



Memperkuat Konsolidasi, Melewati Tantangan, Menyambut Peluang

*Strengthening Consolidation, Overcoming Challenges,
Embracing Opportunities*

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan 2021 PT Pupuk Indonesia (Persero) (“PTPI”) disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 kepada pemegang saham dan regulator. Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan terkait tujuan, kebijakan, rencana, strategi, serta realisasi kinerja operasional dan keuangan yang disusun berdasarkan data faktual yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PTPI, serta lingkungan bisnis terkait, sehingga dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Oleh karena itu, PTPI tidak menjamin bahwa pernyataan atau informasi prospektif tersebut dapat dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan ataupun akan membawa hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata “PTPI” atau “Perusahaan” yang mengacu pada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *Holding Sektor Pupuk*. Selain itu, Laporan Tahunan ini memuat kalimat “PI Grup” yang mengacu kepada kelompok usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta seluruh entitas anak.

The 2021 PT Pupuk Indonesia (Persero) (“PTPI”) Annual Report was prepared to meet the requirements for reporting the performance results to shareholders and regulators for the period January 1, 2021 to December 31, 2021. This Annual Report is prepared based on the Financial Services Authority (“FSA”) Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies, and FSA Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

This Annual Report contains statements related to goals, policies, plans, strategies, as well as the realization of operational and financial performances that are prepared based on factual data that can be accounted for. The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of PTPI, as well as the related business environment, which may result in actual developments being materially different from those reported. Therefore, PTPI does not guarantee that such prospective statements or information can be used as the main basis in making decisions, or that they will bring the results as expected.

This Annual Report contains the word “PTPI” or “Company” that refer to PT Pupuk Indonesia (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) Fertilizer Sector Holding Company. In addition, this Annual Report contains the phrase “PI Group” that refers to the business group of PT Pupuk Indonesia (Persero) and all of its subsidiaries.

TEMA LAPORAN TAHUNAN

Annual Report Theme



Memperkuat Konsolidasi, Melewati Tantangan, Menyambut Peluang

*Strengthening Consolidation, Overcoming Challenges,
Embracing Opportunities*

Keberhasilan mengelola tantangan dengan hasil akhir yang positif tentu menjadi impian semua manusia. Dibutuhkan terobosan dan cara berpikir yang tidak biasa agar dapat menemukan celah di tengah tantangan yang ada, yang dapat menjadi peluang untuk tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan.

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan tentunya menciptakan imbas yang dalam di berbagai sektor perekonomian. Di tengah tantangan tersebut, PTPI justru berupaya memperkuat sentralisasi peran *Holding* dan memperkuat sinergi bersama seluruh entitas usaha yang tergabung dalam BUMN *Holding* Sektor Pupuk. Konsolidasi dan sinergi ini menjadi kunci untuk dapat terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Successfully managing challenges with positive end results is certainly the dream of all human beings. It takes a breakthrough and an unconventional way of thinking to find a gap during the challenging times that exist, which can be turned into opportunities to maintain growth momentum.

The prolonged COVID-19 pandemic has certainly deeply impacted the many economic sectors. During these challenges, PTPI has actually sought to strengthen the centralization through its role as a *Holding* , and to strengthen its synergies with all business entities that are members of the SOE Fertilizer Sector *Holding* . This consolidation and synergy has been the key to continuing to grow and to providing added value for shareholders and stakeholders.

BUMN *HOLDING* SEKTOR PUPUK

SOE Fertilizer Sector Holding

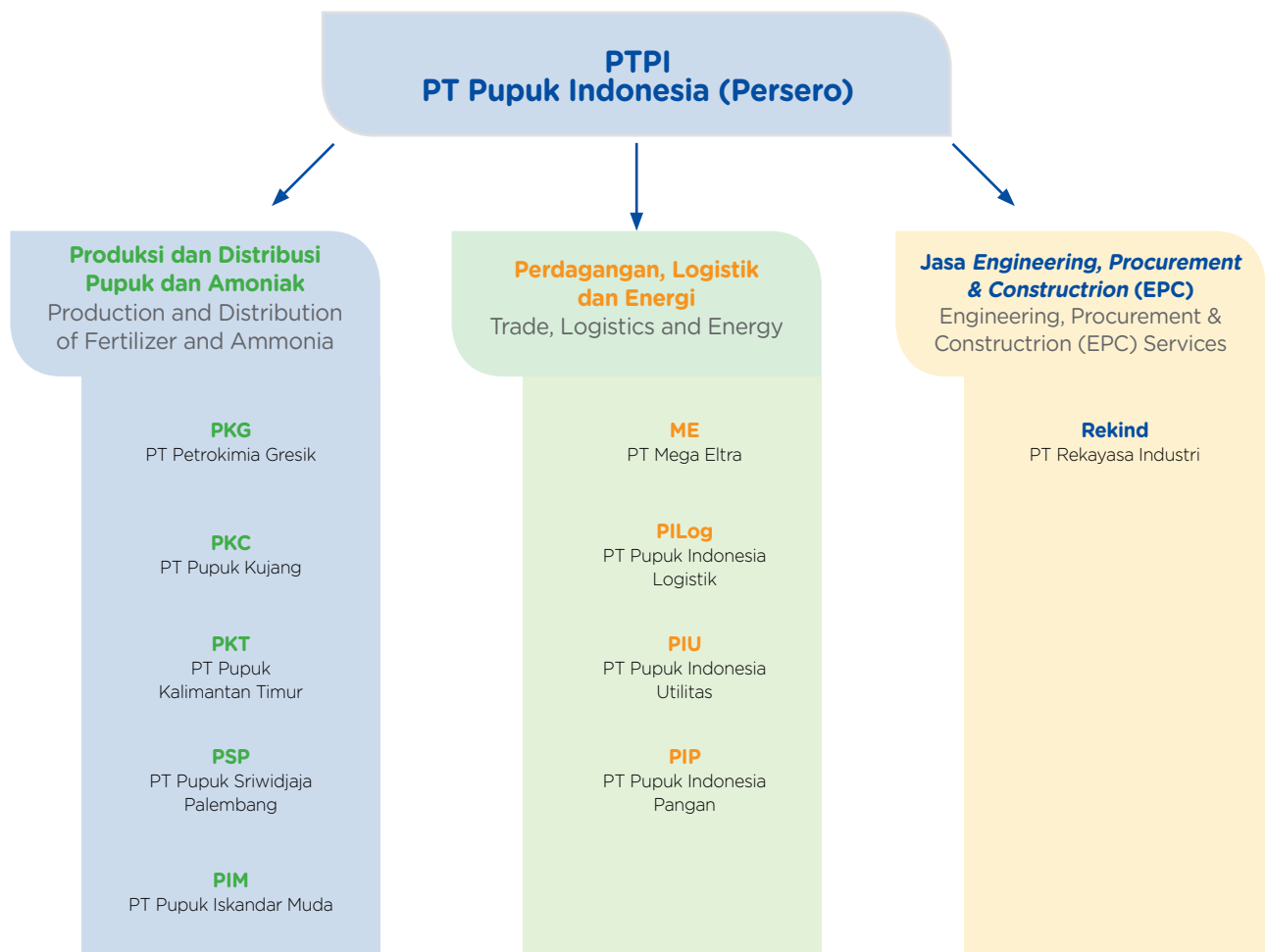


Bisnis inti produksi dan penjualan pupuk yang didukung dengan kegiatan penunjang menjadikan PI Grup sebagai salah satu elemen penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

The PI Group core business of fertilizer production and sales supported by supporting activities makes it one of the key elements in realizing national food security.



PI GRUP BUMN *HOLDING* SEKTOR PUPUK SOE FERTILIZER SECTOR HOLDING



MEMPERKUAT PERAN *ACTIVIST HOLDING*

Strengthening the Role of the Activist Holding

Perubahan peran menjadi *Activist Holding* menjadikan PTPI menjalankan peran sebagai penyelenggara fungsi dalam *BUMN Holding Sektor Pupuk*.

"The change of role to *Activist Holding* involves PTPI carrying out the role of organizer of functions in the SOE Fertilizer Sector Holding."

PILAR STRATEGIS

5 (FIVE) STRATEGIC PILLARS

Pasca dicanangkan perubahan peran *Strategic Holding* menjadi *Activist Holding* pada Agustus 2020, PTPI terus melakukan serangkaian inisiatif strategis. Perubahan ini memberikan peran bagi PTPI untuk menjalankan sentralisasi sejumlah fungsi dalam *BUMN Holding Sektor Pupuk*, mulai dari pemasaran dan penjualan, distribusi, riset dan pengembangan, teknologi, hingga pengadaan. Kebijakan sentralisasi ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam kegiatan operasional, namun juga memperkuat daya saing Perusahaan.

Following the change in the role as *Strategic Holding* to *Activist Holding* was announced in August 2020, PTPI continued to carry out a series of strategic initiatives. These changes involved PTPI taking a role to centralize a number of functions in the SOE Fertilizer Sector Holding, including marketing and sales, distribution, research and development, technology, to procurement. This centralization policy not only provided efficiencies in operational activities, but also strengthened the Company's competitiveness.



PERAN *HOLDING* SENTRALISASI

Centralized Holding Role

No	Fungsi Function	Peran Role
1	<i>Public Service Obligation</i> ("PSO") Management	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan penyaluran PSO SPJB Produsen dan administrasi lainnya Pengiriman ke lini III <ol style="list-style-type: none"> PSO distribution planning SPJB Manufacturers and other administration Delivery to line III
2	<i>Commercial Marketing</i>	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan <i>Commercial Marketing</i> Perencanaan, negosiasi, penetapan harga <ol style="list-style-type: none"> Commercial Marketing Policy Planning, negotiation, pricing
3	<i>Strategic Marketing</i>	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan kebutuhan dan penjualan produk Pemantauan realisasi penjualan, dan penetapan perubahan perencanaan penjualan produk <ol style="list-style-type: none"> Planning product needs and sales Monitoring sales realization, and determining changes in product sales planning
4	<i>Logistic Optimation</i>	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan dan pengendalian distribusi Evaluasi gudang dan Pengelolaan stok optimum gudang lini III Sinergi bantuan pasokan antar Anak Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Distribution planning and control Warehouse evaluation and optimum stock management in line III warehouse Synergy supply assistance between Subsidiaries
5	Pengadaan Procurement	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pengadaan Harga Perkiraan Sendiri ("HPS"), <i>Plan Order, Maintenance/Production Order, Purchase Requisition</i> ("PR"), Penerbitan Purchase Order ("PO")/Order Kerja ("OK")/Kontrak atas nama Anak Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Procurement Policy HPS, Plan Order, Maintenance/Production Order, PR, Issuance of PO/OK/Contract on behalf of Subsidiaries
6	Indonesia Fertilizer Research Institute ("IFRI")	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Riset Pengajuan usulan topik riset, anggaran dan persetujuan kerja sama mitra Pembiayaan riset Pendaftaran produk dan Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") <ol style="list-style-type: none"> Research Policy Submission of proposals fot research topics, budgets and partner cooperation for approval Research funding Product and IPR registration
7	Pengembangan Development	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan, <i>review</i> dan persetujuan proyek <i>Feasibility Study</i> ("FS") Pengadaan proyek <ol style="list-style-type: none"> Policy, review and project approval FS (Feasibility Study) Project procurement
8	Sumber Daya Manusia ("SDM") Human Capital ("HC")	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan SDM Perencanaan dan persetujuan organisasi Penetapan program pengembangan <i>talent</i>, pengelolaan karyawan penugasan untuk PTPI, Rekrutmen calon karyawan S1 dan rekrutmen bersama PI Grup <ol style="list-style-type: none"> HC Policy Organizational planning and approval Determination of talent development programs, management of assigned employees for PTPI, Recruitment of Prospective S1 Employees and Joint Recruitment with PI Group

No	Fungsi Function	Peran Role
9	Teknologi Informasi ("TI") Information Technology ("IT")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan evaluasi <i>master plan</i> dan arsitektur TI 2. Pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian Proyek TI 3. Pengembangan infrastruktur, implementasi aplikasi TI serta <i>backup</i> dan <i>restore</i> 4. Pengelolaan permasalahan TI 5. Perencanaan dan <i>monitoring</i> Kapasitas infrastruktur TI <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation and evaluation of IT master plan and architecture 2. Management, planning, implementation, monitoring and control of IT Projects 3. Infrastructure development, IT application implementation and backup and restore 4. IT Problem Management 5. Planning and monitoring IT infrastructure capacity
10	Keuangan Finance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan keuangan dan akuntansi 2. Pengelolaan fungsi <i>treasury</i> dan optimasi pajak <i>holding</i> dan Anak Perusahaan 3. <i>Review</i> dan persetujuan Capital expenditure ("Capex") 4. Perencanaan dan <i>monitoring</i> Key Performance Indicator ("KPI") dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Anak Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Development of finance and accounting policies 2. Management of the treasury function and optimization of holding and subsidiary taxes 3. Capex review and approval 4. Planning and monitoring subsidiaries' KPI and RKAP
11	Hukum Legal	<p>Mengkoordinasikan dan menangani permasalahan hukum di Anak Perusahaan yang bersifat strategis</p> <p>Coordinate and handle legal issues in strategic Subsidiaries</p>

TRANSFORMASI BISNIS

Business Transformation



Transformasi bisnis yang terus dilakukan tak lepas dari komitmen PTPI untuk terus melakukan perbaikan, peningkatan dan penguatan kompetensinya, khususnya dalam menghadapi perubahan peran *Strategic Holding* menjadi *Activist Holding*.

The business transformation that continues to be carried out demonstrates PTPI's commitment to continue to make improvements, enhancements and strengthening its competencies, especially in the face of changing the role of Strategic Holding to Activist Holding



Single Branding

Meningkatkan *brand awareness* serta efisiensi biaya promosi untuk menghadapi rekomersialisasi pupuk subsidi, agrokimia dan juga melambangkan pembaharuan.

Single Branding

Increasing brand awareness and promotional costs efficiency to face the recommercialization of subsidized fertilizers, agrochemicals and also symbolizes renewal.



Reformasi Subsidi Pupuk Nasional

Mengantisipasi implementasi perubahan mekanisme subsidi melalui kajian harmonisasi kebijakan subsidi dan pemupukan berimbang serta advokasi atas kajian tersebut.

National Fertilizer Subsidy Reform

Anticipating the implementation of changes to the subsidy mechanism through a study on harmonization of subsidized and balanced fertilization policies, as well as advocating for these studies.



Organisasi & Talenta

Menyusun kebijakan talenta, *alignment grading* jabatan, pemetaan remunerasi, serta mobilitas SDM PI Grup.

Organization & Talent

Developing talent policies, position grading alignment, remuneration mapping, and PI Group HC mobility.



Pasar Digital (PADI) UMKM

Memperluas pasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM") dengan pemberian kesempatan kepada UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PI Grup.

Digital Market (PADI) UMKM

Expanding the MSME market by providing opportunities for MSMEs in the procurement of goods and services within the PI Group.



Distribution Planning & Control System (DPCS)

Mengoptimalkan produksi dan stok pupuk dari pusat produksi sampai gudang Kabupaten dengan memanfaatkan teknologi berbasis data geospasial.

Distribution Planning & Control System (DPCS)

Optimizing fertilizer production and stock from production centers to district warehouses by utilizing geospatial data-based technology.



Optimalisasi Aset

Meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pendayagunaan aset melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi tim aset melalui program pelatihan dan sertifikasi.

Assets Optimization

Increasing revenue by maximizing the use of assets through the use of information technology, and increasing the competencies of the asset team through training and certification programs.



Creating Shared Value (CSV)

Menciptakan dampak sosial terkait perbaikan lingkungan (lahan pertanian) melalui program pembinaan kepada petani dengan konsep *sustainable agriculture*.

Creating Shared Value (CSV)

Creating social impacts related to environmental improvement (agricultural land) through coaching programs for farmers with the concept of sustainable agriculture.

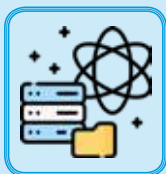


Reposisi Gudang

Mengoptimalkan biaya distribusi dengan memanfaatkan ruang yang belum dimanfaatkan secara maksimal pada gudang di berbagai wilayah di Indonesia serta peningkatan kapasitas gudang maupun standarisasi peralatan dan operasi.

Warehouse Repositioning

Optimizing distribution costs by utilizing untapped space in warehouses in various regions in Indonesia, as well as increasing warehouse capacity and standardizing equipment and operations.



Data Science

Membantu proses pengambilan keputusan operasional Perusahaan yang lebih tepat dan akurat dengan berbasis data memanfaatkan *analytics*

Data Science

Helping the Company's operational decision-making process to be more precise and accurate with data-based use of analytics



Retail Management

Meningkatkan penjualan dan laba dari pupuk non PSO di segmen ritel.

Retail Management

Increasing sales and profit from non-PSO fertilizers in the retail segment.



Agro Solution (Makmur)

Meningkatkan produktivitas panen mitra program Makmur serta meningkatkan penjualan pupuk komersil melalui skema Makmur.

Agro Solutions (Makmur)

Increasing harvest productivity of Makmur program partners, and increase sales of commercial fertilizers through the Makmur scheme.



Inbound & Outbound Supply Chain

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi rantai pasok mulai dari *inbound logistic*, produksi hingga *outbound logistic* melalui penggunaan *digital dashboard* terintegrasi, sentralisasi pengelolaan *Sales & Operation Planning* (S&OP), serta *tools Manufacturing Network Footprints*.

Inbound & Outbound Supply Chain

Increasing supply chain effectiveness and efficiency from inbound logistics, production to outbound logistics through the use of integrated digital dashboards, centralized Sales & Operation Planning (S&OP) management, as well as Manufacturing Network Footprints tools.



Implementasi Budaya "AKHLAK"

Meningkatkan kesadaran budaya Perusahaan melalui internalisasi *core value* AKHLAK (Adaptif, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kompeten).

Implementation of "AKHLAK" Culture

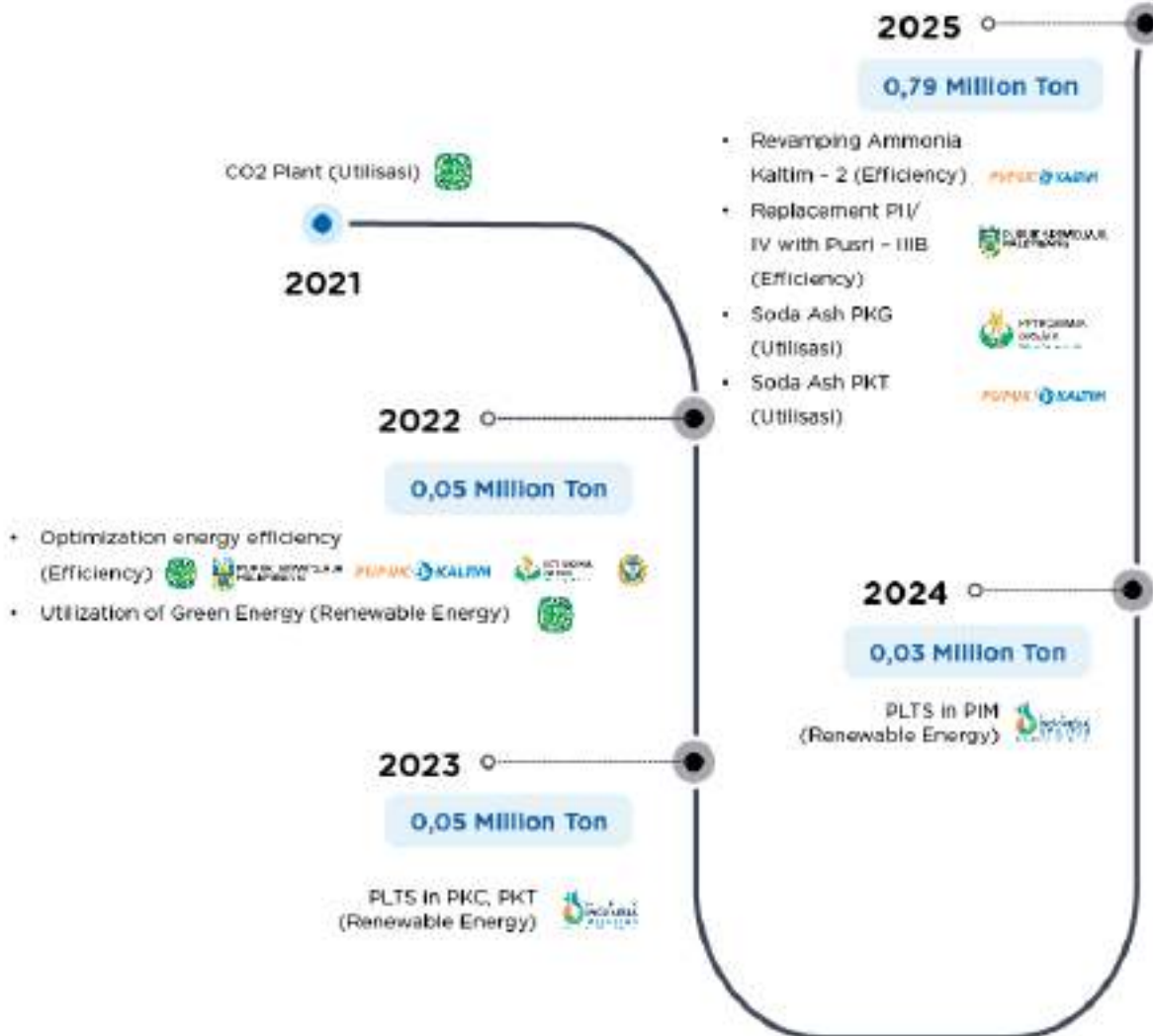
Increasing awareness of corporate culture through internalization of core values of AKHLAK (Trustworthy, Collaborative, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Competent).

DEKARBONISASI DAN UPAYA MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN

Decarbonization and Efforts to Achieve Sustainability

PI Grup berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), salah satunya melalui program Dekarbonisasi.

PI Group berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), salah satunya melalui program Dekarbonisasi.

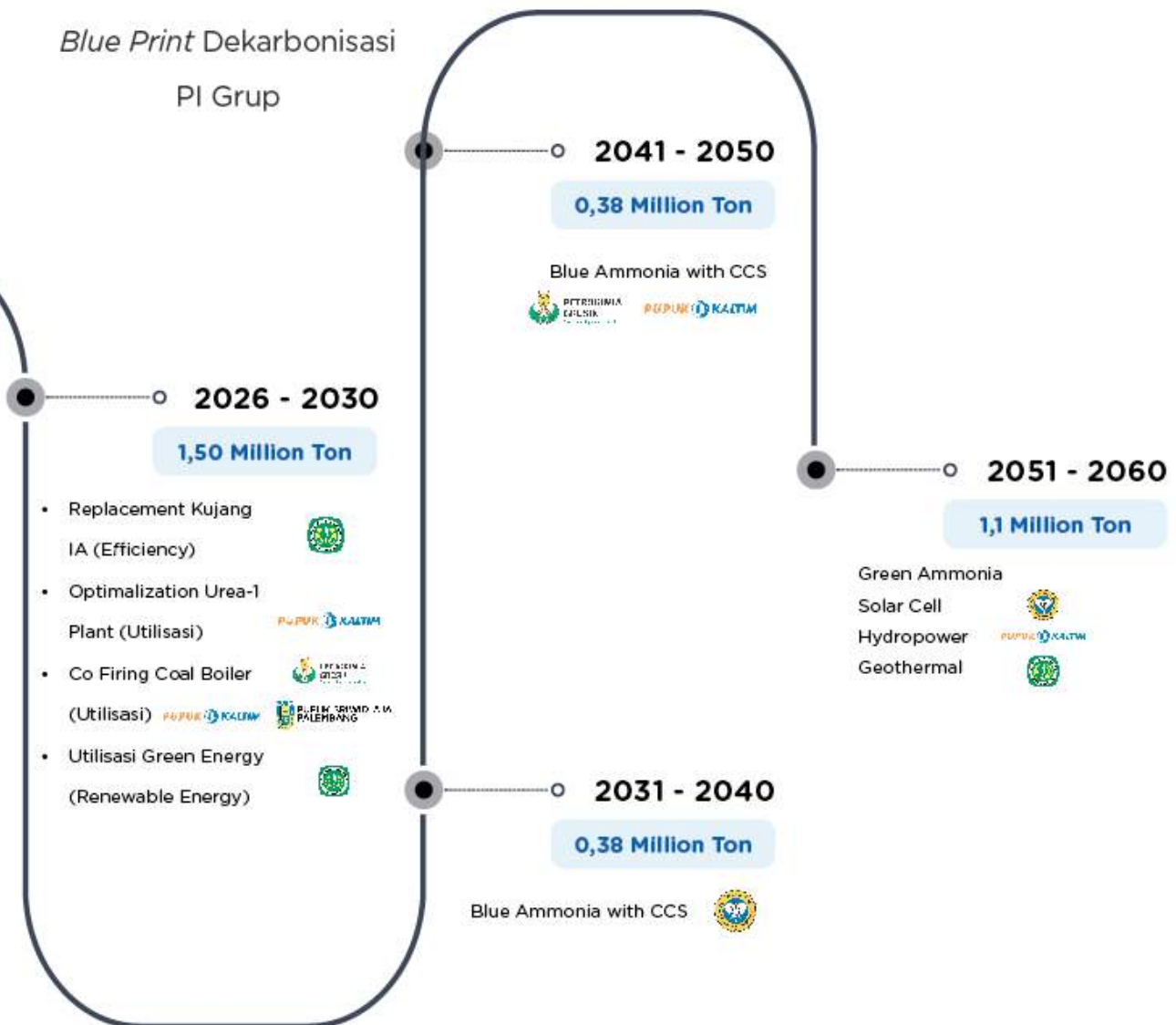


Dekarbonisasi kawasan industri/pabrik pupuk eksisting milik PTPI melalui pengembangan *blue & green ammonia*, utilisasi *renewable electricity*, pembangkit listrik tenaga surya, *co-firing* biomassa pada *boiler* batubara, penerapan *circular economy* (utilisasi CO₂ menjadi produk lain), serta optimasi dan efisiensi energi.

Decarbonization of PTPI's existing industrial estates/ fertilizer factories through the development of blue & green ammonia, use of renewable electricity, solar power plants, co-firing of biomass in coal boilers, implementation of a circular economy (use of CO₂ for other products), as well as optimization and energy efficiency.

Blue Print Dekarbonisasi

PI Grup



BERKOLABORASI MENGHADAPI PANDEMI YANG BERKEPANJANGAN

Collaborating to Face a Prolonged Pandemic



Merebaknya gelombang ke-2 COVID-19 varian Delta bersamaan dengan program vaksinasi massal mewarnai perjalanan tahun 2021 dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan.

The outbreak of the 2nd wave of the Delta variant of COVID-19 together with the mass vaccination program colored the journey in 2021 in the face of the prolonged pandemic



Biaya terkait COVID-19 sebesar Rp12,90 miliar meliputi pencegahan, penanganan, pengobatan, vaksinasi dan lainnya. Status pemantauan kasus COVID-19 per 31 Desember 2021. sebagai berikut:

Costs related to COVID-19 amounted to Rp12.90 billion, and included prevention, handling, treatment, vaccinations and other matters. The status for monitoring COVID-19 cases as of December 31 was as follows:



Perlindungan Karyawan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19

1. Membentuk Tim Krisis COVID-19 dan pemantauan kasus COVID-19 berbasis *website* terintegrasi.
2. Memberlakukan sistem *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) secara selektif, efektif dan efisien.
3. Menerapkan 5M dan disinfeksi lokasi.
4. Sosialisasi kesehatan dan pemeriksaan antigen secara berkala.
5. Membagikan suplemen dan menyediakan klinik khusus.
6. Implementasi *Digital Office*, (administrasi korespondensi berbasis digital) dan Tanda Tangan Elektronik.
7. Program Pengembangan kompetensi secara *online*.

Employee Protection and Prevention of the Spread of COVID-19

1. Established a COVID-19 Crisis Team and monitored COVID-19 cases based on an integrated website.
2. Implemented Work From Home (WFH) and Work From Office (WFO) systems selectively, effectively and efficiently.
3. Applied 5M and site disinfection.
4. Socialized periodic health and antigen examinations.
5. Distributed supplements and provided a dedicated clinic.
6. Implemented a Digital Office, digital-based correspondence administration and digital signature.
7. Conducted online competency development program.

Dukungan untuk Masyarakat

1. Program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di daerah.
2. *Rescheduling* dan *reconditioning* dalam program kemitraan.

Community Support

1. COVID-19 vaccination program for local communities in region.
2. Rescheduling and reconditioning partnership programs.

PENCAPAIAN 2021

2021 Achievements



Kinerja baik yang ditunjukkan PI Grup menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan di masa-masa mendatang

The good performance shown by the PI Group forms a strong foundation for future growth



19.524.990 Ton

Total volume produksi Pupuk, Non-Pupuk dan Produk Samping tahun 2021, meningkat 0,74% dari produksi tahun 2020 sebanyak 19.382.252 Ton.

19,524,990 Tons

Total production of Fertilizers, Non-Fertilizers and By-products in 2021 increased by 0.74% from 19,382,252 Tons in 2020.



14.172.180 Ton

Total volume penjualan pupuk dan Non-Pupuk tahun 2021, mencatat pencapaian 100,67% terhadap target 2021 sebanyak 14.078.326 Ton.

14,172,180 Tons

Total sales of fertilizer and Non-Fertilizer in 2021 achieved 100.67% of the 2021 target of 14,078,326 Tons.



Rp77,09 Triliun

Pendapatan bersih dari segmen Pupuk dan Amoniak tahun 2021, meningkat 19,26% atau setara dengan Rp12,45 Triliun dari tahun 2020 sebesar Rp64,64 Triliun.

Rp77.09 Trillion

Total sales and other revenues in 2021 increased by 19.26%, or Rp12.45 Trillion from Rp64.64 Trillion in 2020.

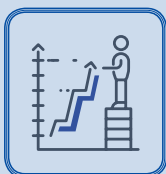


Rp78,60 Triliun

Total penjualan dan pendapatan lainnya tahun 2021, meningkat 9,36% atau setara dengan Rp6,72 Triliun dari tahun 2020 sebesar Rp71,88 Triliun.

Rp78.60 Trillion

Total sales and other revenues in 2021 increased by 9.36%, or Rp6.72 Trillion from Rp71.88 Trillion in 2020.



Rp5,13 Triliun

Laba bersih tahun berjalan tahun 2021, meningkat 120,79% atau setara dengan Rp2,81 Triliun dari tahun 2020 sebesar Rp2,32 Triliun.

Rp5,13 Trillion

Net profit for the current year in 2021 increased by 120.79%, or Rp2.81 Trillion from Rp2.32 Trillion in 2020.



Rp5,32 Triliun

Total laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2021, meningkat 127,67% atau setara dengan Rp2,98 Triliun dari tahun 2020 sebesar Rp2,34 Triliun.

Rp5.32 Trillion

Net profit for the year attributable to owners of the parent entity in 2021 increased by 127.67%, or Rp2.98 Trillion from Rp2.34 Trillion in 2020.



Rp128,46 Triliun

Total aset tahun 2021, meningkat 4,87% atau setara dengan Rp5,97 Triliun dari tahun 2020 sebesar Rp122,49 Triliun.

Rp128.46 Trillion

Total assets in 2021 increased by 4.87%, or Rp5.97 Trillion from Rp122.49 Trillion in 2020.



Rp71,94 Triliun

Total ekuitas tahun 2021, meningkat 6,79% atau setara dengan Rp4,58 Triliun dari tahun 2020 sebesar Rp67,36 Triliun.

Rp71.94 Trillion

Total equity in 2021 increased by 6.79%, or Rp4.58 Trillion from Rp67.36 Trillion in 2020.



Rp17,45 Triliun

Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2021, meningkat 40,69% atau setara dengan Rp5,05 Triliun dari tahun 2020 sebesar Rp12,40 Triliun.

Rp17.45 Trillion

The balance of cash and cash equivalents at the end of 2021 increased by 40.69%, or Rp5.05 Trillion from Rp12.40 Trillion in 2020.



Rp2,11 Triliun

Investasi di tahun 2021, meningkat 38,75% atau setara dengan Rp590,41 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp1,52 Triliun.

Rp2.11 Trillion

Investments in 2021 increased by 38.75%, or Rp590.41 billion from Rp1.52 Trillion in 2020.



6,53%

Rasio margin laba bersih di tahun 2021, meningkat 3,29 poin dari tahun 2020 sebesar 3,24%.

6.53%

Net profit margin ratio in 2021 increased by 3.29 points from 3.24% in 2020.



11,80%

Rasio imbalan investasi di tahun 2021, meningkat 3,22 poin dari tahun 2020 sebesar 8,58%.

11.80%

Return on investment ratio in 2021 increased by 3.22 points from 8.58% in 2020.



Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) PI Grup
Per 31 Desember 2021, terdapat 2 (dua) entitas anak yang mendapatkan PROPER "Emas", 2 (dua) entitas anak yang mendapatkan PROPER "Hijau", dan 1 (satu) entitas anak yang mendapatkan PROPER "Biru".

Company Performance Rating Program in Environmental Management (PROPER) in the PI Group

Up to December 31, 2021, 2 (two) subsidiaries received "Gold" PROPER, 2 (two) subsidiaries received "Green" PROPER, and 1 (one) subsidiary received "Blue" PROPER.



92,325 "Sangat Baik"

penilaian atau *assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2021, dengan predikat "Sangat Baik". Penilaian penerapan GCG tahun 2021 dilakukan secara independen oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

92,325 "Excellent"

Good Corporate Governance Implementation Assessment score for 2021, with the predicate "Excellent". The 2021 GCG implementation assessment was carried out independently by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

DAFTAR ISI

Table of Contents

2	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability
3	Tema Laporan Tahunan Annual Report theme
4	BUMN Holding Sektor Pupuk SOE Fertilizer Sector Holding
5	Memperkuat Peran <i>Activist Holding</i> Strengthening the Role of the Activist Holding
6	Peran Holding Sentralisasi Peran Holding Sentralisasi
8	Transformasi Bisnis Business Transformation
10	Dekarbonisasi dan Upaya Mewujudkan Keberlanjutan Decarbonization and Efforts to Achieve Sustainability
12	Berkolaborasi Menghadapi Pandemi yang Berkepanjangan Collaborating to Face a Prolonged Pandemic
13	Pencapaian 2021 2021 Achievements
16	Daftar Isi Table of Contents

PERFORMA 2021

2021 Performance

20	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights
28	Ikhtisar Operasi dan organisasi Operational and organizational Highlights
32	Ikhtisar Saham Stock Highlights
35	Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi Bonds, Sukuk or Convertible Bonds Highlights
37	Informasi Tentang Sumber Pendanaan Lainnya Information Concerning Other Funding Sources
38	Kilas Peristiwa Events Highlights

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

44	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report
58	Laporan Direksi Board of Directors' Report
77	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2021 PT Pupuk Indonesia (Persero) Statement by the Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners Concerning Responsibility for the 2021 Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero)

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

80	Informasi Umum dan Identitas Perusahaan Company General Information and Identity
82	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company
86	Jejak Langkah Milestones
88	Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar yang Dilayani Line of Business, Products and Services, and Markets Served
92	Wilayah Operasional Pupuk Indonesia Grup PI Group's Operational Area
101	Visi dan Misi Vision and Mission
108	Filosofi Brand Perusahaan Philosophy Behind the Company Logo
110	Struktur organisasi organization Structure
112	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profiles
120	Profil Direksi Board of Directors' Profiles
128	Profil Pejabat Eksekutif Executive officers' Profiles
139	Demografi dan Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Demographics and Employee Demographic Competency Development
156	Pemegang Saham Shareholders
158	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure
160	Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, Joint Venture (JV) dan Special Purpose Vehicle (SPV) List of Subsidiaries and Associated Entities, Joint Ventures (JV) and Special Purpose Vehicles (SPV)
173	Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham Chronology of Share Issuance and Listing
175	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities
179	Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professionals
181	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification
186	Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, serta Informasi Tentang Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan List of Address of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures, and Information on Branch offices and Representative offices
189	Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on the Company Website

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analysis and Discussion Management

- 194 Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industry Overview
- 198 Kebijakan dan Strategi Bisnis Tahun 2021
Business Policies and Strategies In 2021
- 200 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operations Per Business Segment Overview
- 222 Aspek Pemasaran
Marketing Aspects
- 225 Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya
Financial and Other Material Information Overview
- 300 Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Health Level
- 303 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information
- 304 Peta Jalan Usaha: Rencana Pengembangan Jangka Panjang
Business Road Map: Long Term Development Plan

PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- 310 Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Capital Management and Development

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Fungsi Penunjang Bisnis

- 332 Teknologi Informasi
Information Technology
- 344 Riset dan Inovasi
Research and Innovation

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

- 362 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Implementation Commitment
- 396 Struktur dan Proses Tata Kelola Perusahaan
Structure and Process of Corporate Governance
- 564 Audit Internal/Satuan Pengawas Intern
Internal Audit/Internal Control Unit
- 580 Audit Eksternal/Akuntan Publik
External Audit/Public Accountant

- 589 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 594 Manajemen Risiko
Risk Management
- 618 Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau
Manajemen Perseroan (MSOP/ESOP)
Share Ownership Program by Employees and/or
Company Management (MSOP/ESOP)
- 619 Perkara Penting
Important Cases
- 622 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Corporate Information and Data
- 626 Pedoman Etika dan Perilaku
Code of Conduct
- 633 Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control
- 637 Informasi Pemberian dana untuk Kegiatan Politik
Information Related to Funding for Political Activities
- 638 Etika Perusahaan dalam Berhubungan dengan Pejabat
Publik
Company Ethics in Dealing with Public officials
- 639 Kebijakan Anti Fraud
Anti Fraud Policy
- 642 Pelaporan Kekayaan Pejabat
official Assets and Wealth Reporting
- 648 Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement
- 651 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

- 664 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan
Lingkungan
Improving the Quality of Community Life and the
Environment

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report





01

Performa 2021

2021 Performance

Kinerja baik PI Grup di sepanjang tahun 2021 menjadi gambaran akan kemampuan PI Grup dalam mengoptimalkan kompetensi inti yang dimiliki.

PI Group's good performance throughout 2021 reflects the PI Group's ability to optimize its core competencies.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2021	2020	2019*)	2018	2017	YoY2020-2021 (%)	CAGR 2017-2021 (%)	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Sales and Other Revenues								
Penjualan Produk Sales of products	49.313.851	37.356.701	34.655.739	35.964.624	30.187.038	32,01 ▲	13,05 ▲	
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia	25.258.692	25.712.148	27.875.811	28.568.585	24.968.165	(1,76) ▼	0,29 ▲	
Pendapatan Jasa Rendering of services	4.030.593	8.808.724	8.581.597	4.914.923	3.787.479	(54,24) ▼	1,57 ▲	
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Revenues	78.603.136	71.877.573	71.113.147	69.448.132	58.942.682	9,36 ▲	7,46 ▲	
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(63.469.789)	(60.755.846)	(58.139.318)	(54.477.208)	(46.451.261)	4,47 ▲	8,12 ▲	
Laba Bruto Gross Profit	15.133.347	11.121.727	12.973.829	14.970.924	12.491.421	36,07 ▲	4,91 ▲	
Beban Penjualan Selling Expenses	(1.280.505)	(1.186.769)	(1.399.485)	(1.405.345)	(1.335.969)	7,90 ▲	(1,05) ▼	
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(4.023.124)	(4.024.090)	(4.048.018)	(4.119.514)	(3.370.610)	(0,02) ▼	4,52 ▲	
Pendapatan/(Beban) Lain-lain - Bersih Other Expenses - Net	150.180	(105.342)	252.927	(140.800)	(76.631)	242,56 ▲	N/A	-
Laba Operasi Operating Profit	9.979.898	5.805.526	7.779.253	9.305.265	7.708.211	71,90 ▲	6,67 ▲	
Pendapatan Keuangan Finance Income	226.343	284.282	345.497	83.304	204.313	(20,38) ▼	2,59 ▲	
Biaya Keuangan Finance Costs	(2.047.494)	(2.975.349)	(3.563.156)	(3.456.859)	(3.107.848)	(31,18) ▼	(9,91) ▼	
Bagian atas Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of net profit of associates and joint ventures	296.018	236.889	65.846	(7.895)	(245.797)	24,96 ▲	N/A	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	8.454.765	3.351.348	4.627.440	5.923.815	4.558.879	152,28 ▲	16,70 ▲	

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2021	2020	2019*)	2018	2017	YoY2020- 2021 (%)	CAGR 2017- 2021 (%)	
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(3.320.090)	(1.025.767)	(1.634.123)	(1.710.438)	(1.483.483)	223,67	▲	22,31 ▲
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	5.134.675	2.325.581	2.993.317	4.213.377	3.075.396	120,79	▲	13,67 ▲
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Income/(Loss) After Tax	46.592	(484.364)	2.971.940	(18.329)	(294.595)	109,62	▲	N/A -
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	5.181.267	1.841.217	5.965.257	4.195.048	2.780.801	181,40	▲	16,83 ▲
Total Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Profit for the Year Attributable to:								
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	5.321.127	2.337.259	2.947.383	4.180.476	3.021.139	127,67	▲	15,20 ▲
Keperentingan Non- Pengendali Non-Controlling Interest	(186.452)	(11.678)	45.934	32.901	54.257	1.496,61	▲	N/A -
	5.134.675	2.325.581	2.993.317	4.213.377	3.075.396	120,79	▲	13,67 ▲
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:								
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	5.367.719	1.852.895	5.919.323	4.162.147	2.726.544	189,69	▲	18,45 ▲
Keperentingan Non- Pengendali Non-Controlling Interest	(186.452)	(11.678)	45.934	32.901	54.257	1.496,61	▲	N/A -
	5.181.267	1.841.217	5.965.257	4.195.048	2.780.801	181,40	▲	16,83 ▲
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk - Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah penuh) Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity - Basic and Diluted (In full Rupiah)	212.845	93.490	117.895	167.219	234.198	127,67	▲	(2,36) ▼

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi.

**) YoY atau Year over Year adalah cara untuk membandingkan statistik kinerja perusahaan antara periode tertentu (bulan atau kuartal) tahun ini dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

***) CAGR atau Compound Annual Growth Rate adalah tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu.

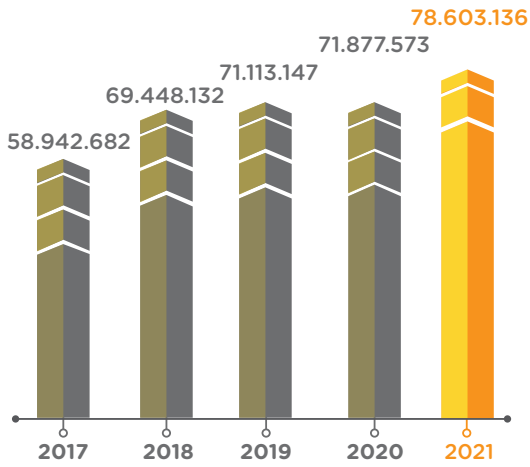
*) Restated and reclassified.

**) YoY or Year over Year is a way to compare company performance statistics between a certain period (month or quarter) this year with the same period the previous year.

***) CAGR or Compound Annual Growth Rate is the annual growth rate over a certain period of time.

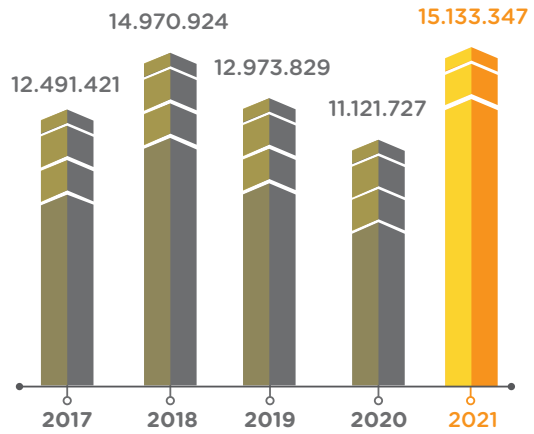
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp Juta)

Total Sales and Other Revenues (Rp Million)



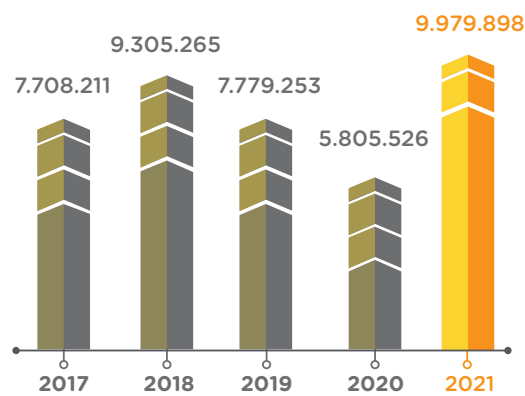
Laba Bruto (Rp Juta)

Gross Profit (Rp Million)



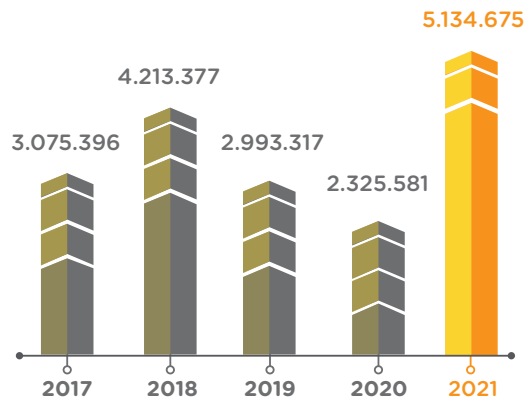
Laba Operasi (Rp Juta)

Operating Profit (Rp Million)



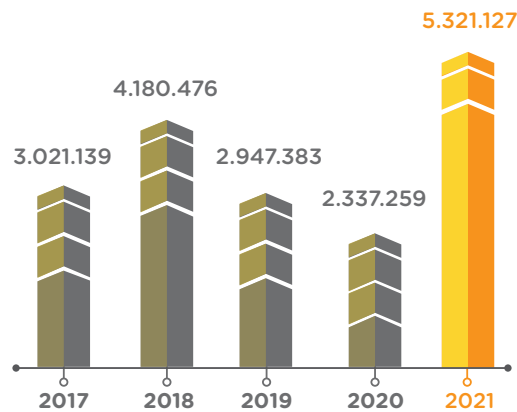
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta)

Profit for the Year (Rp Million)



Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp Juta)

Total Profit for the Year Attributable to Owner of the Parent Entity (Rp Million)



POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

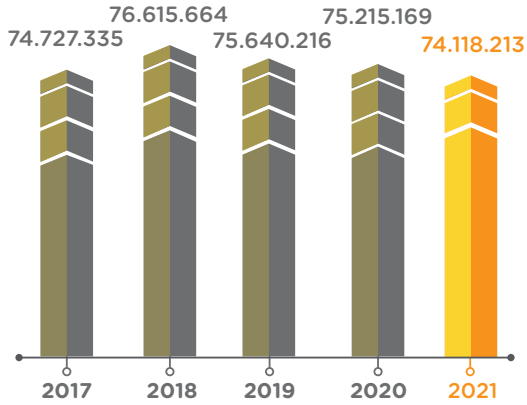
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2021	2020	2019*)	2018	2017	YoY 2020- 2021 (%)		CAGR 2017- 2021 (%)	
Aset Assets									
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	44.174.212	38.693.988	46.528.775	57.647.384	48.455.634	14,16	▲	(2,29)	▼
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	1.178.092	805.785	600.586	448.773	428.612	46,20	▲	28,76	▲
Aset Tetap Fixed Assets	74.118.213	75.215.169	75.640.216	76.615.664	74.727.335	(1,46)	▼	(0,20)	▼
Jumlah Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	84.288.960	83.801.568	85.604.117	81.256.095	80.032.392	15,58	▲	16,53	▲
Jumlah Aset Total Assets	128.463.172	122.495.556	132.132.892	138.903.479	128.488.026	4,87	▲	N/A	-
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity									
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	33.008.039	26.335.318	46.193.223	24.524.445	36.863.153	25,34	▲	(2,72)	▼
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	23.515.157	28.797.421	20.298.270	48.352.148	29.021.158	(18,34)	▼	(5,12)	▼
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	56.523.196	55.132.739	66.491.493	72.876.593	65.884.311	2,52	▲	(3,76)	▼
Total Ekuitas Total Equity	71.939.976	67.362.817	65.641.399	66.026.886	62.603.715	6,79	▲	3,54	▲
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	128.463.172	122.495.556	132.132.892	138.903.479	128.488.026	4,87	▲	N/A	-
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	11.166.173	12.358.670	335.552	33.122.939	11.592.481	(9,65)	▼	(0,93)	▼
Investasi Investments	2.113.916	1.523.501	2.289.323	4.329.971	4.212.181	38,75	▲	(15,83)	▼

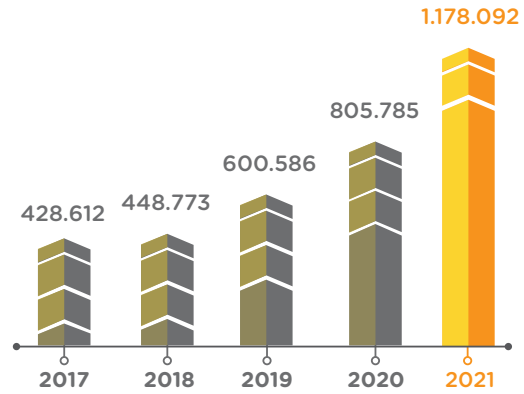
*) Disajikan kembali dan direklasifikasi.

*) Restated and reclassified.

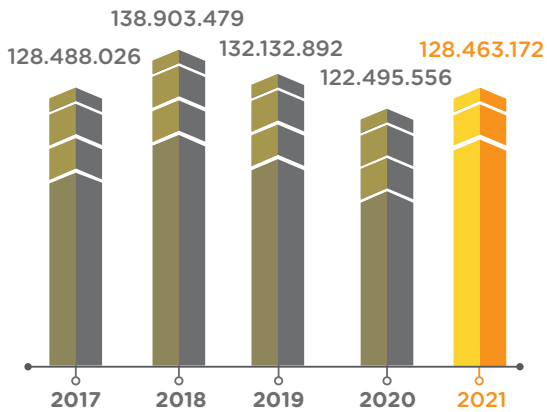
Aset Tetap (Rp Juta)
Fixed Assets (Rp Million)



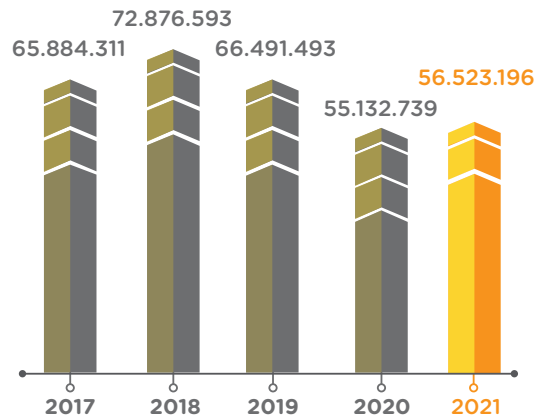
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (Rp Juta)
Investment in Associates and Joint Ventures (Rp Million)



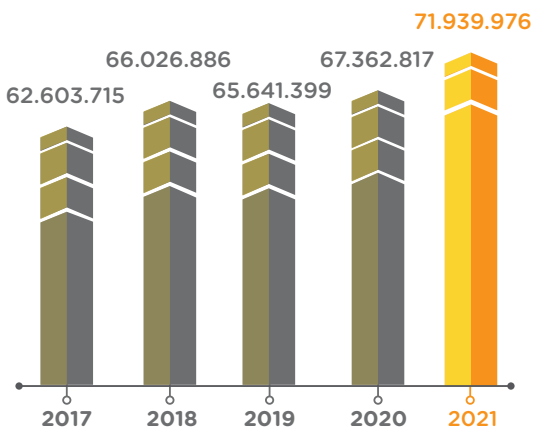
Jumlah Aset (Rp Juta)
Total Assets (Rp Million)



Jumlah Liabilitas (Rp Juta)
Total Liabilities (Rp Million)



Jumlah Ekuitas (Rp Juta)
Total Equity (Rp Million)



ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED CASH FLOWS

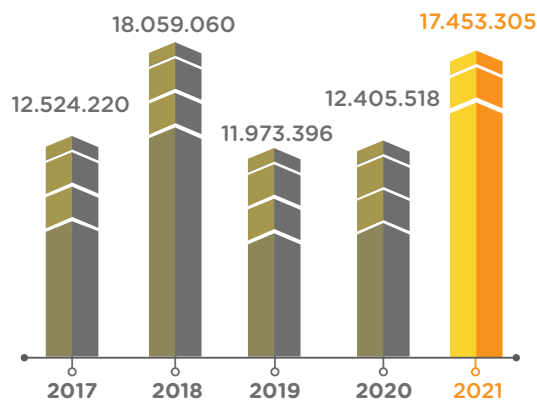
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2021	2020	2019*)	2018	2017	YoY 2020-2021 (%)		CAGR 2017-2021 (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	14.517.293	16.076.203	8.605.091	4.757.544	6.682.282	(9,70)	▼	21,41	▲
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(3.007.701)	(2.957.883)	(2.932.341)	(4.368.796)	(3.797.241)	1,68	▲	(5,66)	▼
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(6.457.203)	(12.746.973)	(11.560.626)	5.062.705	554.476	(49,34)	▼	N/A	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (decrease) in Cash and Cash Equivalents	5.052.389	371.347	(5.887.876)	5.451.453	3.439.517	1.260,56	▲	10,09	▲
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	(4.602)	60.775	(197.788)	83.387	9.288	(107,57)	▼	N/A	-
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	12.405.518	11.973.396	18.059.060	12.524.220	9.075.415	3,61	▲	8,13	▲
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	17.453.305	12.405.518	11.973.396	18.059.060	12.524.220	40,69	▲	8,65	▲

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi.

*) Restated and reclassified.

Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun (Rp Juta)

Cash and Cash Equivalents at the End of the Year (Rp Million)



RASIO-RASIO KEUANGAN

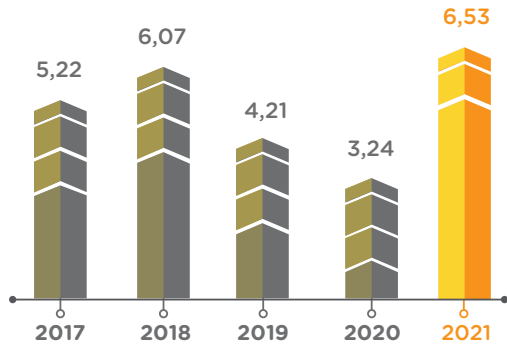
FINANCIAL RATIOS

Dalam persen (%), kecuali dinyatakan lain In percentage (%), unless otherwise stated	Satuan Unit	2021	2020	2019*)	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) 2020-2021 Increase (Decrease) 2020-2021
Profitabilitas Profitability							
Rasio Marjin Laba Bruto Gross Profit Margin Ratio	%	19,25	15,47	18,24	21,56	21,19	3,78 ▲
Rasio Marjin Laba Operasi Operating Profit Margin Ratio	%	12,70	8,08	10,94	13,40	13,08	4,62 ▲
Rasio Marjin Laba Bersih Net Profit Margin Ratio	%	6,53	3,24	4,21	6,07	5,22	3,30 ▲
Rasio Laba Bersih terhadap Aset Return on Asset (ROA)	%	4,00	1,90	2,27	3,03	2,39	2,10 ▲
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas Return on Equity (ROE)	%	7,95	3,74	4,79	7,29	5,67	4,21 ▲
Rasio Imbalan Investasi Return on Investment (ROI)	%	11,80	8,58	8,44	9,49	8,34	3,22 ▲
Rasio EBITDA terhadap Pendapatan EBITDA to Revenue Ratio	%	18,04	13,72	15,23	17,99	17,69	4,32 ▲
Likuiditas Liquidity							
Rasio Kas Cash Ratio	%	52,88	47,11	25,92	73,64	33,97	5,77 ▲
Rasio Lancar Current Ratio	%	133,83	146,93	100,73	235,06	131,45	(13,10) ▼
Rasio Cepat Quick Ratio	%	91,69	102,75	70,95	158,45	103,32	(11,06) ▼
Rasio Modal Terhadap Aset Capital to Asset Ratio	%	56,00	54,99	49,68	43,72	48,72	1,01 ▲
Rasio Liabilitas Terhadap Aset Liability to Assets Ratio	%	44,00	45,01	50,32	52,47	51,28	(1,01) ▼
Solvabilitas Solvency							
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio							
<i>Leverage</i>	%	78,57	81,84	101,30	120,00	105,24	(3,27) ▼
<i>Interest Bearing Debt (%)</i>	%	43,53	54,46	73,43	94,57	82,40	(10,92) ▼
<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	kali times	2,20	3,74	4,45	4,60	4,95	(1,53) ▼
<i>Debt Service to Coverage Ratio (DSCR)</i>	%	278,12	68,53	76,95	194,64	180,68	209,59 ▲
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	%	692,53	331,43	303,98	361,52	335,45	361,11 ▲
Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility							
Rata-rata Hari Pelunasan Piutang Average Receivables Repayment Days	hari days	22,75	28,57	32,94	48,97	44,00	(5,82) ▼

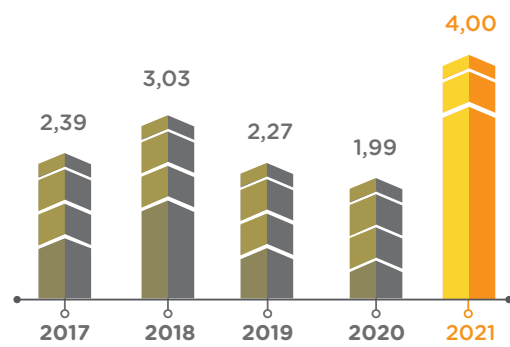
*) Disajikan kembali dan direklasifikasi.

*) Restated and reclassified.

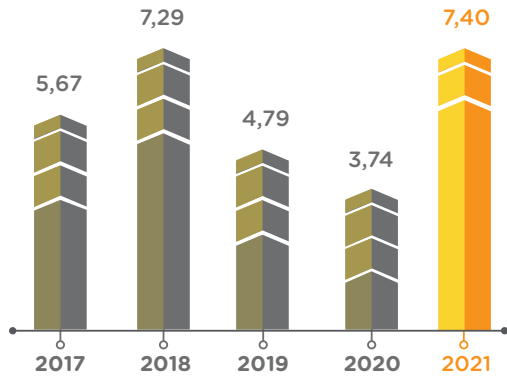
Rasio Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin Ratio (%)



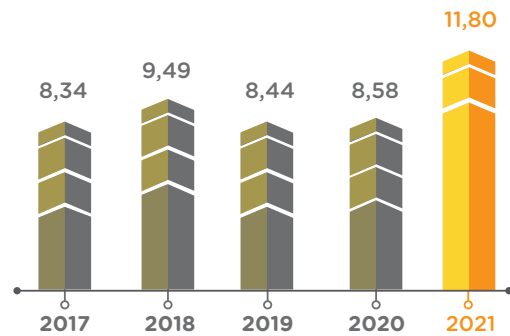
Rasio Laba Bersih terhadap Aset (%) Return on Asset (ROA) (%)



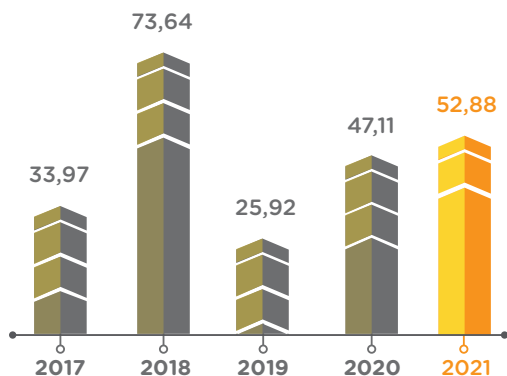
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (ROE) (%)



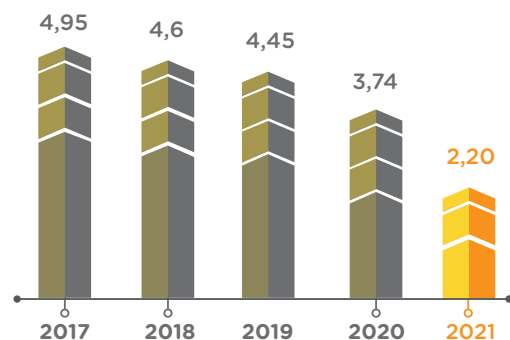
Rasio Imbalan Investasi (%) Return on Investment (ROI) (%)



Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)



Interest Bearing Debt to EBITDA (%) Interest Bearing Debt to EBITDA (%)





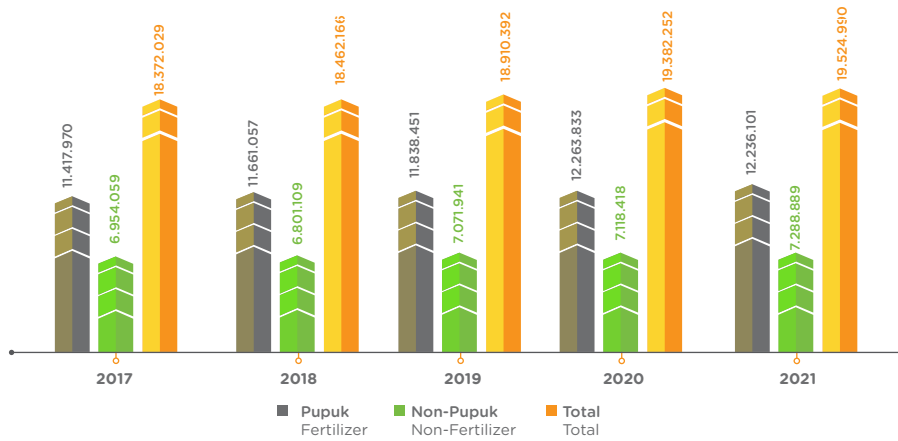
IKHTISAR OPERASI DAN ORGANISASI

OPERATIONAL AND ORGANIZATIONAL HIGHLIGHTS

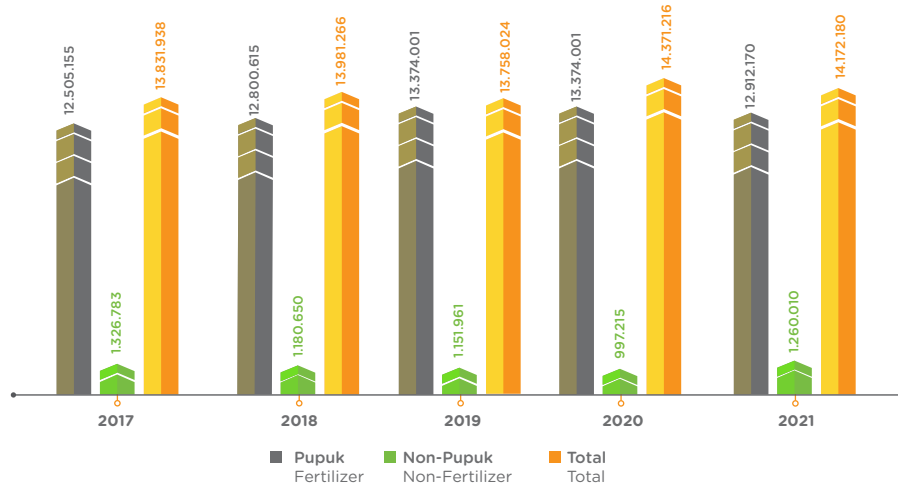
Ikhtisar Operasi Operational Highlights	Satuan Unit	2021	2020	2019*)	2018	2017	YoY 2020- 2021 (%)	CAGR 2017- 2021 (%)
Volume Produksi Production Volume								
Pupuk Fertilizer								
Urea	Ton Tons	7.968.504	7.983.042	7.722.800	7.444.700	6.838.063	(0,18) ▼	3,90 ▲
Non Urea	Ton Tons	4.267.597	4.280.791	4.115.652	4.216.357	4.579.907	(0,31) ▼	(1,75) ▼
Total Volume Produksi Pupuk Total Fertilizer Production	Ton Tons	12.236.101	12.263.833	11.838.451	11.661.057	11.417.970	(0,23) ▼	1,75 ▲
Non Pupuk Non Fertilizer								
Amoniak Ammonia	Ton Tons	6.149.670	6.013.016	5.906.382	5.805.664	5.422.156	2,27 ▲	3,20 ▲
Sulphuric Acid Phosphoric Acid	Ton Tons	881.200	853.111	849.510	698.796	1.198.470	3,29 ▲	(7,40) ▼
Phosphoric Acid Phosphoric Acid	Ton Tons	191.856	218.883	270.333	248.714	288.203	(12,35) ▼	(9,67) ▼
Aluminium Fluoride Aluminium Fluoride	Ton Tons	7.265	7.114	11.301	12.653	11.049	2,12 ▲	(9,95) ▼
Lain-lain Others	Ton Tons	58.899	26.295	34.415	35.282	34.180	123,99 ▲	14,57 ▲
Total Volume Produksi Non Pupuk Total Non Fertilizer Production	Ton Tons	7.288.889	7.118.418	7.071.941	6.801.109	6.954.059	2,39 ▲	1,18 ▲
Total Volume Produksi Total Production Volume	Ton Tons	19.524.990	19.382.252	18.910.392	18.462.166	18.372.029	0,74 ▲	1,53 ▲
Rasio Konsumsi Gas Gas Consumption Ratio								
Urea	MMBTU/ Ton MMBTU/ Tons	27,45	26,86	27,57	28,37	28,68	2,20 ▲	(1,09) ▼
Amoniak Ammonia	MMBTU/ Ton MMBTU/ Tons	35,51	35,10	35,92	36,38	36,10	1,16 ▲	(0,41) ▼
Volume Penjualan Sales Volume								
Pupuk Fertilizer								
Pupuk PSO PSO Fertilizer	Ton Tons	7.919.045	8.430.114	8.708.912	9.340.238	9.297.956	(6,06) ▼	(3,93) ▼

Ikhtisar Operasi Operational Highlights	Satuan Unit	2021	2020	2019*)	2018	2017	YoY 2020- 2021 (%)	CAGR 2017- 2021 (%)
Pupuk Non PSO Non-PSO Fertilizer	Ton Tons	4.993.125	4.943.888	3.897.150	3.460.377	3.207.198	1,00 ▲	11,70 ▲
Total Volume Penjualan Pupuk Total Fertilizer Sales	Ton Tons	12.912.170	13.374.001	12.606.063	12.800.615	12.505.155	(3,45) ▼	0,80 ▲
Non Pupuk Non-Fertilizer								
Amoniak Ammonia	Ton Tons	988.317	797.905	882.938	923.268	884.585	24,57 ▲	2,81 ▲
Non Amoniak Non Ammonia	Ton Tons	271.693	199.310	269.024	257.383	442.198	41,92 ▲	(11,46) ▼
Total Volume Penjualan Non Pupuk Total Non-Fertilizer Sales	Ton Tons	1.260.010	997.215	1.151.961	1.180.650	1.326.783	27,94 ▲	(1,28) ▼
Total Volume Penjualan Total Sales	Ton Tons	14.172.180	14.371.216	13.758.024	13.981.266	13.831.938	(1,30) ▼	0,61 ▲
Nilai Penjualan dan Pendapatan Sales and Revenue Value								
Pupuk Fertilizer								
Nilai Penjualan Pupuk PSO PSO Fertilizer Sales Value	Rp Juta Rp Million	13.698.647	12.348.619	13.387.374	13.216.339	13.162.577	11,17 ▲	1,00 ▲
Nilai Penjualan Pupuk Non PSO Non-PSO Fertilizer Sales Value	Rp Juta Rp Million	24.878.782	18.641.100	14.074.052	10.521.369	9.154.989	33,86 ▲	29,24 ▲
Total Nilai Penjualan Pupuk Total Fertilizer Sales Value	Rp Juta Rp Million	38.572.072	30.989.719	27.461.426	23.737.708	22.317.566	24,96 ▲	15,15 ▲
Non-Pupuk Non-Fertilizer								
Total Nilai Penjualan Non Pupuk Total Non-Fertilizer Sales Value	Rp Juta Rp Million	10.741.779	6.366.982	6.833.445	4.808.548	4.725.701	110,43 ▲	13,24 ▲
Penggantian Biaya Subsidi Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy from the Indonesian Government	Rp Juta Rp Million	25.258.692	25.712.148	27.875.811	28.568.585	24.970.425	(1,76) ▼	0,29 ▼
Pendapatan Jasa Rendering of Services	Rp Juta Rp Million	4.030.593	8.808.724	8.942.465	12.333.291	6.928.990	(42,78) ▼	(2,22) ▼
Jumlah Nilai Penjualan dan Pendapatan Total Sales and Revenue Value	Rp Juta Rp Million	78.603.136	71.877.573	71.113.147	69.448.132	58.942.682	9,36 ▲	7,46 ▲

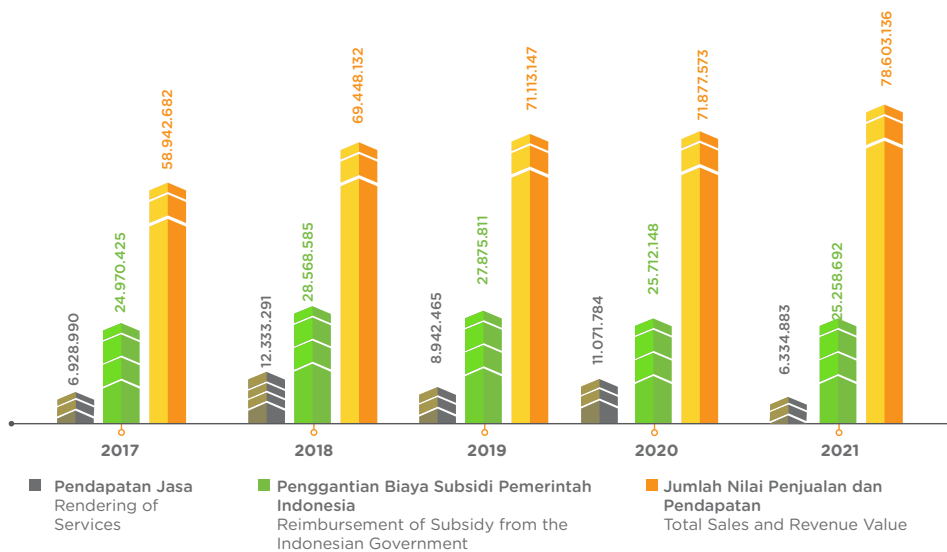
Volume Produksi (Ton)
Production Volume (Tons)



Volume Penjualan (Ton)
Sales Volume (Tons)



Komposisi Penjualan dan Pendapatan Lainnya (Rp juta)
Sales and Other Revenue Composition (Rp Million)



Ikhtisar Organisasi Organizational Highlights	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Karyawan (orang)* Total Employees (people)*	7.851	8.336	8.892	9.661	10.179
Jam Kerja Aman (jam) Safe Working Hours (hours)	73.560.164	57.173.988	87.483.770	46.714.507	27.047.684
Investasi Pendidikan dan Pelatihan bagi Karyawan (Rp-miliar) Employee Education and Training Investment (Rp-billion)	90.094	83,392	142,93	103,12	101,23
Jumlah Mitra Binaan dari Program Kemitraan (mitra)** Total Fostered Partners in the Partnership Program (partners)**	1.030	1.002	1.286	1.307	1.422
Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Rp-miliar)** Distribution of Partnership and Community Funds (Rp-billion)**	103.475	127.287	157.670	155.994	182.861
Assessment Penerapan GCG (Skor)*** GCG Implementation Assessment (Score)***	92,33	93,90	88,97	91,74	88,79
Kriteria Penilaian Baldrige Excellence Framework (BEF)**** Baldrige Excellence Framework (BEF) Assessment Criteria****	643,00	609,00	611,25	n/a*****	582,25
Tingkat Kesehatan Perusahaan (Skor)***** Company Health Level (Score)*****	80,00 "A" Sehat Healthy	72,00 "A" Sehat Healthy	76,50 "A" Sehat Healthy	78,50 "A" Sehat Healthy	73,50 "A" Sehat Healthy

*) Jumlah karyawan mencakup karyawan PTPI dan 10 entitas anak yang langsung berada di bawah PTPI.

**) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan pertama No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan perubahan kedua No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017.

***) *Assessment* penerapan GCG menggunakan metode berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

****) Metode *assessment* menggunakan pendekatan *Baldrige Excellence Framework* yang dikeluarkan oleh National Institute of Standard and Technology (NIST) Amerika Serikat, sejak 2013-2019 menggunakan KPKU oleh FEB, sejak tahun 2020 menggunakan Kriteria BEF oleh IQAF.

*****) *Assessment* KPKU di tahun 2018 tidak dilaksanakan berdasarkan Surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. S-198/D7.MBU/10/2017 tanggal 7 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan *Assessment* Implementasi KPKU BUMN Tahun 2017 butir 3, maka pada tahun 2018 tidak dilaksanakan *Assessment* KPKU.

*****) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

*) The number of employees includes employees of PTPI and 10 subsidiaries directly under PTPI.

**) Implementation of the Partnership and Community Development Program in accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for SOEs, and the first amendment No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016, and the second amendment No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017.

***) GCG implementation Assessment using a method based on a copy of the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs.

****) The assessment method used the Baldrige Excellence Framework approach issued by the United States National Institute of Standard and Technology (NIST), between 2013-2019 used the KPKU by FEB, since 2020 used the BEF Criteria by IQAF.

*****) The KPKU assessment in 2018 was not carried out based on the Deputy for Business Infrastructure of the Ministry of SOEs Letter No. S-198/D7.MBU/10/2017 dated October 7, 2017 concerning the Implementation of the 2017 BUMN KPKU Implementation Assessment point 3.

*****) The Company's Health Level Assessment is based on the Minister of SOEs Decree No. KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment for State-Owned Enterprises.

IKHTISAR SAHAM

STOCK HIGHLIGHTS

JUMLAH SAHAM

Jumlah saham PTPI sebanyak 25.000.000 lembar saham, dengan kepemilikan 100% atau seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

NUMBER OF SHARES

PTPI has 25,000,000 shares, with 100% ownership by the Government of the Republic of Indonesia.

PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN

Sebagai entitas usaha yang mendapatkan modal dari Pemerintah Indonesia, Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kronologi penerbitan saham sejak awal hingga posisi per 31 Desember 2021. Posisi Modal Disetor PTPI per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp25.000.000.000.000 dengan jumlah lembar saham sebanyak 25.000.000 lembar bernilai Rp 1.000.000 per lembar. Berikut kronologi penerbitan saham dari awal sampai akhir tahun buku.

STATE CAPITAL PARTICIPATION AS CORPORATE CAPITAL

As a business entity whose capital comes from the Government of Indonesia, the Company has an obligation to submit a chronology of the issuance of shares from the beginning to the position as of December 31, 2021. The PTPI Paid-up Capital as of December 31, 2021 was Rp25,000,000,000,000 with a total of 25,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share. The following shows the chronology of shares issued up to the end of the fiscal year.

Keterangan Description	Tahun Year	Jumlah (Rp Juta) Total (In Rp Million)	Akumulasi (Rp Juta) Accumulation (In Rp Million)	Akta Notaris Notarial Deed	Nama Notaris Notary's Name
Modal Awal Initial Capital	1970	7.000	7.000	Akta No. 4 Tanggal 3 Januari 1970 Deed No. 4 dated January 3, 1970	Soeleman Ardjasamista, S.H.
Penambahan Additional	1975	24.000	31.000	Akta No.2 Tanggal 1 April 1975 Deed No. 2 dated April 1, 1975	Soeleman Ardjasamista, S.H.
Penambahan Additional	1976	6.000	37.000	Akta No.62 Tanggal 20 Mei 1976 Deed No. 62 dated May 20, 1976	Soeleman Ardjasamista, S.H.
Penambahan Additional	1981	108.000	145.000	Akta No.7 Tanggal 5 Oktober 1981 Deed No.7 dated October 5, 1981	Soeleman Ardjasamista, S.H.
Penambahan Additional	1984	55.000	200.000	Akta No.19 Tanggal 20 Juli 1984 Deed No. 19 dated July 20, 1984	Soeleman Ardjasamista, S.H.
Penambahan Additional	1989	300.000	500.000	Akta No.4 Tanggal 4 September 1989 Deed No. 4 dated September 4, 1989	Soeleman Ardjasamista, S.H.
Penambahan Additional		570.710	1.070.710		
Penambahan Additional	1997	1.829.290	2.900.000	Akta No.14 Tanggal 12 September 1997 Deed No. 14 dated September 12, 1997	Imas Fatimah, SH
Penambahan Additional	2002	6.000	2.906.000	Akta No.13 Tanggal 5 Februari 2002 Deed No. 13 dated February 5, 2002	Imas Fatimah, SH
Penambahan Additional	2005	957.948	3.863.948	Akta No.20 Tanggal 12 September 2005 Deed No. 20 dated September 12, 2005	Fathiah Helmi, SH
Penambahan Additional	2008	390.000	4.253.948	Akta No.6 Tanggal 4 Februari 2008 Deed No. 6 dated February 4, 2008	Fathiah Helmi, SH

Keterangan Description	Tahun Year	Jumlah (Rp Juta) Total (In Rp Million)	Akumulasi (Rp Juta) Accumulation (In Rp Million)	Akta Notaris Notarial Deed	Nama Notaris Notary's Name
Penambahan Additional	2008	35.058	4.289.006	Akta No.15 Tanggal 11 Desember 2008 Deed No. 15 dated December 11, 2008	Fathiah Helmi, SH
Penambahan Additional	2011	6.321.000	10.610.006	Akta No.7 Tanggal 7 Januari 2011 Deed No. 7 dated January 7, 2011	Fathiah Helmi, SH
Penambahan Additional	2012	1.338.048	11.948.054	Akta No.11 Tanggal 19 Januari 2012 Deed No. 11 dated January 19, 2012	Lumassia, SH
Penambahan Additional	2013	951.854	12.899.908	Akta No.14 Tanggal 26 April 2013 Deed No. 14 dated April 26, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H.
Penambahan Additional	2018	12.100.092	25.000.000	Akta No.3 Tanggal 24 Oktober 2018 Deed No. 3 dated October 24, 2018	Lumassia, SH

INFORMASI TENTANG PENCATATAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK SERTA AKSI KORPORASI LAINNYA

Hingga 31 Desember 2021 PTPI tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. PTPI juga tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan RUPS Tahunan tahun buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2021, pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp2.337.259 juta dengan rasio pembayaran dividen sebesar 25,16% atau senilai Rp588.030 juta.

Realisasi pembagian Dividen tunai untuk hasil usaha tahun buku 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

INFORMATION ON LISTING OF SHARES AND PUBLIC OWNERSHIP OF SHARES AND OTHER CORPORATE ACTIONS

Up until December 31, 2021, PTPI has never conducted an Initial Public Offering and has not traded its shares with the public. PTPI also did not undertake any corporate actions such as stock splits, reverse stock, bonus shares, or a decrease in the nominal value of shares.

SHARE DIVIDEND

Based on the 2020 AGMS held on June 30, 2021, the shareholders approved the use of net profit for the fiscal year 2020 attributable to the owners of the Company's Parent Entity of Rp2,337,259 million with a dividend payout ratio of 25.16%, or Rp588,030 million.

The distribution of cash dividends for the 2019 and 2020 fiscal years results were as follows:

Dividen Saham Share Dividend	2021 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2020) 2021 (for Fiscal Year 2020 Operating Results)	2020 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2019) 2020 (for Fiscal Year 2019 Operating Results)	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease)
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk (Rp Juta) Net income attributable to owners of the parent entity (Rp Million)	2.337.259	3.641.754	64,18% ▼
Jumlah Dividen Kas yang Dibagikan (Rp Juta) Amount of dividends distributed) (Rp Million)	588.030	973.500	60,40% ▼
Dividen Kas per Saham (Rp) Cash dividends per share (Rp)	23.521	38.940	60,40% ▼
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Distribution Ratio (%)	25,16%	26,73%	94,13% ▼
Tanggal Pengumuman Announcement date	30 Juni 2021 Juni 30, 2021	4 Agustus 2020 Agustus 4, 2020	



Dividen Saham Share Dividend	2021 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2020) 2021 (for Fiscal Year 2020 Operating Results)	2020 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2019) 2020 (for Fiscal Year 2019 Operating Results)	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease)
Tanggal Pembayaran Payment date	<ul style="list-style-type: none">• Pembayaran I: 29 Juli 2021• Pembayaran II: 30 Agustus 2021• Pembayaran III: 29 September 2021• Payment I: July 29, 2021• Payment II: August 30, 2021• Payment III: September 29, 2021	<ul style="list-style-type: none">• Pembayaran I: 2 September 2020• Pembayaran II: 2 Oktober 2020• Pembayaran III: 2 November 2020• Payment I: September 2, 2020• Payment II: October 2, 2020• Payment III: November 2, 2020	

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS HIGHLIGHTS

PTPI telah beberapa kali menerbitkan Obligasi yang dananya digunakan seluruhnya untuk *refinancing* pinjaman perbankan dan obligasi sebelumnya. Obligasi yang masih beredar tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selain obligasi berikut ini, PTPI tidak menerbitkan efek apapun dalam bentuk lain.

PTPI has issued bonds several times where the funds were used entirely for refinancing bank loan and previous bonds. The outstanding bonds in 2021 can be seen in the table below. Apart from the following bonds listed, PTPI did not issue any other securities.



Obligasi yang Masih Beredar

The outstanding bonds in 2021

Tahun Penerbitan Issuance Year	Nama Obligasi Name of Bond	Tanggal Penerbitan Date Issued	Nilai Obligasi (Rp) Bond Value (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status	Bursa Efek Stock Exchange
2017	Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap I Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN1) PTPI Shelf Registration Bonds I, Stage I, Year 2017, Series B (PIHC01BCN1)	12 Juli 2017 July 12, 2017	2.085.000.000.000	12 Juli 2024 July 12, 2024	8,60%	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap II Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN2) PTPI Shelf Registration Bonds I, Stage II, Year 2017, Series B (PIHC01BCN2)	9 November 2017 November 9, 2017	1.774.000.000.000	9 November 2022 November 9, 2022	7,90%	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
2020	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri A (PIHC02ACN1) PT Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds I, Stage I, Year 2020, Series A (PIHC02ACN1)	3 September 2020 September 3, 2020	1.146.825.000.000	3 September 2023 September 3, 2023	7,00%	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B (PIHC02BCN1) PT Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds Stage I Year 2020 Series B (PIHC02BCN1)	3 September 2020 September 3, 2020	857.835.000.000	3 September 2025 September 3, 2025	7,70%	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange

Tahun Penerbitan Issuance Year	Nama Obligasi Name of Bond	Tanggal Penerbitan Date Issued	Nilai Obligasi (Rp) Bond Value (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status	Bursa Efek Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C (PIHC02CCN1) PT Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds Stage I Year 2020 Series C (PIHC02CCN1)	3 September 2020 September 3, 2020	431.850.000.000	3 September 2027 September 3, 2027	8,30%	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
2021	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A (PIHC02ACN2) PT Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds Stage II Year 2021 Series A (PIHC02ACN2)	10 Maret 2021	350.000.000.000	10 Maret 2024	5,60%	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B (PIHC02BCN2) PT Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds Stage II Year 2021 Series B (PIHC02BCN2)	10 Maret 2021	1.600.000.000.000	10 Maret 2026	6,20%	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C (PIHC02CCN2) PT Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds Stage II Year 2021 Series C (PIHC02CCN2)	10 Maret 2021	800.000.000.000	10 Maret 2028	7,20%	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Jumlah Total		9.045.510.000.000					

PTPI tidak melakukan pelunasan obligasi di tahun 2021. Namun demikian, di tahun 2020 PTPI melakukan pelunasan Obligasi dengan keterangan sebagai berikut:

PTPI did not pay off any bonds in 2021. However, in 2020 PTPI paid off the following bonds:



Obligasi yang Telah Dilunasi pada Periode 2020-2021
Bonds Paid Off in 2020-2021

Tahun Penerbitan Issuance Year	Nama Obligasi Name of Bond	Tanggal Penerbitan Date Issued	Nilai Obligasi (Rp) Bond Value (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status	Bursa Efek Stock Exchange
2017	Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap I Tahun 2017 Seri A (PIHC01ACN1) PTPI Shelf Registration Bonds I, Stage I, Year 2017, Series A (PIHC01BCN1)	12 Juli 2017 July 12, 2017	1.484.500.000.000	12 Juli 2020 July 12, 2020	7,90%	AAA (idn) dari Fitch Ratings (2020)	Lunas sesuai dengan tanggal jatuh tempo Paid off according to due date	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap II Tahun 2017 Seri A (PIHC01ACN2) PTPI Shelf Registration Bonds I, Stage II, Year 2017, Series A (PIHC01BCN1)	9 November 2017 November 9, 2017	2.601.500.000.000	9 November 2020 November 9, 2020	7,50%	AAA (idn) dari Fitch Ratings (2020)	Lunas sesuai dengan tanggal jatuh tempo Paid off according to due date	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Jumlah Total			4.086.000.000.000					

INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION CONCERNING OTHER FUNDING SOURCES

Hingga akhir tahun 2021, PTPI tidak memiliki sumber pendanaan lainnya selain melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai penyertaan modal Perusahaan, penerbitan obligasi seperti yang telah disampaikan di atas, serta pinjaman perbankan. PTPI tidak menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau *Medium Term Notes* maupun instrumen keuangan permodalan lainnya.

Until the end of 2021, PTPI had no other funding sources apart from State Equity Participation (PMN) as the Company's equity participation, and issuance of bonds as stated above, as well as bank loans. PTPI has not issued Medium Term Notes or other capital financial instruments.

KILAS PERISTIWA

EVENTS HIGHLIGHTS

Pupuk Indonesia Terapkan Sentralisasi fungsi Holding

Pupuk Indonesia Instigates the Holding function Centralization



8 Januari 2021
January 8, 2021

Sebagai bagian dari amanah Pemegang Saham yaitu Kementerian BUMN, untuk melakukan transformasi, PTPI resmi menetapkan diberlakukannya Sentralisasi Fungsi Holding di lingkungan PI Grup. Peresmian ini dilaksanakan di Kantor PTPI, Jakarta.

As part of the shareholders' mandate, namely the Ministry of SOEs, for transformation, PTPI officially established the centralization of the Holding Function in the PI Group. The inauguration was held at the PTPI Jakarta office.

Pupuk Indonesia Luncurkan Program Customer Centric

Pupuk Indonesia Launches the Customer Centric Program



17 Februari 2021
February 17, 2021

Sebagai komitmen Perusahaan untuk meningkatkan fokusnya pada pelayanan pelanggan, PTPI meluncurkan Program *Customer Centric Model* di Kantor Pupuk Kujang di Cikampek.

As a commitment to increase its focus on customer services, PTPI launched the Customer Centric Program Model at the Pupuk Kujang office in Cikampek.

Launching Indonesia Food and Fertilizer Research Institute (IFPRI) dan Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute (IFFLI)

Launching Indonesia Food and Fertilizer Research Institute (IFPRI) and Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute (IFFLI)



16 Juni 2021
June 16, 2021

11 perusahaan BUMN Klaster Pangan dan Pupuk sepakat meluncurkan Indonesia Food and Fertilizer Research Institute (IFPRI) dan Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute (IFFLI). Kolaborasi ini dibangun untuk menghasilkan talenta terbaik dan inovasi yang implementatif dari BUMN klaster pangan dan pupuk. Launching ini dilaksanakan di Kantor PTPI, Jakarta

11 Food and Fertilizer SOE Cluster companies launched the Indonesia Food and Fertilizer Research Institute (IFPRI), and the Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute (IFFLI). This collaboration was instigated to produce the best talent and implementative innovations from SOE Food and Fertilizer Clusters. The launch was held at the PTPI office in Jakarta.

Penandatanganan Nota Kesepahaman untuk jual beli gas bumi dari Blok Kasuri untuk pabrik Amoniak-Urea dan Methanol

Signing of a Memorandum of Understanding for buying and selling natural gas from the Kasuri Block for the Amonia-Urea and Methanol factory



17 Juni 2021
June 17, 2021

PTPI dan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman untuk jual beli gas bumi dari Blok Kasuri untuk pabrik Amoniak-Urea dan Methanol di Papua Barat disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Kegiatan ini dilaksanakan di Kementerian ESDM, Jakarta.

PTPI and Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) signed a Memorandum of Understanding to buy and sell natural gas from the Kasuri Block for the Amonia-Urea and Methanol factory in West Papua, witnessed by the Minister of ESDM Arifin Tasrif. The signing took place at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta.

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi
Dismissal and Appointment of Board of Directors Members



16 Juli 2021
July 16, 2021

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengubah susunan dan nomenklatur direksi PTPI melalui SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PTPI. Selaku pemegang saham mengangkat Listiarini Dewajanti sebagai Direktur Keuangan dan Investasi menggantikan Eko Taufik Wibowo dan mengangkat Jamsaton Nababan sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha.

The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) changed the composition and nomenclature of PTPI through SK-237/MBU/07/07/2021 dated July 16, 2021 concerning the dismissal, changes in the position nomenclature, transfer of duties, and appointment of members to the PTPI Board of Directors. The shareholders appointed Listiarini Dewajanti as Director of Finance and Investment to replace Eko Taufik Wibowo, and appointed Jamsaton Nababan as Director of Portfolio and Business Development

Peringatan 1 Tahun Akhlak
1 year anniversary of Akhlak



28 Juli 2021
July 28, 2021

PTPI memperingati satu tahun implementasi AKHLAK yang digagas oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Direksi Pupuk Indonesia dan anak perusahaan, serta diikuti lebih dari 500 karyawan. Kegiatan dilaksanakan secara daring (*online*).

PTPI commemorated the first year of Akhlak's implementation initiated by Minister of SOEs Erick Thohir. This online event was attended by the Pupuk Indonesia and subsidiaries Board of Directors, and more than 500 employees.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pupuk Indonesia dan Pertamina NRE
Signing of a Memorandum of Understanding between Pupuk Indonesia and Pertamina NRE



2 Agustus 2021
August 2, 2021

PTPI sepakat bersinergi dengan Pertamina NRE (PNRE). Sinergi ini dilakukan untuk menjajaki peluang pengembangan hidrogen dan penyediaan energi. Kegiatan dilaksanakan secara daring (*online*).

PTPI agreed to work together with Pertamina NRE (PNRE). This synergy will be carried out to explore opportunities for hydrogen development and energy supply. This event was carried out online

Peresmian Program Makmur
Inauguration of the Makmur Program



29 Agustus 2021
August 29, 2021

Menteri BUMN Erick Thohir resmi meluncurkan Program Makmur di Subang. Program ini merupakan inisiatif PTPI sebagai upaya solusi pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

SOE Minister Erick Thohir officially launched the Makmur Program in Subang. This program is a PTPI initiative as an agricultural solution to increase agricultural productivity and farmer welfare.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pupuk Indonesia dan Bank BRI
Signing of the Memorandum of Understanding between Pupuk Indonesia and Bank BRI



30 September 2021
September 30, 2021

PTPI dan PT Bank BRI (Persero) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Dalam rangka pemberdayaan petani serta pemberian akses permodalan bagi petani Indonesia pada Program Makmur. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor PTPI, Jakarta.

PTPI and PT Bank BRI (Persero) signed a Memorandum of Understanding to empower farmers and provide access to capital for Indonesian farmers through the Makmur Program. This activity took place at the PTPI Jakarta office.

PT Pupuk Indonesia Energi berganti Nama Menjadi PT Pupuk Indonesia Utilitas

PT Pupuk Indonesia Energi changed its name to PT Pupuk Indonesia Utilitas



1 Desember 2021
December 1, 2021

Anak perusahaan PTPI, PT Pupuk Indonesia Energi (PI Energi) melakukan rebranding dengan berganti nama menjadi Pupuk Indonesia Utilitas (PI Utilitas). Perubahan nama ini akan mengukuhkan posisi PI Utilitas sebagai kluster utilitas yang didedikasikan dibangun untuk menunjang salah satu dari tiga komponen utama pabrik pupuk, yaitu pabrik utilitas (listrik, steam, air dan nitrogen), pabrik urea, dan pabrik amoniak

The subsidiary of PTPI, PT Pupuk Indonesia Energi (PI Energi), rebranded itself by changing its name to PT Pupuk Indonesia Utilitas (PI Utilitas). This name change will confirm PI Utilitas' position as a dedicated utility cluster to support one of the three main components of the fertilizer factories, namely the utility factory (electricity, steam, water and nitrogen), urea factory, and ammonia factory

PTPI menggelar Pupuk Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021
PTPI holds Pupuk Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021



13 Desember 2021
December 13, 2021

PTPI menggelar konvensi inovasi di tingkat *holding*, yaitu Pupuk Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021. Melalui kegiatan ini, PTPI dapat meningkatkan efektivitas proses, efisiensi biaya, dan kinerja guna meningkatkan daya saing perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor PTPI, Jakarta.

PTPI held an innovation convention at the holding level called the Pupuk Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021. Through this activity, PTPI can increase the effectiveness of the processes, cost efficiencies, and performance to increase the Company's competitiveness. This activity took place at the PTPI Jakarta office.

Pupuk Indonesia Fertinnovation Challenge 2021
Pupuk Indonesia Fertinnovation Challenge 2021



21 Desember 2021
December 21, 2021

Pelaksanaan kompetisi riset pertanian *Fertinnovation Challenge* 2021 ini menjadi salah satu program Pupuk Indonesia yang saat ini tengah memfokuskan diri dalam bidang riset dan inovasi yang merupakan salah satu pilar strategis dalam program transformasi bisnis. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor PTPI, Jakarta.

The Fertinnovation Challenge 2021 Agricultural Research Competition has become one of Pupuk Indonesia's programs that currently focuses on the field of research and innovation that are one of the strategic pillars in the business transformation program. This activity took place at the PTPI Jakarta office.

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi
Dismissal and Appointment of Board of Directors Members



22 Desember 2021
December 22, 2021

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat direksi baru PTPI melalui SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia. Selaku pemegang saham mengangkat Wono Budi Tjahyono sebagai Direktur Keuangan dan Investasi menggantikan Listiarini Dewajanti dan mengangkat Tina T. Kemala Intan sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko menggantikan Winardi.

The Ministry of State-Owned Enterprises (SEOs) appointed new Directors at PTPI through SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the PTPI Board of Directors. The shareholders appointed Wono Budi Tjahyono as Director of Finance and Investment replacing Listiarini Dewajanti, and appointed Tina T. Kemala Intan as Director of HC, Governance, & Risk Management replacing Winardi.

Pupuk Indonesia Luncurkan Penyeragaman Brand Produk Retail
Pupuk Indonesia Launches Uniform Brand Retail Products



28 Desember 2021
December 28, 2021

PTPI meluncurkan penyeragaman produk retail urea dan NPK dengan brand baru, yaitu Urea Nitrea dan NPK Phonska Plus 16-16-16. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor PTPI, Jakarta.

PTPI a uniform urea and NPK retail products with new brands, called Urea Nitrea and NPK Phonska Plus 16-16-16. This activity took place at the PTPI Jakarta office.





02

Laporan Manajemen

Management Report

Tumbuh di tengah tantangan menjadi sebuah capaian tentang bagaimana PI Grup mampu memperkuat konsolidasi dan menyambut peluang yang ada.

Growing in the midst of challenges is an achievement of how PI Group is able to strengthen consolidation and welcome the opportunities



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT



pt.pupukindonesia



Darmin Nasution

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent
Commissioner





Kemampuan untuk tetap tumbuh di tengah tantangan tentu menjadi modal penting bagi Perusahaan untuk terus melangkah optimis di masa mendatang.

The ability to continue to grow despite the challenges is certainly important capital for the Company to continue to move optimistically into the future.

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Amanat ketersediaan pupuk bagi pasar Indonesia yang diemban PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi salah satu tanggung jawab utama Perusahaan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Sektor Pupuk, PTPI bersama seluruh entitas anak yang tergabung dalam "PI Grup" berupaya untuk memenuhi tugas ketersediaan pupuk bagi pasar domestik sekaligus memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham dalam pengelolaan bisnis di sektor industri pupuk. Laporan Tahunan tahun buku 2021 ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Perusahaan di sepanjang tahun 2021. Melalui buku laporan ini, Perusahaan merangkum dan mendokumentasikan perjalanan dan pencapaian di tahun 2021, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban manajemen dalam melakukan pengelolaan Perusahaan.

Pandangan Umum terhadap Kondisi Perekonomian dan Industri Pupuk Tahun 2021

PI Grup memberikan perhatian yang besar atas perkembangan perekonomian dunia dan domestik yang mempengaruhi industri pupuk. Indikator yang menjadi fokus perhatian Perusahaan, antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, harga komoditas serta harga Urea, NPK, dan Amoniak, serta bahan baku produksi.

Secara umum, tahun 2021 menjadi tahun pemulihan baik dari sisi kegiatan sosial masyarakat maupun perekonomian yang berangsur-angsur pulih dari kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang muncul di tahun 2020. Meskipun demikian, di tahun 2021 pandemi COVID-19 terlihat belum akan berakhir yang ditandai dengan munculnya varian Delta dengan tingkat penyebaran yang cukup cepat. Dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini terutama terlihat pada pemulihan ekonomi di berbagai negara dan Kawasan yang timpang. Kenaikan harga berbagai komoditas terutama pangan merupakan risiko yang perlu diantisipasi secara komprehensif oleh negara-negara berkembang.

DEAR SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

The mandate for fertilizer availability in the Indonesian market carried out by PT Pupuk Indonesia (Persero) is one of the main responsibilities of the Company in the context of realizing national food security. As a State-Owned Enterprise (BUMN) Holding in the Fertilizer Sector, PTPI together with all its subsidiaries who are members of the "PI Group", continue to fulfill the task of providing fertilizer for the domestic market whilst delivering added value to the Government of Indonesia as a shareholder in the fertilizer industry sector business management. This 2021 Annual Report provides a comprehensive picture of the Company's performance throughout 2021. Through this report, the Company summarizes and documents its journey and achievements in 2021, as part of the management's responsibility in managing the Company.

General Outlook on Economic Conditions and the Fertilizer Industry in 2021

PI Group pays great attention to developments in the world and domestic economies that affect the fertilizer industry. The indicators that are the focus of the Company's attention include Gross Domestic Product (GDP), currency exchange rates, inflation rates, commodity prices as well as Urea, NPK and Ammonia prices, and raw materials used in production.

Overall, 2021 was a year of recovery both in terms of community social activities and the economy, which are gradually recovering from the extraordinary events during the COVID-19 pandemic that emerged in 2020. In 2021 the COVID-19 pandemic looked like it will not end, especially due to the emergence of the Delta variant with its fairly fast spread rate. The impact of the prolonged COVID-19 pandemic was mainly seen in the unequal economic recovery in many countries and regions. The increases in commodity prices, especially food, were a risk that developing countries needed to comprehensively anticipate.



Tak hanya itu, perubahan kebijakan moneter terutama Bank Sentral Amerika Serikat (AS) dan beberapa bank sentral negara maju lainnya seiring dengan perubahan prospek ekonomi negara maju menciptakan ketidakpastian pada pasar keuangan global dan meningkatkan risiko di sektor keuangan non-bank.

Dalam publikasi bertajuk “*World Economic Outlook*” edisi Januari 2022, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 sebesar 5,9%, lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mencatat defisit 3,1%. Namun demikian, masih terjadi perlambatan pemulihan ekonomi terutama di kawasan Asia di mana lonjakan kasus COVID-19 masih terjadi seperti India, Malaysia, dan Vietnam yang masih harus berjuang melawan varian baru. Indonesia sendiri, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,69% yang lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 dengan defisit 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04%. Percepatan vaksinasi massal, peningkatan konsumsi dalam negeri dan aktivitas dunia usaha, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menjaga stabilitas keuangan, menjadi beberapa kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk tetap dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Data BPS juga menyebutkan, lapangan usaha Industri Pengolahan berhasil tumbuh 4,92%, di mana Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional mampu tumbuh 8,28% di sepanjang tahun 2021. Di samping farmasi, industri petrokimia juga tumbuh dengan cukup baik yang terlihat dari meningkatnya harga komoditas seperti Amoniak. Di sektor pupuk, permintaan urea, seperti halnya komoditas industri lainnya, akan sangat terpengaruh oleh dampak lanjutan dari wabah COVID-19. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia menempatkan industri pupuk sebagai salah satu sektor yang mendapatkan insentif melalui penurunan harga gas sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, dan Keputusan Menteri ESDM No. 89K Tahun 2020 jo. No. 134K Tahun 2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Dengan adanya fasilitas penurunan harga gas bumi tertentu tersebut, diharapkan beban subsidi pupuk dapat diturunkan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Di sisi lain, insentif ini akan terus menjamin ketersediaan pupuk bagi pelanggan khususnya sektor pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional di tengah tekanan pandemi COVID-19.

Not only that, changes in monetary policy, especially the Central Bank of the United States and several other central banks in developed countries, together with changes in the economic prospects of developed countries, created uncertainty in the global financial markets, and increased risk in the non-bank financial sectors.

In its January 2022 publication “*World Economic Outlook*”, the International Monetary Fund (IMF) projected that the world’s economic growth in 2021 would be 5.9%, better than 2020’s deficit of 3.1%. However, there would still be a slowdown in economic recovery, especially in the Asian region where a surge in COVID-19 cases is still occurring, especially in India, Malaysia, and Vietnam who are still struggling with new variants. Indonesia itself, based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia’s economic performance in 2021 grew 3.69%, higher than the 2020 deficit of 2.07%. In terms of production, the highest growth occurred in the Health Services and Social Activities business sector at 10.46%. In terms of expenditure, the highest growth was seen in the Exports of Goods and Services at 24.04%. The Government of Indonesia’s strategic policies to maintain the national economic recovery momentum included its accelerated mass vaccination program, and increasing domestic consumption and business activities through the National Economic Recovery (PEN) program to maintain financial stability.

The BPS data also reported that the Manufacturing Industry business sector managed to grow by 4.92%, with the Chemical, Pharmaceutical and Traditional Medicine Industries growing 8.28% in 2021. As well as pharmaceuticals, the petrochemical industry also grew quite well, as can be seen in the rising commodity prices such as Ammonia. In the fertilizer sector, demand for Urea, like other industrial commodities, will be greatly affected by the continued impact of the COVID-19 outbreak. Nevertheless, the Government of Indonesia included the fertilizer industry as one of the sectors to receive incentives by lowering gas prices based on the 2020 Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 8 concerning Procedures for Determining Certain Natural Gas Users and Prices in the Industrial Sector, and the 2020 Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 89K in conjunction with the 2021 Decree No. 134K concerning Users and Prices of Certain Natural Gas in the Industrial Sector. With the facilities to reduce certain natural gas prices, it is hoped that the fertilizer subsidy burden can be reduced while increasing tax revenue. On the other hand, this incentive will continue to ensure the availability of fertilizers for customers, especially in the agricultural sector, to help realize the national food security during the COVID-19 pandemic.

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris, Hubungan Kerja dengan Direksi, dan Penyampaian Masukan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris

Peran dan fungsi pengawasan merupakan tugas yang diemban oleh Dewan Komisaris, khususnya dalam memberikan masukan yang sejalan dengan aspirasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan Direksi melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam fungsi pengawasan, Dewan Komisaris bertugas untuk memberikan persetujuan atas hal-hal yang dimintakan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris juga menyampaikan laporan secara tertulis tentang usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), memberikan pendapat dan saran serta alasan Kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai usulan RKAP dimaksud. Dewan Komisaris juga selalu memberikan tanggapan berupa laporan pengawasan secara berkala dan menyeluruh atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi, mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi, serta pemantauan dan saran atas penerapan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Rapat Bulanan Dewan Komisaris yang mengundang Direksi menjadi forum strategis bagi Dewan Komisaris untuk mendapatkan informasi komprehensif tentang kondisi Perusahaan begitu juga apabila ada gejala penurunan kinerja Perusahaan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengundang Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali pertemuan rapat. Dalam pelaksanaannya rapat terbagi atas rapat bulanan dan rapat yang sifatnya strategis dimana Dewan Komisaris masih membutuhkan pendalaman serta tambahan informasi dari Direksi. Di samping itu, Dewan Komisaris juga melaksanakan 20 (dua puluh) kali rapat internal dalam rangka membahas berbagai perkembangan Perusahaan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Seluruh aspek dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris, baik aspek produksi dan teknik, aspek investasi dan sdm, aspek keuangan dan program, aspek hukum, hubungan kerjasama dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), maupun aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL).

Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat rutin Komite yang dihadiri oleh beberapa Dewan Komisaris dan Direksi, hal ini dimaksudkan agar seluruh jajaran dapat mengetahui hal-hal yang lebih teknis sehingga dari hasil pembahasan dapat menjadi masukan untuk keputusan yang tepat bagi para pemangku kepentingan perusahaan.

Board of Commissioners Supervisory Functions, Working Relations with the Board of Directors, and Submission of Feedback to the Board of Directors by the Board of Commissioners

The supervisory role and function is a duty carried out by the Board of Commissioners to provide input in line with the aspirations of the shareholders and all stakeholders. When carrying out this supervisory function, the Board of Commissioners is committed to maintaining a close relationship with the Board of Directors with a common view to achieving the Company's vision and mission.

Duties, Authorities and Obligations of the Board of Commissioners regulated in the Company's Articles of Association. In supervisory function, the Board of Commissioners is tasked with give consent to the things requested Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association and Corporate Governance Guidelines. The Board of Commissioners also submits a written report on the proposed Company Work Plan and Budget (RKAP), provides opinions and suggestions as well as reasons to the General Meeting of Shareholders concerning the proposed RKAP. The Board of Commissioners also provides feedback in the form of periodic and comprehensive supervisory reports on the Company's management carried out by the Board of Directors, proposes remuneration for the Board of Directors in accordance with applicable regulations, and performs performance assessments of the Board of Directors, as well as monitors and provides advice on the applicable laws and regulations.

Monthly Meeting of the Board of Commissioners which invites the Board of Directors become a strategic forum for the Board of Commissioners to get comprehensive information about the condition of The company and also the signs of a decrease of the Company's performance. Throughout 2021, the Board of Commissioners has invited the Board of Directors 18 (eighteen) times meetings. In its implementation, the meeting is divided into monthly meetings and meetings that are strategic in nature where The Board of Commissioners still needs further study as well as additional information from the Board of Directors. The Board of Commissioners also held 20 (twenty) internal meetings to discuss the various developments in the Company, both from an external and internal view. The Board of Commissioners supervises all aspects, including production and technical aspects, investment and HC aspects, financial and program aspects, legal aspects, cooperative relationships and Good Corporate Governance (GCG), as well as the Corporate Social Responsibility aspect.

The Board of Commissioners also holds regular Committee meetings attended by several Commissioners and Directors, so that all levels of the Company fully understand the more technical matters to ensure the results of the discussions will be reflected in making the correct decisions for the Company's stakeholders.



Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari amanat pemegang saham yang telah diputuskan melalui mekanisme RUPS. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Kompetensi anggota Dewan Komisaris memungkinkan untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait arah dan strategi pengurusan Perusahaan; tentunya dengan batas-batas hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dasar Penilaian

Penilaian kinerja Direksi melekat pada *Key Performance Indicator* (KPI) korporasi yang telah disusun di awal tahun dan disepakati dengan pemegang saham sebagai kontrak manajemen. KPI bertujuan sebagai panduan bagi Direksi untuk dapat mengarahkan dan mengelola seluruh sumber daya Perusahaan secara sistematis. Bagi Dewan Komisaris, KPI berguna sebagai panduan pemantauan dalam melakukan tugas pengawasan.

Sebagai BUMN sekaligus *Holding* Industri Pupuk, penilaian KPI Direksi yang melekat pada KPI korporat diatur oleh Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara. KPI Korporat sebagai KPI Kolegial Direksi ini mencakup 5 (lima) perspektif, yaitu perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia meliputi kinerja finansial, operasional, dan sosial; perspektif Inovasi Model Bisnis mencakup beberapa indikator seperti peningkatan penjualan pupuk ritel dalam negeri, implementasi *Customer Centric Model* dan *Agrosolution*, dan restrukturisasi entitas anak dalam PI Grup; perspektif Kepemimpinan Teknologi dengan penekanan pada penerapan transformasi digital seperti *Manufacturing Network Footprint*, *Big Data* dalam produksi, pemasaran, dan logistik, *Advanced Analytics* dalam pemasaran dan distribusi, serta *Supply Chain Control Tower*; perspektif Peningkatan Investasi mencakup kemajuan berbagai proyek pengembangan PI Grup; serta perspektif Pengembangan Talenta meliputi pengelolaan talenta unggul PI Grup, *top talent millennial* dan perempuan, serta pengelolaan riset termasuk implementasi Indonesia Fertilizer Research Institute.

Melalui KPI inilah Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan, termasuk pencapaian KPI sebagai alat *monitoring* pencapaian kinerja Perusahaan. Berikut disampaikan pencapaian KPI Direksi untuk tahun 2021.

The Board of Commissioners' supervisory function is part of the shareholder's mandate enacted through a GMS. Either directly or indirectly, the Board of Commissioners represents the shareholders' interests when supervising the management of the Company by the Board of Directors. The competence of the Board of Commissioners members allows it to provide input to the Board of Directors concerning the direction and strategy of the Company's management; of course within the limits of the rights, authorities and obligations of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

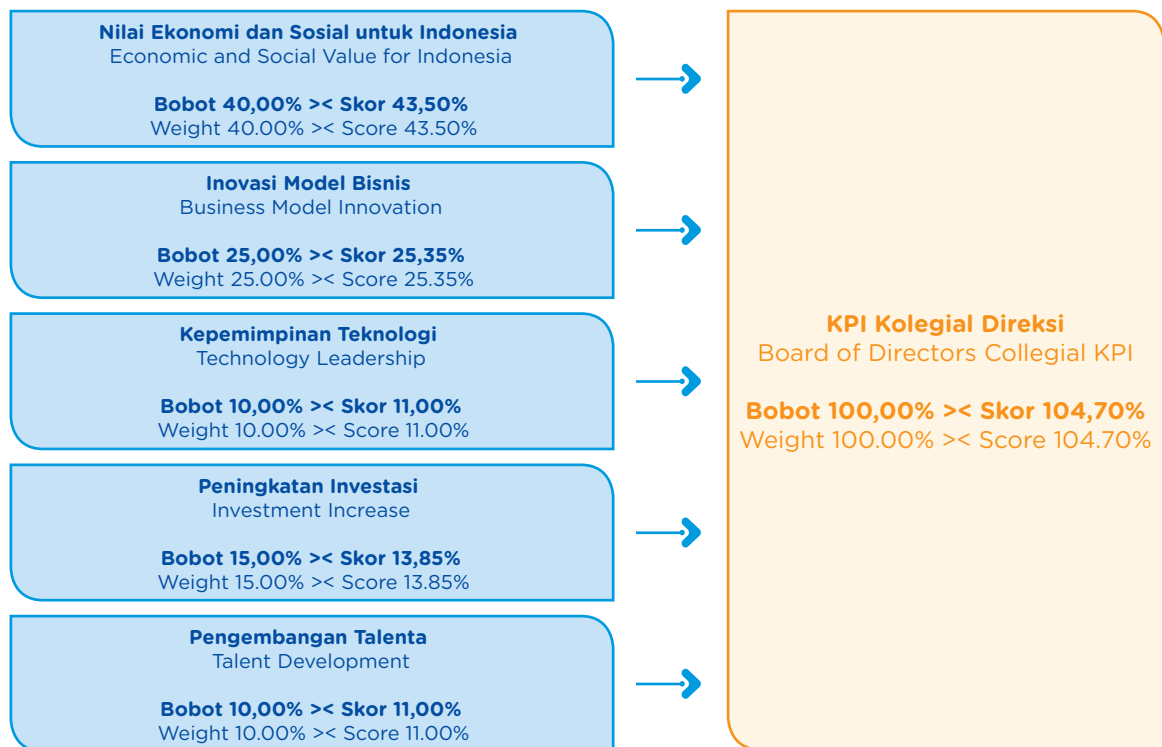
Board of Directors' Performance Assessment and Basis of Assessment

The Board of Directors' performance appraisal looks at the corporate Key Performance Indicators (KPI) prepared at the beginning of the year, as agreed with the shareholders in the management contract. The KPI guide the Board of Directors in directing and managing all Company resources systematically. For the Board of Commissioners, the KPI are a useful monitoring tool for carrying out its supervisory duties.

As a State-Owned Enterprise (SOE), as well as the Fertilizer Industry Holding Company, the Board of Directors' KPI assessment is linked to the corporate KPIs regulated by the Ministry of SOEs through their Regulation No. PER-11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for Directors of SOEs. The Corporate KPIs are the Board of Directors' Collegial KPI, and include 5 (five) perspectives, namely the Economic and Social Values perspective for Indonesia covering financial, operational, and social performance; the Business Model Innovation perspective that includes several indicators such as increased domestic retail fertilizer sales, implementation of the Customer Centric Model and Agrosolution, and restructuring of subsidiaries within the PI Group; the Technology Leadership perspective with emphasis on implementing digital transformation such as Manufacturing Network Footprint, Big Data in production, marketing and logistics, Advanced Analytics in marketing and distribution, and Supply Chain Control Tower; the Investment Enhancement perspective that covers the progress of the PI Group development projects; as well as the Talent Development perspective covering the management of PI Group's superior talent, top millennial and female talent, as well as research management including the implementation of the Indonesia Fertilizer Institute Research Institute.

Using these KPIs, the Board of Commissioners carries out its supervisory duties, and includes the achievement of KPIs as a monitoring tool for the Company's performance achievement.

Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Direksi Tahun 2021 Board of Directors Achievement of Key Performance Indicators in 2021



Atas pencapaian KPI tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya, langkah dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Direksi dalam rangka memenuhi target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 khususnya terkait perwujudan perubahan dari *Strategic Holding* menjadi *Activist Holding*. Dengan peran baru ini, PTPI menjadi penyelenggara fungsi yang diharapkan mampu melakukan sentralisasi sejumlah fungsi dalam BUMN *Holding* Pupuk.

Kinerja volume produksi juga menunjukkan hasil yang baik. Realisasi volume produksi pupuk dan non-pupuk tahun 2021 tumbuh dibandingkan tahun 2020 dan berada di atas target. Keberhasilan ini terutama didukung oleh meningkatnya produksi pada NPK dan Amoniak sejalan dengan upaya PTPI untuk memperluas produknya di segmen komersil. Sedangkan realisasi volume penjualan tahun 2021 berada di atas target, namun sedikit di bawah realisasi tahun 2020 yang disebabkan adanya penyesuaian volume dan administrasi pupuk bersubsidi. Tingginya harga jual Urea dan Amoniak di pasar global memberikan dampak positif terhadap nilai penjualan urea dan amoniak PTPI di sektor komersil.

Dewan Komisaris juga menyambut baik atas pencapaian kinerja keuangan PTPI di tahun 2021. Meningkatnya penjualan dan pendapatan usaha lainnya serta laba bersih tahun berjalan, penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021, serta arus kas dan posisi keuangan yang menguat, menjadi indikator penting bagi PTPI untuk tetap tumbuh di tengah situasi yang masih dibayang-bayangi imbas pandemi COVID-19.

For the achievement of these KPIs, the Board of Commissioners would like to express its appreciation for all the efforts, steps and hard work carried out by the Board of Directors to meet the targets set in 2021, especially for the change from *Strategic Holding* to *Activist Holding*. With this new role, PTPI has become the organizer of all functions, and are expected to centralize a number of functions in the Fertilizer SOE Holding.

The production performance also delivered good results. Fertilizer and non-fertilizer production volumes in 2021 grew compared to 2020 and were above the set targets. This was mainly due to increased production of NPK and Ammonia in line with PTPI's efforts to expand its products in the commercial segment. Also the sales volume in 2021 was above target, but slightly below the realization in 2020 due to volume adjustments and the administration of subsidized fertilizers. The high selling price of Urea and Ammonia in the global market had a positive impact on PTPI's urea and ammonia sales in the commercial sector.

The Board of Commissioners also welcomed PTPI's financial performance achievement in 2021. The increase in sales and other operating revenues as well as net profit for the year, the issuance of the Pupuk Indonesia Sustainable Bonds II Phase II 2021, as well as the cash flows and a stronger financial position, were important indicators for PTPI's continued growth in a period that was still overshadowed by the impact of the COVID-19 pandemic.



Dewan Komisaris juga yakin bahwa Direksi akan memastikan kelanjutan beberapa pelaksanaan inisiatif strategis yang belum selesai atau yang perlu dikembangkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pandangan atas Prospek Usaha Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun penuh harapan namun tetap dengan penuh kehati-hatian. Pandemi COVID-19 yang masih membayangi melalui varian Omicron di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 tetap menjadi perhatian utama bagi pemulihan ekonomi global. Meskipun dibayangi ketidakpastian akibat virus varian baru COVID-19, tidak meratanya pemulihan ekonomi antar negara dan kawasan, adanya kelangkaan energi akibat kenaikan konsumsi komoditas di tahun 2021, tren kenaikan tingkat inflasi dan kemungkinan peningkatan suku bunga global, serta kebijakan *tapering off* dari Bank Sentral Amerika, berbagai lembaga optimis perekonomian Indonesia di tahun 2022 akan menguat. Pemerintah Indonesia sendiri, sebagaimana dikutip dalam Laporan Kementerian Keuangan pada Januari 2022, memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh dengan optimis pada level 5,2%, menguat dari proyeksi tahun 2021 yang berada pada level pertumbuhan 3,69%.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 3,6-4,0%. Dalam tiga tahun terakhir, diperkirakan akan terlihat hasil dari siklus investasi terbaru dengan peningkatan yang sangat signifikan pada segi kapasitas global produksi pupuk Urea. Untuk jangka panjang, permintaan pupuk Urea diperkirakan tumbuh terbatas di negara-negara maju, terutama karena dorongan untuk memproduksi lebih banyak makanan dari lahan pertanian yang terbatas, yang akan menunjukkan bahwa konsumsi nitrogen yang lebih tinggi dengan diimbangi langkah-langkah meningkatkan efisiensi penyerapan nitrogen melalui aplikasi pupuk yang dikelola dengan lebih baik dan peningkatan penggunaan produk nitrogen yang distabilkan.

Di Eropa, 'Green Deal' yang belum lama ini diumumkan menargetkan pengurangan 20% dalam penggunaan pupuk pada tahun 2030. Tiongkok diperkirakan akan mengalami sedikit pertumbuhan Urea pertanian sebagai akibat dari inisiatif Pemerintah Tiongkok untuk mengekang penggunaan pupuk. Di tempat lain di negara berkembang, terdapat potensi pertumbuhan permintaan yang lebih besar, dengan Afrika dan Amerika Latin yang dipandang memiliki potensi paling besar dalam jangka panjang, meskipun peningkatan penggunaan pupuk di kedua wilayah tersebut akan terus terhambat oleh masalah ketersediaan dan harga yang terjangkau.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors will continue the strategic initiatives already completed, or those that need to be developed to run properly.

Outlook on Business Prospects for 2022

2022 will be a year full of hope but with caution. The COVID-19 pandemic still looms following the Omicron variant in late 2021 and early 2022, and remains a major concern for global economic recovery. Even though overshadowed by uncertainty due to the new COVID-19 variant, there has been uneven economic recovery in many countries and regions, with energy shortages due to rising commodity consumption in 2021, an upward trend in inflation rates and the possibility of an increase in global interest rates, as well as the tapering off policy from the Central Bank of America. However, various institutions are optimistic that the Indonesian economy in 2022 will strengthen. The Indonesian government itself, as quoted in the Ministry of Finance Report in January 2022, projects the Indonesian economy to grow in 2022 to a level of 5.2%, stronger than the projection for 2021 of 3.69%.

The agriculture, forestry and fisheries sectors in 2022 are expected to grow in the range of 3.6-4.0%. Over the last three years, the results of the latest investment cycle will be seen in a very significant increase in the global capacity for Urea fertilizer production. Over the long term, demand for Urea fertilizers is expected to grow in developed countries, mainly due to the drive to produce more food from limited agricultural land, which indicates that the higher nitrogen consumption is being offset by measures to increase nitrogen uptake efficiencies by using better managed fertilizers, and increasing the use of stabilized nitrogen products.

In Europe, the recently announced 'Green Deal' targets a 20% reduction in fertilizer use by 2030. China is expected to experience a slight growth in agricultural Urea as a result of the Chinese Government's initiative to curb fertilizer use. Elsewhere in developing countries, there is potential for greater demand growth, with Africa and Latin America seen as having the most potential over the long term, although increasing fertilizer use in both regions will continue to be hampered by availability and affordability issues.

Selain itu, perselisihan antara Rusia dan Ukraina berimbas langsung terhadap komoditas dunia. Harga minyak dan gas bumi dunia akan terdampak, terutama karena Rusia merupakan negara penghasil minyak mentah terbesar ke-3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Rusia, Belarusia, dan Ukraina sebagai pemasok kebutuhan global terkait DAP dan MOP (KCI) akan memberikan imbas terhadap *supply* dan harga bahan baku serta *supply* pupuk NPK. Terutama dengan posisi Ukraina sebagai salah satu negara penghasil bahan pangan terbesar dunia, konflik Rusia dan Ukraina tentunya akan berdampak pada berkurangnya *supply* bahan pangan yang kemudian akan meningkatkan harga komoditas pangan.

Di level nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan rencana pupuk bersubsidi sebanyak 9.118.057 Ton. Hal ini menunjukkan optimisme Pemerintah Indonesia untuk mendorong pertanian dan perkebunan sebagai salah satu sektor yang tetap bertahan dengan baik di tengah tantangan imbas pandemi COVID-19.

Dewan Komisaris menyambut baik proyeksi kinerja PTPI tahun 2022, baik proyeksi meningkatnya produksi maupun penjualan produk pupuk dan non-pupuk, termasuk upaya PTPI untuk tetap menjaga alokasi penjualan dalam mempertahankan penjualan pupuk di sektor non subsidi tetap tinggi. Demikian pula proyeksi kinerja keuangan yang mencerminkan komitmen kuat PTPI dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah situasi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Dewan Komisaris sungguh berharap, proyeksi kinerja ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Perusahaan untuk dapat terus menumbuh kembangkan PTPI di masa-masa mendatang.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dorongan regulator kepada seluruh pelaku usaha untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) patut diapresiasi. Dewan Komisaris patut berbangga, bahwa seluruh elemen Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan praktik GCG dengan harapan Perusahaan memiliki fondasi organisasi yang kokoh, transparan dan akuntabel. Sebagai salah satu organ utama, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengambil peran dalam penerapan GCG di lingkup Perusahaan. Fungsi pengawasan yang berjalan beriringan dengan fungsi pengelolaan oleh Direksi menjadi catatan penting agar konsep keseimbangan 2 (dua) badan dalam entitas Perseroan Terbatas dapat terwujud.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Sekretaris Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan PI Grup

In addition, the dispute between Russia and Ukraine affected directly to world commodities. Oil prices and the world's natural gas will be affected, especially because of Russia is the 3rd largest crude oil producing country in the world after Saudi Arabia and the United States. Not only that, Russia, Belarus and Ukraine as supplier of global needs related to DAP and MOP (KCI) will have an impact on the supply and price of materials raw material and supply of NPK fertilizer. Especially with the position Ukraine as a food producing country the world's largest, the conflict between Russia and Ukraine will certainly have an impact on reducing the supply of food and it will increase the price of food commodities then.

At the national level, the Government of Indonesia through the Ministry of Agriculture has allocated a plan for 9,118,057 Tons of subsidized fertilizer. This demonstrates the Indonesian Government's optimism to encourage agriculture and plantations as the sectors that need to remain afloat in the midst of the challenges of the COVID-19 pandemic.

The Board of Commissioners welcomes the PTPI projected performance for 2022, both the projected increase in production and sales of fertilizer and non-fertilizer products, and PTPI's efforts to maintain sales allocations by maintaining high fertilizer sales in the non-subsidized sectors. Likewise, the projected financial performance reflects PTPI's strong commitment to maintaining growth momentum during an economic situation that has not yet fully recovered. The Board of Commissioners sincerely hopes that this performance projection will become a reference for all levels in the Company to continue to develop PTPI in the future.

View on the Implementation of Good Corporate Governance

The regulator's encouragement for all businesses to apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) should be appreciated. The Board of Commissioners is proud that all areas in the Company are committed to applying GCG practices with the hope that the Company can build a solid, transparent and accountable organizational foundation. As one of the main bodies, the Board of Commissioners has a great responsibility in the implementation of GCG within the Company. Our supervisory function that goes hand in hand with the Board of Directors' management function is an important factor, and balances the 2 (two) bodies in a the Company.

In carrying out its supervisory function, The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the GCG Committee and Risk Management Monitor, Nomination Committee and Remuneration and Secretary to the Board of Commissioners. Committee Audit is in charge of assisting the Board of Commissioners to supervise the management of the



hingga ke entitas anak. Komite Audit juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan umum atas Perusahaan dan memberikan nasihat dalam penerapan GCG dan Manajemen Risiko kepada Direksi dan jajaran di bawahnya.

Sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan validasi dan kalibrasi talenta yang diusulkan untuk menjadi nominasi kepada Menteri serta merumuskan kebijakan nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan melakukan evaluasi atas usulan KPI Individu Direksi dan juga struktur organisasi perusahaan.

Dewan Komisaris memandang, penerapan GCG di lingkup Perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, hingga audit internal, telah dijalankan dengan tujuan menciptakan proses bisnis yang akuntabel. Perusahaan juga menerapkan proses audit independen oleh akuntan publik atas laporan keuangan Perusahaan. Agar independensi akuntan publik terjaga, mekanisme penunjukan akuntan publik dilakukan hingga level persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Mekanisme ini diharapkan dapat menciptakan proses audit yang lepas dari benturan kepentingan. Laporan keuangan teraudit yang telah disertai opini dari akuntan publik akan menjadi laporan dasar yang dapat mencerminkan kinerja Perusahaan yang telah disesuaikan dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas evaluasi dan pemantauan penerapan GCG yang dilakukan secara periodik tahunan. Dengan memanfaatkan metode pengukuran penerapan GCG yang mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN, Perusahaan dan entitas anak memiliki potensi yang besar untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan serta peningkatan penerapan GCG di setiap tahunnya. Hasil *assessment* tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membukukan skor 92,325 dengan predikat "Sangat Baik". Tak hanya itu, insiasi penilaian penerapan GCG tambahan melalui program lembaga riset/pemeringkat, yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA, akan menambah wawasan Perusahaan dan entitas anak untuk menerapkan prinsip GCG pada level yang berbeda. Untuk penilaian tahun 2021, Perusahaan memperoleh skor 85,15 dengan predikat "Sangat Terpercaya".

PI Group down to its subsidiaries. The Audit Committee also provides recommendations to the Board of Commissioners in the process appointment of a Public Accounting Firm (KAP). GCG Committee and The Risk Management Monitor are tasked with assisting The Board of Commissioners in carrying out its functions and duties general oversight of the Company and giving the advice on the implementation of GCG and Risk Management to the Board of Directors and subordinates.

The Nomination and Remuneration Committee also assists us in validating and calibrating talent proposed for nomination to the Minister, as well as formulating nomination and remuneration policies for the Board of Directors and the Board of Commissioners, and evaluating the proposed Individual KPI of the Board of Directors as well as the Company's organizational structure.

The Board of Commissioners view is that the implementation of GCG within the Company has been running in accordance with the applicable regulations, as well as the expectations of shareholders and stakeholders. Risk management, internal control systems, and internal audits have been carried out with the aim of creating accountable business processes. The Company has also implemented an independent audit process by a public accountant on the Company's financial statements. In order to maintain the independence of the public accountants, the mechanism for appointing public accountants is carried out up to the shareholder approval level at the GMS. This mechanism creates an audit process that is free from conflicts of interest. The audited financial report with the public accountant's opinion forms the basis for this report that reflects the Company's performance that has been adjusted to the applicable financial reporting standards in Indonesia.

The Board of Commissioners appreciates the evaluation and monitoring of GCG implementation carried out on an annual basis. By following the GCG implementation measurement method, which refers to a copy of the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation in SOEs, the Company and its subsidiaries has great potential to continue to evaluate and improve as well as increase the implementation of GCG every year. The 2021 assessment results carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) scored 92,325 with the predicate "Excellent". In addition, through the initiation of additional GCG implementation assessments through research/rating agency programs, namely the Corporate Governance Perception Index (CGPI) organized by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine, adds insight on the Company and its subsidiaries application of GCG principles at different levels. For their 2021 assessment, the Company scored 85.15 with the predicate "Very Trusted".

Melalui keterlibatan Dewan Komisaris dan Direksi atas praktik GCG di lingkup Perusahaan seperti yang telah diuraikan di atas, Dewan Komisaris sungguh berharap agar tata kelola organisasi Perusahaan yang kuat dapat memberikan wadah bagi perkembangan Perusahaan hingga masa-masa yang akan datang, namun tidak hanya predikat saja yang diemban namun praktik-praktik GCG dapat diimplementasikan oleh seluruh insan PI Grup.

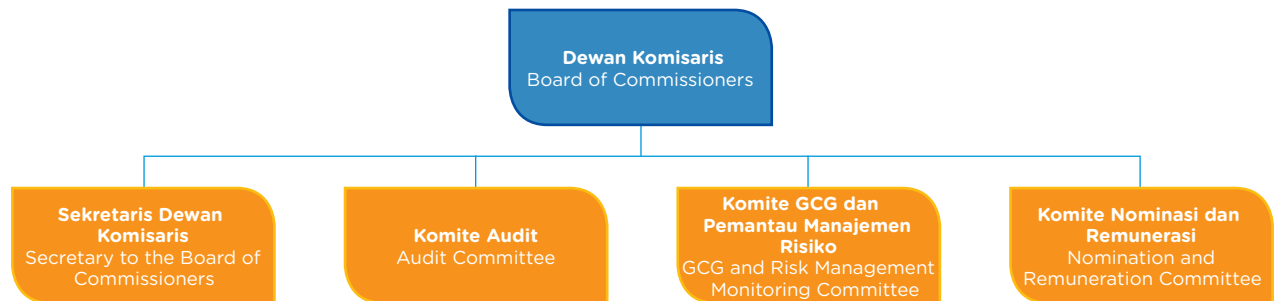
Through the Board of Commissioners and Board of Directors involvement in GCG practices in the Company, the Board of Commissioners sincerely hopes that the Company's strong corporate governance will provide a platform for the Company's future development, not only for this predicate, but also so the GCG practices can be implemented by all PI Group personnel.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris seperti digambarkan pada bagan di berikut ini.

Performance Assessment of Committees Below the Board of Commissioners

As explained above, in carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the GCG and Risk Management Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Secretary to the Board of Commissioners as illustrated in the chart below.



Komite Audit memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan PI Grup hingga ke entitas anak, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan umum atas Perusahaan dan memberikan nasihat dalam penerapan GCG dan Manajemen Risiko kepada Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi merumuskan kebijakan nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan nominasi dan remunerasi. Sedangkan Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas administratif dan menjadi penghubung komunikasi antara Dewan Komisaris dengan *stakeholders*, termasuk komunikasi organisasi antara Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham.

The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in supervising the management of the PI Group to its subsidiaries, as well as providing recommendations to the Board of Commissioners for appointing a Public Accounting Firm (KAP). The GCG and Risk Management Monitoring Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out their general supervisory functions and duties over the Company, and in providing advice on the implementation of GCG and Risk Management to the Board of Directors. Nomination and Remuneration Committee formulate nomination and remuneration policies for the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as supervising on the implementation of nominations and remuneration. Whereas Secretary to the Board of Commissioners has administrative duties and serve as a communication liaison between the Council Commissioner with stakeholders, including communication organization between the Council.

Penilaian atas kinerja organ pendukung didasarkan pada pelaksanaan tugas, baik dalam bentuk rapat untuk menyampaikan rekomendasi, pembahasan materi tertentu, maupun kegiatan reguler yang telah melekat pada fungsi. Selain itu, organ-organ tersebut juga melaksanakan penugasan lain yang berkenaan dengan fungsi Dewan Komisaris.

The performance assessments for these supporting bodies were based on their implementation of duties, either through meetings to submit recommendations, discussions of certain materials, as well as the regular activities attached to the function. In addition, these Bodies also carry out other assignments related to the Board of Commissioners' function.



Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2021 diwujudkan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris baik rapat rutin kinerja bulanan maupun rapat non-rutin; serta membantu konsep surat/korespondensi Dewan Komisaris, menjadi penghubung (*liaison officer*) bagi Dewan Komisaris; serta memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu, selain itu menjalankan fungsi lainnya yang diminta oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

Penilaian kinerja Komite Audit di tahun 2021 direalisasikan melalui program kerja yang telah direncanakan di awal tahun. Di sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melakukan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal; pengawasan kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP); telaah capaian kinerja Perusahaan; perjalanan dinas dalam rangka meninjau langsung lapangan; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Penilaian kinerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko diwujudkan melalui pelaksanaan program yang direncanakan di awal tahun. Komite ini juga telah melakukan pengawasan atas implementasi RKAP dan RJPP, sistem pengendalian internal Perusahaan, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, pengelolaan SDM, pengadaan, mutu dan layanan, pemantauan pengurusan Perusahaan dalam rangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, evaluasi atas Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan KPI individu Direksi, serta perjalanan dinas dalam rangka meninjau langsung lapangan.

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi diwujudkan dengan kontribusinya terkait dengan pengembangan talenta di lingkungan Perusahaan. Komite tersebut merupakan *Talent Committee* untuk Direksi dan BOD1 yang rekomendasinya disampaikan kepada Menteri BUMN melalui Deputi SDM, Teknologi dan Informasi.

Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan dan rekomendasi yang telah diberikan oleh seluruh organ pendukung, Dewan Komisaris memberikan penilaian "Sangat Baik" dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan.

Pandangan atas Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) serta Peran Dewan Komisaris dalam Sistem WBS Perusahaan

Perkembangan praktik GCG tak lepas dari kemampuan Perusahaan untuk menghadirkan proses dan mekanisme GCG yang dapat mewadahi penerapan 5 (lima)

The Secretary to the Board of Commissioners performance appraisal in 2021 was realized during Board of Commissioners meetings, including monthly performance meetings and non-routine meetings; as well as their assistance in the Board of Commissioners' letters/correspondence, serving as a liaison officer for the Board of Commissioners; and providing information needed by the Board of Commissioners on a regular basis or at any time, in addition to carrying out other functions requested by the Board of Commissioners related to the Company's activities.

The Audit Committee performance assessment in 2021 was realized through a work program that was planned at the beginning of the year. Throughout 2021, the Audit Committee reviewed the Internal Audit Unit Inspection Report; supervised the performance of the Public Accounting Firm (KAP); reviewed the Company's performance achievements; organized official trips to directly observe the field; and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding their areas of responsibility.

The GCG Committee and Risk Management Monitoring Committee performance appraisal was realized through the implementation of the program planned at the beginning of the year. This committee also supervised the implementation of the RKAP and RJPP, the Company's internal control system, risk management, information technology systems, HC management, procurement, quality and service, monitored the Company's management compliance with GCG principles, evaluated the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU), and individual KPI of the Board of Directors, as well as organized official trips to directly observe the field.

The Nomination and Remuneration Committee performance appraisal was realized by its contribution to talent development within the Company. The committee acts as a Talent Committee for the Board of Directors and BOD1 whose recommendations are submitted to the Minister of SOEs through the Deputy for HC, Technology and Information.

For the implementation of the duties carried out and the recommendations given by all supporting bodies, the Board of Commissioners would like to give an "Excellent" assessment and express its gratitude for the contributions given.

View on the Management of the Whistleblowing System (WBS) and the Role of the Board of Commissioners in the Company's WBS System

The development of GCG practices increase the Company's ability to present GCG processes and mechanisms that can accommodate the implementation of the 5

prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Salah satu proses atau mekanisme GCG yang cukup penting adalah pemberlakuan Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan pelapor.

Di lingkup PTPI, WBS telah diatur dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Nomor Dokumen PI-TKK-PD-004 Rev.1 tanggal 14 Agustus 2019 dan Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Nomor Dokumen PI-TKK-PR-003 Rev.1 tanggal 14 Agustus 2019. Dalam mengelola WBS PTPI, Kompartemen Tata Kelola Korporat telah ditugaskan sebagai Tim Penanganan Aduan (TPA) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur SDM, Tata Kelola & Manajemen Risiko.

Dalam sistem WBS yang diterapkan Perusahaan, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi berperan untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelaporan yang bersifat eskalatif. Jika pihak terlapor adalah karyawan, penyelesaian laporan dapat dilakukan di tingkat Direksi. Mekanisme WBS juga memungkinkan prosedur pelaporan jika pihak terlapor adalah Direksi, dan bahkan Dewan Komisaris. Jika Direksi menjadi pihak terlapor, Dewan Komisaris memiliki peran untuk menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk melakukan upaya koordinasi dengan pemegang saham. Jika pihak terlapor adalah Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan Karyawan, maka TPA menyerahkan Laporan Hasil Klarifikasi Aduan kepada Direksi.

Di sepanjang tahun 2021 terdapat 715 aduan pelanggaran yang masuk melalui saluran WBS Perusahaan. Dari hasil verifikasi yang dilakukan TPA, hanya 39 pengaduan yang memenuhi syarat dan membutuhkan tindak lanjut.

Dewan Komisaris menyambut baik upaya penguatan WBS Perusahaan, baik melalui sosialisasi secara berkala maupun pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga. Di tahun 2021 PTPI telah melaksanakan kerja sama terkait WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi PI Grup dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tak lepas dari komitmen PTPI untuk mencegah terjadinya fraud, yang juga sejalan dengan aspirasi Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham. Kerja sama semacam ini diharapkan akan semakin memperkuat penerapan WBS di lingkup PTPI, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerapan GCG pada tahapan yang lebih tinggi.

Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah sama.

(five) basic principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. One of the important GCG processes or mechanisms is the Whistleblowing System (WBS). This system is a reporting mechanism that ensures the confidentiality of the whistleblowers.

Within PTPI, WBS is regulated through the WBS Guidelines Document No. PI-TKK-PD-004 Rev.1 dated August 14, 2019, and the WBS Procedures Document No. PI-TKK-PR-003 Rev.1 dated August 14, 2019. In managing the PTPI WBS, the Corporate Governance Compartment has been assigned as the Complaint Handling Team (TPA), which reports directly to the Director of HC, Governance & Risk Management.

In the Company's WBS system, the Board of Commissioners together with the Board of Directors supervise and follow up any escalative reporting. If the reported party is an employee, the report completion is undertaken at the Board of Directors level. The WBS mechanism also allows reporting procedures if the reported party is the Board of Directors, and even the Board of Commissioners. If the Board of Directors becomes the reported party, the Board of Commissioners will follow up on the report, including coordinating efforts with shareholders. If the reported parties are the Board of Commissioners, the Supporting Bodies of the Board of Commissioners, and Employees, then the TPA submits the Complaint Clarification Report to the Board of Directors.

During 2021, there were 715 violations complaints reported through the Company's WBS channel. After verification by the TPA, only 39 complaints met the requirements and were followed-up.

The Board of Commissioners welcomes the efforts to strengthen the Company's WBS, both through regular socialization and the development of cooperation with third parties. In 2021, PTPI's cooperation related to the PI Group's Integrated WBS with the Corruption Eradication Commission (KPK). This reflects PTPI's commitment to preventing fraud, in line with the aspirations of the Ministry of SOEs as the shareholder's proxy. It is hoped that this cooperation will further strengthen the implementation of WBS within PTPI, which in turn will increase the implementation of GCG at a higher stage.

Information on Changes in the Board of Commissioners Composition

During 2021 there were no changes to the Board of Commissioners composition and structure. Thus, the Board of Commissioners composition as of December 31, 2020 and December 31, 2021 were the same.

**Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021**
Board of Commissioners Composition as of December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No. BUMN No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020- GMS held in 2025	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) First (previously never served on the Company's Board of Commissioners)
Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) First (previously never served on the Company's Board of Commissioners)
Anhar Adel	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-280/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019 Ministry of SOEs Decree No. SK-280/MBU/11/2019 dated November 22, 2019	22 November 2019 s.d 9 Januari 2020 November 22, 2019- January 9, 2020	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) First (previously never served on the Company's Board of Commissioners)
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-13/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-13/MBU/01/2020 dated January 9, 2020	9 Januari 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 January 9, 2020-GMS held in 2024	
Bambang Widianto	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020- GMS held in 2025	Ke-1 First
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 First
Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 First
Ari Dwipayana	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 First

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021
Board of Commissioners Composition as of December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Anwar Sanusi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-193/ MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-193/ MBU/06/2018 dated June 8, 2020	8 Juni 2018 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 June 8, 2020- GMS held in 2023	Ke-1 First

Tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sejak 31 Desember 2021 hingga disahkannya laporan tahunan ini. Susunan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi hak dari pemegang saham PTPI, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia.

There have been no changes to the Board of Commissioners composition since December 31, 2021 until the ratification of this annual report. The Board of Commissioners composition is fully the right of PTPI's shareholders, in this case the Government of the Republic of Indonesia.

Apresiasi

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pemerintah Indonesia, kementerian terkait dan seluruh pemangku kepentingan, para investor, serta pelanggan dan mitra usaha atas kerja sama yang telah terjalin. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh karyawan PI Grup atas seluruh dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Semoga PI Grup terus dapat bertumbuh untuk mewujudkan visi dan misinya, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.

Appreciation

The Board of Commissioners would like to thank the Ministry of SOEs as the proxy for the Government of Indonesia as a shareholder, the relevant ministries and all stakeholders, investors, as well as customers and business partners for the cooperation that has been established. The Board of Commissioners would also like to express its appreciation to the Board of Directors and all employees of the PI Group for all the dedication and hard work they have shown. Our hope is that PI Group will continue to grow to realize its vision and mission, which will ultimately provide added value to the shareholders and all stakeholders.

Jakarta, 13 Mei 2022
Jakarta, May 13, 2022

Atas nama jajaran Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero),
On behalf of the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Commissioners,



Darmin Nasution

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT



pt.pupukindonesia



Bakir Pasaman

Direktur Utama
President Director





Optimisme yang disertai dengan kewaspadaan menjadi kunci untuk dapat menghadapi situasi yang masih diliputi ketidakpastian.

Optimism coupled with vigilance is the key to being able to face a situation that is still filled with uncertainty.

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk untuk menjamin ketersediaan pupuk untuk kebutuhan domestik, PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki peran yang besar dalam mata rantai mewujudkan ketahanan pangan Indonesia melalui pemenuhan pupuk bersubsidi. Di saat yang sama, PTPI juga memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dengan memperluas pasar untuk sektor ritel dan komersil. Bersama-sama dengan seluruh entitas anak yang tergabung dalam “PI Grup”, PTPI berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, dan memberikan produk dan layanan yang bermutu yang didasari oleh proses operasi dan bisnis yang berkelanjutan.

Tumbuh di Tengah Tantangan: Inisiatif dan Kebijakan Strategis PTPI

Pengelolaan kegiatan produksi dan penjualan pupuk tak lepas dari kondisi perekonomian baik global maupun nasional, yang berpengaruh terhadap perkembangan pupuk sebagai komoditas. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan dampak berkepanjangan di tahun 2021 tak dapat dipungkiri masih menciptakan kewaspadaan luar biasa. Munculnya varian Delta pada pertengahan tahun 2021 meningkatkan tensi ketidakpastian, meskipun pemulihan perekonomian dan kehidupan sosial terus diupayakan oleh semua pihak.

International Monetary Fund (IMF) melalui jurnal “*World Economic Outlook*” edisi Januari 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 sebesar 5,9%, lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mencatat defisit 3,1%. Indonesia juga turut mencatat pertumbuhan perekonomian yang cukup baik. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tahun 2021 mampu tumbuh 3,69%, jauh di atas capaian tahun 2020 sebesar defisit 2,07%. Pemberlakuan kebijakan PPKM yang lebih fleksibel dan program vaksinasi nasional menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti memberikan dampak positif terhadap menggali kembali perekonomian nasional.

DEAR ESTEEMED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

As a State-Owned Enterprise (SOE) formed to ensure the availability of fertilizer for domestic needs, PT Pupuk Indonesia (Persero) plays a major role in the chain of realizing Indonesian food security through the fulfillment of subsidized fertilizers. At the same time, PTPI also provides added value for shareholders by expanding the market in the retail and commercial sectors. Together with all subsidiaries that are members of the “PI Group”, PTPI is committed to fulfilling these responsibilities, and providing quality products and services based on sustainable business and operational processes.

Growing Amid Challenges: PTPI's Initiatives and Strategic Policies

Management of fertilizer production and sales activities cannot be separated from the global and national economic conditions, which affect the development of fertilizer as a commodity. The COVID-19 pandemic, with its prolonged impact during 2021, created the need for extraordinary vigilance. The emergence of the Delta variant in mid-2021 increased this uncertainty, although all parties continued to strive for economic and social recovery.

The International Monetary Fund (IMF) in their January 2022 journal “*World Economic Outlook*” projected that the world's economic growth in 2021 would be 5.9%, better than the deficit of 3.1% in 2020. Indonesia also recorded quite good economic growth. Citing data from the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy in 2021 would to grow 3.69%, far above the 2020 deficit of 2.07%. The implementation of a more flexible PPKM policy and a national vaccination program demonstrated the Government's commitment to mitigating the impact of the COVID-19 pandemic. The National Economic Recovery Program (PEN) has been proven to have a positive impact on the revival of the national economy.



Di tengah tekanan situasi sosial ekonomi yang masih cukup tinggi, PTPI berupaya mewujudkan inisiatif dari *Strategic Holding* menjadi *Activist Holding* yang telah dicanangkan pada Agustus 2020. Perubahan ini cukup mendasar, di mana sebelumnya kewenangan PTPI sebagai *Strategic Holding* hanya menetapkan kebijakan pada entitas anak, namun sejak perubahan menjadi *Activist Holding*, PTPI memiliki peran menjadi penyelenggara fungsi. Seiring dengan perubahan tersebut, PTPI melakukan sentralisasi sejumlah fungsi, mulai dari pemasaran dan penjualan, distribusi, riset dan pengembangan, teknologi, hingga pengadaan. Kebijakan sentralisasi ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam kegiatan operasional, namun juga memperkuat daya saing Perusahaan.

Untuk itu, PTPI merumuskan program *ad hoc* transformasi bisnis yang disusun selaras dengan pilar strategis *Customer Centric Model*, *R&D and Innovation Driven*, *Excellence in Operation and Supply Chain*, *Feedstock Security and Optimization*, serta *Sustainability and Circular Economy*. Agar ke-5 pilar strategis ini dapat terwujud, PTPI melakukan beberapa inisiatif strategis, yaitu inovasi model bisnis, mewujudkan *World Class Holding Company*, serta transformasi digital. Inovasi model bisnis ditempuh melalui beberapa langkah, seperti strategi *Retail Management* yang mengoptimalkan biaya distribusi dengan memanfaatkan ruang yang belum dimanfaatkan secara maksimal pada gudang di berbagai wilayah di Indonesia serta peningkatan kapasitas gudang maupun standardisasi peralatan dan operasi, meningkatkan produktivitas panen mitra program *Agro Solution* (Makmur) serta meningkatkan penjualan pupuk komersil melalui skema Makmur, *Commercial Transformation* dengan mengembangkan *Customer Centric R&D*, optimalisasi Aset Produksi dan Diversifikasi Usaha (*Adjacent Chemical*), serta dekarbonisasi dengan mendorong fasilitas produksi PI Grup mengurangi emisi gas karbon.

World Class Holding Company ditempuh dengan memperkuat fungsi *Holding* khususnya sentralisasi *Holding* dengan peran PTPI sebagai *Activist Holding*, serta *World Class Human Capital* melalui penguatan organisasi dan pengelolaan *talent*. Transformasi digital juga menjadi perhatian PTPI, yang dikembangkan melalui penguatan *data science* dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan operasional yang lebih tepat dan akurat dengan berbasis data memanfaatkan *analytics*, digitalisasi distribusi dan pergudangan untuk terus memperbaiki tata kelola penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi melalui *Distribution Planning & Control System* (DPCS), *Retail Management* yang dilakukan melalui peningkatan penjualan pupuk ritel dalam negeri melalui program *retail management* dan *agrosolution*, serta *Supply Chain Control Tower* dan *Manufacturing Network Footprint* dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi rantai pasok.

During this high-pressure socio-economic situation, PTPI worked to realize the Strategic Holding to Activist Holding initiative first was launched in August 2020. This change is quite basic, where previously the PTPI authority as Strategic Holding was to only set policies for subsidiaries, with the change to Activist Holding, PTPI will play the role of an organizer of the functions. With this change, PTPI has centralized a number of functions, from marketing and sales, distribution, research and development, technology, to procurement. This centralization policy not only provides efficiencies in operational activities, but also strengthens the competitiveness of the Company.

To that end, PTPI has instigated an *ad hoc* business transformation program that is structured in line with the strategic pillars of Customer Centric Model, R&D and Innovation Driven, Excellence in Operation and Supply Chain, Feedstock Security and Optimization, and Sustainability and Circular Economy. For these 5 strategic pillars to be realized, PTPI undertook several strategic initiatives, including business model innovation, realizing a World Class Holding Company, and digital transformation. The business model innovation was pursued through several steps, including the Retail Management strategy to optimize distribution costs by using unused space in warehouses in various regions in Indonesia, as well as by increasing warehouse capacity and standardizing equipment and operations, to increasing harvest productivity of Agro Solution (Makmur) program partners, and to increase sales of commercial fertilizers through the Makmur scheme, Commercial Transformation by developing Customer Centric R&D, optimization of Production Assets and Business Diversification (Adjacent Chemical), and decarbonization by encouraging the PI Group's production facilities to reduce carbon gas emissions.

Creating a World Class Holding Company is pursued by strengthening the Holding function, especially the centralization of Holding with PTPI's role as Activist Holding, as well as by building a World Class Human Capital through organizational strengthening and talent management. Digital transformation is also a concern for PTPI, which will be developed through strengthening data science to assist the process of making more precise and accurate operational decisions based on data using analytics, digitizing distribution and warehousing to continuously improving distribution governance and supervising subsidized fertilizers through the Distribution Planning & Control System (DPCS). Retail Management is carried out by increasing domestic retail fertilizer sales through retail management and agrosolution programs, as well as through the Supply Chain Control Tower and Manufacturing Network Footprints, in order to increase supply chain effectiveness and efficiency.

Optimalisasi profil keuangan turut dilakukan dalam rangka memperkuat permodalan PI Grup. Di tahun 2021 PTPI berupaya melakukan penyehatan rasio keuangan dengan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2021 dengan total nilai sebesar Rp2,75 Triliun yang terdiri dari 3 (tiga) seri. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 ini berdampak positif terhadap rasio-rasio keuangan serta struktur permodalan Perusahaan. *Debt Service to Coverage Ratio* (DSCR) sebagai rasio yang menggambarkan profitabilitas Perusahaan untuk melunasi pinjaman berbunga jatuh tempo mengalami kenaikan dari 68,84% di tahun 2020 menjadi 278,12% di tahun 2021. Di samping EBITDA yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, turunnya nilai pinjaman berbunga jatuh tempo PTPI berimbas positif pada solvabilitas Perusahaan. Selain itu, *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan profitabilitas Perusahaan untuk menutupi beban bunga pinjaman mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 331,43% di tahun 2020 menjadi 692,53% di tahun 2021. Kenaikan EBITDA dibandingkan tahun sebelumnya yang sejalan dengan penurunan beban bunga akibat penerbitan obligasi memperkuat kemampuan ICR Perusahaan.

Dengan bisnis kelompok usaha PI Grup yang terbagi menjadi 3 (tiga) segmen, yaitu segmen pupuk dan amoniak, segmen jasa konstruksi, serta segmen usaha lain-lain, di tahun 2021 segmen pupuk dan amoniak yang merupakan bisnis inti PI Grup dengan kontribusi mencapai 98,08% terhadap total penjualan dan pendapatan usaha lainnya mampu tumbuh dengan cukup baik. Segmen ini membukukan pendapatan sebesar Rp77,09 Triliun, meningkat 19,26% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp64,64 Triliun; serta laba bersih tahun berjalan pada segmen ini mencapai Rp9,66 Triliun, tumbuh hingga 162,23% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,68 Triliun.

Pertumbuhan segmen pupuk dan amoniak tak lepas dari kinerja produksi dan penjualan pupuk dan amoniak. Realisasi produksi pupuk dan amoniak PI Grup di tahun 2021 mencapai 19.524.990 Ton, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 19.382.252 Ton. Di sisi lain, total volume penjualan pupuk dan amoniak sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14.358.809 Ton di tahun 2020 menjadi 14.172.180 di tahun 2021 karena adanya penyesuaian volume dan administrasi pupuk bersubsidi. Tingginya harga jual urea dan amoniak di pasar global memberikan dampak positif terhadap nilai penjualan urea dan amoniak PTPI di sektor komersil.

Optimizing the financial profile has been carried out to strengthen the capital of the PI Group. In 2021, PTPI improved its financial ratios by conducting a Public Offering of the 2021 Pupuk Indonesia Phase II Sustainable Bonds on March 10, 2021 with a total value of Rp2.75 Trillion in 3 (three) series. The issuance of the 2021 Pupuk Indonesia Sustainable Bonds II Phase II had a positive impact on the financial ratios and the Company's capital structure. The Debt Service to Coverage Ratio (DSCR), a ratio that shows the Company's profitability to pay off interest-bearing loans, increased from 68.84% in 2020 to 278.12% in 2021. In addition to the increase in EBITDA compared to the previous year, the decline in the value of PTPI's interest-bearing loans had a positive impact on the Company's solvency. In addition, the Interest Coverage Ratio (ICR), a ratio that shows the ability of the Company's profitability to cover loan interest expenses, increased quite significantly, from 331.43% in 2020 to 692.53% in 2021. The increase in EBITDA compared to the previous year, in line with the decrease in interest expense due to the issuance of bonds, strengthened the Company's ICR capability.

The PI Group business groups are divided into 3 (three) segments, namely the fertilizer and ammonia segment, the construction services segment, and other business segment. In 2021 the fertilizer and ammonia segment, the core business of the PI Group, contributed 98.08% of total sales, and other operating revenues also grew quite well. This segment's revenue was Rp77.09 Trillion, an increase of 19.26% compared to Rp64.64 Trillion the previous year; and net profit for the year in this segment reached Rp9.66 Trillion, a growth of 162.23% compared to Rp3.68 Trillion in 2020.

The growth in the fertilizer and ammonia segment was due to the fertilizer and ammonia production and sales performance. The PI Group fertilizer and ammonia production in 2021 reached 19,524,990 Tons, an increase of 19,382,252 Tons from the previous year. However, the total fertilizers and ammonia sales were slightly lower than the previous year, from 14,358,809 Tons in 2020 to 14,172,180 in 2021 due to volume adjustments and administration of subsidized fertilizers. The high selling price of urea and ammonia in the global market had a positive impact on PTPI's urea and ammonia sales in the commercial sector.



Namun pada segmen jasa konstruksi justru mendapatkan kendala yang cukup berarti. Pendapatan bersih segmen bidang usaha *Engineering, Procurement & Construction* (EPC) ini mengalami penurunan signifikan sebesar 59,28%, dengan rugi bersih yang dibukukan di tahun 2021 sebesar Rp3,71 Triliun, meningkat dibandingkan rugi bersih tahun sebelumnya yang sebagian besar dari potensi denda akibat keterlambatan penyelesaian beberapa proyek dengan total nilai sebesar Rp1,32 Triliun.

Sedangkan segmen lain-lain yang diperoleh dari entitas anak yang bergerak pada bidang usaha perdagangan umum, jasa pelayaran dan jasa angkutan laut, jasa non EPC, jasa bidang energi, mencatat kinerja yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan bersih dari segmen lain-lain mampu tumbuh hingga 82,25%, sedangkan laba bersih tahun berjalan dari segmen ini mencatat kenaikan signifikan hingga 219,64% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan capaian kinerja operasi di atas, PTPI membukukan penjualan dan pendapatan usaha lainnya tahun 2021 sebesar Rp78,60 Triliun, meningkat 9,36% dibandingkan penjualan dan pendapatan usaha lainnya tahun 2020 sebesar Rp71,88 Triliun. Laba tahun berjalan tahun 2021 tercatat sebesar Rp5,13 Triliun, tumbuh hingga 120,79% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp2,33 Triliun. Kinerja apik dari segmen pupuk dan amoniak memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja PTPI secara keseluruhan.

Pada posisi keuangan, total aset Perusahaan di akhir tahun 2021 sebesar Rp128,55 Triliun, meningkat 4,87% dari tahun sebelumnya sebesar Rp122,49 Triliun. Pertumbuhan total aset PTPI terutama disebabkan meningkatnya kas dan setara kas sebagai bagian dari penguatan arus kas dan permodalan Perusahaan. Sedangkan total liabilitas di akhir tahun 2021 sebesar Rp56,52 Triliun, meningkat 2,52% dari tahun sebelumnya sebesar Rp55,13 Triliun. Meningkatnya liabilitas Perusahaan tak lepas dari penerbitan obligasi yang dilakukan PTPI. Untuk total ekuitas di akhir tahun 2021 sebesar Rp71,94 Triliun, meningkat 6,79% dari tahun sebelumnya sebesar Rp67,36 Triliun.

Pencapaian Target Tahun 2021

Di setiap awal tahun Perusahaan merumuskan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Target ini menjadi bagian dari pemantauan kinerja Perusahaan dan pencapaian manajemen dalam melakukan pengelolaan kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan. Berikut cakupan dan penjelasan pencapaian realisasi beberapa bidang terhadap target yang telah tertuang dalam RKAP Perusahaan tahun 2021.

However, in the construction services segment, there were quite significant obstacles. The Engineering, Procurement & Construction (EPC) business segment net revenue saw a significant decrease of 59.28%, with a net loss recorded in 2021 of Rp3.71 Trillion, an increase compared to the previous year's net loss, mostly due to potential fines due to delays in the completion of several projects with a total value of Rp1.32 Trillion.

Meanwhile, other segments in the subsidiaries engaged in general trading business, shipping and sea transportation services, non-EPC services, energy services, recorded a good performance compared to the previous year. Net income from other segments grew by 82.25%, while net revenue for the year from this segment recorded a significant increase of 219.64% compared to the previous year.

Following the above operating performance achievements, PTPI recorded sales and other operating revenues in 2021 of Rp78.60 Trillion, an increase of 9.36% compared to Rp71.88 Trillion in 2020. Profit for the year in 2021 was Rp5.13 Trillion, up by 120.79% from Rp2.33 Trillion in 2020. The good performance of the fertilizer and ammonia segment contributed greatly to PTPI's overall performance.

In terms of financial position, the Company's total assets at the end of 2021 stood at Rp128.55 Trillion, an increase of 4.87% from the previous year's Rp122.49 Trillion. The growth in PTPI's total assets was mainly due to an increase in cash and cash equivalents as part of strengthening of the Company's cash flow and capital. Meanwhile, total liabilities at the end of 2021 stood at Rp56.52 Trillion, an increase of 2.52% from the previous year's Rp55.13 Trillion. The increase in the Company's liabilities was due to the issuance of bonds by PTPI. Total equity at the end of 2021 was Rp71.94 Trillion, an increase of 6.79% from the previous year's Rp67.36 Trillion.

Achievement of Targets in 2021

At the beginning of each year, the Company establishes performance targets that are stated in the Company's Work Plan and Budget (WP&B). These targets are used for monitoring the Company's performance and management's achievements in managing the Company's operations and business activities. The following explains the scope and realization in several fields against the targets set in the Company's WP&B 2021.

Bidang Produksi

Realisasi produksi pupuk tahun 2021 mencapai 12.236.101 Ton atau 100,02% terhadap target RKAP tahun 2021. Sedangkan realisasi produksi amoniak tahun 2021 mencapai 6.149.670 Ton atau 104,78% terhadap target RKAP. Tercapainya target produksi baik untuk produk pupuk maupun amoniak disebabkan pabrik dapat beroperasi optimal dengan *rate* yang cukup tinggi.

Bidang Penjualan

Realisasi volume penjualan pupuk tahun 2021 mencapai 12.912.170 Ton atau 99,06% terhadap target RKAP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36 tanggal 15 November 2021, target PSO mengalami penyesuaian dari sebelumnya 9.041.475 Ton menjadi 8.776.846 Ton sehingga total pencapaian volume pupuk menjadi 101,11%.

Realisasi volume penjualan konsolidasi amoniak tahun 2021 mencapai 988.317 Ton atau 126,94% terhadap RKAP dan 124,57% terhadap realisasi tahun 2020.

Bidang Keuangan

Kinerja keuangan juga menunjukkan pencapaian yang baik. EBITDA tahun 2021 mencatat realisasi sebesar Rp14,18 Triliun, atau 117,7% dibandingkan target RKAP sebesar Rp12,05 Triliun. Pencapaian EBITDA ini dipengaruhi oleh pendapatan PTPI yang membukukan pencapaian yang baik di tahun 2021. Laba bersih juga mencatat pencapaian kinerja yang cukup baik, dengan realisasi tahun 2021 sebesar 165,35% terhadap target RKAP. Keberhasilan pencapaian laba bersih ini didorong oleh beberapa faktor, baik pencapaian volume penjualan produk komersil, rendahnya beban keuangan akibat rata-rata bunga pinjaman perbankan yang rendah, pertumbuhan marjin dari penjualan produk komersil, serta kenaikan bagian laba bersih dari entitas asosiasi.

Sedangkan arus kas dari aktivitas operasi membukukan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp14,52 Triliun, jauh di atas target RKAP atau sebesar 180,0% dibandingkan target RKAP tahun 2021 sebesar Rp8,06 Triliun. Tingginya pencapaian arus kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan penerimaan dari subsidi Pemerintah Indonesia yang tertunda yang baru dibayarkan di tahun 2021. Selain itu, rasio *Debt to EBITDA* memberikan gambaran yang baik ke arah pengelolaan permodalan serta profitabilitas PTPI. Realisasi rasio *Debt to EBITDA* tahun 2021 sebesar 2,2 kali, atau hanya 62,9% dibandingkan target RKAP sebesar 3,5 kali. Keberhasilan PTPI untuk menekan rasio ini tak lepas dari pelunasan kewajiban yang dilakukan di tahun 2021 seiring dengan kinerja EBITDA yang membukukan pencapaian yang baik.

Production Sector

Fertilizer production in 2021 reached 12,236,101 Tons or 100.02% of the 2021 WP&B target. Meanwhile, ammonia production in 2021 reached 6,149,670 Tons or 104.78% of the WP&B target. The achievement of the production targets for both fertilizer and ammonia products was due to the factories being able to operate optimally at a fairly high rate.

Sales Sector

Fertilizer sales in 2021 reached 12,912,170 Tons or 99.06% of the WP&B target. Based on the Minister of Agriculture Regulation No. 36 dated November 15, 2021, the PSO target was adjusted from the previous 9,041,475 Tons to 8,776,846 Tons, bringing the total fertilizer volume achievement to 101.11%.

The consolidated sales of ammonia in 2021 reached 988,317 Tons or 126.94% of the WP&B and 124.57% of the realization in 2020.

Finance Sector

Financial performance also delivered good achievements. EBITDA in 2021 reached Rp14.18 Trillion, or 117.7% compared to the WP&B target of Rp12.05 Trillion. This was due to PTPI's revenue recording a good achievement in 2021. Net profit also recorded a fairly good performance, with the realization in 2021 achieving 165.35% of the WP&B target. The success of this net profit achievement was driven by several factors, including the commercial product sales volume, lowering the financial costs due to low average bank loan interest, margin growth from commercial product sales, as well as an increase in the net profit share from associates.

Cash flow from operating activities in 2021 was Rp14.52 Trillion, 180.0% above the 2021 WP&B target of Rp8.06 Trillion. This high achievement was mainly due to receipts from the outstanding Indonesian Government subsidies only being paid in 2021. The Debt to EBITDA ratio also provides a good picture of PTPI's capital management and profitability. The Debt to EBITDA ratio in 2021 was 2.2 times, only 62.9% of the WP&B target of 3.5 times. PTPI's success in reducing this ratio was due to the settlement of obligations in 2021 thanks to the good EBITDA performance achievements.



Kendala dan Tantangan yang Dihadapi dan Solusinya

Di sepanjang tahun 2021 terdapat sejumlah isu yang mempengaruhi kinerja Perusahaan, di antaranya adalah:

1. Tingginya harga komoditas bahan baku pupuk NPK internasional sehingga mempengaruhi kenaikan biaya produksi pupuk NPK.
2. Keterlambatan penyelesaian proyek-proyek yang dikerjakan oleh entitas anak di segmen Jasa Konstruksi.
3. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya berpotensi mempengaruhi kinerja PI Group, khususnya pada segmen jasa.

Untuk itu PTPI melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi dinamika harga bahan baku NPK dengan melakukan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

1. Melakukan pengamanan kontrak jangka panjang untuk bahan baku berbasis fosfat untuk kebutuhan produksi NPK.
2. Melakukan produksi bahan baku DAP untuk kebutuhan produksi NPK.

Untuk mengantisipasi dampak atas keterlambatan proyek-proyek yang di kerjakan oleh Entitas Anak, PTPI berupaya melakukan restrukturisasi keuangan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan entitas anak sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan.

Kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan dinamika politik dan ekonomi global membuat PTPI menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi lonjakan harga dan keterbatasan pasokan bahan baku. PTPI tetap optimistis dengan kemampuan kelangsungan usaha ke depan. Keyakinan itu, antara lain didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki serta kemampuan operasi yang *excellent*. PTPI tidak melihat adanya dampak yang signifikan dan material dari kendala yang ditemui di tahun 2021 yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Prospek Usaha Tahun 2022

Di tahun 2022, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan akan tumbuh dengan kisaran 3,6-4,0%. Adanya pabrik pupuk baru di Nigeria, Rusia dan Brunei dan sejumlah besar kapasitas substitusi impor di India yang dijadwalkan beroperasi pada akhir tahun 2021 akan mendorong penambahan kapasitas 9,5 juta Ton per tahun (tidak termasuk Tiongkok). Meskipun waktu operasi komersil untuk pabrik-pabrik ini masih belum pasti, terutama mengingat pembatasan pergerakan yang sedang berlangsung akibat pandemi COVID-19, namun peningkatan kapasitas baru yang signifikan diharapkan akan terjadi pada awal tahun 2022.

Obstacles and Challenges Faced and Their Solutions

Throughout 2021 there were a number of issues that affected the Company's performance, including:

1. High international commodity prices for raw materials for NPK fertilizers this affected the increase in production costs for NPK fertilizers.
2. Delays in completion of projects undertaken by subsidiaries in the Construction Services segment.
3. The COVID-19 pandemic that has not yet fully recovered with the potential to impact the PI Group performance, particularly in the service segment.

To address these, PTPI instigated a number of efforts to overcome the dynamics of the NPK raw materials price by taking the following initiatives:

1. Securing long-term contracts for phosphate-based raw materials for NPK production needs.
2. Producing DAP raw materials for NPK production needs.

To anticipate the impact of delays in projects carried out by Subsidiaries, PTPI conducted financial restructuring to improve the financial condition of subsidiaries so that the projects could be completed.

The recovery conditions after the COVID-19 pandemic, and the dynamics of global politics and economics, forced PTPI to apply the precautionary principle in anticipating price spikes and limited supply of raw materials. PTPI remains optimistic about its ability to continue its business going forward. This belief is supported by its human capital and excellent operating capabilities. PTPI does not see any significant and material impact from the obstacles encountered in 2021 that could affect business continuity.

Business Prospects for 2022

In 2022, the agriculture, forestry and fisheries sectors projected to grow in the range of 3.6-4.0%. The presence of new fertilizer plants in Nigeria, Russia and Brunei, and the large import capacity in India slated to be operational by the end of 2021, will encourage an additional capacity of 9.5 million Tons per year (excluding China). Although the commercial operational times for these factories is still uncertain, especially given the ongoing restrictions due to the COVID-19 pandemic, a significant new capacity increase is expected in early 2022.

Di samping itu, konflik antara Rusia dan Ukraina berimbas pada volatilitas komoditas dunia. Harga minyak dunia akan mengalami kenaikan, di mana Rusia merupakan produsen minyak mentah terbesar ke-3 di dunia. Dengan posisi negara-negara Eropa Timur sebagai pemasok kebutuhan global terkait DAP dan MOP (KCI) serta penghasil bahan pangan terbesar dunia tentunya akan berdampak terhadap pasokan bahan baku pupuk khususnya NPK serta komoditas pangan.

Untuk itu, Perusahaan memproyeksikan peningkatan total produksi tahun 2022 dibandingkan realisasi tahun 2021, terutama peningkatan produksi pada pabrik Urea, SP-36 dan Asam Fosfat. Sedangkan penjualan produk pupuk dan non-pupuk secara keseluruhan diproyeksikan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021, khususnya pada penjualan pupuk subsidi. Adanya kenaikan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2022 membuat PTPI berupaya untuk menjaga kestabilan posisi stok dengan menyesuaikan penjualan pupuk di sektor non-subsidi. Selain itu di tahun 2022, PTPI menjaga alokasi penjualan untuk mempertahankan agar penjualan pupuk di sektor non-subsidi tetap tinggi.

Pendapatan PTPI di tahun 2022 diproyeksikan lebih rendah dari realisasi tahun 2021, demikian juga dengan laba bersih tahun berjalan. Peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi yang menyesuaikan dengan alokasi baru yaitu sebesar 9,1 juta Ton pada tahun 2022, meningkat dari alokasi pada tahun 2021 sebesar 7,9 juta Ton sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berlaku pada tanggal 29 Desember 2021, berdampak pada lebih rendahnya target pupuk non subsidi yang memiliki margin lebih tinggi. Meskipun demikian, PTPI berkomitmen untuk tetap menjaga ketersediaan pupuk dalam rangka ketahanan pangan. Di samping itu, asumsi harga jual Urea dan Amoniak di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2021 yang terutama disebabkan harga jual Urea dan Amoniak yang melonjak tinggi di tahun 2021 dan diantisipasi akan mengalami normalisasi sesuai dengan tren yang terjadi pada tahun 2008. Sedangkan posisi keuangan di tahun 2022 diproyeksikan lebih rendah sejalan dengan turunnya liabilitas jangka pendek Perusahaan.

Secara khusus PTPI akan berupaya melakukan upaya penyehatan keuangan pada entitas anak di segmen Jasa Konstruksi melalui beberapa inisiatif yang akan dijalankan di tahun 2022 yang akan memperkuat kondisi keuangan dan perbaikan proses bisnis. Agar solusi penyehatan keuangan dapat tepat sasaran, PTPI menunjuk pihak independen untuk memberikan saran atas langkah-langkah solutif yang efektif dan efisien.

In addition, the conflict between Russia and Ukraine give an impact on the volatility of world commodities. World oil prices will have increased, where Russia is the 3rd largest producer crude oil in the world. With position Eastern European countries as suppliers of necessities globally related to DAP and MOP (KCI) and material producers The world's largest food industry will certainly have an impact on the supply of fertilizer raw materials, especially NPK and food commodities.

For this reason, the Company projects an increase in total production in 2022 compared to the realization in 2021, especially increased production at the Urea, SP-36 and Phosphoric Acid factories. Meanwhile, sales of fertilizer and non-fertilizer products as a whole are projected to increase compared to the realization in 2021, especially in the sales of subsidized fertilizers. The increase in the allocation of subsidized fertilizer distribution by the Government of Indonesia in 2022 means PTPI will have to maintain a stable stock position by adjusting fertilizer sales in the non-subsidized sector. In addition, in 2022, PTPI will maintain sales allocations to maintain high fertilizer sales in the non-subsidized sector.

PTPI's revenue in 2022 is projected to be lower than the realization in 2021, along with net profit for the year. The increase in the distribution of subsidized fertilizers in line with the new allocation will be 9.1 million Tons in 2022, an increase from the allocation in 2021 of 7.9 million Tons in line with Minister of Agriculture Regulation No. 41 of 2021 concerning the Determination of Allocation and HET for Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector, which took effect on December 29, 2021. This will result in a lower target for non-subsidized fertilizers with higher margins. Nevertheless, PTPI is committed to maintaining the availability of fertilizers in the context of food security. In addition, the assumed selling price of Urea and Ammonia in 2022 will decrease compared to the realization in 2021, mainly due to the high selling price of Urea and Ammonia in 2021, and is anticipated to only normalize to the trend that occurred in 2008. Meanwhile, the financial position in 2022 is projected to be lower in line with the decrease in the Company's short-term liabilities.

In particular, PTPI will instigate efforts to improve the financial health of its subsidiaries in the Construction Services segment through initiatives to be implemented in 2022 to strengthen their financial condition and improve their business processes. For the financial restructuring solution to be right on target, PTPI has appointed an independent party to provide advice on effective and efficient solution steps.



Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai BUMN sekaligus sebagai *Holding* Sektor Pupuk, Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan dilakukan mulai dari pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui perangkat kebijakan serta pembentukan organ-organ GCG, pengelolaan hubungan kerja antara organ GCG yang tertuang dalam prosedur dan mekanisme GCG, hingga internalisasi dan evaluasi atas kemajuan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan.

Corporate Governance Implementation Development

As a SOE, as well as the Holding Company for the Fertilizer Sector, the Company has an obligation to implement Good Corporate Governance (GCG) by applying the 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Implementation starts with compliance of applicable laws and regulations through policy instruments and the establishment of GCG bodies, managing the working relationships between the GCG bodies as contained in GCG procedures and mechanisms, through to internalizing and evaluating the progress of implementing GCG principles within the Company.



Keberadaan 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Anggaran Dasar Perusahaan. Kemitraan strategis melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan seluruh organ pendukungnya berdampak positif pada pengelolaan Perusahaan hingga menjadi lebih berimbang. Meskipun dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia, Perusahaan memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan RUPS sebagai forum bagi pemegang saham untuk dapat mengambil keputusan strategis. Penyelenggaraan RUPS turut mendorong praktik penerapan prinsip GCG yang berlandaskan pada pemenuhan hak pemegang saham sebagai salah satu pemangku kepentingan Perusahaan.

The 3 (three) main bodies include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, in accordance with the 2007 Law No. 40 concerning Limited Liability Companies, as well as the Company's Articles of Association. Strategic supervision partnerships carried out by the Board of Commissioners and all supporting bodies have had a positive impact on the Company management so that it becomes more balanced. Even though it is 100% owned by the Government of Indonesia, the Company fulfills its obligation to hold the GMS as a forum for shareholders to make strategic decisions. The holding of the GMS also encourages the practice of implementing GCG principles based on the fulfillment of the shareholders' rights as one of the Company's stakeholders.

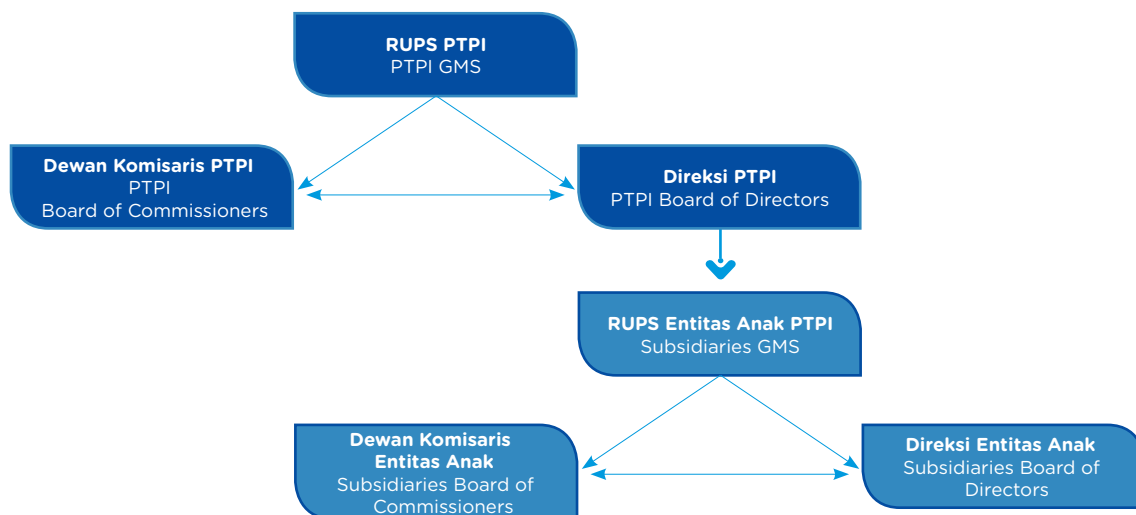
Prosedur dan mekanisme GCG juga telah dikembangkan sejalan dengan standar yang berlaku yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Pedoman-pedoman hingga *Standard Operational Procedure (SOP)* atau Prosedur Tetap telah dikembangkan dan diperbaharui untuk dapat memwadahi kebutuhan akan pengembangan operasi yang adil di lingkup Perusahaan. Termasuk manajemen risiko dan pengendalian internal yang berfungsi memberikan pendeteksian dini atas kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi Perusahaan.

Agar penerapan GCG di lingkup PI Grup dapat berjalan selaras dan memiliki standarisasi, Perusahaan memberlakukan Tata Kelola Perusahaan PI Grup sebagai desain GCG kelompok usaha yang mengatur berbagai hal pokok dalam hubungan keorganisasian antara PTPI sebagai *Holding* dan entitas anak sebagai Anggota *Holding*.

GCG procedures and mechanisms have also been developed in line with applicable standards that have been adapted to the needs of the Company. Standard Operational Procedure (SOP) Guidelines have been developed and updated to accommodate the need for fair operation development within the Company, and includes risk management and internal control, functions that provide early detection of possible risks faced by the Company.

For the implementation of GCG in the PI Group to run in harmony and have standardization, the Company applies the Good Corporate Governance of the PI Group as the business group's GCG design that regulates the main matters in the organizational relationship between PTPI as Holding and subsidiaries as Holding Members.

Desain Tata Kelola Perusahaan PI Grup PI Group Corporate Governance Design



Desain ini mengatur berbagai prinsip dasar dalam struktur GCG PI Grup. Dari bagan di atas, dapat terlihat bahwa setiap entitas anak merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki struktur organ GCG yang mandiri dari struktur GCG Perusahaan. Namun demikian, RUPS entitas anak menjadi forum bagi PTPI untuk melakukan berbagai keputusan strategis bagi entitas anak. Berbagai hal diatur dalam desain GCG PI Grup, termasuk hak dan wewenang masing-masing organ serta hubungan organ induk dengan organ entitas anak.

Transparansi informasi kepada pemegang saham juga menjadi perhatian manajemen. Perusahaan menyadari transparansi informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan keberlanjutan dari dunia usaha yang ditopang oleh keterikatan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan tidak langsung. Transparansi informasi yang komprehensif juga dilakukan melalui penyajian Laporan Keuangan Teraudit, yang telah melalui proses

This design lays out the basic principles in the PI Group GCG structure. The chart above shows that each subsidiary is a separate legal entity with a GCG structure that is independent from the Company's GCG structure. However, the subsidiaries' GMS are the forum for PTPI to make strategic decisions for the subsidiaries. Other areas regulated in the PI Group GCG design include the rights and authorities of each body, and the relationship between the parent body and the subsidiary bodies.

Transparency of information to shareholders is also a concern for management. The Company understands that information transparency is an inseparable part of the sustainable development of a business world supported by the stakeholders' involvement in the indirect monitoring process. Comprehensive information transparency is also carried out through the presentation of the Audited Financial Statements, which have gone through an



audit independen oleh akuntan publik. Penunjukan akuntan publik juga telah melalui rangkaian mekanisme berjenjang, yang melibatkan pemegang saham melalui RUPS. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi akuntan publik, yang pada akhirnya akan memberikan opini yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Evaluasi dan pemantauan terhadap pengukuran penerapan GCG juga dilakukan secara periodik tahunan. Dalam pelaksanaannya, *assessment* terkait penerapan GCG dalam lingkungan Perusahaan dilakukan oleh pihak independen maupun *self assessment* yang dilakukan tim internal, yang hasilnya akan menjadi rujukan dalam evaluasi dan masukan bagi perbaikan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan. Sebagai BUMN, metode pengukuran penerapan GCG mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN. Metode ini dikembangkan melalui alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek Lainnya.

Hasil *assessment* tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membukukan skor 92,325 dengan predikat "Sangat Baik". Tak hanya itu, *assessment* penerapan GCG melalui Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 juga dilakukan kepada 10 entitas anak yang langsung dimiliki oleh PTPI.

Di samping *assessment* penerapan GCG di atas, PTPI bersama 3 (tiga) entitas anak yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melakukan insiasi penilaian penerapan GCG tambahan melalui program lembaga riset/pemeringkat, yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA. Untuk penilaian tahun 2021, PTPI memperoleh skor 85,15 dengan predikat "Sangat Terpercaya". Seluruh penilaian penerapan GCG memberikan masukan berarti bagi PI Grup untuk melakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan penerapan GCG di tahun-tahun berikutnya.

independent audit process by a public accountant. The appointment of a public accountant also goes through a series of tiered mechanisms, involving shareholders through the GMS. This is to maintain the independence of public accountants, who will provide an opinion in accordance with the provisions of the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

GCG implementation evaluation and monitoring is also assessed on an annual basis. In practice, the GCG implementation assessment within the Company is carried out by an independent party, as well as through self-assessments conducted by an internal team, the results of which will become a reference for improving the application of GCG principles within the Company. As a SOE, the method of assessing GCG implementation refers to the Copy of the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation in SOEs. This method was developed by measuring 6 (six) aspects, including: Commitment to Good Corporate Governance Implementation in a Sustainable manner; Shareholders and GMS/Capital Owners; Board of Commissioners/Supervisory Board; Board of Directors; Information Disclosure and Transparency; and Other Aspects.

The 2021 assessment results carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) scored 92,325 with the predicate "Excellent". GCG implementation assessments, based on the copy of the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012, were also made at 10 subsidiaries directly owned by PTPI.

In addition to the above GCG implementation assessments, PTPI together with 3 (three) subsidiaries, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang initiated an additional GCG implementation assessment method through a research/rating institution program, called the Corporate Governance Perception Index (CGPI). This is organized by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with Majalah SWA. For the 2021 assessment, PTPI scored of 85.15 with the predicate "Very Trusted". All GCG implementation assessments provide meaningful input for the PI Group to evaluate, improve and enhance the GCG implementation over the following years.

Keberhasilan PTPI dalam menjaga kinerja penerapan GCG tak lepas dari komitmen kuat manajemen dalam melembagakan penerapan GCG pada struktur organisasi Perusahaan. Manajemen telah membentuk Departemen Tata Kelola & Kepatuhan yang berada di bawah Kompartemen Sekretaris Perusahaan dan berada langsung di bawah Direktur Utama dan di bawah koordinasi Direktur SDM, Tata Kelola & Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam penerapan GCG di lingkup PTPI. Penyempurnaan atas Departemen Tata Kelola & Kepatuhan terus dilakukan, terakhir melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/004/2021 tanggal 7 Januari 2021. Selain itu, di tahun 2021 PTPI melakukan internalisasi atas ISO 37002:2021 tentang *Whistleblowing Management System* (WMS) yang diharapkan akan memperkuat *Whistleblowing System* (WBS) yang telah dimiliki Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Manajemen menyadari, kemajuan serta keberhasilan kinerja PI Grup tak lepas dari dampak lingkungan dan sosial yang timbul atas kegiatan produksi dan penjualan pupuk. Dampak, atau akibat yang muncul dari kegiatan usaha, telah menjadi faktor yang diperhitungkan PI Grup dalam seluruh skema operasi dan bisnis yang dikembangkannya; baik itu akibat atau imbas yang terjadi, maupun pemangku kepentingan yang memiliki kaitan dengan dampak yang muncul dari kegiatan yang dilakukan Perusahaan dan seluruh entitas anak.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* ("CSR"), atau disebut juga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta berbagai peraturan dan perundang-undangan lainnya yang mengikat PI Grup dalam melakukan kegiatan operasi dan usahanya. Selain itu, pelaksanaan program TJSL oleh Perusahaan dilakukan melalui pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia.

Perusahaan juga melakukan uji tuntas melalui pemetaan sosial atas dampak dan risiko dari kegiatan operasi dan usaha yang dijalankan, yang dilakukan dengan memetakan kebutuhan pemangku kepentingan yang terkait dalam

PTPI's success in maintaining the GCG implementation performance is thanks to the strong commitment of management in institutionalizing the GCG implementation in the Company's organizational structure. Management has established a Governance & Compliance Department, under the Corporate Secretary Compartment, and directly under the President Director under the coordination of the Director of HC, Governance & Risk Management, who is responsible for implementing GCG within PTPI. Improvements to the Governance & Compliance Department are continuously being made, most recently through the Board of Directors Decree No. SK/DIR/004/2021 dated January 7, 2021. In addition, in 2021 PTPI internalized ISO 37002:2021 in the Whistleblowing Management System (WMS), which is expected to strengthen the Company's Whistleblowing System (WBS).

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development

Management realizes that PI Group's performance progress and success cannot ignore the environmental and social impacts arising from the production and sale of fertilizers. PI Group has taken the impacts and consequences arising from our business activities, into account in all operating and business schemes developed; whether it is the result, or the impact that occurs; as well as the stakeholders related to the impact that arises from the activities carried out by the Company and all subsidiaries.

The implementation of Corporate Social Responsibility ("CSR"), or Social and Environmental Responsibility ("SER") is based on compliance with the prevailing laws and regulations in Indonesia, including the 2007 Law No. 40 concerning Limited Liability Companies, the 2009 Law No. 32 concerning Environmental Protection and Management, and the 2012 Government Regulation No. 47 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, and other laws and regulations that bind PI Group in conducting its operations and business activities. In addition, the Company's CSR programs are carried out through the fulfillment of Indonesia's Sustainable Development Goals (SDGs).


The Company also conducts due diligence through social mapping of the impacts and risks of its operations and business activities. This is carried out by mapping the needs of stakeholders involved in the chain of operations

rantai kegiatan operasi dan usaha serta potensi dampak dan risiko dari hubungan Perusahaan dengan masing-masing pemangku kepentingan. Uji tuntas ini merupakan komitmen Perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang mempersyaratkan adanya kebijakan yang terencana dalam memetakan hubungan pelaku usaha dengan pemangku kepentingan serta dampak dan risiko dari kegiatan operasi dan usaha.

and business activities, as well as the potential impacts and risks of the Company's relationship with each stakeholder. This due diligence is the Company's commitment to realizing sustainable development, which requires a planned policy for mapping the relationship between the businesses and stakeholders, as well as the impacts and risks of operating and business activities.

Fokus Program TJSL PTPI

PTPI SER Program Focus



Berkaitan dengan Alam

PTPI berusaha melakukan kegiatan seperti penghijauan dan menciptakan pelestarian lingkungan.

Related to Nature

PTPI strives to carry out activities such as reforestation and creating environmental conservation.



Berkaitan dengan Kesejahteraan

PTPI berusaha melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan baik di internal maupun eksternal Pupuk Indonesia.

Related to Welfare

PTPI carries out activities to improve welfare, both internally and externally.



Berkaitan dengan Masyarakat

PTPI berusaha melakukan kegiatan yang berdampak pada kehidupan sosial yang lebih baik.

Related to the Community

PTPI carries out activities that have an impact on a better social life.



Berkaitan dengan Ekonomi

PTPI berusaha melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan laba Perusahaan yang akhirnya dapat menunjang ekonomi negara dan membantu peningkatan indeks perekonomian.

Related to the Economy

PTPI carries out activities to increase profits that supports the country's economy and helps increase the economic index.

Pada lingkup pengelolaan lingkungan hidup, Perusahaan bersama seluruh entitas anak melakukan berbagai upaya pemantauan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari proses kimia dalam produksi pupuk. PI Grup melakukan pemetaan Indikator Pilar Pembangunan Lingkungan, yang mencakup air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang program kegiatan dalam aspek PROPER yang menjawab Tujuan SDGs khususnya Pilar Pembangunan Lingkungan. Per 31 Desember 2021, terdapat 2 (dua) entitas anak yang memperoleh PROPER Emas, 2 (dua) entitas anak mendapatkan PROPER Hijau, dan 1 (satu) entitas anak yang mendapatkan PROPER Biru.

For environmental management, the Company with all subsidiaries undertakes efforts to monitor the environmental impact that may occur from chemical processes in the fertilizer production. PI Group has mapped the Environmental Development Pillar Indicators, which include clean water and proper sanitation, sustainable cities and settlements, responsible consumption and production, climate change management, ocean ecosystems, and land ecosystems. This is in line with the Ministry of Environment and Forestry directive concerning program activities in the PROPER aspect that answer the SDGs Goals, especially the Environmental Development Pillar. As of December 31, 2021, 2 (two) subsidiaries received Gold PROPER, 2 (two) subsidiaries received Green PROPER, and 1 (one) subsidiary received Blue PROPER.

Selain itu, PI Grup juga memiliki kebijakan menempatkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) sebagai prioritas utama di semua aktivitas yang dilakukan. Di samping memenuhi peraturan perundang-

PI Group also has a policy of placing Occupational Safety, Health and Environment (OSHE) as a top priority in all activities carried out. In addition to complying with laws and regulations and other requirements related to OSHE in

undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3LH sesuai bisnis proses yang telah ditetapkan, PI Grup juga melakukan analisa potensi bahaya (*hazard analysis*) untuk meniadakan atau mengurangi risiko dari bahaya pekerjaan yang timbul terhadap manusia, lingkungan dan peralatan pabrik.

Selama tahun 2021 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian (*fatality*). Secara khusus, PTPI melanjutkan program penanggulangan COVID-19 sebagai bagian dari komitmen kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan, baik membentuk Tim Krisis COVID-19 dan *Covid Ranger* di lingkup PTPI maupun entitas anak, memantau secara berkala kasus COVID-19 di lingkup PI Grup melalui sistem informasi berbasis situs web, memberlakukan sistem *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO) secara bergantian, penerapan Protokol Kesehatan secara ketat, hingga bantuan dan dukungan kepada karyawan yang terpapar COVID-19.

Disamping itu PTPI mendukung pemerintah dalam program penanggulangan COVID-19 antara lain melalui penyediaan bantuan oksigen, reaktivasi pabrik oksigen di Gresik, penyediaan vaksinasi bagi karyawan, keluarga karyawan dan masyarakat sekitar Perusahaan, serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Kepada pelanggan, PI Grup berupaya untuk terus meningkatkan mutu produk dan layanan yang diberikan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen terus dilakukan oleh PI Grup, baik melalui survei kepuasan maupun layanan pengaduan atau keluhan, termasuk pengaduan atau keluhan dari produk pupuk bersubsidi. Salah satu komitmen penting dari PI Grup adalah kesehatan dan keselamatan konsumen. Di setiap produk pupuk yang dijual, terdapat informasi yang komprehensif tentang kandungan produk, termasuk bahan kimia. Hal ini dilakukan agar konsumen memiliki informasi tentang produk PI Grup khususnya dalam menyikapi kesehatan dan keselamatan pada saat penggunaan produk yang dijual dan didistribusikan oleh PI Grup.

Informasi tentang Perubahan Komposisi dan Susunan Direksi

Di tahun 2021 terdapat penambahan nomenklatur dan perubahan susunan Direksi sesuai keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS. Berikut disampaikan kronologi nomenklatur dan susunan Direksi di sepanjang tahun 2021 dan susunan Direksi per 31 Desember 2021.

accordance with established business processes, PI Group also conducts a hazard analysis to eliminate or reduce risks from occupational hazards that impact humans, the environment and factory equipment.

During 2021 there were no work accidents that caused fatalities. In particular, PTPI continued its COVID-19 response program as part of the commitment to occupational health and safety for all employees, by establishing a COVID-19 Crisis Team and Covid Ranger within PTPI and its subsidiaries, regularly monitoring of COVID-19 cases within PI Group through a website-based information system, implementing a Work from Home (WFH) and Work from Office (WFO) system, strict implementation of Health Protocols, to assistance and support for employees exposed to COVID-19.

In addition, PTPI supports the Government in the COVID-19 response program, including the provision of oxygen assistance, reactivation of the oxygen factory in Gresik, providing vaccinations for employees, employees' families and communities around the Company, as well as providing social assistance for economically affected communities.

For its customers, the PI Group continuously improves the quality of its products and services provided. Efforts to improve consumer satisfaction continue to be carried out by the PI Group, through satisfaction surveys and service complaints or grievances, including those related to subsidized fertilizer products. One of the PI Group's important commitments is the health and safety of consumers. On every fertilizer product sold, there is comprehensive information about the product's content, including chemicals. This is done so that consumers have information about the PI Group products, especially for addressing health and safety when using the products sold and distributed by the PI Group.

Information on Changes in the Board of Directors' Composition and Structure

In 2021 there was a nomenclature and change to the Board of Directors composition based on a Minister of SOEs as a GMS decision. The following shows the chronology of the Board of Directors nomenclature and composition throughout 2021, and the Board of Directors' composition as of December 31, 2021.

**Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2021**
Chronology of Changes in the Board of Directors Composition in 2021

Periode 1 Januari s.d 16 Juli 2021 Period January 1 - July 16, 2021	Periode 16 Juli s.d 22 Desember 2021 Period July 16 - December 22, 2021	Periode 22 s.d 31 Desember 2021 Period December 22-31, 2021	Keterangan Explanation
Bakir Pasaman (Direktur Utama) (President Director)	Bakir Pasaman (Direktur Utama) (President Director)	Bakir Pasaman (Direktur Utama) (President Director)	-
Nugroho Christijanto (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	Nugroho Christijanto (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	Nugroho Christijanto (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	-
Winardi (Direktur SDM & Tata Kelola) (Director of Human Capital & Governance)	Winardi (Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko) (Director of Human Capital, Governance, & Risk Management)		Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, Pemegang Saham mengubah nomenklatur Direktorat SDM & Tata Kelola menjadi Direktorat SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko. Berdasarkan surat yang sama, penugasan Winardi dialihkan menjadi Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko. Winardi tidak lagi menjabat sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Based on the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021, Shareholders changed the nomenclature of Directorate of Human Capital & Governance to become Directorate of Human Capital, Governance, & Risk Management. According to the same decree, Winardi's assignment was transferred to Director of Human Capital, Governance, & Risk Management. Winardi no longer served as Director of Human Capital, Governance, & Risk Management based on the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021.
Gusrizal (Direktur Pemasaran) (Director of Marketing)	Gusrizal (Direktur Pemasaran) (Director of Marketing)	Gusrizal (Direktur Pemasaran) (Director of Marketing)	-
Bob Indiarto (Direktur Produksi) (Director of Production)	Bob Indiarto (Direktur Produksi) (Director of Production)	Bob Indiarto (Direktur Produksi) (Director of Production)	-
Panji W. Ruky (Direktur Transformasi Bisnis) (Director of Business Transformation)	Panji W. Ruky (Direktur Transformasi Bisnis) (Director of Business Transformation)	Panji W. Ruky (Direktur Transformasi Bisnis) (Director of Business Transformation)	-
Eko Taufik Wibowo (Direktur Keuangan & Investasi) (Director of Finance & Investment)			Eko Taufik Wibowo tidak lagi menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021. Eko Taufik Wibowo no longer serves as Director of Finance & Investment based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021.

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2021 Chronology of Changes in the Board of Directors Composition in 2021

Periode 1 Januari s.d 16 Juli 2021 Period January 1 – July 16, 2021	Periode 16 Juli s.d 22 Desember 2021 Period July 16 – December 22, 2021	Periode 22 s.d 31 Desember 2021 Period December 22-31, 2021	Keterangan Explanation
	Listiarini Dewajanti (Direktur Keuangan & Investasi) (Director of Finance & Investment)		<ul style="list-style-type: none"> Listiarini Dewajanti diangkat sebagai Direktur Keuangan & Investasi sejak 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Listiarini Dewajanti tidak lagi menjabat Direktur Keuangan & Investasi. Listiarini Dewajanti was appointed as Director of Finance & Investment on July 16, 2021 based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021. Based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021 Listiarini Dewajanti no longer serves as the Director of Finance & Investment.
	Jamsaton Nababan (Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha) (Director of Portfolio & Business Development)	Jamsaton Nababan (Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha) (Director of Portfolio & Business Development)	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, Pemegang Saham membentuk Direktorat baru yaitu Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha. Berdasarkan surat yang sama, Jamsaton Nababan dipercaya untuk menjabat Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha. Based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021, the Shareholders formed a new Directorate, namely the Directorate of Portfolio & Business Development. Based on the same letter, Jamsaton Nababan was entrusted to serve as Director of Portfolio & Business Development.
		Tina T Kemala Intan (Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko) (Director of HC, Governance, & Risk Management)	Tina T Kemala Intan diangkat sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko sejak 22 Desember 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Tina T Kemala Intan was appointed as Director of HC, Governance, & Risk Management on December 22, 2021. Based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021
		Wono Budi Tjahyono (Direktur Keuangan & Investasi) (Director of Finance & Investment)	Wono Budi Tjahyono diangkat sebagai Direktur Keuangan & Investasi sejak 22 Desember 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Wono Budi Tjahyono was appointed as Director of Finance & Investment on December 22, 2021. Based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021

**Susunan Direksi per 31 Desember 2021**
Board of Directors Structure as of December 31, 2021tz

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Bakir Pasaman	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 – 2025 GMS	Ke-1 First
Nugroho Christijanto	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-281/MBU/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-281/MBU/10/2018 dated Oktober 26, 2018	26 Oktober 2018 s.d 4 Agustus 2020 October 26, 2018-August 4, 2020	Ke-1 First
	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 August 4, 2020 – 2023 GMS	
Tina T Kemala Intan	Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko Risk Management, Governance, & Human Resource Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 December 22, 2021- 2026 AGMS	Ke-1 First
Gusrizal	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-377/MBU/11/2020 tanggal 11 November 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-377/MBU/11/2020 dated November 11, 2020	20 November 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 November 20, 2020 – 2025 GMS	Ke-2 Second
Bob Indiarso	Direktur Produksi Director of Production	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 – 2025 GMS	Ke-1 First
Panji W. Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 – 2025 GMS	Ke-1 First
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 December 22, 2021- 2026 GMS	Ke-1 First
Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Director of Portofolio & Business Development	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 July 16, 2021 - 2026 GMS	Ke-1 First

Tidak terdapat perubahan susunan Direksi sejak 31 Desember 2021 hingga disahkannya laporan tahunan ini. Susunan Direksi sepenuhnya menjadi hak dari pemegang saham PTPI, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia.

There have been no changes in the Board of Directors composition since December 31, 2021 until the ratification of this annual report. The Board of Directors composition is fully the right of PTPI's shareholders, in this case the Government of the Republic of Indonesia.

Akhir Kata

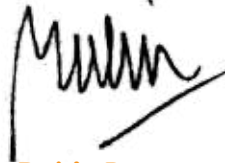
Atas seluruh kinerja yang telah ditorehkan di tahun 2021, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, serta kepada kuasa pemegang saham, Kementerian BUMN. Terima kasih juga diucapkan kepada regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, atas kerja sama yang telah tercipta. Kepada seluruh insan PI Grup, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras yang telah ditunjukkan. Semoga perjalanan tahun 2021 menjadi evaluasi berharga bagi seluruh jajaran dan mampu menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus mengoptimalkan kemampuannya dan menjadi modal Perusahaan untuk dapat tumbuh hingga ke masa-masa yang akan datang.

Final Words

For all the performances given in 2021, please allow the Board of Directors to express their respect and gratitude to the Board of Commissioners, as well as to the proxy of the shareholders, the Ministry of SOEs. We would also like to express our gratitude to the regulators, customers, suppliers, and business partners, for the cooperation they have created. To all PI Group personnel, the Board of Directors would like to express its highest appreciation for all the hard work shown. It is hoped that this journey in 2021 will be a valuable lesson for all levels, and will inspire everyone to continue to optimize their abilities and grow into the Company's future capital.

Jakarta, 13 Mei 2022
Jakarta, May 13, 2022

Atas nama Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero),
On behalf of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero),



Bakir Pasaman
Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

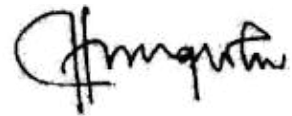
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Mei 2022


ANGGOTA DIREKSI,
Members of the Board of Directors,



BAKIR PASAMAN
Direktur Utama
President Director



NUGROHO CHRISTIJANTO
Wakil Direktur Utama
Vice President Director



BOB INDIARTO
Direktur Produksi
Production Director



WONO BUDI TJAHYONO
Direktur Keuangan dan Investasi
Finance and Investment Director



PANJI WINANTEYA RUKY
Direktur Transformasi Bisnis
Business Transformation Director



TINA T. KEMALA INTAN
Direktur SDM, Tata Kelola dan
Manajemen Risiko
Risk Management, Governance and
Human Resource Director



GUSRIZAL
Direktur Pemasaran
Marketing Director



JAMSATON NABABAN
Direktur Portofolio dan
Pengembangan Usaha
Portfolio and Business
Development Director

STATEMENT BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS CONCERNING RESPONSIBILITY FOR THE 2021 ANNUAL REPORT OF PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

We, the undersigned testify that all information disclosed, in the 2021 Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero), is presented in its entirety. We are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, May 13, 2022

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
Members of the Board of Commissioners,



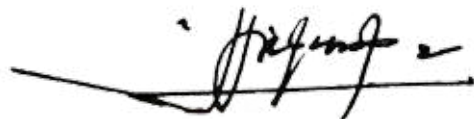
DARMIN NASUTION

Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner



FEBRIO NATHAN KACARIBU

Komisaris
Commissioner



MUSTOHA ISKANDAR

Komisaris Independen
Independent Commissioner



SUWANDI

Komisaris
Commissioner



ANHAR ADEL

Komisaris Independen
Independent Commissioner



ARI DWIPAYANA

Komisaris
Commissioner



BAMBANG WIDIYANTO

Komisaris
Commissioner



ANWAR SANUSI

Komisaris
Commissioner





03

Profil Perusahaan

Company Profile

PTPI terus beradaptasi dan memperkuat peran sebagai activist holding dalam Holding BUMN Sektor Pupuk melalui inovasi dan sinergi PI Grup demi mewujudkan Visi PTPI, yaitu menjadi perusahaan nasional berkelas dunia untuk nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang berkelanjutan serta mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional.

PTPI continues to adapt and strengthen its role as an activist holding in the Holding of SOEs in the Fertilizer Sector through innovation and synergy of the PI Group to realize PTPI's vision, which is to become a world-class national company for plant nutrition and agricultural solutions that are sustainable and capable of providing economic and social impact nationally.



INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY GENERAL INFORMATION AND IDENTITY



Nama Perusahaan Company Name	: PT Pupuk Indonesia (Persero)
Nama Brand Common Name	: Pupuk Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	: 3 Januari 1970 January 3, 1970
Status Perusahaan Status of the Company	: Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Emiten Limited Liability Company, State-Owned Enterprise (SOE), Issuer
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	: Akta Nomor 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahaan berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20. Deed No. 4 dated January 3, 1970 made before Soeleman Ardjasmita, Notary in Jakarta, and ratified based on an excerpt from the Minister of Justice decrees dated February 7, 1970 No. J.A.5/7/20.
Tujuan dan Kegiatan Objectives and Activities	: Melakukan usaha pengelolaan perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk menghasilkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Conducting business management, trading and services in the areas of fertilizers, petrochemical, agrochemical and other chemicals and agroindustry to produce high quality and strongly competitiveness goods and/or services to generate profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.
Modal Dasar Authorized Capital	: Rp100.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued & Paid Up Capital	: Rp25.000.000.000.000
Kepemilikan Saham Share Ownership	: Pemerintah Republik Indonesia, 100,00% Government of the Republic of Indonesia, 100,00%



<p>Kode Obligasi & Peringkatnya Bond Code and Rating</p>	<p>: • PIHCOIBCNI (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B • PIHCOIBCNI (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B • PIHCOIACNI (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A • PIHCOIIBCNI (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B • PIHCOIICCNII (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri C • PIHCOIACNII (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A • PIHCOIIBCNI (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B • PIHCOIICCNII (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C • PIHCOIBCNI (AAA IDN) Shelf Registration Bonds I Phase I Series B • PIHCOIBCNI (AAA IDN) Shelf Registration Bonds I Phase II Series B • PIHCOIACNI (AAA IDN) Shelf Registration Bonds II Phase I Series A • PIHCOIIBCNI (AAA IDN) Shelf Registration Bonds II Phase I Series B • PIHCOIICCNII (AAA IDN) Shelf Registration Bonds II Phase I Series C • PIHCOIACNII (AAA IDN) Shelf Registration Bonds II Phase II Series A • PIHCOIIBCNI (AAA IDN) Shelf Registration Bonds II Phase II Series B • PIHCOIICCNII (AAA IDN) Shelf Registration Bonds II Phase II Series C</p>
<p>Bursa Efek Stock Exchange</p>	<p>: Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange</p>
<p>Jumlah Karyawan Total Employees</p>	<p>: 7.851 karyawan (2021) 7.851 Employees (2021)</p>
<p>Jaringan Usaha Business Network</p>	<p>: Jaringan usaha melalui 10 Entitas Anak Kepemilikan Langsung yang menaungi berbagai entitas, baik Entitas Anak Tidak Langsung, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia. Business network through 10 Direct Ownership Subsidiaries ownership of various entities, including Indirect Subsidiaries, Associate and Joint Venture Entities, with a distribution network throughout Indonesia.</p>
<p>Alamat Kantor Pusat Head Office Address</p>	<p>: Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480-Indonesia Telp : +62 21 53654900 Fax : +62 21 5480607/5482455</p>
<p>Surel Email</p>	<p>: info@pupuk-indonesia.com</p>
<p>Situs Web Website</p>	<p>: www.pupuk-indonesia.com</p>
<p>Situs Pelaporan Digital Digital Site Reporting</p>	<p>: arsr.pupuk-indonesia.com</p>
<p>Layanan Keluhan Pelanggan Customer Service</p>	<p>: pemasaran@pupuk-indonesia.com</p>
<p>Layanan Pelanggan Bebas Pulsa Toll Free Customer Service</p>	<p>: 0800-100-800-1</p>
<p>WhatsApp</p>	<p>: +62-811-9918001</p>
<p>Media Sosial Social Media</p>	<p>: Facebook : PT Pupuk Indonesia Twitter : @pupuk_indonesia Instagram : pt.pupukindonesia</p>



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY



PT Pupuk Indonesia (Persero) selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “PTPI” merupakan *holding company* BUMN yang memiliki sejarah panjang pendiriannya, yaitu sejak tahun 1959. PTPI pertama kali didirikan dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja berdasarkan Akta No. 177 tanggal 24 Desember 1959 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan menjadi badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Muda Kehakiman melalui Keputusan No. J.A.5/3/19 tanggal 28 Januari 1960. Pengesahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Februari 1960 dengan nomor register 320 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 186 Tahun 1960.

PT Pupuk Indonesia (Persero) hereinafter referred to as the “Company” or “PTPI” was first established under the name PT Pupuk Sriwidjaja based on Deed No.177 dated December 24, 1959 drawn up before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta and became a legal entity after obtaining ratification from the Deputy Minister of Justice through Decree No.J.A.5/3/19 dated January 28, 1960. The ratification was registered at the Registrar’s Office of the Jakarta District Court on February 8, 1960 through register No. 320 and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.46 dated June 7, 1960, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.186 1960.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 44) didirikan Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (“PN Pusri”), dan PT Pupuk Sriwidjaya yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaya No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta tersebut dilebur ke dalam PN Pusri sehingga hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta utang usaha dari PT Pupuk Sriwidjaya beralih ke PN Pusri.

PN Pusri kemudian mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 31). Sehubungan hal ini telah ditandatangani Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20.

Pada Tahun 1997, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaya, maka PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) ditugaskan untuk menjadi Induk Perusahaan (*Operation Holding*) yang membawahi 6 (enam) Anak Perusahaan.

Dalam rangka restrukturisasi/pengembangan usaha telah dilakukan pemisahan aset dengan cara *spin off*, dimana PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) mendirikan Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta. Pengalihan sebagian aset PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) kepada PT Pusri Palembang dilaksanakan per 1 Januari 2011. Dengan demikian, segala kegiatan operasional PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) yang meliputi produksi, pemasaran, pengadaan, pengembangan usaha dan lain-lain diserahkan kepada PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, dan PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) bertindak murni sebagai *Non-Operating Holding*.

Pada tanggal 5 April 2012, PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum

Based on the Government Regulation No. 20 of 1964 concerning the Establishment of the State Company Pupuk Sriwidjaya (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1964 No.44) the State Company Pupuk Sriwidjaya (“PN Pusri”) was established, and PT Pupuk Sriwidjaya which was established based on the Deed of Limited Liability Company PT Pupuk Sriwidjaya No.177 dated December 24, 1959 made before Eliza Pondaag, a Notary in Jakarta was merged into PN Pusri so that the rights and obligations, equipment and assets as well as accounts payable from PT Pupuk Sriwidjaya were transferred to PN Pusri.

PN Pusri then changed its legal entity form from a Public Company to a Limited Liability Company (Persero) based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No.20 of 1969 concerning the Transfer of the Legal Entity of the State Company Pupuk Sriwidjaya to a Limited Liability Company (Persero) (State Institution of the Republic of Indonesia of 1969 No.31). In this regard, the Deed of Establishment No.4 dated January 3, 1970, made before Soeleman Ardjasmita, Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice based on an excerpt from the List of Determinations of the Minister of Justice dated February 7, 1970 No.J.A.5/7/20.

In 1997, based on the Government Regulation No.28 of 1997, in conjunction with the Government Regulation no. 34 of 1998 concerning the addition of the Republic of Indonesia’s State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaya, then PT Pusri (Persero) was assigned to become the Holding Company (*Operation Holding*) which oversees 6 subsidiaries.

In the context of restructuring/business development, asset separation was carried out by Spin Off whereby PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) established a subsidiary, PT Pupuk Sriwidjaya Palembang under Deed of Establishment No.14 dated November 12, 2010 made before Fathiah Helmi SH, Notary in Jakarta. The transfer of part of the assets of PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) to PT Pupuk Sriwidjaya Palembang was carried out as of January 1, 2011. Thus all operational activities of PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) including production, marketing, procurement, business development and others were handed over to PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, and PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) acted purely as Non-Operating Holding Company.

On April 5, 2012, PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero) and domiciled in Jakarta based on Deed No.3 dated April 3, 2012 made before Nanda Fauz Iwan, SH, Notary in South Jakarta, with the area of office covering the entire area of the Special Capital Region of Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of



dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-17695.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 5 April 2012.

Anggaran Dasar PTPI telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 01 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Lumassia, SH, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Daftar Perseroan No. AHU-0175443.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020 sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0071253.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020 dan PT Pupuk Indonesia (Persero) berubah menjadi *activist holding*.

Sebagai *activist holding* yang menaungi jaringan usaha melalui Entitas Anak Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung serta Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia, PTPI memiliki peran yang lebih aktif dalam bidang operasional, terutama untuk fungsi-fungsi strategis seperti pemasaran, pengadaan, riset, pengembangan, juga untuk fungsi SDM, IT dan beberapa fungsi lainnya.

Berdasarkan lembaga riset independen Fertecon, PTPI dan Perusahaan Anak menjadi produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian nasional dan ketahanan pangan, di mana Perusahaan dan Perusahaan Anak memiliki berbagai jenis produk pupuk urea, pupuk non-urea dan industri kimia lainnya serta layanan jasa *engineering, procurement & construction*, perdagangan umum, distribusi, energi, dan utilitas serta pangan.

Melalui kekuatan jaringan kelompok usaha, PTPI menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Perusahaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu melalui produk pupuk dan amoniak yang berkualitas.

Indonesia No.AHU-17695.AH.01.02.Tahun 2012 concerning Approval of Amendments to the Company's Articles of Association dated April 5, 2012.

The Articles of Association of PT Pupuk Indonesia (Persero) has been amended several times, the most recent amendment was contained in Deed No.01 dated October 24, 2020, made before Lumassia, SH, Notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta, and has been received and recorded in the Administration of Legal Entities Register of Companies No. AHU-0175443.AH.01.11 in 2020 dated October 18, 2020 as the Letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration No. AHU-0071253.AH.01.02 of 2020 dated October 18, 2020 and PT Pupuk Indonesia (Persero) changed to *activist holding*.

As an *activist holding* that supervises the business network through Direct and Indirect ownership Subsidiaries, as well as Associates and Joint Ventures with distribution networks throughout Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) plays a more active role in the operational field, especially for strategic functions such as marketing, procurement, research, development, as well as HC, IT and other functions.

Based on the independent research institute Fertecon, PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries are the largest fertilizer producer in Southeast Asia with an important role in national agricultural development and food security, where the Company and its Subsidiaries produce various types of urea fertilizer products, urea and other chemical industries, as well as provides engineering services, procurement & construction, general trading, distribution, energy, and utilities and food.

Through the strength of its business group network, PTPI is a partner of the Government of Indonesia for distributing subsidized fertilizers. The Company is also an important part in realizing food security, through quality fertilizer and ammonia products.

Memasuki tahun 2021, Perusahaan resmi menetapkan pemberlakuan sentralisasi fungsi *holding* di lingkungan PI Grup sebagai bagian dari amanah Kementerian BUMN selaku pemegang saham Perusahaan untuk melakukan transformasi. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan secara sentralisasi di *holding* Perusahaan antara lain mencakup fungsi pemasaran dan penjualan komersil, penelitian dan pengembangan, *supply chain* dan *cost management*, pengadaan barang dan jasa, keuangan, audit, manajemen risiko dan kepatuhan, serta manajemen talenta dan pengembangan SDM, dan juga hukum. Tujuan utama sentralisasi ini adalah untuk mendorong *Value Creation* serta menyelaraskan aktivitas fungsi-fungsi anggota PI Grup sehingga sejalan dengan *strategic direction*. Diharapkan dengan penerapan *activist holding role* ini Perusahaan akan mempunyai peran lebih aktif dalam aktivitas operasional Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2021, kinerja Perusahaan didukung oleh 10 (sepuluh) Anak Perusahaan yang mengoperasikan 14 (empat belas) pabrik urea, 13 (tiga belas) pabrik amoniak, 15 (lima belas) pabrik NPK, 3 (tiga) pabrik ZA, 2 (dua) pabrik ZK, dan 1 (satu) pabrik SP di lokasi yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perusahaan akan terus melakukan terobosan untuk memperkuat sinergi usaha industri pupuk dan industri pendukung lainnya melalui *rebranding*, *repositioning*, serta pengembangan usaha.

Entering 2021, the Company was officially determined as the centralized holding function within the PI Group as part of the Ministry of SOEs mandate, as the Company's shareholder to carry out the transformation. The functions implemented centrally in the Company's holding company include marketing and commercial sales, research and development, supply chain and cost management, procurement of goods and services, finance, auditing, risk management and compliance, as well as talent management, HC development, and legal functions. The main objective for this centralization is to encourage Value Creation and align the activities of the functions within the members of the PI Group so they are aligned with the strategic direction. It is hoped that through the implementation of this activist holding role, the Company will have a more active role in the Company's operational activities.

By the end of 2021, the Company's performance was supported by 10 (ten) Subsidiaries operating 14 (fourteen) urea factories, 13 (thirteen) ammonia factories, 15 (fifteen) NPK factories, 3 (three) ZA factories, 2 (two) ZK factories, and 1 (one) SP factory in locations spread across the islands of Java, Sumatra and Kalimantan. The Company will continue to make breakthroughs to strengthen the business synergy of the fertilizer industry and other supporting industries through rebranding, repositioning, and business development.



JEJAK LANGKAH

MILESTONES

1959, 1979-1980

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berdiri sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di industri pupuk sejak tahun 1959.

Dalam rangka kerja sama dengan negara-negara ASEAN dibentuk perusahaan patungan:

- PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menguasai 60% saham.
- Asean Bintulu Fertilizer (ABF) Sdn. Bhd., Pemerintah Indonesia menguasai 13% saham. Pemerintah mengukuhkan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) untuk mewakili Pemerintah di dalam pengawasan kinerja perusahaan.

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was established as an SOE engaging in the fertilizer industry in 1959.

In collaboration with the ASEAN countries, the following joint ventures were established:

- PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) owned 60% shares
- Asean Bintulu Fertilizer (ABF) Sdn. Bhd., Indonesian government owned 13% shares. The government assigned PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) to represent the Government in supervising the company's performance.

1997-1998

Diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang dahulu bernama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjadi Perusahaan Induk (*Operating Holding*) yang membawahi 6 (enam) Anak Perusahaan (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT ReKayasa Industri, dan PT Mega Eltra).

Issuance of Government Regulation No. 28 of 1997 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja in conjunction with Government Regulation No. 34 of 1998 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Indonesia (Persero) formerly known as PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) became the Holding Company (*Operating Holding*) which oversees 6 (six) subsidiaries (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Engineering Industries, and PT Mega Eltra).

2018

Selesaiya Konstruksi dan Produksi Urea Pertama Proyek Amurea II Petrokimia Gresik Anak Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) di Gresik, Jawa Timur.

Completion of Construction and Production of the First Urea of Amurea II Project of Petrokimia Gresik, Subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) in Gresik, East Java.

2013-2017

- Pada tanggal 23 Desember 2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Logistik.
- Pada tanggal 18 Agustus 2014, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Energi.
- Pada tanggal 30 April 2015, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Pangan.
- Peresmian Pabrik PKT 5, November 2015.
- Pembangunan Pabrik NPK II PT Pupuk Kujang.
- Pembangunan Pabrik NPK Fusion I PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di tahun 2016.
- Selesaiya konstruksi Pabrik Pusri IIB di tahun 2017.
- On December 23, 2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a subsidiary company named PT Pupuk Indonesia Logistik.
- On August 18, 2014, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a subsidiary company named PT Pupuk Indonesia Energi.
- On April 30, 2015, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a subsidiary company named PT Pupuk Indonesia Pangan.
- Launching of PKT 5 Factory, November 2015.
- Construction of PT Pupuk Kujang's NPK II Factory.
- Construction of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's NPK Fusion I Factory in 2016.
- Completion of Pusri IIB Factory construction in 2017.

2010-2012

- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 24 Desember 2010 dan berubah dari *Operating Holding* menjadi *Strategic and Investment Holding*.
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan selanjutnya tanggal 3 April 2012 ditetapkan sebagai hari jadi PT Pupuk Indonesia (Persero).
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) established PT Pupuk Sriwidjaja Palembang on December 24, 2010 and transformed from *Operating Holding* into *Strategic and Investment Holding*.
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero) and 3 April 2012 was stipulated as the anniversary of PT Pupuk Indonesia (Persero).

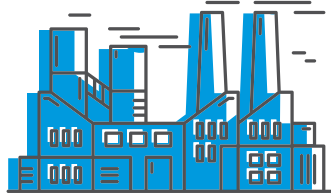


2019

Dimulainya konstruksi proyek NPK Chemical PT Pupuk Iskandar Muda.
Start of PT Pupuk Iskandar Muda NPK Chemical construction project.

2020

- PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi “*Activist Holding*”.
- Penyelesaian pabrik pabrik CO₂ cair PT Pupuk Kujang.
- PT Pupuk Indonesia (Persero) changed to “*Activist Holding*”.
- Completion of the liquid CO₂ plant of PT Pupuk Kujang.



2021

- Pupuk Indonesia menerapkan sentralisasi fungsi *Holding*.
- Peresmian Program Makmur.
- Pupuk Indonesia meluncurkan penyeragaman *brand* produk retail.
- Perubahan nama PT Pupuk Indonesia Energi (“*PIE*”) menjadi PT Pupuk Indonesia Utilitas (“*PIU*”).
- Pupuk Indonesia Implements Centralization of Holding Functions.
- Inauguration of the Makmur Program.
- Pupuk Indonesia Launched Uniform Brand Retail Products.
- PT Pupuk Indonesia Energi (“*PIE*”) becomes PT Pupuk Indonesia Utilitas (“*PIU*”).



BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA, SERTA PASAR YANG DILAYANI

LINE OF BUSINESS, PRODUCTS AND SERVICES, AND MARKETS SERVED

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta No. 01 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat Lumassia, SH, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Daftar Perseroan No. AHU-0175443.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0071253.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, maksud dan tujuan dari kegiatan Perusahaan adalah melakukan usaha (*management*) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agro industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

In accordance with the Company's Articles of Association that were last amended through Deed No. 01 dated October 12, 2020, made before Lumassia, SH, Notaris di Jakarta, domiciled in Central Jakarta, and has been received and recorded in the Administration of Legal Entities Register of Companies No. AHU-0175443.AH.01.11 in 2020 dated October 18, 2020 as the Letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration No. AHU-0071253.AH.01.02 of 2020 dated October 18, 2020, the purpose and objective of the Company's activities is to conduct business management, trading and services in the areas of fertilizers, petrochemical, agrochemical and other chemicals and agro-industry to produce high quality and strongly competitive goods and/or services to generate profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION AND EXECUTED IN THE FISCAL YEAR

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah disampaikan di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:

To achieve the purpose and objectives as stated above, the Company conducts the following business activities:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Already/Not Yet Implemented	Keterangan Explanation
Kegiatan Usaha Utama Main Business Activities		
Perdagangan Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan pada umumnya termasuk ekspor, impor, lokal dan interinsular, bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya. Trade Operating business management, trade and services companies for fertilizer, petrochemical, agrochemical and other chemicals and agroindustry to produce high quality and strongly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the Company value, while following Limited Liability Company principles.	√	Kegiatan ini merupakan bisnis inti PI Grup. This activity is the core business of the PI Group.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah/Belum Djalankan Already/Not Yet Implemented	Keterangan Explanation
Jasa Pengelolaan Perusahaan dan Jasa Konsultasi Manajemen. Corporate Management and Management Consulting Service.	√	Merupakan kegiatan induk usaha produsen pupuk dalam mengelola portofolio investasi dan memberikan arahan kebijakan serta konsultasi pengelolaan Anak Usaha. As a parent company of Fertilizer Production business activities, managing investment Portfolios and providing policy direction and management consulting for its Subsidiaries.
Jasa Lainnya Melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain engineering, pengantongan (<i>bagging station</i>), konstruksi <i>management</i> , pengoperasian pabrik, perbaikan, reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya dalam <i>sector industry</i> pupuk, petrokimia, industri kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan. Other Services Research studies, education, development, engineering design, bagging stations, construction management, plant operations, renovations, repairs, maintenance, consultancy (except legal consultancy) and other technical services in the fertilizer, petrochemical and other chemical industries and services in agriculture and plantations.	√	Merupakan kegiatan usaha EPC dan kegiatan untuk menjamin kelancaran operasional pabrik mulai hulu hingga hilir untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi. EPC business activities, and other activities to ensure the smooth operations in the factories from upstream to downstream to produce high quality products.
Kegiatan Usaha Penunjang Business Support Activities		
Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi, pergudangan dan kegiatan lainnya yang merupakan sarana dan perlengkapan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha tersebut. Conducting business activities in the area of transportation, delivering and warehousing, and other activities as the means for carrying out and facilitating its business activities.	√	Kegiatan ini dilaksanakan melalui Anak Usaha bidang Logistik. These activities are conducted through Logistic Subsidiaries.
Melaksanakan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan perundang-undangan. Conducting Government assignments in accordance with the principles of corporate governance and regulations and legislation.	√	Merupakan kegiatan untuk menjalankan penugasan Pemerintah terutama penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk kebutuhan Petani. Activities to carry out Government assignments, especially in the supply of Fertilizer for the needs of farmers.

Keterangan: ✓ = telah dijalankan | x = belum dijalankan
Description: ✓ = already Implemented | x = not yet Implemented

PRODUK DAN JASA

Pupuk dan Amoniak

Segmen ini memiliki kegiatan produksi dan perdagangan produk pupuk dan amoniak yang ditopang oleh Entitas Anak, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Kegiatan perdagangan produk pupuk mencakup penyaluran pupuk bersubsidi atau *Public Service Obligation* (PSO).

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada PI Grup untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk jenis urea, SP-36, ZA,

PRODUCTS AND SERVICES

Fertilizers and Ammonia

This segment has production and trading activities of fertilizer and ammonia products, which supported by its Subsidiaries: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Trading activities of fertilizer products including the distribution of subsidized fertilizers or Public Service Obligation (PSO).

According to the Regulation of the Minister of Trade No.15/M-DAG/PER/4/2013 dated April 1, 2013 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector, the Government of Indonesia provides subsidies to PI Group for the needs of farmer groups and/or farmers in the agricultural sector, includes



NPK dan jenis pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.02/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi. Berikut adalah produk-produk yang dipasarkan oleh PI Grup:

1. UREA
Pupuk dengan kandungan N sebesar 46% dan diproduksi oleh seluruh Entitas Anak Produsen Pupuk ini dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi (komersil). Pupuk Urea memiliki fungsi membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kandungan protein tanaman.
2. NPK
Merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan N, P, K dan unsur mikro dengan komposisi yang variatif disesuaikan dengan permintaan pasar. Pupuk NPK yang diproduksi oleh Entitas Anak Produsen Pupuk ini dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi. Pupuk NPK memiliki fungsi dapat meningkatkan hasil panen, membuat tanaman lebih hijau dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit dan kekeringan.
3. SP-36
Merupakan pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi. Pupuk SP-36 memiliki kandungan P sebesar 36% dan berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan bunga serta masaknya buah dan biji.
4. ZA
Merupakan pupuk yang diproduksi PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi. Pupuk ZA memiliki kandungan N sebesar 21% dan Sulfur 24% serta berfungsi untuk meningkatkan produksi hasil tebu, meningkatkan kualitas hasil panen, tanaman lebih sehat dan tahan terhadap hama.
5. ZK
Merupakan pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Pupuk ZK memiliki kandungan K₂O sebesar 50% dan Sulfur 17% dan berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah, membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, memperbaiki warna, aroma, dan rasa.
6. AMONIAK
Merupakan bahan mentah industri kimia dengan kemurnian 99,5% yang diproduksi oleh PI Grup dan dipasarkan untuk sektor dalam negeri maupun ekspor.

urea, SP36, ZA, NPK and subsidized fertilizers set by the Ministry of Agriculture. Procedures for the provision, disbursement, and accountability of fertilizer subsidies are regulated in the Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.02/2016 dated 26 April 2016 concerning Procedures for Provision, Disbursement, and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds.

The amount of fertilizer subsidy is calculated based on the difference between the cost of goods sold and the highest retail price. The following are the products marketed by PI Group:

1. UREA
Fertilizer with N content of 46% and produced by all Fertilizer Producing Subsidiaries that are marketed in the subsidized and non-subsidized (commercial) sectors. Urea fertilizer makes plants greener, accelerates plant growth and increases plant protein content.
2. NPK
It is a compound fertilizer that contains N, P, K and micro elements with varied compositions adjusted to market demand. NPK fertilizer produced by the Fertilizer Producing Subsidiaries is marketed in the subsidized and non-subsidized sectors. NPK fertilizer increases crop yields, makes plants greener, and increases plant resistance to drought and pest disease.
3. SP-36
It is a fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik and marketed for the subsidized and non-subsidized sectors. SP-36 fertilizer has a P content of 36% and serves to spur the root and flower growth, and the ripening of fruits and seeds.
4. ZA
It is a fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik and marketed for the subsidized and non-subsidized sectors. ZA fertilizer has an N content of 21% and Sulfur 24% and serves to increase the production of sugarcane, improve the quality of crops, with healthier pestresistant plants.
5. ZK
Is a fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik. ZK fertilizer has a K₂O content of 50% and Sulfur 17% and serves to increase soil nutrients, makes plants grow more upright and sturdy, and improves color, aroma, and taste.
6. AMMONIA
It is a raw material for the chemical industry with a purity of 99.5% and is produced by the PI Group and marketed for the domestic and export sectors.

Produk Lainnya

Dengan menawarkan nilai yang istimewa dan kinerja yang unggul, produk-produk PI Grup telah membantu jutaan petani Indonesia untuk meningkatkan hasil dan kualitas panennya.

Jasa Konstruksi

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri (“Rekind”), Entitas Anak yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement* dan *Construction* (EPC). Dengan pengalaman lebih dari 38 tahun di bidang EPC, Rekind telah membangun pabrik-pabrik skala besar di Indonesia di bidang minyak dan gas bumi (migas), kimia/petrokimia, mineral, infrastruktur dan pembangkit listrik.

Lain-Lain

Kegiatan usaha pada segmen lain-lain merupakan kegiatan penunjang yang terdiri dari perdagangan umum, yaitu melalui PT Mega Eltra dan PT Pupuk Indonesia Pangan, jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik, serta jasa non-EPC melalui PT Mega Eltra dan jasa bidang energi oleh PT Pupuk Indonesia Utilitas.

PASAR YANG DILAYANI

Produk dan jasa yang dipasarkan Perusahaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu produk dan jasa yang dipasarkan serta didistribusikan di berbagai wilayah di Indonesia serta produk yang diekspor ke luar negeri. Sebaran pasar geografis sebagai negara tujuan ekspor yang dilakukan Perusahaan meliputi India, Filipina, Australia, China, Vietnam, Thailand, Meksiko, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, serta beberapa negara lainnya.

Berdasarkan pendapatan konsolidasian Perusahaan, produk yang dipasarkan pada tahun 2021 di pasar domestik mencapai 68,08% sedangkan produk ekspor sebesar 31,92% dari total pendapatan konsolidasian Perusahaan.



Komposisi Persebaran Distribution Composition

	2021 (%)	2020 (%)
Luar Negeri (Ekspor) Overseas (Export)	31,92	26,38
Domestik Domestic	68,08	73,62

Other Products

By offering outstanding value and superior performance, PI Group fertilizer products have supported millions of Indonesian farmers to improve their yields and harvest quality.

Construction services

Construction Services business activities are carried out by PT Rekayasa Industri (“Rekind”), a Subsidiary engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC). With more than 38 years of experience in the EPC field, Rekind has built large-scale factories in Indonesia in the field of oil and gas, chemical/petrochemical, mineral, infrastructure and electricity generation.

Others

Business activities in Other segments are supporting activities consisting of general trading, through PT Mega Eltra and PT Pupuk Indonesia Pangan, shipping services and sea transportation services through PT Pupuk Indonesia Logistik, as well as non-EPC services through PT Mega Eltra and field services energy through PT Pupuk Indonesia Energi.

MARKET SERVED

The products and services marketed by the Company are divided into 2 (two), namely products and services that are marketed and distributed in the regions of Indonesia, and products that are exported abroad. The geographical market distribution for the Company’s exports includes India, the Philippines, Australia, China, Vietnam, Thailand, Mexico, Japan, South Korea, the United States, and several other countries.

Based on the Company’s consolidated revenues, products marketed in 2021 in the domestic market reached 68.08% while the export products amounted 31.92% of the Company’s total consolidated revenues.



WILAYAH OPERASIONAL PI GRUP

PI GROUP'S OPERATIONAL AREA



PT PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE

Jalan Medan - Banda Aceh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh
Phone : (62-645) 56222
Fax : (62-645) 56095
E-mail : info@pim.co.id
Website : http://www.pim.co.id
1 (satu) Pabrik Urea Prill - 570 ribu ton
1 (satu) Pabrik Urea Granule - 570 ribu ton



PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG PALEMBANG

Jalan Mayor Zen, Palembang 30118
Phone : (62-711) 712222
Fax : (62-711) 712100
E-mail : info@pusri.co.id/humas@pusri.co.id
Website : http://www.pusri.co.id
5 (lima) Pabrik Urea Prill - 2.262 ribu ton



PT PUPUK KUJANG KARAWANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 39, Kec. Cikampek, Kab. Karawang 41373, Jawa Barat
Phone : (62-264) 316141, 317007
Fax : (62-264) 314235
E-mail : info@pupuk-kujang.co.id
Website : http://www.pupuk-kujang.co.id
2 (dua) Pabrik Urea Prill - 1.140 ribu ton
2 (dua) Pabrik NPK Granular - 200 ribu ton



PT REKAYASA INDUSTRI JAKARTA

Jalan Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740
Phone : (62-21) 7988700, 7988707
Fax : (62-21) 7988701, 7988702
E-mail : corpsec@rekayasa.co.id
Website : http://www.rekayasa.com



PT MEGA ELTRA JAKARTA

Jalan Jatiwaringin Raya No. 1 RT/RW. 011/005 Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur 13620
Phone : (62-21) 21285152
Fax : (62-21) 28535855
E-mail : pr@megaeltra.co.id
Website : http://www.megaeltra.com



PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK JAKARTA

Gedung Wisma Pusri 101 Jalan Letjend S Parman Kav. 101 RT/RW. 2/1 Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta 11440
Phone : (62-21) 22631881, 22631882, 22631883
Fax : (62-21) 22561904
E-mail : info@pi-logistik.com
Website : http://www.pi-logistik.com



PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

BONTANG

Jalan Ir. James Simandjuntak No. 1
Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang
75313, Kalimantan Timur
Phone : (62-548) 41202
Fax : (62-548) 41626
E-mail : dof@pupukkaltim.com
Website : <http://www.pupukkaltim.com>

3 (tiga) Pabrik Urea Prill - 1.340 ribu ton
3 (tiga) Pabrik Granule - 2.290 ribu ton
3 (tiga) Pabrik NPK - 350 ribu ton



PT PETROKIMIA GRESIK
GRESIK

Jalan Jend. A. Yani, Gresik 61119, Jawa Timur
Phone : (62-31) 3981811, 3982100, 3982200
Fax : (62-31) 3981722, 3892272
E-mail : pg@petrokimia-gresik.com
Website : <http://www.petrokimia-gresik.com>
1 (satu) Pabrik Urea Prili - 460 ribu ton
3 (tiga) Pabrik ZA - 750 ribu ton
1 (satu) Pabrik SP-36 - 500 ribu ton
9 (sembilan) Pabrik NPK - 350 ribu ton



PT PUPUK INDONESIA UTILITAS
JAKARTA

Alamanda Tower Lt. 26
Jalan TB Simatupang No. 22-26
RT/RW. 1/1 Cilandak Barat, Kec. Cilandak,
Jakarta 12430
Phone : (62-21) 29661628, 29661629,
29661630, 29661631
Fax : (62-21) 3452609
E-mail : info@pi-energi.com
Website : <http://www.pi-energi.com>



PT PUPUK INDONESIA PANGAN
KARAWANG

Jalan Rawamerta
Dusun Sukamanah RT/RW. 006/003
Desa Kutawargi, Kec. Rawamerta
Karawang 41382
Phone : (62-267) 6064389
Fax : (62-267) 6064556
E-mail : pemasaran@pi-pangan.com
Website : <http://pi-pangan.com>

WILAYAH OPERASIONAL PRODUK UREA PSO

UREA PSO PRODUCT OPERATIONAL AREAS



WILAYAH OPERASIONAL PRODUK NPK PSO

NPK PSO PRODUCT OPERATIONAL AREAS



- PT Pupuk Iskandar Muda
- PT Pupuk Kujang
- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
- PT Pupuk Kalimantan Timur
- PT Petrokimia Gresik
- Sebagian PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Part of PT Petrokimia Gresik and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
- Sebagian PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang
Part of PT Petrokimia Gresik and PT Pupuk Kujang

**WILAYAH OPERASIONAL
PRODUK ORGANIK PSO**

**PSO ORGANIC PRODUCTS
OPERATIONAL AREAS**



**WILAYAH OPERASIONAL
PRODUK SP-36 DAN ZA PSO**

**SP-36 AND ZA PSO PRODUCTS
OPERATIONAL AREAS**





WILAYAH OPERASIONAL PRODUK KOMERSIL DAN NON PUPUK

OPERATIONAL AREAS FOR COMMERCIAL AND NON- FERTILIZER PRODUCTS

Nama Perusahaan Company Name	Lokasi Pabrik/Operasi Factory/Operations Location	Pasar Dalam Negeri Domestic Market	
		Pupuk Komersil Commercial Fertilizer	Non Pupuk Non Fertilizer
PT Pupuk Iskandar Muda	Lhokseumawe	Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara Aceh, Riau, West Sumatra, North Sumatra	-
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Palembang	Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jambi, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kep Bangka Belitung, Kep Riau, Lampung, NTB, Papua Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jambi, Java Island, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, Bangka Belitung Islands, Riau Islands, Lampung, NTB, Papua	Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara East Java, Lampung, West Sumatra, South Sumatra, North Sumatra
PT Pupuk Kujang	Cikampek	Seluruh Provinsi kecuali Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kep Riau, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara All Provinces except Bengkulu, South Kalimantan, North Kalimantan, Riau Islands, Maluku, Papua, West Papua, West Sulawesi, North Sulawesi	Aceh, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Kep Riau, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara Aceh, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Java Island, South Kalimantan, Riau Islands, Lampung, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi
PT Pupuk Kalimantan Timur	Bontang	Seluruh Provinsi kecuali Bangka Belitung, Kep Riau, Lampung, Maluku, Aceh, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi All provinces except Bangka Belitung, Riau Islands, Lampung, Maluku, Aceh, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi	Jawa Timur, Kalimantan Timur East Java, East Kalimantan
PT Petrokimia Gresik	Gresik	Seluruh Provinsi kecuali Kep Riau All Provinces except Riau Islands	DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara DI Yogyakarta, DKI Jakarta, West Java, East Java, North Sumatra

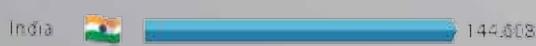
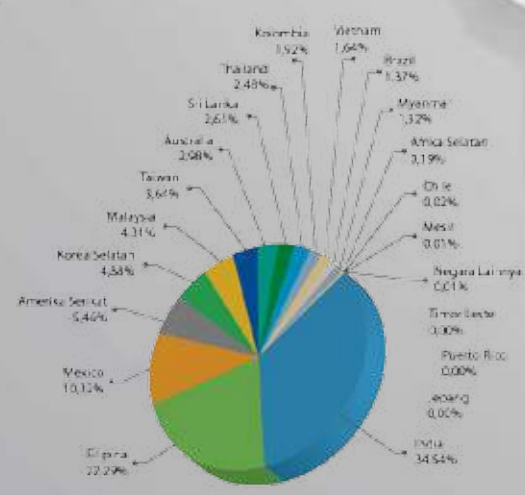
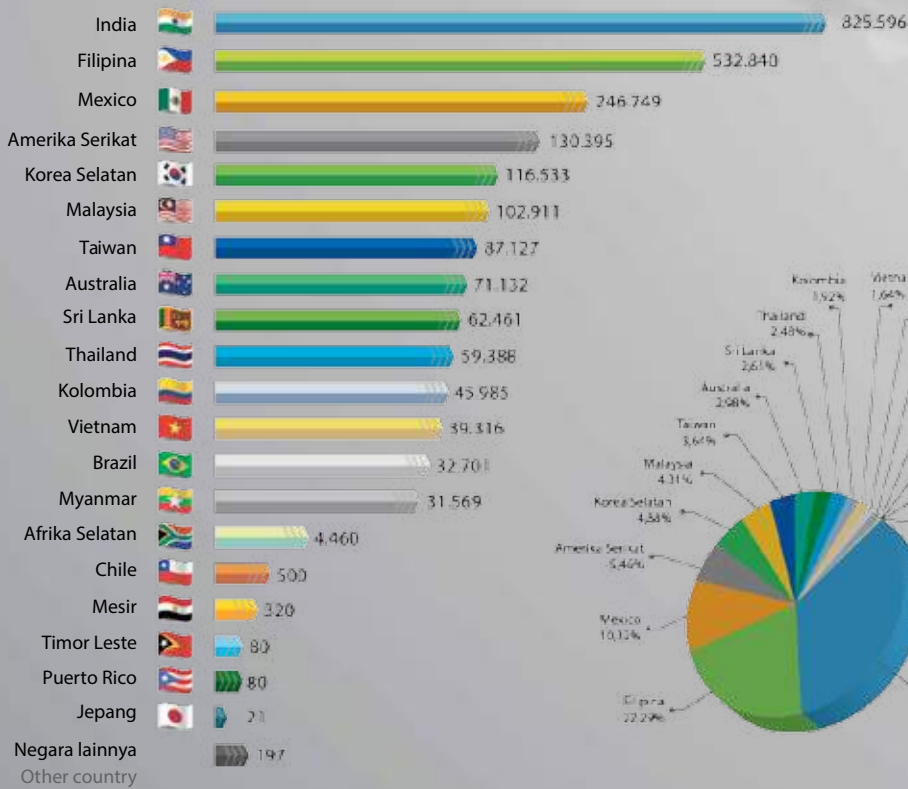


NEGARA TUJUAN EKSPOR PRODUK PI GRUP PI GROUP PRODUCTS EXPORT DESTINATION COUNTRY

Dalam Ton | In Tons



Produk Urea Urea Product

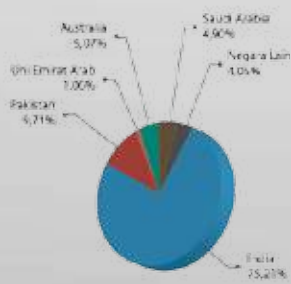


Produk NPK NPK Product

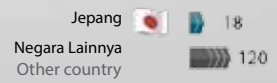




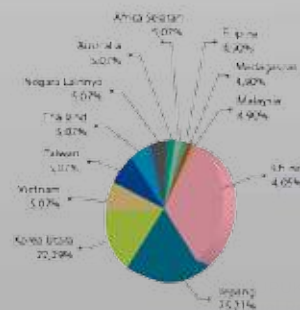
Produk ZK ZK Product



Produk ALF3 ALF3 Product



Produk Amoniak Ammonia Fertilizer







VISI Vision

Menjadi Perusahaan Nasional Berkelas Dunia untuk Nutrisi Tanaman dan Solusi Pertanian yang Berkelanjutan serta Mampu Memberikan Dampak Ekonomi dan Sosial secara Nasional.

To become a Sustainable World-class National Company of Plant Nutrition and Agriculture Solution and able to Create National Economic and Social Impact.

MISI Mission

- Menyediakan produk nutrisi tanaman yang kompetitif dan solusi pertanian sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui ekosistem pertanian yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
- Memaksimalkan *circular economy* sehingga memberikan manfaat serta nilai tambah ekonomi dan sosial untuk Indonesia.
- Mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
- Menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi terkini yang mengedepankan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup dengan prinsip tata kelola yang baik dengan manajemen risiko yang efektif dan didukung oleh SDM yang profesional.
- Menciptakan *culture* yang inovatif, kolaboratif dan *high performing* untuk menjamin perusahaan yang berkelanjutan.
- Provide competitive plant nutrition products and agriculture solution according to consumer needs through sustainable agricultural ecosystems throughout Indonesia.
- Maximizing the circular economy to provide economic and social benefits and added value for Indonesia.
- Support national food security and sovereignty programs.
- Develop core and derivative businesses and a synergistic business portfolio.
- Conduct a business by applying the most up to date technology which prioritizes the work safety and environmental sustainability based on the principles of good governance with effective risk management and supported by professional human resources.
- Creating an innovative, collaborative and high performing culture to ensure a sustainable company.



Review dan Penetapan Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Visi dan Misi PTPI ditetapkan dan diberlakukan melalui kajian secara mendalam dalam sebuah forum penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 yang melibatkan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, jajaran PTPI, kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui surat No. S-86/Kom/PIHC/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dan disahkan oleh Pemegang Saham, dalam hal ini Menteri BUMN melalui surat No. S-1087/MBU/11/2020 tanggal 27 November 2020. Perusahaan melakukan *review* terhadap Visi dan Misi Perusahaan secara berkala setiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis serta tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan.

NILAI-NILAI DAN PARADIGMA

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengimplementasikan nilai-nilai utama dan paradigma Perusahaan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan tersebut telah menetapkan nilai-nilai yang disebut AKHLAK, akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Review and Determination of Company Vision and Mission by Key Management

PTPI's vision and mission was determined and instigated following an in-depth study in the forum for preparing the 2020-2024 Company Long-Term Plan (RJPP), and involved the Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other ranks of PTPI. It was then approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors through letter No. S-86/Kom/PIHC/XI/2020 dated November 12, 2020 and ratified by the Shareholders, in this case the Ministry of SOEs through letter No. S-1087/MBU/11/2020 dated November 27, 2020. The Company reviews the Company's Vision and Mission every year at the Annual General Meeting of Shareholders to ensure its relevance to the development of the business environment and the challenges faced by the Company.

VALUES AND PARADIGMS

PT Pupuk Indonesia (Persero) has implemented the Company's main values and paradigms referring to the Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 on the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises. These provisions have established values called "AKHLAK: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif" or Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative.

AKHLAK

DASAR DAN TUJUAN PENERAPAN AKHLAK

Acuan yang menjadi dasar dalam implementasi nilai-nilai AKHLAK di lingkungan Perusahaan adalah:

1. Surat Edaran Menteri BUMN SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Edaran PTPI No. 08/A/KK/S22/SE/2020 perihal Implementasi Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*).
3. Panduan Tata Nilai Perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero (2 September 2020).
4. Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/072/2020 tentang Tata Nilai Perusahaan.
5. Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/089/2020 tentang Pembentukan Tim Implementasi Budaya Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

BASIS AND PURPOSE OF AKHLAK IMPLEMENTATION

The references that become the basis for the implementation of AKHLAK values within the Company were:

1. Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 concerning the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises.
2. Circular Letter PTPI No. 08/A/KK/S22/SE/2020 concerning Implementation of Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises into a Corporate Culture.
3. Guidelines for Corporate Values of PT Pupuk Indonesia Persero (September 2, 2020).
4. Board of Directors Decree No. SK/DIR/072/2020 concerning Corporate Values.
5. Board of Directors Decree No. SK/DIR/089/2020 concerning the Formation of a Team for Implementing the PT Pupuk Indonesia (Persero) corporate culture.

Perusahaan juga telah memiliki ketetapan yang mewajibkan penerapan nilai-nilai AKHLAK di lingkungan Anak Perusahaan. Ketetapan internal itu disampaikan melalui Surat Edaran Nomor: 08/A/KK/S22/SE/2020 perihal Implementasi Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) tanggal 4 Agustus 2020.

TUJUAN PENERAPAN AKHLAK

Implementasi budaya “AKHLAK” di lingkungan PI Grup bertujuan untuk mendukung transformasi bisnis, sesuai arahan manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero). Selain itu, penerapan nilai-nilai tersebut juga telah menjadi program kerja yang disusun oleh Tim Implementasi Budaya “AKHLAK” di PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan.

PROGRAM IMPLEMENTASI BUDAYA PERUSAHAAN TAHUN 2021

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam merealisasikan nilai-nilai AKHLAK, sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan sejumlah program yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The Company also has provisions that govern the implementation of AKHLAK values within its subsidiaries. The internal decision was conveyed through Circular Letter No. 08/A/KK/S22/SE/2020 on the Implementation of the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises into Corporate Culture dated August 4, 2020.

PURPOSE OF AKHLAK IMPLEMENTATION

The implementation of “AKHLAK” culture within the PI Group aims to support business transformation in line with the direction of the management of PT Pupuk Indonesia (Persero). In addition, the application of these values has also become a work program prepared by the “AKHLAK” Culture Implementation Team at PT Pupuk Indonesia (Persero) in order to achieve the Company’s vision and mission.

CORPORATE CULTURE IMPLEMENTATION PROGRAM IN 2021

As a form of the Company’s commitment to realizing the AKHLAK values, throughout 2021 until this annual report was published, several programs have been implemented which are described in the table below:

No.	Nama Program Program Name	Deskripsi Program Program Description	Waktu Pelaksanaan Date
1	<i>Webinar AKHLAK Series</i>	<i>Webinar AKHLAK Series</i> merupakan Wadah internalisasi <i>Core Values</i> AKHLAK dengan menghadirkan narasumber berpengalaman sesuai dengan tema <i>Core Values</i> AKHLAK. Yang telah dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan tema AKHLAK yakni Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. The AKHLAK webinar Series is a forum for internalizing AKHLAK’s Core Values presented by experienced speakers according to the theme of AKHLAK’s Core Values. This was carried out 6 times related to the AKHLAK themes: Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative.	Amanah : 15 Oktober 2021 Kompeten : 16 Desember 2021 Harmonis : 23 Maret 2021 Loyal : 15 November 2021 Adaptif : 11 Juni 2021 Kolaboratif : 2 September 2021 Trustworthy : October 15, 2021 Competent : December 16, 2021 Harmonious : March 23, 2021 Loyal : November 15, 2021 Adaptive : June 11, 2021 Collaborative : September 2, 2021
2	<i>Workshop Culture on Boarding</i>	<i>Workshop Culture Leader on Boarding Series</i> merupakan acara untuk pembekalan <i>mindset</i> , pengetahuan, dan keterampilan bagi <i>Culture Leader</i> , <i>Culture Champion</i> , dan <i>Change Agent</i> dalam pembangunan budaya AKHLAK yang dilaksanakan pada masing-masing Anak Perusahaan. The Series of Workshops for Culture on Boarding Leaders were events to equip the mindset, knowledge, and skills for Culture Leaders, Culture Champions, and Change Agents in the development of AKHLAK culture to be carried out in each subsidiary.	<i>Culture Leader</i> : • <i>Series I</i> : 19 – 20 April 2021 • <i>Series II</i> : 7 Mei 2021 <i>Culture Champion</i> : • <i>Batch I</i> : 26 – 27 April 2021 • <i>Batch II</i> : 3 – 4 Mei 2021 <i>Culture Fertilizer</i> : 10 – 11 Mei 2021 <i>Culture Leaders</i> : • <i>Series I</i> : April 19 – 20, 2021 • <i>Series II</i> : May 7, 2021 <i>Culture Champions</i> : • <i>Batch I</i> : April 26 – 27, 2021 • <i>Batch II</i> : May 3 – 4, 2021 <i>Culture Fertilizer</i> : May 10 – 11, 2021

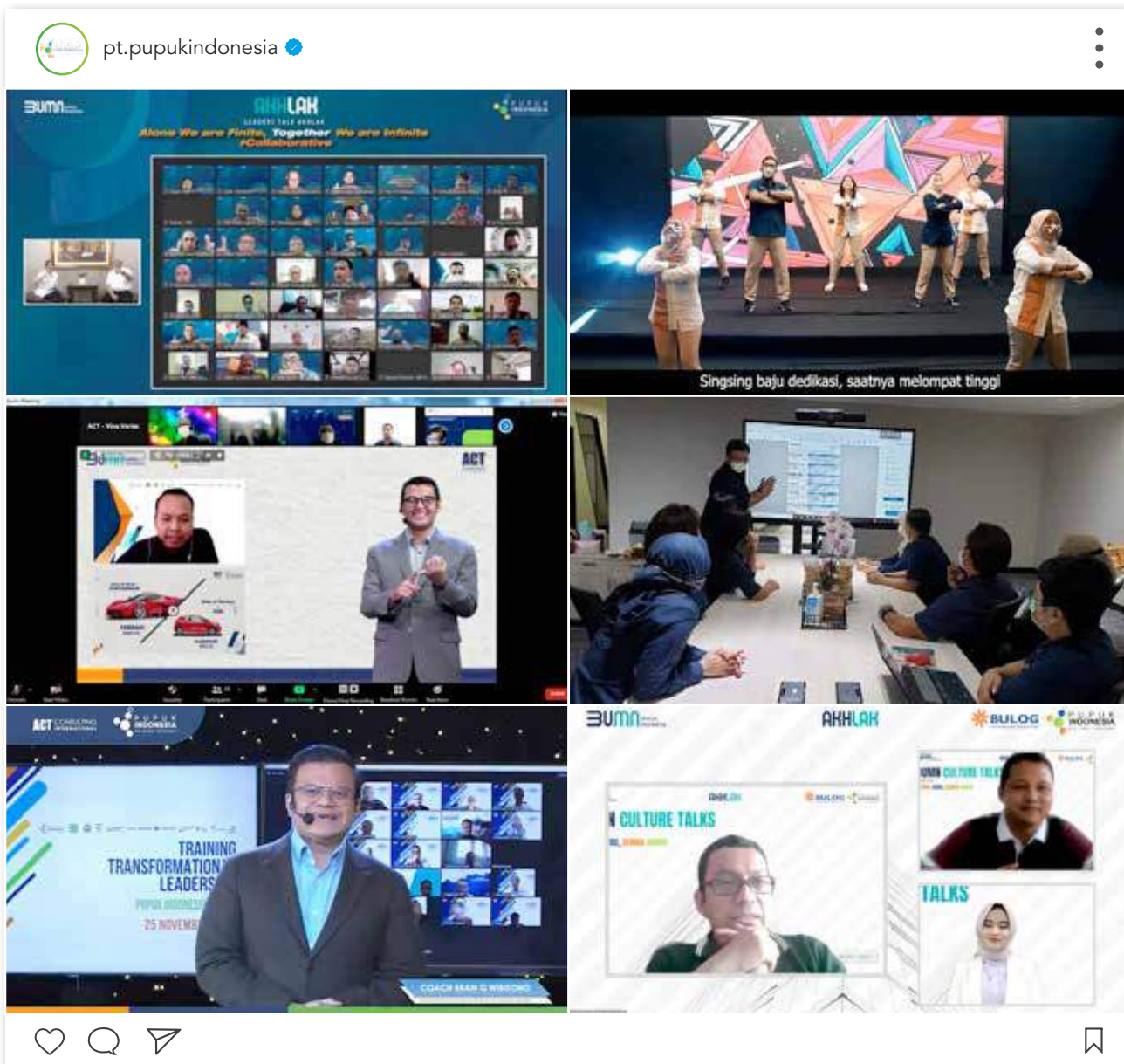


No.	Nama Program Program Name	Deskripsi Program Program Description	Waktu Pelaksanaan Date
3	Workshop <i>Transformational Leadership for BOD</i>	<p>Workshop <i>Transformational Leadership</i> merupakan serangkaian pertemuan rutin bagi jajaran direksi <i>holding</i>, Anak Perusahaan, dengan tujuan untuk memahami konsep kepemimpinan serta peran dan tugas seorang pemimpin, memahami <i>strength</i> atau kekuatan anggota timnya dalam berkolaborasi dan bersinergi di kelompoknya, serta memainkan perannya sebagai <i>coach</i> atau mentor dalam mencapai performa maksimal, yang dipandu oleh Bapak Dr. Ary Ginanjar guna memonitor pelaksanaan implementasi budaya perusahaan di PI Grup. Pelaksanaan <i>workshop</i> ini sebanyak 4 kali.</p> <p>The Transformational Leadership Workshop was a series of regular meetings for the Board of Directors of Holding companies, subsidiaries, with the aim of understanding the concept of leadership and the roles and duties of a leader, understanding the strengths of team members in collaborating and synergizing in their group, and playing their role as a coach or mentor in achieving maximum performance, guided by Dr. Ary Ginanjar to monitor the implementation of corporate culture in the PI Group. This workshop was held 4 times.</p>	<p>Workshop I : 12 April 2021 Workshop II : 10 Juni 2021 Workshop III : 10 September 2021 Workshop IV : 25 November 2021 Workshop I : April 12, 2021 Workshop II : June 10, 2021 Workshop III : September 10, 2021 Workshop IV : November 25, 2021</p>
4	UREA (Unggah Reaksi Video AKHLAK)	<p>Program sosialisasi dan internalisasi <i>Core Values</i> AKHLAK melalui pembuatan video dengan tema AKHLAK yang telah diselenggarakan sebanyak 6 kali dengan total pengumpulan sebanyak 205 video.</p> <p>Socialization program and internalization of AKHLAK Core Values through videos with the AKHLAK themes, held 6 times with a total of 205 videos.</p>	<p>Periode April s.d Desember 2021 Period April to December 2021</p>
5	<i>Living the Grand Why</i>	<p>Menanamkan makna bekerja sebagai karyawan BUMN bagi <i>Change Target</i> dengan dihadiri oleh peserta dari seluruh PI Grup.</p> <p>Instilling the meaning of working as a SOE employee for Change Target, attended by participants from all Pupuk Indonesia (Persero) Group.</p>	<p>Periode April s.d Oktober 2021 Period April to October 2021</p>
6	Pembuatan Buku Contoh Perilaku AKHLAK	<p>Pembuatan buku contoh perilaku AKHLAK yang diturunkan dari 18 pedoman perilaku AKHLAK yang khas untuk perusahaan PI Grup.</p> <p>Making a sample book on AKHLAK behavior from 18 typical AKHLAK behavior guidelines for PI Group companies.</p>	<p>Mei - Juni 2021 May - June 2021</p>
7	SaPa PaGi (<i>Sharing Pemahaman AKHLAK Padu Bersinergi</i>)	<p>SaPa PaGi (<i>Sharing Pemahaman AKHLAK Padu Bersinergi</i>) ialah kegiatan rutin mingguan yang dijalankan di masing-masing unit kerja atau kelompok kerja dimana tiap bulannya terdapat satu kegiatan untuk tiap kompartemen, dengan total realisasi sebanyak 289 kegiatan SaPa PaGi.</p> <p>SaPa PaGi (<i>Sharing Understanding of Synergized AKHLAK</i>) was a weekly routine activity carried out in all work units or work groups where each month there was one activity for each compartment, with a total of 289 SaPa PaGi activities.</p>	<p>Juli - Oktober July - October</p>
8	Perayaan Satu Tahun AKHLAK	<p>Perayaan Satu Tahun AKHLAK telah diselenggarakan dengan narasumber Bapak Ignasius Jonan, dengan jumlah partisipan sebanyak 528 hadir dalam perayaan Satu Tahun AKHLAK.</p> <p>The First Year Celebration of AKHLAK was held with Ignasius Jonan as the resource person, with a total of 528 participants attending.</p>	<p>29 Juli 2021 July 29, 2021</p>
9	Pengukuran AKHLAK <i>Culture Index</i> 2021	<p>Kegiatan pengukuran AKHLAK <i>Culture Index</i> yang dilakukan pada bulan November 2021 lalu menghasilkan peningkatan sebesar 24,6% dari tahun 2020 dengan total capaian nilai sebesar 56,6%.</p> <p>The AKHLAK Culture Index measurement activity was carried out in November 2021 resulted in a total score of 56.6%, an increase of 24.6% from 2020.</p>	<p>November - Desember 2021 November - December 2021</p>

No.	Nama Program Program Name	Deskripsi Program Program Description	Waktu Pelaksanaan Date
10	eNPeKa (Ekspresi Nyata Pemahaman dan Kualitas AKHLAK) eNPeKa (Real Expression of Understanding and Quality of AKHLAK)	eNPeKa (Ekspresi Nyata Pemahaman dan Kualitas AKHLAK) merupakan program <i>customization</i> AKHLAK unit kerja yang dirumuskan bersama oleh <i>Culture Leader, Culture Champion, dan Culture Fertilizer</i> sebagai upaya tindak lanjut dari survei budaya organisasi, PI Grup telah melakukan eNPeKa sebanyak 113 program dengan pencapaian 91%. eNPeKa (Expression of Real Understanding and Quality of AKHLAK) is a work unit AKHLAK customization program that was jointly formulated by the Culture Leader, Culture Champion, and Culture Fertilizer as a follow-up from the organizational culture survey, Pupuk Indonesia (Persero) Group conducted 113 eNPeKa programs with 91% achievement.	Juli – Desember 2021 July – December 2021
11	BUMN <i>Culture Talk Series</i> #7 SOE Culture Talk Series #7	PT Pupuk Indonesia menjadi Narasumber pada BUMN <i>Culture Talk Series</i> #7 yang diselenggarakan dengan peserta dari seluruh penggiat Budaya di Lingkungan Kementerian BUMN. PT Pupuk Indonesia became a resource person at the SOE Culture Talk Series #7 which was held with participants from all cultural activists within the Ministry of SEOs.	31 Juli 2021 July 31, 2021
12	Pemahaman <i>Worklife Balance</i> : Keikhlasan dalam Bekerja Understanding Worklife Balance: Sincerity at Work	Dilakukan dengan menyelenggarakan <i>webinar</i> mengenai 2 topik yaitu Keikhlasan dalam Bekerja dan <i>Webinar</i> Anger Management dengan yang dihadiri oleh Pejabat Grade 1 dan 2 PI Grup. Conducted by holding webinars on 2 topics, namely Sincerity at Work and Anger Management, attended by Grade 1 and 2 PI Group Officials.	<ul style="list-style-type: none"> Keikhlasan dalam bekerja 29 Mei 2021 Anger Management : 9 Juni 2021 Sincerity at work May 29, 2021 Anger Management : June 9, 2021
13	AKHLAK <i>Fun Quiz</i>	AKHLAK <i>Fun Quiz</i> merupakan aktivitas kampanye <i>Core Values</i> AKHLAK dengan mengadakan <i>Fun Quiz</i> di PI <i>Holding</i> dan diharapkan dilakukan juga di masing-masing Anak Perusahaan dengan pencapaian 80%. AKHLAK <i>Fun Quiz</i> is AKHLAK's <i>Core Values</i> campaign activity by holding a <i>Fun Quiz</i> at PI <i>Holding</i> and was carried out in each of the Subsidiaries with 80% achievement.	April – Desember 2021 April – December 2021
14	<i>Culture Pulse Check</i>	<i>Culture Pulse Check</i> merupakan kegiatan dimana tim Implementasi Budaya AKHLAK melakukan koordinasi dengan konsultan untuk metode survei, pertanyaan dalam kuis, dan juga pengolahan data hasil survei dimana perancangan pertanyaan survei dirancang dalam aplikasi Survei <i>Monkey</i> . <i>Culture Pulse Check</i> is an activity where the AKHLAK Culture Implementation team coordinates with consultants using surveys, questionnaires, and survey data processing where survey questions are designed using the <i>Monkey Survey</i> application.	13 – 20 September 2021 September 13 – 20, 2021
15	<i>Culture Breaks</i>	<i>Culture Breaks</i> merupakan kegiatan pertemuan rutin atau pendampingan periodik setiap bulan untuk tim Implementasi Budaya secara terpusat dengan sasaran Program <i>Monitoring</i> dan Evaluasi kegiatan internalisasi dan implementasi <i>Core Value</i> AKHLAK PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup, telah dilaksanakan rutin setiap bulannya hingga bulan Desember 2021 dengan jumlah total kegiatan yakni 9 kegiatan. <i>Culture Breaks</i> are a routine meeting activity or periodic assistance every month for the Culture Implementation team in a centralized manner to Monitor and Evaluate the internalization and implementation Program of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group's <i>Core Value</i> AKHLAK activities, and was carried out routinely every month until December 2021 with a total of 9 activities.	April – Desember 2021 April – December 2021



No.	Nama Program Program Name	Deskripsi Program Program Description	Waktu Pelaksanaan Date
16	Sharing Session	<p><i>Sharing Session</i> adalah kegiatan kerjasama antara PI Grup dengan perusahaan lain mengenai Implementasi Budaya AKHLAK. <i>Sharing Session</i> telah dilaksanakan dengan dua topik, yakni <i>Sharing Session</i> dengan PT PN (Perkebunan Nusantara) mengenai AKHLAK Meter dan dengan PT Pupuk Sriwidjaja mengenai metode NPS (<i>Net Promoter Score</i>). <i>Sharing Session</i> is a collaborative activity between PT Pupuk Indonesia (Persero) Group and other companies regarding the Implementation of AKHLAK Culture. The <i>Sharing Session</i> was held with two topics, namely <i>Sharing Session</i> with PT PN (Perkebunan Nusantara) regarding AKHLAK Meter, and with PT Pupuk Sriwidjaja regarding the NPS (<i>Net Promoter Score</i>) method.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT Perkebunan Nusantara : 27 Desember 2021 • PT Pupuk Sriwidjaja Palembang : 29 Desember 2021 • PT Perkebunan Nusantara : December 27, 2021 • PT Pupuk Sriwidjaja Palembang : December 29, 2021

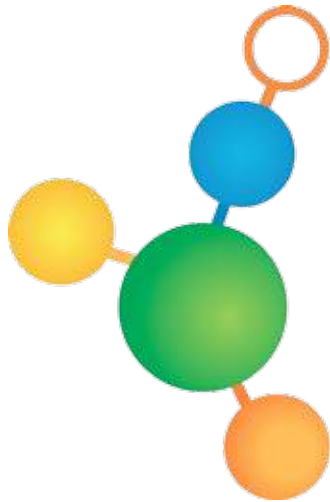






FILOSOFI BRAND PERUSAHAAN

PHILOSOPHY BEHIND THE COMPANY LOGO



P U P U K
INDONESIA
H O L D I N G C O M P A N Y

Objektivitas Objectivity

Objektif dari desain logo adalah memberikan *image* baru untuk Pupuk Indonesia sebagai *Holding Company*, sehingga dapat menghilangkan *image brand* sebelumnya yaitu Pusri.

The objective of the logo design is to provide a new image for Pupuk Indonesia as a Holding Company, subsequently phasing out its previous brand image, namely Pusri.

Bentuk Shape

Bentuk dasar logo terinspirasi dari hal-hal yang menjadi dasar usaha Pupuk Indonesia yaitu molekul atom yang terkandung di dalam senyawa pupuk, *petrochemical* dan *energy*. Bentuk dasar logo Pupuk Indonesia diilhami dari bentuk senyawa kimia pupuk urea.

Dimana pupuk urea merupakan produk utama Pupuk Indonesia. Besaran lingkaran yang ada melambangkan main business dan *sub-business*. Lingkaran kosong melambangkan bisnis yang akan terus berkembang, terus berkarya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

The basic shape of the logo is inspired from the business foundation of Pupuk Indonesia, as molecules contained in fertilizer, petrochemical and energy formula.

The basic shape of the Pupuk Indonesia's logo is inspired by the chemical formula for the urea fertilizer. In which urea fertilizer is the main product of Pupuk Indonesia. The circular shape depicts the main business and sub-business. The empty circle illustrates a growing business, continuous working to meet the needs of the public.

Jenis Huruf Font Type

Huruf yang digunakan adalah huruf tanpa 'serif' yang memberi kesan modern, dinamis, dan profesional.

The font type is without 'serif', reflecting modern, dynamic and professionalism.

WARNA

Warna-warna yang mewakili unsur-unsur bisnis Pupuk Indonesia, yaitu *fertilizer*, *petrochemical*, dan *energy*. Warna logo diilhami dari bisnis inti Pupuk Indonesia dan filosofi yang terkandung di dalamnya.

COLOR

The colors used in the logo are colors representing the elements of Pupuk Indonesia's businesses, namely fertilizer, petrochemical, and energy. The color of the logo was inspired by Pupuk Indonesia's main business and its philosophy.



Hijau

Mewakili *main business* Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang agrokimia dan juga melambangkan pembaharuan.

Green

Green, represents the main business of Pupuk Indonesia that is engaging in the agrochemical sector and also reflecting rejuvenation.



Kuning

Mewakili padi yang menguning dan juga melambangkan kesuburan.

Yellow

Illustrates yellowish rice plants as well as symbolizing fertility.



Oranye

Mewakili sumber daya alam, energi, dan hasil bumi yang diolah Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan dapat diartikan juga sebagai kesuksesan dan pencapaian bisnis.

Orange

Represents natural resources, energy, and natural commodities managed by Pupuk Indonesia to fulfill the needs of the Indonesian people and is also defined as success and business achievement.



Biru Muda

Mewakili keselarasan dan keseimbangan alam.

Light Blue

Represents harmony and balance with the nature.



Biru Tua

Mewakili sifat dan sikap profesional yang diusung Pupuk Indonesia dan juga kepercayaan.

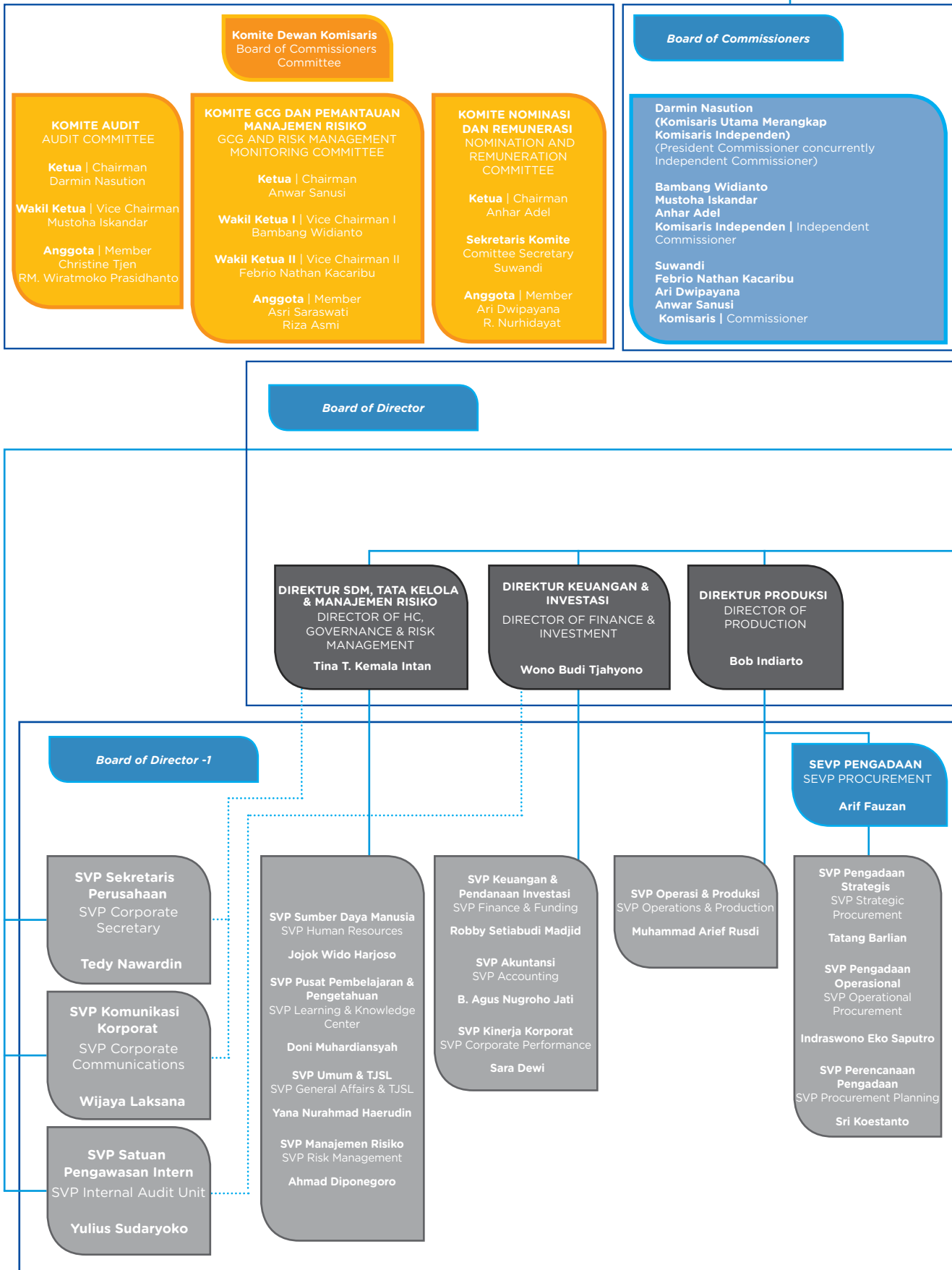
Dark Blue

Represents professional attitude and manner of Pupuk Indonesia and also a symbol of trust.

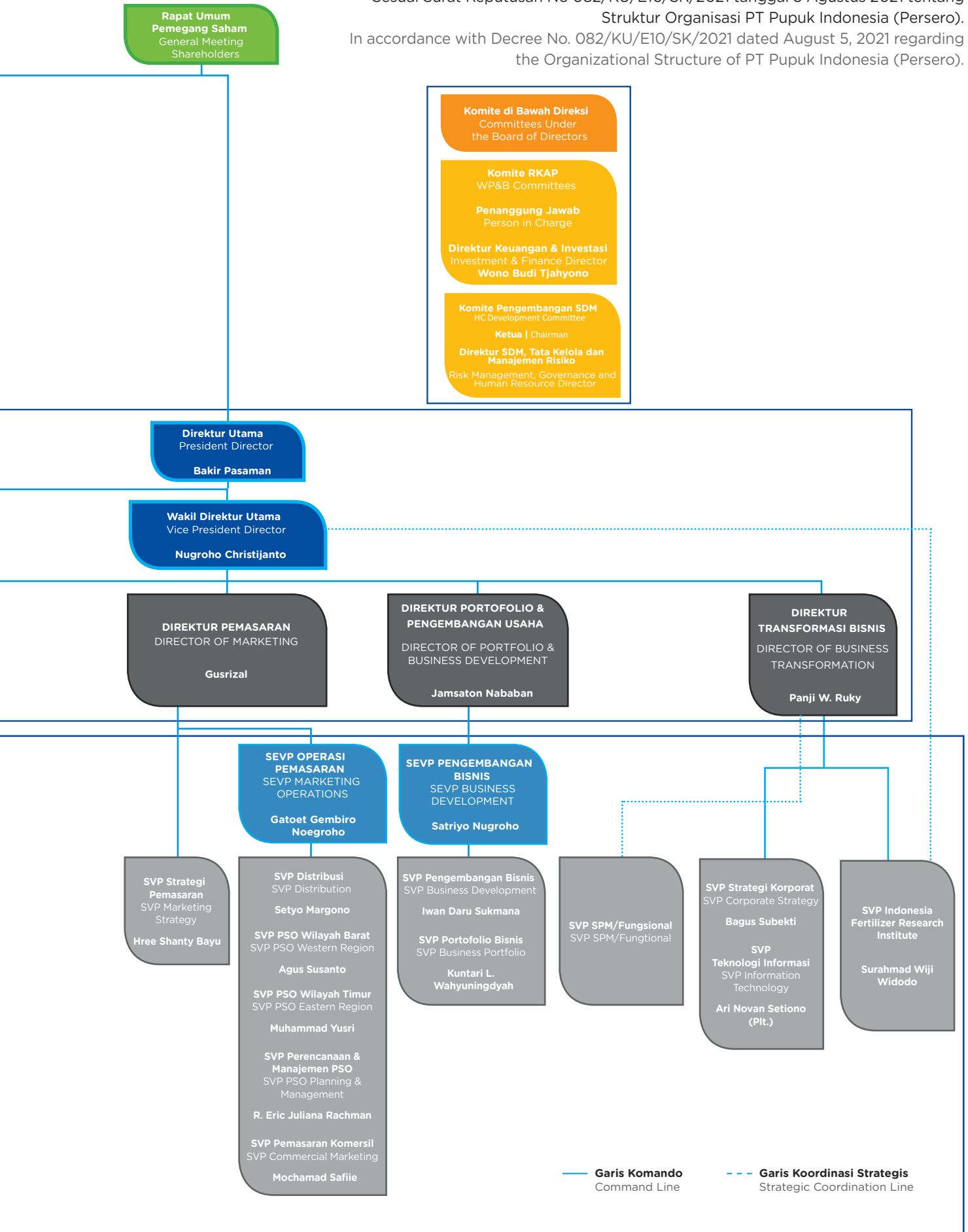


STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE



Sesuai Surat Keputusan No 082/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero).
In accordance with Decree No. 082/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021 regarding the Organizational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero).





PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILES



Darmin Nasution

Komisaris Utama merangkap komisaris independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Masa Jabatan: 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office: August 4, 2020-2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 73 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Mandailing Natal, 21 Desember 1948

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-262/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

- Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020-sekarang);
- Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Finance (2020-sekarang).

Riwayat Pendidikan

- Doktor Ekonomi dari Paris-Sorbone University, Prancis (1984);
- Magister Ekonomi dari Paris-Sorbone University, Prancis (1977);
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1970).

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020-sekarang);
- Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Finance (2020-sekarang);
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2015-2019);
- Gubernur Bank Indonesia (2010-2013);
- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2009-2010);
- Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (2006-2009);
- Direktur Jenderal Lembaga Keuangan/Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Kementerian Keuangan (2005-2006);
- Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2000-2005);
- Deputi Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur (1997-1999);
- Deputi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi (1995-1996);
- Deputi Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan (1993-1994);
- Direktur Utama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) (1989-1993).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 73 as at December 31, 2021
Born Mandailing Natal, December 21, 1948

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-262/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

- President Commissioner at PT Smartfren Telecom Tbk (2020-present);
- President Commissioner at Indonesia Infrastructure Finance (2020-present).

Educational Background

- Doctorate in Economics from Paris-Sorbone University, France (1984);
- Master's degree in Economics from Paris-Sorbone University, France (1977);
- Bachelor's degree in Economics from Universitas Indonesia (1970).

Employment History

- President Commissioner at PT Smartfren Telecom Tbk (2020-present);
- President Commissioner at Indonesia Infrastructure Finance (2020-present);
- Coordinating Minister for Economic Affairs (2015-2019);
- Governor of Bank Indonesia (2010-2013);
- Senior Deputy Governor of Bank Indonesia (2009-2010);
- Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (2006-2009);
- Direktur Jenderal Lembaga Keuangan/Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Kementerian Keuangan (2005-2006);
- Director General of Taxes, Ministry of Finance (2000-2005);
- Deputy Coordinating State Minister for Development Supervision and Apparatus Empowerment (1997-1999);
- Deputy Coordinating Minister for Production and Distribution (1995-1996);
- Deputy Coordinating State Minister for Industry and Trade (1993-1994);
- President Director of the Institute for Economic and Community Research t (LPEM) (1989-1993).

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors, Supervisory Board, other members of the Board of Commissioners, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



Mustoha Iskandar

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Masa Jabatan: 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama

Term of Office: August 4, 2020-2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 61 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Cirebon, 10 Agustus 1960

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-262/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perusahaan maupun di luar Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum dari Universitas Krisnadwipayana (2014);
- Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjajaran (2006);
- Magister Manajemen Pembangunan dari University of the Phillipines Los Banos, Filipina (1996);
- 1. Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (1986);
- 2. Sarjana Muda dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (1986).

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Independen PT Pusri Palembang (November 2016-November 2018);
- Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (Agustus-November 2016);
- Direktur Utama Perum Perhutani (Oktober 2014-Agustus 2016);
- Direktur Komersil Kayu Perum Perhutani (Januari-Oktober 2014);
- Dosen Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Jurusan Manajemen Mata Kuliah Strategic Management STIE Kusuma Negara Jakarta (2011-sekarang);
- Direktur Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Perum Perhutani (2011-2014);
- Dosen Paruh Waktu Program Pasca Sarjana Magister Manajemen untuk Mata Kuliah Strategic Leadership Kwik Kian Gie School of Business Jakarta (2009-sekarang);
- Direktur Utama PT Inhutani IV (Persero) (2007-2011);
- Direktur Pengembangan PT Inhutani III (Persero) (2001-2007);
- Direktur Produksi PT Finantara Intiga (Joint Venture of PT Inhutani III, Gudang Garam dan Nordic Forest Development Finlandia) (1996-1998).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 61 as at December 31, 2021
Born Cirebon, August 10, 1960

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-262/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions within the Company and outside the Company.

Educational Background

- Bachelor's degree in Law from Universitas Krisnadwipayana (2014);
- Doctorate in Business Management from Universitas Padjajaran (2006);
- Master of Development Management from University of the Phillipines Los Banos, Filipina (1996);
- Bachelor's degree in Forestry from Universitas Gadjah Mada (1986);
- Bachelor's degree from Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (1986).

Employment History

- Independent Commissioner of PT Pusri Palembang (November 2016-November 2018);
- Chairman of the Supervisory Board of Perum Perhutani (August-November 2016);
- President Director of Perum Perhutani (October 2014-August 2016);
- Director of Wood Commercial of Perum Perhutani (January-October 2014);
- Lecturer of the Master of Management Postgraduate Program Management Department Strategic Management Course in STIE Kusuma Negara Jakarta (2011-present);
- Director of Forest Resource Management and Community Forest Business Development at Perum Perhutani (2011-2014);
- Part-time Lecturer for Master of Management Postgraduate Program for Strategic Leadership Course in Kwik Kian Gie School of Business Jakarta (2009- present);
- President Director of PT Inhutani IV (Persero) (2007-2011);
- Director of Development at PT Inhutani III (Persero) (2001-2007);
- Director of Production at PT Finantara Intiga (Joint Venture of PT Inhutani III, Gudang Garam and Nordic Forest Development Finlandia) (1996-1998).

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors, Supervisory Board, other members of the Board of Commissioners, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



Anhar Adel

Komisaris independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2024, Periode Pertama
Term of Office: August 4, 2020-2024, AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 63 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1958

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 22 November 2019 berdasarkan keputusan SK-280/MBU/11/2019 dan ditetapkan sebagai Komisaris Independen pada 9 Januari 2020 melalui keputusan SK-13/MBU/01/2020.

Rangkap Jabatan

- Staf Khusus Menteri BUMN (2019-sekarang).

Riwayat Pendidikan

Sarjana Sosial Politik jurusan Administrasi Negara dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1982).

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) (2019-2020);
- Staf Khusus Menteri BUMN (2019-sekarang);
- Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2007-2018);
- Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama BKPM (2005-2007).

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 63 as at December 31, 2021
Born Jakarta, October 18, 1958

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on November 22, 2019 based on SK-280/MBU/11/2019 and appointed as Independent Commissioner on January 9, 2020 through SK-13/MBU/01/2020.

Concurrent Positions

- Special staff to the Minister of SOEs (2019- present).

Educational Background

Bachelor of Social Politics majoring in State Administration from Universitas Padjadjaran, Bandung (1982).

Employment History

- President Commissioner of PT Djakarta Lloyd (Persero) (2019-present);
- Special Staff to the Minister of SOEs (2019- present);
- Main Secretary of the Investment Coordinating Board (BKPM) (2007-2018);
- Head of General Bureau Umum, Sekretariat Utama BKPM (2005-2007).

Affiliated Relationships

Has affiliated relationships with controlling shareholders.



Bambang Widianto

Komisaris

Commissioner

Masa Jabatan: 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office: August 4, 2020-2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 62 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Jakarta, 27 November 1959

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-262/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

Staf khusus Wakil Presiden (Mei 2020-sekarang).

Riwayat Pendidikan

- Doktor Bidang Ekonomi dari Northeastern University, Amerika Serikat (1995);
- Master of Arts Bidang Ekonomi dari Northeastern University, Amerika Serikat (1993);
- Master of Arts Bidang Ilmu Komputer dari Boston University, Amerika Serikat (1990);
- Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1984).

Riwayat Pekerjaan

- Staf Khusus Wakil Presiden (Mei 2020-sekarang);
- Anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI/Sekretaris Eksekutif Ad Interim Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (Desember 2019-Mei 2020);
- Deputi Sekretaris Wakil Presiden RI Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan merangkap Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (Mei 2015-November 2019);
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (Mei 2013-Oktober 2020);
- Komisaris PT Pos Indonesia (2012-2013);
- Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan merangkap Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (November 2009-Mei 2015);
- Komisaris Utama PT Barata Indonesia (Persero) (Maret 2008-Maret 2012);
- Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan (Januari 2008-November 2009);
- Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan (Januari 2007-Januari 2008);
- Pelaksana Tugas Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah merangkap Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat BAPPENAS (Agustus 2005-Januari 2007);
- Komisaris Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) (Januari 2004-September 2006);
- Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi BAPPENAS (April 2002-Agustus 2005);
- Pengajar Program Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi RI (2002-sekarang);
- Direktur Ketenagakerjaan BAPPENAS (2000-April 2002);
- Pengajar Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 62 as at December 31, 2021
Born Jakarta, November 27, 1959

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-262/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

Special staff to Vice President (May 2020-present).

Educational Background

- Doctorate in Economics from Northeastern University, USA (1995);
- Master of Arts in Economics from Northeastern University, USA (1993);
- Master of Arts in Computer Science from Boston University, USA (1990);
- Bachelor's degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung (1984).

Employment History

- Special staff to Vice President (May 2020-present);
- Member of the Expert Team of the Vice President of the Republic of Indonesia / Executive Secretary of the Ad Interim National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) (December 2019-May 2020);
- Deputy Secretary to the Vice President of the Republic of Indonesia for Policy Support for Human Development and Development Equity and concurrently Executive Secretary of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) (May 2015-November 2019);
- Independent Commissioner at PT Bank Syariah Mandiri (May 2013-Oktober 2020);
- Commissioner at PT Pos Indonesia (2012-2013);
- Deputy Secretary to the Vice President for People's Welfare and Poverty Reduction Concurrently Executive Secretary of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) (November 2009-May 2015);
- President Commissioner at PT Barata Indonesia (Persero) (March 2008-March 2012);
- Deputy State Minister for National Development Planning / Head of BAPPENAS for Development Performance (January 2008-November 2009);
- Expert Staff to the Minister of State for National Development Planning / Head of BAPPENAS for Human Resources and Poverty (January 2007-January 2008);
- Acting Deputy Minister of State for National Development Planning / Head of BAPPENAS for Poverty, Employment and Small and Medium Enterprises concurrently Director of Protection and Community Welfare of BAPPENAS (August 2005-January 2007);
- President Commissioner at PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) (January 2004-September 2006);
- Director of Labor and Economic Analysis at BAPPENAS (April 2002-August 2005);
- Lecturer of the Master's Program in Administrative Sciences at Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi RI (2002- present);
- Director of Employment at BAPPENAS (2000-April 2002);
- Lecturer of the Master's Program in Planning and Public Policy, Faculty of Economics at Universitas Indonesia (1999-present).

Affiliated Relationships

Has affiliated relationships with controlling shareholders.



Febrio Nathan Kacaribu

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan: 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office: August 4, 2020-2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 43 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Sidikalang, 27 Februari 1978

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-262/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (April 2020-sekarang).

Riwayat Pendidikan

- Doktor Bidang Ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat (2014);
- Magister Bidang International & Development Economics dari Australian National University, Australia (2005);
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2002).

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (April 2020-sekarang);
- Lektor (Asisten Profesor) di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2019-sekarang);
- Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2015-2019);
- Dosen di Department of Economics, Baylor University, Texas, Amerika Serikat (2012-2015);
- Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2012-2015);
- Konsultan Asia Now, Singapura (2004-2006);
- Peneliti di LPEM FEB Universitas Indonesia (2005-2007).

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 43 as at December 31, 2021
Born Sidikalang, February 27, 1978

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-262/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance (April 2020-present).

Educational Background

- Doctorate in Economics from University of Kansas, USA (2014);
- Master in International & Development Economics from Australian National University, Australia (2005);
- Bachelor's degree in Economics from Universitas Indonesia (2002).

Employment History

- Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance (April 2020-present);
- Lecturer (Assistant Professor) at the Faculty of Economics in Universitas Indonesia (2019- present);
- Lecturer at the Faculty of Economics in Universitas Indonesia (2015-2019);
- Lecturer at Department of Economics, Baylor University, Texas, USA (2012-2015);
- Lecturer at Faculty of Economics in Universitas Indonesia (2012-2015);
- Consultant at Asia Now, Singapore (2004-2006);
- Researcher at LPEM FEB Universitas Indonesia (2005-2007).

Affiliated Relationships

Has affiliated relationships with controlling shareholders.



Suwandi

Komisaris

Commissioner

Masa Jabatan: 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office: August 4, 2020-2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 54 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Bantul, 23 Maret 1967

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-262/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (2019-sekarang).

Riwayat Pendidikan

- Doktor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (2005);
- Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2000);
- Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1991).

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris Utama PTPN VIII (Agustus 2019-Oktober 2020);
- Komisaris PTPN VIII (Desember 2019-Mei 2020);
- Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (2019-sekarang);
- Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2018-2019);
- Plt. Kepala Biro Humas dan Kebijakan Publik Kementerian Pertanian (2017-2018);
- Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian (2015-2018).

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 54 as at December 31, 2021
Born Bantul, March 23, 1967

Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Appointment History

First appointed as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-262/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

Director General of Food Crops, Ministry of Agriculture (2019-present).

Concurrent Positions

- Doctorate in Natural Resources and Environmental Management from Institut Pertanian Bogor (2005);
- Master's degree in Planning and Public Policy from Universitas Indonesia (2000);
- Bachelor's degree in Agriculture from Institut Pertanian Bogor (1991).

Educational Background

- President Commissioner at PTPN VIII (August 2019 - October 2020);
- Commissioner at PTPN VIII (December 2019-May 2020);
- Director General of Food Crops at Ministry of Agriculture (2019-present);
- Director General of Horticulture, Ministry of Agriculture (2018-2019);
- Acting Head of Public Relations and Public Policy Bureau at the Ministry of Agriculture (2017-2018);
- Head of Center for Agricultural Data and Information at the Ministry of Agriculture (2015-2018).

Affiliated Relationships

Has affiliated relationships with controlling shareholders.



Ari Dwipayana

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan: 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office: August 4, 2020-2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 49 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Ubud, 24 Februari 1972

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-262/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

Koordinator Staf Khusus Presiden RI (2019-sekarang).

Riwayat Pendidikan

- Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (2013);
- Magister Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003);
- Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (1995).

Riwayat Pekerjaan

- Koordinator Staf Khusus Presiden RI (2019-sekarang);
- Staf Khusus Presiden RI (2015-2019);
- Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Desember 2014-September 2015);
- Staf Pengajar Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1997-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 49 as at December 31, 2021
Born Ubud, February 24, 1972

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-262/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

Special Staff Coordinator of the President of the Republic of Indonesia (2019-present).

Educational Background

- Doctorate in Political Science from Universitas Gadjah Mada (2013);
- Master's degree in Political Science from Universitas Gadjah Mada (2003);
- Bachelor's degree in Government Science from Universitas Gadjah Mada (1995).

Riwayat Pekerjaan

- Special Staff Coordinator of the President of the Republic of Indonesia (2019-present);
- Special Staff to the President of the Republic of Indonesia (2015-2019);
- Special Staff to the Minister of State Secretary (December 2014-September 2015);
- Lecturer of the Department of Politics and Government FISIPOL at Universitas Gadjah Mada (1997- present).

Affiliated Relationships

Has affiliated relationships with controlling shareholders.



Anwar Sanusi

Komisaris

Commissioner

Masa Jabatan: 8 Juni 2018-RUPS Tahun 2023, Periode Pertama

Term of Office: June 8, 2018-2023 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Ponorogo, 17 November 1968

Domisili

Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 8 Juni 2018 berdasarkan keputusan No. SK-193/MBU/06/2018.

Rangkap Jabatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Agustus 2020-sekarang).

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik dan Sosial dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1992);
- Master of Policy Science National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) dari Universitas Saitama Jepang (1998);
- Doktor bidang Policy Studies dari National Graduate Institute for Policy Studies (2007);
- Post Doctoral National Graduate Institute for Policy Studies (2012).

Riwayat Pekerjaan

- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Agustus 2020-sekarang);
- Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mei 2019-Agustus 2020);
- Plt. Kepala Balilatfo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (April 2017);
- Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (Mei 2014-Mei 2015);
- Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan Sumber Daya Aparatur (Januari-Mei 2014);
- Kepala Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara (Maret 2013-Januari 2014).

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 53 as at December 31, 2021
Born Ponorogo, November 17, 1968

Domicile

Tangerang, Banten, Indonesia

Appointment History

First appointed as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on June 8, 2018 based No. SK-193/MBU/06/2018.

Concurrent Positions

Secretary General of the Ministry of Manpower (August 2020-present).

Educational Background

- Bachelor of Government Science, Faculty of Political and Social Sciences from Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1992);
- Master of Policy Science National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) from Universitas Saitama Japan (1998);
- Doctorate in Policy Studies from National Graduate Institute for Policy Studies (2007);
- Post Doctoral National Graduate Institute for Policy Studies (2012).

Employment History

- Secretary General of the Ministry of Manpower (August 2020-present);
- Secretary General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (May 2019-Agustus 2020);
- Acting Head of Balilatfo Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (April 2017);
- Head of Policy Analysis Development Center Analisis (May 2014-May 2015);
- Head of Apparatus Resource Institutional Innovation Center (January-May 2014);
- Head of Center for Institutional Performance Studies at the State Administration Institutions (March 2013-January 2014).

Affiliated Relationships

Has affiliated relationships with controlling shareholders.



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILES



Bakir Pasaman

Direktur Utama
President Director

Masa Jabatan: 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office: August 4, 2020-2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 60 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Bandung, 27 Februari 1961

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-263/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

- Doktoral Administrasi Bisnis dari Universitas Brawijaya (2019);
- Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran (2008);
- Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya (1996);
- Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1984).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (2016-2020);
- Direktur Teknik dan Pengembangan PT Pupuk Kalimantan Timur (2010-2016);
- Director Compspain XXI S.A./VP Portfolio PT Rekayasa Industri (2005-2010);
- Managing Director/CEO PT Rekayasa Industri (2000-2005).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 60 as at December 31, 2021
Born Bandung, February 27, 1961

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-263/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions within the Company and outside the Company.

Educational Background

- Doctor of Business Administration from Universitas Brawijaya (2019);
- Master in Business Law from Universitas Padjadjaran (2008);
- Master in Management from Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya (1996);
- Bachelor's degree in Chemical Engineering from Institut Teknologi Bandung (1984).

Employment History

- President Director at PT Pupuk Kalimantan Timur (2016-2020);
- Director of Technical and Development at PT Pupuk Kalimantan Timur (2010-2016);
- Director of Compspain XXI S.A./VP Portfolio at PT Rekayasa Industri (2005-2010);
- Managing Director/CEO at PT Rekayasa Industri (2000-2005).

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, Supervisory Board, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



Nugroho Christijanto

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Masa Jabatan: 26 Oktober 2018 -RUPS Tahun 2023, Periode Pertama
Term of Office: October 26, 2018-2023 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Cepu, 22 Mei 1968

Domisili

Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Transformasi Bisnis pada 26 Oktober 2018 berdasarkan keputusan SK-281/MBU/10/2018, kemudian dialihkan sebagai Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-263/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

- Magister Bidang Manajemen Bisnis dan Administrasi teknologi dari Institut Teknologi Bandung (2004);
- Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1992).

Riwayat Pekerjaan

- Plt. Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik (2019-2021);
- Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) (2018-2020);
- Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (2016-2018);
- Direktur Produksi PT Petrokimia Gresik (2012-2016);
- Komisaris Utama PT Petrokimia Kayaku (2012-2016).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 53 as at December 31, 2021
Born Cepu, May 22, 1968

Domicile

Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Appointment History

First appointed as Director of Business Transformation on October 26, 2018 based on SK-281/MBU/10/2018, then transferred as Vice President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-263/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions within the Company and outside the Company.

Educational Background

- Master in Business Management and Technology Administration from Institut Teknologi Bandung (2004);
- Bachelor's degree in Chemical Engineering from Institut Teknologi Bandung (1992).

Employment History

- Acting President Commissioner at PT Pupuk Indonesia Logistik (2019-2021);
- Director of Business Transformation at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2018-2020);
- President Director at PT Petrokimia Gresik (2016-2018);
- Director of Production at PT Petrokimia Gresik (2012-2016);
- President Commissioner at PT Petrokimia Kayaku (2012-2016).

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, Supervisory Board, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



Wono Budi Tjahyono

Direktur Keuangan & Investasi
Director of Finance & Investment

Masa Jabatan: 22 Desember 2021-RUPS 2026, Periode Pertama
Term of Office: December 22, 2021-2026 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 54 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Temanggung, 10 Juli 1967

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No SK-408/MBU/12/2021.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

- Master of Business Administration (MBA) Universitas Gadjah Mada (2009);
- Sarjana (S1) Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1991).

Riwayat Pekerjaan

- Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2021);
- Senior Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2016-2021);
- Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2010-2016);

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 54 as at December 31, 2021
Born Temanggung, July 10, 1967

Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Appointment History

First appointed as Director of Finance and Investment of PT Pupuk Indonesia (Persero) on December 22, 2021 based on No SK-408/MBU/12/2021.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions within the Company and outside the Company.

Educational Background

- Master of Business Administration (MBA) from Universitas Gadjah Mada (2009);
- Bachelor's degree in Agriculture from Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1991).

Employment History

- Senior Executive Vice President at PT Bank Mandiri Tbk (2021);
- Senior Vice President at PT Bank Mandiri Tbk (2016-2021);
- Vice President at PT Bank Mandiri Tbk (2010-2016);

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, Supervisory Board, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



Jamsaton Nababan

Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha
Director of Portfolio & Business Development

Masa Jabatan: 16 Juli 2021-RUPS Tahun 2026, Periode Pertama
Term of Office: July 16, 2021-2026 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 59 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Padang, 16 Juli 1962

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 16 Juli 2021 berdasarkan keputusan No SK-237/MBU/07/2021

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara (1987).

Riwayat Pekerjaan

- President Director PT Pertamina EP Cepu (2017-2021);
- Development Director PT Pertamina EP Cepu (2016-2017);
- Vice President Surface Facilities PT Pertamina EP (2013-2016).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 59 as at December 31, 2021
Born Padang, July 16, 1962

Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Appointment History

First appointed as Director of Portfolio and Business Development of PT Pupuk Indonesia (Persero) on July 16, 2021 based on No SK-237/MBU/07/2021

Concurrent Positions

Has no concurrent positions within the Company and outside the Company.

Educational Background

Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Universitas Sumatera Utara (1987).

Employment History

- President Director at PT Pertamina EP Cepu (2017-2021);
- Development Director PT Pertamina EP Cepu (2016-2017);
- Vice President Surface Facilities at PT Pertamina EP (2013-2016).

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, Supervisory Board, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



Tina T Kemala Intan

Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko

Director of HC, Governance, and Risk Management

Masa Jabatan: 22 Desember 2021-RUPS Tahun 2026, Periode Pertama

Term of Office: December 22, 2021-2026 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 62 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Kalijati, 23 September 1959

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No SK-408/MBU/12/2021.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Psikologi dari Universitas Padjajaran (1985).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur SDM dan Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2019-2021)
- Director of Human Capital, General Affair and IT PT Angkasa Pura II (Persero) (2017-2019)
- Komisaris PT Angkasa Pura Solusi (2018-2019)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 62 as at December 31, 2021
Born Kalijati, September 23, 1959

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as Director of HC, Governance, and Risk Management of PT Pupuk Indonesia (Persero) on December 22, 2021 based on No SK-408/MBU/12/2021.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions within the Company and outside the Company.

Educational Background

Bachelor's degree in Psychology from Universitas Padjajaran (1985).

Employment History

- Director of HC and Law at PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2019-2021)
- Director of Human Capital, General Affairs and IT at PT Angkasa Pura II (Persero) (2017-2019)
- Commissioner at PT Angkasa Pura Solusi (2018-2019)

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, Supervisory Board, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



Gusrizal

Direktur Pemasaran
Director of Marketing

Masa Jabatan: 20 November 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Kedua
Term of Office: November 20, 2020-- 2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 57 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Padang, 20 Januari 1964

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 20 November 2020 berdasarkan keputusan SK-377/MBU/11/2020.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

- Master Bidang Manajemen Logistik dan Perkapalan dari World Maritime University, Swedia (1998);
- Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1989).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) (2017-2020);
- Komisaris Utama PT Pupuk Kujang (2016-2020);
- Direktur Investasi & Pengembangan PT Pupuk Indonesia (Persero) (2016);
- Direktur SDM & Umum PT Pupuk Indonesia (Persero) (2015-2016);
- Direktur Utama PT Donggi Senoro LNG (2013-2015);
- SVP Corporate Investment and Business Development PT Pertamina (Persero) (2010-2013).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 57 as at December 31, 2021
Born Padang, January 20, 1964

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as Director of HC, Governance and Risk Management of PT Pupuk Indonesia (Persero) on November 20, 2020 based on SK-377/ MBU/11/2020.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions within the Company and outside the Company.

Educational Background

- Master's degree in Logistics and Shipping Management from World Maritime University, Swedia (1998);
- Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Institut Teknologi Bandung (1989).

Employment History

- Director of Investment at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2017-2020);
- President Commissioner at PT Pupuk Kujang (2016-2020);
- Director of Investment and Development at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2016);
- Director of HC and General Affairs at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2015-2016);
- President Director at PT Donggi Senoro LNG (2013-2015);
- SVP Corporate Investment and Business Development at PT Pertamina (Persero) (2010-2013).

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, Supervisory Board, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



Panji Winanteya Ruky

Direktur Transformasi Bisnis

Director of Business Transformation

Masa Jabatan:

4 Agustus 2020- RUPS Tahun 2025, Periode Pertama

Term of Office: August 4, 2020-2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 45 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Bandung, 8 Maret 1976

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-263/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

- Magister Bidang Kebijakan Publik dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura (2015);
- MBA Bidang Keuangan dan Manajemen Jasa Keuangan dari Rotterdam School of Management, Belanda (2003);
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1998).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Kemitraan dan Komunikasi Kartu Pra Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Maret 2020-Agustus 2020);
- Senior Vice President PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (2018-2020);
- Senior Advisor-Strategic Economic Affairs Kantor Staf Presiden RI (2015-2018);
- Direktur Senior Treasury Management Visa (2010-2014);
- Manajer Senior Treasury Asia Pasifik Honeywell Pte Ltd (2004-2010);
- Trade Operations Head Citigroup Global Corporate Bank (1998-2002).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 45 as at December 31, 2021
Born Bandung, March 8, 1976

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

First appointed as Director of Business Transformation of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-263/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions within the Company and outside the Company.

Educational Background

- Master in Public Policy from Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore (2015);
- MBA in Finance and Financial Services Management from Rotterdam School of Management, Belanda (2003);
- Bachelor's degree in Economics from Universitas Indonesia (1998).

Employment History

- Director of Partnership and Communication of Kartu Pra Kerja at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (March 2020-August 2020);
- Senior Vice President at PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (2018-2020);
- Senior Advisor-Strategic Economic Affairs at the Office of the President of the Republic of Indonesia (2015-2018);
- Senior Director of Treasury Management at Visa (2010-2014);
- Senior Manager Treasury at Asia Pasifik Honeywell Pte Ltd (2004-2010);
- Trade Operations Head at Citigroup Global Corporate Bank (1998-2002).

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, Supervisory Board, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



Bob Indiarito

Direktur Produksi

Director of Production

Masa Jabatan: 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office: August 4, 2020-2025 AGMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 60 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Bandung, 8 Agustus 1961

Domisili

Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan SK-263/MBU/08/2020.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

- Magister Bidang Manajemen dari Universitas Tridianti, Palembang (2006);
- Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada (1987).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2016-2020);
- General Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2014-2016);
- General Manajer Teknologi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2013-2014);
- General Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2009-2013).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Nationality Indonesian
Age 60 as at December 31, 2021
Born Bandung, August 8, 1961

Domicile

Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Appointment History

First appointed as Director of Production of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on SK-263/MBU/08/2020.

Concurrent Positions

Has no concurrent positions within the Company and outside the Company.

Educational Background

- Master in Management from Universitas Tridianti, Palembang (2006);
- Bachelor's degree in Chemical Engineering from Universitas Gadjah Mada (1987).

Employment History

- Director of HC and General Affairs at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2016-2020);
- Operation General Manager at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2014-2016);
- Technology General Manager at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2013-2014);
- Operation General Manager at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2009-2013).

Affiliated Relationships

Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, Supervisory Board, or the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICERS' PROFILES

SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT



Arif Fauzan
SEVP PENGADAAN | SEVP PROCUREMENT
Menjabat sejak 13 Desember 2021 | Appointed December 13, 2021

Usia Age	: 57 tahun per 31 Desember 2021 57 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: Magister Teknik, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2007) Master's degree in Mechanical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (2007)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: SPK No. 65/SPK-PIHC/XII/2021 13 Desember 2021 SPK No. 65/SPK-PIHC/XII/2021 December 13, 2021



Gatoet Gembira Noegroho
SEVP OPERASI PEMASARAN | SEVP MARKETING OPERATIONS
Menjabat sejak 13 Desember 2021 | Appointed December 13, 2021

Usia Age	: 55 tahun per 31 Desember 2021 55 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S3 Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya (2021) Doctorate in Business Administration from Universitas Brawijaya (2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: SPK No. 64/SPK-PIHC/XII/2021 13 Desember 2021 SPK No. 64/SPK-PIHC/XII/2021 December 13, 2021



Satriyo Nugroho
SEVP PENGEMBANGAN BISNIS | SEVP BUSINESS DEVELOPMENT
Menjabat sejak 7 September 2020 | Appointed September 7, 2020

Usia Age	: 54 tahun per 31 Desember 2021 54 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: Insinyur Universitas Brawijaya (2022) Engineer from Universitas Brawijaya (2022)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: SPK No. 59/SPK-PIHC/IX/2020 7 September 2020 SPK No. 59/SPK-PIHC/IX/2020 September 7, 2020

SENIOR VICE PRESIDENT

Direktorat Utama

Main Directorate



Tedy Nawardin
SVP Sekretaris Perusahaan | SVP Corporate Secretary
Menjabat sejak 01 Mei 2021 | Appointed May 1, 2021

Usia Age	: 54 tahun per 31 Desember 2021 54 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (2005) Master's degree in Communication Studies from Universitas Indonesia (2005)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/055/2021 tanggal 21 April 2021 Board of Directors Decree No. SK/DIR/055/2021 April 21, 2021



Yulius Sudaryoko
SVP Satuan Pengawasan Intern | SVP Internal Audit Unit
Menjabat sejak 01 September 2020 | Appointed September 1, 2020

Usia Age	: 53 tahun per 31 Desember 2021 53 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Strategic Management Binus University (2019) Master's degree in Strategic Management from Binus University (2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Wijaya Laksana
SVP Komunikasi Korporat | SVP Corporate Communication
Menjabat sejak 01 April 2016 | Appointed April 1, 2016

Usia Usia	: 44 tahun per 31 Desember 2021 44 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: • S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia (2012) • S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2019) • Master's degree in Communication Management from Universitas Indonesia (2012) • Master's degree in Management from Universitas Gadjah Mada (2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021

Direktorat SDM, Tata Kelola & Manajemen Risiko

HC, Governance and Risk Management Directorate



Jojok Wido Harjoso
SVP Sumber Daya Manusia | SVP Human Capital
Menjabat sejak 05 November 2020 | Appointed November 5, 2020

Usia Age	: 54 tahun per 31 Desember 2021 54 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2010) Master's degree in Management from Universitas Gadjah Mada (2010)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Doni Muhardiansyah
SVP Pusat Pembelajaran & Pengetahuan | SVP Learning and Knowledge Center
Menjabat sejak 15 November 2020 | Appointed November 15, 2020

Usia Age	: 53 tahun per 31 Desember 2021 53 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S3 Administrasi Bisnis Universitas Indonesia (2007) PhD in Business Administration from Universitas Indonesia (2007)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Yana Nurahmad Haerudin
SVP Umum & TJSL | SVP General Affairs & TJSL
Menjabat sejak 01 Oktober 2017 | Appointed October 1, 2017

Usia Age	: 45 tahun per 31 Desember 2021 45 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 SDM Universitas Singaperbangsa Karawang (2014) Master's degree in HR from Universitas Singaperbangsa Karawang (2014)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Ahmad Diponegoro
SVP Manajemen Risiko | SVP Risk Management
Menjabat sejak 07 Januari 2021 | Appointed January 7, 2021

Usia Age	: 46 tahun per 31 Desember 2021 46 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Master of Information Management Tillburg University (2008) Master's degree in Information Management from Tillburg University (2008)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021

Direktorat Keuangan & Investasi

Finance & Investment Directorate



Robby Setiabudi Madjid
SVP Keuangan & Pendanaan Investasi | SVP Finance and Investment Funding
Menjabat sejak 01 Desember 2021 | Appointed December 1, 2021

Usia Age	: 42 tahun per 31 Desember 2021 42 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: M.Comm, University of Queensland, (2011) M.Comm from University of Queensland, (2011)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 110/A/KU/E10/SK/2021 Tanggal 1 Desember 2021 Board of Directors Decree No. 110/A/KU/E10/SK/2021 December 1, 2021



Agus Nugroho Jati
SVP Akuntansi | SVP Accounting
Menjabat sejak 15 Februari 2021 | Appointed February 15, 2021

Usia Age	: 49 tahun per 31 Desember 2021 49 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Akuntansi Manajemen Keuangan Universitas Gadjah Mada (2008) Master's degree in Financial Accounting Management from Universitas Gadjah Mada (2008)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/022/2021 tanggal 15 Februari 2021 Board of Directors Decree No. SK/DIR/022/2021 dated February 15, 2021



Sara Dewi
SVP Kinerja Korporat | SVP Corporate Performance
Menjabat sejak 15 Februari 2021 | Appointed February 15, 2021

Usia Age	: 47 tahun per 31 Desember 2021 47 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Magister Mangement Keuangan Universitas Gadjah Mada Master's degree in Financial Management from Universitas Gadjah Mada
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/022/2021 tanggal 15 Februari 2021 Board of Directors Decree No. SK/DIR/022/2021 dated February 15, 2021

Direktorat Produksi

Production Directorate



Muhammad Arief Rusdi
SVP Operasi & Produksi | SVP Operations & Production
Menjabat sejak 31 Desember 2021 | Appointed December 31, 2021

Usia Age	: 55 tahun per 31 Desember 2021 55 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Strategic Management School Management of PPM (2019) Master's degree in Strategic Management from School Management of PPM (2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 099/A/KU/E10/SK/2021 tanggal 31 Desember 2021 Board of Directors Decree No. 099/A/KU/E10/SK/2021 December 31, 2021



Tatang Barlian
SVP Pengadaan Strategis | SVP Strategic Procurement
Menjabat sejak 1 Mei 2022 | Appointed May 1, 2022

Usia Age	: 41 tahun per 31 Desember 2021 41 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S1 Teknik Material Institut Teknologi Bandung (2003) Bachelor's degree in Material Technology from Institut Teknologi Bandung (2003)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 042/A/KU/E10/SK/2022 tanggal 1 Mei 2022 Board of Directors Decree No. 042/A/KU/E10/SK/2022 May 1, 2022



Indraswono Eko Saputro
SVP Pengadaan Operasional | SVP Operational Procurement
Menjabat sejak 01 Februari 2019 | Appointed February 1, 2019

Usia Age	: 41 tahun per 31 Desember 2021 41 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S1 Teknik Material Institut Teknologi Bandung (2003) Bachelor's degree in Material Technology from Institut Teknologi Bandung (2003)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 096/A/KU/E10/SK/2021 tanggal 1 April 2021 Board of Directors Decree No. 096/A/KU/E10/SK/2021 tanggal April 1, 2021



Sri Koestanto
SVP Perencanaan Pengadaan | SVP Procurement Planning
Menjabat sejak 05 Maret 2021 | Appointed March 5, 2021

Usia Age	: 53 tahun per 31 Desember 2021 53 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Teknik Elektro Insitut Teknologi Sepuluh November (2007) Master's degree in Electrical Engineering from Insitut Teknologi Sepuluh November (2007)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 114/KU/E10/SK/2021 tanggal 1 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 114/KU/E10/SK/2021 August 1, 2021



Direktorat Pemasaran

Marketing Directorate



Hree Shanty Bayu
SVP Strategi Pemasaran | SVP Marketing Strategy
Menjabat sejak 1 Februari 2019 | Appointed February 1, 2019

Usia Age	:	43 tahun per 31 Desember 2021 43 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	:	S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro (2002) Bachelor's degree in Chemical Engineering from Universitas Diponegoro (2002)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Setyo Margono
SVP Distribusi | SVP Distribution
Menjabat sejak 1 Mei 2022 | Appointed May 1, 2022

Usia Age	:	54 tahun per 31 Desember 2021 54 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	:	S2 Teknik & Manajemen Insitut Teknologi Bandung (2005) Master of Engineering & Management from Insitut Teknologi Bandung (2005)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 046/A/KU/E10/SK/2022 1 Mei 2022 Board of Directors Decree No. 046/A/KU/E10/SK/2022 May 1, 2022



Agus Susanto
SVP PSO Wilayah Barat | SVP Western Region PSO
Menjabat sejak 15 Januari 2021 | Appointed January 15, 2021

Usia Age	:	54 tahun per 31 Desember 2021 54 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	:	S1 Desain Institut Teknologi Sepuluh November (1992) Bachelor's degree in Design from Institut Teknologi Sepuluh November (1992)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 089/KU/E10/SK/2021 tanggal 15 April 2021 Board of Directors Decree No. 089/KU/E10/SK/2021 tanggal April 15, 2021



Muhammad Yusri
SVP PSO Wilayah Timur | SVP Eastern Region PSO
Menjabat sejak 15 Januari 2021 | Appointed January 15, 2021

Usia Age	:	56 tahun per 31 Desember 2021 56 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	:	S1 Agronomi Universitas Mulawarman (1989) Bachelor's degree in Agronomy from Universitas Mulawarman (1989)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 099/A/KU/E10/SK/2021 31 Oktober 2021 Board of Directors Decree No. 099/A/KU/E10/SK/2021 October 31, 2021



R. Eric Juliana Rachman
SVP Perencanaan & Manajemen PSO | SVP PSO Planning & Management
Menjabat sejak 01 Januari 2021 | Appointed January 1, 2021

Usia Age	:	42 tahun per 31 Desember 2021 42 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	:	S1 Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran (2003) Bachelor's degree in Economics Development Studies from Universitas Padjadjaran (2003)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/024/2020 1 Juni 2020 Board of Directors Decree No. SK/DIR/024/2020 June 1, 2020



Mochamad Safiie
SVP Pemasaran Komersial | SVP Commercial Marketing
Menjabat sejak 02 Februari 2021 | Appointed February 2, 2021

Usia Age	:	53 tahun per 31 Desember 2021 53 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	:	S1 Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh November (1993) Bachelor's degree in Chemical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November (1993)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/027/2021 1 Januari 2021 Board of Directors Decree No. SK/DIR/027/2021 January 1, 2021

Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha

Portfolio & Business Development Directorate



Iwan Daru
SVP Strategi Korporat | SVP Corporate Strategy
Menjabat sejak 05 Agustus 2021 | Appointed August 5, 2021

Usia Age	:	44 tahun per 31 Desember 2021 44 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	:	S1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2003) Bachelor degree in Chemical Engineering from Universitas Gadjah Mada (2003)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Kuntari L. Wahyuningdyah
SVP Portofolio Bisnis | SVP Business Portfolio
Menjabat sejak 01 Januari 2021 | Appointed January 1, 2021

Usia Age	:	47 tahun per 31 Desember 2021 47 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	:	S2 Construction Management, University of New South Wales (1998) Master's degree in Construction Management from University of New South Wales (1998)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Direktorat Transformasi Bisnis

Business Transformation Directorate



Bagus Subekti SVP Pengembangan SVP Development Menjabat sejak 07 September 2020 Appointed September 7, 2020	
Usia Age	: 51 tahun per 31 Desember 2021 51 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S1 Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (1994) Bachelor's degree in Chemical Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Ari Novan Setiono Plt. SVP Teknologi Informasi Acting SVP Information Technology Menjabat sejak 1 Mei 2021 Appointed May 1, 2021	
Usia Age	: 43 tahun per 31 Desember 2021 43 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2019) Master's degree in Management from Universitas Gadjah Mada (2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Surahmad Wiji Widodo SVP Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) SVP Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) Menjabat sejak 24 Januari 2022 Appointed January 24, 2022	
Usia Age	: 51 tahun per 31 Desember 2021 51 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung (2007) Master's degree in Chemical Engineering from Institut Teknologi Bandung (2007)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 121/KU/E10/SK/2021 1 Januari 2022 Board of Directors Decree No. 121/KU/E10/SK/2021 January 1, 2022

SENIOR PROJECT MANAGER (SPM)



Brimadiyanto SPM Restrukturisasi Keuangan SPM Financial Restructuring Menjabat sejak 15 Oktober 2021 Appointed October 15, 2021	
Usia Age	: 51 tahun per 31 Desember 2021 51 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Magister Keuangan Universitas Indonesia (2007) Master's degree in Finance from Universitas Indonesia (2007)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 097/A/KU/E10/SK/2021 15 Oktober 2021 Board of Directors Decree No. 097/A/KU/E10/SK/2021 October 15, 2021



Yetty Endarwati
SPM Data Science | SPM Data Science
Menjabat sejak 01 Oktober 2020 | Appointed October 1, 2020

Usia Age	: 45 tahun per 31 Desember 2021 45 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November (2000) Bachelor's degree in Technical Information from Institut Teknologi Sepuluh November (2000)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 005/A/KU/E10/SK/2022 1 Februari 2022 Board of Directors Decree No. 005/A/KU/E10/SK/2022 February 1, 2022



Budi Mulia Utama Hasibuan
SPM Implementasi Budaya Perusahaan | SPM Corporate Culture Implementation
Menjabat sejak 15 September 2020 | Appointed September 15, 2020

Usia Age	: 49 tahun per 31 Desember 2021 49 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Environmental Studies University of New South Wales (1999) Master's degree in Environmental Studies from University of New South Wales (1999)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 072/A/KU/E10/SK/2021 5 Agustus 2021 SPK No. 072/A/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Budi Asikin
SPM Dana Pensiun | SPM Pension Fund
Menjabat sejak 1 Mei 2022 | Appointed May 1, 2022

Usia Age	: 54 tahun per 31 Desember 2021 54 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2019) Master's degree in Management from Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 046/A/KU/E10/SK/2022 1 Mei 2022 Board of Directors Decree No. 046/A/KU/E10/SK/2022 May 1, 2022



Fickry Martawisuda
SPM Retail Management | SPM Retail Management
Menjabat sejak 1 Oktober 2021 | Appointed October 1, 2021

Usia Age	: 38 tahun per 31 Desember 2021 38 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Manajemen Unsika (2017) Master's degree in Management from Unsika (2017)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 102/A/KU/E10/SK/2021 1 Oktober 2021 SPK No. 102/A/KU/E10/SK/2021 October 1, 2021



Evy Yusnita
SPM Sales Force Optimization | SPM Sales Force Optimization
Menjabat sejak 1 Maret 2022 | Appointed March 1, 2022

Usia Age	: 38 tahun per 31 Desember 2021 38 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2015) Master's degree in Management from Universitas Gadjah Mada (2015)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 021/A/KU/E10/SK/2022 1 Maret 2022 Board of Directors Decree No. 021/A/KU/E10/SK/2022 March 1, 2022



Zulyan Imansyah
SPM Inbound & Outbound Supply Chain | SPM Inbound & Outbound Supply Chain
Menjabat sejak 09 September 2020 | Appointed September 9, 2020

Usia Age	: 46 tahun per 31 Desember 2021 46 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Magister Manajemen Universitas Tridinanti (2018) Master's degree in Management from Universitas Tridinanti (2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 102/A/KU/E10/SK/2021 1 Oktober 2021 Board of Directors Decree No. 102/A/KU/E10/SK/2021 October 1, 2021



Dwi Pudyasmoro Basuki Ari Wibowo
SPM Creating Shared Value | SPM Creating Shared Value
Menjabat sejak 01 Juni 2020 | Appointed June 1, 2020

Usia Age	: 54 tahun per 31 Desember 2021 54 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: Sarjana Ekonomi (SE) Universitas Terbuka (1999) Bachelor's degree in Economics (SE) from Universitas Terbuka (1999)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 097/A/KU/E10/SK/2021 1 Oktober 2021 Board of Directors Decree No. 097/A/KU/E10/SK/2021 October 1, 2021



Ari Novan Setiono
SPM Transformasi Digital | SPM Digital Transformation
Menjabat sejak 01 Oktober 2020 | Appointed October 1, 2020

Usia Age	: 43 tahun per 31 Desember 2021 43 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2019) Master's degree in Management from Universitas Gadjah Mada (2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Supriyoto
SPM Agrosolution | SPM Agrosolution
Menjabat sejak 01 Oktober 2020 | Appointed October 1, 2020

Usia Age	: 55 tahun per 31 Desember 2021 55 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S1 Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh November (1990) Bachelor's degree in Chemical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November (1990)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 102/A/KU/E10/SK/2021 1 Oktober 2021 Board of Directors Decree No. 102/A/KU/E10/SK/2021 October 1, 2021



Tathit Surya Arjangi
SPM Strategi & Kebijakan SDM | SPM Organizational Design and HC Planning
Menjabat sejak 1 Mei 2022 | Appointed May 1, 2022

Usia Age	: 43 tahun per 31 Desember 2021 43 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November (2002) Bachelor's degree in Technical Information from Institut Teknologi Sepuluh November (2002)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 046/A/KU/E10/SK/2022 1 Mei 2022 Board of Directors Decree No. 046/A/KU/E10/SK/2022 May 1, 2022



Olyvia Jilly
SPM Barang Reject | SPM Reject Items
Menjabat sejak 1 Januari 2022 | Appointed January 1, 2022

Usia Age	: 37 tahun per 31 Desember 2021 37 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: The University of Warwick, Master of Science (2017)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 116/A/KU/E10/SK/2021 1 Januari 2022 Board of Directors Decree No. 116/A/KU/E10/SK/2021 January 1, 2022



Kartina Wahyu Wiyati
SPM Manajemen Piutang | SPM Accounts Receivable Management
Menjabat sejak 5 Agustus 2021 | Appointed August 5, 2021

Usia Age	: 51 tahun per 31 Desember 2021 51 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Marketing Monash University (2000) Master's degree in Marketing from Monash University (2000)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Maslani
SPM Reformasi Subsidi Pupuk | SPM Fertilizer Subsidy Reform
Menjabat sejak 1 Desember 2021 | Appointed December 1, 2021

Usia Age	: 45 tahun per 31 Desember 2021 45 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada (2008) Master's degree in Economics Development from Universitas Gadjah Mada (2008)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 110/A/KU/E10/SK/2021 1 Desember 2021 Board of Directors Decree No. 110/A/KU/E10/SK/2021 December 1, 2021



Esa Adhi Pradhana
SPM CRP Non Produksi | SPM CRP Non Production
Menjabat sejak 05 Agustus 2021 | Appointed August 5, 2021

Usia Age	: 36 tahun per 31 Desember 2021 36 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S1 Akuntansi (Chartered Akuntan) Universitas Islam Indonesia (2007) Bachelor's degree in Accounting (Chartered Accountant) from Universitas Islam Indonesia (2007)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021



Rika Susanty
SPM Kios Komersil | SPM Commercial Kiosks
Menjabat sejak 1 Januari 2022 | Appointed January 1, 2022

Usia Age	: 50 tahun per 31 Desember 2021 50 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Manajemen Bina Nusantara (2019) Master's degree of Management from Bina Nusantara (2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 116/A/KU/E10/SK/2021 1 Januari 2022 Board of Directors Decree No. 116/A/KU/E10/SK/2021 2021 January 1, 2022



Rachmat Hamdani
SPM CRP Produksi | SPM CRP Production
Menjabat sejak 5 Agustus 2021 | Appointed August 5, 2021

Usia Age	: 52 tahun per 31 Desember 2021 52 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: Master Manajemen Universitas Sriwijaya (2016) Master of Management From Universitas Sriwijaya (2016)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 5 Agustus 2021 Board of Directors Decree No. 097/A/KU/E10/SK/2021 August 5, 2021



Ericsson Ramadhan
SPM Optimalisasi Stock & Sparepart | SVP SPM Stock & Spare Part Optimization
Menjabat sejak 1 November 2021 | Appointed November 1, 2021

Usia Age	: 39 tahun per 31 Desember 2021 39 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: Master of Science, Cranfield University (2017)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 097/A/KU/E10/SK/2021 1 November 2021 Board of Directors Decree No. 097/A/KU/E10/SK/2021 November 1, 2021



M. Zuhri Al Khafid
SPM Design Organisasi dan Perencanaan SDM | SPM Organizational Design and HC Planning
Menjabat sejak 1 Mei 2022 | Appointed May 1, 2022

Usia Age	: 41 tahun per 31 Desember 2021 41 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: Teknik Universitas Gadjah Mada (2003) Engineering from Universitas Gadjah Mada (2003)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 046/A/KU/E10/SK/2022 1 Mei 2022 Board of Directors Decree No. 046/A/KU/E10/SK/2022 May 1, 2022



Lani Sukma Imtihani Djumasa
SPM Manajemen Talenta dan Kinerja | Talent and Performance Management SPM
Menjabat sejak 1 Mei 2022 | Appointed May 1, 2022

Usia Age	: 38 tahun per 31 Desember 2021 38 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S2 Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada (2011) Master's degree of Psychology from Universitas Gadjah Mada (2011)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 046/A/KU/E10/SK/2022 1 Mei 2022 Board of Directors Decree No. 046/A/KU/E10/SK/2022 May 1, 2022



Syamsu Alamsah
SPM Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk | SPM Monitoring and Evaluation of Fertilizer Distribution
Menjabat sejak 1 Mei 2022 | Appointed May 1, 2022

Usia Age	: 56 tahun per 31 Desember 2021 56 as at December 31, 2021
Pendidikan Educational	: S1 Agribisnis STP Tanjingsari (1991) Bachelor's degree in Agribusiness from STP Tanjingsari (1991)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 046/A/KU/E10/SK/2022 1 Mei 2022 Board of Directors Decree No. 046/A/KU/E10/SK/2022 May 1, 2022

DEMOGRAFI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

DEMOGRAFI KARYAWAN

Sampai akhir tahun 2021, jumlah sumber daya manusia Perusahaan termasuk Entitas Anak secara langsung mencapai 7.851 orang, mengalami penurunan 5,82% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 8.336 orang. Penurunan ini dikarenakan PT Pupuk Indonesia (Persero) tidak melakukan rekrutmen atau penambahan karyawan pada tahun 2021. Peningkatan jumlah karyawan di PT Pupuk Indonesia (Persero) disebabkan adanya sentralisasi fungsi *Holding*.

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

By the end of 2021, the total HC in the Company and its direct Subsidiaries was 7,851 people, a decrease of 5.82% compared to 8,336 people in 2020. This decrease was due to PT Pupuk Indonesia (Persero) not recruiting or adding employees in 2021. The increase in the number of employees at PT Pupuk Indonesia (Persero) was due to the centralization of the Holding function.



Demografi Karyawan Tetap berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)

Permanent Employee Demographics based on Gender (People)

Entitas Entity	2021				2020			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
 Holding 								
Pupuk Indonesia	272	82	354	4,51%	204	81	285	3,42%
 Entitas Anak 								
Petrokimia Gresik	1.945	94	2.039	25,97%	2.155	115	2.270	27,23%
Pupuk Kujang	935	86	1.021	13,00%	977	89	1.066	12,79%
Pupuk Kalimantan Timur	1.254	116	1.370	17,45%	1.359	125	1.484	17,80%
Pupuk Iskandar Muda	504	65	569	7,25%	535	71	606	7,27%
Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.683	157	1.840	23,44%	1.762	174	1.936	23,22%
Rekayasa Industri	437	64	501	6,38%	460	65	525	6,30%
Mega Eltra	47	27	74	0,94%	51	30	81	0,97%
Pupuk Indonesia Logistik	27	7	34	0,43%	28	5	33	0,40%
Pupuk Indonesia Utilitas	31	8	39	0,50%	33	8	41	0,49%
Pupuk Indonesia Pangan	8	2	10	0,13%	7	2	9	0,11%
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	6.871	626	7.497	95,49%	7.367	684	2.270	96,58%
 Jumlah Total 	 7.143 	 708 	 7.851 	 100,00% 	 7.571 	 765 	 243 	 100,00%

L = Laki-laki | P = Perempuan
M = Male / F = Female



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Permanent Employee Demographics based on Employment Status (People)

Entitas Entity	Karyawan Tetap Permanent Employees			Karyawan Kontrak Contract Employees		
	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) 2020-2021 Increase (Decrease) 2020-2021	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) 2020-2021 Increase (Decrease) 2020-2021
 Holding 						
Pupuk Indonesia	354	285	69	20	33	(13)
 Entitas Anak Subsidiaries 						
Petrokimia Gresik	2.039	2.270	(231)	361	319	42
Pupuk Kujang	1.021	1.066	(45)	0	3	(3)
Pupuk Kalimantan Timur	1.370	1.484	(114)	36	35	1
Pupuk Iskandar Muda	569	606	(37)	12	13	(1)
Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.840	1.936	(96)	18	5	13
Rekayasa Industri	501	525	(24)	24	25	(1)
Mega Eltra	74	81	(7)	9	18	(9)
Pupuk Indonesia Logistik	34	33	1	1	7	(6)
Pupuk Indonesia Utilitas	39	41	(2)	16	16	0
Pupuk Indonesia Pangan	10	9	1	17	25	(8)
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	7.497	2.270	(554)	494	466	28
Jumlah Total	7.851	8.336	(485)	514	499	15



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Grade Jabatan (orang)

Permanent Employee Demographics based on Position Grade (People)

Entitas Entity	Grade 1		Grade 2		Grade 3		Grade 4		Grade 5-7	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
 Holding 										
Pupuk Indonesia	46	35	99	79	79	52	108	101	22	18
 Entitas Anak Subsidiaries 										
Petrokimia Gresik	22	20	75	76	236	225	360	473	1.346	1.476
Pupuk Kujang	13	11	56	59	170	170	291	311	492	515
Pupuk Kalimantan Timur	29	29	103	131	228	223	521	526	488	575
Pupuk Iskandar Muda	10	9	16	19	83	65	205	170	255	343
Pupuk Sriwidjaja Palembang	19	18	89	86	342	325	460	470	930	1.037
Rekayasa Industri	52	57	166	155	262	260	19	52	2	1
Mega Eltra	5	6	15	20	20	21	16	17	18	17
Pupuk Indonesia Logistik	2	2	9	10	5	6	7	10	11	5
Pupuk Indonesia Utilitas	0	1	6	9	1	1	7	11	25	19
Pupuk Indonesia Pangan	0	-	2	1	0	2	2	3	6	3
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	152	153	537	566	1.347	1.298	1.888	2.043	3.573	3.991
Jumlah Total	198	188	636	645	1.426	1.350	1.996	2.144	3.595	4.009



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia (orang)

Permanent Employee Demographics based on Age (People)

Entitas Entity	> 50		> 45-50		> 40-45		> 35-40		> 30-35		> 25-30		s/d 25	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
 Holding 														
Pupuk Indonesia	41	29	30	31	53	44	82	74	111	78	37	29	0	0
 Entitas Anak Subsidiaries 														
Petrokimia Gresik	183	378	11	21	12	13	111	49	576	536	1.054	917	92	356
Pupuk Kujang	71	73	58	61	140	102	368	353	279	308	105	168	0	1
Pupuk Kalimantan Timur	239	357	68	55	134	126	220	169	400	379	271	348	38	50
Pupuk Iskandar Muda	37	65	12	15	69	38	139	139	128	153	134	127	50	69
Pupuk Sriwidjaja Palembang	85	119	89	89	236	204	393	320	531	570	499	572	7	62
Rekayasa Industri	135	121	83	87	84	80	112	130	82	98	5	9	0	0
Mega Eltra	17	14	19	21	7	12	10	9	9	10	11	11	1	4
Pupuk Indonesia Logistik	7	3	4	6	5	8	6	4	10	5	2	4	0	3
Pupuk Indonesia Utilitas	0	0	0	1	4	2	5	5	14	11	12	13	4	9
Pupuk Indonesia Pangan	0	1	1	0	2	2	2	0	3	3	2	3	0	0
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	774	1.131	345	356	693	587	1.366	1.178	2.032	2.073	2.095	2.172	192	554
Jumlah Total	815	1.160	375	387	746	631	1.448	1.252	2.143	2.151	2.132	2.201	192	554



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)

Permanent Employee Demographics based on Education Level (People)

Entitas	Pasca Sarjana		Sarjana		Diploma		SLTA	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
 Holding 								
Pupuk Indonesia	79	60	274	210	1	11	0	0
 Entitas Anak Subsidiaries 								
Petrokimia Gresik	57	106	508	438	64	161	1.410	1.565
Pupuk Kujang	38	32	200	250	187	122	597	662
Pupuk Kalimantan Timur	67	87	309	272	181	218	812	907
Pupuk Iskandar Muda	16	30	164	193	110	132	279	251
Pupuk Sriwidjaja Palembang	77	91	451	624	226	323	1.086	898
Rekayasa Industri	150	62	305	463	7	0	39	0
Mega Eltra	54	6	19	63	1	3	0	9
Pupuk Indonesia Logistik	24	4	5	23	3	6	2	0
Pupuk Indonesia Utilitas	2	8	27	22	0	4	10	7
Pupuk Indonesia Pangan	1	1	8	7	1	1	0	0
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	486	427	1.996	2.355	780	970	4.235	4.299
Jumlah Total	565	487	2.270	2.565	781	981	4.235	4.303



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perusahaan meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni merupakan ujung tombak dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan secara berkesinambungan menjalankan program pendidikan dan pengembangan kompetensi karyawan agar lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang begitu pesat serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja. Perusahaan begitu memperhatikan dengan baik kualitas, profesionalitas dan efektivitas SDM dalam menjaga, serta menumbuhkan loyalitas dan produktivitas SDM setiap tahunnya. Komitmen-komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan dengan mengacu pada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh SDM.

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah merealisasikan biaya pengembangan kompetensi sebesar Rp114.120 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang Rp83.392 miliar.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company believes that qualified Human Capital (HC) are the spearhead in the Company's effort to realize its vision and mission. For this reason, the Company continuously carries out employee competency education and development programs to make them more competitive in the face of rapid changes and developments as well as to improve the performance effectiveness and productivity. The Company pays great attention to the quality, professionalism and effectiveness of its HC by maintaining, and growing their loyalty and productivity every year. These commitments are evidenced by the HC training and development carried out, with reference to the training and development framework that covers all aspects and development methods for all HC.

During 2021, the Company competency development costs amounted to Rp114,120 billion, higher than Rp83,392 billion in 2020.

REALISASI ANGGARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

COMPETENCY DEVELOPMENT BUDGET REALIZATION

	2021	2020	2019
Realisasi Anggaran Budget Realization	114.120	83.392	142,93

(Rp Miliar)
(Rp Billion)



Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development Realization

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Peserta berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level	Jumlah Total
1	Kepemimpinan Leadership	Softskill dan <i>hardskill</i> Softskill and <i>hardskill</i>	Menyiapkan calon leader dengan kemampuan <i>leadership</i> untuk jenjang karir selanjutnya. Preparing prospective leaders with leadership skills for the next career path.	All Grade	161 peserta dengan total 10 kegiatan 161 participants with a total of 10
2	Manajemen Risiko dan <i>Governance</i> Main Risk and Governance	Softskill dan <i>hardskill</i> Softskill and <i>hardskill</i>	Mengidentifikasi keberadaan dan penyebab munculnya resiko dalam upaya pengembangan bisnis. Identifying the existence and causes of risks emerging during the business development efforts.	All Grade	885 peserta dengan total 17 kegiatan 885 participants with a total of 17 activities

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Peserta berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level	Jumlah Total
3	Budaya Perusahaan Corporate Culture	<i>Softskill</i>	Untuk menanamkan budaya AKHLAK demi transformasi <i>human capital</i> dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global. Instilling the AKHLAK culture for the HC transformation, and increasing the competitiveness of SOEs to become global players.	<i>All Grade</i>	950 peserta dengan total 11 kegiatan 950 participants with a total of 11 activities
4	Teknologi Informasi Information Technology	<i>Softskill</i> dan <i>hardskill</i> Softskill and hardskill	Memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya peran IT dalam baik dalam mendukung layanan yang diberikan kepada <i>user</i> maupun sebagai sarana komunikasi internal perusahaan. Providing a thorough understanding of the importance of IT in both supporting the services provided to users and as a means of internal Company communication.	<i>All Grade</i>	61 peserta dengan total 11 kegiatan 61 participants with a total of 11 activities
5	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	<i>Softskill</i>	Meningkatkan <i>awareness</i> tentang kesehatan dan keselamatan di lingkungan Perusahaan. Increasing awareness about health and safety within the Company.	<i>All Grade</i>	836 peserta dengan total 12 kegiatan 836 participants with a total of 12 activities
6	Keuangan Finance	<i>Softskill</i> dan <i>hardskill</i> Softskill and hardskill	Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan perusahaan sehingga dapat merencanakan dan mengendalikan keuangan Perusahaan. Increasing knowledge about Company financial management so as to plan and control Company finances.	<i>All Grade</i>	48 peserta dengan total 10 kegiatan 48 participants with a total of 10 activities
7	Pemasaran & Distribusi	<i>Softskill</i> dan <i>hardskill</i> Softskill and hardskill	Meningkatkan kinerja <i>sales</i> , <i>marketing</i> , dan distribusi dengan optimal. Meningkatkan kinerja <i>sales</i> , <i>marketing</i> , dan distribusi dengan optimal.	<i>All Grade</i>	213 peserta dengan total 6 kegiatan 213 participants with a total of 6 activities
8	Sumber Daya Manusia Human Capital	<i>Softskill</i> dan <i>hardskill</i> Softskill and hardskill	Meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam Perusahaan. Meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam Perusahaan.	<i>All Grade</i>	754 peserta dengan total 42 kegiatan 754 participants with a total of 42 activities
9	Sertifikasi Certification	<i>Hardskill</i>	Memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Ensuring the competencies a person has been obtained through learning, training, and work experience.	<i>All Grade</i>	73 peserta dengan total 17 kegiatan 73 participants with a total of 17 activities



No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Peserta berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level	Jumlah Total
10	Sistem Manajemen dan Prosedur Management System and Procedures	<i>Hardskill</i>	Meningkatkan pemahaman mengenai sistem manajemen yang paling mutakhir. Increasing understanding of the most up-to-date management system.	<i>All Grade</i>	40 peserta dengan total 4 kegiatan 40 participants with a total of 4 activities
11	Kegiatan Pembelajaran lainnya	<i>Softskill dan hardskill</i>	Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Increasing the skills and competencies of employees in accordance with the Company needs.	<i>All Grade</i>	1156 peserta dengan total 44 kegiatan 1,156 participants with a total of 44 activities

REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS, KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, TATA KELOLA KORPORAT, MANAJEMEN RISIKO, SERTA TATA KELOLA & KEPATUHAN

REALIZATION OF COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS, COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT, CORPORATE GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND GOVERNANCE & COMPLIANCE

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Darmin Nasution (Komisaris Utama) (President Commissioner)	<i>Sharing Session</i>	Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Celebration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2021	10 Desember 2021 December 10, 2021	KPK
Febrio Nathan Kacaribu (Komisaris) (Commissioner)	<i>Sharing Session</i>	<i>Sharing Knowledge</i> Pengawasan Pengadaan, Pendistribusian dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di seluruh Indonesia Sharing Knowledge on Supervision of Procurement, Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers throughout Indonesia	19 Oktober 2021 October 19, 2021	PTPI
Suwandi (Komisaris) (Commissioner)	<i>Sharing Session</i>	<i>Knowledge Sharing Business Judgement Rule</i> Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Perusahaan Knowledge Sharing Business Judgment Rule in Corporate Strategic Decision Making	15 September 2021 September 15, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Implementasi Sosialisasi WBS Tindak Pidana Korupsi terintegrasi KPK RI dan PT Pupuk Indonesia Implementation of WBS Socialization for Corruption Crimes integrated by KPK and PT Pupuk Indonesia	30 September 2021 September 30, 2021	KPK
	<i>Sharing Session</i>	Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Celebration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2021	10 December 2021 December 10, 2021	KPK

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Direksi Board of Directors				
Bakir Pasaman (Direktur Utama) (President Director)	<i>Inhouse</i>	Pemaparan Hasil Pengukuran AKHLAK <i>Culture Health Index</i> Presentation on Measurement Results of AKHLAK Culture Health Index	10 Februari 2021 February 10, 2021	ACT
	<i>Sharing Session</i>	Pelaksanaan Pupuk Indonesia <i>Quality Improvement (PIQI) 2021</i> Implementation of Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021	9 December 2021 December 9, 2021	PTPI
Nugroho Christijanto (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	<i>Inhouse</i>	Pemaparan Hasil Pengukuran AKHLAK <i>Culture Health Index</i> Presentation on Measurement Results of AKHLAK Culture Health Index	10 February 2021 February 10, 2021	ACT
	<i>Sharing Session</i>	<i>Transformational Leadership Series II</i> Transformational Leadership Series II	10 June 2021 June 10, 2021	ACT
	<i>Sharing Session</i>	<i>Leaders Talk AKHLAK dengan Tema Kolaboratif</i> Leaders Talk AKHLAK with Collaborative	2 September 2021 September 2, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Implementasi Sosialisasi WBS Tindak Pidana Korupsi terintegrasi KPK RI dan PT Pupuk Indonesia Implementation of WBS Socialization for Corruption Crimes integrated by KPK and PT Pupuk Indonesia	30 September 2021 September 30, 2021	KPK
	<i>Inhouse</i>	<i>Data Science Bootcamp 2021</i> Data Science Bootcamp 2021	18 October 2021 October 18, 2021	PTPI
	<i>Public</i>	<i>Webinar Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices Business Judgment Rule Corporate Action or Corruption</i> Webinar Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices BUSINESS JUDGMENT RULE Corporate Action or Corruption	26 October 2021 October 26, 2021	PT Pertamina Training & Consulting
	<i>Sharing Session</i>	Pelaksanaan Pupuk Indonesia <i>Quality Improvement (PIQI) 2021</i> Implementation of Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021	9 December 2021 December 9, 2021	PTPI
Bob Indiarso (Direktur Produksi) (Director of Production)	<i>Public</i>	<i>Creating Values</i> Komisaris dan Direksi BUMN Creating Values Board of Commissioners and Board of Directors BUMN	3 June 2021 June 3, 2021	PT Mediasuara Shakti
	<i>Sharing Session</i>	<i>Transformational Leadership Series II</i> Transformational Leadership Series II	10 June 2021 June 10, 2021	ACT
Eko Taufik Wibowo* (Direktur Keuangan dan Investasi) (Director of Finance and Investment)	<i>Inhouse</i>	Pemaparan Hasil Pengukuran AKHLAK <i>Culture Health Index</i> Presentation of the Measurement Results of AKHLAK Culture Health Index	10 February 2021 February 10, 2021	ACT
	<i>Sharing Session</i>	<i>Transformational Leadership Series II</i> Transformational Leadership Series II	10 June 2021 June 10, 2021	ACT



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Listiarini Dewajanti ** (Direktur Keuangan dan Investasi) (Director of Finance and Investment)	<i>Public</i>	Pelatihan <i>Advanced Financial Modelling and Valuation</i> Advanced Financial Modeling and Valuation Training	23 August 2021 August 23, 2021	PT Fidelitas Konsultama Int
	<i>Sharing Session</i>	Implementasi Sosialisasi WBS Tindak Pidana Korupsi terintegrasi KPK RI dan PT Pupuk Indonesia Implementation of WBS Socialization for Corruption Crimes integrated by KPK and PT Pupuk Indonesia	30 September 2021 September 30, 2021	KPK
Panji Winanteya Ruky (Direktur Transformasi Bisnis) (Director of Business Transformation)	<i>Sharing Session</i>	Sosialisasi Pemaparan <i>Roadmap Budaya</i> Socialization of Culture Roadmap Presentation	8 February 2021 February 8, 2021	PTPI
	<i>Inhouse</i>	Pemaparan Hasil Pengukuran AKHLAK <i>Culture Health Index</i> Presentation of the Measurement Results of AKHLAK Culture Health Index	10 February 2021 February 10, 2021	ACT
	<i>Sharing Session</i>	<i>Transformational Leadership Series II</i> Transformational Leadership Series II	10 June 2021 June 10, 2021	ACT
	<i>Inhouse</i>	<i>Data Science Bootcamp 2021</i> Data Science Bootcamp 2021	18 October 2021 October 18, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Pelaksanaan Pupuk Indonesia <i>Quality Improvement (PIQI) 2021</i> Implementation of Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021	9 December 2021 December 9, 2021	PTPI
Winardi *** (Direktur SDM dan Tata Kelola) (Director of HC and Governance)	<i>Inhouse</i>	<i>Workshop Evaluasi Proper Pupuk Indonesia</i> Pupuk Indonesia Proper Evaluation Workshop	21 January 2021 January 21, 2021	PTPI
	<i>Inhouse</i>	Pemaparan Hasil Pengukuran AKHLAK <i>Culture Health Index</i> Presentation of AKHLAK Culture Health Index Measurement Results	10 February 2021 February 10, 2021	ACT
	<i>Sharing Session</i>	Seminar <i>Work Life Balance</i> Keiklasan Dalam Bekerja Work Life Balance Seminar Sincereness In Work	5 May 2021 May 5, 2021	PTPI, OASIS
	<i>Sharing Session</i>	<i>Talent Management and Development BUMN</i> SOE Talent Management and Development	27 May 2021 May 27, 2021	Forum Human Capital Indonesia
	<i>Public</i>	<i>Leadership Seminar Tahun 2021 "Leader's Transformation in The Digital Era"</i> Leadership Seminar 2021 "Leader's Transformation in The Digital Era"	3 June 2021 June 3, 2021	Bank Indonesia
	<i>Sharing Session</i>	<i>Transformational Leadership Series II</i> Transformational Leadership Series II	10 June 2021 June 10, 2021	ACT
	<i>Sharing Session</i>	<i>Webinar AKHLAK ADAPTIF "Navigate Innovation with Culture Change"</i> Webinar AKHLAK ADAPTIF "Navigate Innovation with Culture Change"	11 June 2021 June 11, 2021	PTPI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
	<i>Sharing Session</i>	<i>Benchmark Pelaksanaan Talent Development</i> di Mining Industry Indonesia (MIND ID) Benchmark of Talent Development Implementation in Indonesian Mining Industry (MIND ID)	25 August 2021 August 24, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	<i>Leaders Challenge: Making AKHLAK Liveable at Work and Drive Business Performance</i>	24 September 2021 September 24, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Implementasi Sosialisasi WBS Tindak Pidana Korupsi terintegrasi KPK RI dan PT Pupuk Indonesia Implementation of WBS Socialization for Corruption Crimes integrated by KPK and PT Pupuk Indonesia	30 September 2021 September 30, 2021	KPK
	<i>Sharing Session</i>	Sosialisasi Beasiswa LPDP tahun 2022 LPDP Scholarship Socialization in 2022	11 October 2021 October 11, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	<i>Webinar Semangat, Bangkit dan Tumbuh di Masa Pandemi "Managing Burnout"</i> Webinar Enthusiasm, Rise and Growth in "Managing Burnout" Pandemic	26 October 2021 October 26, 2021	PTPI
	<i>Inhouse</i>	Kelas Bersama Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute PT Pupuk Indonesia Class with PT Pupuk Indonesia Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute	4 November 2021 November 4, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Pelaksanaan Pupuk Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021 Implementation of Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021	9 December 2021 December 9, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Celebration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2021	10 December 2021 December 10, 2021	KPK
	<i>Sharing Session</i>	<i>Webinar AKHLAK dengan Tema KOMPETEN</i> AKHLAK Webinar with COMPETENT Theme	16 December 2021 December 16, 2021	PTPI
Gusrizal (Direktur Pemasaran) (Director of Marketing)	<i>Inhouse</i>	Pemaparan Hasil Pengukuran AKHLAK Culture Health Index Presentation of Measurement Results for AKHLAK Culture Health Index	10 February 2021 February 10, 2021	ACT
	<i>Sharing Session</i>	<i>Transformational Leadership Series II</i> Transformational Leadership Series II	10 June 2021 June 10, 2021	ACT
	<i>Sharing Session</i>	<i>Sharing Session Media Handling</i> PSO Wilayah Barat & Marcomm	9 September 2021 September 9, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	<i>Sharing Session Media Handling</i> PSO Wilayah Timur	10 September 2021 September 10, 2021	PTPI
	<i>Public</i>	IFA 2021 Annual Conference	27 September 2021 September 27, 2021	IFA



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Jamsaton Nababan (Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha) (Director of Portfolio & Business Development)	Sharing Session	Leaders Talk AKHLAK dengan Tema Kolaboratif Leaders Talk AKHLAK with theme "Collaborative"	2 September 2021 September 2, 2021	PTPI
	Sharing Session	Sharing Session dengan Tema "Managing Up, Sideways & Bottoms with Integrity and Professionalism" Sharing Session dengan Tema "Managing Up, Sideways & Bottoms with Integrity and Professionalism"	12 October 2021 October 12, 2021	PTPI
	Sharing Session	Pelaksanaan Pupuk Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021 Implementation of Pupuk Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021	9 December 2021 December 9, 2021	PTPI

Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris tidak mengikuti program pengembangan kompetensi pada tahun 2021
The Secretary to the Board of Commissioners did not participate in any competency development programs in 2021.

Komite Audit Audit Committee

Christine Tjen (Anggota Komite Audit) (Audit Committee Member)	Public	Certification in Audit Committee Certification (CACCP)	9 June 2021 June 9, 2021	Pers. Ikatan Komire Audit Indonesia
	Public	Pelatihan Tanggung Jawab Komite Audit Saat perseroaan tersangkut masalah Board of Commissioners Committee Training Responsibilities for the Audit Committee when a Company is in trouble	23 September 2021 September 23, 2021	IKAI
	Sharing Session	Implementasi Sosialisasi WBS Tindak Pidana Korupsi terintegrasi KPK RI dan PT Pupuk Indonesia Implementation of WBS Socialization for Corruption Crimes integrated by KPK and PT Pupuk Indonesia	30 September 2021 September 30, 2021	KPK
	Sharing Session	Sharing Knowledge Pengawasan Pengadaan, Pendistribusian dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di seluruh Indonesia Sharing Knowledge on Supervision of Procurement, Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers throughout Indonesia	19 October 2021 October 19, 2021	PTPI
	Sharing Session	Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Celebration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2021	10 December 2021 December 10, 2021	KPK
M. Sapto Setiawan **** (Anggota Komite Audit) (Audit Committee Member)	Public	Certification in Audit Committee Certification (CACCP)	9 June 2021 June 9, 2021	Pers. Ikatan Komire Audit Indonesia
	Public	Pelatihan Tanggung Jawab Komite Audit Saat perseroaan tersangkut masalah Board of Commissioners Committee Training Responsibilities for the Audit Committee when a Company is in trouble	23 September 2021 September 23, 2021	IKAI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
RM. Wiratmoko Prasihanto (Anggota Komite Audit) (Audit Committee Member)	<i>Sharing Session</i>	<i>Sharing Knowledge</i> Pengawasan Pengadaan, Pendistribusian dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di seluruh Indonesia Sharing Knowledge on Supervision of Procurement, Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers throughout Indonesia	19 October 2021 October 19, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Seremonial <i>Launching Produk Single Branding</i> Single Branding Product Launching Ceremony	27 December 2021 December 27, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Celebration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2021	10 December 2021 December 10, 2021	KPK
Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko CGC and Risk Management Monitoring Committee				
Asri Saraswati (Anggota Komite PMR & GCG) (RMM & GCG Committee Member)	<i>Inhouse</i>	Pelatihan & Sertifikasi QRMP QRMP Training & Certification	12 April 2021 April 12, 2021	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
	<i>Sharing Session</i>	<i>Knowledge Sharing Business Judgement Rule</i> Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Perusahaan Knowledge Sharing Business Judgment Rule in Corporate Strategic Decision Making	15 September 2021 September 15, 2021	PTPI
	<i>Public</i>	Pelatihan Komite Dewan Komisaris Tanggung Jawab Komite Audit Saat perseroaan tersangkut masalah Board of Commissioners Committee Training Responsibilities for the Audit Committee when a Company is in trouble	23 September 2021 September 23, 2021	IKAI
	<i>Sharing Session</i>	Implementasi Sosialisasi WBS Tindak Pidana Korupsi terintegrasi KPK RI dan PT Pupuk Indonesia Implementation of WBS Socialization for Corruption Crimes integrated by KPK and PT Pupuk Indonesia	30 September 2021 September 30, 2021	KPK
	<i>Sharing Session</i>	<i>Sharing Knowledge</i> Pengawasan Pengadaan, Pendistribusian dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di seluruh Indonesia Sharing Knowledge on Supervision of Procurement, Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers throughout Indonesia	19 October 2021 October 19, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Celebration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2021	10 December 2021 December 10, 2021	KPK



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Riza Azmi (Anggota Komite PMR & GCG) (PMR & GCG Committee Member)	<i>Sharing Session</i>	<i>Knowledge Sharing Business Judgment Rule</i> Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Perusahaan Knowledge Sharing Business Judgment Rule in Corporate Strategic Decision Making	15 September 2021 September 15, 2021	PTPI
	<i>Public</i>	Pelatihan Tanggung Jawab Komite Audit Saat perseroaan tersangkut masalah Board of Commissioners Committee Training Responsibilities for the Audit Committee when a Company is in trouble	23 September 2021 September 23, 2021	IKAI
	<i>Sharing Session</i>	Implementasi Sosialisasi WBS Tindak Pidana Korupsi terintegrasi KPK RI dan PT Pupuk Indonesia Implementation of WBS Socialization for Corruption Crimes integrated by KPK and PT Pupuk Indonesia	30 September 2021 September 30, 2021	KPK
	<i>Sharing Session</i>	<i>Sharing Knowledge</i> Pengawasan Pengadaan, Pendistribusian dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di seluruh Indonesia Sharing Knowledge on Supervision of Procurement, Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers throughout Indonesia	19 October 2021 October 19, 2021	PTPI
	<i>Sharing Session</i>	Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Celebration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2021	10 December 2021 December 10, 2021	KPK
Tungkot Sipayung***** (Anggota Komite PMR & GCG) (Member of the RMM & GCG Committee)	<i>Inhouse</i>	Pelatihan & Sertifikasi QRMP QRMP Training & Certification	12 April 2021 April 12, 2021	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee				
R Nurhidayat (Anggota Komite Nominasi & Remunerasi) (Nomination & Remuneration Committee Member)	<i>Sharing Session</i>	<i>Knowledge Sharing Business Judgment Rule</i> Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Perusahaan Knowledge Sharing Business Judgment Rule in Corporate Strategic Decision Making	15 September 2021 September 15, 2021	PTPI
	<i>Public</i>	Pelatihan Komite Dewan Komisaris Tanggung Jawab Komite Audit Saat perseroaan tersangkut masalah Board of Commissioners Committee Training Responsibilities for the Audit Committee when a Company is in trouble	23 September 2021 September 23, 2021	IKAI
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
Tedy Nawardin (SVP Sekretaris Perusahaan) (SVP Corporate Secretary)	<i>Sharing Session</i>	Pelatihan Induksi Karyawan Pupuk Indonesia Pupuk Indonesia Employee Induction Training	7 September 2021 September 7 2021	PTPI
	<i>Workshop</i>	Kelas Bersama Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute PT Pupuk Indonesia Class with Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute, PT Pupuk Indonesia	4 November 2021 November 4, 2021	PTPI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern Internal Control Unit/Audit Intern				
Yulius Sudaryoko (SVP Satuan Pengawasan Intern) (SVP Internal Audit Unit)	Workshop	Exclusive Workshop Strategic KMap Development Periode 2	19 Januari 2021 January 19, 2021	PTPI
	Workshop	Workshop Culture Leader on Boarding Series II PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)	7 Mei 2021 May 7, 2021	ACT Consulting
	Workshop	Workshop Anger Management PT Pupuk Indonesia	9 Juli 2021 July 9, 2021	PTPI
	Sharing Session	Leaders Talk AKHLAK dengan Tema Kolaboratif Bpk. Nugroho Christijanto	2 September 2021 September 2, 2021	PTPI
	Sharing Session	Knowledge Sharing Business Judgement Rule Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Perusahaan Knowledge Sharing Business Judgment Rule in Corporate Strategic Decision Making	15 September 2021 September 15, 2021	PTPI
	Webinar	Webinar Audit Investigasi Investigative Audit Webinar	22 September 2021 September 22, 2021	BKPP
	Sharing Session	Implementasi Sosialisasi WBS Tindak Pidana Korupsi terintegrasi KPK RI dan PT Pupuk Indonesia Socialization of integrated KPK and PT Pupuk Indonesia WBS for Corruption Crimes	30 September 2021 September 30, 2021	KPK
Manajemen Risiko Risk Management				
Achmad Diponegoro (SVP Manajemen Risiko) (Risk Management)	Training	Training Hedge Accounting	14-15 Desember 2021 December 14-15, 2021	Deloitte
	Training	Konferensi Risk Beyond: Journey to a new Frontier	8-10 Desember 2021 December 8-10, 2021	ERMA
	Training	Training Enterprise Risk Management (ERM) dan Perumusan Key Risk Indicator (KRI) PT Pupuk Indonesia (Persero)	24 November 2021 November 24, 2021	CENTRIA
	Webinar	Riskhub International Webinar: Accelerating ESG: Benefits to Creating The Competitive Advantage	27 September 2021 September 27, 2021	ERMA
	Sharing Session	Knowledge Sharing Business Judgement Rule Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Perusahaan Knowledge Sharing Business Judgment Rule in Corporate Strategic Decision Making	15 September 2021 September 15, 2021	Inhouse
	Training	E-learning Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi E-learning Gratification Control Technical Guidance	26 Juli 2021 July 26, 2021	KPK
	Workshop	Pelatihan ISO 31000 dan sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) ISO 31000 training and Qualified Risk Management Professional (QRMP) certification	15 April 2021 April 15, 2021	CRMS dan LSP MKS



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Tata Kelola & Kepatuhan Governance & Compliance				
Agus Purnomo (VP Tata Kelola & Kepatuhan) (VP Governance & Compliance)	<i>Workshop</i>	Internalisasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Internalization of KPK Regulation No. 2 of 2020	19 Januari 2021 January 19, 2021	KPK RI
	<i>Webinar</i>	<i>Webinar</i> Memperkuat Pengawasan Internal Organisasi Melalui Penerapan ISO 37002 <i>Whistleblowing Management</i> Webinar on Strengthening Organizational Internal Audit through Implementation of ISO 37002 Whistleblowing Management	27 Februari 2021 February 27, 2021	Visi Integritas
	<i>Sharing Session</i>	<i>Sharing Session</i> Hasil Evaluasi Penerapan GCG PI Grup Tahun 2020 Sharing Session on the PI Group GCG Implementation Evaluation Results in 2020	3 Maret 2021 March 3, 2021	PTPI
	<i>Webinar</i>	<i>Webinar</i> Nasional GCG <i>Implementation</i> National Webinar on GCG Implementation	24 Maret 2021 March 24, 2021	Mutu Institute
	<i>Webinar</i>	<i>Webinar</i> Nasional Mewujudkan Dunia Usaha Tanpa Korupsi National Webinar on Realizing a Business World Without Corruption	28 April 2021 April 28, 2021	KPK RI
	<i>Webinar</i>	<i>Webinar</i> Nasional Implementasi <i>Forensic Accounting</i> dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> National Webinar on Forensic Accounting Implementation for Detecting Fraud	5 Juni 2021 June 5, 2021	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
	<i>Webinar</i>	<i>Webinar</i> Implementasi SNI 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan Webinar on Implementation of SNI 37301:2021 Compliance Management System	23 Juni 2021 June 23, 2021	Badan Standarisasi Nasional
	<i>Workshop</i>	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Anti Fraud Manager (CAFM)</i> Certified Anti Fraud Manager Training and Certification	21-23 Juni 2021 June 21-23, 2021	Asia Anti Fraud
	<i>Training</i>	Belajar Anti <i>Fraud</i> " <i>Prevention with the Implementation of Anti Bribery Management System</i> " Learning on Anti Fraud "Prevention with the Implementation of Anti Bribery Management System"	3 Juli 2021 July 3, 2021	ACFE Indonesia Chapter
	<i>Webinar</i>	<i>Webinar</i> " <i>Ethic in Business: Big Challenge</i> " " <i>Reinforcing Ethical Business and Integrity Practices</i> "	7-8 Juli 2021 July 7-8, 2021	PPM Manajemen
	<i>Webinar</i>	<i>International Webinar</i> : " <i>Cyber Risk Management: Stop Cyber Attacks Before They Stop You</i> "	15 Juli 2021 July 15, 2021	IRMAPA
<i>Training</i>	Belajar Anti <i>Fraud</i> " <i>Fraud Risk Assessment</i> " Learning on Anti Fraud "Fraud Risk Assessment"	31 Juli 2021 July 31, 2021	ACFE Indonesia Chapter	

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
	Seminar	Seminar GRC Summit 2021 pada tanggal 26 Agustus 2021 GRC Summit 2021 Seminar on August 26, 2021	26 Agustus 2021 August 26, 2021	PTPI
	Webinar	Webinar Penerapan ISO 37002:2021 <i>Whistleblowing Management System</i> Webinar on Implementation of the ISO 37002:2021 Whistleblowing Management System	4 September 2021 September 4, 2021	Indonesia ISO Expert Association
	Workshop	<i>Workshop</i> Anti Korupsi "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" Anti-Corruption Workshop on "Corruption Detection and Prevention"	14 September 2021 September 14, 2021	BPK RI
	Webinar	<i>RISKHub International Webinar "Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage"</i> RISKHub International Webinar on "Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage"	27 September 2021 September 27, 2021	Marsh, IRMAPA, dan ERMA
	Sharing Session	Internalisasi Budaya Antikorupsi di lingkungan PI Grup Internalization of Anti-Corruption Culture in the PI Group	30 September 2021 September 30, 2021	KPK RI
	Training	Pelatihan <i>Awareness</i> Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600:2016 Training on SNI ISO 19600:2016 Compliance Management System Awareness	19-22 Oktober 2021 October 19-22, 2021	PTPI
	Training	<i>Training of Trainer Whistleblowing System Online</i>	29 Oktober 2021 October 29, 2021	PTPI
	Workshop	Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas untuk Personil Bidang Tata Kelola & Kepatuhan Integrity Builder Expert Certification for Governance & Compliance Personnel	16-18 November 2021 November 16-18, 2021	ACLK KPK
	Training	Internalisasi Budaya Anti Korupsi di lingkungan PI Grup Internalization of Anti-Corruption Culture in the PI Group	10 Desember 2021 December 10, 2021	PTPI
	Training	<i>Training of Trainer Admin</i> Pengelola LHKPN PI Grup Training of Trainers for Admin Manager of LHKPN in the PI Group	21 Desember 2021 December 21, 2021	PTPI

* Masa jabatan berakhir pada 16 Juli 2021

** Masa jabatan dimulai sejak 16 Juli 2021 dan berakhir pada 22 Desember 2021

*** Masa jabatan berakhir pada 22 Desember 2021

**** Masa jabatan berakhir pada 31 Oktober 2021

***** Masa jabatan berakhir sejak 17 Juli 2021

* Term of office ended on July 16, 2021

** Term of office started on July 16, 2021 and ended on December 22, 2021

*** Term of office ended on December 22, 2021

**** Term of office ended on October 31, 2021

***** Term of office ended on July 17, 2021



Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, pada tahun 2021 PI Grup melaksanakan program-program peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia, meliputi *in house training*, *outplant training*, dan pelatihan sertifikasi. Mandays Pelatihan sampai dengan bulan Desember 2021 sejumlah 86.588 dari target sebanyak 40.310, dengan rincian sebagai berikut.

To improve HC competencies, in 2021 the PI Group conducted programs to increase the HC knowledge and skills, including in-house training, outplant training, and certification training. Training Mandays until December 2021 totaled 86,588 of the target of 40,310, with the following details.

No	Perusahaan Company	Realisasi Mandays 2021 2021 Mandays Realization	Realisasi Mandays 2020 2020 Mandays Realization	Realisasi Mandays 2019 2019 Mandays Realization
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	3.498	3.303	2.840
2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	21.644	19.761	38.225
3	PT Pupuk Kujang	9.394	11.399	12.498
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	18.320	29.955	24.618
5	PT Petrokimia Gresik	17.425	33.964	26.507
6	PT Pupuk Iskandar Muda	6.647	7.932	14.189
7	PT ReKayasa Industri	7.493	11.531	8.868
8	PT Mega Eltra	635	1.119	1.199
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	388	472	382
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas	1.070	817	918
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	74	238	165
Total		86.588	120.491	130.409

Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri

Domestic and Overseas Study Assignments

Perusahaan Company	2021		2020	
	DN Domestic	LN Overseas	DN Domestic	LN Overseas
PT Pupuk Indonesia (Persero)	8	1	5	1
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	3	-	5	2
PT Pupuk Kalimantan Timur	-	-	6	2
PT Petrokimia Gresik	8	3	6	3
PT Pupuk Kujang	5	1	7	-
PT Pupuk Iskandar Muda	3	2	6	1
PT ReKayasa Industri	-	1	4	-
Total	27	8	38	8

Dalam rangka peningkatan daya saing SDM, Perusahaan merealisasikannya dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di era global melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP IPI). LSP IPI telah mensertifikasi karyawan internal, karyawan eksternal dan Tenaga Pengajar/Guru sebagai berikut:

In order to increase HC competitiveness, the Company realizes this by implementing competency certification in the global era through the Pupuk Indonesia Industry Professional Certification Agency (LSP IPI). LSP IPI has certified the following internal employees, external employees and teaching staff:

No	Tempat Uji Kompetensi Competency Test Place	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1	PT Pupuk Kalimantan Timur	-	21	191	138	276	65	26	24
2	PT Petrokimia Gresik	71	170	347	79	64	188	262	203
3	PT Pupuk Kujang Cikampek	-	24	109	-	-	129	-	-
4	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	-	24	73	241	381	288	187	42
5	PT Pupuk Iskandar Muda	-	-	179	138	-	63	-	-
Jumlah per tahun Total per year		71	239	899	800	721	733	475	269



PEMEGANG SAHAM

Shareholders

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of shares (sheet)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Deposited Capital (Rp)	(%) Kepemilikan Ownership
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham Share Nominal Value = Rp1,000,000/share			
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	25.000.000	25.000.000.000.000	100,00%
Total	25.000.000	25.000.000.000.000	100,00%

Keseluruhan saham PT Pupuk Indonesia (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak watau senilai Rp25.000.000.000.000.

All shares in PT Pupuk Indonesia (Persero) are owned by the Government of Indonesia with a total share ownership of 25,000,000 shares or a value of Rp25,000,000,000,000,000.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Manajemen Kunci Key Management	Jumlah Total Shares
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nihil Nil
Direksi Board of Directors	Nihil Nil

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

INFORMATION ON THE MAJORITY/CONTROLLING SHAREHOLDERS

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari PT Pupuk Indonesia dengan kepemilikan sebesar 100,00%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

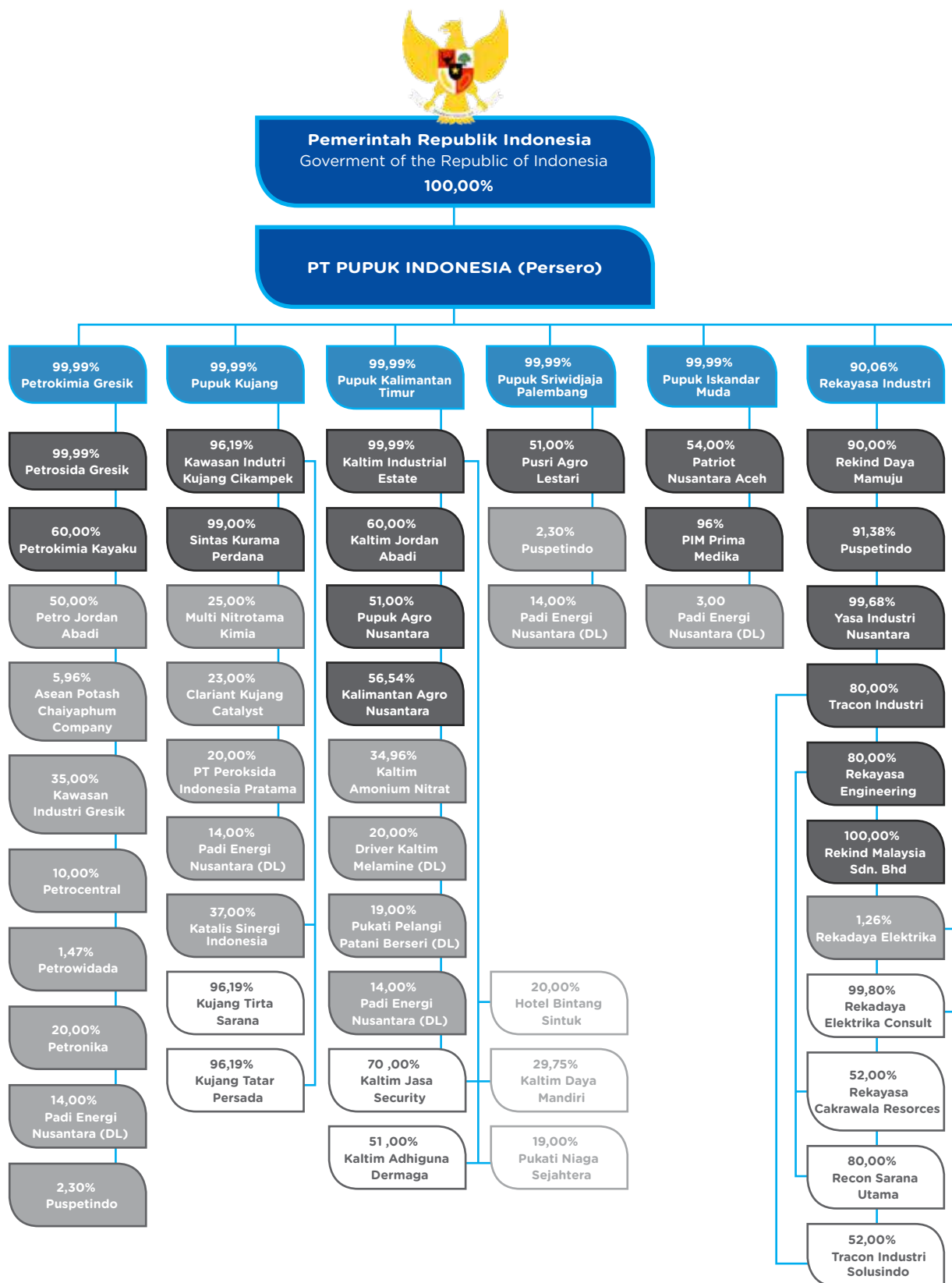
The Government of the Republic of Indonesia is the majority and controlling shareholder and the ultimate owner of PT Pupuk Indonesia with 100.00% ownership. Based on Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Positions, Duties and Authorities of the Minister of Finance to State Owned Enterprises (Persero), Public Companies (PERUM) and Service Companies (PERJAN) to the State Minister for State Owned Enterprises and Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises along with the State Gazette of the Republic of Indonesia; The Proxy of the Company's Shareholders is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE).

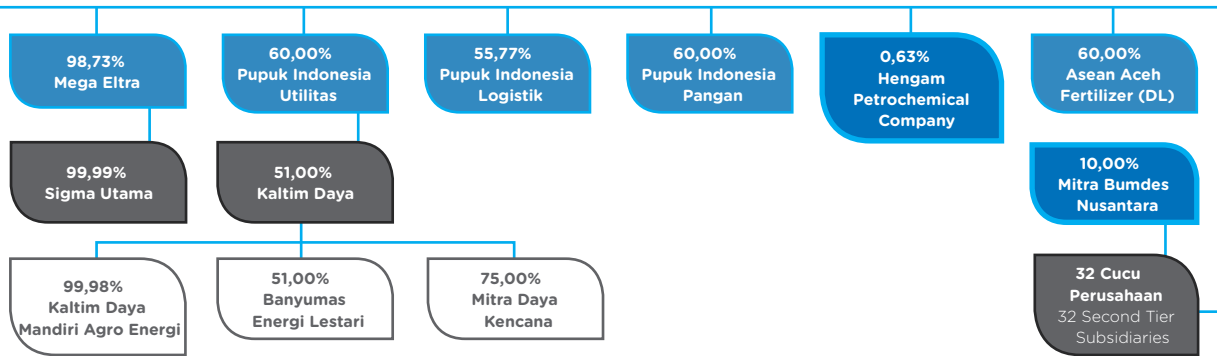




STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Corporate Group Structure





Keterangan

Description

-  Anak Perusahaan Mayoritas
Majority Subsidiaries
-  Anak Perusahaan Minoritas
Minority Subsidiaries
-  Cucu Perusahaan Mayoritas
Majority Second Tier Subsidiaries
-  Cucu Perusahaan Minoritas
Minority Second Tier Subsidiaries
-  Cicit Perusahaan Mayoritas
Majority Third Tier Subsidiaries
-  Cicit Perusahaan Minoritas
Minority Third Tier Subsidiaries



DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI, *JOINT VENTURE (JV)* DAN *SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)*

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES, JOINT VENTURES (JV) AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV)

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham Share Ownership	Jumlah aset (sebelum eliminasi) (RpJuta) Total assets (before elimination) (Rp Million)	
						2021	2020
Kepemilikan Langsung oleh PT Pupuk Indonesia Direct Ownership by PT Pupuk Indonesia							
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Gresik	1971	Beroperasi komersial sejak 1972 Operating commercially since 1972	99,99%	43.182.763	41.396.443
PT Pupuk Kujang ("PKC")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Cikampek	1975	Beroperasi komersial sejak 1975 Operating commercially since 1975	99,99%	9.166.614	8.651.256
PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Bontang	1977	Beroperasi komersial sejak 1985 Operating commercially since 1985	99,99%	33.615.304	27.952.628
PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Aceh	1982	Beroperasi komersial sejak 1982 Operating commercially since 1982	99,99%	5.650.174	6.634.657
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Palembang	2010	Beroperasi komersial sejak 2011 Operating commercially since 2011	99,99%	23.922.756	24.553.643
PT Rekind Industri ("Rekind")	Konstruksi/EPC Construction/EPC	Jakarta	1981	Beroperasi komersial sejak 1981 Operating commercially since 1981	95,03%	7.785.388	9.895.080
PT Mega Eltra ("ME")	Trading	Jakarta	1970	Beroperasi komersial sejak 1970 Operating commercially since 1970	100,00%	733.970	458.523

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham Share Ownership	Jumlah aset (sebelum eliminasi) (RpJuta) Total assets (before elimination) (Rp Million)	
						2021	2020
PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILog")	Pengiriman Shipping	Jakarta	2013	Beroperasi komersial sejak 2013 Operating commercially since 2013	100,00%	575.383	559.627
PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU")	Utilitas Utilities	Jakarta	2014	Beroperasi komersial sejak 2014 Operating commercially since 2014	100,00%	1.651.787	1.652.323
PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP")	Pangan Food	Jakarta	2015	Beroperasi komersial sejak 2015 Operating commercially since 2015	100,00%	194.175	187.023
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Petrokimia Gresik ("PKG") Indirect Ownership, through PT Petrokimia Gresik ("PKG")							
PT Petrosida Gresik	Produksi, distribusi, dan perdagangan bahan aktif pestisida serta bertindak sebagai distributor pupuk Production, distribution and trading of active ingredients pesticides as well as acting as a fertilizer distributor	Gresik	1983	Beroperasi komersial sejak 1983 Operating commercially since 1983	99,99%	981.407	1.097.917
PT Petrokimia Kayaku	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida Producing, formulating and marketing pesticides	Gresik	1976	Beroperasi komersial sejak 1976 Operating commercially since 1976	60,00%	886.362	858.629
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Kujang ("PKC") Indirect Ownership, through PT Pupuk Kujang ("PKC")							
PT Kawasan Industri Kujang Cikampek	Pengelolaan kawasan industri Industrial estate management	Cikampek	1990	Beroperasi komersial sejak 1990 Operating commercially since 1990	96,19%	68.594	60.445



Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham Share Ownership	Jumlah aset (sebelum eliminasi) (RpJuta) Total assets (before elimination) (Rp Million)	
						2021	2020
PT Sintas Kurama Perdana ("SKP")	Industri, perdagangan, jasa dan pergudangan dalam sektor industri kimia dasar Industry, trade, services and warehousing in the chemical industry sector	Cikampek	1986	Beroperasi komersial sejak 1988 Operating commercially since 1988	99,00%	55.466	60.404
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT") Indirect Ownership, through PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")							
PT Kaltim Industrial Estate	Pengelolaan kawasan industri Industrial estate management	Bontang	1990	Beroperasi komersial sejak 1991 Operating commercially since 1991	99,99%	1.069.340	1.042.225
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM") Indirect Ownership, through PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")							
PT PIM Prima Medika	Rumah Sakit Hospital	Lhokseumawe	2017	Beroperasi komersial sejak 2017 Operating commercially since 2017	96,00%	27.510	28.556
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP") Indirect Ownership, through PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")							
PT Pusri Agro Lestari ("PAL")	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida dan agrokimia lainnya Produce, formulate and market pesticides and other agrochemicals	Jakarta	2015	Beroperasi komersial sejak 2015 Operating commercially since 2015	51,00%	51.717	56.311
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Rekayasa Industri ("Rekind") Indirect Ownership, through PT Rekayasa Industri ("Rekind")							
PT Yasa Industri Nusantara ("YIN")	Perancangan dan perencanaan konstruksi, penyediaan dan pengawasan peralatan dan struktur baja Construction design and planning, supply and supervision of steel structures and equipment	Jakarta	1999	Beroperasi komersial sejak 1999 Operating commercially since 1999	99,67%	143.886	150.072
PT Tracon Industri	Penyedia jasa konsultasi dan perdagangan Consulting and trading service provider	Jakarta	2001	Beroperasi komersial sejak 2001 Operating commercially since 2001	80,00%	354.821	351.885

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham Share Ownership	Jumlah aset (sebelum eliminasi) (RpJuta) Total assets (before elimination) (Rp Million)	
						2021	2020
PT Rekayasa Engineering	Penyedia jasa teknik dan <i>engineering</i> Engineering and engineering service provider	Jakarta	2001	Beroperasi komersial sejak 2001 Operating commercially since 2001	80,00%	178.503	167.624
Rekind Malaysia Sdn. Bhd.	Penyedia jasa teknik perancangan dan pengadaan Design and procurement engineering service provider	Malaysia	2014	Beroperasi komersial sejak 2014 Operating commercially since 2014	100,00%	33.989	68.542
PT Rekind Daya Mamuju	Pembangunan pembangkit tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik Construction of power plants, sales of electric power and distribution of electric power	Jakarta	2013	Beroperasi komersial sejak 2013 Operating commercially since 2013	90,00%	1.710.921	1.737.948
PT Puspetindo	Industri logam dan permesinan umum Metal and general machinery industry	Gresik	1990	Beroperasi komersial sejak 1991 Operating commercially since 1991	91,38%	131.824	154.555
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Mega Eltra ("ME") Indirect Ownership, through PT Mega Eltra ("ME")							
PT Sigma Utama	Manufaktur cat Paint Manufacturing	Cibinong	1980	Beroperasi komersial sejak 1982 Operating commercially since 1982	99,99%	102.079	99.196
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU") Indirect Ownership, through PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU")							
PT Kaltim Daya Mandiri ("KDM")	Produsen listrik dan utilitas Electricity and utility manufacturers	Bontang	1995	Beroperasi komersial sejak 2002 Operating commercially since 2002	51,00%	511.286	494.359



PROFIL SINGKAT ENTITAS ANAK/KEPEMILIKAN LANGSUNG OLEH PTPI

PT PETROKIMIA GRESIK (“PKG”)

PKG merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, HM. Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Dalam perjalanannya, PT Petrokimia Gresik mengalami perubahan status, pada tahun 1971 sesuai PP No. 35/1971 menjadi Perum, pada tahun 1974 sesuai PP No. 35/1974 jo PP No. 14/1975 berubah menjadi Persero. Berdasarkan PP No. 28/1997 PKG menjadi anggota *Holding* PTPI.

PKG saat ini menempati areal lebih dari 450 hektar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Total produksi saat ini mencapai 8,9 juta ton/tahun, terdiri dari produk pupuk sebesar 5 (lima) juta ton/tahun, dan produk non-pupuk sebanyak 3,9 juta ton/tahun. Anak Perusahaan PTPI ini bertransformasi menuju perusahaan Solusi Agroindustri untuk mendukung tercapainya program Ketahanan Pangan Nasional, dan kemajuan dunia pertanian. Jumlah karyawan PKG per 31 Januari 2021 sebanyak 2.028 orang.

Struktur Pemegang Saham PKG adalah PTPI yang memiliki 2.393.033 lembar saham atau senilai Rp2.393.033.000.000 (99,9975%) dan Yayasan Petrokimia Gresik yang memiliki 60 lembar saham atau senilai Rp60.000.000 (0,0025%).

BRIEF PROFILE OF SUBSIDIARIES/DIRECT OWNERSHIP BY PTPI

PT PETROKIMIA GRESIK (“PKG”)

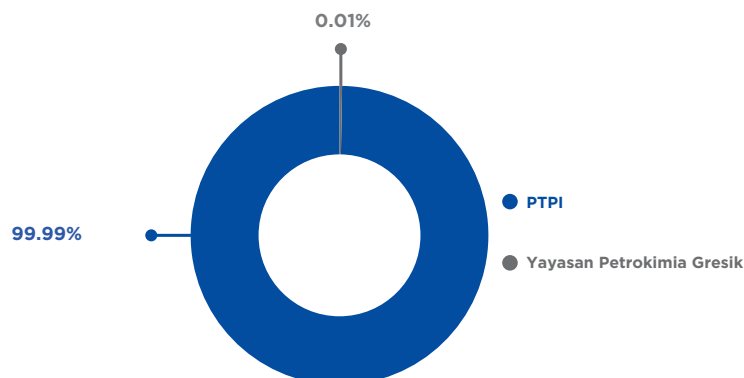
PKG is the most complete fertilizer factory in Indonesia, which at its inception was called Proyek Petrokimia Surabaya. The construction contract was signed on August 10, 1964, and came into force on December 8, 1964. This project was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, HM. Soeharto on July 10, 1972, which was later determined as the anniversary of PT Petrokimia Gresik. On its journey, PT Petrokimia Gresik changed its status, in 1971 and based on PP. No. 35/1971 became Perum, in 1974 based on PP No. 35/1974 in conjunction with PP No. 14/1975 changed to Persero. Based on PP No. 28/1997 PKG became a member of PTPI Holding.

PKG currently occupies an area of more than 450 hectares in Gresik Regency, East Java. Total production currently reaches 8.9 million tons/year, consisting of fertilizer products of 5 (five) million tons/year, and non-fertilizer products of 3.9 million tons/year. This PTPI subsidiary is transforming into an Agroindustry Solutions company to support the achievement of the National Food Security program, and the advancement of the agricultural world. The number of employees of PKG as of January 31, 2021 was 2,028 people.

The Shareholder structure of PKG is PTPI with 2,393,033 shares at a value of Rp2,393,033,000,000 (99.9975%), and the Petrokimia Gresik Foundation with 60 shares at a value of Rp60,000,000 (0.0025%).

Komposisi Kepemilikan Saham PKG Per 31 Desember 2021

PKG Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen PKG

PKG Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners	T. Nugroho Purwanto (Komisaris Utama)	T. Nugroho Purwanto (President Commissioner)
	Indira Chunda Thita (Komisaris Independen)	Indira Chunda Thita (Independent Commissioner)
	Bin Nahadi (Komisaris)	Bin Nahadi (Commissioner)
	Noer Fajrieansyah (Komisaris)	Noer Fajrieansyah (Commissioner)
	Ammarsjah (Komisaris Independen)	Ammarsjah (Independent Commissioner)
	Cecep Herawan (Komisaris)	Cecep Herawan (Commissioner)
Direksi Board of Directors	Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama)	Dwi Satriyo Annurogo (President Director)
	Digna Jatningsih (Direktur Operasi dan Produksi)	Digna Jatningsih (Director of Operations and Production)
	Budi Wahyu Soesilo (Direktur Keuangan dan Umum)	Budi Wahyu Soesilo (Director of Finance and General Affairs)

PT PUPUK KUJANG (“PKC”)

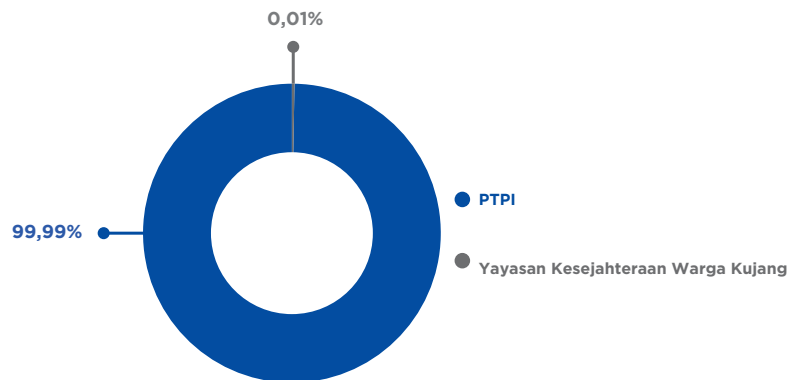
PKC resmi berdiri pada tanggal 9 Juni 1975, yang memproduksi dan memasarkan pupuk (Urea, NPK, dan Organik) serta bahan kimia lain (Amoniak). Perusahaan berlokasi di Cikampek, Provinsi Jawa Barat, dengan kepemilikan saham PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang 0,01%.

PT PUPUK KUJANG (“PKC”)

PKC was officially established on June 9, 1975, and produces and markets fertilizers (Urea, NPK, and Organic) and other chemicals (Ammonia). The company is located in Cikampek, West Java Province, and the share ownership is 99.99% owned by PTPI, and 0.01% owned by Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang.

Komposisi Kepemilikan Saham PKC Per 31 Desember 2021

PKC Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen PKC

PKC Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Fadlansyah Lubis (Komisaris Utama)	Fadlansyah Lubis (President Commissioner)
	Gati Wibawaningsih (Komisaris)	Gati Wibawaningsih (Commissioner)
	Rachman Ferry Isfianto (Komisaris)	Rachman Ferry Isfianto (Commissioner)
	Sripeni Inten Cahyani (Komisaris)	Sripeni Inten Cahyani (Commissioner)
	Riad Oscha Chalik (Komisaris Independen)	Riad Oscha Chalik (Independent Commissioner)
	Mahmud Nurwindu (Komisaris Independen)	Mahmud Nurwindu (Independent Commissioner)
Direksi Board of Directors	Maryadi (Direktur Utama)	Maryadi (President Director)
	Robert Sarjaka (Direktur Operasi & Produksi)	Robert Sarjaka (Director of Operations & Production)
	Yuni Setyaningrum (Direktur Keuangan & Umum)	Yuni Setyaningrum (Director of Finance & General Affairs)



PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (“PKT”)

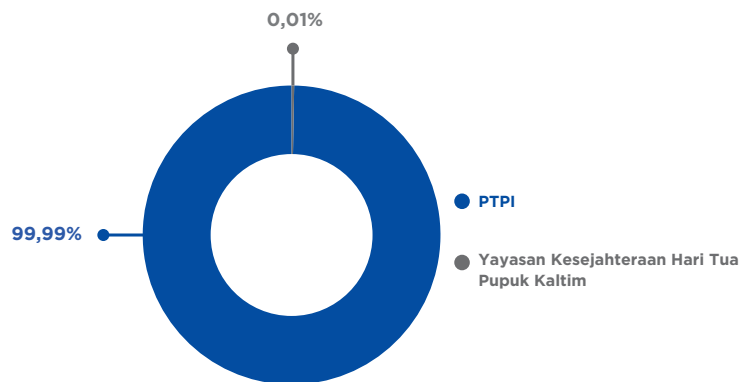
PKT merupakan salah satu produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1977. Berawal dari fasilitas pabrik pupuk terapung yang dikelola oleh Pertamina, kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 tahun 1975 dan Keputusan Presiden No. 39 tahun 1976 pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Perindustrian. Pada Tahun 2012 PKT menjadi Anak Perusahaan PTPI. Hingga 31 Desember 2021, komposisi kepemilikan saham PKT adalah PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim 0,01%.

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (“PKT”)

PKT is one of the largest producers of urea and NPK fertilizers in Asia and was founded on December 7, 1977. Starting from a floating fertilizer factory facility managed by Pertamina, then based on Presidential Decree No. 43 of 1975 and Presidential Decree No. 39 of 1976 the management was handed over to the Ministry of Industry. In 2012 PKT became a subsidiary of PTPI. As of December 31, 2021, PKT’s share ownership is PTPI with 99.99%, and Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim with 0.01%.

Komposisi Kepemilikan Saham PKT Per 31 Desember 2021

PKT Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen PKT

PKT Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kasdi Subagyono (Komisaris Utama)	Kasdi Subagyono (President Commissioner)
	Sukardi Rinakit (Komisaris Independen)	Sukardi Rinakit (Independent Commissioner)
	Musthofa (Komisaris)	Musthofa (Commissioner)
	Sigit Hardwinarto (Komisaris)	Sigit Hardwinarto (Commissioner)
	Eka Sastra (Komisaris Independen)	Eka Sastra (Independent Commissioner)
	Gustaaf AC Patty (Komisaris)	Gustaaf AC Patty (Commissioner)
Direksi Board of Directors	Rahmad Pribadi (Direktur Utama)	Rahmad Pribadi (President Director)
	Hanggara Patrianta (Direktur Operasi dan Produksi)	Hanggara Patrianta (Director of Operations and Production)
	Qomaruzzaman (Direktur Keuangan dan Umum)	Qomaruzzaman (Director of Finance and General Affairs)

PT PUPUK ISKANDAR MUDA (“PIM”)

PIM merupakan Anak Perusahaan PTPI yang memproduksi dan memasarkan pupuk (Urea dan Organik) serta bahan kimia lain (Amoniak). PIM didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasmita, SH, Nomor 54 pada tanggal 24 Februari 1982, dan beberapa kali disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia SH, No.10 tanggal 30 Agustus 2019.

PT PUPUK ISKANDAR MUDA (“PIM”)

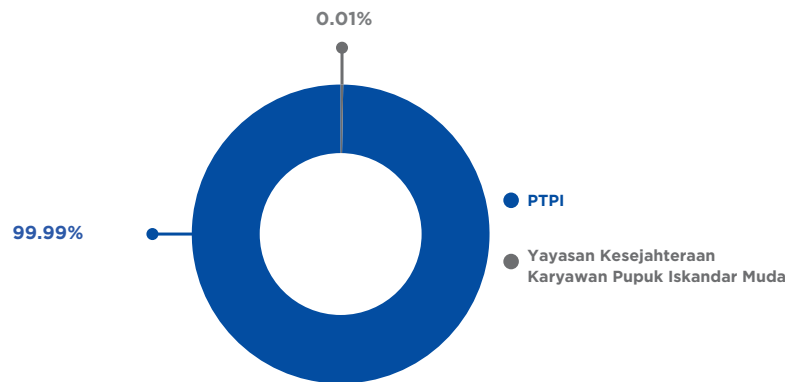
PIM is a PTPI that produces and markets fertilizers (Urea and Organic) and other chemicals (Ammonia). PIM was established based on the Notarial Deed No. 54 before Soeleman Ardjasmita, SH on February 24, 1982, which was changed several times and with the most recent through Notarial Deed No. before Lumassia SH, on August 30, 2019.

PIM memiliki dua unit pabrik pupuk urea dan ammonia, yaitu pabrik PIM-1 dan PIM-2. Pabrik PIM-1 dengan kapasitas produksi Ammonia sebesar 330.000 Ton per tahun dan Urea sebesar 570.000 ton per tahun, dibangun sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1984, diresmikan pada tanggal 20 Maret 1985 dan beroperasi secara komersil sejak tanggal 1 April 1985. Sedangkan pabrik PIM-2 dengan kapasitas produksi Ammonia sebesar 396.000 ton per tahun dan Urea 570.000 ton per tahun mulai dibangun sejak tanggal 23 Maret 1999 dan beroperasi sejak tanggal 15 Agustus 2005. Kantor Pusat PIM berlokasi di Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan kepemilikan saham PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh 0,01%.

PIM has two urea and ammonia fertilizer factories, called PIM-1 and PIM-2 factories. The PIM-1 plant with an Ammonia production capacity of 330,000 Tons per year, and Urea production of 570,000 Tons per year, were built from 1982 to 1984, and inaugurated on March 20, 1985 and have been operating commercially since April 1, 1985. PIM-2 has a production capacity of 396,000 Tons of Ammonia per year and 570,000 Tons of Urea per year, was built on March 23, 1999 and has been operating since August 15, 2005. PIM's head office is located in Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam Province, and a share ownership is PTPI with 99.99%, and Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh with 0.01%.

Komposisi Kepemilikan Saham PIM Per 31 Desember 2021

PIM Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen PIM

	PIM Management	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Bambang Rantam Sariwanto (Komisaris Utama)	Bambang Rantam Sariwanto (President Commissioner)
	Izedrik Emir Moeis (Komisaris)	Izedrik Emir Moeis (Commissioner)
	Marzuki Daud (Komisaris Independen)	Marzuki Daud (Independent Commissioner)
Direksi Board of Directors	Budi Santoso Syarif (Direktur Utama)	Budi Santoso Syarif (President Director)
	Jaka Kirwanto (Direktur Operasi & Produksi)	Jaka Kirwanto (Director of Operations and Production)
	Rochan Syamsul Hadi (Direktur Keuangan & Umum)	Rochan Syamsul Hadi (Director of Finance and General Affairs)

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG ("PSP")

PSP resmi berdiri pada tanggal 12 November 2010, yang memproduksi dan memasarkan pupuk (Urea, NPK, dan Organik) serta bahan kimia lain (Amoniak). Perusahaan berlokasi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kepemilikan saham PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PSP 0,01%.

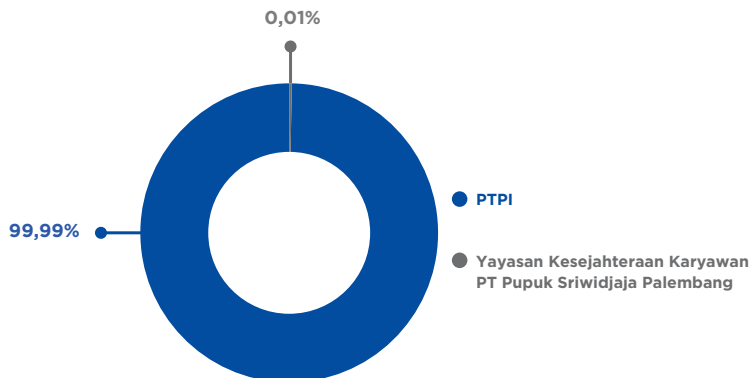
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG ("PSP")

PSP was officially established on November 12, 2010, and produces and markets fertilizers (Urea, NPK, and Organic) and other chemicals (Ammonia). The company is located in Palembang, South Sumatra Province, with 99.99% share ownership by PTPI, and 0.01% by Yayasan Kesejahteraan Karyawan PSP.



Komposisi Kepemilikan Saham PSP Per 31 Desember 2021

PSP Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen PSP

PSP Management

Manajemen	Manajemen	Manajemen
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Imam Apriyanto Putro (Komisaris Utama)	Imam Apriyanto Putro (President Commissioner)
	Ali Jamil (Komisaris)	Ali Jamil (Commissioner)
	Prahoru Yulijanto Nurtjahyo (Komisaris)	Prahoru Yulijanto Nurtjahyo (Commissioner)
	Setya Utama (Komisaris)	Setya Utama (Commissioner)
	Bambang Supriyambodo (Komisaris Independen)	Bambang Supriyambodo (Independent Commissioner)
	Sally Salamah (Komisaris)	Sally Salamah (Commissioner)
Direksi Board of Directors	Tri Wahyudi Saleh (Direktur Utama)	Tri Wahyudi Saleh (President Director)
	Saifullah Lasindrang (Direktur Keuangan dan Umum)	Saifullah Lasindrang (Director of Finance and General Affairs)
	Filius Yuliandi (Direktur Operasi dan Produksi)	Filius Yuliandi (Director of Operations and Production)

PT REKAYASA INDUSTRI (“REKIND”)

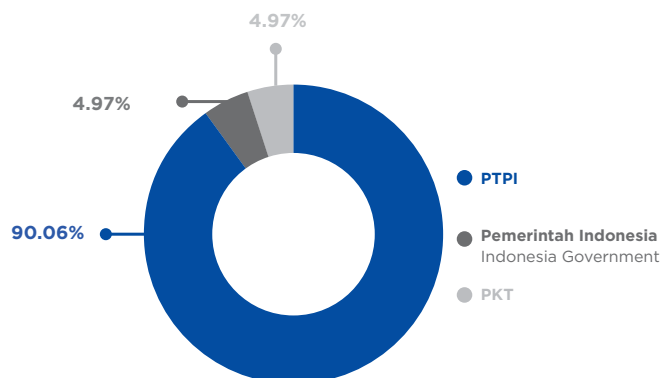
Rekind resmi berdiri pada tanggal 12 Agustus 1981, yang bergerak di bidang usaha jasa *Engineering, Procurement & Construction*. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 90,06%, Pemerintah Republik Indonesia 4,97% dan PKT 4,97%.

PT REKAYASA INDUSTRI (“REKIND”)

Rekind was officially established on August 12, 1981, and is engaged in the Engineering, Procurement & Construction services business. The company is located in Jakarta, with 90.06% share ownership by PTPI, the Republic of Indonesia with 4.97%, and PKT with 4.97%.

Komposisi Kepemilikan Saham REKIND Per 31 Desember 2021

“REKIND” Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen REKIND

REKIND Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Ngakan Timur Antara (Komisaris Utama)	Ngakan Timur Antara (President Commissioner)
	Joko Sambodo (Komisaris)	Joko Sambodo (Commissioner)
	Doddy Rahadi (Komisaris)	Doddy Rahadi (Commissioner)
	R. Illiana Arifiandi (Komisaris)	R. Illiana Arifiandi (Commissioner)
Direksi Board of Directors	Triyani Utaminingsih (Direktur Utama)	Triyani Utaminingsih (President Director)
	Yusairi (Direktur Operasi dan Teknologi/ Pengembangan)	Yusairi (Director of Operations and Technology/ Development)
	Bondan Pristiwandana (Direktur Keuangan dan SDM)	Bondan Pristiwandana (Director of Finance and HC)

PT MEGA ELTRA (“ME”)

ME merupakan salah satu anggota *holding* PTPI yang memiliki sejarah yang panjang. Semula bernama NV Electro Import, sebuah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang usaha kelistrikan, mesin, dan peralatan teknik. NV Electro Import didirikan pada Tahun 1940-an oleh NV Jacobson van den Berg & Co.

Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan tersebut menjadi PN Yuda Electro. Pada tahun yang sama, perusahaan ini digabung ke dalam PN Tulus Bhakti, dan akhirnya menjadi Divisi III dari perusahaan tersebut. Pada tahun 1964, Divisi III diubah namanya menjadi Divisi Elektro Teknik. Setahun kemudian, Divisi tersebut resmi dipisah menjadi “PN Mega Electro”, yang merupakan singkatan dari “Mesin dan Gaya Electro”.

Pada tahun 1970, perusahaan ini resmi diubah statusnya menjadi persero. Pada tahun 1977, perusahaan ini mendapat penyertaan modal dari pemerintah berupa aset eks PN Pembangunan Niaga, sehingga perusahaan ini resmi berekspansi ke bisnis perdagangan (*trading*). Untuk mencerminkan ekspansi tersebut, perusahaan inipun mengubah namanya menjadi “PT Mega Eltra”.

Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Pupuk Sriwidjaja, sebagai bagian dari upaya pembentukan *holding* BUMN di bidang pupuk. Per 31 Desember 2021, saham ME dimiliki oleh PTPI 98,73% dan Rekind 1,27%.

PT MEGA ELTRA (“ME”)

ME is one of the holding members of PTPI and has a long history. Originally named NV Electro Import, a Dutch company engaged in the electricity, machinery, and technical equipment business. NV Electro Import was founded in the 1940s by NV Jacobson van den Berg & Co.

In 1961, the Indonesian government nationalized the company to become PN Yuda Electro. In the same year, this company was merged into PN Tulus Bhakti, and eventually became Division III of the company. In 1964, Division III was renamed the Electrical Engineering Division. A year later, the Division was officially separated into “PN Mega Electro”, which stands for “Mesin and Gaya Electro”.

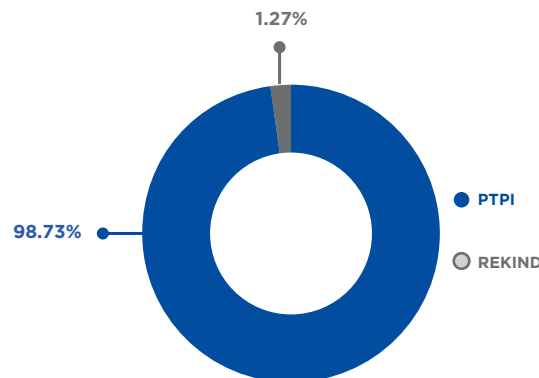
In 1970, the company officially changed its status to a limited liability company. In 1977, this company received capital participation from the Government in the form of assets from the former PN Pembangunan Niaga, so the company officially expanded into the trading business. To reflect this expansion, the company changed its name to “PT Mega Eltra”.

In 1998, the Government of Indonesia officially handed over the majority of the company’s shares to Pupuk Sriwidjaja, as part of its efforts to establish a SOE holding in the fertilizer sector. As of December 31, 2021, ME’s shares were owned by PTPI with 98.73% and Rekind with 1.27%.



Komposisi Kepemilikan Saham ME Per 31 Desember 2021

ME Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen ME

ME Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Sandra Firmania (Komisaris)	Sandra Firmania (Commissioner)
Direksi Board of Directors	Hilman Taufik (Direktur Utama)	Hilman Taufik (President Director)
	Indrajaya (Direktur Komersil dan Operasi)	Indrajaya (Director of Finance and Operations)
	Dundi Insan Perlambang (Direktur Keuangan dan SDM)	Dundi Insan Perlambang (Director of Finance and HC)

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK (“PILOG”)

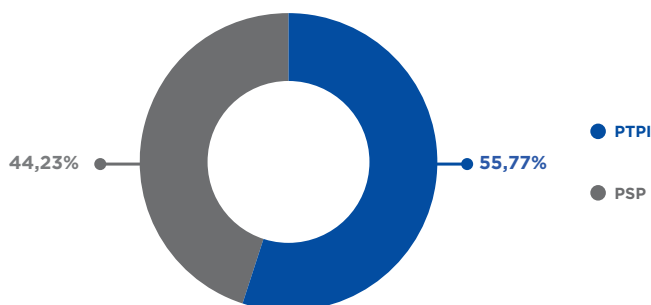
PILOG resmi berdiri pada tanggal 23 Desember 2013, yang bergerak dalam bidang usaha jasa pelayaran dan jasa angkutan laut. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 55,77% dan PSP 44,23%.

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK (“PILOG”)

PILOG was officially established on December 23, 2013, and is engaged in the shipping services and sea transportation services business. The company is located in Jakarta, with 55.77% share ownership by PTPI, and 44.23% by PSP.

Komposisi Kepemilikan Saham PILOG Per 31 Desember 2021

PILOG Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen PILOG

PILOG Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Rudi Rusli (Komisaris Utama)	Rudi Rusli (President Commissioner)
	Dono Prasetyo (Komisaris)	Dono Prasetyo (Commissioner)
Direksi Board of Directors	Tentaminarto Tri Febuartono (Direktur Utama)	Tentaminarto Tri Febuartono (President Director)
	Hasanal Kemal (Direktur Operasional)	Hasanal Kemal (Director of Operationd)
	Priyasdika (Direktur Administrasi & Keuangan)	Priyasdika (Director of Administration & Finance)

PT PUPUK INDONESIA UTILITAS (“PIU”)

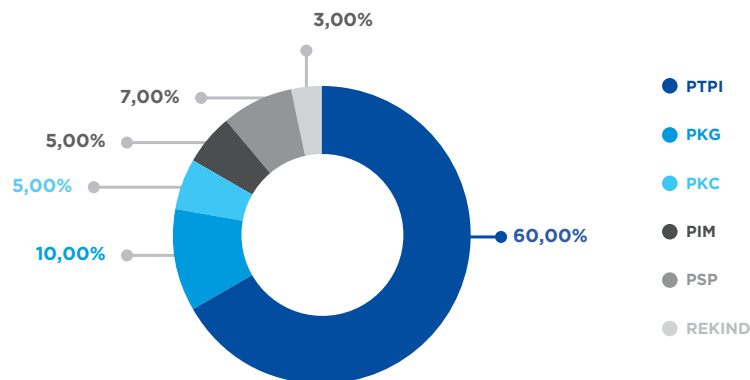
PIU resmi berdiri pada tanggal 1 Desember 2021 (sebelumnya bernama PT Pupuk Indonesia Energi) resmi berdiri pada tanggal 18 Agustus 2014. PT Pupuk Indonesia Utilitas bergerak dalam bidang usaha industri, perdagangan, dan jasa bidang energi. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 60,00%, PKG 10,00%, PKC 5,00%, PKT 10,00%, PIM 5,00%, PSP 7,00%, dan Rekind 3,00%..

PT PUPUK INDONESIA UTILITAS (“PIU”)

PIU was officially established on December 1, 2021 (it was previously called PT Pupuk Indonesia Energi), was established on August 18, 2014. PT Pupuk Indonesia Utilitas is engaged in the industry, trade, and services in the energy sector business. The company is located in Jakarta, with share ownership by PTPI with 60.00%, PKT with 10.00%, PKC with 5.00%, PKT with 10.00%, PIM with 5.00%, PSP with 7.00%, and Rekind with 3.00%.

Komposisi Kepemilikan Saham PIU Per 31 Desember 2021

PIU Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen PIU

PIU Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Sumyana Sukandar (Komisaris Utama)	Sumyana Sukandar (President Commissioner)
	Imam Mujahidin Fahmid (Komisaris)	Imam Mujahidin Fahmid (Commissioner)
	Monica Desideria (Komisaris)	Monica Desideria (Commissioner)
Direksi Board of Directors	Agus Subekti (Direktur Utama)	Agus Subekti (President Director)
	Anis Ernani (Direktur Operasi)	Anis Ernani (Director of Operations)
	Nuri Kristiawan (Direktur Keuangan)	Nuri Kristiawan (Director of Finance)



PT PUPUK INDONESIA PANGAN (“PIP”)

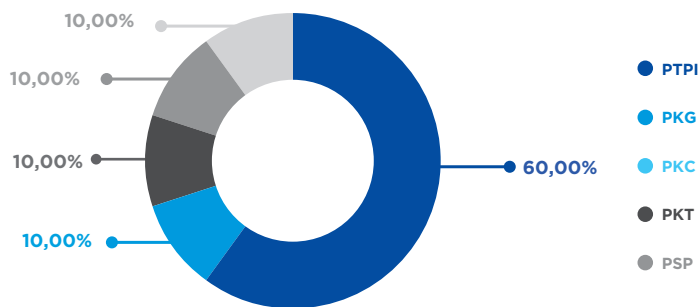
PIP resmi berdiri pada tanggal 30 April 2015, yang bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan di bidang pertanian. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 60,00%, PKG 10,00%, PKC 10,00%, PKT 10,00%, dan PSP 10,00%.

PT PUPUK INDONESIA PANGAN (“PIP”)

PIP was officially established on April 30, 2015, and is engaged in the industry and agricultural trade sector. The company is located in Jakarta, with share ownership by PTPI with 60.00%, PKG with 10.00%, PKC with 10.00%, PKT with 10.00%, and PSP with 10.00%.

Komposisi Kepemilikan Saham PIP Per 31 Desember 2021

PIP Share Ownership Composition As at December 31, 2021



Manajemen PIP

PIP Management

Dewan Komisaris Komisaris Board of Commissioners	Danar Rahmanto (Komisaris)	Danar Rahmanto (Commissioner)
Direksi Board of Directors	Budiono (Direktur Utama) Sefin Martadjaja (Direktur Keuangan)	Budiono (President Director) Sefin Martadjaja (Director of Finance)

KRONOLOGI PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

Hingga akhir tahun 2021 Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Saham melalui bursa efek mana pun. Sebanyak 25.000.000 lembar saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai entitas usaha yang mendapatkan modal dari Pemerintah Indonesia, Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kronologi penerbitan saham sejak awal hingga posisi per 31 Desember 2021. Posisi Modal Disetor PT Pupuk Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp25 Triliun dengan jumlah lembar saham sebanyak 25.000.000 lembar bernilai Rp1.000.000 per lembar. Berikut kronologi penerbitan saham dari awal sampai akhir tahun buku.

Until the end of 2021 the Company has not conducted a Public Offering of Shares through any stock exchange. A total of 25,000,000 shares of the Company are owned by the Government of the Republic of Indonesia. As a business entity that obtains capital from the Government of Indonesia, the Company has an obligation to submit a chronology of the issuance of shares from the beginning to the position as of December 31, 2021. The position of PT Pupuk Indonesia Paid-up Capital as of December 31, 2021 was Rp25 Trillion with a total of 25,000,000 shares valued at Rp1,000,000 per share. The following is the chronology of the issuance of shares from the start to the end of the fiscal year.

Keterangan Description	Tahun Year	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Akumulasi (Rp-juta) Accumulation (Rp-million)	Akta Notaris Notarial Deed	Nama Notaris Notary Name	Pengesahan Approval
Modal Awal Initial Capital	1970	7.000	7.000	Akta No. 4 Tanggal 3 Januari 1970 Deed No. 4 January 3, 1970	Soeleman Ardjasamista, S.H.	Menteri Kehakiman No. J.A.5/7/20 Tanggal 7 Februari 1970 Minister of Justice No. J.A.5/7/20 February 7, 1970
Penambahan Addition	1975	24.000	31.000	Akta No. 2 Tanggal 1 April 1975 Deed No. 2 April 1, 1975	Soeleman Ardjasamista, S.H.	Menteri Kehakiman No. J.A.5/132/15 Tanggal 17 April 1975 Minister of Justice No. J.A.5/132/15 April 17, 1975
Penambahan Addition	1976	6.000	37.000	Akta No. 62 Tanggal 20 Mei 1976 Deed No. 62 May 20, 1976	Soeleman Ardjasamista, S.H.	Menteri Kehakiman No. Y.A.5/317/21 Tanggal 3 Juni 1976 Minister of Justice No. Y.A.5/317/21 June 3rd 1976
Penambahan Addition	1981	108.000	145.000	Akta No. 7 Tanggal 5 Oktober 1981 Deed No. 7 October 5, 1981	Soeleman Ardjasamista, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2206- HT01-04. Th.83 Tanggal 12 Januari 1983 Minister of Justice No. C2206- HT01-04. Th.83 January 12, 1983
Penambahan Addition	1984	55.000	200.000	Akta No. 19 Tanggal 20 Juli 1984 Deed No. 19 July 20, 1984	Soeleman Ardjasamista, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2546- HT01-04. Th.85 Tanggal 2 Februari 1985 Minister of Justice No. C2546- HT01-04. Th.85 February 2, 1985
Penambahan Addition	1989	870.710	1.570.710	Akta No. 4 Tanggal 4 September 1989 Deed No. 4 September 4, 1989	Soeleman Ardjasamista, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2778- HT01-04. Th.90 Tanggal 16 Februari 1990 Menteri Kehakiman No. C2778-HT01-04 Th.90 Tanggal 16 Februari 1990



Keterangan Description	Tahun Year	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Akumulasi (Rp-juta) Accumulation (Rp-million)	Akta Notaris Notarial Deed	Nama Notaris Notary Name	Pengesahan Approval
Penambahan Addition	1997	1.829.290	2.900.000	Akta No. 14 Tanggal 12 September 1997 Deed No. 14 September 12, 1997	Imas Fatimah, SH	Menteri Kehakiman No. C2- 10.682- HT01-04.Th.97 Tanggal 14 Oktober 1997 Minister of Justice No. C2- 10,682-HT01-04.Th.97 October 14, 1997
Penambahan Addition	2002	6.000	2.906.000	Akta No. 13 Tanggal 5 Februari 2002 Deed No. 13 February 5, 2002	Imas Fatimah, SH	Menteri Kehakiman No. C2- 05201- HT01-04.Th.2002 Tanggal 28 Maret 2002 Minister of Justice No. C2-05201- HT01-4.Th.2002 March 28, 2002
Penambahan Addition	2005	957.948	3.863.948	Akta No. 20 Tanggal 12 September 2005 Deed No. 20 September 12, 2005	Fathiah Helmi, SH	Menteri Kehakiman No. C229535- HT01-04.Th.2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Minister of Justice No. C229535- HT01-04.Th.2005 October 25,2005
Penambahan Addition	2008	390.000	4.253.948	Akta No. 6 Tanggal 4 Februari 2008 Deed No. 6 February 4, 2008	Fathiah Helmi, SH	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.3906 Tanggal 19 Februari 2008 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH. 01.10.3906 February 19, 2008
Penambahan Addition	2008	35.058	4.289.006	Akta No. 15 Tanggal 11 Desember 2008 Deed No. 15 December 11, 2008	Fathiah Helmi, SH	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH. 01.10.5826 Tanggal 13 Mei 2009 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH. 01.10.5826 May 13, 2009
Penambahan Addition	2011	6.321.000	10.610.006	Akta No. 7 Tanggal 7 Januari 2011 Deed No. 7 January 7, 2011	Fathiah Helmi, SH	Menteri Hukum & HAM No. AHU. AH.01.10.02656 Tanggal 18 Januari 2011 Minister of Law & Human Rights No. AHU.AH.01.10.2656 January 18, 2011
Penambahan Addition	2012	1.338.048	11.948.054	Akta No. 11 Tanggal 19 Januari 2012 Deed No. 11 January 19, 2012	Lumassia, SH	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH. 01.10.08848 Tanggal 13 Maret 2012 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH. 01.10.08848 March 13, 2012
Penambahan Addition	2013	951.854	12.899.908	Akta No. 14 Tanggal 26 April 2013 Deed No. 14 April 26, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.17728 Tanggal 7 Mei 2013 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH. 01.10.17728 May 7, 2013
Penambahan Addition	2018	12.100.092	25.000.000	Akta No. 3 Tanggal 24 Oktober 2018 Deed No. 3 October 24 2018	Lumassia, SH	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.24295 Tanggal 6 November 2018 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH. 01.10.24295 November 6 2018

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND/ OR LISTING OF OTHER SECURITIES

Perusahaan telah menerbitkan 4 (empat) obligasi yang seluruhnya dicatat di Bursa Efek Indonesia. Rincian kronologi penerbitan obligasi, disampaikan dalam tabel di bawah ini:

The Company has issued 4 (four) bonds, all of which are listed on the Indonesia Stock Exchange. The details of the issuance chronology are presented in the table below:

No	Nama Efek Bonds	Tanggal Terbit Date of Issue	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Pokok Obligasi (Rp) Bond Principal (Rp)	Kode Obligasi Bonds Code	Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Ratings	Status Pembayaran Payment Status
1	Obligasi I tahun 2014-Seri A Bond I year 2014 - Series A	8 Juli 2014 July 8, 2014	8 Juli 2017 July 8, 2017	568.000.000.000	PIHC01A	9,62%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid
2	Obligasi I tahun 2014-Seri B Bond I year 2014 - Series B	8 Juli 2014 July 8, 2014	8 Juli 2019 July 8, 2019	1.131.000.000.000	PIHC01B	9,95%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid
3	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-Seri A Shelf Registration Bonds I Phase I - Series A	12 Juli 2017 July 12, 2017	12 Juli 2020 July 12, 2020	1.484.500.000.000	PIHC01ACN1	7,90%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid
4	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-Seri B Shelf Registration Bonds I Phase I - Series B	12 Juli 2017 July 12, 2017	12 Juli 2024 July 12, 2024	2.085.000.000.000	PIHC01BCN1	8,60%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif Active
5	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II-Seri A Shelf Registration Bonds I Phase II - Series A	9 November 2017 November 9, 2017	9 November 2020 November 9, 2020	2.601.500.000.000	PIHC01ACN2	7,50%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid
6	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II-Seri B Shelf Registration Bonds I Phase II - Series B	9 November 2017 November 9, 2017	9 November 2022 November 9, 2022	1.774.000.000.000	PIHC01BCN2	7,90%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif Active
7	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I-Seri A Shelf Registration Bonds II Phase I - Series A	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2023 September 3, 2023	1.146.825.000.000	PIHC02ACN1	7,00%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif Active



No	Nama Efek Bonds	Tanggal Terbit Date of Issue	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Pokok Obligasi (Rp) Bond Principal (Rp)	Kode Obligasi Bonds Code	Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Ratings	Status Pembayaran Payment Status
8	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I-Seri B Shelf Registration Bonds II Phase I - Series B	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2023 September 3, 2023	857.835.000.000	PIHC02BCN1	7,70%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif Active
9	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I-Seri C Shelf Registration Bonds II Phase II - Series C	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2027 September 3, 2027	431.850.000.000	PIHC02CCN1	8,30%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif Active
10	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A PT Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2021 - Series A	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2024 March 10, 2024	350.000.000.000	PIHC02ACN2	5,60%		Aktif Active
11	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B PT Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2021 - Series B	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2026 March 10, 2026	1.600.000.000.000	PIHC02BCN2	6,20%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif Active
12	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C PT Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2021 - Series C	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2028 March 10, 2028	800.000.000.000	PIHC02CCN2	7,20%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif Active
Jumlah Penerbitan Obligasi All Time Total Bonds Issued				14.830.510.000.000				
Jumlah utang obligasi per 31 Desember 2021 Total bonds payable as of December 31, 2021				9.045.510.000.000				

10 PEMEGANG OBLIGASI TERBESAR

TOP 10 BONDHOLDERS

No	Nama Investor Investor Name	Status Investor Investor Status	Jumlah (Rp) Total (Rp)
1	PT Bank Central Asia Tbk	Bank	900.000.000.000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	889.000.000.000
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Bank	880.000.000.000
4	PT Taspen	Badan Usaha Tetap Business Entity	850.000.000.000
5	DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua	Asuransi Insurance	620.000.000.000
6	PT Bank KEB Hana Indonesia - Treasury	Bank	550.000.000.000
7	BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi Insurance	460.000.000.000
8	Dana Pensiun Telkom	Dana Pensiun Pension Fund	300.000.000.000
9	Treasury Bank Jatim	Bank	286.900.000.000
10	Dana Pensiun Bank Indonesia	Dana Pensiun Pension Fund	255.000.000.000

No	Status Investor Investor Status	Jumlah (Rp) Total (Rp)
1	Bank Domestik	3.992.900.000.000
2	Dana Pensiun Pension Fund	1.644.500.000.000
3	Badan Usaha Non Tax Non-Tax Business Entity	1.470.000.000.000
4	Perusahaan Asuransi Insurance Company	1.038.000.000.000
5	Reksadana Mutual Funds	423.600.000.000
6	Yayasan NPWP NPWP Foundation	184.000.000.000
7	Koperasi Cooperative	131.000.000.000
8	Individu Domestik Government of Indonesia	100.000.000.000
9	Individual Domestic Domestic Individual	39.510.000.000
10	PT NPWP	22.000.000.000
Jumlah utang obligasi per 31 Desember 2021 Total bonds payable as of 31 December 2020		9.045.510.000.000



REALISASI PENGGUNAAN DANA

USE OF FUNDS REALIZATION

Subjek Subject	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Sustainable Bond I Phase I Year 2017	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Sustainable Bond I Phase II Year 2017	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Sustainable Bond II Phase I	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Sustainable Bonds II Phase II
Penggunaan Dana Funds Realization	16% <i>Refinancing</i> Obligasi I Tahun 2014 Seri A 16% <i>Refinancing</i> Bond I 2014 Series A	23% <i>Refinancing</i> Pinjaman Perbankan PT Pupuk Kalimantan Timur 23% <i>Refinancing</i> Bank Loans of PT Pupuk Kalimantan Timur	33% <i>Refinancing</i> Perbankan Kredit Investasi Amurea II dan Revamping PA PT Petrokimia Gresik 33% <i>Refinancing</i> Investment Credit Amurea II Banking and Revamping PA PT Petrokimia Gresik	<i>Refinancing</i> atas Kredit Investasi Amurea II PT Petrokimia Gresik <i>Refinancing</i> Investment Credit Amurea II PT Petrokimia Gresik
	84% <i>Refinancing</i> Pinjaman Perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 84% <i>Refinancing</i> Bank Loans of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	12% <i>Refinancing</i> Pinjaman Perbankan PT Pupuk Kujang 12% <i>Refinancing</i> Bank Loans of PT Pupuk Kujang	26% <i>Refinancing</i> Kredit Perbankan Modal Kerja PT Pupuk Iskandar Muda 26% <i>Refinancing</i> Bank Loans Working Capital of PT Pupuk Iskandar Muda	<i>Refinancing</i> Pinjaman Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik <i>Refinancing</i> Bank Loan PT Pupuk Indonesia Logistik
		19% <i>Refinancing</i> Pinjaman Perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 19% <i>Refinancing</i> Bank Loans of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	41% <i>Refinancing</i> Pinjaman Modal Kerja PT Rekayasa Industri yang berasal dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 41% <i>Refinancing</i> of PT Rekayasa Industri Working Capital Loans originating from Sustainable Bonds I Phase II	
		27% <i>Refinancing</i> Pinjaman Perbankan PT Rekayasa Industri 27% <i>Refinancing</i> Bank Loans of PT Rekayasa Industri		
		6% <i>Refinancing</i> Pinjaman Perbankan PT Mega Eltra 6% <i>Refinancing</i> bank loans of PT Mega Eltra		
		13% <i>Refinancing</i> Pinjaman Perbankan PT Petrokimia Gresik 13% <i>Refinancing</i> Bank Loans of PT Petrokimia Gresik		

KEANGGOTAAN PERUSAHAAN
DALAM ASOSIASI ATAU
ORGANISASICOMPANY MEMBERSHIP
IN ASSOCIATIONS OR
ORGANIZATIONS

Nama Organisasi/Asosiasi Organization/Association Name	Ruang Lingkup Scope	Posisi Keikutsertaan Position Held
Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) Indonesian Fertilizer Manufactur Association	Nasional National	Ketua Presidium Chairman of the Presidium
Kamar Dagang Indonesia (KADIN)	Nasional National	Anggota Member
Lembaga Sertifikasi Industri Pupuk Indonesia Indonesian Fertilizer Producers Association	Nasional National	Anggota Member
International Fertilizer Association (IFA)	Internasional International	Anggota Member

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan Tahun 2021 List of Supporting Institutions and Professionals in 2021

	Nama dan Alamat Name and Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Biaya (%) Fee (%)	Periode Penugasan Assignment Period
Bank Mega	Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12970, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 79175000 Faksimili/Facsimile: (021) 7990720 waliamanat@bankmega.com www.bankmega.com	Wali Amanat Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Trustee of PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance	0,003	2020-2027
Mandiri Sekuritas	Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 526 3445 Faksimili/Facsimile: (021) 526 3507 corsec@mandirisek.co.id MS_Prambanan@mandirisek.co.id www.mandirisekuritas.co.id	<i>Underwriter</i> Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance	0,032	2021
Danareksa Sekuritas	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 29555777/888 Faksimili/Facsimile: (021) 3501724/25 cs@danareksa.co.id callcenter@danareksa.co.id www.danareksasekuritas.co.id	<i>Underwriter</i> Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance	0,032	2021
BCA Sekuritas	Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 2358 7222 Faksimili/Facsimile: (021) 2358 7290/7250/7300 halo@bcasekuritas.co.id cf@bcasekuritas.co.id www.bcasekuritas.co.id	<i>Underwriter</i> Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance	0,032	2021
BNI Sekuritas	Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 2554 3946 Faksimili/Facsimile: (021) 5793 6934 customercare@bnisekuritas.co.id www.bnisekuritas.co.id	<i>Underwriter</i> Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance	0,032	2021
KAP Maksum, Suyamto, dan H	Jalan Kaji No. 2B-5, Petojo Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10130 Telepon: 021-6326436/63852854 Fax: 021-6326371 Email: kap_hms@yahoo.com	Audit Penjatahan Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Audit of PUB Bond II Phase II Year 2021 Allotment	0,002	2021



Nama dan Alamat Name and Address		Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Biaya (%) Fee (%)	Periode Penugasan Assignment Period
Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office	South Tower Jl. Jendral Sudirman Kav. 45- 46 Lantai 24 Jakarta, Sampoerna Strategic Square 12930 Jakarta, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 5770108 mmik_mmco@mmiklaw.co.id www.mmiklaw.co.id	Konsultan Hukum Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Legal Consultant for PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance	0,015	2021
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito	Jl. Panglima Polim V No. 11, RT. 1/ RW. 6, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 724 4650/739 2801/720 9542 Faksimili/Facsimile: (021) 726 5090 poerbaningsih@yahoo.com	Notaris Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Notary for PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance	0,002	2021
Fitch Rating Indonesia	DBS Bank Tower, Lantai 24, Suite 2403, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia Telepon/Telephone: +62 21 29886800 Faksimili/Facsimile: +62 21 29886822 www.fitchratings.com/region/indonesia	Lembaga Peningkat Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Rating Agency for PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance	0,027	2021
Kustodian Sentral Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telepon/Telephone: +62 21 515 2855 Faksimili/Facsimile: +62 21 5299 1199 Bebas Pulsa 0800-186- 5734 Surel/Email: helpdesk@ksei.co.id Situs Web/Website: www.ksei.co.id	Kustodian Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Custodian for PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance Bentuk Jasa/Type of Service: Pencatatan Obligasi Form of Service/Type of Service: Recording Bonds	0,00003	2021
Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telepon/Telephone: +62 21 515 2855 Faksimili/Facsimile: +62 21 5299 1199 Bebas Pulsa 0800-186- 5734 Surel/Email: helpdesk@ksei.co.id Situs Web/Website: www.ksei.co.id	Pencatatan Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Recording for PUB Bond II Phase II Year 2021 Issuance Bentuk Jasa/Type of Service: Pencatatan Obligasi Form of Service/Type of Service: Recording Bonds	0,0057	2021

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATION

NASIONAL | NATIONAL



iNews MAKER AWARDS 2021
The Best Innovation in Social
Business Model

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
iNews

8 April 2021
April 8, 2021



10th ANUGERAH BUMN 2021
Terbaik 1 Transformasi Bisnis dan Organisasi
The Best Corporate
Bakir Pasaman-The Best CEO
Bakir Pasaman-CEO Strategic Orientation Terbaik
10th BUMN ANUGERAH 2021
Best 1 Business and Organizational Transformation
The Best Corporate
Bakir Pasaman - The Best CEO
Bakir Pasaman - Best Strategic Orientation CEO

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
BUMN Track

8 April 2021
April 8, 2021



TOP CSR AWARDS 2021
TOP CSR Award #4 Star
TOP Leader on CSR Commitment 2021
Program Creating Share Value (CSV)
Commitment

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Top Business

22 April 2021
April 22, 2021



**2nd INDONESIA CORPORATE
BRANDING PR AWARDS 2021**
Category Petrochemical for Its
Excellence in Public Relations Practice in
Indonesia

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
The Iconomics

22 April 2021
April 22 2021



EMISI KORPORASI 2021
Penurunan Emisi Korporasi Sektor BUMN
Non-perbankan kategori "Green Elite"
Transparansi Perhitungan Emisi
Korporasi Sektor BUMN Non-perbankan
kategori "Silver Plus"
EMISI KORPORASI 2021
Decreasing Corporate Emissions in the
Non-banking SOE Sector in the "Green
Elite" category
Transparency in Calculation of Corporate
Emissions in the Non-banking SOE
Sector in the "Silver Plus" category

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Berita 1

29 April 2021
April 29, 2021



BUMN MARKETEERS AWARD 2021
Penghargaan Silver dalam kategori "The
Most Promising Company in Marketing
3.0".
SOE MARKETEERS AWARD 2021
Silver Award in the category "The Most
Promising Company in Marketing 3.0".

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Markplus, Inc

9 Juni 2021
June 9, 2021



AKHLAK AWARDS 2021
Role Model Integrasi Roadmap Holding
Terbaik Kategori Perusahaan BUMN
AKHLAK AWARDS 2021
Best Roadmap Integrated Holding Role
Model in the State-Owned Enterprises
Category

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
BUMN

15 Juli 2021
July 15, 2021



2ND INDONESIA BEST CEO AWARDS
Best CEO Award Employees' Choice
2021

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
The Economics

23 Juli 2021
July 23, 2021



**INDONESIA BEST BUSINESS
TRANSFORMATION 2021**

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
SWA Magazine

4 Agustus 2021
August 4, 2021



ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2021
Bronze Winner Kategori BUMN Sub
Kategori Aplikasi Terinovatif
ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2021
Bronze Winner in the SOE Category Sub-
Category for Innovative Applications

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Berita 1

16 September 2021
September 16, 2021



INDONESIA BUMN AWARDS 2021
The Best Brand Popularity in Basic Industry Category
The Best Brand Image in Basic Industry Category
The Best Social Economy Contribution in Basic
Category
Best Annual Report in Basic Group Category
Best Company Profile Print in Basic Group Category
Special Mention Company Profile Video in Basic
Group Category

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Markplus, Inc

12 Oktober 2021
October 12, 2021



INDONESIA TJSL AWARDS 2021
Outstanding Farmer Welfare Empowerment Programs kategori Food and Fertilizer Industry
Outstanding Farmer Welfare Empowerment Programs Category Food and Fertilizer Industry

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Warta Ekonomi

14 Oktober 2021
October 14, 2021



THE BEST COMPANY IN INDONESIA TRILLIONER CLUB

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Majalah SWA

14 Oktober 2021
October 14, 2021



THE BEST STATE OWNED ENTERPRISE AWARDS 2021

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Majalah Infobank

22 Oktober 2021
October 22, 2021



INDONESIAN QUALITY AWARD 2021
Pupuk Indonesia bersama empat anak usahanya meraih peringkat "Emerging Industry Leader"
INDONESIAN QUALITY AWARD 2021
Pupuk Indonesia and four subsidiaries ranked as "Emerging Industry Leaders"

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Indonesian Quality Award Foundation (IQAF)

17 November 2021
November 17, 2021



Best BUMN Award 2021
Indonesia Best BUMN Award 2021: adalah Agricultural Productivity Improvement Program dan Outstanding Financial Performance
Best BUMN Award 2021
Indonesia Best BUMN Award 2021: Agricultural Productivity Improvement Program and Outstanding Financial Performance

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Warta Ekonomi

25 November 2021
November 25, 2021



TOP BUMN AWARD 2021
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman berhasil meraih penghargaan Top CEO in Sustainable Business Growth dalam ajang Top BUMN Award 2021 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia.
TOP BUMN AWARD 2021
PT Pupuk Indonesia (Persero) President Director, Bakir Pasaman received Top CEO in Sustainable Business Growth award at the Top BUMN Award 2021 organized by Bisnis Indonesia.

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Bisnis Indonesia

30 November 2021
November 30, 2021



**THE MOST TRUSTED COMPANIES
AWARD 2021**

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
SWA

8 Desember 2021
Desember 8, 2021

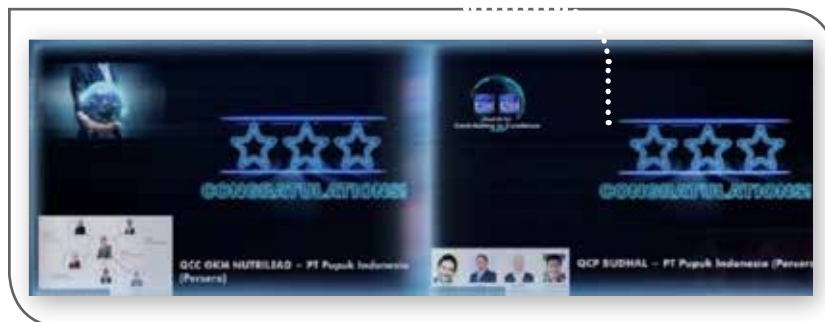


**BEST INDUSTRY MARKETING
CHAMPION 2021 FOR CHEMICAL
SECTOR**

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
SWA Magazine

8 Desember 2021
Desember 8, 2021

INTERNASIONAL | INTERNATIONAL



**AWARD FOR CONTRIBUTING TO EXCELLENCE (ACE) TEAM AWARD
COMPETITION 2021**
QCC GKM Nutrilead-peringkat tertinggi kategori 3 Star
QCP BUDHAL-peringkat tertinggi kategori 3 Star
AWARD FOR CONTRIBUTING TO EXCELLENCE (ACE) TEAM AWARD
COMPETITION 2021
QCC GKM Nutrilead-QCC GKM Nutrilead-highest rating in the 3 Star category
QCP BUDHAL-BUDDHAL QCP-highest rating in the 3 Star category

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Asia Pacific Quality Organization

15 September 2021
September 15, 2021



ASIA SUSTAINABILITY REPORTING RATING 2021

Diberikan Oleh | Issuer of the Award

National Center for Sustainability Reporting (NCSR).

17 November 2021
November 17, 2021



ASEAN Risk Awards 2021 ERMA

- Public Initiative (Runner Up)
- Risk Educator (Runner Up)

Diberikan Oleh | Issuer of the Award
Enterprise Risk Management Academy

10 Desember 2021
December 10, 2021

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA TAHUN 2021

VALID CERTIFICATION IN 2021



ISO 9001:2015-QUALITY SYSTEM MANAGEMENT CERTIFICATION ISO 9001:2015-QUALITY SYSTEM MANAGEMENT CERTIFICATION

Dikeluarkan Oleh

Issued by

PT SGS Indonesia

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi

Certification Issuance Date

18 Februari 2018
February 18 2018

Masa Berlaku Hingga

Validity Until

18 Februari 2022
February 18 2022



SNI ISO 37001: 2016 - ANTI BRIBERY SYSTEM MANAGEMENT CERTIFICATION SNI ISO 37001: 2016 - ANTI BRIBERY SYSTEM MANAGEMENT CERTIFICATION

Dikeluarkan Oleh

Issued by

PT ASRICERT

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi

Certification Issuance Date

27 Oktober 2019
October 27, 2019

Masa Berlaku Hingga

Validity Until

27 Oktober 2022
October 27, 2022



DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, SERTA INFORMASI TENTANG KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

LIST OF ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES, JOINT VENTURES, AND INFORMATION ON BRANCH OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES

Alamat Entitas Anak Kepemilikan langsung Addresses of Direct Ownership Subsidiaries

PT Petrokimia Gresik

Jl. Jend. A. Yani, Gresik 61119, Jawa Timur
Telp : +62-31 3981811, 3982100, 3982200
Fax : +62-31 3981722, 3982272
E-mail : pg@petrokimia-gresik.com
Web : www.petrokimia-gresik.com

PT Pupuk Kujang

Jl. Jend. A. Yani No. 39, Kec. Cikampek, Kab. Karawang
41373, Jawa Barat
Telp : +62-264 316 141, 317 007
Fax : +62-264 314 235
E-mail : info@pupuk-kujang.co.id
Web : www.pupuk-kujang.co.id

PT Pupuk Kalimantan Timur

Jl. Ir. James Simandjuntak No.1, Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara,
Kota Bontang 75313, Kalimantan Timur
Telp : +62-548 41202
Fax : +62-548 41626
E-mail : dof@pupukkaltim.com
Web : www.pupukkaltim.com

PT Pupuk Iskandar Muda

Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh
Telp : +62-645 56222
Fax : +62-645 56095
E-mail : info@pim.co.id
Web : www.pim.co.id

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Jl. Mayor Zen, Palembang 30118
Telp : +62-711 712222
Fax : +62-711 712100
E-mail : info@pusri.co.id/humas@pusri.co.id
Web : www.pusri.co.id

PT ReKayasa Industri

Jl. Kalibata Timur I No. 36, Kalibata, Jakarta 12740
Telp : +62-21 7988700/7988707
Fax : +62-21 7988701/7988702
E-mail : corpsec@rekayasa.co.id.
Web : www.rekayasa.com

PT Mega Eltra

Jl. Jatiwaringin Raya No. 1 Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur
13620
Telp : +62-21 21285152
Fax : +62-21 28535855
E-mail : pr@megaeltra.co.id
Web : www.megaeltra.com

PT Pupuk Indonesia Logistik

Gedung Wisma Pusri 101, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 101
RT/RW. 2/1 Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta 11440
Telp : +62-21 2263 1881, 2263 1882, 2263 1883
Fax : (62-21) 2256 1904
E-mail : info@pi-logistik.com, marketing@pi-logistik.com
Web : www.pi-logistik.com

PT Pupuk Indonesia Utilitas

Alamanda Tower Lt. 26
Jl. TB Simatupang No. 22-26 RT/RW. 1/1 Cilandak Barat, Kec.
Cilandak, Jakarta 12430
Telp : +62-21 29661628, 29661629, 29661630, 29661631
Fax : +62-21 345 2609
E-mail : info@pi-energi.com
Web : www.pi-energi.com

PT Pupuk Indonesia Pangan

Jl. Raya Rawamerta, Dusun Sukamanah RT/RW. 006/003, Desa
Kutawargi, Kec. Rawamerta, Karawang 41382
Telp : +02-67 6064389
Fax : +02-67 6064556
E-mail : pemasaran@pi-pangan.com
Web : www.pi-pangan.com

Alamat Entitas Anak Kepemilikan langsung
Addresses of Direct Ownership Subsidiaries

PT Petrosida Gresik

Kantor Pusat/Head Office :
Jl. KIG Raya Utara Kav. O No. 5, Kawasan Industri Gresik (KIG),
Gresik 61151, Jawa Timur-Indonesia
Telp : +62 31 3981553, 3985541-42, 3985594
Fax : +62 31 3981653
E-mail : corporate@petrosida-gresik.com
Web : www.petrosida-gresik.com

PT Petrokimia Kayaku

Kantor Pusat/Head Office :
Jl. Jendral Ahmad Yani
PO Box 107 Gresik, 61119
Jawa Timur-Indonesia
Telp : +62 31 398 1815/1831/1989
Fax : +62 31 3981830
E-mail : info@petrokayaku.com
Web : m.petrokayaku.com

PT Kawasan Industri Kujang Cikampek

Kawasan Industri Kujang Cikampek, Jl. Jend. A. Yani No. 39,
Cikampek, Jawa Barat
Telp : +62 264-313113
Fax : +62 264-313114
E-mail : info@kikc.co.id
Web : www.kikc.co.id

PT Sintas Kurama Perdana

Kawasan Industri Kujang Cikampek, Jl. Jend. A. Yani No. 39,
Kalihurip, Cikampek, Jawa Barat 41373
Telp : +62 264-313392
Fax : +62 264-313043
E-mail : sales@sintas90.co.id
Web : www.sintas90.co.id

PT Kaltim Industrial Estate

Kantor Pusat/Head Office :
Wisma KIE, Lantai 3, Kawasan Industri Bontang, Jalan Paku Aji
Kav. 79, Bontang-75313, Kalimantan Timur
Telp : +62 548 41368
E-mail : contact@kie.co.id

PT Pusri Agro Lestari

Gedung Pusri 101, Lantai 2 & 3, Jl. Let. jend. S. Parman Kav. 101
Jakarta Barat 11440

PT PIM Prima Medika

Jl. PIM Housing Komp., Tambon Tunong, Dewantara,
Kabupaten Aceh Utara, Aceh

PT Rekind Daya Mamuju

Jalan MT. Haryono Kav. 23 Jakarta 12820
Telp : +62 21 83789152, 83785961, 83787760
Fax : +62 21 8307578

PT Puspेतindo

Gedung Gresik Migas Tower Lt.2
Jl. Dr. Wahidin S.H. No.708, Kembangan,
Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61124
Telp : +62 31 99103048
E-mail : info@puspetindo.com
Web : www.puspetindo.com

PT Yasa Industri Nusantara

Jl. Kalibata Timur No.27, RT.2/RW.8, Kalibata, Pancoran, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Telp : +62 21 791 87800
Fax : +62 21 794 2030

PT Tracon Industri

Jl. Kalibata Timur No.27, RT.2/RW.8, Kalibata, Pancoran, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Telp : +62 21 797 4367
Fax : +62 21 7918 0907

PT Rekindaya Engineering

Jl. Kalibata Timur No.27, RT.2/RW.8, Kalibata, Pancoran, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Telp : +62 21 79181180
Fax : +62 21 7940984
E-mail : marketing@re.rekindaya.co.id
Web : www.rekindayaengineering.co.id

Alamat Entitas Anak Kepemilikan Tidak Langsung
Addresses of Indirect Ownership Subsidiaries

Rekind Malaysia Sdn. Bhd.

Suite 9-2 Lt. 9, Wisma UOA II, No. 21 Jalan Pinang 50450
Kuala Lumpur, Malaysia
Telp : +60 3-2181 5251

PT Sigma Utama

Jl Lanbau No.1, Karang Asem Barat,
Citereup Kabupaten Bogor 16810, Jawa Barat
Telp : +62 21 8756310
Fax : +62 21 8753042
Web : sigmautama.com

PT Kaltim Daya Mandiri

Wisma KIE Kavling 79, Jl. Raya Paku Aji, Kota Bontang,
Kalimantan Timur 75311
Telp : +62 548 41950

PT Kaltim Jasa Sekuriti

Wisma KIE Lantai Dasar, Jln. Paku Aji Kavling 79-Kawasan
Industri Bontang-Bontang-Kalimantan Timur
Telp : +62 548 41101
Fax : +62 548 41104

PT Kaltim Adhiguna Dermaga

Kantor Pusat/Head Office :
Jalan Paku Aji Kav.79, Wisma KIE Lantai 1, Guntung, Bontang
Utara, Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia
E-mail : kaltim.adhiguna@gmail.com, kaltimadhiguna@kad.co.id
Web : kad.co.id

PT Rekindaya Cakrawala Resources

Jl. Kalibata Timur I no. 36, Jakarta Selatan 12740
Telp : +62 21 79181180 Ext. 5511/12/14
Fax : +62 21 79196204
E-mail : marketing@recare.rekindaya.co.id, recruitment@recare.
rekindaya.co.id, designschool@recare.rekindaya.co.id
Web : recare.rekindaya.com

**PT Recon Sarana Utama**

Jl. Kalibata Timur II No. 27 Rt. 002/08- Kel. Kalibata- Kec. Pancoran
Web : recon.co.id

PT Tracon Industri Solusindo

Kantor Pusat/Head Office : Graha Gabah Pertani 1 Floor
Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan 12760 st
Telp : +62 21 797 4367, +62 21 7918 0907
E-mail : bisnis@tracon.rekayasa.co.id, sales@tracon.rekayasa.co.id
(Supply Chain)
Web : tracon.co.id

Alamat Entitas Asosiasi**Addresses of Associated Entities****PT Petronika**

Prof Dr Moh Yamin Sh Jl Po Box 129,
Bedilan, Gresik, Jawa Timur 61111
Telp : +62 31 3951956
E-mail : petronika@telkom.net
Web : www.panditaindustries.com

PT Multi Nitrotama Kimia

Equity Tower 41th
Floor Suite E Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9
Jakarta 12190
Telp : (+62-21) 2903 5022 (Hunting)
Fax : (+62-21) 2903 5021

PT Clariant Kujang Catalyst

Kawasan Industri Kujang Cikampek,
Jl. Jend. A. Yani No. 39, Kalihurip, Cikampek, Jawa Barat 41373
Telp : +62 21 8370 1020, 8370 1719
Fax : +62 21 8370 0410
E-mail : info@kikc.co.id
Web : www.kikc.co.id

PT Peroksida Indonesia Pratama

Kawasan Industri Kujang Cikampek,
Jl. Jend. A. Yani No. 39, Kalihurip, Cikampek, Jawa Barat 41373
Telp : +62 2 64-313 383 ; 313 387
Fax : +62 2 64-313 386
E-mail : info@ptpip.co.id
Web : www.ptpip.co.id

PT Kaltim Amonium Nitrat

Jalan MT. Haryono Kav. 23 Jakarta 12820

PT Aneka Jasa Grhadika

Komplek Lingkungan Industri Kecil
Jl. Prof. M. Yamin SH, PO BOX 122 Tlogopojo,
Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur 61119
Telp : +62 31 3954726
E-mail : info@ajg.co.id
Web : www.ajg.co.id

PT Petrokopindo Cipta Selaras

Jalan Raya Romo 242, Gresik
Telp : +62 31 3984194
E-mail : admin@petrokopindo.com
Web : petrokopindo.com

Hotel Bintang Sintuk

Jl. Urea, Komplek Lapangan Golf PT Pupuk Kaltim, Bontang,
Kalimantan Timur, Indonesia
Telp : +62 21 548 26268, 392 2566
E-mail : reservation@hotelbintangintuk.com
Web : hotelbintangintuk.com

Alamat Ventura Bersama**Addresses of Joint Ventures****PT Petro Jordan Abadi**

Jl Kig Raya Utara No.5, Roomo, Manyar,
Gresik Regency, East Java 61151
Telp : +62 31 399 1887
E-mail : admin@pja-gresik.com
Web : pja-gresik.com

PT Kalimantan Agro Nusantara

Komplek Thomas Square C-5.
Jalan Yos Sudarso II No. 17
Kec. Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur
Telp : +62 549 2027833

PT Kaltim Jordan Abadi

Wisma KIE Lantai 2, Jl. Ammonia Kav. 79 Bontang 75314
Kalimantan Timur
E-mail : contact@kja-bontang.com
Web : kaltimjordanabadi.com

PT Pupuk Agro Nusantara

Jl. Karya Wisata, Komplek J. Square-J. City E-38
Kec. Medan Johor, Kota Medan.

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE

Sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dalam upaya membentuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PTPI menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang salah satunya dapat diakses setiap saat oleh semua pihak melalui situs web yang beralamat di www.pupuk-indonesia.com.

Semua informasi yang disajikan diperbaharui secara berkala untuk memberikan informasi yang aktual dan terkini bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Situs resmi Perusahaan menyajikan Informasi dalam dua Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2015, antara lain:

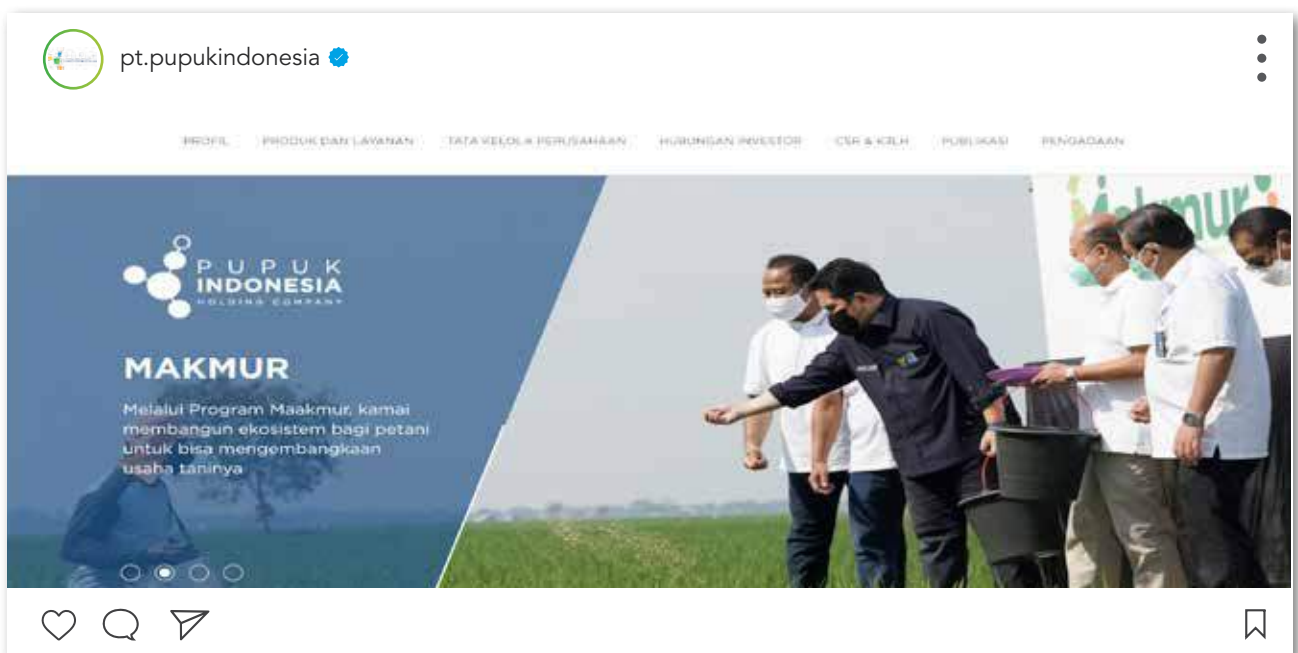
1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

As part of the principle of transparency in an effort to establish Good Corporate Governance, PTPI provides information to stakeholders, which can be accessed at any time by all parties through its website at www.pupuk-indonesia.com.

All information listed is updated regularly to provide actual and up-to-date information for all stakeholders and the general public.

The Company's official website presents information in two languages, namely Indonesian and English and has complied with the information that must be published in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies as stipulated on June 25, 2015, including:

1. General Information of Issuers or Public Companies;
2. Information for Capital Owners or Investors;
3. Corporate Governance Information;
4. Information on Corporate Social Responsibility.





Uraian Description	Ketersediaan Available	Link
Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik General Information of the Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik Brief history of the Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/profil#sekilas
Struktur Organisasi Emiten atau Perusahaan Publik Organization Structure of the Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pojk
Struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik Ownership Structure/Shareholder of the Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pemegang-saham
Struktur Grup Emiten atau Perusahaan Publik Group Structure of the Issuer or Public Company	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pemegang-saham
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Sekretaris Perusahaan Profile of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees, Corporate Secretary	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/profil#dewan-komisaris https://www.pupuk-indonesia.com/id/pages/komite-perusahaan https://www.pupuk-indonesia.com/id/profil#dewan-direksi
Lembaga Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pojk
Dokumen Anggaran Dasar Articles of Association	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pojk
Informasi Bagi Pemodal atau Investor Information for Capital Owners or Investors	√	http://ppid.pupuk-indonesia.com/
Prospektus Penawaran Umum Public Offering Prospectus	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pages/obligasi
Laporan tahunan untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir Annual report for the last 5 (five) fiscal years	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/publikasi#laporan-tahunan
Laporan keuangan tahunan (3 tahun terakhir) Annual financial statements (last 5 years)	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/laporan-keuangan
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least including material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, including date of the announcement of the GMS, date of the invitation to the GMS, date of the GMS, date when the summary of the minutes of the GMS is announced.	√	https://www.pupuk-indonesia.com/informasi-rups

Uraian Description	Ketersediaan Available	Link
Informasi Obligasi Bond Information	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pages/obligasi
Informasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Information	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/gcg
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/gcg
Isi Kode Etik Code of Conduct Contents	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/gcg
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate social responsibility	√	https://www.pupuk-indonesia.com/id/csr

√ = tersedia pada situs web Perusahaan
x = belum tersedia pada situs web Perusahaan
√ = available on Company website
x = not yet available on Company website



BUMN

Makmur

AGROSOLUSI PUPUK INDONESIA

Diluncurkan oleh Menteri BUMN Republik Indonesia

Erick Thohir



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Pertumbuhan profitabilitas dan posisi keuangan yang menguat mencerminkan keberhasilan PI Group memanfaatkan momentum pertumbuhan, yang akan menjadi fondasi untuk terus berkembang di masa-masa mendatang.

The profitability growth and the strong financial position reflects the success of PI Group in taking advantage of the growth momentum, which will be the foundation to continue to grow in the future.



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW



KONDISI EKONOMI

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut meskipun pandemi COVID-19 terlihat belum akan berakhir yang ditandai dengan munculnya varian delta yang cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran varian Delta yang cepat dan adanya potensi ancaman varian baru merupakan risiko utama yang dapat menghambat pemulihan ekonomi global. Pandemi COVID-19 bukan satu-satunya risiko bagi negara-negara di dunia. Kenaikan harga berbagai komoditas terutama pangan merupakan risiko yang perlu diantisipasi secara komprehensif oleh negara-negara miskin dan berkembang. Selain itu terdapat risiko dari perubahan kebijakan moneter terutama bank sentral Amerika Serikat (AS) dan beberapa bank sentral negara maju lainnya seiring dengan perubahan prospek ekonomi negara maju yang mendorong ketidakpastian pada pasar keuangan dan meningkatkan risiko di sektor keuangan non-bank.

ECONOMIC CONDITION

The global economic recovery continued even though the COVID-19 pandemic looked like it would not end, especially from the emergence of the delta variant that rapidly spread to all corners of the world. The rapid spread of the Delta variant and the potential threat of new variants were the main risks faced that can hinder the global economic recovery. The COVID-19 pandemic is not the only risk that countries around the world face. The increases in commodities prices, especially food, also pose a risk that needs to be comprehensively anticipated by poor and developing countries. There are also risks from changes in monetary policy, especially from the central bank of the United States, and several other developed country central banks, following changes in the developed countries economic prospects. This is driving uncertainty in the financial markets and increasing risks in the non-bank financial sector.

Publikasi International Monetary Fund (IMF) bertajuk “World Economic Outlook” edisi Januari 2022 pertumbuhan perekonomian dunia tahun 2021 adalah sebesar 5,9% atau lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi -3,1%. Namun demikian, masih terjadi perlambatan pemulihan ekonomi terutama di Kawasan Asia dimana lonjakan kasus COVID-19 masih terjadi di India, Malaysia, dan Vietnam yang harus berjuang melawan varian baru. Sementara di sisi lain vaksinasi berjalan lambat.

The International Monetary Fund (IMF) in its “World Economic Outlook” January 2022 edition, stated that world economic growth in 2021 was 5.9%, an improvement from the contraction of -3.1% in 2020. However, there would still a slowdown in economic recovery, especially in the Asian Region, where spikes in COVID-19 cases are still occurring in India, Malaysia and Vietnam, as they continue to fight against new variants. While on the other hand vaccination are running slowly.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) seiring dengan pemulihan ekonomi global, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% yang lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04%.

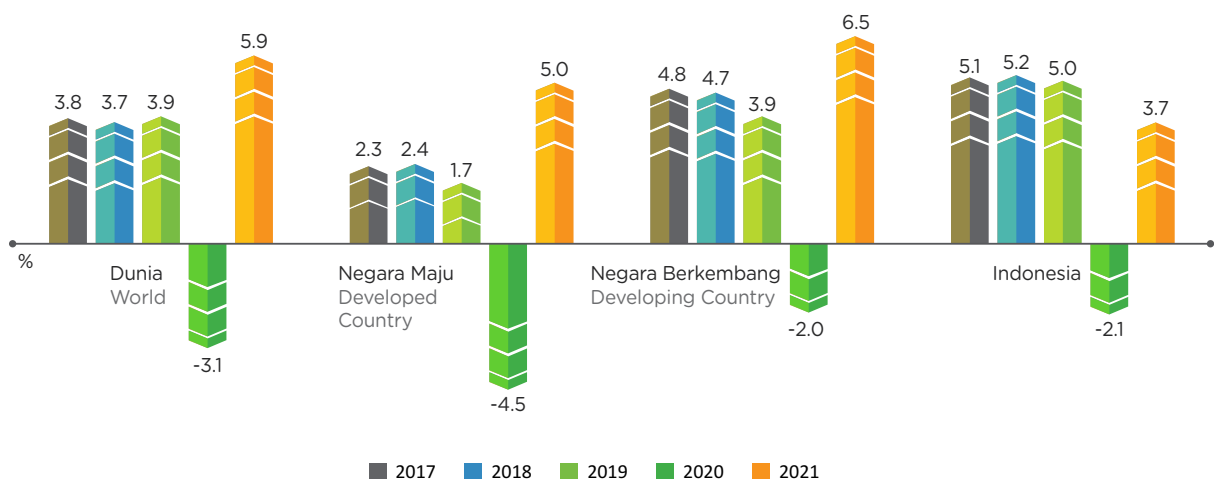
According to the Central Statistics Agency (BPS) data in line with the global economic recovery, Indonesia’s economic performance in 2021 grew by 3.69%, higher than the 2020 when it contracted by -2.07%. For production, the highest growth occurred in the Health Services and Social Activities Business Field with 10.46%. Meanwhile, in terms of expenditure, the highest growth was achieved by the Export Component of Goods and Services with 24.04%.

Strategi pemulihan ekonomi oleh pemerintah diantaranya vaksinasi, peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait. Selain itu, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

The Government’s economic recovery strategy includes vaccinations, increasing domestic consumption, increasing business activities, as well as maintaining economic stability and monetary expansion. These policies have been implemented simultaneously with synergy between the fiscal policy holders, monetary policy holders and related institutions. In order to support the national economic recovery, Bank Indonesia has maintained a stable Rupiah exchange rate, lowered interest rates, purchased Government Securities, and maintained macroeconomic and financial system stability. The objective of lowering interest rates is to increase financial liquidity to encourage business activity.

PI selalu memantau perkembangan perekonomian dunia yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan. Indikator yang menjadi fokus perhatian antara lain nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, harga komoditas amoniak, urea, NPK serta bahan baku produksi.

PI continually monitors the developments in the world economy that may affect the Company’s business performance. Indicators we focus on include currency exchange rates, inflation rates and commodity prices for ammonia, urea, NPK and production raw materials.





KONDISI INDUSTRI PUPUK

Pada tahun 2021, terdapat fenomena *lockdown* di beberapa negara dan pengalihan hasil produksi domestik untuk kebutuhan nasional, yang berdampak pada peningkatan harga komoditas pupuk akibat adanya penyesuaian pada *supply* dan *demand* di pasar. Di samping itu terdapat kenaikan harga gas bumi di beberapa negara yang berdampak pada kenaikan harga produk turunan dari gas bumi.

Kinerja PTPI secara konsolidasi dibandingkan *peers* masih cukup kompetitif dan berada di urutan ke 8 atau turun 2 peringkat dari posisi tahun sebelumnya (*yoy*). Peningkatan pendapatan sebesar 8,10% (*yoy*) disebabkan tingginya penjualan komersial dengan memanfaatkan momentum harga jual yang tinggi. Kemudian untuk kinerja laba tahun berjalan mengalami kenaikan 18,25% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja PTPI dari sisi nilai laba bersih tahun 2021 dibandingkan *peers* juga masih cukup kompetitif dimana perusahaan berada di urutan ke 11 atau turun 2 peringkat dari posisi tahun sebelumnya.



Posisi PTPI dalam Industri Pupuk Berdasarkan Pendapatan PTPI's Position in the Fertilizer Industry in terms of Revenue

FERTILIZER INDUSTRY CONDITION

In 2021, the lockdown phenomenon in several countries and the diversion of domestic production to support national needs had an impact on increasing fertilizer commodity prices due to the adjusting market supply and demand. Also, there were increases in the price of natural gas in several countries that led to a price increase in derivative products using natural gas.

PTPI's performance on a consolidated basis compared to its peers was still quite competitive, and we were ranked in 7th place, or down 1 place from the previous year's position (*yoy*). The 9.36% (*yoy*) increase in revenue was due to high commercial sales taking advantage of the high selling price momentum. The profit for the current year increased by 20.79% (*yoy*) compared to the previous year. PTPI's performance in terms of net profit in 2021 compared to its peers was also still quite competitive where the Company stood in 10th place down from its 2nd place last year.

USD Juta

Peringkat Rank			Perusahaan Companies	Negara Country	Nilai Pendapatan Revenue		Pertumbuhan YoY Growth YoY (%)
2020	2021	2020			2021		
1	1	=	Nutrien	Kanada Canada	20.908	27.712	32,54
2	2	=	Yara International	Norwegia Norway	11.728	16.607	41,60
3	3	=	The Mosaic Company	Amerika Serikat United States of America	8.682	12.357	42,33
4	4	=	OCP Group	Maroko Marocco	6.315	9.476	50,05
5	5	=	Israel Chemicals	Israel	5.043	6.955	37,91
7	6	▲	CF Industries	Amerika Serikat United States of America	4.590	6.538	42,44
9	7	▲	PhosAgro	Rusia Russia	3.412	5.644	65,41
6	8	▼	Pupuk Indonesia	Indonesia	5.096	5.482	8,10
11	9	▲	Uralkali	Rusia Russia	2.696	4.155	54,11
8	10	▼	K+S Group	Jerman Germany	2.990	3.638	21,66
					Rata-rata Industri Industry Average		38,34



PI Grup dalam Industri Pupuk Berdasarkan Laba Bersih
PI Group's Position in the Fertilizer Industry in terms of Net Profit

USD Juta

Peringkat Rank			Perusahaan Companies	Negara Country	Nilai Pendapatan Revenue		Pertumbuhan YoY Growth YoY (%)
2020	2021	2020			2021		
10	1	▲	K+S Group	Jerman Germany	(2.109)	3.378	260,18
2	2	▬	Nutrien	Kanada Canada	459	3.179	592,59
8	3	▲	OCP Group	Maroko Marocco	381	1.836	381,75
1	4	▼	Uralkali	Rusia Russia	(43)	1.767	4.208,65
3	5	▼	PhosAgro	Rusia Russia	227	1.741	665,37
12	6	▲	The Mosaic Company	Amerika Serikat United States of America	2.221	1.627	(26,74)
7	7	▬	SAFCO	Arab Saudi Saudi Arabia	345	1.504	335,82
4	8	▼	CF Industries	Amerika Serikat United States of America	646	1.260	95,05
6	9	▼	Israel Chemicals	Israel	24	832	3.366,67
5	10	▼	Yara International	Norwegia Norway	690	384	(44,35)
9	11	▼	Pupuk Indonesia	Indonesia	165	360	118,25
Rata-Rata Industri							456,93



Asumsi Kurs
Exchange Rates

Asumsi Kurs (USD/Rp) Exchange Rates (USD/Rp)	
2020	2021
14.105	14.269



KEBIJAKAN DAN STRATEGI BISNIS

TAHUN 2021

BUSINESS POLICIES AND STRATEGIES IN 2021



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja perusahaan tahun 2021, PTPI memiliki strategi-strategi sebagai berikut:

1. Implementasi program *retail management* dan *agrosolution*;
2. Pemberdayaan UMKM melalui program PADI untuk meningkatkan penjualan produk dan jasa yang dimiliki oleh UMKM melalui kanal digital BUMN untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian dalam negeri;
3. Penyelesaian proses *single branding* produk urea dan NPK untuk meningkatkan *awareness end-customer*, mengakuisisi pasar non-subsidi, dan sebagai substitusi atau *complementary* pasar subsidi yang kekurangan alokasi;
4. Restrukturisasi anak perusahaan non-produsen pupuk untuk menyelaraskan kembali portofolio anak perusahaan sesuai dengan *strategic direction*;
5. Digitalisasi diantaranya implementasi *Digital Fertilizer*, *Manufacturing Network Footprint*, *Advanced Analytics*, *Supply Chain Control Tower*, *Retail Management System*, dan Digitalisasi Pengelolaan Riset untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan;

To support the Company's performance targets achievement in 2021, PT Pupuk Indonesia (Persero) instigated the following strategies:

1. Implemented retail management and agrosolution programs;
2. Empowered MSMEs through the PADI program to increase sales of products and services owned by MSMEs through SOE digital channels to accelerate domestic economic growth;
3. Completed the single branding process for urea and NPK products to increase end-customer awareness, acquire non-subsidized markets, and as a substitute or complementary subsidy market that is under-allocated;
4. Restructured non-fertilizer producing subsidiaries to realign the subsidiaries portfolio in line with the strategic direction;
5. Conducted digitization for the implementation of Digital Fertilizer, Manufacturing Network Footprint, Advanced Analytics, Supply Chain Control Tower, Retail Management System, and Digitalization of Research Management to improve the Company's business processes effectiveness and efficiency;

6. Penguatan program pengembangan talenta dan manajemen karir;
7. Mengembangkan *Customer Centric* R&D dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman;
8. Penyehatan rasio keuangan perusahaan dengan melakukan penerbitan obligasi PUB II tahun 2021.

Sedangkan untuk mencapai visi menjadi perusahaan nasional berkelas dunia untuk nutrisi tanaman dan solusi pertanian berkelanjutan serta mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional, PTPI menetapkan *strategy house* yang didalamnya terdapat 21 inisiatif strategis dalam rangka transformasi perusahaan yang termuat dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2020-2024. Beberapa inisiatif strategis yang menjadi highlight pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat *partnership* dengan distributor dan *retailer* melalui program *Retail Management*;
2. Mendekatkan diri dan memberikan solusi kepada petani melalui program MAKMUR (*Agrosolution*);
3. Mengembangkan produk *adjacent chemical* potensial dan strategis yang dapat memperkuat *circular economy* seperti katalis merah putih, soda ash, dan amonium nitrat;
4. Mendorong *Operation Excellence* di pabrik dengan meningkatkan keandalan pabrik dan menciptakan efisiensi melalui pengembangan sistem, digitalisasi dan *tools* untuk optimalisasi proses produksi hingga penjualan dan distribusi produk;
5. Pengamanan pasokan bahan baku gas alam dan non gas alam (terutama sumber Phospat dan Kalium) melalui penjajakan tambang potensial;
6. Membentuk tim digital dan *advanced analytics* yang inovatif pada level *holding* untuk implementasi *data science* pada proses bisnis pemasaran dan distribusi;
7. Memperkuat organisasi melalui penguatan strategi talent dan sistem rotasi pegawai.

Inisiatif-inisiatif strategis tersebut diambil mengingat dinamika usaha masa mendatang yang berfokus pada pelanggan. PTPI telah memulai sejumlah program untuk dapat lebih merangkul dan meningkatkan *engagement* dengan konsumen.

6. Strengthened the talent development and career management programs
7. Developed a Customer Centric R&D and products to meet the nutritional needs of plants
8. Refined the Company's financial ratios by issuing PUB II bonds in 2021

At the same time, to achieve its vision to become a sustainable world-class national Company of plant nutrition and agriculture solutions and able to create national economic and social impact, PTPI established a strategy house with 21 strategic initiatives in the context of Company transformation, contained in the Company's 2020- 2024 Long Term Plan. Some of these strategic initiatives highlighted in 2021 included:

1. Strengthening partnerships with distributors and retailers through the Retail Management program;
2. Getting closer and providing solutions to farmers through the MAKMUR (Agrosolution) program;
3. Developing potential and strategic adjacent chemical products to strengthen the circular economy, such as red and white catalysts, soda ash, and ammonium nitrate;
4. Encouraging Operation Excellence in factories by increasing factory reliability and creating efficiencies through system development, digitization and tools to optimize production processes for product sales and distribution;
5. Securing the natural gas and non-natural gas raw materials supply (especially sources of Phosphate and Potassium) through exploration of potential mines;
6. Forming an innovative digital and advanced analytics team at the holding level for the implementation of data science in marketing and distribution business processes;
7. Strengthening the organization through a talent strengthening and employee rotation system strategy.

These strategic initiatives were taken in view of the future dynamics of a customer-focused business. PT Pupuk Indonesia (Persero) initiated a number of programs to better embrace and increase engagement with consumers.



TINJAUAN OPERASI

PER SEGMENT USAHA

OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT OVERVIEW

Segmen usaha PTPI tercermin dari penyajian segmen operasi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi yang tercatat dalam Laporan Keuangan teraudit. Informasi Segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

Segmen usaha berdasarkan produk dan jasa mencakup 3 (tiga) segmen: Segmen Pupuk dan Amoniak, Segmen Jasa Konstruksi dan Segmen Lain-lain yang disampaikan secara konsolidasi.

Segmen Pupuk dan Amoniak merupakan kontributor terbesar serta bisnis inti Perusahaan dengan kontribusi terhadap total penjualan dan pendapatan mencapai 94,56%. Sebagai entitas usaha yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk menjamin distribusi dan ketersediaan pupuk bagi pasar Indonesia, pemerintah menugaskan PI Grup untuk menyalurkan pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

PTPI merupakan *activist holding* yang mengambil peran lebih aktif di dalam operasional perusahaan terutama untuk fungsi-fungsi strategis seperti pemasaran, pengadaan, riset, pengembangan, SDM, dan Teknologi Informasi.

PTPI's business segments are reflected in the presentation of operating segments in accordance with the Operating Segments referred to in the Financial Accounting Standard (PSAK) 5, as recorded in the audited Financial Statements. Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision makers. The main operating decision maker, responsible for allocating resources and assessing the performance of operating segments, as well as making strategic decisions is the Board of Directors.

The business segments based on products and services includes 3 (three) segments: Fertilizer and Ammonia Segment, Construction Services Segment and Other Segments, and these are delivered on a consolidated basis.

The Fertilizer and Ammonia segment is the largest contributor and the Company's core business with a contribution to total sales and revenue of 94.56%. As a business entity formed by the Government of Indonesia to ensure the distribution and availability of fertilizers for the Indonesian market, the Government assigned the PI Group to distribute subsidized fertilizers for the Agricultural Sector.

PTPI is an activist holding that plays a more active role in the Company's operations, especially in strategic functions such as marketing, procurement, research, development, as well as HC and Information Technology functions.



Kontribusi Segmen Usaha Terhadap Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya

Business Segments' Contribution to Sales and Other Operating Revenues

Segmen Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp Juta) Total (Rp million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp Juta) Total (Rp million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp Juta) Amount (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pupuk dan Amoniak Fertilizer and Ammonia	77.094.451	98,08	64.644.015	89,94	12.450.436	19,26
Jasa Konstruksi Construction Services	3.310.739	4,21	8.131.384	11,31	(4.820.645)	(59,28)
Lain-lain Other Segments	7.333.918	9,33	4.024.135	5,60	3.309.783	82,25
Eliminasi* Eliminasi*	(9.135.972)	(11,62)	(4.921.961)	(6,85)	(4.214.011)	85,62
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Income	78.603.136	100,00	71.877.573	100,00	6.725.563	9,36



Proporsi Penjualan Produk dan Subsidi terhadap Total Pendapatan

Proportion of Product Sales and Subsidies to Total Revenue

Segmen Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp Juta) Total (Rp million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp Juta) Total (Rp million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp Juta) Amount (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penjualan Segmen Pupuk dan Amoniak serta Segmen Lain-lain Sales of Fertilizer and Ammonia Segment and Other Segments						
Penjualan Produk* Sales of products*	49.313.851	62,74	37.356.701	51,97	11.957.150	32,01
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia	25.258.692	32,13	25.712.148	35,77	(453.456)	(1,76)
Pendapatan Jasa Rendering of services	4.030.593	5,13	8.808.724	12,26	(4.778.131)	(54,24)
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Income	78.603.136	100,00	71.877.573	100,00	6.725.563	9,36

* Terdiri dari pupuk dan non pupuk

* Consists of fertilizers and non-fertilizers

Penjualan produk pada tahun 2021 berkontribusi paling besar, yaitu 62,74% dari total penjualan dan pendapatan usaha lainnya secara konsolidasi. Adapun penggantian biaya subsidi dari pemerintah tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan penyaluran pupuk bersubsidi dari 8,43 juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,92 juta Ton di tahun 2021.

Product sales in 2021 contributed the most, with 62.74% of total sales and other operating revenues on a consolidated basis. The reimbursement of subsidy from the Government in 2021 decreased compared to 2020, mainly due to a decrease in the distribution of subsidized fertilizers from 8.43 million Tons in 2020 to 7.92 million Tons in 2021.

Namun demikian, manajemen berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi penjualan sektor komersil yang mampu berkontribusi untuk meningkatkan total nilai penjualan dan pendapatan lainnya sebesar 9,36% (yoy).

However, management continued to increase revenue by optimizing sales of the commercial sectors that contributed towards an increase in total sales and other revenue of 9.36% (yoy).



Segmen Pupuk dan Amoniak

Hingga akhir tahun buku 2021, Segmen Pupuk dan Amoniak merupakan bisnis inti PTPI. Segmen ini memiliki kegiatan produksi dan perdagangan produk pupuk dan non-pupuk/amoniak yang ditopang oleh kelompok usaha. Adapun produk yang dihasilkan pada segmen ini adalah Pupuk Urea, NPK, SP-36, ZA, dan ZK, serta produk non pupuk berupa amoniak.

Fertilizer and Ammonia Segment

Up to the end of the 2021 fiscal year, the Fertilizer and Ammonia Segment was PTPI's core business. This segment conducts fertilizer and non-fertilizer/ammonia production and trading activities supported by the business group. The products produced in this segment are Urea Fertilizer, NPK, SP-36, ZA, and ZK, as well as non-fertilizer products in the form of ammonia.



Produk Pupuk dan Amoniak Produksi PI Grup

Fertilizer and Ammonia Products Produced by the PI Group

No.	Produk Product	Uraian Description
Pupuk Fertilizer		
1	Urea	Pupuk dengan kandungan Nitrogen (N) sebesar 46% yang dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi (komersil). Pupuk Urea memiliki fungsi membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kandungan protein tanaman. Fertilizer with Nitrogen (N) content of 46% marketed for the subsidized and non-subsidized (commercial) sectors. Urea fertilizer makes plants greener, accelerates plant growth, and increases plant protein content
2	NPK	Merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan Nitrogen (N), Fosfat (P), Kalium (K) dan unsur mikro dengan komposisi yang variatif disesuaikan dengan permintaan pasar. Pupuk NPK dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi. Pupuk NPK memiliki fungsi dapat meningkatkan hasil panen, membuat tanaman lebih hijau dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit dan kekeringan. Compound fertilizer containing Nitrogen (N), Phosphate (P), Potassium (K) and micro elements with varied compositions adjusted to market demand. NPK fertilizer is marketed for the subsidized and non-subsidized sectors. NPK fertilizer increases crop yields, makes plants greener and increases plant resistance to pests diseases and drought.
3	SP-36	Merupakan pupuk yang dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi. Pupuk SP-36 memiliki kandungan Fosfat (P) sebesar 36% dan berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan bunga serta masaknya buah dan biji. Fertilizer marketed for the subsidized and nonsubsidized sectors. SP-36 fertilizer has a phosphate (P) content of 36% and serves to stimulate the growth of roots and flowers and ripen fruits and seeds.
4	ZA	Merupakan pupuk yang dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi. Pupuk ZA memiliki kandungan Nitrogen (N) sebesar 21% dan Sulfur 24% serta berfungsi untuk meningkatkan produksi hasil tebu, meningkatkan kualitas hasil panen, tanaman lebih sehat dan tahan terhadap hama. Fertilizer marketed for the subsidized and nonsubsidized sectors. ZA fertilizer has a Nitrogen (N) content of 21%, and Sulfur content of 24% and serves to increase sugarcane production, improve crop quality, and making healthier and pest resistant plants.
5	ZK	Merupakan pupuk yang memiliki kandungan K ₂ O sebesar 50% dan Sulfur 17% dan berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah, membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, memperbaiki warna, aroma, dan rasa. Fertilizer with 50% K ₂ O content and 17% Sulfur and serves to increase soil nutrients, make plants more upright and sturdy, and improve color, aroma, and taste.
Amoniak Ammonia		Merupakan bahan mentah industri kimia dengan kemurnian 99,5% yang dipasarkan untuk sektor dalam negeri maupun ekspor. A raw material for the chemical industry with a purity of 99.5% marketed for the domestic and export sectors

Khusus untuk produk pupuk, Perusahaan memiliki 2 (dua) lini bisnis, yaitu pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Pupuk bersubsidi adalah penugasan dari Pemerintah.

For its fertilizer products, the Company has 2 (two) business lines, namely subsidized and non-subsidized fertilizers. Subsidized fertilizers are based on an assignment from the Government.

Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi/Pupuk PSO

PI Grup memiliki penugasan untuk menyalurkan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi atau pupuk *Public Service Obligation* (PSO). Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Berdasarkan peraturan tersebut, kewajiban yang diemban Perusahaan adalah:

1. Wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
2. Wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri pada setiap puncak musim tanam bulan November hingga Januari;
3. Distributor wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setempat;
4. Pengecer wajib memiliki persediaan stok pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Perusahaan mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional, mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip "6 (Enam) Tepat": Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu dan Mutu. Mekanisme dan pola distribusi pupuk bersubsidi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Subsidized Fertilizer/PSO Fertilizer Distribution Mechanism

PI Group has been assigned to channel and distribute subsidized fertilizer called Public Service Obligation (PSO) fertilizer. This is in accordance with the Minister of Trade Regulation No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dated April 1, 2013 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector.

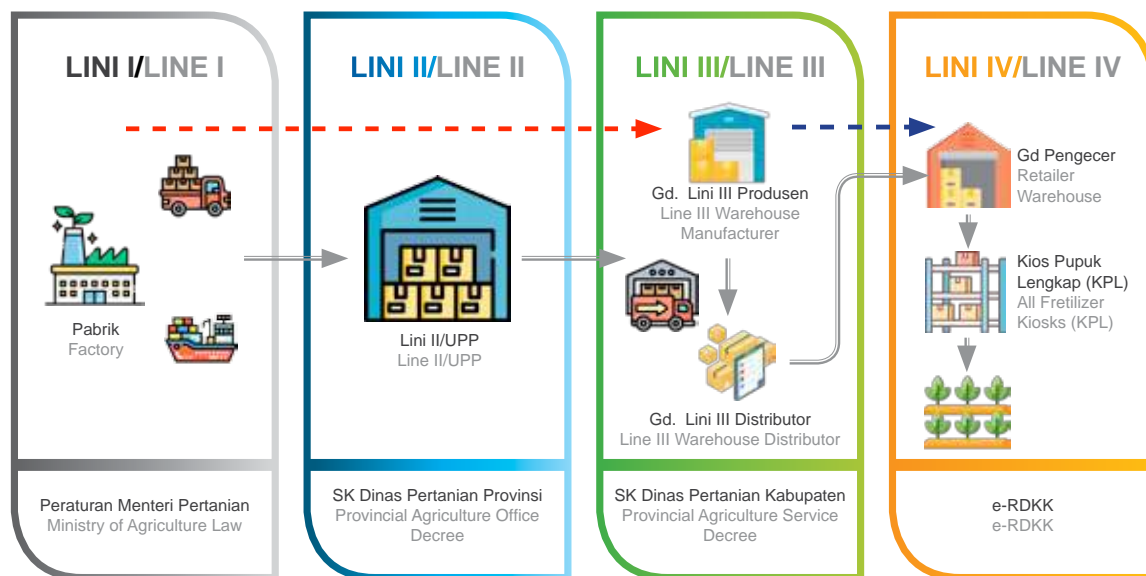
Based on these regulations, the Company's obligations are:

1. Mandatory guarantee of the availability of subsidized fertilizer stock in Line III at least to cover the needs for the next 2 (two) weeks, in accordance with the plan for domestic subsidized fertilizer needs stipulated by a Ministerial Regulation.
2. Mandatory guarantee of the availability of subsidized fertilizer stock in Line III at least to cover the needs for the next 3 (three) weeks, in accordance with the plan for domestic subsidized fertilizer needs stipulated by a Ministerial Regulation at the peak of each planting season from November to January.
3. Distributors are required to guarantee the availability of subsidized fertilizer stocks in the areas under their responsibility for at least the next 2 (two) weeks in accordance with the plan for subsidized fertilizer needs stipulated by the local Regent/Mayor Regulation.
4. Retailers are required to maintain a stock of subsidized fertilizer to cover at least for the needs of the next 1 (one) week in accordance with the RDKK in the areas they are responsible for.

The Company regulates the procurement and distribution of subsidized fertilizers domestically for the agricultural sector nationally, starting from Line I to Line IV in accordance with the "6 (Six) Right" principle: Right Type, Quantity, Price, Place, Time and Quality. The mechanism and pattern of distribution of subsidized fertilizer can be seen in the chart below.



Mekanisme Pendistribusian dari Lini I - Lini IV diatur sesuai Permendag No. 15/M-DAG-PER-4/2013
Distribution mechanism from Line I - Line IV as regulated in accordance with Minister of Trade Regulation No. 15/M-DAG-PER-4/2013



Note:

- Pengiriman langsung untuk lokasi Lini III dekat Lini I
Direct delivery to Line III locations near Line I
- Pengiriman langsung ke kios untuk lokasi remote area
Direct delivery to the kiosks in remote area locations

Sebagai produsen pupuk bersubsidi, Perusahaan wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat dan memiliki/menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III hingga Lini IV. Pengecer/Kios melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi ke Petani/Poktan.

As a producer of subsidized fertilizers, the Company is obliged to ensure the smooth distribution of subsidized fertilizers based on the 6 (six) fixed principles and owns/controls Line III warehouses in their areas of responsibility. Distributors carry out distribution of subsidized fertilizers from Line III to Line IV. Retailers/Kiosks carry out distribution of subsidized fertilizers to Farmers/Poktan.

Kuantum moda transportasi PTPI dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PTPI's quantum mode of transportation in the context of distributing subsidized fertilizers can be seen in the following table:



Kuantum Moda Transportasi PI Group
PI Group Quantum Mode of Transportation

No	Produsen Producer	Kuantum (Ton) Quantum (Tons)	Moda Transportasi (Per Ton) Mode of Transportation (Per Ton)	
			Angkutan Darat Land Transportation	Angkutan Laut Sea Transportation
1	PT Petrokimia Gresik	4.976.494	4.976.494	1.858.155
2	PT Pupuk Kalimantan Timur	738.997	738.997	712.618
3	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.750.088	1.750.088	1.503.882
4	PT Pupuk Iskandar Muda	472.184	472.184	203.683
5	PT Pupuk Kujang	1.141.585	1.141.585	-
Total		9.089.348		

Fokus dan Strategi Tahun 2021

Sebagai bisnis inti, PI Grup mengembangkan Segmen Pupuk dan Amoniak dengan fokus dan strategi sebagai berikut :

1. Implementasi *Digital Fertilizer, Manufacturing Network Footprint, Advanced Analytics, Supply Chain Control Tower, Retail Management System*, dan Digitalisasi Pengelolaan Riset untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan;
2. Pembangunan Pabrik NPK *Chemical* PT Pupuk Iskandar Muda Kapasitas 500.000 *Metric Tonnes per Year* (MTPY) dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pupuk NPK;
3. Persiapan pembangunan Pabrik Pupuk Urea Pusri - 3B dalam rangka revitalisasi pabrik tua;
4. Mengembangkan *Customer Centric R&D* dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman;
5. Peningkatan penjualan pupuk ritel dalam negeri melalui program *retail management* dan *agrosolution*;
6. Implementasi *Single branding dan single pricing* NPK & Urea;
7. Implementasi *Key Account Management (KAM) dan Technical Sales Team* bagi *large estate*;
8. Melakukan reposisi gudang dan sarana distribusi dalam rangka efisiensi biaya logistik;
9. Prioritas pemenuhan kebutuhan produk untuk: (1) Subsidi (PSO) sebagai pemenuhan penugasan dari Kementerian Pertanian, (2) retail untuk memenuhi kebutuhan petani yang tidak diakomodir di sektor subsidi (PSO), (3) Korporasi/Industri dalam negeri, (4) Ekspor;
10. Pengembangan aplikasi *Distributor Management System (DIMAS)* untuk evaluasi pengangkatan distributor pupuk bersubsidi dengan dasar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah;
11. Meningkatkan tata kelola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada lini IV dengan pengembangan aplikasi *Retail Management System (RMS)*.

Kinerja Tahun 2021: Aspek Produksi

Kegiatan operasional PI Grup untuk Segmen Pupuk dan Amoniak dijalankan oleh entitas anak, yaitu: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Pada tahun 2021, realisasi tonase produksi pupuk urea mencapai 7,97 juta ton, turun 0,18% dibandingkan kinerja tahun 2020 yang sebanyak 7,98 juta ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan jumlah pabrik yang melaksanakan *Turn Around (TA)* sebanyak 6 pabrik di tahun 2021 dan 5 pabrik di tahun 2020.

Sedangkan tonase produksi pupuk NPK tahun 2021 tercatat 3,17 Juta ton, meningkat 4,83% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 3,02 juta ton.

Focus and Strategy in 2021

As its core business, PI Group developed the Fertilizer and Ammonia Segment with the following focus and strategies:

1. The Implementation of *Digital Fertilizer, Manufacturing Network Footprint, Advanced Analytics, Supply Chain Control Tower, Retail Management System*, and Digitalization of Research Management to improve the Company's business processes effectiveness and efficiency;
2. Construction of PT Pupuk Iskandar Muda's NPK *Chemical* Factory with a Capacity of 500,000 *Metric Tons per Year* (MTPY) to increase the production capacity of NPK fertilizer;
3. Preparation for the construction of the Pusri Urea Fertilizer- 3B Factory in the context of revitalizing the old factory;
4. Development of *Customer Centric R&D* and products to meet the needs for nutritional plants ;
5. Increasing domestic retail fertilizer sales through retail management and agrosolution programs;
6. Implementation of *Single branding and single pricing* for NPK & Urea;
7. Implementation of *Key Account Management (KAM) and Technical Sales Team* for large estate;
8. Repositioning warehouses and distribution facilities in the context of logistics cost efficiency;
9. Prioritizing the need for products needs through: (1) Subsidies (PSO) as a fulfillment of assignments from the Ministry of Agriculture, (2) retail to meet the needs of farmers who are not included in the subsidy sector (PSO), (3) Corporations/domestic industries, (4) Export;
10. Development of the *Distributor Management System (DIMAS)* application to evaluate the appointment of subsidized fertilizer distributors on the basis of regulations set by the Government;
11. Improving the governance for the procurement and distribution of subsidized fertilizers in line IV by developing the *Retail Management System (RMS)* application.

2021 Performance: Production Aspect

The PI Group operational activities in the Fertilizer and Ammonia Segment are carried out by its subsidiaries: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and PT Pupuk Iskandar Muda.

In 2021, the realized tonnage of urea fertilizer production reached 7.97 million tons, a decrease of 0.18% compared to 7.98 million Tons in 2020. The decline in production was due to the number of factories carrying out *Turn Around (TA)* in 6 factories in 2021 and 5 factories in 2020.

Meanwhile, the NPK fertilizer production tonnage in 2021 was 3.17 million tons, an increase of 4.83% compared to 3.02 million Tons in 2020.



Realisasi tonase produksi pupuk lainnya pada tahun 2021 mencapai 1,09 juta ton, turun sebesar 12,66% dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,26 juta ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan adanya pengaturan produksi dan program pemeliharaan pabrik pupuk SP-36.

Kinerja produksi amoniak pada tahun 2021 meningkat 2,27% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 6,01 juta Ton pada tahun 2020 menjadi 6,15 juta ton. Peningkatan ini terutama disebabkan pabrik dapat beroperasi optimal dengan *rate* yang cukup tinggi. Sedangkan kinerja produksi non amoniak meningkat 0,10% (YoY).

The realized tonnage of other fertilizer production in 2021 reached 1.09 million tons, a decrease of 12.66% compared to 1.26 million Tons in 2020. The decline in production was due to production arrangements and the SP-36 fertilizer plant maintenance program.

Ammonia production performance in 2021 increased by 2.27% compared to the previous year, from 6.01 million Tons in 2020 to 6.15 million tons. This increase was mainly due to the factory being able to operate optimally at a fairly high rate. At the same time, non-ammonia production increased by 0.10% (YoY).



Kinerja Produksi Pupuk dan Amoniak

Fertilizer and Ammonia Production Performance

Produksi Pupuk dan Amoniak Fertilizer and Ammonia Production	Realisasi 2021 (Ton) 2021 Realization (Ton)	Realisasi 2020 (Ton) 2020 Realization (Ton)	Target 2021 (Ton) 2021 Target (Ton)	Kenaikan (Penurunan) 2020-2021 (%) Increase (Decrease) 2020-2021 (%)	Pencapaian Target 2021 (%) 2021 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Produksi Production					
• Pupuk • Fertilizer					
- Urea - Urea	7.968.504	7.983.042	7.797.000	(0,18)	102,20
- NPK - NPK	3.169.211	3.023.235	3.187.000	4,83	99,44
- Pupuk Lainnya* - Other Fertilizers *	1.098.385	1.257.557	1.250.000	(12,66)	87,87
Subtotal Produksi Pupuk Subtotal Fertilizer Production	12.236.101	12.263.833	12.234.000	(0,23)	100,02
• Non Pupuk • Non-Fertilizer					
- Amoniak - Ammonia	6.149.670	6.013.016	5.869.250	2,27	104,78
- Non Amoniak** - Non Ammonia**	1.073.056	1.071.994	1.210.000	0,10	88,68
Subtotal Produksi Non-Pupuk Subtotal Non-Fertilizer Production	7.222.726	7.085.010	7.079.250	1,94	102,03
Produk Samping Side Products					
Subtotal Produksi Produk Samping*** Subtotal Side Products***	66.164	33.409	76.000	98,04	87,06
Total Produksi Total Production	19.524.990	19.382.252	19.389.250	0,74	100,70

*) Terdiri dari SP-36, ZA dan ZK

***) Terdiri dari Asam Sulfat dan Asam Fosfat

****) Terdiri dari AlF₃, HCl dan CO₂

*) Includes SP-36, ZA and ZK

***) Includes Sulfuric Acid and Phosphoric Acid

****) Includes AlF₃, HCl and CO₂

Bahan baku utama dalam produksi pupuk Urea PI Grup adalah gas bumi yang juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Perusahaan telah memiliki sejumlah perjanjian pengadaan gas bumi dengan beberapa penyedia sebagai salah satu upaya kesinambungan dalam produksi.

The main raw material in the production of PI Group's Urea fertilizer is natural gas, which is also used as an energy source. The Company has a number of natural gas procurement agreements with several suppliers as part of its production sustainability efforts.

Gas bumi adalah komponen utama bahan baku sehingga efisiensi konsumsi gas menjadi sangat berpengaruh pada Harga Pokok Produksi (HPP). Capaian kinerja Rasio konsumsi energi tahun 2021 seperti pada tabel berikut :

Natural gas is the main component of raw materials so gas consumption efficiency is very influential on the Cost of Production (HPP). Energy consumption ratio performance achievements in 2021 are shown in the following table:



Kinerja Rasio Konsumsi Gas

Gas Consumption Ratio Performance

Rasio Konsumsi Gas Ratio of Gas Consumption	Realisasi 2021 (MMBTU/Ton) 2021 Realization (MMBTU/Ton)	Realisasi 2020 (MMBTU/Ton) 2020 Realization (MMBTU/Ton)	Target 2021 (MMBTU/Ton) 2021 Target (MMBTU/Ton)	Kenaikan (Penurunan) 2020-2021 (%) Increase (Decrease) 2020-2021 (%)	Pencapaian Target 2021 (%) 2021 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Urea Urea	27,45	26,86	27,74	2,20	98,95
Amoniak Ammonia	35,51	35,10	35,77	1,16	99,26

Kinerja Tahun 2021: Aspek Penjualan

Perusahaan membagi penjualan pupuk ke dalam 2 (dua) model, yaitu penjualan pupuk bersubsidi atau pupuk *Public Service Obligation* (PSO) yang tata niaganya diatur regulasi pemerintah serta penjualan pupuk komersial atau non-subsidi/Non-PSO. Penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 (enam) prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T: Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, dan Tepat Mutu. Sedangkan pupuk dan non pupuk komersil dipasarkan kepada jaringan distribusi domestik, penjualan industri dan ekspor.

2021 Performance: Sales Aspect

The Company divides its fertilizer sales into 2 (two) models, namely sales of subsidized fertilizers or *Public Service Obligation* (PSO) fertilizers through a trading system regulated by Government regulations, and sales of commercial or non-subsidized/Non-PSO fertilizers. The subsidized fertilizers distribution must fulfill 6 (six) main principles called the 6R: Right Type, Right Amount, Right Price, Right Place, Right Time, and Right Quality. At the same time, fertilizers and non-commercial fertilizers are marketed to domestic distribution networks, industrial sales and exports.



Volume Penjualan Pupuk dan Amoniak

Fertilizer and Ammonia Sales Volume

Volume Penjualan Pupuk dan Amoniak (Ton) Sales Volume of Fertilizer and Ammonia (Ton)	Realisasi 2021 (Ton) 2021 Realization (Ton)	Realisasi 2020 (Ton) 2020 Realization (Ton)	Target 2021 (Ton) 2021 Target (Ton)	Kenaikan (Penurunan) 2020-2021 (%) Increase (Decrease) 2020-2021 (%)	Pencapaian Target 2021 (%) 2021 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Pupuk Fertilizer					
• Pupuk PSO • PSO Fertilizer					
- Urea - Urea	3.620.209	3.921.178	4.166.669	(7,68)	86,88
- NPK - NPK	2.702.892	2.592.052	2.679.000	4,28	100,89
- Lainnya* - Others *	1.595.945	1.916.884	2.195.806	(16,74)	72,68
Subtotal Penjualan Pupuk PSO Subtotal Sales of PSO Fertilizer	7.919.045	8.430.114	9.041.475	(6,06)	87,59
• Pupuk Non PSO • Non PSO Fertilizer					
- Urea - Urea	4.259.894	4.292.128	3.455.534	(0,75)	123,28
- NPK - NPK	576.516	567.259	479.867	1,63	120,14



Volume Penjualan Pupuk dan Amoniak (Ton) Sales Volume of Fertilizer and Ammonia (Ton)	Realisasi 2021 (Ton) 2021 Realization (Ton)	Realisasi 2020 (Ton) 2020 Realization (Ton)	Target 2021 (Ton) 2021 Target (Ton)	Kenaikan (Penurunan) 2020-2021 (%) Increase (Decrease) 2020-2021 (%)	Pencapaian Target 2021 (%) 2021 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
- Lainnya** - Others **	156.715	84.501	57.600	85,46	272,07
Subtotal Penjualan Pupuk Non PSO Subtotal Sales of Non-PSO Fertilizer	4.993.125	4.943.888	3.993.001	1,00	125,05
Subtotal Penjualan Pupuk Subtotal Sales of Fertilizer	12.912.170	13.374.002	13.034.476	(3,45)	99,06
Non Pupuk Non Fertilizer					
• Amoniak • Ammonia					
- Amoniak - Ammonia	988.317	793.373	778.600	24,57	126,94
Subtotal Penjualan Amoniak Subtotal Sales of Ammonia	988.317	793.373	778.600	24,57	126,94
• Non Amoniak • Non Ammonia					
- Asam Sulfat - Sulfuric Acid	196.087	131.580	145.000	49,02	135,23
- Asam Fosfat - Phosphoric Acid	9.609	28.113	40.000	(65,82)	24,02
- Lainnya*** - Other Products ***	65.996	31.741	80.250	107,92	82,24
Subtotal Penjualan Non Amoniak Subtotal Sales of Non-Ammonia	271.693	191.435	265.250	41,92	102,43
Subtotal Penjualan Non Pupuk Subtotal Sales of Non-Fertilizer	1.260.010	984.808	1.043.850	27,94	120,71
Total Volume Penjualan Total Sales Volume	14.172.180	14.358.809	14.078.326	(1,30)	100,67

*) Terdiri dari SP-36, ZA, dan Organik.

**) Terdiri dari SP-36, ZA, KCl dan lainnya.

***) Aluminium Fluorida, Asam Clorida, CO₂ Cair dan lainnya.

*) Includes SP-36, ZA, and Organic.

**) Includes SP-36, ZA, KCl, Organic and others.

***) Aluminum Fluoride, Hydrochloric Acid, Liquid CO₂ and others.

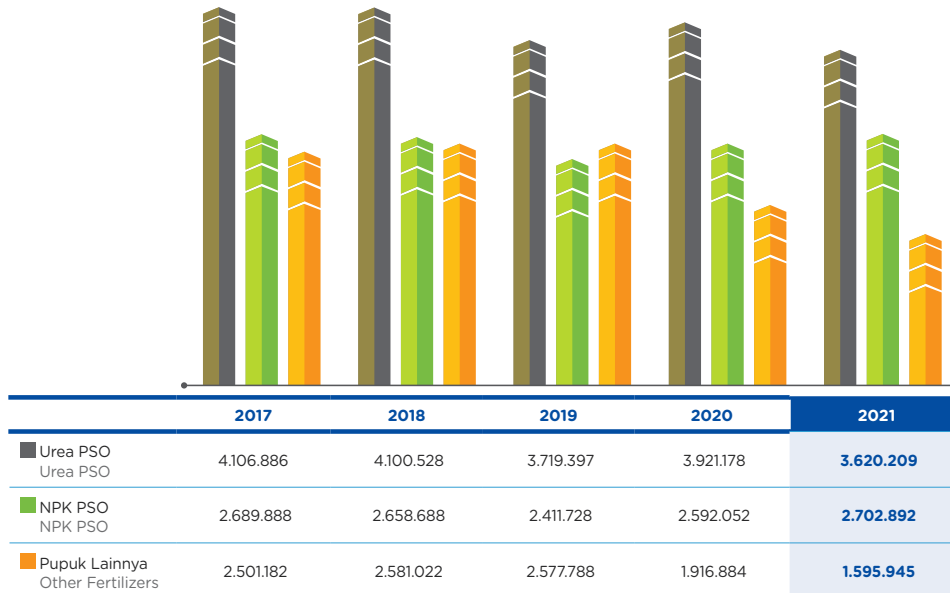
Pupuk Bersubsidi/Pupuk PSO

Untuk sektor PSO, pupuk yang disalurkan oleh PI Grup meliputi urea, ZA, SP-36, NPK serta organik. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah menyalurkan pupuk urea PSO sebanyak 3,62 Juta ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 3,92 juta ton. Penyaluran pupuk PSO lainnya tahun 2021 sebesar 1,60 juta ton, turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1,92 juta ton. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penyesuaian alokasi pupuk bersubsidi serta perubahan mekanisme administrasi penebusan pupuk di kios. Namun demikian, realisasi penyaluran pupuk NPK PSO tahun 2021 mencapai 2,70 juta ton, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang 2,59 juta ton.

Subsidized Fertilizer/PSO Fertilizer

For the PSO sector, the fertilizers distributed by the PI Group include urea, ZA, SP-36, NPK and organic. Throughout 2021, the Company distributed 3.62 million Tons of PSO urea fertilizer, lower than the 3.92 million Tons in 2020. The distribution of other PSO fertilizers in 2021 was 1.60 million tons, a decrease compared to 1.92 million Tons in 2020. This decrease was mainly due to adjustments in the allocation of subsidized fertilizers as well as changes in the administration mechanism for redemption of fertilizers at kiosks. However, the distribution of NPK PSO fertilizer in 2021 reached 2.70 million tons, an increase of 2.59 million Tons compared to 2020.

Kinerja Penjualan Pupuk PSO (Ton) PSO Fertilizer Sales Performance (Tons)



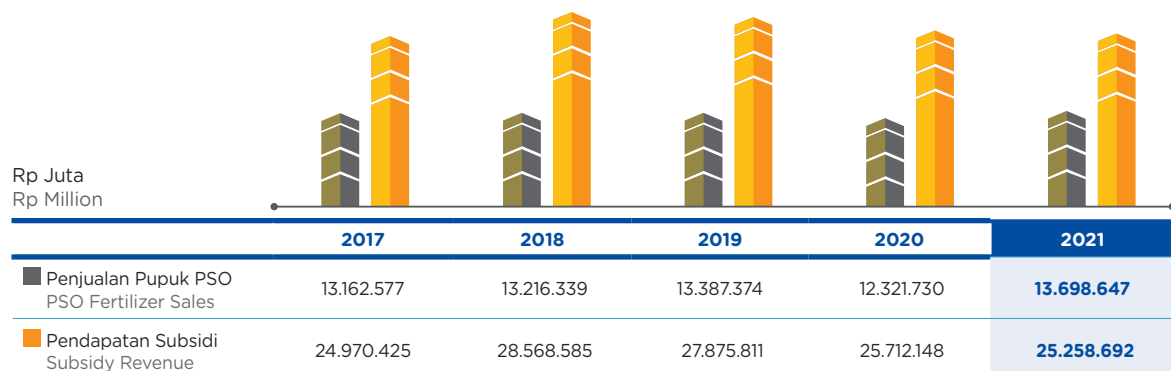
Dari sisi nilai, total penjualan pupuk PSO tahun 2021 mencapai Rp13,70 Triliun meningkat 11,17% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp12,32 Triliun.

In terms of value, the total sales of PSO fertilizer in 2021 reached Rp. 13.70 Trillion, an increase of 11.17% compared to Rp12.32 Trillion in 2020.

Penggantian biaya subsidi dari pemerintah tahun 2021 mencapai Rp25,26 Triliun atau menurun 1,76% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp25,71 Triliun, hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan penyaluran pupuk subsidi dari 8,43 juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,92 juta Ton di tahun 2021.

Reimbursement of subsidies from the Government in 2021 reached Rp25.26 Trillion, a decrease of 1.76% compared to Rp25.71 Trillion in 2020, mainly due to a decrease in the distribution of subsidized fertilizers from 8.43 million Tons in 2020 to 7.92 million tonnes in 2021.

Nilai Penjualan Pupuk PSO (Rp Juta) PSO Fertilizer Sales (Rp million)





Pupuk Non Subsidi/Non-PSO

Pada sektor Non-PSO, tonase penjualan pupuk di tahun 2021 mengalami kenaikan 1,00% dibandingkan tonase penjualan pupuk di tahun 2020, yaitu dari 4,94 juta Ton menjadi 4,99 juta ton. Kenaikan ini terutama karena peningkatan penjualan pupuk NPK komersil dalam negeri dibandingkan tahun sebelumnya.

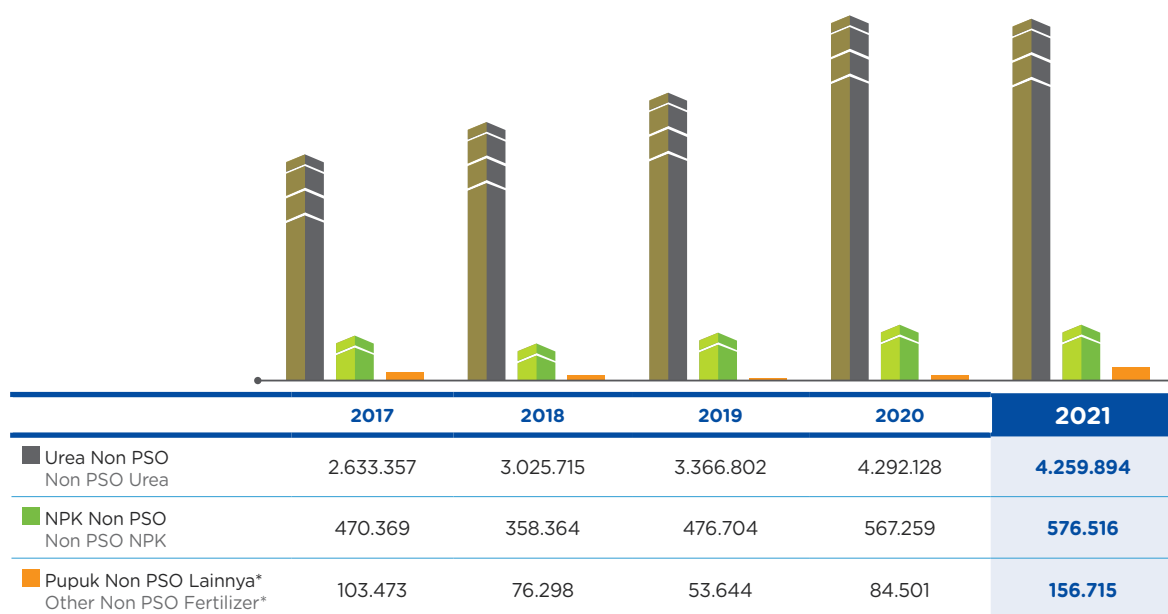
Tonase penjualan pupuk urea tahun 2021 sebesar 4,26 juta ton, mengalami penurunan 0,75% dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,29 juta ton. Sementara tonase penjualan pupuk NPK mengalami kenaikan sebesar 1,63%, yaitu dari 567 ribu Ton di tahun 2020 menjadi 577 ribu Ton di tahun 2021. Begitu juga dengan tonase penjualan pupuk lainnya mengalami kenaikan 85,46%, dari 84,5 ribu Ton di tahun 2020 menjadi 157 ribu Ton di tahun 2021 terutama karena naiknya penyaluran pupuk ZA dan SP-36 dibandingkan tahun 2020.

Non-Subsidized/Non-PSO Fertilizer

In the Non-PSO sector, the fertilizer sales tonnage in 2021 increased by 1.00% compared to the fertilizer sales tonnage in 2020, from 4.94 million Tons to 4.99 million tons. This increase was mainly due to an increase in domestic sales of commercial NPK fertilizer compared to the previous year.

The urea fertilizer sales tonnage in 2021 was 4.26 million tons, a decrease of 0.75% compared to 4.29 million Tons in 2020. The NPK fertilizer sales tonnage increased by 1.63%, from 567 thousand Tons in 2020 to 577 thousand Tons in 2021. Likewise, the sales tonnage for other fertilizers increased by 85.46%, from 84.5 thousand Tons in in 2020 to 157,000 Tons in 2021, mainly due to the increase in the ZA and SP-36 fertilizer distribution compared to 2020.

Kinerja Penjualan Pupuk Non-PSO (Ton)
Non-PSO Fertilizer Sales Performance (Tons)



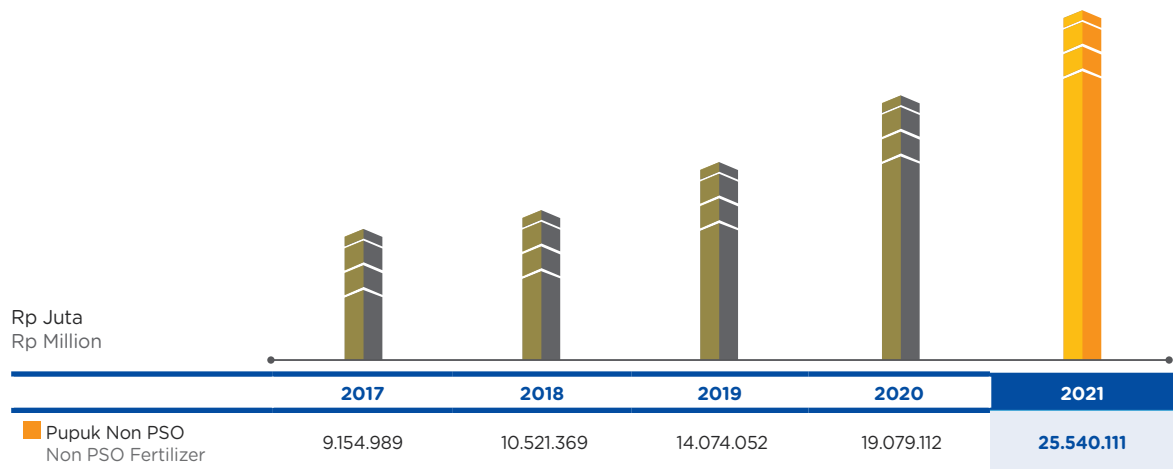
* Terdiri dari SP-36, ZA, KCL, Organik dan lainnya

* Includes SP-36, ZA, KCL, Organic and others

Peningkatan tonase penjualan berdampak pada penambahan nilai penjualan pupuk Non-PSO secara keseluruhan yang mengalami kenaikan 33,86%, yaitu dari Rp19,08 Triliun di tahun 2020 menjadi Rp25,54 Triliun di tahun 2021. Peningkatan nilai penjualan pupuk Non-PSO terutama disebabkan karena tingginya harga jual yang dimanfaatkan dengan optimalnya penjualan pupuk Non-PSO.

The increase in sales tonnage resulted in an increase in the overall sales of Non-PSO fertilizers that increased by 33.86%, from Rp19.08 Trillion in 2020 to Rp25.54 Trillion in 2021. The increase in sales of Non-PSO fertilizers was mainly due to the high selling price and optimal sales of Non-PSO fertilizers.

Nilai Penjualan Pupuk Non-PSO (Rp Juta) Non-PSO Fertilizer Sales (Rp-Million)



Amoniak dan Non-Amoniak

Realisasi volume penjualan amoniak pada tahun 2021 mencapai 988 ribu ton, naik 24,57% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 793 ribu ton. Kenaikan ini terutama disebabkan realisasi harga jual yang lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya.

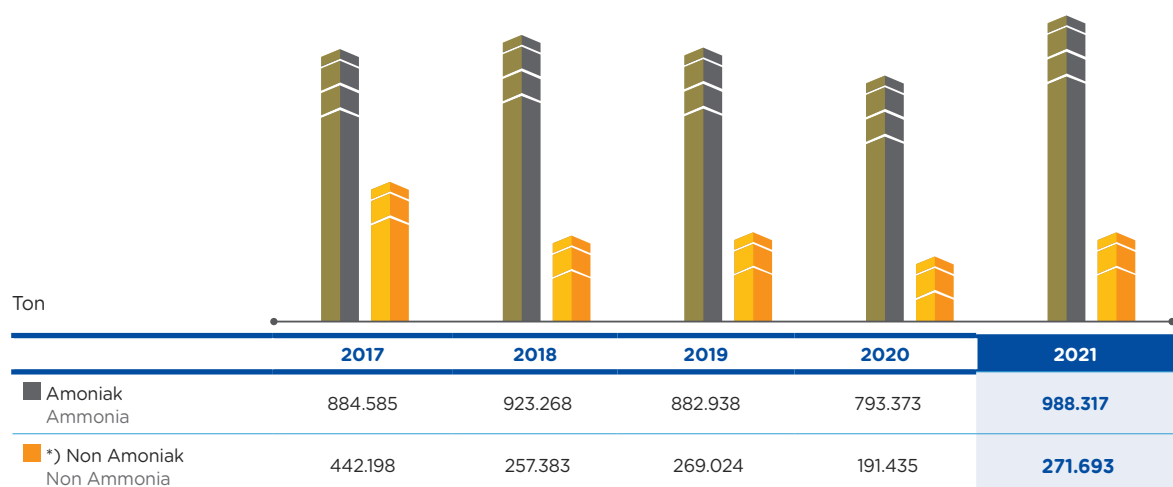
Dalam kondisi tersebut, Perusahaan lebih mengoptimalkan amoniak untuk dijual di sektor Non-PSO yang memberikan margin lebih baik. Sedangkan tonase penjualan non-amoniak mengalami kenaikan 41,92% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 191 ribu Ton di tahun 2020 menjadi 272 ribu Ton di tahun 2021.

Ammonia and Non-Ammonia

The ammonia sales in 2021 reached 988 thousand tons, an increase of 24.57% compared to the previous year's 793 thousand tons. This was mainly due to the realization of a better selling price compared to the previous year.

Under these conditions, the Company optimized ammonia as a raw material for urea fertilizer to be sold in the Non-PSO sector that provided a better margins. Meanwhile, non-ammonia sales tonnage increased by 41.92% compared to the previous year, from 191 thousand Tons in 2020 to 272 thousand Tons in 2021.

Kinerja Penjualan Amoniak dan Non-Amoniak (Ton) Ammonia and Non-Ammonia Sales (Tons)



* Terdiri dari Asam Sulfat, Asam Fosfat, Aluminium Fluorida dan lainnya

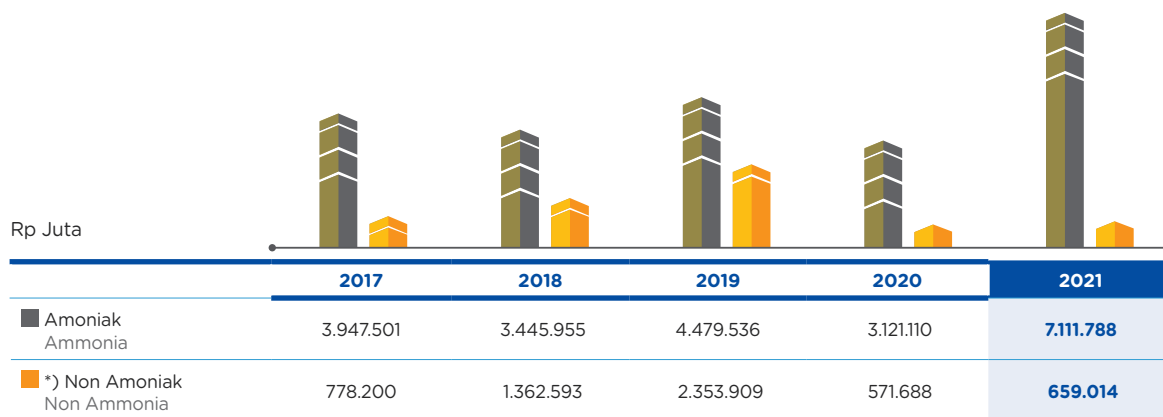
* Includes Sulfuric Acid, Phosphoric Acid, Aluminum Fluoride and others



Dari sisi nilai, perolehan Perusahaan dari hasil penjualan amoniak tahun 2021 mencapai Rp7,11 Triliun, meningkat 27,86% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,12 Triliun. Kenaikan pendapatan tersebut sejalan dengan meningkatnya realisasi volume penjualan dibanding kan tahun sebelumnya serta tingginya harga jual amoniak di pasar global. Sedangkan nilai penjualan non amoniak mencapai Rp659,01 Miliar, meningkat 15,28% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp571,69 Miliar.

In terms of value, the Company's revenue from the sale of ammonia in 2021 reached Rp7.11 Trillion, an increase of 27.86% compared to the previous year's Rp3.12 Trillion. This revenue increase was in line with the increase in sales volume compared to the previous year, and the high selling price of ammonia in the global market. Meanwhile, non-ammonia sales reached Rp659.01 Billion, an increase of 15.28% compared to Rp571.69 Billion in 2020.

Nilai Penjualan Amoniak dan Non-Amoniak (Rp Juta)
Ammonia and Non-Ammonia Sales (Rp million)



* Terdiri dari Asam Sulfat, Asam Fosfat, Aluminium Flourida dan lainnya

* Includes Sulfuric Acid, Phosphoric Acid, Aluminum Fluoride and others

Profitabilitas Segmen Pupuk dan Amoniak

Pada tahun 2021, total laba tahun berjalan untuk Segmen Pupuk dan Amoniak yang berhasil dibukukan oleh Perusahaan sebesar Rp9,66 Triliun, mengalami kenaikan signifikan hingga 162,23% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp3,68 Triliun. Hal ini terutama disebabkan karena tingginya harga jual pupuk dan amoniak di pasar global.

Laporan kinerja profitabilitas untuk segmen Pupuk dan Amoniak belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian kinerja profitabilitas disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Fertilizer and Ammonia Segment Profitability

In 2021, the Company's total profit for the year from the Fertilizer and Ammonia Segment was Rp9.66 Trillion, a significant increase of 162.23% compared to Rp3.68 Trillion in 2020. This was mainly due to the high selling prices of fertilizers and ammonia in the global market.

The Fertilizer and Ammonia segment profitability performance report has not taken into account the inter-segment elimination. The details of the profitability performance are presented in the table below.



Kinerja Profitabilitas Segmen Pupuk dan Amoniak

Fertilizer and Ammonia Segment Profitability Performance

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Finance and Profitability Nominal Performance	2021 (Rp Juta) 2021 (Rp million)	2020 (Rp Juta) 2020 (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue				
Pendapatan eksternal External Revenues	75.815.808	63.927.098	11.888.710	18,60

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Finance and Profitability Nominal Performance	2021 (Rp Juta) 2021 (Rp million)	2020 (Rp Juta) 2020 (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan antar segmen Inter Segment	1.278.643	716.917	561.726	78,35
Pendapatan bersih Net Revenues	77.094.451	64.644.015	12.450.436	19,26
Laba/(Rugi) Usaha Operating Profit/(Loss)				
Beban pokok pendapatan Results of Segments	(58.241.456)	(52.876.197)	(5.365.259)	10,15
Beban penjualan Sales Expense	(2.046.532)	(2.002.020)	(44.512)	2,22
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(2.486.927)	(2.658.847)	171.920	(6,47)
(Beban)/pendapatan lainnya - bersih Share of Net Profits of Associates and Joint Ventures	97.079	(47.681)	144.760	(303,60)
Pendapatan keuangan Financial Income	117.650	128.974	(11.324)	(8,78)
Beban keuangan Financial Expense	(1.733.295)	(2.638.043)	904.748	(34,30)
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share of Net Profits of Associates and Joint Ventures	83.447	91.375	(7.928)	(8,68)
Laba/(Rugi) sebelum pajak Profit/(Loss) Before Tax	12.884.417	4.641.576	8.242.841	177,59
Beban pajak Penghasilan Tax Expense	(3.222.486)	(956.987)	(2.265.499)	236,73
Laba/(Rugi) tahun berjalan Profit/(Loss) for the Current Year	9.661.931	3.684.589	5.977.342	162,23
Laporan Posisi Keuangan consolidated financial position				
Aset segmen Segment Assets	115.537.608	109.243.891	6.293.717	5,76
Liabilitas segmen Segment Liabilitie	45.413.830	44.600.925	812.905	1,82
Pengeluaran modal Capital expenditures	3.206.631	3.347.880	(141.249)	(4,22)

Rencana Pengembangan Tahun 2022

PI Grup telah menyiapkan rencana pengembangan untuk Segmen Pupuk dan Amoniak di tahun 2022. Rencana strategis tersebut akan fokus pada kelanjutan program kerja tahun 2021 dan beberapa program baru, yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan penjualan pupuk non-subsidi akan dilaksanakan program *Customer Centric Model*, yaitu dengan mendesain dan melaksanakan *pilot project system* distributor-retail termasuk sistem insentif, sistem pemasaran, manajemen kinerja kios/ distributor;
2. Melakukan konversi pemakaian pupuk subsidi ke non subsidi melalui pembentukan klaster-klaster baru *agrosolution* dan pendampingan teknis;

2022 Development Plan

PI Group has prepared a development plan for the Fertilizer and Ammonia Segment for 2022. The strategic plan will focus on the continuation of the 2021 work program and several new programs, namely:

1. To increase sales of non-subsidized fertilizers, a Customer Centric Model program will be implemented, by designing and implementing a distributor-retail system pilot project including incentive systems, marketing systems, kiosk/distributor performance management;
2. Conversion of subsidized fertilizer use to non-subsidized fertilizers through the formation of new agrosolution clusters and technical assistance;



3. Dalam rangka penguatan *corporate branding* dan *product image*, akan dilakukan penyeragaman produk urea dan NPK komersil PI Group melalui program *Unified Branding* dan *Single Pricing*;
4. Melanjutkan program reposisi gudang dan program DPCS (*Distribution Planning & Control System*) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alur pasokan distribusi;
5. Melanjutkan program *Supply Chain Control Tower*, yaitu implementasi *Control Tower* melalui *end-to end supply chain dashboard* untuk meningkatkan visibilitas kinerja rantai pasok mulai dari *inbound logistics* hingga *outbound logistics*;

SEGMENT JASA KONSTRUKSI

Segmen Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri (“Rekind”), entitas anak yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement dan Construction (EPC)*. Dengan pengalaman lebih dari 38 tahun di bidang EPC, Rekind telah membangun pabrik-pabrik skala besar di Indonesia, yaitu di sektor minyak dan gas bumi (migas), kimia/petrokimia, mineral, infrastruktur dan pembangkit listrik.

Secara umum, bisnis konstruksi Rekind berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun (*multi years*). Dengan demikian, kontrak kerja yang diperoleh baru tercatat sebagai pendapatan pada tahun-tahun berikutnya.

Fokus dan Strategi Tahun 2021

Fokus dan strategi utama segmen jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Penyehatan kondisi keuangan segmen jasa konstruksi dengan melakukan restrukturisasi pinjaman kepada kreditur.
2. Merumuskan restrukturisasi bisnis untuk jangka panjang.

Kinerja 2021

Kinerja segmen Jasa Konstruksi tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Hal ini terlihat dari penurunan nilai pendapatan sebesar 59,28% sebagai dampak dari timbulnya *Liquidated Damage (LD)* akibat keterlambatan penyelesaian proyek dan kontrak yang merugikan dengan total nilai sebesar Rp1,32 Triliun.

Adapun penurunan nilai perolehan kontrak baru tahun 2021 terutama disebabkan lebih rendahnya perolehan kontrak baru pada segmen *refinery, oil dan gas* atau menurun 88,47% dibandingkan tahun 2020.

3. To strengthen corporate branding and product image, the PI Group commercial urea and NPK products will be carried out through the *Unified Branding and Single Pricing* program;
4. 4. Continuing the warehouse repositioning program and the DPCS (*Distribution Planning & Control System*) program to improve the distribution supply lines effectiveness and efficiency;
5. Continuing the *Supply Chain Control Tower* program, including the implementation of *Control Tower* through *end-to-end supply chain dashboards* to increase supply chain performance visibility from *inbound logistics* to *outbound logistics*;

CONSTRUCTION SERVICES SEGMENT

The Construction Services segment is carried out by PT Rekayasa Industri (“Rekind”), a subsidiary engaged in *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*. With more than 38 years experience in the EPC field, Rekind has built large-scale factories in Indonesia, in the oil and gas, chemical/petrochemical, mineral, infrastructure and power generation sectors.

In general, Rekind’s construction business involves terms of more than 1 (one) year (*multi-year*). Thus, the work contracts are only recorded as income in the following years.

Focus and Strategy for 2021

The main focus and strategy of the construction services segment are as follows:

1. Restructuring the financial condition of the construction services segment by restructuring loans to creditors.
2. Formulating the long-term business restructuring.

2021 Performance

The Construction Services segment performance in 2021 decreased compared to 2020. This can be seen in the decline in revenue of 59.28% as a result of the emergence of *Liquidated Damage (LD)* due to delays in project completion and detrimental contracts with a total value of Rp1.32 Trillion.

The decline in the acquisition value of new contracts in 2021 was mainly due to fewer new contracts in the refinery, oil and gas segments, which saw a decrease of 88.47% compared to 2020.

Perolehan Kontrak Baru New Contracts Obtained	Realisasi 2021 (Rp Juta) 2021 Realization (Rp million)	Realisasi 2020 (Rp Juta) 2020 Realization (Rp million)	Target 2021 (Rp Juta) 2021 Target (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2020 Increase (Decrease) 2020 (%)	Pencapaian Target 2021 2021 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Refinery, Oil & Gas	586.059	5.084.804	1.350.000	-88,47%	43,41%
Power, Mineral, Fertilizer & Overseas	242.194	391.430	6.126.000	-38,13%	3,95%
Entitas lain di bawah Rekind Other Entities under Rekind	893.752	797.006	1.152.015	12,14%	77,58%
Jumlah Perolehan Kontrak Baru Total New Contracts Acquired	1.722.005	6.273.240	8.628.015	-72,55%	19,96%

Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi

Segmen Jasa Konstruksi pada tahun 2021 mencatatkan pencapaian yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Penurunan kinerja keuangan tersebut utamanya disebabkan karena pengadaan material proyek dan proses konstruksi yang mengalami keterlambatan sehingga menimbulkan LD ataupun denda.

Sepanjang tahun 2021, Segmen Jasa Konstruksi membukukan pendapatan Rp3,3 Triliun, turun 59,28% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp8,13 Triliun serta kerugian sebesar Rp3,71 Triliun yang mengalami peningkatan kerugian sebesar 140,98% dibandingkan tahun 2020 sebesar minus Rp1,56 Triliun.

Laporan kinerja profitabilitas untuk segmen Jasa Konstruksi belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Construction Services Segment Profitability

The Construction Services segment in 2021 recorded lower achievements compared to 2020. The decline in financial performance was mainly due to the procurement of project materials, and construction processes being delayed, resulting in LDs or fines.

For 2021, the Construction Services Segment revenues were Rp3.3 Trillion, a decrease of 59.28% compared to Rp8.13 Trillion in 2020, resulting in a loss of Rp3.71 Trillion, an increase of 140.98% compared to the loss in 2020 of Rp1.56 Trillion.

The Construction Services segment profitability performance report has not taken into account the inter-segment elimination. Details of the Construction Services Segment profitability are presented in the table below.



Kinerja Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi

Construction Services Segment Profitability Performance

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Financial Performance and Profitability	2021 (Rp Juta) 2021 (Rp million)	2020 (Rp Juta) 2020 (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue				
Pendapatan eksternal External Revenues	3.296.040	8.052.663	(4.756.623)	(59,07)
Pendapatan antar segmen Inter Segment	14.699	78.721	(64.022)	(81,33)
Pendapatan bersih Net Revenues	3.310.739	8.131.384	(4.820.645)	(59,28)
Laba/(Rugi) Usaha Operating Profit/(Loss)				
Beban pokok pendapatan Results of Segments	(6.659.990)	(8.980.610)	2.320.620	(25,84)
Beban penjualan Sales Expense	(3.165)	(742)	(2.423)	326,55



Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Financial Performance and Profitability	2021 (Rp Juta) 2021 (Rp million)	2020 (Rp Juta) 2020 (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(455.803)	(635.671)	179.868	(28,30)
(Beban)/pendapatan lainnya - bersih Share of Net Profits of Associates and Joint Ventures	54.050	(71.046)	125.096	(176,08)
Pendapatan keuangan Financial Income	3.376	24.095	(20.719)	(85,99)
Beban keuangan Financial Expense	(174.040)	(233.334)	59.294	(25,41)
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share of Net Profits of Associates and Joint Ventures	225.078	230.657	(5.579)	(2,42)
Laba/(Rugi) sebelum pajak Profit/(Loss) Before Tax	(3.699.755)	(1.535.267)	(2.164.488)	140,98
Beban pajak Penghasilan Tax Expense	(12.373)	(21.646)	9.273	(42,84)
Laba/(Rugi) tahun berjalan Profit/(Loss) for the Current Year	(3.712.128)	(1.556.913)	(2.155.215)	138,43
Laporan Posisi Keuangan consolidated financial position				
Aset segmen Segment Assets	7.785.388	9.940.425	(2.155.037)	(21,68)
Liabilitas segmen Segment Liabilities	13.415.576	11.878.541	1.537.035	12,94
Pengeluaran modal Capital expenditures	13.609	14.267	(658)	(4,61)

Rencana Pengembangan Tahun 2022

PI Grup telah menyiapkan rencana pengembangan tahun 2022 untuk Segmen Jasa Konstruksi yang dijalankan oleh Rekind, yaitu :

1. Restrukturisasi pinjaman kepada kreditur untuk menjaga likuiditas serta solvabilitas keuangan.
2. Restrukturisasi proses bisnis dengan melakukan efisiensi beban usaha, *Right Sizing People and Organization*, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Segmen Lain-Lain

Segmen Lain-lain terdiri dari bidang perdagangan umum yang dijalankan melalui PT Mega Eltra ("ME") dan PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP"); jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILog"); serta jasa non EPC melalui ME dan jasa bidang utilitas oleh PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU").

Strategi 2021

Fokus dan strategi utama segmen lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mega Eltra: Menjadi *arranger* untuk suplai bahan baku pupuk NPK bagi produsen pupuk dalam PI Group;
2. Pupuk Indonesia Logistik: Bekerjasama dengan perusahaan logistik angkutan darat untuk menjalankan *Port to Doors Service* kepada pelanggan untuk memperluas cakupan bisnis perusahaan;

2022 Development Plan

PI Group has prepared a 2022 development plan for the Construction Services Segment run by Rekind, which includes:

1. Restructuring loans to creditors to maintain liquidity and financial solvency.
2. Restructuring business processes by implementing efficiencies in operating expenses, *Right Sizing People and Organization*, and increasing labor productivity

Other Segments

The Others segment consists of general trading run through PT Mega Eltra ("ME") and PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP"); shipping and sea transportation services by PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILog"); as well as non-EPC services through ME and energy sector services by PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU").

Strategy 2021

The other segments main focus and strategies were as follows:

1. Mega Eltra: Becoming an *arranger* for the supply of raw material for NPK fertilizer for fertilizer producers in the PI Group;
2. Pupuk Indonesia Logistik: Cooperating with land transportation logistics companies to run *Port to Doors Service* for customers to expand the Company's business scope;

3. Pupuk Indonesia Utilitas: *Rebranding* menjadi Pupuk Indonesia Utilitas untuk fokus pada bisnis pengelolaan utilitas pelanggan;
4. Pupuk Indonesia Pangan: *Rebranding* dengan fokus kepada bisnis *agrosolution*, memperluas jangkauan produk dengan melakukan kerjasama penjualan produk di *marketplace* pertanian.

Kinerja 2021

Jasa pelayaran dan jasa angkutan laut dijalankan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILog) yang merupakan entitas anak PI Grup yang berdiri sejak tahun 2014. PILog memiliki 9 (sembilan) armada kapal laut dengan total kapasitas angkut sebanyak 79,90 ribu MT per tahun yang digunakan untuk mengangkut produk-produk utama PI Grup, seperti pupuk, amoniak dan produk lainnya seperti LPG. Selain memiliki armada sendiri, PILog menyewa kapal laut kepada pihak ketiga.

Sepanjang tahun 2021, realisasi tonase angkutan pupuk sebanyak 734 ribu ton, turun 21,54% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 935 ribu ton. Penurunan ini terutama adanya kendala pengangkutan kapal sehingga realisasi angkutan pupuk belum optimal.

Namun demikian, angkutan amoniak pada tahun 2021 berhasil mencatatkan kenaikan 91,98% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 117 ribu Ton menjadi 225 ribu ton. Begitu juga dengan angkutan lainnya, meningkat 7,16% dari 255 ribu Ton di tahun 2020 menjadi 274 ribu Ton di tahun 2021.

3. Pupuk Indonesia Energi: Rebranding Pupuk Indonesia Utilitas to focus on the customer utility management business;
4. Pupuk Indonesia Pangan: Rebranding with a focus on the agrosolution business, expanding product range by cooperating with product sales in the agricultural marketplace.

2021 Performance

Shipping and sea transportation services are run by PT Pupuk Indonesia Logistik (PILog), a subsidiary of PI Group established in 2014. PILog owns 9 (nine) ships with a total carrying capacity of 79.90 thousand MT per year to transport PI Group's main products, such as fertilizers, ammonia and other products such as LPG. In addition to having its own fleet, PILog leases ships to third parties.

In 2021, the realized tonnage of fertilizer transportation was 734 thousand tons, down by 21.54% compared to 935 thousand Tons in 2020. This decrease was mainly due to problems in ship transportation so that the realization of fertilizer transportation was not optimal.

However, ammonia transportation in 2021 increased by 91.98% compared to 2020, from 117 thousand Tons to 225 thousand tons. Likewise, other transportation increased by 7.16% from 255 thousand Tons in 2020 to 274 thousand Tons in 2021.

Kinerja Tonase Angkutan Laut (Ton)
Sea Freight Tonnage Performance (Tons)



* Terdiri dari angkutan DAP/KCL, Clay serta PTDS

* Includes transportation of DAP/KCL, Clay and PTDS



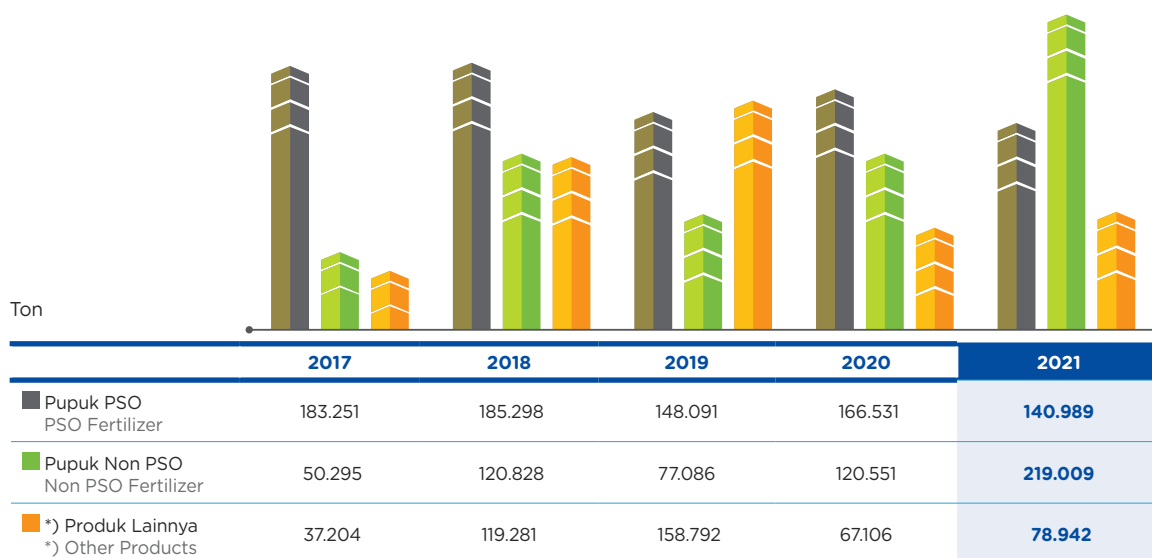
Realisasi tonase perdagangan pupuk PSO yang dilakukan oleh Perusahaan melalui PT Mega Eltra (ME) dan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) pada tahun 2021 sebanyak 144 ribu ton, turun 13,41% dibandingkan tahun 2020 yang 167 ribu ton. Penurunan ini terutama disebabkan karena alokasi penyaluran pupuk subsidi lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Namun demikian, tonase perdagangan pupuk non-PSO meningkat 81,71% dari 121 ribu Ton pada tahun 2020 menjadi 219 ribu Ton pada tahun 2021.

PSO fertilizer trading tonnage carried out by the Company through PT Mega Eltra (ME) and PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) in 2021 was 144 thousand tons, a decrease of 13.41% compared to 167 thousand Tons in 2020. This decrease was mainly due to the lower allocation of subsidized fertilizer distribution compared to the previous year.

However, non-PSO fertilizer trade tonnage increased 81.71% from 121 thousand Tons in 2020 to 219 thousand Tons in 2021.

Kinerja Volume Perdagangan (Ton) Trading Volume Performance (Tons)



*Terdiri dari angkutan Herbisida, pewarna pupuk, semen, batubara, dan lain-lain

* Includes transportation of Herbicides, fertilizer dyes, cement, coal, and others

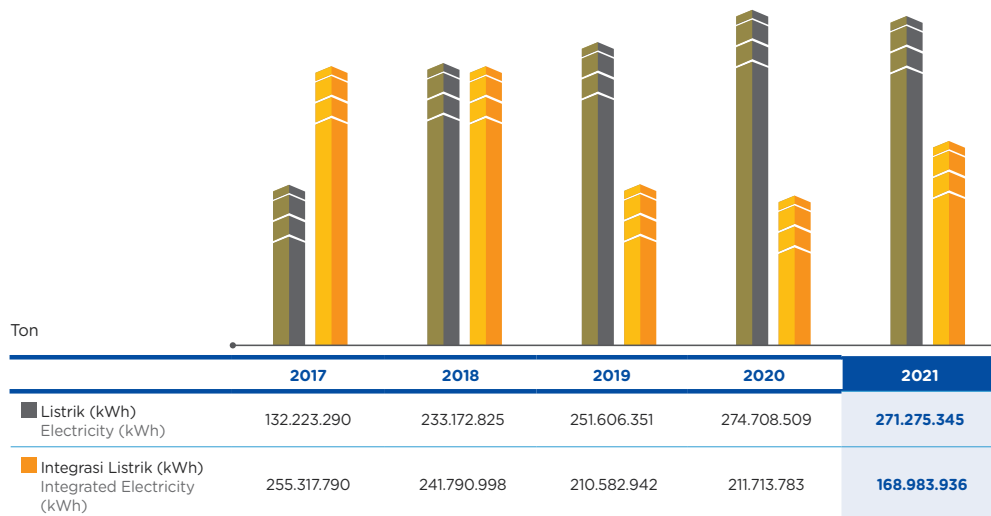
Di bidang jasa utilitas melalui Pupuk Indonesia Utilitas (PIU), secara umum pada tahun 2021 kuantum penjualan lebih rendah dari tahun 2020. Kuantum penjualan listrik tahun 2021 mencapai 271,28 juta kWh, turun 1,25% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 274,71 juta kWh. Demikian juga dengan kuantum penjualan integrasi listrik tahun 2021 mencapai 168,98 juta kWh, mengalami penurunan 20,18% dibandingkan tahun 2020 sebesar 211,71 juta kWh.

Penurunan ini terutama disebabkan permintaan pasokan *user* yang cenderung rendah.

In the field of utility services through Pupuk Indonesia Utilitas (PIU), in general, the sales quantum in 2021 was lower than in 2020. Electricity sales in 2021 were 271.28 million kWh, down by 1.25% compared to 274.71 million kWh in 2020. The integrated electricity sales quantum in 2021 reached 168.98 million kWh, a decrease of 20.18% compared to 211.71 million kWh in 2020.

This decrease was mainly due to lower demand for user supply.

Kuantum Penjualan Listrik (kWh) Electricity Sales Quantum (kWh)



Untuk penjualan non-listrik berupa *steam* mencapai 1,32 juta ton, meningkat 1,07% dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,30 juta ton. Kenaikan ini terutama disebabkan permintaan suplai produk dari user yang cenderung rendah.

Non-electric sales in the form of steam reached 1.32 million tons, an increase of 1.07% compared to 1.30 million Tons in 2020. This increase was mainly due to the lower demand for product supply from users.

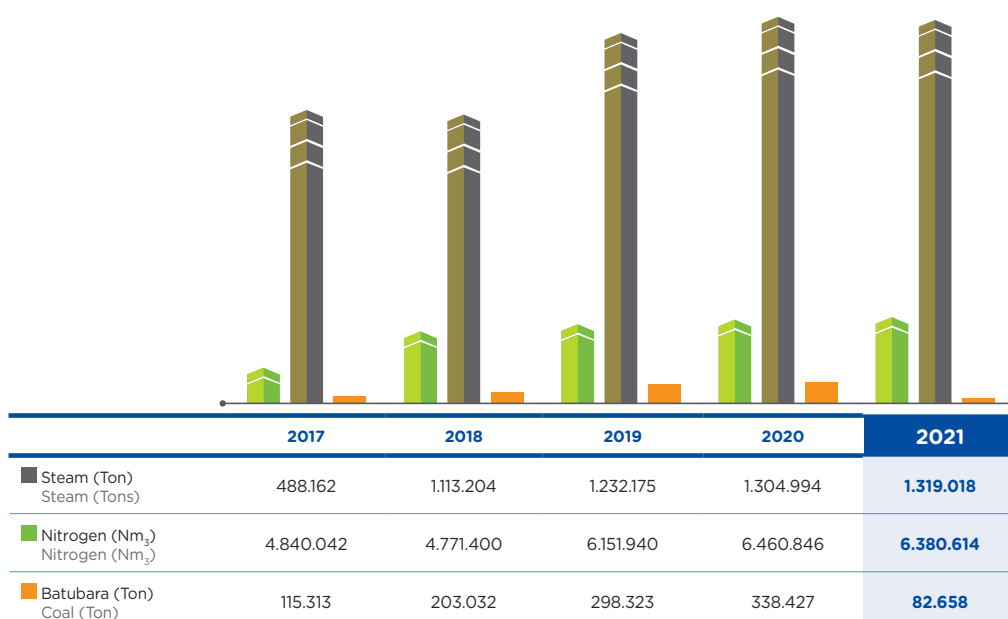
Sedangkan nitrogen mencapai 6,38 juta Nm³, turun 1,24% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 6,46 juta Nm³. Penurunan ini terutama disebabkan permintaan suplai produk dari user yang cenderung rendah.

Nitrogen reached 6.38 million Nm³, down 1.24% compared to 6.46 million Nm³ in 2020. This decrease was mainly due to the lower demand for product supply from users.

Sementara penjualan batu bara mencapai 82,66 ribu ton, turun 75,58% dibandingkan tahun 2020 sebesar 338,43 ribu ton. Penurunan ini terutama disebabkan permintaan suplai produk dari user yang cenderung rendah.

Meanwhile, coal sales reached 82.66 thousand tons, down 75.58% compared to 338.43 thousand Tons in 2020. This decrease was also mainly due to the lower demand for product supply from users.

Kuantum Penjualan Non Listrik Non-Electricity Sales Quantum



**Profitabilitas Segmen Lain-lain**

Segmen lainnya pada tahun 2021 mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp7,33 Triliun, mengalami kenaikan 82,25% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,02 Triliun.

Laporan kinerja profitabilitas untuk segmen usaha lain-lainnya belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian profitabilitas Segmen Lain-lain disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Other Segments Profitability

In 2021, other segments net revenues were Rp7.33 Trillion, an increase of 82.25% compared to Rp4.02 Trillion in 2020.

The other business segment profitability performance report does not take into account inter-segment eliminations. Details of the Others Segment profitability are presented in the table below.

**Kinerja Profitabilitas Segmen Lain-Lain**
Other Segments Profitability Performance

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Finance and Profitability Nominal Performance	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Revenue				
Pendapatan eksternal External Revenues	1.970.750	1.273.188	697.562	54,79
Pendapatan antar segmen Inter Segment	5.363.168	2.750.947	2.612.221	94,96
Pendapatan bersih Net Revenues	7.333.918	4.024.135	3.309.783	82,25
Laba/(Rugi) Usaha Operating Profit/(Loss)				
Beban pokok pendapatan Results of Segments	(2.687.499)	(2.102.432)	(585.067)	27,83
Beban penjualan Sales Expense	(10.860)	(30.030)	19.170	(63,84)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(1.155.169)	(880.197)	(274.972)	31,24
(Beban)/pendapatan lainnya - bersih Share of Net Profits of Associates and Joint Ventures	35.064	4.842	30.222	624,16
Pendapatan keuangan Financial Income	719.202	772.628	(53.426)	(6,91)
Beban keuangan Financial Expense	(698.190)	(662.078)	(36.112)	5,45
Laba/(Rugi) sebelum pajak Profit/(Loss) Before Tax	3.536.466	1.126.868	2.409.598	213,83
Beban pajak Penghasilan Tax Expense	(85.231)	(47.134)	(38.097)	80,83
Laba/(Rugi) tahun berjalan Profit/(Loss) for the Current Year	3.451.235	1.079.734	2.371.501	219,64
Laporan Posisi Keuangan Consolidated Financial Position				
Aset segmen Segment Assets	45.302.140	39.316.793	5.985.347	15,22
Liabilitas segmen Segment Liabilities	11.549.016	8.355.341	3.193.675	38,22
Pengeluaran modal Capital expenditures	327.571	110.598	216.973	196,18

Rencana Pengembangan Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan kinerja serta dukungan bisnis kepada PI Grup, pada tahun 2022 rencana pengembangan yang akan dilakukan untuk segmen lainnya, yaitu :

1. Meningkatkan penguasaan pasar komersil dalam negeri melalui *trading* pupuk.
2. Pengembangan bisnis dengan melakukan Kerjasama pengelolaan *end to end* logistik.
3. *Rebranding* perusahaan serta melakukan kajian skema kerjasama pengelolaan utilitas dengan pihak pihak yang memiliki kapabilitas di bisnis pengelolaan utilitas.
4. *Rebranding* perusahaan serta peningkatan pangsa pasar melalui kerjasama dengan perusahaan lain serta *marketplace online*.

2022 Development Plan

To improve performance and business support to the PI Group, in 2022 a development plan will be carried out for other segments, including:

1. Increasing the domination in the domestic commercial market through trading fertilizers.
2. Developing the business by conducting end-to-end logistics management cooperation.
3. Rebranding and reviewing the Company utility management cooperation schemes with parties owing capabilities in the utility management business.
4. Rebranding and rebranding the Company market share through collaboration with other companies and online marketplaces.



ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECTS

KEBIJAKAN PEMASARAN

Berikut kebijakan pemasaran yang telah dilakukan di tahun 2021:

1. Sentralisasi bidang pemasaran dimulai Januari 2021 yang meliputi fungsi penjualan PSO, penjualan komersil, logistik, dan strategi pemasaran.
2. Sentralisasi mendorong optimalisasi dan harmonisasi produk, pendapatan, dan laba baik untuk pupuk Indonesia maupun anak perusahaan.
3. Pembentukan *unit project management* untuk merespon isu strategis perusahaan yang bersifat spesifik (SPM).
4. Prioritas pemenuhan kebutuhan produk: (1) PSO sebagai pemenuhan penugasan dari Kementerian Pertanian, (2) retail untuk memenuhi kebutuhan petani yang tidak diakomodir di sektor PSO, (3) Korporasi/ Industri dalam negeri, (4) Ekspor.
5. Sinergi antar BUMN dan antar anak Perusahaan.

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran PTPI pada tahun 2021 difokuskan pada upaya mencapai target penjualan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran melalui strategi pemasaran yang sebagai berikut:

1. Pembentukan region penjualan PSO yang mengakomodir rayon penyaluran anak perusahaan.
2. *Agrosolution* sebagai program untuk meningkatkan produktivitas panen dan kesejahteraan petani melalui pendampingan intensif dari hulu sampai hilir, yang meliputi akses permodalan, asuransi pertanian, kawalan budidaya, pengembangan organisasi petani, dan *off taker* hasil panen.
3. *Retail Management* sebagai program penguatan dan pengembangan pasar retail untuk persiapan perubahan kebijakan PSO.
4. Implementasi *Supply Chain Control Tower* untuk mengoptimalkan alokasi produksi & penjualan masing-masing anak perusahaan.
5. Reposisi Gudang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan gudang anak perusahaan.
6. *Single Responsibility* fungsi logistik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses distribusi produk.
7. Sinergi perencanaan dan evaluasi penjualan untuk optimalisasi penjualan dan pendapatan anak perusahaan.

MARKETING POLICY

The following marketing policies were carried out in 2021:

1. Centralization of the marketing sector began in January 2021 and included the PSO sales, commercial sales, logistics, and marketing function strategies.
2. Centralization to encourage optimization and harmonization of products, revenues and profits for both Pupuk Indonesia and its subsidiaries.
3. Establishment of a project management unit to respond to specific Company strategic issues (SPM).
4. Prioritizing product needs fulfillment: (1) PSO as a fulfillment of the Ministry of Agriculture assignment, (2) retail to meet the needs of farmers who are not included in the PSO sector, (3) Corporate/domestic industry, (4) Export.
5. Synergizing between SOEs and between Subsidiaries.

MARKETING STRATEGY

PTPI's marketing strategy in 2021 focused on efforts to achieve sales targets and improve marketing effectiveness and efficiency through the following marketing strategies:

1. Establishment of PSO sales regions to accommodate subsidiary distribution areas.
2. *Agrosolution* as a program to increase harvest productivity and farmers' welfare through intensive assistance from upstream to downstream, including access to capital, agricultural insurance, cultivation control, farmer organization development, and harvest off takers.
3. *Retail Management* as a program to strengthen and develop the retail market to prepare for changes in the PSO policy.
4. Implementation of *Supply Chain Control Tower* to optimize production & sales allocation for each subsidiary.
5. Warehouse repositioning to increase the subsidiary warehouse management effectiveness and efficiency.
6. *Single Responsibility* logistics function to improve the product distribution process effectiveness and efficiency.
7. Synergy of sales planning and evaluation to optimize the subsidiaries sales and revenues.

8. Sinergi komunikasi pemasaran untuk penyeragaman pesan promosi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi pemasaran.
 9. *Single Pricing Urea & Amoniak Anak Perusahaan*
Untuk menyeragamkan harga jual produk urea dan amoniak seluruh anper agar menunjang strategi penjualan perusahaan.
 10. Penentuan *Layering* Harga per Sektor
Layering harga pupuk per sektor sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan harga dalam negeri akibat kenaikan harga internasional demi mendukung ketahanan pangan nasional.
 11. Implementasi *Single Branding*
Sebagai inisiatif strategi untuk memperkuat *brand awareness* produk dan meningkatkan *engagement* konsumen, PI Grup melakukan implementasi *Single Branding* untuk produk pupuk Urea dengan merek PIHC Nitrea dan pupuk NPK formula 16-16-16.
 12. Optimalisasi *Social Media*
Kondisi pembatasan sosial karena dampak dari COVID-19 membuat Perusahaan harus beradaptasi untuk mengubah pendekatan kepada konsumen melalui edukasi dengan *account* Sahabat Petani di Youtube, Instagram dan Facebook. Strategi tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil *survey* pasar, dimana konsumsi internet di level petani sebagai konsumen terbesar relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
 13. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan
Dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas Pelanggan, PT Pupuk Indonesia menyediakan layanan uji tanah yang bertujuan untuk membuat rekomendasi pemupukan spesifik lokasi. Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 24 unit Mobil Uji Tanah yang tersebar di seluruh Indonesia.
8. Synergy of marketing communications for uniformity of promotional messages, and increasing the marketing functions effectiveness and efficiency.
 9. Subsidiaries *Single Pricing* for Urea & Ammonia
Standardizing the selling price of urea and ammonia products throughout the subsidiaries to support the Company's sales strategy.
 10. Determination of Price *Layering* per Sector
Layering fertilizer prices per sector to maintain domestic price stability due to rising international prices in order to support national food security.
 11. *Single Branding* Implementation
A strategic initiative to strengthen product brand awareness and increase consumer engagement, PI Group implemented *Single Branding* for Urea fertilizer products with the PIHC Nitrea brand and NPK fertilizer formula 16-16-16.
 12. *Social Media* Optimization
The social restrictions due to the impact of COVID-19 forced the Company to adapt its approach to consumers through education with Sahabat Farmers accounts on Youtube, Instagram and Facebook. This strategy was implemented based on the results of a market survey, where internet consumption at the farmer level as the largest consumer increased relatively compared to the previous year.
 13. Increase customer satisfaction and loyalty
To increase customer satisfaction and loyalty, PT Pupuk Indonesia provides soil testing services that aim to make site-specific fertilization recommendations. Currently, Pupuk Indonesia has 24 Soil Test Cars spread throughout Indonesia.

Realisasi Kegiatan Pemasaran

Sepanjang tahun 2021, kegiatan Pemasaran yang telah direalisasikan, antara lain:

1. Pembentukan 8 (delapan) unit penjualan wilayah PSO.
2. Pendampingan 50.000 hektar lahan petani anggota Agrosolution.
3. Pengembangan *benefit* model untuk distributor dan kios.
4. Rayonisasi wilayah penjualan retail anak perusahaan
5. Perencanaan produksi dan penjualan setiap bulan untuk 3 bulan ke depan bersama anak perusahaan, unit penjualan, unit distribusi, unit produksi, dan unit pengadaan.
6. Koordinasi rutin untuk menetapkan adjustment terkait perubahan kondisi penjualan, distribusi, produksi, dan pengadaan.
7. Penggunaan gudang bersama oleh anak perusahaan di wilayah penyaluran PSO dan penjualan retail yang beririsan.
8. Penyesuaian/penghentian kontrak gudang berdasarkan hasil evaluasi utilisasi gudang.

Realization of Marketing Activities

In 2021, Marketing activities included:

1. Establishment of 8 (eight) PSO regional sales units.
2. Assistance for 50,000 hectares of agrosolution member farmers.
3. Development of benefit models for distributors and kiosks.
4. Regionalization of subsidiary retail sales areas.
5. Monthly production and sales planning for the next 3 months with subsidiaries, sales units, distribution units, production units, and procurement units.
6. Routine coordination to determine adjustments related to changes in sales, distribution, production, and procurement conditions.
7. The use of shared warehouses by subsidiaries in the distribution area of PSO and intersecting retail sales.
8. Adjustment/termination of warehouse contracts based on results of warehouse utilization evaluation.



9. Pembentukan 6 (enam) unit distribusi wilayah yang bertanggung jawab dalam pengiriman produk seluruh anak perusahaan.
10. Melakukan *launching* urea dan NPK dengan merek PIHC Nitrea dan PIHC Phonska Plus 16-16-16.
11. Meningkatkan *awareness* produk PI Grup, yakni dengan melakukan 1.020 demplot, 3.694 sosialisasi, 40 *sponsorship*, 37 pameran, 113 publikasi, 20 temu pelanggan, dan 42 billboard.
12. *Monitoring* suara pelanggan, tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap produk Perusahaan. Hingga akhir Desember 2021, terdapat 2.763 suara pelanggan yang masuk.

Pangsa Pasar

1. Urea
Pangsa pasar dalam negeri untuk pupuk urea pada tahun 2021 adalah sebesar 99,87% atau mengalami peningkatan 0,28% dibandingkan dengan tahun 2020.
2. NPK
Pangsa pasar dalam negeri untuk pupuk NPK pada tahun 2021 adalah sebesar 55,51% atau mengalami peningkatan 1,21% dibandingkan dengan tahun 2020.
3. Amoniak
Pangsa pasar dalam negeri untuk amoniak pada tahun 2021 adalah sebesar 87,81% atau mengalami peningkatan 6,91% dibandingkan dengan tahun 2020.

9. Establishment of 6 (six) regional distribution units responsible for product delivery to all subsidiaries.
10. Launching urea and NPK under the brands PIHC Nitrea and PIHC Phonska Plus 16-16-16.
11. Increasing awareness of PI Group products, through 1,020 demonstration plots, 3,694 outreach, 40 sponsorships, 37 exhibitions, 113 publications, 20 customer meetings, and 42 billboards.
12. Monitoring customer voice, level of satisfaction and customer loyalty to the Company's products. By the end of December 2021, there were 2,763 subscriber votes entered.

Market Share

1. Urea
The domestic market share for urea fertilizer in 2021 was 99.87%, an increase of 0.28% compared to 2020.
2. NPK
The domestic market share for NPK fertilizer in 2021 was 55.51%, an increase of 1.21% compared to 2020.
3. Ammonia
The domestic market share for ammonia in 2021 was 87.81%, an increase of 6.91% compared to 2020.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

FINANCIAL AND OTHER MATERIAL INFORMATION OVERVIEW

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Uraian kinerja keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) (“PI Grup”, “Perusahaan”) pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan atau Price Waterhouse Copper (PwC) Indonesia. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Pada laporan keuangan tahun buku 2021, Perusahaan telah menyajikan ulang dan reklasifikasi beberapa akun di laporan keuangan konsolidasian PI Grup tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan pada tanggal 1 Januari 2020. Seluruhnya telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan prosedurnya, seperti komunikasi antara KAP untuk tahun buku 2021 dengan KAP sebelumnya, serta dengan Pemegang Saham.

KINERJA KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

“Posisi Keuangan memberikan gambaran tentang kekuatan aset dan permodalan Perusahaan. Pada tahun 2021 Jumlah Aset Perusahaan mencapai Rp128,46 Triliun. Sedangkan Jumlah Liabilitas sebesar Rp56,52 Triliun dan Ekuitas sebesar Rp71,94 Triliun atau masing-masing dengan komposisi sebesar 44% dan 56%”

“The Financial Position provides an overview of the strength of the Company’s assets and capital. In 2021, the Company’s Total Assets stood at Rp128.46 Trillion. Whilst, Total Liabilities amounted to Rp56.52 Trillion, and Equity stood at Rp71.94 Trillion, with a composition of 44% and 56%, respectively.”

STANDARDS FOR THE PRESENTATION OF INFORMATION AND COMPLIANCE WITH FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The financial performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) (“PI Group”, the “Company”) in this annual report refers to the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020, which were audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners, or Price Waterhouse Copper (PwC) Indonesia. The Company’s Consolidated Financial Statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (“DSAK”) of the Indonesian Institute of Accountants and the applicable capital market regulations.

In the 2021 financial statements, the Company has restated and reclassified several accounts in the PI Group’s consolidated financial statements for the fiscal year ended December 31, 2020 and January 1, 2020. All statements have complied following the provisions of the prevailing laws and regulations. Likewise for the procedures, such as communication between the KAP for the 2021 fiscal year and the previous KAP, as well as with the Shareholders.

FINANCIAL PERFORMANCE

Consolidated Statements Of Financial Position



Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Position	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Aset Asset				
Aset Lancar Current assets	44.174.212	38.693.988	5.480.224	14,16
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	84.288.960	83.801.568	487.392	0,58
Jumlah Aset Total Assets	128.463.172	122.495.556	5.967.616	4,87
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Liabilities				
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities	33.008.039	26.335.318	6.672.721	25,34
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	23.515.157	28.797.421	(5.282.264)	(18,34)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	56.523.196	55.132.739	1.390.458	2,52
Jumlah Ekuitas Total Equity	71.939.976	67.362.817	4.577.159	6,79
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	128.463.172	122.495.556	5.967.616	4,87

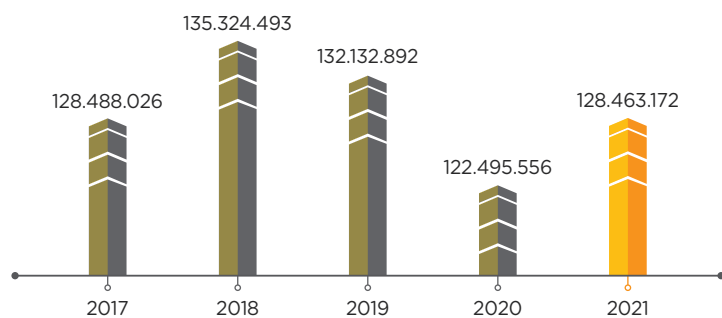
ASET

ASSETS

Jumlah Aset Perusahaan tahun 2021 mencapai Rp128,46 Triliun, mengalami peningkatan 4,87% dibandingkan Jumlah Aset tahun 2020 sebesar Rp122,50 Triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya kas dan setara kas sebesar 40,69% dibandingkan tahun 2020.

The Company's Total Assets in 2021 stood at Rp128.46 Trillion, an increase of 4.87% compared to Rp122.50 Trillion in 2020. The increase was mainly due to a 40.69% increase in cash and cash equivalents compared to 2020.

Jumlah Aset 2017-2021 (Rp Juta)
Total Assets (Rp Million)





Jumlah Aset 2020-2021 (Rp Juta)

Total Assets 2020-2021 (Rp-million)

Aset Asset	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Aset Lancar Current assets	44.174.212	38.693.988	5.480.224	14,16
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	84.288.960	83.801.568	487.392	0,58
Jumlah Aset Total Assets	128.463.172	122.495.556	5.967.616	4,87

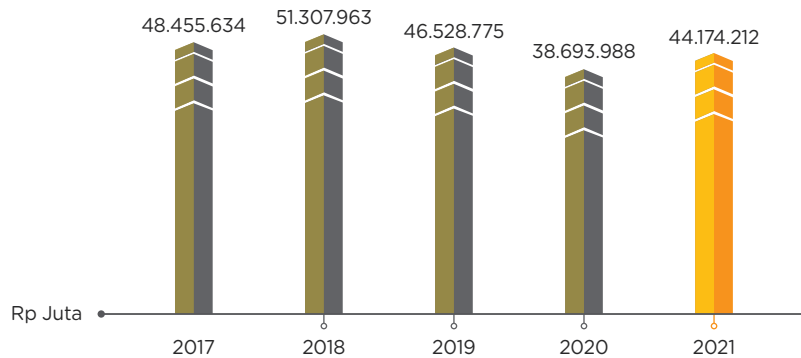
Jumlah aset Perusahaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp128,46 Triliun, meningkat 4,87% atau setara dengan Rp5,97 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp122,50 Triliun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi peningkatan kas dan setara kas sebesar 40,69% yang disebabkan tingginya penerimaan kas dari pelanggan.

As of 31 December 2021, the Company's total assets stood at Rp128.46 Trillion, an increase of 4.87% or Rp5.97 Trillion compared to Rp122.50 Trillion in 2020. This increase was mainly due to an increase in cash and cash equivalents of 40.69% due to high cash receipts from customers.

Aset Lancar

Current Assets

Aset Lancar Current assets	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	17.453.305	12.405.518	5.047.787	40,69
Piutang Usaha Trade Receivable	3.324.666	3.613.966	(289.300)	(8,01)
Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia Subsidy Receivables to the Indonesia Government	2.822.427	3.400.946	(77.029)	(1,98)
Piutang subsidi yang belum ditagih unbilled subsidy receivables	981.471	479.981	501.490	104,48
Piutang lainnya Other Receivables	621.397	486.910	134.487	27,62
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan Construction contract work in progress - due from customers	1.543.717	3.111.002	(1.567.285)	(50,38)
Persediaan Inventory	13.910.126	11.634.940	2.275.186	19,55
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Advances and Prepayments	1.001.193	810.165	191.028	23,58
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	1.346.453	1.938.060	(591.607)	(30,53)
Aset Lancar Lainnya Other current assets	1.169.457	812.500	356.957	43,93
Jumlah Aset Lancar Total current assets	44.174.212	38.693.988	5.480.224	14,16

**Aset Lancar 2017-2021 (Rp Juta)**
Current Assets 2017-2021 (Rp-million)

Jumlah aset lancar Perusahaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp44,17 Triliun, meningkat 14,16% atau setara dengan Rp5,48 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp38,69 Triliun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi meningkatnya kas dan setara kas sebesar 40,69%.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan komponen terbesar pada aset lancar Perusahaan dengan kontribusi sebesar 39,51%. Pada tahun 2021, posisi kas dan setara kas sebesar Rp17,45 Triliun, meningkat 40,69% atau setara dengan Rp5,05 Triliun dibandingkan posisi kas dan setara kas tahun 2020 sebesar Rp12,41 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan tingginya penerimaan kas dari pelanggan.

Piutang Usaha

Piutang usaha - bersih adalah piutang usaha setelah dikurangi cadangan penurunan nilai. Piutang usaha-bersih Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp3,32 Triliun, turun 8,01% atau setara dengan Rp289,30 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,61 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan membaiknya kualitas penagihan piutang usaha serta telah dilakukannya penghapusbukuan atas piutang macet senilai Rp361 Miliar.

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia

Piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk urea, NPK, SP36, ZA, dan pupuk organik bersubsidi. Bagian lancar piutang subsidi perusahaan tahun 2021 sebesar Rp2,82 Triliun, turun 17,01% atau setara dengan Rp578,52 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,40 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan pemerintah telah membayar piutang subsidi sebesar Rp3,78 Triliun atas penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019 dan membayar piutang subsidi sebesar Rp2,07 Triliun atas penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020.

As of December 31, 2021, the Company's current assets stood at Rp44.17 Trillion, an increase of 14.16% or Rp5.48 Trillion compared to Rp38.69 Trillion in 2020. This increase was mainly due to the increase in cash and cash equivalents of 40.69%.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are the largest component of the Company's current assets with a contribution of 39.51%. In 2021, the cash and cash equivalents amounted to Rp17.45 Trillion, an increase of 40.69% or Rp5.05 Trillion compared to Rp12.41 Trillion in 2020. This increase was mainly due to higher cash receipts from customers.

Trade Receivables

Trade Receivables-Net are trade receivables after deducting allowance for impairment. The Company's net trade receivables in 2021 amounted to Rp3.32 Trillion, a decrease of 8.01%, or Rp289.30 Billion compared to Rp3.61 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to the improvement in the quality of collection of trade receivables and the write-off of bad debts amounting to Rp361 Billion.

The Group applies a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure expected loan losses, trade receivables are grouped according to their similar loan risk characteristics and maturity.

Subsidy Receivables From the Government of Indonesia

Subsidy receivables represent the balance of subsidy receivables from the Government of Indonesia for the distribution of urea, NPK, SP36, ZA, and subsidized organic fertilizers. The current share of the Company's subsidy receivables in 2021 was Rp2.82 Trillion, a decrease of 17.01%, or Rp578.52 Billion compared to Rp3.40 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to the Government's payment of subsidy receivables of Rp3.78 Trillion in 2019, compared to the payment of subsidy receivables of Rp2.07 Trillion in 2020.

Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi - dari Pelanggan

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan adalah bagian dari kontrak aset yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Total nilai pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan tahun 2021 sebesar Rp1,54 Triliun, turun 50,38% atau setara dengan Rp1,57 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,11 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan telah selesainya pekerjaan jasa konstruksi oleh Rekind sebagai anak usaha PTPI.

Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13,91 Triliun, meningkat 19,55% atau setara dengan Rp2,28 Triliun dibandingkan Persediaan tahun 2020 sebesar Rp11,63 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan karena lebih tingginya persediaan barang untuk pemenuhan stok pupuk bersubsidi.

Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Jumlah Uang muka dan beban dibayar di muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1,00 Triliun, meningkat 23,58% atau setara dengan Rp191,03 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp810,16 Miliar.

Pajak Dibayar di Muka

Jumlah Pajak dibayar di muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1,35 Triliun, turun 30,53% atau setara dengan Rp231 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,94 Triliun.

Construction Contract Work in Progress - Due from Customers

Construction contract work in progress - due from customers is part of the contract assets recognized in relation to revenue from contracts with customers. The total construction contract work in progress - due from customers in 2021 amounted to Rp1.54 Trillion, a decrease of 50.38%, or Rp1.57 Trillion compared to Rp3.11 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to the completion of the construction service work by Rekind as a subsidiary of PTPI.

Inventories

As of December 31, 2021, total Inventories amounted to Rp13.91 Trillion, an increase of 19.55%, or Rp2.28 Trillion compared to Rp11.63 Trillion in 2020. This increase was mainly due to higher inventories of goods to fulfill subsidized fertilizer stocks.

Advances and Prepayments

As of December 31, 2021, total advances and prepayments amounted to Rp1.00 Trillion, an increase of 23.58%, or Rp191.03 Billion compared to Rp810.16 Billion in 2020.

Prepaid Taxes

As of December 31, 2021, total prepaid taxes amounted to Rp1.35 Trillion, a decrease of 30.53%, or Rp231 Billion compared to Rp1.94 Trillion in 2020.

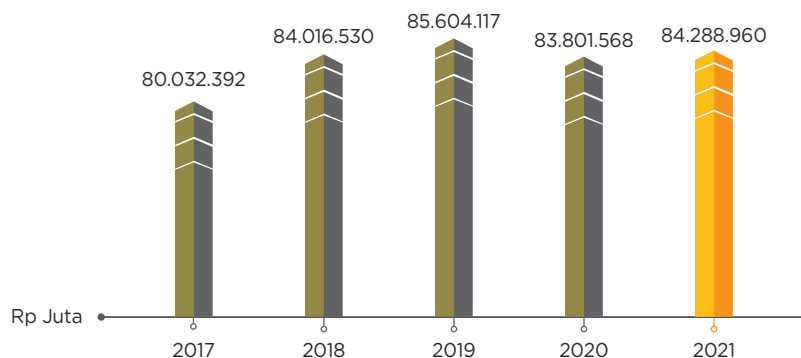


Aset Tidak Lancar

Non Current Assets

Aset Tidak Lancar Non Current Assets	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Piutang Lainnya - Tidak Lancar Other Receivables - Non Current	358.198	308.738	49.460	16,02
Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia -Tidak Lancar Subsidized Receivables from the Government of Indonesia - Non Current	3.057.789	2.318.447	739.342	31,89
Pajak Dibayar Dimuka -Jangka Panjang Prepaid Taxes - long term	1.824.723	1.476.620	348.103	23,57
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Venture	1.178.092	805.785	372.307	46,20
Properti Investasi Investment Property	888.788	894.148	(5.360)	(0,60)
Aset Tetap Fixed Asset	74.118.213	75.215.169	(1.096.956)	(1,46)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	112.797	117.146	(4.349)	(3,71)
Aset Imbalan Pasca Kerja Post-employment Benefits	767.115	797.560	(30.445)	(3,82)
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non Current Assets	1.983.245	1.867.955	115.290	6,17
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non Current Assets	84.288.960	83.801.568	487.392	0,58

Aset Tidak Lancar 2017-2021 (Rp Juta)
Non-Current Assets 2017-2021 (Rp-million)



Jumlah aset tidak lancar Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp84,29 Triliun, meningkat 0,58% atau setara dengan Rp487,39 Miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar tahun 2020 sebesar Rp83,80 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia - tidak lancar sebesar 31,89% atau setara Rp739,34 Miliar.

Piutang Lainnya - Tidak Lancar

Jumlah Piutang lainnya - tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp358,19 Miliar, meningkat 16,02% atau setara dengan Rp49,46 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp308,74 Miliar.

The Company's total non-current assets in 2021 stood at Rp84.29 Trillion, an increase of 0.58%, or Rp487.39 Billion compared to Rp83.80 Trillion in 2020. This increase was mainly due to an increase in subsidy receivables from the Government of Indonesia - non-current of 31.89%, or Rp739.34 Billion.

Other Receivables-Non-Current

As of December 31, 2021, total other Receivables-non-current amounted to Rp358.19 Billion, an increase of 16.02%, or Rp49.46 Billion compared to Rp308.74 Billion in 2020.

Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia - Tidak Lancar

Jumlah piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia - tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp3,06 Triliun, meningkat 31,89% atau setara dengan Rp739,34 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2,32 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan timbulnya piutang subsidi atas penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021 yang menambah saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia - tidak lancar per 31 Desember 2021.

Pajak Dibayar Di Muka - Jangka Panjang

Jumlah pajak dibayar di muka - jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1,82 Triliun, meningkat 23,57% atau setara dengan Rp348,10 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,48 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya pajak lainnya berupa PPN sebesar 81,97% atau setara Rp610,59 Miliar.

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi PI Grup pada entitas asosiasi juga termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama tahun 2021 sebesar Rp1,18 Triliun, meningkat 46,20% atau setara dengan Rp372,31 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp805,78 Miliar.

Properti Investasi

Nilai properti investasi Perusahaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp888,79 Miliar, turun 0,60% atau setara dengan Rp5,36 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp894,15 Miliar.

Aset Tetap

Jumlah aset tetap Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp74,12 Triliun, turun 1,46% atau setara dengan Rp1,10 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp75,22 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan meningkatnya akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 14,05% atau setara Rp3,91 Triliun.

Subsidized Receivables from the Government of Indonesia-Non-current

As of December 31, 2021, total Subsidy Receivables from the Government of Indonesia - non-current amounted to Rp3.06 Trillion, an increase of 31.89%, or Rp739.34 Billion compared Rp2.32 Trillion in 2020. This increase was mainly due to the emergence of subsidy receivables for the distribution of subsidized fertilizers in 2021 that added to the balance of subsidy receivables from the Government of Indonesia - non-current as of December 31, 2021.

Prepaid Taxes -Long-Term

As of December 31, 2021, prepaid taxes long-term amounted to Rp1.82 Trillion, an increase of 23.57%, or Rp348.10 Billion compared to Rp1.48 Trillion in 2020. This increase was mainly due to an increase in other taxes in the form of VAT of 81.97%, or Rp. 610.59 Billion.

Investment in Associates and Joint Ventures

Associates are entities over which the Group has significant influence but not control, usually through an ownership interest of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, investments are initially recorded at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of profit or loss. The Group's investments in associates also includes goodwill identified at acquisition.

Investment in associates and joint ventures in 2021 amounted to Rp1.18 Trillion, an increase of 46.20%, or Rp372.31 Billion compared to Rp805.78 Billion in 2020.

Investment Property

The Company's investment property as of December 31, 2021 amounted to Rp888.79 Billion, a decrease of 0.60%, or Rp5.36 Billion compared to Rp894.15 Billion in 2020.

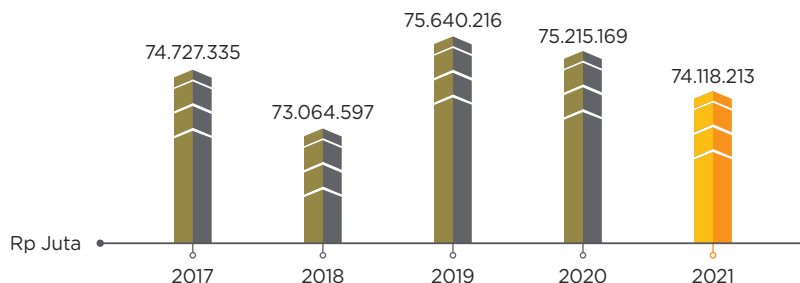
Fixed Assets

The Company's total fixed assets in 2021 amounted to Rp74.12 Trillion, a decrease of 1.46%, or Rp1.10 Trillion compared to Rp75.22 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to an increase in accumulated depreciation of fixed assets of 14.05%, or Rp3.91 Trillion.



Perkembangan Nilai Aset Tetap 2017-2021

Fixed Assets Development 2017-2021 (Rp/share)



Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, pabrik dan peralatan, mesin bengkel kerja, kendaraan dan alat berat, perlengkapan kantor dan rumah, kapal, lokomotif, dan gerbong, aset penyangga, aset hak guna, serta aset dalam penyelesaian. Aset tetap dihitung berdasarkan biaya perolehannya dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap PI Grup telah diasuransikan terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (semua risiko) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp18.903.483 dan USD3.979.723.572. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Aset Pajak Tangguhan

Jumlah aset pajak tangguhan per 31 Desember 2021 sebesar Rp112,80 Miliar, turun 3,71% atau setara dengan Rp4,35 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp117,15 Miliar. Penurunan ini terutama disebabkan terjadi penurunan nilai provisi penurunan piutang usaha dan lainnya sebesar 7,04% atau setara Rp6,08 Miliar.

Aset Imbalan Pasca Kerja

Jumlah aset imbalan pasca kerja tahun 2021 sebesar Rp767,12 Miliar, turun 3,82% atau setara dengan Rp30,45 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp797,56 Miliar.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Jumlah aset tidak lancar lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1,98 Triliun, meningkat 6,17% atau setara dengan Rp115,29 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,87 Triliun.

Fixed assets consist of land, buildings and infrastructure, plant and equipment, workshop machines, vehicles and heavy equipment, office and house equipment, ships, locomotives and carriages, supporting assets, right of use assets, and assets in progress. Fixed assets are calculated at cost, net of accumulated depreciation.

As of December 31, 2021, the PI Group's property, plant and equipment was insured against earthquake, fire and other risks (all risks) for a total coverage of Rp18,903,483 and USD3,979,723,572. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Deferred Tax Assets

As of December 31, 2021, the total deferred tax assets amounted to Rp112.80 Billion, a decrease of 3.71% or Rp4.35 Billion compared to Rp117.15 Billion in 2020. This decrease was mainly due to a decrease in the provision for impairment of trade and other receivables by 7.04% or equivalent to Rp6.08 Billion.

Post-employment Benefits

Total post-employment benefit assets in 2021 amounted to Rp767.12 Billion, a decrease of 3.82%, or Rp30.45 Billion compared to Rp797.56 Billion in 2020.

Other Non-Current Assets

As of December 31, 2021, the total other non-current assets amounted to Rp1.98 Trillion, an increase of 6.17%, or Rp115.29 Billion compared to Rp1.87 Trillion in 2020.

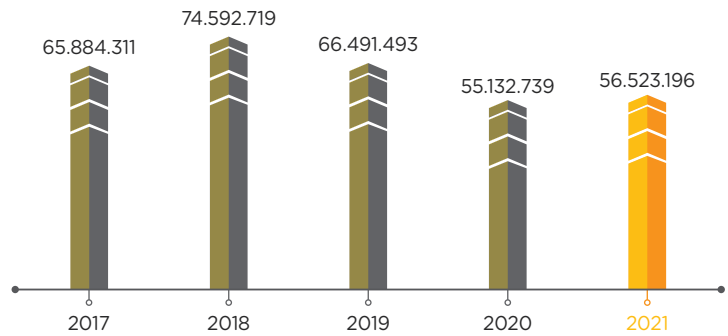
LIABILITAS

Jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp56,52 Triliun, mengalami peningkatan 2,52% dibandingkan jumlah Liabilitas tahun 2020 sebesar Rp55,13 Triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar 25,34% atau setara Rp6,67 Triliun.

The Company's Total Liabilities in 2021 amounted to Rp56.52 Trillion, an increase of 2.52% compared to Rp55.13 Trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in current liabilities of 25.34%, or Rp6.67 Trillion.

LIABILITIES

Jumlah Liabilitas 2017-2021 (Rp Juta)
Total Liabilities 2017-2021 (Rp-million)



Jumlah Liabilitas 2018-2019 (Rp Juta)
Total Liabilities 2018-2019 (Rp-million)

Liabilitas Liabilities	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current liabilities	33.008.039	26.335.318	6.672.721	25,34
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	23.515.157	28.797.421	(5.282.264)	(18,34)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	56.523.196	55.132.739	1.390.457	2,52

Kinerja liabilitas dipengaruhi oleh liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp56,52 Triliun, meningkat 2,52% atau setara dengan Rp1,39 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp55,13 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar 25,34% atau setara Rp6,67 Triliun.

The performance of liabilities is influenced by current liabilities and non-current liabilities. The Company's liabilities in 2021 amounted to Rp56.52 Trillion, an increase of 2.52%, or Rp1.39 Trillion compared to Rp55.13 Trillion in 2020. This increase was mainly due to an increase in current liabilities of 25.34%, or Rp6.67 Trillion.



Liabilitas Jangka Pendek

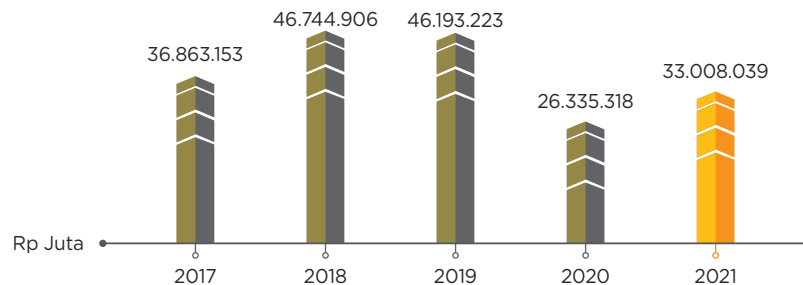
Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short Term Bank Loans	7.308.865	8.313.717	(1.004.852)	(12,09)
Utang Usaha Trade Payables	6.101.227	3.621.211	2.480.016	68,49
Utang Subsidi kepada Pemerintah Indonesia Subsidy Payable to the Government of Indonesia	95.627	126.633	(31.006)	(24,48)
Utang Bruto kepada Pelanggan untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi Amounts Due to Customers for Construction Contract Work	2.210	55.820	(53.610)	(96,04)
Utang Lainnya Other Payables	1.642.704	1.335.066	307.638	23,04
Utang Pajak Tax Payables	2.529.053	808.137	1.720.916	213,00
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar Accrued Liabilities	6.985.666	6.467.251	518.417	8,01
Provisi Provision	2.033.414	681.403	1.352.011	198,42
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: Current Maturities of Non-Current Borrowings				
Pinjaman Bank dan Lainnya Bank and Other Loans	2.360.195	3.050.941	(690.746)	(22,64)
Utang Obligasi Bonds Payable	1.773.765	-	1.773.765	-
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	74.740	94.181	(19.441)	(20,64)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	33.008.039	26.335.318	6.672.721	25,34

Liabilitas jangka pendek tahun 2021 sebesar Rp33,01 Triliun, meningkat 25,34% atau setara dengan Rp6,67 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp26,34 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penerbitan obligasi sebagai aksi korporasi untuk perbaikan struktur modal Perusahaan.

Current liabilities in 2021 amounted to Rp33.01 Trillion, an increase of 25.34%, or Rp6.67 Trillion compared to Rp26.34 Trillion in 2020. This increase was mainly due to the issuance of bonds as a corporate action to improve the Company's capital structure.

Liabilitas Jangka Pendek 2017-2021 (Rp Juta) Current Liabilities 2017-2021 (Rp-million)



Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek merupakan salah satu komponen terbesar dalam liabilitas jangka pendek. Pinjaman bank jangka pendek tahun 2021 sebesar Rp7,31 Triliun, turun 12,09% atau setara dengan Rp1,00 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp8,31 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan telah dibayarnya pinjaman bank yang jatuh tempo di tahun 2021 sebesar 15,95 Triliun.

Utang Usaha

Jumlah Utang usaha Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp6,10 Triliun, meningkat 68,49% atau setara dengan Rp2,48 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,62 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya utang usaha kepada pihak ketiga sebesar 89,61% atau setara Rp2,75 Triliun.

Utang Subsidi kepada Pemerintah Indonesia

Utang subsidi merupakan kelebihan pembayaran piutang subsidi oleh Kementerian Pertanian dikarenakan perbedaan harga pupuk subsidi per Ton antara Kementerian Pertanian dengan hasil audit BPK-RI.

Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia per 31 Desember 2021 sebesar Rp95,63 Miliar, turun 24,48% atau setara dengan Rp31,01 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp126,63 Miliar. Penurunan ini terutama disebabkan PTPI telah melakukan pembayaran kelebihan subsidi kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp126,63 Miliar pada tahun 2021.

Utang Bruto kepada Pelanggan untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi

Jumlah utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2,21 Miliar, turun 96,04% atau setara dengan Rp53,61 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp55,82 Miliar. Penurunan ini terutama disebabkan PTPI melalui Rekind sebagai anak usaha telah menyelesaikan kewajiban kepada pemilik proyek.

Short Term Bank Loans

Short-term bank loans are one of the largest components of current liabilities. Short-term bank loans in 2021 amounted to Rp7.31 Trillion, a decrease of 12.09%, or Rp1.00 Trillion compared to Rp8.31 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to the payment of bank loans maturing in 2021 amounting to 15.95 Trillion.

Accounts Payables

The Company's total trade payables in 2021 amounted to Rp6.10 Trillion, an increase of 68.49%, or Rp2.48 Trillion compared to Rp3.62 Trillion in 2020. This increase was mainly due to an increase in trade payables to third parties of 89.61%, or Rp2.75 Trillion.

Subsidy Payables to the Government of Indonesia

Subsidy payables relate to overpayments of subsidy receivables by the Ministry of Agriculture due to the difference in the price of subsidized fertilizer per Ton between the Ministry of Agriculture and the results of the BPK-RI audit.

As of December 31, 2021, the subsidy payables to the Government of Indonesia were Rp95.63 Billion, a decrease of 24.48%, or Rp31.01 Billion compared to Rp126.63 Billion in 2020. This decrease was mainly due to PTPI having paid excess subsidies to the Government of Indonesia amounting to Rp126.63 Billion in 2021.

Amounts Due to Customers for Construction Contract Work

As of December 31, 2021, the total amounts due to customers for construction contract work amounted to Rp2.21 Billion, a decrease of 96.04%, or Rp.53.61 Billion compared to Rp55.82 Billion in 2020. This decrease was mainly due to PTPI, through Rekind, as a subsidiary, completing its obligations to the project owner.



Utang Lainnya

Jumlah utang lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1,64 Triliun, meningkat 23,04% atau setara dengan Rp307,64 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,33 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya uang muka kontrak penjualan sebesar 49,06% atau setara Rp278,17 Miliar.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perusahaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2,53 Triliun, meningkat 212,95% atau setara dengan Rp1,72 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp808,14 Miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya utang pajak penghasilan badan sebesar 1.276,78% seiring dengan realisasi laba sebelum pajak konsolidasi PTPI yang meningkat sebesar 152,28%.

Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Jumlah liabilitas yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp9,02 Triliun, meningkat 26,16% atau setara dengan Rp1,87 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp7,15 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya liabilitas yang masih harus dibayar berupa biaya bahan bakar dan gas alam sebesar 7,10% atau setara Rp124,61 Miliar.

Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: Pinjaman Bank dan Lainnya

Bagian lancar pinjaman bank dan lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2,36 Triliun, menurun 22,64% atau setara dengan Rp690,75 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,05 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp2,75 Triliun dimana sebesar Rp1,75 Triliun digunakan untuk melunasi pinjaman bank jatuh tempo, sehingga terjadi reklasifikasi dari bagian lancar pinjaman bank jangka panjang menjadi utang obligasi jangka panjang.

Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: Utang Obligasi

Utang obligasi jatuh tempo tahun 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp1,77 Triliun yang merupakan hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap II Tahun 2017 yang akan jatuh tempo di November 2022. Sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat utang obligasi jatuh tempo.

Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa tahun 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp74,74 Miliar, turun 20,64% atau setara dengan Rp19,44 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp94,18 Miliar.

Other Payables

As of December 31, 2021, total other payables amounted to Rp1.64 Trillion, an increase of 23.04%, or Rp307.64 Billion compared to Rp1.33 Trillion in 2020. This increase was mainly due to an increase in contractual sales advances of 49.06%, or Rp278.17 Billion

Taxes Payables

As of December 31, 2021, the Company's total tax payables amounted to Rp2.53 Trillion, an increase of 212.95%, or Rp1.72 Trillion compared to Rp808.14 Billion in 2020. This increase was mainly due to an increase in payments of corporate income tax of 1,276.78% in line with PTPI's increase in consolidated profit before tax of 152.28%.

Accrued Liabilities

As of December 31, 2021, total accrued liabilities amounted to Rp9.02 Trillion, an increase of 26.16%, or Rp1.87 Trillion compared to Rp7.15 Trillion in 2020. This increase was mainly due to an increase in accrued liabilities in the form of fuel and natural gas costs of 7.10%, or Rp124.61 Billion.

Current Maturities of Non-Current Liabilities: Bank and Other Loans

As of December 31, 2021, the current maturities of bank and other loans was Rp2.36 Trillion, a decrease of 22.64%, or Rp690.75 Billion compared to Rp3.05 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to the issuance of PTPI Phase II Sustainable Bonds II 2021 amounting to Rp2.75 Trillion, of which Rp1.75 Trillion was used to pay off maturing bank loans, resulting in a reclassification of the current maturities of long-term bank loans into long-term bonds.

Current Maturities of Non-Current Liabilities: Bonds Payable

As of December 31, 2021, Bonds payable due in 2021 amounted to Rp1.77 Trillion as a result of the issuance of PTPI Sustainable Bonds I Phase II Year 2017 that will mature in November 2022. In 2020, there were no maturing bonds payable.

Current Maturities of Non-Current Liabilities: Lease Liabilities

As of December 31, 2021, Lease liabilities in 2021 amounted to Rp74.74 Billion, a decrease of 20.64%, or Rp19.44 Billion compared to Rp.94.18 Billion in 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

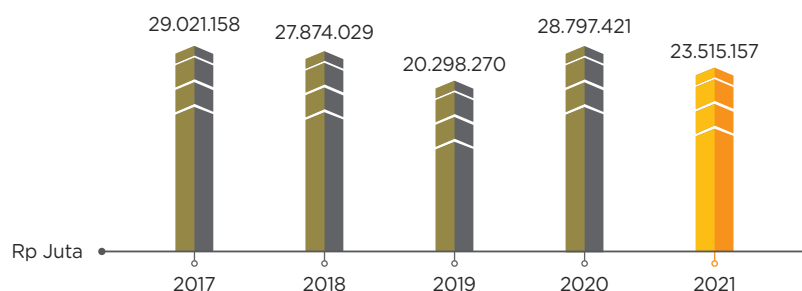
Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pinjaman Jangka Panjang: Long Term Loans:				
Pinjaman Bank dan Lainnya Bank and Other Loans	12.611.995	19.030.343	(6.418.348)	(33,73)
Utang Obligasi Bonds Payable	7.264.168	6.289.446	974.722	15,50
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	69.682	79.536	(9.854)	(12,39)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-employment Benefits Liabilities	2.764.102	2.894.400	(130.298)	(4,50)
Liabilitas Pajak Tanggahan Deferred Tax Liabilities	738.299	475.863	262.436	55,15
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Liabilities	66.911	27.833	39.078	140,40
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	23.515.157	28.797.421	(5.282.264)	(18,34)

Liabilitas jangka panjang Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp23,52, turun 18,34% atau setara dengan Rp5,28 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp28,80 Triliun. Hal tersebut terutama disebabkan terjadi penurunan pinjaman jangka panjang bank dan lainnya sebesar 33,73% atau setara Rp6,42 Triliun.

The Company's non-current liabilities in 2021 amounted to Rp23.52, a decrease of 18.34%, or Rp5.28 Trillion compared to Rp28.80 Trillion in 2020. This was mainly due to a decrease in long-term bank and other loans of 33.73%, or Rp6.42 Trillion.

Liabilitas Jangka Panjang 2017-2021 (Rp Juta)
Non-Current Liabilities 2017-2021 (Rp-million)



Pinjaman Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar: Pinjaman Bank dan Lainnya

Pinjaman jangka panjang bank dan lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp12,61 Triliun, turun 33,73% atau setara dengan Rp6,42 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp19,03 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan pelunasan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp9,80 Triliun.

Long Term Loans - After Deducting Current Portion: Bank Loans and Others

As of December 31, 2021, long-term bank and other loans amounted to Rp12.61 Trillion, a decrease of 33.73%, or Rp6.42 Trillion compared to Rp19.03 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to the repayment of long-term bank loans of Rp9.80 Trillion.



Pinjaman Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar: Utang Obligasi

Utang Obligasi tahun 2021 per 31 Desember 2021 Rp7,26 Triliun, meningkat 15,50% atau setara dengan Rp974,72 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp6,29 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp2,75 Triliun.

Pinjaman Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar: Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa tahun 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp69,68 Miliar, turun 12,39% atau setara dengan Rp9,85 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp79,54 Miliar.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp2,76 Triliun, turun 4,50% atau setara dengan Rp130,30 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2,89 Triliun. Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun PI Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.

Liabilitas pajak tangguhan per 31 Desember 2021 sebesar Rp738,30 Miliar, meningkat 55,15% atau setara dengan Rp262,44 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp475,86 Miliar.

Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Liabilitas tidak lancar lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp66,91 Miliar, meningkat 140,40% atau setara dengan Rp39,08 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp27,83 Miliar.

Long Term Loans - After Deducting Current Portion: Bonds Payable

As of December 31, 2021, Bonds Payable in 2021 amounted to Rp7.26 Trillion, an increase of 15.50%, or Rp974.72 compared to Rp6.29 Trillion in 2020. This increase was mainly due to the issuance of PTPI Sustainable Bonds II Phase II Year 2021 amounting to Rp2.75 Trillion.

Long-Term Loans - After Deducting Current Portion: Lease Liabilities

As of December 31, 2021, Lease liabilities in 2021 amounted to Rp69.68 Billion, a decrease of 12.39%, or Rp9.85 Billion compared to Rp79.54 Billion in 2020.

Post-Employment Benefits Liabilities

As of December 31, 2021, post-employment benefit liabilities amounted to Rp2.76 Billion, a decrease of 4.50%, or Rp130.30 compared to Rp2.89 Trillion in 2020. Management believes that the estimated and employee benefits liabilities provided for the PI Group's overall pension plans, which are based on actuarial estimates, have exceeded the minimum obligations stipulated by the Employment Act.

Deferred Tax Liabilities

Deferred tax liabilities represent the amount of income tax payable for future periods as a result of temporary tax differences.

As of December 31, 2021, deferred tax liabilities amounted to Rp738.30 Billion, an increase of 55.15%, or Rp262.44 Billion compared to Rp475.86 Billion in 2020.

Other Non-Current Liabilities

As of December 31, 2021, other non-current liabilities amounted to Rp66.91 Billion, an increase of 140.40%, or Rp39.08 Billion compared to Rp27.83 Billion in 2020.

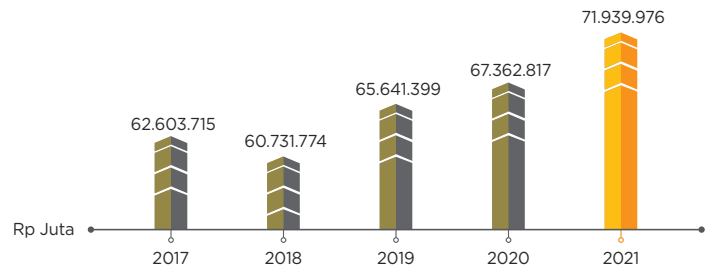
EKUITAS

Jumlah Ekuitas Perusahaan tahun 2021 mencapai Rp71,94 Triliun, mengalami peningkatan 6,79% dibandingkan Jumlah Ekuitas tahun 2020 sebesar Rp67,36 Triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya laba Perusahaan.

The Company's Total Equity in 2021 stood at Rp71.94 Trillion, an increase of 6.79% compared to Rp67.36 Trillion in 2020. The increase was in line with the increase in the Company's profit.

EQUITY

Jumlah Ekuitas 2017-2021 (Rp Juta)
Total Equity 2017-2021 (Rp-million)



Ekuitas 2020-2021 (Rp Juta)
Equity 2020-2021 (Rp-million)

Ekuitas Equity	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity				
Modal saham Share Capital	25.000.000	25.000.000	-	-
Saldo laba: Retained Earnings:				
Ditentukan penggunaannya Defined use	16.044.117	14.294.888	1.749.229	12,24
Belum ditentukan penggunaannya Use has not been defined	2.064.733	(919.135)	2.983.868	324,64
Komponen ekuitas lainnya Other Components of Equity	28.805.426	28.758.834	46.592	0,16
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	71.914.276	67.134.587	4.779.689	7,12
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali Equity attributable to non-controlling interests	25.700	228.230	(202.530)	(88,74)
Jumlah Ekuitas Total Equity	71.939.976	67.362.817	4.577.159	6,79



Kinerja ekuitas dipengaruhi oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang terdiri dari modal saham, saldo laba baik yang dicadangkan maupun belum dicadangkan, penghasilan komprehensif lain serta ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.

Nilai ekuitas tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,79%, sedangkan jumlah ekuitas dipengaruhi oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Modal Saham

Modal saham Perusahaan per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp25 Triliun. Tidak terdapat perubahan modal saham di sepanjang tahun 2021.

Saldo Laba

Saldo laba terdiri dari saldo laba yang dicadangkan dan saldo laba yang belum dicadangkan.

- Saldo laba yang dicadangkan tahun 2021 sebesar Rp16,04 Triliun, meningkat 12,24% atau setara dengan Rp1,75 Triliun dibandingkan saldo laba yang dicadangkan tahun 2020 sebesar Rp14,29 Triliun.
- Saldo laba yang belum dicadangkan tahun 2021 sebesar Rp2,06 Triliun, setara dengan Rp2,98 Triliun dibandingkan saldo laba yang belum dicadangkan tahun 2020 sebesar negatif Rp919,14 Miliar.

Komponen Ekuitas Lainnya

Komponen ekuitas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp28,81 Triliun, meningkat 0,16% atau setara dengan Rp46,59 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp28,76 Triliun.

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk tahun 2021 mencapai Rp71,91 Triliun, meningkat 7,12% atau setara dengan Rp4,78 Triliun dibandingkan posisi tahun 2020 yang sebesar Rp67,13 Triliun.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2021 sebesar Rp25,70 Miliar, turun 88,74% atau setara dengan Rp202,53 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp228,23 Miliar.

Equity performance is influenced by equity attributable to owners of the parent entity, which consists of Share Capital, Retained Earnings both Reserved and Unreserved, Other Comprehensive Income and Equity Attributable to Non-Controlling Interests.

Equity in 2021 increased by 6.79%, while Total Equity Attributable to Non-Controlling Interests in 2021 increased by 7.12% compared to the previous year.

Share Capital

As of December 31, 2021, the Company's share capital was Rp25 Trillion. There was no change in share capital in 2021.

Retained Earnings

Retained Earnings consists of reserved retained earnings and retained earnings that have not been reserved.

- Reserved Earnings in 2021 amounted to Rp16.04 Trillion, an increase of 12.24%, or Rp1.75 Trillion compared to Rp14.29 Trillion in 2020.
- Unreserved Earnings in 2021 amounted to Rp2.06 Trillion, an increase of Rp2.98 Trillion compared to the negative Rp919.14 Billion in 2020.

Other Equity Components

As of December 31, 2021, other comprehensive income was Rp28.81 Trillion, an increase of 0.16%, or Rp46.59 Billion compared to Rp28.76 Trillion in 2020.

Amount of Equity Attributable to Owners of the Parent

Changes in retained earnings and other comprehensive income, such as making the total equity attributable to owners of the Parent entity in 2021 reached Rp71.91 Trillion, an increase of 7.12%, or Rp4.78 Trillion compared to Rp67.13 Trillion in 2020.

Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Equity attributable to non-controlling interests in 2021 amounted to Rp25.70 Billion, a decrease of 88.74%, or Rp202.53 Billion compared to Rp228.23 Billion in 2020.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

“Laba tahun berjalan 2021 mencapai Rp5,13 Triliun, mengalami peningkatan 120,79% dibandingkan Laba tahun berjalan 2020. Pencapaian tersebut sejalan dengan upaya manajemen dalam mengoptimalkan pendapatan sektor komersil”

“Profit for the year 2021 reached Rp5.13 Trillion, an increase of 120.79% compared to 2020. This achievement was due to the management’s efforts to optimize revenue in the commercial sector”

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Sales and Other Revenue	78.603.136	71.877.573	6.725.563	9,36
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(63.469.789)	(60.755.846)	(2.713.943)	4,47
Laba Bruto Gross Profit	15.133.347	11.121.727	4.011.620	36,07
Beban Penjualan Selling expenses	(1.280.505)	(1.186.769)	(93.736)	7,90
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(4.023.124)	(4.024.090)	966	(0,02)
Pendapatan/(Beban) Lainnya - Bersih Other (Expenses)/Income - Net	150.180	(105.342)	255.522	(242,56)
Laba Operasi Operating Profit	9.979.898	5.805.526	4.174.372	71,90
Pendapatan Keuangan Financial Income	226.343	284.282	(57.939)	(20,38)
Biaya Keuangan Finance Costs	(2.047.494)	(2.975.349)	927.855	(31,18)
Bagian atas Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net Profit of Associates and Joint Ventures	296.018	236.889	59.129	24,96
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income tax	8.454.765	3.351.348	5.103.417	152,28
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(3.320.090)	(1.025.767)	(2.294.323)	223,67
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	5.134.675	2.325.581	2.809.094	120,79
Total Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Total Other Comprehensive (Loss)/Income for the Year after Tax	46.592	(484.364)	530.956	(109,62)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	5.181.267	1.841.217	3.340.050	181,40
Total Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Profit for the Year Attributable to				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	5.321.127	2.337.259	2.983.868	127,67



Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	(186.452)	(11.678)	(174.774)	(1.496,61)
	5.134.675	2.325.581	2.809.094	120,79
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	5.367.719	1.852.895	3.514.824	189,69
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	(186.452)	(11.678)	(174.774)	(1.496,61)
	5.181.267	1.841.217	3.340.050	181,40
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk - Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah Penuh) Earnings Per Share Attributable to owner of the parent entity - Basic and Diluted (in full Rupiah)	212.845	93.490	119.355	127,67

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Perusahaan diperoleh dari 3 (tiga) segmen usaha, yaitu segmen Pupuk dan Amoniak, Jasa Konstruksi, dan segmen Lain-Lain.

Pada tahun 2021, penjualan dan pendapatan usaha lainnya mencapai Rp78,60 Triliun, meningkat 9,36% atau setara dengan Rp6,73 Triliun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp71,88 Triliun. Kenaikan ini disebabkan karena optimalnya penjualan komersial dengan memanfaatkan momentum harga jual yang tinggi.

Sales and Other Operating Revenues

As described in the Operational Review section per Business Segment, the Company's Sales and Other Operating Revenues are generated from 3 (three) business segments, the Fertilizer and Ammonia segment, Construction Services segment, and Others segment.

In 2021, sales and other operating revenues amounted to Rp78.60 Trillion, an increase of 9.36%, or Rp6.73 Trillion compared to Rp71.88 Trillion in 2020. This increase was due to optimal commercial sales by taking advantage of the momentum of high selling prices.

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Berdasarkan Segmen Sales and Other Operating Revenues	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp Juta) Amount (Rp Million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp Juta) Amount (Rp Million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp Juta) (Rp Million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan dari Segmen Pupuk dan Amoniak Revenue from fertilizer and ammonia segment	77.094.451	87,87	64.644.015	84,17	12.450.436	19,26
Pendapatan dari Segmen Jasa Konstruksi Revenue from Construction Services Segment	3.310.739	3,77	8.131.384	10,59	(4.820.645)	(59,28)
Pendapatan dari Segmen Lain-lain Revenue from Other Segments	7.333.918	8,36	4.024.135	5,24	3.309.783	82,25
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya sebelum Eliminasi Total Sales and Other Operating Income	87.379.108	100,00	76.799.534	100,00	10.939.574	14,24

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Berdasarkan Segmen Sales and Other Operating Revenues	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp Juta) Amount (Rp Million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp Juta) Amount (Rp Million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp Million)	Persentase (%) Percentage (%)
Eliminasi* Elimination*	(9.135.972)	-	(4.921.961)	-	(4.214.011)	(85,62)
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Operating Income	78.603.136	-	71.877.573	-	6.725.563	9,36

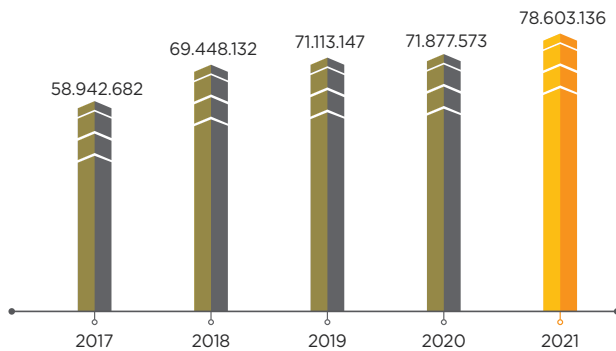
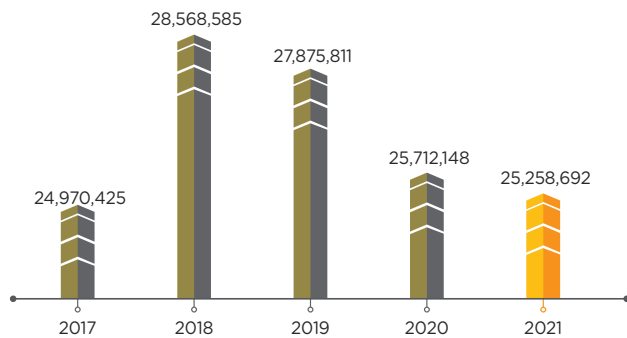
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa segmen pupuk dan amoniak berkontribusi 87,87% terhadap jumlah penjualan dan pendapatan lainnya, sedangkan segmen jasa konstruksi berkontribusi sebesar 3,77%. Di sisi lain, pendapatan dari segmen lain-lain berkontribusi sebesar 8,36% terhadap jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya.

Di samping itu, Perusahaan mendapatkan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013. Tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.02/2016.

From the table above, it can be seen that the fertilizer and ammonia segment contributed 87.87% of total sales and other revenues, while the construction services segment contributed 3.77%. On the other hand, revenue from the others segment contributed 8.36%.

In addition, the Company receives fertilizer subsidies from the Government of Indonesia based on the Minister of Trade Regulation No. 15/M-DAG/PER/4/2013. Procedures for the provision, disbursement and accountability of fertilizer subsidies are regulated in the Minister of Finance Regulation no. 68/PMK.02/2016.

Penjualan dan Pendapatan Lainnya Sales and Other Income	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penjualan Segmen Pupuk dan Amoniak serta Segmen Lain-lain Sales of Fertilizer, Ammonia and Other segment				
Penjualan Produk Sales of Products	49.313.851	37.356.701	11.957.150	32,01
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia	25.258.692	25.712.148	(453.456)	(1,76)
Pendapatan Jasa Revenue from Services	4.030.593	8.808.724	(4.778.131)	(54,24)
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Lainnya Total Sales and Other Revenue	78.603.136	71.877.573	6.725.563	9,36

**Perkembangan Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya 2017-2021 (Rp Juta)***Development of Total Sales and Other Operating Revenues 2017-2021 (Rp Million)***Perkembangan Besaran Subsidi dari Pemerintah 2017-2021 (Rp Juta)***Development of Government Subsidy from 2017-2021 (Rp Million)*

Penjelasan dari masing-masing penjualan dan pendapatan serta subsidi adalah sebagai berikut:

- Penjualan Produk

The explanation of each sale and income and subsidy is as follows:

- Product Sales

Penjualan Produk Product Sales	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penjualan Pupuk Subsidi Subsidy Fertilizer Sales	13.693.290	12.348.619	1.344.671	10,89
Penjualan Pupuk Non Subsidi Non-Subsidized Fertilizer Sales	24.878.782	18.641.100	6.237.682	33,46
Penjualan Non-Pupuk Other Non Fertilizer sales of products	10.497.032	6.143.264	4.353.768	70,87
Penjualan Produk Lainnya Other sales of products	244.747	223.718	21.029	9,40
Jumlah Penjualan Produk Other sales of products	49.313.851	37.356.701	11.957.150	32,01

Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, nilai penjualan pupuk tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 24,47% atau setara Rp7,58 Triliun. Sedangkan penjualan non pupuk dan produk lainnya mengalami peningkatan sebesar 68,71% atau setara Rp4,37 Triliun.

As can be seen in the table above, fertilizer sales in 2021 increased by 24.47%, or Rp7.58 Trillion. Whilst, non-fertilizer and other product sales increased by 68.71%, or Rp4.37Trillion.

- Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia
- Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia

Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy from the Government	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Subsidi Pupuk: Subsidy of Fertilizer				
Urea Urea	10.193.563	12.643.616	(2.450.053)	(19,38)
NPK	11.000.486	9.673.700	1.326.786	13,72
SP-36	1.416.033	2.035.402	(619.369)	(30,43)
ZA	1.583.586	1.368.545	215.041	15,71
Organik Organic	509.883	878.324	(368.441)	(41,95)
NPK Kakao NPK Cocoa	53.651	31.507	22.144	70,28
Subtotal Subtotal	24.757.202	26.631.094	(1.873.892)	(7,04)
Penyesuaian Piutang Subsidi dari Pemerintah, yang belum ditagih, bersih setelah penyesuaian tahun sebelumnya Adjustment of unbilled subsidy receivables from government - net of prior year adjustment	501.490	(918.946)	1.420.436	(154,57)
Jumlah Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Total Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia	25.258.692	25.712.148	(453.456)	(1,76)

Penggantian biaya subsidi dari pemerintah tahun 2021 mencapai Rp25,26 Triliun atau menurun 1,76% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp25,71 Triliun, hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan penyaluran pupuk subsidi dari 8,43 juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,92 juta Ton di tahun 2021.

Reimbursement of subsidy from the Government in 2021 reached Rp25.26 Trillion, a decrease of 1.76% compared to Rp25.71 Trillion in 2020, mainly due to a decrease in the distribution of subsidized fertilizers from 8.43 million Tons in 2020 to 7.92 million Tons in 2021.

- Pendapatan Jasa
- Construction Services Revenue

Pendapatan Jasa Rendering of Construction Services	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Konstruksi Construction Revenue	2.966.228	6.954.611	(3.988.383)	(57,35)
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operations and Maintenance Services	292.267	997.885	(705.618)	(70,71)
Pendapatan Konstruksi dari Perjanjian Konsesi Jasa Construction Revenue from Service Concession Agreement	225.091	130.868	94.223	72,00
Pendapatan Keuangan dari Perjanjian Konsesi Jasa Finance Income from Service Concession Agreement	154.266	352.780	(198.514)	(56,27)
Jasa Lainnya Other Service	392.741	372.580	20.161	5,41
Jumlah Pendapatan Jasa Total Rendering of Services	4.030.593	8.808.724	(4.778.131)	(54,24)



Pendapatan dari jasa konstruksi tahun 2021 sebesar Rp4,03 Triliun, turun 54,24% atau setara Rp4,78 Triliun. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19, sehingga banyak proyek yang telah direncanakan untuk dapat selesai sesuai dengan target menjadi tertunda.

Construction services revenue in 2021 amounted to Rp4.03 Trillion, a decrease of 54.24%, or Rp4.78 Trillion. This was due to the impact of the COVID-19 pandemic, where many planned projects were delayed.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan terdiri dari beban manufaktur (biaya produksi, persediaan barang jadi, barang dalam proses) dan beban non-manufaktur. Beban pokok pendapatan Perusahaan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Cost of Revenues

Cost of revenues consists of manufacturing expenses (production costs, finished goods inventory, work in process) and non-manufacturing expenses. The Company's Cost of Revenue per account can be seen in the table below.

Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Bahan Baku yang Digunakan Raw Material Used	42.883.940	38.343.301	4.540.639	11,84
Penyusutan Depreciation	4.112.455	3.765.120	347.335	9,23
Biaya Tenaga Kerja Langsung Direct Labour	3.267.898	2.530.188	737.710	29,16
Perbaikan dan Pemeliharaan Repairs and Maintenance	980.305	757.788	222.517	29,36
Biaya <i>Overhead</i> lainnya Other Overhead Costs	3.416.216	3.404.341	11.875	0,35
Jumlah Biaya Produksi Total Production Costs	54.660.814	48.800.738	5.860.076	12,01
Persediaan Barang Jadi dan Barang Dalam Proses Finished Goods and Work in Process Inventories				
Awal Tahun Beginning of the Year	7.845.646	10.246.176	(2.400.530)	(23,43)
Akhir Tahun End of the Year	(8.149.802)	(7.845.646)	(304.156)	3,88
	54.356.658	51.201.268	3.155.390	6,16
Beban Non-Manufaktur Non-Manufacturing Cost				
Jasa Konstruksi Construction Services	6.086.695	7.181.246	(1.094.551)	(15,24)
Perdagangan Trading	1.794.178	983.395	810.783	82,45
Properti dan jasa kawasan industri Property and Services Industrial Estate	131.729	227.280	(95.551)	(42,04)
Listrik, <i>Steam</i> dan Utilitas Electricity, Steam and Utilities	510.584	641.185	(130.601)	(20,37)
Lain-lain Others	589.945	521.472	68.473	13,13
Jumlah Beban Non-Manufaktur Total Cost of Non-Manufacturing	9.113.131	9.554.578	(441.447)	(4,62)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenues	63.469.789	60.755.846	2.713.943	4,47

Beban pokok pendapatan tahun 2021 sebesar Rp63,47 Triliun, lebih tinggi 4,47% dibandingkan beban pokok pendapatan tahun 2020 sebesar Rp60,76 Triliun. Beban manufaktur pada tahun buku 2021 meningkat 6,16% dibandingkan tahun sebelumnya atau setara Rp3,16 Triliun. Peningkatan tersebut terutama oleh adanya dampak penerapan PSAK 72.

Beban non manufaktur menurun 4,62%, yang utamanya disebabkan penurunan biaya jasa konstruksi dari Rp7,18 Triliun di tahun 2020 menjadi Rp6,09 Triliun di tahun 2021.

Laba Bruto

Laba bruto didapatkan dari akun penjualan dan pendapatan usaha lainnya yang diakumulasikan dengan beban pokok pendapatan. Perusahaan mencatat laba bruto tahun 2021 sebesar Rp15,13 Triliun, meningkat 36,07% atau setara dengan Rp4,01 Triliun dibandingkan laba bruto tahun 2020 sebesar Rp11,12 Triliun.

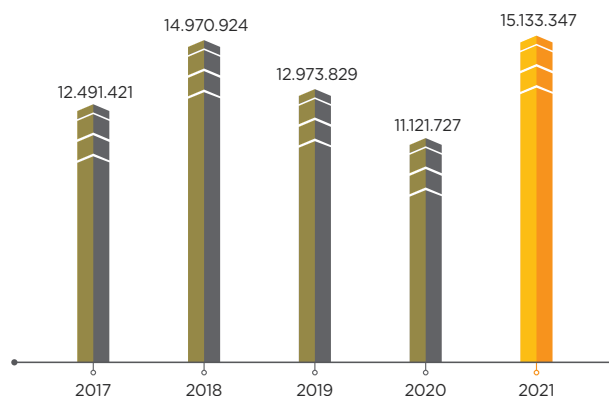
Cost of Revenue in 2021 amounted to Rp63.47 Trillion, an increase of 4.47% compared to Rp60.76 Trillion in 2020. Manufacturing costs in the 2021 fiscal year increased by 6.16% compared to Rp3.16 Trillion the previous year. This increase was mainly due to the impact of applying PSAK 72.

Non-manufacturing costs decreased by 4.62%, mainly due to a decrease in construction service costs from Rp7.18 Trillion in 2020 to Rp6.09 Trillion in 2021.

Gross Profit

Gross profit is obtained from the sales account and other operating income, accumulated with the cost of revenues. The Company's gross profit in 2021 amounted to Rp15.13 Trillion, an increase of 36.07%, or Rp4.01 Trillion compared to Rp11.12 Trillion in 2020.

Perkembangan Laba Bruto 2017-2021 (Rp Juta)
Gross Profit Growth 2017-2021 (Rp-million)



Beban Penjualan

Beban penjualan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Selling Expenses

Selling expenses per account can be seen in the table below.

Beban Penjualan Selling Expenses	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Gaji, Upah dan Kesejahteraan Salaries, Wages, and Welfare	559.551	560.477	(926)	(0,17)
Biaya Jasa Service Charge	160.294	117.086	43.208	36,90
Beban Sewa Rent Expenses	140.982	121.699	19.283	15,84



Beban Penjualan Selling Expenses	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Beban Promosi dan pemasaran Promotion and Marketing Expenses	117.512	107.148	10.364	9,67
Beban Penyusutan Depreciation Expense	110.086	32.787	77.299	235,76
Beban Perlengkapan dan Operasional Kantor Impairment Expense of Receivables and Other Assets	35.107	41.481	(6.374)	(15,37)
Beban Perjalanan Dinas Travel Expenses	23.664	26.399	(2.735)	(10,36)
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	18.673	17.940	733	4,09
Beban Penelitian Research Expenses	16.062	16.496	(434)	(2,63)
Beban Unit Pelayanan dan Utilitas Service Unit and Utility Expenses	11.690	15.854	(4.164)	(26,26)
Beban Asuransi Insurance Expenses	10.990	14.288	(3.298)	(23,08)
Beban Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000) Other Expenses (Each under Rp10.000)	75.894	115.114	(39.220)	(34,07)
Jumlah Beban Penjualan Total Sales Expenses	1.280.505	1.186.769	93.736	7,90

Beban penjualan tahun 2021 sebesar Rp1,28 Triliun, meningkat 7,90% atau setara dengan Rp93,74 Miliar dibandingkan beban penjualan tahun 2020 sebesar Rp1,19 Triliun. Kenaikan ini disebabkan beban penyusutan meningkat 235,76% atau setara Rp77,30 Miliar.

Selling Expenses in 2021 amounted to Rp1.28 Trillion, an increase of 7.90%, or Rp93.74 Billion compared to Rp1.19 Trillion in 2020. This increase was due to an increase in depreciation expenses of 235.76%, or Rp77.30 Billion.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi perusahaan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

General and Administrative Expenses

The Company's General and Administrative Expenses per account can be seen in the table below.

Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Salaries, Wages, and Welfares	2.047.088	1.965.767	81.321	4,14
Beban Jasa Service Charge	521.498	564.524	(43.026)	(7,62)
Beban Pajak Tax Expenses	312.576	413.326	(100.750)	(24,38)
Beban Unit Pelayanan dan Utilitas Service Unit and Utility Expenses	215.461	191.105	24.356	12,74
Beban Penyusutan Depreciation Expenses	127.317	107.817	19.500	18,09
Beban Bina Wilayah Regional Development Expenses	141.113	142.409	(1.296)	(0,91)
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	129.485	100.512	28.973	28,83

Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Beban Sewa Rent Expenses	109.145	32.429	76.716	236,57
Beban Promosi dan Pemasaran Promotion and Marketing Expenses	109.896	127.065	(17.169)	(13,51)
Beban Perlengkapan dan Operasional Kantor Supply and Office Operating Expenses	101.061	97.327	3.734	3,84
Beban Pelatihan Training Expenses	52.906	58.625	(5.719)	(9,76)
Biaya Perjalanan Dinas Travel Expenses	47.604	32.588	15.016	46,08
Beban Penelitian Research Expenses	43.462	25.973	17.489	67,34
Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang - Bersih Insurance Expenses	(55.399)	(5.674)	(49.725)	876,37
Beban Lainnya Other Expenses	119.911	170.297	(50.386)	(29,59)
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Total General and Administrative Expenses	4.023.124	4.024.090	(966)	(0,02)

Beban umum dan administrasi tahun 2021 sebesar Rp4,02 Triliun turun 0,02% atau setara dengan Rp966 juta dibandingkan beban umum dan administrasi tahun 2020 sebesar Rp4,02 Triliun. Penurunan ini disebabkan realisasi beban lainnya menurun sebesar 29,59% atau setara Rp50,39 Miliar.

Pendapatan/(Beban) Lainnya - Bersih

Pendapatan/(beban) lainnya - bersih tahun 2021 sebesar Rp150,18 Miliar, sedangkan realisasi tahun 2020 negatif Rp105,34 Miliar. Pada tahun 2021 Perusahaan membukukan pendapatan lainnya - bersih terutama disebabkan terjadi peningkatan pendapatan atas denda dan klaim sebesar 121,59% atau setara Rp38,75 Miliar.

Laba Operasi

Laba operasi didapatkan dari akun laba bruto yang diakumulasikan dengan beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta (beban) pendapatan lainnya - bersih.

Laba operasi tahun 2021 sebesar Rp9,98 Triliun, meningkat 71,90% atau setara dengan Rp4,17 dibandingkan laba operasi tahun 2020 sebesar Rp5,80 Triliun.

General and Administrative Expenses in 2021 amounted to Rp4.02 Trillion, a decrease of 0.02%, or Rp966 million compared to Rp4.02 Trillion in 2020. This decrease was due to other expenses decreasing by 29.59%, or Rp50.39 Billion.

Other Income/(Expenses) - Net

Other income/(expenses) - net in 2021 amounted to Rp150.18 Billion, compared to a negative Rp105.34 Billion in 2020. In 2021 other income - net was mainly due to an increase in fines and claims of 121.59%, or Rp38.75 Billion

Operating profit

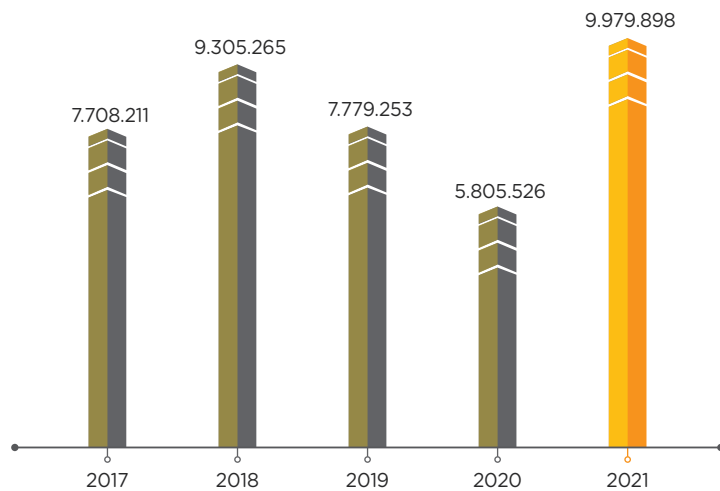
Operating profit is obtained from the gross profit account, which includes general and administrative expenses, selling expenses, and other income (expenses) - net.

Operating profit in 2021 amounted to Rp9.98 Trillion, an increase of 71.90%, or Rp4.17 compared to Rp5.80 Trillion in 2020.



Perkembangan Laba Usaha 2017-2021 (Rp Juta)

Operating Profit Development 2017-2021 (Rp-million)



Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp226,34 Miliar, turun 20,38% atau setara dengan Rp57,94 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp284,28 Miliar.

Financial Income

The Company's financial income in 2021 amounted to Rp226.34 Billion, a decrease of 20.38%, or Rp57.94 Billion compared to Rp284.28 Billion in 2020.

Biaya Keuangan

Biaya Keuangan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Financial Expenses

Financial Expenses per account can be seen in the table below.

Biaya Keuangan Financial Expenses	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pinjaman Bank jangka pendek Short -Term Loan	769.174	1.767.177	(998.003)	(56,47)
Utang Obligasi Bonds Payable	648.074	621.520	26.554	4,27
Pinjaman jangka panjang Long -Term Loan	523.759	453.672	70.087	15,45
Biaya bank dan pinjaman Bank and Loan Cost	63.823	80.284	(16.461)	(20,50)
Kerugian/(Keuntungan) Selisih kurs atas Pinjaman Exchange Differences Loss/(Gain) on Borrowing	29.802	34.058	(4.256)	(12,50)
Pinjaman non-bank Non-Bank Loan	12.862	18.638	(5.776)	(30,99)
Jumlah biaya keuangan Total Financial Expenses	2.047.494	2.975.349	(927.855)	(31,18)

Biaya keuangan tahun 2021 sebesar Rp2,05 Triliun, turun 31,18% atau setara dengan Rp927,86 Miliar dibandingkan biaya keuangan tahun 2020 sebesar Rp2,98 Triliun. Penurunan ini disebabkan total pinjaman berbunga kepada kreditur tahun 2021 sebesar Rp31,32 Triliun lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp36,68 Triliun.

Financial Expenses in 2021 amounted to Rp2.05 Trillion, a decrease of 31.18%, or Rp927.86 Billion compared to Rp2.98 Trillion in 2020. This decrease was due to the total interest-bearing loans to creditors in 2021 of Rp31.32 Trillion being lower than Rp36.68 Trillion in 2020.

Bagian atas Laba (Rugi) Bersih dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Bagian atas rugi bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama tahun 2021 sebesar Rp296,02 Miliar, meningkat 24,96% atau setara dengan Rp59,13 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp236,89 Miliar.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan didapatkan dari akun laba usaha yang diakumulasi dengan pendapatan keuangan, biaya keuangan, serta bagian atas rugi bersih dari asosiasi dan entitas ventura bersama.

Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp8,45 Triliun, meningkat 152,28% atau setara dengan Rp5,10 Triliun dibandingkan laba sebelum pajak penghasilan tahun 2020 sebesar Rp3,35 Triliun.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp3,32 Triliun, meningkat 223,67% atau setara dengan Rp2,29 Triliun dibandingkan beban pajak penghasilan tahun 2020 sebesar Rp1,02 Triliun. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan laba sebelum pajak sebesar 152,28% atau setara Rp5,10 Triliun.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan merupakan laba bersih Perusahaan yang didapatkan dari akun laba sebelum pajak penghasilan yang diakumulasi dengan beban pajak penghasilan.

Laba tahun berjalan tahun 2021 sebesar Rp5,13 Triliun, meningkat 120,79% atau setara dengan Rp2,81 Triliun dibandingkan laba tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp2,32 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan pencapaian sebagai berikut:

1. Nilai penjualan dan pendapatan lainnya meningkat 9,35%.
2. Biaya keuangan tahun 2021 lebih rendah 31,18% dibandingkan realisasi tahun 2020.
3. Bagian atas laba bersih entitas asosiasi tahun 2021 meningkat 24,96% dibandingkan realisasi tahun 2020.

Share on Net Losses of Associates and Joint Ventures

The share of Net Losses of Associates and Joint Ventures in 2021 amounted to Rp296.02 Billion, an increase of 24.96%, or Rp59.13 Billion compared to Rp236.89 Billion in 2020.

Profit Before Income Tax

Profit Before Income Tax is derived from the operating profit account, an accumulation of financial income, financial expenses, and share of net losses of associates and joint venture entities.

Profit Before Income Tax in 2021 was Rp8.45 Trillion, an increase of 152.28%, or Rp5.10 Trillion compared to Rp3.35 Trillion in 2020.

Income Tax Expense

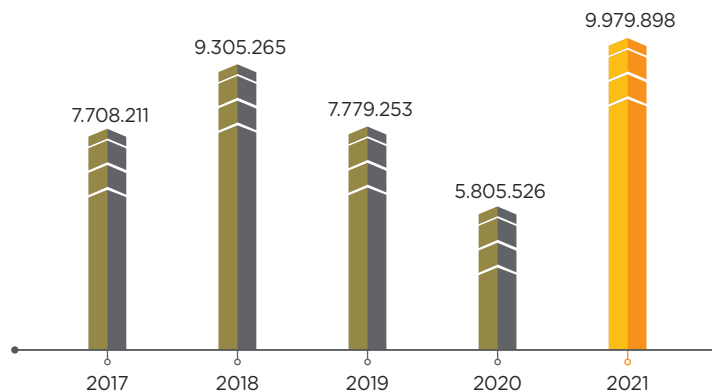
Income Tax Expense in 2021 amounted to Rp3.32 Trillion, an increase of 223.67%, or Rp2.29 Trillion compared to Rp1.02 Trillion in 2020. This increase was due to the increase in profit before income tax of 152.28%, or Rp5.10 Trillion.

Profit for the Year

Profit for the Year is the Company's net profit obtained from the profit before income tax account, accumulated with income tax expense.

Profit for the Year in 2021 amounted to Rp5.13 Trillion, an increase of 120.79%, or Rp2.81 Trillion compared to Rp2.33 Trillion in 2020. This increase is due to the following achievements:

1. The total sales and other income increased by 9.35%.
2. Financial costs in 2021 were 31.18% lower than the realization in 2020.
3. The share of net revenues of associates in 2021 increased by 24.96% compared to the realization in 2020.

**Perkembangan Laba Tahun Berjalan 2017-2021 (Rp Juta)**
Profit Progress for 2017-2021 (Rp-million)**Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain**

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Other Comprehensive Income/(Loss)

Other Comprehensive Income/(Loss) per account can be seen in the table below:

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income/(Loss)	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Items That Will Be Reclassified To Profit Or Loss				
Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak Difference In Foreign Currency Arising From the Translation of the Financial Statements of Subsidiaries	9.078	12.787	(3.709)	(29,01)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Items That Will Not Be Reclassified To Profit Or Loss				
Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Remeasurement Loss on Defined Benefit Plans	(64.188)	(496.372)	432.184	(87,07)
Lainnya Others	32.584	10.496	22.088	210,44
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax Benefit	69.118	(11.275)	80.393	713,02
	37.514	(497.151)	534.665	107,55
Total Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Total Other Comprehensive (Loss)/Income for the Year After Tax	46.592	(484.364)	530.956	109,62

Total penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak tahun 2021 sebesar Rp46,59 Miliar, meningkat 109,62% atau setara dengan Rp530,96 Miliar dibandingkan Total rugi penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak tahun 2020 sebesar Rp484,36 Miliar.

Total Profit/Loss and Other Comprehensive Income for the Current Year After Tax in 2021 amounted to Rp49,59 Billion, an increase of 109.62%, or Rp530.96 Billion compared to Rp484.36 Billion in 2020.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan didapatkan dari akun laba tahun berjalan yang diakumulasikan dengan laba (rugi) komprehensif lain setelah pajak.

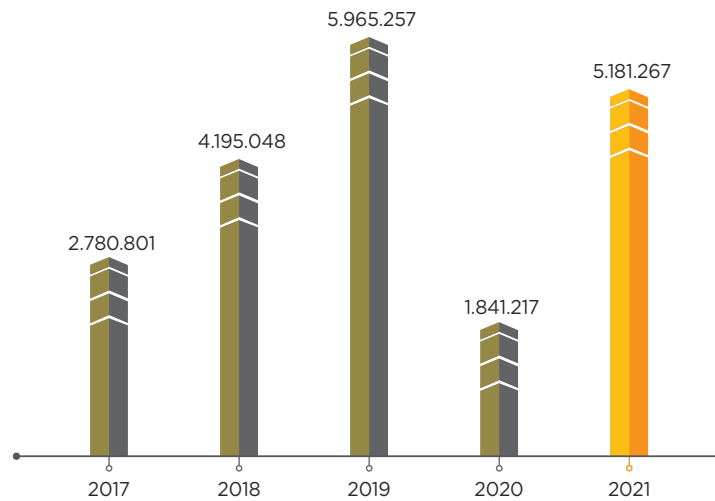
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun 2021 sebesar Rp5,18 Triliun, meningkat 181,40% atau setara dengan Rp3,34 Triliun dibandingkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp1,84 Triliun.

Total Comprehensive Income for the Year

Total Comprehensive Income for the Year is obtained from the current year's profit account, accumulated with other comprehensive income (loss) after tax.

Total Comprehensive Income for the Year for 2021 was Rp5.18 Trillion, an increase of 181.40%, or IDR 3.34 Trillion compared to Rp1.84 Trillion in 2020.

Perkembangan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 2017-2021 (Rp Juta) Progress of Total Comprehensive Income for 2017-2021 (Rp-million)



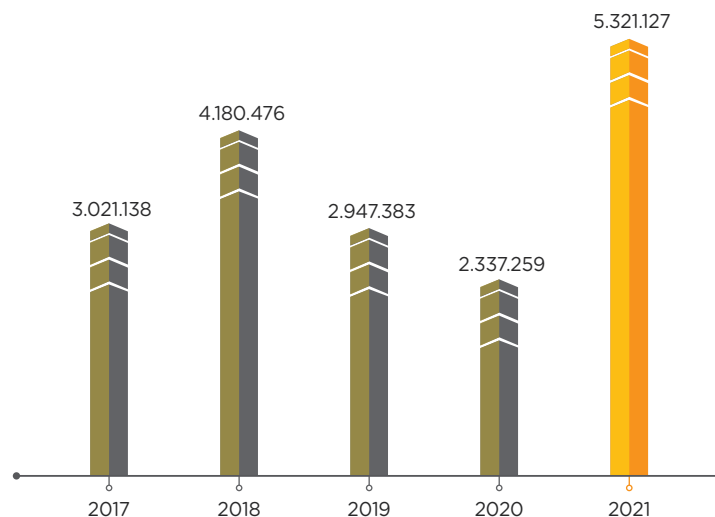
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2021 sebesar Rp5,32 Triliun, meningkat 27,67% atau setara dengan Rp2,98 Triliun dibandingkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2020 sebesar Rp2,34 Triliun.

Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent

Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity in 2021 amounted to Rp5.32 Trillion, an increase of 27.67%, or Rp2.98 Trillion compared to Rp2.34 Trillion in 2020.

Perkembangan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 2017-2021 (Rp Juta) Progress of Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity for 2017-2021 (Rp-million)





Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

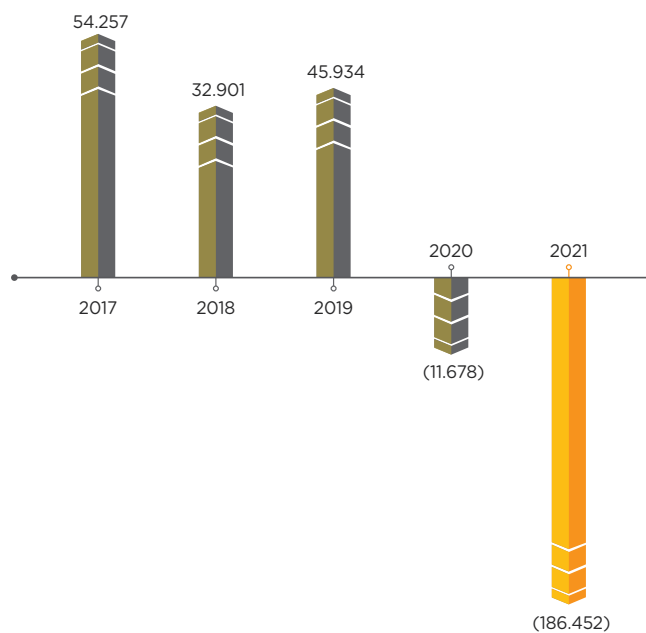
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2021 negatif sebesar Rp186,45 Miliar, turun 1496,61% atau setara dengan negatif Rp174,77 Miliar dibandingkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2020 sebesar Rp11,68 Miliar.

Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests in 2021 was negative Rp186.45 Billion, a decrease of 1,496.61%, or negative Rp174.77 Billion compared to Rp11.68 Billion in 2020.

Perkembangan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali 2017-2021 (Rp Juta)

Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests for 2017-2021 (Rp-million)



Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

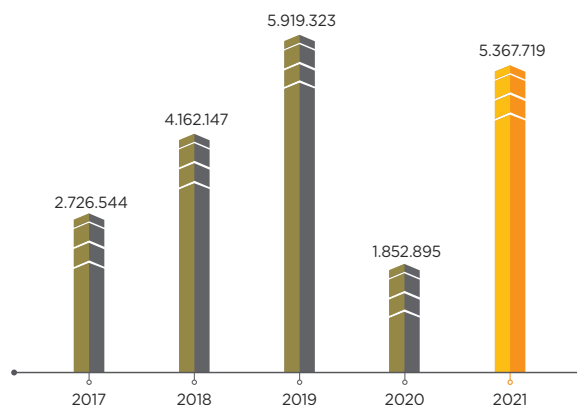
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2021 sebesar Rp5,37 Triliun, meningkat 189,69% atau setara dengan Rp3,51 Triliun dibandingkan total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2020 sebesar Rp1,85 Triliun.

Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent

Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity in 2021 amounted to Rp5.37 Trillion, an increase of 189.69%, or Rp3.51 Trillion compared to Rp1.85 Trillion in 2020.

Perkembangan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 2017-2021 (Rp Juta)

Progress of Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity for 2017-2021 (Rp-million)



Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

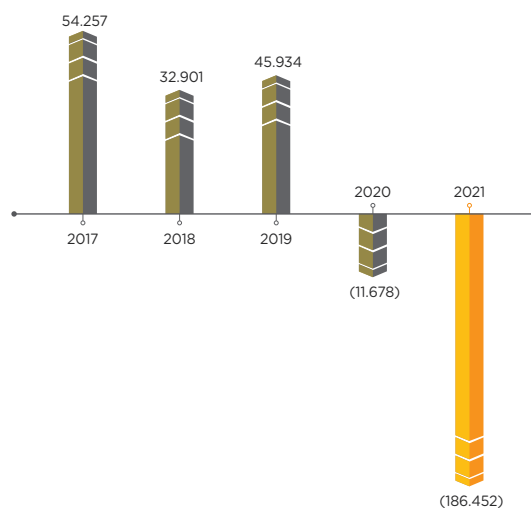
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2021 negatif sebesar Rp186,45 Miliar, turun 1.496,61% atau setara dengan negatif Rp174,77 Miliar dibandingkan total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2020 sebesar Rp11,68 Miliar.

Total Comprehensive Income Attributable to Non-Controlling Interests

Total Comprehensive Income Attributable to Non-Controlling Interests in 2021 was negative Rp186.45 Billion, a decrease of 1,496.61%, or negative Rp174.77 Billion compared to Rp11.68 Billion in 2020.

Perkembangan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali 2017-2021 (Rp Juta)

Development of Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interests for 2017-2021 (Rp-million)



Laba/Rugi per Saham - Dasar dan Dilusian

Laba/rugi bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Earnings/Loss per Share - Basic and Diluted

Basic earnings/loss per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

For purposes of calculating diluted earnings per share, the Company adjusts the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the parent entity and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all diluted potential ordinary shares.



Berikut disampaikan perhitungan laba per saham - dasar dan dilusian tahun 2020 dan 2021:

The table below shows the calculation of Earnings per Share - Basic and Diluted for 2020 and 2021:

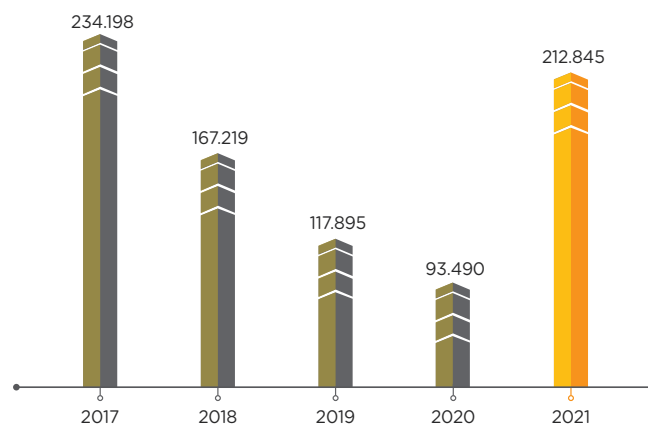
Laba per Saham - Dasar Earnings/Loss per Share - Basic	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rp Juta) Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity (Rp-Milion)	5.321.127	2.337.259	2.983.868	127,67
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (lembar saham) Weighted average number of ordinary shares outstanding (shares)	25.000.000	25.000.000	-	-
Jumlah laba per saham - dasar dan dilusian (Rupiah penuh/lembar saham) Total earnings per share - basic and diluted (full Rupiah/share)	212.845	93.490	119.355	127,67

Laba per saham - dasar dan dilusian tahun 2021 sebesar Rp212.845 per lembar saham, meningkat 127,67% atau setara dengan Rp119.355 per lembar saham dibandingkan laba per saham - dasar dan dilusian tahun 2020 sebesar Rp93.490 per lembar saham.

Earnings per share - basic and diluted in 2021 amounted to Rp212,845 per share, an increase of 127.67%, or Rp119,355 per share compared to Earnings per Share - Basic and Diluted in 2020 of Rp93,490 per share.

Perkembangan Laba per Saham - Dasar 2017-2021 (Rp/lembar saham)

Earnings per Share Development - Basic for 2017-2021 (Rp/share)



Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statements of Cash Flows

“Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2021 mencapai Rp17,45 Triliun, mengalami peningkatan 40,69% dibandingkan dengan kas setara kas pada akhir tahun 2020 sebesar Rp12,41 Triliun”

“The balance of cash and cash equivalents at the end of 2021 reached Rp17.45 Trillion, an increase of 40.69% compared to Rp12.41 Trillion at the end of 2020 of”

Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling likuid, sehingga semakin besar nilainya maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada waktu dan periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi tiga kegiatan penting yaitu: kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Cash is one of the most liquid asset groups, so the greater the value, the smoother the Company's finances will be. While the cash flow statement is a financial report that contains cash receipts and disbursements in a company at a certain time and period. The cash flow statements are grouped into three important activities: operating, investing and financing activities.

Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flows	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	14.517.293	16.076.203	(1.558.910)	(9,70)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(3.007.701)	(2.957.883)	(49.818)	1,68
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Funding Activities	(6.457.203)	(12.746.973)	6.289.770	(49,34)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	5.052.389	371.347	4.681.042	1.260,56
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas Effects of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	(4.602)	60.775	(65.377)	(107,57)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash Balance and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	12.405.518	11.973.396	432.122	3,61
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash Balance and Cash Equivalents at the End of the Year	17.453.305	12.405.518	5.047.787	40,69

Pada akhir tahun 2021, Perusahaan mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp17,45 Triliun, meningkat 40,69% atau setara dengan Rp5,05 Triliun dibandingkan akhir tahun 2020 sebesar Rp12,41 Triliun, yang terutama disebabkan oleh tingginya penerimaan kas dari pelanggan.

At the end of 2021, the Company recorded cash and cash equivalents of Rp17.45 Trillion, an increase of 40.69% or equivalent to Rp5.05 Trillion compared to the end of 2020 of Rp12.41 Trillion, which was mainly due to higher cash receipts from customers.



Kinerja arus kas Perusahaan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The Company's cash flow performance in 2021 compared to 2020 is as follows:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2020-2021 (Rp Juta)

Cash Flows from Operating Activities 2020-2021 (Rp-million)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan Kas dari Pelanggan Receipts from Customers	55.744.116	46.565.013	9.179.103	19,71
Penerimaan Subsidi Pupuk dari Pemerintah Indonesia Receipt of Fertilizer Subsidy from the Government of Indonesia	24.463.583	30.969.079	(6.505.496)	(21,01)
Penerimaan Pendapatan Keuangan Receipts from Finance Income	228.471	284.282	(55.811)	(19,63)
Penerimaan Restitusi Pajak Receipts from Tax Restitutions	512.368	866.984	(354.616)	(40,90)
Pembayaran Kelebihan Subsidi kepada Pemerintah Indonesia Payment of Excess Subsidy to the Government of Indonesia	(126.633)	-	(126.633)	-
Pembayaran kepada Pemasok Payment to Suppliers	(57.329.334)	(52.920.459)	(4.408.875)	8,33
Pembayaran Bunga dan Biaya Transaksi Utang Obligasi Payment of Interest and Bonds Payable Transaction Cost	(2.019.442)	(3.081.993)	1.062.551	(34,48)
Pembayaran Kepada Karyawan Payment to Employees	(5.718.966)	(5.525.230)	(193.736)	3,51
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Payments of Corporate Income Tax	(1.236.870)	(1.081.473)	(155.397)	14,37
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net Cash Flows from Operating Activities	14.517.293	16.076.203	(1.558.910)	(9,70)

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp14,52 Triliun, turun 9,70% atau setara dengan Rp1,56 Triliun dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp16,08 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan meningkatnya pembayaran kepada pemasok karena tingginya biaya bahan baku pembuatan pupuk NPK.

Net Cash Flows Obtained from Operating Activities in 2021 amounted to Rp14.52 Trillion, a decrease of 9.70%, or Rp1.56 Trillion compared to Rp16.08 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to an increase in payments to suppliers due to the high cost of raw materials for NPK fertilizers.

Penerimaan Kas dari Pelanggan

Penerimaan kas dari pelanggan tahun 2021 sebesar Rp55,74 Triliun, meningkat 19,71% atau setara dengan Rp9,18 Triliun dibandingkan penerimaan kas dari pelanggan tahun 2020 sebesar Rp46,57 Triliun. Kenaikan ini selaras dengan tingginya nilai penjualan produk sektor komersil.

Cash Receipts from Customers

Cash Receipts from Customers in 2021 amounted to Rp55.74 Trillion, an increase of 19.71%. or Rp9.18 Trillion compared to Rp46.57 Trillion in 2020. This increase was mainly due to the high sales value of commercial sector products.

Penerimaan Subsidi Pupuk dari Pemerintah Indonesia

Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia tahun 2021 sebesar Rp24,46 Triliun, turun 21,01% atau setara dengan Rp6,51 Triliun dibandingkan penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia tahun 2020 sebesar Rp30,97 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penyesuaian alokasi penyaluran pupuk bersubsidi serta perubahan administrasi pennebusan pupuk di kios pelanggan.

Penerimaan Pendapatan Keuangan

Penerimaan pendapatan keuangan tahun 2021 sebesar Rp228,47 Miliar, turun 19,63% atau setara dengan Rp55,81 Miliar dibandingkan penerimaan pendapatan keuangan tahun 2020 sebesar Rp284,28 Miliar.

Penerimaan Restitusi Pajak

Penerimaan restitusi pajak tahun 2021 sebesar Rp512,37 Miliar, turun 40,90% atau setara dengan Rp354,62 Miliar dibandingkan penerimaan restitusi pajak tahun 2020 sebesar Rp866,98 Miliar.

Pembayaran Kelebihan Subsidi kepada Pemerintah Indonesia

Pembayaran kelebihan subsidi kepada Pemerintah Indonesia tahun 2021 sebesar Rp126,63 Miliar, namun di tahun 2020 tidak terdapat pembayaran kelebihan subsidi kepada Pemerintah Indonesia oleh Perusahaan.

Pembayaran Kepada Pemasok

Pembayaran kepada Pemasok tahun 2021 sebesar Rp57,33 Triliun, meningkat 8,33% atau setara dengan Rp4,41 Triliun dibandingkan Pembayaran kepada Pemasok tahun 2020 sebesar Rp52,92 Triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan Penurunan ini terutama disebabkan tingginya biaya bahan baku pembuatan pupuk NPK.

Pembayaran Bunga dan Biaya Transaksi Utang Obligasi

Pembayaran bunga dan biaya transaksi utang obligasi tahun 2021 sebesar Rp2,02 Triliun, turun 34,48% atau setara dengan Rp1,06 Triliun dibandingkan pembayaran bunga dan biaya transaksi utang obligasi tahun 2020 sebesar Rp3,08 Triliun. Penurunan ini seiring lebih rendahnya pinjaman berbunga tahun 2021 sebesar Rp31,32 Triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp36,68 Triliun.

Pembayaran Kepada Karyawan

Pembayaran kepada Karyawan tahun 2021 sebesar Rp5,72 Triliun, meningkat 3,51% atau setara dengan Rp193,74 Miliar dibandingkan pembayaran kepada Karyawan tahun 2020 sebesar Rp5,53 Triliun.

Pembayaran Pajak Penghasilan Badan

Pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar Rp1,24 Triliun, meningkat 14,37% atau setara dengan Rp155,40 Miliar dibandingkan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp1,08 Triliun.

Receipt of Fertilizer Subsidy from the Government of Indonesia

The Receipt of Fertilizer Subsidy from the Government of Indonesia in 2021 amounted to Rp24.46 Trillion, a decrease of 21.01%, or Rp6.51 Trillion compared to Rp30.97 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to adjustments in the allocation of subsidized fertilizer distribution as well as changes in the administration of fertilizer redemption at customer kiosks.

Receipts from Financial Income

Receipts from Financial Income in 2021 amounted to Rp228.47 Billion, a decrease of 19.63%, or Rp55.81 Billion compared to Rp284.28 Billion in 2020.

Receipts from Tax Restitutions

Receipts from Tax Restitutions in 2021 amounted to Rp512.37 Billion, a decrease of 40.90%, or Rp354.62 Billion compared to Rp866.98 Billion in 2020.

Payment of Excess Subsidy to the Government of Indonesia

Payment of Excess Subsidy to the Government of Indonesia in 2021 amounted to Rp126.63 Billion, but in 2020 there was no payment of excess subsidy to the Government of Indonesia by the Company.

Payments To Suppliers

Payments to Suppliers in 2021 amounted to Rp57.33 Trillion, an increase of 8.33%, or Rp4.41 Trillion compared to Rp52.92 Trillion in 2020. This increase was mainly due to the higher cost of raw materials for NPK fertilizers.

Payments of Interest and Bonds Payable Transaction Costs

Payments of Interest and Bonds Payable Transaction Costs in 2021 amounted to Rp2.02 Trillion, a decrease of 34.48%, or Rp1.06 Trillion compared to Rp3.08 Trillion in 2020 of This decrease was in due to lower interest-bearing loans in 2021 of Rp31.32 Trillion compared to Rp36.68 Trillion in 2020.

Payments to Employees

Payments to Employees in 2021 amounted to Rp5.72 Trillion, an increase of 3.51%, or Rp193.74 Billion compared to Rp5.53 Trillion in 2020.

Payment of Corporate Income Tax

Payment of Corporate Income Tax in 2021 amounted to Rp1.24 Trillion, an increase of 14.37%, or Rp155.40 Billion compared to Rp1.08 Trillion in 2020.



Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investment Activities

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2020-2021 (Rp Juta)

Cash Flows from Investing Activities 2020-2021
(Rp-million)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi Receipt from Dividends from Associates	8.397	9.945	(1.548)	(15,57)
Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	(2.999.502)	(2.978.545)	(20.957)	0,70
Pembelian Properti Investasi Purchase of Investment Properties	-	(13.112)	13.112	-
Penambahan Kepemilikan pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Additional Ownership on Associates and Joint Ventures	(25.160)	(33.861)	8.701	(25,70)
Penerimaan Atas Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sale on Fixed Assets	8.564	57.690	(49.126)	(85,16)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Net Cash Flows Used in Investing Activities	(3.007.701)	(2.957.883)	(49.818)	1,68

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2021 sebesar minus Rp3,01 Triliun, turun 1,68% atau setara dengan Rp49,82 Miliar dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2020 sebesar minus Rp2,96 Triliun.

Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi

Penerimaan dividen dari entitas asosiasi tahun 2021 sebesar Rp8,40 Miliar, turun 15,57% atau setara dengan Rp1,55 Miliar dibandingkan penerimaan dividen dari entitas asosiasi tahun 2020 sebesar Rp9,95 Miliar.

Pembelian Aset Tetap

Pembelian aset tetap tahun 2021 sebesar Rp3,00 Triliun, meningkat 0,70% atau setara dengan Rp20,96 Miliar dibandingkan pembelian aset tetap tahun 2020 sebesar Rp2,98 Triliun.

Penambahan Kepemilikan pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi dan ventura bersama tahun 2021 sebesar Rp25,16 Miliar, turun 25,70% atau setara dengan Rp8,70 Miliar dibandingkan penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi dan ventura bersama tahun 2020 sebesar Rp33,86 Miliar.

Penerimaan Atas Penjualan Aset Tetap

Penerimaan atas penjualan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp8,56 Miliar, turun 85,16% atau setara dengan Rp49,13 Miliar dibandingkan penerimaan atas penjualan aset tetap tahun 2020 sebesar Rp57,69 Miliar.

Net Cash Flow Used for Investment Activities in 2021 amounted to minus Rp3.01 Trillion, an increase of 1.68%, or Rp49.82 Billion compared minus Rp2.96 Trillion in 2020.

Dividend Receipts from Associated Entities

Dividend Receipts from Associated Entities in 2021 amounted to Rp8.40 Billion, a decrease of 15.57%, or Rp1.55 Billion compared to Rp9.95 Billion in 2020.

Purchase of Fixed Asset

Purchase of Fixed Assets in 2021 amounted to Rp3.00 Trillion, an increase of 0.70%, or Rp20.96 Billion compared to Rp2.98 Trillion in 2020.

Additional Ownership in Associates and Joint Ventures

Additional Ownership in Associates and Joint Ventures in 2021 amounted to Rp25.16 Billion, a decrease of 25.70%, or Rp8.70 Billion compared to Rp33.86 Billion in 2020.

Sales of Fixed Assets

Sales of Fixed Assets in 2021 amounted to Rp8.56 Billion, a decrease of 85.15%, or Rp49.13 Billion compared to Rp57.69 Billion in 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2020-2021 (Rp Juta)

Cash Flows from Financing Activities 2020-2021
(Rp-million)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek Proceeds from Short Term Bank Loans	14.684.012	20.165.305	(5.481.293)	(27,18)
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Repayment of Short Term Bank Loans	(15.952.372)	(31.592.649)	15.640.277	49,51
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Proceeds from Non-Current Borrowings	2.680.676	23.007.216	(20.326.540)	(88,35)
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang Repayments of Non-Current Borrowings	(9.801.879)	(21.502.817)	11.700.938	54,42
Pembayaran Dividen kepada Entitas Non Pengendali Payment of Dividends to Non- Controlling Interest	(16.078)	(10.556)	(5.522)	(52,31)
Penerimaan dari Penerbitan Obligasi Proceeds from Bonds Issuance	2.750.000	2.432.690	317.310	13,04
Pembayaran Utang Obligasi Repayments of Bonds Payable	-	(4.086.000)	4.086.000	-
Pembayaran Liabilitas Sewa Repayment of Lease Liabilities	(213.532)	(186.662)	(26.870)	(14,40)
Pembayaran Dividen Kas Payment of Dividends	(588.030)	(973.500)	385.470	39,60
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Net Cash Flows used in Financing Activities	(6.457.203)	(12.746.973)	6.289.770	49,34

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2021 sebesar minus Rp6,46 Triliun, lebih rendah dari arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2020 sebesar Rp12,75 Triliun terutama disebabkan pada tahun 2020 PTPI melunasi utang obligasi dan kredit investasi jangka panjang.

The net cash flows used for financing activities in 2021 was minus Rp6.46 Trillion, lower than the Rp12.75 Trillion cash flows used for financing activities in 2020, mainly due to PTPI repaying bonds and long-term investment loans in 2020.

Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek

Penerimaan pinjaman bank jangka pendek tahun 2021 sebesar Rp14,68 Triliun lebih rendah 27,18% atau setara dengan Rp5,48 Triliun dibandingkan penerimaan pinjaman bank jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp20,17 Triliun. Lebih rendahnya penarikan pinjaman bank jangka pendek terutama disebabkan meningkatnya kinerja Perusahaan sehingga mampu menutupi kebutuhan operasional dengan menggunakan modal yang dihasilkan dari keuntungan bisnis.

Proceeds from Short Term Bank Loans

Proceeds from Short Term Bank Loans in 2021 amounted to Rp14.68 Trillion, a decrease of 27.18%, or Rp5.48 Trillion compared to Rp20.17 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to the improvement in the Company's performance to cover operational needs using capital generated from business profits.

Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pembayaran pinjaman bank jangka pendek tahun 2021 sebesar Rp15,95 Triliun, turun 49,51% atau setara dengan Rp15,64 Triliun dibandingkan pembayaran pinjaman bank jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp31,59 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan pada tahun 2021 Perusahaan tidak menarik pinjaman sebesar yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Repayment of Short Term Bank Loans

Repayment of Short Term Bank Loans in 2021 amounted to Rp15.95 Trillion, a decrease of 49.51%, or Rp15.64 Trillion compared to Rp31.59 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to the fact that in 2021 the Company did not have as many loans as in previous years.



Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang

Penerimaan pinjaman jangka panjang tahun 2021 sebesar Rp2,68 Triliun, turun 88,35% atau setara dengan Rp20,33 Triliun dibandingkan penerimaan pinjaman jangka panjang tahun 2020 sebesar Rp23,01 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan pada tahun 2021 Perusahaan menyesuaikan aktivitas pendanaan dengan aktivitas investasi pengembangan.

Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang

Pembayaran pinjaman jangka panjang tahun 2021 sebesar Rp9,80 Triliun, turun 54,42% atau setara dengan Rp11,70 Triliun dibandingkan pembayaran pinjaman jangka panjang tahun 2020 sebesar Rp21,50 Triliun. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perusahaan telah melunasi sebagian besar pinjaman jangka panjang pada tahun sebelumnya.

Pembayaran Dividen Kepada Entitas Non-Pengendali

Pembayaran Dividen Kepada Entitas Non-Pengendali tahun 2021 sebesar Rp16,08 Miliar, meningkat 52,31% atau setara dengan Rp5,52 Miliar dibandingkan Pembayaran Dividen Kepada Entitas Non-Pengendali tahun 2020 sebesar Rp10,56 Miliar. Kenaikan ini disebabkan membaiknya kinerja Anak Perusahaan sehingga mampu membagikan dividen lebih besar pada tahun 2021.

Penerimaan dari Penerbitan Obligasi

Penerimaan dari Penerbitan Obligasi tahun 2021 sebesar Rp2,75 Triliun, meningkat 13,04% atau setara dengan Rp317,31 Miliar dibandingkan Penerimaan dari Penerbitan Obligasi tahun 2020 sebesar Rp2,43 Triliun. Kenaikan ini telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka memperkuat struktur modal.

Pembayaran Utang Obligasi

Pada tahun 2021 tidak terdapat Pembayaran Utang Obligasi, namun pada Tahun 2020 terdapat Pembayaran Utang Obligasi jatuh tempo sebesar Rp4,09 Triliun.

Pembayaran Liabilitas Sewa

Pembayaran Liabilitas Sewa tahun 2021 sebesar Rp213,53 Miliar, meningkat 14,40% atau setara dengan Rp26,87 Miliar dibandingkan Pembayaran Liabilitas Sewa tahun 2020 sebesar Rp186,66 Miliar.

Pembayaran Dividen Kas

Pembayaran Dividen Kas tahun 2021 sebesar Rp588,03 Miliar, turun 39,60% atau setara dengan Rp385,47 Miliar dibandingkan Pembayaran Dividen Kas tahun 2020 sebesar Rp973,50 Miliar.

Proceeds from Non-Current Borrowings

Proceeds from Non-Current Borrowings in 2021 amounted to Rp2.68 Trillion, a decrease of 88.35%, or Rp20.33 Trillion compared to Rp23.01 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to in 2021 the Company prioritizing improving operational performance.

Repayment of Non-Current Borrowings

Repayment of Non-Current Borrowings in 2021 amounted to Rp9.80 Trillion, a decrease of 54.42%, or Rp11.70 Trillion compared to Rp21.50 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to the Company having repaid most of its long-term loans in the previous year.

Payment of Dividends to Non-Controlling Entities

Payment of Dividends to Non-Controlling Entities in 2021 amounted to Rp16.08 Billion, an increase of 52.31%, or Rp5.52 Billion compared to Rp10.56 Billion in 2020. This increase was due to the improved performance of the Subsidiaries allowing them to distribute larger dividends in 2021.

Proceeds from Bonds Issuance

Proceeds from Bonds Issuance in 2021 amounted to Rp2.75 Trillion, an increase of 13.04%, or Rp317.31 Billion compared to Rp2.43 Trillion in 2020. This increase was planned to meet the need to strengthen the capital structure.

Repayments of Bonds Payable

In 2021 there will be no repayments of bonds payable, compared to Rp4.09 Trillion in 2020.

Repayments of Lease Liabilities

Repayments of Lease Liabilities in 2021 amounted to Rp213.53 Billion, an increase of 14.40%, or Rp26.87 Billion compared to Rp186.66 Billion in 2020.

Payment of Dividend

Payment of Dividend in 2021 amounted to Rp588.03 Billion, a decrease of 39.60%, or Rp385.47 Billion compared to Rp973.50 Billion in 2020.

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas serta Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Dengan akumulasi pada Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, serta Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan seperti yang telah diuraikan di atas, Kas dan Setara Kas di sepanjang tahun 2021 mengalami kenaikan 1260,56% atau sebesar Rp4,68 Triliun. Dengan memperhitungkan Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas sebesar Rp4,60 Miliar, Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2021 sebesar Rp17,45 Triliun.

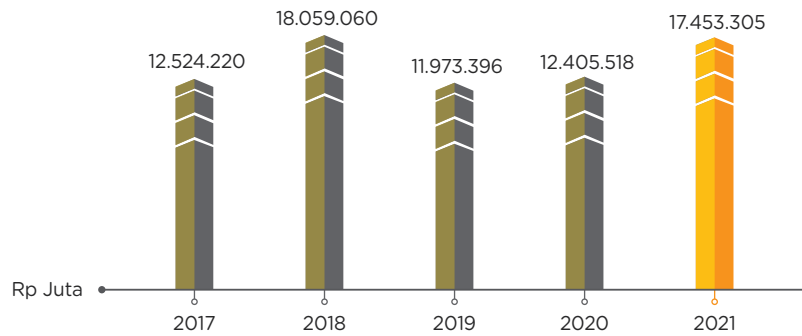
Perkembangan Kas dan Setara Kas Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents And Cash and Cash Equivalents at the End of Year

With the accumulation of Cash Flows from Operating Activities, Cash Flows from Investing Activities, and Cash Flows from Financing Activities as described above, Cash and Cash Equivalents in 2021 increased by 1260,56%, or Rp4.68 Trillion. Taking into account the Effect of Changes in Exchange Rates on Cash and Cash Equivalents of Rp4.60 Billion, Cash and Cash Equivalents at the end of 2021 amounted to Rp17.45 Trillion.

Development of the Company's Cash and Cash Equivalents can be seen in the chart below.

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2017-2021 (Rp Juta)
Development of Cash and Cash Equivalents at the End of 2017-2021 (Rp-million)





KEMAMPUAN PERUSAHAAN MENGHASILKAN LABA

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu melalui rasio Marjin Laba Bruto atau *Gross Profit Margin* (GPM), Marjin Laba Usaha atau *Operating Profit Margin* (OPM), Marjin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* (NPM), Tingkat Imbalan Kepada Pemegang Saham atau *Return on Equity* (ROE), dan Tingkat Imbalan Investasi atau *Return on Investment* (ROI).

Marjin Laba Bruto

GPM digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.

COMPANY CAPABILITY IN GENERATING PROFIT

The Company's ability to generate profits can be measured using profitability ratios, namely the Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Rate of Return to Shareholders or Return on Equity (ROE), and Return on Investment (ROI).

Gross Profit Margin (NPM)

GPM is used to measure the percentage of gross profit to net sales.

$$\text{Marjin Laba Bruto} \\ \text{Gross Profit Margin (GPM)} = \frac{\text{Laba Bruto} \\ \text{Gross Profit}}{\text{Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya} \\ \text{Sales and Other Operating Revenue}} \times 100\%$$

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp Juta) Sales and Other Operating Revenue (Rp Million)	78.603.136	71.877.573	6.725.563	9,36
Laba Bruto (Rp Juta) Gross Profit (Rp Million)	15.133.347	11.121.727	4.011.620	36,07
Marjin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	19,25	15,47	3,78	

Pada tahun 2021 GPM Perusahaan mencapai 19,25%, meningkat 3,78% dibandingkan tahun 2020 sebesar 15,47%. Kenaikan tersebut disebabkan Perusahaan mampu mengoptimalkan penjualan urea sektor komersil dan amoniak yang didukung dengan harga jual yang tinggi.

In 2021 the Company's GPM was 19.25%, an increase of 3.78% compared to 15.47% in 2020. The increase was due to the higher selling price which was utilized optimally by commercial sales.

Marjin Laba Usaha

OPM digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan untuk mengendalikan biaya operasional dalam hubungannya dengan penjualan.

Operating Profit Margin (OPM)

OPM is used to measure the Company's ability to control operating costs in relation to sales.

$$\text{Marjin Laba Usaha} \\ \text{Operating Profit Margin (OPM)} = \frac{\text{Laba Usaha} \\ \text{Operating Profit}}{\text{Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya} \\ \text{Sales and Other Operating Revenue}} \times 100\%$$

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp Juta) Sales and Other Operating Revenue (Rp Million)	78.603.136	71.877.573	6.725.563	9,36
Laba Operasi (Rp Juta) Operating Profit (Rp Million)	9.979.898	5.805.526	4.174.372	71,90
Marjin Laba Operasi (%) Gross Profit Margin (%)	12,70	8,08	4,62	

Pada tahun 2021, nilai OPM Perusahaan mencapai 12,70%, terdapat kenaikan 4,62% dibandingkan tahun 2020 sebesar 8,08%.

In 2021, the Company's OPM value reached 12.70%, an increase of 4.62% compared to 8.08% in 2020.

Marjin Laba Bersih

NPM digunakan untuk mengukur besaran keuntungan bersih yang diperoleh Perusahaan dari hasil penjualan.

Net Profit Margin (NPM)

NPM is used to measure the amount of net profit obtained by the Company from sales.

$$\text{Marjin Laba Bersih} \\ \text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun Berjalan} \\ \text{Net Profit for the Year}}{\text{Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya} \\ \text{Sales and Other Operating Revenue}} \times 100\%$$

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp Juta) Sales and Other Operating Revenue (Rp Million)	78.603.136	71.877.573	6.725.563	9,36
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta) Profit for the Year (Rp Million)	5.134.675	2.325.581	2.809.094	120,79
Marjin Laba Bersih (%) Gross Profit Margin (%)	6,53	3,24	3,30	

Pada tahun 2021, rasio NPM mencapai 6,53%, meningkat 3,30% dibandingkan tahun 2020 sebesar 3,24%. Kenaikan tersebut selain karena disebabkan Perusahaan mampu untuk mengoptimalkan penjualan sektor komersil, Perusahaan mampu untuk menekan biaya keuangan.

In 2021, the NPM ratio was 6.53%, an increase of 3.30% compared to 3.24% in 2020. The increase was not only due to the Company being able to optimize sales in the commercial sector, but the Company being able to reduce financial costs.

Tingkat Imbalan Aset

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengoptimalkan profitabilitas berdasarkan aset yang dimilikinya.

Rate of Return on Assets (ROA)

ROA is a ratio used to measure the Company's ability to optimize profitability based on its assets.

Rumus ROA

ROA formula

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Total Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)	128.463.172	122.495.556	5.967.616	4,87
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) Profit for the Year (Rp-million)	5.134.675	2.325.581	2.809.094	120,79
Tingkat Imbalan Aset (%) Rate of Return on Assets (%)	4,00	1,90	2,10	

Pada tahun 2021, nilai ROA Perusahaan mencapai 4,00%, meningkat 2,10% dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,90%. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya laba tahun berjalan sebesar 120,79%.

In 2021, the Company's ROA was 4.00%, an increase of 2.10% compared to 1.90% in 2020. This increase was mainly due to the increase in profit for the year by 120.79%.

Tingkat Imbalan Kepada Pemegang Saham atau Return on Equity (ROE)

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penghasilan yang tersedia bagi pemilik Perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam Perusahaan.

Rate of Return to Shareholders or Return on Equity (ROE)

ROE is a ratio used to measure the income available to the owners of the Company on the capital invested in the Company.

**Rumus ROE****ROE formula**

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) Profit for the Year (Rp-million)	5.134.675	2.325.581	2.808.540	120,74
Modal Sendiri (Rp-juta) Own Capital (Rp-million)	64.596.489	62.156.426	2.440.063	3,93
Tingkat Imbalan Kepada Pemegang Saham (%) Rate of Return to Shareholders (%)	7,95	3,74	4,21	

Pada tahun 2021, nilai ROE Perusahaan mencapai 7,95%, meningkat 4,21% dibandingkan tahun 2020 sebesar 3,74%. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya laba tahun berjalan sebesar 120,74%.

In 2021, the Company's ROE was 7.95%, an increase of 4.21% compared to 3.74% in 2020. This increase was mainly due to the increase in profit for the current year of 120.74%.

Tingkat Imbalan Investasi atau Return on Investment (ROI)

ROI merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan pada aset yang digunakan untuk operasi Perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan.

Rate of Return on Investment (ROI)

ROI is a ratio used to measure the Company's ability to fund investments in assets used for the Company's operations in order to generate profits.

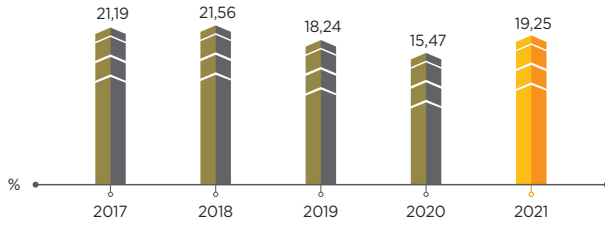
Rumus ROI**ROI formula**

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
EBITDA (Rp Juta) EBITDA (Rp-million)	14.900.374	10.276.809	4.623.565	44,99
Capital Employed (Rp Juta) Capital Employed (Rp-million)	126.280.060	119.842.976	6.437.084	5,37
Tingkat Imbalan Investasi (%) Rate of Return on Investment (%)	11,80	8,58	3,22	

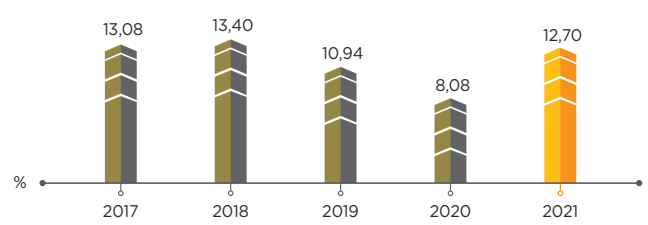
Pada tahun 2021, nilai ROI Perusahaan mencapai 11,80%, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 8,58%. Kenaikan ini disebabkan karena tingginya EBITDA yang meningkat sebesar 44,99% dari tahun 2020.

In 2021, the Company's ROI was 11.80%, an increase compared to 8.58% in 2020. This increase was due to the higher EBITDA that increased by 44.99% from 2020.

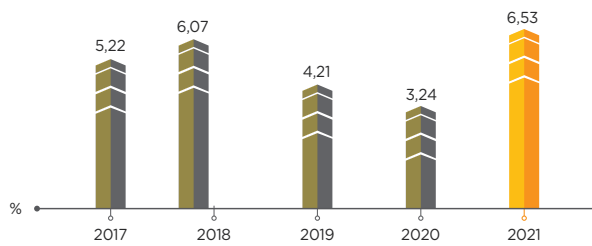
Gross Profit Margin (GPM) 2017-2021 (%)



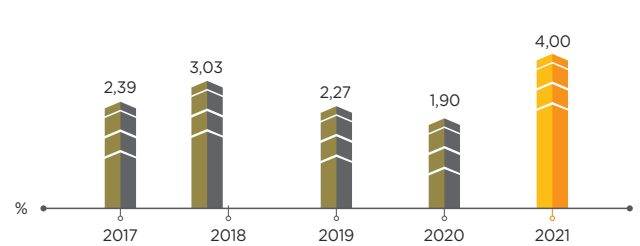
Operating Profit Margin (OPM) 2017-2021 (%)



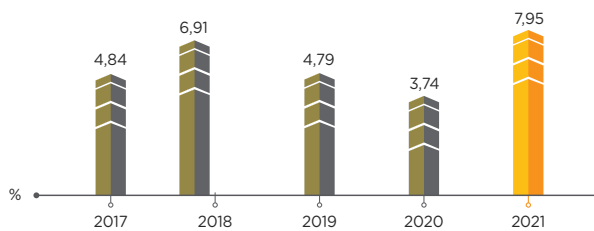
Net Profit Margin (NPM) 2017-2021 (%)



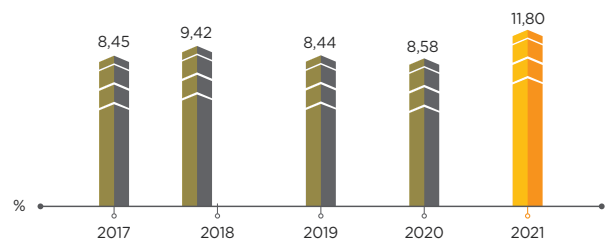
Return on Asset (ROA) 2017-2021 (%)



Return on Equity (ROE) 2017-2021 (%)



Return on Investment (ROI) 2017-2021 (%)





KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek; semakin tinggi rasio likuiditas mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo.

Sedangkan rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk rasio solvabilitas, khususnya rasio utang (*interest bearing & leverage*) terhadap modal sendiri, semakin rendah menunjukkan adanya perbaikan kemampuan Perusahaan untuk melunasi kewajibannya.

Rasio Likuiditas: Mengukur Kemampuan Membayar Kewajiban Jangka Pendek

Rasio Kas = Kas dan Setara Kas : Liabilitas Jangka Pendek

Cash Ratio = Cash and Cash Equivalents : Short-Term Liabilities

Rasio Cepat = (Aset Lancar - Persediaan) : Liabilitas Jangka Pendek

Quick Ratio = (Current Assets - Inventories): Short-Term Liabilities

Rasio Lancar = Aset Lancar : Liabilitas Jangka Pendek

Current Ratio = Current Assets : Short-Term Liabilities

Rasio Likuiditas: Kemampuan Perusahaan Membayar Kewajiban Jangka Pendek

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Kas dan Setara Kas (Rp Juta) Cash and Cash Equivalents (Rp Million)	17.453.305	12.405.518	5.047.787	40,69
Persediaan (Rp Juta) Inventories (Rp Million)	13.910.126	11.634.940	2.275.186	19,55
Aset Lancar (Rp Juta) Current Assets (Rp Million)	44.174.212	38.693.988	5.480.224	14,16
Liabilitas Jangka Pendek (Rp Juta) Current Liabilities (Rp Million)	33.008.039	26.335.318	6.672.721	25,34
Rasio Likuiditas: Liquidity Ratio:				
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	133,83	146,93	(13,10)	
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	91,69	102,75	(11,06)	
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	52,88	47,11	(5,77)	

ABILITY TO PAY DEBT

The Company's ability to meet its obligations can be measured using the liquidity ratio and solvency ratio. Liquidity ratio is a ratio to measure the Company's ability to pay short-term obligations; the higher the liquidity ratio indicates the Company ability to meet its maturing short-term obligations.

The solvency ratio is a ratio that measures the Company's ability to pay all its obligations, both short term and long term. For the solvency ratio, especially the debt ratio (interest bearing & leverage) to equity, the lower ratio an improvement in the Company's ability to pay off its obligations.

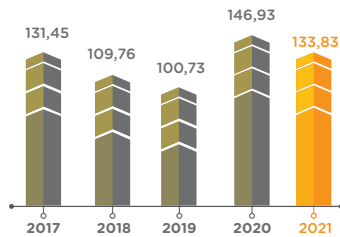
Liquidity Ratio: Measuring Ability to Pay Short-Term Liabilities

Liquidity Ratio: Company's Ability to Pay Short-Term Liabilities

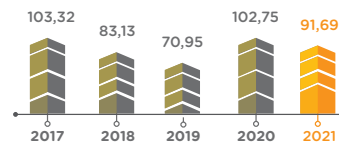
Per 31 Desember 2021, rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas Perusahaan relatif stabil dan dapat di pertahankan.

As of December 31, 2021, the Company's current ratio, quick ratio and cash ratios were relatively stable and can be maintained.

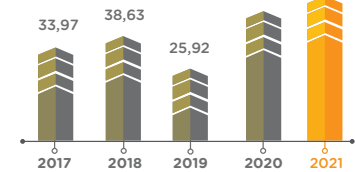
Perkembangan Rasio Lancar Tahun 2017-2021 (%)
Current Ratio Development 2017-2021



Perkembangan Rasio Cepat Tahun 2017-2021 (%)
Quick Ratio Development 2017-2021 (%)



Perkembangan Rasio Kas Tahun 2017-2021 (%)
Cash Ratio Development 2017-2021 (%)



Rasio Solvabilitas: Mengukur Kemampuan Membayar Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Solvabilitas merupakan ukuran kemampuan dalam membayar seluruh utang atau beban keuangan yang dimiliki Perusahaan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan mengukur rasio solvabilitas melalui perhitungan tingkat rasio utang (*Leverage and Interest Bearing*) terhadap modal sendiri, *Debt Service to Coverage Ratio* (DSCR), dan *Interest Coverage Ratio* (ICR).

Solvency Ratio: Measuring Ability to Pay Short-Term and Long-Term Liabilities

Solvency measures the ability to pay all Company debts or financial burdens, for short-term and long-term liabilities. The Company measures the solvency ratio by calculating the debt to equity ratio (*Leverage and Interest Bearing*), *Debt Service to Coverage Ratio* (DSCR), and *Interest Coverage Ratio* (ICR).

Debt to Equity Ratio (DER) = Total Liabilitas : Total Ekuitas

Debt to Equity Ratio (DER) = Total Liabilities : Total Equity

Interest Bearing Debt = Total Pinjaman Berbunga : Total Ekuitas

Interest Bearing Debt = Total Interest Bearing Borrowings : Total Equity

Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) = EBITDA: (Bagian Lancar atas Pinjaman Jk. Panjang tahun sebelumnya+Beban Keuangan)

Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) = EBITDA: (Current Share of previous year Long-Term Loans +Financial Expenses)

Interest Coverage Ratio (ICR) = EBITDA : Beban Keuangan

Interest Coverage Ratio (ICR) = EBITDA : Financial Costs



Rasio Solvabilitas: Kemampuan Perusahaan Membayar Seluruh Kewajiban

Solvency Ratio: Company's Ability to Pay All Liabilities

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
<i>Leverage (%)</i>	78,57	81,84	(3,27)	(4,00)
<i>Interest Bearing Debt (%)</i>	43,53	54,46	(10,93)	(20,07)
<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i> (Kali)	2,20	3,74	(1,53)	(40,91)
<i>Debt Service to Coverage Ratio</i> (DSCR) (%)	278,12	68,53	209,59	
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) (%)	692,53	331,43	361,1	



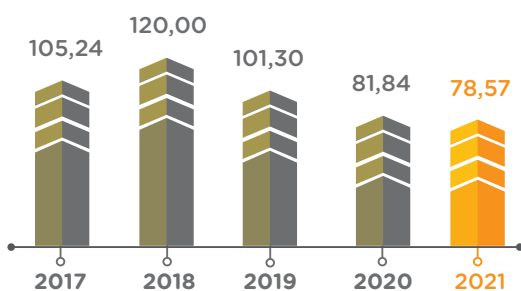
Rasio solvabilitas Perusahaan pada tahun 2021 dalam kondisi memadai yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Debt to Equity Ratio (Leverage dan Interest Bearing)**
Nilai *debt to equity ratio* (DER) *leverage* tahun 2021 sebesar 78,57% turun 3,27% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 81,84%, begitu pun dengan nilai DER *interest Bearing* tahun 2021 sebesar 43,53% yang turun 10,93% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 54,46%. Penurunan tersebut disebabkan pinjaman berbunga tahun 2021 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020.
- 2. Interest Bearing Debt to EBITDA**
Realisasi *interest bearing debt to EBITDA* tahun 2021 menapai 2,20 kali, lebih rendah 1,53 kali dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 3,72 kali. Hal itu menunjukkan kemampuan profitabilitas perusahaan yang lebih baik untuk mengantisipasi kewajiban perusahaan kepada kreditur.
- 3. Debt Service to Coverage Ratio**
Realisasi *debt service to coverage ratio* tahun 2021 mencapai 278,12%, lebih tinggi 209,59% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 68,53%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan profitabilitas perusahaan yang lebih baik untuk melunasi pinjaman berbunga jatuh tempo dan biaya keuangan tahun berjalan.

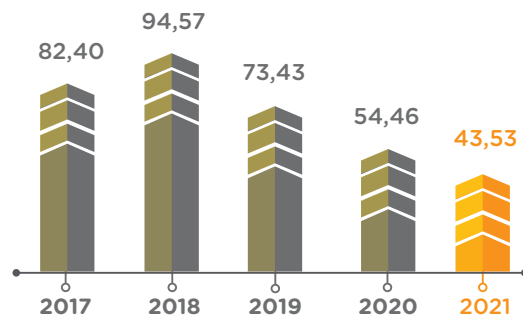
The Company's solvency ratio in 2021 is in an adequate condition as explained below:

- 1. Debt to Equity Ratio (Leverage and Interest Bearing)**
The debt to equity ratio (DER) leverage in 2021 was 78.57%, down by 3.27% compared to 81.84% in 2020, with an DER Interest Bearing value in 2021 of 43.53%, decrease by 10.93% compared to 54.46% in 2020. The decrease was due to lower interest-bearing loans in 2021 compared to 2020.
- 2. Interest Bearing Debt to EBITDA**
Realization of interest bearing debt to EBITDA in 2021 reached 2.20 times, 1.53 times lower than the 3.72 times in 2020. This shows the ability of the company's profitability to better anticipate the Company's obligations to creditors.
- 3. Debt Service to Coverage Ratio**
Realization of the debt service to coverage ratio in 2021 reached 278.12%, 209.59% higher than in 2020's 68.53%. This shows the Company's better profitability ability to pay off interest-bearing loans and finance costs for the current year.

Leverage 2017-2021 (%)
Leverage 2017-2021 (%)

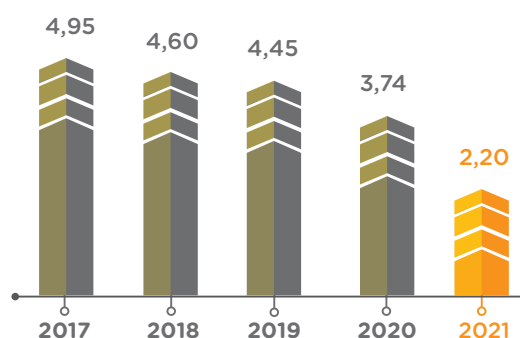


Interest Bearing Debt 2017-2021 (%)
Interest Bearing Debt 2017-2021 (%)



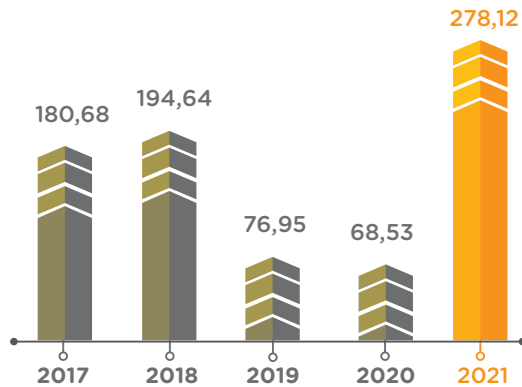
Interest Bearing Debt to EBITDA 2017-2021 (%)

Interest Bearing Debt to EBITDA 2017-2021(%)



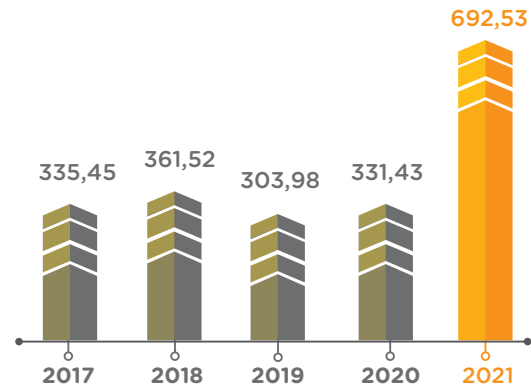
Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) 2017-2021 (%)

Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) 2017-2021 (%)



Interest Coverage Ratio (ICR) 2017-2021 (%)

Interest Coverage Ratio (ICR) 2017-2021 (%)



KEMAMPUAN MEMBAYAR EFEK YANG DITERBITKAN

Berdasarkan peringkat utang yang diterbitkan oleh Fitch Ratings Indonesia pada tahun 2021, Seluruh surat utang Perusahaan mendapat rating AAA (*stable outlook*), hal ini mencerminkan tidak ada masalah atas kemampuan Perusahaan dalam membayar kembali atas efek-efek yang diterbitkan.

ABILITY TO PAY ISSUED SECURITIES

Based on the debt rating issued by Fitch Ratings Indonesia in 2020, all of the Company's debt securities are rated AAA (*stable outlook*), reflecting there is no problem with the Company's ability to repay the securities issued.



Perkembangan Peringkat Efek Securities Rating Progress

Jenis Surat Utang Type of Bonds	2021	2020	Perubahan Changes
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Seri A PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond II Phase II 2021 - Series A	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	N.A	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Seri B PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond II Phase II 2021 - Series B	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	N.A	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Seri C PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond II Phase II 2021 - Series C	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	N.A	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri A (PIHC01ACN1) PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond II Phase I 2017 - Series A (PIHC01ACN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN1) PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond II Phase I 2017 - Series B (PIHC01BCN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A (PIHC01ACN2) PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond II Phase II 2017 - Series A (PIHC01ACN2)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)



Jenis Surat Utang Type of Bonds	2021	2020	Perubahan Changes
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN2) PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond II Phase II 2017 - Series B (PIHC01BCN2)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri A (PIHC02ACN1) PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond I Phase I 2020 - Series A (PIHC02ACN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B (PIHC02BCN1) PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond II Phase I 2020 - Series B (PIHC02BCN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C (PIHC02CCN1) PT Pupuk Indonesia Sustainable Bond II Phase I 2020 - SeriesC (PIHC02CCN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)

Peringkat nasional AAA idn menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan *Fitch Ratings* pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang terendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia.

The AAA idn national rating indicates the highest rating given by Fitch Ratings on the national rating scale for Indonesia. This rating is assigned to issuers or debt securities with the lowest expected default risk relative to other issuers or debt securities in Indonesia.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan perusahaan untuk menagih piutang-piutang yang dimiliki tercermin pada tingkat kolektibilitas piutang atau *Collection Period*. Nilai *Collection Period* yang semakin kecil maka semakin baik, artinya kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang-piutangnya semakin cepat.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY LEVEL

The Company's ability to collect receivables is reflected in the Collection Period. The smaller the Collection Period, the better, meaning that the Company's ability to collect its receivables is getting faster.

$$\text{Collection Period} = \frac{\text{Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya - Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah}}{\text{Piutang Usaha}}$$

Sales and Other Operating Income - Subsidy Reimbursement from the Government
Accounts receivable

Di bawah ini disampaikan *Collection Period* tahun 2020 dan 2021.

Below is the Collection Period for 2020 and 2021.



Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang Accounts Receivable Collectibility Ratio

Perihal Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya tidak termasuk Penggantian Biaya dari Pemerintah Indonesia (Rp-juta) Sales and Other Operating Revenues excluding Reimbursement from the Government of Indonesia	53.344.444	46.165.425	7.179.019	15,55
Piutang Usaha (Rp-juta) Trade Receivable	3.324.666	3.613.966	(289.300)	(8,01)
Rata-rata Hari Pelunasan Piutang (Collection Period) (hari) Average Receivables Repayment Day (Average Collection Period (days))	22,75	28,18	(5,43)	(19,27)

Perusahaan memiliki kebijakan batasan kredit bagi debitur sesuai dengan kemampuan masing-masing pelanggan. Kemampuan tersebut dievaluasi secara periodik untuk menentukan kualitas kredit yang diperkirakan mampu dipenuhi oleh debitur, sehingga Perusahaan terhindar dari risiko gagal bayar debitur.

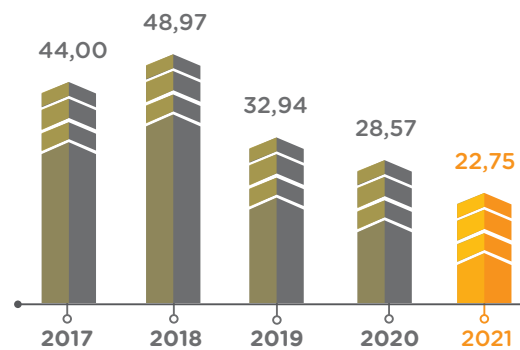
The Company has a credit limit policy for debtors according to the capabilities of each customer. This is evaluated periodically to determine the credit quality that is estimated to be fulfilled by the debtor, so that the Company avoids the risk of debtor default.

Collection Period tahun 2021 sebesar 22,75 hari, mengalami perbaikan dibandingkan dengan *Collection Period* tahun 2020 sebesar 28,18 hari. Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan perusahaan untuk memperoleh kas dari hasil penagihan piutang kepada pelanggan.

The *Collection Period* in 2021 was 22.75 days, an improvement compared to 28.18 days in 2020. This indicates the increasing Company's ability to collect customers' receivables.

Perkembangan *Collection Period* Tahun 2017-2021 (hari)

Collection Period Progress 2017-2021 (day)



Piutang Usaha tahun 2021 sebesar Rp3,32 Triliun, turun 8,01% atau setara dengan Rp289,30 Miliar dibandingkan Piutang Usaha tahun 2020 sebesar Rp3,61 Triliun. Berikut disampaikan rincian umur piutang usaha Perusahaan yang mencerminkan piutang jangka pendek, menengah dan piutang jangka panjang.

Trade Receivable in 2021 amounted to Rp3.32 Trillion, a decrease of 8.01%, or Rp289.30 Billion compared to Rp3.61 Trillion in 2020. The following shows a breakdown by age of the Company's trade receivables reflecting short, medium and long term receivables.



Umur Piutang Usaha

Accounts Receivable Age

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Lancar Current	2.533.230	2.519.202	14.028	0,56
Jatuh tempo: Overdue:				
1 - 90 hari 1 - 90 days	500.675	766.744	(266.069)	(34,70)
91 - 120 hari 91 - 120 days	51.676	230.904	(179.228)	(77,62)
121 - 365 hari 121 - 365 days	186.495	263.497	(77.002)	(29,22)
> 365 hari > 365 days	750.970	948.791	(197.821)	(20,85)



Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Sub Jumlah Subtotal	4.023.046	4.729.138	(706.092)	(14,93)
Cadangan penurunan nilai Allowance for impairment	(698.380)	(1.115.172)	416.792	(37,37)
Jumlah Piutang Usaha - Bersih Total Trade Receivable - Net	3.324.666	3.613.966	(289.300)	(8,01)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai atas piutang usaha cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak dapat tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk secara individual dan kolektif untuk seluruh piutang yang telah jatuh tempo.

Piutang usaha Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Dasar pemilihan kebijakan atas struktur modal Perusahaan terdiri dari modal saham biasa, saldo laba, kepentingan non-pengendali dan komponen ekuitas lainnya. Dalam rangka menjaga kepercayaan pemerintah, investor, kreditor maupun pelaku pasar dalam jangka panjang, Direksi memiliki kebijakan untuk senantiasa mempertahankan basis modal yang kuat. Kebijakan manajemen atas struktur modal juga mempertimbangkan kondisi bisnis, tingkat pengembalian modal, maupun dividen yang dibagikan.

Kebijakan Struktur Modal

Kebijakan pengelolaan struktur modal PI Grup mempertimbangkan rencana bisnis jangka panjang dengan memaksimalkan pinjaman jangka panjang dari kreditor dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha serta ekspansi Perusahaan. Sedangkan untuk kebutuhan modal kerja, Perusahaan menggunakan pinjaman jangka pendek dari kreditor secara proporsional serta memaksimalkan penerbitan obligasi untuk restrukturisasi pinjaman. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga komposisi *debt to equity ratio* agar tidak melampaui syarat/*covenant* yang ditetapkan oleh kreditor. Kebijakan Perusahaan di bidang struktur modal ini diharapkan mampu menjaga kondisi keuangan yang sehat agar mampu mendanai kebutuhan permodalan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dalam hal pembayaran kembali pinjaman-pinjamannya.

Management believes that the allowance for impairment of trade receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible trade receivables. Management also believes that there is no significant concentration of credit risk on trade receivables from related parties and third parties. Allowances for impairment losses are established individually and collectively for all receivables that are past due.

The Company's trade receivables are used as collateral for short-term and long-term bank loans.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The basis for preparing the Company's capital structure policy consists of ordinary share capital, retained earnings, non-controlling interests and other equity components. In order to maintain the trust of the Government, investors, creditors and market players in the long term, the Board of Directors has established a policy to always maintain a strong capital base. Management's capital structure policy also considers business conditions, rate of return on capital, as well as dividends distributed.

Capital Structure Policy

The PI Group's capital structure management policy considers the long-term business plan by maximizing long-term loans from creditors to maintain business continuity and the Company's expansion. For working capital needs, the Company uses short-term loans from creditors proportionally, and maximizes the issuance of bonds for loan restructuring. This policy is intended to maintain the composition of the debt to equity ratio so it does not exceed the terms/covenants set by creditors. The Company's capital structure policy is expected to to maintain a healthy financial condition in order to finance short-term and long-term capital needs, including in terms of repaying loans.

Rincian Struktur Modal

Di tahun 2021, Perusahaan dan entitas anak masih menjalankan strategi mempertahankan rasio total liabilitas terhadap ekuitas (*Leverage* and *DER interest bearing*) masing-masing maksimum 78,57% dan 43,53%. Untuk realisasi total liabilitas terhadap ekuitas (*leverage* and *DER interest bearing*) per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 81,84% (*Leverage*) dan 54,46% (*Interest Bearing*).

Capital Structure Details

In 2021, the Company and its subsidiaries are still implementing the strategy of maintaining a total liabilities to equity ratio (*Leverage* and *DER interest bearing*) at a maximum of 78.57% and 43.53%, respectively. For the realization of total liabilities to equity (*leverage* and *DER interest bearing*) as of December 31, 2020, they were 81.84% (*Leverage*) and 54.46% (*Interest Bearing*).



Rasio Struktur Modal Perusahaan dan Perubahannya Company's Capital Structure Ratio and Changes

Perihal Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
<i>Leverage</i> (%)	78,57	81,84	(3,27)
<i>Interest Bearing</i> (%)	43,53	54,46	(10,93)

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Ikatan material investasi barang modal bertujuan untuk menjamin terealisasinya proyek-proyek pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi guna menunjang penguatan bisnis Perusahaan di masa mendatang.

Pada tahun 2021, Perusahaan memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal yang bukan dalam bentuk pendanaan dengan uraian sebagai berikut.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENTS

The capital material commitment for capital goods investments is aimed at ensuring the realization of development projects and increasing production capacity to support the strengthening of the Company's business in the future.

In 2021, the Company's material commitments for capital goods investments, not in the form of financing, included.

Jenis Perikatan>Nama Proyek Engagement Type/ Project Name	Pihak Yang melakukan Perikatan (Kontraktor/ Vendor) Engaged party (Contractor/ Vendor)	Nilai Investasi (Rp Juta) Investment Amount (In Rp Million)	Mata Uang Currency	Sumber Dana Source of Fund	Upaya melindungi risiko mata uang asing Currency Hedging
Pembangunan Pabrik NPK Chemical PIM Kapasitas 500.000 Ton Per Tahun Construction of the NPK Chemical PIM Factory with an Annual Capacity of 500,000 Tons	PT Pembangunan Perumahan (Persero)	1.473.000	Rupiah	Rp1.178.400 juta (Pinjaman) Rp294.600 juta (Modal Sendiri) Rp1,178,400 million (Loan) Rp94,600 million (Own Capital)	Tidak diperlukan upaya lindung Nilai No hedging is needed
Reklamasi Lahan Industri PKG seluas 23,56 Hektar PKG Industrial Land Reclamation of 23,56 Hectares	Konsorsium: PT Petrokopindo Cipta Selaras, PT Alur Pelayaran Barat dan PT Jaya Marine Shakti	104.000	Rupiah	Rp72.800 (Pinjaman) Rp31.200 (Modal Sendiri) Rp72,800 million (Loan) Rp31,200 million (Own Capital)	Tidak diperlukan upaya lindung Nilai No hedging is needed
Pembangunan Gudang Bahan Baku NPK Curah PKT kapasitas 45.000 Ton Construction of PKT Bulk NPK Raw Material Warehouse with a capacity of 45,000 Tons	PT Nindya Karya	180.622	Rupiah	Rp180.622 (Modal Sendiri) Rp180,622 million (Own Capital)	Tidak diperlukan upaya lindung Nilai No hedging is needed
Penyiapan Lahan Industri Tahap-2 PKT seluas 16 Hektar PKT Phase-2 Industrial Land Preparation covering an area of 16 hectares	KSO PT Wijaya Karya - Pelayaran Fortuna Nusantara	305.600	Rupiah	Rp213.920 (Pinjaman) Rp91.680 (Modal Sendiri) Rp 213,920 million (Loan) Rp 91,680 million (Own Capital)	Tidak diperlukan upaya lindung Nilai No hedging is needed



REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Berikut disampaikan jenis dan nilai investasi barang modal dan penyertaan modal yang direalisasikan pada tahun 2021.

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

The following explains the types and values of capital goods investments and capital participation realized in 2021.

No	Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Tujuan Objective
1	Pembangunan Pabrik NPK Chemical PIM Kapasitas 500.000 Ton Per Tahun Construction of the NPK Chemical PIM Factory with a Capacity of 500,000 Tons Per Year	339.574	Peningkatan kapasitas produksi pupuk NPK Increased production capacity of NPK fertilizer
2	Reklamasi Lahan Industri PKG seluas 23,56 Hektar PKG Industrial Land Reclamation of 23.56 Hectares	64.929	Perluasan kawasan industri Industrial area expansion
3	Pembangunan Gudang Bahan Baku NPK Curah PKT kapasitas 45.000 Ton Construction of PKT Bulk NPK Raw Material Warehouse with a capacity of 45,000 Tons	113.168	Peningkatan kapasitas penyimpanan bahan baku NPK Increased storage capacity of NPK raw materials
4	Penyiapan Lahan Industri Tahap-2 PKT seluas 16 Hektar PKT Phase-2 Industrial Land Preparation covering an area of 16 hectares	28.123	Perluasan kawasan industri Industrial area expansion

Tujuan dari ikatan material investasi barang modal adalah untuk menjamin terealisasinya proyek-proyek pengembangan Perusahaan untuk menunjang penguatan bisnis di masa mendatang.

The purpose of material commitments for capital goods investment is to ensure the realization of the Company's development projects to support the future business strengthening.

Investasi barang modal PTPI tahun 2021 terealisasi sebesar Rp590,55 Miliar atau meningkat sebesar 16,52% atau Rp83,71 Miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya progres proyek pabrik NPK Chemical PIM Kapasitas 500.000 Ton Per Tahun sebesar Rp339,57 Miliar.

PTPI's investment in capital goods in 2021 amounted to Rp590.55 Billion, an increase of 16.52% or Rp83.71 Billion. The increase was mainly due to the progress in the NPK Chemical PIM plant with a capacity of 500,000 Tons per year amounting to Rp339.57 Billion.

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp million)	2020 (Rp Juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp million)	Persentase (%) Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	590.550	506.840	83.710	16,52

DAMPAK NILAI MATA UANG ASING BAGI KINERJA PERUSAHAAN

PI Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

IMPACT OF FOREIGN CURRENCY ON COMPANY PERFORMANCE

The Group is exposed to foreign exchange rate risk that mainly arises from monetary assets and liabilities recognized in a currency different from the functional currency of the entity concerned. Some of this risk is managed using natural hedging originating from monetary assets and liabilities denominated in the same foreign currency.

Pada tanggal 31 Desember 2021 jika Rp melemah/menguat sebesar 10% terhadap USD dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak tahun berjalan akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp422.861 (31 Desember 2020: lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp357.623), terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan/kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN KINERJA PERUSAHAAN

Bisnis komoditas seperti Urea dan Amoniak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Pada tahun 2021 harga jual urea dan amoniak masing-masing sebesar USD352 per Ton dan USD502 per Ton atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar USD260 per Ton dan USD297 per ton. Apabila harga jual tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, dengan volume penjualan Urea dan Amoniak pada tahun 2021 sebesar 4,26 juta Ton dan 988,32 ribu ton, maka pada tahun 2021 PTPI mengalami peningkatan nilai penjualan Urea dan Amoniak sebesar Rp8,32 Triliun.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Pada 2022, PI Grup melakukan pembayaran atas pinjaman bank dari Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BTPN dengan nilai sebesar Rp2,99 Triliun.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2021

Produksi

Produksi pupuk dan non pupuk pada tahun 2021 melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh pabrik yang beroperasi dengan optimal sebagai dampak dari implementasi program kerja bidang produksi, di antaranya pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi (SIMPRO). Sistem ini mengacu *best practice* internasional, yaitu Implementasi *Manufacturing Excellence* dan Sistem Manajemen Energi (SME) ISO 50001 secara bertahap di entitas anak produsen pupuk sesuai evaluasi skala prioritas, serta Implementasi *Digital Fertilizer* secara bertahap.

As of December 31, 2021, if Rp weakens/strengthens by 10% against the USD with all variables held constant, profit before tax for the current year would be Rp422,861 lower or higher (December 31, 2020: Rp357,623 lower or higher), especially from foreign exchange gains/losses arise on the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON COMPANY REVENUE AND PERFORMANCE

Commodity businesses for Urea and Ammonia are strongly affected by fluctuations in market prices. In 2021 the selling prices of urea and ammonia were USD352 per Ton and USD502 per ton, higher than USD260 per Ton and USD297 per Ton in 2020. If the selling price in 2021 is compared to 2020, with the 2021 sales volumes of Urea and Ammonia of 4.26 million Tons and 988.32 thousand tons, then in 2021 PTPI experienced an increase in the sales value of Urea and Ammonia of Rp8.32 Trillion.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURRED AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

In 2022, PI Group made payments on bank loans from Bank Mandiri, BCA, BNI, and BTPN amounting to Rp2.99 Trillion.

ACHIEVEMENT OF TARGETS IN 2021

Production

Production of fertilizers and non-fertilizers in 2021 exceeded the set target. This success was due to the factories operating optimally as a result of the implementation of the production work program, including the implementation of the Production Management System (SIMPRO). These systems refer to international best practices, namely the Manufacturing Excellence and Energy Management System (SME) ISO 50001 in stages in fertilizer producer subsidiaries according to priority scale evaluation, as well as the gradual implementation of Digital Fertilizer.



Perihal Concerning	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) Achievement Realization against 2021 Target (%)
	1	2	(1:2)
Pupuk Fertilizer			
Urea	7.968.504	7.797.000	102,20
SP-36	325.138	490.000	66,35
ZA	759.226	750.000	101,23
NPK	3.169.211	3.187.000	99,44
ZK	14.021	10.000	140,21
Subtotal Produksi Pupuk Fertilizer Production Subtotal	12.236.101	12.234.000	100,02
Non Pupuk Non Fertilizer			
Amoniak Ammonia	6.149.670	5.869.250	104,78
Asam Sulfat Sulfuric acid	881.200	1.050.000	83,92
Asam Fosfat Phosphoric Acid	191.856	160.000	119,91
Subtotal Produksi Non Pupuk Non Fertilizer Production Subtotal	7.222.726	7.079.250	102,03
Produk Samping*) Side Production	66.164	76.000	87,06
Total Produksi Total Production	19.524.990	19.389.250	100,70

) Terdiri dari CO₂ Cair, Dry Ice, HCL, dan Aluminium Fluorida) Includes Liquid CO₂, Dry Ice, HCL, and Aluminum Fluoride

Realisasi produksi pupuk dan non pupuk tahun 2021 mencapai 19,52 juta Ton atau 100,70% terhadap RKAP.

Realization of fertilizer and non-fertilizer production in 2021 was 19.52 million Tons or 100.70% of the RKAP.

Pemasaran dan Penjualan

Marketing and Sales

Perihal Concerning	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) Achievement Realization against 2021 Target (%)
	1	2	(1:2)
Pupuk Fertilizer			
Pupuk PSO PSO Fertilizer			
Urea	3.620.209	4.166.669	86,88
SP-36	390.866	640.812	61,00
ZA	686.771	784.144	87,58
NPK	2.702.892	2.679.000	100,89
Organik Organic	518.307	770.850	67,24
Subtotal Penjualan Pupuk PSO PSO Fertilizer Sales Subtotal	7.919.045	9.041.475	87,59

Perihal Concerning	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) Achievement Realization against 2021 Target (%)
	1	2	(1:2)
Pupuk Non PSO Non PSO Fertilizer			
Pupuk Non PSO Dalam Negeri Domestic Non PSO Fertilizer			
Urea	2.231.326	1.776.499	125,60
SP-36	21.284	-	-
ZA	86.331	-	-
NPK	431.908	387.511	111,46
Lain-Lain *) Others	41.997	53.600	78,35
Subtotal Penjualan Pupuk Non PSO Dalam Negeri Domestic Non-PSO Fertilizer Sales Subtotal	2.812.846	2.217.610	126,84
Pupuk Non PSO Luar Negeri Overseas Non PSO Fertilizer			
Urea	2.028.568	1.679.035	120,82
ZK	7.103	4.000	177,58
NPK	144.608	92.356	156,58
Subtotal Penjualan Pupuk Non PSO Luar Negeri Overseas Sales of Non PSO Fertilizer Subtotal	2.180.279	1.775.391	122,81
Subtotal Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Subtotal	12.912.170	13.034.476	99,06
Non Pupuk Non Fertilizer			
Amoniak Ammonia			
Dalam Negeri Domestic	273.126	133.600	204,44
Luar Negeri Overseas	715.192	645.000	110,88
Subtotal Penjualan Amoniak Ammonia Sales Subtotal	988.317	778.600	126,94
Non Pupuk Non Amoniak Non Ammonia Non Fertilizer			
Asam Sulfat Sulfuric acid	196.087	145.000	135,23
Asam Fosfat Sulfuric acid	9.609	40.000	24,02
Lainnya **) Other	65.996	80.250	82,24
Subtotal Penjualan Non Pupuk Non Amoniak Non Ammonia Fertilizer Sales Subtotal	271.693	265.250	102,43
Jumlah Volume Penjualan Total Sales Volume	14.172.180	14.078.326	100,67

*) Terdiri dari penjualan KCL, TSP, ZK, Rock Phospat dan DAP

**) Terdiri dari CO₂ Cair, Dry Ice, HCL, dan Aluminium Fluorida

*) Includes sales of KCL, TSP, ZK, Rock Phosphate and DAP

**) Includes Liquid CO₂, Dry Ice, HCL, and Aluminum Fluoride

Target volume penjualan berhasil dilampaui Perusahaan, hal ini disebabkan tingginya capaian volume penjualan pupuk komersil. Di samping itu, realisasi penjualan amoniak mencapai 126,94% dari target karena tingginya permintaan amoniak di pasar sepanjang tahun 2021.

The sales volume target was successfully exceeded by the Company, due to higher sales volume of commercial fertilizers. In addition, ammonia sales reached 126.94% of the target due to the high demand for ammonia in the market throughout 2021.

**Laba (Rugi) Dan Penghasilan Komprehensif Lain****Profit (Loss) and Other Comprehensive Income**

Pos Akun Account	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) Achievement Realization against 2021 Target (%)
	1	2	(1:2)
Pendapatan Revenue	53.344.444	46.673.800	114,29
Penggantian Biaya Subsidi Pemerintah Indonesia Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia	25.258.692	26.260.917	96,18
Jumlah Pendapatan Total Revenue	78.603.136	72.934.717	107,77
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(63.469.789)	(60.582.450)	104,77
Laba Bruto Gross Profit	15.133.347	12.352.267	122,51
Beban Penjualan Selling Expenses	(1.280.505)	(1.378.209)	92,91
Beban Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	(4.023.124)	(3.782.278)	106,37
(Beban)/Pendapatan Lainnya - Bersih Other Expenses/Revenue - Net	150.180	(52.282)	(287,25)
Laba Operasi Operating Profit	9.979.898	7.139.498	139,78
Pendapatan Keuangan Financial Income	226.343	226.603	99,89
Biaya Keuangan Financial Costs	(2.047.494)	(3.107.402)	65,89
Bagian atas Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of net profit (loss) of associates and joint ventures	296.018	152.194	194,50
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	8.454.765	4.410.892	191,68
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(3.320.090)	(1.305.624)	254,29
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	5.134.675	3.105.268	165,35
Total Rugi Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Total Other Comprehensive Profit (Loss) After Tax	46.592	-	-
Penghasilan Komprehensif Comprehensive Income	5.181.267	3.105.268	166,85
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada: Profit for the Year Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	5.321.127	3.007.454	176,93
Kepentingan non pengendali Non-Controlling Interest	(186.452)	97.814	(190,62)
	5.134.675	3.105.268	165,35
Laba Komprehensif yang Diatribusikan Kepada: Comprehensive Income for the Year Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	5.367.719	3.007.454	178,48
Kepentingan non pengendali Non-Controlling Interest	(186.452)	97.814	(190,62)
	5.181.267	3.105.268	166,85

Perusahaan mencatatkan laba tahun berjalan pada tahun 2021 sebesar Rp5,13 Triliun atau 165,35% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena tingginya harga jual yang dimanfaatkan dengan optimalnya penjualan produk komersil.

Selain itu terdapat penurunan penggantian biaya subsidi dari pemerintah yang mencapai 96,18% dari target yang disebabkan karena kendala teknis penebusan di kios, baik menggunakan kartu tani atau form manual, serta alokasi penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, Perusahaan senantiasa berupaya untuk melakukan optimalisasi penjualan produk komersil.

The Company's profit for the year in 2021 was Rp5.13 Trillion, or 165.35% of the set target. This was due to the high selling price and the utilized optimal sales of commercial products.

In addition, there was a decrease in reimbursements of subsidy from the Government of Indonesia that reached 96.18% of the target due to technical difficulties in reimbursements at kiosks, by farmers using cards or manual forms, as well as the allocation of subsidized fertilizer distribution being lower than the previous year. However, the Company strives to optimize the sale of commercial products.

Posisi Keuangan

Financial Position

Pos Akun Account	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) Achievement Realization against 2021 Target (%)
	1	2	(1:2)
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	44.174.212	48.782.934	90,55
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	84.288.960	87.398.189	96,44
Total Aset Total Assets	128.463.172	136.181.123	94,33
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity			
Liabilitas Liabilities			
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities	33.008.039	24.568.575	134,35
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	23.515.157	36.266.793	64,84
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	56.523.196	60.835.368	92,91
Ekuitas Equity			
Modal Disetor Share Capital	25.000.000	25.000.000	100,00
Saldo Laba Retained Earnings	18.108.850	18.135.804	99,85
Komponen Ekuitas Lainnya Other Components of Equity	28.805.426	31.933.138	90,21
Kepentingan non pengendali Non-Controlling Interest	25.700	276.813	9,28
Jumlah Ekuitas Total Equity	71.939.976	75.345.755	95,48
Jumlah Ekuitas dan Liabilitas Total Liabilities and Equity	128.463.172	136.181.123	94,33



Jumlah aset Perusahaan pada tahun 2021 tercatat lebih rendah dari target yang disebabkan adanya pelunasan piutang subsidi dari pemerintah. Kas yang diperoleh dari penerimaan piutang subsidi tersebut digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman jangka panjang kepada perbankan sehingga liabilitas lebih rendah dari target.

The Company's total assets in 2021 were lower than the target due to the reimbursement of subsidy receivables from the Government. The cash obtained from the reimbursement of the subsidy receivables was used to partially repay long-term loans to banks so that liabilities were lower than the target.

Struktur Modal

Capital Structure

Perihal Description	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) Achievement Realization against 2021 Target (%)
	1	2	(1:2)
Total Liabilitas Berbasis Bunga (<i>Interest Bearing Debt</i>) Total Interest Bearing Debt	31.318.988	42.299.733	74,04
Total Ekuitas Total Equity	71.939.976	75.345.755	95,48
Jumlah Sumber Permodalan Total Source of Capital	103.258.964	117.645.488	87,77

Struktur modal Perusahaan didominasi oleh ekuitas atau permodalan sendiri, yang menunjukkan struktur modal Perusahaan memiliki fondasi yang kuat. Hal ini juga terlihat dari membaiknya debt to equity ratio (DER) dan interest bearing debt to EBITDA yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola utang dan permodalannya.

The Company's capital structure is dominated by equity or own capital, indicating that the Company's capital structure has a strong foundation. This can also be seen in the improvement in the debt to equity ratio (DER) and interest bearing debt to EBITDA that shows the Company's ability to manage debt and capital.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Capital Management

Perihal Description	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) Achievement Realization against 2021 Target (%)
	1	2	(1:2)
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (people)	7.851	8.244	95,23
Biaya Pelatihan dan Pendidikan (Rp Juta) Training and Education Costs (Rp Million)	114.120	227.928	50,07

Jumlah karyawan tahun 2021 sebanyak 7.851 orang atau 95,23% dari target. Sedangkan biaya pelatihan dan pendidikan mencapai Rp114,120 Miliar atau 50,07% dari target.

The number of employees in 2021 was 7,851 people or 95.23% of the target. Meanwhile, the cost of training and education amounted to Rp114.120 Billion or 50.07% of the target.

PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJA TAHUN 2022

Prospek Usaha Tahun 2022

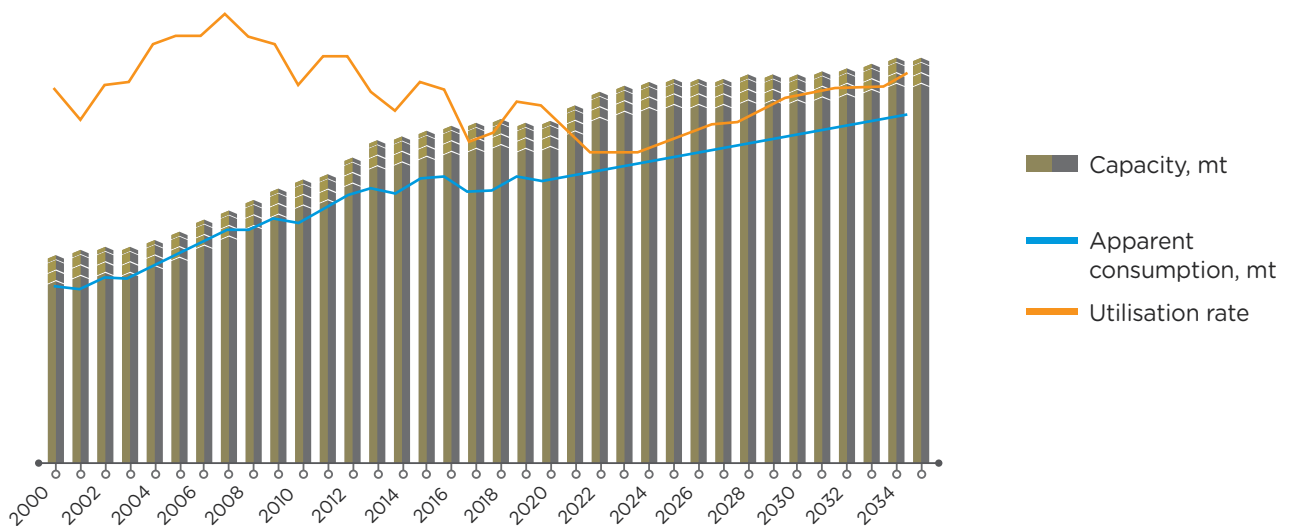
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan masih tumbuh di tahun 2021 dengan perkiraan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada kisaran 2,0-2,3% dan di tahun 2022 juga diperkirakan akan terus bertumbuh dengan kisaran 3,6-4,0%. Dalam tiga tahun terakhir, diperkirakan akan melihat hasil dari siklus investasi terbaru dengan peningkatan yang sangat signifikan dari segi kapasitas global. Pabrik baru di Nigeria, Rusia dan Brunei dan sejumlah besar kapasitas substitusi impor di India diharapkan beroperasi pada akhir tahun 2021. Secara total, kapasitas 9,5 juta Ton per tahun (tidak termasuk China) dijadwalkan akan dimulai pada akhir tahun ini, dan meskipun waktu operasi komersial untuk pabrik-pabrik ini masih belum pasti, terutama mengingat pembatasan pergerakan yang sedang berlangsung akibat pandemi COVID-19, namun pasti akan ada peningkatan kapasitas baru yang signifikan. Pada akhir tahun ini atau awal 2022.

BUSINESS PROSPECTS AND PERFORMANCE PROJECTIONS FOR 2022

Business Prospects for 2022

The agriculture, forestry and fishery sectors were projected to continue to grow in 2021 with an estimated growth of Gross Domestic Product (GDP) in the range of 2.0-2.3%, and in 2022 are also expected to continue to grow in the range of 3.6-4.0%. The last three years show the results of the latest investment cycle with a very significant increase in terms of global capacity. New plants in Nigeria, Russia and Brunei and a significant amount of import substitution capacity in India are expected to be operational by the end of 2021. In total, a capacity of 9.5 million Tons per annum (excluding China) is slated to commence by the end of the year, and despite the uncertain timing of commercial operations for these factories, especially given the ongoing movement restrictions due to the COVID-19 pandemic, there will certainly be significant new capacity increases, at the end of this year or early 2022.

Grafik Urea Supply/Demand Outlook-Global Balance
Urea Supply/Demand Outlook-Global Balance Chart

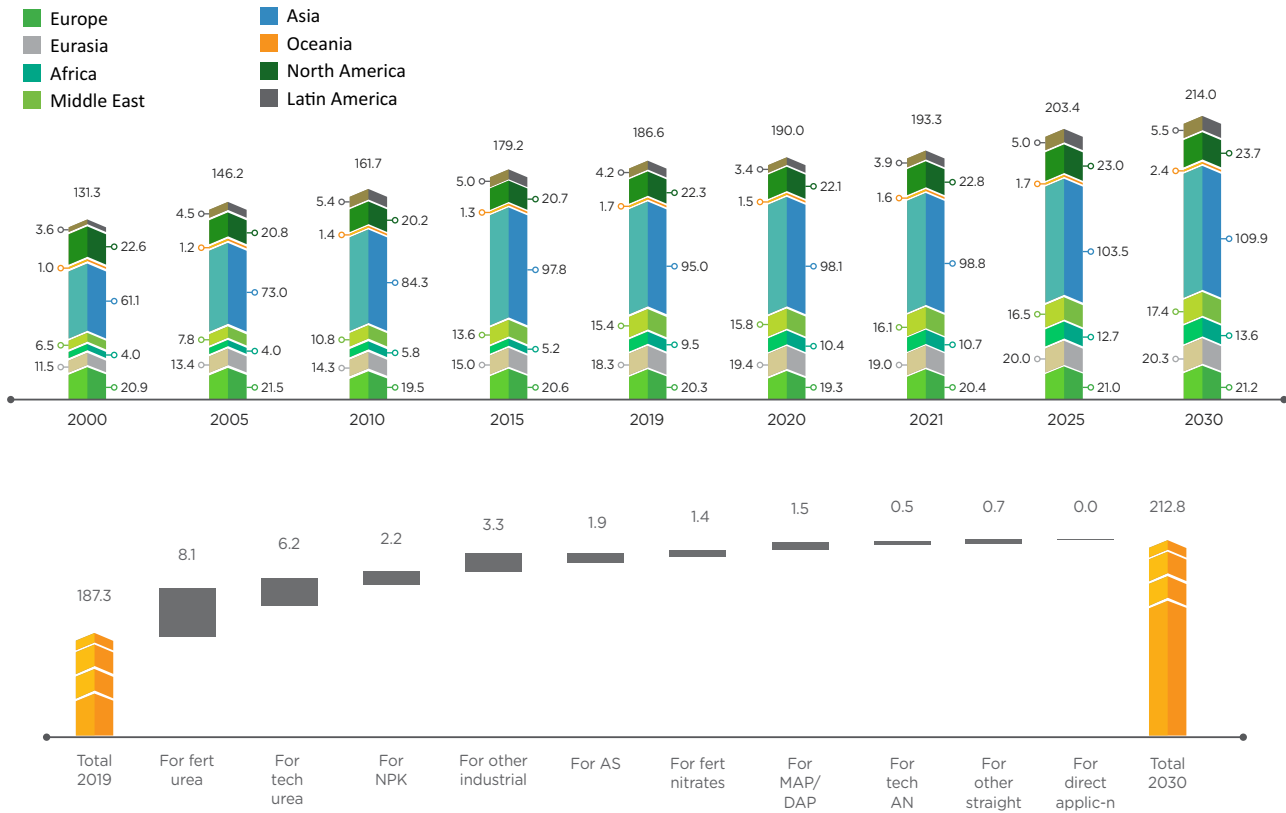


Sumber: Fertecon Outlook April 2021

Source : Fertecon Outlook April 2021



Grafik Demand Outlook 2019-2030, Juta Ton
Grafik Demand Outlook 2019-2030, MT

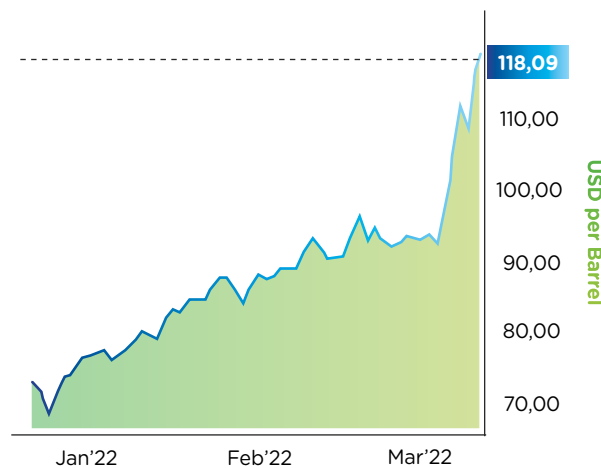


Sumber : Fertecon Outlook 2021
Source: Fertecon Outlook 2021

Di samping itu, adanya peristiwa geopolitik konflik antara Rusia dan Ukraina berdampak terhadap berkurangnya ketersediaan atau *supply* beberapa komoditas dunia sehingga berpengaruh pada kenaikan harga komoditas tersebut. Rusia merupakan negara penghasil minyak mentah terbesar ke-3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Hal ini tentunya akan berimbas pada meningkatnya harga minyak dan gas bumi dunia.

In addition, the geopolitical conflict between Russia and Ukraine had an impact and reduced the availability or supply of several world commodities, thus increasing the price of these commodities. Russia is the 3rd largest crude oil producer in the world after Saudi Arabia and the United States. This of course will have an impact on increasing world oil and gas prices.

Harga Minyak Mentah Dunia Jenis Brent & WTI (10 Februari – 11 Maret 2022)
World Brent and WTI Crude Oil Prices (Feb 10 – March 11, 2022)



Selain itu, Rusia, Belarusia dan Ukraina merupakan negara utama pemasok kebutuhan global terkait DAP dan MOP (KCI) yang berpengaruh pada supply dan harga bahan baku serta supply pupuk NPK. Tak hanya itu, Ukraina juga merupakan salah satu negara penghasil bahan pangan terbesar dunia. Konflik Rusia dan Ukraina tentunya akan berdampak pada berkurangnya supply bahan pangan yang kemudian akan meningkatkan harga komoditas pangan yang dapat berpotensi menciptakan krisis pangan dunia.

In addition, Russia, Belarus and Ukraine are the main global suppliers of DAP and MOP (KCI), which will affect the supply and price of raw materials and supplies of NPK fertilizer. In addition, Ukraine is one of the world's largest food-producing countries. The conflict between Russia and Ukraine will certainly have an impact by reducing the supply of food, which in turn will increase the price of food commodities and potentially create a world food crisis.

Dampak kenaikan harga komoditas pangan
Impact of rising food commodity prices

Price



Soybeans
+27%



Milk
+27%



Palm Oil
+48%



Rice
+6%

Source: Business Insider Commodities Tracer March 9th, 2022

Proyeksi Kinerja dan Rencana Strategis Tahun 2022

Manajemen dalam menyusun RKAP tahun 2022 menetapkan asumsi-asumsi yang cukup moderat dengan mempertimbangkan potensi pandemi COVID-19 di tahun 2022 mengingat varian baru masih terus berkembang dan perkembangan kondisi perekonomian global yang masih belum stabil serta menetapkan beberapa inisiatif strategis sesuai dengan RJP Perusahaan Tahun 2020-2024.

Asumsi yang digunakan antara lain:

1. Pandemi COVID-19 dalam fase *recovery* dan perekonomian berangsur normal di tahun 2022;
2. Asumsi Makro ekonomi mengikuti RAPBN Pemerintah tahun 2022;
3. Alokasi pupuk bersubsidi direncanakan sebesar 9.118.057 Ton mengacu kepada Permentan No.41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berlaku pada tanggal 29 Desember 2021;
4. Asumsi harga bahan baku NPK mengacu kepada berbagai Buletin (Fertecon, Argus, CRU *Fertilizers Week*, dll.) serta mempertimbangkan realisasi pengadaan;
5. Harga jual urea ekspor ditetapkan sebesar USD350 per ton, harga urea komersil domestik sebesar Rp4.652.983 per ton, sedangkan harga jual amoniak domestik ditetapkan sebesar Rp5.190.420 per Ton dan ekspor sebesar USD320 per ton. Asumsi harga jual urea dan amoniak mengacu *forecast* dari sumber buletin-buletin internasional seperti buletin Fertecon, Argus, dan CRU fertilizer yang diolah kembali dengan mempertimbangkan pergerakan *trend* harga yang saat ini melonjak dan diantisipasi akan mengalami normalisasi sesuai dengan *trend* yang terjadi pada tahun 2008;

Performance Projections and Strategic Plan for 2022

Management in preparing the 2022 RKAP used assumptions that were quite moderate and conservative as we faced the potential for the COVID-19 pandemic to continue into 2022, especially as new variants are still developing, and development of global economic conditions is still unstable, and several strategic initiatives were set in accordance with the Company's 2020 - 2024 RJP.

The assumptions used included:

1. The COVID-19 pandemic is in the recovery phase and the economy will return to normal in 2022;
2. Macroeconomic assumptions following the Government's 2022 RAPBN;
3. The allocation of subsidized fertilizer is planned at 9,118,057 Tons based on the Minister of Agriculture No. 41 of 2021 concerning the Determination of Allocation and HET for Subsidized Fertilizers for the Agriculture Sector to take effect on December 29, 2021;
4. The assumption of the price of raw materials for NPK refers to various bulletins (Fertecon, Argus, CRU *Fertilizers Week*, etc.) and considers the realization of procurement;
5. The selling price of export urea is set at USD350 per ton, the domestic commercial urea price is Rp4,652,983 per ton, while the domestic selling price of ammonia is set at Rp5,190,420 per Ton with exports at USD320 per ton. The assumption for urea and ammonia selling prices refers to forecasts from international bulletins such as the Fertecon, Argus, and CRU fertilizer bulletins, which have been reprocessed by taking into account the current upward movement in price trends and the anticipated normalization to the trends that occurred in 2008;



6. Harga gas tahun 2022 diasumsikan menggunakan harga gas sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri;
7. Asumsi khusus mengenai upaya penyehatan keuangan Rekind:
- Rekind beroperasi tanpa tambahan setoran modal;
 - Pembelian aset tanah & bangunan milik Rekind senilai Rp600 Miliar untuk pelunasan sebagian pinjaman *term-loan* senilai USD 10 juta, dan penambahan likuiditas perusahaan;
 - Pelaksanaan *bridging facility* pinjaman bank ke Rekind dengan menyediakan jaminan deposito kepada bank dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian proyek Jambaran Tiung Biru (JTB);
 - Divestasi anak perusahaan Rekind ke anak perusahaan PI Group lainnya senilai Rp441,5 Miliar;
 - Restrukturisasi Rekind akan dilaksanakan setelah kajian oleh Mandiri Sekuritas selesai pada kuartal-1 tahun 2022.

Berikut disampaikan analisis proyeksi kinerja Perusahaan dan rencana strategis yang akan dilakukan di tahun 2022.

The following is an analysis of the Company's performance projections and strategic plans to be carried out in 2022.

Produksi

Production

Perihal Description	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection	Perbandingan Proyeksi 2022 terhadap Realisasi 2021 (%) Comparison of 2022 Projections to 2021 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Pupuk Fertilizer	12.236.101	12.355.700	100,98%
Non Pupuk* non-fertilizer*	7.288.890	7.378.100	101,22%
Jumlah Total	19.524.990	19.733.800	101,07%

*Terdiri dari Amoniak, Asam Fosfat, ALF₃ dan Produk Samping Lainnya

*Includes Ammonia, Phosphoric Acid, ALF₃ and Other By-Products

Total produksi tahun 2022 diproyeksikan meningkat dibanding realisasi tahun 2021 terutama disebabkan peningkatan produksi pabrik Urea, SP-36 dan Asam Fosfat.

Total production in 2022 is projected to increase compared to the 2021 realization, mainly due to increased production of Urea, SP-36 and Phosphoric Acid factories.

Pemasaran dan Penjualan

Marketing and Sales

Perihal Description	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection	Perbandingan Proyeksi 2022 terhadap Realisasi 2021 (%) Comparison of 2022 Projections to 2021 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Pupuk fertilizer	12.912.170	13.710.465	106,18
Non Pupuk* non-fertilizer*	1.260.010	1.119.140	88,82
Jumlah Total	14.172.180	14.829.605	104,64

*Terdiri dari Amoniak, Asam Fosfat, ALF₃ dan Produk Samping Lainnya

*Includes Ammonia, Phosphoric Acid, ALF₃ and Other By-Products

Penjualan pupuk secara keseluruhan diproyeksikan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021, yaitu pada penjualan pupuk subsidi. Hal ini disebabkan adanya peningkatan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah di tahun 2022, sehingga Perusahaan berupaya untuk menjaga kestabilan posisi stok dengan mengurangi penjualan pupuk di sektor non subsidi.

Overall fertilizer sales are projected to increase compared to the realization in 2021, mainly for the subsidized fertilizer sales. This is due to the increase in the allocation of subsidized fertilizer distribution by the Government for 2022, so the Company is seeking to maintain a stable stock position by reducing fertilizer sales in the non-subsidized sector.

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN

PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Pos Akun Account	Realisasi 2021 (Rp Juta) 2021 Realization (Rp Million)	Proyeksi 2022 2022 Projection	Perbandingan Proyeksi 2022 Terhadap Realisasi 2021 (%) Comparison of 2022 Projections to 2021 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Pendapatan Revenue	53.344.444	48.730.616	91,35
Penggantian Biaya Subsidi Pemerintah Indonesia Subsidy Reimbursement from the Government off Indonesia	25.258.692	28.207.072	111,67
Jumlah Pendapatan Total Revenue	78.603.136	76.937.688	97,88
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(63.469.789)	(62.191.451)	97,99
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit	15.133.347	14.746.237	97,44
Beban Usaha Operating Expense	(5.303.629)	(5.460.581)	102,96
Laba (Rugi) Operasi Operating Profit	9.829.718	9.285.656	94,47
Beban Keuangan Finance Expense	(2.047.494)	(2.637.668)	128,82
Pendapatan dan Beban Lain-lain Other Income and Expense	672.541	447.441	66,53
Laba (rugi) Sebelum Pajak Profit (loss) before Income Tax	8.454.765	7.095.428	83,92
Beban Pajak Tax Expense	(3.320.090)	(2.202.325)	66,33
Laba Tahun Berjalan Profit for Year	5.134.675	4.893.103	95,30

Laba tahun berjalan tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp4,89 Triliun atau lebih rendah 4,70% dari realisasi tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyesuaian proporsi penjualan pupuk bersubsidi yang lebih besar di tahun 2022 untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan total alokasi sebesar 9 juta Ton atau meningkat dari tahun 2021 sebesar 7,9 juta ton, dimana penjualan pupuk bersubsidi menghasilkan margin yang lebih rendah dibandingkan dengan pupuk non PSO. Kemudian asumsi harga jual urea dan amoniak tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata realisasi harga jual tahun 2021 seiring dengan tren harga jual komoditas yang cenderung melandai.

Profit for the current year in 2022 is projected to be Rp4.89 Trillion, a decrease of 4.70% from the 2021 realization. This decrease is due to an increase in the distribution of PSO being adjusted to a new allocation of 9 million Tons in 2022 to maintain national food security, an increase from the 2021 allocation in 7.9 million tons, where sales of subsidized fertilizers generate lower margins compared to non-PSO fertilizers. The assumptions for selling prices for urea and ammonia in 2022 is lower than the average realized selling prices in 2021 in line with the trend of commodity selling prices which tend to be sloping.



Posisi Keuangan

Financial Position

Perihal Description	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection	Perbandingan Proyeksi 2022 terhadap Realisasi 2021 (%) Comparison of 2022 Projections to 2021 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Aset Asset			
Aset Lancar Current Asset	44.174.212	36.119.246	81,77
Aset Tidak Lancar Non-Current Asset	84.288.960	89.541.924	106,23
Jumlah Aset Total Asset	128.463.172	125.661.171	97,82
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity			
Liabilitas Liabilities			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liability	33.008.039	27.941.437	84,65
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liability	23.515.157	23.184.833	98,60
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	56.523.196	51.126.270	90,45
Ekuitas Equity			
Jumlah Ekuitas Total Equity	71.939.976	74.534.900	103,61
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	128.463.172	125.661.171	97,82

Posisi Keuangan proyeksi 2022 mencapai Rp125,66 Triliun atau 97,82% dari realisasi tahun 2021. Hal ini utamanya disebabkan oleh adanya penurunan liabilitas jangka pendek.

The financial position 2022 projection is Rp125.66 Trillion or 97.82% of the 2021 realization, mainly due to a decrease in short-term liabilities.

Struktur Modal

Capital Structure

Perihal Description	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection	Perbandingan Proyeksi 2022 terhadap Realisasi 2021 (%) Comparison of 2022 Projections to 2021 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Total Liabilitas Berbasis Bunga (<i>Interest Bearing Debt</i>) Interest Bearing Debt	31.318.988	30.916.119	98,71%
Total Ekuitas Total Equity	71.939.976	74.534.900	103,61%
Jumlah Sumber Permodalan Total Source of Capital	103.258.964	105.451.019	102,12%

Jumlah sumber permodalan proyeksi 2022 mencapai Rp105,45 juta atau 102,12% dari realisasi tahun 2021.

The Total Source of Capital projection for 2022 is Rp105.45 million or 102.12% of the realization in 2021.

Pembayaran Obligasi

Bond Payments

Pos Akun Account	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection	Perbandingan Proyeksi 2022 terhadap Realisasi 2021 (%) Comparison of 2022 Projections to 2021 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Obligasi PUB I Tahap II Seri B PUB Bonds I Phase II Series B		1.774.000	

Pada Tahun 2021 tidak terdapat pembayaran obligasi karena *outstanding* obligasi baik PUB I maupun II yang diterbitkan belum jatuh tempo. Di tahun 2022 terdapat pembayaran atas obligasi yang jatuh tempo untuk obligasi PUB I tahap II sebesar Rp1,77 Triliun.

In 2021 there were no bond payments as the outstanding bonds, both PUB I and II issued have not yet matured. In 2022, there will be repayments on maturing bonds for PUB bonds I phase II of Rp1.77 Trillion.

Pengelolaan sumber daya manusia

Human Capital Management

Perihal Description	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection	Perbandingan Proyeksi 2022 terhadap Realisasi 2021 (%) Comparison of 2022 Projections to 2021 Realization (%)
	1	2	(2:1)
Jumlah Karyawan (orang) Total Employees (Person)	7.851	7.624	97,11
Biaya Pelatihan (Rp Juta) Training Cost (Rp Million)	114.120	213.359	186,96

Untuk tahun depan, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target di bidang sumber daya manusia. Untuk jumlah karyawan 2022 ditargetkan lebih rendah atau sekitar 97,11% dari total karyawan tahun 2021. Dengan demikian, Perusahaan akan mengendalikan rekrutmen karyawan baru.

For next year, the Company has set a number of targets for human capital. The number of employees in 2022 is targeted to be lower, or around 97,11% of the total employees in 2021. Thus, the Company will control the recruitment of new employees.

Sedangkan untuk biaya pelatihan, proyeksi tahun 2022 yang telah ditetapkan mencapai Rp213,4 Miliar atau 186,96% dari realisasi tahun 2021.

For training costs, the projection for 2022 is Rp213.4 Billion, or 186.96% of the 2021 realization.

Penetapan target-target di bidang SDM ini disesuaikan dengan RKAP yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Dalam jangka menengah dan panjang diharapkan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Perusahaan.

The determination of HC targets has been adjusted to the RKAP set by the Company. In the medium and long term, it is expected to support the achievement of the Company's vision and mission.



KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Manajemen mengusulkan dividen berdasarkan kinerja Perusahaan selama periode tertentu kepada Pemegang Saham. Selanjutnya, Pemegang Saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan dividen yang harus dibayarkan PT Pupuk Indonesia (Persero). Dividen hanya dapat dibagikan jika Perusahaan memiliki saldo laba ditahan yang positif.

Pembagian Dividen Tahun 2021 dan Historikalnya

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp2.337.259 juta (Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

DIVIDEND POLICY AND PAYMENT

Basic Dividend Distribution Policy

The management proposes dividends based on the Company's performance over a certain period to Shareholders. Afterwards, based on the General Meeting of Shareholders (GMS), shareholders determine the dividends to be distributed by the Company. Dividends can only be distributed if the Company has a positive retained earnings balance.

Dividend Distribution in 2021 and Its History

Based on the General Meeting of Shareholders (GMS) PT Pupuk Indonesia (Persero) decision regarding the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for Fiscal Year 2020, the shareholders approved the determination of the use of net profit for the fiscal year 2020 attributable to the Owners of the Parent Entity of Rp2,337,259 million with the following composition:

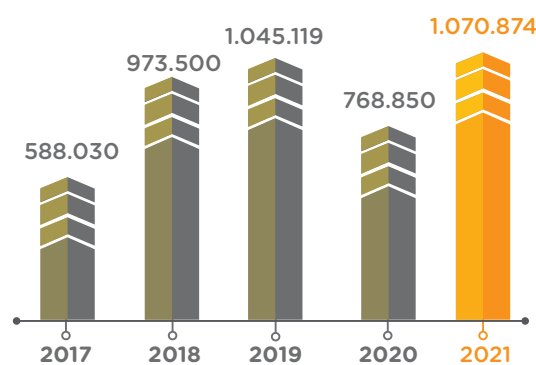
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk tahun 2020 (Rp Juta) Net Income Attributable to the Parent Entity in 2020 (Rp-million)	2.337.259
Dividen kas yang dibagikan (jumlah dividen yang didistribusikan) (Rp Juta) Cash dividends distributed (amount of dividends distributed) (Rp-million)	588.030
Rasio pembayaran dividen (persentase laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tahun 2020 yang dibagikan sebagai dividen) (%) Ratio of dividend payments (percentage of net profit attributable to parent entity in 2020 distributed as dividends) (%)	25,16%
Nilai dividen kas per lembar saham (Rp) Value of cash dividends per share (Rp)	23.521
Tanggal pengumuman Announcement date	30 Juni 2021 June 30, 2021
Tanggal pembayaran Payment date	29 Juli 2021 30 Agustus 2021 29 September 2021 July 29, 2021 August 30, 2021 September 29, 2021

Pembagian dan pembayaran dividen tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dividend distribution and payment for 2017 to 2021 can be seen in the table below.

Tahun Pembagian Year of Distribution	Tahun Buku Dividen Fiscal Year Dividend	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp Juta) Distributed Cash Dividend (Rp Million)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (Rp/share)	Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Ratio (%)
2021	2020	30 Juni 2021 June 30, 2021	29 Juli 2021 30 Agustus 2021 29 September 2021 July 29, 2021 August 30, 2021 September 29, 2021	588.030	23.521	25,16
2020	2019	4 Agustus 2020 August 4, 2020	2 September 2020 2 Oktober 2020 2 November 2020 September 2, 2020 October 2, 2020 November 2, 2020	973.500	38.940	26,73
2019	2018	16 Mei 2019 May 16, 2019	14 Juni 2019 16 Juli 2019 16 Agustus 2019 June 14, 2019 July 16, 2019 August 16, 2019	1.045.119	41.805	25,00
2018	2017	8 Mei 2018 May 8, 2018	8 Juni 2018 6 Juli 2018 8 Agustus 2018 June 8 2018 July 6 2018 August 8, 2018	768.850	59.601	25,00
2017	2016	15 Mei 2017 May 15, 2017	15 Juni 2017 14 Juli 2017 15 Agustus 2017 June 15, 2017 July 14, 2017 August 15, 2017	1.070.874	83.014	30,00

Perkembangan Dividen Kas yang Dibagikan Tahun 2017-2021 (Rp Juta)
Development of Cash Dividends Distributed 2017-2021(%)





PAJAK DAN KONTRIBUSINYA BAGI NEGARA

Pajak yang dibayarkan Perusahaan setiap tahun adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Penghasilan Karyawan (PPh Karyawan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pajak lainnya. Berikut disampaikan besaran pajak yang dibayarkan Perusahaan di tahun 2020 dan 2021.

TAXES AND CONTRIBUTION TO THE STATE

The taxes paid by the Company every year include Corporate Income Tax, Employee Income Tax, Value Added Tax (VAT) and other taxes. The following shows the amount of taxes paid by the Company in 2020 and 2021.

Perihal Description	2021 (Rp Juta) (Rp Million)	2020 (Rp Juta) (Rp Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp Million)	Persentase Percentage (%)
Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Tax	76.543	77.328	(785)	(1,02)
Pajak dan Retribusi Daerah Regional Taxes and Levies	48.719	120.670	(71.951)	(59,63)
Pajak Penghasilan* Income tax*	1.996.314	2.268.508	(272.194)	(12,00)
PPN** PPN	4.001.541	5.060.090	(1.058.549)	(20,92)
Bea dan Pajak Lainnya Customs Duties and Other Taxes	156.653	152.157	4.496	2,95
Jumlah Total	6.279.771	7.678.753	(1.398.983)	(18,22)

*) Terdiri dari PPh Wajib Pungut dan PPh Wajib Bayar
**) Terdiri dari Kurang Bayar PPN Masa, PPN dipungut oleh WAPU

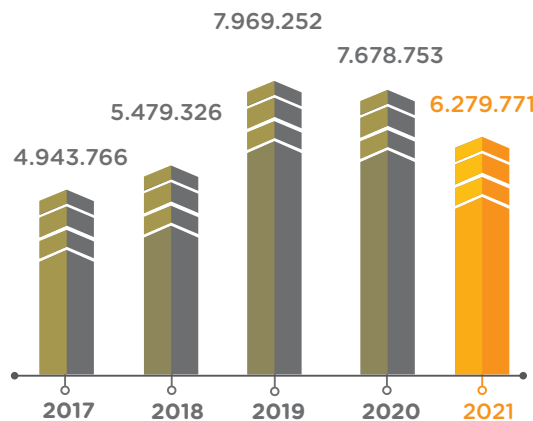
*) Includes mandatory income tax collection and mandatory income tax payments
**) Includes Underpayment of Periodic VAT, VAT is collected by WAPU

Pembayaran pajak kepada negara pada tahun 2021 lebih rendah terutama disebabkan pembayaran PPN yang lebih rendah karena proporsi penjualan pada tahun 2021 lebih banyak dari ekspor.

Tax payments to the state in 2021 were lower mainly due to lower VAT payments as the proportion of sales in 2021 was higher than exports.

Perkembangan Pembayaran Pajak Tahun 2017-2021 (Rp Juta)

Development of Tax Payments for 2017-2021 (Rp
Million)



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Informasi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham

Hingga akhir tahun 2021 Perusahaan tidak melaksanakan penawaran umum saham perdana. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham.

Informasi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

Information on the Realization of Use of Funds from Public Offering of Shares

Until the end of 2021 the Company has never conducted an initial public offering. Therefore, there is no information to report concerning the use of proceeds from the public offering of shares.

Information on the Realization of Use of Funds from the Public Offering of Bonds

Subject	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Sustainable Bond I Phase I Year 2017	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Sustainable Bond I Phase II Year 2017	Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 1 Sustainable Bond 2 Phase 1	Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 2 Sustainable Bond 2 Phase 2
Penggunaan Dana Use of Funds	16% <i>refinancing</i> Obligasi I Tahun 2014 Seri A 16% <i>refinancing</i> Bond I Year 2014 Series A	23% <i>refinancing</i> pinjaman perbankan PT Pupuk Kalimantan Timur 23% <i>refinancing</i> bank loans of PT Pupuk Kalimantan Timur	33% <i>refinancing</i> Perbankan KI Amurea II dan Revamping PA PT Petrokimia Gresik 33% <i>refinancing</i> KI Amurea II Banking and Revamping PA PT Petrokimia Gresik	<i>Refinancing</i> atas KI Perbankan Amurea II PT Petrokimia Gresik <i>Refinancing</i> KI Amurea II Banking PT Petrokimia Gresik
	84% <i>refinancing</i> pinjaman perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 84% <i>refinancing</i> bank loans of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	12% <i>refinancing</i> pinjaman perbankan PT Pupuk Kujang 12% <i>refinancing</i> bank loans of PT Pupuk Kujang	26% <i>Refinancing</i> Kredit Perbankan Modal Kerja PT Pupuk Iskandar Muda 26% <i>Refinancing</i> Bank Loans Working Capital of PT Pupuk Iskandar Muda	<i>Refinancing</i> Pinjaman Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik <i>Refinancing</i> Bank Loan PT Pupuk Indonesia Logistik
		19% <i>refinancing</i> pinjaman perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 19% <i>refinancing</i> bank loans of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	41% <i>Refinancing</i> Pinjaman Modal Kerja PT ReKayasa Industri yang berasal dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 41% <i>Refinancing</i> of PT ReKayasa Industri Working Capital Loans originating from Sustainable Bonds I Phase II	
		27% <i>refinancing</i> pinjaman perbankan PT ReKayasa Industri 27% <i>refinancing</i> bank loans of PT ReKayasa Industri		
		6% <i>refinancing</i> pinjaman perbankan PT Mega Eltra 6% <i>refinancing</i> bank loans of PT Mega Eltra		
		13% <i>refinancing</i> pinjaman perbankan PT Petrokimia Gresik 13% <i>refinancing</i> bank loans of PT Petrokimia Gresik		



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal yang terjadi di tahun buku.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, SERTA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Ketentuan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dan peraturan OJK No. VIII.G.7.

Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan pihak berelasi dari PI Grup. Entitas berelasi dengan Pemerintah mencakup entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENTS, EXPANSIONS, DIVESTMENTS, BUSINESS MERGERS, ACQUISITIONS, AND/OR DEBT/ CAPITAL RESTRUCTURING

There is no material information to report regarding expansions, divestments, mergers, acquisitions, and/or debt/capital restructuring.

INFORMATION ON AFFILIATED TRANSACTIONS, TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES, AND TRANSACTIONS WITH CONFLICTS OF INTEREST

Related Party Terms

The Company applies the Statement of Accounting Standards Finance (PSAK) 7 "Disclosure of Related Parties" and OJK regulation No. VIII.G.7.

Based on OJK Regulation No. VIII.G.7, Government-related entities are related parties of the PI Group. Government-related entities include entities that are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

Details of the nature of the relationships, and the types of significant transactions with related parties are as follows:

Nama Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Pemerintah Indonesia Government of Indonesia	Pemegang Saham Utama Government of Indonesia	Dividen dan penggantian biaya subsidi Dividends and subsidy reimbursements
Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Syariah Indonesia	Entitas di bawah kendali Pemerintah Entities controlled by Government	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, fasilitas <i>Non Cash loan</i> , fasilitas <i>Bill Purchasing Line</i> fasilitas Kredit Modal Kerja, fasilitas <i>Supply Chain Financing</i> , fasilitas <i>Treasury Line</i> Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, placement of restricted cash, Non-Cash Loan facility, Bill Purchasing Line facility, Working Capital Loans facility, Supply Chain Financing Facility, Treasury line facility

Nama Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Adhi Karya (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bhandra Graha Reksa (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Fokus Jasa Mitra, PT Graha Sarana Gresik, PT Iglas (Persero), PT Industri Gula Glenmore, PT Krakatau Engineering, PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan entitas anak, PT Perta Arun Gas, PT Pertamina Niaga, PT Pertamina (Persero) dan entitas anak, PT Pertani (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Petro Graha Medika, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, Yayasan Petrokimia Gresik, Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik, Perum Bulog, Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, Dana Pensiun Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) BNI, DPLK BRI, Tabungan Hari Tua (“YHT”) PIM, BRI Life, PT Pembangunan Perumahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Entitas di bawah kendali Pemerintah Entities controlled by Government	Penjualan pupuk subsidi, penjualan pupuk non-subsidi, pendapatan jasa EPC, pendapatan jasa non-EPC, penjualan jasa, penjualan produk non-pupuk, pembelian bahan baku, sewa, jasa pemeliharaan mekanik, pemakaian listrik, jasa pengangkutan gas, dan pengelola aset program manfaat pasti. Sales of subsidized fertilizers, sales of non-subsidized fertilizers, income from EPC services, revenue from non-EPC services, sales of services, sales of non-fertilizer products, purchases of raw materials, rentals, mechanical maintenance services, electricity consumption, gas transportation services, and asset management for defined benefit programs.
PT Aneka Jasa Grhadika, MNK, PT Petrocentral, PT Gresik Cipta Sejahtera (Persero), PT Petrocentral, PT Petrokopindo Cipta Selaras.	Entitas asosiasi Associated entities	Penjualan pupuk non-subsidi, penjualan non-pupuk, sewa dan pembelian non-bahan baku. Non-subsidy fertilizer sales, non-fertilizer sales, rental and purchase of raw materials
PT Kaltim Jordan Abadi, PT Petro Jordan Abadi (“PJA”)	Ventura Bersama Joint Ventures	Penjualan non-pupuk, pembelian bahan baku. Non-fertilizer sales, purchase of raw materials

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi.

Realisasi Saldo dan Transaksi Transaksi Pihak Berelasi

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi pada Periode Tahun Buku 2021 dan 2020

Explanation Regarding Fairness of the Transactions

The fairness of all transactions conducted by the Company with Related Parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with PSAK 7 standards regarding “Disclosure of Related Parties”. All transactions with related parties are carried out at normal prices, with terms and conditions the same as those with third parties, and have been disclosed in the Company’s consolidated financial statements.

Reason for Transactions

As with transactions with third parties, the Company’s transactions with Related Parties are carried out in line with the Company’s operational and business development needs, as well as the principle of mutual needs between the Company and Related Parties.

Realization of Balances and Related Party Transactions

Realization of Balances and Related Party Transactions in the 2021 and 2020 Fiscal Years



Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balance of Related Parties Assets	2021	2020	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets	
			2021	2020
	Rp Juta Rp Million	Rp Juta Rp Million	%	%
Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents	17.453.305	12.405.518	13,59	10,13
Piutang Usaha - Bersih Trade receivables - Net	851.990	1.037.863	0,66	0,85
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Gross Claims to Project Owners	1.303.488	2.762.362	1,01	2,26
Total Aset dari Pihak-Pihak Berelasi Total Assets of Related Parties	19.608.783	16.205.743	15,26	13,23
Total Aset Total Assets	128.463.172	122.495.556		

Total saldo pihak berelasi dalam aset tahun 2021 sebesar Rp19,61 Triliun atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp16,21 Triliun. Meningkatnya saldo pihak berelasi dalam aset tahun 2021 terutama disebabkan lebih tingginya nilai kas setara kas.

The total assets in related parties in 2021 amounted to Rp19.61 Trillion, higher than Rp16.21 Trillion in 2020. This increase was mainly due to the higher value of cash equivalents.

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Balance of Related Parties Liabilities	2021	2020	Persentase dari Jumlah Liabilitas Percentage from Total Liabilities	
			2021	2020
	Rp Juta Rp Million	Rp Juta Rp Million	%	%
Utang Usaha Trade Payables	279.646	550.957	0,49	1,00
Utang Bruto kepada Pelanggan untuk Pekerjaan Konstruksi Amounts Due To Customers From Construction Contract Work	-	37.329	-	0,07
Total Liabilitas dari Pihak-Pihak Berelasi Total Liabilities of Related Parties	279.646	588.286	0,49	1,07
Total Liabilitas Total Liabilities	56.523.196	55.132.739		

Total saldo pihak berelasi dalam liabilitas tahun 2021 sebesar Rp279,65 Miliar atau lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp588,28 Miliar lebih rendahnya saldo pihak berelasi dalam liabilitas tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 disebabkan menurunnya utang usaha.

Total related parties' liabilities in 2021 amounted to Rp279.65 Billion, lower than Rp588.28 Billion in 2020, due to a decrease in trade payables.

Transaksi Pihak Berelasi dalam Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Sales and Other Operating Revenues From Related Party Transactions	2021	2020	Persentase dari Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Percentage of Total Sales and Other Operating Income	
			2021	2020
	Rp Juta Rp Million	Rp Juta Rp Million	%	%
Penjualan Produk Product Sales	1.998.444	2.219.930	2,54	3,09
Pengganti Biaya Subsidi Subsidy Fees	25.258.692	25.712.148	32,13	35,77
Pendapatan Jasa Service Revenue	2.700.542	6.597.704	3,44	9,18
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Dari Pihak-Pihak Berelasi Total Sales and Other Operating Revenues From Related Parties	29.957.678	34.529.782	38,11	48,04
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Operating Revenues	78.603.136	71.877.573		

Total penjualan dan pendapatan usaha lainnya dari pihak-pihak berelasi tahun 2021 sebesar Rp29,96 Triliun turun 13,24% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp34,53 Triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan penjualan ke pihak ketiga baik dalam negeri dan ekspor serta adanya penurunan pendapatan jasa EPC kepada pihak berelasi.

Total sales and other operating revenues from related parties in 2021 amounted to Rp29.96 Trillion, a decrease of 13.24% compared to Rp34.53 Trillion in 2020. This decrease was mainly due to an increase in sales to third parties, both domestically and exports, as well as a decrease in EPC service revenues from related parties.

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan Transaction with Related Parties in Cost of Revenue	2021	2020	Persentase dari Jumlah Beban Pokok Pendapatan dan Beban Usaha Percentage of Total Cost of Revenue and Operating Expenses	
			2021	2020
	Rp Juta	Rp Juta	%	%
Pembelian Barang dan Jasa dari Pihak Berelasi Purchase of Goods and Services from Related Parties	22.339.337	16.870.777	35,20	27,77
Total Beban Pokok Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi Cost of Revenues from Related Parties	22.339.337	16.870.777	35,20	27,77
Total Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenues	63.469.789	60.755.846		

Total pembelian barang dan jasa dari pihak berelasi pada tahun 2021 sebesar Rp22,34 Triliun, meningkat 32,41% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp16,87 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan harga beli barang yang terkait dengan komoditi energi seperti batubara dan minyak yang lebih tinggi dari tahun 2020, dan tarif jasa seperti tarif angkutan dan jasa untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Total goods and services purchased from related parties in 2021 amounted to Rp22.34 Trillion, an increase of 32.41% compared to Rp16.87 Trillion in 2020. The increase was mainly due to an increase in the purchase price of goods related to energy commodities such as coal and oil which were higher than in 2020, and service tariffs for the Company's transportation and operational needs.

Perihal Description	2021	2020	Persentase dari Jumlah Beban Kepegawaian Percentage of Total Employment Expenses	
			2021	2020
	Rp Juta	Rp Juta	%	%
Gaji dan Imbalan Kerja Jangka Pendek Lain dan Imbalan Pasca Kerja Salary and Other Short-Term Employee Benefit and Post-Employment Benefit				
Dewan Komisaris Board of Commissioners	107.908	108.590	2,68	2,70
Direksi Board of Directors	55.248	42.304	1,37	1,05
Total Personel Manajemen Kunci Total Key Management Personnel	163.156	150.894	4,06	3,75
Total Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	4.023.124	4.024.090		

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi serta Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Seluruh transaksi pihak berelasi/afiliasi di atas merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), Perusahaan telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 7 (Revisi 2015).

Tidak terdapat transaksi material terkait transaksi pihak berelasi yang terjadi di tahun 2021. PTPI bukan merupakan perusahaan yang memperdagangkan ekuitasnya kepada umum, seluruh saham PTPI dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian seluruh transaksi telah diketahui oleh pemegang saham.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat informasi keuangan yang dilaporkan mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

Company Policy Regarding the Review Mechanism of Transactions and Compliance with Related Regulations and Provisions

All the related party/affiliate transactions above are affiliated transactions were carried out to generate business revenue and were carried out routinely, repeatedly, and/or continuously. As stated in the Audited Financial Statement for the fiscal year 2021, audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), the Company has disclosed transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2015).

There were no material transactions regarding related party transactions in 2021. PTPI is not a company that trades its equity to the public, all PTPI shares are owned by the Republic of Indonesia. Thus, all transactions are known to the shareholders.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Throughout 2021, there was no financial information that was reported to contain extraordinary and rare events.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES TO LAW AND REGULATIONS AFFECTING THE COMPANY

Nomor dan Nama Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang diberlakukan Number and Name of the applicable regulations and/or laws	Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang diberlakukan Explanation of the applicable regulations and/or laws	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Company
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 134.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri Minister of Energy and Mineral Resources Decree Number: 134.K/HK.02/ MEM.M/2021 concerning Users and Prices of Certain Natural Gas in the Industrial Sector	Mengatur dan menetapkan pengguna, sumber pasokan, harga dan tarif penyaluran gas bumi Regulate and determine users, sources of supply, prices and tariffs for natural gas distribution	Adanya harga yang tetap There is a fixed price
Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 Republic of Indonesia Minister of Agriculture of the Regulation Number: 49 of 2020 concerning Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector for Fiscal Year 2021	Syarat penebusan pupuk secara manual dan Perubahan Harga Eceran Tertinggi Terms of manual reimbursement of fertilizers and changes in the highest retail price	Serapan petani menurun menyebabkan pencapaian penjualan dan pendapatan perusahaan menjadi rendah. The absorption of farmers decreases causing the Company sales and income to be lower.
Keputusan Menteri pertanian Nomor : 104/Kpts/SR.340/M/2/2021 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 Minister of Agriculture Decree Number: 104/Kpts/SR.340/M/2/2021 concerning Determination of Temporary Cost of Goods Sold for Subsidized Fertilizers in Agriculture Sector for Fiscal Year 2021	Harga pokok sementara pupuk bersubsidi Cost of subsidized fertilizer	Pemerintah punya hutang kepada perusahaan akibat selisih cukup tinggi antara HPP sementara dengan HPP Realisasi The Government has debts to companies due to the high difference between temporary HPP and Realized HPP

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA

ACCOUNTING POLICY CHANGES AND THEIR IMPACT

Penerapan dari standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 yang tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi entitas dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis – Definisi Bisnis
- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60: Instrumen Keuangan – Pengungkapan dan PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga (Bagian 2)
- Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Jasa Konsesi Sewa terkait Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”).

The adoption of annual standards, interpretations, amendments and adjustments effective January 1, 2021 did not result in significant changes to the entity’s accounting policies and did not have any material effect on the amounts reported in the current or prior year:

1. Amendment to PSAK 22: Business Combination Definition of Business
2. Amendment to PSAK 71: Financial Instruments, PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60: Financial Instruments – Disclosures, and PSAK 73: Leases on Reform of Interest Rate References (Part 2)
3. Amendment to PSAK 73: Leases on Lease Concession Services related to Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”).



TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANY HEALTH LEVEL

Sebagai BUMN, Perusahaan memiliki perangkat untuk melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kesehatan Perusahaan diukur melalui beberapa indikator, yakni aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.

As a State-Owned Company, the Company has tools to measure the Company's health level that refer to the Minister of SOEs Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises. The Company's Health Level is measured using several indicators, including financial aspects, operational aspects, and administrative aspects.

No.	Uraian Description	Bobot Weight	Realisasi Realization	
			2021	2020
Aspek Keuangan Financial Aspect				
1	ROE	20.00	12,00	5,50
2	ROI	15.00	9,00	6,00
3	Cash Ratio	5.00	5,00	5,00
4	Current Ratio	5.00	5,00	5,00
5	Collection Period (hari)	5.00	5,00	5,00
6	Perputaran Persediaan (hari) Total Asset Turnover (days)	5.00	4,50	5,00
7	Perputaran Total Aset Ratio of Total Own Capital to Total Assets	5.00	3,00	3,00
8	Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset Ratio of Total Own Capital to Total Assets	10.00	8,50	8,50
Total Aspek Keuangan Total Operational Aspect		70.00	52,00	43.00
Aspek Operasional Administrative Aspect				
1	Pencapaian Produksi Production Achievement	5.00	5,00	5,00
2	Pencapaian Efisiensi Bahan Baku Gas Raw Material Gas Efficiency Achievement	5.00	4,00	5,00
3	Produktivitas Tenaga Kerja Labor Productivity	5.00	5,00	5,00
Total Aspek Operasional Total Operational Aspect		15.00	14,00	15,00

No.	Uraian Description	Bobot Weight	Realisasi Realization	
			2021	2020
Aspek Administrasi Administrative Aspect				
1	Laporan Audit Audit Report	3,00	2,00	2,00
2	Rancangan RKAP RKAP draft	3,00	3,00	3,00
3	Laporan Periodik Periodic Report	3,00	3,00	3,00
4	Kinerja PKBL PKBL Performance			
5	Efektivitas Penyaluran Dana Effectiveness of Fund Distribution	3,00	3,00	3,00
6	Kolektabilitas Penyaluran Pinjaman Loan Collectability	3,00	3,00	3,00
Total Aspek Administrasi Total Administrative Aspect		15,00	14,00	14,00
Total Skor Total Score		100,00	80,00	72,00
Kategori Category			"A"	"A"
Tingkat Kesehatan Soundness Level			"Sehat" "Healthy"	"Sehat" "Healthy"

Secara keseluruhan, realisasi skor tingkat kesehatan Perusahaan pada tahun 2021 adalah sebesar 80,00 dengan kualifikasi "A" dan Sehat. Pencapaian skor tingkat kesehatan tahun 2021 lebih tinggi dari capaian tahun 2020 sebesar 72,00, terutama disebabkan karena tingginya capaian laba tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sehingga mampu meningkatkan rasio ROE dan ROI.

Overall, the Company's health level in 2021 scored 80.00 with "A" and Healthy qualifications. The 2021 health level score was higher than the 2020 achievement of 72.00, mainly due to the higher profit achievement in 2021 compared to 2020 that increased the ROE and ROI ratios.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN DI TAHUN 2021

Mengacu pada perkembangan tahun buku 2021, ada sejumlah isu yang berpotensi mempengaruhi kinerja Perusahaan. Di antaranya adalah:

1. Tingginya harga komoditas internasional sehingga harga bahan baku non gas menjadi volatil;
2. Denda atas keterlambatan *project Rekind*;
3. Kondisi pandemic COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya berpotensi mempengaruhi kinerja PI Grup, terutama pada segmen Jasa.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Mengacu pada kondisi tahun 2021, peningkatan harga komoditas internasional berdampak pada harga bahan baku NPK yang tinggi. Kendati demikian perusahaan melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengamanaan kontrak jangka panjang untuk bahan baku berbasis fosfat untuk kebutuhan produksi NPK.
2. Melakukan produksi bahan baku DAP untuk kebutuhan produksi NPK.

Pada saat bersamaan, pada segmen usaha di bidang jasa terdapat keterlambatan atas *project Rekind* yang berdampak pada timbulnya denda yang cukup signifikan. Dengan kondisi tersebut, Perusahaan berupaya melakukan Restrukturisasi Keuangan untuk memperbaiki kondisi keuangan *Rekind* sehingga *project* tersebut dapat diselesaikan.

Kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan dinamika politik dan ekonomi global membuat perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi lonjakan harga dan keterbatasan pasokan bahan baku. Perusahaan tetap optimistis dengan kemampuan kelangsungan usaha ke depan. Keyakinan itu, antara

MATTERS WITH A POTENTIAL SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY IN 2021

Referring to the development of the 2021 fiscal year, there are a number of issues that have the potential to affect the Company's performance, including:

1. High international commodity prices so that the price of non-gas raw materials becomes volatile;
2. Fines for delays in the *Rekind* project;
3. The condition of the COVID-19 pandemic that has not yet fully recovered has the potential to affect the performance of the PI Group, especially in the Services segment.

MANAGEMENT ASSESSMENT ON MATTERS WITH A POTENTIAL SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

Referring to the conditions in 2021, the increase in international commodity prices had an impact on high NPK raw material prices. However, the company made the following efforts to overcome this problem:

1. Secured long-term contracts for phosphate-based raw materials for NPK production needs.
2. Endured production of DAP raw materials for NPK production needs.

At the same time, in the business service segment, there was a delay in the *Rekind* project that resulted in a significant fine. As a result, the Company is carrying out Financial Restructuring to improve *Rekind*'s financial condition so that the project can be completed.

The recovery conditions after the COVID-19 pandemic, and the dynamics of global politics and economics, have forced the Company to apply the precautionary principle in anticipating price spikes and limited supply of raw materials. The Company remains optimistic about its ability to continue its business going forward. This belief is

lain didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki Perusahaan serta kemampuan operasi yang excellent. Karena itulah, Perusahaan tidak melihat adanya dampak yang signifikan dan material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Dalam melakukan *assessment* atas potensi tantangan yang akan dialami, Perusahaan menggunakan sejumlah asumsi, baik dari internal maupun eksternal. Hal ini juga menjadi acuan yang digunakan pada rencana kerja 2022. Asumsi dimaksud adalah:

1. Perkembangan kurs Rupiah, khususnya terhadap Dolar Amerika Serikat;
2. Peraturan Pemerintah yang mengatur harga gas industri pupuk;
3. Harga amoniak dan urea sesuai asumsi yang digunakan dalam RKAP 2022 dan RJP 2022-2025;
4. Hasil pemeringkatan Perusahaan dan surat utang Pupuk Indonesia tahun 2021 dengan predikat : AAA”;
5. Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah;
6. Rencana produksi dan penjualan sesuai dengan RKAP 2022;
7. Rencana pengembangan di sektor pupuk (Pusri III B dan NPK Chemical PIM) serta diversifikasi produk Petrochemical (Pabrik Soda Ash PKG dan PKT).

supported by the Company’s human capital and excellent operating capabilities. For this reason, the Company does not see any significant and material impacts that may affect business continuity.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING ASSESSMENT OF MATTERS WITH A POTENTIAL SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY’S BUSINESS CONTINUITY

In conducting an assessment of the potential challenges that will be experienced, the Company used a number of internal and external assumptions, as used in the 2022 work plan. The assumptions were:

1. The development of the Rupiah exchange rate, especially against the United States Dollar;
2. Government regulations regulating the price of gas for the fertilizer industry;
3. Ammonia and urea prices according to the assumptions used in the 2022 RKAP and 2022-2025 RJP;
4. The results of the rating of the Company and the debt securities of Pupuk Indonesia in 2021 with the predicate: AAA”;
5. Distribution of subsidized fertilizers according to the allocation set by the Government;
6. Production and sales plan in accordance with the 2022 RKAP;
7. Development plans in the fertilizer sector (Pusri III B and NPK Chemical PIM) as well as diversification of Petrochemical products (PKG and PKT Soda Ash Factory).



PETA JALAN USAHA: RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

BUSINESS ROAD MAP: LONG TERM DEVELOPMENT PLAN

PTPI akan melakukan proses transformasi model bisnis untuk lebih mendekati petani sebagai konsumen dan terus melakukan pengembangan produk hilirisasi/*adjacent Chemicals* yang saat ini juga merupakan tren beberapa perusahaan kelas dunia.

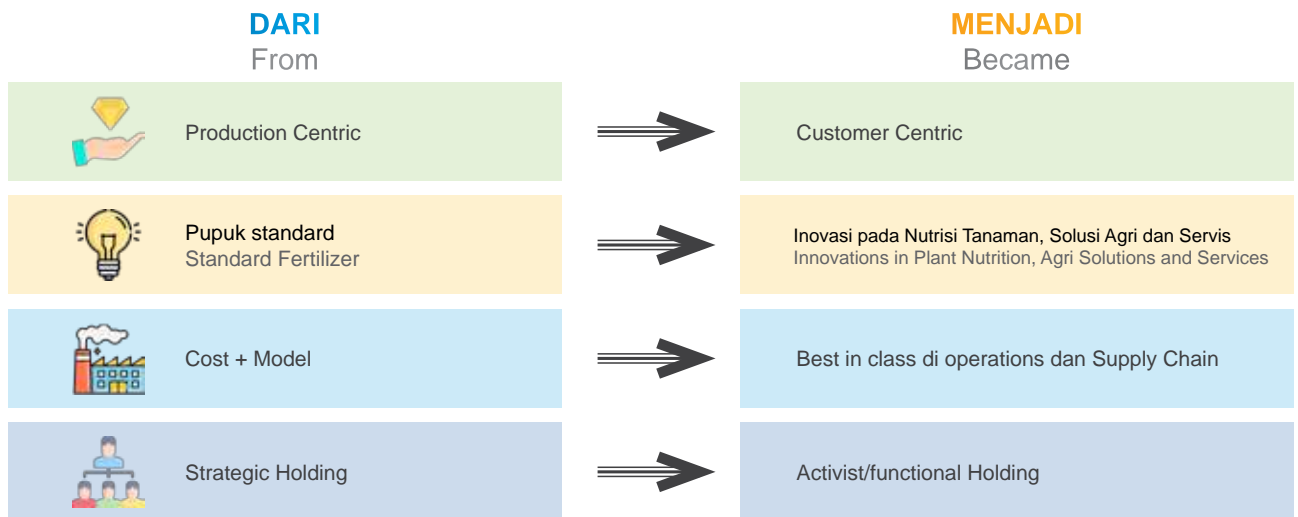
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2022 disusun berdasarkan visi dan misi PTPI yaitu “Perusahaan nasional berkelas dunia untuk nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang berkelanjutan serta mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional” dan RJP Tahun 2020-2024. Model bisnis yang akan dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat *leadership position* di sektor industri pupuk di Indonesia
 - a. Mempertahankan *market share* pasar petani kecil/*ritel (small farm holder)* terutama menjelang perubahan pola subsidi.
 - b. Meningkatkan *market share* pasar korporasi/*perkebunan besar (large estates)*
 - c. Memperbaiki daya saing terutama dalam hal biaya/harga dalam rangka untuk meningkatkan profitabilitas
2. Mengembangkan solusi pertanian (*agro-solutions*) dan pelayanan untuk meningkatkan keterikatan konsumen
 - a. Mengembangkan produk *nutrient* inovatif untuk petani
 - b. Mengembangkan solusi dan layanan inovatif di bidang pertanian untuk meningkatkan kedekatan konsumen
3. Pengembangan produk hilirisasi/*adjacent Chemicals* yang potensial dan memperkuat *circular economy*
 - a. Meningkatkan sinergi dalam *circular economy* dengan industri lainnya
 - b. Mengembangkan potensi bisnis produk hilirisasi/*adjacent Chemicals* untuk memaksimalkan nilai dari limbah dan produk samping yang dihasilkan
4. Penyelarasan rencana-rencana investasi sesuai dengan arah strategis PTPI
5. Menjaga kesehatan *financial* perusahaan
Berdasarkan visi dan model bisnis untuk mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut serta dalam rangka menghadapi tantangan bisnis ke depan dan tren disrupsi yang terjadi, PTPI akan bertransformasi dengan *Value Proposition* sebagai berikut:

PTPI will carry out a business model transformation process to be closer to farmers as consumers, and continue to develop downstream products/*adjacent Chemicals*, which is currently a trend for several world-class companies.

The Company's 2022 Work Plan and Budget was prepared based on PTPI's vision and mission, namely “To become a sustainable World-class national company of plant nutrition and agricultural solutions and able to create national economic and social impact” and the 2020-2024 RJP. The business models developed to support the successful achievement of the vision are as follows:

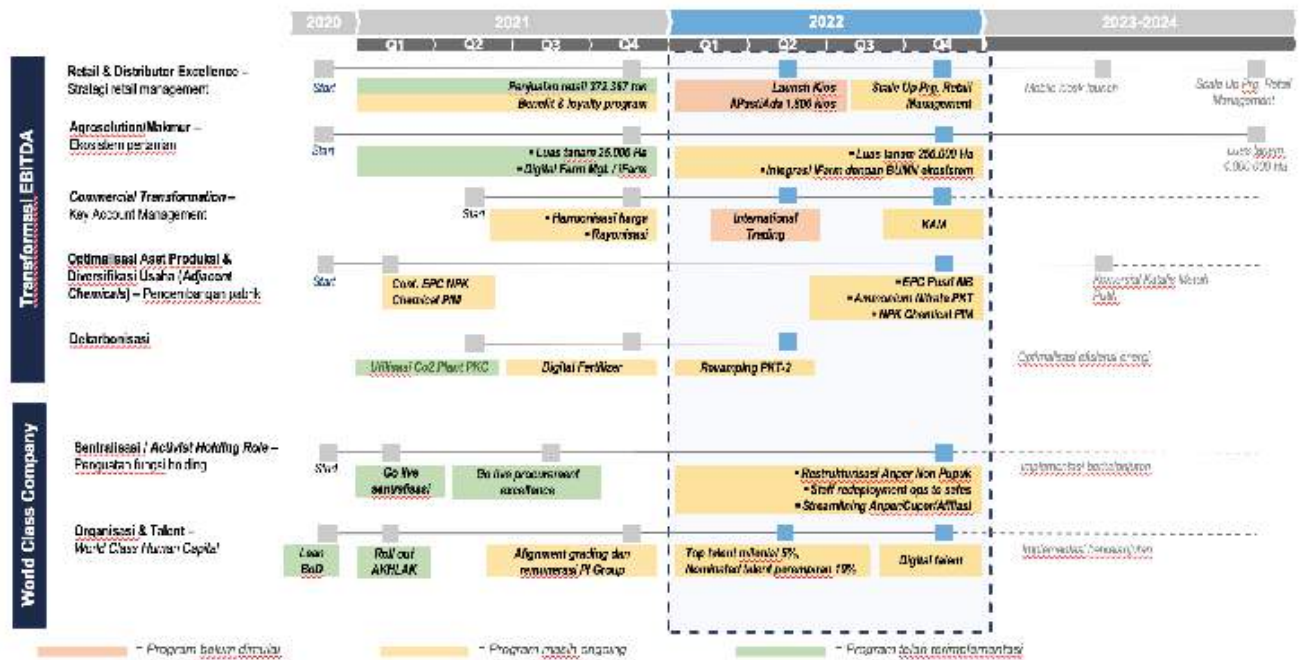
1. Strengthen the leadership position in the fertilizer industry sector in Indonesia
 - a. Maintain the market share of the small farmer/retail market (small farm holder), especially ahead of the change in the subsidy pattern.
 - b. Increase the market share of the corporate/large estates market (large estates)
 - c. Improve competitiveness especially in terms of cost/price to increase profitability
2. Develop agro-solutions and services to increase consumer engagement
 - a. Develop innovative nutrient products for farmers
 - b. Develop innovative solutions and services in agriculture to increase consumer closeness
3. Develop potential downstream/*adjacent Chemicals* products and strengthen circular economy
 - a. Increase synergy in the circular economy with other industries
 - b. Develop business potential for downstream products/*adjacent Chemicals* to maximize the value of waste and by-products produced
4. Align investment plans in accordance with PTPI's strategic direction
5. Maintain the Company's financial health
Based on the vision, and established business models to support the achievement of the vision, to face future business challenges and disruptive trends, PTPI will transform its Value Proposition as follows:

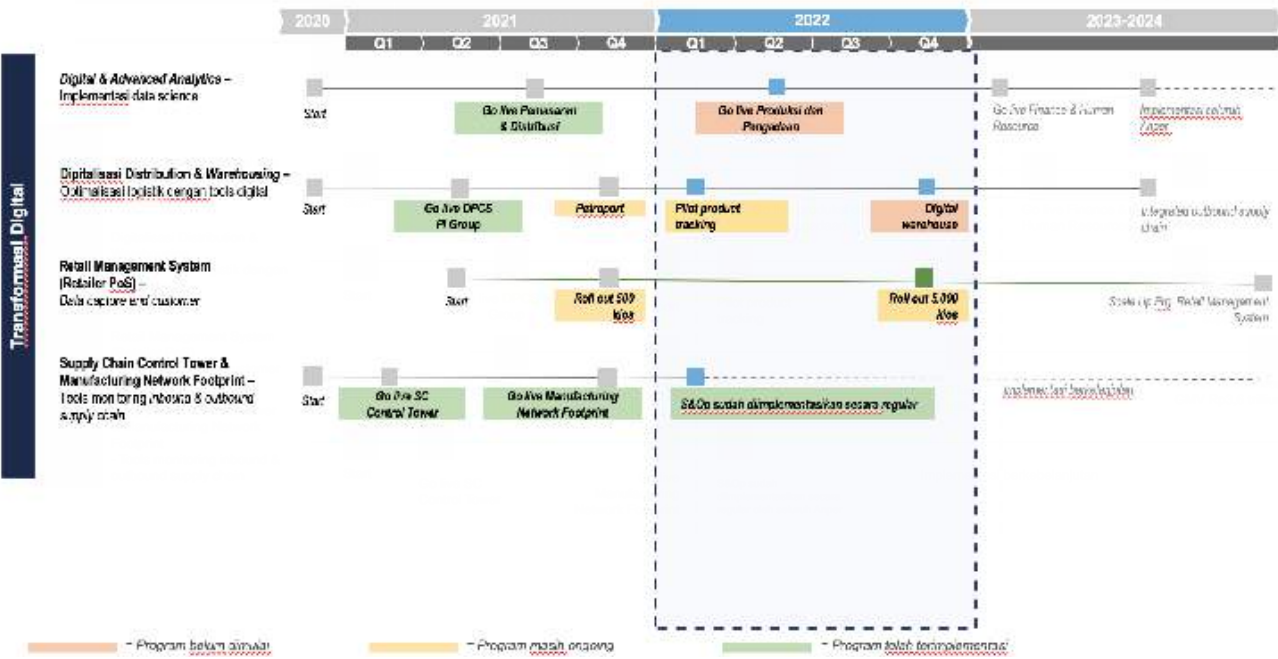


Sumber : RJP PTPI Tahun 2020-2024 | Source: PTPI 2020-2024 Long-term plan

PTPI menyusun beberapa program strategis dalam rangka menyukseskan transformasi yang dilakukan dengan *milestone* sebagai berikut :

PTPI prepared several strategic programs to ensure the transformation's success with the following milestones:





Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank





05

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Capital Management

PTPI senantiasa melakukan pengelolaan SDM yang tepat dan berkesinambungan melalui perencanaan yang terintegrasi dengan visi dan misi Perusahaan, untuk mendukung keberlanjutan Perusahaan jangka panjang

PTPI always performs appropriate and sustainable HC management through integrated planning with the Company's vision and mission, to support the long-term sustainability of the Company.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan Perusahaan. Melalui pengelolaan SDM yang tepat dan berkesinambungan, PTPI terus melakukan pengembangan *Talenta* untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas di tengah persaingan dan lingkungan bisnis yang terus berkembang.

PTPI menyadari bahwa keberadaan SDM yang tangguh dan unggul memegang peranan yang sangat penting guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan SDM yang diwujudkan melalui perencanaan tenaga kerja yang terintegrasi dengan rencana Perusahaan secara umum, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan arah pembangunan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang.

Human Capital (HC) is one of the most important factors in supporting the Company's sustainability. Through proper and sustainable HC management, PTPI will continue to develop talent to produce superior and quality HC in a competitive and growing business environment.

PTPI realizes that the existence of strong and superior HC plays a very important role in realizing the Company's vision and mission. To that end, the Company always carries out HC management through manpower planning integrated with the Company's general plans, including the Company's Work Plan and Budget (WP&B) and the direction of the Company's long term business development.

Manajemen Perusahaan senantiasa mengkaji ulang kebijakan SDM yang telah dijalankan serta melakukan penyempurnaan organisasi sehingga terbangun keselarasan dari kebutuhan dan rencana pengembangan SDM sesuai arah pengembangan Perusahaan ke depan. Pengelolaan dan pengembangan SDM yang dilakukan oleh Perusahaan dimulai dari rancangan struktur organisasi yang selalu disesuaikan dengan arah bisnis dan strategi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan selalu melakukan evaluasi unit kerja terhadap efektivitas proses bisnis serta mempertimbangkan aspek efisiensi.

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melakukan pengembangan organisasi yang ditetapkan melalui peraturan internal, yaitu Surat Keputusan Direksi No. 082/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi di PT Pupuk Indonesia (Persero) Hal ini dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Organisasi.

The Company's management constantly reviews the HC policies that have been implemented and makes improvements to the organization to ensure a harmony between the needs and plans for HC development in line with the direction of the Company's future development. The Company's HC management and development carried out starts with the organizational structure design, which is always adjusted to the Company's business direction and strategy. To achieve this, the Company evaluates work units on the effectiveness of business processes whilst considering the efficiency aspects.

In 2021, the Company carried out an organizational development as stipulated in the Board of Directors Decree No. 082/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021 concerning Organizational Structure at PT Pupuk Indonesia (Persero). This is conducted in the context of Organizational Restructuring.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

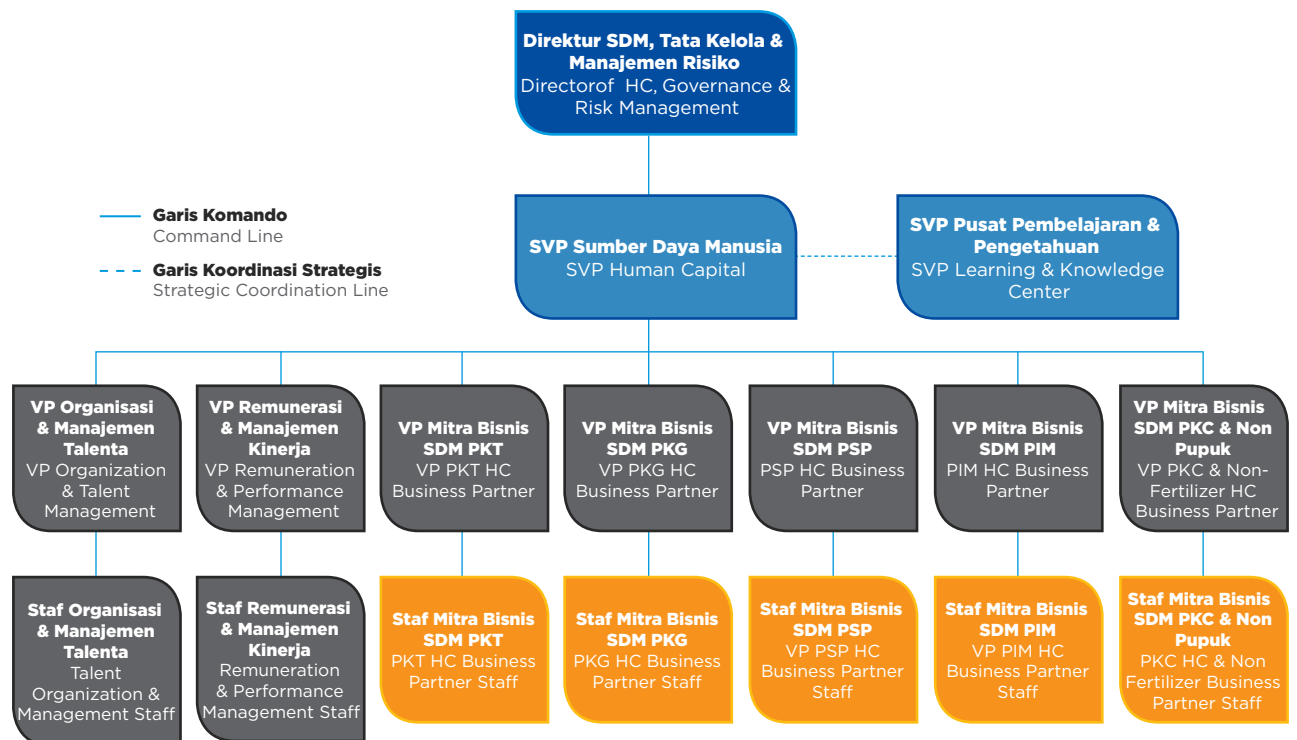
Secara struktural, pengelolaan dan pengembangan SDM PTPI dilakukan oleh Direktorat SDM dan Tata Kelola & Manajemen Risiko melalui Kompartemen *SDM* dan Kompartemen Pusat Pembelajaran & Pengetahuan sebagaimana yang terlampir pada struktur organisasi pengelolaan dan pengembangan SDM PTPI berikut ini.

Struktur Organisasi Pengelolaan dan Pengembangan SDM PTPI

ORGANIZATION STRUCTURE AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

Structurally, PTPI's HC management and development is carried out by the HC and Governance & Risk Management Directorate through the HC Compartment and the Learning & Knowledge Center Compartment as described in the following PTPI HC management and development organization structure.

PTPI HC Management and Development Organization Structure



Berdasarkan struktur organisasi di atas, tanggung jawab pengelolaan SDM PTPI dijalankan oleh Kompartemen *SDM* sementara tanggung jawab pengembangan SDM PTPI dijalankan Kompartemen Pusat Pembelajaran & Pengetahuan. Kedua Kompartemen tersebut dipimpin oleh *Senior Vice President* dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur SDM, Tata Kelola & Manajemen Risiko.

Kompartemen SDM

Kompartemen SDM memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan SDM mulai dari perencanaan kebutuhan karyawan hingga program pensiun karyawan. Per 31 Desember 2021, Kompartemen SDM dikepalai oleh Jojok Wido Harjoso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/005/2021 tanggal 7 Januari 2021.

Tugas Pokok Kompartemen SDM

PTPI telah menetapkan tugas pokok Kompartemen *SDM* yang uraiannya disampaikan di bawah ini:

1. Merencanakan rancangan dan kebijakan rencana jangka panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis PTPI di bidang *SDM* agar sesuai dengan rencana strategis perusahaan.
2. Merencanakan rancangan rencana kerja tahunan (RKAP) bidang *SDM* baik internal maupun Anggota *Holding* sebagai acuan kegiatan dan sasaran kerja yang dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan, untuk mendukung tercapainya target perusahaan yang ditetapkan pemegang saham.
3. Merencanakan kebijakan perancangan (struktur) organisasi korporasi dan Anak Perusahaan yang efektif dan efisien, berorientasi pada produktivitas dan nilai tambah bagi pemegang saham agar visi dan misi perusahaan tercapai.
4. Merencanakan kebijakan perancangan (struktur) organisasi korporasi dan Anak Perusahaan yang efektif dan efisien, berorientasi pada produktivitas dan nilai tambah bagi pemegang saham agar visi dan misi perusahaan tercapai.
5. Merencanakan kebijakan pengelompokan fungsi-fungsi organisasi yang harmonis dan terstandar yang disesuaikan dengan kompetensi bidang PI Grup sehingga memungkinkan dilakukannya lintas karier karyawan di antara PI Grup.
6. Merencanakan kebijakan program pembangunan *SDM* di PI Grup yang kompetitif sehingga mampu menjawab tantangan profesional untuk jangka panjang bagi pemegang saham.
7. Merencanakan, mengelola dan mengoordinasikan kebijakan dan standarisasi program pengembangan SDM berbasis kompetensi di PI Grup secara optimal yang meliputi: struktur organisasi, sistem rekrutmen dan seleksi, pengembangan dan peningkatan kompetensi, profesionalisme karyawan, remunerasi/kompensasi, apresiasi dan penilaian prestasi kerja serta sistem informasi SDM di korporasi.

Within this organization structure, PTPI's HC management responsibility is carried out by the HC Compartment, while PTPI's HC development responsibility is carried out by the Learning & Knowledge Center Compartment. The two compartments are led by a Senior Vice President who reports directly to the Director of HC, Governance & Risk Management.

HC Compartment

The HC compartment is responsible for managing HC from the employee planning stage through to employee retirement. As of December 31, 2021, the HC Compartment was headed by Jojok Wido Harjoso who was appointed based on Board of Directors Decree No. SK/DIR/005/2021 dated January 7, 2021.

HC Compartment Main Duties

PTPI has determined the following main duties of the HC Compartment:

1. Planning the long-term plan (RJP) formulation and policy, as the strategic plan for PTPI HC in line with the Company's strategic plan.
2. Planning the annual work plan and budget (WP&B) for HC, both internally and for Holding Members as a reference for activities and work targets that can be evaluated and accounted for, to support the achievement of the targets set by shareholders.
3. Planning the policies for a corporate and subsidiary organization structure that is effective and efficient, oriented towards productivity and added value for shareholders to ensure the achievement of the Company's vision and mission.
4. Plan an effective and efficient corporate and subsidiaries organization design policy (structure), oriented towards productivity and adding value for shareholders so that the Company's vision and mission are achieved.
5. Planning a harmonized and standardized organizational function grouping policy aligned with the PI Group competencies, which ultimately will enable employee career changes within the PI Group.
6. Planning a competitive HC development program policy in the PI Group in order to respond to the long-term professional challenges for shareholders.
7. Planning, managing, and coordinating the policy and standardization of a competency-based HC development program at PI Group in. An optimal manner, consisting of: organizational structure, recruitment and selection system, competency development and improvement, employee professionalism, remuneration/ compensation, work performance appreciation and assessment, as well as the corporate HC information system.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 8. Merencanakan kebijakan harmonisasi program-program Pascakerja PI Grup di antaranya meliputi Program Dana Pensiun, Prokespen dan Tabungan Hari Tua, agar kesejahteraan karyawan pensiunan tetap terjamin. 9. Merencanakan kebijakan efisiensi biaya-biaya administrasi personalia/ketenagakerjaan di PI Grup untuk menghasilkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kerja setinggi-tingginya dalam pencapaian tujuan korporasi. 10. Merencanakan dan mengendalikan pengelolaan biaya personalia/ketenagakerjaan di Anak Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. 11. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat-rapat Pokja khususnya di bidang <i>SDM</i> dengan Anak Perusahaan, sehingga terjalin forum komunikasi yang efektif. 12. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik. 13. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di Unit Kerjanya berdasarkan Peraturan Perusahaan dan <i>Job Description</i> agar diperoleh <i>SDM</i> berkualitas. 14. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Kepatuhan Anti Penyuapan, GCG (<i>Good Corporate Governance</i>), TQM (<i>Total Quality Management</i>), dan CSR (<i>Corporate Social Governance</i>) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan. | <ol style="list-style-type: none"> 8. Planning a policy to harmonize PI Group's Post-employment programs, including Pension Fund, Prokespen and Old Age Savings Program, to ensure that the welfare of retired employees is guaranteed. 9. Planning a cost efficiency policy for PI Group personnel/labor administration costs to generate the highest work effectiveness, efficiency, and productivity in order to achieve corporate goals. 10. Planning and controlling personnel/labor cost management in subsidiaries in accordance with applicable regulations and targets set by shareholders 11. Planning and coordinating Work Group meetings, particularly in the field of HC with Subsidiaries, to ensure the establishment of an effective communication forum. 12. Managing fixed assets, inventory, and work equipment under its responsibility to ensure they are well maintained. 13. Developing and enhancing the competence and ability as well as the work attitude of employees in Work Units based on Company Regulations and Job Descriptions in order to obtain quality HC. 14. Participating actively in the implementation of the Occupational Health and Safety (OHS) management system, Risk Management System, Anti-Bribery Compliance, GCG (<i>Good Corporate Governance</i>), TQM (<i>Total Quality Management</i>), and CSR (<i>Corporate Social Governance</i>) in the work units to achieve the OHS standards and quality standards in order to make continuous improvements. |
|--|--|

Secara garis besar, Kompartemen *SDM* PTPI mendukung program transformasi organisasi yang sejalan dengan *master plan* Perusahaan. Hal itu dilakukan dengan memusatkan beberapa fungsi bisnis ke Pupuk Indonesia *Holding*.

Overall, the PTPI HC Compartment supports the organizational transformation program in line with the Company's master plan. This was achieved by concentrating several business functions in Pupuk Indonesia Holding.

Dengan strategi itu, PTPI sebagai Entitas Induk memiliki peran lebih aktif dalam aktivitas operasional Perusahaan. *SDM* perusahaan yang unggul merupakan salah satu penggerak utama untuk mencapai visi dan misi perusahaan serta target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Through this strategy, PTPI as the Parent Entity plays a more active role in the Company's operational activities. The superior Company HC is one of the main drivers to achieve the Company's vision and mission as well as the performance targets set by the Shareholders.

Dalam program transformasi organisasi, sejak tahun 2020 lalu telah dilakukan sentralisasi fungsi *SDM* dengan dibentuknya fungsi *Mitra Bisnis SDM* di bawah Kompartemen *SDM*. Fungsi ini membawahi 7 (tujuh) Departemen, yaitu:

In the organizational transformation program, since 2021 the HC function has been centralized by establishing the HC Business Partner function under the HC Compartment. This function is in charge of 7 (seven) departments, namely:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen Remunerasi & Manajemen Kinerja 2. Departemen Organisasi & Manajemen <i>Talenta</i> 3. Departemen Mitra Bisnis <i>SDM</i> PKC & Non-Pupuk PTPI di PT Pupuk Kujang & Anak Perusahaan Non-Pupuk 4. Departemen Mitra Bisnis <i>SDM</i> PKG PTPI di PT Petrokimia Gresik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Remuneration & Performance Management Department 2. Talent Management & Organization Department 3. KC & PTPI Non-Fertilizer Business Partner HC Department at PT Pupuk Kujang & Non-Fertilizer Subsidiaries 4. PKG PTPI Business Partner HC Department at PT Petrokimia Gresik |
|--|--|

5. Departemen Mitra Bisnis SDM PKT PTPI di PT Pupuk Kalimantan Timur
6. Departemen Mitra Bisnis SDM PSP PTPI di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
7. Departemen Mitra Bisnis SDM PIM PTPI di PT Pupuk Iskandar Muda

5. PKT PTPI Business Partner HC Department at PT Pupuk Kalimantan Timur
6. PSP PTPI Business Partner HC Department at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
7. PIM PT PI Business Partner HC Department at PT Pupuk Iskandar Muda

Kompartemen Pusat Pembelajaran & Pengetahuan

Kompartemen Pusat Pembelajaran & Pengetahuan memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan SDM mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pengembangan melalui pendidikan atau pelatihan SDM. Per 31 Desember 2021, Kompartemen Pusat Pembelajaran & Pengetahuan dikepalai oleh Doni Muhardiansyah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Tugas Pokok Kompartemen Pusat Pembelajaran & Pengetahuan

1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis PI Grup di bidang Pusat Pembelajaran & Pengetahuan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan di bidang Pusat Pembelajaran & Pengetahuan PI Grup sebagai acuan sasaran dan kegiatan yang dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.
3. Mengkoordinasikan perumusan kegiatan bidang Pusat Pembelajaran & Pengetahuan di PI Grup.
4. Mengkoordinasikan implementasi kebijakan Pusat Pembelajaran & Pengetahuan di PI Grup.
5. Mengkoordinasikan implemementasi sistem manajemen pengetahuan yang ada di PI Grup.
6. Mengkoordinasikan pengembangan kegiatan sertifikasi profesi SDM di PI Grup.
7. Mengkoordinasikan kegiatan Evaluasi kebijakan, program kerja, dan kegiatan bidang Pusat Pembelajaran & Pengetahuan di PI Grup.
8. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris, dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
9. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan, serta sikap kerja karyawan di Unit Kerjanya berdasarkan Peraturan Perusahaan dan *Job Description* agar diperoleh SDM berkualitas.
10. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen terintegrasi meliputi pengendalian risiko, kepatuhan, anti penyuapan, mutu dan tanggung jawab sosial di area Unit Kerjanya untuk mencapai standar sistem manajemen dalam rangka perbaikan yang berkelanjutan.

Learning and Knowledge Center Compartment

The Learning and Knowledge Center Compartment is responsible for HC development from the planning to implementing development programs through HC education or training. As of December 31, 2021, the Learning and Knowledge Center Compartment was led by Doni Muhardiansyah who was appointed based on Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021.

Learning and Knowledge Center Compartment Main Duties

1. Coordinating the Company's Long Term Plan (RJPP) policy draft, which is the strategic plan of the PI Group in the field of learning & development.
2. Coordinating the Annual Corporate Work Plan and Budget (WP&B) draft in the field of learning & development in the PI Group as a reference for targets and activities that can be evaluated and accounted for.
3. Coordinating the formulation of activities in the field of learning & development in the PI Group.
4. Coordinating the implementation of learning & development policies in the PI Group.
5. Coordinating the implementation of the existing knowledge management system in the PI Group.
6. Coordinating the developing the professional certification activities for HC in the PI Group.
7. Coordinating the evaluation of policies, work programs, and activities in the field of learning & development in the PI Group.
8. Managing the fixed assets, inventory, and work equipment under its responsibility to ensure they are maintained properly.
9. Developing and improving competencies and abilities, as well as the work attitude of employees in the work units based on Company regulations and job descriptions in order to obtain quality HC.
10. Participating actively in the implementation of an integrated management system including risk control, compliance, anti-bribery, quality and social responsibility in the Work Units to achieve management system standards in the context of continuous improvement.



STRATEGI PENGELOLAAN SDM

Dalam rangka mengembangkan kualitas SDM yang profesional, maka Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan telah merencanakan strategi melalui sistem pengelolaan SDM terpadu. Didukung oleh sistem SDM/ Arsitektur SDM yang mendorong pengelolaan SDM agar lebih kompetitif, kolaboratif serta mampu meningkatkan sinergi PI Grup. Diharapkan melalui model pengelolaan terpadu mampu menciptakan SDM yang mendukung rencana pengembangan bisnis Perusahaan

Untuk mewujudkan strategi tersebut, program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 meliputi:

1. Terciptanya dan Terpenuhi *Top Talent*, *Talent Millennial* dan *Talent Perempuan* PI Grup
2. Penguatan Sistem Mobilitas *Talenta* Melalui Pengembangan Dan Penyelarasan Sistem *Grading* untuk *Holding* dan Anak Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero)
3. Pelaksanaan Analisa Jabatan dan perhitungan Beban Kerja di PT Pupuk Indonesia (Persero)
4. Peningkatan Produktivitas SDM
5. Pelaksanaan dan Penyempurnaan *Master Data* (SAP HCM)
6. Pembaharuan Peraturan Perusahaan
7. Pemenuhan *Job Description*
8. Pelaksanaan Inovasi digitalisasi di bidang SDM dan proses administrasi *data base* karyawan secara digitalisasi

MANAJEMEN KARIER

Dengan adanya jenjang karier yang jelas merupakan salah satu upaya Perusahaan untuk terus mempertahankan SDM terbaik yang dimilikinya. Dengan demikian terdapat korelasi yang jelas antara program pendidikan dan pelatihan dengan penilaian kinerja yang dilihat karyawan sebagai salah satu prasyarat untuk meningkatkan karier di PTPI.

Sistem manajemen karier juga sangat membantu karyawan dalam menentukan arah kariernya serta membantu Perusahaan dalam melaksanakan proses pengembangan karier secara konsisten. Pada akhirnya, sistem tersebut memberikan manfaat bagi pencapaian cita-cita Perusahaan. Bagi karyawan, karier merupakan indikator proses pengembangan diri, dan bagi Perusahaan, menggambarkan posisi-posisi yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan.

Selain tuntutan kebutuhan organisasi untuk menyediakan kader yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi, manajemen karier juga sangat dibutuhkan oleh karyawan untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman bagi karyawan. Dengan demikian, karyawan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap Perusahaan.

HC MANAGEMENT STRATEGY

To develop the quality of professional HC, the Company has consistently and sustainably planned strategies through an integrated HC management system. The support of the HC system/Architecture encourages HC management to be more competitive, collaborative, with the ability to increase synergy in the PI Group. The integrated management model will create HC that supports the Company's business development plans

To realize this strategy, the following work programs were established in 2021:

1. Create and Fulfill PI Group Top Talent, Millennial Talent and Female Talent
2. Strengthen the Talent Mobility System through the Development and Alignment of the Grading System for PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding and Subsidiaries of
3. Carry out Job Analysis and Workload Calculations at PT Pupuk Indonesia (Persero)
4. Increase HC Productivity
5. Implement and Improve the Master Data (SAP HCM)
6. Update the Company Regulations
7. Complete the Job Descriptions
8. Implement HC digitalization innovations, and the process of digitalizing employee data base administration

CAREER MANAGEMENT

Having a clear career path is one of the Company's drivers to maintain the best HC. Therefore, there must be a clear correlation between education and training programs and performance appraisals that employees see as one of the prerequisites for advancing a career at PTPI.

The career management system is also very helpful for employees in determining the direction of their careers and assisting the Company in consistently carrying out the career development process. To achieve this, the system must provide benefits for achieving the Company's goals. For employees, their career is an indicator of the self-development process, and for the Company, it reflects the positions needed in order to achieve the Company's goals.

In addition to the organization's need to provide cadres with the competencies in accordance with the organization's needs, career management is also very much needed by employees to create a comfortable workplace. By so doing, employees will have a high attachment to the Company.

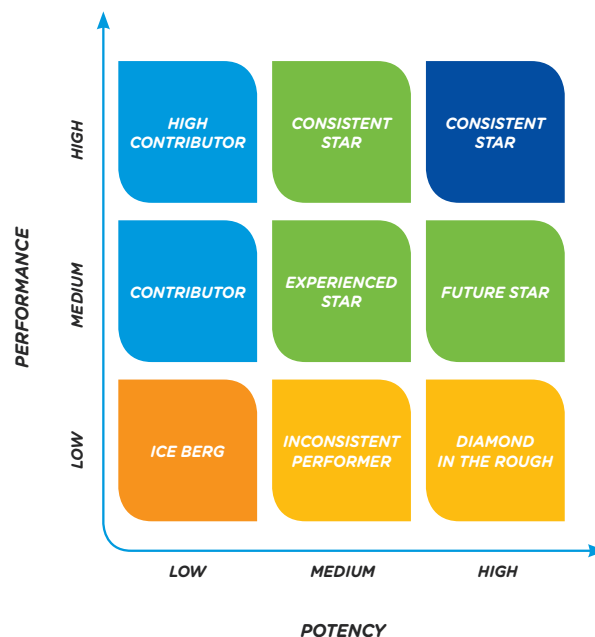
MANAJEMEN TALENTA

Sistem *Talent management* Perusahaan telah disusun dan dimulai sejak tahun 2018 melalui *Human Capital Management System (HCMS)* yang terintegrasi antara *Holding* dan Anak Perusahaan. Program *Talent management* ini bertujuan mempersiapkan kader-kader pemimpin perusahaan di masa mendatang yang kompeten dan unggul.

Pelaksanaan *Talent management* di lingkungan Perusahaan telah tertuang di dalam Surat Direktur SDM & Tata Kelola No. U-0800/E00.KP/2018 tanggal 25 April 2018 dan diatur dan berdasarkan pada Prosedur Management *Talenta* No. PI-SDM-PR-017. Khusus untuk *Talent Grade* 1 diintegrasikan dengan program *Talent management* Kementerian BUMN melalui program *Integrated Talent Management System (ITMS)* sebagai *Talent pool* Kementerian BUMN.

Dalam rangka pelaksanaan *Talent management*, bagi karyawan yang masuk ke dalam kategori *Talent* merupakan adalah karyawan yang memiliki nilai kinerja dan nilai potensi yang tinggi. Karyawan tersebut telah melalui serangkaian proses seleksi serta berada pada 4 (empat) kuadran teratas pada *People Matriks*, yakni: *Consistent Star*, *Utility Hi-Pro*, *Future Star* dan *Experienced Pro*. Selanjutnya, karyawan tersebut ditetapkan oleh Direksi sebagai *Talent*.

Bagi karyawan *Talent* yang sudah ditetapkan oleh Direksi akan mengikuti serangkaian program pengembangan, yang meliputi program pengembangan berbasis pendidikan, pengalaman dan interpersonal. Pada akhir periode, dilakukan evaluasi *Talent* sebagai bagian dari hasil evaluasi program pengembangan yang telah dilakukan. Dalam proses implementasi program *Talent management*, setiap karyawan akan dipetakan ke dalam *Talent box* yang meliputi 9 (sembilan) kotak yang digambarkan sebagai berikut:



TALENT MANAGEMENT

The Company's talent management system was developed and started in 2018 through a Human Capital Management System (HCMS), which was integrated in the Holding and Subsidiaries. This talent management program's objective is to prepare competent and superior cadres as future company leaders.

The Company's talent management was stated in the Director of HC & Governance Letter No. U-0800/E00.KP/2018 dated April 25, 2018, and was regulated and based on Talent Management Procedure No. PI-HR-PR-017. Especially for Talent Grade 1, it was integrated with the Ministry of SOEs' Integrated Talent Management System (ITMS) program for the Ministry of SOEs' talent pool.

For talent management, employees who fall into the talent category are employees who have high performance values and potential values. These employees have gone through a series of selection processes and are in the top 4 (four) quadrants of the People Matrix, namely: Consistent Star, Utility Hi-Pro, Future Star and Experienced Pro. In addition, the employee has been determined by the Board of Directors as a talent.

Talent employees determined by the Board of Directors will participate in a series of development programs, including educational, experience and interpersonal-based development programs. At the end of the period, a talent evaluation will be carried out as part of the development program evaluation results. During the process of implementing the talent management program, each employee will be mapped into a talent box that includes 9 (nine) boxes as described as follows:

Selanjutnya, dalam melakukan pemilihan *Talenta* terbaik Perusahaan, dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang meliputi proses sebagai berikut:

In addition, selecting the Company's best talent is carried out through a series of selection processes including the following processes:



Karyawan yang telah ditetapkan sebagai *Talenta* akan memperoleh serangkaian program pengembangan yang meliputi:

Employees selected as talent will receive a series of development programs, including:

1. *Education Based*:
 - a. Kegiatan Mandiri;
 - b. Pelatihan/*Workshop*/Seminar;
 - c. Sertifikasi;
 - d. Tugas Belajar.
2. *Relationship Based*:
 - a. Penugasan Menjadi Mentor/*Coach*/Pembimbing;
 - b. Penugasan Menjadi Instruktur;
 - c. *Knowledge-Sharing*.
3. *Experienced Based*:
 - a. Perencanaan Rotasi;
 - b. Perencanaan Suksesi;
 - c. Penugasan Khusus;
 - d. Penugasan Antar Entitas Anak PTPI.

1. Education-Based:
 - a. Independent Activities;
 - b. Training/*Workshop*/Seminar;
 - c. Certification;
 - d. Learning Assignments.
2. Relationship-Based:
 - a. Assignment as a Mentor/*Coach*/Adviser;
 - b. Assignment as an Instructor;
 - c. Knowledge-Sharing.
3. Experienced-Based:
 - a. Rotation Planning;
 - b. Succession Planning;
 - c. Special Assignments;
 - d. Assignment Between PTPI Subsidiaries.

REKRUTMEN

Program rekrutmen yang dilaksanakan oleh Perusahaan bertujuan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan dan kebijakan Perusahaan. Pelaksanaan rekrutmen dilakukan melalui 3 (tiga) proses, yaitu:

1. *Program Management Trainee*
Untuk kelompok *fresh graduate*, setelah kandidat diterima sebagai karyawan baru, wajib mengikuti program *Management Trainee* selama 9 (sembilan) bulan. Program ini memiliki 4 (empat) tahapan, yaitu *in Class*, *On the Job Training (OJT) I*, *II* dan *III*. Pada tahapan *in Class*, karyawan mendapatkan materi pengenalan Perusahaan secara umum dan pembinaan karakter. Pada *OJT I* dan *II*, karyawan ditempatkan di perusahaan yang bukan penempatannya. Sedangkan pada *OJT III*, karyawan baru ditempatkan di perusahaan penempatannya.

Program tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan untuk setiap tahapan dengan materi pemahaman proses bisnis, teknik presentasi dan penguasaan kompetensi sesuai bidang keahliannya. Setelah menjalani program

RECRUITMENT

The recruitment program implemented by the Company aims to fill the workforce needs according to the needs and policies of the Company. Recruitment is carried out through 3 (three) processes, namely:

1. *Program Management Trainee*
For fresh graduates, after the candidate has been accepted as a new employee, they must attend the *Management Trainee* program for 9 months. This program has 4 (four) stages, *In Class*, *On the Job Training (OJT) I*, *II* and *III*. The *in-Class* stage involves employees acquiring general Company introduction material and character building. In *OJT I* and *II*, employees are placed in companies they are not assigned to, whereas in *OJT III*, new employees are placed in companies they are assigned to.

These programs last for 3 (three) months for each stage with material covering understanding business processes, presentation techniques and mastery of competencies according to their area of expertise.

pelatihan, karyawan akan ditempatkan di PI Group, baik di *Holding* maupun di entitas anak.

2. Program *Professional Hire*

Untuk program ini, Perusahaan bekerja sama dengan penyedia jasa ataupun rekrutmen eksternal dengan kriteria pelamar memiliki pengalaman kerja dan telah melalui beberapa proses tes sebagai berikut: seleksi administrasi, *assessment*, kesehatan, wawancara oleh *user*. Jika dinyatakan lulus, calon pelamar menjalani masa percobaan beberapa bulan sebelum menjadi karyawan tetap sesuai prosedur yang berlaku di Perusahaan.

3. Program *Fresh Graduate* (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

Untuk Rekrutmen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perusahaan bekerja sama dengan penyedia jasa ataupun rekrutmen eksternal secara umum melalui beberapa proses tes sebagai berikut: seleksi administrasi, tes potensi akademik, TOEFL, *assessment*, kesehatan dan wawancara oleh *user*.

Setelah dinyatakan lulus, pelamar menjalani fase kontrak kerja dengan metode Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah disetujui dengan Surat Perjanjian Kerja oleh kedua belah pihak (Perusahaan dan Calon Karyawan dan/atau Lembaga Penyedia Jasa).

Pada tahun 2021, dikarenakan PTPI sedang menerapkan kebijakan moratorium rekrut PI Grup maka tidak dilakukan pengangkatan dan penerimaan karyawan baru untuk seluruh entitas. Bersamaan dengan itu, karyawan yang pensiun sebanyak 568 orang di Perusahaan dan Entitas Anak, yang meliputi pensiun masa kerja 506 orang, pengunduran diri 28 orang dan meninggal dunia 31 orang dan pelanggaran 3 orang.

TINGKAT *TURNOVER* KARYAWAN

PI Grup berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, nyaman dan bersifat kekeluargaan agar dapat menjadi tempat kerja idaman bagi karyawan dan calon karyawan. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari strategi Perusahaan untuk mengelola tingkat *turnover* karyawan.

Perusahaan secara berkala melakukan *review* terhadap kebijakan terkait remunerasi dan paket *benefit* bagi karyawan serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja. Selain hal-hal bersifat materi, perbaikan senantiasa dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi karyawan. Manajemen meyakini, lingkungan kerja yang baik akan menurunkan tingkat kecenderungan *turnover* karyawan.

Adapun tingkat *turnover* karyawan PTPI di tahun 2021 dibanding tahun 2020 adalah sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

After undergoing the training programs, employees will be assigned to the PI Group, in the Holding or in the subsidiaries.

2. Program Professional Hire

For these programs, the Company works closely with service providers or external recruitment with the criteria that the applicants must have the work experience and have gone through the following testing processes: administrative selection, assessment, health, interviews by the user. If they pass, the prospective applicants will undergo a trial period of several months before becoming a permanent employee based on the procedures in force at the Company.

3. Fresh Graduate Program (Fixed Term Employment Agreement)

For Fixed Term Employment Agreement recruitment, the Company collaborates with service providers or external recruitment through the following test processes: administrative selection, academic potential test, TOEFL, assessment, health and interviews by the user

After passing, the applicants go through a work contract phase using the Fixed Term Employment Agreement (PKWT) method as approved through a Work Agreement Letter by both parties (the Company and Prospective Employees and/or Service Providers).

In 2021, due to PTPI instigating the PI Group recruitment moratorium policy, there were no appointments or recruitment of new employees in all entities. During the same period, 568 employees left the Company and its Subsidiaries, including 506 people who retired, 28 people who resigned and 31 people who passed away, and 3 who committed violations.

EMPLOYEE *TURNOVER* RATE

PI Group strives to create a professional, comfortable, and family friendly work environment as the ideal place to work for employees and prospective employees. These efforts are also part of the Company's strategy to manage its employee turnover rate.

The Company periodically reviews its policies on remuneration and benefit packages for employees as well as other matters related to workforce management. In addition to material matters, improvements are always being made to create a favorable and pleasant working environment for employees. Management believes that a proper working environment will help reduce the employee turnover rate.

PTPI employee turnover rate in 2021 compared to 2020 can be seen in the table below.

Uraian Description	2021 (orang) (People)	2020 (orang) (People)
Pensiun Retired	5	6
Meninggal dunia Passed Away	2	1
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Resigned on their own account	0	2
Diberhentikan Dismissed	0	0
Jumlah karyawan yang keluar Total employees leaving	7	9
Total karyawan di akhir tahun Total employees at the end of the year	354	285

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan persentase *turnover* karyawan di tahun 2021 adalah sebesar 1,97%, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang sebesar 3,15%. Hal ini lebih disebabkan jumlah pensiun lebih sedikit daripada tahun 2020.

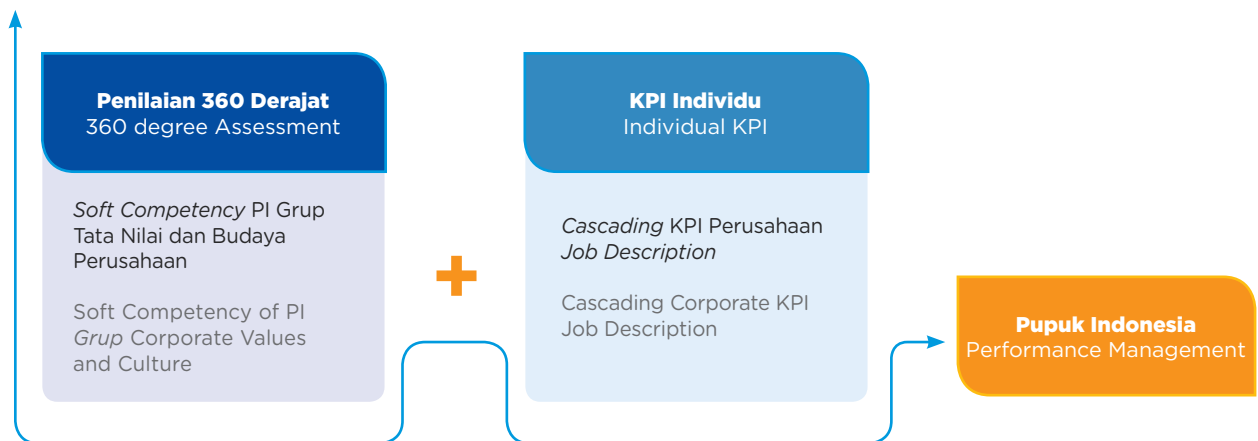
Based on this table, the employee turnover rate in 2021 was 1.97%, a decrease from 3.15% in 2020. This was mainly due to fewer people retiring in 2021 compared to 2020.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan menciptakan iklim kompetitif untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, PTPI mengelola serangkaian proses yang ada dalam *performance management*. Sistem Manajemen Kinerja PI Grup terdiri dari penilaian kinerja individu (KPI Individu) dan penilaian 360 derajat.

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

To increase work productivity and create a competitive climate to achieve the Company's vision and mission, PTPI manages a series of performance management processes. The PI Group Performance Management System consists of individual performance and 360-degree assessments.



Sementara infrastruktur penunjang kinerja SDM yang digambarkan dalam arsitektur *Human Capital* PTPI, dideskripsikan sebagai berikut:

The infrastructure that supports HC performance, is reflected in the PTPI Human Capital architecture, as shown below:



SURVEI KEPUASAN DAN KETERIKATAN KARYAWAN

Sebagai upaya Perusahaan untuk dapat terus memenuhi harapan seluruh *stakeholder* yang mana salah satunya adalah karyawan, maka PTPI melakukan survei kepuasan dan keterikatan karyawan. Pengukuran tingkat kepuasan Karyawan merupakan aspek penting untuk mengetahui tingkat pelayanan yang telah diberikan sekaligus mendapatkan umpan balik untuk mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan Karyawan.

Survei kepuasan dan keterikatan karyawan ini dilaksanakan oleh PTPI dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama para Karyawan. Hasil survei tersebut memastikan seberapa baik PTPI memenuhi persyaratan dan harapan pekerja untuk pengembangan karier, kesejahteraan, serta keamanan dan keselamatan lingkungan kerja bagi karyawan.

Di tahun 2021 ini, PI Grup melaksanakan survei kepuasan dan keterikatan karyawan secara internal yang mana menunjukkan bahwa PI Grup memperoleh nilai indeks kepuasan karyawan sebesar 78,66% dan indeks keterikatan karyawan sebesar 83,11% dengan rincian sebagai berikut:

EMPLOYEE SATISFACTION AND ENGAGEMENT SURVEY

Among the Company's efforts to continue to meet the expectations of all stakeholders, one group being its employees, PTPI conducts employee satisfaction and engagement surveys. Measuring employee satisfaction levels is an important aspect in determining the level of service provided, as well as to gain feedback on developing a service delivery system that is responsive to the employees' needs.

The employee satisfaction and engagement survey is carried out by PTPI to ensure it is fulfilling the main requirements and expectations of its employees. The survey results confirm how well PTPI is fulfilling the employees' requirements and expectations for career development, welfare, as well as security and safety in the working environment.

In 2021, PI Group conducted an internal employee satisfaction and engagement survey where PI Group's employee satisfaction index scored 78.66%, and the employee engagement index scored 83.11% with the following details:

No	Perusahaan Company	Jumlah Karyawan Number of Employees	Indeks Kepuasan Satisfaction Index	Indeks Keterikatan Engagement Index
1	PTPI	354	78,47%	82,20%
2	PT Pupuk Petrokimia Gresik	2.045	82,03%	85,70%
3	PT Pupuk Kujang	1.023	77,00%	79,00%
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	1.370	82,97%	86,37%
5	PT Pupuk Iskandar Muda	1.838	78,64%	84,21%
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	569	74,00%	82,00%

No	Perusahaan Company	Jumlah Karyawan Number of Employees	Indeks Kepuasan Satisfaction Index	Indeks Keterikatan Engagement Index
7	PT Rekyasa Industri	494	75,56%	82,21%
8	PT Mega Eltra	74	57,09%	54,27%
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	35	90,74%	90,90%
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas	39	84,54%	87,29%
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	10	76,25%	N/A
Total PI Group		7.851		
Rata-rata PI Group Average for PI Group			78,66%	83,11%
50% dari Rata-rata 50% of Average			39,33%	41,55%

Sementara, khusus untuk PTPI sendiri pencapaian indeks kepuasan dan keterikatan karyawan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan karyawan sebesar 78,47% dan berada pada kategori “Memuaskan” dengan indeks tertinggi berada pada faktor Jaminan Kesehatan.
2. Indeks keterikatan karyawan sebesar 82,00% dan berada pada kategori “Sangat Tinggi” dengan indeks tertinggi berada pada Faktor *Friendship*.

Specifically for PTPI, the employee satisfaction and engagement index achievement in 2021 was as follows:

1. The employee satisfaction index scored 78.47% in the “Satisfactory” category with the highest index being the Health Insurance factor.
2. The employee engagement index scored 82.00% in the “Very High” category with the highest index being the Friendship Factor.

Pengukuran Measurement	Struktural Structural		Fungsional Functional	
	Indeks Index	Kategori Category	Indeks Index	Kategori Category
Indeks Keterikatan Karyawan Employee Engagement Index	87,23%	Sangat Tinggi Very High	80,74%	Sangat Tinggi Very High
Indeks Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction Index	84,28%	Sangat Memuaskan Very Satisfactory	77,65%	Memuaskan Satisfactory

Nilai Indeks Keterikatan pada karyawan struktural berada pada kategori sangat tinggi dengan indeks tertinggi berada pada faktor *Job Clarity*. Sedangkan nilai Indeks Keterikatan pada karyawan fungsional sangat tinggi dengan indeks tertinggi berada pada faktor *Friendship*.

The Engagement Index for structural employees was in the very high category with the highest index being the Job Clarity factor. While the Engagement Index for functional employees was in the very high category with the highest index being on the Friendship factor.

Nilai Indeks Kepuasan pada karyawan struktural berada pada kategori sangat memuaskan dengan indeks tertinggi berada pada faktor Pengakuan. Sedangkan nilai Indeks Kepuasan pada karyawan fungsional berada pada kategori memuaskan dengan indeks tertinggi berada pada faktor Jaminan Kesehatan.

The Satisfaction Index for structural employees was in the very satisfactory category with the highest index being the Recognition factor. While the Satisfaction Index value for functional employees was in the satisfactory category with the highest index being the Health Insurance factor.

Tabel Pengukuran Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan Berdasarkan Direktorat

Measurement of Employee Satisfaction and Engagement Survey by Directorate

Pengukuran Measurement	Struktural Structural		Fungsional Functional	
	Indeks Index	Kategori Category	Indeks Index	Kategori Category
Direktorat Utama Main Directorate	81,29%	Sangat Tinggi Very High	77,50%	Memuaskan Satisfactory
Direktorat Produksi Production Directorate	81,84%	Sangat Tinggi Very High	78,20%	Memuaskan Satisfactory
Direktorat Keuangan & Investasi Finance & Investment Directorate	79,19%	Tinggi High	76,73%	Memuaskan Satisfactory

Pengukuran Measurement	Struktural Structural		Fungsional Functional	
	Indeks Index	Kategori Category	Indeks Index	Kategori Category
Direktorat Transformasi Bisnis Business Transformation Directorate	83,87%	Sangat Tinggi Very High	81,09%	Sangat Memuaskan Very Satisfactory
Direktorat SDM, Tata Kelola & Manajemen Risiko HC, Governance Directorate & Risk Management	83,66%	Sangat Tinggi Very High	81,41%	Sangat Memuaskan Very Satisfactory
Direktorat Pemasaran Marketing Directorate	84,15%	Sangat Tinggi Very High	80,56%	Sangat Memuaskan Very Satisfactory
Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha Portfolio & Business Development Directorate	78,56%	Tinggi High	76,70%	Memuaskan Satisfactory

Berdasarkan responden tiap-tiap Direktorat di PT Pupuk Indonesia (Persero), nilai indeks keterikatan karyawan tertinggi berada pada Direktorat Pemasaran (84,15%) dan terendah pada Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha (78,56%). Nilai Indeks Kepuasan karyawan tertinggi berada di Direktorat SDM, Tata Kelola & Manajemen Risiko (81,41%) dan terendah berada pada Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha (76,70%).

Based on the respondents from each Directorate at PT Pupuk Indonesia (Persero), the highest employee engagement index value was in the Marketing Directorate (84.15%), and the lowest was in the Portfolio & Business Development Directorate (78.56%). The highest employee satisfaction index value was in the HC, Governance & Risk Management Directorate (81.41%), and the lowest was in the Portfolio & Business Development Directorate (76.70%).

Tabel Pengukuran Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan Berdasarkan Generasi

Measurement of Employee Satisfaction and Engagement Survey by Generation

Pengukuran Measurement	Struktural Structural		Fungsional Functional	
	Indeks Index	Kategori Category	Indeks Index	Kategori Category
Indeks Keterikatan Karyawan Employee Engagement Index	88,59%	Sangat Tinggi Very High	80,12%	Tinggi High
Indeks Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction Index	85,00%	Sangat Memuaskan Very Satisfactory	76,31%	Memuaskan Satisfactory

Karyawan generasi X memiliki indeks keterikatan dan kepuasan lebih tinggi dibandingkan karyawan generasi Y (milenial). Pada karyawan generasi X, Faktor *Job Clarity* dan *Company Pride* merupakan indeks keterikatan tertinggi, sedangkan pada karyawan generasi Y, indeks keterikatan tertingginya adalah Faktor *Friendship*.

Generation X employees had a higher engagement and satisfaction index than generation Y employees (millennials). For generation X employees, the Job Clarity and Company Pride factors were the highest engagement index, while for generation Y employees, the highest engagement index was the Friendship Factor.

Pada karyawan generasi X maupun generasi Y, faktor Jaminan Kesehatan merupakan indeks kepuasan tertinggi dan Kebijakan SDM merupakan faktor dengan indeks kepuasan terendah.

For generation X and generation Y employees, the Health Insurance factor was the highest satisfaction index, and the HC Policy was the factor with the lowest satisfaction index.



PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Dalam mengembangkan SDM yang dimiliki, Perusahaan berfokus pada pengembangan profesionalisme kerja serta peningkatan keunggulan kompetitif SDM sebagai pendorong utama pertumbuhan perusahaan di seluruh PI Grup. Proses pengembangan SDM yang dijalankan oleh PTPI dilandaskan pada pemenuhan kompetensi SDM dan kebutuhan personil di seluruh unit kerja. Selain itu, Perusahaan juga memfasilitasi para karyawannya untuk dapat mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan dalam sistem manajemen SDM berbasis kompetensi.

PTPI telah merancang dan menetapkan kebijakan standar *Passing Grade* penerimaan karyawan di seluruh PI Grup, hal ini dilakukan untuk dapat memastikan bahwa SDM yang dimiliki oleh seluruh perusahaan yang tergabung di dalam PI Grup memiliki kompetensi memadai dalam mendukung kinerja perusahaan. Selanjutnya, guna memastikan tercapainya pemenuhan profil kompetensi yang diharapkan, PTPI merancang program pengembangan kompetensi dan keahlian melalui berbagai program pelatihan internal dan eksternal baik di tingkat domestik maupun internasional.

Adapun program pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan PTPI di sepanjang tahun 2021 berikut biaya yang dikeluarkan, sebagaimana yang telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

REALISASI PROGRAM PENGELOLAAN SDM TAHUN 2021

Sementara itu, di sepanjang tahun 2021, Kompartemen *Human Capital* telah merealisasikan program strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan, dengan pencapaian sebagai berikut:

HC DEVELOPMENT PROGRAM

When developing its HC, the Company focuses on developing work professionalism and increasing the competitive advantages of HC as the main driver for Company growth throughout the PI Group. The HC development process carried out by PTPI is based on fulfilling HC competencies and personnel needs in all work units. The Company also helps its employees develop their competencies through training and education by using a competency-based HC management system.

PTPI has designed and established a standard *Passing Grade* policy for employee acceptance throughout the PI Group, this is to ensure that the HC in all PI Group companies have adequate competencies to support the Company's performance. Furthermore, to ensure the achievement of the expected competency profile, PTPI organizes competency and expertise development programs through internal and external training programs at the domestic and international levels.

PTPI's HC competency development program carried out in 2021 together with the costs incurred can be found in the Company Profile chapter in this Annual Report.

REALIZATION OF HC MANAGEMENT PROGRAM IN 2021

Throughout 2021, the Human Capital Compartment organized strategic programs to support the achievement of the Company's vision and mission, as follows:

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM & PENGELOLAAN SDM TAHUN 2021

HC DEVELOPMENT AND HC MANAGEMENT PROGRAM FOR 2021

No	Sasaran Strategis Strategic Goals	Strategi Strategy	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Tahun 2021 Realization in 2021
1	Kultur perusahaan yang kolaboratif dan <i>High performing</i> Collaborative and high performing corporate culture	Menciptakan kultur perusahaan yang kolaboratif dan <i>High performing</i> Create a collaborative and high performing corporate culture	<ul style="list-style-type: none"> Review Kamus <i>Soft Competency</i> Review Kamus <i>Hard Competency</i> Kajian strukturalisasi SDM dan Distribusi di <i> Holding & Anak Perusahaan</i> Melakukan Audit SDM. Soft Competency Dictionary Review Hard Competency Dictionary Review HC structure and distribution study in Holding & Subsidiaries HC audits. 	<ul style="list-style-type: none"> Review Kamus <i>Soft Competency</i> PI Group selesai dengan memperhatikan <i>core value</i> BUMN yakni AKHLAK Penyelesaian Kamus <i>Hard Competency</i> PI Group untuk 12 <i>Job Family</i> yakni: Pemasaran Keuangan, Perencanaan & Pengembangan, Manajemen SDM, Teknologi Informasi, Manajemen Pengadaan, Sekper/<i>Corporate Communication & General Affair</i>, Hukum, Audit, Operasi, Pemeliharaan dan Konstruksi. Penyelesaian Restrukturisasi fungsi SDM dan Distribusi di <i> Holding & Anak Perusahaan</i>, sesuai dengan SK Direksi Nomor: 082/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021. Dengan program transformasi bisnis perusahaan, maka akan dilakukan penyusunan sistem sistem SDM sebagai infrastruktur pendukung di tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan audit SDM akan dilakukan setelah keseluruhan sistem SDM tersebut diimplementasikan Reviewed PI Group's Soft Competency Dictionary completed by taking into account the SOE core AKHLAK values Completed PI Group's Hard Competency Dictionary for 12 Job Families, namely: Financial Marketing, Planning & Development, HC Management, Information Technology, Procurement Management, Corporate Communication & General Affairs, Law, Audit, Operations, Maintenance and Construction. Completed Restructuring of HC and Distribution functions in Holding & Subsidiaries, in accordance with Board of Directors Decree No. 082/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021. With the Company's business transformation program, prepared HC systems as in supporting infrastructure in 2021, so that HC audit activities can be carried out following the entire HC system implementation

No	Sasaran Strategis Strategic Goals	Strategi Strategy	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Tahun 2021 Realization in 2021
2	Penyempurnaan program Manajemen <i>Talenta</i> dan manajemen Karier PI Group Refine PI Group Talent Management and career management programs	Memperkuat sinergi <i>top Talent</i> antar anak perusahaan Strengthen top Talent synergies between subsidiaries	<ul style="list-style-type: none"> Kajian program pengembangan <i>Talent</i>. Implementasi KPI Individu karyawan yang sejalan dengan KPI Korporat. <i>Talent</i> development program review. Implementation of individual employee KPIs in line with Corporate KPIs. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Grand design Talent</i> management untuk pengembangan <i>Top Talent</i>, <i>Talent Millennial</i> dan <i>Talent Perempuan</i> telah disetujui. <i>Talent</i> selection untuk <i>Top Talent</i>, <i>Talent Millennial</i> dan <i>Talent Perempuan</i> di PI Group telah dilaksanakan. Penilaian KPI Individu karyawan yang di <i>cascading</i> dari KPI Perusahaan Telah dilaksanakan. Approved the grand design Talent management for developing Top Talent, Millennial Talent and Female Talent. Conducted Talent selection for Top Talent, Millennial Talent and Female Talent at PI Group. Conducted individual KPI assessment for employees cascading from the Company's KPI.
3	Penguatan Sistem Mobilitas <i>Talenta</i> Melalui Pengembangan Dan Penyelarasan Sistem <i>Grading</i> Untuk <i> Holding</i> dan Anak Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) Strengthen the Talent Mobility System by Developing and Aligning the PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding and Subsidiaries <i>Grading</i> System		<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi jabatan dan peta remunerasi dan persetujuan terhadap kajian Penyusunan kebijakan <i>grading</i> dan <i>soft launching alignment grading</i> Evaluation of positions and remuneration maps and approval of studies Preparation of grading policies and soft launching of alignment grading 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian program <i>grading</i> di dalam forum Pra Rapat Kerja Bidang SDM PI Group dan Rapat Kerja Bidang SDM PI Group/<i>soft launching</i>. Menyampaikan hasil evaluasi kepada manajemen PI untuk tindak lanjut hasil kajian (100%) Submitted grading program at the PI Group HC Pre-Working Meeting, and soft launched of the PI Group HC Working Meeting. Submitted evaluation results to PI management for follow-up on study results (100%)
4	Terciptanya dan Terpenuhi <i>Top Talent</i> , <i>Talent Millennial</i> dan <i>Talent Perempuan</i> PI Group Terciptanya dan Terpenuhi Top Talent, <i>Talent Millennial</i> dan <i>Talent Perempuan</i> PI Group		<i>Talent</i> Selection Penetapan <i>Talent</i> <i>Talent</i> Selection Penetapan <i>Talent</i>	100%
5	Pemenuhan <i>Job Description</i> Complete Job Descriptions		Penyampaian <i>Draft Job Description</i> seluruh Jabatan Struktural (SEVP, SVP, SPM dan VP) Submission of <i>Draft Job Description</i> for all Structural Positions (SEVP, SVP, SPM and VP)	100%

No	Sasaran Strategis Strategic Goals	Strategi Strategy	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Tahun 2021 Realization in 2021
6	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan perhitungan Beban Kerja di PT Pupuk Indonesia (Persero) Conduct Job Analysis and Workload Calculation at PT Pupuk Indonesia (Persero)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Analisa Jabatan <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan analisa jabatan berdasarkan proses bisnis perusahaan b. Melakukan evaluasi terhadap hasil analisa jabatan: <ol style="list-style-type: none"> i) Penyusunan matriks kewenangan setiap fungsi dan penyusunan <i>Job Description</i> ii) Presentasi dan laporan draft hasil kajian kepada manajemen PI 2. Program Evaluasi kebutuhan jumlah karyawan <ol style="list-style-type: none"> a. Penunjukan pemenang dan Persiapan dan kelengkapan data pendukung b. Melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi kebutuhan karyawan: <ol style="list-style-type: none"> i) Pelaksanaan kajian evaluasi jumlah karyawan ii) Penyampaian hasil kajian 	<p>Sudah disampaikan dokumen jobdesc sebanyak 266 jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun draft hasil kajian • Telah dilaksanakan pemaparan laporan akhir kepada Dir. SDM, TK & Manajemen Risiko pada tgl 21 Oktober 2021 • Telah disampaikan hasil <i>Job Description</i> kepada setiap unit kerja • <i>Kick off meeting</i> Analisa Jabatan pada tanggal 4 Agustus 2021 • <i>Workshop</i> dan pendampingan pengisian untuk seluruh unit kerja di PTPI sudah dilakukan • Telah dilaksanakan klinikal bagi unit kerja yang belum mengumpulkan form ABK • Sudah terkumpul form ABK sebanyak 100% dari total seluruh jabatan • Telah disampaikan laporan akhir perhitungan ABK oleh konsultan pada tgl 26 November 2021 100% <p>266 Job Description submitted</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draft study results prepared • Final report presented to HC, Governance & Risk Management Directorate on October 21, 2021 • The Job Descriptions submitted to each work unit • Analyst Position kick off meeting on August 4, 2021 • Workshops and assistance in all PTPI work units carried out • Clinics for work units that have not submitted the ABK form carried out • 100% of the ABK forms for all positions have been collected • The final report for ABK calculation submitted by the consultant on November 26, 2021 100%
7	Peningkatan Produktivitas SDM Improve HC Productivity		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pencapaian produktivitas karyawan • Program penugasan karyawan di PI Group • Monitoring employee productivity achievements • PI Group employee assignment program 	<p>Realisasi Penugasan PI Group Januari 2021 sd. November 2021</p> <p>Penugasan Anak Perusahaan ke PTPI = Mutasi 53 Orang Non-Mutasi 70 Orang Perubahan Non-Mutasi ke Mutasi = 22 Orang</p> <p>Realisasi Produktivitas Desember 2021 : Rp9.96 miliar/karyawan</p> <p>Realization of PI Group Assignment January 2021 - November 2021 Subsidiaries Assignment to PTPI = Rotation 53 People Non Rotation 70 People Non Rotation Changed to Rotation = 22 People Productivity Realization December 2021 : Rp9,96 billion/employee</p>

No	Sasaran Strategis Strategic Goals	Strategi Strategy	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Tahun 2021 Realization in 2021
8	Harmonisasi dan Standardisasi Remunerasi PI Group Harmonize and Standardize PI Group Remuneration		<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi struktur remunerasi berdasarkan leveling jabatan PTPI valuasi struktur remunerasi berdasarkan leveling jabatan PTPI Implementasi kenaikan Gaji Pokok berdasarkan penilaian Kinerja (KPI) dan Penilaian 360 di seluruh Anak Perusahaan. Evaluation of remuneration structure based on PTPI's position leveling remuneration structure valuation Implementation of Basic Salary increases based on Performance appraisal (KPI) and 360 Assessment in all Subsidiaries. 	<ul style="list-style-type: none"> Kajian <i>grading</i> jabatan dan pemetaan remunerasi di PTPI dan Anak Perusahaan telah dilaksanakan. Kajian <i>grading</i> jabatan dan pemetaan remunerasi di PTPI dan Anak Perusahaan telah dilaksanakan. Position grading and remuneration mapping study at PTPI and Subsidiaries carried out. Position grading and remuneration mapping study at PTPI and Subsidiaries carried out.
9	Mempekerjakan penyandang disabilitas di lingkungan PTPI Employ people with disabilities in PTPI	Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja alih daya melalui rekrutmen penyandang disabilitas di PI Group Fulfill the need for outsourced employees by recruiting people with disabilities at PI Group	Mempersiapkan <i>blue print</i> pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam hal mempekerjakan minimal 2% dari penyandang disabilitas. Blue print for fulfilling Law No. 8 of 2016 mandate in terms of employing a minimum of 2% with people with disabilities	PI Group telah mempekerjakan 19 orang penyandang disabilitas PI Group employed 19 people with disabilities

RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM KE DEPANNYA

FUTURE HC MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PLAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM & PENGELOLAAN SDM TAHUN 2022

HC DEVELOPMENT AND HC MANAGEMENT PROGRAM FOR 2022

No	Sasaran Strategis Strategic Goals	Sasaran Strategy	Program Kegiatan Program Activity
1	Menciptakan kultur perusahaan yang kolaboratif dan <i>high performing</i> Create a collaborative and high performing corporate culture	<i>Redesign system</i> organisasi dan manajemen Kinerja karyawan. Redesign organization system and employee performance management.	<ul style="list-style-type: none"> <i>Review Kamus Soft Competency</i> <i>Review Kamus Hard Competency</i> Melakukan efisiensi biaya SDM dengan memperhatikan <i>best practice</i> dan standar industri serta efektivitas biaya SDM untuk mendorong produktivitas. Soft Competency Dictionary Review Hard Competency Dictionary Review HC cost efficiencies by paying attention to best practices and industry standards as well as HC cost effectiveness to boost productivity.

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM & PENGELOLAAN SDM TAHUN 2022

HC DEVELOPMENT AND HC MANAGEMENT PROGRAM FOR 2022

No	Sasaran Strategis Strategic Goals	Sasaran Strategy	Program Kegiatan Program Activity
2	Penyempurnaan program Manajemen <i>Talenta</i> dan manajemen Karier PI Group Refine PI Group Talent Management and career management programs	Memperkuat sinergi <i>top talent</i> antar anak perusahaan. Strengthen top Talent synergies between subsidiaries.	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi standarisasi manajemen <i>Talenta</i> di PI Group. Pelaksanaan Program <i>Top Talent Millennial</i> dan Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>. Program <i>employee exchange</i> PI Group. Implementasi standarisasi manajemen kinerja (KPI Individu karyawan yang sejalan dengan KPI Korporat). Pemenuhan data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN serta <i>Talent Pool</i> pada portal <i>Human Capital</i> BUMN Standardization of Talent management in PI Group. Implementation of Millennial Top Talent Program and Women in Nominated Talent. PI Group employee exchange program. Standardization of performance management (Employee Individual KPI in line with Corporate KPI). Fulfillment of data for SOE Management, SOE Subsidiaries, and SOE Consolidated Affiliated Companies, and Talent Pools in the SOE Human Capital portal Evaluasi struktur remunerasi berdasarkan levelling jabatan PTPI. Implementasi kenaikan Gaji Pokok berdasarkan penilaian Kinerja (KPI) dan Penilaian 360 di seluruh Anak Perusahaan.
3	Harmonisasi dan Standardisasi Remunerasi PI Group Harmonize and Standardize PTPI Group Remuneration	Harmonisasi dan Standardisasi Remunerasi PI Group Harmonize and Standardize PTPI Group's Remuneration	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi struktur remunerasi berdasarkan <i>levelling</i> jabatan PTPI. Implementasi kenaikan Gaji Pokok berdasarkan penilaian Kinerja (KPI) dan Penilaian 360 di seluruh Anak Perusahaan. Evaluation of remuneration structure based on PTPI leveling position. Increase in Basic Salary based on Performance appraisal (KPI) and 360 Assessment in all Subsidiaries.
4	Memperkerjakan penyandang disabilitas di lingkungan PTPI Employ people with disabilities in PTPI	Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja alih daya melalui rekrutmen penyandang disabilitas di PI Group Fulfill PI Group's need for outsourced employees by recruiting people with disabilities	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan <i>blue print</i> pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam hal mempekerjakan minimal 2% dari penyandang disabilitas. Melakukan proses rekrutmen secara mandiri atau rekrutmen bersama bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan rekrutmen di PI Group. Preparation of a blue print for fulfilling Law No. 8 of 2016 mandate in terms of employing a minimum of 2% with people with disabilities. Carrying out independent or joint recruitment process recruitment for people with disabilities in accordance with PI Group recruitment provisions



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



06



Fungsi Penunjang Bisnis Business Supporting Functions

PTPI memandang bahwa penerapan TI dan kegiatan riset sangat penting dalam mendukung proses bisnis dan kinerja usaha yang berkesinambungan untuk mewujudkan sasaran strategis Perusahaan

PTPI's view is that the application of IT and research activities is very important in supporting the business processes and sustainable business performance to realize the Company's strategic goals

TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY



Di era modern ini, hampir semua jenis dan bidang usaha memerlukan peran dari Teknologi Informasi (TI) tak terkecuali PTPI yang memandang bahwa TI merupakan *business partner* sangat vital untuk mewujudkan sasaran strategis Perusahaan. Dengan penerapan TI di lingkungan PTPI, diharapkan akan dapat membantu proses bisnis dan menunjang usaha yang dijalankan oleh Perusahaan. PTPI sendiri memiliki komitmen untuk mengembangkan TI sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai produksi hingga pengembangan bisnis dari hulu hingga hilir.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menetapkan strategi sentralisasi TI di lingkungan PI Grup. Pemusatan tersebut meliputi seluruh sumber daya dalam pembentukan tim *digital* dan *advanced analytic* yang terpusat di PI Grup. Strategi ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024.

In this modern era, almost all types and fields of business require Information Technology (IT), and this includes PTPI that views IT as a very vital business partner to realize the Company's strategic goals. Through the implementation of IT in PTPI, it is hoped it will assist the business processes and support the business run by the Company. PTPI is committed to developing IT to improve efficiency in the production chain, and to develop its upstream to downstream business.

To realize this, the Company has instigated a strategy to centralize IT within the PI Group. The centralization includes all resources in the digital and advanced analytic teams being centralized in the PI Group. This strategy is contained in the Company's 2020-2024 Long Term Plan.



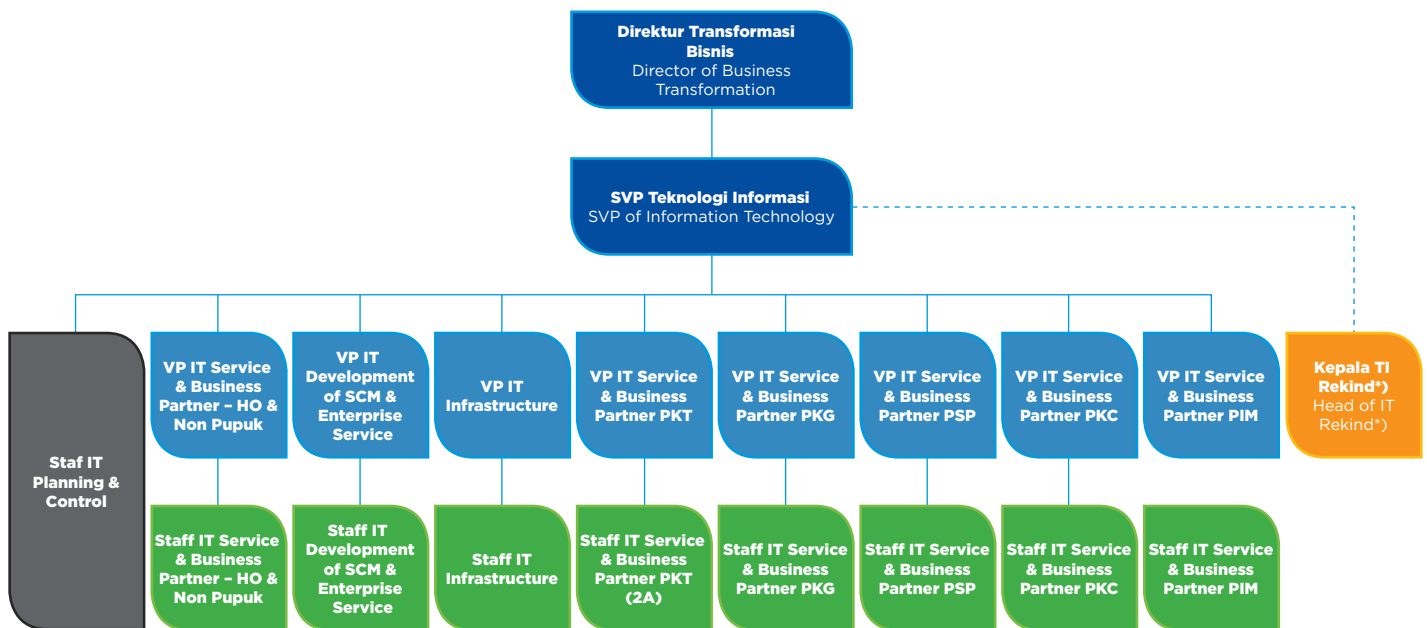
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TI PERUSAHAAN

Secara struktural, pengelolaan TI PTPI dilakukan oleh Direktorat Transformasi Bisnis melalui Kompartemen Teknologi Informasi sebagaimana yang terlampir pada struktur organisasi pengelolaan TI PTPI berikut ini.

IT MANAGEMENT ORGANIZATION STRUCTURE

Structurally, PTPI's IT management is carried out by the Business Transformation Directorate through the Information Technology Compartment as shown in the following PTPI IT management organizational structure.

Struktur Organisasi Pengelolaan TI IT Management Organization Structure



Berdasarkan struktur organisasi di atas, tanggung jawab pengelolaan TI PTPI dijalankan oleh Kompartemen TI yang dipimpin oleh *Senior Vice President* dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Transformasi Bisnis.

Kompartemen TI merupakan sebuah divisi di Perusahaan yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan dan arahan strategis TI, pengembangan dan implementasi solusi TI, serta pengelolaan operasional dan layanan TI dalam mendukung pencapaian target, strategi dan kebutuhan bisnis korporasi.

Per 1 Mei 2022, Kompartemen TI dikepalai oleh Ari Novan selaku penganggung jawab pengelolaan dan pengembangan TI PTPI.

Based on the organizational structure above, PTPI's IT management responsibilities are carried out by the IT Compartment which is led by the Senior Vice President and reports directly to the Director of Business Transformation.

The IT Compartment is a Company division responsible for planning, coordinating, directing and evaluating IT strategic policies and directions, developing and implementing IT solutions, as well as managing IT operations and services to support the achievement of corporate business targets, strategies and needs.

As of May 1, 2022, the IT Compartment is led by Ari Novan as the person in charge of PTPI's IT management and development.

Tugas Pokok Kompartemen Teknologi Informasi

Ruang lingkup kerja yang dijalankan oleh Kompartemen Teknologi Informasi antara lain:

1. Mengelola Perencanaan dan Pengendalian TI di PTPI dan Entitas Anak;
2. Mengelola Penerapan Tata Kelola TI di PTPI dan Entitas Anak;
3. Mengelola Pengembangan dan Operasional Sistem SAP untuk PTPI dan Entitas Anak;
4. Mengelola Pengembangan Sistem Aplikasi;
5. Mengelola Pengoperasian dan Pelayanan TI untuk pengguna Layanan TI di PTPI.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Kompartemen TI, antara lain:

1. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan penyusunan *Master Plan* TI, program kerja dan portofolio TI sesuai dengan target, strategi dan kebutuhan bisnis Perusahaan;
2. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan tersedianya solusi TI yang dapat diandalkan, guna mendukung penyediaan informasi yang tepat, cepat dan terintegrasi dan dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan;
3. Mengelola, mengevaluasi, dan memastikan pelaksanaan pengembangan sistem informasi berjalan dengan efektif, efisien, dan berkualitas;
4. Mengelola, mengevaluasi, dan memastikan pengelolaan perubahan (*change management*) pada sistem informasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan kegiatan operasional layanan TI dilakukan dengan efektif untuk menjamin ketersediaan, keamanan, keandalan dan keakuratan layanan TI;
6. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan proses manajemen risiko TI yang andal dalam pelaksanaan program kerja dan proses operasional TI;
7. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses kerja Unit Kerja TI agar sejalan dengan pedoman dan prosedur yang ditentukan dalam mendukung pengembangan proses bisnis Perusahaan;
8. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan bahwa seluruh aset TI, termasuk lisensi, yang digunakan untuk penyampaian layanan TI dikelola sesuai dengan hukum dan peraturan serta kewajiban kontraktual yang berlaku;
9. Menyusun, mengelola dan memastikan terlaksananya pedoman strategis dan operasional TI sebagai acuan dalam pelaksanaan proses dan pola kerja di Unit Kerja TI;
10. Melaporkan kepada manajemen puncak mengenai kinerja dan peluang untuk peningkatan terhadap manajemen TI dan terhadap layanan TI.

Information Technology Compartment Main Duties

The scope of work carried out by the Information Technology Compartment includes:

1. Managing the Planning and Control of IT at PTPI and Subsidiaries;
2. Managing the implementation of IT Governance at PTPI and Subsidiaries;
3. Managing the Development and Operations of the SAP System for PTPI and Subsidiaries;
4. Managing the Development of Application Systems;
5. Managing IT Operations and Services for IT Service users at PTPI.

In addition, the IT Compartment duties and responsibilities include:

1. Managing, evaluating and ensuring the preparation of IT Master Plan, work plan, and IT portfolio are in accordance with the targets, strategies, and needs of the Company's business;
2. Managing, evaluating and ensuring the availability of reliable IT solutions to support the provision of accurate, fast, and integrated information, and to provide added value for the Company;
3. Managing, evaluating and ensuring the implementation of information system development runs in an effective, efficient, and high-quality manner;
4. Managing, evaluating and ensuring change management in the information system runs in accordance with applicable regulations;
5. Managing, evaluating and ensuring IT operation activities are carried out in an effective manner to ensure the availability, security, reliability, and accuracy of IT services;
6. Managing, evaluating and ensuring reliable IT risk management processes in the implementation of IT work programs and operational processes;
7. Supervising and evaluating the IT Work Unit overall work processes are in line with the established guidelines and procedures to support the development of the Company's business processes;
8. Managing, evaluating and ensuring all IT assets, including licenses used for the delivery of IT services are managed in accordance with applicable laws and regulations as well as applicable contractual obligations;
9. Preparing, managing, and ensuring the implementation of strategic guidelines and operations as a reference in the implementation of the IT Work Unit work processes and patterns;
10. Reporting to senior management the performance and opportunities for improvement of IT management and IT services.



JUMLAH SDM DAN SERTIFIKASI DI BIDANG TI

Dalam menjalankan tugasnya, Kompartemen TI dipimpin oleh seorang *Senior Vice President* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Transformasi Bisnis. Hingga akhir tahun 2021, jumlah pegawai Kompartemen TI sebanyak 78 pegawai yang terdiri dari 24 karyawan di TI Pusat, 13 karyawan di Petrokimia Gresik, 8 karyawan di Pupuk Kujang, 10 karyawan di Pupuk Kaltim, 5 karyawan di Pupuk Iskandar Muda, 11 karyawan di Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan 7 karyawan di Rekayasa Industri.

Dalam menjalankan fungsinya, Kompartemen TI Perusahaan didukung oleh SDM yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi di bidangnya. Berikut jumlah sertifikasi SDM di bidang TI.

TOTAL IT HC AND CERTIFICATION

In carrying out its duties, the IT Compartment is led by a Senior Vice President who reports directly to the Director of Business Transformation. At the end of 2021, the IT Compartment has 78 employees consisting of 24 employees at Central IT, 13 employees at Petrokimia Gresik, 8 employees at Pupuk Kujang, 10 employees at Pupuk Kaltim, 5 employees at Pupuk Iskandar Muda, 11 employees at Pupuk Sriwidjaja Palembang, and 7 employees at Rekayasa Industri.

In carrying out its functions, the IT Compartment is supported by experienced HC with certifications in their respective fields. The following shows the number of certifications held by IT HC.

Sertifikasi Certification	Jumlah Karyawan yang Memiliki Total Certified Employees
ITIL Foundation Certification	1
CCNA (Cisco Certified Network Associate)	2
CEH (Certified Ethical Hacker)	1
Development Consultant SAP NetWeaver '04 - Application Development Focus ABAP	1
MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate)	1
Data Protection Officer	1
BNSP Skema Pengembang Web Pratama	1
Certificate Network Defender (CND)	1
NSE Certified	1
Chief Information Officer	2
ISMS Lead to Implement ISO 27001	1
COBIT 2019 Foundation	3
Comptia Security +	1
Big Data Analyst with TÜV Rheinland Certified Qualification	3
AWS Certified Cloud Practitioner	2
AWS Certified Solutions Architect - Associate	1
DevOps Foundation Certification	6
Continuous Testing Foundation (CTF)SM Certification	3
Offensif Security Certified Professional (OSCP)	1
EPI Certified Data Center Professional (CDCP)	1
Master Project Manager (MPM)	1

PENGEMBANGAN SDM TI

Perusahaan senantiasa melaksanakan pengembangan dan peningkatan kemampuan dari SDM TI yang dimilikinya. Berikut disampaikan pelaksanaan program pada tahun 2021 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

IT HC DEVELOPMENT

The Company continues to develop and improve the capabilities of its IT HC. The following table shows the program implementation in 2021.

Pengembangan SDM Kompartemen TI

HC Development in the IT Compartment

No	Nama Pelatihan Name of Training	Penyelenggara Organizer	Waktu Date	Peserta (Orang) Participants (Person)
1	Penyusunan <i>Risk Control Self Assessment (RCSA)</i> Risiko RKAP 2021 Pupuk Indonesia Preparation of Risk Control Self Assessment (RCSA) for the 2021 Pupuk Indonesia RKAP Risk	PTPI	Januari January	4
2	<i>Training Coaching for LDP 2020</i>	PTPI	Januari January	1
3	Seminar Virtual - BUMN, <i>are you ready for DISRUPTION?</i>	LAJATA Milenial BUMN	Februari February	1
4	<i>Exclusive Workshop Strategic KMap Development Periode 18</i> Exclusive Workshop Strategic KMap Development Period 18	PTPI	Februari February	9
5	<i>Big Data Analyst with TUV Rheinland Certified Qualification</i>	Digital Business Ecosystem Research Center, Telkom University	Maret March	2
6	<i>Mastering Business Analysis (BABOK-v3) - A Practical Approach</i>	PT Andalan Teknologi Inovasi	April	1
7	Sosialisasi Implementasi <i>Knowledge Management System (KMS)</i> Lentera Periode 4 Implementation Socialization for Lentera Knowledge Management System (KMS) Period 4	PTPI	April	7
8	Pelatihan & Sertifikasi QRMA	PT Cipta Raya Mekar Sahitya	April	2
9	<i>Workshop Culture Fertilizer On Boarding</i> PT Pupuk Indonesia (Persero)	ACT	Mei May	1
10	<i>Living the Grand Why</i> PT Pupuk Indonesia (Persero)	ACT	Mei May	21
11	Pelatihan <i>Examiner Baldrige Excellence Framework</i> Baldrige Excellence Framework Examiner Training	PTPI	Juni June	1
12	<i>Workshop Anger Management</i> PT Pupuk Indonesia	PTPI	Juli July	7
13	<i>Training Data Protection Officer</i>	APPDI (Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia)	Agustus August	1
14	Pelatihan <i>Refreshment Training SAP Modul Production Planning (PP) & Quality Management (QM)</i> Refreshment Training for SAP Production Planning (PP) & Quality Management (QM) Module	IWAN	September	2
15	<i>Webinar Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage</i>	ERMA	September	2
16	Sertifikasi <i>Mobile App Development with React Native</i> Mobile App Development Certification with React Native	Inixindo Surabaya	September	1
17	Pelatihan Induksi Karyawan Pupuk Indonesia Pupuk Indonesia Employee Induction Training	PTPI	September	5
18	<i>Refreshment Training Module Financial (FI)</i>	PTPI	September	1
19	<i>Webinar Quality Excellent Activity (QEA)</i>	WKM	September	4
20	Pelatihan <i>UX Designer Fundamental</i>	PT Inixindopersada Rekayasa Komputer	Oktober October	1



Pengembangan SDM Kompartemen TI HC Development in the IT Compartment

No	Nama Pelatihan Name of Training	Penyelenggara Organizer	Waktu Date	Peserta (Orang) Participants (Person)
21	<i>Data Science Bootcamp 2021</i>	PTPI	Oktober October	3
22	Pelatihan SAP Modul - HCM <i>Payroll Configuration</i> SAP Module - HCM Payroll Configuration Training	PT Trainocate Networks Indonesia	November	2
23	<i>Training Python Programming for Data Science & Teknik Analisa Data</i>	PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara	November	2
24	<i>Training & Certified COBIT 2019</i>	PT Andalan Teknologi Inovasi	November	1
25	<i>Training Enterprise Architecture Full Package</i>	PT Inixindo Widya Iswara Nusantara	November	1
26	<i>Refreshment Training SAP Module PM-PS</i>	PTPI	November	1
27	<i>Refreshment Training SAP Module CO</i>	PTPI	November	1
28	<i>Training Enterprise Risk Management (ERM), Risk Control Self Assessment (RCSA) Risk Officer PT Pupuk Indonesia (Persero)</i>	PT Centria Integrity Advisory	November	2
29	<i>Training Key Risk Indicator (KRI) Risk Officer PT Pupuk Indonesia (Persero)</i>	PT Centria Integrity Advisory	November	2
30	Pelatihan Transformasi Industri 4.0 PI Grup PI Group Industry Transformation 4.0 Training	INDI	Desember December	21

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan telah menyusun pedoman strategis TI untuk mengatur agar pengembangan dan penerapan TI selaras dengan strategis bisnis Perusahaan. Dengan demikian, keberadaan TI dapat memberikan dukungan secara optimal dan nilai tambah bagi Perusahaan. Selain itu, pendayagunaan sumber daya TI dalam proses perencanaan, pengadaan dan pengembangan di Perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pedoman strategis tersebut memberikan panduan tata cara dalam melaksanakan pengelolaan TI yang meliputi:

1. Peran TI di dalam Perusahaan;
2. Perencanaan TI;
3. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI;
4. Pengelolaan Investasi TI;
5. Pengelolaan Sumber Daya TI;
6. Pengelolaan Proyek TI; dan
7. Penanganan Kebutuhan & Identifikasi Solusi.

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan telah menetapkan *roadmap* pengembangan TI yang tertuang dalam *Master Plan* TI PI Grup Tahun 2020-2024. *Roadmap* tersebut terbagi atas 3 (tiga) tema utama, yaitu:

1. *Reinforcing Application to Support Business*
2. *Enhancing Technology & Infrastructure Capability*
3. *Improving IT Operating Model & Governance*

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

The Company has prepared IT strategic guidelines to ensure the IT development and implementation is in line with the Company's business strategies. By so doing, IT will be able to provide optimal support and added value to the Company, and ensure the use of IT resources in the planning, procurement, and development process in the Company is carried out in an effective and efficient manner.

The strategic guidelines provide guidance on the procedures for implementing IT management, and include:

1. Role of IT in the Company;
2. IT Planning;
3. IT Process and Organization Framework;
4. IT Investment Management;
5. IT Resources Management;
6. IT Project Management; and
7. Handling of Needs & Identification of Solution.

INFORMATION TECHNOLOGY ROADMAP

The Company has determined the IT development roadmap, as outlined in the 2020-2024 Pupuk Indonesia IT Master Plan. The roadmap is divided into 3 (three) main themes:

1. Reinforcing Application to Support Business
2. Enhancing Technology & Infrastructure Capability
3. Improving IT Operating Model

PENCAPAIAN TAHUN 2021

ACHIEVEMENT 2021

No	Kelompok Inisiatif Initiative Group	Nama Inisiatif Name of Initiative	Uraian Description
1	Pengembangan Aplikasi Application development	Pengembangan <i>E-Procurement</i> E-Procurement Development	<i>E-Procurement</i> adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengadaan <i>end to end</i> (dari permintaan pengadaan sampai proses pembayaran) secara elektronik serta terintegrasi dengan ERP SAP E-procurement is an application used to carry out end-to-end procurement processes (from procurement requests to payment processing) electronically and is integrated with SAP ERP
2	Pengembangan Aplikasi Application development	<i>Standard Costing - Biaya Usaha</i> Standard Costing - Business Costs	Pengembangan sistem untuk penyusunan standar biaya usaha perusahaan produsen pupuk Development of a system to prepare business cost standards for fertilizer producing companies
3	Pengembangan Aplikasi Application development	Proyeksi HPP dan Rekomendasi Harga HPP Projections and Price Recommendations	Pengembangan sistem pendukung untuk menentukan proyeksi HPP dan harga jual aktual untuk produk urea, NPK, dan ammonia, terdiri dari 2 (dua) modul : <ul style="list-style-type: none"> • Modul Proyeksi HPP • Modul Rekomendasi Harga Development of a support system to determine HPP projections and actual selling prices for urea, NPK, and ammonia products, with 2 (two) modules: <ul style="list-style-type: none"> • HPP Projection Module • Price Recommendation Module
4	Pengembangan Aplikasi Application development	<i>Distributor Management</i>	Pengembangan sistem yang memfasilitasi pendaftaran, verifikasi distributor dan penilaian kinerja distributor secara <i>online</i> Development of a system to facilitate online registration, distributor verification and distributor performance appraisals
5	Layanan Service	Optimalisasi Infrastruktur Infrastructure Optimization	Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur untuk operasional Data/koneksi, aplikasi-aplikasi/sistem baru dan sarana kerja pengolah data perusahaan yang mendukung peningkatan layanan TI di masa pandemi COVID-19 Fulfilling the infrastructure facilities needs for data/connection operations, new applications/systems and corporate data processing work facilities to support the improvement of IT services during the COVID-19 pandemic
6	Tata Kelola Governance	Pemutakhiran ITMP 2020 – 2024 ITMP 2020 – 2024 Update	Dalam menjalankan bisnisnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) memerlukan dukungan penuh dari Teknologi Informasi. Sejalan dengan pengesahan RJPP Perusahaan terkini (RJPP 2022-2024), perubahan organisasi TI yang tersentralisasi serta dengan mempertimbangkan sinergi antar Anak Perusahaan dan PT Pupuk Indonesia (Persero), maka diperlukan dokumen IT <i>Master Plan</i> yang menggambarkan rencana strategis TI secara holistik di PI Grup. Pada tanggal 21 Desember 2021, telah disahkan IT <i>Master Plan</i> PI Grup (ITMP 2020-2024 PI Grup) oleh Direktur Utama dengan harapan dokumen yang disusun dengan berpedoman pada Permen BUMN No. PER-02/MBU/2013 ini dapat menjadi pertimbangan bagi Manajemen dalam melakukan investasi, pemanfaatan, dan pengembangan TI di PI Grup. Untuk memastikan keberhasilan pencapaian pelaksanaan, hasil, dan tujuan ITMP maka Pupuk Indonesia (Persero) juga membentuk IT Steering Committee PI Grup yang beranggotakan direksi di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang salah satu tugasnya melakukan proses <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola TI dan realisasi ITMP di PI Grup. In running its business, PT Pupuk Indonesia (Persero) requires full support from Information Technology. In line with the ratification of the latest Company's RJPP (RJPP 2022-2024), changes to a centralized IT organization, and taking into account the synergy between Subsidiaries and PT Pupuk Indonesia (Persero), an IT Master Plan document was needed that explains the holistic IT strategic plan in the PI Group. On December 21, 2021, the PT Pupuk Indonesia (Persero) Group's IT Master Plan (ITMP 2020-2024 PI Group) was approved by the President Director in the hope that the document prepared by referring to the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/2013 would be taken into consideration by Management when investing, utilizing, and developing IT in the PI Group. To ensure the successful implementation, results, and objectives of the ITMP, Pupuk Indonesia (Persero) also established an IT Steering Committee in PT Pupuk Indonesia (Persero) Group, consisting of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries Board of Directors whose duties include monitoring and evaluating the IT Governance implementation and ITMP



No	Kelompok Inisiatif Initiative Group	Nama Inisiatif Name of Initiative	Uraian Description
7	Pengembangan Aplikasi (SPM Data Science) Application development (SPM Data Science)	Prediksi Harga Amoniak, Urea, NPK Prediction of Ammonia, Urea, NPK Prices	Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk <i>forecasting</i> harga Amoniak, Urea, dan NPK dalam jangka pendek (4 minggu) maupun jangka panjang (12 bulan) berdasarkan data <i>history</i> harga dari buletin internasional. Machine Learning Application for forecasting Ammonia, Urea, and NPK prices in the short term (4 weeks) and long term (12 months) based on historical price data from international bulletins.
		Monitoring Realisasi SODO dan PEB INSW Monitoring the SODO and PEB INSW Realization	Dashboard monitoring realisasi penjualan ekspor di SAP serta PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) di INSW (Indonesia National Single Window), dibandingkan dengan alokasi izin ekspor yang dimiliki oleh Pupuk Indonesia. Dashboard for monitoring the realization of export sales in SAP as well as PEB (Export Notification of Goods) and INSW (Indonesia National Single Window), compared to the allocation of export licenses owned by Pupuk Indonesia.
		Rekomendasi Produk Cross-Sell Cross-Sell Products Recommendations	Rekomendasi produk-produk yang berpotensi untuk dipromosikan secara <i>cross-selling</i> dengan menggunakan metode <i>Market Basket Analysis</i> berdasarkan <i>data history</i> penjualan di SAP. Recommendations for products to potentially promote by cross-selling using the Market Basket Analysis method based on sales history data in SAP.
		Monitoring Program Benefit Model Distributor Distributor Model Benefit Program Monitoring	<i>Dashboard monitoring</i> realisasi penjualan, pencapaian target, dan <i>reward</i> yang diperoleh distributor yang mengikuti Program <i>Benefit Model</i> dari tim Retail Management. Dashboard monitoring sales realization, target achievement, and rewards obtained by distributors participating in the Benefit Model Program from the Retail Management team.
		Segmentasi Gudang Warehouse Segmentation	Optimasi gudang berdasarkan tingkat utilisasi, kapasitas penyimpanan, frekuensi keluar-masuk stok, dibandingkan dengan <i>demand</i> pupuk di wilayah yang <i>di-supply</i> . Rekomendasi yang dihasilkan berupa pengelompokan gudang yang (1) tetap beroperasi, (2) dipertimbangkan untuk ditutup, dan (3) disarankan untuk ditutup. Warehouse optimization based on level of utilization, storage capacity, frequency of stock entry and exit, compared to fertilizer demand in the supplied area. The resulting recommendations are in warehouse groups that (1) are still operating, (2) are being considered for closure, and (3) have been recommended to be closed.
		Evaluasi Kinerja Ekspediter dan Stockholder Expediter and Stockholder Performance Evaluation	Evaluasi kinerja ekspediter berdasarkan kesesuaian kuantum, waktu, dan respon pengiriman. Evaluasi kinerja <i>stockholder</i> berdasarkan utilisasi kapasitas dan kecepatan bongkar muat di gudang. Evaluate expediter performance based on quantum suitability, time, and delivery response. Evaluation of stockholder performance based on capacity utilization and loading and unloading speed in the warehouse.
		Optimasi Least Cost Distribution Least Cost Distribution	Perhitungan biaya distribusi pupuk indikatif dari Lini I sampai Lini III dengan mempertimbangkan rute, fasilitas distribusi dan moda transportasi yang optimal serta pemenuhan demand di masing-masing wilayah. Calculation of indicative fertilizer distribution costs from Line I to Line III by considering optimal routes, distribution facilities and modes of transportation as well as meeting demand in each region.
Analisis Balansitas Stok S&OP S&OP Stock Balance Analysis	<i>Dashboard monitoring</i> dan perencanaan stok Urea dan NPK bulanan dari Lini I sampai Lini III di masing-masing anak perusahaan, yang terdiri dari stok awal, kuantum produksi, pengiriman, dan penjualan, serta pemenuhan target stok optimum dan stok minimum. Monthly Urea and NPK stock monitoring and planning dashboards from Line I to Line III in each subsidiary, including initial stock, production quantum, delivery, and sales, as well as fulfillment of optimum and minimum stock targets.		

No	Kelompok Inisiatif Initiative Group	Nama Inisiatif Name of Initiative	Uraian Description
8	Pengembangan Aplikasi (SPM Transformasi Digital) Application development (SPM Digital Transformation)	<i>Distribution Planning and Control System (DPCS) PI Grup</i> Distribution Planning and Control System (DPCS) PI Group	Mendukung kelancaran pelaksanaan <i>monitoring</i> dan perencanaan distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia, dengan melakukan implementasi DPCS dan pengembangan DRP, optimalisasi stok, serta implementasi Petroport dan Sistro. Supporting the smooth monitoring and planning of fertilizer distribution throughout Indonesia, by implementing DPCS and developing DRP, optimizing stock, as well as implementing Petroport and Sistro.
		<i>Retail Management System (RMS)</i> Retail Management System (RMS)	RMS adalah aplikasi digital yang digunakan oleh distributor dan kios pupuk untuk memproses penjualan pupuk retail, komersil, maupun pupuk PSO. Aplikasi ini memiliki fitur point of sales dan terintegrasi dengan sistem internal dan eksternal. RMS is a digital application used by fertilizer distributors and kiosks to process retail, commercial, and PSO fertilizer sales. This application has a point of sales feature and is integrated into the internal and external systems. Tujuan: 1. Meningkatkan engagement PTPI dengan kios PIHC 2. Meningkatkan transaksi penjualan pupuk retail non PSO 3. Mengakomodir beberapa alternatif mekanisme penyaluran PSO (subsidi produk/subsidi langsung) 4. Memberdayakan kios yang terhubung dengan layanan stakeholder lainnya baik BUMN maupun swasta 5. Sistem penjualan produk non subsidi dan produk-produk lain yang dijual di Kios PIHC Objectives: 1. Increase PTPI's engagement with the PIHC kiosks 2. Increase non-PSO retail fertilizer sales transactions 3. Accommodate alternative PSO distribution mechanisms (product subsidies/direct subsidies) 4. Empower kiosks connected to other stakeholder services, both state and private-owned 5. Sales system for non-subsidized products and other products sold at Kiosk PIHC

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2021, Kompartemen TI telah merealisasikan investasi sebesar Rp30.758.949.693. Anggaran tersebut dipergunakan untuk:

1. Implementasi dan *Enhancement System*;
2. Upgrade dan optimalisasi infrastruktur jaringan, *server* dan *storage*;
3. Pembelian lisensi *software*.

RENCANA PENGEMBANGAN TI 2022

Skema Pengembangan TI Tahun 2022

Reinforcing Application to Support Business

1. Pengembangan Sistem Penjualan Komersil (B2B)
Pengembangan sistem untuk mendukung proses penjualan komersil B2B yang terintegrasi dengan SAP & sistem-sistem pemasaran lainnya
2. Pengembangan *Customer Relationship Management (CRM)*
Implementasi sistem terintegrasi untuk mengelola berbagai kanal keluhan pelanggan (whatapps, email, telepon, medsos) dalam rangka memahami dan mempertahankan pelanggan serta menunjang analisis pelanggan potensial secara komprehensif.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

During 2021, the IT Compartment realized an investment of Rp30,758,949,693. The budget was used for:

1. Implementation and Enhancement System;
2. Upgrade and optimization of network infrastructure, servers and storage;
3. Purchase of software licenses.

2022 IT DEVELOPMENT PLAN

2022 IT Development Scheme

Reinforcing Application to Support Business

1. Commercial Sales System Development (B2B)
System development to support B2B commercial sales process integrated with SAP & other marketing systems
2. Development of Customer Relationship Management (CRM)
Implementation of an integrated system to manage customer complaint channels (whatsapp, email, telephone, social media) in order to understand and retain customers and support a comprehensive analysis of potential customers.



3. Pengembangan Salesman App
Pengembangan aplikasi yang digunakan *salesman* di seluruh wilayah pemasaran Pupuk Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk:
 - a. *Task management* dan *routing salesman* (*tracking salesman activity*).
 - b. Evaluasi pencapaian KPI dan target *salesman*.
 - c. Reporting terkait kondisi pasar (*market intelligence*).
4. Pengembangan Sistem Agrosolusi (I-farms)
Pengembangan aplikasi penunjang program Makmur yang mengelola data petani beserta lahannya, monitoring budidaya tanaman, *farm management & consulting* (edukasi kepada petani), integrasi ekosistem, dan *dashboard & reporting* (lanjutan).
5. Pengembangan *Digitalisasi Trading Operation*
Pengembangan sistem untuk mendukung *operasional trading* dan *data analytic* untuk mendapatkan harga pembelian dan penjualan yang lebih kompetitif.
6. Pengembangan Aplikasi E-HPS & *Cost Estimator*
Pengembangan aplikasi dalam rangka mempermudah mendapatkan sumber data penyusunan HPS, Analisa dan *monitoring trend* harga serta digitalisasi proses pembuatan HPS hingga proses persetujuannya.
7. Implementasi *Warehouse Management System & QR Code*
Implementasi & Roll-Out SAP Modul *Warehouse Management* dan *QR Code System* di PI Group untuk memberikan dukungan kinerja pengelolaan pergudangan (*spare part*).
8. Implementasi SAP SBU O&M PI Group
Implementasi ERP SAP untuk SBU O&M di 5 (Lima) Anper (PKT, PKG, PSP, PKC & PIM) yaitu 5 modul yang terintegrasi (CS, FI, CO, MM, SD) untuk menjalankan proses bisnis SBU OM sehingga sistem menjadi terpusat dan dapat dipantau oleh PTPI maupun Anper
9. Pengembangan Sistem Manajemen Piutang
Pengembangan sistem manajemen piutang modul profiling pelanggan serta pengelolaan detail informasi transaksi termasuk dokumen pendukungnya yang terintegrasi hingga ke anak dan cucu perusahaan.
10. Pengembangan *Performarncce Management*
Pengembangan sistem digital untuk pengelolaan KPI di PI Group mulai dari menyusun, *cascading & alignment*, hingga *monitoring* KPI baik di level korporat hingga anak perusahaan.
11. Pengembangan & *Enhancement Integrated Talent Management System* (ITMS)
Pengembangan sistem *Talent Management System* dalam rangka implementasi *talent mobility* PI Group dan *grand design talent management* sesuai KPI dan KBUMN antara lain meliputi *Talent Selection*, *Talent Development*, *Talent Retention*, *Report Talent Pools*, dan *Talent Profiling* (Hard & Soft).
3. Salesman Development App
Development application used by salesmen in all marketing areas of Pupuk Indonesia for:
 - a. Task management and salesman routing (*tracking salesman activity*).
 - b. Evaluation of KPI achievement and salesman targets.
 - c. Reporting related to market conditions (*market intelligence*).
4. Development of Agrosolution System (I-farms)
Development of supporting applications for the Makmur program to manage data on farmers and their lands, monitor plant cultivation, farm management & consulting (education for farmers), ecosystem integration, and dashboards & reporting (continued)
5. Development of Trading Operations Digitalization
System development to support trading operations and data analytics to gain more competitive buying and selling prices.
6. Development of E-HPS & Cost Estimator Application
Development of application to make it easier to obtain data sources for HPS preparation, analysis and monitoring of price trends, as well as digitizing the HPS manufacturing process up to the approval process.
7. Implementation of Warehouse Management System & QR Code
Implementation & Roll-Out of SAP Warehouse Management Module and QR Code System at PI Group to provide support for warehousing management performance (spare parts).
8. Implementation of SAP SBU O&M PI Group
Implementation of SAP ERP for SBU O&M in 5 (Five) Anper (PKT, PKG, PSP, PKC & PIM) including 5 integrated modules (CS, FI, CO, MM, SD) to run SBU OM business processes so the system becomes centralized and can be monitored by PI or Anper
9. Development of Accounts Receivable Management System
Development of accounts receivable management system for the customer profiling module, as well as management of detailed transaction information including supporting documents that are integrated with the Company's subsidiaries.
10. Performance Management Development
Development of a digital system for KPI management in the PI Group starting from compiling, cascading & alignment, to KPI monitoring both at the corporate and subsidiary level.
11. Development & Enhancement of Integrated Talent Management System (ITMS)
Development of a Talent Management System for implementing PI Group's talent mobility and grand design talent management based on KPI and KBUMN, including Talent Selection, Talent Development, Talent Retention, Report Talent Pools, and Talent Profiling (Hard & Soft).

12. *Learning Development Management System (LDMS)*
Pengembangan sistem berbasis *web & mobile* untuk pengelolaan pembelajaran yang meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan *Training Need Analysis*, persiapan pra-pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan pelaporan pasca-pelatihan serta proses pendukung terdiri atas pengelolaan vendor dan pengelolaan pelatihan yang ditawarkan oleh vendor.
13. Pengembangan Portofolio *Monitoring*
Pembuatan alat digitalisasi untuk mendapatkan data kinerja yang lengkap dan terpusat dalam sebuah sistem, sehingga:
 - a. Data-data yang ada terangkum secara visibilitas dimulai dari data tahun 2019.
 - b. Data/informasi yang tersaji lebih terjamin akuntabilitasnya.
 - c. Data tersimpan dalam fasilitas *online* sehingga lebih efektif dan efisien untuk diakses.
 - d. Analisa data lebih tersistematis.

Enhancing Technology & Infrastructure Capability

1. *Cyber Security Improvement*
Peningkatan sistem sekuriti perusahaan dengan melakukan implementasi:
 - a. *Alert Monitoring System*.
 - b. *Advanced Network Security*.
2. Server and EUC Optimization
Melakukan *upgrade server* dan *end user computing* untuk mendukung proses bisnis perusahaan.

Improving IT Operating Model

1. Implementasi ISO 20000
Implementasi Standard ISO terkait *IT Service Management*.
2. *User Access Control*
Update user access matrix sesuai dengan struktur organisasi terkini.
3. *Enterprise Architecture (EA) modelling Implementation*
Implementasi sistem *enterprise* arsitektur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi bisnis dari perusahaan.

12. Learning Development Management System (LDMS)
Development of a web & mobile-based system for learning management including budget management, preparation of Training Needs Analysis, pre-training preparation, training implementation, and post-training reporting, as well as supporting processes for vendor management and management of training offered to vendors.
13. Portfolio Development Monitoring.
Creating digitization tools to record complete and centralized performance data in one system, so that:
 - a. Existing data is summarized in terms of visibility starting from the 2019 data.
 - b. The data/information presented is more guaranteed accountability.
 - c. Data is stored in online facilities making it more effective and efficient to access.
 - d. More systematic data analysis.

Enhancing Technology & Infrastructure Capability

1. *Cyber Security Improvement*
Improvement of the Company's security system by implementing:
 - a. *Alert Monitoring System*.
 - b. *Advanced Network Security*.
2. Server and EUC Optimization
Upgrading servers and end user computing to support Company business processes.

Improving IT Operating Model

1. Implementasi ISO 20000
Implementation of ISO Standards related to IT Service Management.
2. *User Access Control*
Update user access matrix based on the latest organizational structure.
3. *Implementation of Enterprise Architecture (EA) modeling*
Implementation of enterprise system architecture to improve the Company's business effectiveness and efficiency.



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

RISET DAN INOVASI

RESEARCH AND INNOVATION



Perusahaan memandang kegiatan riset sebagai elemen penting dalam mendukung kinerja usaha berkesinambungan. Riset tersebut diarahkan pada sinergi PI Grup dan mitra strategis dalam merespon kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Perusahaan meyakini bahwa riset mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, baik secara individual maupun kelompok usaha yang ditunjukkan dengan ruang yang besar bagi perkembangan riset. Untuk itu, kegiatan riset dilakukan secara sistematis, terperinci, terencana, mengikuti konsep ilmiah dengan metodologi paling tepat yang dituangkan dalam proposal riset dan didukung dengan SDM yang kompeten dibidangnya.

Fokus riset Perusahaan adalah untuk mendapatkan, menyempurnakan dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan bahan baku/penunjang, proses/teknologi, produk, pasar, lingkungan dan sarana penunjang lainnya. Upaya tersebut dilakukan secara konsolidasi untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis Perusahaan.

The Company views its research activities as an important element for supporting continuous business performance. This research is directed at synergizing with the PI Group and strategic partners to respond to the developing market needs.

The Company believes that research will add value to the Company itself, and the business group, and has allocated a large space for research development. Research activities are carried out in a systematic, detailed, and planned manner, and applies scientific concepts and the most appropriate methods, supported by competent HR in their fields, as outlined in the research proposals.

The Company's research focus is to identify, perfect and solve problems related to raw/supporting materials, processes/technology, products, markets, the environment and other supporting facilities. These efforts are consolidated for the growth and development of the Company's business.



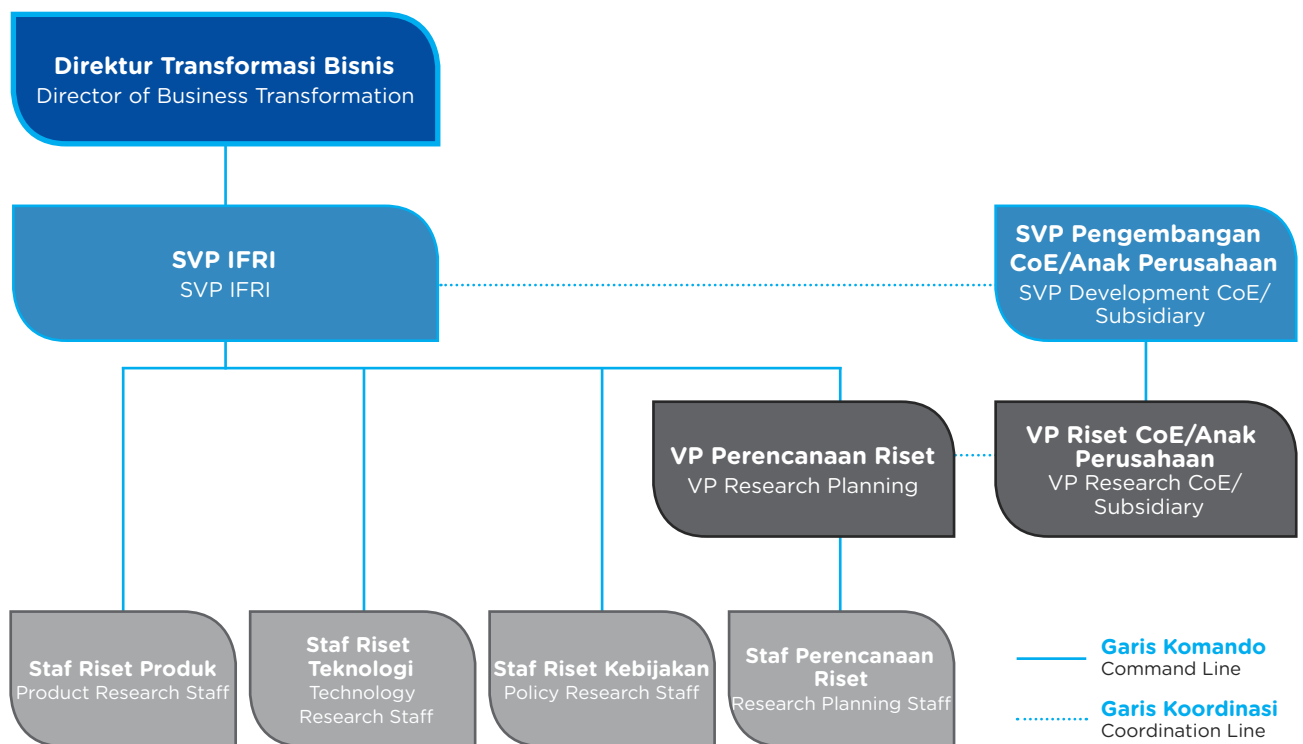
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI RISET

Untuk mendukung sentralisasi fungsi riset serta penugasan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pembentukan *Research Institute*, terdapat penyempurnaan struktur organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 082/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021. Pelaksanaan riset dilakukan oleh Kompartemen *Indonesia Fertilizer Research Institute* (IFRI) yang berada di dalam koordinasi Direktur Transformasi Bisnis serta membawahi Departemen Perencanaan Riset dan kelompok fungsional seperti Riset Produk, Riset Teknologi dan Riset Kebijakan Pupuk.

RESEARCH FUNCTION ORGANIZATIONAL STRUCTURE

To support the centralization of research functions and assignments from the Ministry of SOEs concerning the establishment of the Research Institute, improvements to the organizational structures were stated in the Board of Directors Decree No. 082/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021. Research is carried out by the Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) compartment, under the Director of Business Transformation, and oversees the Research Planning Department and functional groups such as Product Research, Technology Research and Fertilizer policy Research.

Struktur Organisasi Fungsi Riset Research Function Organization Structure



Center of Excellence	Fokus Bidang/Keunggulan Focus of Field/Advantage
PT Petrokimia Gresik	Pupuk Makro+Mikro, Pupuk Organik, Teknologi Produksi NPK dan Turunannya Macro+Micro Fertilizer, Organic Fertilizer, NPK Production Technology and Derivatives
PT Pupuk Kujang Cikampek	Water Soluble Fertilizer, NPK Spesifik Hortikultura, Teknologi Smart Farming Water Soluble Fertilizer, NPK Specific Horticulture, Smart Farming Technology
PT Pupuk Kaltim	Pupuk Coating Mikroba, Pupuk Hayati Spesifik Lahan Marginal, Sistem Rekomendasi Pemupukan Kelapa Sawit Microbial Coating Fertilizer, Marginal Specific Land Fertilizer, Palm Oil Fertilization Recommendation System
PT Pupuk Iskandar Muda	Uji Multilokasi dan Multikomoditi Produk Potensial PI Grup Multi-location and Multi-commodity Testing of Potential PI Group Products

Center of Excellence	Fokus Bidang/Keunggulan Focus of Field/Advantage
PT Pusri Palembang	Controlled Release Fertilizer, Nano Fertilizer, Biostimulan dan Pupuk Spesifik Perkebunan Controlled Release Fertilizer, Nano Fertilizer, Biostimulant and Plantation Specific Fertilizer
PT ReKayasa Industri	Teknologi Proses Agrokiimia dan Petrokimia Agrochemical and Petrochemical Process Technology
PT PI Utilitas	Teknologi utilitas pabrik pupuk Utilities technology fertilizer factory
PT PI Pangan	Produk dan Teknologi Pengolahan Pasca Panen Post-harvest Processing Products and Technology

Berdasarkan struktur organisasi di atas, Kompartemen IFRI dipimpin oleh *Senior Vice President* yang saat ini dijabat oleh Surahmad Wiji Widodo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

FUNGSI UTAMA IFRI

Secara umum, fungsi utama yang dijalankan IFRI adalah mengoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi, merumuskan sasaran dan mengelola seluruh kegiatan riset di lingkungan PTPI dan *Center of Excellence* (Anak Perusahaan). Tujuan dari pelaksanaan fungsi tersebut dalam rangka menunjang penelitian dan kajian dalam bidang riset produk, riset teknologi serta riset kebijakan pupuk yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun inisiatif strategis yang menjadi sasaran utama dari IFRI adalah:

1. Mengembangkan *Customer Centric* R&D dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman;
2. Mengembangkan solusi pertanian (*Agrosolution*) sebagai upaya dalam menciptakan keterikatan dengan konsumen;
3. Membangun *research institute* serta melaksanakan riset pasar dan advokasi kebijakan;
4. Memperkuat R&D *Operating Model* dan organisasi yang solid.

SDM RISET

Pada tahun 2021, jumlah sumber daya manusia di unit kerja sebanyak 59 personil yang terbagi menjadi 9 personil di IFRI (*holding*) dan 50 orang di COE (entitas Anak Perusahaan). SDM riset tersebut berasal dari berbagai bidang keilmuan diantaranya Pertanian, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Manajemen, Bioteknologi dan lain-lain. Dengan jenjang pendidikan Sarjana hingga Doktor.

Based on the above organizational structure, the IFRI compartment is led by a Senior Vice President, Surahmad Wiji Widodo, who was appointed based on the Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021.

MAIN FUNCTIONS OF IFRI

In general, IFRI's main function is to coordinate, direct, evaluate, formulate targets, and manage all research activities in at PTPI and the Centers of Excellence (subsidiaries). The function's purpose is to support studies in product research, technology research and fertilizer policy research to increase the Company's competitiveness. IFRI's targeted strategic initiatives include:

1. Developing Customer Centric R&D and products that meet the nutritional needs of plants;
2. Developing agricultural solutions (*Agrosolution*) to create bonds with consumers;
3. Establishing a research institute to undertake market research and policy advocacy;
4. Strengthening a solid R&D *Operating Model* and organization.

RESEARCH HR

In 2021, the number of employees in the work unit was 59, with 9 in IFRI (*holding*) and 50 in the COE (*subsidiary entity*). Research HR comes from many scientific fields including agriculture, chemical engineering, engineering, management, biotechnology and others, with degrees ranging from Bachelor's to PhD level. Research HR is described in the table below:



No	Keahlian Skill	Pendidikan Education		
		Sarjana Bachelor's degree	Magister Master's degree	Doktor Doctorate
Holding Holding				
1	Pertanian/Afroteknologi Agriculture/Agrotechnology	1		
2	Teknik Kimia Chemical Engineering	1	2	
3	Teknik Mesin Mechanical Engineering			1
4	Manajemen/Ekonomi Economic Management		3	
5	Bioteknologi Biotechnology		1	
CoE/Anak Perusahaan CoE/Subsidiary				
1	Pertanian/Afroteknologi Agriculture/Afrotechnology	14	3	
2	Sosial Ekonomi/Agribisnis Socio-Economic/Agribusiness	2	1	
3	Kimia/Mesin/Teknik Chemical/Mechanical/Engineering	9	3	1
4	Biologi/Mikrobiologi/Bioteknologi Biology/Microbiology/Biotechnology	7	3	
5	Manajemen dan Kompetisi Lain Management and Other Competitions	6	1	
Jumlah Total Personil PI Grup Total PI Group Personnel		40	17	2

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan keahlian dan pengetahuan tentang industri pupuk, pertanian dan wawasan IPTEK yang terkait, Kompartemen IFRI melaksanakan pengembangan kompetensi untuk terus meningkatkan peran riset mendukung kinerja Perusahaan. Hal ini dilaksanakan baik secara *outplant training* maupun *inhouse training*. Berikut program peningkatan kompetensi yang dilaksanakan Kompartemen IFRI sepanjang tahun 2021.

COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM IN 2021

To enhance the expertise and knowledge of the industrial fertilizer, agriculture and other related science and technology insights, the IFRI compartment carried out competency development programs to improve the role of research in supporting the Company's performance. This is carried out through *outplant* and *inhouse training*. The following shows the competency improvement program carried out by the IFRI compartment during 2021.

No	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Peserta (Orang) Participants (Person)
1	2021 Agricultural Outlook	U.S. Departement of Agriculture	Februari February	2
2	Agricultural Economics Society Conference	Agricultural Economics Society	Maret March	2
3	International Conference on Soil Science and Plant Nutrition Management	International Fertilizer Association	Mei May	1
4	IFA Plant Nutrition Solutions Conference	World Academy of Science Engineering and Technology	Juni June	1
5	Workshop analisis kebijakan Policy Analysis Workshop	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Juli July	2
6	International Conference on Plant Nutrition, Soil and Environmental Science	World Academy of Science Engineering and Technology	Oktober October	1
7	Marketing Research with SPSS	Corporate Learning Network	Oktober October	2
8	Sertifikasi Strategic Innovation from Babson College Strategic Innovation certification from Babson College	PT Markplus Indonesia	November	1

No	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Peserta (Orang) Participants (Person)
9	<i>The Data Strategy Course: Building a Datadriven Business</i>	365 Career - UdeMY	November	2
10	<i>Drones for Agriculture</i>	Wageningen - Edx	November	1
11	<i>e-Learning on Digital Agriculture</i>	World Bank	Desember December	1
12	<i>Fundamentals in Digital Marketing</i>	Google	Desember December	1

STRATEGI RISET

Perusahaan memiliki acuan strategi dalam pengembangan riset yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan produk berdasarkan kebutuhan petani yang disesuaikan dengan tren pasar yang prospektif;
2. Penelitian dan pengembangan produk yang bersifat *advanced* seperti *micronutrient*, *controlled release fertilizer*, *water soluble*, *biostimulan* dll;
3. Pengembangan dan implementasi teknologi yang mendukung konsep *good agricultural practice* dan *precision farming* mulai dari persiapan lahan hingga panen;
4. Pelaksanaan sentralisasi fungsi riset dengan membentuk *Center of Excellence* sesuai dengan pengalaman, kompetensi serta potensi pasar masing-masing Anak Perusahaan;
5. Kolaborasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan riset dengan pihak eksternal seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun mitra-mitra potensial lain yang sesuai dengan sasaran perusahaan;
6. Sinergi dengan tim pemasaran maupun produksi untuk memperoleh *feedback* dan *market insight* yang diperlukan dalam inisiasi riset;
7. Aktif memberikan rekomendasi maupun kajian terhadap regulasi/kebijakan kepada *stakeholder* maupun pihak-pihak yang terkait.

RESEARCH STRATEGY

The Company has a strategic reference for its research development that aims to increase the Company's value, as described below:

1. Product development based on farmers' needs tailored to prospective market trends;
2. Advanced products research and development such as micronutrients, controlled release fertilizers, water soluble, biostimulants etc.;
3. Technology development and implementation that supports the concept of Good Agricultural Practice and Precision Farming, from land preparation to harvesting;
4. Centralized research functions by establishing Centers of Excellence in accordance with the experience, competence and market potential of each subsidiary;
5. Active collaboration in research activities with external parties such as research institutions, universities and other potential partners in accordance with the Company's goals;
6. Synergy with the marketing and production teams to gain feedback and market insights needed to initiate research;
7. Active approach to giving recommendations and regulatory/policy reviews to stakeholders and related parties.

Strategi Kolaborasi Riset PTPI PTPI Research Collaboration Strategy





PENCAPAIAN TAHUN 2021

2021 ACHIEVEMENTS

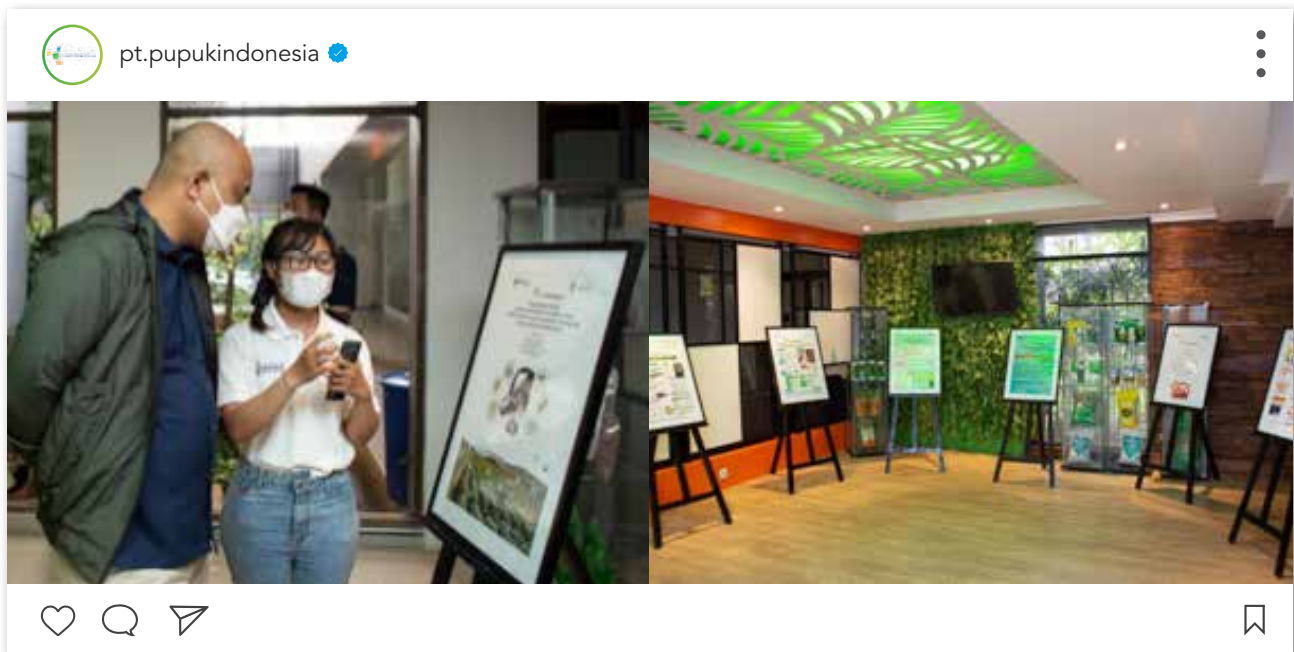
Program Kegiatan Program Activities	Realisasi Realization
Enhanced Efficiency Fertilizer (Controlled Release)	<ul style="list-style-type: none"> Pola pelepasan nutrisi dan uji degradasi polimer Hasil uji multilokasi menunjukkan rerata peningkatan produktivitas 23%. Pattern of release of nutrition and polymer degradation testing The multilocation test results showed a mean increase in productivity of 23%.
Advance Biofertilizer	<ul style="list-style-type: none"> Hasil uji viabilitas dan uji aktivitas endofitik Hasil uji efektivitas menunjukkan rerata peningkatan produktivitas 40%. Viability test results and endophytic activity tests The effectiveness test results showed a mean increase in productivity of 40%.
Urea N Stabilizer	Hasil analisa emisi pupuk urea dengan N-Stabilizer di lahan kelapa sawit. Urea fertilizer emissions analysis results with n-stabilizers on palm oil.
Mikroba Pengikat N Microbial Binder N.	Mikroba Bacillus dan mikroba GD dari tanaman tebu. Bacillus microbes and GD microbes from sugar cane plants.
Optimasi Proses Produksi NPK (Nitalite) NPK Production Process Optimization (Nitalite)	Komposisi bahan baku yang paling efektif serta produksi nitalite untuk kebutuhan <i>pre marketing</i> . Most effective composition of raw materials and nitalite production for pre-marketing needs.
Optimasi Proses Produksi EEF (Controlled Release) EEF Production Process Optimization (Controlled release)	<ul style="list-style-type: none"> Alat mixer CRF dan hasil performance test serta produksi untuk uji multilokasi CRF. Simulasi CFD terkait optimasi proses produksi CRF menggunakan peralatan eksisting. CRF mixer tools and performance test results as well as production for CRF multilocation test. CFD simulation related to optimization of the CRF production process using existing equipment.
Pengembangan Sistem/Aplikasi Precision Agriculture Precision Agriculture System Development/Application	<ul style="list-style-type: none"> Soil sensing kit dengan teknologi <i>near infrared kerjasama</i> dengan BBSDLP. Pemodelan awal terkait pendugaan kadar hara tanah sawah menggunakan kamera multispectral (UAV). Soil sensing kit with near infrared technology in collaboration with BBSDLP. Initial modeling related to estimating the soil nutrient levels in rice fields using a multispectral camera (UAV).
Sistem rekomendasi pemupukan (Precipalm) Fertilization System Recommendation (Precipalm)	<ul style="list-style-type: none"> Data sampel di lahan gambut (445 sampel daun & 203 sampel tanah) dan di lahan mineral (774 sampel daun) untuk update pemodelan dan peningkatan akurasi. Pilot project kelapa sawit bersama tim agrosolusi anak perusahaan wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sample data on peatlands (445 leaf samples & 203 soil samples) and on mineral land (774 leaf samples) for modeling updates and increased accuracy. Palm oil pilot project with the Sumatra and Kalimantan subsidiaries Agrosolusi Teams.
Riset Merauke Merauke Research	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi tanam tahun 2021 seluas 66 Ha dengan luas panen 57 Ha. Realisasi panen tidak mencapai 100% disebabkan adanya toksisitas unsur Fe dan kemasaman pH di lahan B dan C. Rata-rata produktivitas tertinggi lahan A mencapai 5,36 ton/Ha, lahan B mencapai 2,6 ton/Ha dan lahan C mencapai 2,7 ton/Ha. Rata-rata produktivitas (GKP) seluruh lahan tahun 2021 mencapai 2,86 ton/Ha atau meningkat sekitar 9% dibandingkan dengan tahun 2020 (2,61 ton/Ha). Realization of planting in 2021 covering an area of 66 ha with a harvest area of 57 ha. The harvest did not reach 100% due to the toxicity of the Fe element, and the acidity of pH in the B and C land. The highest productivity average in land A reached 5.36 tons/ha, land b reached 2.6 tons/ha and land C reached 2.7 tons/ha. The average productivity (GKP) of 2021 reaches 2.86 tons/ha, an increase of around 9% compared to 2020 (2.61 tons/ha).

PELAKSANAAN FERTINNOVATION 2021

IFRI menyelenggarakan *event* Pupuk Indonesia *Fertinnovation Challenge* 2021 yang merupakan platform PTPI dalam menjangkau dan menggali berbagai inovasi. *Fertinnovation Challenge* menyediakan kompetisi terbuka untuk seluruh disiplin ilmu dan terbagi dalam 3 kategori seperti Inovasi Pertanian Presisi, Inovasi Rantai Nilai Pertanian serta Inovasi Sistem Produksi Pupuk. Sebanyak 334 mahasiswa yang mengikuti kompetisi berasal dari 32 perguruan tinggi di Indonesia.

FERTINNOVATION 2021

IFRI held the Pupuk Indonesia *Fertinnovation Challenge* 2021 event, an PTPI platform for reaching and exploring various innovations. The *Fertinnovation Challenge* is an open competition for all disciplines and is divided into 3 categories, such as precision agriculture innovations, agricultural value chain innovations, and fertilizer production system innovations. A total of 334 students took part in the competition from 32 universities in Indonesia. The first winner of each category besides receiving the main prize will also have the chance of Research & Incubation Funding.



BIAYA DAN KOMERSIALISASI RISET TAHUN 2021

Biaya Riset

Pada tahun 2021, Perusahaan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27,9 miliar untuk kegiatan penelitian dan kerja sama mitra seperti lembaga riset maupun perguruan tinggi, rincian anggaran tersebut ialah Rp 17,8 miliar dikelola *holding* dan Rp 10,2 miliar dikelola anak perusahaan.

RESEARCH AND COMMERCIALIZATION COSTS IN 2021

Research Costs

In 2021, the Company allocated a budget of Rp27.9 billion for research activities and for collaborating with research institutions and universities, with Rp17.8 billion managed by the holding company and Rp10.2 billion by the subsidiaries.



Komersialisasi Riset

Pada tahun 2021, nilai komersialisasi produk hasil riset yang telah dilakukan mencapai Rp 1.034,2 miliar atau meningkat sebesar 14,7% dari realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp 901,5 miliar. Komersialisasi riset tersebut merupakan nilai penjualan produk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan riset yang meliputi produk pupuk, produk hayati dan lainnya.

Research Commercialization

In 2021, the commercialization value of research products reached Rp1,034.2 billion, an increase of 14.7% from Rp901.5 billion in 2020. The commercialization of this research is reflected in the sales value of the Company's products developed from the research, including fertilizer, biological and other products.

RENCANA PENGEMBANGAN RISET 2022

PTPI pada tahun 2022 memfokuskan kegiatan riset untuk mendukung bisnis utama Perusahaan dalam rangka menghadapi tantangan baik global maupun regional. Berikut ini rencana pengembangan riset selama tahun 2022:

2022 RESEARCH DEVELOPMENT PLAN

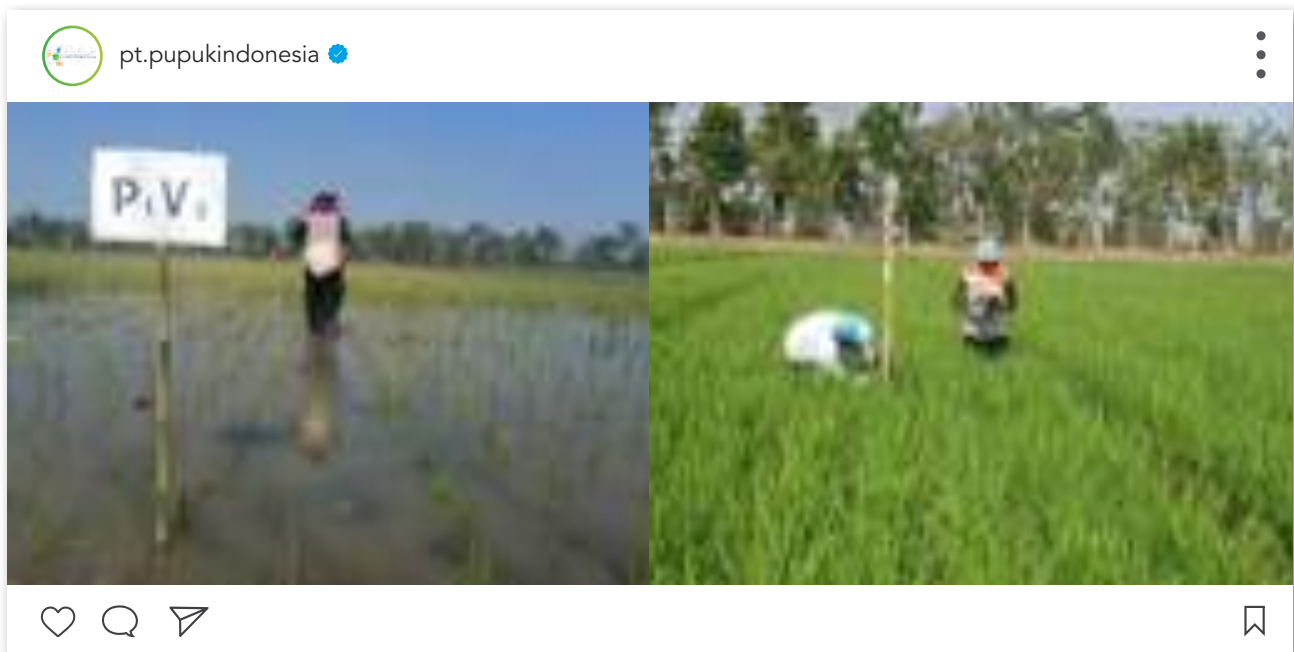
In 2022, PTPI will focus on research activities to support the Company's main business in the face of global and regional challenges. The research development plan for 2022 is as follows:

Rencana Pengembangan Riset 2022 Research Development Plan for 2022

No	Program Kerja Work Program	Keterangan Description
1	<i>Enhanced Efficiency and Future Fertilizer</i>	Melakukan riset produk seperti Controlled Release Fertilizer, Mikroba Endofit, Advanced Biofertilizer, Urea N-Stabilizer dan produk potensial lainnya Conducting product research including Controlled Release Fertilizer, Microbial Endophytic, Advanced Biofertilizer, N-Stabilizer Urea and other potential products
2	<i>Precision Farming</i>	Pengembangan tools dan pemodelan rekomendasi pemupukan spesifik tanaman dan lokasi yang berbasis citra satelit maupun camera multispektral serta riset lain yang mendukung seperti <i>nutrient uptake</i> dan <i>good agriculture practice</i> . Developing tools and modeling of plant and site specific fertilization recommendations based on satellite imagery and multispectral cameras, as well as other supporting research such as nutrient uptake and good agriculture practices.
3	Decarbonisasi Decarbonization	Mendukung program decarbonisasi PI Grup dengan melakukan studi co-firing biomass maupun pengembangan <i>carbon reduction technology</i> . Supporting the PI Group's decarbonization program by conducting co-firing studies on biomass and developing carbon reduction technology.
4	Pengembangan R&D operating model dan organisasi yang solid Development of R&D operating model and solid organization	Penyusunan <i>roadmap</i> riset kluster pupuk untuk PI Grup, <i>enhancement</i> aplikasi SMART, pembaruan DSM dan penerapan kebijakan riset terapan di CoE. Preparing a fertilizer cluster research roadmap for the PI Group, enhancing the SMART applications, updating DSM and applying research policies in CoE.

KEGIATAN KOLABORASI KLUSTER PUPUK DAN PANGAN (IFFRI)

FERTILIZER AND FOOD CLUSTER COLLABORATION ACTIVITIES (IFFRI)



Rekomendasi Pemupukan terhadap Pertumbuhan dan Produksi Padi Biofortifikasi (Inpari Nutri Zinc) dan Galur Padi Unggul Padi SHS

Fertilizer Recommendations for Biofortified Rice Growth and Production (Inpari Nutri Zinc) and SHS Superior Rice Strains

Interaksi pemupukan rekomendasi pupuk PI dengan galur SHS GAB07A-32-3 menunjukkan produktivitas tertinggi, mencapai 7,87 ton/Ha GKP.

Interaction of recommended fertilization using PI fertilizer in the SHS GAB07A-32-3 line showed the highest productivity, reaching 7.87 tons/Ha GKP.

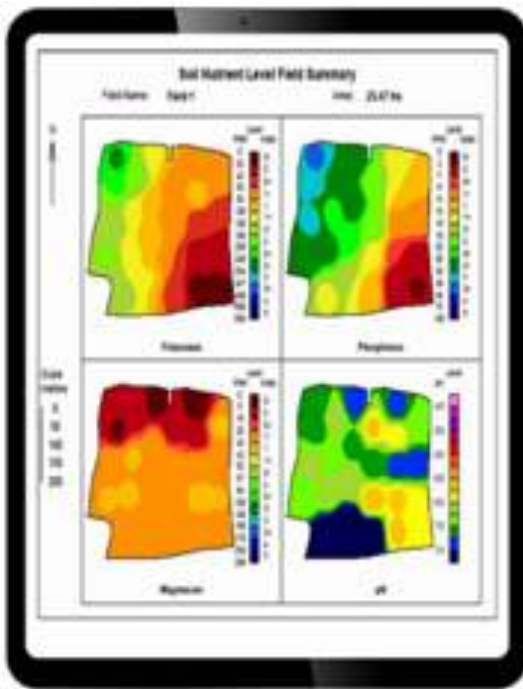


Implementasi Pertanian Presisi pada Perkebunan Tebu

Implementation of Precision Agriculture in Sugar Cane Plantations

1. Hasil pengamatan vegetatif menunjukkan:
 - a. Rerata tinggi tanaman tebu dengan rekomendasi pupuk PI lebih tinggi 20,6% daripada pola pemupukan petani.
 - b. Rerata jumlah batang per meter tanaman tebu dengan rekomendasi pupuk PI lebih tinggi 37,9% daripada pola pemupukan petani.
2. Estimasi panen tebu akan dilaksanakan pada Juli 2022.
 1. The vegetative observations results showed:
 - a. The average height of sugarcane with the recommended PI fertilizer was 20.6% higher than the farmer's fertilization pattern.
 - b. The average number of sugarcane stems per meter with the recommended PI fertilizer was 37.9% higher than the farmer's fertilization pattern.
 2. Estimated sugarcane harvest to be carried out in July 2022.

PRECIPALM

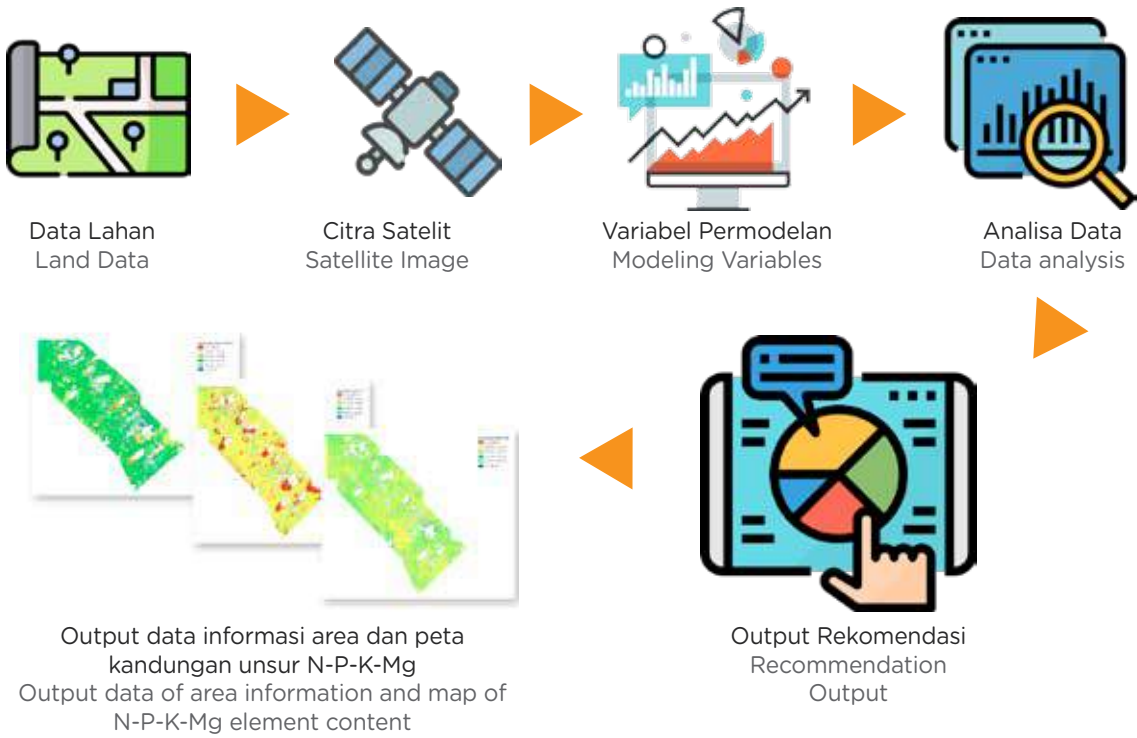


PreciPalm (Precision Agriculture Platform for Oil Palm) merupakan inovasi teknologi pertanian yang dikembangkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk mendukung sistem pertanian presisi. PreciPalm memanfaatkan teknologi satelit untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengolah data spasial dan temporal lahan kebun kelapa sawit menghasilkan rekomendasi pemupukan yang tepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi pemupukan dan usaha tani yang lebih menguntungkan.

Precipalm mampu memberikan informasi kondisi unsur hara makro lahan kelapa sawit secara cepat dan presisi dalam bentuk peta digital lahan, rekomendasi jumlah dan jenis pupuk serta pemantauan kondisi nutrisi lahan paska pemupukan secara realtime. Luasan lahan yang telah dilakukan implementasi Precipalm di tahun 2021 mencapai 165.304 Ha yang tersebar di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Adapun tingkat akurasi yang telah dicapai saat ini pada lahan mineral untuk hara Nitrogen 94%, Phosphor 92%, Kalium 82% dan Magnesium 74%. Rencana pengembangan di tahun 2022 adalah peningkatan akurasi di lahan mineral, pengujian model rekomendasi lahan gambut serta kajian pemanfaatan teknologi radar.

PreciPalm (Precision Agriculture Platform for Oil Palm) is an agricultural technology innovation developed by PT Pupuk Indonesia (Persero) through PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) together with the Bogor Agricultural Institute (IPB), to support precision farming systems. PreciPalm uses satellite technology to identify, analyze, and process spatial and temporal data on palm oil plantations so as to increase productivity, fertilization efficiency and make farming more profitable.

Precipalm provides information on macro-nutrient conditions in palm oil land quickly and precisely in the form of digital land maps, recommendations for the amount and type of fertilizer, and real-time monitoring of post-fertilization soil nutritional conditions. The area of land using Precipalm in 2021 covered 165,304 hectares across North Sumatra, Riau, Jambi, South Sumatra, Lampung, West Java, East Kalimantan, Central Kalimantan and South Kalimantan. The level of accuracy achieved to date in mineral soil for nutrients was Nitrogen 94%, Phosphorus 92%, Potassium 82% and Magnesium 74%. The development plan for 2022 is to increase accuracy in mineral soils, test the recommendation model for peatlands, and study the utilization of radar technology.





A woman in a blue shirt stands with her arms crossed in the upper right. A man in a blue shirt is clapping in the lower left. The background is a bright office space with a window showing greenery. A large number '07' is overlaid in a teal and yellow shape.

07

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Komitmen yang tetap tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG di tengah tantangan situasi telah menciptakan hubungan yang semakin selaras antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan dalam upaya mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan nilai tambah di masa depan.

The higher commitment to applying GCG principles during the challenging situation has created a more harmonious relationship between the Company and its Stakeholders in an effort to achieve sustainable growth and provide added value in the future.



PENCAPAIAN TERBAIK PENERAPAN GCG 2021

THE BEST GCG IMPLEMENTATION ACHIEVEMENTS IN 2021

Capaian Penilaian GCG Periode 2021 GCG Assessment Achievements for the 2021 Period

92,325
"Sangat Baik"
"Excellent"

Penilaian GCG dengan Parameter SK-16
Kementerian BUMN
GCG Assessment with SK-16 Parameters Ministry of SOEs

85,15
"Sangat Terpercaya"
"Very Trusted"

Penilaian GCG dengan Parameter
Corporate Governance Perception Index (CGPI)
GCG Assessment with Parameters Corporate Governance
Perception Index (CGPI)

Pengakuan Eksternal External Acknowledgment

Platinum Rank

Dari | From:
National Center for Sustainability Reporting (NCSR)

Dalam ajang | Event:
The Asia Sustainability Reporting Rating 2021

Tanggal | Date:
7 November 2021
November 7, 2021

Emerging Industry Leader

Dari | From:
Indonesian Quality Award Foundation (IQAF)

Dalam ajang | Event:
Indonesian Quality Award (IQA) ke-17

Tanggal | Date:
16 Desember 2021
December 16, 2021

Implementasi GCG yang konsisten dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini tercermin dari pengakuan dan penghargaan oleh lembaga-lembaga pemeringkat baik nasional maupun internasional yang diterima Perusahaan di tiap tahunnya.

Consistent GCG implementation has had a positive influence on the Company's performance. This is reflected in the recognition/awards by rating agencies, both national and international, that the Company receives every year.

Berikut penghargaan lainnya yang diraih Perusahaan di sepanjang tahun 2021:

The following awards implementation were achieved by the Company in 2021:

No.	Tanggal Perolehan Acquisition date	Nama Penghargaan Award Name	Ajang Penghargaan Award Ceremony	Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institutions
A. Skala Internasional International Scale				
1	20 September 2021 September 20, 2021	<ul style="list-style-type: none"> 3 Star untuk Nutrilead yang mengembangkan inovasi produk pupuk 3 Star untuk Budhal yang mengembangkan Inovasi Teknologi 3 Stars for Nutrilead for developing innovative fertilizer products 3 Stars for Buddhal Technological Innovation developments 	Asia Pasific Quality Organization (APQO) <i>International Conference ke-26</i>	Asia Pasific Quality Organization (APQO)
2	7 November 2021 November 7, 2021	Platinum Rank	The Asia Sustainability Reporting Rating 2021	National Center for Sustainability Reporting (NCSR) National Center for Sustainability Reporting (NCSR)
3	10 Desember 2021 December 10, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Public Initiative (Runner Up) Risk Educator (Runner Up) 	ASEAN Risk Awards 2021	ERMA (Enterprise Risk Management Academy)
B. Skala Nasional National Scale				
1	8 April 2021 April 8, 2021	<ul style="list-style-type: none"> The Best BUMN The Best CEO BUMN untuk Bakir Pasaman The Best BUMN The Best CEO BUMN For Bakir Pasaman 	10th Anugerah BUMN 2021	BUMN Track
2	23 April 2021 April 23, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Top CSR Awards #star 4, TOP CSR Award untuk program CSR unggulan Creating Shared Value (CSV), TOP Leader on CSR Commitment bagi Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman Top CSR Awards #star 4, TOP CSR Award for the flagship CSR program Creating Shared Value (CSV), TOP Leader for CSR Commitment to the President Director of Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman 	Top CSR Awards 2021	TopBusiness
3	29 April 2021 April 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Emisi Korporasi Sektor BUMN Non-perbankan kategori Green Elite, Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor BUMN Non-perbankan kategori Silver Plus Reduction of Corporate Emissions in the Non-banking SOE Sector in the Green Elite category, Transparency in Calculation of Corporate Emissions in the Non-banking SOE Sector in the Silver Plus category 	Emisi Korporasi 2021 Corporate Emissions 2021	BeritaSatu Media <i> Holding</i> , Majalah Investor, dan Bumi Global Karbon BeritaSatu Media Holding, Investor Magazine, and Bumi Global Karbon

No.	Tanggal Perolehan Acquisition date	Nama Penghargaan Award Name	Ajang Penghargaan Award Ceremony	Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institutions
4	9 Juni 2021 June 9, 2021	The Most Promising Company in Marketing 3.0	BUMN Marketeers Award 2021 yang merupakan bagian dari acara Jakarta Marketeers Week BUMN Marketeers Award 2021 as part of the Jakarta Marketeers Week event	Majalah Marketeers
5	15 Juli 2021 July 15, 2021	Role Model Integrasi Roadmap <i>Holding</i> -Anak Perusahaan Role Model Integration Roadmap Holding-Subsidiary	AKHLAK Award 2021	ACT Consulting
6	24 Juli 2021 July 24, 2021	Best CEO Award Employees Choice 2021 pada Kategori Petrochemical Best CEO Award Employees Choice 2021 in the Petrochemical Category	Indonesia Best CEO Awards 2021 'Employees' Choice'	The Economics
7	23 September 2021 September 23, 2021	Indonesia Best TJSL Award 2021 <i>with Outstanding Farmer Welfare Empowerment Programs</i> kategori Food and Fertilizer Industry Indonesia Best TJSL Award 2021 <i>with Outstanding Farmer Welfare Empowerment Programs</i> the Food and Fertilizer Industry category	TJSL Award 2021	Warta Ekonomi
8	14 Oktober 2021 October 14, 2021	The Best Company in Indonesia Trillioner Club	SWA 100 & Indonesia Trillioner Club dengan tema "Winning Strategy to Boost Shareholder Value and How to Become Smart Investor" SWA 100 & Indonesia Trillioner Club with the theme "Winning Strategy to Boost Shareholder Value and How to Become Smart Investor"	Majalah SWA
9	20 November 2021 November 20, 2021	Gugus inovasi <ul style="list-style-type: none"> • Anti Silo2 Club : Platinum • SDM Unggul : Platinum • SIKON : Gold • DIGIFERT : Platinum • SIMAP : Platinum Innovation team <ul style="list-style-type: none"> • Anti Silo2 Club : Platinum • Superior HR : Platinum • SIKON : Gold • DIGIFERT : Platinum • SIMAP : Platinum 	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXV dan <i>International Quality & Productivity Convention (IQPC) 2021</i> XXV National Quality and Productivity Work Meeting (TKMPN) and 2021 International Quality & Productivity Convention (IQPC)	Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI), bekerjasama dengan PT Wahana Kendali Mutu (WKM), Kementerian Ketenagakerjaan, Asia Pacific Quality Organization (APQO) dan Asian Productivity Organization. The Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI), in collaboration with PT Wahana Kendali Quality (WKM), the Ministry of Manpower, the Asia Pacific Quality Organization (APQO) and the Asian Productivity Organization.
10	24 November 2021 November 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultural Productivity Improvement Program • Outstanding Financial Performance 	Indonesia Best BUMN Award 2021	Warta ekonomi
11	30 November 2021 November 30, 2021	Top CEO in <i>Sustainable Business Growth</i>	Top BUMN Award 2021	Bisnis Indonesia
12	8 Desember 2021 December 8, 2021	Most Trusted Company	Indonesia The Most Trusted Companies Award 2021	The Indonesian Institute for <i>Corporate Governance</i> (IICG)
13	15 Desember 2021 December 15, 2021	Gold Winner	BUMN Branding & Marketing Award 2021	Majalah BUMN Track dan DMID
14	16 Desember 2021 December 16, 2021	Emerging Industry Leader	Indonesian Quality Award (IGA) ke-17 tahun 2021	Indonesian Quality Award Foundation (IQAF)

No.	Tanggal Perolehan Acquisition date	Nama Penghargaan Award Name	Ajang Penghargaan Award Ceremony	Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institutions
15	22 Desember 2021 December 22, 2021	<ul style="list-style-type: none">Kategori Best Human Capital Director of The YearKategori Best Corporate Secretary of The YearKategori Best Learning and Development StrategyKategori Best Human Capital Team of The YearBest Human Capital Director of The Year CategoryBest Corporate Secretary of The Year CategoryBest Learning and Development Strategy CategoryBest Human Capital Team of The Year Category	Human Capital & Performance Awards 2021	Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan BusinessNews

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION COMMITMENT



PT Pupuk Indonesia (Persero), disebut juga PTPI atau Perusahaan, berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan di setiap kegiatan usaha sehari-hari dan di seluruh aspek bisnis sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar mampu bertahan di tengah iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.

PTPI menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan bukan lagi merupakan suatu keharusan atau kepatuhan atas Peraturan Eksternal yang berpengaruh bagi Perusahaan, tetapi sudah menjadi landasan utama dalam menjalankan usaha. Melalui tata kelola perusahaan yang baik, PTPI dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan menjalankan kegiatan usaha di industri perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya, serta agroindustri secara sehat sekaligus menjaga kepercayaan Pemegang Saham, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, sampai kepada peran PTPI sebagai entitas usaha milik negara (BUMN) yang menjadi bagian dari agen percepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

PT Pupuk Indonesia (Persero), also known as PTPI or the Company, is fully committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently, comprehensively, and sustainably in all daily business activities, and throughout its business aspects as a step to improve the Company's performance to survive during an increasingly competitive and dynamic business climate.

PTPI realizes that corporate governance implementation is no longer a necessity or compliance with External Regulations that affect the Company, but has become the main foundation in running a business. Through good corporate governance, PTPI can improve the quality of its decision-making and conduct business activities in the fertilizer, petrochemical, agrochemical and other chemical industries, as well as agro-industry in a healthy manner while maintaining the trust of Shareholders, the communities and all other stakeholders, in PTPI's role as a state-owned enterprise (SOE), as the agent for accelerating Indonesia's economic growth.

Dalam perjalanannya, sejak PTPI beroperasi secara komersial, PTPI terus berupaya secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan Perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam meraih kinerja yang optimal.

Komitmen PTPI dalam menerapkan dan menegakkan tata kelola perusahaan yang baik secara simbolis tertuang dalam pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTPI. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pedoman GCG PTPI.

Komitmen penerapan GCG merupakan target mutlak untuk dipenuhi oleh PTPI. Hal tersebut dicapai melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan meningkatkan sistem serta prosedur secara berkesinambungan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG.

PTPI telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG serta *best practice* yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Penerapan prinsip-prinsip GCG juga merupakan bagian dari kepatuhan PTPI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER/01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN.

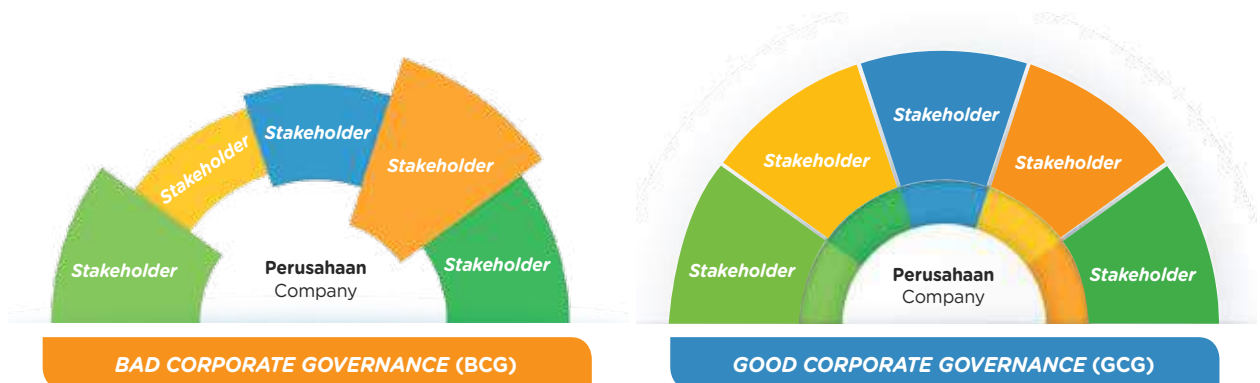
Along its journey, since PTPI started operating commercially, PTPI has consistently tried to apply the principles of good corporate governance to maintain harmony and balance between the interests of the Company and its stakeholders to achieve optimal performance.

PTPI's commitment to implementing and enforcing good corporate governance is symbolically stated in a statement of commitment signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PTPI. This statement is contained in the GCG Guidelines of PTPI.

The commitment to implementing GCG is an absolute target to be fulfilled by PTPI. It is achieved through strengthening the existing infrastructure and improving systems and procedures on an ongoing basis to support the effectiveness of GCG implementation.

PTPI has developed a corporate governance structure and system by taking into account the GCG principles and best practices that apply both nationally and internationally. The GCG implementation principles are also part of PTPI's compliance as a State-Owned Enterprise (SOE) to the Minister of SOEs Regulation No. PER/01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Good Governance Implementation in SOEs.

Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Company Relations with Shareholders and Stakeholders



Pernyataan Komitmen Penerapan GCG Dewan Komisaris dan Direksi PTPI
Statement of Commitment to GCG Implementation PTPI Board of Commissioners and Board of Directors



HIGHLIGHT AKTIVITAS GCG 2021

GCG ACTIVITIES HIGHLIGHTS IN 2021

Januari January	Februari February	Maret March	April April
<p>Internalisasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 di Lingkungan PI Grup tanggal 19 Januari 2021 yang bekerja sama dengan KPK RI. Internalization of KPK Regulation No. 2 of 2020 within the PI Group on January 19, 2021 in collaboration with KPK.</p>	<p>Webinar Memperkuat Pengawasan Internal Organisasi Melalui Penerapan ISO 37002 Whistleblowing Management System tanggal 27 Februari 2021 yang diselenggarakan oleh Visi Integritas. Webinar Strengthening Organizational Internal Supervision through Implementation of ISO 37002 Whistleblowing Management System on February 27, 2021 organized by Visi Integritas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sharing Session Hasil Evaluasi Penerapan GCG PI Grup Tahun 2020 pada tanggal 3 Maret 2021. Webinar Nasional GCG Implementation tanggal 24 Maret 2021 yang diselenggarakan oleh Mutu Institute. Sharing Session on the Results of the GCG Implementation Evaluation in PI Group in 2020 on March 3, 2021. 2. GCG National Webinar on March 24, 2021, organized by the Mutu Institute. 	<ul style="list-style-type: none"> Workshop e-Registration Pengelola LHKPN yang diselenggarakan oleh KPK RI pada 15 April 2021. Webinar Nasional Mewujudkan Dunia Usaha Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 April 2021. Sertifikasi Certified Governance Professional (CGP) tanggal 26-29 April 2021. Perusahaan telah melakukan survei melalui pengisian Kuesioner Asesmen Budaya Organisasi dalam Penerapan Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi (TPK), yang bekerja sama dengan KPK RI. Hal ini dilaksanakan sehubungan dengan pengembangan WBS TPK terintegrasi antara PI dan KPK RI pada tanggal 20 s.d. 27 April 2021 dengan kesimpulan: Tingkat pemahaman Tindak Pidana Korupsi (TPK) karyawan cukup tinggi yaitu 90,13%, Tingkat partisipasi dan budaya anti korupsi karyawan cukup tinggi yaitu 82% dan Tingkat kapasitas dan profesionalisme aparat pengawasan intern cukup tinggi yaitu 87%. Workshop on e-Registration of LHKPN Officials organized by the KPK on April 15, 2021. National Webinar Realizing a Business World Without Corruption organized by the Indonesian KPK on April 28, 2021. Certified Governance Professional (CGP) certification on April 26-29, 2021. The company conducted a survey by completing an Organizational Culture Assessment Questionnaire for the Implementation of the Integrated Corruption Crime Whistleblowing System (TPK), in collaboration with the KPK. This was carried out in connection with the development of an integrated TPK WBS between PI and KPK on April 20-27, 2021 with the conclusion: The level of understanding of Corruption Crimes (TPK) by employees is quite high, scoring 90.13%, the level of participation and anti-corruption culture of employees is quite high scoring 82% and the level of capacity and professionalism of the internal supervision apparatus is quite high, scoring 87%.

- Perusahaan mengikuti kegiatan survey pada kegiatan Peningkatan *Corporate Governance Perception Index 2020* (disingkat *CGPI 2020*). Survey dilaksanakan secara mandiri (*self assessment*) dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukur dalam bentuk pernyataan tentang hal-hal yang dipersepsikan oleh responden sebagai representasi pemangku kepentingan terhadap penerapan GCG Perusahaan. Adapun terhadap hasil pengisian kuesioner, kemudian dilakukan pengujian secara statistic menggunakan uji validitas dan koefisien keandalan. Kegiatan pengisian kuesioner diikuti oleh 5.049 responden yang diwakili oleh 23 (dua puluh tiga) pihak baik dari internal maupun eksternal Perusahaan.
- Penetapan SVP Sekretaris Perusahaan sesuai SK/DIR/055/2021 tanggal 21 April 2021.
- The company took part in the 2020 Corporate Governance Perception Index survey (CGPI 2020) ranking activity. The survey was carried out independently (self-assessment) using a questionnaire as a measuring tool in the form of statements regarding matters perceived by respondents as a representation of stakeholders regarding the Company's GCG implementation. For the results from the questionnaires, statistical testing was carried out using validity and reliability coefficient tests. 5,049 respondents completed the questionnaires represented by 23 (twenty three) parties, internal and external to the Company.
- Determination of the SVP Corporate Secretary in accordance with SK/DIR/055/2021 dated April 21, 2021.

Mei May	Juni June	Juli June	Agustus August
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Workshop Culture Champion on Boarding</i> pada tanggal 3-4 Mei 2021. • Gratifikasi <i>Talk</i> EPS 02 Antara Tradisi dan Akar Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 Mei 2021. • Culture Champion on Boarding Workshop on 3-4 May 2021. • EPS 02 Gratification Talk Between Tradition and the Roots of Corruption organized by KPK on May 28, 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Webinar</i> Nasional Implementasi <i>Forensic Accounting</i> dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 2021. • <i>Webinar</i> Peluit Integritas yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 7-10 Juni 2021. • <i>Interpretation Training</i> on Baldrige Excellence Framework 2021-2022 pada tanggal 9-11 Juni 2021. • <i>Webinar</i> Uji Coba Aplikasi Pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL 2.0) yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 22 Juni 2021. • National Webinar on Forensic Accounting Implementation for Detecting Fraud organized by the Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia on June 5, 2021. • Integrity Whistleblower Webinar organized by the KPK on 7-10 June 2021. • Interpretation Training on the Baldrige Excellence Framework 2021-2022 on June 9-11, 2021. • Webinar for Trial of Online Gratification Reporting Application (GOL 2.0) organized by KPK on June 22, 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar Anti <i>Fraud</i> "<i>Prevention with the Implementation of Anti Bribery Management System</i>" yang diselenggarakan oleh ACFE Indonesia Chapter pada tanggal 3 Juli 2021. • <i>Webinar</i> "<i>Ethic in Business: Big Challenge</i>" "<i>Reinforcing Ethical Business and Integrity Practices</i>" yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada tanggal 7-8 Juli 2021. • <i>International Webinar: "Cyber Risk Management: Stop Cyber Attacks Before They Stop You"</i> yang diselenggarakan oleh IRMAPA pada tanggal 15 Juli 2021. • Study on Anti Fraud "<i>Prevention with the Implementation of Anti Bribery Management System</i>" organized by ACFE Indonesia Chapter on July 3, 2021. • 2<i>Webinar</i> "<i>Ethic in Business: Big Challenge</i>" "<i>Reinforcing Ethical Business and Integrity Practices</i>" organized by PPM Manajemen on July 7-8, 2021. • <i>International Webinar: "Cyber Risk Management: Stop Cyber Attacks Before They Stop You"</i> organized by IRMAPA on July, 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar <i>GRC Summit 2021</i> pada tanggal 26 Agustus 2021. • <i>GRC Summit 2021</i> seminar on August 26, 2021.

- *Webinar* Implementasi SNI 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional pada tanggal 23 Juni 2021.
- Pelatihan dan Sertifikasi Certified Anti *Fraud* Manager (CAFM) yang diselenggarakan oleh Asia Anti *Fraud* pada tanggal 21-23 Juni 2021.
- Webinar on the Implementation of SNI 37301:2021 Compliance Management System organized by the National Standardization Agency on June 23, 2021.
- Anti *Fraud* Manager (CAFM) Training and Certification of Certified organized by Asia Anti *Fraud* on June 21-23, 2021.
- Gratifikasi *Talk* EPS04 Bangun Kompetensi dengan Sertifikasi Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 Juli 2021.
- *E-Learning* Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan oleh ACLC KPK RI pada tanggal 29 Juli 2021.
- Belajar Anti *Fraud* “*Fraud Risk Assessment*” yang diselenggarakan oleh ACFE Indonesia Chapter pada tanggal 31 Juli 2021.
- Gratification *Talk* EPS04 Build Competence with Anti-Corruption Certification organized by KPK on July 28, 2021.
- Anti-Corruption and Integrity Basic Knowledge *E-Learning* organized by ACLC KPK on July 29, 2021.
- Study on Anti-Fraud “*Fraud Risk Assessment*” organized by ACFE Indonesia Chapter on July 31, 2021.

September September	Oktober October	November November	Desember December
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Webinar</i> Penerapan ISO 37002:2021 <i>Whistleblowing Management System</i> yang diselenggarakan oleh Indonesia ISO Expert Association pada tanggal 4 September 2021. 2. <i>Webinar</i> LHKPN: “Apa Susahnya Laporkan LHKPN Tepat Waktu dan Akurat?” yang dilaksanakan oleh KPK RI pada tanggal 7 September 2021. 3. <i>Workshop</i> Anti Korupsi “Deteksi dan Pencegahan Korupsi” yang diselenggarakan oleh BPK RI pada tanggal 14 September 2021. 4. RISKHub <i>International Webinar</i> “<i>Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage</i>” yang diselenggarakan Bersama oleh Marsh, IRMAPA, dan ERMA pada tanggal 27 September 2021. <ul style="list-style-type: none"> • Webinar on the Implementation of ISO 37002:2021 Whistleblowing Management System organized by the Indonesia ISO Expert Association on September 4, 2021. • LHKPN Webinar: “What’s Difficult to Report LHKPN on Time and Accurately?” carried out by KPK on September 7, 2021. • Anti-Corruption Workshop “Corruption Detection and Prevention” held by BPK RI on September 14, 2021. • RISKHub International Webinar “Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage” jointly organized by Marsh, IRMAPA, and ERMA on September 27, 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan <i>Awareness</i> Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600:2016 untuk Personil Bidang Tata Kelola & Kepatuhan PI Grup telah dilakukan pada tanggal 19-22 Oktober 2021. • <i>Awareness</i> Training on SNI ISO 19600:2016 Compliance Management System for Personnel in the PI Group Governance & Compliance Division held on October 19-22, 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas untuk Personil Bidang Tata Kelola & Kepatuhan PI Grup telah dilakukan pada tanggal 16-18 November 2021 yang dikoordinasikan oleh ACLC KPK. • Certification for Integrity Builder Experts for Personnel in the PI Group Governance & Compliance Division carried out on November 16-18, 2021, coordinated by ACLC KPK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2021, Perseroan telah melakukan pemutakhiran Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) Revisi ke-2 berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan fungsi Perseroan menjadi <i>Activist Holding</i>, dan sebagai bentuk Tindak Lanjut atas Aol hasil GCG Assessment Pupuk Indonesia Tahun 2020. Pedoman ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan Nomor: 016/KEP.KOM/XII/2021 dan Nomor: 116.a/A/KU/E42/SK/2021 tanggal 16 Desember 2021. • Pada tahun 2021, Perseroan telah melakukan pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (<i>Code of Group Governance</i>), berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan fungsi Perseroan menjadi <i>Activist Holding</i>. Pedoman Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (<i>Code of Group Governance</i>) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-012 Rev. 1 tanggal 30 Desember 2021 • In 2021, the Company updated the Code of Conduct 2nd Revision based on changes to the Company’s Articles of Association, changes in the Company’s function to become an <i>Activist Holding</i>, and as a form of Follow-up on the Aol results in the 2020 Pupuk Indonesia GCG Assessment. This guide was ratified through a Joint Decree of the President Commissioner and President Director No. 016/KEP.KOM/XII/2021 and No. 116.a/A/KU/E42/SK/2021 dated December 16, 2021. • In 2021, the Company updated the Code of Group Governance, based on changes to the Company’s Articles of Association and changes in the Company’s function to <i>Activist Holding</i>. Code of Group Governance Document No. PI-SEK-PD-012 Rev. 1, dated December 30, 2021

- Gratifikasi *Talk* EPS06 Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 September 2021.
- Internalisasi Budaya Antikorupsi di lingkungan PI Grup dengan Tema "Implementasi WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi KPK RI dan PTPI" tanggal 30 September 2021.
- *E-learning* Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi tanggal 7 Juli-30 September 2021 yang telah diikuti oleh 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang Insan Perusahaan.
- EPS06 Gratification Talk Identification of Gratification Prone Points organized by KPK on September 28, 2021.
- Internalization of Anti-corruption Culture within the PI Group with the theme "Implementation of WBS Integrated Corruption Crimes by KPK and PTPI" on September 30, 2021.
- *E-learning* Technical Guidance for Gratification Control from July 7 - September 30, 2021 attended by 197 (one hundred and ninety seven) Company Personnel.
- *Training of Trainer Whistleblowing System Online* untuk pengelola WBS dari PIM, PKG, ME, PILOG, PIU, dan PIP telah dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021.
- *Training of Trainer Whistleblowing System Online* for WBS managers from PIM, PKG, ME, PILOG, PIU, and PIP conducted on October 29, 2021.
- Internalisasi Budaya Anti Korupsi di lingkungan PI Grup dengan Tema "*Optimalisasi Whistleblowing System dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi, untuk Mewujudkan BUMN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi*", pada tanggal 10 Desember 2021 sebagai salah satu peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2021.
- Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi *Whistleblowing System* TPK Terintegrasi PTPI dan KPK dilakukan melalui pelaksanaan *training i-webs* pada tanggal 14 Desember 2021.
- *Training of Trainer Admin* Pengelola LHKPN PI Grup telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021
- Internalization of Anti-Corruption Culture within the PI Group with the theme "Optimizing the Whistleblowing System in Efforts to Prevent Corruption and Corporate Crime, to Realize a Clean and Corruption-Free SOE", on December 10, 2021 as one of the commemorations of World Anti-Corruption Day 2021.
- Technical Guidance on the Use of the Integrated TPK Whistleblowing System Application was carried out by PTPI and KPK through *i-webs* training on December 14, 2021.
- *Training of Trainer Admin* Officials of LHKPN PI Group was held on December 21, 2021

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan *stakeholders* dengan mewujudkan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya mekanisme pengambilan keputusan manajemen yang tepat dan penuh kehati-hatian (*proper and prudent*) melalui mekanisme *check and balance* sesuai dengan fungsi masing-masing organ Perusahaan.
2. Memaksimalkan nilai Perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja unggul secara berkesinambungan serta menjaga citra Perusahaan yang baik.
3. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan.
4. Mendorong pengambilan keputusan berlandaskan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders*.
5. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko Perusahaan secara lebih efisien dan efektif.
6. Mengurangi potensi benturan kepentingan seluruh organ Perusahaan.
7. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVES

Good Corporate Governance implementation is expected to provide added value to the Company and stakeholders by realizing the following objectives:

1. Encourage the creation of proper and prudent decision-making mechanisms for the management through check and balance mechanism in accordance with the functions of all Company organs.
2. b. Maximize the Company value by continuous superior performance improvement and maintaining a healthy corporate image.
3. Encourage professional, transparent and efficient Company management, and empower the functions and increasing the independency of the Company's organs.
4. Encourage ethical/moral-based decision making and compliance with applicable laws and regulations, with growing awareness of corporate social responsibility towards stakeholders.
5. Encourage more efficient and more effective management of the Company's resources and risks.
6. Reduce potential conflicts of interest in all Company organs.
7. Create a conducive business environment to achieve the Company's goals.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

1. Undang-Undang Republik Indonesia meliputi:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia meliputi:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara meliputi:
 - a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara
 - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

1. Republic of Indonesia Laws including:
 - a. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
 - b. Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - c. Republic of Indonesia Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
 - d. Republic of Indonesia Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
 - e. Republic of Indonesia Law No. 17 of 2003 concerning State Finance.
 - f. Republic of Indonesia Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning Criminal Acts of Corruption.
 - g. Republic of Indonesia Law No. 43 of 2009 concerning Archives.
 - h. Republic of Indonesia Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents.
2. Republic of Indonesia Government Regulations including:
 - a. Republic of Indonesia Government Regulation No. 45 of 2005 dated October 25, 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises.
 - b. Republic of Indonesia Government Regulation No. 44 of 2005 concerning Procedures for State Equity Participation and Administration of State Owned Enterprises and Limited Liability Companies in conjunction with Republic of Indonesia Government Regulation No. 72 of 2016 dated December 30, 2016 concerning Amendments to Republic of Indonesia Government Regulation No. 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.
 - c. Republic of Indonesia Government Regulation No. 28 of 2012 concerning the Implementation of Law No. 43 of 2009 concerning Archives.
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulations including:
 - a. Minister of SOEs Regulation No. KEP-101/MBU/2002 concerning Preparation of Work Plans and Budgets of State-Owned Enterprises.
 - b. Minister of SOEs Regulation No. KEP-102/MBU/2002 concerning Preparation of Long-Term Plans for State-Owned Enterprises
 - c. Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/2006 dated December 20, 2006 concerning Audit Committee for State-Owned Enterprises;
 - d. Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juncto Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara;
 - f. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juncto PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan PER- 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - g. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
 - h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara
 - i. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 - j. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;
 - k. Surat Edaran BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara juncto Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Enterprises (BUMN) in conjunction with Minister of of SOEs Regulation No. PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to Minister of of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
- e. Minister of SOEs Regulation No. PER-21/MBU/2012 concerning Guidelines for Implementing Financial Accountability of State-Owned Enterprises;
 - f. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises in conjunction with PER-10/MBU/10/2020 concerning Amendments to PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
 - g. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.
 - h. Minister of of SOEs Regulation No. PER-11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for Directors of State-Owned Enterprises
 - i. Minister of of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.
 - j. Minister of of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises;
 - k. BUMN Circular Letter Number SE-7/MBU/07/2020 concerning the Core Values for Human Resources of State-Owned Enterprises.
4. Business Competition Supervision Commission (KPPU) Regulation No. 7 of 2009 concerning Guidelines for Concurrent Positions in accordance with the provisions of Article 26 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
 5. Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth Reports in conjunction with the Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth Reports;

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
7. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2006.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
9. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI Nomor 08/KEP.KOM/V/2020 dan 023/A/TR/A22/SK/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi dan Rapat Komite Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi.
10. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.
11. Piagam Satuan Pengawasan Intern Perseroan.

6. Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019 concerning Gratification Reporting.
7. General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia issued by the National Committee on Governance Policy in 2006.
8. Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.
9. Joint Decree of the PTPI Board of Commissioners and Board of Directors No. 08/KEP.KOM/V/2020 and 023/A/TR/A22/SK/2020 concerning Mechanisms for Organizing Board of Commissioners Meetings Involving Directors, and Board of Commissioners Committee Meetings Including the Board of Directors.
10. The Articles of Association of the Company and its amendments.
11. The Company's Internal Audit Unit Charter.

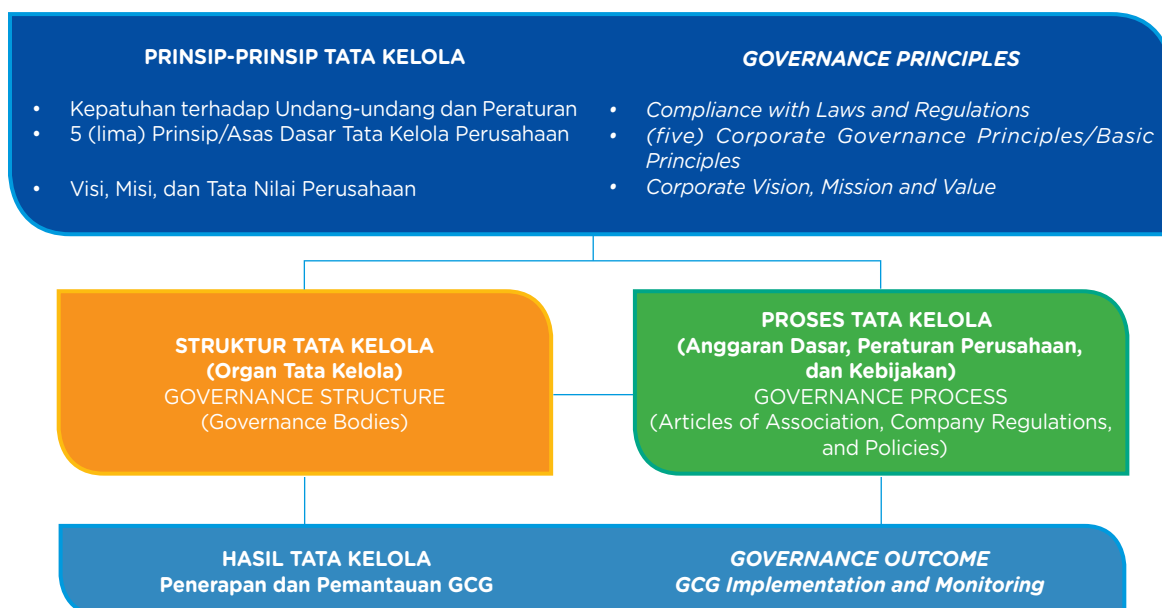
KERANGKA KERJA GCG PTPI

Komitmen PTPI dalam menerapkan GCG diwujudkan dalam Kerangka Kerja GCG atau *Corporate Governance Framework*. *Governance Framework* menjadi landasan utama penerapan GCG di PTPI. *Governance Framework* PTPI terdiri dari *Governance Commitment*, *Governance Principle*, *Governance Structure*, dan *Governance Process*. Keselarasan aspek-aspek tersebut menghasilkan efektivitas tata kelola atau *governance outcome* yang sesuai dengan harapan Perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.

PTPI'S GCG FRAMEWORK

PTPI's commitment to GCG implementation is embodied in the GCG Framework. The Governance Framework is the main basis for GCG implementation in PTPI. PTPI's Governance Framework consists of Governance Commitment, Governance Principles, Governance Structure, and Governance Process. The alignment of these aspects results in effective governance or governance outcomes that are in line with the expectations of the Company and all stakeholders.

Governance Framework PTPI *Governance Framework PTPI*



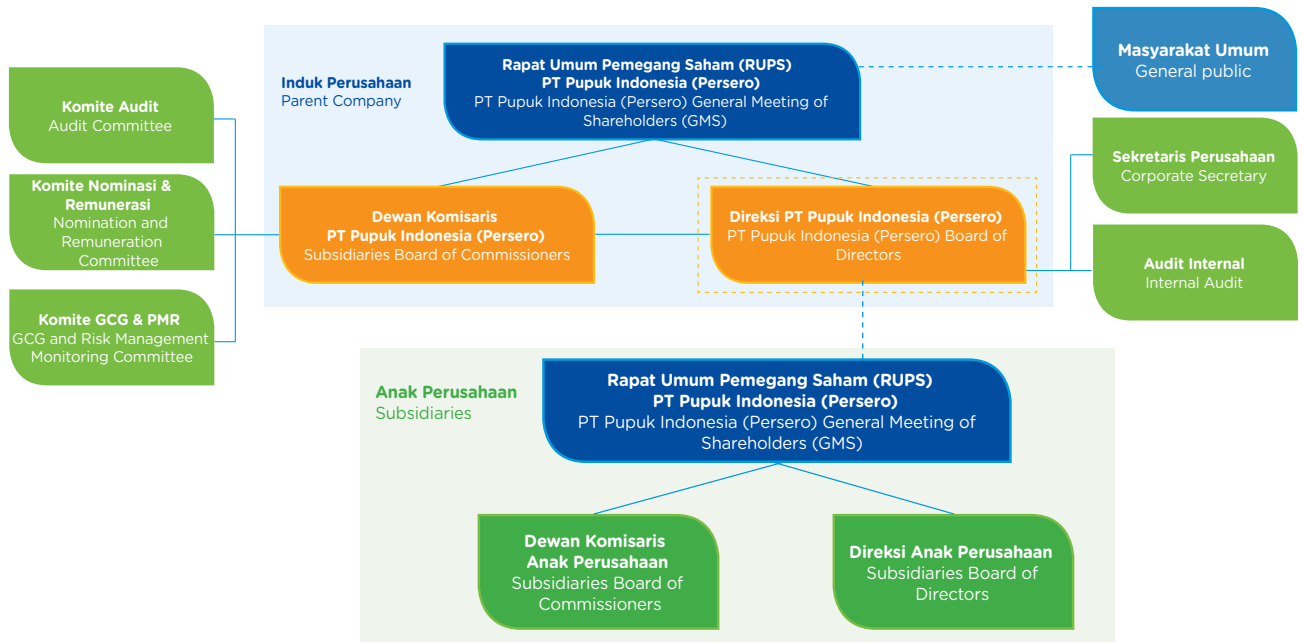
PENERAPAN DAN PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA KELOMPOK USAHA PTPI

Sebagai wujud komitmen PTPI dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan komprehensif, PTPI sebagai entitas usaha yang memiliki peran sebagai Induk *Holding* BUMN Pupuk dan memiliki entitas anak usaha, terus berupaya menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola, baik di lingkungan *holding* maupun Entitas Anak. PTPI telah menetapkan prinsip pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola, baik di lingkungan *holding* maupun Entitas Anak.

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF PTPI GROUP GOVERNANCE PRINCIPLES

As a form of PTPI's commitment to consistently and comprehensively applying the governance principles, PTPI as a business entity who's role is the Holding of BUMN Pupuk, with its subsidiaries continues implement and enforce the principles of good governance, both in the holding and the subsidiaries. PTPI has established the principles for its business activities based on the principles of good governance, both in the Holding and the Subsidiaries

Desain Tata Kelola Kelompok Usaha PTPI PTPI Business Group Governance Design



Prinsip yang Diterapkan dalam Struktur Perusahaan

Pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan harus memperhatikan prinsip GCG sebagai berikut:

1. Keterbukaan
 - a. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Induk dan Anak Perusahaan bagi stakeholder yang mempunyai kepentingan terhadap Induk dan Anak Perusahaan, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan.
 - c. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar Induk dan Anak Perusahaan dan peraturan

Principles Applied in Company Structure

The management of the Parent and Subsidiaries must observe the following GCG principles:

1. Transparency
 - a. Transparency in carrying out the decision-making process and transparency in presenting material and relevant information regarding the Parent and Subsidiaries for stakeholders who have an interest in the Parent and Subsidiaries, based on applicable rules and regulations.
 - b. Ensuring transparency and objectivity in carrying out the decision-making process for managing the Parent and Subsidiaries.
 - c. Taking the initiative to disclose not only information required by the Articles of Association of the Parent and Subsidiaries and applicable laws and

perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para stakeholders.

2. Akuntabilitas
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ di Induk dan Anak Perusahaan sehingga pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan terlaksana secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders Induk dan Anak Perusahaan.
3. Pertanggungjawaban
Kesesuaian dalam pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian
Pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan dilakukan secara profesional berlandaskan kode etik tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko.
5. Kewajaran
Keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Prinsip Tata Kelola Usaha PI Grup

Prinsip tata kelola kelompok usaha yang tergabung dalam PI Grup dibagi berdasarkan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh organ utama dan organ pendukung di masing-masing entitas. Adapun prinsip tata kelola kelompok usaha PI Grup, sebagai berikut:

1. Prinsip Hubungan Korporasi antara Perusahaan dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan mengutamakan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, dengan didasarkan atas prinsip sinergi serta memperhatikan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka mencapai hasil yang terbaik untuk Perusahaan dan Anak Perusahaan.
2. Interaksi dan koordinasi antara Direksi Perusahaan dengan dan antar Anak Perusahaan untuk hal-hal yang belum tercakup dalam Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*), atau tidak terkait dengan pengambilan keputusan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan. Interaksi dan koordinasi tersebut dibuat secara tertulis dan secara tegas menyatakan peran Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan dan peran Anak Perusahaan.
3. Perusahaan dan Anak Perusahaan akan bertindak berdasarkan praktik-praktik terbaik pada industri yang terkait, dengan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan Anak Perusahaan, serta memenuhi persyaratan-persyaratan dari stakeholder yang dapat berpengaruh kepada operasi Perusahaan dan Anak Perusahaan.

regulations, but also matters that are important and may influence the decision-making of stakeholders.

2. Accountability
Clarity of functions, implementation and responsibilities of the Organs in the Parent and Subsidiaries so that the management of the Parent and Subsidiaries is carried out effectively, efficiently, and is accountable to the stakeholders of the Parent and Subsidiaries.
3. Responsibility
Conformity in the management of the Parent and Subsidiaries to the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.
4. Independency
The management of the Parent and Subsidiaries is carried out professionally based on a code of conduct without conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles by considering risk management.
5. Fairness
A balance between the rights and obligations of the management of the Parent and Subsidiaries in accordance with the applicable rules and regulations.

PI Group's Corporate Governance Principles

The governance principles of the PI Group's business groups are divided based on the business activities carried out by the main bodies and supporting bodies in each entity. The PI Group business group governance principles are as follows:

1. The principle of Corporate Relations between the Company and its Subsidiaries as well as between Subsidiaries prioritizes the interests of the Company as a whole, based on the principle of synergy and taking into account the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in order to achieve the best results for the Company and its Subsidiaries.
2. Interaction and coordination between the Board of Directors of the Company and and between Subsidiaries for matters not covered by the Code of Group Governance, or not related to decision-making determined by the Board of Directors of the Company as Shareholders of the Subsidiary. The interaction and coordination is made in writing and explicitly states the role of the Company as the Shareholder of the Subsidiary and the role of the Subsidiary.
3. The Company and its Subsidiaries will act based on best practices in the relevant industry, complying with all applicable laws and regulations, the Articles of Association of the Company and Subsidiaries, as well as comply with requirements from stakeholders that may affect the operations of the Company and Subsidiaries.

Hirarki Struktur Kelompok Usaha PTPI

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas secara langsung pada Anak Perusahaan (kecuali Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk.) yang memungkinkan Perusahaan untuk memiliki kendali atas Anak Perusahaan secara langsung sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anak Perusahaan berperan melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari Perusahaan sebagai Induk Perusahaan.
3. Perusahaan selaku Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan mengkoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Anak Perusahaan dan/atau tanpa perjanjian dengan/kuasa terkait dengan hal-hal yang menyangkut hubungan yang ada antar Perusahaan dalam kelompok usaha PI Grup, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas operasional bisnis Anak Perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pihak-Pihak yang Memegang Peranan Dalam Struktur Kelompok Usaha PI Grup

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan RUPS Perusahaan sebagai Organ Perusahaan yang memegang segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi Perusahaan atau Dewan Komisaris Perusahaan. Perusahaan sebagai Perusahaan yang merupakan BUMN dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia bertindak selaku RUPS Perusahaan.
2. Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan serta memberikan saran dan pendapat kepada RUPS Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
 - b. Dalam pendekatan satu kesatuan ekonomi, Dewan Komisaris Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengetahui segala kebijakan dan tindakan Perusahaan dalam pengelolaan Anak Perusahaan melalui Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan.
 - c. Dewan Komisaris Perusahaan juga berkewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan keputusan RUPS Perusahaan.

Hierarchy Structure of PTPI Business Groups

1. The Company is a Company that has a direct majority share ownership in a Subsidiary (except for an open Subsidiary (Tbk.) that allows the Company to have direct control over the Subsidiary in accordance with applicable rules and regulations.
2. Subsidiaries play a role in carrying out operational activities in accordance with predetermined targets and are an extension of the Company as the Parent Company.
3. The Company as a Company has the authority to establish policies and coordinate, organize and/or synergize functions for Subsidiaries based on agreements with/proxy of Subsidiaries and/or without agreements with/power related matters relating to existing relationships between the Companies in the group. PI Group's business, as well as supervising and evaluating the business operations of the Subsidiaries is in accordance with the applicable rules and regulations.

Parties That Have a Role in the PI Group's Business Group Structure

1. General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company The Company's GMS is the Company's Organ that holds all the authority not given to the Company's Board of Directors or the Company's Board of Commissioners. The company as a state-owned company where all of its shares are owned by the Unitary State of the Republic of Indonesia, through the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia acts as the Company GMS.
2. Board of Commissioners
 - a. The Company's Board of Commissioners as the Company's Organ in charge of supervising and providing advice to the Company's Board of Directors in carrying out the Company's management activities, as well as providing suggestions and opinions to the Company's GMS in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association.
 - b. In a unified economic approach, the Company's Board of Commissioners has the authority to know all the Company's policies and actions in managing the Subsidiary through the Company's Board of Directors as the Shareholders of the Subsidiary.
 - c. The Company's Board of Commissioners is also obliged to always follow the development of the Company's activities and other obligations in the context of supervisory duties and providing advice as long as it does not conflict with the laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the decisions of the Company's GMS.

- d. Dewan Komisaris Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rekomendasi pada RUPS Perusahaan, saran dan nasihat kepada Direksi Perusahaan serta memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi Perusahaan sesuai dengan batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan RUPS Perusahaan.
- e. Mempertimbangkan prinsip independensi/kemandirian, maka tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Dewan Komisaris Perusahaan, tidak dapat diberlakukan sebagai tugas, wewenang dan kewajiban pada Anak Perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*).
3. Direksi Perusahaan
- a. Direksi Perusahaan sebagai Organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang penuh terhadap pengurusan jalannya Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Direksi Perusahaan mempunyai tugas melakukan pengurusan Perusahaan dan mewakili Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pengurusan, Direksi Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan dan mengatur ketentuan-ketentuan kepegawaian Perusahaan.
- c. Dalam melaksanakan tugas mewakili Perusahaan, Direksi Perusahaan mempunyai kewenangan untuk mengatur penyerahan kekuasaan Direksi Perusahaan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Serta mengatur penyerahan kekuasaan Direksi Perusahaan kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- d. Mempertimbangkan prinsip independensi/kemandirian, tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada Direksi Perusahaan tidak dapat diberlakukan sebagai tugas, wewenang dan kewajiban pada Anak Perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*).
4. Perusahaan selaku Pemegang Saham dari Anak Perusahaan.
- a. Perusahaan selaku Pemegang Saham mayoritas di Anak Perusahaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perkembangan usaha Anak Perusahaan.
- b. Perusahaan selaku Pemegang Saham mayoritas di Anak Perusahaan dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS Anak Perusahaan dengan syarat semua Pemegang Saham Anak Perusahaan dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul yang bersangkutan.
- d. The Company's Board of Commissioners has the obligation to provide recommendations at the Company's GMS, suggestions and advice to the Company's Board of Directors and give approval to the Company's Board of Directors' proposals in accordance with the limits stipulated in the Company's Articles of Association and the decisions of the Company's GMS.
- e. Taking into account the principle of independence, the duties, authorities and obligations attached to the Company's Board of Commissioners cannot be treated as duties, authorities and obligations of the Subsidiary as a separate legal entity.
3. Company Board of Directors
- a. The Company Board of Directors is the Company Organ with full duties and responsibilities for managing the Company's operations for the interests and objectives of the Company, in accordance with the provisions of applicable laws and the Company's Articles of Association.
- b. The Company Board of Directors has the duty of managing the Company and representing the Company. In carrying out its management duties, the Company's Board of Directors has the authority to determine the Company's management policies and regulate the provisions of the Company's staffing.
- c. In carrying out the duties of representing the Company, the Company Board of Directors has the authority to regulate the transfer Company Board of Directors power to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Company Board of Directors in accordance with applicable regulations and the Company's Articles of Association. As well as regulating the transfer of power of the Company's Board of Directors to one or several employees of the Company, either individually or jointly or to other people in accordance with applicable regulations and the Company's Articles of Association.
- d. Taking into account the principle of independency, the duties, authorities and obligations attached to the Company Board of Directors cannot be treated as duties, authorities and obligations of the Subsidiary as a separate legal entity.
4. The Company as the Shareholder of the Subsidiaries.
- a. The Company as the majority shareholder in the Subsidiaries has the right to obtain information either directly or indirectly about the business development of the Subsidiaries.
- b. The Company as the majority shareholder in the Subsidiaries may make binding decisions outside the GMS of the Subsidiaries provided that all Shareholders of the Subsidiaries with voting rights agree in writing and sign the proposal in question.

- c. Perusahaan selaku Pemegang Saham untuk Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk) maka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan
 - a. RUPS Anak Perusahaan sebagai Organ Anak Perusahaan yang memegang segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi Anak Perusahaan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 - b. Anak Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perusahaan, maka Direksi Perusahaan bertindak selaku RUPS Anak Perusahaan.
 - c. RUPS Anak Perusahaan memiliki kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.
 - d. Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk), maka RUPS Anak Perusahaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dewan Komisaris Anak Perusahaan
 - a. Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebagai Organ Anak Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Anak Perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengurusan Anak Perusahaan serta memberikan saran dan pendapat kepada RUPS Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.
 - b. Dewan Komisaris Anak Perusahaan juga berkewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan kegiatan Anak Perusahaan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Anak Perusahaan, dan keputusan RUPS Anak Perusahaan.
 - c. Dewan Komisaris Anak Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rekomendasi pada RUPS Anak Perusahaan, saran dan nasihat kepada Direksi Anak Perusahaan serta memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi Anak Perusahaan sesuai dengan batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta keputusan RUPS Anak Perusahaan.
7. Direksi Anak Perusahaan
 - a. Direksi Anak Perusahaan sebagai Organ Anak Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Anak Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Anak Perusahaan serta mewakili Anak Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.
 - b. Direksi Anak Perusahaan sebagai pelaksana strategi Perusahaan di Anak Perusahaan sesuai arahan Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan.
- c. The Company as the Shareholder for an open Subsidiary (Tbk) has the rights and obligations as stated in the applicable Financial Services Authority rules and regulations.
5. General Meeting of Shareholders (GMS) of Subsidiaries
 - a. The Subsidiaries' GMS as the Subsidiaries' Organ holds all the authority that is not given to the Subsidiaries' Board of Directors or the Subsidiaries' Board of Commissioners.
 - b. Subsidiaries whose majority shares are owned by the Company, the Board of Directors of the Company acts as the GMS of the Subsidiary.
 - c. The Subsidiaries' GMS has the authority to give approval as stipulated in the Subsidiaries' Articles of Association.
 - d. Open Subsidiary (Tbk), the Subsidiaries' GMS shall refer to the applicable Financial Services Authority rules and regulations.
6. Subsidiaries' Board of Commissioners
 - a. The Subsidiaries' Board of Commissioners, as the Subsidiaries' Organ in charge of supervising and providing advice to the Subsidiaries' Board of Directors in carrying out the Subsidiaries' management activities as well as providing advice and opinions to the Subsidiaries' GMS in accordance with the provisions in the Subsidiaries' Articles of Association.
 - b. The Subsidiaries' Board of Commissioners is also obliged to always follow the development of the Subsidiaries' activities and other obligations in the context of the supervisory and advisory duties as long as it does not conflict with the applicable regulations, the Subsidiaries' Articles of Association of the Subsidiary, and the Subsidiaries' GMS resolutions.
 - c. The Subsidiaries' Board of Commissioners has the obligation to provide recommendations to the Subsidiaries' GMS, suggestions and advice to the Subsidiaries' Board of Directors as well as to give approval to the Subsidiaries' Board of Directors' proposals in accordance with the limits stipulated in the Subsidiaries' Articles of Association and the Subsidiaries' GMS resolutions.
7. Subsidiaries' Board of Directors
 - a. The Subsidiaries' Board of Directors as an Organ of the Subsidiaries is authorized and fully responsible for the management of the Subsidiaries, in accordance with the Subsidiaries' purposes and objectives and represents the Subsidiaries, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Subsidiaries' Articles of Association.
 - b. The Subsidiaries' Board of Directors as the implementer of the Company Subsidiaries' strategy in accordance with the Company Board of Directors' directives as the Subsidiaries' Shareholders.

- c. Direksi Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk.) melaksanakan strategi Perusahaan di Anak Perusahaan sesuai arahan Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan serta memperhatikan arahan dari Pemegang Saham lainnya sebagaimana pada peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Masyarakat Umum
- Untuk Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk.) yang menjual sahamnya kepada masyarakat umum maka wajib memenuhi hak dan kewajiban Pemegang Saham lainnya dalam hal ini masyarakat umum sesuai peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan Organ Entitas Induk dengan Organ Entitas Anak

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan
 - a. Pada RUPS Anak Perusahaan, Direksi Perusahaan mewakili Perusahaan sebagai Pemegang Saham Mayoritas.
 - b. Keputusan-keputusan Direksi Perusahaan pada RUPS Anak Perusahaan merupakan keputusan yang diambil oleh Direksi Perusahaan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan keputusan RUPS Anak Perusahaan.
 - c. Perusahaan diwakili oleh Direktur Utama atau Direksi Perusahaan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan selaku RUPS Anak Perusahaan.
 - d. RUPS Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk.) mengacu pada peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi Perusahaan
 - a. Direksi Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan, termasuk sebagai Pemegang Saham mayoritas Anak Perusahaan dan Pemegang Saham Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk.)
 - b. Direktur Perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang ditugaskan sebagai Dewan Komisaris Anak Perusahaan atau perangkatnya, menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi Anak Perusahaan dalam upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Direktur dan/atau pegawai Perusahaan tersebut mempertanggungjawabkan penugasan yang diembannya kepada Direksi Perusahaan.
 - c. Fungsi pendukung Perusahaan lainnya, sesuai bidang tugasnya, melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan/atau penyelenggaraan dalam upaya terciptanya sinergi baik dalam tahap pengambilan keputusan/perencanaan maupun tahap implementasi di Perusahaan dan Anak Perusahaan.
 - d. Masing-masing fungsi pendukung dimaksud bertanggung jawab kepada Direksi Perusahaan.

- c. The Board of Directors of a limited liability (Tbk.) Subsidiary carries out the Company Subsidiary's strategy in accordance with the Company Board of Directors' directives as the Subsidiaries' Shareholders, and pays attention to the directives of other Shareholders as stipulated in the Financial Services Authority rules and regulations.
8. General Public
- For a publicly listed Subsidiary (Tbk.) that sells its shares to the general public, it must fulfill the rights and obligations of other Shareholders, in this case the general public in accordance with the Financial Services Authority rules and regulations.

Relationship between Parent Entity Organs and Subsidiary Organs

1. General Meeting of Shareholders (GMS) of Subsidiaries
 - a. At the GMS of the Subsidiaries, the Company's Board of Directors represent the Company as the Majority Shareholder.
 - b. The resolutions of the Company's Directors at the Subsidiary's GMS are resolutions taken by the Company's Board of Directors based on the mechanism stipulated in the Subsidiaries' Articles of Association and the Subsidiary's GMS resolutions.
 - c. The Company is represented by the Company's President Director or the Board of Directors appointed in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association as the GMS of the Subsidiary.
 - d. The GMS of limited liability Subsidiaries (Tbk.) refers to the Financial Services Authority rules and regulations.
2. Company Board of Directors
 - a. The Company's Board of Directors is fully responsible for the overall management of the Company, including as the majority shareholder of the Subsidiary and the shareholder of the limited liability Subsidiary (Tbk.)
 - b. Directors of the Company and/or employees of the Company who are assigned as the Board of Commissioners of the Subsidiary or its apparatus, carry out the supervisory and advisory duty to the Board of Directors of the Subsidiary in an effort to achieve the targets that have been set. The directors and/or employees of the Company are responsible for the assignments they carry for the Company's Board of Directors.
 - c. Other Company support functions, according to their field of duty, carry out communication, coordination, and/or implementation in an effort to create synergy both in the decision-making/planning stage and in the implementation stage in the Company and its Subsidiaries.
 - d. Each of the following supporting functions is responsible to the Company's Board of Directors.



3. Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan
 - a. Direksi Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan dipilih dan diusulkan oleh Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Anak Perusahaan.
 - c. Pengusulan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi Perusahaan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris Perusahaan dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
3. Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries
 - a. The Company Board of Directors has the authority to appoint and dismiss the Board of Commissioners and Subsidiaries' Board of Directors in accordance with applicable regulations.
 - b. The Subsidiaries' Board of Commissioners and Board of Directors are selected and proposed by the Company Board of Directors as the Subsidiaries' Shareholders in accordance with the Subsidiaries' Articles of Association.
 - c. Proposals for the Subsidiaries' Board of Commissioners and Board of Directors of that provide significant contributions to the Company and/or have strategic value are determined by the Company's General Meeting of Shareholders, and can only be made by the Company Board of Directors after receiving a written response from the Company Board of Commissioners and approval from the Company's GMS.

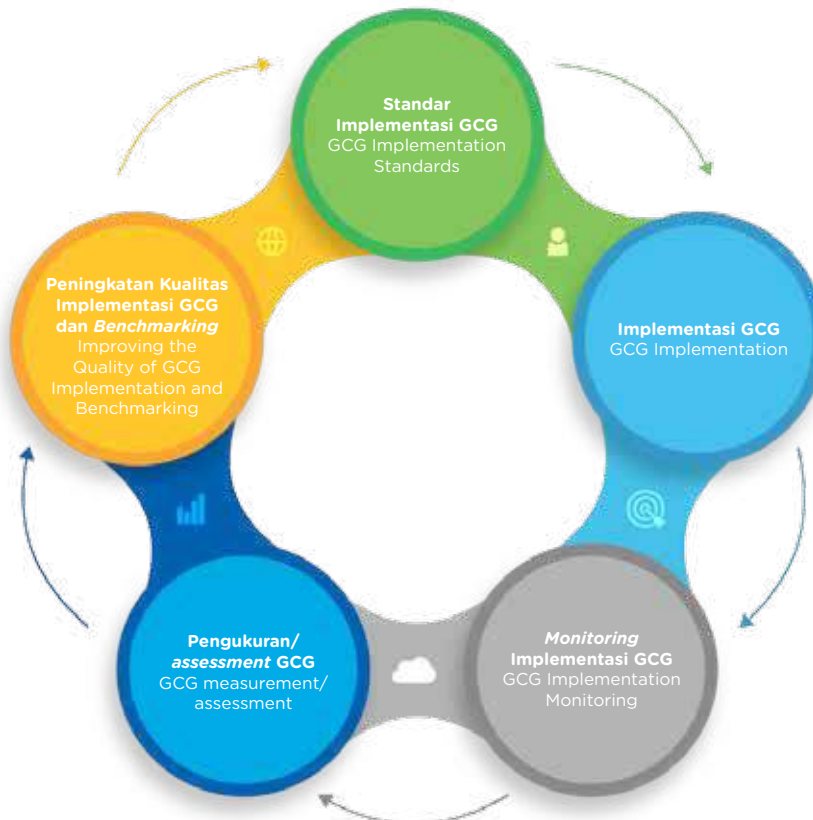
PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE SECARA BERKELANJUTAN

Untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, diperlukan adanya upaya yang secara terus-menerus dan terarah serta secara konsisten berkelanjutan diterapkan oleh seluruh Organ Perusahaan. Siklus penerapan GCG secara berkelanjutan tercermin dalam bagan berikut:

APPLICATION OF SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE

To improve the quality of GCG implementation, it is necessary to have continuous and directed efforts that are consistently implemented by all Company Organs. The sustainable GCG implementation cycle is reflected in the following chart:

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG di PTPI Secara Berkelanjutan Sustainable GCG Implementation Quality Improvements at PTPI



Siklus peningkatan kualitas implementasi penerapan GCG, meliputi:

1. Penetapan Standar kualitas penerapan GCG;
2. Implementasi GCG;
3. *Monitoring* GCG;
4. Pengukuran/*assessment* GCG;
5. Peningkatan Kualitas Implementasi GCG dan *Benchmarking*.

Penetapan Standar Kualitas Penerapan GCG

Standar implementasi GCG dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Perseroan. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Standar implementasi juga dimaksudkan untuk memacu Perseroan untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, masukan dari *stakeholders*, hasil *assessment* dan *benchmarking*.

Standar implementasi GCG di PTPI khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Standar penerapan GCG tersebut meliputi:

1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Aspek Dewan Komisaris.
4. Aspek Direksi.
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
6. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan keberlanjutan dan kemampuan Perseroan sebagai *benchmark* dalam bidangnya.

Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman tersebut ke dalam kebijakan internal Perusahaan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh Insan Perusahaan dan PI Grup.

Komitmen ini ditunjukkan dari Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan. Visi Perusahaan yang kemudian diwujudkan dalam Misi Perusahaan dengan didasarkan pada Tata Nilai Perusahaan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perusahaan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran/*fairness*.

The GCG implementation quality improvement cycle includes:

1. Determination of quality standards for GCG implementation;
2. GCG Implementation;
3. GCG monitoring;
4. GCG measurement/*assessment*;
5. Improving the Quality of GCG Implementation and *Benchmarking*.

Determination of Quality Standards for GCG Implementation

GCG implementation standards are needed as a basic references to realize the Vision and carry out the Company's Mission. The basic references include the criteria to be achieved from various aspects related to GCG implementation. Implementation standards are also intended to encourage the Company to improve the quality of GCG implementation. These standards are formulated based on related regulations, input from stakeholders, and assessment and benchmarking results.

GCG implementation standards at PTPI specifically refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN and the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. The GCG implementation standards include:

1. Commitment Aspects for Sustainable Good Corporate Governance Implementation.
2. Shareholders and GMS/Capital Owners Aspects.
3. Board of Commissioners Aspects.
4. Board of Directors Aspects.
5. Information Disclosure and Transparency Aspects.
6. Other aspects including sustainability reporting and the Company's ability to be a benchmark in its field.

The internalization of the various laws and regulations and guidelines into the Company's internal policies is a commitment from the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as all personnel of the Company and PI Group.

This commitment is shown in the Company's Vision, Mission and Values. The Company's Vision which is realized in the Company's Mission is based on the Corporate Values. In realizing the Vision and carrying out the Mission, the Company always adheres to the GCG principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

Berdasarkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan mengembangkan struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta best practices yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Penerbitan Roadmap oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2014 memiliki dampak yang besar bagi perkembangan GCG di lingkup dunia usaha. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar menjadi bahasan yang dapat menjadi pegangan bagi entitas usaha, khususnya bagi perusahaan terbuka. Demikian pula dengan hak Pemegang Saham tanpa terkecuali, khususnya Pemegang Saham minoritas yang harus menjadi perhatian emiten atau perusahaan terbuka.

OJK telah merilis peraturan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman ini berguna untuk mendorong penerapan praktik GCG. Namun demikian, secara umum, dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan masih mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 karena status Perusahaan saat ini bukan merupakan perusahaan terbuka.

Implementasi Prinsip-Prinsip GCG

Prinsip-Prinsip GCG serta Komitmen Perusahaan dalam Penerapannya

Perusahaan telah mengupayakan penerapan GCG di seluruh proses bisnisnya. Dalam implementasinya, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu keterbukaan/*transparency*, akuntabilitas/*accountability*, pertanggung jawaban/*responsibility*, kemandirian/*independency*, serta kewajaran dan kesetaraan/*fairness* sebagaimana tertuang dalam buku *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Penjelasan prinsip-prinsip dasar dan penerapannya secara umum di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on the GCG principles, the Company has developed a GCG structure that includes the main organs and supporting organs to carry out the GCG mechanism in accordance with the laws and regulations as well as existing best practices. By basing its business activities on the GCG principles, it is hoped that long-term business continuity will be created.

Compliance with Corporate Governance Guidelines

The issuance of the Financial Services Authority (OJK) Roadmap in 2014 had a major impact on the development of GCG in the business world. Emphasis on transparency, accountability, and fair delivery of information is a discussion that can be used as a guide for business entities, especially for public companies. Likewise, the rights of shareholders without exception, especially minority shareholders who must be the concern of issuers or public companies.

OJK has released regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 concerning Good Corporate Governance Implementation Guidelines, as described in the OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies. These guidelines are used to encourage the GCG implementation practices. However, in general, in implementing good corporate governance, the Company still refers to the provisions contained in the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 as the current status of the Company is not a public company.

Implementation of GCG Principles

GCG Principles and the Company's Commitment in Its Implementation

The Company has made efforts to implement GCG in all its business processes. For its implementation, the Company refers to 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, as well as fairness and equality as stated in the General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

An explanation of the basic principles and their application in general within the Company are as follows:

Uraian Prinsip

Description of Principles

Penerapan di PTPI

Implementation at PTPI

Asas 1: Keterbukaan

Principle 1: Transparency

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. PTPI menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para *Stakeholders*. Perusahaan berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para *Stakeholders*.

Transparency in the decision-making process and in disclosures of material and relevant information about the Company. Pupuk Indonesia guarantees openness and objectivity in its decision-making processes when running its business activities. The Company provides material and relevant information about the Company in a way that is easily accessible and can be understood by the Stakeholders. The Company has taken the initiative to disclose not only information required by the Articles of Association and applicable laws and regulations, but also other important matters that may influence the Stakeholders' decision-making.

- Seluruh informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan disampaikan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh para *Stakeholders*, sebagaimana tercantum pada Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan;
- Informasi yang diungkapkan meliputi pengungkapan yang terkait dengan visi, misi, sasaran dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Komisaris, sebagaimana tercantum pada website Perusahaan yang dapat diakses pada alamat www.pupuk-indonesia.com Adapun kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya, serta informasi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan Perusahaan secara periodik dilakukan pemutakhiran dan disimpan di Kompartemen Sekretaris Perusahaan;
- Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana tercantum pada kebijakan Perusahaan terkait Pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Keterbukaan dalam memberi penjelasan tentang transaksi dengan Entitas Anak, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) Perusahaan yang dapat diakses oleh seluruh *Stakeholders* pada website Perusahaan.
- All material and relevant information about the Company is delivered in a timely, adequate, clear, accurate, comparable and easily accessible manner to Stakeholders, as stated in the Monthly, Quarterly, Semesterly, and Annually Performance Reports;
- Information disclosed includes the Company's vision, mission, goals and strategies, financial condition, Board of Directors and Board of Commissioners, as stated on the Company's website which can be accessed at www.pupuk-indonesia.com The share ownership by members of the Board of Directors and Commissioners and their families, as well as other information is in accordance with the Articles of Association and the provisions of the Company are periodically updated and filed in the Corporate Secretary Compartment;
- Information disclosure does not reduce the Company's obligation to protect confidential information about the Company in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. This is stated in the Company's policy regarding the Management of the List of Public Information and Excluded Public Information;;
- Transparency in providing explanations about transactions with Subsidiaries, as stated in the Company's Annual Report which can be accessed by all Stakeholders on the Company's website.

Asas 2: Akuntabilitas

Principle 2: Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis serta tata nilai Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders guna mencapai kinerja Perusahaan secara berkesinambungan.

Clarity on functions, implementation and accountability of the Company Bodies to ensure management is carried out effectively. The Company works with high accountability and can account for all its actions in a transparent and reasonable manner, in the interest of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, business ethics and corporate values, while taking into account the interests of Stakeholders in order to achieve the Company's sustainable performance.

- Penetapan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi Perusahaan sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perusahaan secara efektif. Hal ini secara jelas tercantum pada *Job Description* seluruh Direksi, Karyawan dari level SVP hingga level Staf, Pembagian Tugas Dewan Komisaris, dan Sekretaris Dewan Komisaris;
- Peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan baik, yang dilakukan secara periodik melalui program pelatihan dan pengembangan Kompetensi baik baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan;
- Determining the details for the duties, authorities and responsibilities of each Company Body clearly and in line with the Company's vision, mission, goals and strategies so as to create a balance of power and effective management of the Company. This is clearly stated in the Job Description of all Directors, Employees from SVP level to Staff level, Division of Duties of the Board of Commissioners, and Secretary to the Board of Commissioners;
- Enhancing the functions and roles of each Company Body so that the Company's management can run well, which is carried out periodically through training and competency development programs for both the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees;

Uraian Prinsip Description of Principles	Penerapan di PTPI Implementation at PTPI
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian adanya struktur, sistem dan <i>standard operating procedures</i> (SOP) yang efektif agar dapat menjamin terselenggaranya mekanisme <i>check and balance</i> dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk memastikan tercapainya visi, misi dan sasaran Perusahaan. Hal ini tercantum pada penetapan dan pemutakhiran Struktur Organisasi Perusahaan sesuai perkembangan bisnis Perusahaan dan pemutakhiran SOP atau Dokumen Sistem Manajemen (DSM) yang dapat diakses melalui tautan www.dsm.pupuk-indonesia.com; • Perumusan ukuran kinerja dari segenap jajaran Perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perusahaan (<i>corporate value</i>), sasaran dan strategi Perusahaan, yang tergambar dalam Kontrak Manajemen Kolegial Direksi, Kontrak Manajemen Kolegial Dewan Komisaris, KPI Individu Direksi, serta KPI Individu Karyawan yang dapat diakses melalui tautan kponline.pupuk-indonesia.com; • Penerbitan Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan GCG yang telah dimutakhirkan pada tahun 2021 melalui pengesahan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 016/KEP.KOM/XII/2021 dan 116.1/A/KU/E42/SK/2021 tanggal 16 Desember 2021. • Certainty of an effective structure, system and standard operating procedures (SOP), to ensure the application of a check and balance mechanism in the internal control system, and the achievement of the Company's vision, mission and goals. This is stated in the determination and updating of the Company's Organization Structure in accordance with the Company's business developments and the updating of SOPs or Management System Documents (DSM) which can be accessed via www.dsm.pupuk-indonesia.com; • Formulating the performance measures for all levels of the Company based on agreed-upon standards, consistent with the Company's values, corporate goals and strategies, as stated in the Board of Directors Collegial Management Contract, Board of Commissioners Collegial Management Contract, Board of Directors Individual KPI, and Employee Individual KPI, which can be accessed via kponline.pupuk-indonesia.com; • Publication of the Code of Ethics and Behavior (Code of Conduct) to support the successful implementation of GCG, which was updated in 2021 through the ratification of the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Decree (SKB) No. 016/KEP.KOM/XII/2021 and 116.1/A/KU/E42/SK/2021 dated December 16, 2021.

Asas 3: Pertanggungjawaban Principle 3: Responsibility

Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perusahaan.

Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perusahaan.

- Penetapan kebijakan pokok dalam mengelola Perusahaan yang meliputi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Good Governance*), Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*) yang disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen Utama Perusahaan ini telah dimutakhirkan di tahun 2021 dan 2022 yaitu Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada tanggal 16 Februari 2022, Pedoman Etika dan Perilaku pada tanggal 16 Desember 2021, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 16 Februari 2022, dan Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha pada tanggal 30 Desember 2021;
- Penerapan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang telah dimutakhirkan pada tanggal 27 Desember 2021;
- Kepedulian terhadap tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
- Determining basic policies in managing the Company including the Code of Good Governance, Code of Conduct, Board of Commissioners and Board of Directors Board Manual, and Code of Group Governance based on the Articles of Association and applicable laws and regulations. The Company's key documents were updated in 2021 and 2022, namely the Corporate Governance Guidelines on February 16, 2022, the Ethics and Conduct Guidelines on December 16, 2021, the Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines on February 16, 2022, and the Business Group Governance Guidelines as of December 30, 2021;
- Applying the Guidelines for Handling Conflicts of Interest to avoid misuse of power, which was updated on December 27, 2021;
- Awareness of social responsibility through the implementation of the Social and Environmental Responsibility (SER) Program;

Uraian Prinsip Description of Principles	Penerapan di PTPI Implementation at PTPI
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan profesionalisme dan budaya etis melalui penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan GCG. Komitmen dalam penerapan Etika dan Perilaku oleh seluruh Insan Perusahaan berupa penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dan Pakta Integritas Aksi Korporasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris. • Developing professionalism, and an ethical culture through the application of the Code of Conduct to support the successful implementation of GCG. Commitment to implementing Ethics and Behavior by all Company personnel in the form of signing the Annual Integrity Pact and Corporate Action Integrity Pact by the Board of Directors and Board of Commissioners.
Asas 4: Kemandirian Principle 4: Independency	
<p>Wujud pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p>Professional Company management without conflict of interest and influence/pressure from any party that is inconsistent with the laws and regulations and healthy corporate principles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Organ Perusahaan yang bebas dari pengaruh kepentingan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan bebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara objektif. Komitmen oleh seluruh Insan Perusahaan berupa penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dan Pakta Integritas Aksi Korporasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris; • Pelaksanaan tugas dan fungsi Organ Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing pihak dan keputusan yang diambil semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Hal ini secara jelas tercantum pada <i>Job Description</i> seluruh Direksi, Karyawan dari level SVP hingga level Staf, Pembagian Tugas Dewan Komisaris, dan Sekretaris Dewan Komisaris. • Implementing each Company Bodies' duties and functions free from influence by the interests of any party when making decisions, and free from conflicts of interest so that decisions made can be made objectively. Commitment by all Company personnel in the form of signing the Annual Integrity Pact and Corporate Action Integrity Pact by the Board of Directors and Board of Commissioners; • Implementing the Company Bodies' duties and functions in accordance with the Articles of Association and the applicable laws and regulations, with mutual respect to the rights, obligations, duties, authorities and responsibilities of each party and decisions taken solely for the benefit of the Company. This is clearly stated in the Job Description of all Directors, Employees from SVP level to Staff level, Division of Duties of the Board of Commissioners, and Secretary to the Board of Commissioners.
Asas 5: Keadilan dan Kewajaran Principle 5: Fairness and Equality	
<p>Keadilan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan para <i>Stakeholders</i> berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.</p> <p>Justice in fulfilling the Stakeholders' rights based on agreements and laws and regulations. In carrying out its activities, the Company always pays attention to the interests of the Stakeholders based on the principle of fairness and equality.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan yang setara dan wajar (<i>equal treatment</i>) kepada para <i>Stakeholders</i> dalam memenuhi haknya sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pedoman GCG, Pedoman Etika dan Perilaku; • Pemberian kesempatan kepada para <i>Stakeholders</i> dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi. Hal ini sebagaimana tercantum pada kebijakan Perusahaan terkait Pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Informasi Publik yang Dikecualikan; • Giving equal and fair treatment to Stakeholders to fulfill their rights in accordance with the benefits and contributions given to the Company while taking into account the Articles of Association and the applicable laws and regulations. This is as stated in the GCG Guidelines, Code of Ethics and Conduct; • Providing opportunities for Stakeholders to give input and express opinions for the interests of the Company and open access to information in accordance with the transparency principle. This is as stated in the Company's policy regarding the Management of the List of Public Information and Exempted Public Information;

Uraian Prinsip Description of Principles	Penerapan di PTPI Implementation at PTPI
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin ataupun kondisi fisik. Sebagaimana tercantum pada kebijakan Perusahaan mengenai Rotasi, Mutasi, dan Promosi bagi Karyawan, kesempatan mengikuti dan mengembangkan kompetensi sebagaimana tercantum pada kebijakan Pengembangan SDM. • Providing equal opportunities in employee recruitment, career and professional duties regardless of ethnicity, religion, race, class, gender or physical condition. As stated in the Company's policy regarding Rotation, Transfer, and Promotion of Employees, opportunities to participate in and develop competencies is as stated in the HC Development policy.

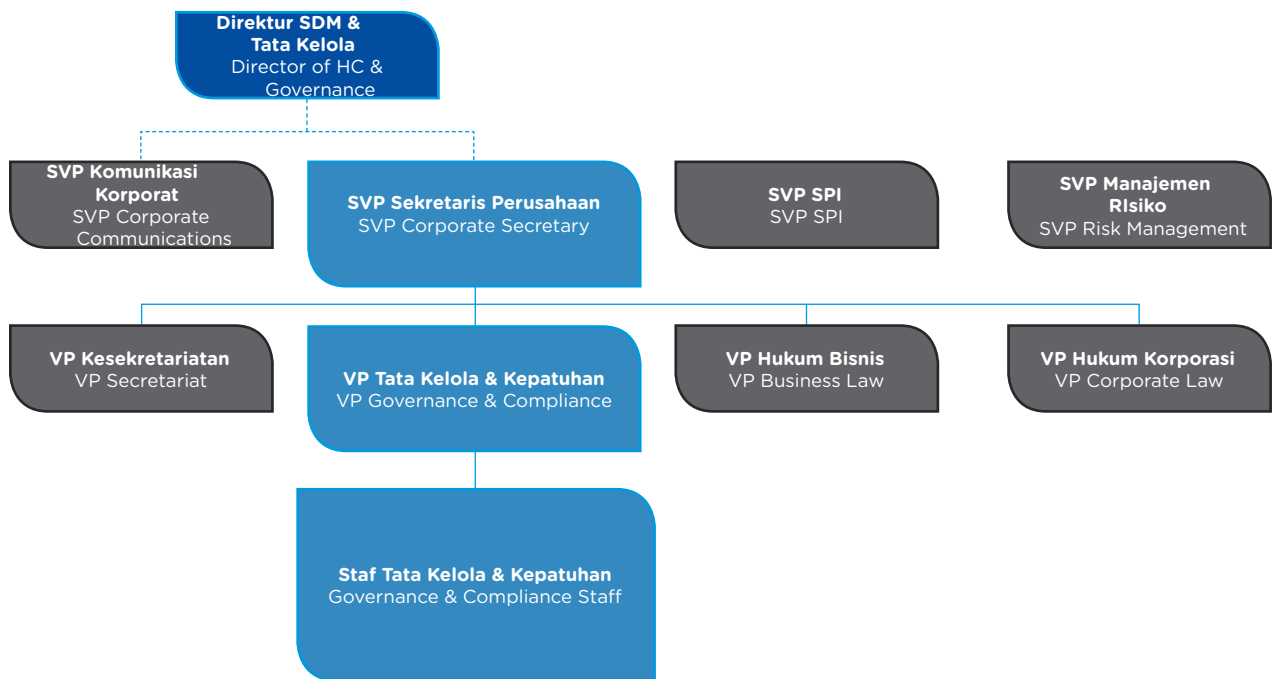
Monitoring Penerapan GCG

Penanggung Jawab Penerapan GCG

Perencanaan, Pengkoordinasian, dan Pemonitoran pelaksanaan dan penegakan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Penerapan GCG di PTPI.

Sesuai Surat Keputusan Direksi PTPI Nomor SK/DIR/004/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/065/2020 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/062/2020, telah ditetapkan Departemen Tata Kelola & Kepatuhan berada di bawah Kompartemen Sekretaris Perusahaan, yang berada di bawah komando Direktur Utama dan di bawah koordinasi Direktur SDM & Tata Kelola yang bertanggung jawab dalam penerapan GCG di PTPI.

Sampai dengan 31 Desember 2021, Departemen Tata Kelola & Kepatuhan telah terisi 1 (satu) orang VP dan 3 (tiga) orang Staf. Adapun struktur organisasi Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan Perusahaan Semester II Tahun 2021 sebagai berikut:



Monitoring GCG Implementation

Responsibility for GCG Implementation

Planning, coordinating, and monitoring the implementation and enforcement of GCG principles is carried out by the person in charge of GCG implementation at PTPI.

In accordance with the PTPI Board of Directors Decree No. SK/DIR/004/2021 dated January 7, 2021 concerning improvement of the Board of Directors Decision Letter No. SK/DIR/065/2020 concerning improvement of the Board of Directors Decree No. SK/DIR/062/2020, the Governance & Compliance Department was established under the Corporate Secretary Compartment, under the command of the President Director, and under the coordination of the Director of HC & Governance, would be responsible for implementing GCG at PTPI.

As of December 31, 2021, the Governance & Compliance Department has 1 (one) VP and 3 (three) staff. The Governance and Compliance Department organization structure in Semester II of 2021 was as follows:

Dalam hal *monitoring* penerapan GCG di PTPI atau Perusahaan, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Penerapan GCG Mingguan (*Weekly Report*);
2. Laporan Kinerja Penerapan GCG Bulanan;
3. Laporan Kinerja Penerapan GCG Triwulanan;
4. Laporan Kinerja Penerapan GCG Semesteran/Tahunan.

Pengukuran/Assessment Penerapan GCG

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran atas hasil kualitas penerapan Tata Kelola, Perusahaan memiliki mekanisme *assessment* atau penilaian penerapan GCG secara periodik. Dalam melakukan penilaian penerapan GCG, Perusahaan menggunakan 2 (dua) model penilaian, yaitu:

1. Penilaian Penerapan GCG Berlandaskan Kebijakan BUMN
Sebagai BUMN, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG dengan menggunakan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
2. Penilaian Penerapan GCG melalui program Lembaga Riset/Pemeringkat
Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, Manajemen Perusahaan berkepentingan untuk dapat melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan secara menyeluruh pada proses bisnis Perusahaan. Guna menunjang hal tersebut diperlukan suatu pengukuran GCG tambahan yang dapat memberikan hasil dari sudut pandang lain di luar penilaian yang telah dilaksanakan sesuai Indikator/Parameter yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN. Hal ini dilakukan agar hasil penilaian tambahan tersebut dapat menjadi pembanding, sekaligus sebagai *assurance* atas hasil penilaian satu sama lain. Sejak tahun 2018, Perusahaan telah melaksanakan penilaian GCG tambahan melalui program yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset/Pemeringkat. Penilaian penerapan GCG tersebut dilakukan melalui program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* oleh pihak independen, yaitu The Indonesia Institute of *Corporate Governance* (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

For monitoring the GCG implementation at PTPI or the Company, the duties and responsibilities report is as follows:

1. Weekly GCG Implementation Performance Report;
2. Monthly GCG Implementation Performance Report;
3. Quarterly GCG Implementation Performance Report;
4. Semester/Annual GCG Implementation Performance Report.

GCG Implementation Measurement/Assessment

To ascertain and gain an overview of the quality of GCG implementation results, the Company uses periodic GCG implementation assessment or assessment mechanism. For assessing GCG implementation, the Company uses 2 (two) assessment models:

1. GCG Implementation Assessment Based on SOE Policy
As a SOE, the Company assesses the GCG implementation using the Secretary to the Ministry of SOEs Decree No. SK16/S.MBU/2012 dated June , 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs.
2. GCG Implementation Assessment through Research/Rating Institution programs
To increase the value of the company in a sustainable manner, the Company's Management needs to understand the extent to which the implementation of GCG principles is comprehensively implemented in the Company's business processes. To support this, an additional GCG measurement is needed that provides results from other points of view, other than the assessment carried out based on the Indicators/Parameters issued by the Ministry of SOEs. The results of these additional assessments can be used for comparison purposes, as well as assurance on the results of each assessment. Since 2018, the Company has carried out additional GCG assessments using programs from Research/Rating Agencies. The GCG implementation assessment is carried out through the *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* program by an independent party, namely The Indonesia Institute of *Corporate Governance* (IICG) in collaboration with SWA Magazine.

Penilaian Penerapan GCG PTPI

PTPI GCG Implementation Assessment

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

Assessment and Evaluation Indicators/Parameters for Good Corporate Governance Implementation in SOEs

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Penilaian Berdasarkan Kebijakan Kementerian BUMN

Dasar dan Kriteria Penilaian

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Perusahaan melakukan penilaian terhadap penerapan GCG sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Penerapan GCG (*assessment*) dilakukan secara berkala oleh Perusahaan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh *assessor* eksternal, dengan diselingi oleh *self assessment* yang dilakukan oleh *assessor* internal Perusahaan setiap tahun berikutnya.
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada poin pertama, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK16/S.MBU/2012.

6 Aspek Assessment GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012) 6 GCG Assessment Aspects (Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S. MBU/2012)

Aspek Aspect	Uraian Description
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board
4	Direksi Board of Directors
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency
6	Aspek Lainnya Other Aspects

Pihak yang Menilai

Sesuai dengan ketentuan dalam PER-01/MBU/2011 di mana penilaian terhadap penerapan GCG di Perusahaan agar dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun, dan dilakukan evaluasi untuk mendeskripsikan tindak

Assessment Based on Ministry of SOE Policy

Basis and Criteria for Assessment

Based on Article 44 paragraph (1) of the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, the Company GCG implementation assessment was as follows:

1. The GCG Implementation Assessment was carried out regularly by the Company every 2 (two) years by external assessors, with a self-assessment carried out by the Company's internal assessors each following year.
2. The review, which is a program that explains the follow-up to the Company GCG implementation carried out in the following year after the assessment as referred to in the first point, includes evaluations of the assessment results and follow-up on recommendations for improvement.

The method for measuring the GCG implementation in the Company refers to the Copy of the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs. This assessment and evaluation method carried out uses a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with a predetermined weight as stipulated in the Copy of the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK16/S.MBU/2012.

Appraiser

In accordance with the provisions in PER-01/MBU/2011, the Company's GCG implementation shall be assessed every 2 (two) years, and that evaluation shall be made to describe the follow-up to the implementation and implementation

lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG. Pelaksanaan GCG *Assessment* tahun 2021, dimulai dengan permintaan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 14 September 2021. Adapun sesuai kebijakan BPKP, kegiatan GCG *Assessment* akan dilaksanakan pada awal tahun 2022 yaitu setelah berakhirnya kinerja tahunan.

Hasil Penilaian

Berdasarkan paparan Tim Asesor GCG BPKP Pusat pada kegiatan *Exit Meeting* GCG *Assessment* PTPI pada tanggal 8 April 2022, capaian hasil GCG *Assessment* PTPI pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

of GCG. The GCG Implementation Assessment for 2021, started with a request to the Deputy Head of BPKP for State Accountants, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) on September 14, 2021. Based on the BPKP policy, the GCG Assessment activities will be carried out in early 2022, after the end of the annual performance.

Assessment Result

Based on the Central BPKP GCG Assessor Team at the PTPI GCG Assessment Exit Meeting on April 8, 2022, the results of the PTPI GCG Assessment in 2021 were as follows:

Aspek Pengujian Test Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2021 Achievement in Fiscal Year 2021		
		Nilai Score	Pencapaian Achievement	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG implementation Quality
1 Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7,00	6,601	94,30	Sangat Baik Excellent
2 Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,330	92,56	Sangat Baik Excellent
3 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	32,483	92,81	Sangat Baik Excellent
4 Direksi Board of Directors	35,00	32,394	92,55	Sangat Baik Excellent
5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,767	97,41	Sangat Baik Excellent
6 Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	3,750		Sangat Baik Excellent
Jumlah Total	100,00		92,325	Sangat Baik Excellent

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Description: 0-50 : Poor | 50-60 : Fair | 60-75 : Good | 75-85 : Very Good | 85-100 : Excellent

Pelaksanaan penilaian GCG Perusahaan menunjukkan hasil dengan predikat "Sangat Baik" mencakup 6 (enam) aspek yang di ukur seperti yang telah diuraikan di atas, dengan capaian skor sebesar 92,325.

The Company's GCG implementation assessment showed results with the predicate of "Excellent" covering 6 (six) aspects as described above, with an achievement score of 92.325.

Sebagai perbandingan, berikut skor hasil GCG *assessment* dari tahun 2019 sampai tahun 2021 Perusahaan:

For comparison, the following shows the results of the Company's GCG assessment scores from 2019 to 2021:

2019		2020		2021		Δ	
External Assessment (BPKP)		External Assessment (PT SDP)		External Assessment (BPKP)		2019 vs	2020 vs
Skor Score	Predikat Predicate	Skor Score	Predikat Predicate	Skor Score	Predikat Predicate	2021	2021
88,97	Sangat Baik Excellent	93,90	Sangat Baik Excellent	92,325	Sangat Baik Excellent	Naik 3,355 poin Up 3,355 points	Turun 1,575 poin Down 1,575 points

Berdasarkan *assessment* GCG yang dilaksanakan assessor eksternal (yaitu BPKP) pada tahun 2021 dan 2019, maka skor *assessment* GCG tahun 2021 meningkat sebesar 3,355 poin dibandingkan skor tahun 2019. Sementara jika dibandingkan dengan *assessment* GCG yang dilakukan oleh assessor internal dengan pendampingan PT Sinergi Daya Prima, maka skor *assessment* GCG tahun 2021 menurun sebesar 1,575 poin dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini disebabkan terdapat perbedaan parameter *assessment*: BPKP menggunakan parameter SK-16 Kementerian BUMN, sementara assessor internal, yaitu PI Grup yang didampingi PT Sinergi Daya Prima, selain menggunakan parameter SK-16 Kementerian BUMN, juga menggunakan parameter lainnya.

From the GCG scores achieved by the Company, in 2021, Based on the GCG assessment carried out by external assessors (BPKP) in 2021 and 2019, the 2021 GCG assessment score increased by 3.355 points compared to the 2019 score. Meanwhile, when compared with the GCG assessment conducted by internal assessors with assistance from PT Sinergi Daya Prima, the 2021 GCG assessment score decreased by 1.575 points compared to 2021. This decrease was due to differences in assessment parameters: BPKP used the SK-16 parameter of the Ministry of SOEs, while the internal assessor, namely the PI Group accompanied by PT Sinergi Daya Prima, in addition to using the SK-16 parameter of the Ministry of SOEs, also used other parameters.



Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG GCG Implementation Assessment Results Achievement

Tahun Year	Jenis Penilaian Type of Assessment	Penilai Appraiser	Skor Assessment GCG						Skor Akhir Final Score	Kategori Category
			Aspek I Aspect I	Aspek II Aspect II	Aspek III Aspect III	Aspek IV Aspect IV	Aspek V Aspect V	Aspek VI Aspect VI		
			Komitmen Commitment	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pengungkapan Informasi Information Disclosure	Aspek Lainnya Other Aspects		
2021	External Assessment	BPKP	6,601	8,330	32,483	32,394	8,767	3,750	92,325	Sangat Baik Excellent
2020	External Assessment	PT Sinergi Daya Prima	92,47	94,44	92,37	95,75	99,77	82,15	93,90	Sangat Baik Excellent
2019	External Assessment	BPKP	92,49	85,43	88,25	90,03	96,22	75,00	88,97	Sangat Baik Excellent
2018	Self Assessment	PI Grup PI Group	97,86	94,00	91,97	92,06	91,89	75,00	91,74	Sangat Baik Excellent
2017	External Assessment	BPKP	95,29	87,56	89,63	90,34	86,11	75,00	88,79	Sangat Baik Excellent
2016	Self Assessment	PI Grup PI Group	91,57	90,89	90,34	88,66	98,11	37,40	87,94	Sangat Baik Excellent
2015	External Assessment	BPKP	91,00	90,56	88,97	83,49	97,00	-	83,61	Sangat Baik Excellent
2014	Self Assessment	PI Grup PI Group	94,14	82,22	84,57	83,51	85,78	-	80,55	Baik Good
2013	External Assessment	BPKP	77,86	81,22	80,06	80,51	83,44	-	76,47	Baik Good



Penilaian Penerapan GCG Anak Perusahaan/Entitas Anak Subsidiaries GCG Implementation Assessment Results Achievement

No.	Perusahaan Company	Skor Evaluasi Penerapan GCG Tahun 2021 Score of GCG Implementation in 2021	Predikat Predicate
1	PT Petrokimia Gresik	94,060	Sangat Baik Excellent
2	PT Pupuk Kujang	91,469	Sangat Baik Excellent



Penilaian Penerapan GCG Anak Perusahaan/Entitas Anak

Subsidiaries GCG Implementation Assessment Results Achievement

No.	Perusahaan Company	Skor Evaluasi Penerapan GCG Tahun 2021 Score of GCG Implementation in 2021	Predikat Predicate
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	95,448	Sangat Baik Excellent
4	PT Pupuk Iskandar Muda	85,246	Sangat Baik Excellent
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	92,049	Sangat Baik Excellent
6	PT Rekayasa Industri	80,062	Baik Baik
7	PT Mega Eltra	83,062	Baik Baik
8	PT Pupuk Indonesia Logistik	82,741	Baik Good
9	PT Pupuk Indonesia Utilitas	83,874	Baik Good
10	PT Pupuk Indonesia Pangan	75,882	Baik Good

Area Pengembangan dan Realisasi Perusahaan
Realisasi Rekomendasi/Area of Improvement (AoI)
Pengembangan hasil GCG Assessment tahun 2021.

Area of Development and Realization
Realization of Recommendations/Area of Improvement
(AoI) Development of GCG Assessment results in 2021.

Rekomendasi Pengembangan Recommendation for Development	Realisasi Realization	Status
Aspek 1: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Aspect 1: Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance		
1	Uraian tugas Direksi pemantau GCG belum memuat tugas memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen dengan pihak ketiga The description of the Board of Directors GCG monitoring duties not yet contain the task of monitoring and maintaining the Company's compliance with all agreements and commitments with third parties	Open
2	Tidak Ada target Penilaian Penerapan GCG pada Indikator KPI Korporat tahun 2021 There was no target for GCG Implementation Assessment for Corporate KPI Indicators in 2021	Open
Aspek 2: Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Aspect 2: Shareholders and GMS/Capital Owners		
1	Pemegang Saham belum menetapkan ketentuan yang mengatur jumlah jabatan yang boleh dirangkap oleh Direksi. PS has not set any provisions governing the number of positions that may be held concurrently by the Board of Directors.	Open
2	Pengesahan RKAP 2022 setelah tahun anggaran berjalan. Ratification of the 2022 WP&B after the current fiscal year.	Open
3	PS belum memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi pada tahun 2021 PS has not yet given approval/decision on the proposed corporate actions in 2021	Open
4	Hasil Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris belum dituangkan dalam Risalah RUPS The Board of Directors and Board of Commissioners performance appraisal results have not been included in the Minutes of the GMS	Open
Aspek 3: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Aspect 3: Board of Commissioners/Supervisory Board		
1	Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi belum memuat penjelasan/ alasan ketidakhadiran. Minutes of the Board of Commissioners' Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors did not contain any explanation/reason for absence.	Open

Rekomendasi Pengembangan Recommendation for Development	Realisasi Realization	Status
2	Uraian Tugas Sesdekomp sesuai SK Dewan Komisaris Nomor: 14/KEP.KOM/X/2020 belum memuat: a) <i>Monitoring</i> tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris, b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan, c) Dukungan administrasi serta <i>monitoring</i> berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris. The Sesdekomp job description based on the Board of Commissioners Decree No. 14/KEP.KOM/X/2020 does not yet contain: a) Monitoring of follow-up to the results of decisions, recommendations and directions of the Board of Commissioners, b) Administrative materials regarding reports/activities of the Board of Directors in managing the Company, c) Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendation from the Board of Commissioners.	Open
3	Program Kerja Tahunan Komite Audit Tahun 2021 belum memuat pelaksanaan <i>self assessment</i> Program Kerja Komite KNR belum disusun untuk Tahun 2021 The 2021 Audit Committee Annual Work Program does not yet contain the implementation of self-assessment. The NRC Committee's Work Program has not been compiled for 2021	Open
4	Dekom belum menyampaikan penilaian kinerja Direksi secara individu kepada Pemegang Saham The Board of Commissioners has not submitted individual Board of Directors performance assessments to Shareholders	Open
5	Pedoman tata tertib rapat Dewan Komisaris belum memuat mengenai: a. Etika rapat b. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya c. Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi The Board of Commissioners meeting guidelines rules do not contain: a. Meeting etiquette b. Implementation of follow-up evaluation of the results of previous meetings c. Discussion/review on the recommendations of the Board of Directors and the directive/decision of the GMS related to the proposals of the Board of Directors	Open
Aspek 4: Direksi Aspect 4: Board of Directors		
1	Direksi belum membuat Laporan Hasil Pelatihan The Board of Directors has not made a Training Results Report	Open
2	Penyampaian Rancangan RKAP 2022 kepada Dewan Komisaris sebaiknya sebelum 15 September 2021 Submission of the 2022 WP&B Draft to the Board of Commissioners preferably before September 15, 2021	Open
3	Direksi belum menyampaikan rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan The Board of Directors has not submitted a plan for promotion and transfer of one position level below the Board of Directors to the Board of Commissioners for the opportunity to provide directives	Open
4	Nilai total HPS belum terbuka dan bersifat rahasia The total HPS has not been disclosed and is confidential	Open
5	Pedoman pengelolaan anak perusahaan belum disahkan atau mendapatkan persetujuan RUPS anak perusahaan Subsidiary management guidelines have not been ratified or approved by the subsidiaryes' GMS	Open
6	Rencana rapat belum masuk dalam RKAT The meeting plan has not been included in the RKAT	Open
7	Pemanggilan RUPS sebaiknya dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS The invitation to the GMS should be made no later than 14 days before the date of the GMS	Open
8	RUPS pengesahan RKAP dilaksanakan setelah tahun anggaran berjalan The GMS to approve the WP&B was held after the current fiscal year	Open
Aspek 5: Pengungkapan Informasi dan Transparansi Aspect 5: Information Disclosure and Transparency		
1	-	-
Aspek 6: Aspek Lainnya Aspect 6: Other Aspects		
1	-	-

Penilaian Melalui Program Lembaga Riset/ Pemeringkat

Sejak tahun 2018, Perusahaan bersama 3 (tiga) Entitas Anak Perusahaan yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang meningkatkan level penilaian penerapan GCG melalui inisiasi penilaian tambahan terhadap penerapan GCG melalui keikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for *Corporate Governance* (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

Metode Penilaian

Metode penilaian CGPI terdiri dari 3 (tiga) tahapan penilaian yang meliputi *self assessment*, sistem dokumentasi, dan observasi.

1. Self Assessment

Merupakan penilaian mandiri oleh perusahaan mengenai kualitas pelaksanaan GCG di lingkup perusahaan. Pada tahapan *self assessment* perusahaan menetapkan responden sesuai yang dipersyaratkan untuk mengisi kuesioner penilaian GCG. Daftar responden terdiri dari 2 (dua) kategori responden yakni responden internal dan responden eksternal.

2. Sistem Dokumentasi

- Kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan penilaian dengan menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema penilaian;
- Pengisian data perusahaan (data isian) yang menyajikan dokumen tentang informasi-informasi dasar perusahaan.

3. Observasi

Tahapan akhir penilaian berupa peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian. Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrumen penilaian melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

Aspek dan indikator penilaian CGPI terdiri dari:

1. Aspek Struktur Tata Kelola

Penilaian atas kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan dalam mengelola perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi para Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip Tata Kelola.

2. Aspek Proses Tata Kelola

Penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme yang dimiliki perusahaan dalam mengelola perusahaan guna menciptakan nilai bagi para Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip Tata Kelola.

3. Aspek Hasil Tata Kelola

Hasil Tata Kelola menggambarkan penilaian terhadap luaran, kualitas luaran, dampak dan manfaat yang dimiliki perusahaan dari proses tata kelola perusahaan

Assessment through Research/Rating Institute Programs

Since 2018, the Company with 3 (three) of its Subsidiaries, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang has improved the assessment of GCG implementation through the initiation of additional assessments through participation in research programs and Corporate Governance Perception Index (CGPI) organized by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine.

Assessment Method

The CGPI assessment method consists of 3 (three) stages of assessment which include self-assessment, documentation system, and observation.

1. Self-Assessment

An independent assessment by the Company on the quality of its GCG implementation. In the self-assessment stage, the Company determines the respondents as required to fill out the GCG assessment questionnaire. The list of respondents consists of 2 (two) categories i.e. internal respondents and external respondents.

2. Documentation System

- Adequacy of documents for fulfilling the assessment requirements by submitting various documents that the company has in the implementation of GCG and other documents related to the theme of the assessment;
- Filling in Company data (data entry) which presents documents about basic information.

3. Observation

The final stage of the assessment is a direct review by the CGPI assessment team to ensure that the process of implementing a series of GCG implementation programs and management efforts is related to the assessment theme. The observation stage is carried out by clarifying the assessment instrument through executive exposure and discussion of company organs.

The aspects and indicators of the CGPI assessment consist of:

1. Aspects of Governance Structure

An assessment of the adequacy of the structure and infrastructure of corporate governance in managing the company in order to create value for the Stakeholders in accordance with the principles of Governance.

2. Aspects of the Governance Process

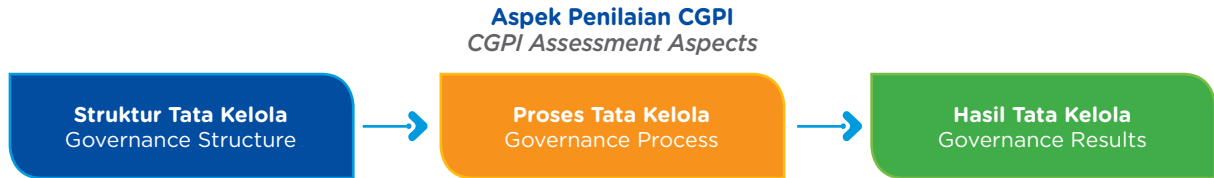
An assessment of the effectiveness of systems and mechanisms owned by the company in managing the Company in order to create value for the Stakeholders in accordance with the principles of Governance.

3. Aspects of Governance Results

The results of the Governance illustrate the assessment of the outputs, the quality of the outcomes, the impact and benefits that the company has from the corporate

yang menciptakan nilai bagi para Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip Tata Kelola. Hasil penilaian CGPI berupa rentang skor yang dicapai oleh perusahaan peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi GCG yang menggunakan istilah “Tepercaya”.

governance process that creates value for Stakeholders in accordance with the principles of Governance. The CGPI assessment results in the form of a range of scores achieved by participating companies categorizing the GCG implementation quality level using the term “Trusted”.



Rentang Skor Penilaian CGPI
CGPI Assessment Scores

55 s/d 69	“Cukup Tepercaya” “Fair Trusted”
70 s/d 84	“Tepercaya” “Trusted”
85 s/d 100	“Sangat Tepercaya” “Most Trusted”

Pihak yang Menilai

The Indonesian Institute for *Corporate Governance* (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

Appraiser

The Indonesian Institute for *Corporate Governance* (IICG) in collaboration with Majalah SWA.

Hasil Penilaian

Assessment Results

Skor Penilaian Masing-masing Kriteria
Score in each Criteria

Aspek Penilaian Assessment Aspect	Bobot Weight	Skor Penilaian Assessment Score	
		2021	2020
Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure Aspect	34,73	30,28	22,73
Aspek Proses Tata Kelola Governance Process Aspect	32,13	30,71	30,17
Aspek Hasil Tata Kelola Governance Result Aspect	33,14	24,15	30,47
Skor Akhir Final Score	100,00	85,15	83,37

Perkembangan Hasil Penilaian CGPI PI Group
PI Group's CGPI Assessment Results Progress

Tahun Year	Skor Capaian Score			Skor Akhir Final Score	Kategori Category
	Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure Aspect	Aspek Proses Tata Kelola Governance Process Aspect	Aspek Hasil Tata Kelola Governance Result Aspect		
Perusahaan (Holding) Holding					
2021	30,28	30,71	24,15	85,15	Sangat Tepercaya Highly Trusted
2020	22,73	30,17	30,47	83,37	Tepercaya Trusted



Perkembangan Hasil Penilaian CGPI PI Group PI Group's CGPI Assessment Results Progress

Tahun Year	Skor Capaian Score			Skor Akhir Final Score	Kategori Category
	Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure Aspect	Aspek Proses Tata Kelola Governance Process Aspect	Aspek Hasil Tata Kelola Governance Result Aspect		
2019	28,61	26,54	27,17	82,32	Tepercaya Trusted
2018	21,10	34,56	24,99	80,65	Tepercaya Trusted
Entitas Anak Subsidiaries					
PT Petrokimia Gresik					
2021	30,47	30,52	24,13	85,12	Sangat Tepercaya Highly Trusted
2020	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Tahun 2019 Did not participate in 2019 CGPI				
2019	29,39	27,34	27,97	84,70	Tepercaya Trusted
2018	21,63	36,03	26,12	83,78	Tepercaya Trusted
PT Pupuk Kalimantan Timur					
2021	30,70	31,43	24,76	86,89	Sangat Tepercaya Highly Trusted
2020	23,57	31,48	31,67	86,72	Sangat Tepercaya Highly Trusted
2019	30,06	27,48	28,17	85,71	Sangat Tepercaya Highly Trusted
2018	21,70	36,52	26,55	84,77	Tepercaya Trusted
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang					
2021	29,77	30,36	23,79	83,92	Tepercaya Trusted
2020	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Tahun 2019 Did not participate in 2019 CGPI				
2019	28,91	26,93	27,16	83,00	Tepercaya Trusted
2018	21,23	35,64	25,13	82,00	Tepercaya Trusted

Tidak ada Rekomendasi Pengembangan yang diterbitkan oleh The *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), karena kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pemeringkatan bukan penilaian penerapan GCG.

There were no Development Recommendations issued by The *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), as the activity carried out is a rating activity, not an assessment of GCG implementation.

Peningkatan Kualitas Implementasi Good Corporate Governance

Improving the Quality of Good Corporate Governance Implementation

Sosialisasi dan Internalisasi Prinsip-prinsip GCG

Socialization and Internalization of GCG Principles

Untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan GCG kepada seluruh Insan Perusahaan, secara periodik Perusahaan melakukan sosialisasi terkait penerapan prinsip-prinsip GCG dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

To provide an understanding of GCG implementation to all Company personnel, the Company periodically conducts GCG principles socialization through the following activities:

1. Penyampaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan baik yang disampaikan secara langsung

1. Submission of Good Corporate Governance Guidelines to the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees, whether directly through booklets,

- berbentuk buku, *email* perusahaan, maupun melalui media lainnya yang digunakan oleh Perusahaan.
- Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada *website* perusahaan yang dapat diakses oleh publik.
- Pemutaran video penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap acara perusahaan baik internal maupun yang mengundang pihak eksternal.
- Sosialisasi prinsip-prinsip GCG melalui berbagai media seperti *standing banner*, poster, *desktop laptop/PC* kantor, TV kantor, Majalah SPIN, media sosial Perusahaan, dll.
- Penandatanganan Pakta Integritas melalui aplikasi PIONIR (Pakta Integritas *Online* Terintegrasi) yang diakses melalui link <https://pionir.pupuk-indonesia.com/>.
- Sosialisasi Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan PTPI kepada *Stakeholders*.

Peta Jalan dan Rencana Pengembangan GCG

Sebagai upaya pengembangan berkelanjutan serta sejalan dengan pengesahan *Roadmap* GCG 2020-2024, maka Perusahaan menetapkan sasaran, strategi, kebijakan terkait dengan pengembangan Manajemen Kepatuhan untuk Tahun 2020-2024 yang didalamnya meliputi implementasi GCG.

Perkembangan Penerapan GCG berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel berikut:

- company emails, or through other media used by the Company.
- Socialization of the Corporate Governance Guidelines on the Company's website that can be accessed by the public.
- Video screening of GCG implementation principles at all Company events, both internal and by inviting external parties.
- Socialization of GCG principles through media such as standing banners, posters, desktop laptops/ office PCs, office TV, SPIN Magazine, Company social media, etc.
- Signing of the Integrity Pact through the PIONIR application (Integrated Online Integrity Pact), which is accessed via <https://pionir.pupuk-indonesia.com/>.
- Socialization of PTPI Anti-Bribery Policy and Commitment to Stakeholders.

GCG Roadmap and Development Plan

As a sustainable development effort and in line with the ratification of the 2020-2024 GCG Roadmap, the Company has established objectives, strategies, policies on Compliance Management for the Year 2020-2024 that also includes GCG implementation.

The GCG implementation development based on the Company's Long-Term Plan for 2020-2024 is as shown in the following table:

No.	Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terbangunnya Kapabilitas Organisasi dan SDM Manajemen Kepatuhan Development of Compliance Management Organizational and HC Capability	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya sertifikasi individu bidang kepatuhan Terselenggaranya <i>workshop</i> terkait Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600: 2014 Terselesaikannya pembangunan aplikasi sistem informasi manajemen kepatuhan e-Integrity Pact Implementation of individual certification in the field of compliance Organizing workshops related to SNI ISO 19600:2014 Compliance Management Completion of the e-Integrity Pact compliance management information system application development 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya sertifikasi individu bidang kepatuhan Terselenggaranya <i>workshop</i> terkait Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600: 2014 Terselesaikannya pembangunan aplikasi sistem informasi manajemen kepatuhan WBS terintegrasi Implementation of individual certification in the field of compliance Organizing workshops related to SNI ISO 19600:2014 Compliance Management Completion of the integrated WBS compliance management information system application development 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya sertifikasi individu bidang kepatuhan Implementation of individual certification in the field of compliance 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya sertifikasi individu bidang kepatuhan Implementation of individual certification in the field of compliance 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya sertifikasi individu bidang kepatuhan Implementation of individual certification in the field of compliance

No.	Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024
2	Terselenggaranya manajemen Kepatuhan berbasis teknologi informasi yang semakin efektif Implementation of more effective information technology-based Compliance management	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya FRTM berdasarkan proses bisnis Perusahaan Terselesaikannya pengembangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 di 6 Anak Perusahaan Compilation of FRTM based on the Company's business processes Completion of the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in 6 Subsidiaries 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya FRTM berdasarkan proses bisnis Perusahaan Terlaksananya Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 di Induk Perusahaan dan 6 Anak Perusahaan Terlaksananya <i>Fraud Control System</i> PI Grup Compilation of FRTM based on the Company's business processes Implementation of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in the Parent Company and 6 Subsidiaries Implementation of the Fraud Control System in PI Group 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya FRTM berdasarkan proses bisnis Perusahaan Terlaksananya Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 di Induk Perusahaan dan 6 Anak Perusahaan Terlaksananya <i>Fraud Control System</i> PI Grup Compilation of FRTM based on the Company's business processes Implementation of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in the Parent Company and 6 Subsidiaries Implementation of the Fraud Control System in PI Group 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya FRTM berdasarkan proses bisnis Perusahaan Terlaksananya Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 di Induk Perusahaan dan 6 Anak Perusahaan Terlaksananya <i>Fraud Control System</i> PI Grup Compilation of FRTM based on the Company's business processes Implementation of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in the Parent Company and 6 Subsidiaries Implementation of the Fraud Control System in PI Group 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya FRTM berdasarkan proses bisnis Perusahaan Terlaksananya Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 di Induk Perusahaan dan 6 Anak Perusahaan Terlaksananya <i>Fraud Control System</i> PI Grup Compilation of FRTM based on the Company's business processes Implementation of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in the Parent Company and 6 Subsidiaries Implementation of the Fraud Control System in PI Group
		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya pengembangan <i>Fraud Control System</i> PI Grup Completion of the Fraud Control System development in PI Group 	<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya pengembangan Program Manajemen Anti Penyuapan di 4 Anak Perusahaan Terselesaikannya pengembangan Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600:2014 Completion of the development of the Anti-Bribery Management Program in 4 Subsidiaries Completion of the development of SNI ISO 19600:2014 Compliance Management System 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Program Manajemen Anti Penyuapan di 4 Anak Perusahaan Terlaksananya Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600:2014 Implementation of Anti-Bribery Management Program in 4 Subsidiaries Implementation of SNI ISO 19600:2014 Compliance Management System 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Program Manajemen Anti Penyuapan di 4 Anak Perusahaan Terlaksananya Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600:2014 Implementation of Anti-Bribery Management Program in 4 Subsidiaries Implementation of SNI ISO 19600:2014 Compliance Management System 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Program Manajemen Anti Penyuapan di 4 Anak Perusahaan Terlaksananya Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600:2014 Implementation of Anti-Bribery Management Program in 4 Subsidiaries Implementation of SNI ISO 19600:2014 Compliance Management System

No.	Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024
3	Terbangunnya budaya Kepatuhan perusahaan yang berkelanjutan dengan tingkat kepatuhan pelaporan kekayaan pejabat sebesar 100% setiap tahun. Establishment of a sustainable corporate compliance culture with a compliance rate of 100% for officials' wealth reporting every year.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan asistensi dan <i>monitoring</i> pengisian Laporan Kekayaan Pejabat Terlaksananya GCG Assessment PI Grup Implementation of assistance and monitoring activities for filling in the Official's Wealth Reports GCG Implementation Assessment for PI Group 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan asistensi dan monitoring pengisian Laporan Kekayaan Pejabat Tersusunnya Peraturan <i>reward and punishment</i> dalam kepatuhan Terlaksananya GCG Assessment PI Grup Implementation of assistance and monitoring activities for filling in the Official's Wealth Reports Formulation of reward and punishment regulations in compliance Compilation of Compliance KPIs GCG Implementation Assessment in PI Group 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan asistensi dan <i>monitoring</i> pengisian Laporan Kekayaan Pejabat Terlaksananya GCG Assessment PI Grup Terlaksananya kegiatan asistensi dan <i>monitoring</i> pengisian Laporan Kekayaan Pejabat Terlaksananya GCG Assessment PI Group 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan asistensi dan <i>monitoring</i> pengisian Laporan Kekayaan Pejabat Terlaksananya GCG Assessment PI Grup Terlaksananya kegiatan asistensi dan monitoring pengisian Laporan Kekayaan Pejabat Terlaksananya GCG Assessment PI Group 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan asistensi dan <i>monitoring</i> pengisian Laporan Kekayaan Pejabat Terlaksananya GCG Assessment PI Grup Terlaksananya kegiatan asistensi dan <i>monitoring</i> pengisian Laporan Kekayaan Pejabat Terlaksananya GCG Assessment PI Group

STRUKTUR DAN PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUCTURE AND PROCESS OF CORPORATE GOVERNANCE



Struktur tata kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan proses tata kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses tersebut mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, prosedur tetap, piagam, dokumen, hingga pemberlakuan aturan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

Struktur tata kelola perusahaan memiliki organ-organ utama yang memiliki peran dalam menunjang pengelolaan Perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Sebagai suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Perseroan terdiri atas tiga organ utama yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing memiliki peran penting dalam penerapan GCG sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab

Governance structure is a comprehensive set of organizational organs or tools that Company has in place, whether those set up to ensure compliance with applicable laws and regulations, or to meet internal needs in order to improve GCG implementation. Governance Process is a series of processes, habits, rules and institutions that affect the overall management of the Company. Governance Process includes the Company's rules and regulations, fixed procedures, Charters, documents, and the enforcement of rules governing relations between the organizational organs or tools.

Governance Structure contains several main organs that play a role in supporting and strengthening the Company's control and management in accordance with the application of the Governance Principles. As a Limited Liability Company business entity established and regulated in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporate governance structure consists of three main organs, namely the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors. Each plays

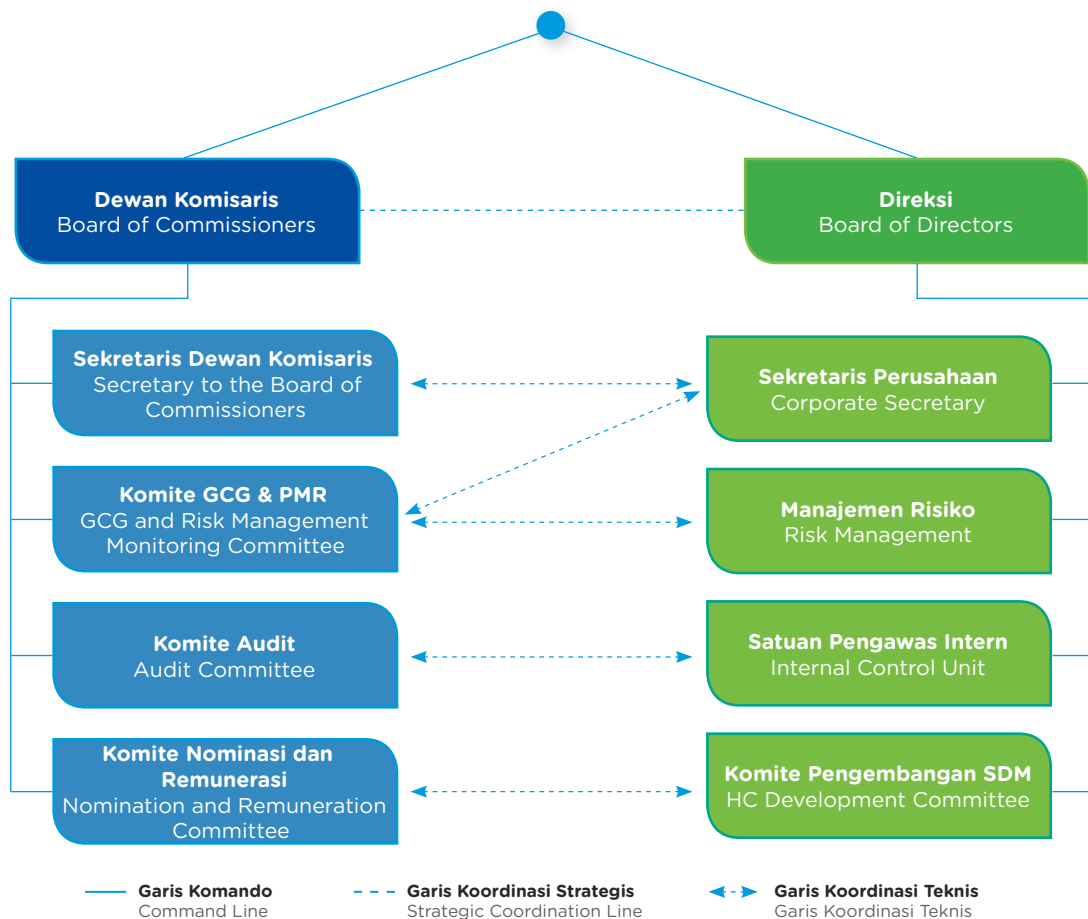
masing-masing. Oleh karena itu, ketiga organ-organ tersebut harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*: Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

an important role in GCG implementation in accordance with their respective functions, duties and responsibilities.

The Limited Liability Company management system in Indonesia adheres to a 2 (two) tier system model, namely a Board of Commissioners and a Board of Directors with clear authorities and responsibilities in accordance with their respective functions as mandated in the laws and regulations as well as the Articles of Association.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PTPI
PTPI Corporate Governance Structure



Dalam mendukung peran organ utama tata kelola, Perusahaan memiliki organ pendukung Dewan Komisaris, yakni Sekretaris Dewan Komisaris, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Audit. Untuk Direksi, didukung oleh organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Satuan Pengawasan Intern.

In supporting the role of the main governance organs, the Company has supporting organs for the Board of Commissioners, namely the Secretary to the Board of Commissioners, the GCG and Risk Management Monitoring Committee, and the Audit Committee. For the Board of Directors, it is supported by the Corporate Secretary, Risk Management, and the Internal Control Unit.

Agar struktur tata kelola dapat berjalan dengan baik dan memiliki batasan tanggung jawab masing-masing, diperlukan proses tata kelola yang dioperasikan melalui perangkat kebijakan atau *soft structure*. Hal itu mencakup peraturan dan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dan serangkaian aturan internal yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi Perusahaan berbasis pengelolaan yang akuntabel.

Perusahaan menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan penerapan GCG, antara lain Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha perusahaan, Pedoman Fungsional, Prosedur, Instruksi Kerja dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mendukung penerapan tata kelola secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan-kebijakan ini secara berkala dimutakhirkan agar selaras dengan perkembangan bisnis Perusahaan serta perubahan peraturan perundang-undangan.

For the Governance Structure to run smoothly within their respective responsibility boundaries, the Company's Governance Process has been established through a set of policies or soft structures including the rules and regulations as previously described, and a set of internal rules to create an accountable corporate management environment.

The Company has set policies including Corporate Governance Guidelines, Ethics and Behavior Guidelines, Board of Commissioners and Board of Directors Working Guidelines, Corporate Governance Guidelines, Functional Guidelines, Procedures, Work Instructions and other policies to support a sustainable and consistent governance implementation. These policies are regularly updated to align with the Company's business developments and changes in the laws and regulations.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines	Pedoman Etika dan Perilaku Ethics and Behavior Guidelines	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Working Guidelines	Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha Corporate Governance Guidelines	Pedoman Fungsional Functional Guidelines	Prosedur Procedures	Instruksi Kerja Work instructions
--	---	--	--	--	-------------------------------	---



Perangkat Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Policy Tools

No.	Soft Structure GCG	Pertama Diterbitkan First Published	Terakhir Dimutakhirkan Last Updated
1	Anggaran Dasar Perusahaan Company Articles of Association	3 Januari 1970 January 3, 1970	12 Oktober 2020 October 12, 2020
2	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Code of Corporate Governance</i>) Code of Corporate Governance	5 November 2012 November 5, 2012	16 Februari 2022 February 16, 2022
3	Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) Code of Conduct	5 November 2012 November 5, 2012	16 Desember 2021 December 16, 2021
4	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) Board Manual	5 November 2012 November 5, 2012	16 Februari 2021 February 16, 2021
5	Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (<i>Code of Group Governance</i>) Code of Group Governance	2 Juli 2012 July 2, 2012	30 Desember 2021 December 30, 2021
6	Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Officials Wealth Report Manual Guidelines	23 September 2015 September 23, 2015	22 November 2021 November 22, 2021
7	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) Whistleblowing System Guidelines	23 Desember 2013 December 23, 2013	14 Agustus 2019 August 14, 2019
8	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	30 Juni 2015 June 30, 2015	22 November 2021 November 22, 2021
9	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Conflict of Interest management Guidelines	30 September 2015 September 30, 20215	27 Desember 2021 December 27, 2021
10	Pedoman Manajemen Anti Penyuapan Anti Bribery Management Guidelines	14 Agustus 2019 August 14, 2019	9 Desember 2021 December 9, 2021



Perangkat Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Policy Tools

No.	Soft Structure GCG	Pertama Diterbitkan First Published	Terakhir Dimutakhirkan Last Updated
11	Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan (<i>Compliance Management System</i>) Compliance Management System Guidelines	30 Desember 2021 December 30, 2021	-
12	Pedoman Sistem Pengendalian <i>Fraud</i> (<i>Fraud Control System</i>) Fraud Control System Guidelines	28 April 2021 April 28, 2021	-
13	Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Guidelines	4 Februari 2013 February 4, 2013	8 September 2017 September 8, 2018
14	Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Company Internal Control System General Guidelines	23 Februari 2016 February 23, 2016	29 Desember 2017 December 29, 2017
15	Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (<i>Company Manual</i>) Integrated Management System Guidelines	8 September 2017 September 8, 2018	8 September 2017 September 8, 2018
16	Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Guidelines	8 September 2017 September 8, 2018	8 September 2017 September 8, 2018
17	Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan Anti-bribery policies and commitments	5 Juli 2019 July 5, 2019	18 Januari 2022 January 18, 2022
18	Kebijakan Mutu Perusahaan Quality Assurance policies	1 Agustus 2019 August 1, 2019	
19	Piagam Satuan Pengawasan Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) Internal Audit Charter	29 April 2015 April 29, 2015	12 Desember 2018 December 12, 2018
20	Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	23 Oktober 2014 October 23, 2014	20 Desember 2019 December 20, 2019
21	Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko (PMR) GCG & PMR Committee Charter	23 Februari 2015 February 23, 2015	20 Desember 2019 December 20, 2019

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40/2007 dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri BUMN bertindak selaku RUPS Persero dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company body that has the authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in Law No. 40/2007 and/or the Company's Articles of Association.

Based on Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN), the Minister of SOEs acts as the GMS of the Company as all the shares of the Persero are owned by the State.

Pemegang Saham Utama/Pengendali

Majority/Controlling shareholders

Pemegang Saham PTPI (Hingga Entitas Pemilik Akhir) per 31 Desember 2021 PTPI Shareholders (up to the final owner entity) as of December 31, 2021



Hak Pemegang Saham

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini.

Shareholders' Rights

1. Attend and vote in the GMS;
2. Receive dividends and the remaining assets resulting from a liquidation;
3. Executing other rights based on these applicable laws and regulations.

Keterbukaan informasi dan Penyampaian Informasi RUPS kepada Pemegang Saham

Perusahaan menyediakan informasi bagi publik dan khususnya Pemegang Saham yang dapat dilakukan melalui sejumlah media, antara lain:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan media penyampaian laporan dan informasi yang memungkinkan Pemegang Saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
2. Media Elektronik, yaitu situs informasi dengan alamat www.pupuk-Indonesia.com;
3. Media Sosial Perusahaan, yaitu dengan alamat:
 - a. Twitter: @pupuk_indonesia
 - b. Instagram: pt.pupukindonesia
4. Laporan Tahunan, yaitu sarana informasi yang dipublikasikan sebagai laporan kinerja pada setiap tahun buku.

Information Disclosure and Submission of GMS Information to Shareholders

The Company provides information to the public and especially the Shareholders through the following media:

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) as a medium for submitting reports and information that allows Shareholders to participate in decision making;
2. Electronic Media, a website at the following address www.pupuk-Indonesia.com;
3. Company Social Media, at the following:
 - a. Twitter: @pupuk_indonesia
 - b. Instagram: pt.pupukindonesia
4. Annual Report, as a means of information published as a performance report each fiscal year.

Perlakuan Setara bagi Pemegang Saham

Seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham minoritas harus diperlakukan setara. Seluruh Pemegang Saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar. Perlakuan setara bagi Pemegang Saham, meliputi:

1. Perlakuan yang Adil
Perusahaan memberikan perlakuan yang adil bagi Pemegang Saham dan kesempatan untuk mereka semua dalam menerima informasi secara adil, dan memungkinkan Pemegang Saham untuk mencalonkan Direksi serta mengusulkan agenda lain melalui laman Perusahaan.

Equal Treatment for Shareholders

All Shareholders including minority Shareholders must be treated equally. All Shareholders must be given the same opportunity to receive attention if their rights are violated. Equal treatment for Shareholders, including:

1. Fair Treatment
The Company provides fair treatment to Shareholders and the provides an opportunity for all of them to receive information fairly, and allows Shareholders to nominate Directors and propose other agenda items through the Company's website.

2. Proses Rapat Pemegang saham
Perusahaan akan memfasilitasi penggunaan surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPS, dan mendorong Pemegang Saham yang tidak dapat hadir untuk menunjuk seorang sebagai wakil mereka.
3. Penggunaan Informasi dari Orang Dalam
Ini merupakan tanggung jawab Direksi Perusahaan, manajemen dan karyawan untuk menjaga informasi kerahasiaan Perusahaan (terutama informasi internal yang tidak seharusnya diungkapkan kepada publik) dari tujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri atau kepentingan orang lain serta untuk mentaati peraturan hukum dan kebijakan tentang *insider trading*.
4. Konflik Kepentingan Direksi
Manajemen dan karyawan harus mengungkapkan setiap kepentingan yang mungkin mereka miliki yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau transaksi terhubung berdasarkan agenda yang terjadwal, sesuai dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan perusahaan.

Wewenang RUPS

RUPS memiliki kewenangan, antara lain:

1. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Menetapkan alokasi laba Perusahaan;
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;
4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Komisaris;
5. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris;
6. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan.
7. Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi;
8. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Komisaris;
9. Menetapkan tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.

JENIS-JENIS RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 (dua) jenis RUPS di Perusahaan, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan. Pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS Tahunan dibahas laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan, laporan tahunan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukkan Akuntan Publik, serta hal lainnya demi kepentingan Perusahaan.

2. Shareholders Meeting Process
The Company will allow the use of a power of attorney for Shareholders who are unable to attend the GMS, and will encourage Shareholders unable to attend to appoint someone as their representative.
3. Use of Information from Individuals
It is the responsibility of the Company's Board of Directors, management and employees to maintain confidential Company information (especially internal information that should not be disclosed to the public) for the purpose of gaining profit for themselves, or for other parties, and to comply with legal regulations and policies concerning insider trading.
4. Conflicts of Interest
The Board of Directors, management and employees must disclose any interests they may have that could give rise to a conflict of interest or a related transaction based on a scheduled agenda, in accordance with Company regulations and policies.

GMS Authorities

GMS authorities include:

1. Determining the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Company's Work Plan and Budget (WP&B);
2. Determining the allocation of the Company's profit;
3. Appointing and dismissing the Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Setting performance targets for all Directors and Commissioners;
5. Conducting collegial and individual performance appraisals of the Board of Directors and Board of Commissioners;
6. Assigning an external auditor to conduct a financial audit of the financial statements.
7. Determining the of the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration;
8. Establishing policies concerning the possibility of conflicts of interest related to the Commissioners;
9. Determining the Board of Directors members division of duties and authorities.

Forms of GMS

Based on the Company's Articles of Association there are 2 (two) types of GMS in the Company, the Annual GMS and other GMS.

Annual GMS

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) discusses the Company's annual report and annual reckoning. The Annual GMS must be convened no later than 6 (six) months after the Fiscal year. The Annual GMS discusses the Board of Directors' Report on annual reckoning, annual reports on the Company's condition, plans for the allocation of profits and the amount of dividends to be paid, requests for the appointment of Public Accountants, and other corporate matters.

RUPS Lainnya

RUPS Lainnya biasa disebut RUPS luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

RUPS Tahunan dan RUPSLB memiliki wewenang tertinggi dalam Struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perusahaan. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2021

Periode tahun buku 2021, Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali.

RUPS Tahunan

- RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021

Hari/Tanggal Day/Date	: 29 Januari 2021 January 29, 2021
Waktu Time	: Pk. 15.22 - 15.54 WIB
Tempat Place	: Gedung PUSRI Lt. 8 Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta Virtual : ID Meeting 319246662

Other GMS

Another GMS are commonly referred to as Extraordinary GMS (EGMS), which can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, the Board of Commissioners, or Shareholders to determine matters not discussed in the Annual GMS.

The Annual GMS and EGMS have the highest authority in the corporate governance structure and are the main forum for Shareholders to exercise their rights and authority over the management of the Company. A GMS shall be convened based on relevant policies, applicable regulations, issued decrees, and the Company's articles of association as described below:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
4. The Company's Articles of Association.

GMS for Fiscal Year 2021

In the Fiscal Year 2021, the Company has held 2 (two) Annual GMS.

Annual GMS

- Annual GMS to Approve the Company's Work Plan and Budget (WP&B) for Fiscal Year 2021

Kehadiran Attendance	<ul style="list-style-type: none"> • Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Zuryati Simbolon • Dewan Komisaris: • Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> a. Komisaris Utama : Darmin Nasution b. Komisaris Independen : Mustoha Iskandar c. Komisaris : Anwar Sanusi d. Komisaris : Bambang Widianto e. Komisaris : Suwandi f. Komisaris : Febrio Nathan Kacaribu g. Komisaris : Ari Dwipayana <p>Ketidakhadiran: Komisaris Independen: Anhar Adel dikuasakan kepada Anwar Sanusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Utama : Bakir Pasaman b. Wakil Direktur Utama : Nugroho Christijanto melalui video konferensi c. Direktur Keuangan dan Investasi : Eko Taufik Wibowo d. Direktur SDM & Tata Kelola : Winardi e. Direktur Transformasi Bisnis : Panji Winanteya Ruki f. Direktur Pemasaran : Gusrizal <p>Ketidakhadiran: Direktur Produksi: Bob Indiarito dikuasakan kepada Direktur Keuangan dan Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proxy of Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia Assistant Deputy for the Department of Food Industry and Fertilizer of the Ministry of SOEs, Zuryati Simbolon • Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> a. President Commissioner : Darmin Nasution b. Independent Commissioner : Mustoha Iskandar c. Commissioner : Anwar Sanusi d. Commissioner : Bambang Widianto e. Commissioner : Suwandi f. Commissioner : Febrio Nathan Kacaribu g. Commissioner : Ari Dwipayana <p>Absent: Independent Commissioner: Anhar Adel delegated to Anwar Sanusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Board of Directors <ul style="list-style-type: none"> a. President Director : Bakir Pasaman b. Vice President Director : Nugroho Christijanto via video conference c. Director of Finance and Investment : Eko Taufik Wibowo d. Director of HC & Governance : Winardi e. Director of Business Transformation : Panji Winanteya Ruki f. Director of Marketing : Gusrizal <p>Absent: Director of Production: Bob Indiarito delegated to Director of Finance and Investment</p>
--------------------------------	---

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 03 Tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Lumassia notaris di Jakarta Pusat. Rincian hasilnya adalah sebagai berikut:

The results of the GMS resolutions have been stated in Notarial Deed. 03 dated January 29, 2021 drawn up before Lumassia notary in Central Jakarta. The details of the results are as follows:

Agenda	Keputusan Resolution
<p>Mata Acara 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2021.</p> <p>Agenda 1: Ratification of the Company's 2021 Work Plan and Budget (WP&B) and the Social and Environmental Responsibility Program Budget (RKA TJSL).</p> <p>Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.</p> <p>Realization: Realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.</p>	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 PTPI dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2021. Approved the Company's 2021 Work Plan and Budget (WP&B) of PTPI and the 2021 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL).</p>
<p>Mata Acara 2: Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2021.</p> <p>Agenda 2: Determination of Operational Aspect Indicators for measuring the Company's Health Level in 2021.</p>	<p>Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan PTPI Tahun 2021. Determined the Operational Aspect Indicators for measuring the Health Level of PTPI in 2021.</p>

Agenda	Keputusan Resolution
<p>Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.</p> <p>Realization: Realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.</p>	
<p>Mata Acara 3: Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2021.</p> <p>Agenda 3: Approval and Ratification of Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Directors and the Board of Commissioners and shareholders in 2021.</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2021.</p> <p>Approved and ratified the Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Directors and the Board of Commissioners and shareholders in 2021.</p>
<p>Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.</p> <p>Realization: Realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.</p>	
<p>Mata Acara 4: Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021.</p> <p>Agenda 4: Approval and Ratification of Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Commissioners and shareholders in 2021.</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) antara Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2021.</p> <p>Approved and ratified the Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Commissioners and shareholders in 2021.</p>
<p>Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.</p> <p>Realization: Realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.</p>	
<p>Mata Acara 5: Penetapan penugasan pemerintah (<i>Public Service Obligation</i>) melalui Peraturan Menteri Pertanian untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.</p> <p>Agenda 5: Determination of Government assignments (<i>Public Service Obligation</i>) through the Minister of Agriculture Regulation for the distribution of Subsidized Fertilizers in 2021.</p>	<p>Menetapkan Penetapan penugasan pemerintah (<i>Public Service Obligation</i>) melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Determined the Government assignments (<i>Public Service Obligation</i>) through of the Republic of Indonesia Minister of Agriculture Regulation No. 49 of 2020 concerning Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizer in the Agriculture Sector for Fiscal Year 2021.</p>
<p>Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.</p> <p>Realization: Realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.</p>	

- RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020
- Annual GMS Approval of the Fiscal Year 2020 Annual Report

Hari/Tanggal Day/Date	: 30 Juni 2021 June 30, 2021
Waktu Time	: Pkl 14.00 WIB s.d selesai 14.00 WIB until finished
Tempat Place	: Jl. Taman Patra III No.4 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan-DKI Jakarta Virtual : Meeting ID 395 991 6617

Kehadiran
Attendance

- :
- Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury
 - b. Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Rachman Ferry Isfianto
 - Dewan Komisaris:
 - a. Komisaris Utama : Darmin Nasution
 - b. Komisaris Independen : Mustoha Iskandar
 - c. Komisaris : Anwar Sanusi
 - d. Komisaris : Bambang Widianto
 - e. Komisaris : Suwandi
 - f. Komisaris : Febrio Nathan Kacaribu
 - g. Komisaris : Ari Dwipayana
 - h. Komisaris Independen : Anhar Adel
 - Direksi
 - a. Direktur Utama : Bakir Pasaman
 - b. Wakil Direktur Utama : Nugroho Christijanto melalui video konferensi
 - c. Direktur Keuangan dan Investasi : Eko Taufik Wibowo
 - d. Direktur SDM & Tata Kelola : Winardi
 - e. Direktur Transformasi Bisnis : Panji Winanteya Ruki
 - f. Direktur Pemasaran : Gusrizal
 - g. Direktur Produksi : Bob Indiarito
 - Shareholder Proxy for the Government of the Republic of Indonesia
 - a. Vice Minister of BUMN I, Pahala Nugraha Mansury
 - b. Assistant Deputy for Plantation and Forestry Industry, Rachman Ferry Isfianto
 - Board of Commissioners:
 - a. President Commissioner : Darmin Nasution
 - b. Independent Commissioner : Mustoha Iskandar
 - c. Commissioner : Anwar Sanusi
 - d. Commissioner : Bambang Widianto
 - e. Commissioner : Suwandi
 - f. Commissioner : Febrio Nathan Kacaribu
 - g. Commissioner : Ari Dwipayana
 - h. Independent Commissioner : Anhar Adel
 - Board of Directors
 - a. President Director : Bakir Pasaman
 - b. Vice President Director : Nugroho Christijanto via video conference
 - c. Director of Finance and Investment : Eko Taufik Wibowo
 - d. Director of HC & Governance : Winardi
 - e. Director of Business Transformation : Panji Winanteya Ruki
 - f. Director of Marketing : Gusrizal
 - g. Director of Production : Bob Indiarito

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Lumassia notaris di Jakarta Pusat Rincian hasilnya adalah sebagai berikut:

The GMS resolutions results have been stated in Notarial Deed. 02 dated August 26, 2021 drawn up before Lumassia notary in Central Jakarta The details of the results are as follows:

Agenda

Keputusan
Resolution**Mata Acara 1:**

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, serta Pengesahan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020.

Agenda 1:

Approval of the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and operation of the Company during Fiscal Year 2020, including the Board of Commissioners Supervisory Duties Implementation Report and the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2020, and Ratification of the restatement of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Years 2019 and 2018, as well as the granting full settlement and release of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions in the Company carried out during Fiscal Year 2020.

- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020.
- Persetujuan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode sebelumnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan Laporan Posisi Keuangan pada 1 Januari 2019/31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00994/2.1025/AU.1/05/1122-1/1/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian PTPI dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Approved the Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the Fiscal Year 2020, including the Board of Commissioners Report on Supervisory Duties during Fiscal Year 2020. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 ending on December 31, 2020.
- Approved the restatement of the Company's Consolidated Financial Statements for the previous period for the year ended December 31, 2019 and the Statement of Financial Position on January 1, 2019/December 31, 2018, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as stated in their report No. 00994/2.1025/AU.1/05/1122-1/1/V/2021 dated May 31, 2021 with a "inqualified, in all material aspects" opinion, the consolidated financial position of PTPI and its subsidiaries as of December 31, 2020, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, as well as provided full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions of the Company carried out during the Fiscal Year 2020, as long as these actions do not constitute a criminal act and/or violate the applicable legal provisions and procedures and are as recorded in the Company's Financial Statements, and do not conflict with the provisions of laws and regulations.

Realisasi:

Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 26 Agustus 2021.

Realization:

Realized through Notarial Deed dated August 2, 26, 2021.

Agenda	Keputusan Resolution
<p>Mata Acara 2: Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020.</p> <p>Agenda 2: Approval of the Partnership and Community Development Program (PKBL) Annual Report for Fiscal Year 2020 and the Ratification of the PKBL Financial Statements for Fiscal Year 2020, as well as granting full settlement and release of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision of the Partnership Program and Community Development (PKBL) carried out during Fiscal Year 2020.</p>	<p>Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: N20210609008/DC2/THA/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", neraca Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPI tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan dan pengurusan PKBL Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Approved and ratified the PKBL Annual Report for Fiscal Year 2020 including the PKBL Financial Report which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as stated in their report No N20210609008/DC2/THA/2021 dated June 9, 2021, with an opinion "inqualified, in all material aspects", the balance sheet of the Partnership and Community Development Program (PKBL) of PTPI as of December 31, 2020, as well as a report on its activities and cash flows for the year then ended, in accordance with the Entity's Financial Accounting Standards Without Public Accountability in Indonesia, as well as providing release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions and management of PKBL for the Fiscal Year 2020, as long as these actions do not constitute a criminal act and/or violate the applicable legal provisions and procedures and are as recorded in the Company's Partnership and Community Development Program, and do not conflict with the provisions of laws and regulations.</p>
<p>Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 26 Agustus 2021.</p> <p>Realization: Realized through Notarial Deed dated August 2, 26, 2021.</p>	
<p>Mata Acara 3: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.</p> <p>Agenda 3: Determine the use of the Company's Consolidated Net Profit for Fiscal Year 2020.</p>	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan.</p> <p>Approved the determination of the use of net profit for Fiscal Year 2019 attributable to the owners of the Company's Parent Entity.</p>
<p>Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 26 Agustus 2021.</p> <p>Realization: Realized through Notarial Deed dated August 2, 26, 2021.</p>	

Agenda	Keputusan Resolution
<p>Mata Acara 4: Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021, serta tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Tahun 2020.</p> <p>Agenda 4: Determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2021, as well as performance bonuses/incentives for the Company's Directors and Board of Commissioners performance in 2020.</p> <p>Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 26 Agustus 2021.</p> <p>Realization: Realized through Notarial Deed dated August 2, 26, 2021.</p>	<p>Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta tantiem/insentif untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2020, akan ditetapkan secara tersendiri.</p> <p>Determined the Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2021 as well as bonuses/incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for their performance during Fiscal Year 2020, will be determined separately.</p>
<p>Mata Acara 5: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2021.</p> <p>Agenda 5: Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021, and the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for Fiscal Year 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk Tahun mengaudit Laporan Keuangan Buku 2021. • Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. • Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, karena kuasa kepada Dewan Kantor Akuntan Publik sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. • Re-appointed the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as the Public Accounting Firm for the Company's Consolidated Financial Statements, and the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the fiscal year when auditing the 2021 Financial Statements. • Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners of to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods during the Fiscal Year 2021 for the purposes and interests of the Company. • Granted power to the Company's Board of Commissioners to determine the fees for audit services or other requirements for the Public Accounting Firm, as well as to appoint a replacement in the event that the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, due to power of attorney to the Board of Public Accounting Firms or for any reason, cannot audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements on the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the Fiscal Year 2021, including determining the audit fee and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
<p>Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 26 Agustus 2021.</p> <p>Realization: Realized through Notarial Deed dated August 2, 26, 2021.</p>	

Keputusan RUPS Tahun 2021

- Sepanjang tahun 2021, Rapat Umum Pemegang Saham mengeluarkan Surat Keputusan sebanyak 2 (dua) keputusan, yaitu:

2021 GMS

- In 2021, the General Meeting of Shareholders issued 2 (two) decrees, as follows:



Keputusan dan Realisasi RUPS 2021 Resolutions and Realization of 2021 GMS

Dasar Hukum Legal Basis	Keputusan Resolution	Realisasi Realization									
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, Nomor SK-237/MBU/07/2021. Minister of State-Owned Enterprises as a PT Pupuk Indonesia (Persero) General Meeting of Shareholders Decree No. SK-237/MBU/07/2021.	<ul style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat nama tersebut di bawah ini sebagai Direksi Perusahaan: Eko Taufik Wibowo sebagai Direktur Keuangan & Investasi Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut: Dismissed with honor the names below as Directors of the Company: Eko Taufik Wibowo as Director of Finance & Investment Changed the positions nomenclature for members of the Company's Board of Directors, as follows: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Semula Before</th> <th>Menjadi After</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Director of Portofolio and Business Development</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Direktur SDM dan Tata Kelola Director of HC and Governance</td> <td>Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Director of HC, Governance and Risk Management</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Semula Before	Menjadi After	1	-	Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Director of Portofolio and Business Development	2	Direktur SDM dan Tata Kelola Director of HC and Governance	Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Director of HC, Governance and Risk Management	Telah direalisasikan dan diaktakan melalui Akta Notaris No. 01 Tanggal 16 Juli 2021. Has been realized and notarized through Notarial Deed. 01 dated July 16, 2021.
No.	Semula Before	Menjadi After									
1	-	Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Director of Portofolio and Business Development									
2	Direktur SDM dan Tata Kelola Director of HC and Governance	Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Director of HC, Governance and Risk Management									
	<ul style="list-style-type: none"> Mengalihkan penugasan nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan: Winardi semula sebagai Direktur SDM dan Tata Kelola menjadi Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> Listiarini Dewajanti sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Jamsaton Nababan sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Transferred the assignment of the members of the Company's Board of Directors: Winardi from originally Director of HC and Governance to become the Director of HC, Governance and Risk Management Appointed the following as members of the Company's Board of Directors: <ul style="list-style-type: none"> Listiarini Dewajanti as Director of Finance and Investment Jamsaton Nababan as Director of Portfolio and Business Development 										
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, Nomor SK-408/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia. Minister of State-Owned Enterprises as a PT Pupuk Indonesia (Persero) General Meeting of Shareholders Decree No. SK-408/MBU/12/2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the PT Pupuk Indonesia (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama tersebut di bawah ini sebagai Direksi Perusahaan: Listiarini Dewajanti sebagai Direktur Keuangan dan Investasi terhitung sejak tanggal 11 November 2021; Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Direksi Perusahaan: Winardi sebagai Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko; Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> Wono Budi Tjahyono sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Tina T. Kemala Intan sebagai Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Confirmed the honorable discharge of the name below as Director of the Company: Listiarini Dewajanti as Director of Finance and Investment effective November 11, 2021; Dismissed with honor the name below as Director of the Company: Winardi as Director of HC, Governance and Risk Management; Appointed the following as members of the Company's Board of Directors: <ul style="list-style-type: none"> Wono Budi Tjahyono as Director of Finance and Investment Tina T. Kemala Intan as Director of HC, Governance and Risk Management. 	Telah direalisasikan dan diaktakan melalui Akta Notaris No. 05 Tanggal 24 Desember 2021. Has been realized and notarized through Notarial Deed. 05 dated December 24, 2021.									

RUPS Tahun Sebelumnya

Sepanjang tahun 2021, telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 6 (enam) kali RUPS, yaitu 2 (dua) kali RUPS Tahunan dan 4 (empat) kali RUPS Lainnya.

Previous Year's GMS

In 2021, 6 (six) GMS were held, namely 2 (two) Annual GMS and 4 (four) others GMS.

RUPS Tahunan

- RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020

Annual GMS

- Annual GMS Approval of the Company's Work Plan and Budget (WP&B) for Fiscal Year 2020

Hari/Tanggal Day/Date	: 24 Januari 2020 January 24, 2020
Waktu Time	: 08.23 WIB
Tempat Place	: Gedung Kementerian BUMN Lt.12 Jl Merdeka Selatan No 13 Jakarta
Kehadiran	: <ul style="list-style-type: none"> Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia Wakil Menteri BUMN I, Budi Gunadi Sadikin Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> Komisaris Utama: Bungaran Saragih Komisaris: Sukriansyah S. Latief Komisaris: Anwar Sanusi Komisaris: Anhar Adel Komisaris: Otok Kuswandaru Ketidakhadiran: <ol style="list-style-type: none"> Komisaris Independen: Widharma Raya Dipodiputro dan dikuasakan kepada Anwar Sanusi Komisaris: Farah Ratnadewi Indriani dan dikuasakan kepada Otok Kuswandaru Direksi <ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama: Aas Asikin Idat Wakil Direktur Utama: Imam Apriyanto Putro Direktur Teknologi: M. Djohan Safri Direktur Keuangan: Indarto Pamoengkas Direktur SDM dan Tata Kelola: Winardi Direktur Pemasaran: Achmad Tossin Sutawikara Direktur Transformasi Bisnis: Nugroho Christijanto Ketidakhadiran: <ul style="list-style-type: none"> Direktur Investasi: Gusrizal dan dikuasakan kepada Direktur Transformasi Bisnis Proxy of Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia Vice Minister of BUMN I, Budi Gunadi Sadikin Board of Commissioners: <ol style="list-style-type: none"> President Commissioner : Bungaran Saragih Commissioner : Sukriansyah S. Latief Commissioner : Anwar Sanusi Commissioner : Anhar Adel Commissioner : Otok Kuswandaru Absent: <ol style="list-style-type: none"> Independent Commissioner: Widharma Raya Dipodiputro and delegated to Anwar Sanusi Commissioner: Farah Ratnadewi Indriani and assigned to Otok Kuswandaru Board of Directors <ol style="list-style-type: none"> President Director: Aas Asikin Idat Vice President Director: Imam Apriyanto Putro Director of Technology: M. Djohan Safri Director of Finance: Indarto Pamoengkas Director of HC and Governance: Winardi Director of Marketing: Achmad Tossin Sutawikara Director of Business Transformation: Nugroho Christijanto Absent: <ul style="list-style-type: none"> Director of Investment Director: Gusrizal and delegated to the Director of Business Transformation

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS GMS Resolutions and Realization Results

Keputusan Resolution	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow Up
<p>Keputusan Mata Acara 1: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 PTPI. Agenda 1 Resolution: To approve the 2020 Work Plan and Budget (WP&B) of PTPI</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 24 Januari 2020. Realized through Notarial Deed No. 04 dated January 24, 2020.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 2: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 PTPI Agenda 2 Resolution: Approved the Work Plan and Budget for the 2020 Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) of PTPI</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 24 Januari 2020. Realized through Notarial Deed No. 04 dated January 24, 2020.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 3: Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2020. Agenda 3 Resolution: Approved and Ratified Management Contracts (the 2020 Key Performance Indicators) between the Board of Directors and the Board of Commissioners and shareholders</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 24 Januari 2020. Realized through Notarial Deed No. 04 dated January 24, 2020.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 4: Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicator</i>) antara Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2020. Agenda 4 Resolution: Approved and ratified Management Contracts (2020 Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners and shareholders</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 24 Januari 2020. Realized through Notarial Deed No. 04 dated January 24, 2020.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 5: Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran tingkat kesehatan PTPI Tahun 2020. Agenda 5 Resolution 5: Determined the Operational Aspect Indicators to measure the health level of PTPI in 2020</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 24 Januari 2020. Realized through Notarial Deed No. 04 dated January 24, 2020.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 6: Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi antar klasifikasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total nilai investasi, serta kepada Direksi untuk melakukan perubahan anggaran di dalam masing-masing klasifikasi tanpa mengubah total anggaran masing-masing klasifikasi. Agenda 6 Resolution 6: Authorized the Board of Commissioners and the Board of Directors to give approval on actions that might result in changes to the inter- classification investment budget with a maximum value of 10% (ten percent) of the total investment value; and authorized the Board of Directors to make changes to the budget in each classification without changing the total budget of each classification</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 24 Januari 2020. Realized through Notarial Deed No. 04 dated January 24, 2020.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 7: Menyetujui penerbitan obligasi berkelanjutan senilai Rp8.000.000.000.000 (delapan Triliun Rupiah) untuk refinancing pinjaman perbankan dan/atau obligasi PTPI dan/atau Entitas Anak. Di dalam pelaksanaannya, penerbitan dan penggunaan dana hasil obligasi agar dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Agenda 7 Resolution: Approved the issuance of sustainable bonds to the amount of Rp8,000,000,000 (eight Trillion Rupiah) for refinancing bank loans and/or bonds of PTPI and/or subsidiaries. In practice, the bond issuance and use of its proceeds are subject to approval from the Board of Commissioners.</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 24 Januari 2020. Realized through Notarial Deed No. 04 dated January 24, 2020.</p>

- RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019
- Annual GMS Approval of the Fiscal Year 2019 Annual Report

Hari/Tanggal Day/Date	: 4 Agustus 2020 August 4, 2020
Waktu Time	: 13.00 WIB
Tempat Place	: Ruang Rapat Kebomas Lt.3 & Ruang Rapat Guntung Lt.8 Kantor PT Pupuk Indonesia (Persero)
Kehadiran Attendance	: <ul style="list-style-type: none"> Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Imam Paryanto Dewan Komisaris: (Plt) Komisaris Utama: Anwar Sanusi Kehadiran secara virtual: <ol style="list-style-type: none"> Anhar Adel Widharma Raya dipodiputro Farah Ratnadewi Indriani Otok Kuswandaru Ketidakhadiran: - Direksi <ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama: Aas Asikin Idat Wakil Direktur Utama: Imam Apriyanto Putro Direktur Teknologi: M. Djohan Safri Direktur Keuangan: Indarto Pamoengkas Direktur SDM dan Tata Kelola: Winardi Direktur Pemasaran: Achmad Tossin Sutawikara Direktur Transformasi Bisnis: Nugroho Christijanto Direktur Investasi: Gusrizal Proxy of Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry Ministry of BUMN, Imam Paryanto Board of Commissioners: Acting President Commissioner: Anwar Sanusi Virtually present: <ol style="list-style-type: none"> Anhar Adel Widharma Raya dipodiputro Farah Ratnadewi Indriani Otok Kuswandaru Absent: - Board of Directors <ol style="list-style-type: none"> President Director: Aas Asikin Idat Vice President Director: Imam Apriyanto Putro Director of Technology: M. Djohan Safri Director of Finance: Indarto Pamoengkas Director of HC and Governance: Winardi Director of Marketing: Achmad Tossin Sutawikara Director of Business Transformation: Nugroho Christijanto Director of Investment: Gusrizal

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS GMS Resolutions and Realization Results

Keputusan Keputusan	Realisasi/Tindak Lanjut Realisasi/Tindak Lanjut
<p>Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui Laporan Tahunan Tahun buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia).</p> <p>Agenda 1 Resolution: Approved the Annual Report for Fiscal Year 2020 including the Oversight Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2019, and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended 31 December 2019 which had been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia).</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 4 Agustus 2020. Realized through Notarial Deed No. 01 dated August 4, 2020.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 2: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.</p> <p>Agenda 2 Resolution: Approved and ratified the Company's Partnership and Community Development Program report for the 2019 Financial Year.</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 4 Agustus 2020. Realized through Notarial Deed No. 01 dated August 4, 2020.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp3.641.754 juta (tiga Triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta Rupiah) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 26,733% atau Rp973.500 juta ditetapkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham; b. Sebesar 73,267% atau Rp 2.668.254 juta ditetapkan sebagai cadangan perseroan. • Dividen sebesar Rp 973.500 juta agar disetor kepada rekening bendahara umum negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. <p>Agenda 3 Resolution:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approved that of net profit for the 2019 Fiscal Year attributable to owners of the Company's Parent Entity, to the amount of Rp3,641,754 million (three Trillion six hundred forty one billion seven hundred fifty four million Rupiah): <ol style="list-style-type: none"> a. 26.733% or Rp973,500 million would be paid as cash dividend to shareholders b. 73.267% or Rp 2,668,254 million would be used as the company's reserves • The dividend of Rp 973,500 million would be deposited in the account of the state general treasurer no later than 1 (one) month after the date of the decision and depositing the dividend is subject to the provisions and laws and regulations 	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 4 Agustus 2020. Realized through Notarial Deed No. 01 dated August 4, 2020.</p>

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS GMS Resolutions and Realization Results

Keputusan Keputusan	Realisasi/Tindak Lanjut Realisasi/Tindak Lanjut
<p>Keputusan Mata Acara 4: Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja tahun buku 2019 akan ditetapkan tersendiri.</p> <p>Agenda 4 Resolution: The Salary and Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2020 and Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2019 would be determined later in a different occasion.</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 4 Agustus 2020. Realized through Notarial Deed No. 01 dated August 4, 2020.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 5: Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun buku 2020, dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p> <p>Agenda 5 Resolution: Appointed Public Accounting Firm (KAP) to audit the company's Consolidated Financial Statements and the Report on the Partnership Program and Community Development Program for Fiscal Year 2020</p>	<p>Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 4 Agustus 2020. Realized through Notarial Deed No. 01 dated August 4, 2020.</p>

Keputusan RUPS 2020

Sepanjang tahun 2020, Pemegang Saham mengeluarkan keputusan Pemegang Saham sebanyak 4 (empat) keputusan, yaitu:



Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS 2020 Resolutions and Realization of 2020 GMS Results

2020 GMS

In 2020, the General Meeting of Shareholders issued 4 (four) decrees, as follows:

Dasar Hukum Legal Basis	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PupukIndonesia, No.SK-13/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 Minister of State-Owned Enterprises as a PT Pupuk Indonesia (Persero) General Meeting of Shareholders Decree No.SK-13/MBU/01/2020 dated January 9 2020	<ul style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Komisaris Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Ony Suprihartono sebagai Komisaris; b. Yanuar Rizky sebagai Komisaris Independen. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Otok Kuswanda b. Farah Ratnadewi Indriani Menetapkan Anhar Adel, anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai Komisaris Independen. Dismissed with honor discharge the following as Commissioners of the Company: <ul style="list-style-type: none"> a. Ony Suprihartono as Commissioner; b. Yanuar Rizky as Independent Commissioner. Appointed the following as members of the Company's Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> a. Otok Kuswanda b. Farah Ratnadewi Indriani Appointed Anhar Adel, a member of the Company's Board of Commissioners as an Independent Commissioner. 	<p>Telah direalisasikan dan diaktakan melalui Akta Notaris No. 02-Tanggal 13 Januari 2020.</p> <p>Realized and notarized through Notarial Deed. 02 dated January 13, 2020.</p>
Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of State-Owned Enterprises as a PT PupukIndonesia (Persero) General Meeting of Shareholders Decree No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4 2020	<ul style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat namanama tersebut di bawah ini sebagai Komisaris Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Bungaran Saragih sebagai Komisaris Utama b. Sukriansyah Sultan Latief sebagai Komisaris c. Widharma Raya Dipodiputro sebagai Komisaris Independen d. Otok Kuswanda sebagai Komisaris e. Farah Ratnadewi Indriani sebagai Komisaris Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama b. Bambang Widianto sebagai Komisaris c. Suwandi sebagai Komisaris d. Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris e. Ari Dwipayana sebagai Komisaris f. Mustoha Iskandar sebagai Komisaris Independen Dismissed with honor the names below as Commissioners of the Company: <ul style="list-style-type: none"> a. Bungaran Saragih as President Commissioner b. Sukriansyah Sultan Latief as Commissioner c. Widharma Raya Dipodiputro as Independent Commissioner d. Otok Kuswanda as Commissioner e. Farah Ratnadewi Indriani as Commissioner Appointed the following as members of the Company's Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> a. Darmin Nasution as President Commissioner b. Bambang Widianto as Commissioner c. Kelvin as Commissioner d. Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner e. Ari Dwipayana as Commissioner f. Mustoha Iskandar as Independent Commissioner 	<p>Sudah direalisasikan dan diaktakan melalui Akta Notaris No 04 Tanggal 7 Agustus 2021.</p> <p>Realized and notarized through Notarial Deed. 04 dated August 7, 2020.</p>



Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS 2020

Resolutions and Realization of 2020 GMS Results

Dasar Hukum Legal Basis	Keputusan Resolution	Realisasi Realization																		
Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No.SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of State-Owned Enterprises as a PT Pupuk Indonesia (Persero) General Meeting of Shareholders Decree No.SK-263/MBU/08/2020 dated August 4 2020	<ul style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat namanama tersebut di bawah ini sebagai Direksi Perusahaan: <ol style="list-style-type: none"> Aas asikin Idat sebagai Direktur Utama Imam Apriyanto Putro sebagai Wakil Direktur Utama Achmad Tossin Sutawikara sebagai Direktur Pemasaran Mohamad Djohan Safri sebagai Direktur Teknologi Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut: Dismissed with honor the following as Directors of the Company: <ol style="list-style-type: none"> Asikin Idat as President Director Imam Apriyanto Putro as Vice President Director Achmad Tossin Sutawikara as Director of Marketing Mohamad Djohan Safri as Director of Technology Changed the position nomenclature for members of the Company's Board of Directors, as follows: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Semula Before</th> <th>Menjadi After</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>Direktur Produksi Director of Production</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Direktur Teknologi Director of Technology</td> <td>Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation</td> <td>Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Direktur Keuangan Director of Finance</td> <td>Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Direktur Investasi Director of Investment</td> <td>Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Semula Before	Menjadi After	1	-	Direktur Produksi Director of Production	2	Direktur Teknologi Director of Technology	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	3	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment	4	Direktur Keuangan Director of Finance	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment	5	Direktur Investasi Director of Investment	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment	
No.	Semula Before	Menjadi After																		
1	-	Direktur Produksi Director of Production																		
2	Direktur Teknologi Director of Technology	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation																		
3	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment																		
4	Direktur Keuangan Director of Finance	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment																		
5	Direktur Investasi Director of Investment	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment																		
	<ul style="list-style-type: none"> Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan: <ol style="list-style-type: none"> Nugroho Christijanto semula sebagai Direktur Transformasi Bisnis menjadi Wakil Direktur Utama Gusrizal semula sebagai Direktur Investasi menjadi Direktur Pemasaran Indarto Pamoengkas semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan & Investasi Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan: <ol style="list-style-type: none"> Bakir Pasaman sebagai Direktur Utama Panji Winanteya Ruky sebagai Direktur Transformasi Bisnis Bob Indiarjo sebagai Direktur Produksi Transferred the assignments of the following members of the Company's Board of Directors: <ol style="list-style-type: none"> Nugroho Christijanto from Director of Business Transformation to become Vice President Director Gusrizal from Director of Investment to become a Director of Marketing Indarto Pamoengkas from Director of Finance to became Director of Finance & Investment Appointed the following as members of the Company's Board of Directors: <ol style="list-style-type: none"> Bakir Pasaman as President Director Panji Winanteya Ruky as Director of Business Transformation Bob Indiarjo as Director of Production 																			



Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS 2020

Resolutions and Realization of 2020 GMS Results

Dasar Hukum Legal Basis	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No. SK-377/MBU/11/2020 tanggal 11 November 2020 Minister of State-Owned Enterprises as a PT Pupuk Indonesia (Persero) General Meeting of Shareholders Decree No. SK-377/MBU/11/2020 dated November 11, 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberhentikan dengan hormat namanama tersebut di bawah ini sebagai Direksi Perusahaan:<ul style="list-style-type: none">a. Gusrizal sebagai Direktur Pemasaranb. Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan & Investasi• Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan:<ul style="list-style-type: none">a. Gusrizal sebagai Direktur Pemasaranb. Eko Taufik Wibowo sebagai Direktur Keuangan & Investasi• Dismissed with honor the following as Directors of the Company:<ul style="list-style-type: none">a. Gusrizal as Director of Marketingb. Indarto Pamoengkas as Director of Finance & Investment• Appointed the following names as members of the Company's Board of Directors:<ul style="list-style-type: none">a. Gusrizal as Director of Marketingb. Eko Taufik Wibowo as Director of Finance & Investment	Telah direalisasikan dan diaktakan melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 23 November 2020. Realized and notarized through Notarial Deed. 02 dated November 23, 2020.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Keberadaan Dewan Komisaris tersebut, terutama mengacu pada Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugas, dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit serta Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus melalui proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan dinyatakan lulus. Proses tersebut untuk memastikan bahwa Komisaris Perusahaan memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dalam Bab II diatur mengenai persyaratan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, yang mencakup persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lain.

Suksesi: Nominasi dan Pengusulan, Pengangkatan serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020.

Anggota Dewan Komisaris PTPI wajib memenuhi persyaratan, kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Persyaratan kemampuan mencakup memahami masalah manajemen

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a corporate organ collectively assigned and responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors and ensuring that the Company implements GCG at all levels of the organization. The main references for the Board of Commissioners includes Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by supporting bodies including the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee and the GCG and Risk Management Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.

Board of Commissioners Criteria

All members of the Company's Board of Commissioners must take and pass the Fit and Proper Test. This process is to ensure that all members the Company's Board of Commissioners have the integrity, competence, reputation and experience and expertise they need to do their respective functions and duties.

Referring to the Minister of SOEs Regulation No. PER-10/MBU/10/2020 as an Amendment to the Minister of SOEs Regulation No. Per-02/MBU/02/2015 concerning the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of State Owned Enterprises, where Chapter II, regulates the requirements for the appointment of members of the Board of Commissioners, including the formal requirements, material requirements, and other requirements.

Succession: Nomination and Proposal, Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS through a transparent process, based on the principles of professionalism and Good Corporate Governance. The appointment of the Board of Commissioners is regulated in the Articles of Association, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 19 of 2003 concerning SOEs, Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises an amended by the Minister of SOE Regulation No. PER-10/MBU/10/2020 dated October 16, 2020.

Members of the PTPI Board of Commissioners must meet the requirements, capabilities and propriety as stipulated in the Company's Articles of Association. Capability requirements include understanding management issues

yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta memiliki waktu yang cukup dalam menjalankan tugas.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS. Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh RUPS, dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Beberapa tahapan seleksi calon anggota Dewan Komisaris sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Dewan Komisaris dalam RUPS, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjaringan sumber bakal calon dilakukan oleh Kementerian BUMN (Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber);
2. Evaluasi persyaratan formal dan persyaratan lain dilakukan oleh Deputi Teknis;
3. Penilaian pemenuhan persyaratan materil oleh tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN;
4. Uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga *professional* yang ditunjuk Pemegang Saham;
5. Penetapan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN/Keputusan RUPS.

Proses Pengangkatan Dewan Komisaris *Board of Commissioners' Appointment Process*

Proses Process	Pelaksana Executer
Penjaringan oleh Kementerian BUMN Candidate screening by SOE Ministry	Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis The SOE Minister, Secretary, Technical Deputy
Evaluasi Persyaratan Formal Formal Requirement Evaluation	Deputi Teknis Technical Deputy
Uji Kelayakan dan Kepatutan Fit and Proper Test	Lembaga profesional yang ditunjuk Pemegang Saham Professional Agency appointed by Shareholders
Penetapan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Appointment based on SOE Ministry Decree	Menteri The SOE Minister
Keputusan RUPS GMS Decision	Pemegang Saham Shareholders

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu dilakukan apabila yang bersangkutan, antara lain:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara, melakukan tindakan yang melanggar

related to the functions of one of the management duties, having adequate knowledge in the Company's business, and having sufficient time for their duties.

The appointment of Board of Commissioners Members shall become effective from the date of appointment, or the date specified in the GMS decision. Candidates for Board of Commissioners members shall sign an integrity statement/pact where they should state their ability to carry out their duties properly, and willingness to be dismissed at any time based on any reason considered appropriate by the GMS, and to not challenge or file a legal process in connection with such dismissal.

Stages for selection of candidates as Board of Commissioners members prior to being proposed by the Shareholders, who have the authority to propose the Board of Commissioners in the GMS, are as follows:

1. The selection of prospective candidates is carried out by the Ministry of BUMN (Minister of BUMN, Vice Minister of SOEs, Secretary to the Ministry of SOEs, Technical Deputy, and/or Deputy seeking prospective candidates from various sources);
2. Evaluation of the formal requirements and other requirements is carried out by the Technical Deputy;
3. Assessment of the meeting material requirements by a team formed by the Ministry of SOEs;
4. Fit and proper test by professional institutions appointed by the Shareholders;
5. Determination of the Board of Commissioners based on Ministry of SOEs Decree/GMS Decree.

A member of the Company's Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the GMS by stating the reasons. The referred member may be dismissed at any time if they:

1. Can no longer able to do their duties properly;
2. Are found to have violated the provisions of the Articles of Association and/or laws and regulations;
3. Are found to have been engaged in actions that caused harm to the Company and/or the State, taken actions

etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Anggota Dewan Komisaris;

4. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/ atau keuangan negara;
5. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan mengundurkan diri.

Selain alasan pemberhentian tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler).

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya. Masa jabatan tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Walaupun demikian, ketentuan itu dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris Tahun 2021

Di tahun 2021, tidak terdapat perubahan jumlah, komposisi, dan pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris. Dengan demikian, jumlah, komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

that violate ethics and/or propriety that they should have otherwise respected as a Board of Commissioners member;

4. Has been determined as a suspect or defendant by a competent authority in an act that is detrimental to SOEs and/or state finances;
5. Are a member found guilty by a court decision that has permanent legal force, and they resign.

In addition to the above reasons for dismissal, a Board of Commissioners member may be dismissed by the GMS due to other reasons deemed appropriate by the SOE Minister or the GMS for the interests and objectives of the Company. The decision is taken after the referred member is given a chance to defend themselves. The Board of Commissioners member can be dismissed through physical GMS resolutions and decisions of all Shareholders outside the GMS (Circular).

Board of Commissioners Term of Office

Board of Commissioners member are appointed for a period effective at the closing of or the date determined by GMS that appointed them and that ends at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS afterward. The term of office may not exceed a period of 5 (five) years, taking into account the articles of association and the laws and regulations in the Capital Market.

However, this provision shall not overrule the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends. After the term of office ends, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) more term of office.

The dismissal of a member of the Board of Commissioners shall be based on the facts, e.g. in cases where they:

1. Are no longer able to do their duties properly;
2. Fail to implement the provisions of the legislation and/ or the provisions of the Articles of Association;
3. Are engaged in actions that cause harm to the Company.

Number, Composition and Structure of the Board of Commissioners in 2021

In 2021, were no changes in the number, composition, and structure of the Board of Commissioners. The number, composition and structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2021 can be seen in the table below.

Komposisi Dewan Komisaris (Sejak 1 Januari 2021 hingga saat ini) Board of Commissioners Composition (From January 1, 2021 to present)

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No. BUMN No.SK-262/ MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) First (previously never served on the Company's Board of Commissioners)
Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/ MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) First (previously never served on the Company's Board of Commissioners)
Anhar Adel	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-280/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019 Ministry of SOEs Decree No. SK-280/MBU/11/2019 dated November 22, 2019	22 November 2019 s.d 9 Januari 2020 November 22, 2019-January 9, 2020	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) First (previously never served on the Company's Board of Commissioners)
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-13/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-13/ MBU/01/2020 dated January 9, 2020	9 Januari 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 January 9, 2020-GMS held in 2024	
Bambang Widianto	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/ MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 First
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/ MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 First
Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/ MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 First
Ari Dwipayana	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-262/ MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020-GMS held in 2025	Ke-1 First
Anwar Sanusi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No.SK-193/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Minister of SOE's as a GMS Decree No.SK-193/ MBU/06/2018 dated June 8, 2020	8 Juni 2018 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 June 8, 2020- GMS held in 2023	Ke-1 First

Independensi

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Dewan Komisaris Perusahaan, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Independency

In carrying out its functions, the Board of Commissioners shall act independently free from the interests of any party. The independency of the Company's Board of Commissioners refers specifically to the Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Aspek Independensi Independency Aspect	Darmin Nasution	Anhar Adel	Mustoha Iskandar	Anwar Sanusi	Bambang Widianto	Suwandi	Febrio Nathan Kacaribu	Ari Dwipayana
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Is not anyone who worked for, or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or oversee the activities of the Company over the last 6 (six) months	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Has no shares of the Company either directly or indirectly;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliations with the Commissioners nor Directors nor the Majority Shareholders of the Company;	✓	Staf Khusus Menteri BUMN (2019 - sekarang) the Minister of SOEs (2019 - present)	✓	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Secretary General of the Ministry of Manpower	Staf Khusus Wakil Presiden (Mei 2020 - sekarang) Vice President Special Staff (May 2020 - present)	Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Director General of Food Crops, Ministry of Agriculture	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (April 2020 - sekarang) Head of Fiscal Policy Agency Ministry of Finance (April 2020 - present)	Koordinator Staf Khusus Presiden RI (2019 - sekarang) Coordinator of Special Staff of the Republic of Indonesia (2019 - present)
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationship with the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Board Manual: Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual*, yakni pedoman anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan peran jabatannya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Manual* pertama kali disahkan dan diterbitkan pada tanggal 5 November 2012. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan, *Board Manual* telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 08/KEP.KOM/XII/2017 dan No. SK/DIR/064/2017 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pupuk Indonesia (Persero) pada tanggal 22 Desember 2017.

Board Manual: Board of Commissioners Work Procedures

In carrying out its functions, the Board of Commissioners refers to the Board Manual, which is the guideline for members of the Board of Commissioners in carrying out their positions in accordance with the articles of association and the prevailing laws and regulations. The Board Manual was first approved and published on November 5, 2012. In accordance with the Company development and needs, the Board Manual was updated based on the PTPI Board of Commissioners and Board of Directors Joint Decrees No. 08/KEP.KOM/XII/2017 and No. SK/DIR/064/2017 concerning the PT Pupuk Indonesia (Persero) BoC and BoD Work Guidelines, on December 22, 2017.

Adapun *Board Manual* yang mengatur tentang Dewan Komisaris, antara lain:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Konsep Umum Pengawasan Dewan Komisaris
3. Persyaratan Dewan Komisaris
4. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
5. Kewajiban Dewan Komisaris
6. Rangkap Jabatan
7. Etika Jabatan Anggota Dewan Komisaris
8. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi
9. Rapat Dewan Komisaris dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
10. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual*, tugas, tanggung jawab, wewenang serta kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai PTPI maupun usaha PTPI yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;

The Board Manual regulates the Board of Commissioners, and includes:

1. Functions
2. General Concept of Board of Commissioners' Supervision
3. Board of Commissioners' Criteria
4. Board of Commissioners' Duties and Authorities
5. Board of Commissioners' Obligations
6. Concurrent Positions
7. Position Ethics for Board of Commissioners Members
8. Competency Recognition and Improvement Program
9. Board of Commissioners' Meetings and Decision Making Mechanism
10. Board of Commissioners' Performance Assessment

Board of Commissioners' Duties, Responsibilities, Obligations and Authority

Based on the Board Manual, the Board of Commissioners' duties, responsibilities, authorities and obligations are as follows:

Board of Commissioners' Duties

The Board of Commissioners is tasked with supervising the management policies, the general management of PTPI and PTPI business conducted by the Board of Directors and providing advice to the Board, including supervising the implementation of the Long-Term Plan, Work Plan and Budget, and the provisions of the Articles of Association, and Decisions of General Meeting of Shareholders, as well as prevailing laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

Board of Commissioners' Authorities

The Board of Commissioners is authorized to:

1. View the books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and check the Company's assets;
2. Enter the yards, buildings and offices used by the Company;
3. Request clarification from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. Have knowledge of all policies and actions that have been, and will be, carried out by the Board of Directors;
5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the Board's knowledge to attend Board of Commissioners' meetings;
6. Appoint and dismiss the Secretary to the Board of Commissioners if deemed necessary;
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association provisions;
8. Establish other Committees besides the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities;

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Use the services of experts for certain matters, and within a certain period, at the expense of the Company, if deemed necessary;
10. Carry out the Company's management under certain circumstances for a certain period in accordance with the Articles of Association provisions;
11. Attend the Board of Directors meetings and provide views on the matters discussed; and
12. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders.

Board of Commissioners' Obligations

The Board of Commissioners is obliged to:

1. Give advice to the Board of Directors in running Company's management;
2. Examine and review and sign the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Corporate Budget prepared by the Board of Directors in accordance with the Articles of Association provisions;
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company Long-Term Plan and the Work Plan and Budget regarding the reasons the Board of Commissioners signed the RJP and WP&B;
4. Follow the development of the Company activities, provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important to the management of the Company;
5. Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are symptoms of a decline in the Company's performance;
6. Examine and review periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual reports;
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested;
8. Develop annual work programs to be included in the WP&B;
9. Establish an Audit Committee;
10. Propose a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders.
11. Make minutes of Board of Commissioners' meetings and keep copies thereof;
12. Report to the Company on their own and/or their families' ownership of shares in the Company and other companies;
13. Provide reports on the supervisory tasks conducted during the past fiscal year at the General Meeting of Shareholders;
14. Fulfill other obligations in the context of supervisory and advisory duties, as long as they do not conflict with statutory regulations, Articles of Association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Pembagian Tugas antar Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN masing-masing No. SK-83/MBU/06/2015 tanggal 4 Juni 2015, No. SK70/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret 2016, No. SK-160/MBU/07/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan No. SK-193/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang lebih baik, disepakati pembagian tugas Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/KEP.KOM/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia.

Hal tersebut dilakukan agar masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat lebih mendalam mengetahui kinerja dari masing-masing Entitas Anak yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja Perusahaan secara konsolidasi. Sehubungan dengan tidak adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris di tahun 2021, disepakati pembagian tugas Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

Pembagian Tugas Masing-masing Dewan Komisaris

Board of Commissioners Division of Duties

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas Duties
Darmin Nasution Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Melakukan koordinasi seluruh pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, serta merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Coordinate the entire implementation of the duties of the Board of Commissioners and chair the Audit Committee
Mustoha Iskandar Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua Komite Audit. • Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) khususnya Bidang Transformasi Bisnis serta terhadap Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. • Vice Chairman of the Audit Committee • Supervision and provision of consolidated advice and recommendations for PT Pupuk Indonesia, particularly in Business Transformation and for the subsidiary PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Anwar Sanusi Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite GCG dan PMR. • Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) khususnya Bidang Tata Kelola serta terhadap Anak Perusahaan yaitu PT ReKayasa Industri. • Chairman of the GCG and PMR Committee • Supervision and provision of consolidated advice and recommendations for PT Pupuk Indonesia (Persero), particularly in Governance and for the subsidiary, PT ReKayasa Industri.

In discharging its duties, each member of the Board of Commissioners is obliged to:

1. Comply with the Articles of Association, laws and regulations, and the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness.
2. Have good faith, full of prudence and responsibility in discharging their supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Board of Commissioners' Division of Duties

In accordance with the Company's Articles of Association and based on the Ministry of SOEs Decree No. SK-83/MBU/06/2015 dated June 4, 2015, No. SK-70/MBU/03/2016 dated March 29, 2016, No. SK-160/MBU/07/2016 dated July 26, 2016 and No. SK-193/MBU/06/2018 dated June 8, 2018, to improve the effectiveness of a better supervisory function, it was agreed to divide the duties of the Board of Commissioners in accordance with the Board's Decree No. 02/KEP.KOM/VII/2018 dated July 4, 2018 concerning the Division of Duties of the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Commissioners.

This division allows each member of the Board of Commissioners to have a deeper comprehension on the performance of subsidiaries that have indirect impacts on the Company's consolidated results. As there was no change in the composition of the Board of Commissioners in 2021, it was agreed that the division of duties of the Board of Commissioners is in accordance with the of the Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021 dated March 5, 2021.

Pembagian Tugas Masing-masing Dewan Komisaris

Board of Commissioners Division of Duties

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas Duties
Bambang Widianto Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Ketua I Komite GCG dan PMR. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI khususnya Bidang Investasi serta terhadap Anak Perusahaan yaitu PT Pupuk Kujang Cikampek. Vice Chairman I of the GCG and PMR Committee Supervision and provision of consolidated advice and recommendations for PTPI, particularly in Investment and for the subsidiary, PT Pupuk Kujang Cikampek.
Febrio Nathan Kacaribu Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Ketua II Komite GCG dan PMR. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI khususnya Bidang Keuangan serta terhadap 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu: 1. PT Pupuk Indonesia Logistik; 2. PT Pupuk Indonesia Energi. Vice Chairman II of the GCG and PMR Committee Supervision and provision of consolidated advice and recommendations for PTPI particularly in the Finance and for 2 (two) subsidiaries: 1. PT Pupuk Indonesia Logistik; 2. PT Pupuk Indonesia Energi.
Anhar Adel Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI khususnya Bidang Produksi serta terhadap Anak Perusahaan yaitu PT Pupuk Petrokimia Gresik. Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Supervision and provision of consolidated advice and recommendations for PTPI, particularly in Production and for the subsidiary, PT Pupuk Petrokimia Gresik.
Suwandi Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI khususnya Bidang Pemasaran serta terhadap 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu: 1. PT Pupuk Indonesia Pangan; 2. PT Pupuk Iskandar Muda Secretary of the Nomination and Remuneration Committee Supervision and provision of consolidated advice and recommendations for PTPI particularly in Marketing and for 2 (two) subsidiaries: 1. PT Pupuk Indonesia Pangan; 2. PT Pupuk Iskandar Muda.
Ari Dwipayana Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia khususnya Bidang Sumber Daya Manusia serta terhadap 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu: 1. PT Pupuk Kalimantan Timur; 2. PT Mega Eltra Secretary of the Nomination and Remuneration Committee Supervision and provision of consolidated advice and recommendations for PTPI particularly in Marketing and for 2 (two) subsidiaries: 1. PT Pupuk Indonesia Pangan; 2. PT Pupuk Iskandar Muda.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Perusahaan memiliki mekanisme program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Di sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pergantian susunan dan komposisi Dewan Komisaris, dengan demikian program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru tidak dilakukan.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris khususnya terkait fungsi pengawasannya. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Orientation Program for New Commissioners

The Company has an orientation program for new members of the Board of Commissioners to ensure that members of the Board of Commissioners can immediately contribute to the Company's performance. The Company orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to business units, Company facilities, reviews of Company documents or other programs deemed appropriate to the needs.

During 2021, there were no change in the structure and composition of the Board of Commissioners, thus the orientation program for new members of the Board of Commissioners was not carried out.

Board of Commissioners Competency Training and Development

The Company provides competency development programs for the Board of Commissioners to increase their insight and knowledge, especially regarding their supervisory function. The training and competency development activities the Board of Commissioners participated in 2021 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun di awal tahun. Adapun pelaksanaan program kerja di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Board of Commissioners Implementation of the Duties in 2021

During 2021, the Board of Commissioners carried out its duties and responsibilities in accordance with the work program prepared at the beginning of the year. The implementation of the work program in 2021 can be seen in the table below.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 Implementation of Duties in 2021

No.	Program Program	Kegiatan Activity
1	Pengawasan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Supervision	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan di Bidang Keuangan dan Program; • Kemitraan dan Bina Lingkungan; • Pengawasan di Bidang Produksi dan Teknik; • Pengawasan di Bidang Investasi dan SDM; • Pengawasan di Bidang Pemasaran; • Pengawasan di Bidang Hukum, Hubungan Kerjasama dan GCG. • Supervision in Finance and Partnership and Community Development Programs; • Supervision in Production and Engineering; • Supervision in investment and HC; • Supervision in Marketing; • Supervision in Legal, Cooperation Relations and GCG.
2	Kegiatan Rutin Routine Activities	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Internal Dewan Komisaris; • Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi; • Rapat bersama dengan Pemegang Saham (RUPS). • Board of Commissioners' Internal Meetings; • Board of Commissioners' meetings with the Board of Directors; • Meetings with Shareholders (GMS).
3	Kegiatan Non Rutin Non-routine Activities	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan Dewan Komisaris Anak Perusahaan; • Perjalanan dinas dalam negeri; • Perjalanan dinas luar negeri; • Pendidikan dan pelatihan; • Melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); • Mengikuti forum yang diselenggarakan oleh <i>International Fertilizer Association</i> (IFA); • Penyusunan Kajian Awal atas Isu Strategis yang dihadapi Perusahaan; • Program suksesi kandidat calon direksi perusahaan; • Lain-lain. • Meeting with the subsidiaries' Board of Commissioners; • Occupational domestic travels; • Overseas business trips; • Education and training; • Carried out Focus Group Discussion (FGD) activities; • Participation in forums organized by the International Fertilizer Association (IFA); • Preparation of Preliminary Studies on Strategic Issues faced by the Company; • Succession program for candidates for directors of the company; • Other activities.

Penilaian Kinerja organ dan Komite Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

Dasar Penilaian

Dasar penilaian terhadap organ di bawah Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas, baik dalam bentuk rapat untuk menyampaikan rekomendasi, pembahasan materi tertentu, maupun kegiatan reguler yang telah melekat pada fungsi. Selain itu, organ-organ tersebut juga melaksanakan penugasan lain yang berkenaan dengan fungsi Dewan Komisaris.

Performance Assessment of Supporting Bodies and Committees Under the Board of Commissioners

Basis of Assessment

The basis for assessing the bodies under the Board of Commissioners is by the implementation of their duties, either in meetings to make recommendations, through discussions of certain materials, or in regular activities attached to their function. In addition, the bodies also conduct other assignments related to the functions of the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris juga menjadikan rencana kerja organ di bawahnya sebagai dasar penilaian kinerja. Karena itu, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan rencana kerja tersebut selalu dilakukan secara berkala.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2021 diwujudkan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sebanyak 68 kali rapat yang terdiri dari rapat rutin kinerja bulanan maupun rapat non-rutin; membantu konsep surat/korespondensi Dewan Komisaris sebanyak 87 surat, menjadi penghubung (*liaison officer*) bagi Dewan Komisaris; serta memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun buku 2021, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik"

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit di tahun 2021 direalisasikan melalui program kerja yang telah direncanakan di awal tahun. Di sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melakukan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal; pengawasan kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP); telaah capaian kinerja Perusahaan; perjalanan dinas dalam rangka meninjau langsung lapangan; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Komite Audit sepanjang tahun buku 2021, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

Penilaian Kinerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Penilaian kinerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko diwujudkan melalui pelaksanaan program yang direncanakan di awal tahun. Komite ini juga telah melakukan pengawasan atas implementasi RKAP dan RJPP, sistem pengendalian internal Perusahaan, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, pengelolaan SDM, pengadaan, mutu dan layanan, pemantauan pengurusan Perusahaan dalam rangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, evaluasi atas Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan KPI individu Direksi, serta perjalanan dinas dalam rangka meninjau langsung lapangan.

Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko sepanjang tahun buku 2021, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

The Board of Commissioners also uses the work plans of the bodies under the Board as the basis for performance appraisal. Therefore, evaluation is always made and monitoring done on the implementation of the work plan.

Performance Assessment of the Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners performance appraisal in 2021 was realized through the convening of 68 Board of Commissioners' meetings consisting of regular monthly performance meetings and non-routine meetings; assisting in drafting 87 Board of Commissioners' letters/correspondence, and serving as a liaison officer for the Board of Commissioners; and providing information needed by the Board of Commissioners on a regular basis or at any time.

For the implementation of the duties carried out by the Secretary to the Board of Commissioners throughout fiscal year 2021, the Board of Commissioners gives an "Excellent" assessment.

Audit Committee Performance Assessment

The performance assessment of the Audit Committee in 2021 was realized through the work program planned at the beginning of the year. Throughout 2021, the Audit Committee reviewed the Internal Audit Unit Inspection Reports; supervised the performance of the Public Accounting Firm (KAP); reviewed of the Company's performance achievements; conducted official trips to have direct field observation; and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding their areas of responsibility.

For the implementation of the duties carried out by the Audit Committee throughout fiscal year 2021, the Board of Commissioners gives an "Excellent" assessment.

GCG and Risk Management Monitoring Committee Performance Assessment

The performance appraisal of the GCG and Risk Management Monitoring Committee was realized through the implementation of the program planned at the beginning of the year. The Committee has also supervised the execution of the Company's WP&B and RJPP, internal control system, risk management, IT systems HC management, procurement, quality and service, monitoring the Company's management to adhere to GCG principles, evaluation on Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and individual KPIs of the Board of Directors, and conducted official trips to have direct field observation.

For the implementation of the duties carried out by the GCG and Risk Management Monitoring Committee throughout fiscal year 2021, the Board of Commissioners gives an "Excellent" assessment.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi diwujudkan dengan kontribusinya terkait dengan pengembangan talenta di lingkungan Perusahaan. Komite tersebut merupakan *Talent Committee* untuk Direksi dan BOD-1 yang rekomendasinya disampaikan kepada Menteri BUMN melalui Deputi SDM, Teknologi dan Informasi.

Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan mandat yang diberikan, sehingga memberikan kontribusi besar bagi kesinambungan Perusahaan. Karena itu, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen serta menjaga "fairness". Komisaris Independen diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham minoritas termasuk Pemegang Saham publik dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria Penentuan Komisaris independen

Keberadaan Komisaris Independen di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen Perusahaan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Perusahaan;

Nomination and Remuneration Committee Performance Assessment

The performance appraisal of the Nomination and Remuneration Committee was realized by its contribution to talent development within the Company. The committee acts as a Talent Committee for the Board of Directors and BOD-1 whose recommendations are submitted to the Minister of SOEs through the Deputy for HC, Technology and Information.

Throughout 2021, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its mandate, thus making a major contribution to the sustainability of the Company. Therefore, the Board of Commissioners gives an "Excellent" assessment.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent Commissioner are members of the Board of Commissioners who have no financial, management, share ownership and/or familial relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or the controlling shareholder or with a company that may hinder or influence their position to act independently in accordance with the principles of GCG principles

The existence of an Independent Commissioners aims to create a more objective and independent climate and maintain "fairness". An Independent Commissioner should be able to create a balance between meeting the interests of the majority Shareholders and protecting the interests of the minority Shareholders including the public and other Stakeholders.

The appointment of an Independent Commissioner is regulated under OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Criteria for Independent Commissioners

The existence of Independent Commissioners in the Company must always ensure that the supervisory mechanism run effectively and in accordance with prevailing laws and regulations. The criteria for the Company's Independent Commissioners are in accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies:

1. Not someone who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;
2. Does not own the Company's shares either directly or indirectly;
3. Has no affiliated relationships with the Commissioners, Directors and Majority Shareholders of the Company;

4. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

Komisaris Independen PTPI telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana disebutkan di atas. Kepatuhan tersebut juga telah dinyatakan oleh masing-masing Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui setiap tahun.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, komposisi Dewan Komisaris Independen minimal 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen, atau 37,5% dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris sebanyak 8 orang. Dengan demikian, komposisi ini telah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku yang mensyaratkan jumlah Komisaris Independen minimal 30%.

4. Has no business relationship with the Company, either directly or indirectly.

The PTPI Independent Commissioners have met the independency criteria as mentioned above. Each Independent Commissioner has also stated this compliance by signing a statement letter, which is updated every year.

Composition and Membership of Independent Commissioners in the Company's Board of Commissioners Composition

OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 states that the composition of Independent Commissioners shall be at least 30% of the total members of the Board of Commissioners. At the end of 2021, the Company had 3 (three) Independent Commissioners, or 37.5% of the total 8 members of its Board of Commissioners. Thus, the composition has complied with the applicable provisions and/or regulations that require the number of Independent Commissioners to be at least 30%.

Komposisi Komisaris Independen

Composition of Independent Commissioners

Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	SK-262/MBU/08/2020	4 Agustus 2020- RUPS Tahun 2025 August 4, 2020- AGM 2025	Ke-1
Mustoha Iskandar	SK-262/MBU/08/2020	4 Agustus 2020- RUPS Tahun 2025 August 4, 2020- AGM 2025	Ke-1
Anhar Adel	SK-13/MBU/01/2020	9 Januari 2020- RUPS Tahun 2024 January 9, 2020- AGM 2024	Ke-1

Independensi Komisaris Independen

Dalam menjalankan fungsinya, Komisaris Independen terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Pernyataan independensi tersebut disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Aspek Independensi

Independency Aspect

Aspek Independensi Independency Aspect	Darmin Nasution	Mustoha Iskandar	Anhar Adel
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not someone who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not own the Company's shares either directly or indirectly	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliated relationships with the Commissioners, Directors and Majority Shareholders of the Company	✓	✓	Staf Khusus Menteri BUMN (2019-sekarang) Special Staff to the Minister of SOEs (2019- present)
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no business relationship with the Company, either directly or indirectly	✓	✓	✓

Independency of Independent Commissioner

In discharging their functions, an Independent Commissioner must be free from the interests of any party. The independency statement is presented in the table below.



Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Dalam menjalankan fungsinya, Komisaris Independen bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Komisaris Independen dapat dilihat dari telah ditandatanganinya Pakta Integritas yang diperbaharui setiap tahunnya.

Independent Commissioner Statement Letter

In carrying out their functions, the Independent Commissioners acts independently and are free from the interests of any party. The independency of the Independent Commissioner can be seen in the signing of the Integrity Pact which is renewed every year.



DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Hal ini mencerminkan wujud akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, auditor eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Kriteria dan Persyaratan Direksi

Direksi merupakan jabatan strategis di lingkungan Perusahaan yang akan menciptakan keunggulan pengelolaan dan daya saing Perusahaan. Dengan demikian, posisi Direksi membutuhkan kelengkapan persyaratan dan kompetensi tertentu. Di lingkungan Perusahaan, terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi. Persyaratan tersebut adalah:

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a company body that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the Company purposes and objectives, and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, and the GMS Resolutions.

The Board of Directors reports the implementation of its duties to the Shareholders through the GMS. This reflects a form of accountability in the Company's management in accordance with GCG principles. The Board of Directors' performance is evaluated by the Board of Commissioners who will report it to the GMS. The Board of Directors follows up on audit findings and recommendations from Internal Audit, external auditors and/or oversight results by other authorities.

Board of Directors' Criteria and Requirements

The Board of Directors is a strategic position within the Company that creates management excellence and competitive edges for the Company. Therefore, the Board of Directors is a position that requires certain criteria and competencies. At the Company, there are 3 (three) criteria that any prospective member of the Board must meet. The criteria are:

Persyaratan Formal

Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;
4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Persyaratan Lain

Persyaratan lain Direksi BUMN adalah sebagai berikut:

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat 1, dan DPRD Tingkat II;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/ atau kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

Anggota Direksi Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Formal Requirements

The Company's Board of Directors is a group of selected individuals capable of making legal actions, except those who within 5 (five) years prior to the appointment:

1. Were declared bankrupt;
2. Were members of a Board of Directors or members of a Board of Commissioners/ Supervisory Board found guilty of causing a state- owned enterprise and/or company to be declared bankrupt;
3. Were sentenced for committing a crime that caused harm to state finances, SOE, corporation, and/or related to the financial sector.

Material Requirements

The material requirements for the Board of Directors of State-Owned Enterprises (SOE) are as follows:

1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;
4. Experience;
5. Honesty;
6. Good Attitude; and
7. High dedication to advancing and developing the Company.

Other Criteria

Other criteria for SOE Board of Directors are as follows:

1. Shall not be an administrator of a Political Party and/or a candidate for legislature member and/or legislature member. A candidate referred to here is candidate/ member of central/provincial/municipal house of representatives;
2. Shall not be a candidate for district head/vice head and/or district head/vice head;
3. Is not currently serving as a Board of Directors member in the relevant SOE or 2 (two) consecutive periods;
4. d. Has dedication and willing to devote full time to perform their duties; and
5. Shall be physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can keep them from doing the duties as a SOE Board of Directors, to be proven by a health certificate from a physician.

Members of the Company's Board of Directors shall refrain from assuming a the following concurrent positions:

1. As a member of the Board of Directors of another SOE, Region Owned Enterprises (ROE), and Private Owned Enterprises;
2. As member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of another SOE;
3. Other structural and functional positions in a central and or regional government agency/institution;
4. Other positions stipulated under the provisions of the legislation, political party administrators and/or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Head/vice Regional Head;
5. Other positions that may cause a conflict of interest.

Sukses: Nominasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi dilakukan jika persyaratan formal, lainnya dan materiil sesuai dengan ketentuan yang ada.

Rincian tentang suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam bab ini.

Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya. Syarat yang menyertainya adalah tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Direksi Tahun 2021

Penetapan Direksi Perusahaan merupakan wewenang Pemegang Saham. Komposisi Direksi Perusahaan harus disesuaikan dengan tingkat kompleksitas Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, yang antara lain tercermin dalam struktur organisasi. Sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan Direksi akan lebih efektif, tepat dan cepat untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan.

Di tahun 2021, terdapat 2 (dua) kali perubahan komposisi dalam Direksi, yaitu, berdasarkan keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tanggal 16 Juli 2021, dimana diputuskan memberhentikan dengan hormat Eko Taufik Wibowo sebagai Direktur Keuangan dan Investasi, kemudian mengangkat Jamsaton Nababan sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha, dan Listiarini Dewajanti sebagai Direktur Keuangan & Investasi.

Succession: Nomination, Appointment and Dismissal of Directors

Board of Directors members are appointed and dismissed through a GMS pursuant to all applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association and Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 concerning the Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of Board of Directors of SOE. The appointment of Board of Directors members shall meet formal, material, and other requirements pursuant to all provisions that apply.

Details of the succession of Board of Directors can be found in the Nomination and Remuneration Function section of this chapter.

Board of Directors' Term of Office

Members of Board of Directors are appointed for a period that becomes effective at the closing of, or the date determined by, the GMS that appointed them; and ends at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS afterward. Other conditions are that the term of office may not exceed 5 (five) years, taking into account all applicable laws and regulations with due observance on the right of the GMS to dismiss the appointed members of Board of Directors at any time before their term of office ends.

When their term of office ends, the Board of Directors members may be reappointed by GMS for another term of office, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance on the laws and regulations in the Capital Market and on the right of the GMS to dismiss them at any time.

Number, Composition and Structure of the Board of Directors in 2021

The determination of the Company's Board of Directors is the authority of the Shareholders. The Company's Board of Directors composition must be adjusted to the level of complexity of the Company in carrying out its business activities, as reflected in the organizational structure. This ensures the decisions made by the Board of Directors will be more effective, precise and quick to achieve the Company's goals.

In 2021, there were 2 (two) changes to the Board of Directors composition, namely, based on a Minister of SOEs as the GMS decision on July 16, 2021, where it was decided to honorably dismiss Eko Taufik Wibisono as Director of Finance and Investment, and appoint Jamsaton Nababan as Director of Portfolio and Business Development, and Listiarini Dewajanti as Director of Finance & Investment.

Kemudian pada tanggal 22 Desember, berdasarkan keputusan Pemegang Saham secara sirkuler selaku RUPS, diputuskan pemberhentian dengan hormat Winardi sebagai Direktur SDM dan Tata Kelola, serta pemberhentian dengan hormat sehubungan dengan pengunduran diri Listiarini Dewajanti sebagai Direktur Keuangan & Investasi kemudian mengangkat Tina T. Kemala Intan sebagai Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko, dan Wono Budi Tjahyono sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.

Then on December 22, based on a Ministry of SOEs as the GMS decision, it was decided to honorably discharge Winardi as Director of HC and Governance, and honorably dismiss, in connection with their resignation, Listiarini Dewajanti as Director of Finance & Investment, and appoint Tina T. Kemala Intan as Director of HC, Governance and Risk Management, and Wono Budi Tjahyono as Director of Finance and Investment.

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2021 Chronology of Changes in the Board of Directors Composition in 2021

Periode 1 Januari s.d 16 Juli 2021 Period January 1 – July 16, 2021	Periode 16 Juli s.d 22 Desember 2021 Period July 16 – December 22, 2021	Periode 22 s.d 31 Desember 2021 Period December 22-31, 2021	Keterangan Explanation
Bakir Pasaman (Direktur Utama) (President Director)	Bakir Pasaman (Direktur Utama) (President Director)	Bakir Pasaman (Direktur Utama) (President Director)	-
Nugroho Christijanto (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	Nugroho Christijanto (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	Nugroho Christijanto (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	-
Winardi (Direktur SDM dan Tata Kelola) (Director of Human Capital and Governance)	Winardi (Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko) (Director of Human Capital, Governance, & Risk Management)		Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, Pemegang Saham mengubah nomenklatur Direktorat SDM & Tata Kelola menjadi Direktorat SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko. Berdasarkan surat yang sama, penugasan Winardi dialihkan menjadi Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko. Winardi tidak lagi menjabat sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Based on the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021, Shareholders changed the nomenclature of Directorate of Human Capital & Governance to become Directorate of Human Capital, Governance, & Risk Management. According to the same decree, Winardi's assignment was transferred to Director of Human Capital, Governance, & Risk Management. Winardi no longer served as Director of Human Capital, Governance, & Risk Management based on the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021.
Gusrizal (Direktur Pemasaran) (Director of Marketing)	Gusrizal (Direktur Pemasaran) (Director of Marketing)	Gusrizal (Direktur Pemasaran) (Director of Marketing)	-
Bob Indiarjo (Direktur Produksi) (Director of Production)	Bob Indiarjo (Direktur Produksi) (Director of Production)	Bob Indiarjo (Direktur Produksi) (Director of Production)	-
Panji W. Ruky (Direktur Transformasi Bisnis) (Director of Business Transformation)	Panji W. Ruky (Direktur Transformasi Bisnis) (Director of Business Transformation)	Panji W. Ruky (Direktur Transformasi Bisnis) (Director of Business Transformation)	-
Eko Taufik Wibowo (Direktur Keuangan & Investasi) (Director of Finance & Investment)			Eko Taufik Wibowo tidak lagi menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021. Eko Taufik Wibowo no longer serves as Director of Finance & Investment based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021.

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2021

Chronology of Changes in the Board of Directors Composition in 2021

Periode 1 Januari s.d 16 Juli 2021 Period January 1 – July 16, 2021	Periode 16 Juli s.d 22 Desember 2021 Period July 16 – December 22, 2021	Periode 22 s.d 31 Desember 2021 Period December 22-31, 2021	Keterangan Explanation
	Listiari Dewajanti (Direktur Keuangan & Investasi) (Director of Finance & Investment)		<ul style="list-style-type: none"> Listiari Dewajanti diangkat sebagai Direktur Keuangan & Investasi sejak 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Listiari Dewajanti tidak lagi menjabat Direktur Keuangan & Investasi. Listiari Dewajanti was appointed as Director of Finance & Investment on July 16, 2021 based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021. Based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021 Listiari Dewajanti no longer serves as the Director of Finance & Investment.
	Jamsaton Nababan (Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha) (Director of Portfolio & Business Development)	Jamsaton Nababan (Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha) (Director of Portfolio & Business Development)	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, Pemegang Saham membentuk Direktorat baru yaitu Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha. Berdasarkan surat yang sama, Jamsaton Nababan dipercaya untuk menjabat Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha.</p> <p>Based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021, the Shareholders formed a new Directorate, namely the Directorate of Portfolio & Business Development. Based on the same letter, Jamsaton Nababan was entrusted to serve as Director of Portfolio & Business Development.</p>
		Tina T Kemala Intan (Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko) (Director of HC, Governance and Risk Management)	<p>Tina T Kemala Intan diangkat sebagai Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko sejak 22 Desember 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Tina T Kemala Intan was appointed as Director of HC, Governance and Risk Management on December 22, 2021. Based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021</p>
		Wono Budi Tjahyono (Direktur Keuangan & Investasi) (Director of Finance & Investment)	<p>Wono Budi Tjahyono diangkat sebagai Direktur Keuangan & Investasi sejak 22 Desember 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Wono Budi Tjahyono was appointed as Director of Finance & Investment on December 22, 2021. Based on the Minister of SOEs as a GMS Decree No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021</p>

Susunan Direksi per 31 Desember 2021

Board of Directors Structure as of December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Bakir Pasaman	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 – 2025 GMS	Ke-1 First
Nugroho Christijanto	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-281/MBU/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-281/MBU/10/2018 dated Oktober 26, 2018	26 Oktober 2018 s.d 4 Agustus 2020 October 26, 2018-August 4, 2020	Ke-1 First
	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 August 4, 2020 – 2023 GMS	
Tina T Kemala Intan	Direktur SDM dan Tata Kelola Director of HC and Governance	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 December 22, 2021- 2026 AGMS	Ke-1 First
Gusrizal	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-377/MBU/11/2020 tanggal 11 November 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-377/MBU/11/2020 dated November 11, 2020	20 November 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 November 20, 2020 – 2025 GMS	Ke-2 Second
Bob Indiarso	Direktur Produksi Director of Production	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 – 2025 GMS	Ke-1 First
Panji W. Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 – 2025 GMS	Ke-1 First
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 December 22, 2021- 2026 GMS	Ke-1 First
Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Director of Portofolio & Business Development	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 July 16, 2021 - 2026 GMS	Ke-1 First

Independensi Direksi

Dalam menjalankan fungsinya, Direksi bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Direksi Perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan saham dan rangkap jabatannya, dimana tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham di Perusahaan dan perusahaan lain yang berhubungan dengan Perusahaan, serta tidak merangkap jabatan di perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan.

Independence of the Board of Directors

In carrying out its functions, the Board of Directors shall act independently free from the interests of any party. The independence of the Company's Board of Directors can be seen from their share ownership and concurrent positions, where no member of the Board of Directors owns shares in the Company and other companies related to the Company, and does not hold concurrent positions in companies that have business relations with the Company.

Pernyataan Independensi Direksi Statement of Independence by the Board of Directors

Aspek Independensi Independency Aspect	Bakir Pasaman	Nugroho Christijanto	Tina T Kemala Intan	Gusrizal	Bob Indiarto	Panji W. Ruky	Wono Budi Tjahyono	Jamsaton Nababan
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Is not anyone who worked for, or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or oversee the activities of the Company over the last 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Has no shares of the Company either directly or indirectly.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliations with the Commissioners nor Directors nor the Majority Shareholders of the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationship with the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Board Manual: Pedoman Kerja Direksi

Perusahaan memiliki Pedoman Kerja (*Board Manual*) Direksi yang digunakan sebagai pedoman umum bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanat Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut pertama kali disahkan dan diterbitkan pada tanggal 5 November 2012.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemutakhiran/revisi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. *Board Manual* yang baru tersebut saat ini sudah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 08/KEP. KOM/XII/2017 dan Nomor SK/ DIR/064/2017 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pupuk Indonesia (Persero), pada tanggal 22 Desember 2017.

Board Manual: Board of Directors Work Procedures

The Company has a Board of Directors' Board Manual that contains the general guidelines for members of the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners of in carrying out their functions and roles as bearers of the Company's mandate in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. The Board Manual was first approved and published on November 5, 2012.

In 2017 the Board Manual was updated/revised in accordance with the Company's development and needs. The renewed Board Manual was ratified through a Joint Decrees of the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Commissioners and Board of Directors No: 08/KEP. KOM/XII/2017 and No: SK/DIR/064/2017 concerning the Board Manual for the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Commissioners and Board of Directors, on December 22, 2017.

Adapun *Board Manual* yang mengatur tentang Direksi, antara lain:

1. Fungsi Direksi;
2. Persyaratan Direksi;
3. Tugas dan Wewenang Direksi;
4. Tata Laksana Kewenangan Direksi;
5. Kewajiban Direksi;
6. Rangkap Jabatan;
7. Etika Jabatan Anggota Direksi;
8. Program Pengenalan Dan Peningkatan Kompetensi;
9. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
10. Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
11. Rapat Direksi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
12. Penilaian Kinerja Direksi.

Tugas Direksi

Tugas yang menjadi kewajiban Direksi sesuai dengan yang tercantum dalam *Board Manual* adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi-transparansi kemandirian-akuntabilitas-pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Direksi berwenang untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan.
 - b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
 - c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
 - d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

The Board Manual regulates the Board of Directors, and includes:

1. Board of Directors' Function;
2. Board of Directors' Criteria;
3. Board of Directors' Duties and Authorities;
4. Board of Directors' Governance Procedures;
5. Board of Directors' Obligations;
6. Concurrent Positions;
7. Ethics for Board of Directors' Members;
8. Orientation program and Competency Development Program;
9. Company's Long-term Plan (RJPP);
10. Company's Work Plan and Corporate Budget (WP&B);
11. Board of Directors' Meetings and Decision-Making Mechanism;
12. Board of Directors' Performance Assessment.

Board of Directors' Duties

The Board of Directors' duties as stated in the Board Manual are as follows:

1. The Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to the Company's management for the benefit of the Company and in accordance with the purpose and objectives of the Company, and for representing the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with restrictions as regulated in statutory regulations, Articles of Association and/or General Meeting of Shareholders' Decisions;
2. In performing its duties, the members of the Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, and fairness;
3. In carrying out the duties referred to in point (1), the Board of Directors is authorized to:
 - a. Establish Company management policies;
 - b. Regulate the transfer of authority of the Board of Directors to any one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company inside and outside the court;
 - c. Regulate the transfer of authority of the Board of Directors to any one or several Company employees, individually or jointly or to others, to represent the Company inside and outside the court;
 - d. Regulate the Company's employment provisions including the determination of salaries, pensions or retirement benefits and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations, with the provisions for salaries, pensions or retirement benefits and other income for employees exceeding the specified legislative obligations, after prior approval from the GMS;

- e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
 - g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Entitas Anak dan/atau perusahaan patungan.
 - i. Menetapkan kebijakan terhadap Entitas Anak di bidang-bidang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- e. Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's employment and prevailing laws and regulations;
 - f. Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
 - g. Perform all actions and other acts regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties, and/or other parties with the Company and representing the Company inside and outside the court about all matters and all events, with limitations as regulated in legislative regulations, Articles of Association and/or General Meeting of Shareholders' decisions;
 - h. Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners of a Subsidiary and/or a joint venture;
 - i. Establish policies for the Subsidiaries in areas stipulated in the Articles of Association.

Kewajiban Direksi

Kewajiban Direksi sebagaimana tertuang dalam *Board Manual* adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Board of Directors' Obligations

The Board of Directors' obligations as set out in the Board Manual are as follows:

1. Undertake and ensure the realization of the Company's business and activities in accordance with the purpose and objectives and business activities;
2. Prepare on-time Company Long-Term Plan, Work Plan and Budget, and amendments and submit to the Board of Commissioners and Shareholders for GMS approval;
3. Provide an explanation to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Corporate Budget;
4. Keep a Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Board of Directors' Meetings;
5. Prepare an Annual Report as a form of accountability for the Company's management, as well as the Company's financial documents as referred to in the law on Company Documents;
6. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit to Public Accountants to be audited;
7. Submit the Annual Reports, including Financial Statements, to the GMS for approval and ratification, as well as reports on the Company's rights not recorded in books, including the results of receivables' write-offs;
8. Provide explanations to the GMS regarding the Annual Report;
9. Submit the Balance Sheet and Income Statement that has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the laws and regulations;

10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
 11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5), dan dokumen Perusahaan lainnya.
 12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 11).
 13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
 14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
 15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
 16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
 17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
 18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Submit reports on changes in the Shareholders, BoD and BoC composition to the Minister in charge of Law and Human Rights;
 11. Maintain a List of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners' Meetings and Minutes of Board of Directors' Meetings, Annual Reports and Company financial documents as referred to in items 4) and 5), and other Company documents;
 12. File the Company's place of domicile: the List of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners' Meetings and Minutes of Board of Directors' Meetings, Annual Report and Company financial documents and other Company documents as referred to in item 11);
 13. Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision;
 14. Provide periodic reports in the manner and time according in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;
 15. Prepare the Company's organization structure complete with details and duties;
 16. Provide explanations on all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;
 17. Prepare and establish a blueprint for the Company's organization;
 18. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and those determined by the GMS based on the laws and regulations

Pembagian lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi melakukan pembagian tugasnya secara masing-masing yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi berjalan efektif dan efisien. Adapun untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, sebagai berikut:

Division of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In carrying out their duties, the Board of Directors has divided the duties individually with the aim that the duties and responsibilities of each Board of Directors runs effectively and efficiently. The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are determined as follow:

Pembagian Tugas Masing-masing Direksi Board of Directors' Individual Division of Duties

Direksi Board of Directors	Tugas Duty
Bakir Pasaman Direktur Utama President Director	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir tugas-tugas yang dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Wakil Direktur Utama, Direktur Produksi, Direktur Keuangan dan Investasi, Direktur SDM & Tata Kelola, Direktur Pemasaran, dan Direktur Transformasi Bisnis dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan sesuai dengan ketentuan <i>Job Description</i> (uraian jabatan), Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. • Menetapkan dan memutuskan arah dan kebijakan strategis Perseroan serta menetapkan visi, misi dan nilai-nilai korporasi bagi Anak Perusahaan Perseroan ("Anak Perusahaan"), serta <i>general guideline</i> untuk memenuhi kepentingan seluruh <i>stakeholder</i>. • Mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan Sistem <i>Management</i> Terpadu untuk menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh manajemen Anak Perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. • Mengoptimalkan tingkat pendapatan dan laba perusahaan serta menghasilkan manfaat (<i>benefit</i>) bagi seluruh <i>stakeholders</i> perusahaan, sesuai dengan visi, misi, rencana dan strategi perusahaan. • Mengarahkan dan menetapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan jalannya kegiatan operasional dan pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan kebijakan dan peraturan dan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. • Mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan dalam pengembangan program <i>community development</i>, agar sesuai dengan kebijakan dan keputusan pemerintah, visi, misi dan strategi perusahaan. • Mengarahkan dan menetapkan kebijakan bidang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan target perusahaan. • Menetapkan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, asumsi dan parameter anggaran Korporasi dan Anak Perusahaan, sehingga visi dan misi perusahaan tercapai. • Mengkoordinasikan dan menetapkan arah dan kebijakan, serta standarisasi & harmonisasi bidang Keuangan, Pemasaran, Logistik dan Distribusi, Investasi, Penelitian dan Pengembangan, Produksi & Pemeliharaan, Perhitungan <i>overhead cost</i>, Pengadaan, Pengelolaan Aset, SDM, kepatuhan (<i>compliance</i>) dan Pengembangan <i>Human Capital Management</i> bagi Anak Perusahaan agar berjalan sesuai dengan strategi untuk mencapai target-target perusahaan yang telah ditetapkan. • Menentukan arah dan kebijakan program-program peningkatan <i>capital expenditure</i> untuk mendukung pengembangan Anak Perusahaan pada taraf yang optimal guna efisiensi perusahaan. • Menetapkan arah dan kebijakan penetapan <i>Statement of Corporate Intent</i>, <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) bagi Anak Perusahaan serta besaran dividen Anak Perusahaan agar tercipta keadilan dan sinergi yang baik bagi seluruh <i>holding</i>. • Coordinate the duties of Vice President Director, Director of Production, Director of Finance and Investment, Director of HC & Governance, Director of Marketing, and Director of Business Transformation in discharging their respective duties to manage the Company in accordance with the provisions of their respective Job Description, Articles of Association and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders. • Determine and decide the strategic direction and policies of the Company, set the vision, mission and corporate values for the Company's subsidiaries, and set general guidelines to meet the interests of all stakeholders. • Direct, establish, and control the Integrated Management System to serve as a guideline and reference for all Subsidiary management in achieving the Company's objectives. • Optimize the company's income and profit levels and generate benefits for all company stakeholders, in accordance with the Company's vision, mission, plans and strategies. • Direct and establish an internal control system to ensure the Company's operations and achievement comply with the policies and all applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget. • Direct, determine, and control policies in the development of community development programs to ensure compliance with government policies and decisions, and the Company's vision, mission and strategies. • Direct and determine policies in the field of human resource management and organizational development in accordance with the development and needs of Subsidiaries to support the achievement of the company's vision, mission and targets. • Establish the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget, assumptions and budget parameters and those of Subsidiaries to ensure the Company's vision and mission are achieved. • Coordinate and set directives and policies, and standardize & harmonize Finance, Marketing, Logistics and Distribution, Investment, Research and Development, Production & Maintenance, Overhead cost calculation, Procurement, Asset Management, HR, compliance and Human Development Capital Management for Subsidiaries in order for them to run according to the strategy to achieve the Company's stated targets. • Determine the directives and policies of capital expenditure programs to optimally support the development of Subsidiaries for the Company to run more efficiently. • Determine the directives and policy for determining the Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicators (KPI) for Subsidiaries and the amount of dividends to be paid by Subsidiaries in order to create fairness and good synergy for all holdings.

Pembagian Tugas Masing-masing Direksi

Board of Directors' Individual Division of Duties

Direksi Board of Directors	Tugas Duty
	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) <i> Holding</i> maupun Anak Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya seluruh kepentingan <i> stakeholders</i> Perusahaan. • Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota dewan komisaris dan para pemegang saham serta laporan tahunan kepada RUPS. • Membuat laporan tahunan serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. • Menjalin dan membina hubungan yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintahan dan asosiasi profesi yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan di di bidang industri pupuk untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis Perusahaan. 16.Koordinasi dan integrasi program-program Korporasi <i> Holding</i> dan Anak Perusahaan untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis Perusahaan. • Convene General Meetings of Shareholders (GMS) of the Holding and Subsidiaries to ensure all the interests of the Company's stakeholders are addressed and met. • Give an explanation of all matters asked or requested by BoC members and the shareholders and submit the Company's annual report to the General Meeting of Shareholders. • Prepare annual reports and other reports in accordance with applicable regulations. • Establish and maintain healthy and harmonious relationships with government agencies and professional associations pertaining to the Company's core business in the fertilizer industry to ensure the Company's work plans and strategic programs are aligned.
<p>Nugroho Christijanto Wakil Direktur Utama Vice President Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengarahkan, mengkoordinir, dan mengawasi serta bertanggung jawab atas tugas-tugas Direktur Produksi dan Direktur Pemasaran, sesuai dengan <i> Job Description</i> (uraian jabatan), Anggaran Dasar dan atau keputusan RUPS, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, kebijakan/ ketentuan peraturan perundang-undangan. • Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap Proyek-Proyek dan Pengembangan Bisnis (investasi pengembangan dan investasi penyertaan) yang menjadi tanggung jawab SEVP Pengembangan Bisnis sesuai dengan <i> Job Description</i> (uraian jabatan), setelah rencana investasi pengembangan dan investasi penyertaan tersebut disetujui oleh Direktur Keuangan & Investasi. • Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab untuk memastikan jalannya kegiatan Indonesia Fertilizer Research Institute sesuai dengan kebijakan dan peraturan dan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. • Membantu Direktur Utama dalam menetapkan dan memutuskan arah dan kebijakan strategis • Setiap bidang serta menetapkan visi, misi dan nilai – nilai korporasi bagi Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (“Anak Perusahaan”), serta <i> general guideline</i> untuk memenuhi kepentingan seluruh <i> stakeholder</i>. • Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan Sistem Manajemen Terpadu untuk menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh manajemen Anak Perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. • Membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan kelangsungan usaha perusahaan untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan dan laba perusahaan serta menghasilkan manfaat (<i> benefit</i>) bagi seluruh <i> stakeholders</i> perusahaan, sesuai dengan visi, misi, rencana dan strategi perusahaan. • Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan dan menetapkan kebijakan bidang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan target perusahaan. • Direct, coordinate, supervise, and superintend the duties of the Production Director and Marketing Director, in accordance with the respective Job Descriptions, the Company's Articles of Association and/or decisions of the General Meeting of Shareholders, Corporate Budget Work Plan, Long Term Plan, policies/the provisions of the legislation. • Direct, coordinate, supervise, and superintend Projects and Business Development (Development investment and Investment participation) which are the responsibility of the SEVP Business Development in accordance with the respective Job Description (position description), after the development investment plan and investment participation are approved by the Director of Finance & Investment. • Direct, coordinate, supervise and superintend activities off Indonesia Fertilizer Research Institute to ensure they comply with the policies and regulations and laws, adhere to the Company's Articles of Association and Long Term Plan and Work Plan and Budget. • Assist the President Director in setting and deciding strategic directions and policies for each area of business as well as establishing the vision, mission and corporate values of the subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) (the “Subsidiary”), and general guidelines to ensure the interests of all stakeholders are addressed and met. • Assist the President Director in directing, establishing, and controlling the Integrated Management System to serve as a guideline and reference for all Subsidiary management in achieving the Company's objectives. • Assist the President Director in implementing the Company's business sustainability to optimize income and profit levels and generate benefits for all the Company's stakeholders, in accordance with the Company's vision, mission, plans and strategies. • Assist the President Director in directing and setting policies in human resource management and organizational development according to the development and needs of the Subsidiaries to help achieve the Company's vision, mission and targets.

Pembagian Tugas Masing-masing Direksi Board of Directors' Individual Division of Duties

Direksi Board of Directors	Tugas Duty
	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Direktur Utama dalam menetapkan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, asumsi dan parameter anggaran Korporasi dan Anak Perusahaan, sehingga visi dan misi perusahaan tercapai. • Membantu Direktur Utama dalam menetapkan arah dan kebijakan, serta standarisasi & harmonisasi bidang Keuangan, Pemasaran, Logistik dan Distribusi, Investasi, Penelitian dan Pengembangan, Produksi & Pemeliharaan, Perhitungan <i>overhead cost</i>, Pengadaan, Pengelolaan Aset, SDM dan Pengembangan <i>Human Capital Management</i> bagi Anak Perusahaan agar berjalan sesuai dengan strategi untuk mencapai target-target perusahaan yang telah ditetapkan. • Membantu Direktur Utama dalam menentukan arah dan kebijakan program - program peningkatan <i>capital expenditure</i> untuk mendukung pengembangan Anak Perusahaan pada taraf yang optimal guna efisiensi perusahaan. • Membantu Direktur Utama dalam menetapkan arah dan kebijakan penetapan <i>Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicator (KPI)</i> bagi Anak Perusahaan serta besaran dividen Anak Perusahaan agar tercipta keadilan dan sinergi yang baik bagi seluruh PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perseroan"). • Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan RUPS Perseroan maupun Anak Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya seluruh kepentingan <i>stakeholders</i> perusahaan. • Membantu Direktur Utama dalam memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota dewan komisaris dan para pemegang saham serta laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. • Membantu Direktur Utama dalam membuat laporan tahunan serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. • Membantu Direktur Utama dalam menjalin dan membina hubungan yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintahan dan asosiasi profesi yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan di bidang industri pupuk untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis perusahaan. • Membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan Koordinasi dan integrasi program-program Korporasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis perusahaan. • Mewakili Perseroan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan penugasan dari Direktur Utama. • Assist the President Director in setting the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, assumptions and budget parameters and those of the Subsidiaries to ensure that the Company's vision and mission are achieved. • Assist the President Director in setting directions and policies, and pursuing standardization & harmonization in Finance, Marketing, Logistics and Distribution, Investment, Research and Development, Production & Maintenance, Overhead cost calculation, Procurement, Asset Management, HR and Human Capital Management Development for the Subsidiaries to run according to the strategy to achieve the Company's stated targets. • Assist the President Director in determining the directives and policies of programs to increase capital expenditure to optimally support the development of Subsidiaries in order for the Company to run efficiently. • Assist the President Director in setting the directives and policy of establishing the Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicators (KPI) for Subsidiaries and the amount of dividends that the Subsidiaries need to pay in order to create fairness and good synergy for all PT Pupuk Indonesia (Persero) (the "Company") . • Assist the President Director in convening the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company and those of its Subsidiaries to ensure all the interests of the company's stakeholders are addressed and met. • Assist the President Director in presenting an explanation of all matters asked or requested by members of the BoC and the shareholders and in submitting the annual report to the General Meeting of Shareholders. • Assist the President Director in making annual reports and other reports in accordance with applicable regulations. • Assist the President Director in establishing and fostering healthy and harmonious relations with government agencies and professional associations pertaining to the Company's core business in the fertilizer industry to ensure the Company's work plans and strategic programs are aligned. • Assist the President Director in implementing Coordination and integration amongst the Company's and the Subsidiaries' Corporate programs to ensure the Company's work plans and strategic programs are aligned. • Represent the Company and do other other duties based on assignments given by the President Director.

Pembagian Tugas Masing-masing Direksi

Board of Directors' Individual Division of Duties

Direksi Board of Directors	Tugas Duty
<p>Tina T Kemala Intan Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Risk Management, Governance and Human Resource Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat SDM & Tata Kelola PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perseroan") di bidang <i>Human Capital, Learning & Development Center</i>, serta <i>Corporate Services & PKBL</i> sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang sesuai ketentuan yang berlaku. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan <i>Human Capital</i> bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan untuk memastikan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien serta berorientasi pada produktivitas dan nilai tambah bagi pemegang saham. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan Bidang <i>Corporate Service & PKBL</i> bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan Bidang <i>Learning & Development Center</i> bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan untuk memastikan proses pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan pengembangan perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan Bidang Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan terkait dengan proyek strategis yang meliputi proyek <i>Creating Share Value (CSV)</i>, Proyek Implementasi Budaya Perusahaan, dan proyek Organisasi & <i>Talent</i> di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and superintend the tasks and work under the Directorate of Human Resources & Governance of PT Pupuk Indonesia (Persero) (the "Company") in the fields of Human Capital, Learning & Development Center, as well as Corporate Services & PKBL in accordance with the provisions set out in the WP&B and long-term plans in accordance with applicable regulations. Direct, coordinate, supervise, and superintend the determination of direction and policies of Human Capital of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries to ensure effective and efficient management of Human Resources towards productivity-oriented operations and give added values to the shareholders. Direct, coordinate, supervise, and superintend the determination of direction and policies of the Corporate Service & PKBL Sector of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries in accordance with applicable regulations to help the Company run seamless operations both in the short term and long terms. Directs, coordinates, supervises, and is responsible for determining the direction and policies of the Risk Management Sector of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries to support the smooth running of the Company's business in the short and long term. Direct, coordinate, supervise, and superintend work related to strategic projects which cover Creating Share Value (CSV) projects, Corporate Culture Implementation Projects, and Organization & Talent projects within PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries to help the Company run seamless operations in both the short and long terms.
<p>Gusrizal Direktur Pemasaran Director of Marketing</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) di bidang <i>Strategic Marketing</i> dan <i>Marketing Operation</i> sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan pemerintah. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang <i>Marketing Operation</i> yang meliputi <i>Logistic Optimization, PSO Planning Management, PSO Wilayah 1, PSO Wilayah 2</i> dan <i>Commercial Marketing</i> PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek strategis di bawah Direktorat Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero). Direct, coordinate, supervise, and superintend the tasks and work under the Marketing Directorate of PT Pupuk Indonesia (Persero) in the field of Strategic Marketing and Marketing Operations in accordance with the provisions set out in the WP&B as well as long-term plans and government regulations. Direct, coordinate, supervise, and superintend the setting of directions and policies in the field of Marketing Operations which cover Logistic Optimization, PSO Planning Management, PSO Region 1, PSO Region 2 and Commercial Marketing of PT Pupuk Indonesia (Persero) in accordance with applicable regulations to help the Company run seamless operations in both the short and long terms. Direct, coordinate, supervise, and superintend the implementation of strategic projects under the Marketing Directorate of PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pembagian Tugas Masing-masing Direksi Board of Directors' Individual Division of Duties

Direksi Board of Directors	Tugas Duty
Bob Indiarto Direktur Produksi Director of Production	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Produksi PT Pupuk Indonesia (Perseroan) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka Panjang serta ketentuan pemerintah. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bidang Operasi dan Produksi di lingkungan Perseroan dan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bidang Pengadaan yang mencakup pengadaan strategis dan pengadaan operasional di PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Direct, coordinate, supervise, and superintend the duties tasks and work under the Production Directorate of PT Pupuk Indonesia (the Company) in accordance with the provisions set out in the Company's WP&B and Long-term plan, and government regulations. Direct, coordinate, supervise, and superintend the duties and work in the Operations and Production of the Company to increase productivity and efficiency in accordance with applicable regulations to help the Company run seamless operations both in the short and long terms. Direct, coordinate, supervise, and superintend the tasks and work in Procurement which includes strategic procurement and operational procurement at PT Pupuk Indonesia (Persero) in accordance with applicable procedures and provisions to help the Company run seamless operations both in the short and long terms.
Panji W. Ruky Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Transformasi Bisnis Perseroan di bidang Perencanaan Strategis dan Transformasi Bisnis, serta TI untuk Perseroan dan Anak Perusahaan sesuai KPI dari Pemegang Saham, RKAP maupun RJPP. Bertanggung jawab untuk Menyusun arah dan kebijakan di bidang TI Perseroan dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang Perencanaan Strategis dan Tata Kelola TI, Pengembangan TI, Operasional dan Layanan TI sesuai KPI dari Pemegang Saham, RKAP maupun RJPP. Bertanggung jawab untuk Menyusun arah dan kebijakan di bidang Perencanaan Strategis, Transformasi Bisnis Perseroan, serta mengarahkan Perencanaan Strategis dan Transformasi Bisnis Anak Perusahaan sesuai dengan KPI dari Pemegang Saham, RKAP maupun RJPP. Superintend the implementation of duties and work under the Directorate of Business Transformation of the Company in the field of Strategic Planning and Business Transformation, as well as IT for the Company and its Subsidiaries according to the KPI from the Shareholders, WP&B and RJPP. Superintend the development of directions and policies in the IT sector of the Company and its Subsidiaries covering the areas of Strategic Planning and IT Governance, IT Development, Operations and IT Services according to the KPI from the Shareholders, WP&B and RJPP. Superintend the formulation of directions and policies in the field of Strategic Planning, Business Transformation of the Company, as well as directing Strategic Planning and Business Transformation of Subsidiaries in accordance with the KPI of the Shareholders, WP&B and RJPP.
Wono Budi Tjahyono Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance and Investment	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Keuangan & Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) di bidang Keuangan dan Perbendaharaan, Akuntansi dan Kinerja korporat, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan pemerintah. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang Keuangan dan Perbendaharaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang perbankan dan perbendaharaan, asuransi dan perpajakan, dan verifikasi dan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang Akuntansi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang akuntansi umum dan KPI dan akuntansi biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and superintend the duties and work under the Directorate of Finance & Investment of PT Pupuk Indonesia (Persero) in Finance and Treasury, Accounting and Corporate Performance, in accordance with the provisions set out in the Company's WP&B and long-term plans, and government regulations. Direct, coordinate, supervise, and superintend the setting of directions and policies in Finance and Treasury of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries covering banking and treasury, insurance and taxation, and verification and collection in accordance with applicable regulations to help the Company run seamless operations both in the short and long term. Direct, coordinate, supervise, and superintend the duties and work in the Finance and Treasury PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries covering general accounting and KPI and cost accounting in accordance with applicable regulations to help the Company run seamless operations both in the short and long term.

Pembagian Tugas Masing-masing Direksi

Board of Directors' Individual Division of Duties

Direksi Board of Directors	Tugas Duty
	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang Kinerja Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang pengelolaan risiko finansial, anggaran, dan pelaporan dan Analisis kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan arah dan kebijakan di bidang Pengembangan Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai kewenangan Direksi yang mencakup bidang pelaksanaan investasi rutin, pelaksanaan investasi pengembangan, dan pengelolaan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan arah dan kebijakan di bidang Portofolio Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai kewenangan Direksi yang mencakup bidang restrukturisasi Anak Perusahaan dan afiliasi serta sinergi dan kinerja portofolio afiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direct, coordinate, supervise, and superintend the setting of directions and policies in the Corporate Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries which cover financial risk management, budgeting, and reporting and performance analysis in accordance with applicable regulations to help the Company run seamless operations both in the short and long term. Coordinate and supervise the implementation of directions and policies in the Business Development of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries according to the BoD's authority which cover routine investment implementation, development investment implementation, and investment management in accordance with applicable regulations to help the Company run seamless operations both in the short and long terms. Coordinate and supervise the implementation of directions and policies in the Business Portfolio of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries according to the BoD's authority which cover restructuring of Subsidiaries and affiliates as well as synergy and performance of affiliate portfolios in accordance with applicable regulations to help the Company run seamless operations both in the short and long terms.
Jamsaton Nababan Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Director of Portfolio & Business Development	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan dibawah Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan pemerintah. Melakukan analisa, evaluasi, dan mengusulkan rencana pengembangan mencakup investasi rutin, pengembangan, dan proyek-proyek strategis berskala besar di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan arah dan kebijakan di bidang Pengembangan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai kewenangan Direksi yang mencakup investasi rutin, pengembangan perusahaan menggunakan teknologi yang sudah proven, dan proyek-proyek strategis berskala besar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengkoordinasikan terlaksananya supply gas baru dan kontinuitas supply gas eksisting di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. Melakukan analisa, evaluasi, dan mengusulkan investasi penyertaan dan arah kebijakan terhadap kemajuan bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, dan Afiliasi. Directing, coordinating, supervising and being responsible for the duties and work under the Portfolio & Business Development Directorate of PT Pupuk Indonesia (Persero) in accordance with the provisions set out in the WP&B as well as the long-term plans and Government regulations. Analyzing, evaluating, and proposing a development plan including routine investments, development, and large-scale strategic projects in PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. Coordinating and supervising the directiveness and policies in the Development of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries in accordance with the Board of Directors' authority including routine investments, Company development using proven technology, and large-scale strategic projects, in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the Company's business in the short and long term. Coordinating the new gas supply and continuity of existing gas supply in PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. Analyzing, evaluating, and proposing investment participation and policy directions for the business progress of PT Pupuk Indonesia (Persero), Subsidiaries, Second Tier Subsidiaries, and Affiliates.

Pembagian Tugas Masing-masing Direksi Board of Directors' Individual Division of Duties

Direksi Board of Directors	Tugas Duty
	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan arah dan kebijakan di bidang Portofolio Bisnis PTPI, Anak Perusahaan sesuai kewenangan Direksi yang mencakup bidang Portofolio Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, dan Afiliasi serta sinergi dan kinerja portofolio afiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan di lingkungan PI Grup. Melakukan <i>monitoring</i>, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek strategis yang berskala besar di lingkungan PI Grup. Coordinating and supervising the directives and policies in the Business Portfolio of PTPI, Subsidiaries in accordance with the authority of the Board of Directors, including the Subsidiaries, Second Tier Subsidiaries, and Affiliates Portfolios, as well as the synergy and performance of affiliate portfolios in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business in the short and long term. Monitoring and evaluating the ongoing projects in PI Group. Monitoring, evaluating, and controlling the large-scale strategic projects in PI Group.

Program Orientasi Bagi Direksi

Perusahaan memiliki mekanisme program orientasi bagi anggota Direksi yang baru untuk memastikan bahwa anggota Direksi dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Panduan pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Direksi baru telah diatur dalam *Code of Corporate Governance* Perusahaan yang menyatakan bahwa anggota Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya. Program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Gambaran umum mengenai perusahaan;
- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Dewan Komisaris;
- Penjelasan mengenai *Stakeholders* utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan;
- Penjelasan mengenai sistem pengendalian internal, sistem audit dan temuan-temuan audit yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus-kasus hukum yang melibatkan Perusahaan;
- Pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan komposisi dan susunan Direksi, Perusahaan melaksanakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru yang dilakukan pada 26 Juli 2021 melalui video konferensi dan pada tanggal 6 Januari 2022 bertempat di Ruang Rapat Kebomas Lt. 3, Gedung Pusri.

Board of Directors' Orientation Program

The Company runs an orientation program for new members of the Board of Directors to ensure they can immediately contribute to the Company's performance. The orientation program for new Directors is regulated in the Company's Code of Corporate Governance that states that newly appointed Commissioners and Directors must have an orientation program on the Company that should be held soon after their appointment. The orientation Program for the new Directors includes the following:

- General description of the company;
- Description of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors and Board of Commissioners Committees;
- Description of of the Company's main stakeholders and corporate social responsibility;
- Description of the internal control system, audit system and audit findings that have not been followed up completely as well as legal cases involving the Company;
- Implementation of GCG in the Company.

The Company's orientation program may be run as presentations, meetings, visits to business units, Company facilities, and reviews of Company documents or other based-need programs.

In connection with the recent changes in the composition and structure of its BoD, the Company held an orientation program for new members of the Board of Directors on July 26, 2021 via video conference and on January 6, 2022 at the Kebomas Meeting Room, Lt. 3, Pusri Building.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Direksi untuk menambah wawasan dan pengetahuan Direksi khususnya terkait pengelolaan Perusahaan serta kepemimpinan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Board of Directors' Training and Competency Development

The Company facilitates competency development programs for the Board of Directors to increase their insight and knowledge, especially regarding the management and leadership of the Company. The list of training and competency improvement activities participated in by the Board of Directors throughout 2021 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Pelaksanaan Tugas tahun 2021 Implementation of Duties in 2021

No.	Bidang Field	Program/Kegiatan Program/Activity
1	Produksi Production	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Plant Audit; Melaksanakan program maintenance excellence; Implementasi Digital Fertilizer; Melakukan asesmen Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0); Penyusunan guidance dan pelaksanaan self assessment Process Safety Management (PSM) dan desktop assessment PSM; Integrasi SDGs ke program Perusahaan; Pelaporan SR sesuai standar GRI untuk seluruh anak perusahaan (100%). Carry out Plant Audits; Implement a maintenance excellence program; Implement Digital Fertilizer; Assess the Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0); Prepare guidance and implement Process Safety Management (PSM) self assessment and PSM desktop assessment; Integrate SDGs into Company programs; SR report according to GRI standards for all subsidiaries (100%).
2	Pengadaan Procurement	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penandatanganan MoU PI dengan Mind ID; Melakukan penjajakan tambang potensial; Program cataloging pekerjaan jasa pemeliharaan agar dapat dilaksanakan pengadaan bersama, sehingga diperoleh harga pengadaan yang terbaik; Restrukturisasi Pengadaan PI Grup; Sign PI MoU with Mind ID; Conduct exploration of potential mines; Catalogue program for maintenance services so joint procurement can be carried out, so that the best procurement price is obtained; Restructure PI Group Procurement;
3	Pemasaran Marketing	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan implementasi program benefit model distributor dan kios oleh konsultan; Aplikasi penjualan produk komersil PI Group; Implementasi Retail Management System (RMS); Program Demplot; Mengadakan program promosi melalui kegiatan pemberian reward/apresiasi bagi distributor kios dan petani; Pemanfaatan fungsi aplikasi layanan pelanggan berbasis Customer Relationship Management (CRM); Kajian Fee Distributor Pengecer Pupuk Bersubsidi; Mengembangkan sistem sksisting (WCM)/sistem zero kelangkaan untuk menciptakan dashboard monitoring alokasi dan penyaluran per kabupaten; Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait produk PI Group (termasuk produk Single branding); Penyeragaman promotion kit kios PI-Mart di daerah potensial; Penerapan Key Account Management (KAM) dan Technical Sales Team serta Product Package Korporasi; Assist in the implementation of the distributor and kiosk model benefit program with consultants; PI Group's commercial product sales application; Implement Retail Management System (RMS); Demonstration Plot Program; Conduct promotional programs by providing rewards/appreciation for kiosk distributors and farmers; Utilize customer service application functions based on Customer Relationship Management (CRM); Review Subsidized Fertilizer Distributor Fees; Develop a existing (WCM)/zero scarcity system to create a monitoring dashboard for allocations and distributions per district; Conduct socialization activities for PI Group products (including Single branding products); Uniform promotion kit at PI-Mart kiosks in potential areas; Implement Key Account Management (KAM) and Technical Sales Team and Corporate Product Packages;

No.	Bidang Field	Program/Kegiatan Program/Activity
4	Distribusi Distribution	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sinergi melalui utilisasi kapal PI Logistik dengan anak perusahaan PI Grup lainnya di bidang distribusi dan logistik; Penggunaan UPP (Unit Pengantongan Pupuk) dan gudang yang idle milik PT Pusri Palembang oleh anggota <i>holding</i>; Penggunaan sarana distribusi (gudang) bersama di Jawa dan Sumatera maupun seluruh Indonesia; Perbaikan rute distribusi dengan membangun <i>Manufacturing Network Model (Supply Chain Management)</i>; Penjadwalan pengapalan dilakukan secara akurat dan terintegrasi di seluruh anak perusahaan; Implementasi <i>Supply Chain Control Tower</i>; Implementasi <i>Manufacturing Footprint</i>; Meminimalkan losses pupuk pada saat distribusi melalui penggunaan <i>slings bag</i> dan <i>pallet</i>; Melakukan perencanaan stok pupuk berdasarkan kajian stok optimum; Implementasi <i>Distribution Requirement Planning (DRP)</i>; Melakukan penyediaan stok optimum di sektor komersil dan ritel di wilayah pasar potensial sesuai rencana penjualan; Implementasi <i>Distribution Planning & Control System (DPCS)</i>; Standardisasi biaya distribusi untuk meningkatkan efisiensi; Menciptakan pola distribusi (<i>distribution channel</i>) berupa jalur pemasaran baru (tambahan). Increase synergy by utilizing PI Logistics ships with other PI Group subsidiaries for distribution and logistics; Use UPP (Fertilizer Packing Unit) and idle warehouses owned by PT Pusri Palembang by holding members; Use shared distribution facilities (warehouses) in Java and Sumatra as well as throughout Indonesia; Improve distribution routes by building a Manufacturing Network Model (Supply Chain Management); Schedule accurate and integrated shipments in all subsidiaries; Implement Supply Chain Control Tower; Implement Manufacturing Footprint; Minimize fertilizer losses during distribution by using sling bags and pallets; Conduct fertilizer stock planning based on optimum stock studies; Implement Distribution Requirement Planning (DRP); Provide optimum stock in the commercial and retail sectors in potential market areas according to the sales plan; Implement Distribution Planning & Control System (DPCS); Standardize distribution costs to increase efficiency; Create distribution channels in the form of new (additional) marketing channels.
5	Pengembangan Bisnis Business Development	<ul style="list-style-type: none"> Proyek Methanol JV Internal/Eksternal Grup; Pelaksanaan Proyek AIF3-II; Pembangunan Pabrik NPK Chemical PT Pupuk Iskandar Muda; Kajian FS untuk Kalimantan Timur 2; Pelaksanaan restrukturisasi anak perusahaan; Pelaksanaan restrukturisasi cucu perusahaan/afiliasi; Monitoring Kinerja anak perusahaan, cucu perusahaan/afiliasi; Pelaksanaan sinergi dan <i>circular economy</i> anak perusahaan; The Group's Internal/External JV Methanol Project; Implement AIF3-II Project; Construct PT Pupuk Iskandar Muda's NPK Chemical Factory; Conduct FS Study for East Kalimantan 2; Implement subsidiary restructuring; Implement restructuring of subsidiaries/affiliates; Monitor performance of subsidiaries, second-tier subsidiaries/affiliates; Implement subsidiary's synergy and circular economy;
6	Riset Research	<ul style="list-style-type: none"> Riset Produk: Enhanced Efficiency Fertilizer (Controlled Release); Advance Biofertilizer; Urea N Stabilizer; Mikroba Pengikat N. Riset Teknologi: Optimasi Proses Produksi NPK (Nitralite); Optimasi Proses Produksi EEF (Controlled Release); Pengembangan Sistem / Aplikasi Precision Agriculture; Sistem rekomendasi pemupukan (Precipalm). Riset Kebijakan: Identifikasi dan harmonisasi regulasi tata niaga pupuk; Pemanfaatan/ pengecualian limbah samping industri pupuk dan implikasinya terhadap bisnis Perusahaan dan Lingkungan; Pembuatan program kebijakan di bidang pupuk antara lain: reformasi subsidi; White paper, policy brief, dan briefing notes. Perencanaan Riset: Advisory Board IFRI; Pembuatan program kebijakan riset terapan di anak perusahaan; Perancangan Sistem Manajemen Riset; Riset Merauke.

No.	Bidang Field	Program/Kegiatan Program/Activity
		<p>Product Research:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enhance Efficiency Fertilizer (Controlled Release); Advance Biofertilizer; Urea N Stabilizer; N-binding Microbes. <p>Technology Research:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimize NPK (Nutralite) Production Process; Optimize EEF (Controlled Release) Production Process; Develop Precision Agriculture Systems/Applications; Fertilizer recommendation system (Precipalm). <p>Policy Research:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identify and harmonize fertilizer trade regulations; Utilize/exceptions of fertilizer industry by-products and the implication for the Company's business and the environment; Develop policy programs for fertilizers, including: subsidy reform; White papers, policy briefs, and briefing notes. <p>Research Planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> IFRI Advisory Board; Develop applied research policy programs in subsidiaries; Research Management System Design; Merauke Research.
	Sumber Daya Manusia (SDM) Human Capital (HC)	<ul style="list-style-type: none"> Review Kamus Soft Competency; Review Kamus Hard Competency; Melakukan efisiensi biaya SDM dengan memperhatikan best practice dan standar industri serta efektivitas biaya SDM untuk mendorong produktivitas; Kajian strukturisasi SDM dan distribusi di holding & anak perusahaan; Melakukan audit SDM; Survei kesehatan budaya Perusahaan; Sosialisasi budaya Perusahaan; Kajian program pengembangan talen; Implementasi KPI Individu karyawan yang sejalan dengan KPI Korporat; Evaluasi struktur remunerasi berdasarkan levelling jabatan PTPI; Implementasi kenaikan gaji pokok berdasarkan penilaian kinerja (KPI) dan penilaian 360 di seluruh anak perusahaan; Menumbuh-kembangkan komunitas praktisi (CoP) sebagai forum belajar dan berbagi pengetahuan untuk membangun budaya belajar dan berbagi pengetahuan bagi para Subject Matter Expert (narasumber ahli) dan knowledge worker (pekerja pengetahuan) di PI Grup; Membuat Aset Pengetahuan dari hasil sharing komunitas praktisi dan dokumentasi pengetahuan narasumber ahli; Menyusun dan memanfaatkan peta pengetahuan (KMAP) di PI Grup; Memanfaatkan KM Technology untuk menyimpan dan mempercepat proses distribusi pengetahuan penting ke seluruh PI Grup; Peningkatan kapabilitas pengelola Learning Center; Melakukan standardisasi Learning Value Chain (LVC) dalam proses pembelajaran; Menyediakan fasilitas dan teknologi pembelajaran yang memadai untuk proses pembelajaran; Pengembangan Learning Management System (LMS) untuk PI Grup; Mengembangkan dan memanfaatkan LSP PI Grup sebagai enabler Smart Learning Center; Mempersiapkan blue print pemenuhan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam hal mempekerjakan minimal 2% dari penyandang disabilitas;

No.	Bidang Field	Program/Kegiatan Program/Activity
		<ul style="list-style-type: none"> Review Soft Competency Dictionary; Review Hard Competency Dictionary; Conduct HC cost efficiency by taking into account best practice and industry standards as well as HC cost effectiveness to boost productivity; Study HC structure and distribution in holding & subsidiaries; Conduct HC audits; Survey corporate cultural health; Socialize Corporate culture; Review talent development programs; Implement individual employee KPIs to be in line with Corporate KPIs; Evaluate remuneration structure based on the leveling position of PT Pupuk Indonesia (Persero); Implement basic salary increase based on performance appraisal (KPI) and 360 assessment in all subsidiaries; Develop community of practitioners (CoP) as a forum for learning and sharing knowledge to build a learning culture and sharing knowledge for Subject Matter Experts and knowledge workers in the PI Group; Create Knowledge Assets from the community of practitioners sharing and document knowledge from expert sources; Develop and utilize knowledge maps (KMAP) in the PI Group; Utilize KM Technology to store and accelerate the distribution of critical knowledge across the PI Group; Increase the capability of Learning Center managers; Standardize the Learning Value Chain (LVC) in the learning process; Provide adequate learning facilities and technology for the learning process; Develop Learning Management System (LMS) for PI Group; Develop and utilize Pupuk Indonesia Group LSP as a Smart Learning Center enabler; Prepare a blue print for fulfilling the mandate of Law Number 8 of 2016 in terms of employing a minimum 2% people with disabilities;
	Tata Kelola dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> Inisiasi penerapan Business Continuity Management (BCM); Mengintegrasikan Sistem Informasi PRISMA di PI Grup; Membangun aplikasi Sistem Manajemen Kepatuhan e-Integrity Pact dan WBS terintegrasi; Membangun dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Kinerja Unggul (<i>Performance Excellent</i> dan hasil inovasi); Initiate Business Continuity Management (BCM) implementation; Integrate PRISMA Information System in PI Group; Develop an integrated e-Integrity Pact and WBS Compliance Management System application; Build and develop an information system for Excellent Performance Management (Excellent Performance and innovation results);
	Keuangan dan Akuntansi Finance and Accounting	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penerbitan obligasi PUB II; Melakukan pembelian Menara Kadin REKIND dan Gedung Pusri; Melakukan settlement aset agar PT SHS dapat melunasi pinjaman cash collateral yang dijaminan oleh PTPI sebagai Langkah mitigasi macetnya pinjaman PT SHS di BRI; Melakukan kajian sentralisasi fungsi treasury; Koordinasi pendanaan investasi terpusat; Penyusunan sistem pelaporan pinjaman & financial covenant; Implementasi fitur <i>Intercompany Reconciliation</i>, <i>Intercompany Sales</i> di SAP dan penggunaan fitur dan aplikasi pendukung di luar SAP; Pengembangan <i>Platform</i> Integrasi Data Perpajakan DJP-SAP Perusahaan; Penyusunan pedoman induk pengelolaan perpajakan; Pengembangan Aplikasi <i>Vendor Invoice Management</i> (VIM); Pengembangan laporan profitabilitas perusahaan pupuk dan non pupuk menggunakan sistem untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat; Penerapan Revisi Pedoman Alokasi Biaya untuk seluruh anak perusahaan PTPI terkait dengan optimalisasi ERP SAP; Evaluasi karakteristik perilaku biaya; Penyempurnaan Digitalisasi KPI; Mengembangkan performance dashboard untuk evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen. Issue PUB II bonds; Purchase the REKIND Kadin Tower and the Pusri Building; Perform asset settlement so that PT SHS can repay the cash collateral loan guaranteed by PTPI as a step to mitigate the loss of PT SHS' loan at BRI; Conduct a study on centralizing the treasury function; Centralize coordination of investment funding; Prepare a loan & financial covenant reporting system; Implement Intercompany Reconciliation, Intercompany Sales features in SAP and use supporting features and applications outside of SAP; Develop the Company's DGT-SAP Tax Data Integration Platform; Prepare master guidelines for tax management; Vendor Invoice Management (VIM) Application Development; Develop profitability reports for fertilizer and non-fertilizer companies using the system to produce timely and accurate information; Implement Revised Cost Allocation Guidelines in all subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) for optimizing ERP SAP; Evaluate cost behavior characteristics; Improve KPI digitization; Develop performance dashboard for evaluation and management decision-making.

No.	Bidang Field	Program/Kegiatan Program/Activity
	Teknologi Informasi Information Technology	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem aplikasi terpusat/bersama TI PI Grup; • Peningkatan Infrastruktur Kapasitas Sentralisasi Data Center; • Kolaborasi sistem komunikasi; • Optimalisasi ERP; • Persiapan migrasi SAP dari ECC ke S/4 HANA atau ke ERP lainnya; • Implementasi Data Science (BDA); • Penyesuaian IT Master Plan 2020-2024 sesuai RJPP; • Pengukuran IT Maturity PI Grup; • Implementasi Enterprise Architect; • Implementasi IT Asset Management; • IT Risk & Security Enhancement. • Develop centralized/shared application system with IT PI Group; • Improve Data Center Centralized Capacity Infrastructure; • Collaborate on communication systems; • Optimize ERP; • Prepare SAP migration from ECC to S/4 HANA or to other ERP; • Implement Data Science (BDA); • Adjust IT Master Plan 2020-2024 according to RJPP; • Measure PI Group's IT Maturity; • Implement Enterprise Architect; • Implement IT Asset Management; • Enhance IT Risk & Security.
	Sekretariat dan Hukum Secretariat and Legal	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i>; • Pengembangan aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan; • Pengelolaan arsip/dokumen Perusahaan; • Menerbitkan Pedoman Sentralisasi Penanganan Permasalahan Hukum di Anak Perusahaan PTPI; • Implementasi Sentralisasi Penanganan Permasalahan Hukum di Anak Perusahaan PTPI; • Melakukan <i>updating</i> permasalahan sengketa hukum dan permasalahan sengketa antar BUMN secara berkala serta melaporkan kepada Pemegang Saham; • Complete Annual Report and Sustainability Report • Develop supporting applications for Secretarial activities; • Company archives/documents management; • Issue Guidelines for Centralizing Legal Issues Handling in the Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero); • Implement Centralized Legal Issues Handling in the Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero); • Regularly update legal disputes and disputes between SOEs and report to Shareholders;
	Komunikasi Korporat Corporate Communications	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerja sama placement dengan media top tier; • Melakukan kegiatan agenda setting sesuai dengan perkembangan isu; • Melakukan kampanye bersama media sosial secara berkala sesuai perkembangan isu; • Kampanye Komunikasi Internal Transformasi Bisnis. • Collaborate on placements in top tier media; • Carry out agenda setting activities in according to developing issues; • Conduct joint campaigns with social media on a regular basis according to developing issues; • Conduct Business Transformation Internal Communication Campaign.
	Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Audit Management System (AMS); • Penerapan Data Analytic Tools dalam setiap penyusunan program; • Membangun database atas script data analytic; • Mengevaluasi perbaikan atas Tata Kelola • Perusahaan dan Pedoman Subsidiary Governance dalam Pedoman/Prosedur di Unit Kerja; • Berkoordinasi dengan Unit Kerja TKK & MR dalam pengembangan <i>Fraud Control Plan</i> (FCP). • Implement Audit Management System (AMS); • Prepare Data Analytic Tools Application in each program; • Build a database for data analytic scripts; • Evaluate improvements to Governance • Company and Subsidiary Governance Guidelines in Guidelines/Procedures in Work Units; • Coordinate with the TKK & MR Work Unit to develop the Fraud Control Plan (FCP).
	Pengelolaan Transformasi Bisnis Business Transformation Management	<ul style="list-style-type: none"> • Sentralisasi Project Management Office (PMO) PI Grup untuk memastikan seluruh program Ad Hoc transformasi bisnis PI Grup terimplementasi; • Tools monitoring program Ad Hoc transformasi bisnis PI Grup terimplementasi; • Continuous <i>monitoring</i> dan <i>activist</i> PMO Ad Hoc transformasi bisnis PI Grup; • <i>Summary key learning program</i> Ad Hoc transformasi bisnis PI Grup. • Centralize PI Group's Project Management Office (PMO) to ensure that all PI Group's Ad Hoc business transformation programs are implemented; • Implement PI Group's Ad Hoc program monitoring tools for business transformation; • Continuously monitor and be an activist of PMO Ad Hoc business transformation of PI Group; • Summarize key learning programs for PI Group's Ad Hoc business transformation.

No.	Bidang Field	Program/Kegiatan Program/Activity
	Perencanaan Strategis Strategic Planning	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif strategis, rencana kerja dan target RJPP anak perusahaan selaras dengan RJPP PTPI; • Keputusan Pemegang Saham (KPS) atas RJPP anak perusahaan 2020-2024 sesuai kerangka pedoman penyusunan RJPP; • <i>Roadmap</i> transformasi bisnis perusahaan yang ditetapkan dalam RJPP terprogram dalam RKAP seluruh fungsi unit kerja dan anak perusahaan • Roadmap transformasi bisnis perusahaan dalam RJPP terprogram dalam RKAP seluruh unit kerja dan anak perusahaan. • Project Charter <i>monitoring</i> inisiatif strategis; • Indikator strategis post-mortem implementasi program transformasi bisnis yang berdampak langsung pada bisnis perusahaan. • Ensure the subsidiaries' RJPP strategic initiatives, work plans and targets are in accordance with the RJPP of PT Pupuk Indonesia (Persero); • Ensure the Shareholders' Decisions (KPS) for the subsidiaries' 2020-2024 RJPP are in accordance with the guidelines for the preparation of the RJPP; • Ensure the Company's business transformation roadmap in the RJPP is programmed in the WP&B of all work unit functions and subsidiaries • Ensure the Company's business transformation roadmap in the RJPP is programmed in the WP&B of all work units and subsidiaries. • Project Charter monitoring strategic initiatives; • Post-mortem strategic indicators for the implementation of business transformation programs that have a direct impact on the Company's business.
	Sistem Manajemen Terpadu dan Inovasi Integrated Management System and Innovation	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PI Innovation Day</i>; • PI Quality Improvement (PIQI); • Pencapaian dalam Konvensi Inovasi Nasional & Internasional; • Revisi DSM Sentralisasi; • DSM sesuai rekomendasi BPKP; • Hasil Surveillance Audit pada Januari dan September dan sertifikat ISO 9001 dapat dipertahankan; • Rekomendasi Perbaikan Sistem Manajemen Terpadu ke Mega Eltra dan tindak lanjut rekomendasi & adopsi SE terpenuhi 100%; • Dokumen Aplikasi BEF sesuai format BEF; • Skor 625 Asessment Kinerja Unggul; • Tindaklanjut OFI (<i>Opportunities for Improvement</i>) hasil <i>assessment</i> ke AFI (<i>Action For Improvement</i>). • <i>PI Innovation Day</i>; • PI Quality Improvement (PIQI); • Achievements in National & International Innovation Conventions; • Revise the Centralized DSM; • DSM as recommended by BPKP; • Maintain the Surveillance Audit results in January and September and the ISO 9001 certificate; • Recommend Improvements of the Integrated Management System to Mega Eltra and follow-up recommendations & adoption of SE are met 100%; • BEF Application Documents according to BEF format; • Score 625 in the Superior Performance Assessment; • Follow up OFI (Opportunities for Improvement) assessment results to AFI (Action For Improvement).

Penilaian Kinerja Organ dan Komite Pendukung Direksi

Penilaian dan Dasar Penilaian atas Kinerja Komite Pendukung Direksi

Direksi dibantu oleh 2 (dua) komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan, yaitu Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Direktur yang sesuai dengan bidangnya. Direksi melakukan penilaian terhadap komite-komite di bawah Direksi berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, partisipasi kehadiran dalam rapat yang diadakan.

Direksi menilai bahwa di tahun 2021, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan rapat yang dilakukan oleh komite-komite tersebut telah berjalan dengan baik dan efektif. Hasil rapat komite dapat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Performance Assessment of Supporting Organs and Committees of the Board of Directors

Assessment and Basis of Assessment on the Performance of the Supporting Committee of the Board of Directors

The Board of Directors is assisted by 2 (two) committees in carrying out their duties and responsibilities in managing the Company, namely the Company's Work Plan and Budget Committee (WP&B) and the Human Resources Management Committee led by the Director in accordance with his/her field. The Board of Directors evaluates the committees under the Board of Directors based on the implementation of assigned duties and responsibilities, participation in the meetings held.

The Board of Directors considers that in 2021, the implementation of duties, responsibilities and meetings conducted by these committees has been going well and effectively. The results of committee meetings can assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors.

Penilaian dan Dasar Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung Direksi

Direksi secara berkala melakukan penilaian atas kinerja organ pendukung Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal. Penilaian kedua organ pendukung Direksi tersebut berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan. Evaluasi dan penilaian juga dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan

Di sepanjang tahun 2021, berdasarkan KPI dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, efektif, dan efisien. Ada pun aspek KPI Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

KPI Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary KPI

Perspektif BSC BSC Perspective	No.	Key Performance Indicators (KPI) Key Performance Indicators (KPI)
<i>Financial</i>	1	Laba Bersih Net Profit
	2	EBITDA
	3	<i>Return on Asset</i>
	4	Biaya Rutin terhadap Target Routine Costs against Target
	5	Penyerapan Anggaran Program Kerja Strategis Absorption of Strategic Work Program Budget
<i>Customer</i>	1	Perkara terkait aksi korporasi (in kracht) yang tidak kalah di pengadilan Cases related to corporate actions (in kracht) that are not lost in court
	2	Terlaksananya Agenda Korporasi Implementation of Corporate Agenda
<i>Internal Business Process</i>	1	Ketepatan pengurusan izin korporasi PTPI Induk Accuracy in PTPI Parent's corporate license management
	2	Ketersediaan supply agreement Availability of supply agreements
	3	Rata-rata hari revidu dokumen legal Average legal document review days
	4	Ketersediaan Administrasi seluruh kegiatan PI Grup Availability of Administration for all PI Group activities
<i>Learning & Growth</i>	1	Gap Kompetensi Karyawan Grade 2 Kompartemen Compartment Grade 2 Employee Competency Gap
	2	Indeks Kepuasan Kerja & Keterikatan Karyawan Job Satisfaction & Employee Engagement Index

Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal (SPI) membantu Direksi dalam melaksanakan audit internal Perusahaan guna menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses tata kelola Perusahaan serta memberikan saran perbaikan. SPI dipimpin oleh SVP Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan BUMN: PER-01/ MBU/2011.

Assessment and Basis for Assessment of the Performance of the Supporting Organs of the Board of Directors

The Board of Directors periodically evaluates the performance of the supporting organs of the Board of Directors, namely the Corporate Secretary and Internal Audit. The assessment of the two supporting organs of the Board of Directors is based on the established Key Performance Indicators (KPI). Evaluation and assessment are also carried out based on the results of the implementation of the duties and responsibilities of the Corporate Secretary.

Corporate Secretary

Throughout 2021, based on the KPI and the implementation of the duties and responsibilities of the Corporate Secretary, the Board of Directors considers that the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities properly, effectively and efficiently. There are also aspects of the Corporate Secretary's KPI, as follows:

Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit (SPI) assists the Board of Directors in carrying out internal audits of the Company to assess the effectiveness of the internal control system, risk management and corporate governance processes and provide suggestions for improvement. SPI is led by the Internal Audit Unit SVP who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners in accordance with SOE Regulation: PER-01/MBU/2011.

Di sepanjang tahun 2021, berdasarkan KPI dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi menilai bahwa SPI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ada pun aspek KPI SPI, sebagai berikut:

Throughout 2021, based on KPI and the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors considers that SPI has carried out its duties and responsibilities well. There are also aspects of SPI KPIs, as follows:

Perspektif BSC BSC Perspective	No.	Key Performance Indicators (KPI) Key Performance Indicators (KPI)
<i>Financial</i>	1	Laba Bersih Net Profit
	2	EBITDA
	3	Return on Asset
	4	Biaya Rutin terhadap Target Routine Costs against Target
	5	Penyerapan Anggaran Program Kerja Strategis Absorption of Strategic Work Program Budget
<i>Customer</i>	1	Realisasi Laporan Kegiatan Pengawasan Realization of Monitoring Activity Report
	2	Hasil Temuan Audit Eksternal External Audit Findings
	3	Tindak Lanjut Temuan Audit Follow-up on Audit Findings
		<ul style="list-style-type: none"> Temuan Audit BPK BPK Audit Findings Temuan Audit Internal Internal Audit Findings
<i>Internal Business Process</i>	1	Implementasi SI-MTL terintegrasi di PI Grup Integrated SI-MTL implementation in PI Group
	2	Ketepatan waktu penerbitan LHA-LK & Laporan Lainnya oleh KAP Timeliness of LHA-LK & Other Reports by KAP
	3	Implementasi Audit Management System Implementation of Audit Management System
	4	Ketepatan waktu Penerbitan Laporan Hasil Audit (LHA) atas objek Audit Timeliness of Audit Result Report (LHA) on Audit objects
	5	Progres PKPT sinergi PKPT Synergy progress
<i>Learning & Growth</i>	1	Gap Kompetensi Karyawan Grade 2 Kompartemen Grade 2 Compartment Employee Competency Gap
	2	Indeks Kepuasan Kerja & Keterikatan Karyawan Job Satisfaction Index and Employee Engagement

TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada kebijakan *Board Manual*, yang telah mengatur kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Secara umum, kebijakan tersebut mendorong terpilihnya orang-orang dari latar belakang yang beragam untuk mengisi posisi manajemen, eksekutif, dan karyawan.

TRANSPARENCY OF INFORMATION REGARDING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Composition Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

The diversity in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Board Manual policy, which has set criteria for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

In general, the policy encourages the selection of individuals from diverse backgrounds to fill management, executive, and employee positions.

Pemegang Saham menetapkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memerhatikan unsur keberagaman, baik dari sisi pendidikan, pengalaman kerja dan usia. Penetapan komposisi ini juga memerhatikan kebutuhan Perusahaan, khususnya bidang usaha bagi setiap Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

The Shareholders determine the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors while considering the elements of diversity, both in terms of education, work experience, and age. The determination of this composition also takes into account the needs of the Company, particularly the line of business for each member of the Board of Directors. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have good integrity, competence and reputation.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2021 dijabarkan sebagai berikut:

The diversity in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of 31 December 2021 is described as follows:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Gender Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Darmin Nasution	Indonesia	Laki-laki Male	73	Doktor Ilmu Ekonomi Doctor of Economics	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Minister for Economic Affairs	Ekonomi Makro dan Moneter Macroeconomics and Monetary
Bambang Widianto	Indonesia	Laki-laki Male	61	Doktor Kebijakan Ekonomi Doctor of Economic Policy	Staf Khusus Wakil Presiden Special Staff to the Vice President	Kebijakan Sosial dan Ekonomi Social and Economic Policy
Suwandi	Indonesia	Laki-laki Male	62	Doktor Pengelolaan SDA dan Lingkungan Doctor of Natural Resources and Environmental Management	Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Director General of Food Crops of the Ministry of Agriculture	Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Natural Resources and Environmental Management
Febrio Nathan Kacaribu	Indonesia	Laki-laki Male	43	Doktor Ilmu Ekonomi Doctor of Economics	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance	Kebijakan dan Pengelolaan Fiskal Fiscal Policy and Management
Ari Dwipayana	Indonesia	Laki-laki Male	49	Doktor Ilmu Politik Doctor of Political Science	Staf Khusus Presiden RI Special Staff to the President of the Republic of Indonesia	Kebijakan Politik dan Sosial Political and Social Policy
Mustoha Iskandar	Indonesia	Laki-laki Male	61	Doktor Manajemen Bisnis Doctor of Business Management	Direktur Utama Perum Perhutani President Director of Perum Perhutani	Manajemen Perusahaan Corporate Management
Anhar Adel	Indonesia	Laki-laki Male	62	Sarjana Administrasi Negara Bachelor of State Administration	Sekretaris Utama BKPM Main Secretary of BKPM	Administrasi Negara State Administration
Anwar Sanusi	Indonesia	Laki-laki Male	53	Doktor Studi Kebijakan dari National Graduate Institute for Policy Studies (2007) Doctor of Policy Studies from the National Graduate Institute for Policy Studies (2007);	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Secretary General at the Ministry of Manpower	Strategi dan Ilmu Kebijakan Strategy and Policy Science

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Gender Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Direksi Board of Directors						
Bakir Pasaman	Indonesia	Laki-laki Male	60	Doktoral Administrasi Bisnis Doctor of Business Administration	Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur President Director at PT Pupuk Kalimantan Timur	Administrasi Bisnis Business Administration
Nugroho Christijanto	Indonesia	Laki-laki Male	53	Magister Manajemen Bisnis dan Administrasi Teknologi Master in Business Management and Technology Administration	Plt. Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik Acting President Commissioner at PT Pupuk Indonesia Logistik	Manajemen Bisnis dan Administrasi Teknologi Business Management and Technology Administration
Tina T Kemala Intan	Indonesia	Perempuan Female	62	Sarjana Psikologi Bachelor of Psychology	Direktur SDM dan Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk HR and Legal Director of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resource Management
Gusrizal	Indonesia	Laki-laki Male	57	Master Manajemen Logistik dan Perkapalan Master in Logistics and Shipping Management	Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia Director of Investment at PT Pupuk Indonesia	Manajemen Management
Bob Indiarso	Indonesia	Laki-laki Male	60	Magister Manajemen Master in Management	Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Director of HR and General at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Manajemen Produksi Production Management
Panji W. Ruky	Indonesia	Laki-laki Male	45	Magister Kebijakan Publik Master in Public Policy	Direktur Kemitraan dan Komunikasi Kartu Pra Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Director of Partnership and Communication of Kartu Pra Kerja at Coordinating Ministry for Economic Affairs	Kebijakan Publik Public Policy
Wono Budi Tjahyono	Indonesia	Laki-laki Male	54	Master of Business Administration Master of Business Administration	Senior Vice President PT Bank Mandiri Senior Vice President PT Bank Mandiri	Administrasi Bisnis Business Administration
Jamsaton Nababan	Indonesia	Laki-laki Male	59	Sarjana Teknik Mesin Bachelor of Mechanical Engineering	President Director PT Pertamina EP Cepu President Director PT Pertamina EP Cepu	Teknik Engineering

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pengungkapan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keuangan termasuk di antaranya utang-piutang, kerja sama bisnis, dan sebagainya; sementara bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya. Adapun hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Affiliated Relationships of the Board of Commissioners and Board of Directors

Disclosure of affiliations includes familial and financial relationships. Financial relationships include debts and receivables, business partnerships, and others.; while familial relationships include special relationships mainly through blood relations, such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, and others. The affiliation relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors can be seen in the table below.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliated Relationships of the Board of Commissioners and Board of Directors

	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationships with:			Hubungan Keluarga dengan: Familial Relationships with:		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang saham Utama/Pengendali Perusahaan) Republic of Indonesia (Company's Majority /Controlling Shareholder)	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang saham Utama/Pengendali Perusahaan) Republic of Indonesia (Company's Majority /Controlling Shareholder)
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Darmin Nasution	x	x	x	x	x	x
Bambang Widianto	x	x	x	x	x	x
Suwandi	x	x	x	x	x	x
Febrio Nathan Kacaribu	x	x	x	x	x	x
Ari Dwipayana	x	x	x	x	x	x
Mustoha Iskandar	x	x	x	x	x	x
Anhar Adel	x	x	x	x	x	x
Anwar Sanusi	x	x	x	x	x	x
Direksi Board of Directors						
Bakir Pasaman	x	x	x	x	x	x
Nugroho Christijanto	x	x	x	x	x	x
Tina T Kemala Intan	x	x	x	x	x	x
Gusrizal	x	x	x	x	x	x
Bob Indiarso	x	x	x	x	x	x
Panji W. Ruky	x	x	x	x	x	x
Wono Budi Tjahyono	x	x	x	x	x	x
Jamsaton Nababan	x	x	x	x	x	x

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors

Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:

	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As Member of the Board of Directors	Jabatan Lain Other Position
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Darmin Nasution	✓	x	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020-sekarang) Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Finance (2020-sekarang) President Commissioner at PT Smartfren Telecom Tbk (2020-present) President Commissioner at Indonesia Infrastructure Finance (2020-present)
Bambang Widianto	x	x	Staf Khusus Wakil Presiden RI Special Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia
Suwandi	x	✓	Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Director General of Food Crops of the Ministry of Agriculture
Febrio Nathan Kacaribu	x	x	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance
Ari Dwipayana	x	x	Koordinator Staf Khusus Presiden RI Special Staff Coordinator of the President of the Republic of Indonesia
Mustoha Iskandar	x	x	x
Anhar Adel	x	x	Staf Khusus Menteri BUMN Special Staff to the Minister of SOEs
Anwar Sanusi	x	x	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Secretary General of the Ministry of Manpower
Direksi Board of Directors			
Bakir Pasaman	x	x	x
Nugroho Christijanto	x	x	x
Tina T Kemala Intan	x	x	x
Gusrizal	x	x	x
Bob Indiarso	x	x	x
Panji W. Ruky	x	x	x
Wono Budi Tjahyono	x	x	x
Jamsaton Nababan	x	x	x

Pengungkapan Kepemilikan Saham

Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Disclosure of Share Ownership

The Company requires that all Commissioners and Directors disclose their share ownership, both inside and outside the country, in reports that must be updated annually.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Per Desember 2021*Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 2021*

	Kepemilikan Saham Share Ownership		
	Perusahaan Company	Entitas Anak dan Afiliasi Subsidiaries and Affiliates	Perusahaan Lain (Lebih Dari 5%) Other Companies (More than 5%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Darmin Nasution	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Bambang Widianto	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Suwandi	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Febrio Nathan Kacaribu	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Ari Dwipayana	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Mustoha Iskandar	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Anhar Adel	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Anwar Sanusi	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Direksi Board of Directors			
Bakir Pasaman	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Nugroho Christijanto	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Tina T Kemala Intan	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Gusrizal	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Bob Indiarto	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Panji W. Ruky	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Wono Budi Tjahyono	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Jamsaton Nababan	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

**PENILAIAN KINERJA DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI****Penilaian Dewan Komisaris****Pihak yang Melakukan Penilaian**

Penilaian Dewan Komisaris dilakukan melalui metode *self assessment* sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KEP.KOM/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Piagam Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

**PERFORMANCE ASSESSMENT OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS
AND BOARD OF DIRECTORS****Assessment of the Board of Commissioners****Assessor**

The Board of Commissioners assessment is carried out through the self-assessment method as stated in the Board of Commissioners Decree No. 07/KEP.KOM/XI/2018 dated November 2, 2018 concerning the Stipulation of the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Commissioners Charter.

Kriteria Penilaian

Dewan Komisaris pada tahun 2018 telah melakukan penyempurnaan Pedoman Dewan Komisaris sesuai Keputusan Nomor 07/KEP.KOM/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Piagam Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero), yang salah satunya mengatur tentang pelaksanaan *self assessment* kinerja Individu Dewan Komisaris. Implementasi atas kebijakan tersebut dimulai pada tahun 2020.

Dewan Komisaris dengan Keputusannya Nomor 17/KEP.KOM/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 telah menetapkan Kebijakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PTPI. Adapun kriteria penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Assessment Criteria

In 2018, The Board of Commissioners has made enhancements to the Guidelines for the Board of Commissioners in accordance with Decree No. 07/KEP. KOM/XI/2018 dated November 2, 2018 on the Establishment of the Charter of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero), one of which regulates the implementation of self-assessment of the Individual performance of the Board of Commissioners. The implementation of the policy started in 2020.

The Board of Commissioners through its Decree No. 17/KEP.KOM/X/2020 dated October 5, 2020 has established the Policy for the Measurement and Assessment of the Performance of the Board of Commissioners of PTPI. The following are the assessment criteria:

No.	Kegiatan Activity
1	Pencapaian KPI Dewan Komisaris Board of Commissioners KPI Achievement
2	Tingkat Kehadiran: <ul style="list-style-type: none"> Rapat Internal Rapat Gabungan yang menyertakan Direksi Attendance Rate: <ul style="list-style-type: none"> Internal Meetings Joint Meetings that included the Board of Directors
3	Pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan atas implementasi rencana dan kebijakan (keuangan, investasi, operasional, SDM, hukum, IT dan tata kelola) sesuai RKAP dan <i>Master plan</i> PTPI Supervision of the management of the Company on the implementation of plans and policies (financial, investment, operational, HC, legal, IT, and governance) in accordance with the WP&B and the Master plan of PTPI
4	Penugasan tertentu (pengawasan pengelolaan Anak Perusahaan sesuai SK Penugasan Dewan Komisaris Certain assignments (supervision of the management of subsidiaries in accordance with the Board of Commissioners Assignment Decree)
5	Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan Commitment in advancing the interests of the Company
6	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan Compliance with applicable laws and regulations as well as Company policies

Hasil Penilaian

Di tahun 2021, hasil penilaian atas kinerja Dewan Komisaris ada di skor 98,4. Rincian hasil penilaian tersebut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Assessment Results

In 2021, the Board of Commissioners performance assessment results stood at a score of 98,4. The details of the assessment results are presented in the following table.

Skor Penilaian Dewan Komisaris

Board of Commissioners Assessment Score

No.	Kegiatan Activity	Target Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Nilai Score
1	Responsivitas terhadap usulan/pemintaan persetujuan/ rekomendasi/ tanggapan Dewan Komisaris Responsiveness to the proposal/ request for approval/recommendation/ response of the Board of Commissioners	100	12	100%	12
2	Pengawasan/Implementasi <i>Blue Print</i> /RJPP Supervision/ Implementation of the Blue Print/ RJPP	100% (Minimal: 1 kali) 100% (Minimal: 1 time)	8	100% (1 kali) (1 time)	8
3	Pengawasan/Implementasi RKAP Monitoring/Implementation of the WP&B	100% (Minimal 12 kali) 100% (Minimal: 12 times)	12	100% (12 kali) (12 time)	12

Skor Penilaian Dewan Komisaris

Board of Commissioners Assessment Score

No.	Kegiatan Activity	Target Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Nilai Score
4	Pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Internal Supervision of the Internal Control System	100% (Minimal 2 kali) 100% (Minimal: 2 times)	6	100% (3 kali) (3 times)	6
5	Pengawasan terhadap Manajemen Risiko Perusahaan Supervision of the Company's Risk Management	100% (Minimal 2 kali) 100% (Minimal: 2 times)	6	100% (3 kali) (3 times)	6
6	Pengawasan terhadap Sistem Teknologi Informasi Supervision of the Information Technology System	100% (Minimal 2 kali) 100% (Minimal: 2 times)	6	100% (4 kali) (4 times)	6
7	Pengawasan terhadap Kebijakan SDM (Termasuk Diklat dan remunerasi) Supervision of HC Policy (Including Education and Training as well as Remuneration)	100% (Minimal 2 kali) 100% (Minimal: 2 times)	6	100% (2 kali) (2 times)	6
8	Pengawasan terhadap Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Supervision of Accounting Policies and Preparation of Financial Statements	100% (Minimal 2 kali) 100% (Minimal: 2 times)	6	100% (3 kali) (3 times)	6
9	Pengawasan terhadap Seleksi Kantor Akuntan Publik Supervision of Selection of Public Accounting Firm	100% (Minimal: 1 kali) 100% (Minimal: 1 time)	6	100% (1 kali) (1 times)	6
10	Pengawasan terhadap Kebijakan Pengadaan Supervision of Procurement Policy	100% (Minimal 2 kali) 100% (Minimal: 2 times)	6	100% (2 kali) (2 times)	6
11	Pengawasan terhadap Kebijakan Mutu dan Layanan Supervision of Quality and Service Policy	100% (Minimal: 1 kali) 100% (Minimal: 1 time)	6	100% (1 kali) (1 times)	6
12	Pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Pihak Ketiga Supervision of Laws and Regulations and Third-Party Agreements	100% (Minimal 2 kali) 100% (Minimal: 2 times)	6	100% (3 kali) (3 times)	6
13	Tindak Lanjut Hasil <i>Assessment</i> GCG Follow-up of GCG Assessment Results	100%	6	80%	6,4
14	Peningkatan <i>Knowledge</i> Dewan Komisaris Knowledge Increase of the Board of Commissioners	100%	6	100% (3 kali) (3 times)	6
Jumlah Total			100		98,4

Penilaian Direksi

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian terhadap kinerja Direksi, antara lain dilakukan terkait dengan penerapan terhadap prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi terkait dengan hal itu menjadi variabel penilaian penting.

Di tahun 2021, penilaian GCG yang di dalamnya terdapat penilaian aspek Direksi, dilaksanakan oleh BPKP Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan itu menegaskan bahwa penilaian atas penerapan GCG dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Di antara periode itu, di tahun 2021 Perusahaan menggunakan konsultan independen untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian GCG.

Assessment of the Board of Directors

Assessor

Assessment of the performance of the Board of Directors, among others, is carried out in relation to the implementation of GCG principles. The performance of the Board of Directors in this regard is an important assessment variable.

In 2021, the GCG assessment, which included an assessment of the Board of Directors aspect, was carried out by BPKP. This is in accordance with the Minister of SOEs Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The regulation confirms that an assessment of the implementation of GCG be carried out every 2 (two) years. During this period, in 2021 the Company used independent consultants to assess the GCG achievements.

Selain penerapan GCG, Direksi juga melaksanakan penilaian terkait dengan KPI. Penilaian ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang kemudian dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian untuk Direksi, terutama berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Ada lima perspektif, yaitu:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Pengembangan Investasi
5. Pengembangan Talenta

Hasil Penilaian

No.	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement		Skor Score
					Target Target	(%)	
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia							
Finansial Financial							
1	Laba bersih Net Profit	Rp Miliar Billion Rp	5,00	5.135	3.105	110,00	5,50
2	Gap ROIC to WACC ROIC to WACC Gap	%	5,00	3,03	0,19	110,00	5,50
3	<i>Interest bearing Debt</i> to EBITDA Interest bearing Debt to EBITDA	Kali (x) Times (x)	5,00	2,20	3,51	110,00	5,50
4	<i>Cashflow From Operation</i> ("CFO") Cashflow From Operation ("CFO")	Rp Miliar Billion Rp	5,00	16.537	10.944	110,00	5,50
Operasional Operational							
5	Pendapatan dari <i>Circular Economy</i> Revenue from Circular Economy	Rp Miliar Billion Rp	5,00	3.977	1.482	110,00	5,50
6	Pendapatan dari <i>Commercial Fertilizer</i> Revenue from Commercial Fertilizer	Rp Miliar Billion Rp	5,00	26.642	16.322	110,00	5,50
7	Implementasi <i>Single Branding</i> urea dan NPK komersil Implementation of Commercial Urea and NPK Single Branding	Waktu Time	5,00	Desember 2021 December 2021	Desember 2021 December 2021	100,00	5,50
Sosial Social							
8	Pemberdayaan distributor lokal kategori UMKM program PADI Empowerment of local distributors for the PADI program category of SMEs						
	• Nilai pengadaan internal ke UMKM The value of internal procurement to MSMEs	Rp Miliar Billion Rp	3,00	5.279	2.054	110,00	3,30
	• Nilai transaksi <i>marketplace</i> (<i>Business to Business</i>) Marketplace transaction value (<i>Business to Business</i>)	Rp Miliar Billion Rp	2,00	268	144	110,00	2,20
Subtotal			40,00				43,50

In addition to the GCG implementation, the Board of Directors also carried out assessments related to KPI. This assessment was carried out by the Board of Commissioners and then reported to the Shareholders through the GMS.

Assessment Criteria

Assessment criteria for the Board of Directors, especially based on the achievement of the Key Performance Indicators (KPI) that have been determined. There are five perspectives, namely:

1. Economic Social Value for Indonesia
2. Business Model Innovation
3. Technology Leadership
4. Energize Investment
5. Unleash Talent

Assessment Results

No.	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement		Skor Score
					Target Target	(%)	
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation							
9	Peningkatan penjualan pupuk ritel dalam negeri Increase in domestic retail fertilizer sales						
	• Implementasi <i>Customer Centric Model</i> Implementation of Customer Centric Model	Ton Tons	5,00	608.579	372.367	110,00	5,50
	• Implementasi Agrosolution Implementation of Agrosolution	Ton Tons	5,00	37.742	12.500	110,00	5,50
10	Efisiensi beban usaha Operating load efficiency	Rp Miliar Billion Rp	5,00	5.304	5.160	97,29	4,86
11	Efisiensi COGM melalui implementasi <i>Manufacturing Excellence</i> COGM efficiency through the implementation of Manufacturing Excellence						
	a. Urea	Rp/Ton Rp/Tons	3,00	3.436.983	3.440.129	100,09	3,00
	b. NPK	Rp/Ton Rp/Tons	2,00	4.980.894	5.296.402	106,33	2,13
12	Implementasi restrukturisasi Anak Perusahaan PI Grup Implementation of restructuring of PI Group's Subsidiaries						
	• ME, PILOG, PIU, dan PIP ME, PILOG, PIU, and PIP	Waktu Time	3,00	-	Desember 2021 December 2021	95,38	2,86
	• <i>Right Issue</i> saham Rekind Right Issue of Rekind's shares	Waktu Time	2,00	-	Desember 2021 December 2021	75,00	1,50
Subtotal			25,00				25,35
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership							
13	Implementasi <i>Manufacturing Network Footprint</i> Implementation of Manufacturing Network Footprint	Waktu Time	5,00	Oktober 2021 October 2021	November 2021	110,00	5,50
14	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam Bidang Produksi, Pemasaran, dan Logistik Utilization of Big Data in Production, Marketing, and Logistics						
	• Implementasi <i>Advanced Analytics</i> dalam proses Pemasaran dan Distribusi Implementation of Advanced Analytics in Marketing and Distribution process	Waktu Time	2,00	Agustus 2021 August 2021	September 2021	110,00	2,20
	• Implementasi <i>Supply Chain Control Tower</i> Implementation of Supply Chain Control Tower	Waktu Time	3,00	Februari 2021 Februari 2021	April 2021	110,00	3,30
Subtotal			10,00				11,00

No.	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement		Skor Score
					Target Target	(%)	
Peningkatan Investasi Investment Increase							
15	Progres Proyek Pengembangan PI Grup PI Group Development Project Progress						
	• Pra Kualifikasi Kontraktor EPC Proyek Pusri III B Pre-Qualification of Pusri III Project EPC Contractor B	Waktu Time	2,00	Juni 2021 June 2021	Juni 2021 June 2021	100,00	2,00
	• Pabrik NPK Chemical PIM kapasitas 500.000 MTPY PIM's NPK Chemical Plant with a capacity of 500,000 MTPY	%	2,00	64,69	70,00	92,41	1,85
	• Kajian Lokasi dan Feasibility Study Pabrik Amurea dan Methanol Bintuni Site Study and Feasibility Study of Bintuni Amurea and Methanol Plant	Waktu Time	3,00	-	Desember 2021 December 2021	90,00	2,70
	• Pra Kualifikasi EPC Proyek Katalis Merah Putih Merah Putih Catalyst Project EPC Pre Qualification	Waktu Time	3,00	Juni 2021 June 2021	Juli 2021 July 2021	110,00	3,30
16	Persiapan IPO PKT PKT IPO Preparation	Waktu Time	5,00	-	Desember 2021 December 2021	80,00	4,00
Subtotal			15,00				13,85
Pengembangan Talenta Talent Development							
17	Talenta Unggul PI Grup PI Group's Excellent Talent						
	• <i>Top talent</i>	%	3,00	42,67	33,00	110,00	3,30
	• <i>Top talent</i> Milenial Millennial top talent	%	1,00	57,82	16,00	110,00	1,10
	• <i>Top talent</i> Perempuan Female top talent	%	1,00	5,60	5,00	110,00	1,10
18	Pengelolaan Riset Terpusat Centralized Research Management						
	• Implementasi Indonesia Fertilizer Institute (Digitalisasi Pengelolaan Riset) Implementation of Indonesia Fertilizer Institute (Digitalization of Research Management)	Waktu Time	2,00	November 2021	Desember 2021 December 2021	110,00	2,20
	• Kolaborasi Riset dengan Lembaga Riset Lain Research Collaboration with Other Research Institutes	Jumlah MoU / PKS Total MoU / PKS	3,00	12	6	110,00	3,30
Subtotal			10,00				11,00
Total			100,00				104,70

Dengan demikian, hasil pencapaian KPI Direksi secara Kolegial tahun 2021 memperoleh skor sebesar 104,70% atau lebih tinggi dari bobot yang ditargetkan yaitu 100,00%.

The Board of Directors' Collegial KPI achievement results in 2021 scored 104.70%, higher than the target weight of 100.00%.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN disertai perubahannya yaitu yang terakhir Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN serta Surat Keputusan Menteri BUMN No. SR-79/Wk1.MBU.D/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PTPI Tahun 2021.

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Proses penetapan remunerasi berdasarkan hasil kajian yang memperhatikan sejumlah indikator, yakni hasil kinerja keuangan Perusahaan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajaran dengan *peer Group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang memberikan motivasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kontribusinya terhadap Perusahaan. Pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tidak hanya didasarkan kepada *Key Performance Indicator* (KPI) tahunan, tetapi juga pencapaian jangka pendek maupun panjang sebagai hasil dari sistem yang telah dibangun. Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan peraturan BUMN, Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

1. Faktor Skala Usaha;
2. Faktor Kompleksitas Usaha;
3. Tingkat Inflasi;
4. Kondisi dan Kemampuan Perusahaan.

Apabila perhitungan honorarium dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka honorarium yang dipakai adalah sama dengan honorarium tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pemberian kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama;

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

The policy for determining the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors remuneration refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards of SOEs, as amended by the latest Minister of SOE Regulation No. PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 as the Sixth Amendment to the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs, as well as Minister of SOEs Decree No. SR-79/Wk1.MBU.D/10/2021 dated October 5, 2021 concerning Determining the Income for the Board of Directors and Board of Commissioners of PTPI for 2021.

Procedure for Proposing for Determination the Board of Commissioners and the Board of Directors Remuneration

The process for determining the remuneration is based on review results and by taking into account several indicators including: financial performance results and fulfillment of reserves as regulated in applicable laws and regulations, fairness with peer groups, and consideration of the Company's long-term goals and strategies.

The Company provides appropriate reward in the form of income to motivate the Board of Commissioners and Board of Directors for their contribution to the Company. The remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors is not only based on the annual Key Performance Indicator (KPI), but also on the achievements of short and long term targets as a result of the developed system. Approval for the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration is determined by the GMS. Based on SOE regulations, Shareholders determine the remuneration based on:

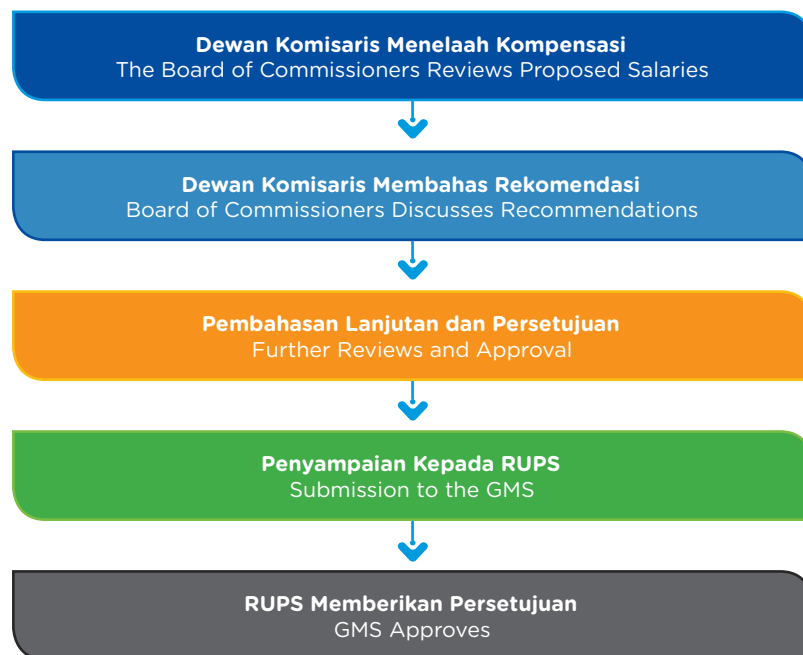
1. Business Scale Factor;
2. Business Complexity Factor;
3. Inflation Rate;
4. Conditions and Capabilities of the Company.

In the event that the honorarium calculated by taking into account the factors resulting in the honorarium to be lower than in the previous year, the honorarium used is the honorarium in the previous year. The mechanism for compensation proposal of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

1. The Board of Commissioners reviews the compensation in the market conditions for similar work in other companies in the same line of business and status;

2. Dengan memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Dewan Komisaris untuk menyiapkan rekomendasi;
 3. Usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk pembahasan dan persetujuan dalam RUPS;
 4. RUPS memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris. Skema Pemberian Remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:
2. After taking into account the Company's business performance and the contribution of each individual, the Board of Commissioners discusses and then prepares its recommendations;
 3. A proposal for members of the Board of Commissioners remuneration is submitted to Shareholders for discussion and approval at the GMS.
 4. The GMS approves and determines the remuneration of the Board of Commissioners. The Remuneration Scheme of the Company is as follows:

Prosedur Pengusulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Hingga Penetapan oleh RUPS
Procedure for Proposing the Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration up to the GMS Resolution



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

The Board of Commissioners and the Board of Directors remuneration structure refers to Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards of SOEs and their amendments. Based on these regulations, the components of the Board of Commissioners' income consist of:

Komponen dan Struktur Remunerasi Remuneration Component and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honor Salary/Honorarium	
<p>Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota dewan komisaris perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama; Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama. <p>Fixed income in the form of money received every month based on their position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following terms:</p> <ul style="list-style-type: none"> The President Commissioner's salary is 45% of the President Director's salary; Other Commissioners' salaries are 90% of the President Commissioner's salary. 	<p>Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gaji Direktur Utama ditetapkan Menggunakan Pedoman Kementerian BUMN; Perhitungan gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama; Perhitungan gaji Direktur Lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. <p>Fixed income in the form of money received every month based on their position as a member of the Company's Board of Directors, with the following terms:</p> <ul style="list-style-type: none"> The President Directors' salary is determined using Ministry of SOEs Guidelines; Calculation of the salary of the Vice President Director of 95% of the salary of the President Director; Other Directors' salaries are 85% of the President Director's salary.
Tunjangan Allowances	
<p>Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota dewan komisaris selain honorarium, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan hari raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali honorarium di setiap tahunnya; Tunjangan transportasi diberikan 20% dari honorarium per bulan; Asuransi purna jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun. <p>Income in the form of money or which can be valued with money received at a certain time by members of the board of commissioners other than honorarium, which can be in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> Holiday allowance, given at most 1 (one) time honorarium in each year; Transportation allowance is given 20% of the honorarium per month; Post-employment insurance, provided with the condition that the premium borne by the company is a maximum of 25% of the honorarium per year. 	<p>Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota direksi selain gaji, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan hari raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji di setiap tahunnya; Tunjangan perumahan diberikan sebesar Rp27.500.000 per bulan apabila perusahaan tidak menyediakan rumah jabatan; Asuransi purna jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun. <p>Income in the form of money or which can be valued with money received at a certain time by members of the board of directors other than salary, which can be in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> Holiday allowance, given at most 1 (one) time salary in each year; Housing allowance is given in the amount of Rp27,500,000 per month if the company does not provide a house for office. Post-employment insurance, provided with the condition that the premium borne by the company is a maximum of 25% of the salary per year.

Komponen dan Struktur Remunerasi Remuneration Component and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
<p>Fasilitas Facilities</p> <p>Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>); Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan perusahaan. <p>Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/used by members of the board of commissioners in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> Health facilities, provided in the form of reimbursement of medical expenses (<i>at cost</i>); Legal aid facilities, provided if needed, in the event of an action/ deed for and against name of the position related to the company. 	<p>Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai faktor jabatan; Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>); Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan perusahaan. <p>Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/used by members of the board of directors in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vehicle facilities, provided as much as 1 (one) unit of official vehicle along with maintenance and operational costs with specifications and standards according to job factors; Health facilities, provided in the form of reimbursement of medical expenses (<i>at cost</i>); Legal aid facilities, provided if needed, in the event of an action/ deed for and on behalf of the position related to the company.
<p>Tantiem Incentive</p> <ul style="list-style-type: none"> Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian <i>key performance indicators</i> melebihi 100%; Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris; Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan tantiem/insentif kinerja komisaris Utama sebesar 45% dari tantiem/insentif kinerja Direktur utama; Perhitungan komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama Tantiem is income which is an award given to members of the Board of Commissioners if the Company earn profits and do not accumulate losses. The Company can give bonuses to members of the board of commissioners based on the determination of the GMS in the ratification of the annual report if the realization of key performance indicators exceeds 100%; Performance incentives are income which is an award given to members of the Board of Commissioners; The calculation of performance bonuses/incentives for the Board of Commissioners is as follows: <ol style="list-style-type: none"> The calculation of the tantiem/performance incentive of the President Commissioner is 45% of the tantiem/performance incentive of the President Director; The calculation of other commissioners is 90% of the tantiem/performance incentive of the President Commissioner. 	<ul style="list-style-type: none"> Tantiem yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa penghargaan jangka panjang (<i>long term incentive</i>/Iti). Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian <i>key performance indicators</i> melebihi 100%; Insentif kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian; Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi direksi adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Tantiem/insentif kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN; Perhitungan tantiem/insentif kinerja Wakil Direktur Utama sebesar 90% tantiem/insentif kinerja gaji Direktur Utama Perhitungan tantiem/insentif kinerja Direktur lainnya sebesar 85% tantiem/insentif kinerja gaji Direktur Utama Tantiem is income which is an award given to members of the Board of Directors of SOEs if the Company earn profits and do not accumulate losses. Tantiem can be given in addition to long-term incentives (ITI). The company can give bonuses to members of the board of directors based on the determination of the GMS in the ratification of the annual report if the realization of key performance indicators exceeds 100%; Performance incentives, namely income which is an award given to members of the board of directors if there is an increase in performance even though they are still experiencing losses or accumulated losses; The tantiem/performance incentives calculation for the Board of Directors is as follows: <ol style="list-style-type: none"> The President Director's tantiem/performance incentives are determined using the Ministry of SOEs guidelines; Calculation of the Vice President Director's tantiem/performance incentive at 90% tantiem/performance incentives of the President Director's salary Calculation of other Directors' tantiem/performance incentives at 85% tantiem/performance incentives of the President Director's salary

Komponen dan Struktur Remunerasi Remuneration Component and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Tax on Honorarium, Allowances and Facilities	
Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas tantiem/insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris. Borne and company expense. Meanwhile, taxes on performance bonuses/incentives for the Board of Commissioners are borne and by each member of the Board of Commissioners expense.	Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas tantiem/insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi. Borne and company expense. Meanwhile, taxes on performance bonuses/incentives for the Board of Directors are borne and by the respective Directors expense.

Kebijakan Dasar terkait Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha dari emiten atau perusahaan publik sejenis;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
5. Kesesuaian peraturan dan perundang-undangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan;
6. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di luar Perusahaan.

Penetapan remunerasi Direktur Utama sebagai acuan dalam perhitungan Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya didasarkan pada pencapaian kinerja Perusahaan, yaitu:

1. Pencapaian pendapatan Perusahaan;
2. Peningkatan aktiva Perusahaan;
3. Pencapaian laba Perusahaan;
4. Peningkatan EBITDA margin;
5. Peningkatan skor KPI dari periode sebelumnya.

Principal Policy related to Indicators to Determine the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration structure, policies, and amount for the Board of Commissioners and Board of Directors must consider the following matters:

1. Remuneration applicable to the industry in accordance with the business activities and business scale of similar issuers or public companies;
2. The duties, responsibilities and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners related to the achievement of the Company's goals and performance;
3. Collegial and Individual Performance targets of each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
4. Balance between fixed and variable benefits;
5. Compliance with taxation and employment laws and regulations;
6. The principles of transparency, internal balance, and competitiveness with other companies.

The determination of the President Director' remuneration is the reference for calculating the Board of Commissioners and other Directors remuneration, and is based on the Company's performance achievement, namely:

1. The Company's revenue achievement;
2. Increase in the Company's assets;
3. The Company's profit achievement;
4. Increased EBITDA margin;
5. Improvement in KPI scores compared to the previous period.

Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi (Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/05/2019)

Remuneration Formulation for the Board of Commissioners and Board of Directors
(In Accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/05/2019)

Jabatan Position	Besaran Quantity
Direktur Utama President Director	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN) 100% (determined using Ministry of SOEs guidelines)
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Sebesar 95% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 95% of President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentives
Direktur bidang Sumber Daya Manusia Human Resources Director	Sebesar 90% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 90% of President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentives

**Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
(Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/05/2019)**
*Remuneration Formulation for the Board of Commissioners and Board of Directors
(In Accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/05/2019)*

Jabatan Position	Besaran Quantity
Direksi Lainnya Other Directors	Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 85% of President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentives
Komisaris Utama President Commissioner	Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 45% of President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentives
Komisaris Lainnya Other Commissioners	Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Honorarium/Tantiem/Performance Incentives

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun buku ditetapkan sesuai dengan Surat Kementerian BUMN Nomor No. SR-79/Wk1.MBU.D/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PTPI Tahun 2021.

Remuneration Determination for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Determination of the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration for the fiscal year is determined in accordance with the Ministry of SOEs Letter No. SR-79/Wk1.MBU.D/10/2021 dated October 5, 2021 concerning the Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PTPI in 2021.

Realisasi Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2021
Board of Commissioners Remuneration in 2021

Uraian Description	Komisaris Utama Committee President	Anggota Komisaris Committee Members
Masa Menjabat Tahun 2021 2021 Term of Office		
Penghasilan Per Bulan Income Per Month		
Honorarium Honorarium	126.000.000	113.400.000
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	25.200.000	22.680.000
Jumlah Penghasilan Per Bulan Total Income Per Month	151.200.000	136.080.000
Jumlah Penghasilan Per Tahun Total Income per Year	1.814.400.000	1.632.960.000
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	126.000.000	113.400.000
Asuransi Purna Jabatan Post Retirement Insurance	378.000.000	340.200.000
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Asuransi Kesehatan Health Insurance	Asuransi Kesehatan Health Insurance
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	-	-
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Adcost	Adcost
Pajak Remunerasi Remuneration Tax	Ditanggung Perusahaan Borne by the Company	Ditanggung Perusahaan Borne by the Company
Tantiem/Insentif Kinerja Bonus/ Performance Incentive	2.207.939.812*	2.392.418.994
Jumlah Remunerasi Tahun 2021 Total Remuneration in 2021	4.148.339.812	4.138.778.994

*) keterangan : Dihitung secara proposional sesuai masa jabatan Komisaris Utama terhitung sejak 4 Agustus 2020.

*) note : Calculated proportionally according to the President Commissioner's term of office that started on August 4, a2020.

Realisasi Remunerasi Direksi Tahun 2021
Remuneration Realization of the Board of Directors in 2021

(Rp)

Uraian Description	Direktur Utama President Director	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Direktur Lainnya Other Directors
Masa Menjabat Tahun 2021 2021 Term of Office			
Penghasilan Per Bulan Income Per Month			
Gaji Salary	280.000.000	252.000.000	238.000.000
Tunjangan Tempat Tinggal Housing Allowance	27.500.000	27.500.000	27.500.000
Jumlah Penghasilan Per Bulan Total Income Per Month	307.500.000	279.500.000	265.500.000
Jumlah Penghasilan Per Tahun Total Income Per Year	3.690.000.000	3.354.000.000	3.186.000.000
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	280.000.000	252.000.000	238.000.000
Asuransi Purna Jabatan Post Retirement Allowance	840.000.000	756.000.000	714.000.000
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Asuransi Kesehatan Health Insurance	Asuransi Kesehatan Health Insurance	Asuransi Kesehatan Health Insurance
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	1 Unit kendaraan maks. kapasitas 3.500 cc 1 Vehicle Unit max. Capacity 3.500 cc	1 Unit kendaraan maks. kapasitas 3.500 cc 1 Vehicle Unit max. Capacity 3.500 cc	1 Unit kendaraan maks. kapasitas 3.500 cc 1 Vehicle Unit max. Capacity 3.500 cc
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	<i>Adcost</i>	<i>Adcost</i>	<i>Adcost</i>
Pajak Remunerasi Remuneration Tax	Ditanggung Perusahaan Borne by the Company	Ditanggung Perusahaan Borne by the Company	Ditanggung Perusahaan Borne by the Company
Tantiem/Insentif Kinerja Bonus/ Performance Incentive	5.907.207.393	5.316.486.654	5.021.126.284
Jumlah Remunerasi Tahun 2021 Total Remuneration in 2021	9.877.207.393	8.922.486.654	8.445.126.284

Rekapitulasi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
Recapitulation of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

(Rp)

Uraian Description	Jumlah Total
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	31.119.054.769
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	64.721.044.200
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021 Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021	95.840.098.969

Rasio Gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Salary Ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees

Uraian Description	2021	2020
Direktur Utama terhadap Wakil Direktur Utama President Director to Vice President Director	1:0,9	1:0,9
Direktur Utama terhadap Direktur Lainnya President Director to Other Directors	1:0,85	1:0,85
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioners to Other Commissioners	1:0,9	1:0,9
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1:0,45	1:0,45
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi President Director to the highest-ranking Employee	1:0,28	1:0,29
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah President Director to the lowest-ranking Employee	1:0,04	1:0,04
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest-ranking Employee to lowest-ranking Employee	1:0,15	1:0,13
Karyawan Terendah terhadap Upah Minimum Regional (UMP) Rata-rata Lowest-ranking Employee to Average Regional Minimum Wage (UMP)	1:2,63	1:2,28

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikitnya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan Perusahaan. Setiap rapat Dewan Komisaris, kecuali ditentukan lain, harus dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat.

Selain rapat internal, Dewan Komisaris juga dapat melakukan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituang Direksi secara rutin mengadakan Rapat Internal Direksi.

Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama terkecuali karena suatu dan lain hal Direktur Utama berhalangan hadir dan menunjuk salah seorang Direksi untuk memimpin Rapat Direksi. Bagi Setiap anggota Direksi yang telah menerima pemberitahuan rapat secara tertulis wajib menghadiri panggilan rapat dimaksud kecuali karena sesuatu dan lain hal yang bersangkutan berhalangan hadir. Bila karena sesuatu dan lain hal anggota Direksi berhalangan hadir maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Utama atau Direktur yang menandatangani undangan rapat, selanjutnya yang bersangkutan dapat mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain sesuai dengan aturan Anggaran Dasar.

BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND JOINT MEETINGS

Meeting Policy

The Board of Commissioners holds meetings at least once a month, or according to the Company's needs. Each Board of Commissioners meeting, unless otherwise specified, must be attended by the Secretary to the Board of Commissioners. Board of Commissioners' Meeting Decisions are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that consensus is not reached, then the decision is taken based on voting. The Board of Commissioners can also take legal and binding decisions without holding a Meeting.

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners can also conduct joint meetings by inviting the Board of Directors as a form of coordination to discuss the Board of Directors' periodic reports, and to discuss business conditions and prospects as well as national policies that impact the Company's performance, and to provide responses, records and advice as outlined The Board of Directors regularly hold Internal Meetings.

The President Director will chair these meetings, or in the event that the President Director is unable to attend, one appointed Director will chair the Meeting. All Directors who receive a written notification of the meeting are required to attend unless they have valid reasons for not attending. If for any reason a director is unable to attend, the Director must notify the President Director or the Director who signed the meeting invitation, and the person concerned may delegate their responsibility to other parties in accordance with the Articles of Association.

Setiap keputusan yang diambil dalam rapat Direksi harus dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Direktur Utama/Ketua rapat yang menentukan. Adapun untuk penyampaian informasi akan diadakannya Rapat Internal Direksi, Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan dan di dalam panggilan rapat tersebut mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Realisasi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 20 kali rapat yang terdiri dari 12 rapat internal rutin dan 8 rapat internal non-rutin sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

All Board of Directors meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that this is not achieved, the decision will be based on majority votes and if the votes are equal, the President Director/ Chair of the meeting will decide. Invitations for the Board of Directors Internal Meetings will be in writing and sent to the Directors no later than 3 (three) days before the meeting is held, together with the agenda, date, time and place of the meeting.

Realization of Board of Commissioners Meetings

During 2021, the Board of Commissioners held 20 meetings consisting of 12 routine internal meetings and 8 non-routine internal meetings as shown in the table below:

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Attendance Frequency of the Board of Commissioners in Internal Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance %
Darmin Nasution	20	16	80%
Bambang Widianto	20	15	75%
Suwandi	20	17	85%
Febrio Nathan Kacaribu	20	12	60%
Ari Dwipayana	20	16	75%
Mustoha Iskandar	20	20	100%
Anhar Adel	20	16	80%
Anwar Sanusi	20	18	90%
Rata-rata Average	20	16,13	81%

Agenda Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Agenda
26 Januari 2021 January 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matriks dan kinerja perusahaan s.d. bulan November 2020; Pembahasan kinerja perusahaan s.d. bulan Desember 2020 (termasuk didalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan Rencana Penerbitan Obligasi Tahap II; Pembahasan Rencana Setoran Tambahan Modal pada PT Pilog; Pembahasan Rencana Perubahan Struktur Organisasi; Isu strategis lainnya Discussion on the follow-up to the pending matrix and the Company's performance up to November 2020; Discussion on the Company's performance up to December 2020 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the Phase II Bond Issuance Plan; Discussion on the Plan for Additional Capital Deposit at PT Pilog; Discussion on the Plan for Changes in the Organizational Structure; Other strategic issues

Agenda Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Agenda
24 Februari 2021 February 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Desember 2020. Pembahasan kinerja perusahaan bulan Januari 2021 (termasuk didalamnya template <i>monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan progress audit oleh KAP; Pembahasan Isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in December 2020. Discussion on the Company's performance in January 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payable); Discussion on the audit progress by KAP; Discussion on other strategic issues.
30 Maret 2021 March 30, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Januari 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan Februari 2021 (termasuk didalamnya template <i>monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan hasil evaluasi penerapan GCG Tahun 2020; Pembahasan Isu-isu strategis lainnya Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in January 2021; Discussion on the Company's performance in February 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payable); Discussion on the results of the GCG implementation assessment in 2020; Discussion on other strategic issues
22 April 2021 April 22, 2021	Progress Audit Laporan Keuangan tahun buku 2020 Financial Report Audit Progress for Fiscal Year 2020
26 April 2021 April 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan progress audit oleh KAP; Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Februari 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan Maret 2021 (termasuk didalamnya template <i>monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan KPI Individu Direksi; Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Discussion on audit progress by KAP; Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in February 2021; Discussion on the Company's performance in March 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payable); Discussion of Individual KPIs for the Board of Directors; Discussion on other strategic issues.
24 Mei 2021 May 24, 2021	Finalisasi Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 Finalization of Financial Statement Audit for Fiscal Year 2020
28 Mei 2021 May 28, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Maret 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan April 2021; Kelengkapan dokumen RUPS Laporan Tahunan <i>Audited</i> Tahun Buku 2020 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2020; dan Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in March 2021; Discussion on the Company's performance in April 2021; Completeness of the GMS documents, the Audited Annual Report for Fiscal Year 2020 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for 2020; and Discussion on other strategic issues.
11 Juni 2021 June 11, 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Petisi Pengadaan Discussion on Procurement Petition Follow-up
29 Juni 2021 June 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan April 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2021 (termasuk di dalamnya template <i>monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan Persiapan RUPS Laporan Tahunan <i>Audited</i> Tahun Buku 2020; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in April 2021; Discussion on the Company's Performance for May 2021 (including the monthly monitoring template for Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the Preparation of the GMS for the 2020 Fiscal Year Audited Annual Report; and Other Strategic Issues.
14 Juli 2021 July 14, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Going Concern PT Rekind; Pembahasan Usulan Shareholder Loan (SHL) kepada PT Rekind Discussion on PT Rekind as a Going Concern; Discussion on the proposed Shareholder Loan (SHL) to PT Rekind

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Agenda
28 Juli 2021 July 28, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Mei 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan Juni 2021; Pembahasan perubahan struktur organisasi PTPI; dan Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in May 2021; Discussion on the Company's performance in June 2021; Discussion on changes in the organizational structure of PTPI; and Discussion on other strategic issues.
13 Agustus 2021 August 13, 2021	Pembahasan Surat Direksi Nomor: 09761/A/PR/D41/ET/2021 tentang Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Rencana Penambahan Penyertaan Modal PTPI di PT Rekayasa Industri Discussion of the Board of Directors Letter No. 09761/A/PR/D41/ET/2021 concerning the Request for a Written Response from the Board of Commissioners on the Plan to Increase the Equity Participation of PTPI in PT Rekayasa Industri
27 Agustus 2021 August 27, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Juni 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan Juli 2021; dan Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in June 2021; Discussion on the Company's performance in July 2021; and Discussion on other strategic issues.
28 September 2021 September 28, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan s.d bulan Juli 2021; Pembahasan kinerja Perusahaan s.d bulan Agustus 2021; Pembahasan surat Direksi Nomor: 11856/A/KU/1/B11/ET/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Laporan Upaya Restrukturisasi Fasilitas Pinjaman Bersama Perbankan yang Diterima PT Rekind; Pembahasan capaian KPI Dewan Komisaris s.d Triwulan III 2021; Laporan kunjungan ke Anak Perusahaan (PT Pupuk Sriwidjaja); dan Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance until July 2021; Discussion of the Company's performance until August 2021; Discussion on the letter of the Board of Directors Number: 11856/A/KU/1/B11/ET/2021 dated September 15, 2021 concerning the Report on the Restructuring of Joint Bank Loan Facilities Received by PT Rekind; Discussion on KPI achievements of the Board of Commissioners up to Q III 2021; Reports on visits to Subsidiary (PT Pupuk Sriwidjaja); and Discussion on other strategic issues.
6 Oktober 2021 October 6, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Piagam Komite Dewan Komisaris; dan Pembahasan Metode Evaluasi Kinerja Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris. Pembahasan Piagam Komite Dewan Komisaris; dan Pembahasan Metode Evaluasi Kinerja Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.
8 Oktober 2021 October 8, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Tahun 2022; dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2022. Discussion on the Board of Commissioners' Committee Charter; and Discussion on the Committee's Performance Assessment Method and the Secretary too the Board of Commissioners.
28 Oktober 2021 October 28, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan s.d bulan Juli 2021; Pembahasan kinerja Perusahaan s.d bulan Agustus 2021; Pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2022; Laporan kunjungan ke Anak Perusahaan Surabaya dan Bali (PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kalimantan Timur); Pembahasan Rancangan RKT Tahun 2022; dan Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance until July 2021; Discussion of the Company's performance until August 2021; Discussion on the Draft 2022 WP&B; Reports on visits to Surabaya and Bali Subsidiaries (PT Petrokimia Gresik and PT Pupuk Kalimantan Timur); Discussion on the Draft 2022 RKT; and Discussion on other strategic issues.
16 November 2021 November 16, 2021	Finalisasi Piagam Komite Dewan Komisaris Finalization of the Board of Commissioners Committee Charter

Agenda Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Agenda
26 November 2021 November 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan September 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan Oktober 2021; Finalisasi form evaluasi kinerja Organ Dewan Komisaris; dan Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in September 2021; Discussion on the Company's performance in October 2021; Finalization of the performance assessment form of the Board of Commissioners' support bodies; and Discussion on other strategic issues.
28 Desember 2021 December 28, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja Perusahaan bulan Oktober 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan November 2021; Persiapan Asesmen GCG tahun 2021 oleh BPKP; dan Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up of pending matters and the Company's performance in October 2021; Discussion on the Company's performance in November 2021; Preparation of the 2021 GCG Assessment by BPKP; and Discussion on other strategic issues.

Realisasi Rapat Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan 58 (lima puluh delapan) kali rapat internal sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Realization of Board of Directors Meetings

Throughout 2021, the Board of Directors has held 58 (fifty eight) internal meetings, the details are presented in the following table.

Frekuensi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Attendance Frequency of the Board of Directors in Internal Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance %
Bakir Pasaman	58	58	100
Nugroho Christijanto	58	58	100
Winardi**	56	56	100
Gusrizal	58	58	100
Bob Indiarso	58	58	100
Panji W. Ruky	58	58	100
Eko Taufik Wibowo****	32	32	100
Listiarini Dewajanti*****	24	24	100
Jamsaton Nababan*	26	26	100
Tina T Kemala Intan***	2	2	100
Wono Budi Tjahyono***	2	2	100
Rata-rata Average	39,2	39,2	100

* Masa jabatan dimulai sejak 16 Juli 2021 | Term of Office started on July 16, 2021

** Masa jabatan berakhir pada 22 Desember 2021 | Term of Office ended on December 22, 2021

*** Masa jabatan dimulai sejak 22 Desember 2021 | Term of Office started on December 22, 2021

**** Masa jabatan berakhir pada 16 Juli 2021 | Term of Office ended on July 16, 2021

***** Masa Jabatan dimulai sejak 16 Juli 2021 s.d 22 Desember 2021 | Term of Office started on July 16, 2021 until December 22, 2021

Agenda Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
05 Januari 2021 January 5, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pendaftaran, Evaluasi, Seleksi dan <i>Monitoring</i> Kinerja Distributor. Penanganan COVID-19. Persiapan Go-Live Sentralisasi Fungsi <i> Holding</i>. Isu Kelangkaan Pupuk. Kenaikan HET Pupuk Subsidi. Proyek Shipping Out Pupuk Sriwijaya Palembang. Isu Strategis Perusahaan: Penyelesaian STG Boiler dan Hutang Pajak Proyek Amoniak P2B, Sales Operation, Tender Pengadaan KCL, Struktur Organisasi Anper, Proyek NPK PIM System for Registration, Evaluation, Selection and Monitoring of Distributor Performance. Handling Covid-19. Preparation of Go-Live Centralized Holding Function. Fertilizer Scarcity Issues. Increase in Subsidized Fertilizer HET. Fertilizer Sriwijaya Palembang Shipping Out Project. Company Strategic Issues: Settlement of STG Boiler and P2B Ammonia Project Tax Payable, Sales Operation, KCL Procurement Tender, Subsidiaries Organizational Structure, NPK PIM Project
06 Januari 2021 January 6, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Antisipasi Unjuk Rasa. Pengaturan WFH Bagi Karyawan. Persiapan Rapat Bersama Federasi Serikat Pekerja Pupuk Indonesia (FSPPPI). Anticipating Protests. WFH arrangements for employees. Preparation of the Joint Meeting of the Pupuk Indonesia Workers Union Federation (FSPPPI).
12 Januari 2021 January 12, 2021	Isu-isu Strategis Perusahaan: Corporate Strategic Issues:
17 Januari 2021 January 17, 2021	<ul style="list-style-type: none"> RKAP Perusahaan Tahun 2021. Ijin Ekspor. Materi RDP Komisi IV DPR RI. Company WP&B 2021. Export Permit. Material for DPR RI Commission IV RDP.
20 Januari 2021 January 20, 2021	Isu-isu Strategis Perusahaan Corporate Strategic Issues
02 Februari 2021 February 2, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan kompensasi bagi distributor dan kios. Isu-isu Strategis Perusahaan. Increased compensation for distributors and kiosks. Corporate Strategic Issues.
23 Februari 2021 February 23, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Informasi Hasil Rapat dengan KBUMN (dashboard <i> monitoring</i> proyek, reformasi subsidi pupuk, retail management system, IPO PKT, Akuisisi Tambang Fosfat). Persiapan Rapat <i> Monitoring</i> Anak Perusahaan (kendala operasional pabrik di PKC). Submission of Information on Meeting Results with KBUMN (project monitoring dashboard, fertilizer subsidy reform, retail management system, PKT IPO, Phosphate Mine Acquisition). Preparation of Subsidiary Monitoring Meeting (factory operational constraints in CCP).
01 Maret 2021 March 1, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Peraturan Perusahaan; Rayonisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021. Changes to Company Regulations; Regionalization of Subsidized Fertilizer Distribution in 2021.
02 Maret 2021 March 2, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan kompensasi bagi distributor dan kios. HUT PI (Tema: Agrosolusi untuk Indonesia). Kelanjutan Pekerjaan Konsultan Masterplan Increased compensation for distributors and kiosks. PI Anniversary (Theme: Agrosolution for Indonesia). Continuation of Masterplan Consultant Work
13 Maret 2021 March 13, 2021	Pengadaan bahan baku DAP Procurement of DAP raw materials

Agenda Rapat Direksi Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
16 Maret 2021 March 16, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Margin Distributor dan Kios Produk POC • Persiapan Perubahan Rayonisasi. • <i>Ship to Ship (STS) Transfer</i> • Penyaluran NPK 15-10-12. • Penghubung Petani dengan Distributor • Gedung Learning and Development Center (LDC) • Isu Sentralisasi SDM. • Pekerjaan Lanjutan Konsultan BCG • Materi Presentasi kepada Wamen I BUMN. • Determination of POC Product Distributor and Kiosk Margins • Preparation for Regionalization Changes. • Ship to Ship (STS) Transfer • Distribution of NPK 15-10-12. • Liaison between Farmers and Distributors • Learning and Development Center (LDC) building • HC Centralization Issues. • Continuing Work of BCG Consultant • Presentation materials to the Vice Minister of BUMN I.
23 Maret 2021 March 23, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • KPI Individu Direksi Tahun 2021. • Kontribusi CSR Sentra Vaksin Bersama. • Program Insentif Kinerja. • Isu Strategis Perusahaan. • Board of Directors Individual KPI 2021. • CSR Contribution to the Joint Vaccine Center. • Performance Incentive Program. • Company Strategic Issues.
30 Maret 2021 March 30, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Rapat Gabungan Direksi dan Dekom. • Isu-isu Strategis Perusahaan • Preparation for the Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners. • Company Strategic Issues
7 April 2021 April 7, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Anggaran DPR-RI. • Hasil Kunjungan Kerja ke Karawang dan Subang. • Pengadaan Bahan Baku Rock Phosphate High Grade dan KCL. • Penyelesaian Permasalahan Pajak PT Rekind. • Results of the Hearing Meeting with the DPR-RI Budget Board. • Results of Working Visits to Karawang and Subang. • Procurement of High Grade Rock Phosphate and KCL Raw Materials. • Resolution of PT Rekind's Tax Problems.
13 April 2021 April 13, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Progres Pengadaan Bahan Baku (Rock Phosphate dan KCL). • Bantuan Sentra Vaksin BUMN. • KPI tingkat SPM. • <i>Talent Management</i>. • Rencana Kerjasama dengan Bareskrim Polri. • Konsultan <i>Retail Management (RM)</i>. • Penambahan Formasi Direktorat Keuangan. • Isu Strategis • Progress of Procurement of Raw Materials (Rock Phosphate and KCL). • SOE Vaccine Center Assistance. • MSS level KPIs. • Talent Management • Plan for Cooperation with the National Police's Criminal Investigation Unit. • Retail Management Consultant (RM). • Addition and Formation of the Finance Directorate. • Strategic Issues
21 April 2021 April 21, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Hasil Rakornis POKJA Kebijakan Pupuk Subsidi. • Penyampaian Hasil Kunjungan Presiden RI ke Kab. Indramayu. • Isu Strategis Perusahaan: • Submission of the Working Group Coordination Meeting Results on Subsidized Fertilizer Policy. • Submission of the results of the President of the Republic of Indonesia visit to Kab. Indramayu. • Company Strategic Issues:
27 April 2021 April 27, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian THR bagi Karyawan, Direksi dan Dekom. • Kenaikan Margin Distributor dan Pengecer. • Laporan Program <i>Retail Management System (RMS)</i>. • Penyelamatan Cash Flow Rekind. • Rencana Penarikan Dividen PKT. • Isu Strategis Perusahaan : Rencana penandatanganan MOU antara PI dan Polowijo. • Provision of THR for Employees, Board of Directors and Board of Commissioners. • Increase in Margin of Distributors and Retailers. • Retail Management System (RMS) Program Report. • Rekind Cash Flow Rescue. • PKT Dividend Withdrawal Plan. • Corporate Strategic Issues: Plan to sign an MOU between PI and Polowijo.

Agenda Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
4 Mei 2021 May 4, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria Seleksi Talent. Pembahasan Pajak terhadap Aktivitas Sentralisasi. Audit AKN IV BPK RI Perihal Penyaluran Subsidi Pupuk. Update Hasil Pra Kualifikasi Proyek IIIB dan Proyek Ammonia Urea di Papua Barat. Talent Selection Criteria. Tax Discussion on Centralized Activities. Audit of AKN IV BPK RI Regarding Fertilizer Subsidy Distribution. Update on Pre-Qualification Results for Project IIIB and Ammonia Urea Project in West Papua.
9 Mei 2021 May 9, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan PIC Proyek Strategis Perusahaan. Persiapan Meeting dengan BPK AKN IV. Isu Strategis Perusahaan Appointment of PIC for the Company's Strategic Projects. Preparation of Meeting with BPK AKN IV. Company Strategic Issues
11 Mei 2021 May 11, 2021	<p>Agenda I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyek Prioritas Pupuk Indonesia. Program IPO PKT. Pembebanan Kerugian Proyek PT Rekind. Hasil Rapat dengan BPK RI Terkait Koreksi Volume Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 <p>Agenda II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres Pengadaan Suplai Gas Pusri IIIB, Pabrik Amurea Bintuni, dan Methanol Bintuni. Perbaikan Pabrik PT PIM. Pengadaan Bahan Baku Rock Phosphate. Tim Project Management Office (PMO) Percepatan Transformasi Operasional Pemasaran dan Reformasi Subsidi. Revisi Penyusunan RJP PI dan Anper. Program Seleksi Talent, Program Mapping, Grading dan Sistem Remunerasi. Penagihan Pembayaran Pupuk Subsidi. <p>Agenda I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pupuk Indonesia Priority Project. CCP IPO Program. Assignment of PT Rekind Project Losses. Results of Meeting with BPK RI Regarding Volume Correction of Subsidized Fertilizer Distribution in 2020 <p>Agenda II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procurement Progress of Pusri IIIB Gas Supply, Amurea Bintuni Factory, and Bintuni Methanol. Repair of PT PIM Factory. Procurement of Rock Phosphate Raw Materials. Project Management Office (PMO) Team for Accelerating Marketing Operational Transformation and Subsidy Reform. Revision of Preparation of CPR for PI and Subsidiaries. Talent Selection Program, Mapping Program, Grading and Remuneration System. Collection of Subsidized Fertilizer Payments.
16 Mei 2021 May 16, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Rencana IPO PT PKT Isu Strategis Perusahaan PT PKT IPO Plan Company Strategic Issues
18 Mei 2021 May 18, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Rapat dengan Asdep Minerba Kementerian ESDM dan Hasil Rapat dengan BPK RI - Kementan RI. Karyawan Grade I PI yang pensiun Tahun 2021. Rencana Perubahan Margin Distributor dan Pengecer. Laporan <i>Single Branding</i>. RJPP Rekind. Vaksin Gotong-Royong. Isu Strategis Perusahaan Results of the meeting with the Vice for Mineral and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources and the results of the meeting with the BPK RI - Ministry of Agriculture. PI Grade I employees retiring in 2021. Distributor and Retailer Margin Change Plan. Single Branding Report. RJPP Rekind. Gotong-Royong Vaccines. Corporate Strategic Issues
01 Juni 2021 June 1, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Produksi Rencana Pembelian Aset Gedung Menara Kadin Lantai 25 Milik PT Rekyasa Industri Isu Strategis Perusahaan Production Transformation Plan to Purchase Assets of Menara Kadin Building, 25th Floor, owned by PT Rekyasa Industri Company Strategic Issues

Agenda Rapat Direksi Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
8 Juni 2021 June 8, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Perubahan Status SEVP dari PKWT menjadi PKWTT Persiapan RUPS Kinerja (Status Penyelesaian Laporan Audit) Proposal Sponsorship Film Kadet Program Sentra Vaksinasi Bersama Usulan Penyelesaian Pinjaman Rekind Jatuh Tempo Update IPO PKT (Penunjukan Underwriter) & PMO PI Percepatan Transformasi Pemasaran, Operasional dan Subsidi Industri Pupuk serta Anggaran Benefit Konsultan BCG untuk Retail Management (RM) Isu Strategis Perusahaan Proposed Change of SEVP Status from PKWT to PKWTT Preparation of GMS Performance (Status of Completion of Audit Report) Kadet Film Sponsorship Proposal Joint Vaccination Center Program Proposed Rekind Loan Settlement Maturity Update PKT IPO (Underwriter Appointment) & PI PMO Acceleration of Marketing Transformation, Operations and Subsidies for the Fertilizer Industry and BCG Consultant Benefit Budget for Retail Management (RM) Corporate Strategic Issues
15 Juni 2021 June 15, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) PT ReKayasa Industri - Mandiri Progres Reformasi Subsidi Pupuk Isu Strategis Perusahaan : Usulan Revisi RKAP Anper Explanation on Special Transaction Loans (PTK) PT ReKayasa Industri - Mandiri Fertilizer Subsidy Reform Progress Company Strategic Issues: Proposed Revised Subsidiaries WP&B
22 Juni 2021 June 22, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Hasil Rapat dengan Menteri dan Wakil Menteri BUMN Penanganan COVID-19 di Pupuk Indonesia Usulan Remunerasi, Tantiem Direksi dan Jasa Operasi Karyawan Isu Strategis Bidang Pemasaran Submission of the results of the meeting with the Minister and Vice Minister of SOEs Handling Covid 19 at Pupuk Indonesia Proposed Remuneration, Board of Directors Tantiem and Employee Operation Services Strategic Issues in Marketing
24 Juni 2021 June 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan COVID-19 di Pupuk Indonesia. Permintaan Dukungan dari KPK. Persiapan RUPS Kinerja Tahun 2020. Isu Strategis Perusahaan: Handling COVID-19 at Pupuk Indonesia. Request for Support from KPK. Preparation of the 2020 Performance GMS. Company Strategic Issues:
30 Juni 2021 June 30, 2021	<p>Penarikan Dividen Masing-masing Anak Perusahaan Dividend Withdrawal of Each Subsidiary</p>
03 Juli 2021 July 3, 2021	<p>Pembahasan mengenai Rencana Perpanjangan Perjanjian Transaksi Khusus antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan PT ReKayasa Industri dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Discussion on the Special Transaction Agreement Extension Plan between PT Pupuk Indonesia (Persero) and PT ReKayasa Industri and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</p>
06 Juli 2021 July 6, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat dengan Menteri BUMN. Status Sebaran Paparan COVID-19 di PI Grup dan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor PI. HPP Ammonia PKC. Status Tunda Bayar dan E-Verval 2021. Pengembangan Kios Eksklusif PI Mart dan Penggunaan Jenis Pupuk Tahun 2022. Reaktivasi Pembangkit Oksigen. Pengadaan KCL. Isu Strategis Perusahaan Preparation of the Meeting with the Minister of SOEs. Status of COVID-19 Exposure Distribution at PI Group and Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) at PI Offices. PKC Ammonia HPP. Delayed Payment Status and E-Verval 2021. Development of PI Mart Exclusive Kiosk and Use of Fertilizers in 2022. Reactivation of Oxygen Generator. Procurement of KCL. Corporate Strategic Issues
09 Juli 2021 July 9, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Going Concern Rekind Opsi Penyediaan Pendanaan kepada Rekind untuk Pelunasan PTK Mandiri sebesar USD 41 juta Going Concern Rekind Option of Providing Funding to Rekind for PTK Mandiri Repayment of USD 41 million

Agenda Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
13 Juli 2021 July 13, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan SKD <i>Pro-Hire</i>. • Update Proyek Pengembangan dan Kontrak Gas PKC dan PSP • Pembayaran Cicilan Dividen • Sponsorship Film Kadet 1947 • Update Sebaran COVID-19 di PI Grup • SBU <i>Operation & Maintenance</i> dan Kelompok Ahli Produksi (KAP) & Tim Peningkatan Performa Pabrik (3P) • Isu Strategis Perusahaan • Pro-Hire SKD proposal. • Update the PKC and PSP Gas Contracts and Development Projects • Payment of Dividend Installments • Kadet Cadet Film Sponsorship • Update the Spread of Covid-19 in PI Group • SBU Operation & Maintenance and Production Expert Group (KAP) & Factory Performance Improvement Team (3P) • Corporate Strategic Issues
19 Juli 2021 July 19, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Struktur Organisasi PI • Proposed Organizational Structure of PI
20 Juli 2021 July 20, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Oksigen dan Turn Around Pabrik Kaltim 5. • Isu Strategis Perusahaan • Oxygen Assistance and Turn Around East Kalimantan Factory 5. • Company Strategic Issues
21 Juli 2021 July 21, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Alokasi dan Rayon Pupuk Bersubsidi • Changes in Subsidized Fertilizer Allocation and Rayon
27 Juli 2021 July 27, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Gas • Upaya Penyelamatan Rekind • Progress IPO PKT • Kenaikan Harga Besi/Baja • Pinjam-meminjam Bahan Baku KCL Powder antara PKG dan PKT • Aplikasi Rekomendasi Harga • Persetujuan Logo PIE menjadi PIU • Usulan Nama Pengganti Agro Solution • Gas Price • Rekind Rescue Efforts • PKT IPO Progress • Increase in Iron/Steel Prices • Lending and lending of KCL Powder Raw Materials between PKG and PKT • Price Recommended Applications • Approval of PIE Logo to PIU • Proposed Name Change for Agro Solution
01 Agustus 2021 August 1, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Jabatan SEVP, SVP dan SPM • Pengangkatan Karyawan Non Mutasi Menjadi Karyawan Tetap Pupuk Indonesia • Filling SEVP, SVP and SPM positions • Appointment of Non-Transfer Employees to Permanent Employees of Pupuk Indonesia
03 Agustus 2021 August 3, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Rapat IPO dengan Wamen I BUMN • Pemasangan Banner Pengumuman Pembelian Pupuk Bersubsidi • Rencana Penyaluran Pupuk TA 2022 • <i>Single Branding</i> • Renovasi Gedung Phonska • Laporan Pelaksanaan Vaksin Gotong Royong PI Grup • Usulan Anggaran TKNO dan COVID-19 • <i>Top Risk</i> PI • Update Upaya Penyelamatan Rekind • Preparation for the IPO Meeting with the Vice Minister of State-Owned Enterprises • Installing the Announcement Banner for the Purchase of Subsidized Fertilizer • Fertilizer Distribution Plan for FY 2022 • <i>Single Branding</i> • Phonska Building Renovation • Report on the Implementation of Gotong Royong Vaccines by PI Group • Proposed Budget for TKNO and COVID-19 • PI Top Risks • Update Rekind's Rescue Efforts

Agenda Rapat Direksi Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
10 Agustus 2021 August 10, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuk Indonesia sebagai Bapak Angkat Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) • <i>Sponsorship</i> Peraih Medali di Olimpiade Tokyo • <i>Sponsorship</i> Patriot Energi dari Kementerian ESDM • Program ATM Beras • Perubahan Logo PIE menjadi PIU • Karung NPK PKG • Valuasi PT Rekind Daya Mamuju (RDM) • Isu Strategis Lainnya • Pupuk Indonesia as the Sponso of the All-Indonesian Weightlifting Association (PABSI) • Sponsorship of Medal Winners at the Tokyo Olympics • Sponsorship of Patriot Energi from the Ministry of Energy and Mineral Resources • ATM Beras Program • Change the PIE Logo to PIU • PKG NPK Sacks • Valuation of PT Rekind Daya Mamuju (RDM) • Other Strategic Issues
17 Agustus 2021 August 17, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fertinnovation</i> • <i>Update</i> Tanggapan Dekom atas Surat PI Mengenai Permohonan Setoran Modal ke Rekind • <i>Update</i> mengenai Pelaksanaan PSO • Isu Strategis Perusahaan: • Fertinnovation • Update on the Board of Commissioners Response to the PI Letter Regarding the Application for Capital Deposit to Rekind • Update on PSO Implementation • Company Strategic Issues:
31 Agustus 2021 August 31, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Rapat dengan Wamen I BUMN • Status dan Potensi LD pada Proyek Rekind on going • <i>Data Analytic Fase I Close Out</i> dan Perbaikan Sistem WCM untuk PSO • <i>Proposal Sponsorship</i> • Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Bank Mandiri • RKAP Pemasaran Tahun 2022 • Report on the results of the meeting with the Vice Minister of State-Owned Enterprises • Status and Potential of LD on Rekind on going Project • Data Analytic Phase I Close Out and WCM System Improvement for PSO • Sponsorship Proposal • Extension of the Repayment Period for Bank Mandiri's Special Transaction Loan Facility (PTK) • Marketing WP&B 2022
07 September 2021 September 7, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan Persetujuan Pembayaran PSL dan Kenaikan iuran Normal Dapensri • Permohonan Persetujuan Mengagunkan Aktiva Tetap PT PIM untuk Penerimaan Pendanaan Kredit Investasi • Pencapaian KPI 2021 vs Usulan Tambahan Alokasi NPK PSO 2021 • Application for Approval of PSL Payments and Increase in the Normal Dapensri Contribution • Application for Approval to Pledge PT PIM's Fixed Assets for Receipt of Investment Credit Funding • Achievement of KPI 2021 vs Proposed Additional Allocation of NPK PSO 2021
14 September 2021 September 14, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Rapat dengan Menteri BUMN • Program <i>Talent Management</i> BoD-1 dan BoD-2 • <i>Addendum</i> Perjanjian Pinjaman Bersama yang Akan Jatuh Tempo • Report on the results of the meeting with the Minister of SOEs • Talent Management Program BoD-1 and BoD-2 • Addendum to the maturing Mutual Loan Agreement
22 September 2021 September 22, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak Jasa Pengadaan dan Pemasaran • Pembubaran PT Kaltim Jordan Abadi • Isu Strategis Perusahaan • Procurement and Marketing Service Contract • Dissolution of PT Kaltim Jordan Abadi • Company Strategic Issues
29 September 2021 September 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Bersama • Pembahasan Materi <i>Workshop</i> dengan Wamen I terkait Rekind • Isu Strategis Perusahaan: • Term Extension of the Joint Loan Facility • Discussion of Workshop Materials with Vice Minister I regarding Rekind • Company Strategic Issues:

Agenda Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
6 Oktober 2021 October 6, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Konsultan Pajak Rekind Ijin Ekspor Urea dan ZA Penutupan Pabrik SP-36 Izin <i>Import</i> ZA Perjanjian Kerjasama Penggunaan Fasilitas dan Sumberdaya Antar Anper Penjelasan Legal Opinion Jamdatun Terkait Asuransi Purna Jabatan Direksi dan Komisaris PI serta Perpanjangan PTK Bank Mandiri Persiapan Raker PI Grup Rekind Tax Consultant Payments Urea and ZA Export Permits SP-36 Factory Closure ZA Import Permit Cooperation Agreement on the Use of Facilities and Resources Between Subsidiaries Explanation of Jamdatun's Legal Opinion Regarding Retirement Insurance for Directors and Commissioners of PI and Extension of PTK Bank Mandiri Preparation of PI Group Working Meeting
21 Oktober 2021 October 21, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Volume dan kebutuhan anggaran subsidi Pupuk TA 2022 Penghapusbukuan Aset Tetap Bangunan dan Prasarana PSP Laporan Penyaluran Bantuan Pembangunan Islamic Center UGM Rencana Renovasi Gedung PUSRI Kemanggisan Fertilizer subsidy budget volume and requirement for FY 2022 Write-off of PSP Buildings and Infrastructure Fixed Assets Report on the Distribution of UGM Islamic Center Development Assistance PUSRI Kemanggisan Building Renovation Plan
27 Oktober 2021 October 27, 2021	Pembelian Aset PT Sang Hyang Seri (Persero) Purchase of PT Sang Hyang Seri (Persero) Assets
27 Oktober 2021 October 27, 2021	Perpanjangan Jangka Waktu Pemberian Kredit atas Perjanjian Kredit Deutsche Bank Extension of the Deutsche Bank Credit Agreement Loan Term
27 Oktober 2021 October 27, 2021	Perpanjangan Perjanjian Kredit antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan dengan MUFG Bank Ltd. Extension of the Credit Agreement between PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries and MUFG Bank Ltd.
2 November 2021 November 2, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) Isu Strategis Perusahaan Jambaran Tiung Biru (JTB) Project Company Strategic Issues
22 November 2021 November 22, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Menteri BUMN terkait: <ol style="list-style-type: none"> <i>Certified Internal Auditor Executive</i> (CIAE) Pendampingan BPKP untuk Pelaksanaan Pengadaan Bahan Baku Kontrak Jangka Panjang Penjualan Pupuk Komersil Laporan Kinerja Instructions of the Minister of SOEs regarding: <ol style="list-style-type: none"> <i>Certified Internal Auditor Executive</i> (CIAE) Assistance with BPKP for the Implementation of Raw Material Procurement Long Term Commercial Fertilizer Sales Contract Performance Report
26 November 2021 November 26, 2021	Fasilitas Kredit Bank Mandiri untuk PT Rekyasa Industri Bank Mandiri Credit Facility for PT Rekyasa Industri
9 Desember 2021 December 9, 2021	Rancangan RKAP PTPI Tahun 2021 PTPI 2021 Draft WP&B
13 Desember 2021 December 13, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Business Model Kios PI Pasti Ada Pinjaman KMK Rekind untuk Pelunasan NCL PI Kiosk Business Model Must Exist Rekind KMK Loan for NCL Repayment
21 Desember 2021 December 21, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Fasilitas Kredit NCL Rekind <i>Soft Launching Single Branding</i> Usulan RKAP NPK 2022 Pembelian Asset Kantor Rekind Sosialisasi E-Meterai Pengadaan Phosphate Rock Completion of NCL Rekind Credit Facility Soft Launch Single Branding Proposed WP&B NPK 2022 Purchase of Rekind Office Assets E-Stamp Socialization Procurement of Phosphate Rock

Agenda Rapat Direksi Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
24 Desember 2021 December 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan Fasilitas Kredit Bank Mandiri untuk PT ReKayasa Industri (Rekind) Untuk PT ReKayasa Industri (Rekind)/Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Extension of Bank Mandiri Credit Facility for PT ReKayasa Industri (Rekind) For PT ReKayasa Industri (Rekind)/Special Transaction Loans (PTK)
30 Desember 2021 December 30, 2021	Restrukturisasi dan Penjualan Aset PT ReKayasa Industri Restructuring and Selling of PT ReKayasa Industri Assets

Realisasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan 18 kali rapat gabungan yang terdiri dari 12 rapat gabungan rutin dan 6 rapat gabungan non rutin sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Realization of Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

During 2021, the Board of Commissioners and the Board of Directors held 18 joint meetings consisting of 12 regular joint meetings and 6 non-routine joint meetings as shown in the table below.

Peserta Participants	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance %
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Darmin Nasution	18	16	89%
Bambang Widianto	18	15	83%
Suwandi	18	16	89%
Febrio Nathan Kacaribu	18	13	72%
Ari Dwipayana	18	16	89%
Mustoha Iskandar	18	18	100%
Anhar Adel	18	15	83%
Anwar Sanusi	18	17	94%
Direksi Board of Directors			
Bakir Pasaman	18	18	100%
Nugroho Christijanto	18	18	100%
Winardi**	17	17	100%
Gusrizal	18	18	100%
Bob Indiarso	18	18	100%
Panji W. Ruky	18	18	100%
Eko Taufik Wibowo****	11	11	100%
Listiarini Dewajanti*****	6	6	100%
Jamsaton Nababan*	7	7	100%
Tina T Kemala Intan***	1	1	100%
Wono Budi Tjahyono***	1	1	100%

* Masa jabatan dimulai sejak 16 Juli 2021 | Term of Office started on July 16, 2021

** Masa jabatan berakhir pada 22 Desember 2021 | Term of Office ended on December 22, 2021

*** Masa jabatan dimulai sejak 22 Desember 2021 | Term of Office started on December 22, 2021

**** Masa jabatan berakhir pada 16 Juli 2021 | Term of Office ended on July 16, 2021

***** Masa Jabatan dimulai sejak 16 Juli 2021 s.d 22 Desember 2021 | Term of Office started on July 16, 2021 until December 22, 2021

Agenda Rapat Gabungan

Joint Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
29 Januari 2021 January 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matriks dan kinerja perusahaan s.d. bulan November 2020; Pembahasan kinerja perusahaan s.d. bulan Desember 2020 (termasuk didalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan Rencana Penerbitan Obligasi Tahap II; Pembahasan Rencana Setoran Tambahan Modal pada PT Pilog; Pembahasan Rencana Perubahan Struktur Organisasi; Isu strategis lainnya. Discussion on follow-up to the pending matrix and the Company's performance up to November 2020; Discussion on the Company's performance up to December 2020 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress on the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on Phase II Bond Issuance Plan; Discussion on Plan for Additional Capital Deposit at PT Pilog; Discussion on Plan for Changes in Organizational Structure; Other strategic issues.
18 Februari 2021 February 18, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai isu kelangkaan pupuk di lapangan; Pembahasan surat Direksi Nomor 1432/A/KU/B12/ET/2021 tanggal 10 Februari 2021 khususnya mengenai Pelaksanaan Hedging Nilai Tukar Valas PI Grup 2020. Discussion on the issue of scarcity of fertilizers in the field; Discussion on the letter of Board of Directors Number 1432/A/KU/B12/ET/2021 dated February 10, 2021, in particular regarding the Implementation of PI Group 2020 Foreign Exchange Hedging.
18 Februari 2021 February 18, 2021	Pembahasan mengenai Persiapan Penyampaian Calon Talent BOD-1 Discussion on Preparation for Submission of BOD-1 Talent Candidates
25 Februari 2021 February 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan s.d. bulan Desember 2020; Pembahasan kinerja bulan Januari 2021 (termasuk didalamnya template <i>monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan mengenai Persiapan Penyampaian Calon Talent BOD-1; Pembahasan Progress Audit Tahun Buku 2020; Isu-isu strategis lainnya. Discussion on follow-up on pending matters and Company's performance up to and including December 2020; Discussion on performance for January 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on Preparation for Submission of BOD-1 Talent Candidates; Discussion on Audit Progress for Fiscal Year 2020; 5. Other strategic issues.
24 Maret 2021 March 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Dewan Komisaris atas tindak lanjut kinerja perusahaan s.d. bulan Januari 2021; Pembahasan kinerja bulan Februari 2021 (termasuk didalamnya template <i>monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan mengenai pembentukan Cluster Talent Committee PTPI; Isu-isu strategis lainnya Directives from the Board of Commissioners on the follow-up to the Company's performance up to January 2021; Discussion on the performance of February 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the formation of the PT Pupuk Indonesia (Persero) Cluster Talent Committee; Other strategic issues.
31 Maret 2021 March 31, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Dewan Komisaris atas tindak lanjut kinerja perusahaan s.d. bulan Januari 2021; Pembahasan kinerja bulan Februari 2021 (termasuk didalamnya template <i>monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan mengenai pembentukan Cluster Talent Committee PTPI; Isu-isu strategis lainnya Directives from the Board of Commissioners on the follow-up to the Company's performance up to January 2021; Discussion on the performance for February 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the formation of the PT Pupuk Indonesia (Persero) Cluster Talent Committee; Other strategic issues
28 April 2021 April 28, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Dewan Komisaris atas tindak lanjut pending matriks dan kinerja perusahaan s.d. bulan Februari 2021; Pembahasan Hasil Laporan Audit Bersama Proyek Banggai Amoniak Plant di Rekind oleh SPI (Nomor:23/SPI/LHA08/PKPT-AP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020) Pembahasan kinerja perusahaan bulan Maret 2021 (termasuk didalamnya template <i>monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Directives from the Board of Commissioners on the follow-up to the pending matrix and Company performance up to February 2021; Discussion on the results of the Banggai Project Joint Audit Report Ammonia Plant Rekind by SPI (Number: 23/SPI/LHA08/PKPT-AP/XII/2020, December 30, 2020); Discussion on the Company's performance in March 2021 (including the monthly monitoring template for Vice Minister of BUMN I and progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion of other strategic issues.

Agenda Rapat Gabungan Joint Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
31 Mei 2021 May 31, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Dewan Komisaris atas tindak lanjut kinerja perusahaan s.d. bulan Maret 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan April 2021 (termasuk didalamnya <i>template monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Persiapan RUPS Laporan Tahunan Audited Tahun Buku 2020; Usulan Remunerasi 2021 & Tantiem atas Kinerja 2020; Pembahasan isu-isu strategis lainnya. Directives from the Board of Commissioners on the follow-up to the Company's performance up to March 2021; Discussion on the Company's performance in April 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Preparation of GMS Audited Annual Report for Fiscal Year 2020; Proposed 2021 Remuneration & Tantiem for 2020 Performance; Discussion on other strategic issues.
15 Juni 2021 June 15, 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Petisi Pengadaan Discussion on Procurement Petition Follow-up
18 Juni 2021 June 18, 2021	Pembahasan Dampak Perubahan Fungsi Holding Menjadi Activist Holding (Kondisi Before-After) dan Sentralisasi Beberapa Fungsi Discussion on the Impact of Changing the Holding Function to Activist Holding (Before-After Conditions) and Centralization of Several Functions
29 Juni 2021 June 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan April 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2021 (termasuk di dalamnya <i>template monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan Persiapan RUPS Laporan Tahunan Audited Tahun Buku 2020; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the April 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance for May 2021 (including the monthly monitoring template for Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the Preparation for the GMS for the 2020 Fiscal Year Audited Annual Report; and Other Strategic Issues.
29 Juli 2021 July 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Dewan Komisaris atas Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Mei 2021; Pembahasan Laporan Manajemen Semester I/kinerja s.d. Bulan Juni Tahun 2021; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Directives from the Board of Commissioners on the follow-up/pending matters resulting from the performance meeting in May 2021; Discussion on Management Reports for Semester I/ performance up to June 2021; and Other Strategic Issues.
16 Agustus 2021 August 16, 2021	Arahan Dewan Komisaris atas Rencana Penambahan Modal PTPI pada PT Rekayasa Industri Directives from the Board of Commissioners on the Plan to Increase the PTPI Capital in PT Rekayasa Industri
30 Agustus 2021 August 30, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Juni 2021; Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Juli 2021; Pembahasan rancangan RKAP Tahun 2022; Pembahasan Pencapaian KPI Kolegal dan KPI Individu Direksi s.d Juli 2021; Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya Discussion on the follow-up on pending matters and the Company's performance in June 2021; Discussion on the Company's performance in July 2021; Discussion of the 2022 WP&B draft; Discussion on the Achievement of Collegial KPI and Individual KPI for the Board of Directors until July 2021; Discussion of Other Strategic Issues
30 September 2021 September 30, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Juli 2021; Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Agustus 2021; Pembahasan surat Direksi Nomor: 11856/A/KU/1/B11/ET/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Laporan Upaya Restrukturisasi Fasilitas Pinjaman Bersama Perbankan yang Diterima PT Rekind; dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up on pending matters and Company performance in July 2021; Discussion of the Company's performance in August 2021; Discussion on the letter of the Board of Directors No. 11856/A/KU/1/B11/ET/2021 dated September 15, 2021 concerning the Report on the Restructuring of Joint Bank Loan Facilitation Received by PT Rekind; and Discussion of Other Strategic Issues.
29 Oktober 2021 October 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembacaan arahan Dewan Komisaris atas tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Agustus 2021; Pembahasan kinerja Perusahaan bulan September 2021; Finalisasi Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan/RKAP 2022 dan; Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya Reading the directives from the Board of Commissioners on the follow-up on pending matters and the company's performance in August 2021; Discussion on the Company's performance in September 2021; Finalization of the 2022 Corporate Budget Work Plan/WP&B and; Discussion on Other Strategic Issues

Agenda Rapat Gabungan Joint Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
30 November 2021 November 30, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembacaan arahan Dewan Komisaris atas tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan September 2021; Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Oktober 2021; dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya Reading the directives from the Board of Commissioners on the follow-up on pending matters and the Company's performance in September 2021; Discussion on the Company's performance in October 2021; and Discussion of Other Strategic Issues
29 Desember 2021 December 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembacaan arahan Dewan Komisaris atas tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Oktober 2021; Pembahasan kinerja Perusahaan bulan November 2021; Pembahasan Inisiatif Strategis KPI Kolegial tahun 2022; dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. Reading the directives from the Board of Commissioners on the follow-up on pending matters and the Company's performance in October 2021; Discussion on the Company's performance in November 2021; Discussion on Collegial KPI Strategic Initiatives for 2022; and Discussion on Other Strategic Issues.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 4 (empat) organ, yaitu Komite Audit, Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Sekretariat Dewan Komisaris. Di samping itu, Dewan Komisaris menjalankan fungsi remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memimpin Sekretariat Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Gempita Pratiwi. Beliau menjabat sejak 31 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP. KOM/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

SUPPORTING BODIES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory duties and responsibilities, as well as provision of advice and recommendations, the Board of Commissioners is assisted by 4 (four) organs, namely the Audit Committee, the GCG and Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and the Board of Commissioners Secretariat. In addition, the Board of Commissioners manages the remuneration function for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners leads the Secretariat to assist the Board of Commissioners in the smooth administration of their duties and responsibilities.

Term of Office

In accordance with Article 5 of Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Bodies of the Board of Commissioners/ Supervisory Boards of SOEs, the term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is set by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and they can be reappointed for a maximum of 2 (two) years.

Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners is Gempita Pratiwi, who has served since January 31, 2020 based on the Board of Commissioners Decree No. 04/KEP. KOM/I/2020 dated January 31, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero).

Gempita Pratiwi

Periode Jabatan Position Period	:	Ke-1 First
Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	34 tahun 34 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place and Date of Birth	:	Palembang, 17 Juli 1987 Palembang, July 17, 1987
Domisili Domicile	:	Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP. KOM/1/2020 Board of Commissioners Decree No. 04/KEP. KOM/1/2020
Pendidikan Education	:	S1 Bachelor's Degree
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Staff Dekom/Dewas PT Perkebunan Nusantara IX • Sekretaris Dekom/Dewas PT Djakarta Lloyd • Staff of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of PT Perkebunan Nusantara IX • Secretary to the Board of Commissioners/ Supervisory Board of PT Djakarta Lloyd

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Rincian tugas yang diemban oleh Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan dalam uraian di bawah ini:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Rincian realisasi pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan tahunan ini.

Secretary to the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities

Details of the duties carried out by the Secretary to the Board of Commissioners are presented in the following description:

1. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies GCG principles;
2. Providing information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Coordinating Committee members, if needed in order to expedite the duties of the Board of Commissioners;
4. As liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Details on the realization of competency development of the Secretary to the Board of Commissioners are presented in the "Company Profile" chapter contained in this annual report.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021*Duties Implementation of Duties in 2021*

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1 Surat Keluar/Surat Keputusan/Memo Outgoing Letters/Decision Letters/Memos													
	Surat Tanggapan Kinerja Bulanan Monthly Performance Response Letters	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Surat Tanggapan Dekom/Persetujuan Aksi Korporasi Board of Commissioners Response Letters/ Corporate Action Approval	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Surat Tanggapan RKAP 2022 Response Letters for RKAP 2022										✓		
	Surat Tanggapan Audit 2020 Audit Response Letters 2020	✓				✓		✓		✓			
	Rapat Lainnya Other Meetings	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Surat Keputusan Decrees		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Memo Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners Communications Memos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 Rencana Kerja dan/atau Laporan Dewan Komisaris Work Plan and/or Board of Commissioners Reports													
	RKA Tahun 2022 RKA 2022										✓		✓
	Laporan Pengawasan TW IV Tahun 2020 2020 Q IV Supervisory Report		✓										
	Laporan Pengawasan TW I Tahun 2021 2021 Q I Supervisory Report					✓							
	Laporan Pengawasan TW II Tahun 2021 2021 Q II Supervisory Report								✓				
	Laporan Pengawasan TW III Tahun 2021 2021 Q III Supervisory Report											✓	
3 Risalah Rapat Minutes of Meetings													
	Risalah Rapat Internal Minutes of Internal Meetings	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Risalah Rapat Gabungan Minutes of Joint Meetings	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Koordinasi Organ Dekom (Sekretariat dan Komite) Coordination of Board of Commissioners (Secretariat and Committee) Organs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Perjalanan Dinas (Mendampingi Dekom Kunker Anper) Official Travel (Accompanying the BOC Subsidiary Work Visits)									✓	✓		

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 Duties Implementation of Duties in 2021

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
6.	Tugas Lainnya dari Dewan Komisaris (bila ada) Other Duties of the Board of Commissioners (if any)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Komite Audit

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Pembentukan Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Kualifikasi Komite Audit

Untuk dapat menjadi anggota Komite Audit khususnya dari pihak independen, seseorang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki integritas yang baik, profesional, dan mempunyai pengetahuan, serta pengalaman kerja yang cukup di bidang keuangan/akuntansi/teknis dan/atau pengawasan/pemeriksaan.
- Mampu berkomunikasi secara efektif.
- Dapat menyediakan waktu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
- Tidak memiliki benturan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
- Anggota Komite Audit yang berasal dari luar perusahaan (bukan anggota Dewan Komisaris) tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PI Grup.
 - Anggota Komite Audit pada Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PI Grup.
 - Anggota Komite Audit pada BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN lain.
 - Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan

Audit Committee

The Board of Commissioners established an Audit Committee to assist the duties of the Board of Commissioners to encourage the implementation of good corporate governance, an adequate internal control structure, improve the quality of transparency and financial disclosure, as well as to assess the scope, independence and objectivity of the public accountants. The Audit Committee was established in compliance with the Ministry of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Bodies for the Board of Commissioners/Supervisory Boards of SOEs, as well as OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Implementation of Audit Committee.

Audit Committee Qualifications

To become a member of the Audit Committee, especially for independent parties, they must meet the following requirements:

- Have good integrity, be professional, and have knowledge, as well as sufficient work experience in finance/accounting/technical and/or supervision/auditing.
- Ability to communicate effectively.
- Can provide time to complete duties and responsibilities.
- Does not have any personal conflict of interest that can have a negative impact and conflict of interest with the Company.
- Members of the Audit Committee from outside the Company (not members of the Board of Commissioners) may not hold concurrent positions as:
 - Member of the Board of Commissioners of the PI Group's Subsidiaries and Second Tier Subsidiaries.
 - Member of the Audit Committee of the PI Group's Subsidiaries and Second Tier Subsidiaries.
 - Member of the Audit Committee in BUMN and/or subsidiaries of other BUMN.
 - Other positions that are prohibited from being held concurrently based on the Company's internal policies and/or applicable laws and regulations.

Appointment and Dismissal

The appointment and dismissal of members of the Audit Committee is carried out by the Board of Commissioners through a decree. The dismissal of members of the Audit Committee can be carried out if the members finished their term of office and based on the decision of the Board

Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan anggota Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, pada Pasal 20 yang menyatakan, "Masa jabatan anggota komite lain yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu".

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, terdapat perubahan atau pergantian pada komposisi dan susunan Komite Audit, sebagai berikut:

of Commissioners, dismissed in the event that they are not able to meet the prescribed performance and/or incompetent in carrying out their duties.

Term of Office

Provisions for the term of office of members of the Audit Committee are regulated in Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Boards of SOEs, in Article 20 which states, "The term of office of other committee members who are not members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of the Company is no longer than 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years of service, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/ Supervisory Board to dismiss it at any time".

Number, Composition, and Structure of the Audit Committee in 2020

In 2021, there were changes to the composition and structure of the Audit Committee, as follows:

Susunan Komite Audit Audit Committee Structure

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP. KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 Board of Commissioners Decision No. 03/KEP. KOM/III/2021 dated March 5, 2021	14 Agustus 2020- bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris August 14, 2020- concurrently with the term of office as Commissioner	Ke-1 First
Bambang Widianto	Wakil Ketua komite Audit I Vive Chairman I of the Audit Committee	Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP. KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Board of Commissioners Decision No.08/KEP. KOM/VIII/2020 dated 14 August 2020	14 Agustus 2020-5 Maret 2021 August 14,2020- March 5, 2021	Ke-1 First
Febrio Nathan Kacaribu	Wakil Ketua komite Audit II Vive Chairman II of the Audit Committee	Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP. KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Board of Commissioners Decision No.08/KEP. KOM/VIII/2020 dated 14 August 2020	14 Agustus 2020-5 Maret 2021 August 14,2020- March 5, 2021	Ke-1 First
Mustoha Iskandar	Wakil Ketua Komite Audit Vice Chairman of the Audit Committee	Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP. KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 Board of Commissioners Decision No. 03/KEP. KOM/III/2021 dated March 5, 2021	5 Maret 2021- bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris March 5, 2021- concurrently with the term of office as Commissioner	Ke-1 First
M. Sapto Setiawan	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP.KOM/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05/KEP.KOM/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 Board of Commissioners Decree No. 01/KEP. KOM/II/2017 dated February 13, 2017 Board of Commissioners Decree No. 05/KEP.KOM/XII/2019 dated December 18, 2019 	3 Februari 2020-27 September 2021 February 3, 2020- September 27,2021	Ke-2 Second
Christine Tjen	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 19/KEP. KOM/XI/2020 tanggal 15 November 2020 Board of Commissioners Decision No. 19/KEP. KOM/XI/2020 dated November 15, 2020	15 November 2020-14 November 2023 November 15, 2020-14 November 2023	Ke-1 First
RM. Wiratmoko Prasidhanto	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12/KEP. KOM/IX/2021 tanggal 27 September 2021 Board of Commissioners Decree No. 12/KEP. KOM/IX/2021 dated September 27, 2021	27 September 2021 -26 September 2024 September 27, 2021 - September 26, 2024	Ke-1 First

Profil Ketua dan Anggota Komite Audit

Profile of Chairman and Members of the Audit Committee

Darmin Nasution

Ketua Komite Audit

Chairman of the Audit Committee

Rincian profil disampaikan secara pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Details of the profile are presented in the “Profile of the Board of Commissioners” section contained in the “Company Profile” Chapter of this Annual Report.

Mustoha Iskandar

Wakil Ketua Komite Audit

Vice Chairman of the Audit Committee

Rincian profil disampaikan secara pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Details of the profile are presented in the “Profile of the Board of Commissioners” section contained in the “Company Profile” Chapter of this Annual Report.

M. Sapto Setiawan

Anggota Komite Audit

Member of the Audit Committee

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	39 tahun 39 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place and Date of Birth	:	Pekalongan, 27 September 1983 Pekalongan, September 27, 1983
Domisili Domicile	:	Tangerang Selatan, Banten Tangerang Selatan, Banten
Pendidikan Education	:	<ul style="list-style-type: none"> Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia (2015) D4 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (2010); D3 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (2006). Master's Degree in Accounting from Universitas Indonesia (2015) Diploma 4 in Accounting from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (2010) Diploma 3 in Accounting from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (2006)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	Kepala Subbidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata IIA-1, Kementerian BUMN (2017-sekarang). Head of the IIA-1 Energy, Logistics, Regions and Tourism Subdivision, Ministry of SOEs (2007-present)

Christine Tjen

Anggota Komite Audit

Member of the Audit Committee

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	43 tahun 43 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place and Date of Birth	:	Tangerang, 3 Agustus 1978 Tangerang, August 3, 1978
Domisili Domicile	:	Jakarta
Pendidikan Education	:	<ul style="list-style-type: none"> University of Sydney, Sydney NSW Master of <i>International</i> Taxation (2006); University of Indonesia, Depok, Indonesia Bachelor in Accounting (2000); University of Sydney, Sydney NSW Master of International Taxation (2006) University of Indonesia, Depok, Indonesia Bachelor in Accounting (2000)

Christine Tjen**Anggota Komite Audit**
Member of the Audit Committee

Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coordinator at Tax Education and Research Center FEB UI</i> Period: November 2018-Sekarang; • <i>Associate Director for Administration and Finance LPEM FEB UI</i> Period: January 2015-Sekarang; • <i>Risk Management Committee PT Perusahaan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC</i> Maret 2016-2020. • <i>Coordinator at Tax Education and Research Center FEB UI</i> Period: November 2018-present; • <i>Associate Director for Administration and Finance LPEM FEB UI</i> Period: January 2015-present; • <i>Risk Management Committee at PT Perusahaan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC</i> Maret 2016-2020.
-------------------------------------	---	---

RM. Wiratmoko Prasadhanto**Anggota Komite Audit**
Audit Committee Member

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	39 tahun 39 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place, Bate of Birth	:	Yogyakarta, 20 Agustus 1982 Yogyakarta, August 20, 1982
Domisili Domicile	:	Jakarta
Pendidikan Education	:	<ul style="list-style-type: none"> • S1 – Akuntansi Universitas Indonesia (2009); • S1 – Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003); • Bachelor's degree in Accounting from Universitas Indonesia (2009); • Bachelor's degree in Accounting from State College of Accountancy (2003);
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian BUMN <ul style="list-style-type: none"> a. Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Subkoordinator MR-1 (Desember 2020 - Sekarang); b. Pengendali Sub Fungsi MR-1 (Juni - Desember 2020); c. Kasubbid Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb-2 (Januari 2019 - Juni 2020); • Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (Juni 2018 - Agustus 2021). <ul style="list-style-type: none"> • Ministry of SOEs <ul style="list-style-type: none"> a. Junior State Corporate Governance at MR-1 Sub-Coordinator (December 2020 - Present); b. - Controller MR-1 Sub-Function (June - December 2020); c. - Head of Sub-Division of Construction and Transportation Facilities and Infrastructure Business IIIb-2 (January 2019 - June 2020); • Secretary to the Board of Commissioners of PT Pupuk Kalimantan Timur (June 2018 - August 2021).

Independensi Komite Audit

Independensi adalah syarat menjadi Komite Audit. Seorang anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional sebagaimana diatur dalam Audit Committee Charter yang diperbaharui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum dalam Audit Committee Charter, anggota Komite di bawah Dewan Komisaris menandatangani pernyataan independensi Komite Audit.

Independence of the Audit Committee

Independency is an absolute requirement for the Audit Committee. An Audit Committee member must be independent, objective and professional as regulated in the Audit Committee Charter that is updated based on the applicable laws and regulations. In addition to being stated in the Audit Committee Charter, Committee members under the Board of Commissioners sign an Audit Committee statement of independency.

Pengungkapan Independensi Komite Audit Audit Committee Disclosure of Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Darmin Nasution	Mustoha Iskandar	M. Sapto Setiawan	Christine Tjen	RM. Wiratmoko Prasidhanto
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has a management relationship in the Company, Subsidiaries, and Affiliated Entities	x	x	x	x	x
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Owns Company shares, both directly and indirectly	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Has familial relations with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Committee members	x	x	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah Serves as a political party, official, and government administrator	x	x	x	x	x



Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 06/KEP.KOM/XII/2019 tentang Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia tanggal 20 Desember 2019 sebagai acuan Komite Audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*. Kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite Audit dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melakukan pemutakhiran atas Piagam Komite Audit dan telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP.KOM/XI/2021 tanggal 5 November 2021.

Work Guidelines: Audit Committee Charter

The Board of Commissioners established work guidelines to support the implementation of the Audit Committee duties, which were based on Decree 06/KEP.KOM/XII/2019 concerning the PT Pupuk Indonesia (Persero) Audit Committee Charter dated December 20, 2019, as a reference for the Audit Committee in carrying out their duties and functions so as to meet the Good Corporate Governance provisions. This guideline policy binds and regulates the Audit Committee members when carrying out their activities. In 2021, the Company updated the Audit Committee Charter through Board of Commissioners Decree No. 014/KEP.KOM/XI/2021 dated November 5, 2021.

Audit Committee Charter (Piagam Komite Audit) mengatur hal-hal mengenai: Visi & Misi, Fungsi, Peran & Tanggung Jawab, Tugas Komite Audit, Hubungan dengan Pihak-Pihak Terkait, Keanggotaan Komite Audit, Persyaratan Anggota, Rapat Anggota, Remunerasi & Anggaran, Kode Etik, Pelaporan, Evaluasi Kinerja, dan Pemberlakuan & Penyempurnaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Secara rinci, tugas Komite Audit adalah:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
6. Memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku;
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan dan kepatuhan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Perusahaan dengan pihak ketiga;
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa;
9. Melakukan penelaahan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholders yang disampaikan secara langsung kepada Dewan Komisaris;
10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

The Audit Committee Charter regulates matters related to the Vision & Mission, Functions, Roles & Responsibilities, Audit Committee Duties, Relationships with Related Parties, Audit Committee Membership, Membership Requirements, Members' Meetings, Remuneration & Budget, Code of Ethics, Reporting, Performance Assessments, and Enforcement & Refinement.

Duties and Responsibilities

The Audit Committee is tasked with providing opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters requiring the Board of Commissioners' attention, and carrying out other tasks related to the Board of Commissioners' duties. In detail, the duties of the Audit Committee are:

1. Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system, and the effectiveness of the external and internal auditors' duties;
2. Assessing the of audit activities and results carried out by the Internal Audit Unit and external auditors;
3. Providing recommendations for improving the management control system and its application;
4. Ensuring there are satisfactory evaluation procedures for all information published by the Company;
5. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners;
6. Ensuring the financial statements are presented fairly in accordance with applicable accounting principles;
7. Reviewing compliance with laws and regulations applicable to the Company's activities, and compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties;
8. Providing recommendations to the Board of Commissioners for the appointment of an external auditor based on independence, scope of assignment, and remuneration;
9. Reviewing suggestions, problems or complaints from stakeholders submitted directly to the Board of Commissioners;
10. Carrying out other supervisory duties as requested by the Board of Commissioners.

When carrying out its duties, the Audit Committee is authorized to access records or information on employees, funds, assets, and other Company resources related to their duties.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perusahaan mengikutsertakan Anggota Komite Audit dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menyelenggarakan 20 kali rapat dengan rekapitulasi kehadiran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Audit Committee Competency Development

The Company includes members of the Audit Committee in competency development activities that are carried out through various trainings and education with funding fully the responsibility of the Company. The list of Audit Committee training and competency development activities in 2021 can be viewed in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Audit Committee Meeting

In 2021, the Audit Committee held 20 meetings. The following is a recapitulation of the attendance of the Audit Committee meetings as attached in the following.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Tahun 2021 Audit Committee Meeting Attendance Recapitulation in 2021

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance %
Darmin Nasution	20	16	80%
Mustoha Iskandar	20	19	95%
M. Sapto Setiawan*	12	12	100%
Christine Tjen	20	20	100%
RM. Wiratmoko Prasadhanto**	8	8	100%
Rata-rata Average	16	15	95%

* Masa jabatan dimulai sejak 3 Februari 2020 s.d 27 September 2021 | Term of Office started on February 3, 2020 until September 27, 2021

** Masa jabatan dimulai sejak 27 September 2021 | Term of Office started on September 27, 2021

Agenda Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Meeting Agenda
25 Januari 2021 January 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan November 2020; Pembahasan kinerja perusahaan bulan Desember 2020 (termasuk didalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan update Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2020 Isu-isu strategis lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the November 2020 performance meeting; Discussion on the Company's performance in December 2020 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payable); Discussion on the 2020 Financial Report Audit Progress Update Other strategic issues.
10 Februari 2021 February 10, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Temuan-temuan Audit SPI Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI Discussion on SPI Audit Findings Internal Monitoring Work Development by SPI.
23 Februari 2021 February 23, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Desember 2020. Pembahasan kinerja perusahaan bulan Januari 2021 (termasuk didalamnya template <i>monthly monitoring</i> Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan progress audit oleh KAP; Pembahasan Isu-isu strategis lainnya Discussion of the follow-up on pending matters and the company's performance in December 2020. Discussion on the company's performance in January 2021 (including monthly monitoring template for the Deputy Minister of SOE I and the progress of the realization of trade receivables and accounts payable position); Discussion of audit progress by KAP; Discussion of other strategic issue.

Agenda Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Meeting Agenda
26 Maret 2021 March 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Januari 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan Februari 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Progres realisasi dan langkah-langkah pencapaian KPI Kolegial PT Pupuk Indonesia s.d bulan Febuari 2021; Isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up on pending matters and the Company's performance in December 2020. Discussion on the Company's performance in January 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on audit progress by KAP; Discussion on other strategic issues
18 Maret 2021 March 18, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Temuan-temuan Audit SPI Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI Discussion on SPI Audit Findings Internal Monitoring Work Development by SPI
23 April 2021 April 23, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters Hasil Rapat Kinerja Bulan Februari 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Maret 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan Progres Realisasi Posisi Piutang Usaha dan Hutang Usaha); Pembahasan Progres Audit, khususnya terkait PT Rekind; Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the March 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance for April 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the Finalization of the 2020 Financial Year Audit Report; Other Strategic Issues.
24 Mei 2021 May 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Maret 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan April 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan Finalisasi Laporan Hasil Audit Tahun Buku 2020; Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the March 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance for April 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the Finalization of the 2020 Fiscal Year Audit Report; Other Strategic Issues
29 Mei 2021 May 29, 2021	<p>Pembahasan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2020 Discussion on Audited Financial Report for Fiscal Year 2020</p>
25 Juni 2021 June 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan April 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan Persiapan RUPS Laporan Tahunan Audited Tahun Buku 2020; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the April 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance for May 2021 (including the monthly monitoring template for Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the Preparation of the GMS for the 2020 Fiscal Year Audited Annual Report; and Other Strategic Issues.
26 Juli 2021 July 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Mei 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juni 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the May 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance in June 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Other Strategic Issues.
26 Agustus 2021 August 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Juni 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Laporan Hasil Kajian komprehensif dari pihak ketiga independen (surat Dewan Komisaris Nomor:S-059/Kom/PIHC/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021) Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the June 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance in July 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Comprehensive Study Report from an independent third party (letter of the Board of Commissioners Number: S-059/Kom/PIHC/VIII/2021 dated August 18, 2021) Other Strategic Issues.

Agenda Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Meeting Agenda
27 Agustus 2021 August 27, 2021	Pembahasan Tahapan dan Progres Kegiatan Pengadaan Jasa KAP 2021 Discussion of the Stages and Progress of the 2021 KAP Service Procurement Activities
6 September 2021 September 6, 2021	Klarifikasi & Negosiasi Pengadaan Ulang Jasa Akuntan Publik PTPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2021 Clarification & Negotiation for Procurement of Public Accountant Services of PTPI and Subsidiaries for Fiscal Year 2021
10 September 2021 September 10, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Klarifikasi & Negosiasi Final terkait Pengadaan Jasa Akuntan Publik • PTPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2021 • Final Clarification & Negotiation for Public Accountant Services Procurement • PTPI and Subsidiaries Fiscal Year 2021
24 September 2021 September 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Juli 2021; • Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); • Progres Project SDU PIHC (project prioritas Menteri BUMN 2021-2023); • Progres Implementasi Manufacturing Network Footprint; dan • Isu-Isu Strategis Lainnya. • Discussion on follow-up/pending matters on the results of the July 2021 performance meeting; • Discussion on the Company's Performance in August 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); • Progress of the SDU PIHC Project (the priority project of the Minister of SOEs 2021-2023); • Progress of Manufacturing Network Footprint Implementation; and • Other Strategic Issues.
21 Oktober 2021 October 21, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Temuan-temuan Audit SPI • Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI • Discussion on SPI Audit Findings • Internal Monitoring Work Development by SPI
26 Oktober 2021 October 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Agustus 2021; • Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); • Realisasi capaian KPI kolegal dan individu Direksi s.d. Triwulan III 2021; dan • Isu-Isu Strategis Lainnya. • Discussion on follow-up/pending matters on the results of the August 2021 performance meeting; • Discussion on the Company's Performance in September 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); • Realization of collegial and individual KPI achievements of Directors up to Q III 2021; and • Other Strategic Issues.
24 November 2021 November 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan September 2021; • Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); • Progres Penyelesaian Dana Pensiun (Penyelesaian Perubahan PPMP ke PPIP di PSP dan Penyelesaian Dampak Restrukturisasi AJS); dan • Isu-Isu Strategis Lainnya. • Discussion on follow-up/pending matters on the results of the September 2021 performance meeting; • Discussion on the Company's Performance in October 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); • Progress of Pension Fund Completion (Completion of Changes from PPMP to PPIP in PSP and Completion of the Impact of AJS Restructuring); and • Other Strategic Issues.
13 Desember 2021 December 13, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI dan Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI; dan • Pelaksanaan WBS (<i>Whistleblowing System</i>) di PIHC. • Discussion on the Progress of SPI Audit Findings and Development of Internal Audit Work by SPI; and • Implementation of WBS (<i>Whistleblowing System</i>) at PIHC.
24 Desember 2021 December 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Oktober 2021; • Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan November 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); dan • Isu-Isu Strategis Lainnya. • Discussion on follow-up/pending matters on the results of the performance meeting in October 2021; • Discussion on the Company's Performance for November 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); and • Other Strategic Issues.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit pada 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Audit Committee in 2021

During 2021, the Audit Committee carried out its duties, details of which are presented in the following table.

Rincian Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 Details of Duty Implementation in 2021

No.	Program Program	Kegiatan Activity
1	Evaluasi dan Analisis atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2022 Evaluation and Analysis of Proposed Work Plan and Budget of the Company or the 2022 WP&B	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Audit 2022 • Evaluasi Usulan RKAP Tahun 2022 PTPI • Evaluasi Revisi RKAP Tahun 2022 PTPI • Proposed Work Plan and Budget (RKA) for 2022 Audit Committee • Evaluation of Proposed WP&B 2022 for PTPI • Evaluation of the Revised WP&B 2022 for PTPI
2	Evaluasi Perubahan Lingkungan Strategis dan Permasalahan Perusahaan Evaluation of Strategic Environmental Changes and Company Problems	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Usulan Perubahan Struktur Organisasi PTPI • Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun Anggaran 2020 pada PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan Pupuk Sriwijaya Palembang. • Evaluation of Proposed Changes in PTPI Organizational Structure of • Responses to the Examination Results Report with the Specific Purpose on Calculation of Fertilizer Subsidies and Distribution of Subsidized Fertilizers for Fiscal Year 2020 at PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, and Pupuk Sriwijaya Palembang.
3	Evaluasi Saran, Harapan, Permasalahan dan Keluhan dari Stakeholder Evaluation of Suggestions, Expectations, Problems and Complaints from Stakeholders	Tanggapan atas Kelangkaan Pupuk dan Kebijakan Hedging Valuta Asing Response to Fertilizer Scarcity and Foreign Exchange Hedging Policy
4	Evaluasi Kebijakan dan atau Implementasi Sistem IT atau Teknologi Informasi Policy Evaluation and or Implementation of IT or Information Technology Systems	Telah dilakukan pada Triwulan II, III dan IV Tahun 2021. Carried out in the second, third and fourth quarters of 2021.
5	Evaluasi atau Analisis terhadap Kebijakan Akuntansi, Laporan Keuangan Unaudited dan Audited Tahun 2020 PT PIHC Grup Evaluation or Analysis of PT PIHC Group's 2020 Accounting Policies, Unaudited and Audited Financial Statements	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Progres Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2020 PTPI. • Laporan Perkembangan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020. • Tanggapan atas Isu Restatement Laporan Keuangan PTPI Tahun Buku 2020. • Perpanjangan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021. • Tanggapan atas Konsep Laporan Keuangan Audited 2020. • Tanggapan atas Konsep Laporan Keuangan Audited 2020 (setelah perbaikan). • Tanggapan atas Position Paper terkait Restatement Laporan Keuangan Audited 2020 PTPI. • Tanggapan atas Laporan PKBL Audited 2020 PT Pupuk Indonesia (Persero). • Tanggapan atas Draft/Konsep Laporan LEK, KPI dan PSA 62 Tahun 2020 PTPI. • Evaluasi Kinerja KAP atas Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan dan Laporan Lainnya PTPI Tahun Buku 2020 serta Rekomendasi Penunjukkan KAP untuk Tahun Buku 2021. • Audit Progress Report on the 2020 Consolidated Financial Statements of PTPI. • Audit Progress Report on Financial Statements for Fiscal Year 2020. • Responses to the Issue of Restating the Financial Statements of PTPI for Fiscal Year 2020. • Extension of the Financial Statement Audit for the 2021 Fiscal Year. • Responses to the 2020 Audited Financial Statement Concept. • Responses to the Draft 2020 Audited Financial Statements (after revision). • Responses to the Position Paper on the 2020 Audited Financial Statement Restatement of PTPI. • Responses to the PKBL Audited 2020 Report of PTPI. • Responses to the Draft/Concept of the LEK, KPI and PSA 62 Year 2020 Reports of PTPI. • Evaluation of KAP Performance on the Audit of Financial Statements and Other Reports of PTPI for Fiscal Year 2020 and Recommendations for Appointment of KAP for Fiscal Year 2021.

Rincian Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 Details of Duty Implementation in 2021

No.	Program Program	Kegiatan Activity
6	Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Evaluation and Analysis of the Implementation of the Company's Goods and Services Procurement Process	Telah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2021 Carried out in the third quarter of 2021
7	Evaluasi dan Analisis Kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Evaluation and Analysis of the Board of Directors' Compliance with the Laws and Regulations	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi atas Rencana Penambahan Modal PTPI pada PT Pupuk Indonesia Logistik. Evaluasi atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PT PIHC dan Laporan Pelaksanaan Hedging Nilai Tukar Valuta Asing. Evaluasi atas Usulan Penambahan Modal PTPI pada PT Rekayasa Industri atau Rekind. Evaluasi dan Monitoring atas Tindak Lanjut Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) PTPI untuk Tahun Buku 31 Desember 2020. Evaluation of the Capital Increase Plan of PTPI in PT Pupuk Indonesia Logistik. Evaluation of the 2021 PTPI or PT PIHC Sustainable Bonds Issuance II Phase II and Foreign Exchange Hedging Implementation Reports. Evaluation of the Proposed Capital Increase of PTPI in PT Rekayasa Industri or Rekind. Evaluation and Monitoring of Follow-up Reports on Compliance with Legislation and Internal Control (PSA 62) PTPI for Fiscal Year December 31, 2020.
8	Evaluasi Kinerja Perusahaan yang menekankan pada Compliance pada Keputusan RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2021; Company Performance Evaluation that emphasizes Compliance in the GMS Decision regarding the Company's Work Plan and Budget or WP&B 2021;	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi atas Kinerja Desember 2020, Januari, dan Februari 2021 termasuk Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2021. Evaluasi atas Kinerja Maret - Mei 2021 termasuk Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2021. Evaluasi atas Kinerja Juni - Agustus 2021 termasuk Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2021. Evaluasi atas Kinerja September - November 2021 termasuk Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2021. Evaluation of Performance in December 2020, January, and February 2021, including First Quarter 2021 Management Report. Evaluation of the March - May 2021 Performance including the Management Report for Second Quarter 2021. Evaluation of the performance of June - August 2021, including the Management Report for Q III 2021. Evaluation of Performance September - November 2021 including Management Report Q IV 2021.
9	Evaluasi dan Telaahan atas Usulan Permohonan Persetujuan atau Rekomendasi Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Evaluation and Review of the Proposed Application for Approval or Recommendation from the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Usulan Permohonan Perubahan Struktur Organisasi. Evaluasi atas Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Evaluasi atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi PTPI. Evaluation of Proposals for Changes in Organizational Structure. Evaluation of Proposed Amendment to the Company's Articles of Association. Evaluation of Proposed Changes in the PTPI Organizational Structure.
10	Kegiatan Evaluasi Usulan Calon Auditor atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 Evaluation of Proposed Auditor's of Financial Statements for the 2021 Fiscal Year	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan KAP untuk Audit TB 2021. Permintaan Pengadaan Jasa Akuntan Publik Tahun 2021. Permohonan izin Pengadaan Jasa KAP. Surat Permintaan Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa KAP. Surat Permintaan Evaluasi Teknis. Laporan Pelaksanaan Pengadaan dan Usulan Penetapan Penyedia Jasa Akuntan Publik PTPI dan Anper Th 2021. Appointment of KAP for TB Audit 2021. Request for Procurement of Public Accountant Services in 2021. Application for KAP Services Procurement permit. Request for KAP Service Procurement Offer Documents. Request for Technical Evaluation. Procurement Implementation Report and Proposal for Determination of Public Accountant Service Providers for PTPI and Subsidiaries in 2021.
11	Kegiatan Penelaahan Gejala Penurunan Kinerja Tahun Buku 2021 Activity to Study the Symptoms of Decline in Performance for the 2021 Fiscal Year	Telah dilakukan pada Triwulan II, III dan IV Tahun 2021. Carried out in the second, third and fourth quarters of 2021.

Rincian Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Details of Duty Implementation in 2021

No.	Program Program	Kegiatan Activity
12	Evaluasi dan Analisis Pengelolaan Anak Perusahaan Evaluation and Analysis of Subsidiary Management	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pada Triwulan II, III dan IV Tahun 2021. Pendalaman Kinerja PT Pupuk Kujang Cikampek. Pendalaman Kinerja PT Petrokimia Gresik Pendalaman Kinerja PT Pupuk Indonesia Logistik Pendalaman Kinerja PT Pupuk Indonesia Pangan Pendalaman Kinerja PT Mega Eltra Pendalaman Kinerja PT Pupuk Indonesia Utilitas Pendalaman Kinerja PT Pupuk Sriwijaya Palembang Pendalaman Kinerja PT Pupuk Kalimantan Timur Carried out in Q II, III and IV of 2021. Studying the Performance of PT Pupuk Kujang Cikampek. Exploring Performance of PT Petrokimia Gresik Exploring Performance of PT Pupuk Indonesia Logistik Exploring Performance of PT Pupuk Indonesia Pangan Exploring Performance of PT Mega Eltra Exploring Performance of PT Pupuk Indonesia Utilitas Exploring Performance of PT Pupuk Sriwijaya Palembang Exploring Performance of PT Pupuk Kalimantan Timur
13	Melaksanakan Penugasan Dewan Komisaris Carrying out Board of Commissioners Assignments	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan atas Usulan Key Performance Indikator (KPI) Individual 2021. Tanggapan atas Laporan Hasil Audit Bersama Proyek Banggai Amoniak Plant di PT ReKayasa Industri Response to the Proposed Individual Key Performance Indicators (KPI) 2021. Response to the Joint Audit Report of the Banggai Ammonia Plant Project at PT ReKayasa Industri
14	Kegiatan Koordinasi Komite Dewan Komisaris dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa: Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Komite dengan Direksi Coordination activities of the Board of Commissioners Committees in the context of their Duties and Functions in the form of of the Board of Commissioners Internal Meetings and Committee Meetings with the Board of Directors	Rapat-Rapat Internal selama tahun 2021 dengan Dewan Komisaris termasuk Rapat dengan Direksi dan KAP Internal Meetings during 2021 with the Board of Commissioners including Meetings with the Board of Directors and KAP
15	Kegiatan Pendampingan Audit KAP atas Laporan Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020 KAP Audit Assistance Activities on the PT Pupuk Indonesia (Persero) Management Report in 2020	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Laporan Manajemen Tahun 2020 Unaudited. Tanggapan atas Laporan Manajemen Audited Tahun Buku 2020 PTPI. Management Report Evaluation for Unaudited Performance 2020. Responses to the Audited Management Report for the 2020 Fiscal Year of PTPI.
16	Studi Banding Workshop Ke Dalam dan atau Ke Luar Negeri untuk Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas Komite Audit Comparative Study of Domestic and/or Overseas Workshops to Improve the Audit Committee Competencies and Capabilities	CACP Course Batch XX yang diadakan oleh IKAI. CACP Course Batch XX held by IKAI.

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko merupakan organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan umum atas Perusahaan dan memberikan nasihat dalam penerapan GCG dan manajemen risiko kepada Direksi dan jajaran manajemen di bawahnya, serta melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris lainnya.

Semula, organ ini Komite Manajemen Risiko yang dibentuk pada tanggal 30 April 2011 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 02/KEP. KOM/IV/2011. Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP.KOM/IV/2012

GCG and Risk Management Monitoring Committee

The GCG and Risk Management Monitoring Committee is an organ established by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in the implementation of its duties, in accordance with Ministry of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/ Supervisory Boards of SOEs. The GCG and Risk Management Monitoring Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in its general GCG and Risk Management supervisory and advisory functions and duties with the Board of Directors and Management, as well as carrying out other tasks related to other duties of the Board of Commissioners.

Initially, this body was the Risk Management Committee which was established on April 30, 2011 based on the Board of Commissioners Decree No. 02/KEP. KOM/IV/2011. Through the Decree of the Board of Commissioners No.

tanggal 4 April 2012, Komite Manajemen Risiko berganti nama menjadi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, yang kemudian 2 (dua) kali diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 02/KEP.KOM/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dan No. 04/KEP.KOM/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018. Pada tahun 2021, terjadi perubahan komposisi Ketua dan Anggota Komite GCG dan PMR, sehingga diperbaharui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

Kualifikasi Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Persyaratan kemampuan adalah profesional dalam bidang GCG dan manajemen risiko sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, dan membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest* apabila diperlukan.

Selain itu, anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko juga harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan kepatutan, antara lain: memiliki integritas yang baik, pengetahuan yang memadai tentang bisnis Perusahaan, pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang lainnya yang relevan, jujur, independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.

Standar kompetensi yang ditunjukkan melalui sertifikasi anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, antara lain:

1. ISO 31000, *International Risk Standard*, ERM Fundamentals;
2. Certification in Risk Management Assurance (CRMA).

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, pada Pasal 20 yang menyatakan, "Masa jabatan anggota komite lain yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu".

01/KEP.KOM/IV/2012 dated April 4, 2012, the Risk Management Committee changed its name to the GCG and Risk Management Monitoring Committee, which was then updated 2 (two) times through Decree of the Board of Commissioners No. 02/KEP.KOM/II/2017 dated February 13, 2017 and No. 04/KEP.KOM/VII/2018 dated July 4, 2018. In 2021, there was a change in the composition of the Chairman and Members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee, so that it was renewed through the Decree of the Board of Commissioners 03/KEP.KOM/III/2021 dated March 5, 2021.

Qualification of Members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

Members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee are required to meet the fit and proper requirements. The capability requirement is professionalism in the field of GCG and risk management so as not to interfere with the objectivity of their opinion on the issues faced, and sign a letter that stated they are free from conflicts of interest, if necessary.

In addition, Members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee must also have commendable character and behavior as well as meeting the propriety requirements, including: having good integrity, adequate knowledge of the Company's business, sufficient work experience in supervision/inspection, and other relevant fields, must be honest, independent (no conflict of interest), objective and professional, as well as trustworthy and committed to their duties.

Competency standards that are demonstrated through the certification of members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee include:

1. ISO 31000, *International Risk Standard*, ERM Fundamentals;
2. Certification in Risk Management Assurance (CRMA).

Appointment and Dismissal

The appointment and dismissal of members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee is carried out by the Board of Commissioners through a decree. Dismissal can be conducted if the person concerned ends their term of office and based on the decision of the Board of Commissioners, is dismissed because they do not meet the predetermined performance and/or is incompetent in carrying their duties.

Term of Office

Provisions for the term of office of members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee are regulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Boards of SOEs, in Article 20 which states, "The term of office of other committee members who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the Company is no longer than 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years of service, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss at any time".

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, terdapat perubahan atau pergantian pada komposisi dan susunan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Adapun rincian susunan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko sebagai berikut:

Number, Composition, and Structure of the GCG and Risk Management Monitoring Committee in 2021

During 2021, there were changes in the composition and structure of the GCG and Risk Management Monitoring Committee. Details of the GCG and Risk Management Monitoring Committee composition as follow:

Susunan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Management Monitoring Committee Composition

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Anwar Sanusi	Ketua Komite GCG dan PMR Chairman of the GCG and RMM Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021 dated March 5, 2021	5 Maret 2021-habis masa periode jabatan Dewan Komisaris March 5, 2021 - the term of office of the Board of Commissioners has expired	Ke-1 First
	Wakil Ketua II/ Komisaris Vice Chairman I/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.04/KEP.KOM/VII/2021 tanggal 4 Juli 2018 Board of Commissioners Decree No. 04/KEP.KOM/VII/2021 dated July 4, 2021	4 Juli 2018-5 Maret 2021 July 4, 2018-March 5, 2021	
Mustoha Iskandar	Wakil Ketua Vice Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP.KOM/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2020 Board of Commissioners Decree No.08/KEP.KOM/VIII/2021 dated August 14, 2020	14 Agustus 2020-5 Maret 2021 August 14, 2018-March 5, 2021	Ke-1 First
Bambang Widianto	Wakil Ketua I Vice Chairman I	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021 dated March 5, 2021	5 Maret 2021-habis masa periode jabatan Dewan Komisaris March 5, 2021 - the term of office of the Board of Commissioners has expired	Ke-1 First
Febrio Nathan Kacaribu	Wakil Ketua II Vice Chairman II	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021 dated March 5, 2021	5 Maret 2021-habis masa periode jabatan Dewan Komisaris March 5, 2021 - the term of office of the Board of Commissioners has expired	Ke-1 First
Tungkot Sipayung	(Anggota Komite/ Pihak Independen) (Committee Member/ Independent Party)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/KEP.KOM/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 jo. No. 02/KEP.KOM/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 Board of Commissioners Decree No. 02/KEP.KOM/II/2017 dated February 13, 2017 jo. No. 02/KEP.KOM/VII/2019 dated July 5, 2019	18 Juli 2019-17 Juli 2021 July 18, 2019-July 17, 2021	Ke 2 Second
Asri Saraswati	(Anggota Komite/ Pihak Independen) (Committee Member/ Independent Party)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/KEP.KOM/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 Board of Commissioners Decree No. 02/KEP.KOM/VII/2019 dated July 5, 2019	5 Juli 2019-4 Juli 2022 July 5, 2019-July 4, 2022	Ke-1 First
Riza Azmi	(Anggota Komite/ Pihak Independen) (Committee Member/ Independent Party)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/KEP.KOM/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Board of Commissioners Decree No. 10/KEP.KOM/VII/2021 dated July 29, 2021	29 Juli 2021 - 28 Juli 2022 July 29, 2021 - July 28, 2022	Ke-1 First

Profil Ketua dan Anggota Komite GCG dan Pemantau Risiko

Profiles of Chairman and Members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

Anwar Sanusi

Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Chairman of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.

Details of the profile are presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section contained in the "Company Profile" Chapter of this Annual Report.

Bambang Widianto

Wakil Ketua I Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Vice Chairman I of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

Rincian profil disampaikan secara pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Details of the profile are presented in the “Profile of the Board of Commissioners” section contained in the “Company Profile” Chapter of this Annual Report.

Febrio Nathan Kacaribu

Wakil Ketua II Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Vice Chairman II of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

Rincian profil disampaikan secara pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Details of the profile are presented in the “Profile of the Board of Commissioners” section contained in the “Company Profile” Chapter of this Annual Report.

Tungkot Sipayung

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/Pihak Independen GCG and Risk Management Monitoring Committee Member / Independent Party

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	56 tahun 56 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place and Date of Birth	:	Simalungun, 25 Oktober 1965 Simalungun, October 25, 1965
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
Pendidikan Education	:	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor (2000); Program Studi Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; Sarjana Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1987). Doctorate in Economics, Institut Pertanian Bogor (2000); Agricultural Economics Study Program, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; Bachelor’s degree in Agriculture, Institut Pertanian Bogor (1987).
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) (2013-sekarang); Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) (2008-2013); Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG, PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) (2008-2013). Executive Director, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) (2013-present); Commissioner, PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) (2008-2013); Risk Management Monitoring and GCG Committee Chairman, PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) (2008-2013).

Asri Saraswati

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Member of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	64 tahun 64 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place and Date of Birth	:	Jakarta, 31 Agustus 1958 Jakarta, August 31, 1958
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat Depok, West Java

Asri Saraswati**Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko**
Member of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

Pendidikan Education	:	Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1985). Bachelor's degree in Economics, Universitas Indonesia (1985).
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit PT BNI Life Insurance (2011-2015); • Special Advis Direksi PT BNI Asset Management (2011-2013); • <i>Division Head of Capital & Money Market</i> Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) 2005-2008; • <i>Investment Director</i> PT Pentasena Arthatama (Investment Management Company) (1996-2003). • Audit Committee of PT BNI Life Insurance (2011-2015); • Special Adviser of the Board of Directors of PT BNI Asset Management (2011-2013); • Division Head of Capital & Money Market at Bank Indonesia Employee Welfare Foundation (YKKBI) 2005-2008; • Investment Director of PT Pentasena Arthatama (Investment Management Company) (1996-2003).

Riza Azmi**Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko**
GCG and Risk Management Monitoring Committee Member

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	38 tahun 38 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place and Date of Birth	:	Medan, 8 Mei 1983 Medan, May 8, 1983
Domisili Domicile	:	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Pendidikan Education	:	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Arts in Economics, Georgia State University (2013) • Master of Science in Economics, Gadjah Mada University (2013) • Sarjana Sains Terapan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2009) • Master of Arts in Economics, Georgia State University (2013) • Master of Science in Economics, Gadjah Mada University (2013) • Bachelor's degree in Applied Science, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2009)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Risiko Dukungan dan Jaminan pada Penugasan Pemerintah, Kementerian Keuangan (2021 - sekarang). • Kepala Seksi Risiko Pinjaman pada BUMN, Kementerian Keuangan (2015 - 2021). • Head of Support and Guarantee Risk Section on Government Assignments, Ministry of Finance (2021 - present). • Head of Loan Risk Section for BUMN, Ministry of Finance (2015 - 2021).

Independensi Komite GCG dan Pemantau Risiko

Independensi adalah syarat menjadi Komite GCG dan Pemantau Risiko. Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko harus bersikap independen, objektif dan profesional sebagaimana diatur dalam Charter Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum dalam *Charter*, Komite Kebijakan Risiko juga menandatangani pernyataan independensi. Seluruh anggota Komite tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan tentang pelaksanaan GCG.

Independency of the GCG and Risk Monitoring Committee

Independence is a requirement to become a GCG and Risk Monitoring Committee. Members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee must act independently, objectively and professionally as stipulated in the GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter, which is updated regularly to comply with the prevailing laws and regulations.

In addition to being stated in the Charter, the Risk Policy Committee also signed a statement of independence. All members of the Committee do not hold concurrent positions, which are prohibited by the regulations regarding the implementation of GCG.

Pengungkapan Independensi Komite GCG dan Pemantau Risiko Disclosure of Independence of the GCG and Risk Monitoring Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Anwar Sanusi	Bambang Widianto	Febrio Nathan Kacaribu	Riza Azmi	Asri Saraswati
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi. Has management relationships in the Company, Subsidiaries and Affiliated Entities	x	x	x	x	x
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Owns Company shares, both directly and indirectly	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite. Has familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Committee members	x	x	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah. Serves as a political party, official and government administrator	x	x	x	x	x

Pedoman Kerja: Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 01/ KEP.KOM/ II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Permutakhiran terakhir atas Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dilakukan pada tahun 2021 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 015/KEP.KOM/XI/2021 tanggal 5 November 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko bertugas untuk:

- Komite GCG dan PMR bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan atas Perseroan dan memberikan nasihat dalam penerapan GCG dan Manajemen Risiko kepada Direksi dan Manajemen;
- Melakukan fungsi pengawasan (*oversight roles*) dalam perspektif *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap hal-hal berikut ini:
 - Kinerja Operasional - meninjau pelaksanaan kegiatan dan kinerja operasional yang relevan dengan ruang lingkup penerapan manajemen risiko dan GCG, sebagaimana yang diterapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.

Work Guidelines: GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter

The Board of Commissioners established work guidelines to support the GCG Committee and the Risk Management Monitoring Committee duties as determined through the Decree of the Board of Commissioners No. 01/KEP.KOM/ II/2015 dated February 23, 2015 on the GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter. The GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter are prepared based on the applicable laws and regulations, and reviewed periodically.

The last update of the GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter was carried out in 2021 and determined through the Board of Commissioners Decree No. 015/KEP.KOM/XI/2021 dated November 5, 2021.

Duties and Responsibilities

In accordance with the GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter, the GCG Committee and Risk Management Monitoring Committee are tasked with:

- The GCG and PMR Committees duties include assisting the Board of Commissioners in carrying out their supervisory functions and duties over the Company and providing advice on the implementation of GCG and Risk Management to the Board of Directors and Management;
- Performing a supervisory role in the perspective of corporate governance and risk management on the following matters:
 - Operational Performance - reviewing the implementation of operational activities and performance that are relevant to risk management and GCG implementation, as implemented in the annual company work plan and budget.

- b. Manajemen Risiko – melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap proses manajemen risiko, memantau kesesuaian praktik manajemen risiko dengan kebijakannya, serta memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan Manajemen Risiko perusahaan. Efektivitas pengelolaan manajemen risiko, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
- i) Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
 - ii) Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fraud dan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat; dan
 - iii) Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- c. Unit Kerja – meninjau dan mengawasi rencana kerja dan kegiatan unit kerja di manajemen yaitu Unit Tata Kelola dan Kepatuhan serta Unit Manajemen Risiko, serta memberikan nasihat pada saat diperlukan.
- d. *Corporate Governance* - Meninjau kecukupan pemantauan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika usaha serta memastikan tidak adanya benturan kepentingan.
- b. Risk Management – monitoring and reviewing the risk management process, monitoring the suitability of risk management practices and policies, and ensuring the application of principles, functions and implementation related to policies on managing the Company's Risk Management. The effectiveness of risk management management relates to the following matters:
- i) Implementation of strong risk management supervisory functions;
 - ii) Establishment of a risk management culture to reduce the possibility of fraud and unhealthy business practices; and
 - iii) Identification of issues related to risk management that require the attention of the Board of Commissioners.
- c. Work Unit – reviewing and supervising the work plans and activities of the management work units, namely the Governance and Compliance Unit and the Risk Management Unit, as well as providing advice when needed.
- d. Corporate Governance - Reviewing the adequacy of monitoring for compliance with applicable laws and regulations, and business ethics and ensuring there are no conflicts of interest.

Pengembangan Kompetensi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Perusahaan mengikutsertakan Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Pelaksanaan rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko yang ditunjuk oleh ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Setiap rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG dan

Competency Development of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

The Company includes members of the GCG Committee and Risk Management Monitoring in competency development activities carried out through various trainings and education with funding fully the responsibility of the Company. The list of training and competency improvement activities that the GCG Committee and Risk Management Monitoring Committee participated in throughout 2021 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

GCG and Risk Management Monitoring Committee Meetings

The GCG and Risk Management Monitoring Committee must hold at least 1 (one) meeting per month. The GCG and Risk Management Monitoring Committee meeting can make decisions if at least 66% or 2 of the 3 members (including the Chairman) are present. The committee meeting decisions are based on consensus agreement. In the event there is no consensus agreement, the decision is based on the majority vote.

The GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings are chaired by the GCG & Risk Management Monitoring Committee Chair who is appointed by the GCG and Risk Management Monitoring Committee chairman. Each GCG and Risk Management Monitoring Committee meeting is stated in the minutes of the meeting signed by

Pemantau Manajemen Risiko yang hadir. Perbedaan pendapat dalam rapat dicantumkan dalam risalah rapat.

all members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee present. Differences of opinion in the meeting are included in the minutes of the meeting.

Sepanjang tahun 2021, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 16 kali rapat dengan rekapitulasi kehadiran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

In 2021, the GCG and Risk Management Monitoring Committee held 16 meetings, with the attendance recapitulation presented in the table below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko pada Rapat Tahun 2021 Attendance Recapitulation of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Management Monitoring Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance %
Anwar Sanusi	16	12	75%
Bambang Widianto	16	10	63%
Febrio Nathan Kacaribu	16	9	56%
Tungkot Sipayung*	10	9	90%
Asri Saraswati	16	15	94%
Riza Azmi**	6	6	100%
Rata-rata Average	13.3	10.2	76%

* Masa jabatan berakhir pada 17 Juli 2021 | Term of Office ended on July 17, 2021

** Masa jabatan dimulai pada 29 Juli 2021 | Term of Office started on July 29, 2021

Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
25 Januari 2021 January 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan November 2020; Pembahasan kinerja perusahaan bulan Desember 2020 (termasuk didalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan update Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2020; dan Isu-isu strategis lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the November 2020 performance meeting; Discussion on the Company's performance in December 2020 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the 2020 Financial Report Audit Progress update; and Other strategic issues.
23 Februari 2021 February 23, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut pending matters dan kinerja perusahaan bulan Desember 2020. Pembahasan kinerja perusahaan bulan Januari 2021 (termasuk didalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan progress audit oleh KAP; dan Pembahasan Isu-isu strategis lainnya. Discussion on the follow-up on pending matters and the Company's performance in December 2020. Discussion on the Company's performance in January 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on audit progress by KAP; and Discussion on other strategic issues.
26 Maret 2021 March 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Januari 2021; Pembahasan kinerja perusahaan bulan Februari 2021 (termasuk didalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progress realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Progres realisasi dan langkah-langkah pencapaian KPI Kolegial PTPI s.d bulan Februari 2021; dan Isu-isu strategis lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the January 2021 performance meeting; Discussion on the Company's performance in February 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Progress of realization and steps to achieve the Collegial KPI of PT Pupuk Indonesia until February 2021; and Other strategic issues.
16 April 2021 April 16, 2021	<p>Pembahasan Pelaksanaan Restrukturisasi Anper Non Pupuk Discussion on the Implementation of Non-Fertilizer Subsidiaries Restructuring</p>

Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
23 April 2021 April 23, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters Hasil Rapat Kinerja Bulan Februari 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Maret 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan Progres Realisasi Posisi Piutang Usaha dan Hutang Usaha); Pembahasan Progres Audit, khususnya terkait PT Rekind; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the February 2021 Performance Meeting; Discussion on Company Performance for March 2021 (including monthly monitoring template for Vice Minister of BUMN I and Progress of Realization of position of trade receivables and trade payables); Discussion on Audit Progress, especially regarding PT Rekind; and Other Strategic Issues.
5 Mei 2021 May 5, 2021	Tindak lanjut AoI GCG Follow up to GCG AoI
24 Mei 2021 May 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Maret 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan April 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan Finalisasi Laporan Hasil Audit Tahun Buku 2020; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the March 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance for April 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the Finalization of the 2020 Fiscal Year Audit Report; and Other Strategic Issues.
29 Mei 2021 May 29, 2021	Pembahasan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2020 Discussion on Audited Financial Report for Fiscal Year 2020
15 Juni 2021 June 15, 2021	<p>Pembahasan Konsep Laporan Auditor Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan PKBL Tahun 2020; Laporan Realisasi <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Tahun 2020; Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2020; dan Pernyataan Standar Audit Nomor 61 (PSA62). <p>Discussion of the Independent Auditor's Report Concept</p> <ul style="list-style-type: none"> PKBL Report 2020; Key Performance Indicators (KPI) Realization Report 2020; Report on the Results of the 2020 Performance Evaluation; and Statement of Auditing Standards No. 61 (PSA62).
25 Juni 2021 June 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan April 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan Persiapan RUPS Laporan Tahunan Audited Tahun Buku 2020; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the April 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance for May 2021 (including the monthly monitoring template for Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the Preparation of the GMS for the 2020 Fiscal Year Audited Annual Report; and Other Strategic Issues.
26 Juli 2021 July 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Mei 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juni 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the May 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance in June 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Other Strategic Issues.
26 Agustus 2021 July 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Juni 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Laporan Hasil Kajian komprehensif dari pihak ketiga independen (surat Dewan Komisaris Nomor:S-059/Kom/PIHC/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021) Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters from the June 2021 performance meeting results; Discussion on the Company's Performance in July 2021 (including the monthly monitoring template for the Deputy Minister of SOEs, and the progress of the trade receivables and accounts payables realization); Comprehensive Study Report from independent third party (BoC letter Number: S-059/Kom/PIHC/VIII/2021 dated August 18, 2021) Other Strategic Issues.

Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
24 September 2021 September 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Juli 2021; • Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); • Progres Project SDU PIHC (project prioritas Menteri BUMN 2021-2023); • Progres Implementasi Manufacturing Network Footprint; dan • Isu-Isu Strategis Lainnya. • Discussion on follow-up/pending matters on the results of the June 2021 performance meeting; • Discussion on the Company's Performance in July 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); • Comprehensive Study Report from independent third party (letter of the Board of Commissioners No. S-059/Kom/PIHC/VIII/2021 dated August 18, 2021) • Other Strategic Issues.
26 Oktober 2021 October 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Agustus 2021; • Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); • Realisasi capaian KPI kolegal dan individu Direksi s.d. Triwulan III 2021; dan • Isu-Isu Strategis Lainnya. • Discussion on follow-up/pending matters on the results of the August 2021 performance meeting; • Discussion on the Company's Performance in September 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); • Realization of collegial and individual KPI achievements for Directors up to Q III 2021; and • Other Strategic Issues.
24 November 2022 November 24, 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan September 2021; • Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); • Progres Penyelesaian Dana Pensiun (Penyelesaian Perubahan PPMP ke PPIP di PSP dan Penyelesaian Dampak Restrukturisasi AJS); dan • Isu-Isu Strategis Lainnya. • Discussion on follow-up/pending matters on the results of the September 2021 performance meeting; • Discussion on the Company's Performance in October 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); • Progress of Pension Fund Completion (Completion of Changes from PPMP to PPIP in PSP and Completion of the Impact of AJS Restructuring); and • Other Strategic Issues.
24 November 2022 November 24, 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Oktober 2021; • Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan November 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); dan • Isu-Isu Strategis Lainnya. • Discussion on follow-up/pending matters from the October 2021 performance meeting results; • Discussion on the Company's Performance in November 2021 (including the monthly monitoring template for the Deputy Minister of SOEs, and the progress of the trade receivables and accounts payables realization); and • Other Strategic Issues.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko pada 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the GCG and Risk Management Monitoring Committee in 2021

Throughout 2021, the GCG and Risk Management Monitoring Committee has realized a number of activities as the implementation of its duties and functions, which are described in the table below:

Rincian Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 Implementation of Duties in 2021

No.	Program Program	Kegiatan Activity
1	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan RKAP 2021 Evaluation and Monitoring of 2021 WP&B Implementation	Evaluasi Kinerja Konsolidasi PT Pupuk Indonesia (Persero) bulan Januari s/d November 2021 Evaluation of the Consolidated Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) from January to November 2021
2	Evaluasi Kinerja Konsolidasi PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2020 Evaluation of the Consolidated Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2020	Evaluasi Kinerja Konsolidasi PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2020 (<i>Unaudited</i>) Evaluation of the Consolidated Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2020 (<i>Unaudited</i>)
3	Evaluasi Laporan Manajemen Konsolidasi Tahun 2020 Evaluation of Consolidated Management Report 2020	Evaluasi Laporan Manajemen Konsolidasi Tahun 2020 (<i>Unaudited</i>) Consolidated Management Report Evaluation 2020 (<i>Unaudited</i>)
4	Evaluasi Laporan Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) Konsolidasi Tahun 2020 Evaluation of the 2020 Consolidated PT Pupuk Indonesia (Persero) Management Report	Evaluasi Laporan Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) Konsolidasi Tahun 2020 (<i>Audited</i>) Evaluation of the Consolidated 2020 PT Pupuk Indonesia (Persero) Management Report (<i>Audited</i>)
5	Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Evaluation of Governance Implementation (GCG)	Evaluasi Kinerja Konsolidasi PT Pupuk Indonesia (Persero) bulan Januari s/d November 2021 Evaluation of the Consolidated Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) from January to November 2021
6	Evaluasi Kebijakan dan Implementasi Tata Kelola (GCG) Evaluation of the Consolidated Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) from January to November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rekomendasi atau Area of Improvement (Aoi) atas Hasil Evaluasi Penerapan GCG PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020, Aspek Dewan Komisaris. Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil <i>Self Assessment</i> Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2020. Kajian atas revisi Draft Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>). Kajian atas revisi Draft Revisi Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>). Kajian atas Perbaikan Draft Revisi Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) ► <i>Code of Conduct</i> Revisi 2. Kajian atas Draft Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Code of Corporate Governance</i>). Follow-up on Recommendations or Areas of Improvement (Aoi) on the Evaluation Results of PT Pupuk Indonesia (Persero) GCG Implementation in 2020, Board of Commissioners Aspect. Evaluation of Implementation and Results of Self-Assessment on the Implementation of Good Corporate Governance of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2020. Review of the revised Draft of the Board Manual for the Board of Commissioners and the Board of Directors. Review of the revised Draft of the Code of Conduct. Review on the Improvement of the Revised Draft Code of Conduct ► <i>Code of Conduct</i> Revision 2. Review of the Draft Revised Code of Corporate Governance.
7	Pemantauan Manajemen Risiko Risk Management Monitoring	Evaluasi Kinerja Konsolidasi PT Pupuk Indonesia (Persero) bulan Januari s/d November 2021 Evaluation of the Consolidated Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) from January to November 2021

Rincian Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 Implementation of Duties in 2021

No.	Program Program	Kegiatan Activity
8	Evaluasi Kebijakan dan Implementasi Manajemen Risiko Evaluation of Risk Management Policy and Implementation	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Rencana Penerbitan OB II Tahap II, serta Pelaksanaan Hedging Nilai Tukar Valas PI Group 2020. Laporan Hasil Audit SPI Atas Proyek Banggai Amoniak Plant di PT Rekayasa Industri - 30 Desember 2020. Evaluasi atas Rencana Penambahan Penyertaan Modal PT Pupuk Indonesia (Persero) di PT Rekayasa Industri. Evaluation of the Phase II OB II Issuance Plan, as well as the PI Group 2020 Foreign Exchange Hedging. SPI Audit Report on the Banggai Ammonia Plant Project at PT Rekayasa Industri - December 30, 2020. Evaluation of the Plan to Increase the Equity Participation of PT Pupuk Indonesia (Persero) in PT Rekayasa Industri.
9	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan Evaluation Information Technology System Policy and Implementation	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola TI Semester II tahun 2020. Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2021. Evaluation of IT Governance and Performance in Semester II of 2020. Evaluation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Information Technology System Policy and Implementation in 2021.
10	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier (SDM) Evaluation of Policies and Career Development (HC)	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT. Pupuk Indonesia (Persero). Tanggapan atas Penyesuaian Struktur Organisasi PT. Pupuk Indonesia (Persero). Evaluasi Kebijakan Dan Pelaksanaan Pengembangan Karier (SDM) PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2021. Responses to the Proposed Changes in the Organizational Structure of PT. Pupuk Indonesia (Persero). Responses to Adjustment of the Organizational Structure of PT. Pupuk Indonesia (Persero). Evaluation of Policies and Career Development (HC) of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2021.
11	Evaluasi Kebijakan Pengadaan & Umum Perusahaan Dan Pelaksanaannya Evaluation of the Company's Procurement & General Policy and its Implementation	Evaluasi Kebijakan Pengadaan & Umum Perusahaan Dan Pelaksanaannya di PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2021 Evaluation of the Company's Procurement & General Policy and its Implementation at PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2021
12	Evaluasi/Analisis Isu Perubahan Lingkungan Strategis Bisnis Evaluation/Analysis of Changes in the Strategic Business Environment	Analisis Perubahan Lingkungan Strategis Bisnis PI Grup tahun 2021 Analysis of Changes in the PI Group's Strategic Business Environment in 2021
13	Evaluasi Kebijakan Dan Pelaksanaan Investasi Evaluation of Investment Policy and Implementation	Evaluasi Kebijakan Dan Pelaksanaan Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2021 Evaluation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Investment Policy and Implementation in 2021
14	Evaluasi Kebijakan Mutu, Pelayanan Dan Pelaksanaan Perusahaan Evaluation of Company's Quality Policy, Service and Implementation	Evaluasi Kebijakan Mutu dan Pelayanan PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2021 Evaluation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Quality and Service Policy in 2021
15	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan PKBL dan CSR Evaluation of PKBL and CSR Policy and Implementation	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) - [dahulu PKBL] PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2021 Evaluation of Policy and Implementation for Social and Environmental Responsibility (SER) - [formerly PKBL] for PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2021
16	Evaluasi Kebijakan Riset dan Pelaksanaannya Evaluation of Research Policy and Implementation	Evaluasi Kebijakan Riset dan Pelaksanaannya di PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2021 Evaluation of Research Policy and Implementation at PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2021
17	Evaluasi atas Rancangan RKAP 2022 Evaluation of Draft 2022 WP&B	Evaluasi Komite atas Rancangan RKAP 2022 dalam rangka Dewan Komisaris melakukan penelitian dan penelaahan serta menandatangani RKAP tahun 2020 yang disiapkan Direksi Committee evaluation of the 2022 WP&B Draft in the context of the Board of Commissioners conducting research and review and signing the 2020 WP&B prepared by the Board of Directors

Rincian Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Implementation of Duties in 2021

No.	Program Program	Kegiatan Activity
18	Evaluasi atas Revisi Rancangan RKAP 2022 Evaluation of the Revised Draft 2022 WP&B	Evaluasi Komite atas Revisi Rancangan RKAP 2022 berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal (Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-787/MBU/10/ 2021 tanggal 8 Oktober 2021). Committee Evaluation on the Revised Draft 2022 WP&B based on the Aspirations of Shareholders/Capital Owners (Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-787/MBU/10/2021 dated October 8, 2021).
19	Melaksanakan Penugasan Dari Dewan Komisaris Carrying out the Board of Commissioners Assignments	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke PT. Pupuk Indonesia Logistik. • Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke PT. Mega Eltra dan PT. Pupuk Indonesia Pangan. • Analisis atas Petisi Kompartemen Pengadaan PT. Pupuk Indonesia (Persero). • Evaluasi Atas Usulan KPI Individu Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2021. • Evaluasi atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) dan Penilaian Tingkat Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2020 PT Pupuk Indonesia (Persero). Evaluasi atas: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Position Paper</i> atas <i>Restatement</i> Laporan Keuangan 2018 dan 2019 PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Entitas Anak; b. Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020; c. Laporan Status Tindak Lanjut Atas Keputusan dan Arahan RUPS RKAP Tahun 2020 dan RUPS Kinerja Perusahaan Tahun 2019. • Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Perhitungan HPP dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 oleh BPK RI pada PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang Cikampek, PT. Pupuk Sriwijaya Palembang dan PT. Pupuk Iskandar Muda. • Hasil Evaluasi dan Penilaian Teknis Pengadaan Jasa Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2021. • Tanggapan atas Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Pengawas Intern (SPI) PT Pupuk Indonesia (Persero) atas Pengelolaan Piutang Subsidi. • Report on the Board of Commissioners Working Visit to PT. Pupuk Indonesia Logistik. • Report on the Board of Commissioners' Working Visit to PT. Mega Eltra and PT. Pupuk Indonesia Pangan. • Analysis of the Procurement Compartment Petition of PT. Pupuk Indonesia (Persero). • Evaluation of the Proposed Individual KPI for Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2021. • Evaluation of the Performance Evaluation Report (LHEK) and the Assessment of the Achievement Level of Key Performance Indicators (KPI) in 2020 PT Pupuk Indonesia (Persero). Evaluation of: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Position Paper</i> on the 2018 and 2019 Financial Statements of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries; b. Compliance Report on Legislation and Internal Control for the Year Ended December 31, 2020; c. Follow-up Status Report on the Resolutions and Directions of the 2020 RKAP GMS and 2019 Company Performance GMS. • Responses to the Examination Result Report (LHP) on the Calculation of HPP and Distribution of Subsidized Fertilizers in 2020 by BPK RI at PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang Cikampek, PT. Pupuk Sriwijaya Palembang and PT. Pupuk Iskandar Muda. • Results of Evaluation and Technical Assessment on the Procurement of Public Accountant Services in PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries for the 2021 Fiscal Year. • Response to the Audit Result Report (LHA) of the Internal Supervisory Unit (SPI) of PT Pupuk Indonesia (Persero) on the Management of Subsidized Receivables.

Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, sesuai arahan yang tertuang dalam Surat Kementerian BUMN Nomor: S-254/MBU/04/2020 pada tanggal 17 April 2020 perihal *Talent & Succession Management* Direksi BUMN. Pada angka 3 huruf c disebutkan:

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar segera membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) atau nomenklatur lain yang disamakan fungsinya dengan memperluas peran sebagai *Talent Committee* untuk Eksekutif BUMN (Direksi dan BOD-1) dengan format susunan sebagai berikut:

1. Ketua: Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawasan/Komisaris Independen;
2. Sekretaris: Ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
3. Anggota: Ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kualifikasi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 06/KEP.KOM/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Pada tahun 2021, terjadi perubahan komposisi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, sehingga diperbaharui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 serta pengangkatan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/KEP.KOM/VI/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan Nomor 011/KEP.KOM/IX/2021 tanggal 27 September 2021.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Kendati demikian, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.

Nomination & Remuneration Committee

The Nomination & Remuneration Committee was established by the Board of Commissioners to assist the implementation of the duties of the Board of Commissioners, in accordance with the directives contained in the Ministry of SOE Letter No. S-254/MBU/04/2020 dated April 17, 2020 on Talent & Succession Management of the Board of Directors of SOEs. In number 3 the letter c stated:

The Board of Commissioners/Supervisory Board shall immediately establish the Nomination and Remuneration Committee (NRC) or other nomenclature with equivalent function by expanding the role as Talent Committee for SOE Executives (Directors and BOD-1) with the following format:

1. Chairman: President Commissioner/ Chairman of the Supervisory Board/ Independent Commissioner
2. Secretary: Determined through the decision of the Board of Commissioners/ Supervisory Board meeting
3. Members: Determined through the decision of the Board of Commissioners/ Supervisory Board meeting

Qualification of Members of the Nomination & Remuneration Committee

The Board of Commissioners established the Nomination & Remuneration Committee based on the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Commissioners Decree No. 06/KEP.KOM/IV/2020 dated April 22, 2020. In 2021, there was a change in the Nomination & Remuneration Committee Members composition, so it was renewed through Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021 dated March 5, 2021 and appointed members of the Nomination & Remuneration Committee through the Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.KOM/VI/2021 dated July 9, 2021 and No. 011/KEP.KOM/IX/2021 dated September 27, 2021.

Appointment and Dismissal

Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed in the Board of Commissioners' Meeting for a certain term of office and may be reappointed in the following period. The replacement of members of the Nomination and Remuneration Committee who are not from the Board of Commissioners is carried out no later than 60 days after the said member of the Nomination and Remuneration Committee can no longer carry out their functions.

Term of Office

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 34/Pojk.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee is not longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association. However, the Board of Commissioners has the right, from time to time, to replace them.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, terdapat perubahan atau pergantian pada komposisi dan susunan Komite Nominasi & Remunerasi. Adapun rincian susunan Komite Nominasi & Remunerasi per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Number, Composition, and Structure of the Nomination & Remuneration Committee in 2020

During 2021, there were changes in the composition and structure of the Nomination & Remuneration Committee. The Nomination & Remuneration Committee composition as of December 31, 2021 can be seen in the table below.

Susunan Komite Nominasi & Remunerasi

Structure of the Nomination & Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Anhar Adel	Ketua Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP.KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP.KOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No.08/KEP.KOM/VIII/2020 dated August 14, 2020 and updated through the Board of Commissioners Decree No.03/KEP.KOM/III/2021	14 Agustus 2020- mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris August 14, 2020- following the term of office as Commissioner	Ke-1 First
Suwandi	Sekretaris Secretary	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP.KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP.KOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No.08/KEP.KOM/VIII/2020 dated August 14, 2020 and updated through the Board of Commissioners Decree No.03/KEP.KOM/III/2021	14 Agustus 2020- mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris August 14, 2020- following the term of office as Commissioner	Ke-1 First
Ari Dwipayana	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP.KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP.KOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No.08/KEP.KOM/VIII/2020 dated August 14, 2020 and updated through the Board of Commissioners Decree No.03/KEP.KOM/III/2021	14 Agustus 2020- mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris August 14, 2020- following the term of office as Commissioner	Ke-1 First
R. Nurhidayat	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.007/KEP.KOM/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.KOM/VI/2021 dated June 9, 2021	9 Juni 2021 – 8 Juni 2024 June 9, 2021 – June 8, 2024	Ke-1 First
M. Sapto Setiawan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 11/ KEP.KOM/IX/2021 tanggal 27 September 2021 Board of Commissioners Decree No. 11/ KEP.KOM/IX/2021 dated September 27, 2021	27 September 2021 - 31 Oktober 2021 September 27, 2021 - October 31, 2021	Ke-1 First

Profil Ketua dan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Rincian profil Ketua dan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi disampaikan secara pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Profiles of Chairman and Members of the Nomination & Remuneration Committee

Details of profiles of the Chairman and Members of the Nomination & Remuneration Committee are presented in the “Profile of the Board of Commissioners” section contained in the “Company Profile” Chapter of this Annual Report.

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi. Sesuai dengan amanat regulasi, Komite juga mampu menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Independency of the Nomination & Remuneration Committee

All members of the Nomination and Remuneration Committee have met all the independence criteria. In accordance with the regulatory mandate, the Committee is also able to carry out its duties independently, upholds the interests of the Company and cannot be influenced by any party.

Pengungkapan Independensi Komite Nominasi & Remunerasi Disclosure of Independence of the Nomination & Remuneration Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Anhar Adel	Suwandi	Ari Dwipayana	R. Nurhidayat
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	x	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi. Has a management relationship in the Company, Subsidiaries and Affiliated Entities	x	x	x	x
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Holds Company shares, both directly and indirectly	x	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite. Has familial relations with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Committee members	x	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah. Serves as a political party, official and government administrator	x	x	x	x



Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/ M/3U/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 perihal Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Di antara isi piagam yang menjadi pegangan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Tugas dan Fungsi;
3. Hubungan dengan Dewan Komisaris;
4. Masa Jabatan;
5. Persyaratan Keanggotaan.

Work Guidelines: Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee duties and functions refers to the applicable laws and regulations, including the Minister for SOEs Regulation Number PER-10/M/3U/2012 concerning the Supporting bodies of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, and the Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.

The Nomination and Remuneration Committee charter includes:

1. Appointment and Dismissal of the Nomination and Remuneration Committee;
2. Duties and Functions;
3. Relationship with the Board of Commissioners;
4. Term of office;
5. Membership Requirements.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan membantu Dewan Komisaris dan bertugas untuk:
 - a. Menyusun konsep dan analisis yang berhubungan dengan fungsi komite remunerasi dan nominasi.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi yang sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris.
2. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
3. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi.
4. Melakukan evaluasi terhadap kriteria yang digunakan dalam proses talent classification yang dilakukan oleh Direksi.
5. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (Selected Talent), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (Nominated Talent).
6. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
7. Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators Individu anggota Direksi.
8. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
9. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun.
10. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
11. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai kebijakan remunerasi, struktur remunerasi, dan besaran remunerasi bagi Dewan komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
12. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee duties and responsibilities include:

1. The Nomination and Remuneration Committee has the role of assisting the Board of Commissioners and is tasked with:
 - a. Developing concepts and analyzes related to the remuneration and nomination committee function.
 - b. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding policies, criteria and qualifications required in the nomination process in accordance with the Company's strategic plan and performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
2. Conducting regular reviews of the company's Talent Management System as well as monitoring and evaluating its implementation.
3. Evaluating the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors.
4. Evaluating the criteria used in the talent classification process conducted by the Board of Directors.
5. Validating and calibrating the Talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent), to produce a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Ministerial (Nominated Talent).
6. Evaluating the Company's Representative Candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, prior to submission to the GMS/Minister.
7. Evaluating the proposed Key Performance Indicators for Individual members of the Board of Directors.
8. Preparing proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
9. Assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on prepared benchmarks.
10. Preparing proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
11. Evaluating the remuneration policy and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy, remuneration structure, and the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of directors to be submitted to the GMS.
12. Evaluating the recommendation of the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
13. Carrying out other duties in accordance with the Board of Commissioners' requests.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan review terhadap setiap aktivitas dalam lingkup tugasnya, dan setiap saat dapat mencari serta meminta informasi yang dibutuhkan dari:

1. Direksi;
2. Setiap pegawai (dan seluruh pegawai diarahkan bekerja sama untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi);
3. Pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya manusia dan remunerasi;
4. Manajemen; dan
5. Pihak-pihak yang terkait.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi & Remunerasi

Perusahaan mengikutsertakan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Nominasi & Remunerasi di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Pelaksanaan rapat Komite Nominasi & Remunerasi dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat komite dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi & Remunerasi telah menyelenggarakan 10 kali rapat dengan rekapitulasi kehadiran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi & Remunerasi pada Rapat Tahun 2021 Attendance Recapitulation of the Nomination & Remuneration Committee

Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance %
Anhar Adel	10	9	90%
Suwandi	10	10	100%
Ari Dwipayana	10	8	80%
R. Nurhidayat	10	10	100%
M. Sapto Setiawan*	3	3	100%
Rata-rata Average	8.6	8	88%

* Masa jabatan di mulai pada 27 September 2021 s.d 31 Oktober 2021 | Term of Office started on September 27, 2021 until October 31, 2021

Nomination and Remuneration Committee Authorities

The Board of Commissioners authorizes the Nomination and Remuneration Committee to review all activities within its scope of duties, and can seek and request information from:

1. Board of Directors;
2. Every employee (and all employees are directed to work together to fulfill what is required by the Nomination and Remuneration Committee);
3. The parties carrying out the HC management and remuneration function;
4. Management; and
5. Relevant parties.

Competency Development of the Nomination & Remuneration Committee

The Company includes members of the Nomination & Remuneration Committee in competency development activities carried out through various trainings and education with funding fully the responsibility of the Company. The list of training and competency improvement activities participated in by the Nomination & Remuneration Committee throughout 2021 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

Nomination & Remuneration Committee Meeting

The Nomination & Remuneration Committee must hold at least 1 (one) meeting per month. The Nomination & Remuneration Committee meeting can make decisions if at least 66% or 2 people from the 3 members (including the Chairman) are present. The committee meeting decisions are based on consensus agreement. In the event there is no consensus agreement, the decision is based on the majority vote.

In 2021, the Nomination & Remuneration Committee has held 10 meetings with the attendance recapitulation presented in the table below.

Agenda Rapat Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
25 Juni 2021 June 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan April 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Pembahasan Persiapan RUPS Laporan Tahunan Audited Tahun Buku 2020; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the April 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance for May 2021 (including the monthly monitoring template for Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Discussion on the Preparation of the GMS for the 2020 Fiscal Year Audited Annual Report; and Other Strategic Issues.
26 Juli 2021 July 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Mei 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juni 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the May 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance in June 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Other Strategic Issues.
26 Agustus 2021 August 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Juni 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Laporan Hasil Kajian komprehensif dari pihak ketiga independen (surat Dewan Komisaris Nomor:S-059/Kom/PIHC/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021) Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the June 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance in July 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payable); Comprehensive Study Report from an independent third party (letter of the Board of Commissioners No. S-059/Kom/PIHC/VIII/2021 dated August 18, 2021) Other Strategic Issues.
24 September 2021 September 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Juli 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Progres Project SDU PIHC (project prioritas Menteri BUMN 2021-2023); Progres Implementasi Manufacturing Network Footprint; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the July 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance in August 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Progress of the SDU PIHC Project (the priority project of the Minister of SOEs 2021-2023); Progress of Manufacturing Network Footprint Implementation; and Other Strategic Issues.
1 Oktober 2021 October 1, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi; Pembahasan usulan KPI Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Evaluation of the Nomination and Remuneration Committee; Discussion on proposed KPI for the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors
26 Oktober 2021 October 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Agustus 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Realisasi capaian KPI kolegal dan individu Direksi s.d. Triwulan III 2021; dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the August 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance in September 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payable); Realization of collegial and individual Directors KPI achievements up to Q III 2021; and Other Strategic Issues.
27 Oktober 2021 October 27, 2021	Pembahasan Rencana Kerja Tahunan KNR KNR Annual Work Plan Discussion
24 November 2021 November 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan September 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan hutang usaha); Progres Penyelesaian Dana Pensiun (Penyelesaian Perubahan PPMP ke PPIP di PSP dan Penyelesaian Dampak Restrukturisasi AJS); dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the September 2021 performance meeting; Discussion on the Company's Performance in October 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); Progress of Pension Fund Completion (Completion of Changes from PPMP to PPIP in PSP and Completion of the Impact of AJS Restructuring); and Other Strategic Issues.
30 November 2021 November 30, 2021	Wawancara Calon Direktur PIE PIE Director Candidate Interview

Agenda Rapat Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Agenda
24 Desember 2021 December 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak lanjut/pending matters hasil rapat kinerja bulan Oktober 2021; Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan November 2021 (termasuk di dalamnya template monthly monitoring Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); dan Isu-Isu Strategis Lainnya. Discussion on follow-up/pending matters on the results of the performance meeting in October 2021; Discussion on the Company's Performance for November 2021 (including the monthly monitoring template for the Vice Minister of BUMN I and the progress of the realization of the position of trade receivables and trade payables); and Other Strategic Issues.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi pada 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi & Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Melaksanakan tugas dan pelaporannya secara mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
- Bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
- Melakukan penelaahan atas usulan KPI Direksi secara individual serta melakukan review atas pencapaiannya secara berkala;
- Menyusun Laporan Triwulanan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris pada bulan pertama setelah Triwulan yang bersangkutan;
- Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris, jika diminta;
- Menjaga kerahasiaan Dokumen, data dan Informasi Perusahaan;
- Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris;
- Melakukan penelaahan atas usulan penempatan/pengangkatan pegawai/Direksi dan Komisaris pada Anak Perusahaan yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris;
- Melakukan penelaahan atas usulan perubahan struktur organisasi yang memerlukan tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris.

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities by the Nomination & Remuneration Committee in 2022

Throughout 2021, the Nomination & Remuneration Committee carried out its duties and responsibilities as reported to the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee is obliged and responsible for:

- Carry out their duties and report independently and report directly to the Board of Commissioners;
- Work collectively in carrying out their duties to assist the Board of Commissioners;
- Review the KPI proposals for the Board of Directors individually and review their achievements on a regular basis;
- Prepare the Nomination and Remuneration Committee Activity Quarterly Reports and submit to the Board of Commissioners in the first month after the relevant Quarter;
- Prepare special reports to the Board of Commissioners, if requested;
- Maintain the confidentiality of Company Documents, data and information;
- Provide opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and identify matters that require the attention of the Board of Commissioners;
- Review the proposed placement/appointment of employees/Directors and Commissioners in Subsidiaries that require the approval/response of the Board of Commissioners;
- Review the proposed organizational structure changes that require the response/approval of the Board of Commissioners.

Rincian Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 Details of Duty Implementation in 2021

No.	Program Program	Kegiatan Activity
1	Melakukan <i>review</i> secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (<i>Talent Management System</i>) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya Conduct regular reviews of the company's Talent Management System as well as monitoring and evaluating its implementation	Tanggapan Dewan Komisaris atas Desain Program Pengembangan talenta PTPI The Board of Commissioners' Response to the Design of the Talent Development Program of PTPI

Rincian Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Details of Duty Implementation in 2021

No.	Program Program	Kegiatan Activity
2	Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (<i>Talent Classification</i>) yang dilakukan oleh Direksi Evaluate Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors	Evaluasi Sistem Pengelolaan Talenta serta Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaannya. Evaluation of the Talent Management System and Monitoring and Evaluating its Implementation.
3	Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (<i>Selected Talent</i>), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan Dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (<i>Nominated Talent</i>) Validate and calibrate Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners/Supervisory Board (Selected Talent), to produce a list of Talents to be Nominated by the Board of Commissioners/Supervisory Board to the GMS/Minister (Nominated Talent)	Penyampaian hasil validasi dan kalibrasi atas Daftar Top 20% Talenta BOD-1 (selected talent) PTPI. Submission of validation and calibration results on the Top 20% Talent List BOD-1 (selected talent) of PTPI.
4	Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri Evaluating the Company Representative Candidates who will be proposed as member of Board of Directors or member of Board of Commissioners of subsidiaries, before being submitted to the GMS/Minister	Evaluasi Calon Direksi Anak-Anak Perusahaan: 1. PT PSP 2. PT PIE Evaluation of Prospective Directors of Subsidiaries: 1. PT PSP 2. PT PIE
5	Melakukan evaluasi atas usulan <i>Key Performance Indicators</i> Individu anggota Direksi Evaluate the proposed Key Performance Indicators for Individual members of the Board of Directors	Kajian atas Usulan KPI 2 Direksi Secara Individual Tahun 2021 Review on Proposed KPI 2 Directors Individually in 2021
6	Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board	Penyampaian Usulan konsep sistem Evaluasi Kinerja Individu Direksi PTPI Submission of the proposed system concept for the Individual Performance Evaluation of the Board of Directors of PTPI
7	Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board	Rekomendasi Usulan program pengembangan bagi anggota Dewan Komisaris PTPI. Recommendation for proposed development programs for members of the Board of Commissioners of PTPI.
8	Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Evaluating the remuneration policy for employees requiring approval/response from the Board of Commissioners/Supervisory Board	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Atas Penetapan Anggota Komite KNR termasuk Remunerasinya. Kajian Atas Usulan Remunerasi dan Tantiem Direksi Study to Determine NRC Committee Members including Remuneration. Review of the Proposed Board of Directors Remuneration and Tantiem
9	Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan Evaluating the Board of Directors' proposal on the Company's organizational structure	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan Dewan Komisaris Atas Perubahan Struktur Organisasi PTPI Kajian atas Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi PTPI Response to the Board of Commissioners on Changes in the PTPI Organizational Structure Study of the Proposed Adjustment of the PTPI Organizational Structure
10	Penugasan lain oleh Dewan Komisaris Other assignments by the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> Kajian atas Surat Direksi tentang Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Rencana Penambahan Penyertaan Modal PTPI di PT Rekayasa Industri Evaluasi atas Kinerja Juni, Juli, dan Agustus 2021. Penyusunan Dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan KNR Kepada Dewan Komisaris. Evaluasi Atas Usulan RKAP Tahun 2022 PTPI. Rapat-Rapat Internal dan Rapat Komite KNR periode s.d. Desember 2021, termasuk Rapat dengan Direksi. Study the Letter of the Board of Directors regarding the Request for Written Response from the Board of Commissioners on the Plan to Increase the Equity Participation of PTPI in PT Rekayasa Industri Evaluation of Performance in June, July, and August 2021. Preparation and Submission of the KNR Annual Work Plan and Budget to the Board of Commissioners. Evaluation of the Proposed WP&B 2022 of PTPI. Internal Meetings and KNR Committee Meetings period up to December 2021, including the Board of Directors Meeting.

Kebijakan Suksesi Direksi

Pelaksanaan suksesi Direksi dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, profesionalisme serta kompetensi. Tujuan dari kebijakan itu adalah dalam rangka menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan bisnis serta tujuan jangka panjang Perusahaan. Kendati demikian, sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka keputusannya diambil oleh pemerintah.

Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 mengatur bahwa sumber Bakal Calon Direksi BUMN dapat berasal dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta BUMN yang terdiri atas:
 - a. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak usaha dari BUMN/perusahaan patungan BUMN.
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Sumber Lain yang terdiri dari:
 - a. Pejabat BUMN lain;
 - b. Sumber lainnya.

Direksi diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham. Proses pencalonan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya, seluruh calon Direksi menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dan mekanisme penilaiannya tercantum dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-09a/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Board of Directors' Succession Policy

The succession of the Board of Directors is carried out based on the principles of good governance, professionalism and competence. The objective of this policy is to maintain the continuity of leadership regeneration process, ultimately ensuring business continuity as well as the Company's long-term goals. However, as an SOE whose shares are wholly owned by the state, the decision is taken by the Government.

The Board of Directors succession policy refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on the Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance; Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 on Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises; and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 regulates that Candidates for the Board of Directors of SOEs can come from:

1. Board of Directors of SOE;
2. Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOE;
3. SOE Talent, consisting of:
 - a. Officials 1 (one) level below the Board of Directors or officials who have special achievements;
 - b. Directors of subsidiaries/ joint ventures of SOEs.
4. Talent from the Ministry of SOEs;
5. Other Sources, consisting of:
 - a. Other SOE officials;
 - b. Other sources.

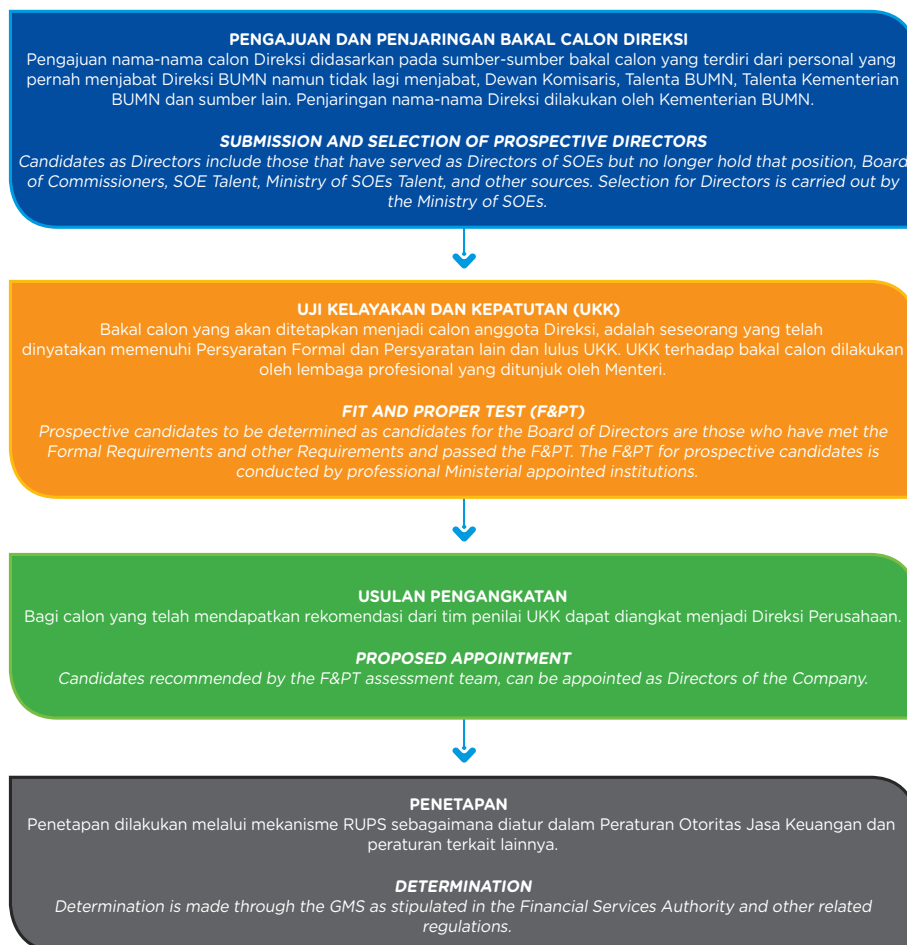
Directors are appointed by Shareholders through a GMS from candidates nominated by the Shareholders. The nomination process is carried out in accordance with the applicable laws and regulations, and the nomination made binding by the GMS.

To ensure integrity and professionalism in their fields, all candidates for the Board of Directors undergo a fit and proper test that is carried out in accordance with applicable laws and regulations. In conducting the fit and proper test for candidates as Directors reference is made to the Ministry of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 and the evaluation mechanism as stipulated in the Ministry of SOEs Decree No. KEP-09A/MBU/2002 on Fit and Proper Test of Prospective Members of Directors of SOEs, the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as other laws and regulations.

Selain itu, dalam rangka program penyiapan kandidat calon Direksi, Perusahaan melakukan program *assessment* kepada para pejabat internal yang posisinya 1 (satu) tingkat di bawah Direksi (*Grade 1*). Dari sisi penentuan kompetensi, yang menjadi acuan adalah standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN dan *Leadership Development Program* (LDP), yaitu program pengembangan kompetensi Kementerian BUMN.

In addition, in the framework of preparing candidates as Directors, the Company conducts an assessment program for internal officials whose position is one level below the Board of Directors (*Grade 1*). In terms of competency assessment, reference is made to the competency standards required by the Ministry of SOEs and the Leadership Development Program (LDP), which is the competency development program for the Ministry of SOEs.

Skema dan Mekanisme Suksesi Direksi: Pengusulan Hingga Penetapan *Board of Directors Succession Scheme and Mechanism: Proposal to Determination*



Selain persyaratan formal dan material, Bakal Calon Direksi diwajibkan memenuhi persyaratan lainnya, yaitu:

1. Bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
2. Bukan merupakan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Bukan merupakan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
4. Tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMN yang sama.

In addition to formal and material requirements, Prospective Directors are required to meet the following requirements, namely:

1. Is not a member and/or administrator of a political party and/or candidate of legislative member and/or legislative member;
2. Is not a state official who is prohibited based on statutory regulations;
3. Is not a candidate for head/vice regional head and/or head/vice regional head;
4. Has not served as Director for 2 (two) periods with the same SOE.

KOMITE DAN ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Sekretaris Perusahaan, Komunikasi Korporat, Komite Pengembangan SDM, dan Audit Internal.

Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi untuk membantu tugas Direksi dalam menyiapkan dan menyusun RKAP Perusahaan dan anak Perusahaan atau PI Grup sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/048/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup.

Struktur dan Keanggotaan Komite RKAP

Struktur dan keanggotaan Komite RKAP berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/048/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Komite RKAP

Struktur dan keanggotaan Komite RKAP berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/048/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup adalah sebagai berikut:

Tabel Keanggotaan Komite RKAP
WP&B Committee Members

Jabatan Position	Dijabat Oleh Held By
Pengarah Director	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Teknologi Direktur Investasi Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Direktur Transformasi Bisnis President director Director of Technology Director of Investment Director of HC, Governance and Risk Management Director of Business Transformation
Penanggung Jawab Person Responsible	Direktur Keuangan Director of Finance
Ketua Chairman	SVP Kinerja Korporat SVP Corporate Performance
Wakil Ketua Vice Chairman	SVP Perencanaan Korporat SVP Corporate Planning
Sekretaris Secretary	VP Anggaran VP Budget
Penanggung Jawab Direktora Utama Responsible to President Director	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Penanggung Jawab Direktorat Teknologi Responsible to Technology Directorate	SVP Teknologi Manufaktur SVP Manufacturing Technology

BOARD OF DIRECTORS COMMITTEES AND SUPPORTING BODIES

In carrying out its duties and responsibilities in managing the Company, the Board of Directors is assisted by the Company's Work Plan and Budget Committee (WP&B), Corporate Secretary, Corporate Communications, HC Development Committee, and Internal Audit.

Company Work Plan and Budget Committee (WP&B)

The Company's Work Plan and Budget Committee (WP&B) is a supporting body appointed by the Board of Directors to assist them in preparing and compiling the Company's and Subsidiaries, or PI Group, WP&B in accordance with the Board of Directors' Decree No. SK/DIR/048/2019 dated July 30, 2019 concerning PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Work Plan and Budget Committee.

WP&B Committee Structure and Membership

The WP&B Committee structure and membership based on the of the Board of Directors Decree No. SK/DIR/048/2019 dated July 30, 2019 concerning the PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Work Plan and Budget Committee is as follows:

WP&B Committee Structure

The WP&B Committee structure and membership based on the of the Board of Directors Decree No. SK/DIR/048/2019 dated July 30, 2019 concerning the PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Work Plan and Budget Committee is as follows:

Tabel Keanggotaan Komite RKAP
WP&B Committee Members

Jabatan Position	Dijabat Oleh Held By
Penanggung Jawab Direktorat Investasi Responsible to Investment Directorate	SVP Pengembangan Korporat SVP Corporate Development
Penanggung Jawab Direktorat Keuangan Responsible to Finance Directorate	SVP Keuangan & Perbendaharaan SVP Finance & Treasury
Penanggung Jawab Direktorat Pemasaran Responsible to Marketing Directorate	SVP Niaga SVP Commerce
Penanggung Jawab Direktorat SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Responsible to HC, Governance and Risk Management Directorate	SVP SDM SVP HC
Penanggung Jawab Direktorat Transformasi Bisnis Responsible to Business Transformation Directorate	SVP Transformasi Bisnis SVP Business Transformation
Penanggung Jawab Risiko RKAP Responsible to WP&B Risk	SVP Tata Kelola Korporasi SVP Corporate Governance

Tugas dan Tanggung Jawab Komite RKAP**Pengarah**

Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan ser-ta rencana kerja pelaksanaan penyusunan RKAP kepada Komite RKAP.

Penanggungjawab

Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan Komite RKAP dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan prinsip ketaatan pada ketentuan/prosedur yang berlaku di perusahaan, transparansi serta efektivitas proses untuk mendukung penyusunan RKAP.

Ketua

- Bertanggung jawab dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan Komite RKAP, termasuk pelaksanaan rapat-rapat dan tugas-tugas Komite RKAP.
- Memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan penyusunan RKAP di lingkungan PTPI dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
- Melaporkan RKAP yang telah disusun kepada Pengarah cq. Direktur Keuangan dan Investasi.

Wakil Ketua

- Bertanggung jawab dalam Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan penyusunan RKAP khususnya program kerja dan risiko perusahaan yang diajukan oleh penanggungjawab bidang.
- Melaporkan perkembangan penyusunan RKAP kepada Ketua Komite RKAP.

Sekretaris

Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan penyusunan RKAP di lingkungan PTPI.

Bidang-Bidang

- Bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun asumsi penyusunan RKAP serta arahan-arahan bersifat strategis untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKAP Anak Perusahaan.

WP&B Committee Duties and Responsibilities Director

Provides directives and determines policies and work plans for the WP&B preparation for the WP&B Committee.

Person Responsible

Responsible for all WP&B Committee activities and ensures these activities are in accordance with the compliance principles of the applicable provisions/procedures in the Company, and the transparency and effectiveness process to support the preparation of the WP&B.

Chairman

- Responsible for leading, planning, coordinating, and evaluating all WP&B Committee activities, including the WP&B Committee meetings and duties.
- Ensures that the preparation and implementation of the PTPI WP&B is carried out and runs well.
- Reports the WP&B prepared to the Steering Committee through the Director of Finance and Investment.

Vice Chairman

- Responsible for leading, planning, coordinating, and evaluating all WP&B preparation activities, especially the Company work programs and risks proposed by the person in charge of the area.
- Reports the progress of the WP&B preparation to the WP&B Committee Chairman.

Secretary

Responsible for carrying out administrative duties to support the preparation and implementation of the PTPI WP&B.

Areas

- Responsible for preparing and compiling the assumptions used for the preparation of the WP&B as well as the strategic directives that subsequently become the basis for the preparation of the Subsidiary's WP&B.

2. Review atas target-target tahun penyusunan RKAP sesuai dengan timeline dalam RJPP dan Transformasi Bisnis.
3. Menyiapkan dan menyusun risiko strategis utama dalam penyusunan RKAP untuk selanjutnya menjadi dasar dalam pembuatan RKAP berbasis risiko khususnya untuk penanggung jawab bidang risiko.
4. Memastikan bahwa persiapan kebutuhan terkait masing-masing bidang untuk penyusunan RKAP dilaksanakan dengan baik.
5. Menyampaikan perkembangan penyusunan RKAP PI Group pada masing-masing bidang baik kepada Ketua dan Wakil Ketua.

2. Reviews the targets for the preparation of the WP&B in accordance with the timeline in the RJPP and Business Transformation.
3. Prepares and compiles the main strategic risks for the preparation of the WP&B to subsequently become the basis for preparing the risk-based WP&B, especially for those in charge of the risk sector.
4. Ensures the preparation of needs related to each area in the preparation of the WP&B is carried out properly.
5. Conveys the development of the PI Group's WP&B preparation in each area to the Chairman and Vice Chairman.

Pelaksanaan Tugas Komite RKAP

Pada tahun 2021, Komite RKAP telah melaksanakan program kerja sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKAP Tahun 2022
2. Pembahasan inisiatif strategis serta milestone tahun 2022
3. Melakukan review atas usulan RKAP Tahun 2022 Anak Perusahaan
4. Finalisasi asumsi RKAP Tahun 2022
5. Memberikan keputusan dan arahan untuk RKAP Tahun 2022 kepada Anak Perusahaan

Implementation of the WP&B Committee Duties

In 2021, the WP&B Committee implemented the following work programs:

1. Preparation for the preparation of the 2022 WP&B
2. Discussion on strategic initiatives and milestones for 2022
3. Reviewed the Subsidiaries' 2022 WP&B proposal
4. Finalized the 2022 WP&B assumptions
5. Provided decisions and directives for the 2022 WP&B to the Subsidiaries

Rapat Komite RKAP

Sepanjang tahun 2021, Komite Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 kali. Berikut agenda rapat yang telah dibahas di tahun 2021.

WP&B Committee Meetings

Throughout 2021, the WP&B Committee held 6 meetings. The agenda for the meetings in 2021 included the following.

Tabel Rapat Komite RKAP
WP&B Committee Meetings

No.	Agenda
1	Rapat Pembahasan Perencanaan Penjualan dan Operasi Prognosa Tahun 2021 dan RKAP 2022 Discussion Meeting on Sales Planning and Operation Prognosis for 2021 and 2022 WP&B
2	Rapat Pembahasan Strategic Session RKAP Tahun 2022 PTPI PTPI 2022 WP&B Strategic Session Discussion Meeting
3	Rapat Pembahasan Balansitas Produk untuk RKAP Tahun 2022 Product Balance Discussion Meeting for 2022 WP&B
4	Rapat Penyelarasan Asumsi Produksi, Pengadaan dan Pemasaran RKAP tahun 2022 Alignment of Production, Procurement and Marketing Assumptions Meeting for 2022 WP&B
5	Pengisian Batas Toleransi Risiko (BTR) dan Risk Register Operasional untuk RKAP tahun 2022 Completing the Risk Tolerance Limit (BTR) and Operational Risk Register for the 2022 WP&B
6	Rapat Teknis RKAP Tahun 2022 - Anak Perusahaan 2022 WP&B Technical Meeting - Subsidiaries

Di tahun 2021, Komite RKAP juga telah menyusun program kerja tahun 2022, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKAP Tahun 2023
2. Pembahasan inisiatif strategis serta milestone tahun 2023
3. Melakukan *review* atas usulan RKAP Tahun 2023 Anak Perusahaan
4. Finalisasi asumsi RKAP Tahun 2023
5. Memberikan keputusan dan arahan untuk RKAP Tahun 2023 kepada Anak Perusahaan

In 2021, the WP&B Committee also prepared the following work program for 2022:

1. Preparation for preparing the 2023 WP&B
2. Discussion of strategic initiatives and milestones for 2023
3. Reviewed the proposed 2023 WP&B for Subsidiaries
4. Finalized the 2023 WP&B assumptions
5. Provided decisions and directives for the 2023 WP&B to the Subsidiaries

KOMITE PENGEMBANGAN SDM

Komite Pengembangan SDM merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi untuk membantu tugas Direksi dalam pengelolaan program pengembangan Sumber Daya Manusia di Perusahaan agar sesuai dengan kompetensi. Pembentukan dan pengangkatan keanggotaan Komite Pengembangan SDM dilaksanakan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/081/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia PTPI.

Susunan Anggota Komite Pengembangan SDM

Keanggotaan Komite Pengembangan SDM terdiri dari dua level, yaitu Level Utama dan Level Madya.

Level Utama

Tabel Susunan Anggota Komite Pengembangan SDM Level Utama

Main Level HC Development Committee Members Composition

Jabatan Position	Dijabat Oleh Held By
Ketua Chairman	Direktur SDM dan Tata Kelola Director of HC and Governance
Sekretaris Secretary	SVP SDM HC SVP
Anggota Members	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Keuangan Direktur Teknologi Direktur Pemasaran Direktur Investasi Direktur Transformasi Bisnis Director of Finance Director of Technology Director of Marketing Director of Investment Director of Business Transformation

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite SDM Level Utama

- Menerima usulan dan mencari informasi bakal calon pejabat Grade 1 dan Grade 2 dari sumber internal dan sumber reliable lainnya.
- Melakukan penilaian terhadap kandidat Senior Vice President I Ka. SPI I Sekretaris Perusahaan I Ka. Pusat Pelatihan I Ka. Corporate Communication dan Pejabat Grade 1 setingkat lainnya di perusahaan untuk diputuskan melalui Rapat Komite Pengembangan SDM dengan mengacu pada kompetensi para calon I kandidat yang diusulkan dan kebutuhan kompetensi jabatan sesuai dengan arah pengembangan perusahaan.
- Melakukan penilaian terhadap kandidat Vice President dan Pejabat Grade 2 setingkat lainnya di perusahaan untuk diputuskan melalui Rapat Komite Pengembangan SDM dengan mengacu pada kompetensi dan kontribusi para calon I kandidat yang diusulkan melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia dan sesuai dengan arah pengembangan perusahaan.

HC DEVELOPMENT COMMITTEE

The HC Development Committee is a supporting body appointed by the Board of Directors to assist them in managing the Company's Human Capital development program based on competencies. The formation and appointment of members of the HC Development Committee was carried out by the Board of Directors Decree No. SK/DIR/081/2018 dated November 26, 2018 concerning the Human Capital Development Committee of PTPI.

Members of the HC Committee

The HC Development Committee Membership has two levels, Main Level and Intermediate Level.

Main Level

Main Level HC Committee Main Duties and Responsibilities

- Receiving proposals and seeking information on prospective candidates for Grade 1 and Grade 2 officials from internal sources and other reliable sources.
- Assessing the candidates for Senior Vice President I Ka. SPI I Corporate Secretary I Ka. Training Center I Ka. Corporate Communication and other Grade 1 Officers in the Company to be decided through the HC Development Committee Meeting with reference to the competencies of the proposed candidates and the competency needs of positions in accordance with the Company development directives.
- Assessing the Vice President candidates and other Grade 2 Officers in the Company to be decided through the HC Development Committee Meeting with reference to the competencies and contributions of the candidates proposed through the HC development program and in accordance with Company development directives.

4. Melakukan evaluasi penilaian, dalam hal penilaian dilakukan oleh Lembaga Profesional.
 5. Membahas program Rotasi, Mutasi, dan Promosi karyawan Grade 1 dan Grade 2 internal perusahaan berdasarkan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.
 6. Melakukan penilaian dan wawancara dan/atau evaluasi untuk penetapan dan pengisian formasi I penggantian pejabat dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan kebutuhan perusahaan.
 7. Mengevaluasi keberhasilan dan kinerja kerja pejabat-pejabat Grade 1 dan Grade 2 di internal perusahaan.
 8. Membahas masalah pengelolaan Sumber Daya Manusia (baik operasional maupun strategis).
 9. Memberikan arahan strategi di bidang Sumber Daya Manusia, membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia termasuk perubahan - perubahannya dan mengusulkan kepada Direktur Utama untuk penetapannya.
 10. Menetapkan sistem yang dapat mendorong karyawan memiliki budaya perusahaan, etos dan budaya kerja yang baik.
 11. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama PTPI.
 12. Bertanggung jawab atas pengelolaan program pengembangan SOM Grade 1 dan 2 di Perusahaan.
4. Evaluating the assessments, in the event the assessment was carried out by a Professional Institution.
 5. Discussing the Company's internal rotation, transfer, and promotion programs for Grade 1 and Grade 2 employees based on a competency-based HC development system.
 6. Conducting assessments and interviews and/or evaluation for the determination and filling of formation/replacement of officials by considering the position needs and the Company needs.
 7. Evaluating the success and work performance of Grade 1 and Grade 2 officials within the Company.
 8. Discussing HC management issues (both operational and strategic).
 9. Providing strategic directives in the field of HC, preparing general policies in the field of HC, including changes, and proposing to the Director General for determination.
 10. Establishing a system to encourage employees to have a good company culture, ethos and work culture.
 11. Responsible to the President Director of PTPI.
 12. Responsible for the management of HC Grade 1 and 2 development programs in the Company.

Tugas & Wewenang Ketua Komite Pengembangan SDM Level Utama

1. Menyerahkan Daftar Bakal Calon Pejabat Grade 1 dan setingkat lainnya di internal Perusahaan kepada Direktur Utama untuk memperoleh persetujuan.
2. Menyerahkan Daftar Bakal Calon Pejabat Grade 2 dan setingkat lainnya di internal perusahaan kepada Direktur Utama untuk memperoleh persetujuan.
3. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Tim guna disampaikan kepada Direktur Utama PTPI.
4. Menyampaikan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direktur Utama guna mendapatkan penetapan.
5. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite SDM Level Utama.
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku Ketua Komite Pengembangan SDM Level Utama.

Tugas & Wewenang Anggota Komite Pengembangan SDM Level Utama

1. Melakukan penilaian terhadap bakal calon Pejabat Grade 1 & 2 di internal perusahaan sesuai dengan tugas dan wewenang utama Komite PSDM Level Utama.
2. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite Pengembangan SDM Level Utama.

Duties & Authorities of the Head of the Main Level HC Development Committee

1. Submitting a List of Prospective Candidates for Grade 1 Officers and other internal levels within the Company to the President Director for approval.
2. Submitting a List of Prospective Candidates for Grade 2 Officers and other levels within the company to the President Director for approval.
3. Preparing the final evaluation results as determined by the Team to be submitted to the President Director of PTPI.
4. Submitting the results of the final evaluation of the assessment to be submitted to the President Director for approval.
5. Performing duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Main Level HC Committee.
6. Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as the Head of the Main Level HC Development Committee.

Duties & Authorities of Main Level HC Development Committee Members

1. Assessing prospective candidates for Grade 1 & 2 Officers in the Company's internal positions in accordance with the main duties and authorities of the Main Level PSDM Committee.
2. Performing duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Main Level HC Development Committee.

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku anggota Komite PSDM level utama.

Tugas & Wewenang Sekretaris Komite Pengembangan SDM Level Utama

- Menyiapkan bahan rapat untuk pembahasan di Komite Pengembangan SDM Level Utama.
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil pembahasan Komite Pengembangan SDM Level Utama.
- Bertanggungjawab kepada Ketua Komite Pengembangan SDM Level Utama.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang selaku Sekretaris Komite PSOM level utama.

- Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as a member of the main level PSDM Committee.

Duties & Authorities of the Main Level HC Development Committee Secretary

- Preparing meeting materials for discussion at the Main Level HC Development Committee.
- Administering and documenting the discussion results of the Main Level HC Development Committee.
- Responsible to the Head of the Main Level HC Development Committee.
- Responsible for the implementation of duties, responsibilities and authorities as the main level PSOM Committee Secretary.

LEVEL MADYA

Tabel Susunan Anggota Komite Pengembangan SDM Level Madya

Composition of Intermediate Level HC Development Committee Members

Jabatan Position	Dijabat Oleh Held By
Ketua Chairman	Senior Vice President Sumber Daya Manusia Senior Vice President HC
Sekretaris Secretary	VP Pengembangan SDM VP HC Development
Anggota Member	Seluruh SVP, Ka. SPI, Sekretaris Perusahaan, Ka. Pusat Pelatihan, Ka. Corporate Communication All SVP, Head of SPI, Corporate Secretary, Head of Training Center, Head of Corporate Communication

INTERMEDIATE LEVEL

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite SDM Level Madya

- Menerima usulan dan mencari informasi bakal calon untuk mengisi jabatan di posisi Grade 3, 4 dan 5 dari sumber internal dan sumber reliable lainnya.
- Melakukan penilaian terhadap kandidat untuk mengisi jabatan posisi Grade 3, 4, dan 5 di perusahaan untuk diputuskan melalui Rapat Komite Pengembangan SDM dengan mengacu pada kompetensi para calon I kandidat yang diusulkan dan kebutuhan kompetensi jabatan sesuai dengan arah pengembangan Perusahaan.
- Membahas program Rotasi, Mutasi, dan Promosi karyawan Grade 3, 4, dan 5 di internal Perusahaan berdasarkan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.
- Melakukan penilaian dan wawancara dan I atau evaluasi untuk penetapan dan pengisian formasi I penggantian pejabat dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan kebutuhan perusahaan.
- Mengevaluasi keberhasilan dan kinerja kerja pejabat-pejabat Grade 3, 4, dan 5 di internal perusahaan.
- Membahas masalah pengelolaan Sumber Daya Manusia (baik operasional maupun strategis) sesuai kewenangannya.
- Menyiapkan dan mengusulkan sistem yang dapat mendorong karyawan memiliki budaya perusahaan, etos dan budaya kerja yang baik, dan kemudian diusulkan kepada Direktur SDM & Tata Kelola untuk penetapan.

Main Duties and Responsibilities of Intermediate Level HC Committee

- Receiving proposals and seeking information on prospective candidates to fill positions in Grade 3, 4 and 5 positions from internal sources and other reliable sources.
- Assessing candidates to fill Grade 3, 4, and 5 positions in the Company to be decided through the HC Development Committee Meeting with reference to the competencies of the proposed candidates and the competency needs of positions in accordance with the Company development directives.
- Discussing the Rotation, Transfer, and Promotion program for Grade 3, 4, and 5 employees within the Company based on a competency-based HC development system.
- Conducting assessments and interviews and/or evaluation for the determination and filling of formation/replacement of officials by considering the position needs and the Company needs.
- Evaluating the success and work performance of Grade 3, 4, and 5 officials within the Company.
- Discussing HC management issues (both operational and strategic) according to their authority.
- Preparing and proposing a system that encourages employees to have a good corporate culture, work ethic and culture, and propose it to the Director of HC & Governance for determination.

8. Melakukan evaluasi penilaian, dalam hal penilaian dilakukan oleh Lembaga Profesional.
9. Mengevaluasi peraturan-peraturan perusahaan dan pelaksanaannya yang terkait dengan ketenagakerjaan serta memberikan alternatif usulan penyempurnaan kepada Direktur SDM & Tata Kelola.
10. Membahas dan mengevaluasi pemetaan kompetensi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang dan mengusulkannya kepada Direktur SDM & Tata Kelola untuk penetapannya.
11. Menggagas penerapan human capital management dalam membentuk tim kerja lintas fungsional di lingkungan perusahaan.
12. Melaksanakan tugas - tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite SDM level Madya.
13. Bertanggung jawab atas pengelolaan program pengembangan SDM Grade 3, 4, dan 5 di perusahaan.

Tugas dan Wewenang Ketua Komite Pengembangan SDM Level Madya

1. Menyerahkan daftar usulan Rotasi, Mutasi dan Promosi Karyawan Grade 3, 4, 5 dan setingkat lainnya di internal perusahaan kepada Direktur SDM & Tata Kelola dan selanjutnya dimintakan persetujuan Direktur Utama.
2. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Tim guna disampaikan kepada Direktur SDM & Tata Kelola dan selanjutnya dimintakan persetujuan Direktur Utama.
3. Menyampaikan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direktur SDM & Tata Kelola dan selanjutnya dimintakan persetujuan Direktur Utama.
4. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite SDM Level Madya.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas , tanggung jawab, dan wewenang selaku ketua komite Pengembangan SDM level madya.

Tugas dan Wewenang Anggota Komite Pengembangan SDM Level Madya

1. Melakukan penilaian terhadap usulan Rotasi, Mutasi dan Promosi Karyawan Grade 3, 4, 5 di internal perusahaan sesuai dengan tugas dan wewenang utama Komite PSDM Level Madya.
2. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite SDM Level Madya.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku anggota Komite Pengembangan SDM Level Madya.

Tugas dan Wewenang Sekretaris Komite Pengembangan SDM Level Madya

1. Menyiapkan bahan rapat untuk pembahasan di Komite Pengembangan SDM Level Madya.
2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil pembahasan Komite Pengembangan SDM Level Madya.

8. Evaluating the assessment, in the event that the assessment is carried out by a Professional Institution.
9. Evaluating Company regulations and their implementation related to manpower and provide alternative suggestions for improvement to the Director of HC & Governance.
10. Discussing and evaluating the mapping of current competencies and competencies needed in the future and proposing them to the Director of HC & Governance for determination.
11. Initiating the implementation of human capital management by forming cross-functional work teams in the Company.
12. Carrying out other duties and responsibilities that may be assigned by the Board of Directors to the Intermediate-level HC Committee.
13. Responsible for managing HC Grade 3, 4, and 5 development programs in the Company.

Duties and Authorities of the Intermediate Level HC Development Committee Chair

1. Submitting a list of proposed Rotations, Transfers and Promotions for Grade 3, 4, 5 and other employees internally in the Company to the HC & Governance Director and then ask for approval from the President Director.
2. Preparing the final evaluation results as determined by the Team to be submitted to the HC & Governance Director and ask for approval from the President Director.
3. Submitting the final assessment results to be submitted to the Director of HC & Governance and requesting approval from the President Director.
4. Performing duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Intermediate Level HC Committee.
5. Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as the head of the intermediate-level HC Development committee.

Duties and Authorities of Intermediate Level HC Development Committee Members

1. Assessing the proposed Rotation, Transfer and Promotion of Grade 3, 4, 5 employees in the Company in accordance with the main duties and authorities of the Intermediate Level PSOM Committee.
2. Perform duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Intermediate Level HC Committee.
3. Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as a member of the Intermediate Level HC Development Committee.

Duties and Authorities of Intermediate Level HC Development Committee Secretary

1. Preparing meeting materials for discussion at the Intermediate Level HC Development Committee.
2. Administering and documenting the results of the Intermediate Level HC Development Committee discussions.

3. Bertanggungjawab kepada Ketua Komite Pengembangan SDM Level Madya.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku Sekretaris Komite Pengembangan SDM Level Madya.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengembangan SDM

Tugas & Wewenang Ketua Komite Sumber Daya Manusia Level Utama

1. Menerima usulan dan mencari informasi bakal calon pejabat Grade 1 dan Grade 2 dari sumber internal dan sumber reliabel lainnya.
2. Melakukan penilaian terhadap kandidat Senior Vice President dan Pejabat Grade 1 setingkat lainnya di perusahaan untuk diputuskan melalui Rapat Komite PSDM dengan mengacu pada kompetensi para calon / kandidat yang diusulkan dan kebutuhan kompetensi jabatan sesuai dengan arah pengembangan perusahaan.
3. Melakukan penilaian terhadap kandidat Vice Presiden dan Pejabat Grade 2 setingkat lainnya di perusahaan untuk diputuskan melalui Rapat Komite PSDM dengan mengacu pada kompetensi dan kontribusi para calon/kandidat yang diusulkan melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia dan sesuai dengan arah pengembangan perusahaan.
4. Melakukan evaluasi penilaian, dalam hal penilaian dilakukan oleh Lembaga Profesional.
5. Membahas program Rotasi, Mutasi, dan Promosi karyawan Grade 1 dan Grade 2 internal perusahaan berdasarkan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.
6. Melakukan penilaian dan wawancara dan / atau evaluasi untuk penetapan dan pengisian formasi / penggantian pejabat dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan kebutuhan perusahaan.
7. Mengevaluasi keberhasilan dan kinerja kerja pejabat-pejabat Grade 1 dan Grade 1 di internal perusahaan.
8. Membahas masalah pengelolaan Sumber Daya Manusia (baik operasional maupun strategis).
9. Memberikan arahan strategi di bidang Sumber Daya Manusia, membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia termasuk perubahan - perubahannya dan mengusulkan kepada Direktur Utama untuk penetapannya.
10. Menetapkan sistem yang dapat mendorong karyawan memiliki budaya perusahaan, etos dan budaya kerja yang baik.
11. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama PTPI.
12. Bertanggung jawab atas pengelolaan program pengembangan SDM Grade 1 dan 2 di Perusahaan

Tugas & Wewenang Ketua Komite PSDM Level Utama

1. Menyerahkan Daftar Bakal Calon Pejabat Grade 1 dan setingkat lainnya di internal perusahaan kepada Direktur Utama untuk memperoleh persetujuan.

3. Responsible to the Head of the Intermediate Level HC Development Committee.
4. Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as Secretary of the Intermediate Level HC Development Committee.

Implementation of HC Committee Duties

Duties & Authorities of the Main Level HC Committee Chairman

1. Receive proposals and seek information on prospective candidates for Grade 1 and Grade 2 Officers from internal and other reliable sources.
2. Assess the candidates for Senior Vice President and other Grade 1 Officers in the Company to be decided through the HC Committee Meeting with reference to the proposed candidates' competencies and the positions' competency needs in accordance with the Company's development direction.
3. Assess the Vice President candidates and other Grade 2 Officers in the Company to be decided through the HC Committee Meeting with reference to the proposed candidates' competencies through the HC development program in accordance with the Company's development direction.
4. Evaluate the assessments if carried out by a Professional Institution.
5. Discuss the Company's internal rotation, transfer, and promotion programs for Grade 1 and Grade 2 employees based on the competency-based HC development system.
6. Conduct assessments and interviews and/or evaluations for determining and filling/replacing officers by considering the position needs and the Company needs.
7. Evaluate the success and work performance of Grade 1 and Grade 1 officers in the Company.
8. Discuss HC management issues (operational and strategic).
9. Provide strategic directives in the HC field, establish general HC policies including the changes, and propose to the President Director for determination.
10. Establish a system to encourage employees to embrace a good corporate culture, ethos and work culture.
11. Responsible to the President Director of PTPI.
12. Responsible for managing Grade 1 and 2 HC development programs in the Company

Duties & Authorities of the Main Level HC Committee Chairman

1. Submit a List of Prospective Officers for Grade 1 and other levels in the Company's internal level to the President Director for approval

2. Menyerahkan Daftar Bakal Calon Pejabat Grade 2 dan setingkat lainnya di internal perusahaan kepada Direktur Utama untuk memperoleh persetujuan
3. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Tim guna disampaikan kepada Direktur Utama PTPI
4. Menyampaikan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direktur Utama guna mendapatkan penetapan
5. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite SDM Level Utama
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku Ketua Komite PSDM Level Utama

Tugas & Wewenang Anggota Komite PSDM Level Utama

1. Melakukan penilaian terhadap bakal calon Pejabat Grade 1 & 2 di internal perusahaan sesuai dengan tugas dan wewenang utama Komite PSDM Level Utama
2. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite PSDM Level Utama
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku anggota Komite PSDM level utama

Tugas & Wewenang Sekretaris Komite PSDM Level Utama

1. Menyiapkan bahan rapat untuk pembahasan di Komite PSDM Level Utama
2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil pembahasan Komite PSDM Level Utama
3. Bertanggungjawab kepada Ketua Komite PSDM Level Utama
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang selaku Sekretaris Komite PSDM level utama

Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite PSDM Level Madya

1. Menerima usulan dan mencari informasi bakal calon untuk mengisi jabatan di posisi Grade 3, 4, dan 5 dari sumber internal dan sumber reliabel lainnya.
2. Melakukan penilaian terhadap kandidat untuk mengisi jabatan posisi Grade 3, 4, dan 5 di perusahaan untuk diputuskan melalui Rapat Komite PSDM dengan mengacu pada kompetensi para calon/kandidat yang diusulkan dan kebutuhan kompetensi jabatan sesuai dengan arah pengembangan perusahaan.
3. Membahas program Rotasi, Mutasi, dan Promosi karyawan Grade 3, 4, dan 5 di internal perusahaan berdasarkan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.
4. Melakukan penilaian dan wawancara dan/atau evaluasi untuk penetapan dan pengisian formasi/penggantian pejabat dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan kebutuhan perusahaan.

2. Submit a List of Prospective Candidates for Grade 2 officers and other levels within the Company's internal level to the President Director for approval
3. Prepare the final evaluation results determined by the Team to be submitted to the President Director of PTPI
4. Submit the final assessment evaluation results to the President Director for determination
5. Perform duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Main Level HC Committee
6. Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities of the HC Committee Main Level Chairman

Duties & Authorities of the Main Level HC Committee Members

1. Assess the Company's internal prospective Grade 1 & 2 officer candidates in accordance with the main duties and authorities of the Main Level HC Committee
2. Perform duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Main Level HC Committee
3. Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as a member of the Main Level HC Committee

Duties & Authorities of the Main Level HC Committee Secretary

1. Prepare meeting materials for discussion at the Main Level HC Committee
2. Administer and document the discussion results at the Main Level HC Committee
3. Responsible to the Main Level HC Committee Chairman
4. Responsible for the implementation of duties, responsibilities and authorities as Secretary of the Main Level HC Committee

Main Duties & Responsibilities of Middle Level HC Committee

1. Receive proposals and seek information on prospective candidates to fill Grade 3, 4, and 5 positions from internal and other reliable sources.
2. Assess candidates to fill Grade 3, 4, and 5 positions in the Company to be decided through the HC Committee Meeting with reference to the proposed candidates competencies and the competency needs of positions in accordance with the Company development direction.
3. Discuss the Rotation, Transfer, and Promotion program for Grade 3, 4, and 5 employees within the Company based on a competency-based HC development system.
4. Conduct assessments and interviews and/or evaluations for determining and filling/replacing officers by considering the position needs and the Company needs.

5. Mengevaluasi keberhasilan dan kinerja kerja pejabat-pejabat Grade 3, 4, dan 5 di internal perusahaan.
6. Membahas masalah pengelolaan Sumber Daya Manusia (baik operasional maupun strategis) sesuai kewenangannya.
7. Menyiapkan dan mengusulkan sistem yang dapat mendorong karyawan memiliki budaya perusahaan, etos, dan budaya kerja yang baik, dan kemudian diusulkan kepada Direktur SDM & Tata Kelola untuk penetapan.
8. Melakukan evaluasi penilaian, dalam hal penilaian dilakukan oleh Lembaga Profesional.
9. Mengevaluasi peraturan-peraturan perusahaan dan pelaksanaannya yang terkait dengan ketenagakerjaan serta memberikan alternatif usulan penyempurnaan kepada Direktur SDM & Tata Kelola.
10. Membahas dan mengevaluasi pemetaan kompetensi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang dan mengusulkannya kepada Direktur SDM & Tata Kelola untuk penetapannya.
11. Menggagas penerapan human capital management dalam membentuk tim kerja lintas fungsional di lingkungan perusahaan.
12. Melaksanakan tugas – tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite SDM level Madya
13. Bertanggung jawab atas pengelolaan program pengembangan SDM Grade 3, 4, dan 5 di perusahaan.

Tugas & Wewenang Ketua Komite PSDM Level Madya

1. Menyerahkan daftar usulan Rotasi, Mutasi, dan Promosi Karyawan Grade 3, 4, 5 dan setingkat lainnya di internal perusahaan kepada Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko dan selanjutnya dimintakan persetujuan Direktur Utama.
2. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Tim guna disampaikan kepada Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko dan selanjutnya dimintakan persetujuan Direktur Utama
3. Menyampaikan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko dan selanjutnya dimintakan persetujuan Direktur Utama.
4. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite SDM Level Madya.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku ketua komite PSDM level madya.

Tugas & Wewenang Anggota Komite PSDM Level Madya

1. Melakukan penilaian terhadap usulan Rotasi, Mutasi, dan Promosi Karyawan Grade 3, 4, 5 di internal perusahaan sesuai dengan tugas dan wewenang utama Komite PSDM Level Madya.
2. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite SDM Level Madya.

5. Evaluate the success and work performance of Grade 3, 4, and 5 officers within the Company.
6. Discuss HC management issues (operational and strategic) according to their authority.
7. Prepare and propose a system to encourage employees to embrace a good corporate culture, ethos, and work culture, and propose to the Director of HC & Governance for determination.
8. Evaluate the assessment if carried out by a Professional Institution.
9. Evaluate Company manpower regulations and their implementation and provide alternative suggestions for improvement to the Director of HC & Governance.
10. Discuss and evaluate the mapping of current competencies and required competencies in the future, and propose to the Director of HC & Governance for determination.
11. Initiate the implementation of HC management by forming cross-functional work teams within the Company.
12. Carry out other duties and responsibilities assigned by the Board of Directors to the Middle Level HC Committee
13. Responsible for managing Grade 3, 4, and 5 HC development programs in the Company.

Duties & Authorities of Middle Level HC Committee Chairman

1. Submit a list of proposed Rotations, Transfers, and Promotions for Grade 3, 4, 5 employees and other levels within the Company to the Director of HC, Governance, & Risk Management and then request approval from the President Director.
2. Prepare the final evaluation results as determined by the Team to be submitted to the Director of HC, Governance, & Risk Management and then request approval from the President Director
3. Submit the final assessment evaluation results to be submitted to the Director of HC, Governance, & Risk Management and then request approval from the President Director.
4. Perform duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Middle Level HC Committee.
5. Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as the Middle Level HC Committee chairman.

Duties & Authorities of Middle Level HC Committee Members

1. Assess the proposed Rotation, Transfer, and Promotion of Grade 3, 4, 5 employees within the Company in accordance with the main duties and authorities of the Middle Level HC Committee.
2. Perform duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Middle Level HC Committee.

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku anggota Komite PSDM Level Madya.

Tugas & Wewenang Sekertaris Komite PSDM Level Madya

- Menyiapkan bahan rapat untuk pembahasan di Komite PSDM Level Madya.
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil pembahasan Komite PSDM Level Madya.
- Bertanggungjawab kepada Ketua Komite PSDM Level Madya.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku Sekertaris Komite PSDM Level Madya.

Rapat Komite Pengembangan SDM

Sepanjang tahun 2021, Komite PSDM telah mengadakan rapat sebanyak 26 kali. Berikut agenda rapat yang telah dibahas di tahun 2021.

Tabel Rapat Komite RKAP
WP&B Committee Meeting Table

No.	Tanggal Date	Agenda
1	5 Januari 2021 January 5, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan COVID-19 Struktur Organisasi Anak Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Handling COVID-19 Subsidiary Organizational Structure
2	6 Januari 2021 January 6, 2021	Pengaturan WFH Bagi Karyawan WFH Arrangements for Employees
3	12 Januari 2021 January 12, 2021	Implementasi Struktur Organisasi Baru dan Pengisian Jabatan di Anper Implementation of New Organizational Structure and Position Filling at Subsidiaries
4	17 Januari 2021 January 17, 2021	RKAP Perusahaan Tahun 2021 Company WP&B 2021
5	20 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> RKAP Korporat Tahun 2021 Dampak Perubahan Komponen Subsidi terhadap Jasa Operasi Pengisian Pejabat Pengadaan Job evaluation PI Grup Perkembangan Kasus COVID-19 <ol style="list-style-type: none"> Corporate WP&B 2021 Impact of Changes in Subsidy Components on Operational Services Filling the Procurement Officer position PI Group Job evaluation Development of COVID-19 Cases
6	16 Maret 2021 March 16, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Gedung Learning and Development Center (LDC) Isu Sentralisasi SDM <ol style="list-style-type: none"> Learning and Development Center (LDC) Building HC Centralization Issues
7	23 Maret 2021 March 23, 2021	<ol style="list-style-type: none"> KPI Individu Direksi Tahun 2021 Kontribusi CSR Sentra Vaksin Bersama <ol style="list-style-type: none"> Board of Directors Individual KPI 2021 CSR Contribution of the Joint Vaccine Center Performance Incentive Program
8	13 April 2021 April 13, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan Sentra Vaksin BUMN KPI tingkat SPM Talent Management Penambahan Formasi Direktorat Keuangan <ol style="list-style-type: none"> SOE Vaccine Center Assistance SPM level KPIs Talent Management Additional Formation of the Finance Directorate

- Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as a Middle Level HC Committee Member.

Duties & Authorities of Middle Level HC Committee Secretary

- Prepare meeting materials for discussion at the Middle Level HC Committee.
- Administer and document the results of the Middle Level HC Committee discussions.
- Responsible to the Middle Level HC Committee Chairman.
- Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as Secretary of the Middle Level HC Committee.

HC Committee Meetings

Throughout 2021, the HC Committee held 26 meetings. The following shows the agenda for the meeting discussions in 2021.

No.	Tanggal Date	Agenda
9	21 April 2021 April 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Perusahaan s/d Maret 2021 Program Sentra Vaksinasi bersama dan uang muka jasa operasi <ol style="list-style-type: none"> Company Performance up to March 2021 Joint Vaccination Center Program and advances for operating services
10	27 April 2021 April 27, 2021	Pemberian THR bagi Karyawan, Direksi dan Dekom Provision of THR for Employees, Board of Directors and Board of Commissioners
11	4 Mei 2021 May 4, 2021	Kriteria Seleksi Talent Talent Selection Criteria
12	9 Mei 2021 May 9, 2021	Karyawan tidak diijinkan mudik sesuai suratdari KBUMN Employees are not allowed to go home during Lebaran according to a letter from KBUMN
13	11 Mei 2021 May 11, 2021	Program Seleksi Talent, Program Mapping, Grading dan Sistem Remunerasi. Talent Selection Program, Mapping Program, Grading and Remuneration System.
14	18 Mei 2021 May 18, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Karyawan Grade I PI yang pensiun Tahun 2021 Vaksin Gotong Royong <ol style="list-style-type: none"> PI Grade I employees retiring in 2021 Gotong Royong Vaccines
15	1 Juni 2021 June 1, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Progress Talent Selection dan Pemetaan Grading Usulan Organ Pendukung Dekom (Komite) utk ikut dalam kunjungan ke lapangan <ol style="list-style-type: none"> Progress of Talent Selection and Grading Mapping Proposal for the Board of Commissioners Supporting Organs (Committees) to participate in field visits
16	22 Juni 2021 June 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan COVID-19 di Pupuk Indonesia Usulan Remunerasi, Tantiem Direksi dan Jasa Operasi Karyawan <ol style="list-style-type: none"> Handling COVID-19 in Pupuk Indonesia Proposed Remuneration, Board of Directors Tantiem and Operation Services Employees
17	24 Juni 2021 June 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan COVID-19 di Pupuk Indonesia Persiapan RUPS Kinerja Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> Handling COVID-19 in Pupuk Indonesia Preparation for the 2020 Performance GMS
18	6 Juli 2021 July 6, 2021	Status Sebaran Paparan COVID-19 di PI Grup dan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kantor PI Distribution Status of COVID-19 Exposure at PI Group and Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) at PI Offices
19	13 Juli 2021 July 13, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Usulan SKD Pro-Hire Update Sebaran COVID-19 di PI Grup <ol style="list-style-type: none"> SKD Pro-Hire proposal Update on the Spread of Covid-19 in PI Group
20	19 Juli 2021 July 19, 2021	Usulan Struktur Organisasi PI Proposed Organizational Structure of PI
21	20 Juli 2021 July 20, 2021	Perubahan Struktur Organisasi Changes in Organizational Structure
22	1 Agustus 2021 August 1, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pengisian Jabatan SEVP, SVP dan SPM Pengangkatan Karyawan Non Mutasi Menjadi Karyawan Tetap Pupuk Indonesia <ol style="list-style-type: none"> Filling SEVP, SVP and SPM positions Appointment of Non-Permanent Employees to Permanent Employees in Pupuk Indonesia
23	3 Agustus 2021 August 3, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Vaksin Gotong Royong PI Grup Usulan Anggaran TKNO dan COVID-19 <ol style="list-style-type: none"> Report on the Implementation of the Pupuk Indonesia Group Gotong Royong Vaccine TKNO Budget Proposal and COVID-19
24	7 September 2021 September 7, 2021	Pencapaian KPI 2021 2021 KPI Achievements
25	14 September 2021 September 14, 2021	Program Talent Management BoD-1 dan BoD-2 BoD-1 and BoD-2 Talent Management Programs
26	2 November 2021 November 2, 2021	Bidang SDM, TK, & MR (Bantuan Buku Tabungan untuk Anak TNI/Polri, Permintaan Bantuan untuk Peternak Ayam Telur) HC, GCG, & RM (Saving Book Assistance for TNI/Polri Children, Request for Assistance for Chicken Egg Farmers)

Di tahun 2021, Komite PSDM juga telah menyusun program kerja tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program transformasi SDM
2. Penyiapan kebijakan Human Capital Alignment Pupuk Indonesia Grup
3. Pembahasan program-program SDM lainnya dalam mendukung transformasi bisnis perusahaan

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) mempunyai peranan penting dalam memperlancar hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pihak eksternal atau *stakeholders*. Keberadaan Sekretaris Perusahaan juga diharapkan terlaksananya pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam membantu Direksi, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama sebagai Pejabat Penghubung, implementasi GCG, komunikasi korporat, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat. Melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan publik, Sekretaris Perusahaan turut menjaga citra Perusahaan dan mewakili Direksi dalam setiap kegiatan komunikasi eksternal, khususnya dengan pihak regulator, investor, dan para Pemangku Kepentingan lainnya.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Sesuai Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, Perusahaan wajib melaporkan pergantian atau pemberhentian dan pengangkatan pejabat Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Tedy Nawardin berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/055/2021 tentang Penunjukkan Pejabat di Lingkungan PTPI.

In 2021, the HC Committee also prepared the following work program for 2022:

1. Implementation of HC transformation program
2. Preparation of Pupuk Indonesia Group's HC Alignment policy
3. Discussions on other HC programs to support the Company's business transformation

Corporate Secretary

The Corporate Secretary plays an important role in facilitating the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors and is the liaison party that bridges the interests between the Company and external parties or stakeholders. The Corporate Secretary also fulfills the provisions of the applicable laws and regulations.

In assisting the Board of Directors, the Corporate Secretary has the main function as Liaison Officer, GCG implementation, corporate communication, and administration of policy documents and minutes of meetings. Through the various activities that are related to the public, the Corporate Secretary helps maintain the image of the Company and represents the Board of Directors in every external communication activity, especially with regulators, investors, and other Stakeholders.

The requirements and procedures for the appointment of the Corporate Secretary refer to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011, and Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Party Appointing and Dismissing the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed through a Board of Directors Decision based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

Pursuant to OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014, the Company is required to report any dismissal and appointment of the Corporate Secretary to OJK and the Indonesia Stock Exchange.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary is Tedy Nawardin based on the Board of Directors Decree No: SK/DIR/055/2021 concerning the Appointment of Officials within PTPI.

Tedy Nawardin

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Warga Negara Nationality	: Indonesia Indonesian
Usia Age	: 54 tahun 54 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place and Date of Birth	: Bandung, 25 Februari 1967 Bandung, February 25, 1967
Domisili Domicile	: Bontang-Kalimantan Timur Bontang-East Kalimantan
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: SK/DIR/055/2021
Periode Jabatan Term of Office	: Menjabat terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 Serving effectively since May , 2021
Pendidikan Education	: <ul style="list-style-type: none"> • Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (2005); • Sarjana Ilmu Jurnalistik Universitas Padjajaran (1991). • Master's Degree in Communication from Universitas Indonesia (2005) • Bachelor's Degree in Journalistic from Universitas Padjajaran (1991)
Pengalaman Kerja Work Experience	: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Kaltim Daya Mandiri (April 2016-Mei 2021); • Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kaltim (April 2014-April 2016); • General Manager Umum PT Pupuk Kaltim (Maret 2012-Desember 2014). • President Director of PT Kaltim Daya Mandiri (April 2016-May 2021) • Corporate Secretary of PT Pupuk Kaltim (April 2014-April 2016) • General Manager of PT Pupuk Kaltim (March 2012-December 2014)

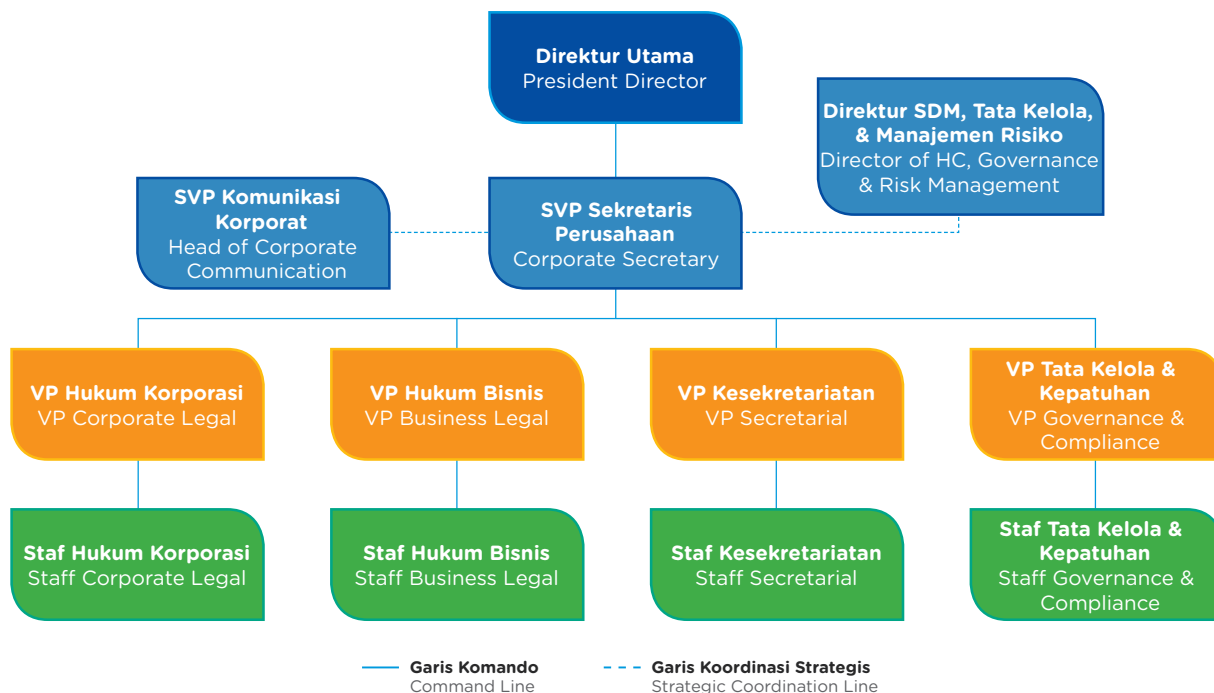
Organisasi Sekretaris Perusahaan

Cakupan fungsi Sekretaris Perusahaan dan koordinasi di antara organ digambarkan dalam struktur organisasi di bawah ini.

Corporate Secretary Organization

The Corporate Secretary's scope and functions include coordination among the organizational structure described below.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan Per 31 Desember 2021
Corporate Secretary Organization Structure Per December, 31 2021



Secara struktural, Sekretaris Perusahaan berada satu tingkat di bawah Direksi yang membawahi VP Hukum Korporasi, VP Hukum Bisnis, VP Kesekretariatan serta VP Tata Kelola & Kepatuhan. Sekretaris Perusahaan diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan hubungan yang baik antara Perusahaan sebagai emiten dengan regulator dan lembaga-lembaga penunjang pasar modal, kalangan investor, masyarakat luas dan Pemangku Kepentingan pada umumnya, dan sebagai pengelola informasi yang terkait dengan lingkungan bisnis Perusahaan.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi SK/DIR/004/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Struktur Organisasi PTPI, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 23 orang.

Structurally, the Corporate Secretary is one level below the Board of Directors and supervises the VP of Corporate Law, VP of Business Law, VP of Secretariat, as well as VP of Governance and Compliance. The Corporate Secretary is expected to be able to assist the Board of Directors in managing good relationships between the Company, as an issuer, with regulators and capital market supporting institutions, investors, the wider community and other Stakeholders, and in managing information related to the Company's business.

The organizational structure of the Corporate Secretary is determined according to the Decree of the Board of Directors SK/DIR/004/2021 dated 7 January 2021 on the Organizational Structure of PTPI, the number of employees who are members of the Corporate Secretary unit is 23 people.

Fungsi Function	Jumlah Number
Hukum Bisnis Business Legal	4
Hukum Korporasi Corporate Legal	3
Kesekretariatan Secretarial	12
Tata Kelola dan Kepatuhan Governance and Compliance	4
Jumlah Total	23

Fungsi dan Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi SK/DIR/080/2019 tanggal 20 Desember 2019, fungsi dan tugas pokok Sekretaris Perusahaan PTPI, yaitu:

1. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
2. Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas bidang hukum secara korporat, serta kearsipan dokumen hukum korporat;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan kaitannya dengan penyiapan administrasi/dokumentasi penyelenggaraan RUPS, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat Direksi Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan penyiapan administrasi/dokumen penyelenggaraan RUPS Anggota *Holding*;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dalam kaitannya dengan *investor relations* dan *corporate communications*, meliputi persiapan Laporan Tahunan Perusahaan, Corporate Identity, *website* termasuk SI-Portal BUMN Pupuk, *media relations*, *sponsorship donations*, dan lain-lain;
5. Mengoordinasikan kegiatan Sekretaris Perusahaan Anggota *Holding* dalam rangka pelaksanaan kegiatan sinergi & harmonisasi *Holding*;

Main Functions and Duties of the Corporate Secretary

Based on the Board of Directors Decree SK/ DIR/080/2019 dated December 20, 2019, the following are the main functions and duties of the Corporate Secretary of PTPI:

1. The Corporate Secretary reports directly to the President Director;
2. Coordinates and carries out corporate legal tasks, as well as archiving of corporate legal documents;
3. Coordinates the implementation of tasks and the relations with preparing, administering, and documenting the implementation of the GMS, Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, Board of Directors meetings in accordance with the Articles of Association, and preparing, administering, and documenting the GMS of Holding Members;
4. Coordinates all tasks related to investor relations and corporate communications, including preparing the Company's Annual Report, Corporate Identity, websites, including the BUMN Pupuk SI-Portal, media relations, sponsorship donations, and others;
5. Coordinates the activities of Corporate Secretaries of Holding Members in the context of implementing synergy & harmonization of Holding activities;

6. Mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian untuk mengantisipasi kemungkinan risiko dan peristiwa (*events*) antara lain *Legal Risk*, *Operational Risk*, dan *Financial Risk* yang potensial dapat terjadi di Korporasi *Holding* dan Anggota *Holding*;
7. Mengoordinasikan pengendalian potensi risiko terhadap penyaluran dana (bantuan, investasi, dsb.) yang dilakukan unit-unit kerja; kemungkinan/potensi/indikasi penyimpangan yang akan timbul pada unit-unit kerja dan efektivitas program-program efisiensi Korporasi *Holding* dan Anggota *Holding*.

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Kompetensi

No	Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (Orang)* Participants (Person)*
1	Exclusive Workshop Strategic KMap Development Periode 1 Exclusive Workshop Strategic KMap Development Period 1	PTPI	18 Januari 2021 January 18, 2021	2
2	Training Coaching for LDP 2020 "Powerful Coaching Skill untuk penyusunan Breakthrough Project LDP 2020/2021" Coaching Training for LDP 2020 "Powerful Coaching Skills for preparing the 2020/2021 LDP Breakthrough Project"	PTPI	22 Januari 2021 January 22, 2021	1
3	Pelatihan & Sertifikasi QRMA QRMA Training & Certification	PT Cipta Raya Mekar Sahitya	12 - 14 April 2021 April 12 - 14, 2021	1
4	Pelatihan dan Sertifikasi CGP Tahun 2021 CGP 2021 Training and Certification	LSP MKS	26 - 29 April 2021 April 26 - 29, 2021	1
5	Workshop Culture Fertilizer On Boarding PTPI	ACT	10 - 11 Mei 2021 May 10 - 11 2021	3
6	Living the Grand Why PTPI	ACT	21 Mei 2021 May 21, 2021	3
7	Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat Community Complaint Handling Training	PTPI	7 - 10 Juni 2021 June 7 - 10, 2021	1
8	Workshop Anger Management PTPI PTPI Anger Management Workshop	PTPI	9 Juli 2021 July 9, 2021	3
9	Pelatihan Induksi Karyawan PTPI PTPI Employee Induction Training	PTPI	7 September 2021 September 7, 2021	1

Competency Development Program

The Company engages personnel of Corporate Secretary in competency development activities, to support the implementation of the Corporate Secretary's duties. The list of training and competency improvement activities that the Corporate Secretary participated in during 2020 can be viewed in the Company Profile chapter in this annual report.

In addition, the following are competency development programs attended by the Corporate Secretary personnel during 2021:

Competency Development Programs

No	Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (Orang)* Participants (Person)*
10	Pelatihan <i>Soft Skill</i> untuk Sekretaris Soft Skill Training for Secretaries	Solusi Manajemen Terintegrasi	22 - 24 September 2021 September 22 - 24, 2021	1
11	Webinar Quality Excellent Activity (QEA)	WKM	23 September 2021 September 23, 2021	1
12	Kelas Bersama Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute PT Pupuk Indonesia Class with PT Pupuk Indonesia Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute	PTPI	4 November 2021 November 4, 2021	1
13	Skema Sekretaris/Administrasi Perkantoran BNSP	PT Magnet Solusi Integra	6 - 13 November 2021 November 6 - 13, 2021	1
14	Training Key Risk Indicator (KRI) Risk Officer PTPI	PT Centria Integrity Advisory	24 November 2021 November 24, 2021	2
15	Pelatihan Transformasi Industri 4.0 PI Grup	INDI	30 November 2021 - 2 Desember 2021 November 30, 2021 - December 2, 2021	1
16	<i>Workshop</i> Penyusunan Business Plan Pi Grup BOD - 2 Batch 1	PTPI	16 - 20 Desember 2021 December 16 - 20, 2021	3

* Peserta diluar Unit Tata Kelola dan Kepatuhan | Participants other than the Governance and Compliance Unit

Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, realisasi program kerja di Kompartemen Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

Implementation of Duties in 2021

Throughout 2021, the Corporate Secretary has carried out their duties and responsibilities through several programs with details as follows:

No.	Sasaran Strategis Strategic Goals	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Realization
1.	Memastikan administrasi perkantoran/kesekretariatan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Perusahaan berjalan dengan baik Ensuring that office/secretary administration and archive management within the Company run well	<p>Pengembangan aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan Application development to support the Secretarial activities</p> <hr/> <p>Pengelolaan arsip/dokumen perusahaan Management of Company archives/documents</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Sistem Informasi/Aplikasi <i>Digital Office</i> ("DOF") di seluruh Anak Perusahaan • Persiapan dan Penyusunan Rencana Pengembangan DOF • Pelaksanaan Rapat Kelompok Kerja ("Pokja") Stakeholders Relation Bidang Kesekretariatan PI Grup dan <i>Benchmark ke Corporate Document Management PT KAI</i> • Implementation of Information Systems/Digital Office Applications ("DOF") in all Subsidiaries • Preparation and Compilation the DOF Development Plan • Implementation of the Working Group Meeting ("Pokja") of Stakeholders Relation for the Secretariat of the PI Group and Benchmarks to PT KAI's Corporate Document Management <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan arsip dinamis vital dan aktif • Pengelolaan arsip vital yang dilakukan oleh Dep. Kesekretariatan bersama dengan Dep. Hukum Bisnis (Kompartemen Sekretaris Perusahaan) berupa arsip dokumentasi RUPS PI Grup, yaitu Risalah RUPS, Keputusan Pemegang Saham, dan/atau Akta Notaris terkait. • Pemeliharaan arsip aktif Perusahaan yang terbit di tahun 2020 s.d. Triwulan III/2021. • Pemindahan arsip inaktif • Pengelolaan arsip dinamis inaktif • Revisi atas Dokumen Sistem Manajemen (DSM) Pengelolaan Arsip: <ul style="list-style-type: none"> » Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan dan Prosedur Tata Naskah Dinas ("TND") » Prosedur Penggunaan & Pemeliharaan Arsip serta Prosedur Penyusutan Arsip » Sosialisasi Pengelolaan Arsip (Prosedur TND dan Surat Keputusan Direksi: Tanggung Jawab Penandatanganan & Pemasang Dokumen (SK/DIR/048/2021)) » Instruksi Kerja (IK) Penerimaan dan Pengiriman Dokumen/Barang » Survei arsip di lingkungan PI » Pengadaan Jasa Pengelolaan Arsip • Management of vital and active dynamic archives • Management of vital archives carried out by the Dep. Secretariat together with Dep. Business Law (Corporate Secretary Compartment) in the form of archives of the PI Group GMS, namely the Minutes of the GMS, Shareholders' Decisions, and/or related Notary Deeds. • Maintenance of the Company's active archives published in 2020 until Quarter III/2021. • Inactive archive transfer • Inactive dynamic archive management • Revision of Records Management System Document (DSM): <ul style="list-style-type: none"> » Guidelines for Organizing Archives and Procedures for Administration of Official Manuscripts ("TND") » Archives Use & Maintenance Procedures and Archive Depreciation Procedures » Dissemination of Archive Management (TND Procedures and Board of Directors Decree: Responsibilities of Signatories & Documents Initials (SK/DIR/048/2021)) » Work Instructions (IK) for Receiving and Sending Documents/Goods » Archive survey in PI. » Procurement of Archives Management Services

No.	Sasaran Strategis Strategic Goals	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Realization
			<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dalam <i>Webinar</i> Pemberdayaan Peran Unit Kearsipan di Lingkungan BUMN dan Bimtek Pengelolaan Arsip Aset & Arsip Terjaga (oleh ANRI). Penyelenggaraan Klinik Kesekretariatan Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kearsipan di lingkungan PI Grup Participation in Webinars on Empowering the Role of Archives Unit in BUMN and Technical Guidance for Asset Archive Management & Archives Maintained (by ANRI). Administration of the Secretariat Clinic. Implementation of Archives Development activities within the PI Group
2.	Terciptanya fungsi koordinasi dan sinergitas dalam penanganan permasalahan hukum yang bersifat strategis di lingkungan PI Grup Creation of a function for coordination and synergy in handling legal issues that are strategic in the PI Group	<p>Menerbitkan Pedoman Sentralisasi Penanganan Permasalahan Hukum di Anak Perusahaan PTPI Issuing Guidelines for Centralizing the Handling of Legal Issues in Subsidiaries of PTPI</p> <p>Implementasi Sentralisasi Penanganan Permasalahan Hukum di Anak Perusahaan PTPI Implementation of Centralized Handling of Legal Issues in Subsidiaries of PTPI</p>	<p>Pedoman Sentralisasi Penanganan Permasalahan Hukum (PI-SEK-PD-005) telah diterbitkan Guidelines for the Centralization of Legal Issues Handling (PI-SEK-PD-005) have been issued.</p> <p>Sentralisasi penanganan permasalahan hukum strategis telah dijalankan per Februari 2021 Centralization of the strategic legal issues handling was carried out as of February 2021.</p>
3.	Inventarisasi risiko hukum yang bersifat strategis dalam proses bisnis di PI Grup Inventory of strategic legal risks in business processes at PI Group	<p>Seluruh perusahaan di PI Grup wajib menyampaikan 10 (sepuluh) risiko hukum terbesar beserta mitigasi risikonya Regularly updating legal disputes and disputes between SOEs and reporting to Shareholders</p> <p>Melakukan updating permasalahan sengketa hukum dan permasalahan sengketa antar BUMN secara berkala serta melaporkan kepada Pemegang Saham Melakukan updating permasalahan sengketa hukum dan permasalahan sengketa antar BUMN secara berkala serta melaporkan kepada Pemegang Saham</p>	<p>Seluruh Perusahaan di PI Grup telah menyampaikan 10 (sepuluh) risiko hukum terbesar beserta mitigasi risikonya Regularly updating legal disputes and disputes between SOEs and reporting to Shareholders</p> <p>Seluruh Anak Perusahaan telah melaporkan secara berkala ke PI terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi All Subsidiaries have reported regularly to PI on legal issues faced.</p>
4.	Terbangunnya Kapabilitas Organisasi dan SDM Manajemen Kepatuhan Development of Compliance Management Organizational and HC Capability	Membangun aplikasi Sistem Manajemen Kepatuhan <i>e-Integrity Pact</i> dan WBS terintegrasi Building an integrated e-Integrity Pact and WBS Compliance Management System application	Sampai dengan Triwulan IV/2021 progres pembangunan aplikasi Sistem Manajemen Kepatuhan <i>e-Integrity Pact</i> dan WBS terintegrasi Up to Quarter IV/2021 the e development of the integrated e-Integrity Pact and WBS Compliance Management System application is in progress.

Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan

Sejak tahun 2020, pelaksanaan fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di Perusahaan berada di bawah Departemen Tata Kelola & Kepatuhan yang dipimpin oleh *Vice President* (VP) dan berada di bawah Kompartemen Tata Kelola Korporat serta berada di bawah koordinasi Direktur SDM & Tata Kelola, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Direksi No. SK/DIR/062/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/080/2019 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/006/2019.

Berdasarkan kebutuhan dan perkembangan organisasi untuk mendukung pelaksanaan transformasi bisnis Perusahaan, maka pada awal tahun 2021 terdapat perubahan fungsi pelaksana Tata Kelola dan Kepatuhan di Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/004/2001 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/065/2020 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/062/2020. Perubahan tersebut yaitu pelaksana fungsi Tata Kelola & Kepatuhan berada Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan yang dipimpin oleh seorang *Vice President* (VP) dan berada di bawah Kompartemen Sekretaris Perusahaan serta berada di bawah koordinasi Direktur SDM & Tata Kelola.

Organisasi Departemen Tata Kelola & Kepatuhan

VP Tata Kelola dan Kepatuhan dijabat oleh Agus Purnomo berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/010/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan PTPI.

Governance and Compliance Function

In 2020 the implementation of the Governance and Compliance function in the Company is under the Governance & Compliance Department led by a Vice President (VP) and is under the Corporate Governance Compartment and is under the coordination of the HR & Governance Director, in accordance with the Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/062/2020 dated September 7, 2020 on Refinement to the Board of Directors Decree No. SK/DIR/080/2019 on Refinement of the Board of Directors Decree No. SK/DIR/006/2019.

Based on the needs and development of the organization to support the implementation of the Company's business transformation, in early 2021 there was a change in the function of implementing Governance and Compliance in the Company in accordance with the Board of Directors Decree No. SK/DIR/004/2001 dated January 7, 2021 on Refinement of the Board of Directors Decree No. SK/DIR/065/2020 on Refinement to the Board of Directors Decree No. SK/DIR/062/2020. The change is that the implementation of the Governance & Compliance function is in the Governance and Compliance Department led by a Vice President (VP) under the Corporate Secretary Compartment and under the coordination of the Director of HC & Governance.

Organization of the Governance & Compliance Department

VP Governance and Compliance is Agus Purnomo, based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/010/2019 dated February 13, 2019 regarding the Appointment of Officials within PTPI.

Agus Purnomo

VP Tata Kelola & Kepatuhan VP Governance and Compliance

Warga Negara Nationality	: Indonesia Indonesian
Usia Age	: 46 tahun 46 Years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place and Date of Birth	: Magelang, 12 Agustus 1976 Magelang, August 12, 1976
Domisili Domicile	: Depok, Jawa Barat Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/010/2019 tanggal 13 Februari 2019 Board of Directors Decree No. SK/DIR/010/2019 dated February 13, 2019
Periode Jabatan Term of Office	: Menjabat terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 Served since February 1, 2019
Pendidikan Education	: <ul style="list-style-type: none"> • Diploma 3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997); • Diploma 4 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2004); • Magister Akuntansi Forensik, Universitas Diponegoro (2012). • Diploma 3 in Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997) • Diploma 4 in Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2004) • Master's Degree in Forensic Accounting, Universitas Diponegoro (2012)

Agus Purnomo

VP Tata Kelola & Kepatuhan VP Governance and Compliance

Sertifikasi Certification	<ul style="list-style-type: none"> Chartered Accountant (CA) No.11.D37503, Ikatan Akuntan Indonesia (7 Januari 2014-sekarang); Akuntan No.Reg. D-37.503/No.RNA 17581, Kementerian Keuangan RI, (22 April 2014-sekarang); Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) No.ERMAP-1120532, Enterprise Risk Management Academy (ERMA) (10 Desember 2015-10 Desember 2021); Qualified Internal Auditor (QIA) No.5175/QIA/2018, Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS QIA), (2 Oktober 2018- 31 Desember 2021); Certified Governance Professional (CGP) No.Reg. TKP.628.000684 2019, Lembaga Sertifikasi Profesi - Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) (22 Juli 2019-22 Juli 2022). Chartered Accountant (CA) No.11.D37503, Institute of Chartered Accountants Indonesia (7 January 2014-present) Accountant Reg No. D-37.503/No.RNA 17581, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, (22 April 2014-present) Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) No. ERMAP-1120532, Enterprise Risk Management Academy (ERMA) (December 10, 2015- December 10, 2021) Qualified Internal Auditor (QIA) No.5175/QIA/2018, Certification Board of Qualified Internal Auditor (DS QIA), (October 2, 2018- December 31, 2021) Certified Governance Professional (CGP) Reg No. TKP.628.000684 2019, Professional Certification Institution- Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) (July 22, 2019- July 22, 2022)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1 Januari 1998-30 Juni 2014); Staf Audit Keuangan, PTPI (1 Juli 2014- 31 Januari 2019). Auditor, Financial and Development Supervisory Agency (January 1, 1998 to June 30, 2014) Financial Audit Staff, PTPI (July 1, 2014- January 31, 2019)

Jumlah Karyawan

Hingga akhir tahun 2021, jumlah karyawan yang tergabung dalam Departemen Tata Kelola & Kepatuhan sebanyak 4 (empat) orang.

Number of Personnel

As of to the end of 2021, there were 4 (four) people employed as members of the Governance & Compliance Department.

Fungsi Function	Jumlah Number
VP Tata Kelola & Kepatuhan VP Governance & Compliance	1
Staf Tata Kelola & Kepatuhan Staff Governance & Compliance	3
Jumlah Total	4 orang 4 people

Tugas Pokok dan Fungsi

Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan memiliki tugas pokok meliputi:

- Merumuskan kebijakan dan program kerja bidang Tata Kelola dan Kepatuhan Perusahaan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang tata kelola dan kepatuhan, yaitu:
 - Implementasi peraturan dan kebijakan yang terkait *Good Corporate Governance* (GCG) di PI Grup;
 - Peningkatan kompetensi asesor GCG di PI Grup;
 - Pengukuran implementasi GCG di PI Grup;
 - Perbaikan atas *Area of Improvement* (AoI) hasil asesmen GCG untuk mendorong peningkatan pelaksanaan GCG;
 - Pengendalian Gratifikasi di PI Grup;
 - Peningkatan Kepatuhan LHKPN di PI Grup;
 - Pengembangan *Whistleblowing System* (WBS) di PI Grup;

Main Duties and Functions

The Governance and Compliance Department has the following main tasks:

- Formulate policies and work programs in the field of Corporate Governance and Compliance;
- Carry out and coordinate activities in the areas of governance and compliance, namely:
 - Implementation of regulations and policies related to Good Corporate Governance (GCG) PI Group;
 - Improving the competence of GCG assessors in PI Group;
 - Measurement of GCG implementation in PI Group;
 - Improvements to the Area of Improvement (AoI) as a result of GCG assessment to encourage their improvement of GCG implementation;
 - Gratification Control in PI Group;
 - Enhancing LHKPN Compliance in PI Group;
 - Development of the Whistle Blowing System (WBS) in PI Group;

- h. Pengendalian *fraud* di PI Group;
 - i. Sosialisasi bidang tata kelola dan kepatuhan di Perusahaan guna meningkatkan pemahaman insan perusahaan.
3. Mengevaluasi kebijakan, program kerja, dan kegiatan bidang tata kelola dan kepatuhan di PI Group.

- h. Fraud control in PI Group;
 - i. Socialization in the field of governance and compliance in the Company in order to improve the understanding of company personnel.
3. Evaluating policies, work programs and activities in the field of governance and compliance in PI Group.

Program Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2021, program pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh karyawan Departemen Tata Kelola & Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Competency Development Program

Throughout 2021, the competency development programs followed by the employees of the Governance & Compliance Department were as follows:

Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (Orang)* Participants (Person)*
Internalisasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 di Lingkungan PI Grup tanggal 19 Januari 2021 yang bekerja sama dengan KPK RI. Internalization of KPK Regulation Number 2 of 2020 within the PI Group on January 19, 2021 in collaboration with the Indonesian KPK.	KPK RI	19 Januari 2021 January 19, 2021	2
<i>Webinar</i> Memperkuat Pengawasan Internal Organisasi Melalui Penerapan ISO 37002 <i>Whistleblowing Management System</i> tanggal 27 Februari 2021 yang diselenggarakan oleh Visi Integritas Webinar Strengthening Organizational Internal Supervision through Implementation of ISO 37002 Whistleblowing Management System on February 27, 2021 organized by Visi Integritas	Visi Integritas	27 Februari 2021 February 27, 2021	2
<i>Sharing Session</i> Hasil Evaluasi Penerapan GCG PI Grup Tahun 2020 pada tanggal 3 Maret 2021. Sharing Session on Evaluation Results of the Implementation of GCG PI Group in 2020 on March 3, 2021.	PTPI	3 Maret 2021 March 3, 2021	2
<i>Webinar</i> Nasional GCG <i>Implementation</i> tanggal 24 Maret 2021 yang diselenggarakan oleh Mutu Institute. GCG Implementation National Webinar on March 24, 2021, organized by the Mutu Institute.	Mutu Institute	24 Maret 2021 March 24, 2021	1
UPG <i>Development Program</i> Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 5 s.d. 7 April 2021. UPG Development Program 2021 organized by the Indonesian Corruption Eradication Commission on April 5 - 7, 2021.	PTPI	5 s.d. 7 April 2021 April 5 to 7, 2021	1
<i>Workshop e-Registration</i> Pengelola LHKPN yang diselenggarakan oleh KPK RI pada 15 April 2021. LHKPN Manager e-Registration Workshop organized by the Indonesian KPK on April 15, 2021.	KPK RI	15 April 2021 April 15, 2021	1
<i>Webinar</i> Nasional Mewujudkan Dunia Usaha Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 April 2021. National Webinar Realizing a Business World Without Corruption organized by the Indonesian Corruption Eradication Commission on April 28, 2021.	KPK RI	28 April 2021 April 28, 2021	2
Sertifikasi <i>Certified Governance Professional (CGP)</i> tanggal 26-29 April 2021. Certified Governance Professional (CGP) certification on April 26-29, 2021.	PTPI	26-29 April 2021 April 26-29, 2021	1
Gratifikasi <i>Talk</i> EPS 02 Antara Tradisi dan Akar Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 Mei 2021. Gratification Talk EPS 02 Between Tradition and the Roots of Corruption organized by the Indonesian KPK on May 28, 2021.	KPK RI	28 Mei 2021 May 28, 2021	1
<i>Webinar</i> Nasional Implementasi <i>Forensic Accounting</i> dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 2021. National Webinar on Forensic Accounting Implementation for Detecting Fraud organized by the Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia on June 5, 2021.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	5 Juni 2021 June 5, 2021	1
<i>Webinar</i> Peluit Integritas yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 7-10 Juni 2021. Whistleblower Integrity Webinar organized by the Indonesian KPK on June 7-10, 2021.	KPK RI	7-10 Juni 2021 June 7-10, 2021	1
<i>Interpretation Training</i> on <i>Baldrige Excellence Framework</i> 2021-2022 pada tanggal 9-11 Juni 2021. Interpretation Training on Baldrige Excellence Framework 2021-2022 on June 9-11, 2021.	PTPI	9-11 Juni 2021 June 9-11, 2021	1

Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (Orang)* Participants (Person)*
<i>Webinar</i> Uji Coba Aplikasi Pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL 2.0) yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 22 Juni 2021. Webinar Trial of Online Gratification Reporting Application (GOL 2.0) organized by the Indonesian KPK on June 22, 2021.	KPK RI	22 Juni 2021 June 22, 2021	1
<i>Webinar</i> Implementasi SNI 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional pada tanggal 23 Juni 2021. Webinar Implementation of SNI 37301:2021 Compliance Management System organized by the National Standardization Body on June 23, 2021.	Badan Standarisasi Nasional	23 Juni 2021 June 23, 2021	2
Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Anti Fraud Manager</i> (CAFM) yang diselenggarakan oleh Asia Anti <i>Fraud</i> pada tanggal 21-23 Juni 2021. Certified Anti Fraud Manager (CAFM) training and certification organized by Asia Anti Fraud on June 21-23, 2021.	Asia Anti <i>Fraud</i>	21-23 Juni 2021 June 21-23, 2021	1
Belajar Anti <i>Fraud</i> " <i>Prevention with the Implementation of Anti Bribery Management System</i> " yang diselenggarakan oleh ACFE Indonesia Chapter pada tanggal 3 Juli 2021. Learn about Anti Fraud " <i>Prevention with the Implementation of Anti Bribery Management System</i> " organized by ACFE Indonesia Chapter on July 3, 2021.	ACFE Indonesia Chapter	3 Juli 2021 July 3, 2021	1
<i>Webinar</i> " <i>Ethic in Business: Big Challenge</i> " " <i>Reinforcing Ethical Business and Integrity Practices</i> " yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada tanggal 7-8 Juli 2021. Webinar " <i>Ethic in Business: Big Challenge</i> " " <i>Reinforcing Ethical Business and Integrity Practices</i> " organized by PPM Manajemen on July 7-8, 2021.	PPM Manajemen	7-8 Juli 2021 July 7-8, 2021	1
<i>International Webinar</i> : " <i>Cyber Risk Management: Stop Cyber Attacks Before They Stop You</i> " yang diselenggarakan oleh IRMAPA pada tanggal 15 Juli 2021. International Webinar: " <i>Cyber Risk Management: Stop Cyber Attacks Before They Stop You</i> " hosted by IRMAPA on July 15, 2021.	IRMAPA	15 Juli 2021 July 15, 2021	1
Gratifikasi <i>Talk</i> EPS04 Bangun Kompetensi dengan Sertifikasi Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 Juli 2021. Gratification Talk EPS04 Build Competence with Anti-Corruption Certification organized by the Indonesian KPK on July 28, 2021.	KPK RI	28 Juli 2021 July 28, 2021	1
<i>E-Learning</i> Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan oleh ACLC KPK RI pada tanggal 29 Juli 2021. Anti-Corruption and Integrity Basic Knowledge E-Learning organized by ACLC KPK RI on July 29, 2021.	ACLC KPK RI	29 Juli 2021 July 29, 2021	1
Belajar Anti <i>Fraud</i> " <i>Fraud Risk Assessment</i> " yang diselenggarakan oleh ACFE Indonesia Chapter pada tanggal 31 Juli 2021. Anti-Fraud Study " <i>Fraud Risk Assessment</i> " organized by ACFE Indonesia Chapter on July 31, 2021.	ACFE Indonesia Chapter	31 Juli 2021 July 31, 2021	1
Seminar GRC <i>Summit</i> 2021 pada tanggal 26 Agustus 2021. GRC Summit 2021 seminar on August 26, 2021.	PTPI	26 Agustus 2021 August 26, 2021	1
<i>Webinar</i> Penerapan ISO 37002:2021 <i>Whistleblowing Management System</i> yang diselenggarakan oleh Indonesia ISO Expert <i>Association</i> pada tanggal 4 September 2021. Webinar on the Implementation of ISO 37002:2021 Whistleblowing Management System organized by the Indonesia ISO Expert Association on September 4, 2021.	Indonesia ISO Expert <i>Association</i>	4 September 2021 September 4, 2021	2
<i>Webinar</i> LHKPN: "Apa Susahnya Laporkan LHKPN Tepat Waktu dan Akurat?" yang dilaksanakan oleh KPK RI pada tanggal 7 September 2021. LHKPN Webinar: "What's Difficult to Report LHKPN on Time and Accurately?" carried out by the Indonesian Corruption Eradication Commission on September 7, 2021.	KPK RI	7 September 2021 September 7, 2021	1
<i>Workshop</i> Anti Korupsi "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang diselenggarakan oleh BPK RI pada tanggal 14 September 2021. Anti-Corruption Workshop "Corruption Detection and Prevention" organized by BPK RI on September 14, 2021.	BPK RI	14 September 2021 September 14, 2021	1
RISKHub <i>International Webinar</i> " <i>Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage</i> " yang diselenggarakan Bersama oleh Marsh, IRMAPA, dan ERMA pada tanggal 27 September 2021. RISKHub <i>International Webinar</i> " <i>Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage</i> " jointly organized by Marsh, IRMAPA, and ERMA on September 27, 2021.	Marsh, IRMAPA, dan ERMA	27 September 2021 September 27, 2021	1

Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (Orang)* Participants (Person)*
Gratifikasi <i>Talk</i> EPS06 Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 September 2021. Gratification Talk EPS06 Identification of Gratification Prone Points organized by the Indonesian KPK on September 28, 2021.	KPK RI	28 September 2021 September 28, 2021	1
Internalisasi Budaya Antikorupsi di lingkungan PI Grup dengan Tema "Implementasi WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi KPK RI dan PTPI" tanggal 30 September 2021. Internalization of Anti-corruption Culture within the PI Group with the theme "Implementation of the Integrated Corruption Crime WBS of RI KPK and PTPI" on September 30, 2021.	KPK RI	30 September 2021 September 30, 2021	2
<i>E-learning</i> Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi tanggal 7 Juli-30 September 2021 yang telah diikuti oleh 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang Insan Perusahaan. E-learning Technical Guidance for Gratification Control on July 7, - September 30, 2021 attended by 197 (one hundred and ninety seven) Company Personnel.	PTPI	7 Juli-30 September 2021 July 7 - September 30, 2021	1
Pelatihan <i>Awareness</i> Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600:2016 untuk Personil Bidang Tata Kelola & Kepatuhan PI Grup telah dilakukan pada tanggal 19-22 Oktober 2021. The SNI ISO 19600:2016 Compliance Management System Awareness Training for Personnel in the Governance & Compliance Division in the PI Group was held on October 19-22, 2021.	PTPI	19-22 Oktober 2021 October 19-22, 2021	2
<i>Training of Trainer Whistleblowing System Online</i> untuk pengelola WBS dari PIM, PKG, ME, PILOG, PIU, dan PIP telah dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021. Training of Trainer Whistleblowing System Online for WBS managers from PIM, PKG, ME, PILOG, PIU, and PIP has been conducted on October 29, 2021.	PTPI	29 Oktober 2021 October 29, 2021	2
Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas untuk Personil Bidang Tata Kelola & Kepatuhan PI Grup telah dilakukan pada tanggal 16-18 November 2021 yang dikoordinasikan oleh ACLC KPK. Certification of Integrity Builder Experts for Personnel in the Governance and Compliance Division of the PI Group was carried out on November 16-18, 2021, and coordinated by ACLC KPK.	ACLC KPK	16-18 November 2021 November 16-18, 2021	2
Internalisasi Budaya Anti Korupsi di lingkungan PI Grup dengan Tema "Optimalisasi <i>Whistleblowing System</i> dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Tindak Pidana Korporasi, untuk Mewujudkan BUMN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi", pada tanggal 10 Desember 2021 sebagai salah satu peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2021 Internalization of Anti-Corruption Culture within the PI Group with the theme "Optimizing the Whistleblowing System in Efforts to Prevent Corruption and Corporate Crime, to Realize a Clean and Corruption-Free BUMN", on December 10, 2021 as one of the commemorations of World Anti-Corruption Day 2021	PTPI	10 Desember 2021 December 10, 2021	2
Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi <i>Whistleblowing System</i> TPK Terintegrasi PI dan KPK dilakukan melalui pelaksanaan <i>training i-webs</i> pada tanggal 14 Desember 2021. Technical Guidance on the Use of the Integrated PI and KPK TPK Whistleblowing System Application carried out through the implementation of i-webs training on December 14, 2021.	PTPI	14 Desember 2021 December 14, 2021	1
<i>Training of Trainer Admin</i> Pengelola LHKPN PI Grup telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021 Training of Trainer Admin Manager of LHKPN PI Group has been held on December 21, 2021	PTPI	21 Desember 2021 December 21, 2021	

Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, realisasi program kerja di Departemen Tata Kelola & Kepatuhan sebagai berikut:

Implementation of Duties in 2021

For 2021, the realization of the Governance & Compliance Department work programs was as follows:

No.	Program Program	Kegiatan Activity
1	Penyusunan atau pemutakhiran: Pedoman <i>Governance-Risk Management-Compliance</i> (GRC) 4.0 terintegrasi dan Pedoman Utama GCG Compilation or updating: Integrated Governance-Risk Management-Compliance (GRC) 4.0 Guidelines and GCG Main Guidelines	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Pedoman GRC dalam tahap penyusunan awal (20%). • Pemutakhiran Pedoman Utama GCG: <ul style="list-style-type: none"> » Pedoman Etika dan Perilaku/<i>Code of Conduct</i> (CoC) telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 016/KEP.KOM/XII/2021 dan Nomor: 116.1/A/KU/E42/SK/2021 tanggal 16 Desember 2021 » Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha/<i>Code of Group Governance</i> (CoGG) Nomor Dokumen: PI-SEK-PD-012 Rev. 1 Tanggal 30 Desember 2021 » Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) dalam proses pengesahan » Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Code of Corporate Governance</i>) dalam proses pengesahan. • The preparation of the GRC Guidelines is in the initial drafting stage (20%). • GCG Key Guidelines Update: <ul style="list-style-type: none"> » The Code of Conduct (CoC) has been ratified through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors Number: 016/KEP.KOM/XII/2021 and Number: 116.1/A/KU/E42/SK/2021 dated 16 December 2021 » Code of Group Governance (CoGG) Document Number: PI-SEK-PD-012 Rev. 1 December 30, 2021 » Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) in the process of ratification » Code of Corporate Governance is in the process of being ratified.
2	Identifikasi proses integrasi Pedoman Bidang Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kinerja Unggul berbasis Teknologi Informasi. Identification of the integration process of the Information Technology-based Risk Management, Compliance and Superior Performance Guidelines.	Telah dilakukan pemetaan data proses bisnis dan Pemetaan RACI Matriks terkait <i>Governance, Risk, and Compliance</i> . Business process data equalization and RACI Matrix Mapping related to Governance, Risk, and Compliance have been carried out.
3	Meningkatkan SDM Manajemen Kepatuhan PI Grup yang berkompeten melalui pelaksanaan <i>training</i> dan sertifikasi Increasing the competent HR Compliance Management of the PI Group through the implementation of training and certification	Telah dilakukan peningkatan SDM Manajemen Kepatuhan PI Grup yang berkompeten melalui pelaksanaan <i>training</i> dan sertifikasi, sebagaimana pada Tabel Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Manajemen Kepatuhan There has been an increase in the competent HR Compliance Management of the PI Group through the implementation of training and certification, as shown in the Table of Training and Certification for Compliance Management
4	Melakukan sosialisasi/ <i>workshop</i> penerapan Manajemen Kepatuhan Conducting socialization/ <i>workshop</i> on the implementation of Compliance Management	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pelatihan SNI ISO 19600:2016 untuk PI Group pada tanggal 19, 21-22 Oktober 2021. • Telah menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan yang telah mengacu pada ISO 37301, yaitu Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan (<i>Compliance Management System</i>) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-003 Rev. 0 Tanggal 30 Desember 2021, serta telah disampaikan kepada Anak Perusahaan melalui Surat Edaran Nomor: SE-03/A/KK/610/SE/2022 tanggal 26 Januari 2022 untuk dapat diratifikasi oleh Anak Perusahaan. • SNI ISO 19600:2016 training has been conducted for PI Group on 19, 21-22 October 2021. • Has determined the Compliance Management System Guidelines that have referred to ISO 37301, namely the Compliance Management System Guidelines Document Number PI-SEK-PD-003 Rev. 0 Dated December 30, 2021, and has been submitted to the Subsidiaries through Circular Letter Number: SE-03/A/KK/610/SE/2022 dated January 26, 2022 for ratification by the Subsidiaries.
5	Melakukan klinik penerapan Manajemen Kepatuhan Conducting clinical implementation of Compliance Management	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Klinikal <i>Fraud Risk Register</i> pada tanggal 7 dan 8 Juli 2021 sesuai surat Sekper pada poin-1 di atas. • Pelaksanaan Klinik Risiko pada bulan September sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja yang dikoordinasikan kepada PIC di Dep. Tata Kelola & Kepatuhan • Fraud Risk Register Clinical Activities on 7 and 8 July 2021 according to the Secretary's letter in point-1 above. • The implementation of the Risk Clinic in September is in accordance with the needs of the Work Unit which is coordinated to the PIC in the Dep. Governance & Compliance

No.	Program Program	Kegiatan Activity
6	Membangun aplikasi Sistem Manajemen Kepatuhan <i>e-Integrity Pact</i> dan WBS terintegrasi PI Grup. Developed the PI Group's integrated <i>e-Integrity Pact</i> and WBS Compliance Management System application.	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Pakta Integritas <i>Online</i> telah digunakan untuk penandatanganan pakta integritas pada tahun 2021. Telah dilakukan <i>Training of Trainer</i> pengelola WBS <i>online</i> 6 (enam) Anak Perusahaan (PKG, PIM, ME, PILOG, PIE, PIP) pada tanggal 29 Oktober 2021 Pengaturan konfigurasi DNS untuk WBS <i>Online</i> 6 (enam) Anak Perusahaan masih dalam proses pengerjaan oleh Tim TI PI The Integrity Pact Online Application has been used for signing the integrity pact in 2021 Training of Trainers for managing WBS online for 6 (six) Subsidiaries (PKG, PIM, ME, PILOG, PIE, PIP) has been carried out on October 29, 2021 DNS configuration settings for WBS Online 6 (six) Subsidiaries are still being worked on by the PI IT Team
7	Memutakhirkan aplikasi Sistem Manajemen Kepatuhan SIAP GCG Updating the GCG READY Compliance Management System application	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi SIAP GCG telah digunakan oleh PI Grup sejak tahun 2019. Terkait pengembangan dan perbaikan Aplikasi SIAP GCG, telah dilakukan permintaan pengembangan Aplikasi SIAP GCG pada akhir Desember 2021 ke Kompartemen Teknologi Informasi. The SIAP GCG application has been used by PI Group since 2019. Regarding the development and improvement of the SIAP GCG Application, a request for the development of the SIAP GCG Application has been made at the end of December 2021 to the Information Technology Compartment.
8	Mengembangkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 PI Grup untuk 4 Anak Perusahaan (ME, PILOG, PIE, PIP) Develop Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001:2016 PI Group for 4 Subsidiaries (ME, PILOG, PIE, PIP)	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan <i>Kick Off Meeting</i> Pengembangan FCS dan SMAP di 4 (empat) Anak Perusahaan (ME, Pilog, PIE, dan PIP) pada tanggal 2 Juli 2021. Pengisian kuesioner telah dilakukan oleh seluruh responden di Anak Perusahaan pada tanggal 2 sd 8 Juli 2021. <i>Workshop Fraud Risk Assessment (FRA)</i> dan <i>Self Assessment</i> Implementasi 10 (sepuluh) Atribut FCS dan Klausul SMAP telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021 yang diikuti oleh Tim Pengembangan FCS PI Group, dan Tim <i>Counterpart</i> Unit Kerja Anak Perusahaan. Pelaksanaan FRA untuk 4 (empat) Unit Kerja (Pengadaan, Keuangan, Investasi, dan Pemasaran) telah dilaksanakan pada tanggal 12 sd 19 Juli 2021 oleh masing-masing Tim Pengembangan FCS dan Tim <i>Counterpart</i> Unit Kerja Anak Perusahaan, serta telah disampaikan kepada PI pada tanggal 20 Juli 2021. Pengisian Kertas Kerja <i>Self Assessment</i> Implementasi 10 (sepuluh) Atribut FCS dan Klausul SMAP telah dilaksanakan pada tanggal 21 sd 27 Juli 2021 oleh masing-masing Tim Pengembangan FCS dan Tim <i>Counterpart</i> Unit Kerja Anak Perusahaan, serta telah disampaikan kepada PI pada tanggal 28 Juli 2021 Pelaksanaan wawancara Unit Kerja untuk Implementasi 10 (sepuluh) Atribut FCS dan SMAP serta hasil penilaian risiko <i>fraud</i> 4 Anak Perusahaan pada tanggal 16-24 Agustus 2021 mengacu pada Surat Tugas yang disampaikan oleh Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko Nomor: 14616/A/MR/E42/IT/2021 tanggal 13 Agustus 2021. Penyusunan Laporan Pengembangan FCS dan Implementasi SMAP oleh Tim FCS PI dengan menggunakan template standar pelaporan yang telah dimutakhirkan. Implementation of FCS and SMAP Development Kick Off Meetings in 4 (four) Subsidiaries (ME, Pilog, PIE, and PIP) on July 2, 2021. Filling out the questionnaire has been carried out by all respondents in the Subsidiaries on July 2 to 8, 2021. The Fraud Risk Assessment (FRA) and Self Assessment Workshop on the Implementation of 10 (ten) FCS Attributes and SMAP Clauses was held on July 9, 2021, which was attended by the FCS PI Group Development Team, and the Counterpart Team for the Subsidiary Work Units. The implementation of FRA for 4 (four) Work Units (Procurement, Finance, Investment, and Marketing) was carried out from 12 to 19 July 2021 by each FCS Development Team and Subsidiary Work Unit Counterpart Team, and was submitted to PI on 20 July 2021. The implementation of the 10 (ten) FCS Attributes and SMAP Clauses on the Implementation of Self Assessment Working Papers was carried out from 21 to 27 July 2021 by each of the FCS Development Team and the Counterpart Team of Subsidiary Work Units, and was submitted to PI on 28 July 2021 Implementation of Work Unit interviews for the Implementation of 10 (ten) FCS and SMAP Attributes as well as the results of the fraud risk assessment of 4 Subsidiaries on August 16-24 2021 referring to the Assignment Letter submitted by the Director of HR, Governance, & Risk Management Number: 14616/A /MR/E42/IT/2021 dated August 13, 2021. Preparation of FCS Development Report and SMAP Implementation by FCS PI Team using updated reporting standard templates.

No.	Program Program	Kegiatan Activity
9	Mengembangkan Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600 Developing SNI ISO 19600 Compliance Management System	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pelatihan SNI ISO 19600:2016 untuk PI Group pada tanggal 19, 21-22 Oktober 2021. Telah menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan yang telah mengacu pada ISO 37301, yaitu Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan (<i>Compliance Management System</i>) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-003 Rev. 0 Tanggal 30 Desember 2021, serta telah disampaikan kepada Anak Perusahaan melalui Surat Edaran Nomor: SE-03/A/KK/610/SE/2022 tanggal 26 Januari 2022 untuk dapat diratifikasi oleh Anak Perusahaan. SNI ISO 19600:2016 training has been conducted for PI Group on 19, 21-22 October 2021. Has determined the Compliance Management System Guidelines that have referred to ISO 37301, namely the Compliance Management System Guidelines Document Number PI-SEK-PD-003 Rev. 0 Dated December 30, 2021, and has been submitted to the Subsidiaries through Circular Letter Number: SE-03/A/KK/610/SE/2022 dated January 26, 2022 for ratification by the Subsidiaries.
10	Menyusun <i>Fraud Risk That Matters</i> (FRTM) berdasarkan proses bisnis perusahaan Develop Fraud Risk That Matters (FRTM) based on the company's business processes	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pengesahan Prosedur Pengelolaan Risiko <i>Fraud</i> Nomor Dokumen PI-SEK-PR-015 Rev.1 Tanggal 28 Desember 2021. Penyusunan FRR Awal Tahun 2021 dan <i>Monitoring</i> 2020 seluruh Unit Kerja telah selesai dikompilasi dan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen. The Fraud Risk Management Procedure has been validated Document Number PI-SEK-PR-015 Rev.1 dated 28 December 2021. The preparation of the FRR in the Beginning of 2021 and the 2020 Monitoring of all Work Units have been completed and reported in the Management Review Meeting
11	Mengelola pelaporan Benturan Kepentingan PI Grup Manage PI Group Conflict of Interest reporting	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pengesahan atas pemutakhiran Pedoman Pengendalian Benturan kepentingan Nomor: PI-SEK-PD-008 Rev.1 Tanggal 27 Desember 2021 yang disampaikan ke Anak Perusahaan melalui Surat Edaran Nomor: 03/A/KK/610/SE/2022 tanggal 26 Januari 2022. Tindak Lanjut, <i>Monitoring</i>, dan Evaluasi atas Laporan Benturan Kepentingan PI Group setiap bulan disampaikan pada laporan kinerja bulanan PI Group. Approval has been made on updating the Conflict of Interest Control Guidelines Number: PI-SEK-PD-008 Rev.1 dated 27 December 2021 which was submitted to the Subsidiaries through Circular Letter Number: 03/A/KK/610/SE/2022 dated 26 January 2022 . Follow-up, Monitoring, and Evaluation of the PI Group Conflict of Interest Report every month submitted to the PI Group monthly performance report
12	Mengelola pelaporan Gratifikasi PI Grup Manage PI Group Gratification reporting	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi telah selesai dan telah ditandatangani D1 pada tanggal 22 November 2021 (pedoman) dan 25 November 2021 (prosedur) Tindak Lanjut, <i>Monitoring</i>, dan Evaluasi atas Laporan Gratifikasi setiap bulan disampaikan pada laporan kinerja bulanan PI Group. Publikasi video sosialisasi anti gratifikasi melalui media TV Perusahaan di lobby gedung kantor dan media sosial Perusahaan yang akan dilaksanakan s.d Desember 2021 (<i>Progress</i> 100%). Mengikuti sertifikasi <i>e-Learning</i> Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi bersama KPK-RI pada tanggal 16 Juli s.d. 1 Oktober 2021 dengan total 5626 peserta terdaftar dari semua entitas PI Group dan sebanyak 2416 peserta (43%) diantaranya telah mendapat sertifikat dengan rincian : PTPI sebanyak 279 peserta, PT Petrokimia Gresik sebanyak 305 peserta, PT Pupuk Kujang sebanyak 63 peserta, PT Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 239 peserta, PT Pupuk Iskandar Muda sebanyak 550 peserta, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebanyak 164 peserta, PT Rekayasa Industri sebanyak 677 peserta, PT Mega Eltra sebanyak 71 peserta, PT Pupuk Indonesia Logistik sebanyak 17 peserta, PT Pupuk Indonesia Utilitas sebanyak 9 peserta dan PT Pupuk Indonesia Pangan sebanyak 42 peserta. The Guidelines and Procedures for Gratification Control have been completed and have been signed by D1 on November 22, 2021 (guidelines) and November 25, 2021 (procedures) Follow-up, Monitoring, and Evaluation of Gratification Reports are submitted every month in the PI Group's monthly performance report Publication of anti-gratification socialization videos through Company TV media in the office building lobby and Company social media which will be held until December 2021 (100% Progress) Participated in the e-Learning certification of Gratification Control Technical Guidance with the KPK-RI on July 16 s.d. October 1, 2021 with a total of 5626 registered participants from all PI Group entities and as many as 2416 participants (43%) of whom have received certificates with details: PTPI with 279 participants, PT Petrokimia Gresik with 305 participants, PT Pupuk Kujang with 63 participants, PT Pupuk Kalimantan Timur with 239 participants, PT Pupuk Iskandar Muda with 550 participants, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang with 164 participants, PT Rekayasa Industri with 677 participants, PT Mega Eltra with 71 participants, PT Pupuk Indonesia Logistik with 17 participants, PT Pupuk Indonesia Utility with 9 participants and PT Pupuk Indonesia Pangan with 42 participants.

No.	Program Program	Kegiatan Activity
13	Mengelola pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) Managing Violation Reporting (Whistleblowing System/WBS)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Tindak Lanjut, <i>Monitoring</i>, dan Evaluasi atas Laporan Aduan Pelanggaran melalui WBS untuk PI Group setiap bulan melalui laporan kinerja bulanan. • Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan KPK RI tentang WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi PI dan KPK RI pada tanggal 2 Maret 2021. • <i>Progress</i> WBS Terintegrasi PI dengan KPK sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> » WBS Terintegrasi PI dengan KPK: <i>Kick Off Meeting</i> tgl 20 April 2021, penyampaian kebutuhan data KPK RI tgl 21 April 2021, Pengisian Kuesioner Budaya Pelaporan tgl 20-28 April 2021, wawancara dan diskusi dengan Tim Teknis WBS tgl 4 Mei 2021, wawancara dengan Staf, VP, dan SVP tgl 5 Mei 2021, Asesment Aplikasi WBS Terintegrasi tgl 6 Mei 2021, penyampaian Metode Integrasi Aplikasi WBS PI tgl 19 Mei 2021, Pelatihan Peluit Integritas tgl 7-10 Juni 2021, Pembahasan Hasil <i>Assessment</i> WBS tgl 14 Juni 2021, Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi tanggal 19 dan 21 Juli 2021, Pembahasan Aplikasi pada 26 Juli 2021, Penyampaian laporan final dan kesepakatan rencana aksi melalui surat KPK Nomor: B/4462/PM.00.00/30-35/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021. Uji Coba Integrasi Sistem WBS PI dan Sistem AROMA KPK oleh Tim TI PI.” » Uji Coba Integrasi Sistem WBS PI dan Sistem AROMA KPK oleh Tim TI PTPI, melalui instalasi Sistem AROMA telah selesai dilakukan pada tanggal 28 September 2021 » Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> melalui Internalisasi Budaya Anti Korupsi di lingkungan PI Grup dengan Teman “Implementasi WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi KPK RI dan PTPI”, pada tanggal 30 September 2021. » Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> WBS TPK melalui Pelaksanaan <i>benchmark</i> oleh PT PLN terkait dengan pengeolaan WBS di PTPI telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021. » Penyampaian kepada KPK RI terkait dengan penetapan pertukaran informasi dan data dalam pelaksanaan WBS terintegrasi PTPI dan KPK » Launching Aplikasi WBS TPK Terintegrasi PTPI dan KPK pada tanggal 10 Desember 2021 » Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi <i>Whistleblowing System</i> TPK Terintegrasi PI dan KPK dilakukan melalui pelaksanaan <i>training i-webs</i> pada tanggal 14 Desember 2021. • Implementation of Follow-up, Monitoring, and Evaluation of Reports of Complaints of Violations through the WBS for the PI Group every month through monthly performance reports. • The company has signed a Cooperation Agreement with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) regarding the Integrated Corruption Crime WBS (TPK) PI and the RI KPK on March 2, 2021. • The progress of the Integrated WBS between PI and KPK is as follows: <ul style="list-style-type: none"> » Integrated WBS between PI and KPK: Kick Off Meeting on April 20, 2021, submission of data needs for the RI KPK on April 21, 2021, Completing the Reporting Culture Questionnaire on April 20-28, 2021, interview and discussion with the WBS Technical Team on May 4, 2021, interview with Staff, VP, and SVP on May 5, 2021, Integrated WBS Application Assessment on May 6, 2021, submission of the WBS PI Application Integration Method on May 19, 2021, Integrity Whistle Training on June 7-10, 2021, Discussion of WBS Assessment Results on June 14, 2021, Discussion of Follow-up Recommendations on July 19 - 21, 2021, Application Discussion on July 26, 2021, Submission of the final report and agreement on the action plan through KPK letter Number: B/4462/PM.00.00/30-35/08/2021 dated August 9, 2021. Trial of Integration of the PI WBS System and KPK AROMA System by the PTPI IT Team.” » The trial for the integration of the WBS PI System and the KPK AROMA System by the IT PTPI Team, through the installation of the AROMA System, was completed on September 28, 2021 » Implementation of Follow-up on the Recommendations of Assessment Results through Internalization of Anti-Corruption Culture within the PI Group with the theme “Implementation of the Integrated Corruption Crime WBS of the Indonesian KPK and PTPI”, on September 30, 2021. » Follow-up to the Recommendation on the TPK WBS Assessment Results through the implementation of benchmarks by PT PLN related to WBS management at PTPI has been carried out on November 2, 2021. » Submission to the Indonesian Corruption Eradication Commission related to the determination of the exchange of information and data in the implementation of WBS integrated with PTPI and KPK » Launching of the Integrated PI and KPK WBS TPK Application on December 10, 2021 » Technical Guidance on the Use of the Integrated TPK Whistleblowing System Application for PTPI and KPK is carried out through the implementation of i-webs training on December 14, 2021.

No.	Program Program	Kegiatan Activity
14	Menyusun peraturan <i>reward and punishment</i> dalam kepatuhan Develop reward and punishment regulations in compliance	Peraturan <i>reward and punishment</i> dalam kepatuhan dalam proses penyusunan. Reward and punishment regulations in compliance in the drafting process.
15	Mengembangkan KPI Kepatuhan Developing Compliance KPIs	Telah dilakukan penyusunan KPI Kepatuhan untuk tahun 2021 The Compliance KPI for 2021 has been prepared
16	Mengelola pelaporan kekayaan pejabat Manage officials' wealth reporting	<ul style="list-style-type: none"> • Progres status pelaporan tersebut meliputi: 699 WL (100%) Diumumkan Lengkap. • Penyampaian Surat Edaran Nomor: SE-13/A/KU/A/24/SE/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Pemberlakuan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. • Penetapan Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat No. PI-SEK-PD-010 Rev. 1 tanggal 22 November 2021. Pedoman ini disampaikan ke Anak Perusahaan melalui Surat Edaran No. SE-03/A/KK/610/SE/2022 tanggal 26 Januari 2022. • Pelaksanaan <i>Training of Trainer</i> Pengelola LHKPN PI Group pada tanggal 21 Desember 2021. • The progress of the reporting status includes: 699 WL (100%) Fully Announced. • Submission of Circular Letter Number: SE-13/A/KU/A/24/SE/2021 dated November 15, 2021 concerning Enforcement of Circular Letter of the Minister of SOEs Number: SE-12/MBU/10/2021 concerning Obligations to Submit Report on Assets of State Administrators (LHKPN) For Officials in State-Owned Enterprises. • Stipulation of Guidelines for Reporting Official Wealth No. PI-SEK-PD-010 Rev. 1 dated November 22, 2021. These guidelines are submitted to the Subsidiaries through Circular Letter No. SE-03/A/KK/610/SE/2022 dated January 26, 2022. • Implementation of the PI Group LHKPN Manager Training of Trainers on December 21, 2021.
17	Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pejabat struktural terhadap kepatuhan Measure the level of understanding of structural officials on compliance	Telah dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pejabat struktural terhadap kepatuhan melalui pengisian survei CGPI, WBS, dan Assesment GCG Tahun 2021. Measurements of the level of understanding of structural officials on compliance have been carried out by filling out the CGPI, WBS, and 2021 GCG Assessment surveys.
18	Menerapkan peraturan <i>reward and punishment</i> dalam Kepatuhan Implementing reward and punishment regulations in Compliance	Peraturan <i>reward and punishment</i> dalam kepatuhan dalam proses penyusunan. Reward and punishment regulations in compliance in the drafting process.
19	Menerapkan KPI Kepatuhan Implementing Compliance KPIs	Telah dilakukan penyusunan KPI Kepatuhan untuk tahun 2021. The Compliance KPI for 2021 has been prepared

No.	Program Program	Kegiatan Activity																																																																																	
20	Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil GCG Assessment PI Grup Tahun 2020 Monitor the follow-up to the recommendations of the 2020 PI Group GCG Assessment results	<i>Monitoring</i> Tindak Lanjut AoI (rekomendasi) hasil GCG Assessment PI Grup Tahun 2020 adalah sebagai berikut: The AoI Follow Up Monitoring (recommendations) on the results of the 2020 PI Group GCG Assessment are as follows:																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Perusahaan Company</th> <th rowspan="2">Jumlah AoI Total AoI</th> <th colspan="3">Status per Maret 2022 Status in Maret 2022</th> </tr> <tr> <th>Open</th> <th>In Progress</th> <th>Closed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PKT</td> <td>55</td> <td>0 0%</td> <td>0 0%</td> <td>55 100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PKC</td> <td>66</td> <td>0 0%</td> <td>2 3%</td> <td>64 97%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PKG</td> <td>47</td> <td>0 0%</td> <td>2 4%</td> <td>45 96%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PI</td> <td>60</td> <td>1 2%</td> <td>4 8%</td> <td>55 92%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PIP</td> <td>154</td> <td>6 4%</td> <td>6 4%</td> <td>142 92%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PIM</td> <td>67</td> <td>0 0%</td> <td>7 10%</td> <td>60 90%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ME</td> <td>89</td> <td>1 1%</td> <td>10 11%</td> <td>78 88%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PILOG</td> <td>69</td> <td>0 0%</td> <td>11 16%</td> <td>58 84%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PSP</td> <td>53</td> <td>0 0%</td> <td>14 26%</td> <td>39 74%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PIU</td> <td>90</td> <td>0 0%</td> <td>34 38%</td> <td>56 62%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>REKIND</td> <td>51</td> <td>0 0%</td> <td>23 45%</td> <td>28 55%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>801</td> <td>8 1%</td> <td>113 14%</td> <td>680 85%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Perusahaan Company	Jumlah AoI Total AoI	Status per Maret 2022 Status in Maret 2022			Open	In Progress	Closed	1	PKT	55	0 0%	0 0%	55 100%	2	PKC	66	0 0%	2 3%	64 97%	3	PKG	47	0 0%	2 4%	45 96%	4	PI	60	1 2%	4 8%	55 92%	5	PIP	154	6 4%	6 4%	142 92%	6	PIM	67	0 0%	7 10%	60 90%	7	ME	89	1 1%	10 11%	78 88%	8	PILOG	69	0 0%	11 16%	58 84%	8	PSP	53	0 0%	14 26%	39 74%	9	PIU	90	0 0%	34 38%	56 62%	10	REKIND	51	0 0%	23 45%	28 55%	TOTAL		801	8 1%	113 14%	680 85%
No	Perusahaan Company	Jumlah AoI Total AoI				Status per Maret 2022 Status in Maret 2022																																																																													
			Open	In Progress	Closed																																																																														
1	PKT	55	0 0%	0 0%	55 100%																																																																														
2	PKC	66	0 0%	2 3%	64 97%																																																																														
3	PKG	47	0 0%	2 4%	45 96%																																																																														
4	PI	60	1 2%	4 8%	55 92%																																																																														
5	PIP	154	6 4%	6 4%	142 92%																																																																														
6	PIM	67	0 0%	7 10%	60 90%																																																																														
7	ME	89	1 1%	10 11%	78 88%																																																																														
8	PILOG	69	0 0%	11 16%	58 84%																																																																														
8	PSP	53	0 0%	14 26%	39 74%																																																																														
9	PIU	90	0 0%	34 38%	56 62%																																																																														
10	REKIND	51	0 0%	23 45%	28 55%																																																																														
TOTAL		801	8 1%	113 14%	680 85%																																																																														
		Adapun <i>monitoring</i> hasil GCG Assessment Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai triwulan II 2022 setelah laporan resmi hasil GCG Assessment PI Tahun 2021 diterima oleh masing-masing Perusahaan. The monitoring of the results of the 2021 GCG Assessment will be carried out starting in the second quarter of 2022 after the official report on the results of the 2021 PI GCG Assessment is received by each company.																																																																																	
21	Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil <i>Fraud Control System</i> PI Grup Monitoring the follow-up to the recommendations of the PI Group <i>Fraud Control System</i> results	Telah disampaikan Surat Direktur Utama PTPI kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi, Nomor: 04743/A/MR/E42/ET/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengembangan <i>Fraud Control System</i> PI Grup. A letter from the President Director of PTPI has been submitted to the Deputy Head of BPKP for Investigation, Number: 04743/A/MR/E42/ET/2021 dated April 28, 2021 regarding the Follow-up to the Results of the <i>Fraud Control System</i> Development of the PI Group.																																																																																	

No.	Program Program	Kegiatan Activity
22	Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil Audit Internal dan <i>Surveillance</i> SMAP Monitor follow-up on recommendations from Internal Audit and <i>Surveillance</i> SMAP	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut NCCAR ASMI SMAP Tahun 2020 adalah sebagai berikut: Sampai dengan 31 Oktober 2021 dari total 63 NCCAR memiliki <i>progress</i> sebagai berikut: 4 (6%) <i>Open</i>, 11 <i>In progress</i> (18%), 48 <i>Closed</i> (76%) Tindak Lanjut Temuan Hasil <i>Surveillance</i> SMAP Tahun 2021 diantara sebagai berikut: Pemutakhiran Pedoman SMAP yang telah disahkan pada masih dalam proses reuiu oleh SMTI, dan Penyelesaian NCCAR Masih dalam proses verifikasi. The follow-up for NCCAR ASMI SMAP in 2020 is as follows: As of October 31, 2021, out of a total of 63 NCCARs have progress as follows: 4 (6%) <i>Open</i>, 11 <i>In progress</i> (18%), 48 <i>Closed</i> (76%) Follow-up to the findings of the 2021 SMAP <i>Surveillance</i> Results are as follows: Updating the SMAP Guidelines that have been approved in still in the review process by SMTI, and NCCAR Completion Still in the verification process.
23	Menyusun laporan efektivitas penerapan Manajemen Kepatuhan PI Grup Compile report on the effectiveness of the implementation of PI Group Compliance Management	<p>Penyusunan laporan efektivitas penerapan Manajemen Kepatuhan PI Grup Semester I 2021 telah selesai dan disampaikan kepada pihak terkait melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepada Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko, melalui Surat SVP Sekretaris Perusahaan Nomor: 15213/A/MR/E42/IT/2021 tanggal 21 Agustus 2021 perihal Penyampaian Laporan Efektivitas Penerapan Manajemen Kepatuhan PI Grup s.d. Semester I Tahun 2021 Kepada Direktur Utama, melalui Surat Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko Nomor: 15233/A/MR/E42/IT/2021 tanggal 22 Agustus 2021 perihal Penyampaian Laporan Efektivitas Penerapan Manajemen Kepatuhan PI Grup s.d. Semester I Tahun 2021" <p>The preparation of the report on the effectiveness of the implementation of the PI Group Compliance Management Semester I 2021 has been completed and submitted to the relevant parties through:</p> <ul style="list-style-type: none"> To the Director of HC, Governance, & Risk Management, through SVP Corporate Secretary Letter Number: 15213/A/MR/E42/IT/2021 dated August 21, 2021 regarding Submission of Report on the Effectiveness of Implementation of Compliance Management of PI Grup s.d. Semester I Year 2021 To the President Director, through the Letter of the Director of HC, Governance, & Risk Management Number: 15233/A/MR/E42/IT/2021 dated August 22, 2021 regarding Submission of Report on the Effectiveness of Implementation of Compliance Management of PI Grup s.d. Semester I Year 2021
24	Menyelenggarakan GCG <i>Assessment</i> PI Grup (Eksternal <i>Assessment</i>) Organizing the GCG <i>Assessment</i> of the PI Group (External <i>Assessment</i>)	<p>Pelaksanaan GCG <i>Assessment</i> tahun 2021, dimulai dengan permintaan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 14 September 2021. Adapun sesuai kebijakan BPKP, kegiatan GCG <i>Assessment</i> akan dilaksanakan pada awal tahun 2022 yaitu setelah berakhirnya kinerja tahunan.</p> <p>Implementation of the GCG <i>Assessment</i> in 2021, starting with a request to the Deputy Head of BPKP for State Accountants, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) on September 14, 2021. According to BPKP policy, GCG <i>Assessment</i> activities will be carried out in early 2022, after the end of the annual performance.</p>
25	Melaksanakan evaluasi atas implementasi <i>Fraud Control System</i> PI Grup Carry out an evaluation of the implementation of the <i>Fraud Control System</i> of the PI Group	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penyampaian kepada Anak Perusahaan Pedoman Sistem Pengendalian <i>Fraud (Fraud Control System)</i> Nomor Dokemen: PI-SEK-PD-014 Rev 0 tanggal 28 April 2021, melalui Surat Edaran Direktur Utama PTPI Nomor: 02/A/KU/A00/SE/2021 tanggal 21 Mei 2021, untuk dapat diratifikasi di Anak Perusahaan. Telah disampaikan Surat Direktur Utama PTPI kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Nomor: 04743/A/MR/E42/ET/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengembangan <i>Fraud Control System</i> PI Grup. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Investigasi BPKP Nomor: S-1022/D5/03/2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengembangan <i>Fraud Control System</i> PI Grup, maka pelaksanaan kegiatan evaluasi implementasi FCS di PI dan bimbingan teknis FCS 6 (enam) Anak Perusahaan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Subsidiaries have submitted the <i>Fraud Control System</i> Guidelines Document Number: PI-SEK-PD-014 Rev 0 dated April 28, 2021, through the Circular Letter of the President Director of PTPI Number: 02/A/KU /A00/SE/2021 dated May 21, 2021, to be ratified in Subsidiaries. A letter from the President Director of PTPI has been submitted to the Deputy Head of BPKP for Investigation, Number: 04743/A/MR/E42/ET/2021 dated April 28, 2021 regarding the Follow-up to the Results of the <i>Fraud Control System</i> Development of the PI Group. Based on the Letter of the Deputy for Investigation of BPKP Number: S-1022/D5/03/2021 dated December 3, 2021 regarding the Follow-up to the Development of the PI Group <i>Fraud Control System</i>, the implementation of FCS implementation evaluation activities in PI and FCS technical guidance for 6 (six) company subsidiaries will be implemented in 2022.

No.	Program Program	Kegiatan Activity
26	Melaksanakan Audit Internal dan <i>Surveillance</i> SMAP Implementing Internal Audit and SMAP Surveillance	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan Audit Sistem Manajemen Internal Terintegrasi pada tanggal 2-6 Agustus 2021. Telah dilakukan <i>Surveillance</i> SMAP Pada tanggal 5-6 Oktober 2021 oleh PT ASRICERT An Integrated Internal Management System Audit has been conducted on August 2-6, 2021. SMAP Surveillance has been carried out on October 5-6, 2021 by PT ASRICERT

Tabel Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Manajemen Kepatuhan PI Group
PI Group Compliance Management Training and Certification

No.	Perusahaan Company	Realisasi Pelatihan Bidang Manajemen Kepatuhan Compliance Management Training Realization
1	PTPI	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 di Lingkungan PI Grup tanggal 19 Januari 2021 yang bekerja sama dengan KPK RI. Webinar Memperkuat Pengawasan Internal Organisasi Melalui Penerapan ISO 37002 <i>Whistleblowing Management System</i> tanggal 27 Februari 2021 yang diselenggarakan oleh Visi Integritas. <i>Sharing Session</i> Hasil Evaluasi Penerapan GCG PI Grup Tahun 2020 pada tanggal 3 Maret 2021. Webinar Nasional GCG <i>Implementation</i> tanggal 24 Maret 2021 yang diselenggarakan oleh Mutu Institute. UPG <i>Development Program</i> Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 5 s.d. 7 April 2021. <i>Workshop e-Registration</i> Pengelola LHKPN yang diselenggarakan oleh KPK RI pada 15 April 2021. Webinar Nasional Mewujudkan Dunia Usaha Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 April 2021. Sertifikasi <i>Certified Governance Professional (CGP)</i> tanggal 26-29 April 2021. <i>Workshop Culture Champion on Boarding</i> pada tanggal 3-4 Mei 2021. Gratifikasi Talk EPS 02 Antara Tradisi dan Akar Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 Mei 2021. Webinar Nasional Implementasi <i>Forensic Accounting</i> dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 2021. Webinar Peluit Integritas yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 7-10 Juni 2021. <i>Interpretation Training on Baldrige Excellence Framework</i> 2021-2022 pada tanggal 9-11 Juni 2021. Webinar Uji Coba Aplikasi Pelaporan Gratifikasi <i>Online (GOL 2.0)</i> yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 22 Juni 2021. Webinar Implementasi SNI 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional pada tanggal 23 Juni 2021. Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Anti Fraud Manager (CAFM)</i> yang diselenggarakan oleh Asia Anti <i>Fraud</i> pada tanggal 21-23 Juni 2021. Belajar Anti <i>Fraud "Prevention with the Implementation of Anti Bribery Management System"</i> yang diselenggarakan oleh ACFE Indonesia Chapter pada tanggal 3 Juli 2021. Internalization of KPK Regulation Number 2 of 2020 within the Pupuk Indonesia Group on January 19, 2021 in collaboration with the Indonesian KPK. Webinar Strengthening Organizational Internal Supervision through Implementation of ISO 37002 <i>Whistleblowing Management System</i> on February 27, 2021 organized by Visi Integritas <i>Sharing Session</i> on Evaluation Results of the Implementation of GCG Pupuk Indonesia Group in 2020 on March 3, 2021. GCG Implementation National Webinar on March 24, 2021, organized by the Mutu Institute. UPG Development Program 2021 organized by the Indonesian Corruption Eradication Commission on April 5 - 7, 2021. LHKPN Manager e-Registration Workshop organized by the Indonesian KPK on April 15, 2021. National Webinar Realizing a Business World Without Corruption organized by the Indonesian Corruption Eradication Commission on April 28, 2021. <i>Certified Governance Professional (CGP)</i> certification on April 26-29, 2021. <i>Workshop Culture Champion on Boarding</i> on May 3-4, 2021. Gratification Talk EPS 02 Between Tradition and the Roots of Corruption organized by the Indonesian KPK on May 28, 2021. National Webinar on Forensic Accounting Implementation for Detecting Fraud organized by the Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia on June 5, 2021. <i>Whistleblower Integrity Webinar</i> organized by the Indonesian KPK on June 7-10, 2021. <i>Interpretation Training on Baldrige Excellence Framework</i> 2021-2022 on June 9-11, 2021. Webinar Trial of Online Gratification Reporting Application (GOL 2.0) organized by the Indonesian KPK on June 22, 2021. Webinar Implementation of SNI 37301:2021 Compliance Management System organized by the National Standardization Body on June 23, 2021. <i>Certified Anti Fraud Manager (CAFM)</i> training and certification organized by Asia Anti Fraud on June 21-23, 2021. Learn about Anti Fraud "Prevention with the Implementation of Anti Bribery Management System" organized by ACFE Indonesia Chapter on July 3, 2021.

Tabel Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Manajemen Kepatuhan PI Group PI Group Compliance Management Training and Certification

No.	Perusahaan Company	Realisasi Pelatihan Bidang Manajemen Kepatuhan Compliance Management Training Realization
		<ul style="list-style-type: none"> • Webinar “Ethic in Business: Big Challenge “Reinforcing Ethical Business and Integrity Practices” yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada tanggal 7-8 Juli 2021. • International Webinar: “Cyber Risk Management: Stop Cyber Attacks Before They Stop You” yang diselenggarakan oleh IRMAPA pada tanggal 15 Juli 2021. • Gratifikasi Talk EPS04 Bangun Kompetensi dengan Sertifikasi Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 Juli 2021. • E-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan oleh ACLC KPK RI pada tanggal 29 Juli 2021. • Belajar Anti Fraud “Fraud Risk Assessment” yang diselenggarakan oleh ACFE Indonesia Chapter pada tanggal 31 Juli 2021. • Seminar GRC Summit 2021 pada tanggal 26 Agustus 2021. • Webinar Penerapan ISO 37002:2021 Whistleblowing Management System yang diselenggarakan oleh Indonesia ISO Expert Association pada tanggal 4 September 2021. • Webinar LHKPN: “Apa Susahnya Laporkan LHKPN Tepat Waktu dan Akurat?” yang dilaksanakan oleh KPK RI pada tanggal 7 September 2021. • Workshop Anti Korupsi “Deteksi dan Pencegahan Korupsi” yang diselenggarakan oleh BPK RI pada tanggal 14 September 2021. • RISKHub International Webinar “Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage” yang diselenggarakan Bersama oleh Marsh, IRMAPA, dan ERMA pada tanggal 27 September 2021. • Gratifikasi Talk EPS06 Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 28 September 2021. • Internalisasi Budaya Antikorupsi di lingkungan PI Grup dengan Tema “Implementasi WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi KPK RI dan PTPI” tanggal 30 September 2021. • E-learning Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi tanggal 7 Juli-30 September 2021 yang telah diikuti oleh 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang Insan Perusahaan. • Pelatihan Awareness Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 19600:2016 untuk Personil Bidang Tata Kelola & Kepatuhan PI Grup telah dilakukan pada tanggal 19-22 Oktober 2021. • Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas untuk Personil Bidang Tata Kelola & Kepatuhan PI Grup telah dilakukan pada tanggal 16-18 November 2021 yang dikoordinasikan oleh ACLC KPK. • Internalisasi Budaya Anti Korupsi di lingkungan PI Grup dengan Tema “Optimalisasi Whistleblowing System dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Tindak Pidana Korporasi, untuk Mewujudkan BUMN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi”, pada tanggal 10 Desember 2021 sebagai salah satu peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2021 • Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Whistleblowing System TPK Terintegrasi PI dan KPK dilakukan melalui pelaksanaan training i-webs pada tanggal 14 Desember 2021. • Training of Trainer Admin Pengelola LHKPN PI Grup telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021 • Webinar “Ethic in Business: Big Challenge “Reinforcing Ethical Business and Integrity Practices” organized by PPM Manajemen on July 7-8, 2021. • International Webinar: “Cyber Risk Management: Stop Cyber Attacks Before They Stop You” hosted by IRMAPA on July 15, 2021. • Gratification Talk EPS04 Build Competence with Anti-Corruption Certification organized by the Indonesian KPK on July 28, 2021. • Anti-Corruption and Integrity Basic Knowledge E-Learning organized by ACLC KPK RI on July 29, 2021. • Anti-Fraud Study “Fraud Risk Assessment” organized by ACFE Indonesia Chapter on July 31, 2021. • GRC Summit 2021 seminar on August 26, 2021. • Webinar on the Implementation of ISO 37002:2021 Whistleblowing Management System organized by the Indonesia ISO Expert Association on September 4, 2021. • LHKPN Webinar: “What’s Difficult to Report LHKPN on Time and Accurately?” carried out by the Indonesian Corruption Eradication Commission on September 7, 2021. • Anti-Corruption Workshop “Corruption Detection and Prevention” organized by BPK RI on September 14, 2021. • RISKHub International Webinar “Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage” jointly organized by Marsh, IRMAPA, and ERMA on September 27, 2021. • Gratification Talk EPS06 Identification of Gratification Prone Points organized by the Indonesian KPK on September 28, 2021. • Internalization of Anti-corruption Culture within the Pupuk Indonesia Group with the theme “Implementation of the Integrated Corruption Crime WBS of RI KPK and PT Pupuk Indonesia (Persero)” on September 30, 2021. • E-learning Technical Guidance for Gratification Control on July 7, - September 30, 2021 attended by 197 (one hundred and ninety seven) Company Personnel. • The SNI ISO 19600:2016 Compliance Management System Awareness Training for Personnel in the Governance & Compliance Division in the Pupuk Indonesia Group was held on October 19-22, 2021. • Training of Trainer Whistleblowing System Online for WBS managers from PIM, PKG, ME, PILOG, PIU, and PIP has been conducted on October 29, 2021. • Certification of Integrity Builder Experts for Personnel in the Governance and Compliance Division of the Pupuk Indonesia Group was carried out on November 16-18, 2021, and coordinated by ACLC KPK. • Internalization of Anti-Corruption Culture within the Pupuk Indonesia Group with the theme “Optimizing the Whistleblowing System in Efforts to Prevent Corruption and Corporate Crime, to Realize a Clean and Corruption-Free BUMN”, on December 10, 2021 as one of the commemorations of World Anti-Corruption Day 2021. • Technical Guidance on the Use of the Integrated PI and KPK TPK Whistleblowing System Application carried out through the implementation of i-webs training on December 14, 2021. • Training of Trainer Admin Manager of LHKPN Pupuk Indonesia Group has been held on December 21, 2021.

KOMUNIKASI KORPORAT

Kompartemen Komunikasi Korporat dipimpin oleh Senior Vice Manager President (SVP) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama serta bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan SVP Komunikasi Korporat berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Hingga akhir tahun 2021, SVP Komunikasi Korporat dijabat oleh Wijaya Laksana berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/005/2021.

Organisasi Komunikasi Korporat

Secara struktural, Komunikasi Korporat berada satu tingkat di bawah Direksi yang membawahi VP Komunikasi Internal dan VP Komunikasi Eksternal. Sekretaris Perusahaan diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan hubungan yang baik antara Perusahaan sebagai emiten dengan regulator dan lembaga-lembaga penunjang pasar modal, kalangan investor, masyarakat luas dan Pemangku Kepentingan pada umumnya, dan sebagai pengelola informasi yang terkait dengan lingkungan bisnis Perusahaan.

Struktur organisasi Komunikasi Korporat ditetapkan sesuai Keputusan Direksi Nomor 082/KU/E10/SK/2021 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero), jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Komunikasi Korporat sebanyak 16 orang.

CORPORATE COMMUNICATION

The Corporate Communications Compartment is led by a Senior Vice Manager President (SVP) who is appointed and dismissed by the President Director and reports directly to the President Director. The appointment of the Corporate Communications SVP is based on the Company's internal mechanism with approval from the Board of Commissioners. At the end of 2021, Wijaya Laksana was the SVP Corporate Communications based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/005/2021.

Corporate Communication Organization

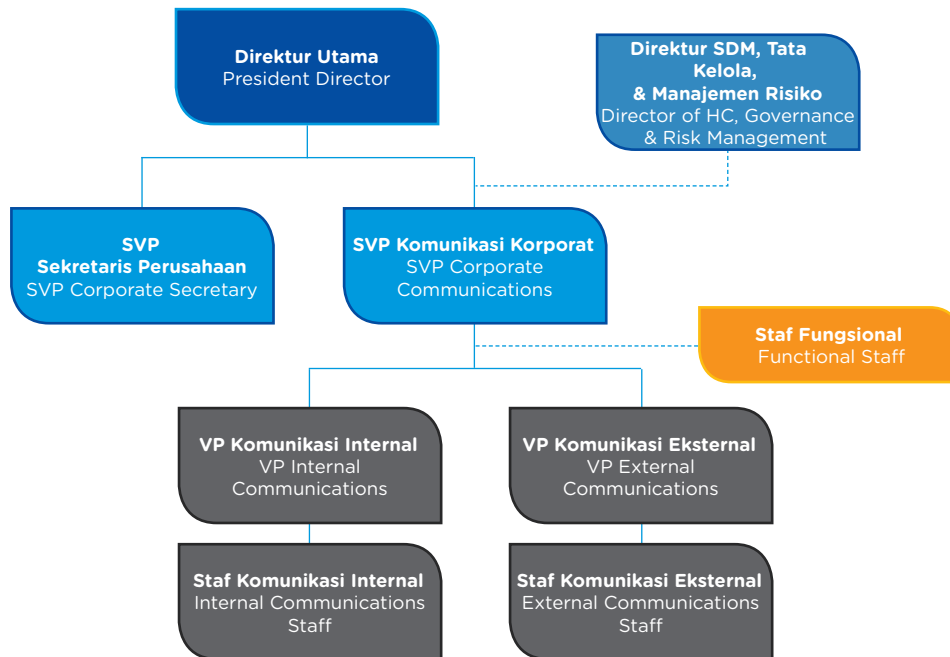
Structurally, Corporate Communications is one level below the Board of Directors who oversees the VP Internal Communications and VP External Communications. The Corporate Secretary assists the Board of Directors in maintaining a good relationship between the Company as an issuer with the regulators and capital market supporting institutions, investors, the general public and stakeholders, and as a manager of information related to the Company's business.

The Corporate Communications organizational structure was determined based on Board of Directors Decree No. 082/KU/E10/SK/2021 concerning the Organizational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero), the number of employees in the Corporate Communications unit is 16 people.

Fungsi Function	Jumlah Number
SVP Komunikasi Korporat SVP Corporate Communications	1 orang 1 person
Komunikasi Internal Internal Communication	4 orang 4 person
Komunikasi Eksternal External Communication	5 orang 5 person
Fungsional Functional	4 orang 4 person
Jumlah Total	14 orang 14 person

Struktur Organisasi

Organizational Structure



Fungsi dan Tugas Pokok Komunikasi Korporat

1. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas tugas dan pekerjaan bagi unit di bawah unit kerja Komunikasi Korporat, yang meliputi kegiatan komunikasi Perusahaan meliputi internal dan eksternal di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan komunikasi korporat di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero), meliputi kegiatan kehumasan, hubungan media, promosi, pameran dan sponsorship dalam rangka menjaga reputasi perusahaan yang positif
3. Mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan hubungan dengan media massa dalam rangka menjalin hubungan baik dan mengelola isu-isu strategis perusahaan dalam rangka menjaga reputasi perusahaan yang positif.
4. Mengkoordinasikan acara Perusahaan yang melibatkan Direksi dan stakeholder eksternal maupun internal.
5. Mengkoordinasikan dan merencanakan pengelolaan media publikasi Perusahaan, baik internal maupun eksternal, antara lain website perusahaan, portal publik, media sosial, media internal serta artefak promosi perusahaan lainnya
6. Mengkoordinasikan dan mengelola program promosi dan publikasi Perusahaan yang terkait dengan korporasi, meliputi iklan, kerjasama media, pameran, sponsorship dalam rangka mempromosikan brand korporasi guna membentuk citra positif perusahaan
7. Mengkoordinasikan kegiatan protokoler Direksi dalam kegiatan Perusahaan dengan stakeholder eksternal maupun internal sehingga tercipta citra perusahaan yang baik.

Corporate Communications Main Functions and Duties

1. Coordinate and be responsible for the duties and work for in the Corporate Communications work units, including the Company internal and external communication activities in PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Coordinate policies and corporate communication activities within PT Pupuk Indonesia (Persero), including public relations activities, media relations, promotions, exhibitions and sponsorships in order to maintain a positive Company reputation
3. Coordinate and manage relations activities with the mass media in order to establish good relations and manage the Company's strategic issues in order to maintain a positive Company reputation.
4. Coordinate corporate events involving the Board of Directors and external and internal stakeholders.
5. Coordinate and plan the management of the Company's publication media, both internally and externally, including the Company website, public portals, social media, internal media and other Company promotional artifacts
6. Coordinate and manage corporate promotion and publication programs, including advertisements, media collaborations, exhibitions, sponsorships in order to promote the corporate brand to form a positive corporate image
7. Coordinate the protocol activities for the Company's Board of Directors activities with external and internal stakeholders so as to create a good corporate image.

- | | |
|---|---|
| <p>8. Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan internal karyawan dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan meningkatkan korsa kebersamaan karyawan PI Grup.</p> <p>9. Mengelola pendokumentasian kegiatan Perusahaan, baik dalam bentuk visual, audio, audio visual, baik analog maupun digital.</p> <p>10. Mengkoordinasikan dan merencanakan pengelolaan hubungan dengan stakeholder sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan mendukung pencapaian visi misi Perusahaan Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.</p> <p>11. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di Unit Kerjanya berdasarkan Peraturan Perusahaan dan <i>Job Description</i> agar diperoleh SDM berkualitas.</p> <p>12. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Kepatuhan Anti Penyuapan, GCG (<i>Good Corporate Governance</i>), TQM (<i>Total Quality Management</i>), dan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan berkelanjutan.</p> | <p>8. Coordinate and plan employee internal activities to communicate Company policies and increase the PI Group employee community.</p> <p>9. Manage the Company's documentation, both in the form of visual, audio, audio visual, analog and digital.</p> <p>10. Coordinate and plan the management of relationships with stakeholders so as to create harmonious relationships and support the achievement of the Company's vision and mission, with responsibility for the management of fixed assets, inventory and work equipment under its responsibility so it is maintained properly.</p> <p>11. Responsible for the employees competencies and abilities and work attitudes development and in their work units based on Company regulations and job descriptions in order to obtain quality HC.</p> <p>12. Actively participate in the Occupational Health and Safety (OHS) management system, Risk Management System, Anti-Bribery Compliance, GCG (<i>Good Corporate Governance</i>), TQM (<i>Total Quality Management</i>), and CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) in the work units to achieve OHS standards and quality standards in order to continue continuous improvements.</p> |
|---|---|

Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Implementation of Duties in 2021

No	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Realization
1	Terciptanya citra dan reputasi positif Perusahaan baik di mata stakeholder internal maupun eksternal dengan parameter menjaga persentase pemberitaan positif tahunan sebesar 92% setiap tahun Creation of a positive Company image and reputation in the eyes of internal and external stakeholders within the parameter of maintaining the percentage of positive annual news at 92% every year	Penerbitan <i>Press Release</i> Publishing Press Releases	Penerbitan <i>press release</i> sebanyak 122 <i>press release</i> , dan menghasilkan 5.437 berita positif setara dengan 146% dari target RKAP sebesar 92% Published 122 press releases, and produced 5,437 positive news, equivalent to 146% of the WP&B target of 92%

No	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Realization
	Melakukan Kerjasama <i>placement</i> dengan media top tier Collaborating on placements with top tier media		<p>Kerjasama publikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antaranews.com Periode : Feb-Juli 2021 Jumlah : 90 berita 2. Republika (cetak dan online) Periode : Feb-April 2021 Jumlah : 18 berita 3. Kompas.com Periode : Mei-Juli 2021 Jumlah : 15 berita 4. Jawapos.com/Radar JP Periode : Mei-Des 2021 Jumlah : 36 berita 5. Tempo.co Periode : Juli-Sept 2021 Jumlah : 25 berita 6. Antaranews.com Periode : Sep-Nov 2021 Jumlah : 45 berita 7. Republika.com Periode : Nov-Des 2021 Jumlah : 24 berita <p>Publication collaboration:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antaranews.com Period : Feb-July 2021 Quantity : 90 news 2. Republika (print and online) Period : Feb-April 2021 Quantity : 18 news 3. Kompas.com Period : May-July 2021 Quantity : 15 news 4. Jawapos.com/Radar JP Period : May-Dec 2021 Quantity : 36 news 5. Tempo.co Period : July-Sept 2021 Quantity : 25 news 6. Antaranews.com Period : Sep-Nov 2021 Quantity : 45 news 7. Republika.com Period : Nov-Dec 2021 Quantity : 24 news
	Melakukan kegiatan agenda setting sesuai dengan perkembangan isu Carry out agenda setting activities in accordance with the development of issues		<p>Daftar agenda setting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan stok pupuk subsidi menghadapi musim tanam 2. Capaian dan kinerja Perusahaan 3. Program transformasi Perusahaan 4. Program pengembangan strategis Perusahaan 5. Prestasi Perusahaan 6. Program CSR dan PKBL <p>List of agenda settings:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Availability of subsidized fertilizer stock for the growing season 2. Company achievements and performance 3. Company transformation program 4. Company's strategic development program 5. Company Achievements 6. CSR and PKBL Programs

No	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Realization
	Melakukan kampanye bersama media sosial secara berkala sesuai perkembangan isu Conduct social media campaigns on a regular basis according to the development of issues		<p>Daftar campaign di Medsos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan followers selama 2021 sebanyak 34.938 atau sebesar 112% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021, dengan detail sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Instagram: 25.029; followers baru • Facebook: 7.627; followers baru • Twitter: 2.334 followers baru 2. Total reach/impression pada tahun 2021 sebanyak 4.066.894. Total reach hingga Triwulan III sebanyak 3.269.927. 3. Reach adalah jumlah total orang yang melihat konten yang diposting. Berikut detailnya: <ul style="list-style-type: none"> • Instagram: 2.523.913 • Facebook: 1.167.381 • Twitter: 375.600 4. Rata-rata engagement rate selama tahun 2021: <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram: 5,2% b. Facebook: 3,7% c. Twitter: 1,7% <p>List of social media campaigns:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional 34,938 followers during 2021 or 112% of the target set for 2021, as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Instagram: 25,029; new followers • Facebook: 7,627; new followers • Twitter: 2,334 new followers 2. Total reach/impression in 2021 is 4,066,894. The total reach up to Quarter III is 3,269,927. 3. Total number of people who viewed the posted content <ul style="list-style-type: none"> • Instagram: 2.523.913 • Facebook: 1.167.381 • Twitter: 375.600 4. Average engagement rate during 2021: <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram: 5,2% b. Facebook: 3,7% c. Twitter: 1,7%

No	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi Realization
		Kampanye Komunikasi Internal Transformasi Bisnis Business Transformation Internal Communication Campaign	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan PI News Edisi ke-4 pada tahun 2021 • Sharing Session Direktur Transformasi Bisnis dan Yoris Sebastian Bersama Millennial Ambassador tanggal 8 Februari 2021 • Seminar Hari Krida Pertanian Bersama Milenial tanggal 28 Juni 2021 • Launching Sentralisasi Fungsi Holding tanggal 8 Januari 2021 • Launching Customer Centric Model tanggal 17 Februari 2021 • Launching IFFRI dan IFFLI tanggal 16 Juni 2021 • Publikasi Program Agro Solution melalui media social • Penyebaran press release terkait transformasi bisnis Perusahaan • Launching Program Makmur oleh Menteri BUMN tanggal 28 Agustus 2021 • Penyebaran informasi Transformasi Bisnis melalui Whatsapp Blast dan TV Media ke internal Perusahaan • Penyebaran informasi Transformasi Bisnis melalui website Perusahaan dan portal BUMN. • Pembuatan materi dan publikasi DPCS, RMS, dan RM melalui media massa dan media social. • Publishing PI News 4th Edition in 2021 • Business Transformation Director and Yoris Sebastian Sharing Session with Millennial Ambassadors on February 8, 2021 • Agricultural Krida Day Seminar with Millennials on June 28, 2021 • Launching Centralized Holding Function on January 8, 2021 • Launching Customer Centric Model on February 17, 2021 • Launching IFFRI and IFFLI on June 16, 2021 • Publication of Agro Solution Program through social media • Dissemination of press releases on the Company's business transformation • Launching the Makmur Program by the Minister of SOEs on August 28, 2021 • Dissemination of Business Transformation information via Whatsapp Blast and TV Media to the Company internally • Dissemination of Business Transformation information through the Company's website and BUMN portal. • Preparing material and publications for DPCS, RMS, and RM through mass media and social media.
2	Memastikan penyelenggaraan kegiatan internal Perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan agenda setting yang telah disusun Ensuring the Company's internal activities go well in accordance with the agenda setting prepared	Agenda Perusahaan Company Agenda	Melaksanakan kegiatan agenda Perusahaan sebanyak 137 kegiatan Carrying out the Company's agenda of 137 activities

AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT/INTERNAL CONTROL UNIT



Audit Internal sebagai organ pendukung Direksi dalam tata kelola Perusahaan merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian internal Perusahaan yang secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Fungsi Audit Internal di lingkup Perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang membantu Direksi dalam melaksanakan audit internal Perusahaan guna menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses tata kelola Perusahaan serta memberikan saran perbaikan. SPI merupakan unit kerja Perusahaan yang melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi (*consultative management*).

Dalam proses pelaksanaan pengawasan, SPI memerankan sebuah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi Perusahaan.

Internal Audit as a supporting body to the Board of Directors for corporate governance is an important part of the Company's internal control system that broadly aims to help management realize its objectives/targets through checking the adequacy and implementation of internal control, risk management and corporate governance processes. The Internal Audit function within the Company is carried out by the Internal Audit Unit (SPI) that assists the Board of Directors in carrying out internal audits of the Company to assess the effectiveness of the internal control system, risk management and corporate governance processes and provide suggestions for improvement. Internal Audit is also the Company's work unit that carries out consultative management activities.

When conducting supervision, SPI plays an independent, objective assurance and consultative role designed to provide added value and improve the Company's operations.

Pelaksanaan proses pengawasan dan audit harus mampu membantu Perusahaan mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan Perusahaan yang baik.

Keberadaan SPI merupakan bentuk kepatuhan Perusahaan yang mengacu pada Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN, serta Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

KEBIJAKAN AUDIT INTERNAL PI GRUP

Untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan PI Grup, Direksi menetapkan kebijakan pengawasan intern sesuai SK Direksi No. SK/DIR/043/2015 tanggal 21 September 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pelaksanaan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat oleh SPI;
2. Penguatan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui:
 - a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (*sustainable*);
 - b. Pelaksanaan audit keuangan, audit operasional, dan audit khusus yang fokus pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi (*risk based audit*);
 - c. Pemberian konsultasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, tata kelola, dan manajemen risiko;
 - d. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya SPI.
3. Program pengawasan intern dibuat oleh SVP SPI dan ditetapkan oleh Direktur Utama;
4. SPI PTPI dapat melakukan audit kepada Entitas Anak atas penerapan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang bernilai strategis;
5. SPI PTPI berkoordinasi dengan SPI Entitas Anak dalam menetapkan program dan kegiatan pengawasan;
6. SVP SPI menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan intern setiap Triwulan kepada Direktur Utama;
7. SPI Entitas Anak menyusun kebijakan pengawasan intern di masing-masing perusahaan dengan mengacu kepada Kebijakan pengawasan intern PTPI.

These supervision and audit processes are designed to help the Company achieve its objectives and follow a systematic and disciplined approach in evaluating and increasing the risk management process effectiveness, adequate controls and good corporate management.

SPI is a form of Company compliance with Law No. 19 of 2003 concerning SOEs, the 1998 Government Regulation Number 12 concerning Limited Liability Companies (Persero), SOE Ministerial Decree Number KEP-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practices in SOEs, as well as OJK Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter.

PI GROUP'S INTERNAL AUDIT POLICY

To realize a strong internal control system within the PI Group, the Board of Directors established an internal control policy in accordance with the Board of Directors Decree No. SK/DIR/043/2015 dated September 21, 2015 covering the following points:

1. Implementation to realize a strong internal control system by Internal Audit;
2. Strengthening the internal control system is carried out through:
 - a. Development and strengthening of sustainable internal control functions;
 - b. Implementation of financial audits, operational audits, and special audits that focus on activities that have a high risk (*risk-based audit*);
 - c. Provide consultative services to improve and enhance the effectiveness of operations, governance, and risk management;
 - d. Increase the capability and capacity of Internal Audit resources.
3. The internal control program is led by the SVP SPI who is appointed by the President Director;
4. Internal Audit PTPI can conduct audits on subsidiaries on the implementation of policies issued by the Company and strategic activities.
5. Internal Audit PTPI coordinates with the Internal Audit of subsidiaries in establishing monitoring programs and activities;
6. The SVP of SPI submits a quarterly report on the implementation of internal control to the President Director;
7. Subsidiaries' SPI formulates internal control policies in each company by referring to PTPI's internal control policies.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

SVP Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan BUMN: PER-01/ MBU/2011.

PROFIL SVP SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala SPI dijabat oleh Yulius Sudaryoko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/061/2020 tanggal 2 September 2020.

PARTY APPOINTING AND DISMISSING THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

The SVP of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners in accordance with SOE Regulation: PER-01/MBU/2011.

PROFILE OF THE SVP OF INTERNAL AUDIT UNIT

The head of SPI is Yulius Sudaryoko based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/061/2020 dated September 2, 2020.

Yulius Sudaryoko

SVP Satuan Pengawasan Intern SVP Internal Audit Unit

Warga Negara Nationality	: Indonesia Indonesian
Usia Age	: 53 tahun 53 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place and Date of Birth	: Makassar, 1 Juli 1968 Makassar, July 1, 1968
Domisili Domicile	: Jakarta Barat, DKI Jakarta West Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/061/2020 tanggal 2 September 2020 Board of Directors Decree Number SK/DIR/061/2020 dated September 2, 2020
Periode Jabatan Term of Office	: Menjabat terhitung sejak 1 September 2020 Effectively served since September 1, 2020
Pendidikan Education	: <ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (2019); • Sarjana Manajemen dari Universitas Terbuka (2001); • Diploma Akuntansi dari Politeknik Universitas Diponegoro (1991). • Master of Management from Bina Nusantara University (2019) • Bachelor's degree in Management from Universitas Terbuka (2001) • Diploma in Accounting from Polytechnic Universitas Diponegoro (1991).
Sertifikasi Certification	: Qualified Internal Auditor (QIA) Qualified Internal Auditor (QIA)
Pengalaman Kerja Work Experience	: <ul style="list-style-type: none"> • Staf Utama Direktorat Utama PT Pupuk Kaltim (2016-2020); • Manajer Administrasi & Keuangan Proyek Pengembangan Infrastruktur PT Pupuk Kaltim (2016); • Manajer Keuangan <i>Project</i> Kaltim 5 PT Pupuk Kaltim (2014 -2015); • Kepala Bagian Departemen Anggaran PT Pupuk Kaltim (2008-2012); • Auditor PT Pupuk Kaltim (1992-2008). • Senior Staff of Main Directorate at PT Pupuk Kaltim (2016-2020) • Administration and Finance Manager of Infrastructure Development Project at PT Pupuk Kaltim (2016) • Finance Manager of Kaltim 5 Project at PT Pupuk Klaltim (2014 -2015) • Head of Budget Department at PT Pupuk Kaltim (2008-2012) • Auditor at PT Pupuk Kaltim (1992-2008).

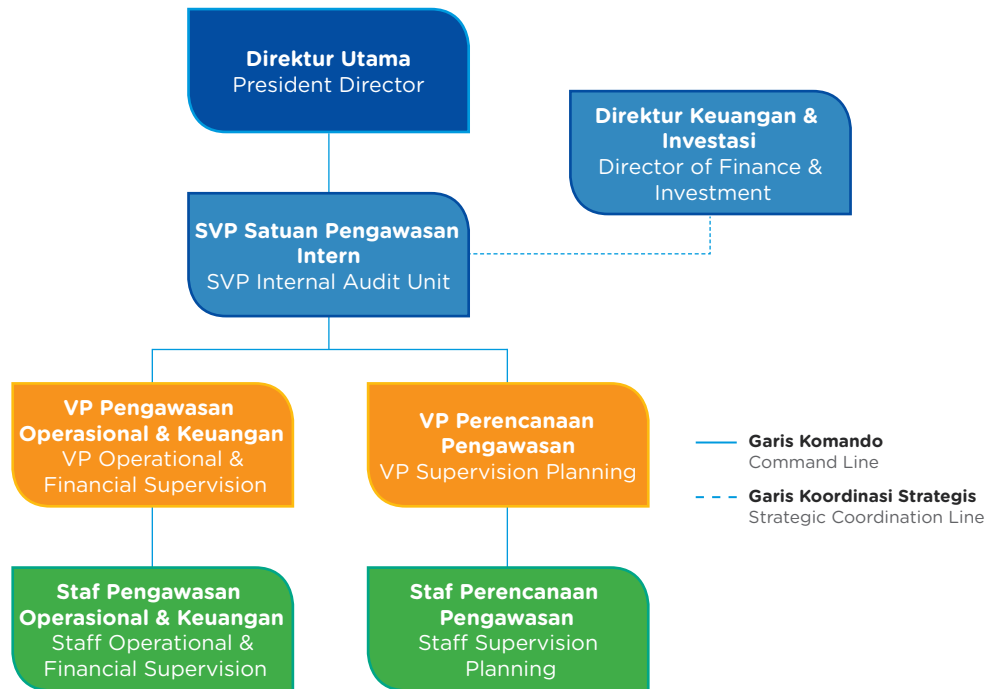
STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 082/KU/E10/SK/2021 tentang Struktur Organisasi PTPI dijelaskan bahwa *Senior Vice President* SPI secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Direktur Keuangan & Investasi.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In line with the Company's Board of Directors Decree No. 082/KU/E10/SK/2021 concerning the PT Pupuk Indonesia (Persero) Organization Structure, the Senior Vice President SPI is structurally responsible directly to the President Director and coordinates with the Director of Finance & Investment.

Struktur Organisasi SPI
SPI Organizational Structure



KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perusahaan mengembangkan Sistem Pengendalian Internal agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengamankan investasi dan aset perusahaan serta menjaga pencapaian kinerja yang baik. Selain itu, pengendalian internal dibangun guna meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Entitas Anak guna memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

SPI Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. 082/KU/E10/SK/2021 tentang Struktur Organisasi PTPI. Keberadaan dan tugas SPI BUMN mengacu kepada Undang-Undang (UU) RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bab VI Bagian Pertama, Satuan Pengawasan Internal serta Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal PTPI dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh Senior Vice President (SVP) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. SVP SPI dalam organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT

The Company developed an Internal Control System so that it can function effectively in securing the Company's investments and assets as well as maintaining the achievement of good performance. In addition, internal control is built to improve the integrated control system, both between the Company and its Subsidiaries to ensure that operational activities are carried out properly and can increase added value for the Company through effective implementation of risk management and the principles of Good Corporate Governance.

The Company's SPI was established based on the Decree of the Board of Directors, which was updated with the Decree of the Board of Directors No. 082/KU/E10/SK/2021 concerning the Organizational Structure of PTPI. The existence and duties of the SOE's SPI refer to RI Law Number 19 of 2003 about State-Owned Enterprises (BUMN) Chapter VI Part One, Internal Control Unit and SOE Ministerial Regulation (Permen).

The positions of PTPI's Internal Control Unit and its Subsidiaries are as follows:

1. The Internal Audit Unit (SPI) is led by a Senior Vice President (SVP) who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
2. SVP SPI is under and responsible to the President Director.

3. SVP SPI secara struktural bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Personil SPI bertanggung jawab secara langsung kepada SVP SPI.

Hubungan kerja SPI secara internal dan eksternal dijabarkan sebagai berikut:

1. Hubungan Internal
 - a. SVP SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
 - b. SVP SPI membawahi 2 (dua) Departemen Pengawasan, yaitu:
 - i) Pengawasan Operasional & Keuangan;
 - ii) Perencanaan Pengawasan.

Tanggung jawab pelaksanaan masing-masing Departemen didelegasikan kepada *Vice President* (VP) terkait.

2. Hubungan Eksternal
 - a. Hubungan dengan auditor eksternal;
 - b. Hubungan dengan Komite Audit;
 - c. Hubungan dengan pihak luar lainnya, antara lain dengan Satuan Pengawasan Intern Entitas Anak dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit bersama.

JUMLAH PEGAWAI SATUAN PENGAWAS INTERN

Pada periode tahun 2021, personil SPI Perusahaan berjumlah 102 (seratus dua) orang terdiri dari 9 (sembilan) orang di Perusahaan sebagai *Holding* dan 93 (sembilan puluh tiga) orang di Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Entitas Entity	Jumlah SDM Total HC
 Holding 		
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	9
Entitas Anak Subsidiaries		
2	PT Petrokimia Gresik	14
3	PT Pupuk Kujang	14
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	12
5	PT Pupuk Iskandar Muda	7
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	20
7	PT Rekayasa Industri	15
8	PT Mega Eltra	4
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	2
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas	3
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	2
Jumlah SDM SPI PI Group Total PI Group Internal Audit Personnel		102

3. SVP SPI is structurally responsible to the President Director and functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
4. SPI personnel are responsible directly to the SVP SPI.

Internal and external Internal Audit work relationships are described as follows:

1. Internal Relations
 - a. SVP Internal Audit reports directly to the President Director;
 - b. SVP Internal Audit oversees 2 (two) Supervision Departments, namely:
 - i) Operational and Financial Control;
 - ii) Planning Audits.

The responsibility for implementing each Department is delegated to the relevant Vice President (VP).

2. External Relations
 - a. Relationship with External Auditors;
 - b. Relationship with Audit Committee;
 - c. Relationships with other external parties, including the Internal Audit Unit of the subsidiaries in the form of coordinating the implementation of joint audits.

NUMBER OF INTERNAL AUDIT UNIT EMPLOYEES

In 2021, the Company's Internal Audit personnel was 107 (one hundred and two) people consisting of 9 (nine) people in the Holding Company and 93 (ninety three) people in the Subsidiaries with the following details:

SERTIFIKASI PROFESI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Untuk mendukung peran auditor agar lebih berkompeten dalam mengelola risiko yang ada di Perusahaan, maka Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi auditor yang diberikan secara sistematis dengan dengan mengikutsertakan auditor internal dalam program sertifikasi. Adapun daftar sertifikasi kompetensi personil SPI di PI Grup, sebagai berikut:

No.	Sertifikasi Kompetensi	Jumlah
1	Qualified Internal Audit (QIA)	20
2	Professional Internal Auditor (PIA)	12
3	Chartered Accountant (CA)	8
4	Certified Fraud Examiner (CFE)	2
5	Certified Chief Governance Officer (CCGO)	2
6	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	2
7	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	2
8	Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	1
9	Certified Forensic Auditor (CFrA)	1
10	Certified Risk Management Professional (CRMP)	1

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi personil SPI melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian bidang audit dan bidang lainnya yang dapat menunjang kegiatan pengawasan.

PEDOMAN KERJA: PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pelaksanaan fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh SPI, berpedoman pada standar pelaksanaan fungsi Audit Internal yang berlaku dan kode etik Audit Internal. Piagam SPI revisi terakhir disahkan pada tanggal 30 Desember 2021. Piagam tersebut disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan.

Piagam SPI memuat struktur dan kedudukan Unit Satuan Pengawasan Intern, kualifikasi, ruang lingkup kerja operasional, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal dan Komite Audit, kode etik, serta independensi dan objektivitas Auditor Intern. Piagam SPI menjadi dasar bagi auditor pada Satuan Pengawasan Intern Perusahaan dan menjadi acuan bagi Satuan Pengawasan Intern Anak Perusahaan.

Selain Piagam SPI, auditor internal Perusahaan juga dilengkapi dengan seperangkat pedoman kerja, mekanisme kerja dan supervisi dalam organisasinya, antara lain diatur dalam:

INTERNAL AUDIT UNIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

To support the role of auditors to be more competent in managing the risks that exist in the Company, the Company organizes competency development programs for auditors that is provided systematically by involving internal auditors in the certification program. The list of competency certifications held by SPI personnel in the PI Group is as follows:

The Company is committed to developing the SPI personnel competency through training and expertise certification in auditing and other fields that support the supervisory activities.

GUIDELINES: INTERNAL AUDIT CHARTER

The Internal Audit functions carried out by SPI are guided by the applicable standards for the Internal Audit function and the Internal Audit code of ethics. The last revised Internal Audit Charter was ratified on December 30, 2021. The Charter was ratified by the President Commissioner and President Director of Pupuk Indonesia.

The SPI Charter contains the structure and position of the Internal Audit Unit, qualifications, scope of operational work, authorities, responsibilities, professional standards, relationships with external auditors and the Audit Committee, the code of ethics, as well as the Internal Auditors' independence and objectivity. The SPI Charter forms the basis for the Company's Internal Audit Unit auditors and is a reference for the Subsidiary's Internal Audit Units.

In addition to the Internal Audit Charter, the Company's internal auditors also have a set of work guidelines, and work and supervision mechanisms, including:

Kode Etik-Pedoman-Prosedur-Kebijakan SPI

1. Kode Etik SPI PTPI;
2. Kebijakan Pengawasan Intern PTPI;
 - a. Pedoman:
 - i) Pedoman Umum Audit Internal;
 - ii) Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko;
 - iii) Pedoman Audit Operasional;
 - iv) Pedoman Sistem Pengendalian Intern;
 - v) Pedoman Penyusunan Pelaporan Kegiatan SPI;
 - vi) Pedoman Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas (*Quality Assurance*) SPI;
 - vii) Pedoman Pendampingan Audit Eksternal (*Counterpart*);
 - viii) Pedoman Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi.
 - b. Prosedur:
 - i) Prosedur Audit Internal;
 - ii) Prosedur Pemantauan Status Tindak Lanjut;
 - iii) Prosedur Audit Khusus;
 - iv) Prosedur PKPT;
 - v) Prosedur Kearsipan SPI;
 - vi) Prosedur Audit Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan;
 - vii) Prosedur Evaluasi SPIP;
 - viii) Prosedur Penilaian Mandiri;
 - ix) Prosedur Pengadaan Jasa KAP.
 - c. Buku Ketentuan Lanjutan
 - i) Buku Ketentuan Lanjutan Audit Operasional;
 - ii) Buku Ketentuan Audit Internal Berbasis Risiko;
 - iii) Buku Ketentuan Lanjutan Pendampingan Audit Eksternal (*Counterpart*);
 - iv) Buku Ketentuan Lanjutan Penyusunan Laporan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
 - v) Buku Ketentuan Lanjutan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan;
 - vi) Buku Ketentuan Lanjutan Tata Kelola TI.
 - d. Kebijakan Internal
 - i) Syarat Kompetensi Per Penugasan;
 - ii) Mekanisme *Review* Berjenjang;
 - iii) Jabatan Fungsional;
 - iv) Jenjang Karir SPI;
 - v) Audit Berbasis Komputer;
 - vi) Fungsi Konsultansi;
 - vii) Komunikasi Komite Audit;
 - viii) Pelaporan Informasi Biaya.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra terpercaya dan profesional dalam mendukung pencapaian kinerja unggul Perusahaan.

Internal Audit Code of Conduct-Guidelines-Procedures-Policies

1. PTPI Internal Audit's Code of Conduct
2. PTPI Internal Control Policy;
 - a. Guidelines:
 - i) General Guidelines for Internal Audit;
 - ii) Risk-based Internal Audit Guidelines
 - iii) Operational Audit Guidelines;
 - iv) Internal Control System Guidelines;
 - v) Guidelines for Preparing Internal Audit Activity's Report;
 - vi) Internal Audit Quality Assurance and Improvement Program Guidelines;
 - vii) External Audit Assistance Guidelines (Counterpart);
 - viii) Evaluation of Information Technology Guidelines.
 - b. Procedures:
 - i) Internal Audit Procedure;
 - ii) Monitoring of Follow-up Status Procedure;
 - iii) Special Audit Procedure;
 - iv) Audit Program Procedure;
 - v) Internal Audit Filing Procedure;
 - vi) Internal Control Procedures for Financial Statements;
 - vii) Internal Audit Evaluation Procedure;
 - viii) Self-Assessment Procedure;
 - ix) Public Accountant Service Appointment Procedure.
 - c. Advanced Provision Book:
 - i) Operational Audit Advanced Provision Book;
 - ii) Risk-based Internal Audit Provision Book;
 - iii) Advanced Provision Book on External Audit Assistance (Counterpart);
 - iv) Advanced Provision Book on Preparing Internal Audit Unit's Reports;
 - v) Advanced Provision Book for the Company's Internal Control System;
 - vi) Advanced Provision Book for IT Governance.
 - d. Internal Policy
 - i) Competency Requirement per Assignment;
 - ii) Tiered Review Mechanism;
 - iii) Functional Position;
 - iv) Internal Audit Career Path;
 - v) Computer-based Audit;
 - vi) Consultative Function;
 - vii) Audit Committee Communication;
 - viii) Cost Information Reporting.

Vision and Mission

Vision

To become a trusted and professional partner in supporting the Company's superior performance achievement.

Misi

1. Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pelaksanaan assurance dan konsultasi yang berbasis risiko, objektif dan independen.
2. Meningkatkan harmonisasi dan sinergi fungsi internal audit antara Perusahaan dan Anak Perusahaan serta Eksternal Audit.
3. Meningkatkan kompetensi personil secara berkelanjutan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

PERSYARATAN KEAHLIAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL

SPI merupakan unit kerja yang memiliki fungsi khusus, sehingga perlu adanya standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya seperti kompetensi dalam bidang auditing, manajemen risiko, administrasi, akuntansi & keuangan dan manajemen Perusahaan.

Untuk menghasilkan personil SPI yang kompeten dan menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan PI Grup, maka auditor SPI PTPI harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas yang dijalankan.
4. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal dan manajemen risiko.
6. Menjaga kerahasiaan data/informasi perusahaan terkecuali apabila informasi tersebut harus diungkapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesinya secara terus-menerus.
8. SVP SPI, VP, dan Ketua Tim Audit memiliki sertifikasi audit internal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun berdasarkan Risk That Matter (RTM) konsolidasi, risk register, hasil audit eksternal/internal, Arahan Direksi dan Dewan Komisaris c.q. Komite Audit, usulan unit kerja, serta pertimbangan lainnya yang diperlukan.
2. Melakukan kegiatan assurance yang meliputi audit kepatuhan, audit keuangan, dan audit operasional serta evaluasi atas keekonomisan, efektivitas dan efisiensi di seluruh unit kerja Perusahaan serta Anak Perusahaan dan afiliasi yang bernilai strategis berdasarkan standar yang berlaku.

Mission

1. Provide added value for the Company through the application of risk-based, objective and independent assurance and consulting.
2. Improve the internal audit function harmonization and synergy between the Company and its Subsidiaries, as well as the External Audit.
3. Continuously improve personnel competencies and optimize the use of information technology

PROFESSIONAL SKILLS AND ACCURACY REQUIREMENTS

SPI is a work unit with special functions so certain competency standards must be met, including competency in auditing, risk management, administration, accounting & finance and corporate management.

To develop competent SPI personnel to support the success of the PI Group supervisory function, the PTPI SPI auditors must meet the following qualifications:

1. Have integrity and professional, independent, honest and objective behaviors in carrying out their duties.
2. Have knowledge and experience in technical audits, and disciplines relevant to their field of work.
3. Have knowledge of the laws and regulations relevant to the duties being carried out.
4. Have the ability to effectively interact and communicate both verbally and in writing.
5. Must understand the principles of good corporate governance, internal control and risk management.
6. Must maintain the confidentiality of Company data/information, except when the information must be disclosed based on applicable regulations.
7. Must be willing to continuously improve their knowledge, skills and professional abilities.
8. The SPI SPI, VP, and Head of the Audit Team must have internal audit certification.

DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

The Internal Audit Unit duties and responsibilities, based on the Internal Audit Charter include:

1. Develop and implement the Annual Supervision Work Program (PKPT). PKPT is prepared based on the consolidated Risk That Matter (RTM), risk register, results of external/internal audit, Directives from the Board of Directors and Board of Commissioners through the Audit Committee, work unit proposals, and other necessary considerations.
2. Conduct assurance activities including compliance, financial, and operational audits as well as evaluations of the economy, effectiveness and efficiency of all work units in the Company and its subsidiaries and affiliates with a strategic value based on applicable standards.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan kegiatan konsultasi (advisory services) kepada seluruh unit kerja Perusahaan baik diminta atau tidak diminta untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Oleh karenanya, jasa advis merupakan kegiatan fasilitasi bukan penjaminan, yang meliputi pemberian pendampingan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat. 4. Melakukan evaluasi dan memberikan opini atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Teknologi Informasi 5. Melakukan koordinasi dengan audit eksternal atau pengawasan fungsional lainnya seperti KAP, BPK-RI, BPKP, dan auditor/assessor eksternal lainnya, serta mengkoordinasikan penyediaan data & informasi perusahaan untuk kebutuhan tersebut. 6. Melakukan evaluasi pengembangan sumber daya dan standarisasi infrastruktur SPI. 7. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan audit eksternal serta keputusan dan arahan RUPS Perusahaan oleh Pemegang Saham (KBUMN). 8. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direksi yang relevan. 9. Melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit 10. Sebagai mitra kerja Komite Audit, auditor eksternal, asesor eksternal dan SPI Anak Perusahaan. 11. Melaksanakan penugasan adhoc sesuai permintaan Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 12. Melaksanakan audit khusus berdasarkan pengembangan hasil audit dan permintaan Direksi. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Conduct consulting activities (advisory services) for all work units of the Company, whether requested or not, to provide added value for the Company, and to improve the Company performance without replacing management responsibilities. Therefore, advisory services are non-guarantee activities, but provide assistance on reviewing system development, self-assessment of control and performance, counseling and providing advice. 4. Evaluate and provide opinions on the Internal Control System, Risk Management and Information Technology Governance 5. Coordinate the external audit or other functional supervision by the KAP, BPK-RI, BPKP, and other external auditors/assessors, as well as coordinate the provision of Company data & information as needed. 6. Evaluate resource development and standardization of SPI infrastructure. 7. Monitor the follow-up of internal and external audits results, as well as the decisions and directives from the Company's GMS by the Shareholders (KBUMN). 8. Report the supervisory results to the President Director and relevant Directors. 9. Report the supervisory results to the Board of Commissioners through the Audit Committee 10. Act as a working partner of the Audit Committee, external auditor, external assessor and SPI in the Subsidiaries. 11. Carry out ad hoc assignments as requested by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners. 12. Carry out special audits based on any developing audit results, and requests from the Board of Directors. |
|--|---|

Sedangkan wewenang SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh data, dokumen, informasi dan sumber daya dari Perusahaan serta Anak Perusahaan dan Perusahaan afiliasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit sesuai dengan profesi dan standar audit intern.
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan seluruh proses bisnis dan unit kerja Perusahaan, Anak Perusahaan dan afiliasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Memberikan pendapat, rekomendasi & saran-saran perbaikan kepada Direksi, SEVP, dan para pejabat Kompartemen, Departemen, dan Tim Adhoc Perusahaan serta Anak Perusahaan, baik diminta atau tidak diminta, dalam hal mengamankan harta dan kekayaan korporat.
5. Dapat meminta surat representasi kepada auditee atas keabsahan dan kelengkapan dokumen dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan penugasan pengawasan.

The Internal Audit Unit's authorities based on the Internal Audit Charter are as follows:

1. Have unrestricted access to all data, documents, information and resources in the Company and its Subsidiaries and affiliated companies to enable them to carry out their duties and authorities.
2. Determine the scope, methods, ways, techniques, strategies and audit approaches in accordance with the profession and internal audit standards.
3. Supervise the Company, Subsidiaries and affiliates and work units business processes and activities in accordance with the applicable rules and regulations.
4. Provide opinions, recommendations & suggestions for improvement to the Board of Directors, SEVP, and officials in the Company and Subsidiaries Compartments, Departments, and Adhoc Teams, whether requested or not, to secure the corporate property and assets.
5. Request letters of representation from the auditee on the validity and completeness of the documents and supporting information needed to carry out the supervisory assignment.

6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
 7. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta Unit Kerja Perusahaan.
 8. Dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Unit Kerja di lingkungan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terintegrasi yang dijalankan melalui koordinasi dengan masing-masing SPI Anak Perusahaan yang terkait.
 9. Dapat meminta bekerja sama dan melakukan koordinasi pengawasan dengan SPI Anak Perusahaan dan afiliasi.
 10. Melakukan koordinasi dengan auditor/asesor eksternal.
 11. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai internal perusahaan maupun dari pihak luar perusahaan, dalam rangka pelaksanaan pengawasan
 12. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
 13. Dapat melakukan kegiatan digital forensic di Perusahaan serta Anak Perusahaan dan afiliasi sesuai dengan governance yang berlaku.
6. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
 7. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee and the Company's Work Units.
 8. Coordinate and communicate with the Subsidiaries and Affiliated Companies Board of Commissioners, Audit Committee and Work Units when conducting integrated supervision in coordination with each Subsidiary SPI.
 9. Request cooperation and coordination supervision with SPI Subsidiaries and affiliates.
 10. Coordinate with external auditors/assessors.
 11. Request or receive internal assistance from the Company employees, or from parties outside the company, in the context of supervision
 12. Participate in strategic meetings without voting rights.
 13. Carry out digital forensic activities in the Company and its Subsidiaries and affiliates in accordance with applicable governance.

INDEPENDENSI

Sebagai pemeriksaan internal, SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kebebasan bertindak (independen) secara objektif.

1. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam Perusahaan seperti manajemen dan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum;
3. Dalam pelaksanaan tugas audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun unit kerja yang diperiksa, dengan tetap menjunjung teguh kode etik yang telah ditetapkan.

RAPAT SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, SPI dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara. Rapat rutin strategis Perusahaan yang diikuti oleh SPI antara lain Rapat Direksi & BOD atas Kinerja Bulanan Perusahaan dan Rapat *Monitoring* Bulanan atas Kinerja Anak Perusahaan. Selain rapat rutin strategis Perusahaan, SPI juga melakukan rapat rutin bulanan dengan Komite Audit untuk melaporkan kinerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SPI.

Untuk rapat non rutin strategis Perusahaan yang diikuti SPI antara lain diuraikan sebagai berikut:

INDEPENDENCY

As an internal check, in carrying out its duties and functions SPI has the freedom to act independently and objectively.

1. Not take sides with parties in the Company such as management and Commissioners, both directly and indirectly;
2. Perform audits in accordance with generally accepted internal audit standards and principles;
3. In carrying out the audit duties, they free themselves from all personal interests and those of the work units being examined, by upholding the established code of ethics.

INTERNAL AUDIT MEETINGS

In carrying out its supervisory function, SPI can participate in strategic meetings without voting rights. The Company's routine strategic meetings attended by SPI include the Board of Directors, and Board of Directors Meetings on the Company's Monthly Performance and Monthly Monitoring Meetings on the Performance of Subsidiaries. In addition to the Company's routine strategic meetings, SPI also holds regular monthly meetings with the Audit Committee to report on the performance and activities carried out by SPI.

The Company's non-routine strategic meetings participated in by SPI included:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1	5 Januari 2021 January 5, 2021	Rapat Pemaparan Transformasi Bisnis kepada BPK AKN IV dan VII Business Transformation Presentation Meeting to BPK AKN IV and VII	VP Pengawasan Operasional dan Keuangan VP Operational and Financial Supervision
2	7 Januari 2021 January 7, 2021	FGD Penyusunan <i>Risk Control Self Assessment (RCSA)</i> Risiko RKAP 2021 FGD Preparation of Risk Control Self Assessment (RCSA) 2021 WP&B Risk	Internal SPI Internal SPI
3	25 Januari 2021 January 25, 2021	Rapat pembahasan perjanjian Kerjasama PI-KPK terkait penanganan WBS Meeting to discuss the PI-KPK Cooperation agreement regarding the handling of WBS	Seluruh Internal SPI All Internal SPI
4	4 Februari 2021 February 2, 2021	Rapat rencana pembelian asset Menara kadin milik PT ReKayasa Industri Meeting on the plan to purchase Kadin Tower assets belonging to PT ReKayasa Industri	VP dan Staf Pengawasan Operasional dan Keuangan VP and Staff Operational and Financial Supervision
5	5 Februari 2021 February 5, 2021	Ekspose mediasi penyelesaian Proyek STG dan Boiler antara PSP dan Rekind Exposure mediation of STG and Boiler Project completion between PSP and Rekind	VP Pengawasan Operasional & Keuangan, Staf Perencanaan Pengawasan VP Operational & Financial Supervision, Supervisory Planning Officer
6	16 Februari 2021 February 16, 2021	Ekspose BPK RI dengan Unit Kerja terkait pembahasan pupuk subsidi Exposure of BPK RI with Work Units related to discussion on subsidized fertilizers	VP dan Staf Pengawasan Operasional dan Keuangan VP and Staff Operational and Financial Supervision
7	16 Februari 2021 February 16, 2021	<i>Entry meeting</i> BPKP atas 3 penugasan BPKP entry meeting for 3 assignments	VP dan Staf Pengawasan Operasional dan Keuangan VP and Staff Operational and Financial Supervision
8	17 Februari 2021 February 17, 2021	Rapat - <i>Preliminary Discussion</i> Audit Quantum Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2020 PI Grup (PWC dan BPK) Meeting - Preliminary Discussion Audit Quantum Distribution of Subsidized Fertilizer in 2020 PI Group (PWC and BPK)	Staf Perencanaan Pengawasan Staff Supervision Planning
9	18 Februari 2021 February 18, 2021	Rapat pembahasan Progres Audit dan SA 600 PTPI Meeting to discuss the Audit Progress and SA 600 PTPI	SVP SPI dan VP Perencanaan Pengawasan SVP of SPI and VP Monitoring Planning
10	12 Maret 2021 March 12, 2021	Rapat Koordinasi Rencana Perbaikan Cashflow PT ReKayasa Industri Coordination Meeting of PT ReKayasa Industri's Cashflow Improvement Plan	VP Pengawasan Perencanaan dan Staf Pengawasan Operasional & Keuangan VP Planning Supervision and Operational & Financial Supervision Staff
11	19 Maret 2021 March 19, 2021	Rapat <i>progress</i> audit tahun 2020 KBUMN KBUMN 2020 audit progress meeting	Internal SPI Internal SPI
12	14 April 2021 April 14, 2021	Rapat pembahasan konsep temuan hasil pemeriksaan BPK AKN IV Meeting to discuss the concept of finding the results of the AKN IV BPK examination	VP dan Staf Pengawasan Operasional & Keuangan VP and Staff Operational & Financial Supervision
13	19 Mei 2021 May 19, 2021	Rapat audit laporan keuangan TB 2020 TB 2020 financial report audit meeting	Internal SPI, Akuntansi, dan KAP Internal SPI, Accounting, and KAP
14	25 Mei 2021 May 25, 2021	Rapat dengan KBUMN terkait Laporan Keuangan Meeting with KBUMN regarding Financial Report	Kementerian BUMN, KAP, dan Internal SPI Ministry of BUMN, KAP, and Internal SPI
15	16 Juni 2021 June 16, 2021	Rapat pembahasan Tindak Lanjut rekomendasi BPK RI dengan tim Pemantauan tindak lanjut BPK RI Meeting to discuss the follow-up to BPK RI recommendations for the BPK RI follow-up monitoring team	SPI PI Grup SPI PI Group
16	15 Juli 2021 July 15, 2021	Pembahasan Persiapan Pengadaan Jasa KAP 2021 Discussion on Preparation for Procurement of KAP Services 2021	Internal SPI dan Akuntansi Internal SPI and Accounting
17	6 Agustus 2021 August 6, 2021	Rapat terkait Negosiasi Harga Jasa KAP Meeting related to KAP Service Price Negotiation	Dept. Perencanaan Pengawasan dan Unit Kerja Pengadaan Supervision Planning Dept. and Procurement Work Unit
18	9 Agustus 2021 August 9, 2021	Rapat pengadaan jasa KAP 2021 dengan Komite dan Pengadaan 2021 KAP service procurement meeting with the Committee and Procurement	Komite Audit, Pengadaan dan Dept. Perencanaan Pengawasan Audit Committee, Procurement and Monitoring Planning Dept.
19	1 September 2021 September 1, 2021	Pembahasan Revisi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 Discussion on the Minister of Trade Revised Draft Regulation No. 15 Year 2013	SVP Satuan Pengawasan Intern dan VP Pengawasan Operasional dan Keuangan SVP Internal Audit Unit and VP Operational and Financial Supervision

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
20	19 Oktober 2021 October 19, 2021	Pemaparan Konsep Sentralisasi PI Grup Presentation of the Concept of Centralization of PI Group	Dept. Perencanaan Pengawasan Monitoring Planning Dept.
21	1 November 2021 November 1, 2021	Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan TA 2021 oleh BPK RI AKN VII Entry Meeting Preliminary Examination 2021 FY by BPK RI AKN VII	BPKP, Dept. Pengawasan Operasional dan Keuangan BPKP, Operational and Financial Supervision Dept.
22	25 November 2021 November 25, 2021	Ekspose Kebijakan Trading dengan BPKP Expose Trading Policy with BPKP	Dept. Pengawasan Operasional dan Keuangan Operational and Financial Supervision Dept.
23	2 Desember 2021 December 2, 2021	Rapat <i>Progress</i> Audit Laporan Keuangan TB 2021 dengan Dirkeu, Komite dan KAP TB 2021 Financial Report Audit Progress Meeting with BOC, Committee and KAP	Direktur Keuangan, Komite Audit, KAP, dan Dept. Perencanaan Pengawasan Director of Finance, Audit Committee, KAP, and Monitoring Planning Dept.
24	3 Desember 2021 December 3, 2021	Pembahasan Tindak Lanjut BPK RI tahun 2020 dengan Anper dan Kementan Discussion on the 2020 BPK RI follow-up with Anper and the Ministry of Agriculture	BPK-RI, Anak Perusahaan, Kementan, dan VP Perencanaan Pengawasan BPK-RI, Subsidiaries, Ministry of Agriculture, and VP Supervision Planning
25	28 Desember 2021 December 28, 2021	Rapat koordinasi rencana jual beli gedung kantor Rekind Kalibata Coordination meeting on the sale and purchase of Rekind Kalibata office buildings	VP dan Staf Dept. Pengawasan Operasional dan Keuangan VP and Staff Operational and Financial Supervision Dept.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perusahaan mengikutsertakan Satuan Pengawasan Intern dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program

Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (Orang) Participant (Person)
<i>Exclusive Workshop Strategic KMap Development Periode 2</i> Exclusive Workshop Strategic KMap Development Period 2	PTPI	19 Januari 2021 January 19, 2021	2
<i>Workshop Culture Leader on Boarding Series II</i> PTPI	ACT Consulting	7 Mei 2021 May 7, 2021	1
<i>Workshop Anger Management</i> PTPI	PTPI	9 Juli 2021 July 9, 2021	2
<i>Leaders Talk AKHLAK</i> dengan Tema Kolaboratif Bpk. Nugroho Christijanto	PTPI	2 September 2021 September 2, 2021	2
<i>Knowledge Sharing Business Judgement Rule</i> Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Perusahaan Knowledge Sharing Business Judgment Rule in Corporate Strategic Decision Making	PTPI	15 September 2021 September 15, 2021	1
<i>Webinar Audit Investigasi</i> Investigative Audit Webinar	BPKP	22 September 2021 September 22, 2021	1
Implementasi Sosialisasi WBS Tindak Pidana Korupsi terintegrasi KPK RI dan PTPI Socialization on integrated KPK and PTPI WBS	KPK	30 September 2021 September 30, 2021	3
Pelatihan dan Sertifikasi CGP Tahun 2021 2021 CGP Training and Certification	LSP MKS	26 April - 29 April 2021 April 26 - 29, 2021	1

INTERNAL AUDIT UNIT COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company includes the Internal Audit Unit in competency development activities carried out through training and education with the full funding being the responsibility of the Company. The Internal Audit Unit training and competency improvement activities throughout 2021 is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program

Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (Orang) Participant (Person)
Workshop Anger Management PTPI	PTPI	09 Juli 2021 July 9, 2021	1
Webinar Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage	ERMA	27 September 2021 September 27, 2021	1
Pelatihan COBIT 2019 TKK IT COBIT 2019 TKK IT Training	PROXSIS	07 - 08 Oktober 2021 October 7-8, 2021	3
Sharing Knowledge Pengawasan Pengadaan, Pendistribusian dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di seluruh Indonesia Sharing Knowledge on Supervision of Procurement, Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers throughout Indonesia	Sharing Sessions	19 Oktober 2021 October 19, 2021	2
Pelaksanaan Pupuk Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021 Implementation of Indonesia Quality Improvement (PIQI) 2021	Sharing Session	09 Desember 2021 December 9, 2021	3
Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 Celebration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2021	KPK	10 Desember 2021 December 10, 2021	5
Training Coaching for LDP 2020	DIKLAT	22 Januari 2021 January 22, 2021	1
Living the Grand Why PTPI	ACT	21 Mei 2021 May 21, 2021	1
Pelatihan & Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Level Managerial Managerial Level Qualified Internal Auditor (QIA) Training & Certification	PPIA	26 Juli - 03 Agustus 2021 July 26 - August 3, 2021	1
Seminar Nasional Audit Internal (SNIA) 2021 National Seminar on Internal Audit (SNIA) 2021	YPIA	01 - 02 Desember 2021 December 1 - 2, 2021	2
Inventarisasi Arsip Inaktif dan Arsip Vital Inventory of Inactive Archives and Vital Archives	PTPI	23 Februari 2021 February 23, 2021	1
Sharing Session Risk Indicator, Risk Tolerance dan Risk Appetite Sharing Session Risk Indicator, Risk Tolerance and Risk Appetite	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	17 Maret 2021 March 17, 2021	2
Seminar Work Life Balance KEIKLASAN DALAM BEKERJA	PTPI, OASIS	05 Mei 2021 May 5, 2021	1
Change fertilizer sharing forum	PTPI	03 Agustus 2021 August 3, 2021	1
Sosialisasi Implementasi Knowledge Management System (KMS) Lentera Priode 1 Socialization of the Lentera Period 1 Knowledge Management System (KMS)	PTPI	30 Maret 2021 March 30, 2021	1
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program SaPa PaGi , Program eNPeKa dan Input Picu Meter Periode Oktober 2021 Technical Guidance on the Implementation of the SaPa PaGi Program, the eNPeKa Program and the Input Trigger Meter for the October 2021 Period	PTPI	26 Oktober 2021 October 26, 2021	1
Pelatihan Transformasi Industri 4.0 PI Grup PI Group 4.0 Industry Transformation Training	INDI	30 November - 02 Desember 2021 November 30 - December 2, 2021	1
Webinar AKHLAK dengan Tema KOMPETEN AKHLAK Webinar with COMPETENT Theme	PTPI	16 Desember 2021 December 16, 2021	2
Pelatihan Induksi Karyawan PTPI PTPI Employee Induction Training	PTPI	07 September 2021 September 7, 2021	2
Kelas Bersama Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute PTPI Class with Indonesia Food & Fertilizer Learning Institute PTPI	PTPI	04 November 2021 November 4, 2021	1

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2021

Realisasi kinerja SPI PTPI sebagai *Holding Company* di tahun 2021 melebihi dari rencana pada PKPT 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Ringkasan Realisasi Kinerja Summary of Performance Realization

Uraian Description	Program Audit 2021 Audit Program 2021	Realisasi 2021 Realization of 2021	%
Assurance	16	13	81%
Konsultasi Consultative	2	22	1100%
Pendampingan Accompaniment	15	26	173%

Adapun realisasi kegiatan *assurance* dan konsultasi selama tahun 2021, yaitu:

1. *Joint Audit* atas Pembangunan Pabrik NPK di PT Pupuk Iskandar Muda.
2. *Joint Audit* atas Pengelolaan Piutang Subsidi di PI Grup.
3. *Joint Audit* SPI PTPI bersama dengan SPI PT PIM atas penyaluran distribusi Pupuk Bersubsidi tahun 2021.
4. *Joint Audit* SPI PT PI bersama dengan SPI PT PKC atas Penyaluran dan Distribusi Pupuk Bersubsidi tahun 2021.
5. *Joint Audit* SPI PT PI bersama dengan SPI PT PSP atas Penyaluran dan Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. *Joint Audit* atas Administrasi Perpajakan pada PT Pupuk Kalimantan Timur.
7. Audit Pengelolaan Kegiatan *Agro Solution*.
8. Audit Atas Pengadaan Aplikasi *Learning Management System* dan Pendampingan Konsultan Implementasi *Knowledge Management System*.
9. Audit atas Pengadaan Bahan Baku di PTPI.
10. Evaluasi *Monitoring Tindak Lanjut* LHA SPI PI pada Kompartemen SDM.
11. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP).
12. Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi.
13. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.

RENCANA AUDIT 2022

Perusahaan telah memiliki rencana audit tahun 2022 yang tersusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI PTPI Tahun 2022, yang diuraikan sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT UNIT DUTIES IN 2021

The realization of the performance of PTPI SPI as a Holding Company in 2020 exceeded the plan in 2020 PKPT, with the following details:

The realization of assurance and consultative activities during 2021, included:

1. *Joint Audit* of NPK Factory Construction at PT Pupuk Iskandar Muda.
2. *Joint Audit* on Management of Subsidized Receivables at PI Group.
3. *Joint Audit* of PTPI SPI with PT PIM's SPI for the distribution of Subsidized Fertilizer in 2021.
4. *Joint Audit* of PT PI SPI with PT PKC's SPI for the Distribution and of Subsidized Fertilizer in 2021.
5. *Joint Audit* of SPI PT PI with SPI PT PSP for the Distribution of Subsidized Urea Fertilizer in South Sumatra, Central Java and Yogyakarta Special Region.
6. *Joint Audit* on Tax Administration at PT Pupuk Kalimantan Timur.
7. *Agro Solution* Activity Management Audit.
8. Audit on Procurement of Learning Management System Application and Consultative Assistance of Knowledge Management System Implementation.
9. Audit of Raw Material Procurement at PTPI.
10. Evaluation of Follow-up Monitoring of LHA SPI PI in the HC Compartment.
11. Evaluation of the Company's Internal Control System (SPIP).
12. Evaluation of Information Technology Governance.
13. Evaluation of Risk Management Implementation.

AUDIT PLAN FOR 2022

The Company's audit plan for 2022 is structured in the SPI PTPI 2022 Annual Supervision Work Program (PKPT), which is described as follows:

Uraian Description	Rencana 2022 2022 Plan
Assurance	17
Konsultasi Consultative	5
Pendampingan Accompaniment	12

Pemilihan objek audit mempertimbangkan risiko-risiko perusahaan, hasil audit/evaluasi yang lalu, Arahan Komisaris dan/atau Direksi serta sumber daya yang ada, maka objek audit yang dipilih dalam program audit tahun 2022 sebagai berikut:

1. Internal PTPI
 - a. Audit Kegiatan Pemasaran Komersil.
 - b. Audit Pengelolaan Uang Muka di PTPI.
 - c. Evaluasi Penerapan *Joint Cost* Anak Perusahaan Pupuk oleh PTPI.
 - d. Audit Pengadaan Barang dan Jasa.
 - e. Audit Pengelolaan Bahan Baku dan Persediaan di Pergudangan Cikampek.
 - f. Audit Pengelolaan SDM PTPI.
 - g. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.
 - h. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.
 - i. Evaluasi Tata Kelola IT.
2. *Joint Audit* dengan Anak Perusahaan
 - a. *Joint Audit* PSO Wilayah PKG dan Peralihan Wilayah Baru dari PKT.
 - b. *Joint Audit* PSO Wilayah PSP dan Peralihan Wilayah Baru dari PKT.
 - c. *Joint Audit* Administrasi Perpajakan atas *Project Rekind*.
 - d. *Joint Audit* atas Administrasi Perpajakan pada PIM.
 - e. *Joint Audit* Optimalisasi Pengelolaan Aset PI Group.
 - f. *Joint Audit* penerapan PSAK 72.
 - g. *Peer Review* Internal Audit Capability Model (IACM) PI Grup.

Sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi program kegiatan SPI di PI Grup, pada tahun 2022 PTPI menitipkan beberapa objek pemeriksaan di dalam PKPT masing-masing SPI Anak Perusahaan. Objek pemeriksaan yang dititipkan dalam PKPT SPI Anak Perusahaan.

Tahun 2022, SPI merencanakan 5 (lima) objek konsultasi yakni:

1. Konsultasi Penjualan Aset Rekind ke PTPI.
2. Konsultasi Penghapusbukuan/Pengelolaan Aset Tetap PI Grup di PSP.
3. Konsultasi atas proyek-proyek PI Group.
4. Konsultasi Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Audit BPK di PKC.
5. Konsultasi Penghapusbukuan/ Pengelolaan Aset Tetap PI Group.

The audit objects selected take into account the Company's risks, the results of previous audits/evaluations, the directives from the Commissioners and/or Directors as well as existing resources, the audit objects selected for the 2022 audit program are as follows:

1. Internal PTPI
 - a. Commercial Marketing Activities Audit.
 - b. Advances Management Audit at PI.
 - c. Evaluation of Subsidiary Application of Joint Cost Fertilizer by PI.
 - d. Goods and Services Procurement Audit.
 - e. Raw Materials and Inventory Management in Cikampek Warehousing Audit.
 - f. PI HC Management Audit.
 - g. Evaluation of the Company's Internal Control System.
 - h. Evaluation of Risk Management Implementation.
 - i. IT Governance Evaluation.
2. Joint Audits with Subsidiaries
 - a. Joint Audit PSO PKG Region and Transition of New Territories from PKT.
 - b. Joint Audit PSO PSP Region and New Territories Transition from PKT.
 - c. Joint Audit of Tax Administration on Project Rekind.
 - d. Joint Audit on Tax Administration at PIM.
 - e. Joint Audit Optimization of PI Group Asset Management.
 - f. Joint Audit of PSAK 72 implementation.
 - g. Peer Review of the PI Group's Internal Audit Capability Model (IACM).

in an effort to increase the synergy of the SPI program activities in the PI Group, in 2022 PT Pupuk Indonesia (Persero) entrusted several inspection objects in the PKPT to each SPI Subsidiary. The inspection objects entrusted to the Subsidiary's PKPT.

In 2022, SPI plans 5 (five) consultancy objects, including:

1. Rekind Asset Sales to PI Consultancy.
2. Write-off/Fixed Asset Management Consultancy for PI Group in PSP.
3. Consultancy on PI Group projects.
4. Consultancy on the Completion of Follow-up to the BPK Audit results at PKC.
5. Consultancy on PI Group Write-off/Fixed Asset Management.

Objek konsultasi lainnya juga dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan dari unit kerja di Perusahaan, sumber daya yang ada dan tingkat urgensi perbaikan yang perlu segera dilakukan oleh PTPI dan/atau PI Grup.

Kegiatan pendampingan/*Counterpart* atas aktivitas audit/*review* pihak eksternal: Komite Audit, KAP, BPKP, BPK RI, Itjen Kementan, Itjen Kemenkeu, dan BPPT. Selain melakukan fungsi *assurance*, konsultasi dan pendampingan, adapun kegiatan pengembangan dan penguatan infrastruktur yang dikerjakan oleh SPI pada tahun 2022 untuk mendukung pencapaian visi misi perusahaan pada umumnya yaitu:

1. Penyusunan Standar Prosedur Evaluasi Penghapusbukuan Aset oleh SPI PI Grup.
2. Penyusunan Prosedur *Joint Audit*.
3. Pengembangan dan Implementasi *Data Analytics Tools*.
4. Penyempurnaan Prosedur Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.
5. Penyusunan Prosedur Konsultasi.
6. Penyusunan *Tax Compliance Checklist* SPI PI Grup.

Other consultative objects will also be carried out after considering requests from work units in the Company, available resources and the level of urgency for repairs that need to be immediately carried out by PTPI and/or PI Group.

Assistance/*counterpart* activities for external audit/*review* activities: Audit Committee, KAP, BPKP, BPK RI, Ministry of Agriculture Inspector General, Ministry of Finance Inspector General, and BPPT. In addition to carrying out *assurance*, consultative and mentoring functions, the infrastructure development and strengthening activities carried out by SPI in 2022 to support the achievement of the Company's vision and mission in general are:

1. Preparation of Standard Procedures for Evaluation of Asset Write-off by SPI PI Group.
2. Preparation of Joint Audit Procedures.
3. Development and Implementation of Data Analytics Tools.
4. Improvement of the Risk Management Implementation Evaluation Procedures.
5. Preparation of Consultancy Procedures.
6. Preparation of the PI Group's SPI Tax Compliance Checklist.

AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK

EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku dan memiliki tujuan untuk menyatakan pendapat, dalam semua hal yang material, apakah laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Anggota *Holding* sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Dalam hal ini, Auditor Eksternal tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan terhadap SAK di Indonesia.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (BapepamLK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan;
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI;

As part of the internal control system, an external audit is conducted by a Public Accounting Firm that meets the requirements of applicable laws and regulations and has the objective of expressing an opinion, in all material respects, whether the consolidated financial statements of the Company and its Holding Members are in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

In this case, the External Auditors are not allowed to have a conflict of interest with the Company to ensure their independence and quality of the audit results. The External Auditors are responsible for submitting an opinion on the conformity of the Company's Financial Statements with Indonesian SAK.

COMPLIANCE WITH INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD

Management is responsible for the presentation of the Company's financial statements, in compliance with SAK as determined by the Indonesian Institute of Accountants (IIA), and the Decision of the Chairman of the Financial Institution Capital Market Supervisory Agency (BapepamLK), which is now the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Number VIII.G.7, Attachment to Decree Number KEP-347/BL/2012, dated 25 June 2012 concerning Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements by Issuers or Public Companies.

EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS

1. Audits of the Company's financial statements are conducted in accordance with the professional standards of the Public Accountant that cover all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances;
2. The audits include testing and evaluating the internal control system, as well as checking, on the basis of testing, supporting evidence for the amounts and disclosures in the financial statements. The audits will also include an assessment of the accounting principles used, and significant estimates made by management, as well as an evaluation of the financial statements overall presentation in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI;

3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan;
4. Audit mengandung risiko inherent bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen;
5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.

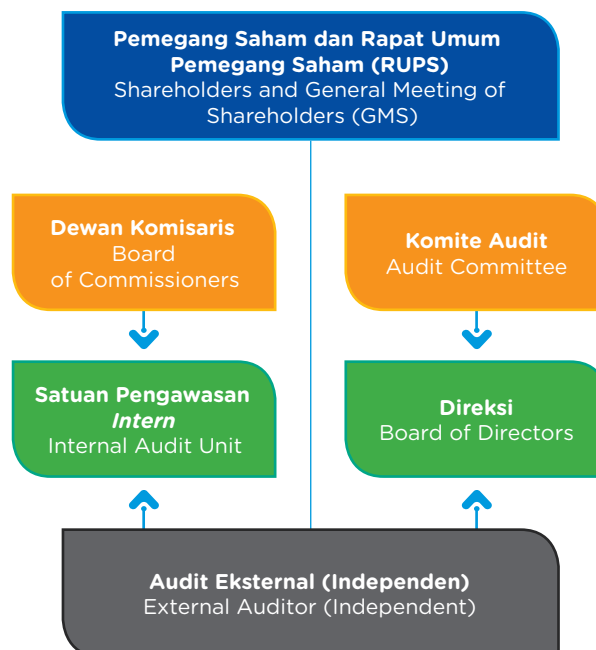
Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

3. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also holds question and answer sessions with the Management regarding management statements presented in the financial statements;
4. Audits reveal inherent risks if there are material errors and irregularities. If there are any, the KAP will submit them to the management;
5. Management approves the KAP's examination work paper on the Company for review by the relevant agency or authority.

The audit is carried out based on the Professional Standards of Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Indonesian Supreme Audit Agency (BPK).

Hubungan Auditor Eksternal dengan Organ Internal Perusahaan

The Relationship of External Auditor with Company's Internal Bodies



Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan Auditor Eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan.

Shareholders through the GMS have the authority to appoint an External Auditor to conduct audits of the Company's financial statements.

Dalam pelaksanaan audit, Perusahaan selalu berupaya menciptakan komunikasi yang efektif antara Kantor Akuntan Publik dan manajemen PTPI, Entitas Anak, dan beberapa Cucu Perusahaan melalui aktivitas koordinasi yang mencakup kegiatan Eksternal Auditor yang diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui komunikasi seluruh unit kerja terkait dan melaksanakan pertemuan secara berkala, pendampingan ke unit kerja lainnya dalam Perusahaan dan SPI Entitas Anak, guna membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi Perusahaan dan KAP. Di samping itu, SPI PTPI juga bertanggung jawab membantu Komite Audit PTPI dalam melakukan evaluasi atas kinerja Kantor Akuntan Publik yang meliputi antara lain aspek pemahaman atas isu-isu yang dihadapi oleh Perusahaan.

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2021 didasarkan pada Keputusan RUPS KBUMN tanggal 30 Juni 2021 dengan berpedoman pada Ketentuan OJK No:13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Adapun kronologis proses penetapan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai auditor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja KAP Tahun Buku 2020 selanjutnya memberikan masukan dan usulan penetapan KAP kepada Pemegang Saham;
2. Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tersebut, Dewan Komisaris PTPI meminta kepada Direksi PTPI untuk menyiapkan tim Pengadaan Bersama Jasa Akuntan Publik Tahun Buku 2021 yang akan membantu proses penunjukan KAP;
3. Penunjukan KAP di Entitas Anak Perusahaan ditetapkan dalam RUPS masing-masing Entitas;
4. Proses pengadaan KAP dilakukan secara bersama untuk seluruh Entitas PI Grup;
5. Dewan Komisaris PTPI merumuskan dan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris untuk kebutuhan pelaksanaan penunjukan KAP di lingkungan PI Grup. Surat Keputusan tersebut menetapkan Tim Penanggung jawab dan Tim Pelaksanaan penetapan KAP yang melibatkan perangkat Dewan Komisaris di PI dan Entitas Anak;

When conducting audits, the Company always seeks to create effective communication between the Public Accounting Firm and the Management of PTPI, Subsidiaries, and other second-tier Subsidiaries by coordinating activities that include the External Auditor, which are expected to achieve comprehensive and optimal audit results.

Coordination is carried out via communication between all relevant work units, and by holding regular meetings, assistance to other work units within the Company and Subsidiaries' SPI, to discuss matters considered important to the Company and KAP. In addition, the PTPI SPI is also responsible for assisting the Pupuk Indonesia Audit Committee in evaluating the performance of the Public Accounting Firm including aspects of understanding the issues faced by the Company.

MECHANISM FOR APPOINTING PUBLIC ACCOUNTANT

The appointment of the Public Accounting Firm of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners to carry out an Audit of the Company's Consolidated Financial Statements, Financial Reports on the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK), and Other Reports for the 2021 Fiscal Year was based on the KBUMN GMS Decision on June 30, 2021, in line with OJK Regulation No:13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firms in Financial Services Activities.

The chronology for determining the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as the external auditor was as follows:

1. The Board of Commissioners evaluated the KAP performance for Fiscal Year 2020 and then provided input and proposals for determining the KAP to Shareholders;
2. Based on the results of the Annual GMS, the Board of Commissioners of PTPI requested the Board of Directors of PTPI prepare a Joint Procurement team for Public Accountant Services for the Fiscal Year 2021 to assist in the process of appointing KAP;
3. The appointment of KAP in the Subsidiaries was determined in the GMS of each Entity;
4. The KAP procurement process was carried out jointly for all PI Group Entities;
5. The Board of Commissioners of PTPI formulated and issued a Board of Commissioners Decree for the appointment of KAP within the PI Group. The Decree stipulated the Responsible Team and the Implementation Team for the determination of KAP, which involved the Board of Commissioners at PI and Subsidiaries;

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Pelaksanaan Audit ditandatangani sesuai prosedur yang ditetapkan di dalam prosedur penunjukan KAP yang diatur di dalam SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

6. The Work Start Order (SPMK) and the Audit Implementation Contract were signed according to the procedures set out in the KAP appointment procedure as stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris PTPI No: S-063/Kom/PIHC/IX/2021 tanggal 13 September 2021, Perusahaan telah menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan Akuntan Publik Toto Harsono untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Tahun Buku 2021. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

PUBLIC ACCOUNTANT FIRM

Based on the PTPI Board of Commissioners Letter No: S-063/Kom/PIHC/IX/2021 dated September 13, 2021, the Company appointed and established the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, and Public Accountant Toto Harsono, to audit the Company's Consolidation Financial Statements for Fiscal Year 2021. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor must not have a conflict of interest with the Company.

Akuntan Publik Tahun 2021 Public Accountants in 2021

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	: Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Akuntan Accountant	: Toto Harsono
Tahun Audit Audit Year	: Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021
Periode Penugasan Assignment Period	: 20 September 2021 September 20, 2021
Jasa Services	: <ul style="list-style-type: none"> Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (PI Grup) Tahun Buku 2021. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2021. Audit the Consolidated Financial Statements of PI, its Subsidiaries and their Subsidiaries (PI Group) for the Fiscal Year 2021. Audit the Financial Report for PTPI UMK Funding Program for Fiscal Year 2021.
Jasa Lainnya Other Services	: <ul style="list-style-type: none"> Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan. Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan. Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris. Management Letter. Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN. Compliance with Laws and Regulations and Internal Control Audit. Review of the Company's Performance Evaluation Report. Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. Review of the Follow-up Evaluation Report Status concerning directives from the Company's GMS and the Board of Commissioners. Management Letters. Review of the Preparation for Compiling Aggregated Financial Information for the Ministry of SOEs.
Biaya Fee	: Rp21.350.000.000

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir

PTPI's External Auditors for the last 5 years

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya Fee
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Izin: 241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Permit Number : 241/KM.1/2015	Toto Harsono No. Izin: AP.1122 Toto Harsono Permit Number: AP.1122	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified, in all material aspects	<p>Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (PI Grup) Tahun Buku 2021. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2021. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan. Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan. Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris. Management Letter. Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN. <p>The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> Audit of the Consolidated Financial Statements of PTPI, its Subsidiaries and Subsidiaries (PI Group) for the 2021 Fiscal Year. Audit of Financial Report of PTPI UMK Funding Program for Fiscal Year 2021. Compliance Audit with Legislation and Internal Control. Review of the Company's Performance Evaluation Report. Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. Review of the Follow-up Evaluation Report Status concerning directives from the Company's GMS and the Board of Commissioners. Management Letters. Review of the Preparation for Compiling Aggregated Financial Information for the Ministry of SOEs. 	Rp21.350.000.000

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir
PTPI's External Auditors for the last 5 years

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya Fee
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners. Permit Number: KEP-241/KM.1/2015	Toto Harsono No. Izin: AP.1122 Toto Harsono Permit Number: AP.1122	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified, in all material aspects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Audit Laporan Keuangan; • Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal; • Reviu Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI (<i>Key Performance Indicator</i>); • Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris; • <i>Management Letter</i> The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: <ul style="list-style-type: none"> • Audit of Financial Statements; • Review of Company Performance Evaluation Report; • Compliance Audit of Legislation and Internal Control; • Review of KPI (Key Performance Indicator) Achievement Level Assessment Reports; • Audit of Financial Statements of the Partnership and Community Development Programs; • Review Report on the Evaluation of the Status of Follow-Up Directions and GMS Decisions; • Management Letters. 	Rp19.500.000.000

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir

PTPI's External Auditors for the last 5 years

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya Fee
2019	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: KMK No. 477/KM.1/2015 KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners. Permit Number: KMK No. 477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501 Rudi Hartono Purba Permit Number: AP.0501	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified, in all material aspects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Audit Laporan Keuangan; • Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal; • Reviu Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI (<i>Key Performance Indicator</i>); • Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris; • <i>Management Letter</i>. The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: <ul style="list-style-type: none"> • Audit of Financial Statements; • Review of Company Performance Evaluation Report; • Compliance Audit of Legislation and Internal Control; • Review of KPI (Key Performance Indicator) Achievement Level Assessment Reports; • Audit of Financial Statements of the Partnership and Community Development Programs; • Review Report on the Evaluation of the Status of Follow-Up Directions and GMS Decisions; • Management Letters. 	Rp5.925.881.000

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir
PTPI's External Auditors for the last 5 years

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya Fee
2018	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: KMK No. 477/KM.1/2015 KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners. Permit Number: KMK No. 477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501 Rudi Hartono Purba Permit Number: AP.0501	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified, in all material aspects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Audit Laporan Keuangan; • Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal; • Reviu Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI (<i>Key Performance Indicator</i>); • Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; • Reviu Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan dan Keputusan RUPS; • <i>Management Letter</i> The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: <ul style="list-style-type: none"> • Audit of Financial Statements; • Review of Company Performance Evaluation Report; • Compliance Audit of Legislation and Internal Control; • Review of KPI (Key Performance Indicator) Achievement Level Assessment Reports; • Audit of Financial Statements of the Partnership and Community Development Programs; • Review Report on the Evaluation of the Status of Follow-Up Directions and GMS Decisions; • Management Letters. 	Rp5.980.000.000

Auditor Eksternal PTPI 5 Tahun Terakhir

PTPI's External Auditors for the last 5 years

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya Fee
2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No: KEP-241/KM.1/2015 KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners. Permit Number: KEP-241/KM.1/2015	Yanto, SE AK.,M. Ak., CPA No. Izin: AP.0241 Yanto, SE AK.,M. Ak., CPA Permit Number: AP.0241	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified, in all material aspects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Audit Laporan Keuangan; Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal; Reviu Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI (<i>Key Performance Indicator</i>); Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; Reviu Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan dan Keputusan RUPS; <i>Management Letter</i> The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: <ul style="list-style-type: none"> Audit of Financial Statements; Review of Company Performance Evaluation Report; Compliance Audit of Legislation and Internal Control; Review of KPI (Key Performance Indicator) Achievement Level Assessment Reports; Audit of Financial Statements of the Partnership and Community Development Programs; Review Report on the Evaluation of the Status of Follow-Up Directions and GMS Decisions; Management Letters. 	Rp7.788.000.000

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Perusahaan menerapkan Sistem Pengendalian Internal untuk membantu manajemen meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, dan memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan. Selain itu, pengendalian internal dibangun untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Entitas Anak guna memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki pedoman umum Sistem Pengendalian Internal melalui Dokumen No. PI-SPIPR-007 tanggal 29 Desember 2017 tentang Prosedur Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP) yang telah disahkan bersama-sama oleh Direktur Utama, Direktur Keuangan, SVP Satuan Pengawasan Intern dan VP Pengawasan Keuangan. Pedoman ini memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkup Perusahaan yang merupakan prosedur dengan tujuan untuk mengatur dan menjelaskan rangkaian aktivitas pelaksanaan evaluasi penerapan SPIP dan menilai tingkat kecukupan efektivitas penerapannya. Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian asersi mengenai efektivitas pengendalian internal dan memberikan keyakinan kepada *Stakeholder* lain bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah cukup memadai dalam mencapai tujuan. Prosedur ini juga menjelaskan langkah-langkah dan tahapan dalam mengevaluasi penerapan SPIP oleh Satuan Pengawasan Intern Perusahaan yang melingkupi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

The Company has established an Internal Control System to assist management in improving the Company's compliance with applicable laws and regulations, ensuring the availability of correct, complete, and timely financial reports and management reports, and meeting the efficiency and effectiveness of the Company's business activities. In addition, internal control was developed to improve the integrated control system, both between the Company and its Subsidiaries to ensure that operational activities have been carried out properly, and can increase added value for the Company through the effective implementation of risk management and the principles of Good Corporate Governance.

THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM GUIDELINES

The Company has general guidelines for the Internal Control System through Document Number PI-SPI-PR-007 dated 29 December 2017 regarding Evaluation Procedures for the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP) which was jointly approved by the President Director, Finance Director, SVP Internal Audit and VP Financial Audit. This guideline provides a clear picture of the implementation of the Internal Control System in the scope of the Company which is a procedure with the aim of regulating and explaining a series of activities implementing the evaluation of SPIP implementation and assessing the adequacy of the effectiveness of its implementation. Evaluation of the implementation of the Company's Internal Control System is carried out to provide confidence to the Board of Directors in providing assertions regarding the effectiveness of internal control and to provide confidence to other Stakeholders that the implementation of the Company's Internal Control System is sufficient in achieving its objectives. This procedure also explains the steps and stages in evaluating the application of SPIP by the Company's Internal Control Unit which covers everything from preparation, implementation, and reporting activities.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERUSAHAAN DAN KESESUAIAN TERHADAP FRAMEWORK INTERNASIONAL

Sistem Pengendalian Intern Perusahaan telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) yang dipublikasikan pada tahun 2013 berisikan 5 komponen pengendalian internal, sebagai pengembangan dari COSO-*Internal Control Framework* yang dipublikasikan pada tahun 1992.

Adapun kelima komponen pengendalian internal tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu perusahaan dan mempengaruhi kesadaran personal tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh elemen perusahaan.

Terdapat 5 (lima) prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam Perusahaan untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu:

- a. Direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika;
 - b. Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal;
 - c. Manajemen dengan pengawasan Direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan;
 - d. Perusahaan menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan;
 - e. Perusahaan meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan.
- ### 2. Penilaian Risiko
- Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko adalah suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko adalah sebagai berikut:

THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM AND COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL FRAMEWORK

The Company's Internal Control System is in accordance with the *Internal Control Integrated Framework* developed by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) published in 2013 containing 5 components of internal control, as a development of the COSO-*Internal Control Framework* published in 1992.

The five internal control components are:

1. Control Environment

The control environment creates an atmosphere of control within a Company and influences personal awareness about control. The control environment is the foundation for all internal control components that shape discipline and structure. The control environment is defined as a set of standards, processes and structures that provide the basis for carrying out internal control in all elements of the Company.

To support the control environment, 5 (five) principles must be upheld or implemented in the Company, namely:

- a. The Board of Directors, Management and other personnel must show commitment to integrity and ethical values;
 - b. The Board of Directors must show their independence from Management when supervising the development and performance of internal controls;
 - c. Management, with the Board of Directors' supervision, establishes the structure, reporting channels, authorities and responsibilities for pursuing its goals;
 - d. The Company shows a commitment to attract, develop and retain competent individuals in line with its goals;
 - e. The Company ensures individuals are responsible for their internal control duties and responsibilities in achieving their goals.
- ### 2. Risk Assessment
- Risk assessment is a dynamic and interactive process for identifying and assessing the risk of achieving objectives. Risk is the possibility that an event will take place and affect the achievement of the Company's goals. The principles to support the risk assessment are as follows:

- a. Perusahaan menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan;
 - b. Perusahaan mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola;
 - c. Perusahaan mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan;
 - d. Perusahaan mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.
3. **Aktivitas Pengendalian**
Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. Prinsip-prinsip dalam perusahaan yang mendukung aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut:
- a. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima;
 - b. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan;
 - c. Perusahaan mendistribusikan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.
4. **Informasi dan Komunikasi Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal Terdapat 3 (tiga) prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu:**
- a. Perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal;
 - b. Perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal;
 - c. Perusahaan berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.
5. **Aktivitas Pemantauan**
Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk, baik yang sifatnya
- a. The Company establishes goals with sufficient clarity to enable risk identification and assessment related to the goals;
 - b. The Company identifies the risks for achieving the goals across all entities, and risk analysis as the basis for determining how risks should be managed;
 - c. The Company considers the potential for fraud in assessing risks related to the goals achievement;
 - d. The Company identifies and assesses changes that can significantly affect the internal control system.
3. **Control Activities**
Control activities are actions established through policies and procedures that help ensure that management directives to reduce risk in the achievement of goals are carried out. Control activities include authorization, verification, reconciliation, analysis, work performance, maintaining the security of Company assets and separation of functions. The principles to support the control activities are as follows:
- a. The Company selects and develops control activities that assist in mitigating target achievement risks at an acceptable stage;
 - b. The Company selects and develops general control activities for the technology used to support the goals achievement;
 - c. The Company distributes control activities through policies that determine what is expected, and the procedures to implement the policies.
4. **Information and Communication**
The information required by management is relevant and quality information both from internal and external sources and information is used to support the functions of other components of internal control. There are 3 (three) principles that support the internal control's information and communication components, namely:
- a. The Company obtains or produces and uses quality and relevant information to support the internal control function;
 - b. The Company communicates the information internally, including the purpose and responsibilities of internal control to support the internal control function;
 - c. The Company communicates with internal parties regarding matters affecting the internal control function.
5. **Monitoring Activities**
Monitoring activities involves several forms of evaluation that are continuous, separate or a combination of both,

berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya, yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi.

Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau Manajemen dan Direksi, dan kekurangan-kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada Manajemen dan Direksi.

PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERKAIT KEGIATAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021, SPI telah melakukan kegiatan audit, evaluasi, *review* dan konsultasi di unit-unit Perusahaan dan Anak Perusahaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini bagian Satuan Pengawasan Intern sub Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern Tahun 2021.

HASIL EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) mencakup 5 (lima) komponen sistem pengendalian internal perusahaan yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan telah dilaksanakan, dengan terbitnya Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan No: 26/SPI/LHE-23/PKPT-IP/XII/2021.

Evaluasi atas penerapan sistem pengendalian internal dilakukan dengan menggunakan *scorecard* yang mengacu kepada referensi dan ketentuan dari Sistem Pengendalian Internal yang dipublikasikan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yaitu *COSO-Internal Control Framework*.

which are used to ascertain whether each of the five internal control components affects the functions within each existing and functional component.

The findings are evaluated against the criteria set by the policy makers, recognized standard-setting institutions or Management and the Board of Directors, and any deficiencies found are communicated to Management and the Board of Directors.

CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM RELATED TO FINANCIAL AND OPERATIONAL ACTIVITIES

In accordance with the 2021 Annual Supervision Work Program (PKPT), SPI has carried out audit, evaluation, review and consultancy activities in the units of the Company and its Subsidiaries as described in this Annual Report section of the Internal Audit Unit sub Implementation of the 2021 Internal Audit Unit Tasks.

EVALUATION RESULTS OF THE IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's Internal Control System (SPIP) implementation evaluation covering the Company's 5 (five) internal control system components: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring, has been carried out and reported in the Company's Internal Control System Implementation Evaluation Results Report No: 26/SPI/LHE-23/PKPT-IP/XII/2021.

The internal control system implementation evaluation is carried out using a scorecard that refers to the Internal Control System's references and provisions published by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), namely the *COSO-Internal Control Framework*.

Hasil evaluasi penerapan sistem pengendalian internal di PTPI menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya dengan perolehan skor sebesar 91,22 serta mendapat predikat **“Sangat Baik”** dibandingkan dengan skor tahun 2020 sebesar 90,50 dengan predikat Sangat Baik. Dengan demikian, sistem pengendalian internal telah distandarisasi dan telah dievaluasi secara periodik.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan terus berupaya menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan PTPI. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengendalian internal, Manajemen PTPI melakukan evaluasi dengan cara, antara lain:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*),
2. Penilaian risiko (*risk assessment*),
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*),
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan
5. Pemantauan (*monitoring*).

Dari hasil evaluasi tahunan tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern di Perusahaan selama tahun 2021 telah **Sangat Baik**.

The evaluation results of the PTPI internal control system showed an increase from the previous year with a score of 91.22 and a predicate of **“Excellent”** compared to the 2020 score of 90.50 with the predicate Excellent, meaning the internal control system has been standardized and has been evaluated periodically.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company continues to implement an effective Internal Control System by involving the Board of Commissioners, Board of Directors, and all PTPI Personnel. To determine the effectiveness of internal control activities, PTPI Management conducts evaluations in the following ways:

1. Control environment,
2. Risk assessment,
3. Control activities
4. Information and communication, and
5. Monitoring.

The results of the annual evaluation shows that the Company's Internal Control System during 2021 has been **Excellent**.

MANAJEMEN RISIKO

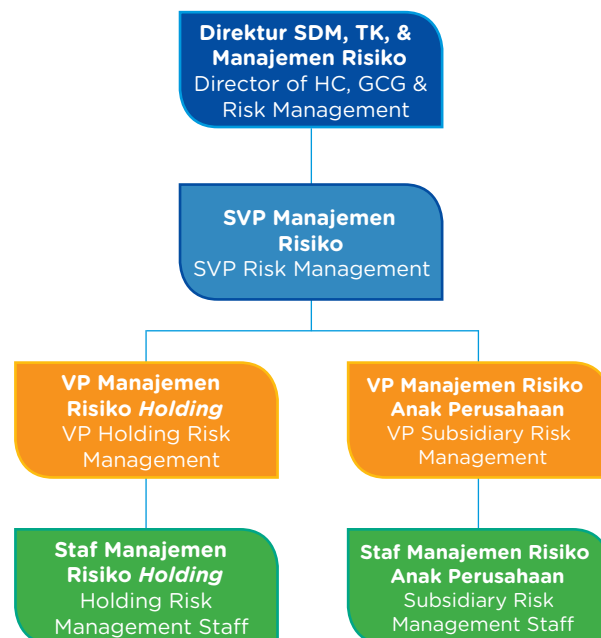
RISK MANAGEMENT

Pengelolaan fungsi Manajemen Risiko dilakukan oleh Kompartemen Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang *Senior Vice President (SVP)* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta berkoordinasi dengan Direktur Keuangan & Investasi sesuai SK/DIR/004/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi PTPI Nomor: SK/DIR/065/2020 Tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/062/2020. Sejalan dengan perkembangan usaha dan strategi bisnis Perusahaan dilakukan penyesuaian Struktur Organisasi dimana Fungsi Manajemen Risiko berada di bawah koordinasi Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko sesuai SK Direksi PT PI No: 082/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi PTPI.

The Risk Management function is carried out by the Risk Management Compartment led by a Senior Vice President (SVP) who reports directly to the President Director and coordinates with the Director of Finance & Investment in accordance with SK/DIR/004/2021 dated January 7, 2021 concerning Refinement of the PTPI Board of Directors Decree Number: SK/DIR/065/2020 concerning Refinement of the Board of Directors Decree Number: SK/DIR/062/2020. In line with the Company's business development and business strategy, adjustments were made to the Organizational Structure where the Risk Management Function is under the coordination of the Director of HC, Governance, and Risk Management in accordance with the PT PI Board of Directors Decree No: 082/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021 concerning Organizational Structure of PTPI.

ORGANISASI KOMPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMPARTMENT ORGANIZATION



Ahmad Diponegoro

SVP Manajemen Risiko SVP Risk Management

Warga Negara Nationality	: Indonesia Indonesian
Usia Age	: 46 tahun 46 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place, Date of Birth	: Bandung, 25 Juni 1975 Bandung, June 25, 1975
Domisili Domicile	: Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: SK/DIR/015/2021
Periode Jabatan Term of Office	: 2020-sekarang 2020-present
Pendidikan Education	: <ul style="list-style-type: none"> S-1 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (1998); S-2 Informasi Manajemen Tilburg University (2006). Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Institut Teknologi Bandung 1998 Master's Degree in Management Information from Tilburg University 2006
Pengalaman Kerja Work Experience	: <ul style="list-style-type: none"> 3D <i>Integrated Design</i> (2001-2007); ICT <i>Operation Manager</i> (2007-2020); Corp <i>Development Manager</i> (2010-2012); AVP <i>Corporate Strategy</i> (2012-2017); VP <i>Corporate Secretary</i> PT Rekayasa Industri (2017-2019); SVP <i>Corporate Strategy & Investment</i> PT Rekayasa Industri (2019-2020); Kepala Pembelajaran dan Manajemen Pengetahuan PTPI (2020); Senior <i>Project Manager</i> Implementasi Budaya Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020); SVP Tata Kelola Korporasi PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020); SVP Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero)(2020-sekarang). 3D <i>Integrated Design</i>, 2001-2007. ICT <i>Operation Manager</i>, 2007-2020. Corp <i>Development Manager</i>, 2010-2012. AVP <i>Corporate Strategy</i>, 2012-2017. VP <i>Corporate Secretary</i> of PT Rekayasa Industri, 2017-2019, SVP <i>Corporate Strategy & Investment</i> PT Rekayasa Industri, 2019-2020. Head of Learning and Knowledge Management at PTPI, 2020. Senior <i>Project Manager</i> for the Implementation of Corporate Culture at PT Pupuk Indonesia (Persero), 2020. SVP <i>Corporate Governance</i> at PT Pupuk Indonesia (Persero), 2020. SVP <i>Risk Management</i> at PT Pupuk Indonesia (Persero), 2020-present

Hingga akhir Desember 2021, jumlah karyawan yang tergabung dalam Kompartemen Manajemen Risiko sebanyak 9 orang.

The end of December 2021, the number of employees who are members of the Risk Management Compartment is 9 people.

Fungsi Function	Jumlah Number
SVP Manajemen Risiko SVP Risk Management	1
VP Manajemen Risiko <i> Holding</i> VP Risk Management of Holding Company	1
VP Manajemen Risiko Anak Perusahaan VP Risk Management of Subsidiaries	1

Fungsi Function	Jumlah Number
Staf Manajemen Risiko <i> Holding</i> Staff of Risk Management of Holding Company	3
Staf Manajemen Risiko Anak Perusahaan Staff of Risk Management of Subsidiaries	3
Jumlah Total	9 orang people

SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN RISIKO

Untuk mendukung peran Fungsi Manajemen Risiko agar lebih kompeten dalam mengelola risiko yang ada di Perusahaan, maka Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Fungsi Manajemen Risiko yang diberikan secara sistematis dan berjenjang. Daftar sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Fungsi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL CERTIFICATION

To support the Risk Management Function to be more competent in managing the Company risks, the Company facilitates competency development programs for the Risk Management Function that are provided in a systematic and tiered manner. The list of professional certifications held by employees of the Risk Management Function are as follows.

Jenis dan Level Sertifikasi Type and Level of Certification	Total
<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i>	3
<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	1
<i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	3
Jumlah	7 orang people

Catatan: 2 orang karyawan baru bergabung pada akhir Q2/2021 dan akan mengikuti program sertifikasi tahun 2022.
Note: 2 new employees joined at the end of Q2/2021 and will join the certification program in 2022.

Selain fungsi Manajemen Risiko, Perusahaan juga memfasilitasi program sertifikasi untuk Unit Pengelola Risiko baik di Perusahaan maupun di Anak perusahaan. Adapun jumlah SDM tersertifikasi PI Grup berjumlah 177 orang, sebagai berikut:

In addition to the Risk Management function, the Company also facilitates certification program for Risk Management Unit both within the Company and in its Subsidiaries. The number of PI Group's certified HC is 177 people, as follows:

No	Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	Jumlah Total
1.	Certified in Enterprise Risk Governance (CERG)	1
2.	Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	16
3.	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	21
4.	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	85
5.	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	44
6.	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	2
7.	Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1
8.	Qualified Risk Management Professional (CRMP)	5
9.	Certified Risk Management Officer (CRMO)	2

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sepanjang tahun 2021, program pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Fungsi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2021, the competency development programs followed by employees of the Risk Management Function were as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program

Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (Orang) Participant (Person)
<i>Training Hedge Accounting</i>	Deloitte	14-15 Desember 2021 December 14-15, 2021	3
Konferensi <i>Risk Beyond: Journey to a new Frontier</i>	ERMA	8-10 Desember 2021 December 8-10, 2021	3
Pelatihan Transformasi Industri 4.0 Pupuk Indonesia Industrial Transformation 4.0 Training for Pupuk Indonesia	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik	30 November-2 Desember 2021 November 30 - December 2, 2021	1
<i>Training Enterprise Risk Management (ERM) dan Perumusan Key Risk Indicator (KRI) PTPI</i> Enterprise Risk Management (ERM) and Formulation of PTPI Key Risk Indicator (KRI) Training	CENTRIA	24 November 2021 November 24, 2021	3
<i>Riskhub International Webinar: Accelerating ESG: Benefits to Creating The Competitive Advantage</i> Riskhub International Webinar: Accelerating ESG: Benefits to Creating The Competitive Advantage	ERMA	27 September 2021 melalui zoom September 27, 2021 via zoom	3
<i>Knowledge Sharing Business Judgement Rule</i> Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Perusahaan Knowledge Sharing Business Judgment Rule in Corporate Strategic Decision Making	Inhouse	15 September 2021 September 15, 2021	1
<i>E-learning Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi</i> E-learning Gratification Control Technical Guidance	KPK	26 Juli 2021 July 26, 2021	3
Pelatihan <i>Risk Control Self Assessment (RCSA)</i> Risk Control Self Assessment (RCSA) Training	CRMS	30 Juni-1 Juli 2021 melalui zoom June 30-July 1 2021 via zoom	1
Pelatihan ISO 31000 dan sertifikasi <i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i> ISO 31000 and Qualified Risk Management Professional (QRMP) certification training	CRMS dan LSP MKS	15 April 2021 April 15, 2021	1
<i>Project Risk Management</i>	CRMS	6-7 April 2021 April 6-7, 2021	2
Pelatihan Pengujian Keandalan & Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis Reliability Testing & Evaluation of Business Continuity Management System Effectiveness Training	IRMAPA & PROXSIS	30-31 Maret 2021 March 30-31, 2021	2
Pelatihan Pembangunan Prosedur Aplikatif Kontingensi Bisnis (<i>Business Contingency Plan</i>) Business Contingency Plan Applicative Procedure Development Training	IRMAPA & PROXSIS	23-24 Maret 2021 March 23-24, 2021	2
<i>Sharing Session Risk Indicator, Risk Tolerance, dan Risk Appetite</i> Sharing Session Risk Indicator, Risk Tolerance, and Risk Appetite	External	17 Maret 2021 March 17, 2021	3
Pelatihan Perumusan Strategi Jitu Pemulihan Bisnis (<i>Business Recovery Strategy</i>) Business Recovery Strategy Formulation Training	IRMAPA & PROXSIS	16 Maret 2021 March 16, 2021	2

Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (Orang) Participant (Person)
Pelatihan Analisis Dampak Bisnis (<i>Business Impact Analysis</i>) yang Efektif Effective Business Impact Analysis Training	IRMAPA & PROXSIS	9-10 Maret 2021 March 9-10 2021	2
Pelatihan BCM Essentials berbasis ISO 22301 ISO 22301-based BCM Essentials training	IRMAPA & PROXSIS	2 Maret 2021 March 2, 2021	2

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2021

Sepanjang tahun 2021, realisasi program kerja di Departemen Manajemen Risiko sebagai berikut:

- Klinikal Pengelolaan Risiko**
Perseroan melaksanakan klinikal risiko secara berkala guna meningkatkan pemahaman *Risk Owner* dan *Risk Officer* dalam melakukan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) serta memastikan implementasi manajemen risiko sesuai dengan Pedoman MRT.
- Sosialisasi dan *Workshop***
Perseroan telah mengadakan beberapa sosialisai dan *workshop* sebagai berikut:
 - Sosialisasi pemutakhiran aplikasi Pupuk Indonesia *Risk Management Application* (PRISMA) kepada *Risk Officer* dan *Risk Owner* Pupuk Indonesia dan Anak Perusahaan
 - Sosialisasi *Business Continuity Management System* (BCMS) PI Grup
 - Sosialisasi penyusunan *Risk Based Budgeting* 2022 ke Komp. Kinkor, Komp. Keuangan, Komp. Akuntansi, dan Komp. Strategi Korporat tanggal
 - Workshop* Pengisian *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) Tahun 2021 untuk Internal PI dan PI Group
 - Sharing Session* *Risk Indicator*, *Risk Tolerance*, dan *Risk Appetite* untuk *Risk Owner* dan *Risk Officer* PI.
- Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko PI Group**
Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) untuk PI Group. Pelaksanaan PMPMR tahun 2021 bersifat *external assessment* dengan bekerja sama dengan konsultan independent manajemen risiko.
- Kajian Risiko Aksi Korporasi**
Sebagai salah satu kelengkapan persetujuan Aksi Korporasi Perseroan menyusun dokumen Kajian Risiko Aksi Korporasi (KRAK). Selama tahun 2021, telah dilaksanakan reuiu atas Kajian Risiko untuk Aksi Korporasi sebanyak 18 (delapan belas) Kajian Risiko, sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF DUTIES IN 2021

In 2021, the Risk Management Department work programs were as follows:

- Risk Management Clinical**
The Company conducted clinical risk periodically to improve the understanding of Risk Owners and Risk Officers in conducting Risk Control Self Assessment (RCSA) as well as ensuring the implementation of risk management in accordance with the MRT Guidelines.
- Dissemination and *Workshop***
The Company held several socializations and workshops including:
 - Dissemination of the Pupuk Indonesia Risk Management Application (PRISMA) update to Risk Officers and Risk Owners of Pupuk Indonesia and its Subsidiaries
 - Socialization of the PI Group's Business Continuity Management System (BCMS)
 - Socialization of the preparation for Risk Based Budgeting 2022 for Komp. Kinkor, Comp. Finance, Comp. Accounting, and Comp. Corporate Strategy date
 - Workshop on Completing Risk Control Self-Assessment (RCSA) in 2021 for Internal PI and PI Group
 - Sharing Session- Risk Indicator, Risk Tolerance, and Risk Appetite for Risk Owners and Risk Officers of PI.
- Assessment of the Maturity Level of PI Group**
In 2021, the Risk Management Maturity Level Assessment (PMPMR) for the PI Group was carried out. The PMPMR in 2021 was an external assessment in collaboration with an independent risk management consultant.
- Corporate Action Risk Assessment**
For the approval of Corporate Actions, the Company has prepared a Corporate Action Risk Assessment (KRAK) document. During 2021, 18 (eighteen) Risk Studies were carried out on Risk Assessments for Corporate Action, as follows:

No	Judul Kajian Risiko Title of Risk Assessment	Waktu Penyelesaian Completion Time
1.	Proyek Gudang Urea Ekspor PT Petrokimia Gresik PT Petrokimia Gresik Export Urea Warehouse Project	Februari February
2.	Likuidasi PT Pupuk Agro Nusantara (PAN) oleh PT Pupuk Kalimantan Timur The liquidation of PT Pupuk Agro Nusantara (PAN) by PT Pupuk Kalimantan Timur	Maret March
3.	Likuidasi PT Kaltim Jordan Abadi (KJA) oleh PT Pupuk Kalimantan Timur The liquidation of PT Kaltim Jordan Abadi (KJA) by PT Pupuk Kalimantan Timur	Maret March
4.	Penghapus bukuan Bangunan Eks Bagor PT Pusri Palembang Write-off of Ex PT Pusri Palembang Bagor Building	Maret March
5.	Penyertaan modal di Kalianusa oleh PT Pupuk Kalimantan Timur The equity participation in Kalianusa by PT Pupuk Kalimantan Timur	April April
6.	Persiapan Proyek Lahan Industri 2 oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Industrial Land Project Preparation 2 by PT Pupuk Kalimantan Timur	Mei May
7.	Penyertaan Modal Kaltim Amonium Nitrat (KAN) oleh PT Pupuk Kalimantan Timur East Kalimantan Ammonium Nitrate (KAN) equity participation by PT Pupuk Kalimantan Timur	Mei May
8.	Proyek Revamping Ammonia Pabrik-2 oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Factory-2 Ammonia Revamping Project by PT Pupuk Kalimantan Timur	Juli July
9.	Penghapus bukuan Aktiva Tetap Berupa Bangunan & Prasarana Milik PT Pusri Palembang utk Lahan PIIIB Write-off of Fixed Assets in the Form of Buildings & Infrastructure Owned by PT Pusri Palembang for PIIIB land	Juli July
10.	Pemberian Pinjaman Pemegang Saham (<i>Shareholder Loan</i>) kepada PT ReKayasa Industri Provision of Shareholder Loans to PT ReKayasa Industri	Juli July
11.	Pembangunan Pabrik PIIIB oleh PT Pusri Palembang Construction of PIIIB Factory by PT Pusri Palembang	Agustus August
12.	Penggunaan Aktiva Tetap PT PIM untuk Penerimaan Pendanaan Kredit Investasi PT PIM's Fixed Assets for Receipt of Investment Credit Funding	Agustus August
13.	Pemberian Setoran Modal oleh PTPI Kepada PT ReKayasa Industri Provision of Capital Deposit by PTPI to PT ReKayasa Industri	Agustus August
14.	Pembangunan Pabrik Soda Ash oleh PT Petrokimia Gresik Construction of Soda Ash Factory by PT Petrokimia Gresik	September September
15.	Pembangunan Pabrik NPK Fusion PKT oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Construction of PKT NPK Fusion Factory by PT Pupuk Kalimantan Timur	November November
16.	Penghapusan Aset Gudang Pati oleh PT Pupuk Sriwidjadja Palembang Removal of Pati Warehouse Assets by PT Pupuk Sriwidjadja Palembang,	November November
17.	Penghapusbukuan Aset Tetap PT Pupuk Kalimantan Timur 2020 2020 Write-off of PT Pupuk Kalimantan Timur Fixed Assets	November November
18.	Penyewaan KPJ dan Wisma 101 KPJ and Wisma 101 Leases	Desember December

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan untuk memastikan pencapaian nilai bagi Pemegang Saham dan pemenuhan komitmen pada karyawan serta seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya, Perseroan berkomitmen menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT). MRT diperlukan untuk memastikan pencapaian terhadap sasaran, termasuk sasaran RKAP.

Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2009 sejak tahun 2013, hal ini ditunjukkan dengan pemberlakuan Pedoman Manajemen Risiko kepada seluruh anak perusahaan pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan Surat Edaran No. SE-03/III/2013. Kemudian sesuai kebutuhan perusahaan, Perseroan melakukan revisi Pedoman pada tahun 2017 menjadi Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi No Dok: PI-TKK-PD-005 tanggal 8 September 2017 dan diedarkan

RISK MANAGEMENT SYSTEM

To realize good corporate governance and to ensure the achievement of value for Shareholders, and fulfillment of commitments to employees and all other relevant stakeholders, the Company is committed to implementing Integrated Risk Management (MRT). MRT is needed to ensure the achievement of targets, including WP&B targets.

The Company implemented a Risk Management System based on ISO 31000:2009 in 2013, and implemented Risk Management Guidelines in all subsidiaries on January 1, 2013 based on Circular Letter No. SE-03/III/2013. Then based on the Company's needs, the Company revised the Guidelines in 2017 to become Integrated Risk Management Guidelines Doc No: PI-TKK-PD-005 dated September 8, 2017, and circulated to all subsidiaries through

ke seluruh anak perusahaan melalui Surat Edaran No: SE-004/1/2018. Pernyataan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Perseroan yang tercantum dalam Pedoman tersebut menunjukkan bahwa Perseroan:

1. Berkomitmen untuk menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) pada seluruh aktivitas dan kepentingan usaha PI Group;
2. Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengacu pada SNI ISO 31000 Manajemen Risiko-Prinsip dan Panduan;
3. Mewajibkan penanggung jawab risiko di setiap tingkatan organisasi melakukan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi pengelolaan risiko serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
4. Berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola risiko, menyediakan anggaran pengelolaan risiko, serta menyediakan dukungan teknologi informasi untuk pengelolaan risiko secara memadai dan menjadikan menjadikan budaya sadar risiko sebagai bagian dari budaya Perusahaan;
5. Melakukan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PI Group secara berkala.

Implementasi Manajemen Risiko yang efektif dan efisien dilakukan secara berkelanjutan pada setiap fungsi dan hirarki dalam Perseroan. Dalam setiap tahapan implementasi, Perseroan mengidentifikasi dan menganalisis seluruh risiko (RTM dan Non RTM) yang dapat mengganggu pencapaian Sasaran Perseroan. Setiap risiko yang teridentifikasi dikategorikan berdasarkan taksonomi risiko yang berlaku di Perseroan, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Keuangan, dan Risiko Kepatuhan & Hukum. Setiap tahun anggaran, Perseroan menetapkan RTM Konsolidasi berdasarkan pareto kontributor utama dalam hal *value*, *investment*, *cost*, dan *contingency*. Untuk memastikan seluruh RTM Konsolidasi dapat dikendalikan, Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat risiko secara berkala.

Secara periodik, Perseroan juga mengukur efektivitas Sistem Manajemen Risiko yang telah diterapkan di lingkungan PI Grup. Hasil pengukuran dijadikan dasar untuk pengembangan Sistem Manajemen Risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan.

PROFIL RISIKO PERUSAHAAN TAHUN 2021

Sejak awal tahun 2021, Perseroan telah mengidentifikasi 12 (dua belas) RTM Konsolidasi yang perlu dikelola dan dimonitor setiap bulan, sehingga dapat diyakini tingkat risiko berada pada tingkat yang wajar dan dapat diterima oleh Perseroan.

Adapun hasil pengelolaan 12 (dua belas) RTM Konsolidasi sampai dengan akhir Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Circular Letter No: SE-004/1/2018. The Company's Risk Management Implementation Policy Statement contained in the Guidelines indicates that the Company:

1. Is committed to implementing a systematic, measurable, and sustainable Integrated Risk Management to accomplish good corporate governance in all activities and business interests of the PI Grup;
2. Has developed Integrated Risk Management Implementation Guidelines referring to SNI ISO 31000 Risk Management - Principles and Guidelines;
3. Requires the person in charge of risk at every level of the organization to perform the process of identifying, analyzing, and evaluating risk management as well as being the basis for decision making in accordance with their duties and responsibilities;
4. Is committed to developing the competence of risk management's human resources, providing risk management budgets, and offering information technology support for adequate risk management, and is committed to making a risk-aware culture part of the Company's culture;
5. Evaluates the Implementation of the Integrated Risk Management of the PI Group on a regular basis

Implementation of effective and efficient Risk Management is carried out on an ongoing basis in every function and hierarchy within the Company. At each stage of implementation, the Company identifies and analyzes all risks (RTM and Non RTM) that may interfere with the achievement of the Company's Targets. Each identified risk is categorized based on the risk taxonomy applicable in the Company, namely Strategic Risk, Operational Risk, Financial Risk, and Compliance & Legal Risk. Every fiscal year, the Company determines the Consolidated RTM based on the Pareto main contributors in terms of value, investment, cost, and contingency. To ensure that all Consolidated RTMs can be controlled, the Company monitors and evaluates risk levels on a regular basis.

Periodically, the Company also measures the effectiveness of the Risk Management System within the PI Group. The measurement results are used as the basis for developing an integrated and sustainable Risk Management System.

COMPANY RISK PROFILE 2021

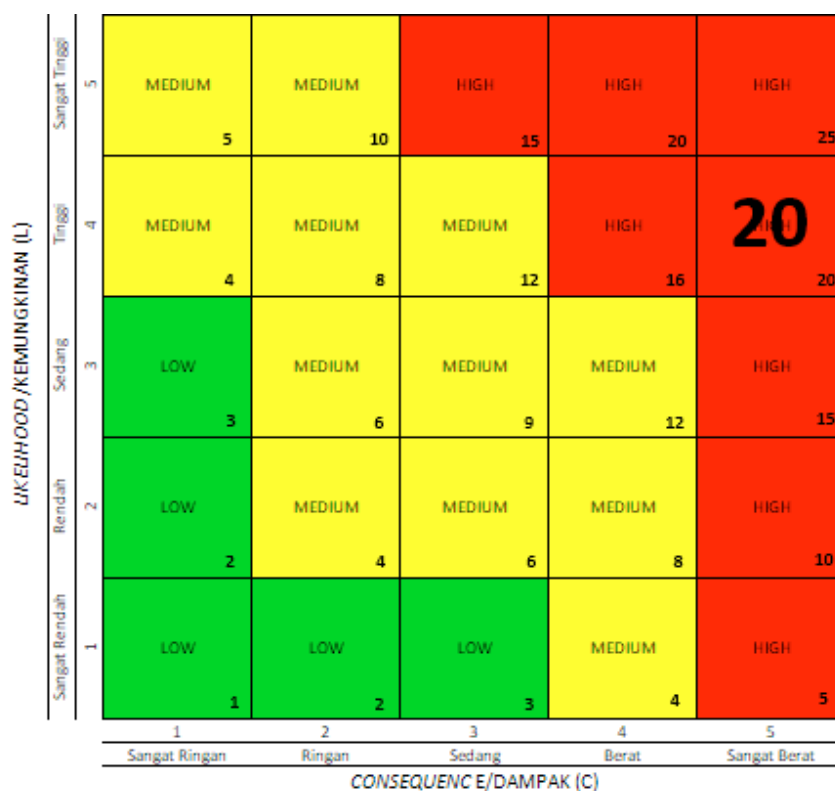
Since the beginning of 2021, the Company has identified 12 (twelve) Consolidated RTMs that need to be managed and monitored every month, so that the risk level can be believed to be at a reasonable and acceptable level for the Company.

The results of the management of 12 (twelve) Consolidated RTMs until the end of 2021 were as follows:

No.	Uraian Risiko Risk Description
1.	<p data-bbox="268 309 1477 353">Nama Risiko Risk Name : Tidak Optimalnya Pelaksanaan Investasi Pengembangan Non-Optimal Implementation of Development Investment</p> <p data-bbox="268 365 1477 409">Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 : 20 Early 2021 Risk Level</p> <p data-bbox="268 421 1477 465">Tingkat Risiko TW IV 2021 : 20 Q IV 2021 Risk Level</p> <p data-bbox="268 488 1477 730"> Dampak Risiko: <ul style="list-style-type: none"> • KPI Manajemen untuk realisasi Investasi tidak tercapai • Reputasi Perusahaan menurun • Tambahan biaya <i>Interest During Construction</i> (IDC). • Tambahan biaya proyek manajemen Risk Impact: <ul style="list-style-type: none"> • Management KPI for Investment realization is not achieved • Company's reputation is declining • Additional Interest During Construction (IDC) fees. • Additional project management costs </p> <p data-bbox="268 741 1477 786"> Realisasi Perlakuan Risiko: Melakukan <i>monitoring</i> melalui laporan mingguan dan bulanan. Berikut <i>progress</i> masing-masing proyek: </p> <p data-bbox="268 808 1477 831">PKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="268 835 1477 931">1. Proyek Amurea dan Methanol Papua Barat <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengadaan konsultan untuk Menyusun <i>bankable</i> FS Proyek Amurea dan Methanol Papua Barat. b. Melakukan <i>kick off meeting</i> dengan konsultan terpilih. c. Memantau konsultan dalam menyusun laporan <i>bankable</i> FS Proyek Amurea dan Methanol Papua Barat. <li data-bbox="268 936 1477 1070">2. Proyek Gudang Bahan Baku <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan terkait perpanjangan kontrak antara PKT dengan Nindya Karya. b. Memastikan PKT dalam melakukan pemantauan atas kegiatan subkontraktor yang diambil alih oleh Nindya Karya untuk percepatan <i>progress</i> proyek. c. Memastikan PKT dalam melakukan pemantauan kegiatan <i>engineering, procurement, dan construction</i> yang dikerjakan oleh Kontraktor. <p data-bbox="268 1077 1477 1211"> PIM: Proyek NPK <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan PIM dalam melakukan pemantauan kegiatan <i>engineering, procurement, dan construction</i> yang dikerjakan oleh Kontraktor. 2. Memantau pelaksanaan dan tindaklanjut atas <i>workshop</i> antara PIM, PP, dan perwakilan Subkontraktor terkait penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan proyek. </p> <p data-bbox="268 1218 1477 1263"> Realization of Risk Treatment: Monitoring through weekly and monthly reports. The following is the progress of each project: </p> <p data-bbox="268 1270 1477 1292">PKT:</p> <p data-bbox="268 1314 1477 1337">PKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="268 1341 1477 1438">1. West Papua Amurea and Methanol Project <ol style="list-style-type: none"> a. Procurement of consultants to develop <i>bankable</i> FS for the West Papua Amurea and Methanol Project. b. Conduct a <i>kick off meeting</i> with the selected consultant. c. Monitor consultants in preparing <i>bankable</i> reports for the West Papua Amurea and Methanol FS Project. <li data-bbox="268 1442 1477 1554">2. Raw Material Warehouse Project <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring the contract extension between PKT and Nindya Karya b. Ensuring that PKT is monitoring the activities of subcontractors taken over by Nindya Karya to accelerate project progress c. Ensuring PKT in monitoring <i>engineering, procurement, and construction</i> activities carried out by the Contractor. <p data-bbox="268 1561 1477 1583">PIM:</p> <p data-bbox="268 1588 1477 1610">NPK Project</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure PIM in monitoring <i>engineering, procurement, and construction</i> activities carried out by the Contractor. 2. Monitor the implementation and follow-up of workshops between PIM, PP, and representatives of Subcontractors related to solving problems in project implementation.

No.	Uraian Risiko Risk Description
	<p>PSP</p> <p>Proyek Pusri IIIB</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan skema pembangunan proyek Pusri IIIB. Melanjutkan rencana pelaksanaan proyek Pusri IIIB. Memastikan tim tender Pusri IIIB melakukan finalisasi penyusunan dokumen <i>project specification</i>, TOR, dan dokumen draft kontrak EPC. Melakukan <i>High Level Meeting</i> antara Manajemen PI dengan Manajemen Anper Bersama dengan Manajemen Kontraktor EPC terkait Proyek NPK Chemical PIM dan Proyek Gudang Bahan Baku Curah PKT. Melakukan evaluasi lanjutan terkait aspek pemenuhan bahan baku, aspek komersil/pasar serta aspek lokasi terkait proyek Amurea dan Methanol Papua Barat. Menyusun <i>scope of work</i> yang detail dan jelas pada kontrak terkait proyek Pusri IIIB. <p>PSP</p> <p>Pusri IIIB Project</p> <ol style="list-style-type: none"> Establishing the Pusri IIIB project development scheme Continuing the implementation plan of the Pusri IIIB project Ensure that the Pusri IIIB tender team finalizes the preparation of the project specification document, TOR, and EPC contract draft document. Conducting High Level Meeting between PI Management and Subsidiary Management together with EPC Contractor Management related to the PIM NPK Chemical Project and PKT Bulk Raw Material Warehouse Project Conduct further evaluations related to aspects of meeting raw materials, commercial/market aspects and location aspects related to the West Papua Amurea and Methanol projects. Develop a detailed and clear scope of work in contracts related to the Pusri IIIB project

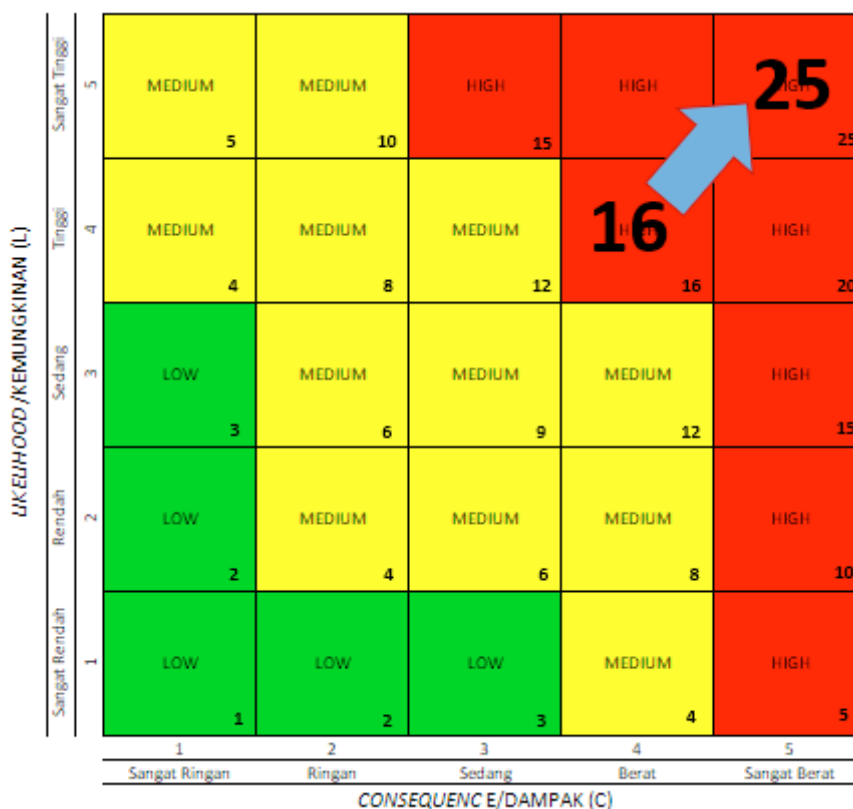
Heat Map Risiko Tidak Optimalnya Pelaksanaan Investasi Pengembangan:
Heat Map Risk of Non-Optimal Implementation of Development Investments:



No.	Uraian Risiko Risk Description	
2.	Nama Risiko Risk Name	: Tidak Optimalnya Pengembalian dari Investasi Penyertaan Non-Optimal Return on Investment Participation
	Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 Early 2021 Risk Level	: 16
	Tingkat Risiko TW IV 2021 Q IV 2021 Risk Level	: 25
	Dampak Risiko: 1. Target investasi penyertaan tidak tercapai. 2. KPI Manajemen tidak terpenuhi. Dampak Risiko: 1. The investment target is not achieved. 2. Management KPIs are not met.	
	Realisasi Perlakuan Risiko: Melakukan <i>monitoring</i> pelaksanaan investasi penyertaan di Anak Perusahaan dengan <i>progress</i> sebagai berikut:	
	Setoran Modal PI ke PT PI Logistik (PT PILOG): 1. Melakukan permohonan persetujuan setoran modal ke KBUMN. 2. Melakukan restrukturisasi proses bisnis PT PILOG dengan beberapa <i>quick win</i> sebagai berikut: a. Menjual/Scrap kapal yang <i>unprofitable</i> . b. Penjajakan kerjasama dengan perusahaan logistik di lingkungan PI Grup terkait bisnis <i>end-to-end logistic</i> . 3. Penerbitan SPMK Appraisal Kapal. 4. Melakukan pembahasan dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan PTPI terkait <i>long term contract</i> untuk kapal eksisting.	
	Setoran Modal PT Pupuk Kujang (PT PK) untuk Pabrik Katalis 1. Melakukan pemantauan proses pelaksanaan Pra-kualifikasi (PQ) Proyek Katalis Nasional. 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan setoran modal PT PK ke Pabrik Katalis pada PT Katalis Sinegi Indonesia (PT KSI). 3. Melakukan pemantuan pada PT KSI terkait pelaksanaan tender. 4. Melakukan pemantauan Pada PT KSI terkait pelaksanaan <i>beauty contest</i> untuk mencari Kreditur.	
	Setoran Modal PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) ke PT Kalianusa 1. Melakukan pemantauan pelaksanaan setoran modal PT PKT ke PT Kalianusa. 2. Melakukan pemantauan proses perubahan anggaran dasar PT Kalianusa dimana terdapat perubahan komposisi saham PT PKT pada PT Kalianusa.	
	Realization of Risk Treatment: Monitoring the implementation of investment in Subsidiaries with the following progress:	
	PI Capital Deposit to PT PI Logistik (PT PILOG): 1. Apply for approval for capital deposit to KBUMN 2. Restructuring PT PILOG's business processes with several quick wins as follows: a. Selling/Scrap unprofitable ships b. Exploration of cooperation with logistics companies within the PI Group related to end-to-end logistics business 3. Issuance of Ship Appraisal SPMK 4. Conducting discussions with PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and PTPI regarding long term contracts for existing vessels.	
	Investment of PT Pupuk Kujang (PT PK) for Catalyst Factory 1. Monitoring the implementation process of the Pre-qualification (PQ) of the National Catalyst Project 2. Monitoring the implementation of PT PK's capital deposit to the Catalyst Factory at PT Katalis Sinegi Indonesia (PT KSI) 3. Monitoring PT KSI regarding the tender implementation 4. Monitoring PT KSI regarding the implementation of the beauty contest to find creditors	
	Capital Deposit of PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) to PT Kalianusa 1. Monitoring the implementation of PT PKT's capital deposit to PT Kalianusa. 2. Monitoring the process of changing the articles of association of PT Kalianusa where there is a change in the composition of PT PKT's shares in PT Kalianusa.	

No.	Uraian Risiko Risk Description
	<p>Setoran Modal PT PKT pada PT Kaltim Ammonium Nitrat (PT KAN)</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan pelaksanaan setoran modal PT PKT ke PT KAN. Melakukan pemantauan <i>progress</i> proyek Ammonium Nitrat. Melakukan pemantauan Konsinyering dan tindak lanjutnya antara PT KAN dan pihak kontraktor terkait pembahasan <i>recovery schedule</i>, <i>Extension of Time</i> (EOT), dan penyelesaian <i>item pending engineering</i> yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek. <p>Right Issue PT Rekayasa Industri (PT REKIND)</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan implementasi restrukturisasi PT REKIND dengan melibatkan berbagai pihak. Melakukan kerjasama dengan konsultan terkait kajian dan appraisal PT REKIND. <p>PT PKT Capital Deposit in PT Kaltim Ammonium Nitrate (PT KAN)</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoring the implementation of PT PKT's capital deposit to PT KAN Monitoring the progress of the Ammonium Nitrate project Monitoring the consignment and its follow-up between PT KAN and the contractor regarding the discussion of recovery schedule, Extension of Time (EOT), and completion of pending engineering items that have the potential to hinder project completion. <p>Rights Issue of PT Rekayasa Industry (PT REKIND)</p> <ol style="list-style-type: none"> Restructuring of PT REKIND by involving various parties Cooperating with consultants related to the study and appraisal of PT REKIND

Heat Map Risiko Tidak Optimalnya Pengembalian dari Investasi Penyertaan:
Non-Optimal Return of Participation Investment Heat Map Risk:



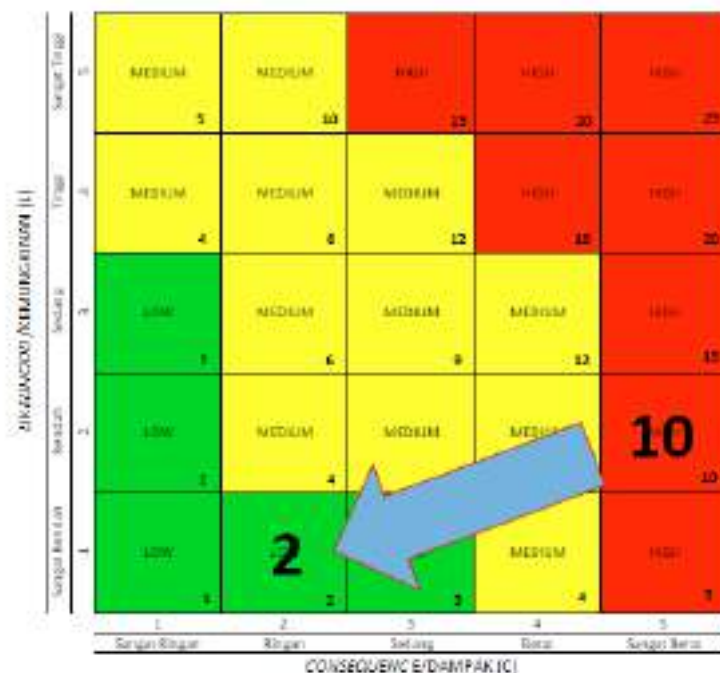
No.	Uraian Risiko Risk Description	
3.	Nama Risiko Risk Name	: Downtime Pabrik Amoniak dan Urea Ammonia and Urea Plant Downtime
	Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 Early 2021 Risk Level	: 20
	Tingkat Risiko TW IV 2021 Q IV 2021 Risk Level	: 9
	<p>Dampak Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi timbulnya pencemaran yang bisa menimbulkan masalah sosial dengan masyarakat sekitar. Citra perusahaan turun dengan menurunnya tingkat <i>competitiveness</i> perusahaan untuk melaksanakan standar terbaik perusahaan dunia. Dengan sering terjadinya <i>Scheduled Shutdown</i>, maka dapat meningkatkan probabilitas penularan COVID-19 karena pekerjaan perbaikan yang membutuhkan <i>manhours</i> dan <i>manpower</i> yang tinggi. Potensi kehilangan laba dari ketidaktercapaian produksi urea dan eksekusi amoniak. Potensi adanya biaya yang muncul akibat <i>inefficiency</i> konsumsi gas Urea. <p>Risk Impact:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potential for pollution that can cause social problems with the surrounding community. The company's image decreases as the company's level of competitiveness decreases to implement the best standards of world companies With the frequent occurrence of Scheduled Shutdowns, it can increase the probability of Covid-19 transmission due to repair work that requires high manhours and manpower. Potential loss of profit from not achieving urea production and excess ammonia Potential costs arising from inefficiency of Urea gas consumption. <p>Realisasi Perlakuan Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan <i>Digital Fertilizer</i> dan analisa data <i>performance</i> pabrik di beberapa pabrik Anak Perusahaan PI. Meningkatkan <i>reliability</i> melalui program <i>maintenance excellence</i> dan sistem manajemen produksi (SIMPRO). Pemantauan pelaksanaan program pembuatan strategi pemeliharaan berbasis RCM di masing-masing pabrik pilot. Melaksanakan audit perencanaan dan post TA di 5 Anak Perusahaan PI. Menyelenggarakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) terkait Boiler Batubara dan STG dan Amoniak & Urea. Menyelenggarakan kegiatan <i>Sharing troubleshooting</i> bidang <i>Rotating, Static & Instrument</i>. Melakukan Pembentukan Tim 3P (Peningkatan Performa Pabrik) sebagai sarana untuk <i>transfer knowledge</i>. Menyelenggarakan rapat <i>monitoring</i> kondisi peralatan kritis pabrik, investasi rutin 2021, dan tindak lanjut <i>plant</i> audit tahun 2019. <p>Realization of Risk Treatment:</p> <ol style="list-style-type: none"> Digital Fertilizer and analyzing factory performance data at several Fertilizer Subsidiaries' factories. Reliability through maintenance excellence program and production management system (SIMPRO) Monitoring the implementation of the RCM-based maintenance strategy development program in each pilot plant Planning and post TA audits in 5 Subsidiaries of Fertilizer Organizing a Focus Group Discussion (FGD) related to Coal Boilers and STG and Ammonia & Urea Organizing Sharing troubleshooting activities in the Rotating, Static & Instrument fields Establishing a 3P Team (Factory Performance Improvement) as a means for knowledge transfer. Holding a meeting to monitor the condition of critical plant equipment, regular investment in 2021, and follow-up to the 2019 plant audit. 	

Heat Map Risiko **Downtime Pabrik Amoniak dan Urea**
Ammonia and Urea Plant Downtime Risk Heat Map



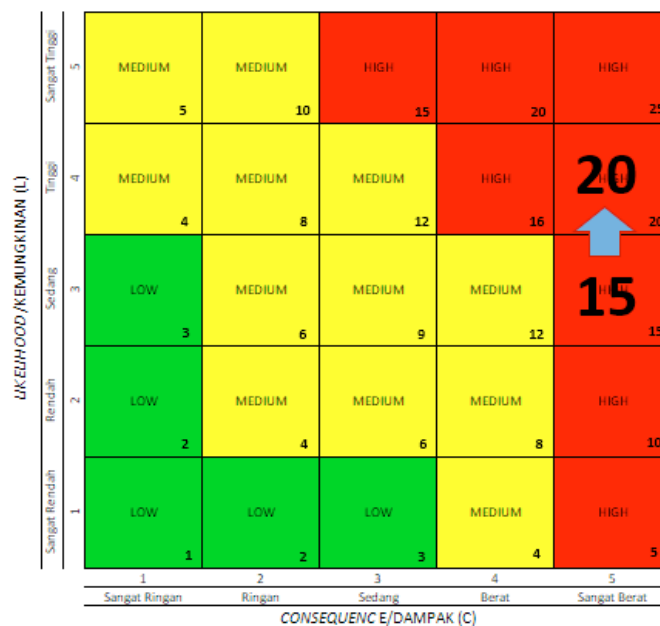
No.	Uraian Risiko Risk Description
4.	<p>Nama Risiko Risk Name : Terjadinya <i>Fatality</i> Fatality Occurrence</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 : 10 Early 2021 Risk Level</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko TW IV 2021 : 2 Q IV 2021 Risk Level</p> <hr/> <p>Dampak Risiko: 1. Tidak terpenuhinya peraturan pemerintah. 2. Terjadinya kematian pada pekerja. 3. Reputasi perusahaan menurun. 4. Potensi biaya yang timbul akibat kecelakaan termasuk asuransi dan santunan serta kerusakan alat apabila ada.</p> <p>Risk Impact: 1. Non-fulfillment of government regulations. 2. The occurrence of death in workers 3. Company reputation is declining 4. Potential costs arising from accidents including insurance and compensation as well as equipment damage if any.</p> <hr/> <p>Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Memonitor pelaksanaan <i>live saving rules</i> dalam laporan bulanan masing-masing Anak Perusahaan. 2. Memonitor pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan penerapan <i>Process Safety Management</i> (PSM) di pabrik. 3. Memantau pelaksanaan Inspeksi K3 di masing-masing Anak Perusahaan. 4. Memonitor <i>Leading indicator</i> perilaku kerja aman dan tindak lanjut dari rekomendasi K3 dan tindak lanjut pelaporan kecelakaan kerja. 5. Melakukan reviu hasil <i>survey safety culture</i> terkait indeks yang dihasilkan serta menindaklanjuti hasil rekomendasinya 6. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi bidang Produksi membahas kinerja K3 di masing-masing Anper Produsen Pupuk. 7. Menyelenggarakan <i>Webinar</i> keselamatan kerja bertema "Implementasi Sistem Manajemen K3 (berbasis ISO 45001).</p> <p>Realization of Risk Treatment: 1. Monitor the implementation of live saving rules in the monthly reports of each Subsidiary. 2. Monitor the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) and the implementation of Process Safety Management (PSM) in factories. 3. Monitor the implementation of OHS Inspections in each Subsidiary. 4. Monitor leading indicators of safe work behavior and follow-up on OHS recommendations and follow-up on work accident reporting. 5. Review the safety culture survey results related to the resulting index and following up on the recommendations 6. Organizing a Coordination Meeting in the Production sector to discuss OHS performance in each Fertilizer Producer Subsidiary. 7. Organizing a safety webinar with the theme "Implementation of OHS Management System (based on ISO 45001)</p>

Heat Map Risiko Terjadinya *Fatality*:
Risk of Fatality Occurrence Heat Map:



No.	Uraian Risiko Risk Description	
5.	Nama Risiko Risk Name	: Tidak Tercapainya Target Penjualan Pupuk PSO PSO Fertilizer Sales Target Not Achieved
	Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 Early 2021 Risk Level	: 15
	Tingkat Risiko TW IV 2021 Q IV 2021 Risk Level	: 20
	<p>Dampak Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Teguran dari KPA atas realisasi kinerja perusahaan dalam melaksanakan penugasan subsidi pupuk. Menurunkan kepercayaan KPA dalam penetapan/pemberian alokasi tahun berikutnya. Tidak tercapainya KPI Perusahaan. Potensi <i>opportunity lost</i> laba akibat ketidaktercapaian penjualan semua jenis pupuk PSO. <p>Risk Impact:</p> <ol style="list-style-type: none"> Warning from KPA for the realization of the company's performance in carrying out the assignment of fertilizer subsidies Lowering KPA's confidence in determining/granting allocations for the following year Not achieving the Company's KPIs Potential opportunity lost profit due to the non-achievement of sales of all types of PSO fertilizers 	
	<p>Realisasi Perlakuan Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberlakukan kewajiban input e-RDKK dan SK Dinas alokasi di dalam sistem WCM. Melakukan koordinasi dengan Produsen, Kementan dan Himbara terkait penyaluran dan pembayaran subsidi. Berkoordinasi dengan unit Produksi dan Distribusi serta melakukan kunjungan ke lapangan terkait kegiatan penyaluran pupuk subsidi. Menginstruksikan kepada Produsen untuk setiap penebusan yang tidak melalui Kartu Tani wajib dilengkapi dengan fotokopi KTP dan melengkapi form penebusan pupuk subsidi. Berkoordinasi dengan Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengupayakan realokasi antara kabupaten/Kota dan kecamatan guna mengoptimalkan serapan di masing-masing wilayah. Mengembangkan dashboard <i>monitoring</i> realisasi penyaluran vs alokasi pupuk subsidi. Menindaklanjuti pemenuhan stok pupuk lini III Provinsi yang berada dibawah ketentuan stok minimum. Mengintegrasikan sistem penebusan pupuk WCM-SIAGA dengan sistem Kartu Tani. <p>Realization of Risk Treatment:</p> <ol style="list-style-type: none"> Enforce the obligation to input e-RDKK and SK allocations in the WCM system. Coordinate with Producers, Ministry of Agriculture and Himbara regarding distribution and payment of subsidies Coordinate with Production and Distribution units as well as make field visits related to the distribution of subsidized fertilizers. Instruct Producers for every redemption that is not through a Farmer's Card, it must be accompanied by a photocopy of the KTP and complete the redemption form for subsidized fertilizers. Coordinate with the Provincial, Regency/City Offices to seek reallocation between regencies/municipalities and sub-districts in order to optimize absorption in each region. Develop a dashboard for monitoring the realization of distribution vs allocation of subsidized fertilizer Follow up the fulfillment of the province's line III fertilizer stock which is below the minimum stock requirement Integrate the WCM-SIAGA fertilizer redemption system with the Kartu Tani system 	

Heat Map Risiko **Tidak Tercapainya Target Penjualan Pupuk PSO:**
Not Achieving PSO Fertilizer Sales Target Heat Map Risk:



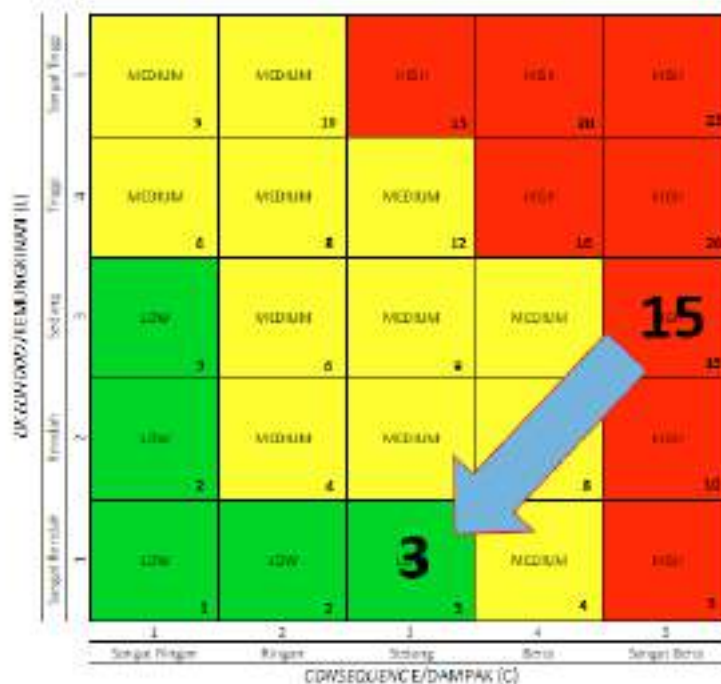
No.	Uraian Risiko Risk Description
6.	<p>Nama Risiko : Tidak Tercapainya Target Penjualan Komersil Risk Name : Not Achieving Commercial Sales Target</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 : 20 Early 2021 Risk Level</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko TW IV 2021 : 2 Q IV 2021 Risk Level</p> <p>Dampak Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Brand awareness</i> turun. 2. Konsumen diambil alih oleh pesaing. 3. Motivasi tenaga pemasar turun. 4. Potensi <i>opportunity lost</i> laba akibat ketidaktercapaian penjualan semua jenis pupuk Non PSO. 5. Timbulnya biaya pengelolaan <i>stock</i> akibat produk tidak terjual. <p>Risk Impact:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brand awareness is down 2. Consumers are taken over by competitors 3. Marketers' motivation is down 4. Potential opportunity lost profit due to non-achievement of sales of all types of Non-PSO fertilizers 5. Incurring stock management costs due to unsold products <hr/> <p>Realisasi Perlakuan Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Implementasi <i>Key Account Management (KAM)</i> dan <i>technical sales team</i> bagi <i>large estate</i>. 2. Melakukan kajian penjualan harga pasar jika harga pasar lebih rendah daripada COGS. 3. Melaksanakan Reposisi Gudang Jabar, Sumbagut & Sumbagsel, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. 4. Melakukan pengembangan aplikasi <i>precision farming</i> dan sistem rekomendasi pemupukan. 5. Melakukan Implementasi <i>Supply Chain Control Tower (SCCT)</i>, serta mengupdate dan menelaah tren permintaan (<i>supply</i> dan <i>demand</i>) serta harga di pasar Domestik dan Internasional melalui <i>Data Science</i>. 6. Melaksanakan Implementasi <i>Agrosolutions</i>. 7. Melakukan Implementasi Single Branding NPK & Urea. 8. Melakukan penghematan biaya bahan baku DAP dan KCl melalui kontrak jangka Panjang. 9. Melakukan implementasi CCM, kios lengkap produk dan teknologi <i>point of sales</i> terintegrasi dengan <i>supply</i> dan <i>manufacturing network</i>. <p>Realization of Risk Treatment:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementing Key Account Management (KAM) and technical sales team for large estates: 2. Conduct a market price sales study if the market price is lower than COGS: 3. Implemented Repositioning of Warehouses in West Java, Sumbagut & South Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua: 4. Develop precision farming applications and fertilization recommendation systems: 5. Implementing Supply Chain Control Tower (SCCT), as well as updating and analyzing demand trends (supply and demand) and prices in Domestic and International markets through Data Science: 6. Implementing Agrosolutions: 7. Implementing NPK & Urea Single Branding 8. Saving costs of DAP and KCl raw materials through long-term contracts 9. Implementing CCM, complete kiosk of products and point of sales technology integrated with supply and manufacturing network

Heat Map Risiko **Tidak Tercapainya Target Penjualan Komersil:**
Not Achieving Commercial Sales Targets Heat Map Risk:



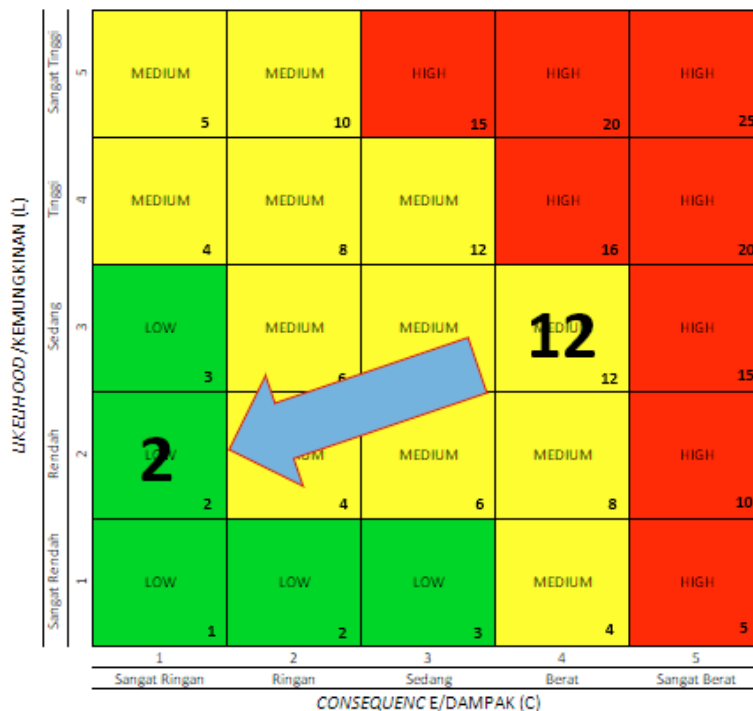
No.	Uraian Risiko Risk Description	
7.	Nama Risiko Risk Name	: Penurunan Tingkat Kesehatan Karyawan Decrease in Employee Health Level
	Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 Early 2021 Risk Level	: 15
	Tingkat Risiko TW IV 2021 Q IV 2021 Risk Level	: 3
	<p>Dampak Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menurunkan semangat pekerja akibat kekhawatiran tertular COVID-19 di tempat kerja. Reputasi Perusahaan memburuk akibat ekspose ke media akibat kasus COVID-19 yang tinggi. Meningkatnya biaya kesehatan karyawan dan biaya lembur. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh penghentian operasional Pabrik. <p>Risk Impact:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lowering the employees' morale due to fears of contracting COVID-19 at work Company reputation deteriorated due to exposure to media due to high COVID-19 cases Increased employee health costs and overtime costs. Potential loss caused by cessation of Factory operations 	
	<p>Realisasi Perlakuan Risiko :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan <i>Continues Improvement</i> dan perawatan terhadap fasilitas Kesehatan dan fasilitas kerja antara lain: <i>Air purifier</i>, Alat GeNose, Fasilitas pencuci tangan, <i>Hand Sanitizer</i>, Alat Ukur Suhu Tubuh dan <i>Touchless Button Lift</i>. Melakukan koordinasi dengan Anak Perusahaan terkait penanganan COVID-19 varian Omicron. Melakukan koordinasi pelaksanaan vaksin <i>booster</i> di PI Grup. Melaksanakan sosialisasi protokol COVID-19 melalui media publikasi di lokasi kerja dan melaksanakan <i>webinar</i> Kesehatan. Melaksanakan vaksinasi gotong royong di kantor PTPI dan memaksimalkan pemberian vaksin untuk seluruh karyawan PTPI dan keluarga guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Minimalisir kegiatan secara langsung termasuk pengaturan jadwal WFH dan WFO. Melakukan <i>screening</i> dan <i>tracking</i> kepada karyawan terkonfirmasi positif dan melakukan <i>lockdown</i> sementara untuk memutuskan rantai penularan. Menyediakan perawatan isoman kepada karyawan dan keluarga di beberapa Rumah Sakit dan hotel rekanan di Jakarta. <p>Realization of Risk Treatment:</p> <ol style="list-style-type: none"> Carry out Continues Improvement and maintenance of Health facilities and work facilities, including: Air purifier, GeNose Equipment, Hand washing facilities, Hand Sanitizer, Body Temperature Measuring Device and Touchless Lift Buttons. Coordinate with Subsidiaries regarding the handling of COVID-19 Omicron variants Coordinate the implementation of booster vaccines in the PI Group. Carry out socialization of covid protocols through publication media at work locations and carry out Health webinars Carry out mutual cooperation vaccinations at the PTPI office and maximize the provision of vaccines for all PTPI employees and families to prevent the spread of the COVID-19 virus. Minimize direct activities including setting WFH and WFO schedules. Screening and tracking positive confirmed employees and implementing a temporary lockdown to break the chain of transmission. Providing isolation care to employees and their families in hospitals and partner hotels in Jakarta. 	

Heat Map Risiko **Penurunan Tingkat Kesehatan Karyawan:**
Decrease in Employee Health Levels Heat Map Risk:



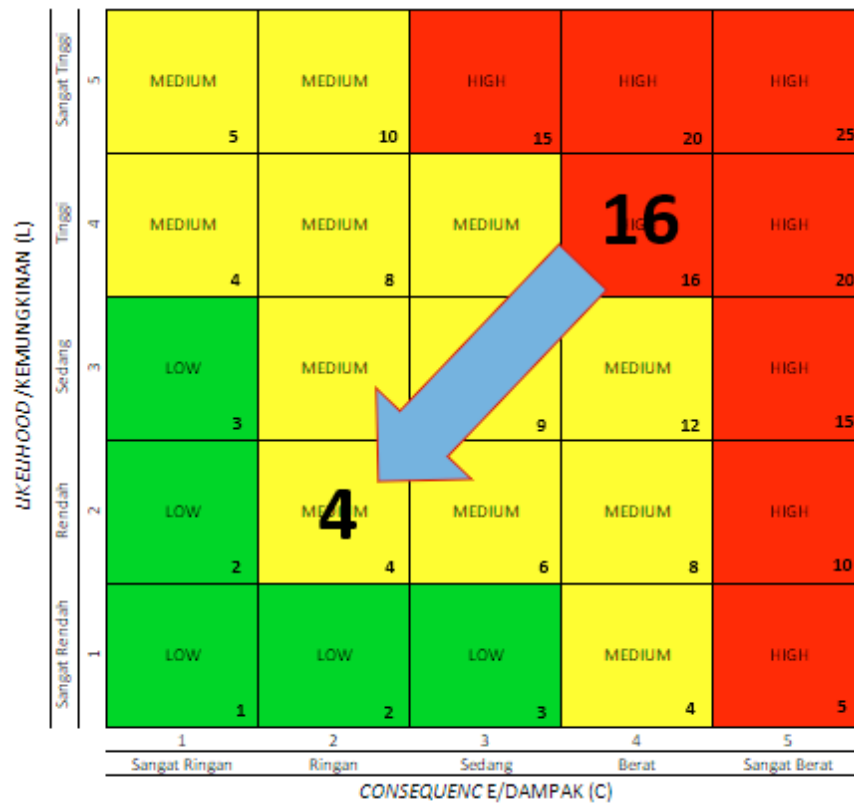
No.	Uraian Risiko Risk Description
8.	<p>Nama Risiko : Tingkat Implementasi Budaya Akhlak Rendah Risk Name : Low Akhlak Culture Implementation Level</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 : 12 Early 2021 Risk Level</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko TW IV 2021 : 2 Q IV 2021 Risk Level</p> <hr/> <p>Dampak Risiko: 1. Tidak tercapainya target KPI Korporat Implementasi Budaya Perusahaan (AKHLAK). 2. Penurunan produktivitas karyawan.</p> <p>Risk Impact: 1. Not achieving the Corporate Culture Implementation KPI target (AKHLAK) 2. Decrease in employee productivity</p> <hr/> <p>Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Menyelenggarakan kegiatan <i>culture breaks</i> yaitu kegiatan yang bertujuan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan implementasi budaya perusahaan serta <i>upskilling</i> tim implementasi budaya PI Group. 2. Menyusun <i>Roadmap</i> program implementasi Budaya AKHLAK PI Group Tahun 2021-2023. 3. Melakukan Pembuatan Buku contoh perilaku AKHLAK dan mensosialisasikan terkait buku contoh perilaku AKHLAK ke seluruh Anak Perusahaan dan PTPI. 4. Penyelarasan <i>Soft Kompetensi</i> Inti dengan <i>Core Value</i> AKHLAK. 5. Pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> dan <i>training culture</i> untuk BOD, <i>Change Leader</i>, <i>Change Champions</i>, <i>Change Agent</i> dan seluruh karyawan PTPI. 6. Menyusun jadwal <i>monitoring</i> rutin kegiatan implementasi budaya perusahaan rutin setiap bulan bersama tim implementasi budaya PI Grup dan Konsultan.</p> <p>Realization of Risk Treatment: 1. Organizing culture breaks, activities aimed at monitoring and evaluating activities for implementing corporate culture and upskilling the PI Group culture implementation team 2. Prepare a Roadmap for the implementation of the PI Group's AKHLAK Culture program for 2021-2023 3. Preparing sample booklets on AKHLAK behavior and socializing sample booklets on AKHLAK behavior to all Subsidiary Companies and PTPI. 4. Alignment of Soft Core Competencies with Core Values AKHLAK 5. Implementation of workshops and cultural training for BOD, Change Leaders, Change Champions, Change Agents and all employees of PTPI. 6. Arrange routine monitoring schedule for routine corporate culture implementation activities every month with the PI Group culture implementation team and Consultants.</p>

Heat Map Risiko Tingkat Implementasi Budaya Akhlak Rendah:
Low Akhlak Culture Implementation Level Heat Map Risk:



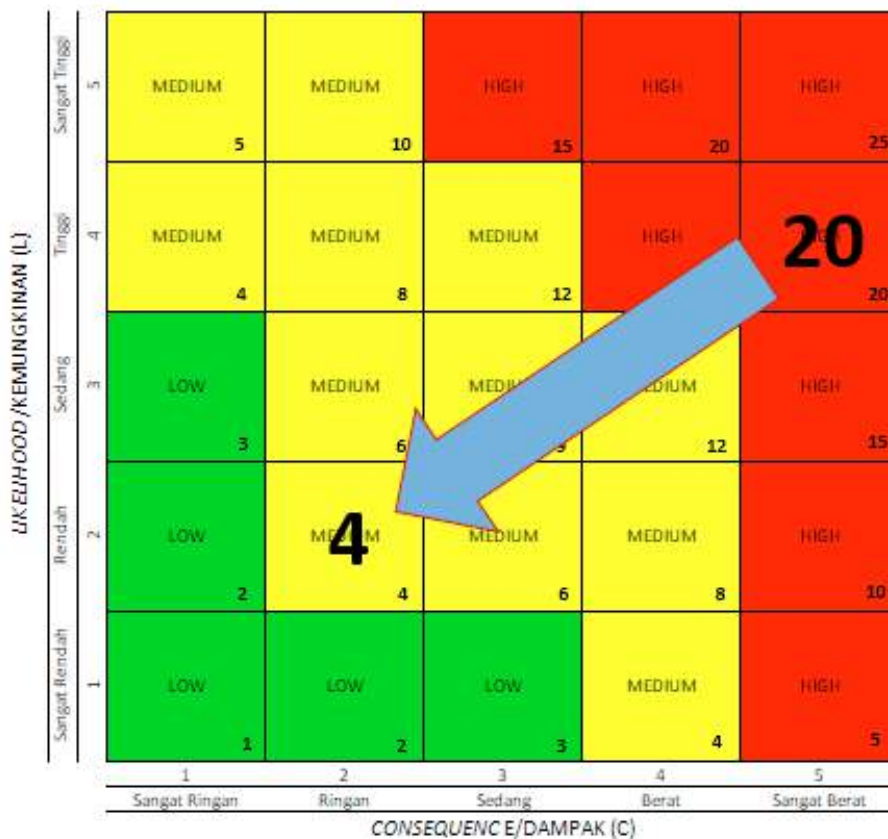
No.	Uraian Risiko Risk Description	
9.	Nama Risiko Risk Name	: Menurunnya Kualitas Piutang Usaha Declining Quality of Accounts Receivable
	Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 Early 2021 Risk Level	: 16
	Tingkat Risiko TW IV 2021 Q IV 2021 Risk Level	: 4
	<p>Dampak Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi tambahan biaya bunga akibat belum tertagihnya piutang usaha. Kinerja Direksi berdasarkan Kontrak Manajemen dan KPI korporat untuk perspektif keuangan serta persepsi pasar dinilai kurang baik. <p>Risk Impact:</p> <ol style="list-style-type: none"> Potential additional interest costs due to uncollectible trade receivables Board of Directors performance based on Management Contracts and corporate KPIs from a financial perspective and market perception is considered poor 	
	<p>Realisasi Perlakuan Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi & klarifikasi kepada Anak Perusahaan atas <i>monitoring</i> piutang yang telah jatuh tempo, upaya yang telah dilakukan, impairment yang telah dilakukan dan estimasi nilai pemulihan impairment piutang yang akan didapatkan. Melakukan pembuatan database pelanggan sebagai tindakan preventive meminimalisir piutang bermasalah. Memerhatikan <i>cash convercion cycle</i> antara jangka waktu pembayaran vendor dengan penerimaan dari <i>customer</i>. Sejak dimulainya sentralisasi, khusus untuk penjualan Kredit mewajibkan untuk melampirkan jaminan berupa SKBDN (dalam Negeri) dan LC (Luar Negeri). <p>Realization of Risk Treatment:</p> <ol style="list-style-type: none"> Coordinate & clarify to Subsidiaries on monitoring receivables that are past due, efforts that have been made, impairments that have been made and the estimated value of recovery of impairment of receivables that will be obtained. Create a customer database as a preventive measure to minimize problematic receivables Observing the cash conversion cycle between vendor payment terms and customer receipts. Since the start of centralization, specifically for credit sales, it is obligatory to attach collateral in the form of SKBDN (domestic) and LC (Foreign) 	

Heat Map Risiko **Menurunnya Kualitas Piutang Usaha:**
Declining Quality of Accounts Receivable Heat Map Risk:



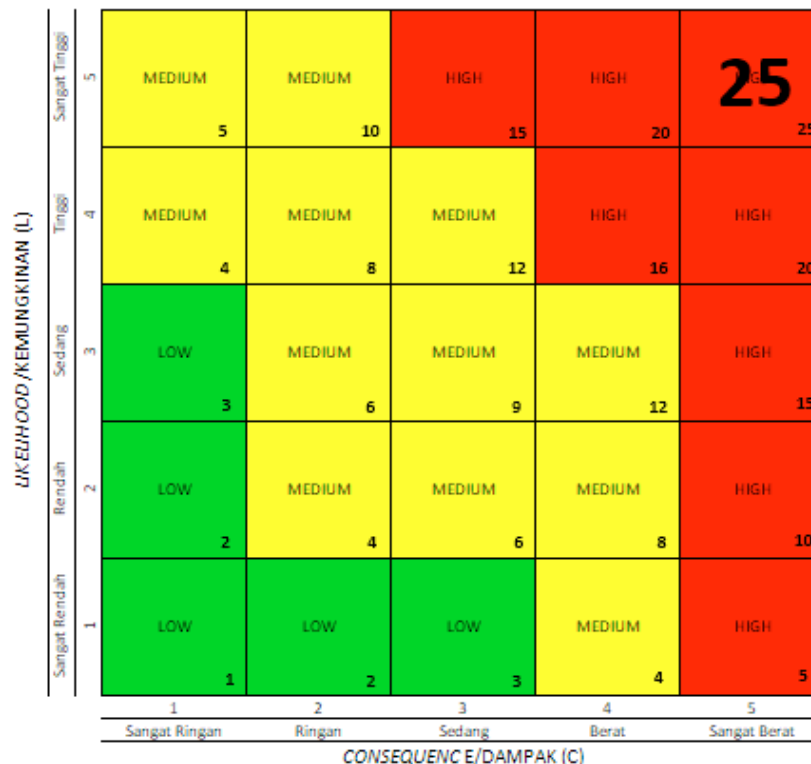
No.	Uraian Risiko Risk Description
10.	<p>Nama Risiko : Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Risk Name : Rupiah Exchange Rate Fluctuation</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 : 20 Early 2021 Risk Level</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko TW IV 2021 : 4 Q IV 2021 Risk Level</p> <hr/> <p>Dampak Risiko: Beban lain-lain dan beban keuangan meningkat Risk Impact: Other expenses and financial expenses increased</p> <hr/> <p>Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Menetapkan <i>Hedging Coverage Ratio</i> menjadi KPI Kompartemen Keuangan dan Pendanaan Investasi serta KPI Kompartemen di Anak Perusahaan. 2. Meminta komitmen Anak Perusahaan untuk melaksanakan <i>Hedging</i>. 3. Menyediakan Dana Pencadangan dalam USD yang dicadangkan untuk membayar pokok & bunga pada saat jatuh tempo (Berlaku di PIU). 4. Memantau penjualan ekspor Anak Perusahaan.</p> <p>Realization of Risk Treatment: 1. Determine the Hedging Coverage Ratio to become the KPI for the Finance and Investment Funding Compartment and the KPI for the Compartments in Subsidiaries 2. Request Subsidiaries' commitment to implement Hedging. 3. Provide Reserve Fund in USD which is reserved to pay principal & interest at maturity. (Valid at PIU). 4. Monitoring the export sales of Subsidiaries</p>

Heat Map Risiko **Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah:**
Rupiah Exchange Rate Fluctuation Heat Map Risk:



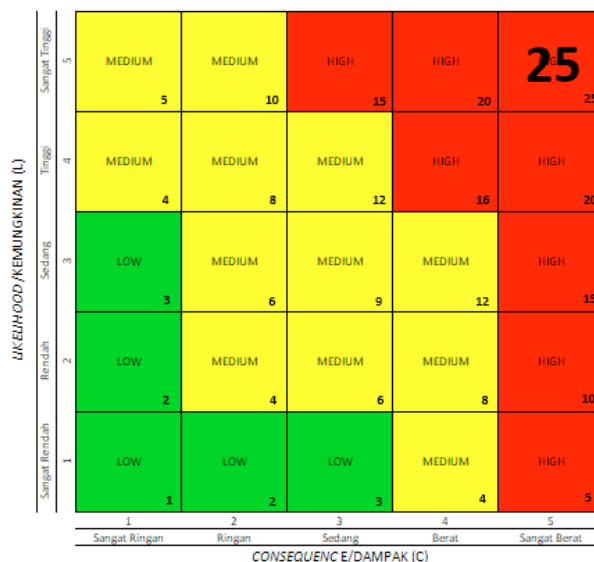
No.	Uraian Risiko Risk Description	
11.	Nama Risiko Risk Name	: Terjadi Kasus Hukum Pajak dan Tuntutan Kurang Bayar di REKIND Tax Law Cases and Underpayment Claims at REKIND
	Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 Early 2021 Risk Level	: 25
	Tingkat Risiko TW IV 2021 Q IV 2021 Risk Level	: 25
	Dampak Risiko: 1. Adanya denda dan bunga pajak. 2. Sanksi kenaikan atas keberatan yang tidak diterima. 3. Sanksi kenaikan atas banding yang tidak diterima. Risk Impact: 1. Fines and tax interest 2. Sanctions increase for objections not accepted 3. Sanctions increase for appeals not accepted	
	Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Menindaklanjuti temuan audit dan menyelesaikan sengketa pajak dengan didampingi konsultan pajak. 2. Memperkuat sistem di <i>Document Control (Finance, Accountig & Tax)</i> , menyusun/update PPWI pengelolaan pajak REKIND, Melakukan tax planning korporasi secara berkelanjutan. a. Menyusun dan memutakhirkan Sistem <i>development Policy, Procedure, and Working Instruction</i> . b. Melakukan pelatihan perpajakan kepada semua tim <i>project</i> agar ada <i>awareness</i> terhadap dokumen pajak. c. Mengusahakan penempatan fungsi manager untuk meningkatkan performa Divisi pajak. d. Meningkatkan koordinasi internal terkait dokumentasi pembayaran. 3. Menerapkan aplikasi SYNTAX untuk administrasi perpajakan. 4. Optimalisasi <i>manpower</i> proyek yang ada untuk ditugaskan sebagai <i>tax officer</i> Realization of Risk Treatment: 1. Follow up audit findings and resolve tax disputes accompanied by a tax consultant 2. Strengthening the Document Control system (Finance, Accountig & Tax), compiling/updating PPWI REKIND tax management, Carrying out corporate tax planning in a sustainable manner a. Develop and update System development Policy, Procedure, and Working Instruction. b. Conduct tax training for all project teams so there is awareness of tax documents. c. Strive for the placement of manager functions to improve the tax division performance. d. Improve internal coordination regarding payment documentation 3. Implement SYNTAX application for tax administration 4. Optimization of existing project manpower to be assigned as tax officer	

Heat Map Risiko **Terjadi Kasus Hukum Pajak dan Tuntutan Kurang Bayar di REKIND:**
Tax Law Cases and Underpayment Claims at REKIND Heat Map Risk:



No.	Uraian Risiko Risk Description
12.	<p>Nama Risiko Risk Name : Kegiatan Usaha Rekind Terganggu/Terhenti (Rekind) Rekind's Business Activities Disrupted/Stop (Rekind)</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko Awal Tahun 2021 : 25 Early 2021 Risk Level</p> <hr/> <p>Tingkat Risiko TW IV 2021 : 25 Q IV 2021 Risk Level</p> <hr/> <p>Dampak Risiko Proyek Rekind berpotensi tidak bisa dilanjutkan dan terkendala denda LD akibat kesulitan pendanaan <i>project</i>. Risk Impact The Rekind project has the potential to be discontinued and is constrained by LD fines due to project funding difficulties</p> <hr/> <p>Realisasi Perlakuan Risiko: 1. <i>Monitoring</i> secara berkala atas timeline proyek yang sedang dijalankan. 2. Melakukan percepatan pencapaian target <i>progress/milestone project ongoing, settlement & realisasi</i> dari CO, serta pengajuan EOT untuk menghindari denda LD. 3. Menyusun strategi restrukturisasi Rekind secara menyeluruh. 4. Memperbaiki kondisi <i>cashflow</i> proyek dan mencari alternatif pendanaan. a. Melakukan efisiensi beban usaha. b. Melakukan penjualan aset. c. Melakukan Penjajakan penjualan saham Rekind di RDM kepada PT PIU dan calon pembeli potensial lain. d. Pemecahan <i>milestone payment</i> untuk mempercepat pembayaran. e. Mengubah <i>retention money</i> menjadi <i>retention bond</i>. f. Mengajukan skema pembayaran langsung dari <i>owner</i> ke vendor/subkontraktor Rekind. 5. Proses special audit di Rekind dan kasus pajak oleh konsultan eksternal, serta meminta pendapat hukum dari Konsultan Hukum, BPKP, Jamdatun. a. Proses audit khusus dan pendampingan kasus perpajakan sedang berjalan didampingi Konsultan Eksternal. b. Dilakukan audit dengan tujuan tertentu atau <i>Agreed Upon Procedures (AUP)</i> oleh BPKP. c. Pendampingan <i>Change Order project on-going</i> oleh BPKP dan Jamdatun. 6. Melakukan Diskusi dan komunikasi yang intens dengan stakeholder utama Rekind.</p> <hr/> <p>Realization of Risk Treatment: 1. Periodic monitoring of the project timeline being implemented. 2. Accelerate the achievement of progress/milestone project ongoing targets, settlement & realization of CO, as well as EOT submissions to avoid LD fines. 3. Develop a comprehensive restructuring strategy for Rekind 4. Improve project cashflow conditions and look for alternative funding. a. Performing operating expense efficiency b. Conduct asset sales c. Explore the sale of Rekind's shares in RDM to PT PIU and other potential buyers. d. Solve payment milestones to speed up payments. e. Change the retention money into a retention bond. f. Propose a payment scheme directly from the owner to the Rekind vendor/subcontractor. 5. Special audit process at Rekind and tax cases by external consultants, as well as requesting legal opinions from Legal Consultants, BPKP, Jamdatun. a. The process of special audits and assistance for tax cases is underway accompanied by an External Consultant. b. Conducted audits with specific objectives or <i>Agreed Upon Procedures (AUP)</i> by BPKP. c. Assistance for on-going <i>Change Order</i> projects by BPKP and Jamdatun. 6. Conduct intense discussions and communication with Rekind's main stakeholders</p>

Heat Map Risiko Kegiatan Usaha Rekind Terganggu/Terhenti (Rekind):
Rekind's Business Activities Disrupted/Stopped (Rekind) Heat Map Risk:



EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

Untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah efektif dijalankan dan mendukung pencapaian sasaran Perseroan, maka Perseroan melakukan penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) setiap tahun. Pelaksanaan PMPMR ini merupakan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko dalam rangka memberikan perbaikan terhadap sistem manajemen risiko di PI Grup, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran penerapan Sistem MRT di Perusahaan saat ini;
2. Menetapkan tingkat maturitas (*maturity level*) penerapan manajemen risiko di lingkungan PI Grup;
3. Mengetahui kesenjangan (*gap*) antara penerapan manajemen risiko di lingkungan PI Group dengan SNI ISO 31000:2018 dan mendapatkan masukan (*feedback*) dalam rangka peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko.

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan PMPMR, mencakup pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, serta pengumpulan data sekunder melalui kajian dokumen. Dari pelaksanaan PMPMR tahun 2021, Konsultan Independen menetapkan Indeks Maturitas Perseroan sebesar sebesar 3,09 dengan kategori *Mature-Defined*.

Adapun tingkatan Indeks Maturitas yang berlaku di Perusahaan dibagi menjadi 6 level dengan rincian:

Kategori Maturitas Maturity Category	Indeks Maturitas Maturity Index
<i>Basic-Non-Existent</i>	1,00 - 1,59
<i>Basic-Initial</i>	1,60 - 2,09
<i>Mature-Repeatable</i>	2,10 - 2,59
<i>Mature-Defined</i>	2,60 - 3,09
<i>Advance-Managed</i>	3,10 - 3,59
<i>Advance-Optimized</i>	3,60 - 4,00

PERNYATAAN MANAJEMEN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Sebagai bentuk komitmen Direksi PTPI dalam menerapkan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan guna menjamin pencapaian Sasaran Perusahaan, PTPI melakukan evaluasi atas penerapan Sistem MRT melalui pelaksanaan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) setiap tahun.

EVALUATION OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS IN 2021

To ensure that the implementation of risk management has been effectively implemented and supports the achievement of the Company's targets, the Company conducts an Annual Risk Management Implementation Maturity Level (PMPMR) assessment, every year. The implementation of this PMPMR is an evaluation of the implementation of Risk Management to provide improvements to the risk management system in the PI Group, with the following objectives:

1. Gain an overview of the current implementation of the MRT System in the Company;
2. Determine the maturity level of risk management implementation within the PI Group;
3. Understand the gap between the implementation of risk management within the PI Group and SNI ISO 31000:2018 and receive feedback in order to improve the quality of risk management.

The methodology used in the implementation of PMPMR includes primary data collection through questionnaires and interviews, as well as secondary data collection through document reviews. From the implementation of PMPMR in 2021, the Independent Consultant determined the Company's Maturity Index of 3.09 in the *Mature-Defined* category.

The Maturity Index levels that apply in the Company are divided into 6 levels with details:

MANAGEMENT STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

As a form of commitment from the PTPI Board of Directors in implementing a systematic, structured and sustainable Integrated Risk Management System (MRT) to ensure the achievement of the Company's Targets, PTPI evaluates the MRT System through a Maturity Level Assessment Risk Management (PMPMR) every year.

Hasil evaluasi tahunan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Penerapan Sistem MRT di PTPI selama tahun 2021 telah memadai.

The results of the annual evaluation carried out show that the MRT system at PTPI during 2021 was adequate.

RENCANA SISTEM MANAJEMEN RISIKO KE DEPAN

FUTURE RISK MANAGEMENT SYSTEM PLAN

Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko di perusahaan, dalam kurun waktu tahun 2022-2024, Perusahaan akan melakukan beberapa rencana pengembangan sistem manajemen risiko sebagai berikut:

To increase the risk management effectiveness in the Company, during the period 2022-2024, the Company will carry out several risk management system development plans as follows:

Tahun 2022

- Mengembangkan dan mereview Pedoman dan Prosedur penerapan manajemen risiko
- Meningkatkan SDM manajemen risiko PI Grup yang kompeten melalui pelaksanaan *training*
- Melakukan sosialisasi/*workshop* penerapan manajemen risiko secara intensif
- Melakukan klinik risiko ke unit kerja setiap triwulan
- Menerapkan *Risk based Budgeting* (RBB)
- Mengembangkan Sistem Deteksi Dini Risiko
- Mengembangkan *Business Continuity Management* (BCM)
- Mengembangkan *Loss Event Management* (LEM)
- Menyusun RTM berdasarkan sasaran RKAP, yang dilengkapi dengan Batas Toleransi Risiko (BTR) dan *Key Risk Indicator* (KRI)
- Mereview kajian risiko aksi korporasi berbasis teknologi informasi
- Melakukan pengukuran tingkat pemahaman *Risk Owner* dan *Risk Officer* terhadap pengelolaan risiko
- Memantau tindak lanjut atas rekomendasi penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko PI Grup setiap triwulan
- Menyelenggarakan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko PI Grup setiap tahun
- Develop and review the Guidelines and Procedures for implementing risk management.
- Improve the competent human resources of the PI Group risk management through the implementation of training.
- Conducting intensive dissemination/*workshop* on risk management implementation.
- Conduct risk clinics to work units every quarter.
- Apply Risk based Budgeting (RBB).
- Develop a Risk Early Detection System.
- Develop Business Continuity Management (BCM).
- Develop Loss Event Management (LEM).
- Prepare RTM based on WP&B targets, which are equipped with Risk Tolerance Limits (BTR) and Key Risk Indicators (KRI).
- Review the risk assessment of information technology-based corporate actions.
- Measure the level of understanding of the Risk Owner and Risk Officer on risk management.
- Monitor the follow-up on the recommendation for the assessment of the maturity level of the implementation of the risk management of the PI Group on a quarterly basis.
- Organize a risk management maturity level assessment of PI Group every year.

Tahun 2023

- Mengembangkan dan me *review* Pedoman dan Prosedur penerapan manajemen risiko
- Meningkatkan SDM manajemen risiko PI Grup yang kompeten melalui pelaksanaan *training*
- Melakukan sosialisasi/*workshop* penerapan manajemen risiko secara intensif
- Melakukan klinik risiko ke unit kerja setiap triwulan
- Menerapkan *Risk based Budgeting* (RBB)
- Mengembangkan Sistem Deteksi Dini Risiko
- Menerapkan *Business Continuity Management* (BCM)
- Mengembangkan *Loss Event Management* (LEM)
- Menyusun RTM berdasarkan sasaran RKAP, yang dilengkapi dengan Batas Toleransi Risiko (BTR) dan *Key Risk Indicator* (KRI)
- Mereview kajian risiko aksi korporasi berbasis teknologi informasi
- Melakukan pengukuran tingkat pemahaman *Risk Owner* dan *Risk Officer* terhadap pengelolaan risiko
- Memantau tindak lanjut atas rekomendasi penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko PI Grup setiap triwulan
- Menyelenggarakan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko PI Grup setiap tahun
- Develop and review Guidelines and Procedures for implementing risk management.
- Improve the competent human resources of the PI Group risk management through the implementation of training.
- Conduct intensive dissemination/*workshop* on risk management implementation.
- Carry out risk clinics to work units every quarter.
- Apply Risk based Budgeting (RBB).
- Develop a Risk Early Detection System.
- Implement Business Continuity Management (BCM).
- Develop Loss Event Management (LEM).
- Prepare RTM based on WP&B targets, which are equipped with Risk Tolerance Limits (BTR) and Key Risk Indicators (KRI).
- Review the risk assessment of information technology-based corporate actions.
- Measure the level of understanding of the Risk Owner and Risk Officer on risk management.
- Monitor the follow-up on the recommendation for the assessment of the maturity level of the application of risk management of the PI Group every quarter.
- Conduct a risk management maturity level assessment of PI Group every year.

Tahun 2024

- Mengembangkan dan mereview Pedoman dan Prosedur penerapan manajemen risiko
- Meningkatkan SDM manajemen risiko PI Grup yang kompeten melalui pelaksanaan *training*
- Melakukan sosialisasi/*workshop* penerapan manajemen risiko secara intensif
- Melakukan klinik risiko ke unit kerja setiap triwulan
- Menerapkan *Risk based Budgeting* (RBB)
- Menerapkan Sistem Deteksi Dini Risiko
- Menerapkan *Business Continuity Management* (BCM)
- Menerapkan *Loss Event Management* (LEM)
- Menyusun RTM berdasarkan sasaran RKAP, yang dilengkapi dengan Batas Toleransi Risiko (BTR) dan *Key Risk Indicator* (KRI)
- Mereview kajian risiko aksi korporasi berbasis teknologi informasi
- Melakukan pengukuran tingkat pemahaman *Risk Owner* dan *Risk Officer* terhadap pengelolaan risiko
- Memantau tindak lanjut atas rekomendasi penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko PI Grup setiap triwulan
- Menyelenggarakan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko PI Grup setiap tahun
- Develop and review Guidelines and Procedures for implementing risk management.
- Improve the competent human resources of the PI Group risk management through the implementation of training.
- Conduct intensive dissemination/*workshop* on risk management implementation.
- Conduct risk clinics to work units every quarter.
- Apply Risk based Budgeting (RBB).
- Implement a Risk Early Detection System.
- Implement Business Continuity Management (BCM).
- Implement Loss Event Management (LEM).
- Develop RTM based on WP&B targets, which are equipped with Risk Tolerance Limits (BTR) and Key Risk Indicators (KRI).
- Review the risk assessment of information technology-based corporate actions.
- Measure the level of understanding of the Risk Owner and Risk Officer on risk management.
- Monitor the follow-up on the recommendation for the assessment of the maturity level of the application of risk management of the PI Group every quarter.
- Organize a risk management maturity level assessment of PI Group every year.

PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Penilaian atas penerapan sistem manajemen risiko perusahaan, dapat tercermin dari hasil penilaian KPI Kompartemen MR tahun 2021. Adapun beberapa indikator penilaian terkait Manajemen Risiko antara lain:

1. Pencapaian indeks Maturitas Manajemen Risiko PTPI;
2. Penurunan Tingkat Risiko Utama *Holding*;
3. Penurunan Tingkat Risiko Utama Anak Perusahaan;
4. Pemenuhan Kajian Risiko Aksi Korporasi; dan
5. Pencapaian Indeks Pemahaman Manajemen Risiko Pupuk Indonesia.

Atas implementasi sistem manajemen risiko perusahaan sepanjang tahun 2021, diperoleh hasil seluruh indikator dalam KPI kompartemen tersebut diatas tercapai diatas >100% dari yang ditargetkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kinerja Fungsi Manajemen Risiko PTPI tahun 2021 berjalan dengan baik.

ASSESSMENT OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company's risk management system assessment is reflected in the results of the 2021 MR Compartment KPI assessment. The assessment indicators related to Risk Management included:

1. Achievement of PTPI Risk Management Maturity Index,
2. Reducing the Holding' Main Risk Levels,
3. Reducing the Subsidiaries' Main Risk Levels,
4. Compliance with the Corporate Action Risk Assessment, and
5. Achievement of the Pupuk Indonesia Risk Management Understanding Index.

For the application of the Company's risk management system throughout 2021, the results for all the indicators in the KPI compartment show achievements above >100% of the target. This indicates that the PTPI Risk Management Function Performance in 2021 is going well.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN PERSEROAN (MSOP/ ESOP)

SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES AND/OR COMPANY MANAGEMENT (MSOP/ESOP)

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program* (MSOP), dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau *Employees Stock Option Program* (ESOP). Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Until the end of 2021, the Company has never established a Management Stock Ownership Program (MSOP), or an Employee Stock Option Program (ESOP). All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

PERKARA PENTING

IMPORTANT CASES

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2021 atau telah dinyatakan selesai di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

The details of the legal issues involving the Company in 2021, or which have been declared completed in 2021, are as follows.

No.	Perusahaan Company	Para Pihak Parties in Litigation	Pokok dan Nilai Perkara Case Principal and Value	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company						
1.	PTPI	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil						
2.	PKG	<table border="0"> <tr> <td>Pemohon Plaintiff</td> <td>PKG</td> </tr> <tr> <td>Termohon I Respondent I</td> <td>Abdul Aziz Asikin, Direktur CV Sumber Tani</td> </tr> <tr> <td>Tergugat Defendent</td> <td>Budi Dwi Santosa, Persero Komanditer CV Sumber Tani</td> </tr> </table>	Pemohon Plaintiff	PKG	Termohon I Respondent I	Abdul Aziz Asikin, Direktur CV Sumber Tani	Tergugat Defendent	Budi Dwi Santosa, Persero Komanditer CV Sumber Tani	<p>Perselisihan hak Pemohon yang menderita kerugian senilai yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp1.789.154.555 (Harga total pembelian produk Pemohon) -Rp179.815.455 (keuntungan yang seharusnya didapat Pemohon per tahun) -Rp250.000.000 (biaya berperkara) <p>Disputes over the Plaintiffs' rights who suffered losses of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp1,789,154,555 (Total purchase price of the Plaintiffs' products) -Rp179,815,455 (profit that should be obtained by the Plaintiffs per year) -Rp250,000,000 (litigation fee) 	<p>Telah terbit putusan PN Gresik</p> <p>Decision by the Gresik District Court has been published</p>	<p>berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait yang berwenang serta berkoordinasi dengan konsultan hukum</p> <p>coordinate with the relevant authorized agencies and coordinate with legal consultants</p>	<p>Rp1.789.154.555 (Harga total pembelian produk Pemohon)</p> <p>Rp179.815.455 (keuntungan yang seharusnya didapat Pemohon per tahun)</p> <p>Rp1,789,154,555 (Total purchase price of the Plaintiffs' products)</p> <p>Rp179,815,455 (profit that should be obtained by the Plaintiffs per year)</p>
Pemohon Plaintiff	PKG											
Termohon I Respondent I	Abdul Aziz Asikin, Direktur CV Sumber Tani											
Tergugat Defendent	Budi Dwi Santosa, Persero Komanditer CV Sumber Tani											
3.	PKC	<table border="0"> <tr> <td>Pemohon Plaintiff</td> <td>PKC</td> </tr> <tr> <td>Termohon Respondent</td> <td>Cuu Long Vietnam Fertilizer</td> </tr> </table>	Pemohon Plaintiff	PKC	Termohon Respondent	Cuu Long Vietnam Fertilizer	<p>Wanprestasi Cuu Long Vietnam Fertilizer atas sales contract</p> <p>Default on Cuu Long Vietnam Fertilizer sales contract</p>	<p>Proses pelaksanaan putusan</p> <p>In the decision process</p>	<p>berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait yang berwenang serta berkoordinasi dengan konsultan hukum</p> <p>coordinate with the relevant authorized agencies and coordinate with legal consultants</p>	<p>Nihil Nil</p>		
Pemohon Plaintiff	PKC											
Termohon Respondent	Cuu Long Vietnam Fertilizer											
4.	PKT	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil						

No.	Perusahaan Company	Para Pihak Parties in Litigation	Pokok dan Nilai Perkara Case Principal and Value	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company	
5.	PIM	Penggugat Plaintiff	Ali Gadeng	perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli rumah dalam komplek perumahan PT AAF unlawful acts during the sale and purchase of houses in the PT AAF housing complex	Proses di Pengadilan Tingkat I Jakarta Pusat In process at the Central Jakarta Level I Court	Berkoordinasi dengan konsultan hukum Coordinate with the legal consultant	Berdasarkan gugatan Tergugat : Rp1.250.000.000 Based on the Defendant's lawsuit: Rp1,250,000,000
		Tergugat I Defendant I	Likuidator PT Asean Aceh Fertilizer (AAF)				
		Tergugat II Defendant II	PI c/q PIM				
		Tergugat III Defendant III	Barrori Mirza				
		Tergugat IV Defendant IV	Henderi Suhari				
6.	PSP	Penggugat Plaintiff	PSP	Gugatan wanprestasi (klaim THT)	Proses di Pengadilan Negeri Palembang	berkoordinasi dengan konsultan hukum	Gugatan tidak dipenuhi
		Tergugat Defendant	AJB Bumiputra	Default lawsuit (ENT claim)	In process at the Palembang District Court	coordinate with the legal consultant	Claim not fulfilled
7.	REKIND	Penggugat Plaintiff	Rekind	Wanprestasi terhadap perjanjian pemborongan Proyek Donggi, Nilai gugatan : Rp 11.640.620.480,-	Proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	berkoordinasi dengan konsultan hukum	-
		Tergugat Defendant	PT Bank Pembangunan Bengkulu	Default on the Donggi Project charter agreement, Claim value : Rp11,640,620,480,-	In process at the South Jakarta District Court	coordinate with the legal consultant	
		Turut Tergugat Co- Defendant	PT Gatramas Internusa				
8.	ME	Tergugat Defendant	PT Masyarakat Pratama Anindita	Hutang Piutang : wanprestasi terhadap perjanjian jual beli pupuk urea non subsidi terkait dengan kewajiban membayar piutang Payables Receivables: default on the sale and purchase agreement of non-subsidized urea fertilizer related to the obligation to pay debts	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah mengeluarkan Putusan Nomor Perkara 497/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Tertanggal 24 April 2018 The Central Jakarta District Court Special Class IA has issued its Decision Number 497/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. dated April 24, 2018	melakukan proses penagihan piutang sesuai dengan Putusan Pengadilan carry out the receivables collection process in accordance with the Court's Decision	kerugian terhadap ME loss to ME
		Penggugat Plaintiff	ME				
9.	PILOG	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	

No.	Perusahaan Company	Para Pihak Parties in Litigation	Pokok dan Nilai Perkara Case Principal and Value	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company
10.	PIE	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
11.	PIP	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris maupun Direksi tidak ada yang mendapatkan sanksi administrasi.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELATED AUTHORITIES

Throughout 2021, the Company, its subsidiaries, the Board of Commissioners and the Board of Directors did not receive administrative sanctions.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan akses informasi dan data Perusahaan. Penyebaran Informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari implementasi prinsip transparansi Informasi. Kebijakan ini mengacu pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan, “bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik”, dan sebagai pelaksanaan prinsip GCG. Perusahaan selalu memberikan informasi yang lengkap, bermanfaat, dan termutakhir terkait pemberian informasi kepada Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yang dalam hal ini adalah Sekretaris Perusahaan.

Informasi-informasi yang relevan terkait Perusahaan telah disampaikan melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Penyampaian Laporan Manajemen Tahunan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris senantiasa tepat waktu, yaitu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam penerapan keterbukaan informasi untuk keperluan internal yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan berupa Laporan Tahunan, RKAP, RJPP, kebijakan dan prosedur Perusahaan serta informasi terbaru lainnya tentang Perusahaan melalui berbagai media komunikasi seperti *Website*, Siaran Pers, Portal, Media Cetak, Media Elektronik dan Surat Edaran. Berdasarkan media yang digunakan, informasi dan data mengenai Perusahaan dapat diperoleh melalui sejumlah saluran komunikasi.

SISTEM WEB

Situs web memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan yang menampilkan kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan. Situs web ini dapat diakses melalui *link* www.pupuk-indonesia.com. Melalui situs tersebut para *Stakeholder* dapat menemukan banyak konten yang memuat berbagai informasi terkini Perusahaan seperti Profil PTPI, produk

The Company always provides easy access to Company information and data. Dissemination of information to all stakeholders is an important part of implementing the principle of information transparency. This refers to the 2008 Law No. 14 concerning Public Information Disclosure that stated, “Public Information Disclosure is a means of optimizing public scrutiny of the State and other Public Agencies administration, and everything that results from it, in the public interest”, and as an implementation of GCG principles. The Company always provides complete, useful and up-to-date information related to providing information to Shareholders and Stakeholders. Information disclosure is carried out by officials or work units in accordance with their duties, authorities and responsibilities, in this case the Corporate Secretary.

Relevant Company information is submitted through the Quarterly and Annual Management Reports to the Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders. Submission of Annual Management Reports to Shareholders and the Board of Commissioners is always on time, and in accordance with the stipulated provisions.

The application of information disclosure for internal purposes related to the Company’s planning that may have a significant effect on employees in the form of Annual Reports, WP&B, RJPP, Company policies and procedures as well as other latest information about the Company through various communication media such as Websites, Press Releases, Portals, Media Print, Electronic Media and Circular Letters. Based on the media used, information and data regarding Pupuk Indonesia can be obtained through a number of communication channels.

WEBSITE

Websites play a significant role in the governance of information disclosure. Information disclosure and availability on the Company’s website will provide benefits to the public and stakeholders by displaying the Company’s operational activities and performance. This website can be accessed through the link www.pupuk-indonesia.com. On this site, Stakeholders can find the latest information on the Company including the PTPI Profile, products and services, marketing, CSR & HSE, daily fertilizer stock, Latest

dan jasa, pemasaran, CSR & HSE, stok pupuk harian, Berita Terkini dan e-Proc, Tata Kelola Perusahaan termasuk *Annual Report* maupun *Sustainability Report*. Guna meningkatkan kualitas informasi dan berita terkini mengenai Perusahaan yang disampaikan kepada publik, Perusahaan senantiasa memutakhirkan konten secara berkala dan berkelanjutan.

MEDIA DIGITAL “SPIN” (SEPUTAR PI GROUP)

SPIN merupakan tabloid digital yang terbit di setiap bulannya yang digunakan sebagai media komunikasi seluruh karyawan Perusahaan. SPIN memuat berbagai artikel informatif terkait kegiatan PTPI dalam kurun waktu satu bulan yang bertujuan menyebarkan informasi kepada karyawan mengenai informasi terkait Perusahaan. Sebagai media internal Perusahaan, SPIN menjadi wadah dan sarana bagi jajaran manajemen untuk dapat menyosialisasikan program kerja, strategi bisnis yang dijalankan serta target yang harus tercapai oleh Perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Informasi yang tercantum dalam majalah dikemas dalam bahasa informatif sehingga mudah dipahami oleh seluruh karyawan. SPIN dibagikan terbatas hanya kepada internal karyawan serta Entitas Anak.

FORUM KOMUNIKASI INTERNAL

Perusahaan menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi karyawan dengan manajemen yang secara berkala dilakukan oleh Direksi kepada seluruh karyawan, Direksi kepada jajaran manajemen, serta masing-masing unit kerja baik melalui *family gathering*, rapat kerja, *morning briefings*, dan kegiatan perusahaan lainnya.

MEDIA SOSIAL

Perusahaan mengoptimalkan jejaring sosial/*social media* sebagai sarana komunikasi dua arah antara perusahaan dengan *Stakeholders* maupun dengan pelanggan dan masyarakat. Sarana komunikasi ini digunakan sebagai penyebaran informasi produk maupun sarana *customer care*. Sosial media perusahaan dapat diakses melalui:

Twitter : @Pupuk_Indonesia
Instagram : PT PupukIndonesia

News and e-Proc, Corporate Governance including the Annual Report and Sustainability Report. To enhance the quality of the Company's latest information and news for public use, the Company regularly and continuously updates the website content.

“SPIN” DIGITAL MEDIA (ABOUT PI GROUP)

The SPIN digital tabloid is published every month which is a communication medium for all Company employees. SPIN contains various informative articles related to PTPI's activities within the month aimed at disseminating information to employees regarding information related to the Company. As the Company's internal media, SPIN is a forum and a means for management to disseminate work programs, business strategies carried out, and targets that must be achieved by the Company in the short, medium and long term. The information contained in the magazine is packaged in such a way all employees can easily understand it. SPIN is distributed only to internal and Subsidiary employees.

INTERNAL COMMUNICATION FORUM

The Company provides communication opportunities to facilitate discussions for employees with management. These are regularly carried out by the Board of Directors with all employees, the management, and all work units through family gatherings, work meetings, morning briefings, and other Company activities.

SOCIAL MEDIA

The Company uses social networking/media as a means of two-way communication between the Company and its Stakeholders as well as with customers and the public. These communication tools are used to disseminate product information and customer care facilities. Corporate social media can be accessed through:

Twitter : @Pupuk_Indonesia
Instagram : PT PupukIndonesia

LAPORAN TAHUNAN

Perusahaan juga menyediakan sarana informasi melalui Laporan Tahunan yang disusun setiap tahunnya. Laporan Tahunan ini akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi massa, media massa dan masyarakat.

ANNUAL REPORT

The Company also delivers information through an Annual Report every year. The Annual Reports are submitted to Shareholders, regulators, mass organizations, mass media and the public.

Tema Theme	Tahun Year
Mengoptimalkan Sinergi Menuju Kinerja yang Berkelanjutan Optimize Synergy, Towards a Sustainable Performance	2016
Sinergi dan Transformasi untuk Keberlanjutan Perusahaan Synergy and Transformation for Company Sustainability	2017
Transformasi untuk Masa Depan Transformation for the Future	2018
Transformasi Memperkuat Daya Saing untuk Kinerja Unggul Transformation to Strengthen Competitiveness for Excellent Performance	2019
Agrosolusi untuk Indonesia Agro-Solution for Indonesia	2020
Memperkuat Konsolidasi, Melewati Tantangan, Menyambut Peluang Strengthen Consolidation, Overcome Challenges, Seize Opportunities	2021

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Selain itu, PTPI juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan perusahaan secara menyeluruh melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan bersamaan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi massa, media massa dan masyarakat.

SUSTAINABILITY REPORT

In addition, PTPI delivers information on all Company activities through Sustainability Reports that are published with the Annual Report. The Sustainability Reports are submitted to Shareholders, regulators, mass organizations, mass media and the public.

Tema Theme	Tahun Year
Memupuk Keberlanjutan Menuju Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Bangsa Cultivate Sustainability Towards Food Security for the Nation's Prosperity	2016
Sinergi untuk Keberlanjutan Synergy for Sustainability	2017
Transformasi untuk Keunggulan dan Keberlanjutan Transformation for Excellence and Sustainability	2018
Bersinergi Demi Mensejahterakan Kedaulatan Pangan Nasional Synergy for national food sovereignty	2019
Transformasi Demi Mensejahterakan Kedaulatan Pangan Nasional Transformation for the success of national food sovereignty	2020
Mengembangkan Keberlanjutan Demi Ketahanan Pangan Developing Sustainability for Food Security	2021

MEDIA KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Perusahaan juga memiliki ragam media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

TYPE OF MEDIA USED FOR SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

The Company also uses a variety of communication media to convey data and information related to the Company's operational activities, business processes and performance achievements that can be seen in the table below.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk-Bentuk Media Type of Media
Regulator Regulators	Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja Komisi, dan Rapat dengan Kementerian/Lembaga Negara, publikasi kepatuhan di media massa Hearing Meeting, Commission Work Meeting, and Meeting with State Ministries/Institutions, compliance publications in the mass media
Pemegang Saham Shareholders	RUPS, RUPSLB, Rapat dengan Pimpinan Kementerian BUMN, Publikasi Kinerja dan Capaian di media massa GMS, EGMS, Meeting with the Leaders of the Ministry of SOEs, Publication of Performance and Achievements in the mass media
Investor Investors	<i>Website</i> Perusahaan, Akun Media Sosial Perusahaan, Publikasi Kinerja dan capaian di media massa Company's Website, Corporate Social Media Accounts, Performance Publications and achievements in the mass media
Lembaga Publik Public Institutions	<i>Website</i> Perusahaan dan Akun Media Sosial Perusahaan Company's Website and Corporate Social Media Accounts
Konsumen Consumers	<i>Website</i> Perusahaan, Akun Media Sosial Perusahaan, Kanal Media Sosial Entitas Anak Company's Website, Corporate Social Media Accounts, Subsidiaries' Social Media Channels
Karyawan Employees	Majalah SPIN, TV Media, Video, Poster/E-Flyer, TBanner, Spanduk, Email Perusahaan dan <i>Desktop Background</i> SPIN Magazine, TV Media, Video, Poster/E-Flyer, TBanner, Banners, Corporate Email and Desktop Background
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Akun media sosial Perusahaan Company's Social Media Account
Mitra Kerja dan Rekanan Work Partners and Partners	Akun media sosial Perusahaan Company's Social Media Account
Organisasi Profesi Professional Organizations	Akun media sosial Perusahaan Company's Social Media Account
Masyarakat/Ummum General Public	Akun media sosial Perusahaan, publikasi kinerja dan capaian di media massa Company's social media accounts, performance publications and achievements in mass media

PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

CODE OF CONDUCT

Kode Etik merupakan pedoman perilaku bagi jajaran Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para pelanggan, rekanan maupun rekan kerja. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan bentuk upaya Perusahaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola, yang selama ini mendukung Perusahaan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal/ Pemegang Saham namun juga segenap Pemangku Kepentingan. Untuk itulah, Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*).

Code of Conduct is the cornerstone of the behavior of the Company's people in carrying out their daily duties and activities and in conducting business relationships with customers, partners, colleagues, and other stakeholders. The Code of Conduct is a form of the Company's efforts to apply the principles of governance, which to date have supported the Company in achieving the established Vision and Mission.

The Company understands the importance of implementing GCG as a tool to continuously increasing value and long-term business growth not only for Shareholders but also for all stakeholders. To that end, the Company is committed to implementing GCG consistently, one way by applying the Company's Code of Conduct.

VISI & MISI
Vision and Mission

TATA NILAI
Values

PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU
Code of Conduct

PENETAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PERUSAHAAN

Perusahaan telah menyusun Pedoman Etika dan Perilaku untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai di Perusahaan sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku pertama kali diterbitkan dan ditandatangani secara bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 5 November 2012. Sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 016/KEP.KOM/XII/2021 dan 116.1/A/KU/E42/SK/2021 pada tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PTPI.

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Maksud penerapan Pedoman Etika dan Perilaku bagi Setiap Insan Perusahaan sebagai berikut:

1. Setiap Insan Perusahaan memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

ESTABLISHMENT OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT

The Company has established a Code of Ethics and Conduct to serve as a behavioral reference for the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees in the Company as part of the Company's efforts to its achieve Vision and Mission. The Code of Ethics and Conduct was first issued and signed jointly by the President Commissioner and the President Director on November 5, 2012. In accordance with Pupuk Indonesia's business development, the Code of Conduct Guidelines have been updated through a Joint Decree of the PTPI's Board of Commissioners and Board of Directors Number 016/KEP.KOM/XII/2021 and Number 116.1/A/KU/E42/SK/2021 dated December 16, 2021 about the PTPI Code of Conduct.

THE CODE OF CONDUCT GUIDELINES, PURPOSE, OBJECTIVE AND BENEFIT

The purpose of applying the Company's Code of Conduct Guidelines are as follows:

1. All Company Personnel understand that all Company activities are based on the principles of good corporate governance;

2. Setiap Insan Perusahaan agar berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
3. Setiap Insan Perusahaan menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
4. Setiap Insan Perusahaan meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan sebagai bagian dari pengelolaan risiko sekaligus membangun reputasi Perusahaan.

Tujuan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bertingkah laku tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
2. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai secara menyeluruh;
3. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pegawai, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
4. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan PTPI sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
5. Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa PTPI dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan; dan
6. Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholders*.

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku ini secara konsisten dan konsekuen oleh Insan Perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perusahaan
 - a. Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan Pelanggan, Masyarakat, Pemerintah dan *Stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan; dan
 - b. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

2. All Company Personnel are to behave well in carrying out all Company activities;
3. Every Company Personnel creates a healthy and comfortable working atmosphere within the Company's environment;
4. Every Person in the Company minimizes the opportunity for irregularities to occur as part of risk management while building the Company's reputation.

The objectives of implementing the Pupuk Indonesia's Code of Conduct were:

1. To be a behavioral guide on what can be done, and what cannot be done;
2. Create a working environment that upholds the Company's values and culture to improve the overall performance and productivity of employees;
3. Encourage operational activities to be more efficient and effective given that the relationships with employees, partners, customers, the community, government and other Stakeholders have ethical standards that must be considered;
4. Increase the value of the Company by providing certainty and protection to Stakeholders in dealing with PTPI to produce a good reputation, which in turn will realize long-term business success;
5. Increase the Shareholders' confidence that PTPI is managed prudently, efficiently, transparently, accountably and fairly to achieve the expected level of profitability while still taking into account the interests of the Company; and
6. Create a harmonious and mutually beneficial relationship with Stakeholders.

The consistent and consequential application of this Code of Conduct by Company Personnel is expected to provide benefits for:

1. The Company
 - a. Encourage the Company's operational activities to be more efficient and effective, bearing in mind that relations with Customers, the Communities, the Government and other Stakeholders already have ethical standards that must be considered; and
 - b. Increase the value of the Company by providing certainty and protection to Stakeholders in dealing with the Company to produce a good reputation, which in turn will realize long-term business success.

2. Pemegang Saham
Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
3. Insan Perusahaan
 - a. Memberikan pedoman kepada setiap Insan Perusahaan tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan; dan
 - b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Insan Perusahaan secara menyeluruh.
4. Masyarakat dan pihak lain yang terkait
Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

POKOK-POKOK ISI PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Adapun muatan yang terkandung dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan terdiri dari:

1. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud, Tujuan, dan Manfaat, Landasan Penyusunan, Visi-Misi, Tata Nilai Perusahaan, dan Daftar Istilah).
2. Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan (Karyawan, Pemerintah, Pemegang Saham, Pelanggan, Mitra Usaha, Pesaing, Kreditur/Investor, Penyedia Barang/Jasa, Masyarakat dan Lingkungan Sekitar, Media Massa, dan Entitas Anak sebagai Anggota *Holding*).
3. Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan (Komitmen Insan Perusahaan, Etika Kerja Insan Perusahaan, Tata Perilaku Insan Perusahaan).
4. Penegakkan Pedoman Etika dan Perilaku (Komitmen Penegakkan Etika dan Perilaku, Sosialisasi dan Internalisasi, Pelanggaran).

PENGUNGKAPAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan tanggung jawab seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya Perusahaan sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

2. Shareholders
Add confidence that the Company is managed in a trustworthy, prudent, efficient, transparent, accountable and fair manner to achieve the level of profitability expected by Shareholders while still taking into account the interests of the Company.
3. Company Personnel
 - a. Provide guidelines for all Company Personnel on the desired or prohibited behaviors in the Company; and
 - b. Create a working environment that upholds the values of honesty, ethics and openness to improve the performance and productivity of every individual of the Company as a whole.
4. Communities and other related parties
Create a harmonious and mutually beneficial relationship with the Company, which in turn will create economic and social welfare for the communities and other related parties.

CODE OF CONDUCT PRINCIPAL CONTENTS

The Company's Code of Conduct consists of:

1. Introduction (Background, Purpose, Objectives and Benefits, Foundation for Development, Vision-Mission, and Corporate Values).
2. The Company's Code of Conduct with Stakeholders (Employees, Government, Shareholders, Customers, Business Partners, Competitors, Creditors/Investors, Goods/Services Providers, Communities and Surrounding Environment, Mass Media, and Subsidiaries);
3. Commitment, Work Ethics and Behavior of Corporate Personnel (Commitments of Corporate Personnel, Work Ethics of Corporate Personnel, Corporate Personnel Conduct);
4. Enforcement of Code of Conduct (Commitment to Enforce Code of Conduct, Dissemination and Internalization, Violations).

DISCLOSURE OF CODE OF CONDUCT APPLICATION TO ALL ORGANIZATION LEVELS

The Code of Conduct is the responsibility of all employees, the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Committees under the Board of Commissioners to act in accordance with the Company's culture so that professional, responsible, reasonable, appropriate, and trustworthy behavior is realized in conducting business relationships with colleagues and work partners.

Pelaksanaan kode etik ini merupakan upaya untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada seluruh Insan Perusahaan bahwa Perusahaan beroperasi secara jujur dan terbuka, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, dengan tingkat perputaran karyawan yang rendah dan peningkatan kesejahteraan;
2. Menjadi bagian dari komunitas tertentu, dimana menjaga hubungan baik merupakan hal mendasar bagi sukses jangka panjang Perusahaan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi; dan
3. Menjadi bagian dari industri pupuk nasional, di mana pelaksanaan dan komitmen terhadap Kode Etik dapat mendukung Perusahaan dalam berbagai perkara penting, serta menjadi bagian dari manajemen risiko yang baik, dan mampu membangun reputasi Perusahaan.

UPAYA PENYEBARAN DAN SOSIALISASI PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) SERTA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Sebagai wujud komitmen terhadap penegakan prinsip GCG, Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku, karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan PTPI yang berperilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi serta seluruh karyawan.

Penandatanganan pernyataan Komitmen terhadap Pedoman Etika dan Perilaku sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Jumlah Karyawan 2021 Total Employees in 2021	Jumlah Insan Perusahaan yang Telah Menandatangani Pernyataan Komitmen Number of Company Personnel Who Have Signed the Statement of Commitment	Jumlah Insan Perusahaan yang Belum Menandatangani Pernyataan Komitmen Number of Company Personnel Who Have Not Signed the Commitment Statement
354 karyawan 354 Employees	100%	100%

Pernyataan komitmen terhadap Pedoman Etika dan Perilaku dituangkan dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas. Adapun pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan Karyawan dapat dilihat dalam rincian tabel di bawah ini.

The implementation of this code of conduct is an effort to:

1. Provide understanding to all Company personnel that the Company operates honestly and openly, to create a good working environment, with low employee turnover and increased welfare;
2. Be part of a particular community, where maintaining good relations is fundamental to the Company's long-term success in achieving social welfare and economic improvement; and
3. Be a part of the national fertilizer industry, where the implementation and commitment to the Code of Conduct can support the Company in various important matters, as well as being part of good risk management, and being able to build the Company's reputation.

EFFORTS TO DISSEMINATE AND PROMOTE THE CODE OF CONDUCT AND THE SIGNING OF THE INTEGRITY PACT

As a form of commitment to upholding GCG principles, the Company continues to disseminate the Code of Ethics and Conduct, as socialization is an important stage in the creation of PTPI personnel who behave in accordance with the Corporate Culture. The Code of Ethics and Conduct is communicated and socialized to the Board of Commissioners and its supporting bodies, the Board of Directors and all employees.

The signing of the statement of Commitment to the Code of Conduct until 2021 is as follows:

The statement of commitment to the Code of Conduct is stated in the form of signing an Integrity Pact. In 2021, all the Board of Commissioners, Directors, Supporting Bodies of the Board of Commissioners, and Employees have signed an integrity pact with the following details:

No.	Jabatan Position	Jumlah Total	Jumlah yang sudah tanda tangan Pakta integritas The number that has signed the integrity pact	Persentase Percentage
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	8	8	100%
2	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Bodies of the Board of Commissioners	11	11	100%
3	Direksi Board of Directors	8	8	100%
4	Pejabat <i>Grade</i> I Grade I Officials	40	40	100%
5	Pejabat <i>Grade</i> II Grade II Officials	83	83	100%
6	Staf Fungsional Functional Staff	288	288	100%
Jumlah Total		438	438	100%



KEBIJAKAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan dan menyediakan fasilitas pengaduan terhadap pelanggaran etika Perusahaan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan.

Dalam Pedoman Etika dan Perilaku, apabila terdapat pelanggaran etika maka untuk memberikan efek jera kepada seluruh insan perusahaan, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

SANKSI PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Berdasarkan Peraturan Perusahaan No. 079/SK/DIR/2017 jenis sanksi diklasifikasikan dari sanksi yang ringan hingga yang terberat.

DISCIPLINARY ENFORCEMENT AND VIOLATION MANAGEMENT POLICY

The Company conducts regular monitoring of enforcement, and provides a facility for reporting grievances or complaints against violations of Company ethics through the Company's *Whistleblowing System* (WBS) application.

In the Code of Conduct, if there are any ethics violations, as a deterrent to all Company personnel, sanction will be given in accordance with the applicable rules and regulations.

CODE OF CONDUCT VIOLATION SANCTIONS

Based on Company Regulation Number 079/SK/DIR/2017 the types of sanctions range from minor to severe sanctions.

No.	Pedoman Guidelines	Uraian Description
1	Klasifikasi Sanksi: Sanctions Classification	Jenis Sanksi: Type of Sanction:
	Sanksi Ringan Minor Sanction	Teguran lisan dan tertulis Oral and Written Reprimands
	Sanksi Sedang Medium Sanction	Surat Peringatan Tertulis (<i>Warning Slip</i>) A berlaku 6 (enam) bulan, Surat Peringatan Tertulis (<i>Warning Slip</i>) B berlaku 6 (enam) bulan, dan Surat Peringatan Tertulis (<i>Warning Slip</i>) C berlaku 6 (enam) bulan Warning Slip A valid for 6 (six) months, Warning Slip B valid for 6 (six) months, and Warning Slip C valid for 6 (six) months
	Sanksi Berat Severe Sanction	Surat Peringatan Tertulis (<i>Warning Slip</i>) C dan penurunan Grade atau jabatan minimal satu tingkat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Warning Slip C and Grade or Position demotion at least one level, dan Termination of Employment.
	Ganti Kerugian Compensation	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila terjadi kerugian material terhadap Perusahaan, akibat dari perbuatan pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja, di samping sanksi hukuman seperti tersebut dalam butir a, b, c d iatas, diberikan juga sanksi/hukuman ganti rugi senilai kerugian yang ditimbulkan; • Ganti rugi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji, jasa operasi, bantuan cuti, dan hak-hak lainnya. Apabila Karyawan tidak bersedia mengganti maka akan diproses secara hukum. • If there is a material loss to the Company, as a result of violations of work regulations or discipline, in addition to the sanctions as referred to in items a, b, c above, there will also be compensation/ penalties for losses incurred; • Compensation can be made by salary deductions, operating services, leave assistance, and other rights. If the employee does not agree, legal proceedings will follow.
2	Bentuk Sanksi Form of Sanction	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan akan memberikan sanksi/hukuman kepada Karyawan yang melakukan pelanggaran sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran yang dilakukan karyawan; • Pemberian sanksi/hukuman tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan usaha korektif dari Perusahaan, agar Karyawan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari; • Teguran Lisan bersifat internal unit kerja dan harus menjadi perhatian serius dari Karyawan, bahwa Teguran Lisan tersebut sudah merupakan catatan dari atasan untuk menilai kondikte Karyawan yang bersangkutan; • Teguran tertulis berlaku untuk seluruh lingkungan unit kerja di Perusahaan dan juga akan mempengaruhi kondikte dari Karyawan yang bersangkutan; • Selama masa proses penyelesaian kasus pelanggaran hingga berlakunya sanksi seperti tersebut di atas, Karyawan tidak berhak atas kenaikan pangkat baik <i>Promotion Increase</i> maupun <i>Merit Increase</i>; • Apabila ada atasan yang tidak mau melaksanakan dan/atau mengeluarkan sanksi/hukuman terhadap Karyawan yang patut menerimanya dalam kurun waktu tertentu, maka Pejabat/Atasan tersebut akan diberikan sanksi administratif atau <i>warning slip</i> oleh pejabat yang lebih tinggi lagi dan diketahui oleh Departemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) • The Company will impose sanctions/penalties on employees who commit violations based on the level of error/violation committed by employees; • The sanctions/punishments are intended as an effort to guide and to correct by the Company, so that employees can improve their attitudes and behavior in the future; • Oral reprimands are internal to the work units and must be taken seriously by the employees, as the oral reprimand is a note for the supervisor when assessing the employee's conduct; • Written warnings applied to the entire work unit in the Company will also affect the conduct of the employee concerned; • During the process of resolving violation cases until sanctions are imposed, the employee is not entitled to promotion, either by a Promotion or a Merit Increase; • In the event a supervisor refuses to implement and/or impose sanctions/ penalties on an Employee • Who is entitled to receive such within a certain period of time, the supervisor will be given an administrative sanction or warning slip by a higher official, with the knowledge of the Human Resource Management Department.

JUMLAH PELANGGARAN ETIKA

Dalam rangka penegakan terhadap etika Perusahaan, PTPI senantiasa melakukan tindak disiplin dengan rincian sanksi yang dikenakan selama tahun 2021, 2020, dan 2019.

Sanksi Sanctions	2021	2020	2019
Tindakan Disiplin Disciplinary Action	3	0	0
Jumlah Total	3	0	0

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

In the context of enforcing Company ethics, PTPI always takes disciplinary action with details of sanctions imposed during 2021, 2020, and 2019, as follows.

MANAGEMENT REVIEW TERHADAP PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Perusahaan secara konsisten melakukan kajian terhadap penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dalam rangka mengevaluasi kinerja Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku sekarang ditetapkan pada tahun 2021 dan merupakan pemutakhiran dari Pedoman sebelumnya.

MANAGEMENT REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CODE OF CONDUCT GUIDELINES

The Company consistently conducts studies on the application of the Code of Conduct in order to evaluate the Company's performance. The Code Conduct currently in force in 2021 is an update of the previous Code.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFICATION CONTROL

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan, PTPI berkomitmen dan menerapkan aturan untuk setiap bentuk pemberian, permintaan dan penerimaan gratifikasi. Para Insan PTPI dilarang mencemarkan nama baik Perusahaan melalui tindakan penyelewengan atau tindakan yang merugikan citra Perusahaan. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada diberikannya sanksi oleh Perusahaan mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perusahaan memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. PI-TKK-PD-002 Rev. 1 tanggal 14 Agustus 2019 dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi No. PI-TKK-PR-002 Rev. 1 tanggal 14 Agustus 2019. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi Insan PTPI dalam penerapan pengendalian gratifikasi.

Pada tahun 2020, Perusahaan sedang melakukan proses pemutakhiran Pedoman dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Pada tanggal 17 Desember 2020 Direksi dan Dewan Komisaris melakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi PTPI dan Entitas Anak yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK RI, sebagai wujud penguatan komitmen Perusahaan dalam mengendalikan gratifikasi.

KATEGORI GRATIFIKASI

Kategori gratifikasi yang diatur dalam Pedoman di atas mencakup penolakan terhadap gratifikasi, penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi, dan permintaan gratifikasi.

PENOLAKAN GRATIFIKASI

Seluruh Insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) "DILARANG" menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan, yang berupa/dalam bentuk uang/

In order to apply the principles of *Good Corporate Governance* consistently and continuously in all Company business activities, PTPI is committed, and has implemented rules related to each form of gratification, request and receipt of gratification. PTPI personnel are prohibited from defaming the Company's good name through misappropriation or actions that harm the Company's image. Violations of this rule can result in sanctions for the Company from minor sanctions to severe sanctions.

GRATIFICATION CONTROL GUIDELINES

The Company has a gratification control guidelines No. Pi-TKK-PD-002 Rev. 1 dated August 14, 2019 and a Gratification Control Procedure No. Pi-TKK-PR-002 Rev. 1 dated August 14, 2019. The guidelines are a reference for PTPI personnel for gratification control.

In 2020, the Company was in the process of updating the Guidelines and Procedures for Gratification Control referring to KPK Regulation Number 2 of 2019 dated 5 November 2019 regarding Gratification Reporting.

On 17 December 2020, the Board of Directors and Board of Commissioners signed a Statement of Commitment to the Implementation of Gratification Control of PTPI and its Subsidiaries witnessed by the Director of Gratification of the KPK RI, as a form of strengthening the Company's commitment to controlling gratuities.

GRATIFICATION CATEGORIES

The gratification categories regulated in the Guidelines the refusal, acceptance, offering and request of gratification.

REFUSAL OF GRATIFICATION

All Company personnel who due to their position and contrary to their duties and obligations, and or core family members (husband/wife, children) are "PROHIBITED" from receiving directly or indirectly gratification from any party that has a business relationship or is competitor of the Company, in the form of money/money equivalent,

setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, *voucher*, *traveller cheque*, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Terhadap tawaran/pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini, Insan Perusahaan wajib "MENOLAK" setiap tawaran/pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak pemberi. Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka insan Perusahaan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai alat pemantauan kepatuhan insan Perusahaan terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

PENERIMAAN GRATIFIKASI

Penerimaan gratifikasi terbagi dalam 2 (dua) pendekatan yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan sehingga dapat dianggap suap, dan gratifikasi dalam kedinasan. Sebaliknya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramah-tamahan atau penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar, serta pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat.

PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pemberian gratifikasi yang "DILARANG" adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dapat dianggap suap.

PERMINTAAN GRATIFIKASI

Dalam konteks permintaan gratifikasi, insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan "PENOLAKAN" setiap permintaan dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak peminta secara sopan dan santun dan apabila diperlukan dapat menyampaikan ketentuan dalam Pedoman tersebut sebagai bagian dari sosialisasi aturan

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Sebagai upaya pencegahan terjadinya gratifikasi, Perusahaan telah menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi

goods, discounts, commissions, interest-free loans, meal invitations, travel tickets, accommodation facilities, travel trips, free medical treatment, vouchers, traveller checks, compensation, high financial value gifts, entertainment and other things that provide personal benefits to themselves and their families, whether they are accepted domestically or abroad and whether by electronic means or without electronic means.

In the case of offers/gratification that is not in accordance with the provisions stipulated in this Policy, the Company personnel are obliged to "REFUSE" any offers/gifts referred to and provide an explanation of this regulation to the offering party. For the refusal of gratification made, the Company personnel must report such to the Gratification Control Unit as a way of monitoring the Company's personnel compliance with the Gratification Control Guidelines.

ACCEPTANCE OF GRATIFICATION

Acceptance of gratification is divided into 2 (two), namely gratification that must be reported and gratification that does not require reporting. Gratification that must be reported are those related to their official position or duties, or those outside their official duties so that they can be considered bribery, and gratification in service. On the other hand, gratifications that do not require reporting are generally accepted gratification, not contrary to applicable laws, and are seen as an expression of hospitality or respect in social relations within reasonable limits, as well as gifts that fall within the realm of custom, habit and the norms existing in society.

GRATIFICATION OFFERING

Gratification offers that are PROHIBITED include gift made with the aim of bribery or gratification that can be considered as a bribe.

REQUEST FOR GRATIFICATION

In the context of a request for gratification, Company personnel if asked to provide a gratification not in accordance with the regulations, must "REJECT" any request by providing an explanation of this regulation to the requesting party politely and respectfully, and if necessary, can submit the Guideline regulations as part of the regulation's dissemination.

GRATIFICATION CONTROL UNIT

For the effectiveness of gratification control, the Company has established a Gratification Control Unit (UPG) based

(UPG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/072/2017 tentang Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PTPI tanggal 26 Desember 2017. Dalam Surat Keputusan tersebut, fungsi UPG melekat pada Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan di bawah Kompartemen Tata Kelola Korporat dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mereviu kebijakan, melakukan pemantauan, dan pengendalian gratifikasi, serta melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi antara lain:

1. Menerima pelaporan gratifikasi dari insan Perusahaan;
2. Melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima;
3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada penerima, pemberi, atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi;
4. Menentukan atau memberikan rekomendasi penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Perusahaan;
6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh Perusahaan maupun oleh penerima;
7. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Kerja Satuan Pengawasan Internal apabila terjadi pelanggaran pedoman gratifikasi oleh insan Perusahaan;
8. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Direksi dan KPK.

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka menjamin Pedoman Pengendalian Gratifikasi dapat diketahui oleh seluruh insan Perusahaan, maka:

1. Seluruh unit kerja berkewajiban mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada mitra/rekanan atau pihak ketiga lainnya;
2. Seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga berkewajiban menyampaikan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak dalam mata rantai pemasok (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta Pemangku Kepentingan lainnya);
3. Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak eksternal terkait dengan adanya Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
4. Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban memonitor pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi;

on Directors Decree Number SK/DIR/072/2017 concerning the Gratuity Control Unit (UPG) of PTPI dated 26 December 2017. In the Decree, the UPG function is attached to the Governance and Compliance Department under the Corporate Governance Compartment with main duties and functions, namely reviewing policies, monitoring and controlling gratuities, as well as disseminating information about gratuities within the Company.

Duties and authorities of the Gratification Control Unit include:

1. Receive reports of gratification from Company personnel;
2. Process the reporting gratification received;
3. Conduct direct confirmation of the gratification report to the recipient, giver, or other third party related to the receiving/granting gratification;
4. Determine or provide recommendations for the handling and use of gratification;
5. Coordinate, consult and correspond with KPK on behalf of the Company;
6. Monitor the follow-up on the use of gratification received by the Company and by the recipient;
7. Provide follow-up recommendations to the Internal Audit Unit if there is a violation of the gratification guideline by Company personnel;
8. Report the results of handling of gratuities reporting to the Board of Directors and KPK.

IMPLEMENTATION OF GRATIFICATION CONTROL

To ensure that the Gratification Control Guidelines are known to all Company personnel, therefore:

1. All relevant staff are obliged to include the restrictions on the acceptance, gratification (gifts/facilities) during the process of procurement of goods/services and/or contracts for the procurement of goods and services, as well as in correspondence to partners or other third parties;
2. All work units that have a working relationship with third parties are obliged to submit Gratification Control Policies to all parties in the supply chain (Goods/Services Providers, Agents, Distributors, Consultants, Auditors/Assessors and Customers and other Stakeholders);
3. The Gratification Control Unit is obliged to continuously provide information to all workers and external parties related to the Gratification Control Policy;
4. The Gratification Control Unit is obliged to monitor the implementation of the Gratification Control Policy and provide periodic reports to the Board of Directors;

5. Perusahaan secara periodik menyampaikan Himbauan Larangan Penerimaan dan atau Pemberian Gratifikasi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri serta menjelang Natal dan tahun Baru.

PROSES PELAPORAN GRATIFIKASI

Insan Perusahaan dapat melaporkan penerimaan, pemberian, penolakan, dan permintaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan dan/atau langsung melalui sistem aplikasi pelaporan gratifikasi *online* yang diakses melalui www.gol.kpk.go.id.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

JUMLAH LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2021

Sebagai wujud komitmen dalam penerapan pengendalian gratifikasi, Perusahaan secara konsisten melakukan internalisasi budaya Anti Gratifikasi kepada seluruh Insan Perusahaan. Untuk itu, di tahun 2021 Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) menerima 181 (seratus delapan puluh satu) laporan gratifikasi dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Laporan Gratifikasi Gratuity Report Category	Jumlah Laporan Total Reports
Penolakan Rejection	7
Penerimaan: Reception	174
Dikelola Perusahaan Company Managed	86
Menjadi Milik Negara Become State Owned	12
Dikembalikan ke Penerima Returned to Sender	49
Dalam Proses Analisis KPK KPK's In the Analysis Process	27
Pemberian Gift	0
Permintaan Request	0
Jumlah Laporan Gratifikasi Total Gratuity Report	181

PENGELOLAAN PENGADUAN BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan, PTPI menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan No. Dok. PI-TKK-PD-001 Rev.0 tanggal 8 September 2017.

5. The Company periodically submits Appeals on the Prohibition of Acceptance and/or Gratification Granting at the time of Idul Fitri and Christmas and the New Year.

GRATIFICATION REPORTING PROCESS

The Company's employees can report acceptance, giving, rejection, and requests for gratuities through the Company's Gratification Control Unit and/or directly through the online gratification reporting application system that is accessed through www.gol.kpk.go.id.

SANCTIONS FOR VIOLATION

Violations of the regulations stipulated in the Gratification Control Policy will be subject to sanctions in accordance with the applicable rules and regulations in the Company.

TOTAL GRATIFICATION REPORTS IN 2020

The Company consistently controls gratification within the Company through internalization of Anti-Gratification culture to all Company's Personnel. In 2020 the Gratification Management Unit (UPG) received 181 (one hundred eighty one) gratification reports with the following details:

MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST COMPLAINT

To avoid conflicts of interest, the Company stipulates Guidelines for Handling Conflicts of Interest Document Number PI-TKK-PD-001 Rev.0 dated 8 September 2017. During 2021 there were 5 (five) conflict of interest

Selama Tahun 2021 terdapat 5 (lima) aduan benturan kepentingan di PTPI, yaitu: 5 (lima) aduan benturan kepentingan disampaikan melalui media WBS, namun setelah dilakukan klarifikasi tidak dapat memenuhi syarat aduan, dan 0 (nol) aduan melalui Unit Kepatuhan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan pada Anak Perusahaan tidak terdapat 2 (dua) aduan benturan kepentingan, baik yang disampaikan melalui WBS, Atasan Pelapor, maupun melalui Departemen/Unit Kepatuhan.

complaints at PTPI, namely: 5 (five) conflict of interest complaints submitted through WBS media, but after clarified that the complaint cannot meet the requirements, and 0 (zero) complaint through the Compliance Unit have been followed up. Meanwhile, in the Subsidiaries, there were 2 (two) conflict of interest complaints, whether submitted through WBS, Reporting Supervisors, or through the Compliance Department/Unit.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK INFORMATION RELATED TO FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES

Perusahaan memiliki kebijakan yang terkait dengan pemberian dana untuk kegiatan politik dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. PITKK-PD-002 Rev.1 tanggal 14 Agustus 2019, yang menyatakan bahwa Perusahaan dilarang memberikan kontribusi, yang berasal dari dana Perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan independensi Perusahaan sebagai BUMN yang memiliki integritas dalam pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan pelarangan pemberian dana juga berguna untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai peruntukan yang ditetapkan.

Based on Gratification Control Guideline NUMBER PITKK-PD-002 Rev.1 14 August 2019, The Company is prohibited from contributing, which comes from Company's funds, goods and facilities belonging to the Company, which are intended to support any political party or candidate, except to the extent justified according to applicable laws and regulations.

This aims to create the independence of the Company as a SOE that has integrity in management in accordance with applicable regulations. Provisions for prohibiting the provision of funds are also useful to avoid conflicts of interest in decision making and to realize transparent and accountable budget management according to the designated purpose.

ETIKA PERUSAHAAN DALAM BERHUBUNGAN DENGAN PEJABAT PUBLIK

COMPANY ETHICS IN DEALING WITH PUBLIC OFFICIALS

Perusahaan memiliki kebijakan etika yang mengatur hubungan dengan pejabat publik melalui Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran pejabat publik yang memiliki wewenang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Perusahaan memelihara hubungan dengan pejabat publik dalam batas toleransi yang diperbolehkan hukum, dan menghindari terjadinya penyelewengan.

Perusahaan juga melarang pembayaran secara langsung atau tidak langsung kepada pegawai atau pejabat publik di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis. Larangan ini berlaku tidak hanya terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, namun juga terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan oleh wakil Perusahaan.

Jamuan terhadap pejabat publik dapat dilakukan oleh wakil Perusahaan sepanjang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang pantas dan dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan terhadap pejabat publik tersebut atau situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap integritas yang bersangkutan atau motif Perusahaan dalam melakukan tindakan tersebut.

The Company has an ethical policy that regulates relations with public officials through the Company's Code of Conduct. The policy is made to develop and maintain good relations and effective communication with all levels of public officials who have authority related to the Company's operations. The company maintains relations with public officials within the limits of tolerance permitted by law and avoids fraud.

The Company also prohibits direct or indirect payments to employees or public officials outside of official capacity and that is against the law and ethical business practices. This prohibition applies not only to payments and expenses made by the Company, but also to payments and expenses made for and on behalf of the Company by Company's representatives.

Entertainment for public officials can be provided by representatives of the Company as long as it is in accordance with applicable legal corridors, in an appropriate manner and in a situation that does not allow compromise and partiality to the public official or a situation that may raise suspicions about the integrity of the person concerned or the Company's motives in committing to the action.

KEBIJAKAN ANTI FRAUD

ANTI FRAUD POLICY

Perusahaan memiliki komitmen tinggi menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan hal di atas, Perusahaan telah menetapkan beberapa Kebijakan yang meliputi:

1. Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016, yang telah disosialisasikan kepada seluruh *Stakeholder* Perusahaan.

The Company is committed to creating a favorable business climate, avoiding behaviors or actions that can cause conflicts of interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritize the interests of the Company above personal, family, group or group interests. The Company also always pays attention to anti-corruption policies as stipulated in 2001 Law Number 20 on the Amendments to 1999 Law Number 31 about the Eradication of Corruption Crimes. In line with the above, the Company has established several policies:

1. Anti-Bribery Policy and Commitment in the context of implementing the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, which has been disseminated to all Company's Stakeholders.



2. Komitmen Pengendalian Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 17 Desember 2020.

2. Commitment to Control the Implementation of Gratification Control which was updated on December 17, 2020.



PENGEMBANGAN PROGRAM ANTI FRAUD

Perusahaan telah mengembangkan program terkait pengendalian *fraud* Perusahaan, yaitu:

1. Pengembangan *Fraud Control System*
Perusahaan bekerja sama dengan BPKP Pusat dan Perwakilan dalam pengembangan *Fraud Control System* yang telah dimulai sejak tahun 2017. Berikut pengembangan *Fraud Control System* (FCS) yang dilakukan di tahun 2021, antara lain:
 - a. Penetapan Pedoman Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) Nomor Dokumen: PI-SEK-PD-014 Rev 0 tanggal 28 April 2021.
 - b. Penyampaian Pedoman kepada Anak Perusahaan Pedoman Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) Nomor Dokumen: PI-SEK-PD-014 Rev 0 tanggal 28 April 2021, melalui Surat Edaran Direktur Utama PTPI Nomor: 02/A/KU/A00/SE/2021 tanggal 21 Mei 2021, untuk dapat diratifikasi di Anak Perusahaan.
 - c. Pengembangan FCS di 4 (empat) Anak Perusahaan (ME, PILOG, PIU, PIP)
Pengembangan FCS di 4 (empat) Anak Perusahaan (ME, PILOG, PIU, dan PIP) dilakukan secara terintegrasi dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. *Progress* sampai dengan Semester II 2021 telah selesai dilakukan tahapan pelaksanaan FCS dan dalam proses penyusunan Laporan Akhir oleh Tim FCS PI. Adapun detail pelaksanaan pengembangan dijabarkan pada pembahasan Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016.
 - d. Pengembangan FCS di PI dan 6 (enam) Anak Perusahaan (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, REKIND)
 - i) Telah disampaikan Surat Direktur Utama PTPI kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Nomor: 04743/A/MR/E42/ET/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengembangan *Fraud Control System* PI Grup.
 - ii) Berdasarkan data Tindak Lanjut Hasil Pengembangan FCS PI Grup yang disampaikan tersebut, sampai dengan Juni 2021 masih dalam tahap revidi kesesuaian oleh BPKP Pusat.
 - iii) Dilakukan penyusunan *draft* Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya, untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada BPKP Pusat.
 - iv) Telah dilakukan koordinasi informal dengan Tim BPKP Pusat terkait dengan proses pengembangan lanjutan FCS untuk penyusunan RAB, KAK, dan *time line* pelaksanaan pada 21 September 2021.
 - e. Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: S-1022/D5/03/2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengembangan *Fraud Control System* PI Grup, maka pelaksanaan kegiatan evaluasi implementasi

DEVELOPMENT OF ANTI-FRAUD PROGRAM

To improve fraud control, the Company has developed programs that include:

1. Development of Fraud Control System
The Company collaborates with the BPKP and Representatives in the development of the Fraud Control System which has been started since 2017. The development of the Fraud Control System (FCS) carried out in 2021 includes:
 - a. Establishment of a Fraud Control System Document Number: PI-SEK-PD-014 Rev 0 Date 28 April 2021.
 - b. Submission of Guidelines to Subsidiaries on the Fraud Control System Document Number: PI-SEK-PD-014 Rev 0 April 28, 2021, through PTPI President Director Circular Number: 02/A/KU/KU/A00/SE/2021 dated May 21, 2021, to be ratified in the subsidiary.
 - c. Development of FCS in 4 (Four) Subsidiaries (ME, Pilog, Piu, PIP)
Development of FCS in 4 (four) subsidiaries (ME, Pilog, PIU, and PIP) was carried out in an integrated manner through the SNI ISO 37001: 2016 Electory Management System. Progress up to semester II 2021 has been completed, the implementation of FCS stage is in the process of preparing the final report by the FCS PI team. Details of the development are described in the discussion of SNI ISO 37001: 2016 SMAP Certification.
 - d. Development of FCS in PI and 6 (Six) Subsidiaries (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, Rekind)
 - i) Has been submitted by the PTPI President Director to the Deputy Head of BPKP in the Investigation Division, Number: 04743/A/MR/E42/ET/2021 dated April 28, 2021 regarding the follow-up of the results of the development of the PI Group.
 - ii) Based on the follow-up data on the results of the development of the FCS PI Group submitted, up to June 2021 it is still in the review stage of conformity by the Central BPKP.
 - iii) The draft Work Reference Framework and the Budget Plan was carried out, and will be coordinated with the Central BPKP.
 - iv) Informal coordination with the Central BPKP Team was carried out related to the FCS advanced development process for the preparation of RAB, KAK, and Time Line implementation on September 21, 2021.
 - e. Based on the Deputy Head of BPKP Investigation Division Number: S-1022/D5/03/03/2021 dated December 3, 2021 concerning the Follow-up Results of the Development of the PI Group Fraud Control System, the FCS implementation evaluation

FCS di PTPI dan bimbingan teknis FCS di 6 (enam) Anak Perusahaan akan dilaksanakan pada tahun 2022.

2. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016
Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Berikut sertifikasi yang diperoleh ke-enam Anak Perusahaan:

activities in PTPI and FCS Technical Guidance in 6 (six) Subsidiaries will be held in 2022.

2. Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) SNI ISO 37001:2016
The Company and subsidiaries have received the anti-bribery management system certificate 37001: 2016. The following certification were obtained by the six subsidiaries:

No.	Perusahaan Company	Lembaga Sertifikasi Certification Agency	Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Sertifikasi Certificate Date	Berlaku Sampai Valid Until
1	PT Pupuk Kalimantan Timur	British Standards Institutions (BSI)	No. IABMS 729332	16 Juni 2020 June 16, 2020	15 Juni 2023 June 15, 2023
2	PT Petrokimia Gresik	PT Amerika Sistem Registrasi Internasional	No. A37 201007-007	2 Juli 2020 July 2, 2020	30 Juni 2023 June 30, 2023
3	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	TUV Nord Indonesia	No. 03 13 G 20008	15 Juli 2020 July 15, 2020	22 Juli 2023 July 22, 2023
4	PT Pupuk Iskandar Muda	Sucofindo <i>International</i> Certification Service	No. SAB 00009	23 Juli 2020 July 23, 2020	22 Juli 2023 July 22, 2023
5	PT Rekayasa Industri	PT Mutuagung Lestari	No. ABMS-031	10 Agustus 2020 August 10, 2020	10 Agustus 2023 August 10, 2023
6	PT Pupuk Kujang	Sucofindo <i>International</i> Certification Service	No. SAB 00014	10 Agustus 2020 August 10, 2020	Agustus 2023 August 2023
7	PT Pupuk Indonesia Utilitas	TUV Nord Indonesia	No. 03 13 A 22000014	7 Januari 2022 January 7, 2022	6 Januari 2025 January 6, 2025

Dalam rangka memastikan kesesuaian implementasi SMAP di PTPI, Perusahaan melaksanakan kegiatan *Surveillance* Audit Ke-2 Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 yang diselenggarakan pada tanggal 5-6 Oktober 2021 oleh Lembaga Sertifikasi PT Amerika Sistem Registrasi Internasional. Kesimpulan hasil *Surveillance* Audit sebagai berikut:

1. Tidak terdapat Ketidaksesuaian Mayor;
2. Terdapat Ketidaksesuaian Minor;
3. Terdapat 9 (Sembilan) Potensi dan Peluang Perbaikan.

Berdasarkan Surat PT Amerika Sistem Registrasi Internasional Nomor: 131/L/ASRI/XII/2021 Tanggal 1 Desember 2021, dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan (*surveillance*) ke-2, Komite Serufikasi ASRICERT Indonesia memutuskan untuk mempertahankan status sertifikat SNI ISO 37001:2016 dengan Nomor Sertifikat A37 191004 - 004 untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada PTPI.

To ensure the suitability of the SMAP at PTPI, the company carried out a 2nd SNI ISO 37001: 2016 SNI 37001: 2016 *Surveillance* Audit *Surveillance* on October 5-6, 2021 by the Certification Institute of PT America International Registration System. The results of the *surveillance* audit are as follows:

1. No Major Mismatches
2. There are Minor Mismatches
3. There are 9 (Nine) Potential Opportunities for Improvement

Based on the PT America International Registration System letter Number: 131/L/Asri/XII/2021 dated December 1, 2021, it was stated that based on the 2nd *surveillance* results, the ASRICERT Indonesia Seru Certificate Committee decided to maintain the status of the ISO 37001: 2016 SNI Certification with Certification Number A37 191004 - 004 for the next 1 (one) year for PT Pupuk Indonesia (Persero).

PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT

OFFICIAL ASSETS AND WEALTH REPORTING

PRINSIP DASAR PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT

Sebagai BUMN, Perusahaan juga terikat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban melaporkan kekayaan oleh Pejabatnya. Tujuan dari pelaporan kekayaan pejabat adalah untuk mendorong Pejabat yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

DASAR HUKUM PENERAPAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT DI PERUSAHAAN

Dalam menerapkan kebijakan mewajibkan Pejabatnya untuk melaporkan kekayaannya, Perusahaan menimbang dasar hukum penerapan kewajiban tersebut, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya;
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik;
5. Keputusan KPK Nomor 07/KPK/2/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN;
6. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 12 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BASIC PRINCIPLES OF OFFICIAL ASSETS AND WEALTH REPORTING

As a SOE, the Company is also bound by the laws and regulations governing the obligation to report the wealth of its officials. The purpose of reporting official wealth is to encourage officials who adhere to the general principles of state administrators that are free from corrupt practices, collusion, and nepotism, and other despicable acts.

LEGAL BASIS FOR IMPLEMENTING OFFICIAL WEALTH REPORTING OBLIGATIONS IN THE COMPANY

In implementing the policy requiring its Officials to report their assets, the Company considers the legal basis for implementing these obligations, as follows:

1. 1999 Law Number 28 regarding State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism;
2. 2002 Law Number 30 on the Corruption Eradication Commission;
3. Ministry of SOEs' Regulation Number PER-01/BUMN/2011 about the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, and their changes;
4. Secretary to the Ministry of SOEs' Decree Number SK-16/S.MBU/2012 regarding Assessment and Evaluation Indicators/Parameters for Good GCG Implementation;
5. KPK Decree Number 07/KPK/2/2005 concerning Procedures for Registration, Announcement and Inspection of LHKPN;
6. KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of the Assets' Wealth;
7. KPK's Circular Letter Number 12 of 2017 concerning Guidelines for Managing the Reports of Assets of State Administrators in the State-Owned Enterprises;
8. KPK Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation Number 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Administrators' Assets.

9. Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

9. Ministry of SOEs Circular Letter Number SE-12/MBU/10/2021 dated October 5, 2021 concerning the Obligation to Submit State Officials Asset Reports (LHKPN) in State-Owned Enterprises.

KEBIJAKAN YANG MEWAJIBKAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN

Kebijakan tentang pelaporan kekayaan pejabat telah ditetapkan oleh Perusahaan pada tahun 2013 dengan pemutakhiran terakhir pada tahun 2021 yaitu Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat No. PI-SEK-PD-010 Rev. 1 tanggal 22 November 2021. Pedoman ini disampaikan ke Anak Perusahaan melalui Surat Edaran No. SE-03/A/KK/610/SE/2022 tanggal 26 Januari 2022. Pemutakhiran tersebut mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pejabat yang termasuk Wajib Laport adalah seluruh pejabat di Perusahaan dan Entitas Anak meliputi:

POLICIES THAT REQUIRE REPORTING THE WEALTH OF COMPANY OFFICIALS

The policy for Reporting of Officials' Wealth was determined by the company in 2013 with the last update in 2021, namely Guidelines for Reporting of Official Assets No. PI-SEK-PD-010 Rev. 1 November 22, 2021. This guideline was submitted to a subsidiary through Circular Letter No. SE-03/A/KK/610/SE/2022 dated January 26, 2022. The update refers to KPK Regulation Number 2 of 2020 dated June 4, 2020 concerning Procedures for Registration, Announcement and Inspection of State Officials' Assets, and Ministry of SOEs Circular Letter Number SE-12/MBU/10/10/2021 dated October 5, 2021 concerning Obligations to Submit State Officials' Assets Reports (LHKPN) for officials within the State -Owned Enterprises

All officials in the company and subsidiaries required to report include:

Pejabat Officials	Induk Perusahaan Parent Company	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Terafiliasi Terkonsolidasi Consolidated Affiliated Companies
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Wajib Laport Mandatory Report	Wajib Laport Mandatory Report	Wajib Laport Mandatory Report
Direksi Board of Directors	Wajib Laport Mandatory Report	Wajib Laport Mandatory Report	Wajib Laport Mandatory Report
Grade I/Setara Grade I Officials/Equivalent	Wajib Laport Mandatory Report	Wajib Laport Mandatory Report	-
Grade II/Setara Grade II Officials/ Equivalent	Wajib Laport Mandatory Report	Wajib Laport Mandatory Report	-

Hal ini merupakan perluasan Wajib Laport yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

This expands on the mandatory report mandated by Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean State and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism and refers to the Ministry of SOEs Circular Letter Number SE-12/MBU/10/2021 October 5, 2021 concerning Obligations to Submit State Officials' Assets Reports (LHKPN) for officials within the State -Owned Enterprises.

PENGELOLA PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN

Perusahaan telah menetapkan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (UPL). UPL adalah unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan sumber daya manusia (SDM) dan/atau unit yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk menjadi mitra kerja KPK dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat dan melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi pengelolaan e-LHKPN di Perusahaan dan Anak Perusahaan.

UPL memiliki fungsi sebagai Admin Induk Perusahaan dan Admin Anak Perusahaan yang terbagi atas:

1. Admin Induk Perusahaan dikelola oleh unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan SDM dan/atau unit yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Perusahaan. Admin Induk Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Unit yang membidangi fungsi kepatuhan di Perusahaan.
 - i) Berkoordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor di PI Group dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta penggunaan aplikasi e-LHKPN.
 - ii) Berkoordinasi dengan KPK dalam kegiatan sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat di PI Group.
 - iii) Mengingatkan Wajib Lapor di Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat.
 - iv) Melakukan koordinasi dengan UPL di Anak Perusahaan untuk mendorong kepatuhan Wajib Lapor di Anak Perusahaan.
 - v) Mengajukan permintaan akun (*username* dan *password*) untuk Admin Induk Perusahaan dan Admin Anak Perusahaan kepada KPK.
 - vi) Melakukan approval, aktivasi, dan non aktivasi akun Wajib Lapor di PI Group, serta membuat akun Admin Anak Perusahaan.
 - vii) Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Lapor, baik dalam pelaporan Harta Kekayaan maupun pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Perusahaan.
 - viii) Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Direksi Perusahaan yang membawahi fungsi kepatuhan terhadap Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap di Perusahaan.
 - b. Unit yang membidangi fungsi SDM di Perusahaan:
 - i) Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor di Perusahaan sewaktu-waktu, setiap terjadi

MANAGER OF COMPANY OFFICIALS WEALTH REPORTING

The Company has established a Management Unit for the Official's Assets Report (UPL). UPL is a unit in charge of compliance and HC, and/or units appointed by the Company and subsidiaries to become KPK partners in managing Official's Assets Reports, and coordinating with the KPK on changes in regulatory management of e-LHKPN in the Company and subsidiaries.

UPL has a parent admin and subsidiary admin functions, which are divided into:

1. The parent company admin is managed by a unit in charge of compliance and HC, and/or units appointed by the Company for in managing Official's Assets Reports in the Company. The parent company admin has the following duties and responsibilities:
 - a. Unit in charge of compliance function in the Company.
 - i) Coordinating with KPK in terms of monitoring and evaluating compliance with reporting in PI Group in reporting and announcing assets and the use of the e-LHKPN application.
 - ii) Coordinating with KPK in the socialization activities for filling out the Official's Assets Reports in the PI Group.
 - iii) Reminding that mandatory reports in the Company comply with the obligation to deliver the Official's Assets Reports.
 - iv) Coordinating with UPL in subsidiaries to encourage compliance with reporting in subsidiaries.
 - v) Submitting an account request (*username* and *password*) for the parent admin and subsidiary admin to KPK.
 - vi) Approving, activating, and non-activating accounts must reported in the PI Group, as well as creating an Admin subsidiary account.
 - vii) Conducting monitoring and evaluation of the level of compliance to be reported, both in reporting assets and announcements of official assets reports in the Company.
 - viii) Delivering recommendations for sanctions to the Company Director that oversees the compliance function of the mandatory reports that are not compliant, by submitting a report of the official's assets with complete documents in the Company.
 - b. Units in charge of HC function in the Company:
 - i) Updating Company data to report at any time, all transfers, rotations, promotions, demotions,

- mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan pensiun serta melakukan pemutakhiran berkala setiap bulan.
- ii) Melakukan koordinasi dengan UPL di Anak Perusahaan untuk pemutakhiran data Wajib Lapori di seluruh Anak Perusahaan.
 - iii) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapori PI Group kepada KPK sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPK.
2. Admin Anak Perusahaan dikelola oleh unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan SDM dan/atau unit yang ditunjuk oleh Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan. Admin Anak Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Unit yang membidangi fungsi kepatuhan di masing-masing Anak Perusahaan:
 - i) Berkoordinasi dengan Admin Induk Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapori dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan penggunaan aplikasi e-LHKPN.
 - ii) Mengajukan approval, aktivasi, dan non aktivasi akun Wajib Lapori serta Admin Anak Perusahaan di masing-masing Anak Perusahaan kepada Admin Induk Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan.
 - iii) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan.
 - iv) Mengingatkan Wajib Lapori di masing-masing Anak Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat.
 - v) Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Lapori, baik dalam pelaporan Harta Kekayaan maupun pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan.
 - vi) Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Direksi Anak Perusahaan yang membawahi fungsi kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk oleh Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat terhadap Wajib Lapori yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap di masing-masing Anak Perusahaan.
 - b. Unit yang membidangi fungsi SDM di masing-masing Anak Perusahaan:
 - i) Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapori di masing-masing Anak Perusahaan posisi akhir tahun untuk pejabat aktif dan sesuai waktu pensiun untuk pejabat yang pensiun.
 - ii) Menyampaikan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapori di
- and retirement, as well as regular monthly updates.
- ii) Coordinating with UPL in subsidiaries to update data all subsidiaries are required to report.
 - iii) Delivering staffing data and data change data for PI Group report to KPK according to the schedule set by the KPK.
2. Admin subsidiary are managed by units in charge of compliance and HC and/or units appointed by subsidiaries for managing official's assets reports in each subsidiary. Admin subsidiary has the following duties and responsibilities:
- a. Units in charge of compliance function in each subsidiary:
 - i) Coordinate with the parent admin in charge of compliance in terms of monitoring and evaluating compliance with reporting and announcing their assets and the use of e-LHKPN applications.
 - ii) Submitting approval, activation, and non activation of accounts that the admin Subsidiary in each Subsidiary must report to the Parent Admin in charge of Compliance Functions.
 - iii) Organizing socialization and assistance to fill in official assets reports in each subsidiary.
 - iv) Reminding mandatory reports in each subsidiary must comply with the obligation to submit official assets reports.
 - v) Conducting monitoring and evaluation of the level of compliance must be reported, both for reporting assets, and for announcements of official assets reports in each subsidiary.
 - vi) Delivering recommendations for sanctions to the Subsidiary Directory that oversees the Compliance Function, or Director appointed by a subsidiary to manage the official assets reports when mandatory reporting is not compliant when submitting an official assets report, with complete documents in each subsidiary.
 - b. Units in charge of HC function in each subsidiary:
 - i) Updating data required to report in each subsidiary at the end of the year for active officials, with the retirement date for retired officials.
 - ii) Delivering updates of staffing data and data changes in each subsidiary to be reported to

masing-masing Anak Perusahaan kepada Admin Induk Perusahaan bidang SDM untuk posisi akhir tahun paling lambat tanggal 1 Desember setiap tahunnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh KPK.

the Parent Admin at the end of the year no later than December 1 each year, or any other time determined by KPK.

SANKSI ATAS KELALAIAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT DI PERUSAHAAN

Dalam hal Wajib Laportidak melaporkan harta kekayaannya atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Pedoman dan/atau Peraturan KPK, Direksi yang membawahi kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat dapat memberikan sanksi administratif kepada Wajib Laporterdasarkan rekomendasi dari KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Laportyang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Sanksi bagi Wajib Laportyang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran secara lisan;
2. Teguran secara tertulis;
3. Penundaan hak atas:
 - a. Pembayaran jasa operasi/bantuan biaya cuti tahunan/sejenisnya bagi pejabat yang pertama kali menjabat, pejabat aktif, dan pejabat yang diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - b. Pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan; atau
 - c. Pembayaran pesangon atau sejenisnya bagi pejabat yang berakhir masa jabatan atau pensiun.

Sanksi penundaan hak pada huruf c. dapat dicabut setelah kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap telah dilaksanakan oleh Wajib Laportsesuai dengan ketentuan dalam Pedoman. Ketentuan terkait sanksi tersebut ditetapkan dalam Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat No. PI-SEK-PD-010 Rev. 1 tanggal 22 November 2021.

TRANSPARANSI PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2021

Pada periode tahun 2021, seluruh Wajib LaportPerusahaan telah melaksanakan pelaporan kekayaannya dengan tingkat kepatuhan 100%. Berikut jumlah Wajib Laportyang melaporkan kekayaannya per masing-masing jabatan.

SANCTIONS FOR NEGLIGENCE IN OFFICIAL'S WEALTH REPORTS IN THE COMPANY

In the case of obligatory reporters that do not report their assets or do not fulfill their obligations as stipulated in the KPK guidelines and/or regulations, the Director in charge of compliance or Director appointed by the Company and subsidiaries to manage the Official's assets Reports can provide administrative sanctions to the obligatory reporter based on recommendations from KPK in accordance with applicable regulations. Types of sanctions for non-compliant mandatory reports when submitting official assets reports together with documents, are given the following sanctions:

1. Verbal reprimand;
2. Written reprimand;
3. Delay of Rights:
 - a. Payment of operational services/assistance for annual leave costs/and similar for officials when first joining, active officials, and officials who have been re-appointed after the end of their term of office or retirement; or
 - b. Definitive appointment for officials to receive promotion; or
 - c. Payment of severance pay or the like for officials who end in a term of office or retire.

Sanctions for delaying rights in letter c. can be revoked after the obligation to deliver the official assets report and documents in full has been carried out by the obligatory reporter in accordance with the provisions in the guidelines. Provisions related to the sanctions are determined in the Official Assets Reporting Guidelines for No. PI-SEK-PD-010 Rev. 1 November 22, 2021.

TRANSPARENCY IN COMPANY OFFICIAL'S WEALTH REPORTING IN 2021

In 2021, all the Company's Compulsory Reporters have carried out their wealth reporting with a 100% compliance level. The following is the number of Reporting Persons who report their wealth per each position.

Penyampaian LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2021 Submission of Company Officials' LHKPN in 2021

Pejabat Wajib LHKPN Mandatory LHKPN Officials	Jumlah Wajib Laporan Total Mandatory Reports	Telah Melaporkan Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	8	8	100
Direksi Board of Directors	7	7	100
Pejabat <i>Grade</i> I Grade I Officials	38	38	100
Pejabat <i>Grade</i> II Grade II Officials	70	70	100
Total	123	123	100

Status Pelaporan Kekayaan Pejabat Tahun 2021 di Entitas Anak Status of Officials Wealth Reporting in 2021 for Subsidiaries

Perusahaan Company	Jumlah Wajib Laporan Total Mandatory Reports	Telah Melaporkan Reported	
		Jumlah Total	%
PT Petrokimia Gresik	103	103	100
PT Pupuk Kujang	68	68	100
PT Pupuk Kalimantan Timur	127	127	100
PT Pupuk Iskandar Muda	33	33	100
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	101	101	100
PT Rekyasa Industri	79	79	100
PT Mega Eltra	27	27	100
PT Pupuk Indonesia Logistik	18	18	100
PT Pupuk Indonesia Utilitas	12	12	100
PT Pupuk Indonesia Pangan	12	12	100
Total	580	580	100

PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perusahaan memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara cepat dan transparan, dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik tanpa adanya benturan kepentingan dalam prosesnya. Kebijakan yang diterapkan dalam proses ini mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2005 No. 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4556);
3. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 4756);
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297);
5. Surat Keputusan Direksi PTPI No. SK/DIR/055/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen di PTPI;
6. Surat Keputusan Direksi PTPI tentang Otorisasi Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di PTPI;
7. Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Group PTPI No. PIADAPD-002 Revisi 1 tanggal 8 Agustus 2019;
8. Pedoman Pengelolaan Inventory Material No. PIADAPD-001 tanggal 8 September 2017.

Dalam pelaksanaannya, PTPI senantiasa menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kemandirian dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses serta prosedur pengadaan barang dan jasa.

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES POLICIES AND GUIDELINES

The Company has a policy for goods and services procurement that can be carried out quickly and transparently, by applying the principles of good corporate governance without any conflict of interest in the process. The policies applied in this process refer to:

1. Ministry of SOEs' Regulation Number PER15/MBU/2012 on the amendment to Ministry of SOEs' Regulation Number PER-05/MBU/2008 regarding General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services in State-Owned Enterprises;
2. The 2005 Law Number 45 about the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises (Republic of Indonesia State Gazette 2005 Number 117. Supplement to Republic of Indonesia State Gazette Number 4556);
3. The 2007 Law Number 40 concerning Limited Liability Companies (Republic of Indonesia State Gazette 2007 Number 106, Supplemental to Republic of Indonesia State Gazette Number 4756);
4. The 2003 Law Number 19 concerning State Owned Enterprises (Republic of Indonesia State Gazette 2003 Number 70, Supplemental to Republic of Indonesia State Gazette Number 4297);
5. PTPI Board of Directors' Decree Number SK/DIR/055/2015 dated 23 December 2015 on the Responsibility for Signing and Initializing PTPI Documents;
6. PTPI Board of Directors' Decree concerning the Authorization of Signing of Documents for Implementation of General Guidelines for Procurement of Goods and Services at PTPI;
7. General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services at PTPI Group Number PI-ADAPD-002 Revision 1 dated 8 August 2019.
8. Guidelines for the Inventory Management of Materials Number PIADAPD-001 dated 8 September 2017.

In its implementation, PTPI always upholds the principles of honesty and independence from parties directly or indirectly involved in the processes and procedures for the procurement of goods and services.

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN

Pengelolaan pengadaan dilaksanakan untuk memastikan kecukupan sumber daya dari segi barang dan jasa serta pemenuhannya dilakukan secara wajar sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam menunjang kegiatan operasional agar berjalan lancar efektif dan efisien. Kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ada di Perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk mengatur kegiatan pengadaan jasa yang diperlukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kriteria; spesifikasi, harga, aspek mutu, dan aspek K3HL untuk menjamin jasa yang diadakan sesuai dengan yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan serta melalui proses pengadaan yang efektif dan efisien.

Prosedur ini menjelaskan rangkaian aktivitas dalam melaksanakan kegiatan pengadaan jasa yang diperlukan Perusahaan melalui metode kontrak, pelelangan terbuka prakualifikasi, pelelangan terbuka pascakualifikasi, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan E-Catalogue.

Manajemen bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh dalam prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa. Proses tersebut dimulai dengan rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset oleh divisi terkait untuk mendapatkan persetujuan. Prosedur dan tata cara pengadaan meliputi:

1. Prosedur pengadaan barang internal (PI-ADA-PR-001) tanggal 29 Desember 2017;
2. Prosedur pengadaan jasa internal (PI-ADA-PR-002) tanggal 29 Desember 2017;
3. Prosedur pengadaan bersama PI Grup (PI-ADA-PR-003) tanggal 11 September 2019;
4. Penyusunan pedoman pengelolaan rekanan.

RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

Dalam memastikan pengelolaan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efektif, Perusahaan memiliki target dan perencanaan dalam wujud realisasi program pengadaan barang dan jasa yang disampaikan dalam tabel di bawah ini.

PROCUREMENT PROCEDURES

Procurement management is carried out to ensure the adequacy of resources in terms of goods and services and their fulfillment is carried out fairly in accordance with the needs of the Company in supporting operational activities to run smoothly and efficiently. The Company's procurement of goods and services policies is conducted with the objective of regulating the procurement of services needed by the Company, by taking into account the following criteria; specifications, prices, quality, and K3HL aspects to guarantee the services provided are in accordance with what was requested and can be accounted for through an effective and efficient procurement process.

This procedure explains the series of activities required in carrying out the procurement services by the Company using the contract method, pre-qualification open auction, post-qualification open auction, limited auction, direct election, direct appointment, and E-Catalog.

The management is responsible for and has full authority over the procedures for the procurement of goods and services. The process starts with a procurement plan, the procurement, receipt and storage process, as well as the use, and management of assets by the relevant divisions for approval. Procurement procedures include:

1. Procedure for procurement of internal goods (PI-ADAPR-001) dated December 29, 2017;
2. Procedure for procurement of internal services (PI-ADAPR-002) dated December 29, 2017;
3. Procedure for joint procurement of PI Group (PI-ADA-PR-003) dated September 11, 2019;
4. Formulation of partner management guidelines.

PLAN AND IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN 2021

To ensure the management of goods and services procurement runs effectively, the Company has targets and plans for the realization of the goods and services procurement program as presented in the table below.

Target dan Realisasi Kegiatan Target and Realization of Activities

No.	Target/Rencana Target/Plan
1	Implementasi Sentralisasi Pengadaan Wave-1 Implementation of Wave-1 procurement centralization
2	Implementasi Sentralisasi Pengadaan Wave-2 Implementation of Wave-2 procurement centralization
3	Penggunaan dan <i>enhancement</i> aplikasi IPROMS Use and enhancement of iproms applications
4	Implementasi Kebijakan <i>Stockholding Policy</i> Implementation of Stockholding Policy
5	Implementasi <i>Warehouse Management & QR Code</i> Implementation of Warehouse Management & QR Code
6	Implementasi <i>Tools of Material & Service (TOMS)</i> Implementation of Tools of Material & Service (TOMS)

Dampak dan Capaian di Bidang Pengadaan Impact and Achievement in Procurement Area

No.	Dampak dari Pelaksanaan Kegiatan Impact on the Implementation of Activities	Capaian Kegiatan Activities Achievement
1	Nilai pengadaan sentralisasi menjadi lebih tinggi The higher amount of centralization procurement.	Nilai sentralisasi pengadaan : ± Rp 20,89 T Procurement centralization value: ± Rp20.89 T
2	Tingkat penghematan perolehan pengadaan menjadi lebih baik The level of savings in procurement acquisition is better	Nilai penghematan sentralisasi pengadaan : ± Rp 1,077 T Centralization Procurement savings value: ± Rp. 1,077 T
3	Proses/alur kerja pengadaan yang lebih sistematis More systematic procurement workflow / process.	Enhancement ditargetkan selesai di tahun 2022 Enhancement targeted to be completed in 2022
4	Nilai persediaan spare part PI Grup dapat dimonitor & dikontrol dengan optimal The PI Group spare part inventory can be monitored & controlled optimally.	Pedoman <i>Stockholding Policy</i> PI Grup yang diimplementasikan ke semua anak perusahaan Guidelines for PI Group Stockholding Policy implemented in all subsidiaries
5	Mengoptimalkan penggunaan seluruh area di gudang, serta mengurangi kesalahan transaksi pergudangan Optimizing the use of all warehouse areas, as well as reducing warehousing transaction errors.	Penyeragaman proses bisnis pergudangan semua anak perusahaan pupuk Uniform warehousing business process in all fertilizer subsidiaries
6	Penyeragaman proses cataloguing material code di seluruh anak perusahaan Uniformed process of cataloguing material code throughout the subsidiaries	Implementasi program kerja Cataloguing - TOMS Implementation of Cataloguing Work Program - TOMS

RANTAI PASOKAN

Dalam menjalankan usaha, PI Grup bekerja sama dengan pemasok barang dan jasa mengingat Perusahaan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan barang dan jasa secara mandiri. Berikut adalah rincian jumlah pemasok secara geografis dan nilai realisasi kontrak sepanjang tahun 2021.

Jumlah Pemasok dan Nilai Kontrak Number of Suppliers and Contract Value

Kategori pemasok Supplier Category	Jumlah Pemasok Total Suppliers		Nilai Kontrak (Rp Miliar) Contract Value (in billion Rp)	
	2021	2020	2021	2020
Pemasok Nasional National Supplier	3.433	3.208	17.916	14.556
Pemasok Internasional International Supplier	170	175	11.672	9.547
Jumlah Total	3.603	3.383	29.589	24.103

SUPPLY CHAIN

In conducting business, PI Group cooperates with suppliers of goods and services considering that the Company cannot meet all the needs of goods and services independently. The following is a list of the number of suppliers geographically and the value of contract realization throughout 2021.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai upaya untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) yang bertujuan tujuan agar Perusahaan dapat: (i) menerapkan budaya kerja yang konsisten dalam menegakkan tata nilai Perusahaan, (ii) mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial dalam rangka menjaga serta melindungi aset serta reputasi Perusahaan, (iii) mendorong upaya pengawasan oleh semua pihak sehingga menciptakan budaya malu untuk melakukan pelanggaran, dan (iv) menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Perusahaan.

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

Dalam mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS), Perusahaan mengacu pada landasan hukum, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, yaitu pada Pasal 2 ayat 2 yang mengatur bahwa dalam rangka penerapan GCG, Direksi harus menyusun mekanisme terkait pelaporan atas dugaan penyimpangan di Perusahaan;
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN, yaitu pada Parameter 13 yang mengatur bahwa Perusahaan harus memiliki kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*Whistleblowing System*).

Mengacu pada hal di atas, Perusahaan telah menetapkan mekanisme Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) yang diatur dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Nomor Dokumen PI-TKK-PD-004 Rev.1 tanggal 14 Agustus 2019 dan Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Nomor Dokumen PI-TKK-PR-003 Rev.1 tanggal 14 Agustus 2019.

In an effort to support the application of good corporate governance, the Company has established a whistleblowing system to: (i) implement a consistent work culture in upholding the Company's values, (ii) encourage reporting on matters that cause harm to the Company both financially and non-financially in the framework of safeguard and protect the assets and reputation of the Company, (iii) encourage supervision efforts by all parties so as to create a culture of shame for violations, and (iv) create a transparent and accountable environment within the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICIES

When implementing the Violation Reporting System (WBS), the Company refers to the following legislation:

1. Government of the Republic of Indonesia's Regulation Number 43 of 2018 regarding Procedures for Implementing Community Participation and Giving Awards in the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Corruption
2. Ministry of SOEs' Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, especially Article 2 paragraph 2 that stipulates that in the framework of implementing GCG, the Board of Directors must prepare a mechanism related to reporting alleged irregularities in the Company;
3. Decree of the Secretary to the Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters and Evaluation Indicators for GCG Implementation in SOEs, particularly Parameter 13 that stipulates that the Company must have a policy regarding a reporting system for alleged irregularities in the Company (*Whistleblowing System*).

Referring to the above, the Company has established a mechanism for the Management of the Violation Reporting System (WBS) regulated in the Guidelines for the Reporting System (WBS) Document Number PI-TKK-PD-004 Rev.1 dated August 14, 2019 and the Procedure for Management of the Violation Reporting System (WBS) Document Number PI-TKKPR-003 Rev.1 dated 14 August 2019.

PRINSIP-PRINSIP DASAR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Guna mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan pelanggaran, maka Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Perusahaan diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

BASIC PRINCIPLES OF VIOLATION REPORTING SYSTEM

To speed up and simplify the violation reports' follow up process, the Company's Violation Reporting System (WBS) is applied by upholding the following principles:

No.	Dampak dari Pelaksanaan Kegiatan Impact of Activities	Capaian Kegiatan Activity Achievements
1	Kepastian Hukum Legal Certainty	Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait. Implementation of the Violation Reporting System (WBS) prioritizes the foundation of applicable laws and regulations, as well as taking into account aspects of propriety and fairness and can provide protection for related parties.
2	Efektif Effective	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The application of the Violation Reporting System (WBS) is carried out in a standardized and law-abiding manner referring to the general provisions in the Violation Reporting System Guidelines and applicable laws and regulations.
3	Efisien Efficient	Aktivitas pelaporan pelanggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan/atau perangkat perusahaan secara efisien dalam mendukung pelaksanaan. Violation reporting activities are carried out with due regard to the efficient use of various Company's resources and/or instruments in supporting implementation.
4	Transparan Transparent	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) harus menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku. Implementation of the Violation Reporting System (WBS) must uphold the transparency of information to the authorities if they find out there are irregularities from the implementation of the applicable business processes.
5	Akuntabel Accountable	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) harus menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya. Implementation of the Violation Reporting System (WBS) must uphold the truth of the data and information submitted and its accountability.
6	Kehati-hatian Prudence	Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personel terkait. In the implementation of the Violation Reporting System (WBS), it must adhere to the principle of prudence, that is, considering the smallest impact/risk for the Company and/or related Officers/Personnel.
7	Non Diskriminatif Non-Discriminatory	Setiap Insan Perusahaan memiliki hak yang sama untuk dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Every Company's Personnel has the same right to be able to report violations committed by each Company's Individual that occurs within the Company in accordance with the forms of violations that can be reported through the Violation Reporting System (WBS).
8	Itikad Baik Good faith	Setiap pelaporan pelanggaran dilakukan atas dasar itikad baik dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, bukan dilakukan atas dasar fitnah atau tanpa dasar/bukti. All violation reporting is done in good faith with the aim of the Company, not based on defamation or without basis/evidence
9	Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor Confidentiality and Protection of Whistleblowers	Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan, Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) ini menjaga kerahasiaan serta asas praduga tidak bersalah. In carrying out the process of following up on every complaint, the Violation Reporting System (WBS) maintains the confidentiality and presumption of innocence.
10	Koordinasi Coordination	Penanganan pengaduan harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pejabat yang berwenang. The handling of complaints must be carried out with good cooperation among the authorized officials.
11	Objektivitas Objectivity	Penanganan pengaduan harus berdasar fakta atau bukti yang dapat dinilai. Complaint handling must be based on facts or evidence that can be assessed.

RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan memberikan batasan yang jelas untuk setiap pelaporan yang dapat diproses lebih lanjut oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Kategori pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, yaitu meliputi: penyimpangan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku serta Peraturan Perusahaan, benturan kepentingan, kecurangan, korupsi, pencurian, penggelapan, suap, pemerasan, penipuan, dan gratifikasi ilegal. Untuk kategori lainnya, pengaduan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan lain yang disediakan oleh Perusahaan.

PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

Perusahaan menetapkan Kompartemen Tata Kelola Korporat sebagai Tim Penanganan Aduan (TPA) yang ditugaskan dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). TPA bertanggung jawab langsung kepada Direktur SDM & Tata Kelola. Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS), tugas dan tanggung jawab TPA sekurang-kurangnya meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan klarifikasi atas aduan pelanggaran yang disampaikan pelapor;
2. Mengkoordinasi pengungkapan tindak lanjut aduan pelanggaran dan perlindungan pelapor;
3. Melakukan reviu dan evaluasi perbaikan sistem WBS;
4. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. Berhubungan dengan pihak terlapor untuk memperoleh penjelasan mengenai fakta yang diadukan ataupun klarifikasi atas pengaduan;
 - b. Mendiskusikan kasus yang ditangani dengan pihak yang tidak terkait/berwenang;
 - c. Berusaha untuk melakukan investigasi atau wawancara atas kasus yang dilaporkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

WBS TINDAK PIDANA KORUPSI TERINTEGRASI PTPI DAN KPK RI

Perusahaan senantiasa berkomitmen dalam mencegah *fraud* yang salah satunya melalui pengembangan WBS. Sejalan dengan komitmen tersebut dan menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: S-489/S.MBU/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Kerjasama WBS di BUMN dengan KPK RI, maka Perusahaan telah melaksanakan kerja sama terkait dengan WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi PI dan KPK RI pada tanggal 2 Maret 2021.

VIOLATION REPORTING SYSTEM AND COVERAGE

The Company provides clear limits for each report that can be further processed by the Violation Reporting System (WBS). The categories of complaints that will be followed up by the Violation Reporting System (WBS) are actions that can harm the Company, which include deviations from the Code of Conduct and Company Regulations, conflicts of interest, fraud, corruption, theft, embezzlement, bribery, extortion, fraud, and illegal gratuities. For other categories, complaints can be submitted through other complaint channels provided by the Company.

MANAGEMENT OF THE VIOLATION REPORTING SYSTEM (WBS)

The Company established the Corporate Governance Compartment as a Complaints Handling Team (CHT) assigned to the management of the Violation Reporting System (WBS). The CHT is directly responsible to the Director of HC & Governance. In carrying out the management of the Violation Reporting System (WBS), the duties and responsibilities of the CHT include at least, but not limited to:

1. Clarify complaints of violations submitted by the reporter;
2. Coordinate the disclosure of follow-up complaints of violations and the protection of the reporter;
3. Review and evaluate improvements to the WBS system;
4. It is not allowed to do the following things, but not limited to:
 - a. Liaise with the reported party to obtain an explanation of the facts reported or clarification of the complaint;
 - b. Discuss cases handled by parties who are not related/authorized;
 - c. Seek to conduct an investigation or interview of a reported case without permission from the competent authorities.

PTPI AND KPK RI INTEGRATED WBS

The Company is committed in preventing fraud, and one way has been through the development of WBS. In line with this commitment and follow up on the Secretary of the Ministry of SOEs Number: S-489/S.MBU/12/2020 dated December 22, 2020 regarding WBS cooperation in BUMN with the KPK RI, the Company cooperated in the Integrated PI and KPK RI WBS on March 2, 2021.



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal PTPi terkait penanganan pengaduan tindak pidana korupsi;
2. Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi;
3. Penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi melalui aplikasi;
4. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi; dan
5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait tindak pidana korupsi.

The scope of the cooperation agreement includes:

1. Preparation and/or strengthening of PTPi internal rules related to the handling complaints of corruption;
2. Commitment to management of complaints handling related to corruption;
3. Handling complaints related to criminal acts of corruption through applications;
4. Coordination and joint activities in handling complaints related to corruption; and
5. Exchange of data and/or information related to corruption.

Adapun rincian kegiatan yang telah dilakukan bersama dengan KPK RI pada tahun 2021 sebagai berikut:

The activities carried out together with the KPK RI in 2021 were as follows:

No	Kegiatan Activity
1	<p>Pelaksanaan Rapat Koordinasi Awal Rencana Implementasi <i>Whistleblowing System</i> Terintegrasi bersama KPK RI pada tanggal 12 Januari 2021. Implementation of the initial coordination meeting plan for the integrated Whistleblowing System with KPK RI on January 12, 2021.</p>
2	<p>Tim Internal PTPi (personil dari Unit SPI, Teknologi Informasi, Hukum Korporasi, dan Tata Kelola & Kepatuhan) melakukan rapat koordinasi pada tanggal 22 Januari 2021 untuk merevisi <i>draft</i> Perjanjian Kerja Sama antara KPK RI dengan PTPi tentang Penanganan Pengaduan Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikirim oleh KPK RI. The PI internal team (personnel from the SPI, Information Technology, Corporate Law, and Governance & Compliance Units) held a coordination meeting on January 22, 2021 to revise the draft cooperation agreement between KPK RI and PI regarding the handling of complaints related to corruption in efforts to eradicate corruption sent by KPK RI.</p>
3	<p>Pelaksanaan Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengaduan Tipikor melalui <i>Whistle-Blowing System</i>, pada tanggal 25 Januari 2021 antara PTPi dan KPK RI sesuai undangan dari Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI Nomor: UND/23/PJK.01.03/30-33/01/2021 tanggal 22 Januari 2021. Discussion on cooperation agreements on Corruption Complaints through Whistle-Blowing System, on January 25, 2021 between PI and KPK RI in accordance with the invitation from the Deputy for Information and Data of KPK RI Number: UND/23/PJK.01.03/30-33/01/2021 dated January 22, 2021.</p>
4	<p>Tim Internal PTPi (personil dari Unit SPI, Teknologi Informasi, Hukum Korporasi, dan Tata Kelola & Kepatuhan) melakukan rapat finalisasi <i>draft</i> Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK RI dengan PTPi tentang Penanganan Pengaduan Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Februari 2021 sebagai tindak lanjut atas pembahasan PKS bersama dengan KPK pada tanggal 25 Januari 2021. PI internal team (personnel from the SPI, Information Technology, Corporate Law, and Governance & Compliance Unit) held a finalization meeting of the draft cooperation agreement (PKS) between the KPK RI and PI on the handling of complaints related to corruption in efforts to eradicate corruption on February 16, 2021 as a follow up to the PKS discussion together with KPK on January 25, 2021.</p>

No	Kegiatan Activity
5	<p>Pada tanggal 19 Februari 2021 PI telah menyampaikan <i>draft</i> PKS kepada KPK RI melalui media <i>e-mail</i>, untuk selanjutnya dilakukan reviu final oleh Biro Hukum KPK RI;</p> <p>Biro Hukum KPK RI telah menyampaikan hasil final reviu PKS pada tanggal 23 Februari 2021 kepada Tim PI untuk selanjutnya dilakukan finalisasi dan paraf kepada pejabat terkait. On February 19, 2021 PI delivered a PKS draft to KPK RI through e-mail, for further final revue by the KPK RI Legal Bureau;</p> <p>The KPK RI Legal Bureau submitted the results of the Final PKS Review on February 23, 2021 to the PI team for further finalization and initials by the relevant officials.</p>
6	<p>Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Pengaduan terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2021 oleh Direktur Utama PTPI dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI dengan Nomor Perjanjian Kerjasama Nomor: 79 Tahun 2021, Nomor: 018/A/PA.08.01/E42/SP/2021.</p> <p>Signing of the Cooperation Agreement on Handling Complaints related to Corruption Crimes in Efforts to Eradicate Corruption, carried out on March 2, 2021 by the President Director of PTPI and the Deputy for Information and Data of KPK RI with the Cooperation Agreement Number: 79 of 2021 , Number: 018/A/PA.08.01/E42/SP/2021.</p>
7	<p>Pelaksanaan <i>Kick Off Meeting</i> secara <i>online</i> pada tanggal 20 April 2021, serta penyampaian kebutuhan data kepada KPK RI pada tanggal 21 April 2021 melalui Surat Direktur SDM & Tata Kelola Nomor: 04427/A/PA/E42/ET/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Penyampaian Data <i>Assessment</i> Penerapan <i>Whistleblowing System</i> Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi.</p> <p>Kick Off Meeting online on April 20, 2021, as well as delivery of data requirements to KPK RI on April 21, 2021 through the Director of HC & Governance Number: 04427/A/PA/E42/ET/2021 dated April 21, 2021 Regarding Submission of Data Assessment Application of Integrated Corruption Crimes Whistleblowing System (TPK).</p>
8	<p>Pengisian Kuesioner Budaya Pelaporan tanggal 20-28 April 2021, untuk Dewan Komisaris beserta Organ, Direksi, dan Karyawan. Pengisian survey dilakukan melalui pengisian kuesioner secara <i>online</i> dengan jumlah total responden yang mengisi sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam). Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil survey tersebut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pemahaman Tindak Pidana Korupsi (TPK) karyawan cukup tinggi yaitu 90,13%. • Tingkat partisipasi dan budaya anti korupsi karyawan cukup tinggi yaitu 82%. • Tingkat kapasitas dan profesionalisme aparat pengawasan intern cukup tinggi yaitu 87%. <p>Completing the Cultural Questionnaire Reporting on April 20-28, 2021, for the Board of Commissioners along with Bodies, Board of Drectors, and employees. The survey filling was conducted by filling out questionnaires online by a total of 236 (two hundred thirty-six) respondents. The conclusions obtained from the survey results included:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The employees' level of understanding of corruption (TPK) is quite high at 90.13%. • The employees' level of participation and anti-corruption culture is quite high at 82%. • The level of capacity and professionalism of the internal supervision aparat is quite high at 87%.
9	<p>Pelaksanaan <i>Assessment</i> WBS TPK Terintegrasi yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dan diskusi dengan Tim Teknis WBS PI dan KPK RI tanggal 4 Mei 2021; • Wawancara dengan Staf, VP, dan SVP tanggal 5 Mei 2021. • <i>Asesment</i> Aplikasi WBS Terintegrasi yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2021. <p>Implementation of Integrated TPK WBS Assessment including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interviews and discussions with the WBS PI and KPK RI technical team on May 4, 2021; • Interviews with staff, VP, and SVP on May 5, 2021. • Integrated WBS Application Assessment conducted on May 6, 2021.
10	<p>Penyampaian Metode Integrasi Aplikasi WBS PTPI kepada KPK RI tanggal 19 Mei 2021, melalui surat SVP Sekretaris Perusahaan Nomor: 05631/A/PA/E42/ET/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal penyampaian metode integrasi Aplikasi <i>Whistleblowing System</i> PT Pupuk Indoensia (Persero) dengan KPK RI.</p> <p>Submission of WBS PI Application Integration Method to KPK RI dated May 19, 2021, through the SVP Corporate Secretary Number: 05631/A/PA/E42/ET2/2021 dated May 19, 2021 regarding the delivery of the Whistleblowing Application Integration Method of PT Pupuk Indoensia (Persero) with KPK RI.</p>
11	<p>Pelaksanaan Pelatihan Peluit Integritas oleh KPK RI dengan peserta pengelola WBS PI pada tanggal 7-10 Juni 2021, diikuti oleh 3 (tiga) peserta dari unit SPI, Hukum, dan Tata Kelola & Kepatuhan.</p> <p>The integrity whistleblower training by KPK RI with WBS PI management participants on June 7-10, 2021, was attended by 3 (three) participants from the SPI, Law, and Governance & Compliance Units.</p>

No	Kegiatan Activity
12	<p>Pelaksanaan Rapat Pembahasan Hasil <i>Assessment</i> WBS TPK Terintegrasi PI-KPK RI tanggal 14 Juni 2021. Adapun kesimpulan dalam rapat tersebut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> PI telah memiliki aplikasi WBS dan beberapa media penerimaan pengaduan Pengelolaan pengaduan telah dilengkapi dengan peraturan, personil dan sarana penunjang Sudah terbangun budaya anti korupsi dan budaya melaporkan dugaan penyimpangan <p>Saran berdasarkan Hasil <i>Assessment</i> WBS TPK Terintegrasi Antara PI dan KPK RI meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi WBS kepada pihak Internal dan Eksternal PI terkait dengan penggunaan media WBS, perlindungan pelapor, serta kerahasiaan pelapor untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan tata cara pelaporan melalui WBS. Integrasi media penerimaan pengaduan sehingga menjadi 1 (satu) bank data. Mengembangkan media koordinasi dengan pelapor untuk memudahkan memperoleh dan menggali data terkait dengan pelaporan. Penyesuaian referensi yang digunakan dalam pedoman dan prosedur WBS PI, yaitu Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran-SPP (<i>Whistleblowing System</i>) Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> Tahun 2006. Menyelesaikan pemutakhiran Pedoman dan Prosedur WBS mengacu pada rekomendasi dari BPKP dan hasil penilaian GCG. <p>PI-KPK RI Integrated TPK WBS Assessment Discussion Meeting on June 14, 2021. The conclusions at the meeting include:</p> <ul style="list-style-type: none"> PI already has a WBS application and several media for receiving complaints Complaint management is equipped with regulations, personnel and supporting facilities An anti-corruption culture has been built and a culture of reporting alleged irregularities <p>Suggestions based on the Integrated TPK WBS Between PI and RI KPK assessment results included:</p> <ul style="list-style-type: none"> WBS socialization to Internal and External PI parties related to the use of WBS media, whistleblower protection, and whistleblower confidentiality to increase understanding related to reporting procedures through WBS. Integration of media for receiving complaints to become 1 (one) data bank. Develop coordination media with reporters to make it easier to obtain and explore data related to reporting. Adjustment of references used in the WBS PI guidelines and procedures, namely the Guidelines for Reporting Systems and Violations-SPP (<i>Whistleblowing System</i>) of the 2006 National Governance Policy Committee. Completed the updating of the WBS Guidelines and Procedures referring to the recommendations from BPKP and the results of the GCG assessment.
13	<p>Pembahasan rencana aksi atas Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> WBS TPK Terintegrasi PTPI dan KPK RI bersama Tim Internal PI pada tanggal 19 Juli 2021</p> <p>Discussion on the action plan for the Recommendations for the Integrated PI and RI KPK TPK WBS Assessment with the PI Internal Team on July 19, 2021.</p>
14	<p>Pembahasan final rencana aksi atas Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> WBS TPK Terintegrasi PTPI dan KPK RI bersama Tim Internal PI dan KPK RI pada tanggal 21 Juli 2021</p> <p>Final discussion on the action plan for the Recommendation Results of the Integrated TPK PI and the RI KPK WBS Assessment with the PI and KPK RI Internal Teams on July 21, 2021</p>
15	<p>Penyampaian Final Rencana Aksi atas Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> WBS TPK Terintegrasi PTPI dan KPK RI pada tanggal 21 Juli 2021 melalui e-mail</p> <p>Final submission of the Action Plan on the Recommendation Results of the Integrated TPK PI and the RI KPK WBS Assessment on July 21, 2021 via e-mail</p>
16	<p>Pelaksanaan rapat pembahasan instalasi sistem AROMA bersama dengan PTPI PI dan TI KPK pada tanggal 26 Juli 2021</p> <p>Meeting to discuss the installation of the AROMA system with TI PI and TI KPK on July 26, 2021</p>
17	<p>Penyampaian Laporan Final Hasil <i>Assessment</i> WBS TPK Terintegrasi PTPI dan KPK RI serta kesepakatan rencana aksi melalui surat KPK RI Nomor: B/4462/PM.00.00/30-35/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021</p> <p>Submission of the Final Report on the Integrated PI and the RI KPK TPK WBS Assessment Results, and agreement on an action plan through RI KPK letter Number: B/4462/PM.00.00/30-35/08/2021 dated August 9, 2021</p>
18	<p>Uji Coba Integrasi Sistem WBS PI dan Sistem AROMA KPK oleh Tim TI PTPI, melalui instalasi Sistem AROMA telah selesai dilakukan pada tanggal 28 September 2021</p> <p>Trial for the integration of the WBS PI System and the KPK AROMA System by the PI IT Team, through the installation of the AROMA System, completed on September 28, 2021</p>
19	<p>Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> melalui Internalisasi Budaya Anti Korupsi di lingkungan PI Grup dengan Tema "Implementasi WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi KPK RI dan PTPI", pada tanggal 30 September 2021</p> <p>Follow-up on the Recommendations of the Assessment Results through Internalization of Anti-Corruption Culture within the PI Group with the theme "Implementation of the Integrated Corruption RI and PTPI WBS", on September 30, 2021.</p>
20	<p>Pelaksanaan <i>benchmark</i> oleh PT PLN terkait dengan pengelolaan WBS di PTPI telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021.</p> <p>The benchmark implementation by PT PLN related to WBS management at PI carried out on November 2, 2021</p>
21	<p>Penyampaian kepada KPK RI terkait dengan penetapan pertukaran informasi dan data dalam pelaksanaan WBS terintegrasi PTPI dan KPK</p> <p>Submission to the RI KPK related to exchange of information and data in the integrated PI and KPK WBS</p>
22	<p><i>Launching</i> Aplikasi WBS TPK Terintegrasi PTPI dan KPK pada tanggal 10 Desember 2021</p> <p>Launch of the Integrated PI and KPK TPK WBS Application on December 10, 2021</p>
23	<p>Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi <i>Whistleblowing System</i> TPK Terintegrasi PTPI dan KPK dilakukan melalui pelaksanaan <i>training i-webs</i> pada tanggal 14 Desember 2021.</p> <p>Technical Guidance on the Use of the Integrated PI and KPK TPK Whistleblowing System Application carried out through i-webs training on December 14, 2021</p>

SOSIALISASI PENERAPAN WBS

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai *Whistleblowing System* di seluruh tingkatan dalam organisasi, Perusahaan melaksanakan sosialisasi WBS secara berkelanjutan baik kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Sosialisasi WBS di internal Perusahaan disampaikan melalui media internal perusahaan seperti rapat unit kerja, Majalah Internal, *e-mail*, dan *desktop/laptop* karyawan, sedangkan sosialisasi WBS kepada pihak eksternal disampaikan melalui *website* Perusahaan, laporan tahunan, dan kegiatan-kegiatan Perusahaan yang melibatkan pihak eksternal Perusahaan. Adapun sosialisasi ke pihak internal dan eksternal yang dilakukan pada tahun 2021 antara lain:

1. Sosialisasi WBS melalui himbuan terkait larangan penerimaan dan permintaan gratifikasi oleh insan PTPI dalam rangka perayaan hari keagamaan, ulang tahun perusahaan maupun dalam aktivitas-aktivitas lainnya (Hari Raya Idul Fitri dan Nataru Tahun 2021) didalamnya terdapat media pelaporan WBS, yang disampaikan kepada:
 - a. Himbuan tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442H oleh Insan PTPI sesuai surat Direktur Utama PTPI kepada Seluruh Direksi dan Karyawan nomor 08008/A/PA/E42/IT/2021 tanggal 05 Mei 2021.
 - b. Himbuan tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442H oleh Insan PTPI sesuai surat Direktur Utama PTPI kepada Direktur Utama Anak Perusahaan nomor 05020/A/PA/E42/ET/2021 tanggal 05 Mei 2021.
 - c. Himbuan tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442H oleh Insan PTPI sesuai surat Direktur Utama PTPI kepada Komisaris Utama nomor 05029/A/PA/E42/ET/2021 tanggal 05 Mei 2021.
 - d. Himbuan tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442H oleh Insan PTPI sesuai surat Direktur Utama PTPI kepada Seluruh Rekanan nomor 05045/A/PA/E42/ET/2021 tanggal 05 Mei 2021.
 - e. Penyampaian Himbuan dan Komitmen PTPI tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Natal 2021 dan tahun Baru 2022 yang disampaikan secara internal melalui *broadcast* pesan whatsapp ke seluruh karyawan pada tanggal 24 November 2021 dan secara eksternal melalui advertorial di Harian Media Indonesia tanggal 21 Desember 2021.
2. Sosialisasi WBS melalui *Website* Perusahaan serta melalui *standing Banner* di beberapa lokasi strategis Perusahaan.
 - a. Pengisian Kuesioner Budaya Pelaporan tanggal 20-28 April 2021, untuk Dewan Komisaris beserta Organ, Direksi, dan Karyawan. Pengisian survei dilakukan melalui pengisian kuesioner secara *online*

DISSEMINATION OF WBS IMPLEMENTATION

To increase understanding of the Whistleblowing System at all levels within the organization, the Company carried out continuous socialization of WBS to both internal and external parties of the Company. WBS socialization within the Company is delivered through internal company media such as work unit meetings, Internal Magazines, e-mail, and employee desktops/laptops, while WBS socialization to external parties is delivered through the Company's website, annual reports, and Company activities external to the Company. Dissemination to internal and external parties carried out in 2020 included:

1. WBS dissemination through appeals regarding the prohibition of accepting and requesting gratuities by PTPI personnel in the context of celebrating religious days, company birthdays and in other activities (Eid Al-Fitr and Nataru in 2021) where there is WBS reporting media, submitted to
 - a. An appeal regarding Gratification Control in the context of Eid Al-Fitr 1442H by PTPI Group personnel according to the letter from the President Director of PTPI to all Directors and Employees number 08008/A/PA/E42/IT/2021 dated May 5, 2021.
 - b. An appeal regarding Gratification Control in the context of Eid Al-Fitr 1442H by PTPI Group personnel according to the letter from the President Director of PTPI to the President Director of Subsidiaries number 05020/A/PA/E42/ET/2021 dated May 5, 2021.
 - c. An appeal regarding Gratification Control in the context of Eid Al-Fitr 1442H by PTPI Group personnel according to the letter from the President Director of PTPI to the President Commissioner number 05029/A/PA/E42/ET/2021 dated May 5, 2021.
 - d. An appeal regarding Gratification Control in the context of Eid Al-Fitr 1442H by PTPI Group personnel according to the letter from the President Director of PTPI to All Partners number 05045/A/PA/E42/ET/2021 dated May 5, 2021.
 - e. Submission of the Appeal and Commitment of PTPI regarding Gratification Control in the context of Christmas 2021 and New Year 2022 which was delivered internally via WhatsApp message broadcast to all employees on November 24, 2021 and externally through advertorials in Harian Media Indonesia on December 21 2021
2. WBS socialization through the Company's Website and through standing Banners at several strategic locations of the Company.
 - a. Completion of the Reporting Culture Questionnaire on April 20-28, 2021, for the Board of Commissioners and its Organs, Board of Directors, and Employees. The survey was filled out via an online questionnaire

dengan jumlah total responden yang mengisi sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam).

- b. Wawancara terkait dengan WBS TPK Terintegrasi Antara PI dan KPK RI bersama Staf, VP, dan SVP tanggal 5 Mei 2021.
- c. Pelaksanaan Pelatihan Peluit Integritas oleh KPK RI dengan peserta pengelola WBS PI pada tanggal 7-10 Juni 2021, diikuti oleh 3 (tiga) peserta dari unit SPI, Hukum, dan Tata Kelola & Kepatuhan.
- d. *Webinar* Internalisasi Budaya Anti Korupsi di lingkungan PI Grup dengan Tema "Implementasi WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi KPK RI dan PTPI", pada tanggal 30 September 2021. "
- e. Pelaksanaan *benchmark* oleh PT PLN terkait dengan pengeolaan WBS di PI telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021.
- f. Sosialisasi WBS pada saat *Vendor Gathering* pada tanggal 22 November 2021.
- g. *Webinar* Internalisasi Budaya Antikorupsi di PI Grup dengan Tema "Optimalisasi *Whistleblowing System* dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Tindak Pidana Korporasi, untuk Mewujudkan BUMN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi serta Launching WBS Terintegrasi pada tanggal 10 Desember 2021.

by 236 (two hundred and thirty-six) respondents.

- b. Interview related to PI and KPK RI TPK Integrated WBS with Staff, VP, and SVP on May 5, 2021.
- c. Implementation of the Integrity Whistleblower Training by KPK with participants PI WBS management on June 7-10, 2021, attended by 3 (three) participants from the SPI, Law, and Governance & Compliance units.
- d. Webinar Internalization of Anti-Corruption Culture within the PI Group with the theme "Implementation of the RI KPK and PTPI Integrated WBS", on September 30, 2021."
- e. Benchmark implementation by PT PLN related to PI WBS management carried out on November 2, 2021.
- f. WBS socialization at the Vendor Gathering on November 22, 2021.
- g. Webinar Internalization of PI Group Anti-Corruption Culture with the theme "Optimizing the Whistleblowing System to Prevent Corruption and Corporate Crime, to Realize a Clean and Corruption-Free SOE and Launching Integrated WBS on December 10, 2021.

MEDIA PELAPORAN

Perusahaan menyediakan media pelaporan dugaan pelanggaran melalui *website*, *e-mail*, telepon, dan desk pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor, yaitu:

<i>Website</i>	: http://pihclean.pupuk-indonesia.com
<i>Email</i>	: pihclean@pupuk-indonesia.com
<i>Telepon</i>	: (021) 53654900 extension 6620
<i>Desk Pengaduan</i>	: Tim WBS PIHC – Kantor Pusat PT Pupuk Indonesia (Persero) Gedung Pusri Lantai 6 Jalan Taman Anggrek – Kemanggisian Jaya, Jakarta, 11480

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN ADUAN

Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Perusahaan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan aduan melalui media pelaporan yang disediakan Perusahaan;
2. Tim Pengelola Aduan (TPA) menerima pengaduan yang masuk melalui media pelaporan dan melakukan analisis kelengkapan persyaratan aduan sesuai dengan ketentuan. Apabila aduan tidak memenuhi kriteria dan/atau pelapor tidak dapat melengkapi persyaratan aduan selama 7 (tujuh) hari sejak aduan ditanggapi

REPORTING MEDIA

The Company provides media for reporting suspected violations through the website, e-mail, telephone and complaint desks that can be used by the complainant, namely:

<i>Website</i>	: http://pihclean.pupuk-indonesia.com
<i>Email</i>	: pihclean@pupuk-indonesia.com
<i>Telephone</i>	: (021) 53654900 extension 6620
<i>Complaint Desk</i>	: WBS PIHC Team– Head Office PT Pupuk Indonesia (Persero) Gedung Pusri Lantai 6 Jalan Taman Anggrek – Kemanggisian Jaya, Jakarta, 11480

MECHANISM OF VIOLATION REPORTING AND HANDLING

Everyone can report suspected violations that occur within the Company through the Company's Violation Reporting System (WBS) with the following mechanism:

1. The reporter submits a complaint through the reporting media provided by the Company;
2. The Complaints Management Team (TPA) receives complaints that enter through reporting media and analyzes the completeness of the complaint requirements in accordance with the provisions. If the complaint does not meet the criteria and/or the reporter cannot complete the complaint requirement

oleh TPA, maka aduan tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;

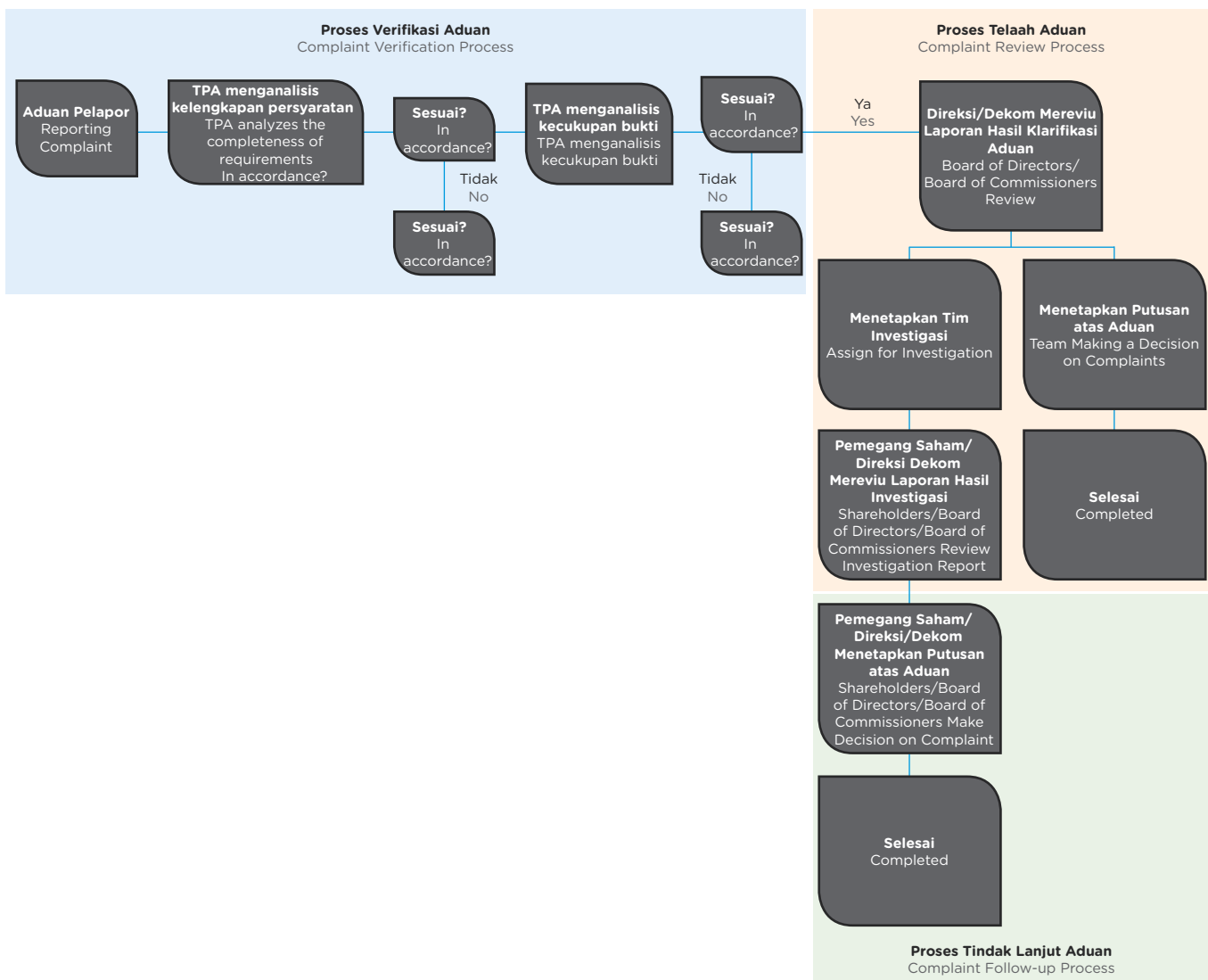
3. Apabila aduan memenuhi persyaratan maka TPA melakukan klarifikasi kecukupan bukti awal yang disampaikan pelapor dan menyusun Laporan Hasil Klarifikasi Aduan;
4. Kewenangan penanganan pelaporan berdasarkan klasifikasi terlapor, sebagai berikut:
 - a. Apabila terlapor Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan Karyawan, maka TPA menyerahkan Laporan Hasil Klarifikasi Aduan kepada Direksi;
 - b. Apabila terlapor Direksi Perusahaan, maka TPA menyerahkan Laporan Hasil Klarifikasi Aduan kepada Dewan Komisaris;
 - c. Selanjutnya dari butir a dan b di atas, Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan penanganan pengaduan menetapkan rekomendasi tindakan terhadap laporan hasil klarifikasi aduan yang disampaikan TPA, sebagai berikut:
 - i) Proses pemberian sanksi, jika dipandang Laporan Hasil Klarifikasi sudah memadai.
 - ii) Dilakukan investigasi oleh Tim Investigasi dari internal sesuai substansi pengaduan, dan dapat melibatkan external investigator, jika dipandang Laporan Hasil Klarifikasi perlu pendalaman lebih lanjut.
5. Tim Investigasi menyelesaikan tugas dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan untuk dilakukan investigasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi, dan dapat diperpanjang
6. Dari laporan hasil investigasi, Dewan Komisaris atau Direksi menetapkan keputusan akhir sebagai berikut:
 - a. Pengaduan ditutup atau selesai, karena aduan tidak terbukti;
 - b. Proses penetapan sanksi oleh pihak yang berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terlapor terbukti bersalah;
 - c. Pengaduan diteruskan kepada penyidik atau pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi.

within 7 (days) since the complaint has been responded to by the TPA, then the complaint is declared to not meet the requirements;

3. If the complaint meets the requirements, the TPA will clarify the adequacy of the initial evidence submitted by the reporter and prepare a Report on the Complaints Clarification Result;
4. The authority to handle reporting is based on the reported classifications, as follows:
 - a. If reported are the Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, and Employees, then the TPA submits the Report on the Clarification of Complaints to the Board of Directors;
 - b. If reported is the Board of Directors of the Company, the TPA submits a Report on the Results of the Clarification of Complaints to the Board of Commissioners;
 - c. Furthermore, from points a and b above, the Board of Directors or the Board of Commissioners in accordance with the authority to handle complaints shall determine recommendations for action on the report on the clarification of complaints submitted by the TPA, as follows:
 - i) The sanction process will take place if Clarification Report is considered adequate.
 - ii) An investigation is carried out by the Internal Investigation Team according to the substance of the complaint and may involve an external investigator if it is deemed that the Clarification Result Report needs further investigation.
5. The Investigation Team completes the task within 90 (ninety) days after the determination to conduct an investigation by the Board of Commissioners or the Board of Directors, and it can be extended.
6. From the investigation report, the Board of Commissioners or Board of Directors shall make the final decision as follows:
 - a. Complaints are closed or completed, if the complaints have not been proven;
 - b. The process of determining sanctions by the authorities that are allowed to impose sanctions in accordance with applicable regulations, if the reported party is proven guilty;
 - c. Complaints are passed on to the investigator or the competent authority for further processing in accordance with the applicable provisions and regulations, if there is evidence indicating that the violation is related to a general crime and/or corruption.

BAGAN ALUR SISTEM PENGADUAN

COMPLAINT SYSTEM FLOWCHART



SANKSI BAGI TERLAPOR

Setiap terlapor yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR/WHISTLEBLOWER

Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan identitas dan pelaporan pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun.

SANCTIONS FOR VIOLATORS

Every reported party proven to have committed a violation is given sanctions in accordance with the provisions in force.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The Company guarantees protection for whistleblowers against all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party if the Reporter maintains the confidentiality of the identity and reporting of violations complained to any party.

Pemberian perlindungan kepada pelapor, dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.

JUMLAH PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2021

Hingga akhir tahun 2021, jumlah pengaduan yang masuk melalui sistem *Whistleblowing System* sebanyak 751 (tujuh ratus lima puluh satu) aduan dugaan pelanggaran, terdiri dari:

1. 712 (95%) bukan aduan dugaan pelanggaran; dan
2. 39 (5%) aduan dugaan pelanggaran.

Dari 39 (tiga puluh sembilan) aduan dugaan pelanggaran tersebut, terdiri dari:

1. 12 (dua belas) (30%) aduan terkait Kecurangan,
2. 12 (dua belas) (30%) aduan terkait Penipuan,
3. 5 (lima) (13%) aduan terkait Benturan Kepentingan,
4. 4 (empat) (10%) aduan terkait Kode etik/perilaku dan Peraturan Kepegawaian,
5. 3 (tiga) (8%) aduan terkait Penggelapan,
6. 1 (satu) (3%) aduan terkait Penyuapan,
7. 1 (satu) (3%) aduan terkait Pemerasan, dan
8. 1 (satu) (3%) aduan terkait Korupsi.

Berikut laporan yang masuk melalui media WBS sepanjang tahun 2020 dan 2021.

The granting of protection to the reporter can be refused or stopped if there is evidence that the person concerned did not carry out his obligations in maintaining the confidentiality of his identity and report.

TOTAL VIOLATION REPORTS IN 2021

By the end of 2021, the number of complaints submitted through the Whistleblowing System was 751 (seven hundred and fifty-one) complaints of alleged violations, consisting of:

1. 712 (95%) were not complaints of alleged violations, and
2. 39 (thirty-nine) (5%) were complaints of alleged violations.

The 39 (thirty nine) complaints of alleged violations, consisting of:

1. 12 (twelve) (30%) complaints related to Cheating,
2. 12 (twelve) (30%) complaints related to Fraud,
3. 5 (five) (13%) complaints related to Conflicts of Interest,
4. 4 (four) (10%) complaints related to the Code of ethics/behavior and Employment Regulations,
5. 3 (three) (8%) complaints related to embezzlement,
6. 1 (one) (3%) complaint related to Bribery,
7. 1 (one) (3%) complaint related to Extortion, and
8. 1 (one) (3%) complaint related to Corruption.

The following shows the reports received through WBS media throughout 2021 and 2020.

No.	Status	Jumlah Aduan Berdasarkan Media Sosial Total of Complaints Based on Social Media								Jumlah Aduan Total Complaints			
		Website		Email		Telepon Telephone		Desk Pengaduan Complaint Desk		2020		2021	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Total	%	Total	%
Jenis Aduan Type of Complaint													
1	Aduan Dugaan Pelanggaran Complaint of Alleged Violations	0	30	7	9	0	0	0	0	7	1%	39	5%
2	Bukan Aduan Dugaan Pelanggaran Complaints of Non-Alleged Violation	82	9	843	703	0	0	0	0	925	99%	712	95%
Jumlah Aduan Total Complaints		82	39	850	712	0	0	0	0	932	100%	715	100%





08

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Perusahaan senantiasa berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

The Company strives to build harmonious relationships with the communities and the environment to create sustainable added value.

MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

IMPROVING THE QUALITY OF COMMUNITY LIFE AND THE ENVIRONMENT



Komitmen PTPI sebagai agen perubahan dalam pelaksanaan prinsip tanggung jawab sosial mendorong Perusahaan untuk senantiasa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas hidup komunitas lokal.

PTPI commitment as an agent of change in applying the social responsibility principles drives the Company to contribute to the communities' economic development and to improve the quality of life in the local communities.

Dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional perusahaan, PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PTPI mengupayakan interaksi dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar kawasan industri di mana Perusahaan beroperasi. PTPI berusaha memberikan kontribusi signifikan yang dapat membangun kehidupan sosial masyarakat serta menjaga kelestarian ekosistem. Komitmen ini dilandaskan oleh kesadaran bahwa Perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan memiliki potensi ketahanan bisnis yang tinggi sebagai dampak dari dukungan masyarakat dan peningkatan citra Perusahaan. Untuk itu PTPI berkomitmen untuk mewujudkan usaha berkelanjutan direalisasikan dengan penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") guna mengoptimalkan nilai tambah Perusahaan bagi pemangku kepentingan serta meminimalkan output dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas Perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan.

When carrying out the Company's operational activities, PT Pupuk Indonesia (Persero) or PTPI interacts with the community and the environment around the industrial areas where the Company operates. PTPI strives to make a significant contribution to develop the community social life, and to maintain the ecosystem sustainability. These commitments are based on the awareness that companies that uphold the principles of sustainability have a higher potential for business resilience as a result of community support and the companies' improving image. For this reason, PTPI is committed to delivering a sustainable business by implementing Social and Environmental Responsibility ("SER"), to optimize the Company's added value for stakeholders and to minimize the negative impacts caused by Company activities on the community and the environment.



Wujud nyata dari komitmen PTPI untuk melaksanakan TJSL dibuktikan melalui berbagai program berikut:

1. Prioritas Program Pendidikan
2. Prioritas Program Lingkungan
3. Prioritas Program Pengembangan UMK

EMPAT TUJUAN STRATEGIS PROGRAM TJSL PTPI



Berkaitan Dengan Alam

PTPI berusaha melakukan kegiatan seperti penghijauan dan menciptakan pelestarian lingkungan.

Related to Nature

PTPI carries out activities to increase reforestation and create environmental conservation.



Berkaitan Dengan Kesejahteraan

PTPI berusaha melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan baik di internal maupun eksternal.

Related to Welfare

PTPI carries out activities to improve welfare, both internally and externally.



Berkaitan Dengan Masyarakat

PTPI berusaha melakukan kegiatan yang berdampak pada kehidupan sosial yang lebih baik.

Related to the Community

PTPI carries out activities that have an impact on a better social life.



Berkaitan dengan Ekonomi

PTPI berusaha melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan laba Perusahaan yang akhirnya dapat menunjang ekonomi negara dan membantu peningkatan indeks perekonomian.

Related to the Economy

PTPI carries out activities to increase profits that supports the country's economy and helps increase the economic index.

Pelaksanaan program TJSL berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk menciptakan hubungan harmonis antara Perusahaan dan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan serta lingkungan. PTPI telah membentuk divisi khusus yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Program TJSL Perusahaan, yaitu Departemen TJSL. Agar program TJSL dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, divisi ini memiliki beberapa unit khusus yang tersebar di wilayah operasional anak perusahaan PTPI.

The implementation of the CSR program is oriented towards achieving the Sustainable Development Goals (TPB) to create a harmonious relationship between the company and the community as stakeholders and the environment. PTPI has established a special division called the SER Department with the responsibility to implement, supervise, and evaluate the Company's SER program. For the SER programs to reach people in need, this division has several special units spread across the operational areas of PTPI.



Lebih lanjut tentang upaya PTPI dalam mewujudkan keberlanjutan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan tahun 2021 sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

More about PTPI's efforts in realizing sustainability can be seen in the 2021 Sustainability Report as an integral document of this Annual Report



CREATING SHARED VALUE (CSV)

Di samping menjalankan program CSR, PTPI berinovasi untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSV (Creating Shared Value), yang merupakan pengembangan dari kegiatan CSR Perusahaan. Salah satu inisiatif dari program CSV yang telah digagas dan sedang diwujudkan oleh PTPI dan seluruh anak perusahaan adalah program agro solution berupa pendampingan kepada para petani agar bisa meningkatkan produktivitas pertanian, mulai dari pembibitan hingga panen.

Pada tahun 2021, Petani di seluruh provinsi di Indonesia, di antaranya petani untuk komoditi padi, kakao, jagung, cabai merah, nanas dan manggis sebanyak 38.511 telah menjalankan program ini di atas lahan sebesar 37.166 Hektare. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas produksi hasil panen padi per 31 Desember 2021 dari 5,7 ton/Ha menjadi 7,6 ton/Ha + 2,0 ton/Ha (35,14%), untuk kapasitas produksi hasil panen jagung s.d Desember 2021 dari 5,3 ton/Ha menjadi 7,2 ton/Ha + 1,9 ton/Ha (34,91%). PTPI akan terus memperluas cakupan Program Agro Solution di tahun mendatang dengan menetapkan target seluas 250.000 Hektare untuk berbagai komoditi untuk 2022.

EDUKASI MASYARAKAT

Program edukasi masyarakat yang dikembangkan oleh PTPI bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Edukasi masyarakat dijalankan melalui Program Bina Lingkungan/CSR Perusahaan.

CREATING SHARED VALUE (CSV)

In addition to its CSR programs, PTPI carried out community empowerment through CSV (Creating Shared Value) activities, which are a development of the Company's CSR activities. One of the CSV program initiatives that has been initiated and is being realized by PTPI and all subsidiaries is the agro solution program, which provides assistance to farmers to increase their agricultural productivity, from seedling to harvesting.

In 2021, farmers in all provinces in Indonesia, including farmers for rice, cocoa, corn, red chili, pineapple and mangosteen commodities as many as 38,511 have implemented this program on an area of 37,166 hectares. This program has succeeded in increasing the production capacity of rice yields as of December 31, 2021 from 5.7 tons/ha to 7.6 tons/ha + 2.0 tons/ha (35.14%), for corn production capacity up to December 2021. from 5.3 tons/Ha to 7.2 tons/Ha + 1.9 tons/Ha (34.91%). PTPI will continue to expand the scope of the Agro Solution Program in the coming year by setting a target of 250,000 hectares for various commodities for 2022.

COMMUNITY EDUCATION

The public education program developed by PTPI aims to broaden the knowledge and insight of the communities to increase the quality of human capital. Community education is carried out through the Company's Community Development Program/CSR.



Program TJSL Edukasi Masyarakat



Beasiswa Pendidikan
Education Scholarships

Beasiswa Pendidikan

PTPI memberikan bantuan dana bagi pelajar yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Selain itu, Perusahaan juga memberikan biaya pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan paket ABC. Siswa-siswi berprestasi penerima sponsor pendidikan dari Pupuk Indonesia berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan total pendanaan pada program beasiswa pendidikan sebesar Rp7.533 miliar.

Program Lolapil (Program Loka Latihan Keterampilan)

PTPI bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk melatih keterampilan dan kedisiplinan para operator industri lulusan SMA/SMK sederajat.

Sertifikasi Keahlian

Pembekalan keterampilan dan peningkatan kompetensi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan melalui pelatihan HSE dan welder, adapun keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat dimasa mendatang meskipun di luar lingkungan perusahaan.

Rumah Tahfidz

PTPI mendanai 55 santri Tahfidz Al Quran untuk menjalankan bimbingan selama beberapa bulan. Program ini didukung oleh 11 Rumah Tahfidz Al Quran yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

INVESTASI INFRASTRUKTUR DAN DUKUNGAN LAYANAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional di Indonesia guna meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar serta meningkatkan efektivitas distribusi produk perusahaan. Oleh karena itu, program TJSL PTPI mencakup pembiayaan infrastruktur yang diberikan secara sukarela dan tidak bersifat komersial.

SER Community Education Program



Sertifikasi Keahlian
Expertise Certification

Education Scholarships

PTPI provides financial assistance for underprivileged students to continue their education from elementary school to university level. In addition, the Company also provides literacy education funds, and ABC package equivalent education. Outstanding students who receive educational sponsorship from Pupuk Indonesia come from various regions in Indonesia with a total funding of Rp7,533 billion.

Lolapil Program (Skills Training Workshop Program)

PTPI cooperates with the Indonesian Navy to train SMA/SMK or equivalent graduates with the skills and discipline needed for industrial operators.

Expertise Certification

Providing the skills and improving community competencies to increase their abilities in the fields required by the Company through HSE and welder training, while these skills can be used by beneficiaries coming from outside the Company environment.

Tahfidz House

PTPI provided a guidance program to 55 Tahfidz Al Quran students over several months. This program is supported by 11 Tahfidz Al Quran houses spread across all regions in Indonesia.

INVESTMENT INFRASTRUCTURE AND SUPPORT SERVICES

Infrastructure development is one of the national priorities in Indonesia to increase public access to basic services and increase the effectiveness of the Company's product distribution. Therefore, PTPI's SER program includes infrastructure financing, which is provided voluntarily and is not commercial in nature.

Pada tahun 2021, total dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur adalah sebesar Rp10.043 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan atau pengecoran jalan, pendirian gapura, pembangunan sarana olahraga warga, toilet umum, pendirian taman baca, serta pemasangan CCTV. Selain itu, dana juga dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas bagi program unggulan.

In 2021, the total funds spent on infrastructure development financing was Rp10.043 billion. The funds were allocated for road repairs or castings, construction of gates, sports facilities for residents, public toilets, establishment of reading gardens, and installation of CCTV. In addition, funds were also used for the development of infrastructure and facilities for superior programs.

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG YANG SIGNIFIKAN

Manfaat nyata telah dirasakan oleh komunitas lokal di sekitar wilayah operasional PTPI melalui implementasi program-program TJSL. Selama tahun 2021, PTPI telah menjalankan beberapa program yang memberikan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan dan mendukung kemajuan masyarakat. Program tersebut antara lain adalah program kemitraan dan program pengentasan kemiskinan lainnya.

SIGNIFICANT INDIRECT ECONOMIC IMPACT

Real benefits have been felt from the SER programs by the local communities around PTPI operational areas. During 2021, PTPI implemented several programs that had a significant indirect economic impact and supported the community's progress. These programs included the partnership program and other poverty alleviation programs.

PROGRAM KEMITRAAN

Manfaat dari Program Kemitraan ini tercermin dari peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki masyarakat, serta memperbaiki kualitas hidup komunitas lokal di wilayah operasional PTPI. Per tanggal 31 Desember 2021, jumlah mitra binaan PTPI tercatat sebanyak 60.556 mitra yang tersebar di seluruh wilayah operasi anak perusahaan, atau bertambah 1.030 Mitra pada tahun 2021.

PARTNERSHIP PROGRAM

The Partnership Program benefits are reflected in the increasing employment levels, the potential and skills being developed in the community, as well as their improved quality of life in PTPI operational areas. As of December 31, 2021, the number of PTPI foster partners reached 60,556 partners spread across all operating areas of the subsidiaries, an increase of 1,030 Partners in 2021.

Adapun Dana Program Kemitraan PTPI bersumber dari dana pengembalian pinjaman yang digulirkan kembali. Pada tahun pelaporan 2021, realisasi program penyaluran dana Program Kemitraan adalah sebesar Rp103.475 miliar, yang terdiri dari pinjaman mitra binaan sebesar 103.098 dan pembinaan kemitraan sebesar 377.

PTPI Partnership Program funds are sourced from previous loan repayment funds. In the 2021 reporting year, the Partnership Program fund distributed Rp103,475 billion, consisting of loans to foster partners of Rp103,098 and partnership development of Rp377.

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

PTPI meluncurkan program-program untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah operasional PTPI. Program ini ditujukan bagi warga dari segala usia dengan menitikberatkan pada pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah terlaksana sejauh ini adalah:

POVERTY ALLEVIATION PROGRAM

PTPI has launched poverty alleviation programs in PTPI operational areas. This program is intended for citizens of all ages with an emphasis on developing entrepreneurship to improve the economic conditions of the community. The poverty alleviation programs implemented to date include:

1. Rumah Kreatif BUMN
PTPI menciptakan program ini sebagai wadah pembinaan bagi para pemilik bisnis usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Program Rumah Kreatif juga mewadahi pemasaran produk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk di tengah ketatnya persaingan bisnis yang ketat.
2. Kampung Berdaya Ramah Disabilitas
PTPI bersama masyarakat mengembangkan sebuah program yang berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mementingkan partisipasi seluruh lapisan

1. Rumah Kreatif BUMN
PTPI created this program as a forum for fostering micro business owners to develop their businesses. The program also facilitates the marketing of MSME products to increase product competitiveness during intense business competitive times.
2. Kampung Berdaya Ramah Disabilitas
PTPI and the communities have developed a program that focuses on environmental conservation, but also emphasizes the participation of all levels of society,



masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Program ini melaksanakan budi daya tanaman Aren yang dapat menyerap polusi, serta menyediakan lingkungan yang inklusif bagi para penyandang disabilitas. Disamping itu, Kampung Berdaya Ramah Disabilitas melakukan revitalisasi ruang interaksi warga dan sinergi bersama inkubator bisnis dalam kegiatan tanggap darurat COVID-19 yang mendahulukan keuntungan seluruh pemangku kepentingan.

3. Program Local Business Development (LBD) Sentra Produk Oleh-Oleh Dewantara
PTPI membina para wirausaha di Kecamatan Dewantara untuk mengikuti pelatihan keahlian dasar wirausaha yang meliputi diversifikasi produk, peningkatan kualitas produk dan kemasan, teknik pemasaran, serta pemberian bantuan dana usaha untuk meningkatkan produktivitas dan keunikan produk khas daerah.
4. Pemberdayaan Keramba Jaring Apung
PTPI membina masyarakat lokal di Perairan Tanjung Limau, Perairan Tanjung Gusung, dan Perairan Bontang Kuala untuk melakukan diversifikasi budidaya 4 jenis Ikan Kerapu dan 5 jenis Lobster yang bibitnya telah diberikan kepada 74 orang nelayan anggota Koperasi BEM. Melalui kegiatan ini anggota koperasi telah mengembangkan jumlah keramba hingga 120 petak dan menerima tambahan pendapatan hingga Rp450.000 - Rp4,5 juta per bulan. PTPI juga membina ibu-ibu nelayan untuk mengelola hasil olahan budidaya ikan untuk dijual di pasar, bahkan diekspor.
5. Putri Eceng
Penumpukan eceng gondok di perairan Kecamatan Klari, Kab. Karawang dimanfaatkan masyarakat untuk produksi kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Program ini juga menekankan partisipasi wanita dalam memanfaatkan kreativitas untuk menghasilkan produk ramah lingkungan yang diminati kalangan masyarakat luas.
6. Kampung Pisang
Masyarakat di sekitar daerah Bengawan Solo dibina untuk memanfaatkan lahan Daerah Airan Sungai (DAS) sebagai area subur untuk penanaman pohon pisang. Pemanfaatan pohon pisang sebagai jajanan dan kerajinan tangan pun digalakkan untuk menambah penghasilan sampingan masyarakat melalui UMKM.

DAMPAK PROGRAM CSR PADA MASYARAKAT

Komitmen PTPI untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui alokasi bantuan program CSR memberikan dampak langsung terhadap kenaikan pendapatan masyarakat sekitar dan adanya program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Adapun dana yang telah direalisasikan PTPI untuk program CSR di tahun 2021 adalah sebesar Rp92,29 miliar meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp51,32 miliar.

including people with disabilities. This program involves the cultivation of pollution-absorbing plants, namely sugar palm., as well as provides an inclusive environment for people with disabilities. In addition, the Empowered Villages are being revitalizing as an interaction space for residents to synergize with business incubators for the Covid-19 emergency response activities that prioritize the benefits for all stakeholders.


3. Local Business Development (LBD) Program for the Dewantara Gifts Center
PTPI has fostered entrepreneurs in Dewantara Sub-district to take part in basic entrepreneurial skills training including product diversification, product and packaging quality improvement, marketing techniques, and has also provided business funding assistance to increase the productivity of unique regional products.
4. Use of Floating Net Cages
PTPI fosters local communities in the Tanjung Limau, Tanjung Gusung, and Bontang Kuala waters to diversify through the cultivation of 4 types of Grouper and 5 types of Lobster for 74 fishermen who are members of the BEM Cooperative. Through this activity, cooperative members have expanded the number of cages to 120 plots and receive additional income of up to Rp450,000 - Rp4.5 million per month. PT Pupuk Indonesia (Persero) also fosters fisherwomen to manage processed fish cultivation products for sale in the market, and even for export.
5. Putri Eceng
The buildup of water hyacinth in the waters in the Klari District, Kab. Karawang are used by the community for the production of high-value handicrafts. This program also emphasizes the participation of women in utilizing creativity to produce environmentally friendly products that are of interest to the wider community.
6. Kampung Pisang
Communities around the Bengawan Solo area have been fostered to use the Airan Sungai (DAS) land as a fertile area for planting banana trees. The use of banana trees for snacks and handicrafts is also encouraged to increase the community's side income through MSMEs.

IMPACT OF CSR PROGRAM ON THE COMMUNITY

PTPI commitment to improve the quality of people's lives through the allocation of CSR program assistance has had a direct impact on increasing the surrounding communities' income, and this program has received a positive response from the communities. The funds that have been realized by PTPI for the CSR program in 2021 are Rp92.29 billion, an increase compared to the previous year which was Rp51.32 billion.

Dampak Program CSR Pada Masyarakat

Impact of CSR Program on the Communities

- 
- Pemenuhan kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan pascabencana
 - Peningkatan kualitas pendidikan yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan terserapnya tenaga kerja profesional
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat mempraktikkan budaya hidup sehat
 - Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup
 - Pertumbuhan laju perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasional PTPI
 - Perkembangan keterampilan kerja masyarakat
 - Tercapainya kesetaraan gender yang ditandai dengan peningkatan jumlah perempuan yang mendapatkan pekerjaan
 - Peningkatan kesehatan dan vitalitas penduduk, termasuk kaum rentan seperti lansia, anak-anak, dan para penyandang disabilitas
 - Konservasi alam yang melindungi sumber air masyarakat, meningkatkan produksi sumber makanan, serta menciptakan diversifikasi mata pencaharian

- Meeting community needs during the post-disaster recovery period.
- Improving the quality of education is directly proportional to improving the quality of human capital and the absorption of professional employees.
- Availability of facilities and infrastructure to support the communities in practicing a healthy living culture.
- The success of health and socio-economic development programs that contribute to increasing life expectancy.
- The economic growth of the communities around the PT Pupuk Indonesia (Persero) operational areas
- Development of community work skills.
- The achievement of gender equality is marked by an increase in the number of women finding work.
- Improving the residents' health and vitality, including the vulnerable such as the elderly, children, and people with disabilities.
- Nature conservation that protects the communities' water sources, increases the production of food sources, and creates a diversification of livelihoods.

Dukungan Terhadap Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19

PTPI menyadari bahwa masyarakat sekitar wilayah operasional, terutama para mitra, mengalami dampak negatif pandemi yang cukup menyulitkan usaha dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, kami menerapkan kebijakan untuk meringankan para mitra dan mendorong usaha mereka seperti:

1. Memberlakukan skema *reconditioning* serta *reschedule* pada teknis penagihan yang menyesuaikan keadaan yang dialami bisnis mitra binaan.
2. Memberikan pelatihan terkait Digital Marketing sebagai upaya peningkatan keterampilan dalam memasarkan produk dan layanan mitra binaan secara online sehingga dapat memperluas pasar.
3. Tetap memberikan pinjaman modal untuk menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga di masa pandemi ini.

Support for the Community during the COVID-19 Pandemic

PTPI understands that the communities around the operational areas, especially the partners, are being negatively impacted by the pandemic that has made it difficult for businesses to meet their daily needs. As a result, we have implemented policies to ease this situation for our partners and to encourage their efforts, including:

1. Implemented *reconditioning* and *rescheduling* schemes on billing techniques adapted to the conditions experienced by the fostered partner's businesses.
2. Provided training on Digital Marketing in an effort to increase the fostered partners skills in marketing the products and services online so they can expand their market.
3. Continued to provide working capital loans to stimulate people's economic activities, so their welfare is maintained during this pandemic.



Bagi masyarakat umum, PTPI berupaya mendukung pengelolaan dampak pandemi dengan penyaluran program PKBL berupa:

- Vaksin Gotong Royong gratis;
- Donasi perangkat pendukung protokol kesehatan;
- Membagikan kebutuhan sembako bagi warga yang terdampak pandemi.

Program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di daerah seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Samarinda Kalimantan Timur. Penyediaan vaksin di daerah Tapanuli Utara, Kab. Tulang Bawang, Kab. Pesawaran dan Kab. Lampung Selatan, Kab. Sumbawa, Kab. Dompus, dan Kab. Bima serta tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Total Vaksin yang telah dibagikan sebanyak 26.000 dosis. Pada tahun 2022 PTPI akan melanjutkan program vaksin booster.

PROGRAM DANA BINA LINGKUNGAN

PTPI memandang program Bina Lingkungan bukan hanya sebagai kewajiban yang harus dijalankan BUMN, melainkan sebuah upaya untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat dengan memanfaatkan dana hibah secara transparan. Dana dialokasikan melalui delapan sektor sebagaimana diatur dalam Permen BUMN No. PER-02/MBU/04/2020.

Pada tahun 2021, realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan adalah sebesar Rp94,64 miliar, naik sebesar 147% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Porsi terbesar disalurkan untuk Pengentasan kemiskinan Rp25,01 miliar atau sebesar 26%.

For the general public, PTPI's support for managing the impact of the pandemic is through the PKBL programs in the form of:

- Free Gotong Royong Vaccines;
- Donating health protocol support devices;
- Distributing basic food needs for people affected by the pandemic.

The COVID-19 vaccination program covered people in areas such as East Kutai, Kutai Kartanegara and Samarinda East Kalimantan. Vaccines were also provided in North Tapanuli, Tulang Bawang, Pesawaran and South Lampung, Sumbawa, Dompus, and Bima and other places throughout Indonesia. A total of 26,000 doses of vaccine have been distributed. In 2022 PTPI will continue with the booster vaccine program.

ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT FUND PROGRAM

PTPI view is that the Community Development program is not only an obligation that must be carried out by SOEs, but is also an effort to empower the social conditions of the communities by transparently utilizing funds. Funds are allocated to eight sectors as regulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/04/2020.

In 2021, the Community Development Program distributed funds amounting to Rp94.64 billion, an increase of 147% compared to the previous year. The largest portion was channeled to poverty alleviation and amounted to Rp25.01 billion (26%).



The cover page features a composite image. On the left, a person wearing a traditional conical hat and a white long-sleeved shirt is working in a rice field. On the right, a woman in a white lab coat, blue face mask, and blue gloves is using a tablet. The background is a mix of green and yellow abstract shapes. The number '09' is prominently displayed in the upper left.

09

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statements

**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2021 DAN 2020/
*31 DECEMBER 2021 AND 2020***

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK ("Grup")

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES ("The Group")

SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned:

- | | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| 1. Nama | : Bakir Pasaman | : | Name 1. |
| Alamat Kantor | : Gedung Pusri
Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya
Jakarta 11480 | : | Office Address |
| Alamat Domisili (sesuai KTP) | : Jl. Taman Sari I/77, Lebak Bulus, Cilandak
Jakarta 12440 | : | Residential Address
(as in identity card) |
| Nomor Telepon Kantor | : +6221 536 54900 | : | Telephone |
| Jabatan | : Direktur Utama/President Director | : | Position |
| 2. Nama | : Wono Budi Tjahyono | : | Name 2. |
| Alamat Kantor | : Gedung Pusri
Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya
Jakarta 11480 | : | Office Address |
| Alamat Domisili (sesuai KTP) | : Vila Bogor Indah CC. 10/29, Ciparigi, Kota
Bogor | : | Residential Address
(as in identity card) |
| Nomor Telepon Kantor | : +6221 536 54900 | : | Telephone |
| Jabatan | : Direktur Keuangan dan Investasi/
Finance and Investment Director | : | Position |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup; | 1. Responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements; |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia; | 2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. All information contained in the Group's consolidated financial statements have been fully and correctly disclosed; and |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect material information or facts and do not omit material information or facts; |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup. | 4. Responsible for the Group's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 21 April/April 2022

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan dan Investasi/
Finance and Investment Director



Bakir Pasaman



Wono Budi Tjahyono



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries as at 31 December 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
21 April 2022

Toto Harsono, S.E.

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1122

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020*)	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	17,453,305	12,405,518	Cash and cash equivalents
Piutang usaha:	5			Trade receivables:
- Pihak berelasi		851,990	1,037,863	Related parties -
- Pihak ketiga		2,472,676	2,576,103	Third parties -
Piutang subsidi dari				Subsidy receivables from
Pemerintah Indonesia	6a	2,822,427	3,400,946	the Government of Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih	6b	981,471	479,981	Unbilled subsidy receivables
Piutang lainnya:				Other receivables:
- Pihak berelasi		557,033	429,224	Related parties -
- Pihak ketiga		64,364	57,686	Third parties -
Pekerjaan dalam penyelesaian				Construction contract
kontrak konstruksi – dari				work in progress –
pelanggan	7	1,543,717	3,111,002	due from customers
Persediaan	8	13,910,126	11,634,940	Inventories
Uang muka dan				
beban dibayar di muka		1,001,193	810,165	Advances and prepayments
Pajak dibayar di muka:	9a			Prepaid taxes:
- Pajak penghasilan badan		321,546	576,915	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		1,024,907	1,361,145	Other taxes -
Aset lancar lainnya		<u>1,169,457</u>	<u>812,500</u>	Other current assets
Jumlah aset lancar		<u>44,174,212</u>	<u>38,693,988</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang lainnya – tidak lancar		358,198	308,738	Other receivables – non-current
Piutang subsidi dari				Subsidy receivables from
Pemerintah Indonesia –				the Government of Indonesia –
tidak lancar	6a	3,057,789	2,318,447	non-current
Pajak dibayar di muka –				
jangka panjang:	9a			Prepaid taxes – non-current:
- Pajak penghasilan badan		469,280	731,762	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		1,355,443	744,858	Other taxes -
Investasi pada entitas				
asosiasi dan				Investment in associates
ventura bersama		1,178,092	805,785	and joint ventures
Properti investasi		888,788	894,148	Investment properties
Aset tetap	10	74,118,213	75,215,169	Fixed assets
Aset pajak tangguhan	9d	112,797	117,146	Deferred tax assets
Aset imbalan pascakerja	17b	767,115	797,560	Post-employment benefit assets
Aset tidak lancar lainnya		<u>1,983,245</u>	<u>1,867,955</u>	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>84,288,960</u>	<u>83,801,568</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>128,463,172</u>	<u>122,495,556</u>	TOTAL ASSETS

*) Direklasifikasi (lihat ke Catatan 39)

As reclassified (refer to Note 39) *)

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	14	7,308,865	8,313,717	Short-term bank loans
Utang usaha:	11			Trade payables:
- Pihak berelasi		279,646	550,957	Related parties -
- Pihak ketiga		5,821,581	3,070,254	Third parties -
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	6a	95,627	126,633	Subsidy payable to the Government of Indonesia
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	7	2,210	55,820	Amounts due to customers for construction contract work
Utang lainnya	12	1,642,704	1,335,066	Other payables
Utang pajak:	9b			Taxes payables:
- Pajak penghasilan badan		1,878,257	136,424	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		650,797	671,713	Other taxes -
Liabilitas yang masih harus dibayar	13a	6,985,668	6,467,251	Accrued liabilities
Provisi	13b	2,033,414	681,403	Provisions
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17a	2,100,570	1,780,958	Short-term employee benefit liabilities
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang:				Current maturities of non-current borrowings:
- Pinjaman bank dan lainnya	15	2,360,195	3,050,941	Bank and other loans -
- Utang obligasi	16	1,773,765	-	Bonds payable -
- Liabilitas sewa	35c	74,740	94,181	Lease liabilities -
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>33,008,039</u>	<u>26,335,318</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka panjang:				Non-current borrowings:
- Pinjaman bank dan lainnya	15	12,611,995	19,030,343	Bank and other loans -
- Utang obligasi	16	7,264,168	6,289,446	Bonds payable -
- Liabilitas sewa	35c	69,682	79,536	Lease liabilities -
Liabilitas imbalan pascakerja	17b	2,764,102	2,894,400	Post-employment benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	9d	738,299	475,863	Deferred tax liabilities
Liabilitas tidak lancar lainnya		<u>66,911</u>	<u>27,833</u>	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>23,515,157</u>	<u>28,797,421</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>56,523,196</u>	<u>55,132,739</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/3 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owner of the parent entity
Modal saham – modal dasar 100.000.000 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 25.000.000 lembar dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	18	25,000,000	25,000,000	Share capital – authorised 100,000,000 shares; issued and fully paid 25,000,000 shares at a par value of Rp1,000,000 (full amount) per shares
Saldo laba:				Retained earnings:
- Ditentukan penggunaannya		16,044,117	14,294,888	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		2,064,733	(919,135)	Unappropriated -
Komponen ekuitas lainnya		<u>28,805,426</u>	<u>28,758,834</u>	Other components of equity
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		71,914,276	67,134,587	Total equity attributable to owner of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		<u>25,700</u>	<u>228,230</u>	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		<u>71,939,976</u>	<u>67,362,817</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>128,463,172</u>	<u>122,495,556</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 2/1 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA				SALES AND OTHER REVENUES
Penjualan produk	21	49,313,851	37,356,701	Sales of products
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia	22	25,258,692	25,712,148	Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia
Pendapatan jasa	23	<u>4,030,593</u>	<u>8,808,724</u>	Rendering of services
		78,603,136	71,877,573	
BEBAN POKOK PENDAPATAN	24	<u>(63,469,789)</u>	<u>(60,755,846)</u>	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		<u>15,133,347</u>	<u>11,121,727</u>	GROSS PROFIT
Beban penjualan	25	(1,280,505)	(1,186,769)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	26	(4,023,124)	(4,024,090)	General and administrative expenses
Pendapatan/(beban) lainnya – bersih	27	<u>150,180</u>	<u>(105,342)</u>	Other income/(expenses) – net
		<u>(5,153,449)</u>	<u>(5,316,201)</u>	
LABA OPERASI		9,979,898	5,805,526	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan		226,343	284,282	Finance income
Biaya keuangan	28	(2,047,494)	(2,975,349)	Finance costs
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama		<u>296,018</u>	<u>236,889</u>	Share of net profit of associates and joint ventures
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		8,454,765	3,351,348	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	9c	<u>(3,320,090)</u>	<u>(1,025,767)</u>	Income tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN		<u>5,134,675</u>	<u>2,325,581</u>	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak		9,078	12,787	Difference in foreign currency arising from translation of the financial statements of subsidiaries
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti	17b	(64,188)	(496,372)	Remeasurement loss on defined benefit plans
Lainnya		32,584	10,496	Others
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait		<u>69,118</u>	<u>(11,275)</u>	Related income tax benefit/(expense)
		<u>37,514</u>	<u>(497,151)</u>	
TOTAL PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>46,592</u>	<u>(484,364)</u>	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR AFTER TAX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>5,181,267</u>	<u>1,841,217</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 2/2 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ <u>Notes</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		5,321,127	2,337,259	Owner of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		<u>(186,452)</u>	<u>(11,678)</u>	Non-controlling interest
		<u>5,134,675</u>	<u>2,325,581</u>	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		5,367,719	1,852,895	Owner of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		<u>(186,452)</u>	<u>(11,678)</u>	Non-controlling interest
		<u>5,181,267</u>	<u>1,841,217</u>	
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK – DASAR DAN DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	19	<u>212,845</u>	<u>93,490</u>	EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNER OF THE PARENT ENTITY – BASIC AND DILUTED (In full Rupiah)

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 3 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEARS ENDED

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo labar/ Retained earnings		Komponen ekuitas lainnya/ Other components of equity					Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling Interest	Jumlah ekuitas/ Total equity		
	Saldo labar/ Retained earnings	Saldo labar/ Retained earnings	Salah satu karena penjabaran laporan keuangan/ Difference in foreign currency due to translation of financial statements	Surplus revaluasi aset revaluation surplus	Pengukuran kembali program imbalan pasti Remeasurement on defined benefit plans	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total				
Saldo pada 1 Januari 2020¹⁾	25.000,000	11.626,634	385,360	140,911	30.868,425	(1.795,775)	41,546	66.255,192	250,464	66.505,656	Balance as at 1 January 2020¹⁾
Pencadangan laba ditahan	20	2.668,254	(2.668,254)	-	-	-	-	(973,500)	(10,556)	(984,056)	Appropriation of retained earnings Cash dividend
Dividen kas	20	-	(973,500)	-	-	-	-	-	-	-	Cash dividend
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	2.337,259	12,787	11,909	(507,647)	(1,413)	1.952,895	(11,678)	1.841,217	Total comprehensive income for the year
Saldo pada 31 Desember 2020		25.000,000	14.294,888	153,698	30.868,425	(2.303,422)	40,133	67.134,587	228,230	67.362,817	Balance as at 31 December 2020
Pencadangan laba ditahan	20	-	1.749,229	(1.749,229)	-	-	-	(688,030)	(16,078)	(704,108)	Appropriation of retained earnings Cash dividend
Dividen kas	20	-	-	(586,030)	-	-	-	-	-	-	Cash dividend
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	5.321,127	9,078	-	4.930	32,584	(186,452)	5.181,267	Total comprehensive income for the year
Saldo pada 31 Desember 2021		25.000,000	16.044,117	2.064,733	162,776	30.868,425	(2.298,492)	72,717	25,700	71.939,976	Balance as at 31 December 2021

¹⁾ Setelah penyesuaian penerapan PSAK 71 dan 72/After adjustment of SFAS 71 and 72 implementation

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 4/1 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020*</u>	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	55,744,116		46,565,013	<i>Receipts from customers</i>
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia	24,463,583	6a	30,969,079	<i>Receipts of fertiliser subsidy from the Government of Indonesia</i>
Penerimaan pendapatan keuangan	228,471		284,282	<i>Receipts from finance income</i>
Penerimaan restitusi pajak	512,368		866,984	<i>Receipts from tax restitutions</i>
Pembayaran kelebihan subsidi kepada Pemerintah Indonesia	(126,633)	6a	-	<i>Payment of excess subsidy from the Government of Indonesia</i>
Pembayaran kepada pemasok	(57,329,334)		(52,920,459)	<i>Payment to suppliers</i>
Pembayaran bunga dan biaya transaksi utang obligasi	(2,019,442)		(3,081,993)	<i>Payment of interest and bonds payable transaction cost</i>
Pembayaran kepada karyawan	(5,718,966)		(5,525,230)	<i>Payments to employees</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	<u>(1,236,870)</u>		<u>(1,081,473)</u>	<i>Payments of corporate income tax</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>14,517,293</u>		<u>16,076,203</u>	<i>Net cash flows generated from operating activities</i>
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	8,397		9,945	<i>Proceeds from dividend of associates</i>
Pembelian aset tetap	(2,999,502)		(2,978,545)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Pembelian properti investasi	-		(13,112)	<i>Purchase of investment properties</i>
Penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(25,160)		(33,861)	<i>Additional ownership on associates and joint ventures</i>
Penerimaan atas penjualan aset tetap	<u>8,564</u>	10	<u>57,690</u>	<i>Proceeds from sale on fixed assets</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(3,007,701)</u>		<u>(2,957,883)</u>	<i>Net cash flows used in investing activities</i>
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	14,684,012	32b	20,165,305	<i>Proceeds from short-term bank loans</i>
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(15,952,372)	14, 32b	(31,592,649)	<i>Repayments of short-term bank loans</i>
Penerimaan pinjaman jangka panjang	2,680,676	32b	23,007,216	<i>Proceeds from non-current borrowings</i>
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(9,801,879)	15, 32b	(21,502,817)	<i>Repayments of non-current borrowings</i>
Pembayaran dividen kepada entitas non-pengendali	(16,078)		(10,556)	<i>Payment of dividends to non-controlling interest</i>
Penerimaan dari penerbitan obligasi	2,750,000	32b	2,432,690	<i>Proceeds from bonds issuance</i>
Pembayaran utang obligasi	-	32b	(4,086,000)	<i>Repayments of bonds payable</i>
Pembayaran liabilitas sewa	(213,532)	32b, 35c	(186,662)	<i>Repayment of lease liabilities</i>
Pembayaran dividen kas	<u>(588,030)</u>	20	<u>(973,500)</u>	<i>Payment of cash dividends</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(6,457,203)</u>		<u>(12,746,973)</u>	<i>Net cash flows used in financing activities</i>

*) Direklasifikasi (lihat ke Catatan 39)

As reclassified (refer to Note 39) *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 4/2 Schedule

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	5,052,389		371,347	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	(4,602)		60,775	<i>Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalent</i>
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>12,405,518</u>	4	<u>11,973,396</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>17,453,305</u>	4	<u>12,405,518</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 32a.

Additional information regarding non-cash activities is presented in Note 32a.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), dahulu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang didirikan dengan akta notaris Eliza Pondaag No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960 dan Tambahan Berita Negara No. 186. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta.

Nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) telah berubah menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan akta notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, No. 3 tanggal 3 April 2012, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 April 2012 dengan Surat Keputusan No. AHU-17695.AH.01.02 tahun 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dimuat dalam akta notaris No. 01 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Daftar Perseroan No. AHU-0175443.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020 sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0071253.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020.

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1. GENERAL

a. The Company's establishment

PT Pupuk Indonesia (Persero) (the "Company"), formerly PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), is a State-Owned Enterprise which was established based on notarial deed No. 177 dated 24 December 1959, of Eliza Pondaag and published in the State Gazette No. 46, dated 7 June 1960 and State Gazette Supplement No. 186. The head office of the Company is located at Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta.

The name of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was changed to PT Pupuk Indonesia (Persero) based on notarial deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, No. 3 dated 3 April 2012, which was approved by the Minister of Law and Human Rights on 5 April 2012 by Decree No. AHU-17695.AH.01.02 year 2012.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by notarial deed No. 01 dated 12 October 2020, made by Lumassia, S.H., notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta which has been received by and recorded in the Legal Entity Administration System Register of Companies No. AHU-0175443.AH.01.11 year 2020 dated 18 October 2020 as stated in the Letter of Minister Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration No. AHU-0071253.AH.01.02 year 2020 dated 18 October 2020.

The Company's share capital is wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar;
- b) Menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding*;
- c) Menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat;
- d) Menjalankan usaha di bidang industri;
- e) Menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi manajemen;
- f) Menjalankan usaha di bidang penelitian dan pengembangan;
- g) Menjalankan usaha di bidang kawasan industri;
- h) Menjalankan usaha di bidang reparasi;
- i) Menjalankan usaha di bidang pergudangan dan penyimpanan;
- j) Menjalankan usaha di bidang ekspedisi;
- k) Menjalankan usaha di bidang konstruksi;
- l) Menjalankan usaha di bidang pengadaan listrik; dan
- m) Menjalankan usaha di bidang pertambangan batu bara, lignit, serta mineral.

b. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") telah disusun dan disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 21 April 2022.

c. Struktur Grup

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, struktur Grup adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. The Company's establishment (continued)

In accordance with the Company's Articles of Association, the Company's goals, objectives and business activities are as follows:

- a) *Engage in wholesale trade sector;*
- b) *Engage in holding company activities;*
- c) *Engage in head office activities;*
- d) *Engage in industry;*
- e) *Engage in management consulting services;*
- f) *Engage in research and development;*
- g) *Engage in industrial estate sector;*
- h) *Engage in repair sector;*
- i) *Engage in warehousing and storage sector;*
- j) *Engage in expedition sector;*
- k) *Engage in construction sector;*
- l) *Engage in electricity supply sector; and*
- m) *Engage in coal, lignite and mineral mining sector.*

b. Completion of the consolidated financial statements

The Company and its subsidiaries' (collectively referred to as the "Group") consolidated financial statements were prepared and authorised for issuance by the Company's Board of Directors on 21 April 2022.

c. Group structure

As at 31 December 2021 and 2020, the structure of the Group is as follows:

Entitas/ <i>Entity</i>	Kedudukan/ <i>Domicile</i>	Kegiatan usaha/ <i>Nature of business</i>	Mulai beroperasi komersial/ <i>Commencement of commercial operation</i>	Persentase kepemilikan efektif/ <i>Effective percentage of ownership</i>		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ <i>Total assets (before elimination)</i>	
				31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/Held directly by the Company							
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	Gresik	Produsen pupuk/ <i>Fertiliser producers</i>	1971	99.99	99.99	43,182,763	41,396,443
PT Pupuk Kujang ("PKC")	Cikampek	Produsen pupuk/ <i>Fertiliser producers</i>	1975	99.99	99.99	9,166,614	8,651,256
PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	Bontang	Produsen pupuk/ <i>Fertiliser producers</i>	1985	99.99	99.99	33,615,304	27,952,628
PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	Aceh	Produsen pupuk/ <i>Fertiliser producers</i>	1982	99.99	99.99	5,650,174	6,634,657

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Struktur Grup (lanjutan)

c. Group structure (continued)

Entitas/ Entity	Kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business	Mulai beroperasi komersial/ Commencement of commercial operation	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before elimination)	
				31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/Held directly by the Company (lanjutan/continued)							
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")	Palembang	Produsen pupuk/ Fertiliser producers	2011	99.99	99.99	23,922,756	24,553,643
PT Rekayasa Industri ("Rekind")	Jakarta	Konstruksi/ Construction	1981	95.03	95.03	7,785,388	9,895,080
PT Mega Eltra ("ME")	Jakarta	Konstruksi dan lain-lain/ Construction and others	1970	100.00	100.00	733,970	458,523
PT Pupuk Indonesia Logistik ("Pilog")	Jakarta	Logistik/ Logistics	2013	100.00	100.00	575,383	559,627
PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU") (dahulu/ formerly PT Pupuk Indonesia Energi ("PIE"))	Jakarta	Pengelolaan usaha industri, pembangunan, perdagangan dan jasa dibidang energi/ Managing industry business, development, trading and services in energy sector	2014	100.00	100.00	1,651,787	1,652,323
PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP")	Jakarta	Perdagangan/ Trading	2015	100.00	100.00	194,175	187,023
Dimiliki melalui PKG/Held through PKG							
PT Petrosida Gresik ("PSG")	Gresik	Produksi, distribusi, dan perdagangan bahan aktif pestisida serta bertindak sebagai distributor pupuk/ Producing, distributing and trading the active ingredients of pesticides and also as a distributor of fertiliser	1983	99.99	99.99	981,407	1,097,917
PT Petrokimia Kayaku ("PKY")	Gresik	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida/Producing, formulating and marketing pesticide	1976	60.00	60.00	886,362	858,629
Dimiliki melalui PKC/Held through PKC							
PT Kawasan Industri Kujang Cikampek ("KIKC")	Cikampek	Pengelolaan kawasan industri/ Managing industrial area	1990	96.19	96.19	68,594	60,445
PT Sintas Kurama Perdana ("SKP")	Cikampek	Perdagangan, jasa dan pergudangan sektor industri kimia/ Trading, services and warehousing related to chemical industry	1988	99.00	99.00	55,466	60,404
Dimiliki melalui PKT/Held through PKT							
PT Kalim Industrial Estate ("KIE")	Bontang	Pengelolaan kawasan industri/Managing industrial area	1991	99.99	99.99	1,069,340	1,042,225

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/4 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Group structure (continued)

Entitas/ Entity	Kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business	Mulai beroperasi komersial/ Commencement of commercial operation	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before elimination)	
				31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020
Dimiliki melalui PKT/Held through PKT (lanjutan/continued)							
PT Kaltim Adhiguna Dermaga ("KAD")	Bontang	Penyedia jasa bongkar muat/Providing loading and unloading services	1990	50.99	50.99	37,521	40,886
PT Kaltim Jasa Sekuriti ("KJS")	Bontang	Jasa pengamanan/ Security service	2002	70.00	70.00	24,173	21,381
Dimiliki melalui PIM/Held through PIM							
PT PIM Prima Medika	Lhokseumawe	Rumah Sakit/ Hospital	2017	96.00	96.00	27,510	28,556
Dimiliki melalui PSP/Held through PSP							
PT Pusri Agro Lestari ("PAL")	Jakarta	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida dan produk agrokimia lainnya/Producing, formulating and marketing pesticide and other agrochemical products	2015	51.00	51.00	51,717	56,311
Dimiliki melalui Rekind/Held through Rekind							
PT Yasa Industri Nusantara ("YIN")	Jakarta	Perancangan dan perencanaan konstruksi, penyediaan dan pengawasan peralatan dan struktur baja/Design and plan for construction, construction equipment and steel structure, supplies and equipment rental	1999	99.67	99.67	143,886	150,072
PT Tracon Industri	Jakarta	Penyedia jasa konsultasi dan perdagangan/ Consulting services and general trading	2001	80.00	80.00	354,821	351,885
PT Tracon Industri Solutindo ("TIS")	Jakarta	Penilaian, Energi Audit, Project Management Consultant ("PMC"), desain rekayasa/ Assessment, Audit Energy, PMC, Engineering Design	2019	98.00	98.00	8,923	2,758
PT Rekayasa Engineering ("RE")	Jakarta	Penyedia jasa teknik dan engineering/ technical and engineering services	2001	80.00	80.00	178,503	167,624
PT Rekayasa Cakrawala Resources	Jakarta	Penyedia jasa rekrutmen, pelatihan, konsultasi dan pendidikan/ Recruitment services, training, consulting and education	2006	51.00	51.00	114,234	93,109
PT Recon Sarana Utama	Jakarta	Penyedia jasa engineering, pengadaan dan konstruksi/ Technical engineering, procurement and construction	2014	80.00	80.00	96,545	83,596
Rekind Malaysia Sdn. Bhd.	Malaysia	Penyedia jasa teknik perancangan dan pengadaan/ Technical engineering and procurement services	2014	100.00	100.00	33,989	68,542

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/5 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Entitas/ Entity	Kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business	Mulai beroperasi komersial/ Commencement of commercial operation	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before elimination)	
				31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020
Dimiliki melalui Rekind/Held through Rekind (lanjutan/continued)							
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangunan pembangkit tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik/ Construction of power plants, sale of electrical power and distribution of electrical power	2013	90.00	90.00	1,710,921	1,737,948
PT Puspertino	Gresik	Industri logam dan permesinan umum/ Metal industry and general machinery	1991	91.38	91.38	131,284	154,555
Dimiliki melalui ME/Held through ME							
PT Sigma Utama ("SU")	Cibinong	Manufaktur cat/ Paint manufacturing	1982	99.91	99.91	102,079	99,196
Dimiliki melalui PIU/Held through PIU							
PT Kaltim Daya Mandiri ("KDM")	Bontang	Produsen listrik dan utilitas/Electricity and utilities producers	2002	95.00	80.75	511,286	494,359

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Group structure (continued)

d. Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee

The composition of the Company's Board of Commissioners as at 31 December 2021 and 2020 is as follows:

31 Desember/December 2021 dan/and 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Darmin Nasution
Mustoha Iskandar
Anhar Adel
Febrio Nathan Kacaribu
Anwar Sanusi
Ari Dwipayana
Bambang Widiyanto
Suwandi

Board of Commissioners

President Commissioner and
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/6 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit (lanjutan)

Susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2021

Direksi

Direktur Utama	Achmad Bakir Pasaman
Wakil Direktur Utama	Nugroho Christijanto
Direktur Produksi	Bob Indiarito
Direktur Keuangan dan Investasi	Wono Budi Tjahyono
Direktur Transformasi Bisnis	Panji Winanteya Ruky
Direktur Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	Tina T. Kemala Intan Gusrizal
Direktur Pemasaran	
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha	Jamsaton Nababan

31 Desember/December 2020

Direksi

Direktur Utama	Achmad Bakir Pasaman
Wakil Direktur Utama	Nugroho Christijanto
Direktur Produksi	Bob Indiarito
Direktur Keuangan dan Investasi	Eko Taufik Wibowo
Direktur Transformasi Bisnis	Panji Winanteya Ruky
Direktur Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	Winardi
Direktur Pemasaran	Gusrizal

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2021

Komite Audit

Ketua	Darmin Nasution
Wakil Ketua	Mustoha Iskandar
Anggota	R.M. Wiratmoko
Anggota	Christine Tjen

31 Desember/December 2020

Komite Audit

Ketua	Darmin Nasution
Wakil Ketua I	Bambang Widiyanto
Wakil Ketua II	Febrio Nathan Kacaribu
Anggota	M. Sapto Setiawan
Anggota	Christine Tjen

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah karyawan tetap Grup masing-masing adalah 7.853 orang dan 8.336 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

d. Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee (continued)

The composition of the Company's Board of Directors as at 31 December 2021 and 2020 is as follows:

Board of Directors

President Director
Vice President Director
Production Director
Finance and Investment Director
Business Transformation Director
Governance and Human Resource Director
Marketing Director
Portfolio and Business Development Director

Board of Directors

President Director
Vice President Director
Production Director
Finance and Investment Director
Business Transformation Director
Governance and Human Resource Director
Marketing Director

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2021 and 2020 are as follows:

Audit Committee

Chairman
Vice Chairman
Members
Members

Audit Committee

Chairman
Vice Chairman I
Vice Chairman II
Members
Members

As at 31 December 2021 and 2020, the Group had a total of 7,853 employees and 8,336 employees (unaudited), respectively.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/7 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Peraturan No. VIII. G.7 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah (aset tetap), dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan dinyatakan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan di Catatan 3.

Kecuali dinyatakan pada di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") and the Regulations and Guidelines No. VIII.G.7 concerning Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority ("OJK").

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, as modified by revaluation of land (fixed assets), and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and other comprehensive income, and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 3.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020, which conform to Indonesian Financial Accounting Standards.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/8 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Penerapan dari standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 yang tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi entitas dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis – Definisi Bisnis
- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60: Instrumen Keuangan – Pengungkapan dan PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga (Bagian 2)
- Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Jasa Konsesi Sewa terkait *Corona Virus Disease 2019* ("COVID-19").

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amandemen PSAK 22: Bisnis Kombinasi tentang referensi ke kerangka konseptual
- Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya memenuhi Kontrak
- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Penyesuaian tahunan PSAK 69: Agrikultur
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: Instrumen Keuangan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: Sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to the SFAS and IFAS

The adoption of the following standards, interpretations, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2021 did not result in substantial changes to the entity's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior years:

- Amendment to SFAS 22: Business Combination – Definition of Business
- Amendments to SFAS 71: Financial Instruments, SFAS 55: Financial Instruments – Recognition and Measurement, SFAS 60: Financial Instruments – Disclosures and SFAS 73: Leases regarding Interbank Offered Rate ("IBOR") Reform (Batch 2)
- Amendment to SFAS 73: Leases regarding *Corona Virus Disease 2019* ("COVID-19") related Rent Concession.

Certain new standards, amendments and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended 31 December 2021 and have not been early adopted by the Group are as set out below:

- Amendment of SFAS 1: Presentation of Financial Statements
- Amendment of SFAS 16: Fixed Assets regarding proceeds before intended use
- Amendment of SFAS 22: Business Combination regarding reference to the conceptual framework
- Amendment of SFAS 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts – Cost of Fulfilling Contracts
- SFAS 74: Insurance Contracts
- Annual improvements on SFAS 69: Agriculture
- Annual improvements on SFAS 71: Financial Instruments
- Annual improvements on PSAK 73: Leases.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/9 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK 1 dan PSAK 16 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amandemen terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

(i) Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)

Changes to the SFAS and IFAS (continued)

Amendments and annual improvements to the above accounting standards are effective from 1 January 2022, except for Amendment to SFAS 1 and SFAS 16 which are effective from 1 January 2023 and SFAS 74 which is effective from 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

b. Principles of consolidation

(i) Subsidiaries

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiary. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/10 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 71, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(i) Subsidiaries (continued)

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination achieved in stages, at the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that are deemed to be an asset or liability are recognised in accordance with SFAS 71, in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi atas kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset bersih yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor. Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal tahun komparatif penyajian pelaporan keuangan.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(i) Subsidiaries (continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previously held interest in the acquiree over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

A business combination transaction between entities under common control is accounted for in accordance with SFAS 38 (Revised 2012): Business Combination of Entities Under Common Control. The difference between transfer price paid and carrying value of net assets acquired is presented as additional paid-in capital. The financial statement items of the combined entities are consolidated to the Group's consolidated financial statements as if the combination had occurred from the beginning of the comparative financial reporting year presented.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/12 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama" di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(ii) Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of profit or loss. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss, and its share of post acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the difference to "share of net profit of associates and joint ventures" in profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/13 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi (lanjutan)

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

(iii) Pengaturan bersama

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Pada tanggal pelaporan, Grup memiliki operasi bersama dan ventura bersama.

Operasi bersama

Operasi bersama adalah salah satu jenis pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama dalam sebuah pengaturan memiliki hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut.

Grup memiliki kepemilikan dalam operasi bersama dimana Grup termasuk salah satu pihak yang memiliki pengendalian bersama (operator bersama), atau pihak yang berpartisipasi tidak memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut.

Sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama bagian kepemilikan dalam operasi bersama, Grup mengakui:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

Ketika Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama, dimana Grup merupakan salah satu operator bersama, maka Grup mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(ii) Associates (continued)

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's financial statements only for the portion of other investors' interest in the associates.

Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognised in profit or loss.

(iii) Joint arrangements

Under SFAS 66, investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. At the reporting date, the Group has joint operations and joint ventures.

Joint operations

A joint operation is a type of joint arrangement whereby the parties own joint control of the arrangement that have rights to the assets and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.

The Group has interests in several joint operations whereby the Group is included as a party which has joint control of a joint operation (joint operator), or as a party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation.

In relation to its interests in joint operations, the Group recognises its:

- Assets, including its share of any assets held jointly;
- Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
- Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation; and
- Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

When the Group enters into a transaction with a joint operation in which it is a joint operator, the Group shall recognise gains and losses resulting from such transaction only for the portion of the other parties' interests in the joint operation.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/14 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(iii) Pengaturan bersama (lanjutan)

Ventura bersama

Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

c. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rp yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(iii) Joint arrangements (continued)

Joint ventures

Joint ventures are accounted for using the equity method. Under the equity method, interests in joint ventures are initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses and movements in other comprehensive income. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint venture (which includes any long-term interest that, in substance, forms part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated for the portion of the Group's interest in the joint ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

c. Foreign currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rp, which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Group.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

(i) Mata uang fungsional dan penyajian (lanjutan)

Untuk tujuan konsolidasi, untuk entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional berbeda, maka aset dan liabilitas entitas anak Grup ditranslasikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Sementara itu, pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata dari kurs tengah Bank Indonesia selama periode laporan laba rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak Grup tersebut ke dalam Rp disajikan dalam akun "Komponen ekuitas lainnya" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rp disesuaikan untuk mencerminkan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui di dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Euro ("EUR")	16,127	17,330
Dolar Amerika Serikat ("USD")	14,269	14,105

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Foreign currency translation (continued)

(i) Functional and presentation currency (continued)

For consolidation purposes, for the Group subsidiaries that have different functional currency, the Group's subsidiaries' assets and liabilities are translated using the Bank of Indonesia middle rate at the end of each reporting period. Revenue and expenses are translated using the average of the Bank of Indonesia middle rate during profit or loss period.

The difference arising from the translation of the Group subsidiaries' financial statements into Rp is presented as "Other components of equity" account in the equity section of the consolidated statement of financial position.

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transactions.

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the reporting dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full amount):

Euro ("EUR")
United States Dollar ("USD")

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/16 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan pada akun "kas yang dibatasi penggunaannya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Piutang

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang lainnya merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi cadangan atas penurunan nilai.

Piutang lainnya dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

Sesuai peraturan OJK, piutang lainnya dari pihak berelasi disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada kondisi tertentu pada piutang lainnya dari pihak berelasi untuk disajikan sebagai aset lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Cash in banks and time deposits that are restricted are presented as "restricted cash" in the consolidated statement of financial position.

e. Receivables

(i) Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are receivables arising from transactions outside of the ordinary course of business. If collection of the trade receivables is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any reserve for impairment.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Group.

In accordance with OJK regulation, other receivables from related parties are classified as non-current assets unless there are specific circumstances leading these other receivables from related parties to be presented as current assets.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/17 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Piutang (lanjutan)

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya (lanjutan)

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lainnya ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan piutang digunakan untuk mencatat dampak kerugian kredit ekspektasian, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban umum dan administrasi" pada laba rugi. Ketika piutang usaha dan piutang lainnya, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, diakui sebagai "Pendapatan lainnya" pada laba rugi.

(ii) Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia

Piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk urea, NPK, NPK kakao, SP36, ZA dan pupuk organik yang bersubsidi.

Jumlah tersebut menjadi subjek audit tahunan dan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Receivables (continued)

(i) Trade and other receivables (continued)

Collectibility of trade and other receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used to record impact from expected credit losses, using exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is charged to profit or loss as "General and administrative expenses" in profit or loss. When a trade and other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written-off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are recognised as "Other income" in profit or loss.

(ii) Subsidy receivables from the Government of Indonesia

Subsidy receivables represent the subsidy receivables balance from the Government of Indonesia for the distribution of subsidised urea, NPK, NPK cocoa, SP36, ZA and organic fertiliser.

The amount is subject to annual audit and approval by the Supreme Audit Agency ("BPK").

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/18 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Piutang (lanjutan)

(iii) Piutang retensi

Piutang retensi adalah jumlah termin yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga ketidaksesuaian telah diperbaiki.

(iv) Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – kepada pelanggan

Jumlah pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – kepada pelanggan adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dan dikurangi jumlah kerugian dan termin yang diakui, untuk semua pekerjaan dalam proses dimana biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) melebihi termin.

f. Persediaan

Persediaan dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersihnya. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* langsung maupun tidak langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban penjualan.

Penurunan nilai atas persediaan dan suku cadang yang usang dan perputarannya lambat, jika ada, ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap umur persediaan dan kondisi persediaan akhir periode laporan. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

g. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. *Receivables* (continued)

(iii) *Retention receivables*

Retention receivables are amounts of progress billings that are not paid until the conditions specified in the contract for the payment of such amount have been satisfied or until defects have been rectified.

(iv) *Construction contract work in progress – due from customers*

Construction contract work in progress – due from customers is the net amount of costs incurred plus recognised profits and less the sum of recognised losses and progress billings, for all contracts in progress for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceeds progress billings.

f. *Inventories*

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted-average method. The cost of finished goods and work in process comprises materials, labour and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business less applicable selling expense.

Impairment for obsolete and slow moving inventories and spare parts, if any, is determined based on a review of the inventories aging and physical condition of the inventories at the end of reporting period. Any reversal of decline in value of inventories due to an increase in net realisable value is recognised as a reduction in the amount of cost of inventories in the period in which the recovery occurs.

g. *Prepayments*

Prepayments are amortised on a straight-line basis over the estimated beneficial periods of the prepayments.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/19 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Properti investasi

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, dan prasarana yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh entitas di dalam Grup konsolidasian. Properti investasi juga termasuk properti yang sedang dikonstruksi atau pembangunan untuk penggunaan di masa yang akan datang sebagai properti investasi.

Properti investasi dalam bentuk tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Properti investasi lainnya diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis properti investasi yaitu 5 sampai dengan 40 tahun.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi. Properti investasi yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok properti investasi berikut akumulasi penyusutan dan penurunan nilainya, jika ada. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti investasi tersebut dibukukan dalam laba rugi pada tahun penjualan terjadi.

Manajemen melakukan penilaian atas properti investasi secara berkala untuk memastikan ada tidaknya penurunan nilai permanen yang material.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Investment properties

Investment properties represent land, buildings and infrastructure that are held for long-term rental yields or for capital appreciation or both and that are not occupied by the companies in the consolidated Group. Investment properties also includes properties that is being constructed or developed for future use as investment properties.

Investment properties in the form of land are presented at acquisition cost and not depreciated.

Other investment properties are recognised at cost and depreciated over the estimated economic life. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the investment properties which is 5 to 40 years.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Expenditures which extends the useful lives of the property or results in increasing future economic benefits such as an increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance, is capitalised. When the property is unused or otherwise disposed of, the carrying value and accumulated impairment losses, if any, are removed from the investment property account. Gains or losses from the sale of investment properties are recorded in profit or loss in the year of sale.

Management performs valuation of investment properties regularly to check whether or not there is a material permanent impairment.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/20 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi dalam periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Tanah dinyatakan berdasarkan model revaluasi dan tidak disusutkan. Aset tetap yang tidak digunakan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat atau jumlah terpulihkan.

Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala (3 tahun sekali) untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai "Surplus revaluasi aset" di ekuitas. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya dicatat atas aset yang sama dibebankan di penghasilan komprehensif lainnya dan didebitkan terhadap "Surplus revaluasi aset" di ekuitas; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Keuntungan atau kerugian bersih dari pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil bersih pelepasan dengan nilai tercatat dan diakui dalam "Pendapatan/(beban) lainnya – bersih" di laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its acquisition cost and any cost directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance costs are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Land is stated at revaluation model and not depreciated. Unused fixed assets are stated at the lower of carrying value or recoverable amount.

Valuation of land is performed by external independent appraisers who are registered at OJK. Valuations are performed regularly (once every 3 years) to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to other comprehensive income and shown as "Assets revaluation surplus" in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited against "Asset revaluation surplus" in equity; all other decreases are charged to profit or loss.

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "Other income/(expense) – net" in profit or loss.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana permanen	20
Bangunan dan prasarana tidak permanen	10
Pabrik dan peralatan	8 - 20
Mesin bengkel kerja	8
Kendaraan dan alat berat	4 - 8
Perlengkapan kantor dan rumah	4
Kapal	10 - 35
Aset penyangga	8 - 20

Hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73: Sewa. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16: Aset tetap.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed assets (continued)

Depreciation on other fixed assets is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

	<u>Tahun/Years</u>
Permanent buildings and infrastructure	20
Non-permanent buildings and infrastructure	10
Plants and equipment	8 - 20
Workshop machinery	8
Vehicles and heavy equipment	4 - 8
Office and household equipment	4
Ships	10 - 35
Supporting assets	8 - 20

Land rights are recognised at cost.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 73: Leases. If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16: Fixed assets.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

The accumulated costs of the construction of buildings, plants and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/22 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, kecuali *goodwill*, ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Goodwill sebagai bagian dari investasi di asosiasi diuji penurunan nilainya bersamaan dengan investasi di asosiasi sebagai satu unit penghasil kas.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

k. Instrumen keuangan

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam dua kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- (ii) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual ketika menentukan apakah arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of non-financial assets

Fixed assets and other non-current assets, excluding goodwill, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Goodwill as part of investment in associates is assessed for impairment together with investment in associate as one cash generating unit.

Reversal on impairment losses of assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal in impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses related to goodwill would not be reversed.

k. Financial instruments

Classifications, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following two categories:

- (i) Financial assets at amortised cost; and
- (ii) Financial assets at FVTPL or fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/23 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran
(lanjutan)

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang bukan termasuk dimiliki untuk diperdagangkan, tergantung apakah Grup telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang:

- (i) Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. *Financial instruments* (continued)

Classifications, recognition and measurement (continued)

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at FVOCI.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

As at 31 December 2021 and 2020, the Group had financial assets which were categorised as at amortised cost and fair value through other comprehensive income.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

- (i) *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses). Impairment losses of financial assets are presented as separate line item in the statement of profit or loss.*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran
(lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lainnya. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lainnya, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.
- (iii) Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode keterjadiannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Financial instruments (continued)

Classifications, recognition and
measurement (continued)

Debt instruments (continued)

- (ii) FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.
- (iii) FVTPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at FVTPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVTPL and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it occurs.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/25 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran
(lanjutan)

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kerugian penurunan nilai (dan pembalikan kerugian penurunan nilai) pada investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. *Financial instruments* (continued)

Classifications, recognition and measurement (continued)

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from changes in fair value.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/26 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Penurunan nilai dari aset keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan metode sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya, dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian terhadap instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

m. Aset takberwujud

Piranti lunak komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Impairment of financial assets

The Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit losses for cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and contract assets without a significant financing component.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

m. Intangible assets

Computer software

Costs associated with the maintenance of computer software program are recognised as an expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/27 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset takberwujud (lanjutan)

Piranti lunak komputer (lanjutan)

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari tiga tahun.

n. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- (i) Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- (ii) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Intangible assets (continued)

Computer software (continued)

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that does not meet these criteria is recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed three years.

n. Leases

Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- (i) The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- (ii) The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:
 - The Group has the right to operate the asset; or
 - The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- (i) pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- (ii) pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- (iii) harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- (iv) penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Leases (continued)

Group as a lessee (continued)

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- (i) fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- (ii) variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- (iii) the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- (iv) penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/29 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Leases (continued)

Group as a lessee (continued)

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the outstanding lease liabilities. The corresponding lease liabilities, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" and lease liabilities in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Short-term leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Low-value assets leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Utang usaha dan utang lainnya

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang lainnya terdiri dari uang muka kontrak pelanggan, utang iuran, dan utang retensi. Utang usaha dan utang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Provisi

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan. Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus kas keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan.

q. Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak

Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi jumlah yang diakui dan termin, untuk semua kontrak dimana termin melebihi biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui).

r. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables consist of contractual cash advances, contribution payables and retention payables. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

p. Provision

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (either legal or constructive) as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and the obligation can be reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses. Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole.

q. Amounts due to customers for contract work

Amounts due to customers for contract work is the net amount of costs incurred plus recognised profits, less the sum of recognised losses and progress billings, for all contracts in progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses).

r. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pinjaman (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

s. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Borrowings (continued)

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

s. Borrowing cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Biaya emisi penerbitan utang obligasi

Utang obligasi pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

u. Imbalan kerja

(i) Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan manfaat pasti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan imbalan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung beberapa faktor, misalnya usia, masa kerja dan kompensasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

t. Bonds payable issuance costs

Bonds payable are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognised on an effective interest rate method.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognised over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

u. Employee benefits

(i) Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they accrued to the employees.

(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits

The Group provides defined benefits in accordance with the Collective Labour Agreement ("CLA"), which are higher than those required under prevailing regulations related to manpower. Since manpower regulations and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the manpower regulations or the CLA represent defined benefit plans.

Defined benefit pension plan program defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually depending on factors such as age, years of service and compensation.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/33 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang Rp sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya seperti uang penghargaan, santunan kematian, penghargaan pengabdian, dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan atau PKB. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Employee benefits (continued)

(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits (continued)

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in Rp, the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

The Group also provides other post-employment benefits and other long-term benefits such as long service reward, death allowance, jubilee rewards, and separation reward. The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualified family members pass away. The value of benefits provided to the employee is based on the Company Regulation or the CLA. The separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya, kecuali imbalan jangka panjang lainnya dimana keuntungan dan kerugian aktuarial diakui langsung sebagai beban pada laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

(iii) Imbalan kesehatan pascakerja

Grup menyediakan imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum tertentu. Perkiraan biaya imbalan ini dicatat sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- (i) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- (ii) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- (iii) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Employee benefits (continued)

(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits (continued)

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise, except for other long-term benefits where actuarial gains and losses are directly recognised as expenses in profit or loss.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

(iii) Post-retirement healthcare benefits

The Group provides post-retirement healthcare benefits to its retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using the *projected unit credit* method.

v. Revenue and expense recognition

Revenue recognition has to fulfil five steps of assessment as follows:

- (i) Identify contract(s) with a customer;
- (ii) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
- (iii) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer which will be paid during the contract period;

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

- (iv) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
- (v) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

- (i) Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- (ii) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

Grup mengakui aset kontrak dan liabilitas kontrak sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Aset kontrak terdiri dari pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan serta piutang retensi dan pendapatan yang belum ditagihkan yang disajikan sebagai bagian dari aset lancar lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian. Liabilitas kontrak terdiri dari utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi dan pendapatan diterima di muka yang disajikan sebagai bagian dari utang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Subsidi pupuk Pemerintah diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Revenue and expense recognition (continued)

- (iv) Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin;
- (v) Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

A performance obligation may be satisfied:

- (i) At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- (ii) Over the time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over the time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

The Group has recognised contract assets and contract liabilities related to revenue from contract with customers. Contract assets consist of construction contract work in progress – due from customers and retention receivables and unbilled revenues which are presented as part of other current assets in the consolidated statements of financial position. Contract liabilities consist of amounts due to customers for construction contract work and unearned revenue which is presented as part of other payables in the consolidated statements of financial position.

The Government's fertiliser subsidy is recognised as revenue on an accrual basis which is calculated in accordance with the requirements stipulated in the Decree of Minister of Finance, Minister of Agriculture and Minister of Trade of the Republic of Indonesia.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pajak penghasilan kini dan tanggungan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tanggungan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus ini, masing-masing beban pajak juga diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan di negara dimana Grup beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan terkait dengan situasi dimana diperlukan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Grup dikenakan pajak final atas pendapatan dari *real estate* dan jasa konstruksi. Pajak final dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tanggungan.

Pajak penghasilan tanggungan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tanggungan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tanggungan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tanggungan direalisasikan atau liabilitas pajak tanggungan diselesaikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Current and deferred income tax

The tax expense for the year comprises current and deferred tax. The tax expense is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns ("SPT") in situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. Where appropriate, it establishes a provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

The Group is subject to final income tax on revenue from real estate and construction services. The final income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date.

Final income tax is presented outside income tax expenses in profit or loss.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities related to the final income tax, and their respective final tax bases is not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (or laws) that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan dimana waktu pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan" dalam laba rugi. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan".

x. Aset keuangan dari perjanjian konsesi jasa

Piutang dari proyek konsesi merupakan jasa yang berhubungan dengan perjanjian konsesi jasa dimana pembayaran minimum yang dijamin telah disetujui tanpa dipengaruhi tingkat penggunaan listrik. Karena jangka waktu pembayaran yang panjang, piutang diukur sebesar nilai kini dari penerimaan kas yang dijamin di masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Akumulasi tahunan dari bunga atas piutang ini disajikan sebagai pendapatan keuangan dari perjanjian konsesi jasa menggunakan metode suku bunga efektif. Pembayaran akan dibagi menjadi porsi pengurang piutang dan bunga dari jumlah pokok yang belum dibayarkan dan porsi atas bagian konsesi jasa lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Current and deferred income tax (continued)

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax liabilities are provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries and associates, except for deferred income tax liabilities where the timing of the reversal of temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there are legally-enforceable rights to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entities and where there is an intention to settle the balances on a net basis.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Income tax expense" in profit or loss. The Group also presents interest/penalties, if any, as part of "Income tax expense".

x. Financial assets from service concession arrangement

Receivables due from service concession project represents service provided in connection with a service concession arrangement for which guaranteed minimum payments have been agreed irrespective of the extent of use of the electricity. Due to the length of the payment period, receivables are measured using the present value of future guaranteed cash receipts discounted using certain interest rate. The annual accumulation of interest on these receivables is presented as finance income from service concession arrangement using the effective interest method. Payments will be divided into a portion to be deducted from the receivables and interest on the unpaid amounts and a portion for the other service concessions.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

z. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor.

aa. Laba bersih per saham dasar dan dilusian

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam periode yang bersangkutan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Perusahaan.

ab. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen dideklarasikan dan telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.

ac. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan OJK No. VIII.G.7.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Segment reporting

Operating segments are reported in a consistent manner with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing the performance of the operating segments and making strategic decisions is the Board of Directors.

z. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuing of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax from the proceeds. Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital account.

aa. Basic and diluted earnings per share

The amount of basic earnings per share is computed by dividing earnings for the period attributable to owners of the parent by the weighted-average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company.

ab. Dividend distributions

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

ac. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS 7: Related Party Disclosures and OJK Regulation No. VIII.G.7.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ac. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan pihak berelasi dari Grup. Entitas berelasi dengan Pemerintah mencakup entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan dalam Catatan 29.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ac. Transactions with related parties (continued)

Based on OJK Regulation No. VIII.G.7, Government-related entities are considered related parties of the Group. Government-related entities include entities which are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.

The details of significant balances and transactions entered into with related parties are presented in Note 29.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

a. Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana setiap entitas di dalam Grup beroperasi. Manajemen Grup mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari barang dan jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions, and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

a. Determination of functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which each of the entities in the Group operates. The Group's Management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of goods sold and services rendered and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/40 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian
piutang usaha dan piutang lainnya

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan piutang lainnya. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

c. Ketidakpastian eksposur perpajakan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan besaran fasilitas pengurang pajak dan investasi (*capital allowance*) dan pengurangan beban tertentu untuk tujuan fiskal selama proses estimasi atas perhitungan beban pajak penghasilan masing-masing perusahaan dalam Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Provision for expected credit losses of
trade receivables and other receivables

The Group calculates expected credit losses for trade receivables and other receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

c. Uncertain tax exposures

Judgements and assumptions are required to determine the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for each company within the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

All judgements and estimates taken by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, can take several years to complete and in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which this determination is made.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Pajak penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, besaran *capital allowance* dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset nonkeuangan" asumsi atas laba kena pajak masa depan yang dapat dihasilkan sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas dan lain-lain; yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan keadaan akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

e. Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun bersih mencakup tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa datang dan kenaikan biaya kesehatan. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 17.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

d. Income taxes

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered probable that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Similar to "impairment of non-financial assets", assumptions about the generation of future taxable profits is heavily affected by management's estimates and assumptions regarding expected production levels, sales volumes, commodity prices, etc; which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

e. Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase and future medical costs. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of post-employment benefits liabilities.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

Other key assumptions for post-employment benefits liabilities are based on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 17.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/42 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Estimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi

Grup mengestimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi berdasarkan ekspektasi utilisasi aset yang sesuai dengan rencana dan strategi usaha setelah mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Di samping itu, estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi juga mempertimbangkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan keterbatasan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan dari aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis properti investasi dan aset tetap 4 sampai dengan 20 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa properti investasi dan aset tetap.

Nilai tercatat atas aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 10.

g. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan konstruksi mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang dilaporkan. Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

f. Estimating the useful lives of fixed assets and investment properties

The Group estimates the useful lives of its fixed assets and investment properties based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviour. In addition, the Group's collective assessment of industry practice, an internal technical evaluation and experience with similar assets are also considered when estimating the useful lives of fixed assets and investment properties. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

The costs of fixed assets and investment properties are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management estimates the useful life of these investment properties and fixed assets to be within 4 to 20 years. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful life and the residual values of these investment properties and fixed assets.

The net carrying amounts of the Group's fixed assets at reporting dates are disclosed in Note 10.

g. Revenue and expense recognition of construction contract

The revenue recognition policy for construction contract requires the use of estimates which may impact the reported amount of revenue. Revenue related to construction contracts is recognised based on the completion stage of contract activities at the end of reporting period (percentage of completion method).

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/43 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak
konstruksi (lanjutan)

Untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak konstruksi, Grup mengestimasi kemajuan proyek berdasarkan pengukuran langsung atas nilai barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan sampai akhir periode pelaporan secara relatif terhadap sisa barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak. Dalam menentukan estimasi kemajuan proyek, diperlukan juga pertimbangan manajemen karena tidak terdapat cara pengukuran yang baku untuk menentukan kemajuan proyek. Estimasi dan pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi tingkat presisi nilai persentase penyelesaian. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa estimasi dan pertimbangan yang dibuat adalah wajar dan tepat, perbedaan persentase dapat mempengaruhi besaran pendapatan konstruksi yang dicatat pada suatu periode.

Grup mengestimasi jumlah imbalan yang bersifat variabel atas penyerahan jasa konstruksi yang dijanjikan ke pelanggan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak. Apabila terdapat kemungkinan Grup kehilangan hak atas sebagian imbalan yang akan dibayarkan atau berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan karena satu dan lain hal, maka nilainya akan dibukukan sebagai provisi pada saat kondisi yang dapat menimbulkan hal tersebut teridentifikasi dan nilainya diestimasi berdasarkan informasi yang tersedia sampai dengan tanggal pelaporan.

Grup juga secara berkelanjutan mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak konstruksi. Dalam mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak, Grup perlu menggunakan pertimbangan dan pengetahuan Grup atas situasi terkini dari proyek karena tidak terdapat cara pengukuran yang baku untuk menentukan jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak. Estimasi dan pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi tingkat presisi hasil perhitungan kontrak yang merugikan.

h. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi pupuk melalui Grup berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ("Permendag") No. 15/M-DAG/PER/4/2013. Subsidi pupuk diberikan untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk jenis urea, SP 36, ZA, NPK dan pupuk organik yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

g. Revenue and expense recognition of
construction contract (continued)

To determine the completion stage of a construction contract, the Group estimates the progress of the project on the basis of direct measurements of the value of goods or services transferred to a customer as of the period end, relative to the remaining goods or services promised under the contract. In estimating the progress of project, management needs to include their judgements as there is no standardised measurement to calculate the progress of a project. These estimates and judgements may affect the level of precision of percentage of completion. While management believes that their estimates and judgements are reasonable and appropriate, differences in percentage of the actual completion stage may affect the amount of construction revenue recorded for a period.

The Group estimates the variable consideration amount from fulfilling promised construction services to the customer in line with the terms and conditions in the contract. If there is a possibility that the Group loss its entitlement of a portion of consideration that will be paid or liable to pay a compensation to the customer for one reason or another, the amount will be booked as a provision when the condition that indicates it arise and the amount is estimated based on the latest available information up to the reporting date.

The Group also continuously estimates the cost to complete a construction contract. In estimating the cost to complete a contract, the Group needs to include their judgements and knowledge of the latest project situation as there is no standardised measurement to calculate the cost to complete a contract. These estimates and judgements may affect the level of precision of the onerous contract calculation result.

h. Revenue and receivable recognition of
subsidy

The Government of Indonesia provides a fertiliser subsidy through the Group based on Ministry of Trading ("Permendag") Regulation No. 15/M-DAG/PER/4/2013. Fertiliser subsidies are given for the needs of farmers group and/or farmers in the agricultural sector including fertiliser type urea, SP 36, ZA, NPK and organic fertilisers stipulated by the Ministry of Agriculture.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/44 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi
(lanjutan)

Tata cara perhitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi.

Pendapatan subsidi dibukukan berdasarkan biaya pupuk subsidi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK-RI") yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan estimasi kuantitas penyaluran pupuk yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut yang didasarkan pada kuantitas tersalur bulanan yang telah diverifikasi Kementerian Pertanian. Secara historis, aktual kuantitas penyaluran pupuk yang disetujui dan estimasi dari kuantitas penyaluran tidak berbeda signifikan.

Klasifikasi piutang subsidi antara porsi lancar dan tidak lancar ditentukan berdasarkan estimasi dan pertimbangan manajemen selama setahun ke depan berdasarkan ketersediaan sisa budget Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") tahun berikutnya yang dapat digunakan untuk penagihan piutang subsidi per tanggal neraca yang didukung oleh tren pembayaran historis oleh Pemerintah Indonesia.

i. Sewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 73: Sewa, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

h. Revenue and receivable recognition of
subsidy (continued)

The procedure for the calculation, settlement and accountability of subsidised fertiliser is stipulated by Ministry of Finance Regulation ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Fertiliser subsidy amount is calculated based on the difference between cost of goods sold and the highest retail price.

Revenue from the Government subsidy is recorded based on subsidised fertiliser costs audited by Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK-RI") as stated on Minutes of Audit Result and estimates of distributed quantity as stated in Minutes of Audit Result which is based on monthly distributed quantity that has been verified by Ministry of Agriculture. Historically, the actual approved distributed quantity and estimates of distributed quantity are not significantly different.

The classification of current and non-current portion of subsidy receivables is determined based on management's estimation and judgement using the availability of the remaining budget of Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") for the following year that available for collection of subsidy receivables as of balance sheet date which were supported by historical payment trends from the Government of Indonesia.

i. Leases

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of leased asset based on SFAS 73: Lease, which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/45 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, tidak ada revisi persyaratan sewa untuk mencerminkan efek dari melaksanakan opsi perpanjangan dan opsi penghentian.

j. Cadangan penurunan nilai persediaan

Grup melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

k. Nilai wajar aset tetap yang menggunakan model revaluasi

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Penentuan nilai wajar dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

i. Leases (continued)

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group. For the year ended 31 December 2021, there was no revision of lease terms to reflect the effect of exercising extension and termination options.

j. Provision for impairment of inventories

The Group provides provision of impairment of inventories based on estimated future usage and the condition of the inventories. Uncertainty associated with these factors may result in the realisable amount being different from the reported carrying amount of the inventories.

k. Fair value of fixed assets that use revaluation model

Land is stated at fair value. The determination of the fair value was performed by an independent public appraiser.

Management, with the assistance of an independent public appraiser, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the appraisers as part of the valuation process. The approaches and methods that are used in the revaluation depend upon the group of assets. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs, or significant changes in assumptions, may materially affect the value of the assets that use the revaluation model.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/46 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kas			Cash on hand
Rp	6,000	6,738	Rp
USD	1,055	1,566	USD
Lainnya	<u>42</u>	<u>41</u>	Others
Jumlah kas	<u>7,097</u>	<u>8,345</u>	Total cash on hand
Bank			Cash in banks
Rp			Rp
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	1,622,558	2,326,667	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	1,273,565	1,876,331	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	1,139,915	1,417,120	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	31,874	14,076	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	7,917	3,407	Others (each below Rp10,000)
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")	272,766	66,867	PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")
PT Bank DKI ("Bank DKI")	82,072	95,370	PT Bank DKI ("Bank DKI")
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	80,943	118,983	PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
United Overseas Bank Limited ("UOB")	4,463	26,110	United Overseas Bank Limited ("UOB")
PT Bank Bukopin Tbk ("Bukopin")	2,363	75,937	PT Bank Bukopin Tbk ("Bukopin")
PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")	535	14,874	PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	<u>27,758</u>	<u>28,348</u>	Others (each below Rp10,000)
Jumlah rekening Rupiah	<u>4,546,729</u>	<u>6,064,090</u>	Total Rp accounts
USD			USD
Pihak berelasi			Related parties
Bank Mandiri	1,742,981	382,021	Bank Mandiri
BRI	453,155	66,091	BRI
BNI	35,951	48,646	BNI
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	13	1,665	Others (each below Rp10,000)
Pihak ketiga			Third parties
Bank BJB	15,550	-	Bank BJB
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	8,701	18,569	PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	<u>14,147</u>	<u>26,896</u>	Others (each below Rp10,000)
Jumlah rekening USD	<u>2,270,498</u>	<u>543,888</u>	Total USD accounts

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/47 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)	2021	2020	
Mata uang asing lainnya			Other currency accounts
Pihak berelasi			Related parties
Bank Mandiri	86	84	Bank Mandiri
BNI	-	296	BNI
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Maybank			PT Bank Maybank
Indonesia Tbk ("Maybank")	10,220	5,335	Indonesia Tbk ("Maybank")
HSBC	383	516	HSBC
Jumlah rekening dalam mata uang asing lainnya	<u>10,689</u>	<u>6,231</u>	Total other currency accounts
Jumlah kas di bank	<u>6,827,916</u>	<u>6,614,209</u>	Total cash in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Rp			Rp
Pihak berelasi			Related parties
BNI	4,238,900	1,205,604	BNI
BRI	2,453,778	955,009	BRI
Bank Mandiri	1,159,756	1,329,915	Bank Mandiri
BTN	729,400	1,338,605	BTN
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	165,000	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")
Pihak ketiga			Third parties
Bank BJB	423,100	636,000	Bank BJB
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")	93,980	16,224	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")
MUFG Bank, Ltd ("MUFG")	70,000	-	MUFG Bank, Ltd ("MUFG")
PT Bank MNC ("MNC")	40,000	15,000	PT Bank MNC ("MNC")
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	<u>17,400</u>	<u>8,400</u>	Others (each below Rp10,000)
Jumlah deposito berjangka Rp	<u>9,391,314</u>	<u>5,504,757</u>	Total time deposits in Rp
USD			USD
Pihak berelasi			Related parties
BRI	1,001,685	200,362	BRI
BNI	167,946	76,167	BNI
Bank Mandiri	7,135	1,411	Bank Mandiri
Pihak ketiga			Third party
Bank Sumsel Babel	<u>50,212</u>	<u>267</u>	Bank Sumsel Babel
Jumlah deposito berjangka USD	<u>1,226,978</u>	<u>278,207</u>	Total time deposits in USD
Jumlah deposito berjangka	<u>10,618,292</u>	<u>5,782,964</u>	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	<u><u>17,453,305</u></u>	<u><u>12,405,518</u></u>	Total cash and cash equivalents

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/48 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Deposito berjangka memperoleh bunga per tahun sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rp	1.85% - 5.50%	6.40% - 7.75%	Rp
USD	0.04% - 3.50%	0.04% - 2.50%	USD

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Time deposits earned the following annual interest rates:

5. PIUTANG USAHA

Pihak ketiga
Cadangan penurunan nilai

<u>2021</u>	<u>2020</u>
3,107,309	3,655,479
<u>(634,633)</u>	<u>(1,079,376)</u>
<u>2,472,676</u>	<u>2,576,103</u>

Third parties
Allowance for impairment

Pihak berelasi (Catatan 29)
Cadangan penurunan nilai

915,737	1,073,659
<u>(63,747)</u>	<u>(35,796)</u>
<u>851,990</u>	<u>1,037,863</u>

Related parties (Note 29)
Allowance for impairment

Jumlah – bersih

<u>3,324,666</u>	<u>3,613,966</u>
------------------	------------------

Total – net

Nilai tercatat piutang usaha Grup berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The carrying amounts of the Group's trade receivables are denominated in the following currencies:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rp	3,288,010	3,767,635	Rp
USD	735,036	961,498	USD
Lainnya	<u>-</u>	<u>5</u>	Others

4,023,046

4,729,138

Cadangan penurunan nilai

<u>(698,380)</u>	<u>(1,115,172)</u>
------------------	--------------------

Allowance for impairment

Jumlah – bersih

<u>3,324,666</u>	<u>3,613,966</u>
------------------	------------------

Total – net

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of these trade receivables is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Lancar	2,533,230	2,519,202	Current
Sudah jatuh tempo:			Overdue:
1-90 hari	500,675	766,744	1-90 days
91-120 hari	51,676	230,904	91-120 days
121-365 hari	186,495	263,497	121-365 days
>365 hari	<u>750,970</u>	<u>948,791</u>	>365 days

4,023,046

4,729,138

Cadangan penurunan nilai

<u>(698,380)</u>	<u>(1,115,172)</u>
------------------	--------------------

Allowance for impairment

Jumlah – bersih

<u>3,324,666</u>	<u>3,613,966</u>
------------------	------------------

Total – net

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal	1,115,172	930,384
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71	-	190,462
Penghapusan	(361,393)	-
Pembalikan	(85,427)	(84,764)
Penambahan	<u>30,028</u>	<u>79,090</u>
Saldo akhir	<u><u>698,380</u></u>	<u><u>1,115,172</u></u>

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Karena jatuh temponya yang pendek, nilai wajar piutang usaha kurang lebih sama dengan jumlah tercatatnya.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 14).

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak berelasi.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	1,115,172	930,384	<i>Beginning balance</i>
	-	190,462	<i>Opening balance adjustment upon adoption of SFAS 71</i>
	(361,393)	-	<i>Write-off</i>
	(85,427)	(84,764)	<i>Reversal</i>
	<u>30,028</u>	<u>79,090</u>	<i>Additional</i>
	<u><u>698,380</u></u>	<u><u>1,115,172</u></u>	<i>Ending balance</i>

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Allowance for impairment losses for individual receivables are provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

Allowance for impairment losses for collective receivables are provided for customers that have insignificant balances and with possibilities of payment default. This calculation considers trends of payment made by customers, relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

Due to the short-term nature, the fair value of trade receivables approximates their carrying amount.

Based on the review of the status of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that the provision for the impairment of trade receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible trade receivables.

Trade receivables of the Group are used as collateral on short-term (Note 14).

See Note 29 for related parties information.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/50 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SUBSIDI

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia

Rincian saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tahun		
2020	430,237	2,611,261
2019	-	3,680,071
Estimasi piutang subsidi dari Pemerintah – 2021	<u>6,038,001</u>	<u>-</u>
	6,468,238	6,291,332
Dikurangi: Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	<u>(588,022)</u>	<u>(571,939)</u>
Jumlah	<u>5,880,216</u>	<u>5,719,393</u>
Dikurangi: Bagian lancar	<u>2,822,427</u>	<u>3,400,946</u>
Bagian tidak lancar	<u>3,057,789</u>	<u>2,318,447</u>

Estimasi piutang subsidi dari Pemerintah merupakan estimasi piutang subsidi atas penyaluran pupuk untuk tahun 2021 dan 2020. Lihat Catatan 2v dan 3h mengenai pengakuan pendapatan dan piutang subsidi.

Mutasi saldo piutang subsidi Grup adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal	6,152,036	11,095,343
Penyesuaian	(9,471)	(609)
Pembayaran kepada Pemerintah	126,633	-
PPN atas pembayaran	12,663	-
Subsidi Pemerintah (Catatan 22)	24,757,202	26,631,094
PPN atas pendapatan	2,475,720	2,663,109
Penerimaan dari Pemerintah	(24,463,583)	(30,969,079)
PPN atas penerimaan	(2,468,339)	(3,096,908)
PPh 22 atas penerimaan	<u>(219,813)</u>	<u>(170,914)</u>
Jumlah	6,363,048	6,152,036
Dikurangi: Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	<u>(588,022)</u>	<u>(571,939)</u>
Ditambah:		
Utang subsidi kepada Pemerintah	95,627	126,633
Utang PPN keluaran atas utang subsidi kepada Pemerintah	<u>9,563</u>	<u>12,663</u>
Saldo akhir	<u>5,880,216</u>	<u>5,719,393</u>

6. SUBSIDY RECEIVABLES

a. Subsidy receivables from the Government of Indonesia

The balance of the subsidy receivables from the Government of Indonesia is as follow:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Year		
2020	430,237	2,611,261
2019	-	3,680,071
Estimated subsidy receivables from the Government – 2021	<u>6,038,001</u>	<u>-</u>
	6,468,238	6,291,332
Less: VAT out payable from unpaid subsidy receivables	<u>(588,022)</u>	<u>(571,939)</u>
Total	<u>5,880,216</u>	<u>5,719,393</u>
Less: Current portion	<u>2,822,427</u>	<u>3,400,946</u>
Non-current portion	<u>3,057,789</u>	<u>2,318,447</u>

Estimated subsidy receivables from Government represent estimated receivable from fertiliser distribution in 2021 and 2020. Refer to Notes 2v and 3h regarding subsidy revenue and receivable recognition.

The movements of the subsidy receivables of the Group are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beginning balance	6,152,036	11,095,343
Adjustment	(9,471)	(609)
Payment to the Government	126,633	-
VAT related to payments	12,663	-
Government subsidy (Note 22)	24,757,202	26,631,094
VAT related to revenue	2,475,720	2,663,109
Settlement from the Government	(24,463,583)	(30,969,079)
VAT related to settlements	(2,468,339)	(3,096,908)
Income tax article 22 related to settlements	<u>(219,813)</u>	<u>(170,914)</u>
Total	6,363,048	6,152,036
Less: VAT out payable from unpaid subsidy receivables	<u>(588,022)</u>	<u>(571,939)</u>
Add: Subsidy payable to the Government	95,627	126,633
VAT payable from unpaid subsidy payable to the Government	<u>9,563</u>	<u>12,663</u>
Ending balance	<u>5,880,216</u>	<u>5,719,393</u>

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SUBSIDI (lanjutan)

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia (lanjutan)

Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan merupakan utang PPN atas penjualan subsidi yang penyelesaiannya akan dilakukan melalui saling hapus dengan porsi PPN atas utang pelunasan piutang subsidi.

Utang subsidi merupakan kelebihan pembayaran dari Pemerintah dikarenakan perbedaan harga subsidi per ton antara Kementerian Pertanian dengan hasil audit BPK-RI.

Pada tahun 2020, terdapat 128.057 ton pendapatan pupuk subsidi yang masih dalam proses penelusuran kelengkapan bukti oleh BPK-RI. Menindaklanjuti hal ini, Grup telah memberikan seluruh bukti dokumen tambahan yang diminta di tahun 2021 sebesar Rp394.707 dan berdasarkan hasil verifikasi lanjutan, terdapat penyesuaian pendapatan subsidi sebesar Rp413 berdasarkan notulen rapat tertanggal 3 Desember 2021. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, manajemen masih menunggu laporan BPK-RI terkait hal ini. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada koreksi signifikan atas nilai pendapatan subsidi tersebut karena pengakuan pendapatan telah didukung dengan bukti yang valid.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang subsidi di atas. Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dianggap dapat diabaikan, sebab pihak yang bertransaksi merupakan Pemerintah Indonesia.

Piutang subsidi Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 14).

b. Piutang subsidi yang belum ditagih

Piutang subsidi yang belum ditagih adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Piutang subsidi belum ditagih	1,079,618	527,979	Unbilled subsidy receivables
Dikurangi:			Less:
Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum ditagih	<u>(98,147)</u>	<u>(47,998)</u>	VAT out payable from unbilled subsidy receivables
Jumlah	<u>981,471</u>	<u>479,981</u>	Total

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk subsidi ke distributor namun belum tersalurkan ke petani.

6. SUBSIDY RECEIVABLES (continued)

a. Subsidy receivables from the Government of Indonesia (continued)

VAT out payable from unpaid subsidy receivables is VAT payable from subsidy sales, settlement of which will be performed by offsetting VAT portion from settlement of subsidy receivables.

Subsidy payable is an overpayment from the Government due to difference in subsidised fertiliser price per tons between the Ministry of Agriculture and BPK-RI audit result.

In 2020, there are 128,057 tons of subsidised fertiliser revenue that are still in the process of tracking down evidence by BPK-RI. In response to this, the Group has provided all required additional documentary evidence in 2021 and based on the results of further verification, there is an adjustment in 2021 subsidy revenue of Rp394,707, based on the results of further verification, there is an adjustment in 2020 subsidy revenue of Rp413, based on the minutes of the meeting dated 3 December 2021. As of completion date of these consolidated financial statements, management is still waiting for the BPK-RI report in regards to this matter. Management believes that there is no significant correction to the balance of subsidy revenue because revenue recognition is supported by valid evidence.

No impairment loss has been recorded in relation to the subsidy receivables. The credit risk on subsidy receivables is considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.

Subsidy receivables of the Group are used as collateral on short-term (Note 14).

b. Unbilled subsidy receivables

Unbilled subsidy receivables were as follows:

Unbilled subsidy receivables arise from the sales of subsidised fertiliser to distributors which have not yet distributed to the farmers.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/52 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PEKERJAAN DALAM PENYELESAIAN KONTRAK KONSTRUKSI – DARI PELANGGAN DAN UTANG BRUTO KEPADA PELANGGAN UNTUK PEKERJAAN KONTRAK KONSTRUKSI

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan adalah bagian dari kontrak aset yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi adalah bagian dari liabilitas kontrak yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Rincian pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Pihak berelasi (Catatan 29)	1,303,488
Pihak ketiga	<u>240,229</u>
Jumlah	<u><u>1,543,717</u></u>

Berdasarkan hasil penelaahan atas masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa potensi kerugian atas jumlah tagihan bruto pelanggan tidak tertagih sangat minimum sehingga tidak terdapat provisi atas penurunan nilai jumlah tagihan bruto pelanggan yang dibukukan untuk saldo per 31 Desember 2021 dan 2020.

Rincian pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Rp	525,531
USD	<u>1,018,186</u>
Jumlah	<u><u>1,543,717</u></u>

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan dijamin oleh Grup sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 14 dan 15).

Rincian utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi atas pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Pihak berelasi (Catatan 29)	-
Pihak ketiga	<u>2,210</u>
Jumlah	<u><u>2,210</u></u>

7. CONSTRUCTION CONTRACT WORK IN PROGRESS – DUE FROM CUSTOMERS AND AMOUNTS DUE TO CUSTOMERS FOR CONSTRUCTION CONTRACT WORK

Construction contract work in progress – due from customers is recognised as part of contract assets related to revenue from contracts with customers.

Amounts due to customers for construction contract work is recognised as part of contract liabilities related to revenue from contracts with customers.

Details of construction contract work in progress – due from customers are as follows:

	<u>2020</u>	
	2,762,362	Related parties (Note 29)
	<u>348,640</u>	Third parties
Jumlah	<u><u>3,111,002</u></u>	Total

Based on the assessment of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that there were minimal potential losses from uncollectible gross amount due from customers, hence there was no provision booked for the impairment of gross amount due from customers as at 31 December 2021 and 2020.

The details of construction contract work in progress – due from customers based on currencies are as follows:

	<u>2020</u>	
Rp	1,977,026	Rp
USD	<u>1,133,976</u>	USD
Jumlah	<u><u>3,111,002</u></u>	Total

Construction contract work in progress – due from customers is used by the Group as collateral for short-term and long-term bank loans (Notes 14 and 15).

Details of amounts due to customers from construction contract work are as follows:

	<u>2020</u>	
	37,329	Related parties (Note 29)
	<u>18,491</u>	Third parties
Jumlah	<u><u>55,820</u></u>	Total

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERSEDIAAN	2021	2020	
Barang jadi	7,619,063	7,273,863	<i>Finished goods</i>
Bahan baku	2,728,720	1,372,139	<i>Raw materials</i>
Suku cadang dan bahan pembantu	2,638,375	2,457,883	<i>Spare parts and supporting materials</i>
Persediaan dalam perjalanan	1,379,537	947,359	<i>Inventories in transit</i>
Persediaan barang dalam proses	<u>530,739</u>	<u>571,783</u>	<i>Work in process inventories</i>
	14,896,434	12,623,027	
Provisi penurunan nilai	<u>(986,308)</u>	<u>(988,087)</u>	<i>Provision impairment</i>
Jumlah	<u><u>13,910,126</u></u>	<u><u>11,634,940</u></u>	<i>Total</i>
Mutasi provisi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:			<i>Movement of provision for decline in value of inventories is as follows:</i>
	2021	2020	
Saldo awal	988,087	998,360	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	9,120	-	<i>Addition</i>
Pemulihan	-	(10,273)	<i>Recovery</i>
Penghapusan	<u>(10,899)</u>	<u>-</u>	<i>Write-off</i>
Saldo akhir	<u><u>986,308</u></u>	<u><u>988,087</u></u>	<i>Ending balance</i>

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa provisi tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari persediaan usang atau penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021, persediaan barang jadi diasuransikan terhadap risiko kerugian, gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (*all risks*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp11.325.327 dan USD22.821.554. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungjawabkan.

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 14).

Based on a review at the reporting date, the Group's management believes that the above provision is adequate to cover any losses from obsolescence or impairment of inventories.

As at 31 December 2021, finished goods are covered by insurance against the risk of losses, earthquake, fire and other risks (all risks) with total sum insured of Rp11,325,327 and USD22,821,554. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on inventories insured.

The inventories are used as collaterals for the short-term (Note 14).

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/54 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN			9. TAXATION
a. Pajak dibayar dimuka	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pajak dibayar di muka – porsi lancar			Prepaid taxes – current portion
Pajak penghasilan badan ("PPH Badan"):			<i>Corporate income tax:</i>
Pasal 28A	320,691	565,904	Article 28A
Klaim pengembalian pajak	<u>855</u>	<u>11,011</u>	Claim for tax refund
	<u>321,546</u>	<u>576,915</u>	
Pajak lainnya:			<i>Other taxes:</i>
PPN	999,635	1,336,522	VAT
Lainnya	<u>25,272</u>	<u>24,623</u>	Other
	<u>1,024,907</u>	<u>1,361,145</u>	
Pajak dibayar di muka – porsi tidak lancar			Prepaid taxes – non-current portion
PPH Badan:			<i>Corporate income tax:</i>
Pasal 28A	106,916	484,468	Article 28A
Klaim pengembalian pajak	<u>362,364</u>	<u>247,294</u>	Claim for tax refund
	<u>469,280</u>	<u>731,762</u>	
Pajak lainnya:			<i>Other taxes:</i>
PPN	1,355,443	744,858	VAT
b. Utang pajak			b. Taxes payable
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
PPH badan:			<i>Corporate income tax:</i>
Pasal 25/29	<u>1,878,257</u>	<u>136,424</u>	Article 25/29
Pajak lainnya:			<i>Other taxes:</i>
Pasal 21	221,950	278,197	Article 21
PPN	298,545	190,932	VAT
Pasal 4(2)	72,445	140,631	Article 4(2)
Surat Ketetapan Pajak	22,382	23,411	Tax Assessment Letter
Pasal 22	18,004	19,552	Article 22
Pasal 23	15,639	17,103	Article 23
Lainnya	<u>1,832</u>	<u>1,887</u>	Other
	<u>650,797</u>	<u>671,713</u>	

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/55 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan

	2021	2020
Perusahaan:		
Pajak kini	15,294	-
Penyesuaian tahun sebelumnya	23,679	-
	<u>38,973</u>	<u>-</u>
Entitas anak:		
Pajak kini	2,716,860	869,470
Pajak tangguhan	335,903	78,529
Penyesuaian tahun sebelumnya	228,354	77,768
	<u>3,281,117</u>	<u>1,025,767</u>
Konsolidasian:		
Pajak kini	2,732,154	869,470
Pajak tangguhan	335,903	78,529
Penyesuaian tahun sebelumnya	252,033	77,768
	<u>3,320,090</u>	<u>1,025,767</u>

9. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses

The Company:
Current tax
Prior year adjustment

Subsidiaries:
Current tax
Deferred tax
Prior year adjustment

Consolidated:
Current tax
Deferred tax
Prior year adjustment

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax of the Company and estimated taxable income of the Company is as follow:

	2021	2020	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	8,454,765	3,351,348	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(9,693,703)	(3,206,751)	Profit before income tax of subsidiaries
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasian	4,586,554	881,830	Adjusted for consolidation elimination
Laba sebelum pajak penghasilan – Perusahaan	<u>3,347,616</u>	<u>1,026,427</u>	Profit before income tax – the Company
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Penghasilan yang telah dikenakan PPh final	(4,264,936)	(1,684,877)	Income subject to final income tax
Beban pokok pendapatan yang telah dikenakan PPh final	743,831	380,098	Cost of revenues subject to final income tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut perpajakan	243,009	154,413	Non-deductible expenses
Estimasi laba/(rugi) kena pajak – Perusahaan	<u>69,520</u>	<u>(123,939)</u>	Estimated taxable income/(loss) – the Company
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya yang belum dikompensasi	(123,939)	-	Uncompensated prior year accumulated tax losses
Penyesuaian atas akumulasi rugi fiskal	<u>123,939</u>	<u>-</u>	Adjustment on accumulated tax loss
Laba kena pajak/ (akumulasi rugi fiskal)	<u>69,520</u>	<u>(123,939)</u>	Taxable income/ (accumulated tax losses)
Pajak kini	15,294	-	Current income tax
Pembayaran pajak di muka – Perusahaan:			Prepaid taxes – the Company:
Pasal 23	(6,724)	(1,157)	Article 23
Pasal 25	-	(1,091)	Article 25
Kurang/(lebih) bayar pajak penghasilan badan – Perusahaan	<u>8,570</u>	<u>(2,248)</u>	Underpayment/(overpayment) of corporate income tax – the Company

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/56 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perusahaan merupakan *strategic investment holding* dengan penghasilan utama berupa dividen yang merupakan penghasilan bukan objek pajak. Dengan demikian, semua biaya yang terkait dengan dividen bukan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian Grup dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	8,454,765	3,351,348	Consolidated profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak efektif	1,860,048	737,297	Income tax calculated at effective tax rates
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(1,512,533)	(2,196,675)	Income subject to final income tax
Beban pokok pendapatan yang telah dikenakan PPh final	2,420,323	2,092,596	Cost of revenues subject to final income tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	303,408	621,600	Non-deductible expenses
Beban pajak final	3,975	42,646	Final tax expense
Aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut fiskal	(52,987)	(34,311)	Non-depreciated fixed assets based on fiscal
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(65,124)	(52,116)	Share in net profit of associates and joint ventures
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	252,033	77,768	Adjustment in respect of prior years
Penyesuaian tarif pajak	<u>110,947</u>	<u>(263,038)</u>	Adjustment tax rate
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>3,320,090</u>	<u>1,025,767</u>	Consolidated income tax expenses

9. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (continued)

The Company is a strategic investment holding whose main income is from dividend which is not a tax object. As such, all expenses incurred relating to dividend income are not deductible for taxation purpose.

The reconciliation between the Group's consolidated income tax expense and the theoretical tax amount on the Group's consolidated profit before income tax is as follows:

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/57 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax assets and liabilities

31 Desember/December 2021						
Saldo awal/ Beginning balance	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes of tax rates	(Dibebankan)/dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/credited to profit or loss	(Dibebankan)/dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Aset pajak tangguhan:					Deferred tax assets:	
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	86,389	6,461	(12,540)	-	80,310	Provision for impairment of trade receivables and other receivables
Liabilitas imbalan pascakerja	21,826	1,381	(1,423)	(438)	21,346	Post-employment benefit liabilities
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(3,406)	(108)	(32)	-	(3,546)	Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets
Provisi penurunan nilai persediaan	2,671	-	58	-	2,729	Provision for impairment of inventories
Bonus, insentif, dan tantiem	199	93	196	-	488	Bonus, incentive and tantiem
Lain-lain	9,467	1,232	771	-	11,470	Others
Aset pajak tangguhan	117,146	9,059	(12,970)	(438)	112,797	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan:					Deferred tax liabilities:	
Provisi penurunan nilai piutang usaha	184,094	18,406	(109,948)	-	92,552	Provision for impairment of trade receivables
Liabilitas imbalan pascakerja	458,361	(10,395)	(62,450)	69,556	455,072	Post-employment benefits liabilities
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1,541,324)	(151,033)	(4,164)	-	(1,696,521)	Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets
Akumulasi rugi fiskal	109,527	5,913	(86,183)	-	29,257	Accumulated fiscal loss
Provisi penurunan nilai persediaan	193,823	17,664	(429)	-	211,058	Provision for impairment of inventories
Penurunan nilai investasi	12,332	687	4,599	-	17,618	Impairment of investment
Bonus, insentif, dan tantiem	193,651	7,810	41,155	-	242,616	Bonus, incentive and tantiem
Aset keuangan lainnya	(52,376)	(5,580)	(8,553)	-	(66,509)	Other financial assets
Lain-lain	(33,951)	(3,478)	13,987	-	(23,442)	Others
Liabilitas pajak tangguhan	(475,863)	(120,006)	(211,986)	69,556	(738,299)	Deferred tax liabilities
Jumlah – bersih	(358,717)				(625,502)	Total – net

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/58 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax assets and liabilities (continued)

31 Desember/December 2020						
Saldo awal/ Beginning balance	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes of tax rates	Penyesuaian atas penerapan PSAK baru/ Adjustment upon application of new SFAS	(Dibebankan)/dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/credited to profit or loss	(Dibebankan)/dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset pajak tangguhan:						
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	72,340	14,742	3,471	(4,164)	-	86,389
Liabilitas imbalan pascakerja	23,774	(2,123)	-	(338)	513	21,826
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1,666)	(1,711)	-	(29)	-	(3,406)
Provisi penurunan nilai persediaan	1,496	(320)	-	1,495	-	2,671
Bonus, insentif, dan tantiem	2,010	(347)	-	(1,464)	-	199
Lainnya	9,466	(968)	-	969	-	9,467
Aset pajak tangguhan	107,420	9,273	3,471	(3,531)	513	117,146
Liabilitas pajak tangguhan:						
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	211,116	(33,423)	869	5,532	-	184,094
Liabilitas imbalan pascakerja	583,651	1,228	-	(114,730)	(11,788)	458,361
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1,636,165)	365,365	-	(270,524)	-	(1,541,324)
Akumulasi rugi fiskal	83,009	(19,368)	-	45,886	-	109,527
Provisi penurunan nilai persediaan	225,324	(44,310)	-	12,809	-	193,823
Penurunan nilai investasi	10,508	(1,861)	-	3,685	-	12,332
Bonus, insentif, dan tantiem	236,767	(36,079)	-	(7,037)	-	193,651
Aset keuangan lainnya	(63,097)	12,619	-	(1,898)	-	(52,376)
Lainnya	(31,786)	9,594	-	(11,759)	-	(33,951)
Liabilitas pajak tangguhan	(380,673)	253,765	869	(338,036)	(11,788)	(475,863)
Jumlah – bersih	(273,253)					(358,717)

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset pajak tangguhan atas rugi fiskal entitas anak senilai Rp3.126 (31 Desember 2020: Rp12.379) tidak diakui dikarenakan tidak terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia di masa depan untuk memulihkan aset pajak tangguhan tersebut.

As at 31 December 2021, deferred tax assets of certain subsidiaries' fiscal loss amounted to Rp3,126 (31 December 2020: Rp12,379) were not recognised because it is not probable that there will be sufficient taxable income in the future to recover them.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/59 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

f. Surat ketetapan pajak

9. TAXATION (continued)

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

f. Tax assessment letters

31 Desember/December 2021						
Entitas/ Entity	Jenis pajak/ Type of taxes	Tahun pajak dan status/Fiscal year and status	Nilai sengketa/ Amount of disputes	Nilai yang dibayarkan/ Amount paid	Pajak dibayar di muka/ Prepaid tax	Provisi pajak/ Tax provision
Rekind	PPH badan/Corporate income tax	2014 (Peninjauan kembali/ Judicial review) 2015 (Bandung/Appeal) 2016 (Bandung/Appeal) 2017 (Peninjauan kembali/ Judicial review)	106,678	-	-	147,415
Rekind	PPN/VAT	2016 (Peninjauan kembali/ Judicial review) 2017 (Bandung/Appeal)	19,390	-	-	37,293
Rekind	Pajak dipotong dan pajak lainnya/ Withholding and other taxes	2014 (Peninjauan kembali/ Judicial review) 2015 (Ditolak/Rejected) 2016 (Bandung/Appeal) 2017 (Bandung/Appeal)	386,822	-	-	322,830
PSP	PPN/VAT	2015 (Diterima/Accepted) 2016 (Keberatan/Objection) 2018 (Diterima/Accepted) 2018 (Keberatan/Objection) 2018 (Bandung/Appeal) 2019 (Keberatan/Objection)	55,996	4,123	55,996	-
PSP	PPH badan/Corporate income tax	2016 (Bandung/Appeal) 2018 (Keberatan/Objection) 2019 (Keberatan/Objection)	165,390	71,175	165,390	-
PKG	PPH 21/Article 21	2018 (Bandung/Appeal) 2019 (Keberatan/Objection) 2020 (Bandung/Appeal)	62,360	11,011	51,349	-
PKG	Bea Pabean/Custom Duty	2020 (Keberatan/Objection) 2020 (Bandung/Appeal)	28,381	-	28,381	-
PKC	PPH Badan/Corporate income tax	2017 (Keberatan/Objection) 2017 (Bandung/Appeal)	35,730	35,730	35,730	-

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/60 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Rekind memiliki kasus sengketa pajak sebesar Rp512.890 atas berbagai jenis pajak (belum termasuk denda sanksi administrasi sebesar 100% dari nilai sengketa jika Rekind kalah dalam proses persidangan). Manajemen Rekind telah membukukan provisi sebesar Rp507.989 atas sengketa tersebut, sudah termasuk denda sanksi administrasi sebesar 100% dari nilai sengketa. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, terdapat sengketa sebesar Rp297.280 yang sedang dalam pengajuan banding (diprovisikan Rp78.834), Rp157.236 yang hasil putusan bandingnya ditolak seluruhnya dan akan diajukan Peninjauan Kembali (diprovisikan Rp314.471 termasuk penalti), Rp56.311 yang hasil putusan bandingnya diterima sebagian dan akan diajukan Peninjauan Kembali (diprovisikan Rp112.621 termasuk penalti), Rp2.063 yang sedang diajukan penghapusan penalti (diprovisikan seluruhnya).

Manajemen berkeyakinan bahwa resolusi dari sengketa pajak yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup.

g. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan UU No. 7/2021 ("UU HPP") tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemerintah Indonesia mencabut penurunan tarif PPh badan sebelumnya dari 22% menjadi 20% pada tahun pajak 2022 yang sebelumnya diatur dalam UU No. 2/2020, sehingga kini tarif PPh badan akan tetap sebesar 22%.

UU HPP juga menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% sejak 1 Januari 2025, tarif PPh baru Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% berlaku mulai Tahun Pajak 2022, dan pengenalan atas Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 20 Juni 2022.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan per 31 Desember 2021 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

9. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letter (continued)

On 31 December 2021, Rekind has outstanding dispute of Rp512,890 for various types of taxes (excluding potential 100% penalty on disputed amount that Rekind would be liable if Rekind lost in the disputes). Rekind's management has recorded provision of Rp507,989 for the disputes, including the 100% penalty on the disputed amount. As of the issuance date of these financial statements, there are disputes of Rp297,280 currently under appeal (Rp78,834 provisioned), Rp157,236 fully rejected based on appeal result and will be filed for Judicial Review (Rp314,471 provisioned including penalty), Rp56,311 partially accepted based on appeal result and will be filed for Judicial Review (Rp112,621 provisioned including penalty), and Rp2,063 being filed for penalty abolition (fully provisioned).

Management is of the opinion that the resolution of the ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the Group's financial position and cash flows.

g. Tax rates changes

Based on Law No. 7/2021 (the "HPP Law") regarding the Harmonisation of Tax Regulations, the Government of Indonesia revoked the previous reduction in the corporate income tax rate from 22% to 20% in the 2022 tax year which was previously regulated in Law No. 2/2020, thus the corporate income tax rate will remain at 22%.

The HPP Law also stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and to 12% by 1 January 2025, the CIT rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments remains at 22% effective from Fiscal Year 2022 and the introduction of a Voluntary Taxpayer Disclosure Program from 1 January to 20 June 2022.

Deferred tax assets and liabilities as at 31 December 2021 have been remeasured taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they are realised.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/61 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	31 Desember/December 2021					Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Revaluasi/ Revaluation		
Biaya perolehan							Acquisition cost
Tanah	32,002,781	-	-	-	-	32,002,781	Land
Bangunan dan prasarana	7,528,644	10,049	(1,828)	76,293	-	7,613,158	Buildings and infrastructure
Pabrik dan peralatan	54,038,283	949,233	(333,802)	1,742,295	-	56,396,009	Plants and infrastructure
Mesin bengkel kerja	3,670,444	10,827	(4,410)	42,102	-	3,718,963	Workshop machinery
Kendaraan dan alat berat	507,960	10,042	(8,672)	1,461	-	510,791	Vehicles and heavy equipment
Perlengkapan kantor dan rumah	897,780	136,129	(898)	35,696	-	1,068,707	Office and household equipment
Kapal	408,405	-	-	46,221	-	454,626	Ships
Aset penyangga	813,406	114,159	(534)	6,343	-	933,374	Supporting assets
	<u>99,867,703</u>	<u>1,230,439</u>	<u>(350,144)</u>	<u>1,950,411</u>	<u>-</u>	<u>102,698,409</u>	
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Tanah	55,683	36,046	(9,941)	351,443	-	433,231	Land
Bangunan dan prasarana	191,305	106,549	(45,653)	-	-	252,201	Buildings and infrastructure
Kendaraan dan alat berat	244,313	54,364	(44,227)	-	-	254,450	Vehicles and heavy equipment
	<u>491,301</u>	<u>196,959</u>	<u>(99,821)</u>	<u>351,443</u>	<u>-</u>	<u>939,882</u>	
Aset dalam penyelesaian	2,652,580	1,840,132	-	(2,309,600)	-	2,183,112	Construction in progress
	<u>103,011,584</u>	<u>3,267,530</u>	<u>(449,965)</u>	<u>(7,746)</u>	<u>-</u>	<u>105,821,403</u>	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	3,127,274	209,356	(1,372)	-	-	3,335,258	Buildings and infrastructure
Pabrik dan peralatan	21,512,957	3,470,473	(333,802)	-	-	24,649,628	Plants and infrastructure
Mesin bengkel kerja	1,281,363	177,563	(4,410)	-	-	1,454,516	Workshop machinery
Kendaraan dan alat berat	334,716	31,593	(8,596)	-	-	357,713	Vehicles and heavy equipment
Perlengkapan kantor dan rumah	718,743	110,524	(898)	-	-	828,369	Office and household equipment
Kapal	305,776	16,677	-	-	-	322,453	Ships
Aset penyangga	349,246	48,152	(534)	-	-	396,864	Supporting assets
	<u>27,630,075</u>	<u>4,064,338</u>	<u>(349,612)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,344,801</u>	
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Tanah	14,721	30,974	(9,652)	-	-	36,043	Land
Bangunan dan prasarana	80,089	125,669	(42,693)	-	-	163,065	Buildings and infrastructure
Kendaraan dan alat berat	71,530	103,084	(41,126)	-	-	133,488	Vehicles and heavy equipment
	<u>166,340</u>	<u>259,727</u>	<u>(93,471)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>332,596</u>	
Penurunan nilai	-	25,793	-	-	-	25,793	Impairment
	<u>27,796,415</u>	<u>4,349,858</u>	<u>(443,083)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,703,190</u>	
Nilai buku bersih	<u>75,215,169</u>					<u>74,118,213</u>	Net book value

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/62 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember/December 2020					Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance*)	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Revaluasi/ Revaluation		
Biaya perolehan							Acquisition cost
Tanah	31,974,975	27,806	-	-	-	32,002,781	Land
Bangunan dan prasarana	6,791,417	50,483	(73,683)	760,427	-	7,528,644	Buildings and infrastructure
Pabrik dan peralatan	51,141,734	380,939	(188,737)	2,704,347	-	54,038,283	Plants and infrastructure
Mesin bengkel kerja	3,664,876	5,568	-	-	-	3,670,444	Workshop machinery
Kendaraan dan alat berat	481,651	15,529	(20,741)	31,521	-	507,960	Vehicles and heavy equipment
Perlengkapan kantor dan rumah	843,167	60,278	(15,284)	9,619	-	897,780	Office and household equipment
Kapal	382,506	-	-	25,899	-	408,405	Ships
Aset penyangga	692,694	64,059	(1,037)	57,690	-	813,406	Supporting assets
	<u>95,973,020</u>	<u>604,662</u>	<u>(299,482)</u>	<u>3,589,503</u>	<u>-</u>	<u>99,867,703</u>	
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Tanah	48,125	7,558	-	-	-	55,683	Land
Bangunan dan prasarana	67,033	124,272	-	-	-	191,305	Buildings and infrastructure
Kendaraan dan alat berat	155,425	88,888	-	-	-	244,313	Vehicles and heavy equipment
	<u>270,583</u>	<u>220,718</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>491,301</u>	
Aset dalam penyelesaian	3,823,037	2,475,886	(34,567)	(3,611,776)	-	2,652,580	Construction in progress
	<u>100,066,640</u>	<u>3,301,266</u>	<u>(334,049)</u>	<u>(22,273)</u>	<u>-</u>	<u>103,011,584</u>	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	2,854,775	337,124	(64,625)	-	-	3,127,274	Buildings and infrastructure
Pabrik dan peralatan	18,484,344	3,206,252	(177,639)	-	-	21,512,957	Plants and infrastructure
Mesin bengkel kerja	1,271,319	10,044	-	-	-	1,281,363	Workshop machinery
Kendaraan dan alat berat	323,951	29,548	(18,783)	-	-	334,716	Vehicles and heavy equipment
Perlengkapan kantor dan rumah	659,953	74,074	(15,284)	-	-	718,743	Office and household equipments
Kapal	242,234	63,542	-	-	-	305,776	Ships
Aset penyangga	325,250	24,959	(963)	-	-	349,246	Supporting assets
	<u>24,161,826</u>	<u>3,745,543</u>	<u>(277,294)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27,630,075</u>	
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Tanah	-	14,721	-	-	-	14,721	Land
Bangunan dan prasarana	-	80,089	-	-	-	80,089	Buildings and infrastructure
Kendaraan dan alat berat	6,159	65,371	-	-	-	71,530	Vehicles and heavy equipment
	<u>6,159</u>	<u>160,181</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>166,340</u>	
	<u>24,167,985</u>	<u>3,905,724</u>	<u>(277,294)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27,796,415</u>	
Nilai buku bersih	<u>75,898,655</u>					<u>75,215,169</u>	Net book value

*) Termasuk penyesuaian PSAK 73/Including SFAS 73 adjustments

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dialokasikan sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban pokok pendapatan (Catatan 24)	4,112,455	3,765,120
Beban penjualan (Catatan 25)	110,086	32,787
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	<u>127,317</u>	<u>107,817</u>
Jumlah	<u><u>4,349,858</u></u>	<u><u>3,905,724</u></u>

Pada tanggal 31 Desember 2021, harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp8.185.302 (2020: Rp6.857.827).

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (semua risiko) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp18.903.483 dan USD3.979.723.572. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 14 dan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

Revaluasi pada tanggal 31 Desember 2019 dilakukan atas dasar penilaian dari beberapa Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP"). Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI – 2015, dengan menggunakan pendekatan pasar. Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (objek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup meyakini bahwa tidak ada perubahan yang signifikan atas nilai wajar aset tetap dibandingkan dengan saldo revaluasi yang dilakukan di tahun 2019.

10. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expenses of fixed assets for the years ended 31 December 2021 and 2020 were allocated as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	4,112,455	3,765,120	<i>Cost of revenues (Note 24)</i>
	110,086	32,787	<i>Selling expenses (Note 25)</i>
	<u>127,317</u>	<u>107,817</u>	<i>General and administrative expenses (Note 26)</i>
Jumlah	<u><u>4,349,858</u></u>	<u><u>3,905,724</u></u>	<i>Total</i>

As at 31 December 2021, the acquisition cost of fixed assets which have been fully depreciated and are still being used amounted to Rp8,185,302 (2020: Rp6,857,827).

As at 31 December 2021, fixed assets of the Group are insured against risks of earthquake, fire and other risks (all risks) with total sum insured amounting to Rp18,903,483 and USD3,979,723,572. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Certain fixed assets are pledged as collateral for short-term and long-term bank loans (Notes 14 and 15).

As at 31 December 2021 and 2020, the Group's management is on the opinion that there was no indication of impairment in the fixed assets' value.

Revaluation performed as at 31 December 2019 was carried by several Independent Public Appraisers ("KJPP"). The Valuation Assessment Standards used are Indonesian Appraisal Standards VI edition – 2015, using the market approach. This approach considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by a comparison process. Basically, the properties being valued (valuation object) are properties that are compared to other similar properties, that have either been transacted or offered for sale in a sales transaction.

As at 31 December 2021 and 2020, the Group believed that there were no significant changes in fair value of fixed assets compared to the revaluation performed in 2019.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Secara total, kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tanah dicatat sebagai "Surplus revaluasi aset" sebesar Rp30.868.425 pada tanggal 31 Desember 2021 (Rp30.868.425 pada tanggal 31 Desember 2020).

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap selain tanah.

Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai aset dalam penyelesaian adalah sebesar Rp2.183.112 (2020: Rp2.652.580). Sebagian besar aset dalam penyelesaian diperkirakan akan selesai pada tahun 2022 dengan persentase penyelesaian saat ini antara 1%-99%.

Grup telah mengkapitalisasi biaya pinjaman masing-masing sebesar Rp40.494 dan Rp10.628 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkatan bunga antara 4,97% - 7,67%.

Hak atas tanah diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir antara tahun 2029 sampai dengan tahun 2045. Mengacu pada praktek di masa lalu, Grup memiliki keyakinan dapat memperpanjang HGB tersebut.

Keuntungan atas pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Nilai jual	8,564	57,690	Selling price
Nilai buku	<u>(6,882)</u>	<u>(56,755)</u>	Book value
Keuntungan bersih	<u>1,682</u>	<u>935</u>	Net gain

10. FIXED ASSETS (continued)

In total, the increase in carrying amounts of the class of revalued assets is recorded as "Assets revaluation surplus" amounting to Rp30,868,425 as at 31 December 2021 (Rp30,868,425 as at 31 December 2020).

There is no significant difference between the fair value and carrying amount of fixed assets other than land.

As at 31 December 2021, construction in progress is amounting to Rp2,183,112 (2020: Rp2,652,580). Most of the construction in progress are estimated to be completed in 2022 with current percentage of completion between 1%-99%.

The Group has capitalised borrowing cost amounting to Rp40,494 and Rp10,628 for the years ended 31 December 2021 and 2020, respectively. Borrowing costs were capitalised at the rate of 4.97% - 7.67%.

Land rights are held under renewable Building Right Titles ("HGB") which will expire between 2029 up to 2045. Based on historical practices, the Group believes that it can renew these HGB.

Gain on disposal of fixed assets for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. UTANG USAHA

11. TRADE PAYABLES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak berelasi (Catatan 29)	279,646	550,957	<i>Related parties (Note 29)</i>
Pihak ketiga	<u>5,821,581</u>	<u>3,070,254</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah	<u><u>6,101,227</u></u>	<u><u>3,621,211</u></u>	<i>Total</i>

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rp	4,403,968	2,629,800	<i>Rp</i>
USD	1,652,965	967,003	<i>USD</i>
EUR	28,281	17,999	<i>EUR</i>
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	<u>16,013</u>	<u>6,409</u>	<i>Others (each below Rp10,000)</i>
Jumlah	<u><u>6,101,227</u></u>	<u><u>3,621,211</u></u>	<i>Total</i>

Saldo utang usaha pihak ketiga merupakan utang atas pembelian bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan jasa.

Trade payables to third parties are payable for the procurement of raw materials, supporting materials, spare parts and services.

12. UTANG LAINNYA

12. OTHER PAYABLES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak berelasi:			<i>Related parties:</i>
Dana Pensiun PKT	-	212,018	<i>Dana Pensiun PKT</i>
BRI	40,646	-	<i>BRI</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	15,959	-	<i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	<u>23,785</u>	<u>55,060</u>	<i>Others (each below Rp10,000)</i>
	<u>80,390</u>	<u>267,078</u>	
Pihak ketiga:			<i>Third parties:</i>
Uang muka kontrak penjualan	845,166	566,996	<i>Contractual cash advances</i>
Utang iuran	267,848	262,153	<i>Contribution payables</i>
Utang retensi	169,203	129,945	<i>Retention payables</i>
Pendapatan diterima di muka	208,368	62,632	<i>Unearned revenue</i>
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	<u>71,729</u>	<u>46,262</u>	<i>Others (each below Rp10,000)</i>
	<u>1,562,314</u>	<u>1,067,988</u>	
Jumlah	<u><u>1,642,704</u></u>	<u><u>1,335,066</u></u>	<i>Total</i>

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/66 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR
DAN PROVISI

13. ACCRUED LIABILITIES AND PROVISIONS

a. Liabilitas yang masih harus dibayar

a. Accrued liabilities

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya bahan bakar dan gas alam	1,879,143	1,754,533	Fuel and gas costs
Bahan baku non-gas	1,770,839	1,675,413	Non-gas raw materials
Biaya proyek	1,691,879	1,647,778	Project costs
Biaya distribusi	550,521	539,410	Distribution costs
Pembelian aset tetap	315,370	196,434	Purchase of fixed assets
Bunga pinjaman	191,270	134,905	Interest expenses
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	<u>586,646</u>	<u>518,778</u>	Others (each below Rp10,000)
Jumlah	<u>6,985,668</u>	<u>6,467,251</u>	Total

b. Provisi

b. Provisions

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Provisi <i>liquidated damage</i>	1,239,655	-	Provision for liquidated damage
Provisi sengketa pajak	507,538	575,516	Provision for tax dispute
Provisi kontrak merugikan	<u>286,221</u>	<u>105,887</u>	Provision for onerous contract
Jumlah	<u>2,033,414</u>	<u>681,403</u>	Total

Perubahan provisi adalah sebagai berikut:

The movement in the provisions are as follows:

<u>2021</u>					
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Dibebankan pada laporan laba rugi/ Charged to profit or loss</u>	<u>Realisasi selama tahun berjalan/ Realisation during the year</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
<i>Liquidated damage</i>	-	1,239,655	-	1,239,655	<i>Liquidated damage</i>
Sengketa pajak	575,516	-	(67,978)	507,538	Tax dispute
Kontrak yang merugikan	105,887	180,334	-	286,221	Onerous contract
Jumlah	<u>681,403</u>	<u>1,419,989</u>	<u>(67,978)</u>	<u>2,033,414</u>	Total
<u>2020</u>					
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Dibebankan pada laporan laba rugi/ Charged to profit or loss</u>	<u>Realisasi selama tahun berjalan/ Realisation during the year</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
<i>Liquidated damage</i>	705,977	-	(705,977)	-	<i>Liquidated damage</i>
Sengketa pajak	575,516	-	-	575,516	Tax dispute
Kontrak yang merugikan	-	105,887	-	105,887	Onerous contract
Jumlah	<u>1,281,493</u>	<u>105,887</u>	<u>(705,977)</u>	<u>681,403</u>	Total

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/67 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR
DAN PROVISI (lanjutan)

b. Provisi (lanjutan)

Liquidated damage

Grup memiliki kewajiban kontraktual untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat indikasi bahwa proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka Grup akan mencatatkan provisi atas potensi keterlambatan *liquidated damage* yang dapat dikenakan oleh pemilik proyek. Provisi diakui sebesar nilai dari perkiraan hari keterlambatan penyelesaian proyek dikalikan dengan tarif spesifik yang berlaku berdasarkan kontrak proyek. Jumlah provisi yang diperkirakan terjadi adalah sebesar Rp1.239.655 (2020: nihil). Provisi dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Provisi tersebut dapat berubah apabila Grup mendapatkan perpanjangan waktu dari pemilik proyek dan/atau terjadi perubahan estimasi waktu penyelesaian.

Sengketa pajak

Jumlah ini merupakan provisi untuk kasus pajak yang sedang dalam proses banding ataupun peninjauan kembali (Catatan 9f). Manajemen Grup berkeyakinan bahwa hasil kasus pajak yang berpotensi kalah tidak akan melebihi jumlah yang telah diprovisikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Kontrak yang merugikan

Grup memiliki beberapa kontrak dengan indikasi rugi pada akhir proyek. Sebagian besar kerugian yang diestimasi merupakan nilai pekerjaan tambahan (*change order*) yang belum disetujui oleh pemilik proyek. Nilai provisi diakui sebesar total biaya yang dibutuhkan hingga kontrak selesai dikurangi dengan nilai kontrak yang sudah disetujui. Jumlah provisi yang diperkirakan terjadi adalah sebesar Rp286.221 (2020: Rp105.887). Provisi dibukukan sebagai bagian "Beban pokok pendapatan".

Provisi tersebut dapat berubah apabila Grup mendapatkan persetujuan pekerjaan tambahan dari pemilik proyek dan/atau terjadi perubahan estimasi total biaya yang dibutuhkan hingga penyelesaian kontrak.

13. ACCRUED LIABILITIES AND PROVISIONS
(continued)

b. Provisions (continued)

Liquidated damage

The Group has contractual liabilities to complete their projects within the scheduled period. The Group has booked provisions for potential delay liquidated damages that might be charged by the project owners as there were indications that the projects cannot be completed within the scheduled period. The provision is recognised for the amount estimated from delay on project schedule days multiplied by the applicable charge rate stated in the contract. The total provision expected to be incurred was Rp1,239,655 (2020: nil). Provision was booked as revenue deduction.

The provision stated above may change due to extension of time received by the Group from project owner and/or changes in estimated time of completion.

Tax disputes

The amounts represent a provision for those tax disputes which are in process for appeal or judicial review (Note 9f). Group's management believes that potential outcome of tax dispute loss will not exceed the amount of provision provided as at 31 December 2021 and 2020.

Onerous contract

The Group has several contracts which might be onerous by the end of projects. Most of the estimated loss represent the amount of additional work (*change order*) which has not been approved by the project owners. Provision was recognised for the amount estimated from total cost required to complete the project deducted by the approved contract value. The total provision expected to be incurred was Rp286,221 (2020: Rp105,887). Provision was booked as part of "Cost of revenues".

The provision stated above may change due to approval of additional work from project owners and/or changes in estimated total cost required until completion of the contract.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/68 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

14. SHORT-TERM BANK LOANS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rp			Rp
Pihak berelasi			Related parties
BRI	1,424,690	558,197	BRI
Bank Mandiri	659,704	3,775,377	Bank Mandiri
BTN	14,676	19,010	BTN
BNI	466	733,933	BNI
	<u>2,099,536</u>	<u>5,086,517</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Panin	646,199	647,464	Panin
BCA	416,881	-	BCA
BTPN	400,000	300,000	BTPN
MUFG	297,186	324,277	MUFG
Bank DKI	414,500	89,467	Bank DKI
PT Bank DBS Indonesia ("DBS")	200,000	549,000	PT Bank DBS Indonesia ("DBS")
PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")	49,500	100,000	PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")
UOB	133,732	203,099	UOB
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")	149,208	28,765	PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")
HSBC	11,796	22,612	HSBC
PT Standard Chartered Bank Indonesia ("Standard Chartered Bank")	-	550,000	PT Standard Chartered Bank Indonesia ("Standard Chartered Bank")
PT Bank ICBC Indonesia ("Bank ICBC")	21,168	102,023	PT Bank ICBC Indonesia ("Bank ICBC")
Bank of China, Ltd. ("Bank of China")	-	60,770	Bank of China, Ltd. ("Bank of China")
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")	57,698	25,000	PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")
	<u>2,797,868</u>	<u>3,002,477</u>	
Jumlah pinjaman jangka pendek saldo Rp	<u>4,897,404</u>	<u>8,088,994</u>	Total short-term loan in Rp amount
USD			USD
Pihak berelasi			Related parties
Bank Mandiri	2,159,864	-	Bank Mandiri
BRI	-	30,501	BRI
	<u>2,159,864</u>	<u>30,501</u>	
Pihak ketiga			Third parties
MUFG	229,731	-	MUFG
Panin	12,786	92,513	Panin
OCBC	-	91,862	OCBC
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	9,080	9,847	Others (each below Rp10,000)
	<u>251,597</u>	<u>194,222</u>	
Jumlah pinjaman jangka pendek saldo USD	<u>2,411,461</u>	<u>224,723</u>	Total short-term loan in USD amount
Jumlah	<u><u>7,308,865</u></u>	<u><u>8,313,717</u></u>	Total

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/69 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Informasi lain mengenai pinjaman bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

<u>Kreditur/Creditors</u>	<u>Jadwal pembayaran/ Repayment schedule</u>
Bank Mandiri	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/Max. 360 days after withdrawal date
BRI	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/Max. 360 days after withdrawal date
BNI	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/Max. 360 days after withdrawal date
MUFG	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/Max. 360 days after withdrawal date
HSBC	120 hari setelah tanggal penarikan/120 days after withdrawal date
Panin	90 - 240 hari setelah tanggal penarikan/90 - 240 days after withdrawal date
DBS	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/Max. 360 days after withdrawal date
BTPN	90 - 360 hari setelah tanggal penarikan/6 - 30 days after withdrawal date
UOB	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/Max. 360 days after withdrawal date
OCBC	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/ Max. 360 days after withdrawal date
Bank DKI	90 - 360 hari setelah tanggal penarikan/90 - 360 days after withdrawal date
ICBC	180 - 360 hari setelah tanggal penarikan/180 - 360 days after withdrawal date
Bank CTBC	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/Max. 360 days after withdrawal date
BCA	14 - 30 hari setelah tanggal penarikan/14 - 30 days after withdrawal date
CIMB Niaga	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/Max. 360 days after withdrawal date
BTN	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/Max. 360 days after withdrawal date

Jaminan pinjaman bank jangka pendek berupa piutang usaha (Catatan 5), piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia (Catatan 6), pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan (Catatan 7), persediaan (Catatan 8), dan aset tetap (Catatan 10).

Dana yang diperoleh dari pinjaman bank jangka pendek digunakan untuk modal kerja dan pendanaan kegiatan umum. Grup mengawasi berbagai rasio yang diharuskan oleh pemberi pinjaman sehingga Grup tidak melanggar perjanjian untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Other information relating to short-term bank loans as at 31 December 2021 is as follows:

<u>Tingkat suku bunga per tahun/ Interest rates per annum</u>
USD: 3.00% - 5.00% IDR: 8.00% - 10.50%
USD: 9.50% IDR: JIBOR 3 bulan/months + 2.00% dengan min. LPS/with min. LPS IDR +2.00% - 12.50%
IDR: 11.50%
USD: LIBOR + 1.55% IDR: JIBOR + Margin
USD: 8.30% IDR: 12.10%
IDR: Ditentukan setiap penarikan/ Determined on each withdrawal USD: 5.50%
IDR: Ditentukan setiap penarikan/ Determined on each withdrawal
USD: JIBOR 3 bulan/months + 1.60% IDR: JIBOR 3 bulan/months + 1.50%
IDR: Biaya dana perbankan/Cost of fund +3.25% USD: JIBOR + 4.25%
USD: 4.25% IDR: 9.00%
IDR: 3.00% - 9.50%
IDR: 9.50%
IDR: 7.75%
IDR: 9.75% - 10.00%
IDR: 8.00%
IDR: 9.90%

The short-term bank loans collateral are trade receivables (Note 5), subsidy receivables from the Government of Indonesia (Note 6), construction contract work in progress – due from customers (Note 7), inventories (Note 8) and fixed assets (Note 10).

The funds received from short-term bank loans are used for working capital and general corporate funding. The Group monitors various ratios as required by the lenders so that the Group does not breach covenants on any borrowing facilities.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pinjaman dari Bank Mandiri, BRI, CTBC, Bank DKI, Panin, dan UOB tidak memenuhi beberapa batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman (lihat Catatan 15).

Sepanjang tahun 2021, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman jangka pendek sejumlah Rp15.952.372 (2020: Rp31.592.649).

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

As at 31 December 2021 and 2020, the Group has not complied with the financial covenants related to loans from Bank Mandiri, BRI, CTBC, Bank DKI, Panin and UOB (see Note 15).

In 2021, the Group has paid short-term bank loans amounting to Rp15,952,372 (2020: Rp31,592,649).

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG

15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pinjaman bank	13,594,795	21,141,444	<i>Bank loans</i>
Pinjaman sindikasi	1,346,138	909,244	<i>Syndicated loans</i>
Pinjaman dari pihak selain bank	<u>31,257</u>	<u>30,596</u>	<i>Non-bank loans</i>
	14,972,190	22,081,284	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Bagian jangka pendek	<u>(2,360,195)</u>	<u>(3,050,941)</u>	<i>Current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>12,611,995</u>	<u>19,030,343</u>	<i>Non-current portion</i>
<u>Pinjaman bank</u>		<u><i>Bank loans</i></u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rp			Rp
Pihak berelasi			Related parties
Bank Mandiri	5,442,340	6,184,673	<i>Bank Mandiri</i>
BNI	2,348,187	4,036,074	<i>BNI</i>
BRI	151,764	1,547,281	<i>BRI</i>
BSI	29,688	29,888	<i>BSI</i>
BTN	<u>-</u>	<u>4,678</u>	<i>BTN</i>
	<u>7,971,979</u>	<u>11,802,594</u>	
Pihak ketiga			Third parties
BCA	2,520,802	4,867,040	<i>BCA</i>
Bank DKI	899,854	1,140,000	<i>Bank DKI</i>
BTPN	826,000	1,937,500	<i>BTPN</i>
MUFG	105,350	-	<i>MUFG</i>
Bank Muamalat	42,801	42,839	<i>Bank Muamalat</i>
Bank BJB	37,584	74,181	<i>Bank BJB</i>
Bank Sumsel Babel	<u>20,546</u>	<u>41,074</u>	<i>Bank Sumsel Babel</i>
	<u>4,452,937</u>	<u>8,102,634</u>	
Jumlah pinjaman bank saldo Rp	<u>12,424,916</u>	<u>19,905,228</u>	<i>Total bank loan in Rp amount</i>
USD			USD
Pihak berelasi			Related party
Bank Mandiri	<u>586,965</u>	<u>580,218</u>	<i>Bank Mandiri</i>
Pihak ketiga			Third party
BTPN	<u>582,914</u>	<u>655,998</u>	<i>BTPN</i>
Jumlah pinjaman bank saldo USD	<u>1,169,879</u>	<u>1,236,216</u>	<i>Total bank loan in USD amount</i>
Jumlah pinjaman bank	<u>13,594,795</u>	<u>21,141,444</u>	<i>Total bank loan</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Bagian jangka pendek	<u>(2,344,601)</u>	<u>(2,936,229)</u>	<i>Short-term portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>11,250,194</u>	<u>18,205,215</u>	<i>Long-term portion</i>

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/71 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA
JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS
(continued)

Significant information related to bank loans as at 31 December 2021 is as follows:

Kreditur/ Creditors	Jenis fasilitas/ Facilities type	Fasilitas/ Facilities	Periode jatuh tempo/ Maturity period	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rates	Jaminan/ Collateral
BRI	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	Rp5,500,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	Sesuai rekomendasi buku/ Based on bank recommendation	Negative pledge
		Rp850,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	JIBOR 3 bulan/months + 4.5% p.a	Negative pledge
		Rp500,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	LIBOR 3 bulan/months + 2.00% p.a	Tagihan atas proyek-proyek yang akan diterima pemegang/Invoices for projects that will be received by the borrower
	- Kredit investasi/Investment loan	Rp1,512,128	23 Maret/March 2023	8.00% p.a untuk tahun pertama, JIBOR 3 bulan + 2.40% p.a min. LPS + 1.8% p.a untuk tahun seterusnya/8.00% for the first year, JIBOR 3 months + 2.40% p.a min. LPS + 1.8% p.a for the following years	Pabrik Pusri II-B, Bangunan Steam Turbine Generator (STG), Kapal Self Propelled Urea Barge (SPUB)/ Pusri II-B Plant, STG building, SPUB ship
	- Pendanaan jangka pendek (A)/ Short-term funding (A) ¹⁾	Rp500,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	Reviewable	Negative pledge
	- Pendanaan jangka pendek (B)/ Short-term funding (B) ¹⁾	Rp70,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	Reviewable	Negative pledge
	- Kredit modal kerja impor (A)/ Import working capital loan (A)	Rp70,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	JIBOR 3 bulan/months + 4.50% p.a	Negative pledge
		Rp300,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	JIBOR 3 bulan/months + 2.00% p.a	Negative pledge
	- Penangguhan jaminan impor (A)/ Suspension of import guarantee (A)	Rp70,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	0.0625% - 0.125% p.a	Negative pledge
	- Pendanaan kembali A/ Refinancing A	Rp70,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	Reviewable	Negative pledge
	- Bank garansi (A)/ Bank guarantee	USD14,554,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	0.25% - 1.00% p.a	Negative pledge
		Rp200,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	0.25% - 0.75% per transaksi/ per transaction	-
	- Forex line	USD10,000,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	Reviewable	Negative pledge
		USD168,000,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	Reviewable	Negative pledge
	- Supply chain financing	Rp350,000	31 Maret/March 2022 ¹⁾	Reviewable	Negative pledge
- Trade line	Rp9,691	31 Maret/March 2022 ¹⁾	Reviewable	Negative pledge	
- Commercial line	Rp4,460	31 Maret/March 2022 ¹⁾	Reviewable	Negative pledge	
Bank Mandiri	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	Rp1,250,000	19 Desember/December 2022	Suku bunga saat penarikan/Interest rate at withdrawal date	Negative pledge
		USD72,000,000	31 Januari/January 2022 ¹⁾	Tingkat referensi + margin, LIBOR 3 bulan + 2.00% p.a/ Reference rate + margin LIBOR 3 months + 2.00% p.a	Tagihan atas proyek-proyek yang akan diterima pemegang/Invoices for projects that will be received by the borrower
	- Kredit investasi/Investment loan	Rp1,000,000	23 Maret/March 2023	JIBOR 3 bulan/months + 2.40% p.a min. LPS + 1.8% p.a	Pabrik Pusri II-B, bangunan STG, kapal SPUB/Pusri II-B plant, STG building, SPUB ship
		Rp420,000	10 Juni/June 2029	JIBOR 3 bulan/months + 4.75% p.a	Tanah, bangunan, mesin, peralatan pabrik NPK dan fidusia hasil klaim bank garansi/Land, building, machinery, NPK plant equipment, and fiduciary claim from bank guarantee
	- Kredit berjangka/Term loan	Rp6,000,000	23 Desember/December 2026	JIBOR 3 bulan/months + 2.25% p.a	Negative pledge
		Rp3,000,000	30 Desember/December 2026	JIBOR 3 bulan/months + 2.25 p.a	Negative pledge
	- Non-cash loan	USD40,000,000	19 Desember/December 2022	0.25% - 0.50% p.a	Negative pledge
- Kredit jangka pendek/ Short-term loan ¹⁾	Rp650,000	19 Desember/December 2022	4.08% p.a	Negative pledge	
Deutsche Bank	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	USD125,000,000	19 Desember/December 2022	Reviewable	Negative pledge
BSI	- Kredit investasi/Investment loan	Rp420,000	10 Juni/June 2029	JIBOR 3 bulan/months + 4.75% p.a	Tanah, bangunan, mesin, peralatan pabrik NPK dan fidusia hasil klaim bank garansi/land, building, machinery, NPK plant equipment, and fiduciary claim from bank guarantee
Bank Muamalat	- Line facility	Rp130,000	28 Februari/February 2022 ¹⁾	7.00% p.a	-

¹⁾ Dalam proses perpanjangan/In the process of extension.

¹⁾ Dicatat sebagai pinjaman jangka pendek/Recorded as short-term loan.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/72 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan) 15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)

Kreditur/ Creditors	Jenis fasilitas/ Facilities type	Fasilitas/ Facilities	Periode jatuh tempo/ Maturity period	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rates	Jaminan/ Collateral
BNI	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	Rp4,876,368	20 September 2023	8.50% p.a (ditinjau kembali/reviewable)	Negative pledge
		Rp700,000	20 September 2023	JIBOR 3 bulan/months + 1.80% p.a	Negative pledge
		Rp1,000,000	20 September 2022	8.50% p.a	Tanpa jaminan/Clean basis
	- Kredit investasi/Investment loan	Rp500,000	20 September 2023	8.50% p.a (ditinjau kembali/reviewable)	Negative pledge
		Rp2,896	28 Mei/May 2022 ¹⁾	JIBOR 3 bulan/months + 2.40% p.a min. LPS + 1.80% p.a	4 truk Nissan/4 Nissan trucks
		Rp1,200,451	23 Maret/ March 2023		
		Rp420,000	10 Juni/June 2029	JIBOR 3 bulan/months + 4.75% p.a	Tanah, bangunan, mesin, peralatan pabrik NPK dan fidusia hasil klaim bank garansi/Land, building, machinery, NPK plant equipment, and fiduciary claim from bank guarantee
	- Treasury line	USD700,000	20 September 2022	Reviewable	Negative pledge
	- Kredit modal kerja/Working Capital loan – uncommitted ¹⁾	Rp300,000	20 September 2023	Reviewable	Negative pledge
	- Non-cash loan (sublimit kredit modal kerja/working capital loan – committed ¹⁾)	Rp700,000	20 September 2023	0.0417% - 0.5% p.a	Negative pledge
BTPN	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	Rp900,000	31 Oktober/ October 2023	JIBOR + 1.60% p.a	Negative pledge
		Rp3,990,000	31 Oktober/ October 2023	JIBOR 3-6 bulan/months + 1.50% - 1.60% p.a	Tanpa jaminan/Clean basis
	- Kredit Investasi/Investment loan	USD63,500,000	5 Agustus/ August 2024	1.60% p.a + LIBOR	Pabrik Gresik Gas Cogeneration Plant (GGCP)/Gresik Gas Cogeneration plant (GGCP)
	- Kredit berjangka/Term loan	Rp2,000,000	31 Oktober/ October 2023	0.125% - 0.5%	Negative pledge
	- Treasury line	Rp900,000	31 Oktober/ October 2023	JIBOR	Negative pledge
MUFG	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	Rp2,000,000	29 November 2022	JIBOR 3 bulan/months + 1.05% - 1.30% p.a	Tanpa jaminan/Clean basis
		Rp176,000	8 Mei/May 2025	JIBOR 3 bulan/months + 2.30% p.a	Mesin dan sarana pendukung pabrik CO2/ Machinery and CO2 plant supporting facilities
	- Penyelesaian impor/Import completion (sublimit)	Rp350,000	29 November 2022	JIBOR + 1.05% p.a	Negative pledge
	- Pinjaman perdagangan/Trade loan (sublimit)	Rp350,000	29 November 2022	JIBOR + 1.05% p.a	Mesin dan sarana pendukung pabrik CO Machinery and CO2 plant supporting facilities
	- Pinjaman jangka pendek/short-term loan ¹⁾	Rp350,000	29 November 2022	JIBOR + 1.30% p.a	Negative pledge
Panin	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	Rp1,000,000	17 Maret/March 2023	Suku bunga saat penarikan/Interest rate at withdrawal date	Tanpa jaminan/Clean basis
		Rp2,200,000	28 November 2024	Suku bunga saat penarikan/Interest rate at withdrawal date	Negative pledge
BCA	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	Rp2,600,000	28 November 2024	Suku bunga saat penarikan/Interest rate at withdrawal date	Negative pledge
		Rp2,400,451	23 Maret/March 2023	JIBOR 3 bulan/months + 2.40% p.a min. LPS + 1.80% p.a	Pabrik Pusri II-B, bangunan STG, kapal SPUB/Pusri II-B plant, STG building, SPUB ship
Bank BJB	- Kredit investasi/Investment credit	Rp300,000	28 November 2024	4.19% p.a	Negative pledge
		Rp300,000	28 November 2024	4.19% p.a	Negative pledge
		Rp300,000	28 November 2024	0.0625% - 0.85% p.a	Negative pledge
		Rp500,000	28 November 2024	0.85%	-
Bank Sumsel Babel	- Kredit investasi/Investment loan	Rp400,000	23 Maret/March 2023	JIBOR 3 bulan/months + 2.40% p.a min LPS 1.80% p.a	Pabrik Pusri II-B, Bangunan STG, kapal SPUB/Pusri II-B plant STG building, SPUB ship
		Rp200,000	23 Maret/March 2023	JIBOR 3 bulan/months + 2.40% p.a min LPS 1.80% p.a	Pabrik Pusri II-B, Bangunan STG, kapal SPUB/Pusri II-B plant
Bank DKI	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	Rp1,500,000	21 Desember/ December 2023	Suku bunga saat penarikan/interest rate at withdrawal date	Negative pledge
BTN	- Kredit modal kerja/Working capital loan ¹⁾	Rp35,000	29 Maret/March 2022 ¹⁾	9.90% p.a	-

¹⁾ Dalam proses perpanjangan/In the process of extension.

²⁾ Dicatat sebagai pinjaman jangka pendek/Recorded as short-term loan.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/73 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA
JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pinjaman sindikasi

	Jumlah mata uang asing (nilai penuh)/ Amount of foreign currency (full amount)	31 Desember/December 2021		
		Ekuivalen Rp/Rp equivalent		
		Jumlah/ Total	Jangka pendek/ Current	Jangka panjang/ Non-current
Pihak berelasi/Related parties				
Bank Mandiri (USD)	USD28,629,858	408,519	-	408,519
Bank Mandiri (Rp)	-	179,230	-	179,230
BNI (Rp)	-	174,935	-	174,935
BSI (Rp)	-	174,935	-	174,935
		937,619	-	937,619
Pihak ketiga/Third party				
ICBC	USD28,629,858	408,519	-	408,519
Jumlah/Total		1,346,138	-	1,346,138

	Jumlah mata uang asing (nilai penuh)/ Amount of foreign currency (full amount)	31 Desember/December 2020		
		Ekuivalen Rp/Rp equivalent		
		Jumlah/ Total	Jangka pendek/ Current	Jangka panjang/ Non-current
Pihak berelasi/Related party				
Bank Mandiri	USD32,231,291	454,622	(50,798)	403,824
Pihak ketiga/Third party				
ICBC	USD32,231,291	454,622	(50,798)	403,824
Jumlah/Total		909,244	(101,596)	807,648

Informasi lain mengenai pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Other information related to syndicated loans as at 31 December 2021 are as follows:

Kreditur/ Creditors	Jumlah fasilitas/ Total facilities	Jadwal pembayaran/ Repayment schedule	Tingkat suku bunga/ Interest rates
Bank Mandiri, BNI, BSI dan/and ICBC			
Pinjaman jangka panjang/ Long-term loan	USD71,400,000 USD3,300,000	30 Desember/December 2025 30 Desember/December 2025	LIBOR (3 bulan/months) + 3.25% LIBOR (3 bulan/months) + 3.25%
Interest During Construction ("IDC")	Rp122,000	6 Oktober/October 2029	JIBOR (3 bulan/months) + 4.75%
Pinjaman jangka pendek/ Short-term loan ^{*)}	Rp54,000 USD3,300,000	26 Januari/January 2023 30 Desember/December 2025	9.50% LIBOR (3 bulan/months) + 3.25%
Kredit investasi/ Investment credit	Rp718,000	6 Oktober/October 2029	JIBOR (3 bulan/months) + 4.75%

^{*)} Dicatat sebagai pinjaman jangka pendek/Recorded as short-term loan.

Jaminan pinjaman sindikasi berupa tanah yang menjadi lokasi proyek pembangunan, mesin dan peralatan yang dibiayai dari fasilitas kredit (Catatan 10).

The syndicated loan collateral is land of plant area, machinery and tools which are funded from the credit facilities (Note 10).

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/74 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA
JANGKA PANJANG (lanjutan)

Sesuai dengan perjanjian pinjaman sindikasi, Grup diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan antara lain rasio lancar, *debt to equity ratio*, dan *debt service coverage ratio*. Grup juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Grup telah memenuhi batasan rasio keuangan dan non-keuangan tersebut.

Pinjaman dari pihak selain bank

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pihak berelasi		
Pemerintah RI (RDI-373)	34,049	33,929
Pemerintah RI (RDI-014)	12,309	12,309
Pemerintah RI (Bappenas)	<u>6,187</u>	<u>6,187</u>
	52,545	52,425
Dikurangi:		
Selisih nilai wajar yang belum diamortisasi	<u>(21,288)</u>	<u>(21,829)</u>
	31,257	30,596
Dikurangi:		
Bagian jangka pendek	<u>(15,594)</u>	<u>(13,116)</u>
Bagian jangka panjang	<u><u>15,663</u></u>	<u><u>17,480</u></u>

Informasi lain mengenai pinjaman dari pihak selain bank pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

<u>Kreditur/ Creditors</u>	<u>Jumlah fasilitas/ Total facilities</u>	<u>Jadwal pembayaran/ Repayment schedule</u>	<u>Tingkat suku bunga/ Interest rates</u>
Pemerintah/ Government RDI - 373	20 tahun/years	Tahunan, setiap tanggal 30 Oktober 2019 - 30 Oktober 2038/Annually, every 30 October 2019 - 30 October 2038	0%
RDI - 014	20 tahun/years	Tahunan, setiap tanggal 30 Oktober 2019 - 30 Oktober 2038/Annually, every 30 October 2019 - 30 October 2038	0%

Pada bulan Maret 2019, berdasarkan Surat Skema Penyelesaian Piutang Negara yang berasal dari pinjaman RDI-373 dan RDI-014, penyelesaian pinjaman dilakukan melalui skema penjadwalan kembali pembayaran selama 20 tahun dengan metode pro rata dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2038.

15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS
(continued)

As specified by the syndicated loan agreements, the Group is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants which are current ratio, debt to equity ratio, and debt service coverage ratio. The Group is also required to comply with certain terms and conditions in relation to its Articles of Association, the nature of business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters. The Group complied with the financial and non-financial ratio covenants.

Non-bank loans

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
			Related parties
			Government of RI (RDI-373)
			Government of RI (RDI-014)
			Government of RI (Bappenas)
			Less:
			Unamortised difference of fair value
			Less:
			Current portion
			Non-current portion

Other information related to non-bank loans as at 31 December 2021 is as follows:

In March 2019, based on the Receivables Settlement Scheme Letter from the RDI-373 and RDI-014 loan, the loan settlement was carried out through a repayment rescheduling scheme for 20 years using the pro rata method starting from 2019 up to 2038.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA
JANGKA PANJANG (lanjutan)**

Informasi lainnya

Pada tahun 2021, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang sebesar Rp9.801.879 (2020: Rp21.502.817).

Terdapat fasilitas yang belum digunakan oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2021 pada Panin dan Deutsche Bank masing-masing sebesar Rp1.000.000 dan USD125.000.000. Tidak terdapat fasilitas yang belum digunakan oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2020.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank, Grup diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup tidak memenuhi beberapa batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman sebagai berikut (pinjaman jangka panjang dan pendek):

<u>Nama Entitas/ Entity</u>	<u>Indikator keuangan/ Financial indicator</u>	<u>Kreditur/ Creditor</u>	<u>Jenis fasilitas/ Facility type</u>	<u>Saldo pinjaman/ Outstanding amount</u>	<u>Tanggal penerimaan surat pengampunan/ Date of waiver letter received</u>
Rekind	<i>Debt to equity ratio, trade receivable coverage</i>	Bank Mandiri	Pendanaan jangka pendek/Short-term funding	797,992	Diterima pada 22 Februari 2022/Obtained on 22 February 2022
Rekind	<i>Current ratio</i>	BRI	Pendanaan jangka pendek/Short-term funding	79,135	Diterima pada 20 Januari 2022/Obtained on 20 January 2022
PSG	<i>Debt to sales ratio, DSCR</i>	CTBC	Pendanaan jangka pendek/Short-term funding	49,500	Tidak diterima/ Has not obtained
PSG	<i>Current ratio, debt to equity ratio, DSCR</i>	Bank DKI	Pendanaan jangka panjang/Long-term funding	294,500	Tidak diterima/ Has not obtained
PSG	<i>Current ratio, debt to equity Ratio, DSCR</i>	Panin	Pendanaan jangka pendek/Short-term funding	128,985	Tidak diterima/ Has not obtained
PSG	<i>Debt to sales ratio, DSCR</i>	UOB	Pendanaan jangka panjang/Long-term funding	105,600	Tidak diterima/ Has not obtained

Terdapat perubahan penyajian atas saldo pinjaman Rekind yang mereklasifikasi dari liabilitas jangka panjang (untuk pinjaman bank yang tidak memenuhi persyaratan pinjaman) menjadi liabilitas jangka pendek karena pelanggaran atas rasio keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, PSG telah memperoleh surat dari bank-bank tersebut perihal penerimaan informasi terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan, dimana bank-bank tersebut mengkonfirmasi bahwa jatuh tempo pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

**15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS
(continued)**

Other information

In 2021, the Group has paid long-term bank loans and other loans amounting to Rp9,801,879 (2020: Rp21,502,817).

There are unused facilities of the Group as at 31 December 2021 at Panin and Deutsche Bank amounting to Rp1,000,000 and USD125,000,000, respectively. There are no unused facilities of the Group as at 31 December 2020.

As specified by the bank loan agreements, the Group is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants.

As at 31 December 2021, the Group has not complied with the covenants in the borrowing agreement as follows (long-term and short-term loans):

There are changes of presentation of Rekind's borrowings which reclassify long-term liabilities (for those breach of covenants) to short-term liabilities due to breach of financial ratios as at 31 December 2021 and 2020.

On the issuance date of these consolidated financial statements, PSG has obtained letters from the banks regarding receipt of information related to the nonfulfillment of the financial ratio requirements, in which the banks confirmed that the maturity of the loan will mature in the next 12 months after the balance sheet date.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/76 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG OBLIGASI

16. BONDS PAYABLE

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap I Tahun 2017	2,085,000	2,085,000	Shelf Registration Bonds I Phase I PTPI Year 2017
Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap II Tahun 2017	1,774,000	1,774,000	Shelf Registration Bonds I Phase II PTPI Year 2017
Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020	2,436,510	2,436,510	Shelf Registration Bonds II Phase I PTPI Year 2020
Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021	<u>2,750,000</u>	<u>-</u>	Shelf Registration Bonds II Phase II PTPI Year 2021
	<u>9,045,510</u>	<u>6,295,510</u>	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	<u>(7,577)</u>	<u>(6,064)</u>	Unamortised transaction costs
Jumlah utang obligasi	<u>9,037,933</u>	<u>6,289,446</u>	Total bonds payable
Dikurangi:			Less:
Bagian jangka pendek	<u>(1,773,765)</u>	<u>-</u>	Current portion
Bagian jangka panjang	<u>7,264,168</u>	<u>6,289,446</u>	Non-current portion

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

The details of bonds payable are as follows:

No.	Obligasi dan nilai nominal/ Bonds and nominal amount	Bunga per tahun/ Interest per annum	Jatuh tempo/ Maturity
a.	Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap I Tahun 2017/ Shelf Registration Bonds I Phase I PTPI Year 2017	8.60%	12 Juli/July 2024
b.	Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap II Tahun 2017/ Shelf Registration Bonds I PTPI Phase II Year 2017	7.90%	9 November 2022
c.	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020/ Shelf Registration Bonds II PTPI Phase I Year 2020	7.00% 7.70% 8.30%	3 September 2023 3 September 2025 3 September 2027
d.	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021/ Shelf Registration Bonds II PTPI Phase II Year 2021	5.60% 6.20% 7.20%	10 Maret/March 2024 10 Maret/March 2026 10 Maret/March 2028

Dana yang diperoleh digunakan antara lain untuk modal kerja, pendanaan umum, pembiayaan kembali pinjaman dan pembiayaan lainnya.

Funds received were used for working capital, general funding, loan refinancing and other financing.

Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, antara lain batasan rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah memenuhi batasan rasio keuangan tersebut.

The Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. As at 31 December 2021, the Company complied with the respective financial covenants.

Obligasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 mendapatkan peringkat "AAA(idn)" dari Fitch. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian lembaga pemeringkat atas kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

These bonds are rated "AAA(idn)" by Fitch as at 31 December 2021. The rating reflects the rating agency's assessment of the likelihood of timely payment of the principal and interest.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

The bonds are not guaranteed with a specific collateral, but are guaranteed with all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and the future ones. The bondholders' rights are *pari passu* without preference to the other creditors.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/77 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. IMBALAN KERJA

17. EMPLOYEE BENEFITS

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

a. Short-term employee benefit liabilities

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Gaji, insentif, dan bonus	1,784,432	1,362,269	Salaries, incentives and bonuses
Manfaat pensiun	316,138	418,689	Pension benefits
Jumlah	<u>2,100,570</u>	<u>1,780,958</u>	Total

b. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang

b. Long-term post-employment benefits liabilities

Imbalan karyawan dihitung oleh aktuaris independen. Tabel berikut menyajikan ikhtisar liabilitas imbalan karyawan dan biaya yang dibebankan sebagaimana tercatat pada laporan keuangan:

The provision for employee benefits are calculated by independent actuaries. The table below presents a summary of the employee benefits liabilities and expenses reported in the financial statements:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Liabilitas di posisi keuangan untuk:			Liabilities on financial position for:
Imbalan pascakerja ("IPK")	2,873,430	3,126,565	Post-employment benefits ("PEB")
Imbalan jangka panjang lainnya ("IJPL")	206,810	186,524	Other long-term benefits ("OLTEB")
	<u>3,080,240</u>	<u>3,313,089</u>	
Dikurangi:			Less:
Bagian jangka pendek (Catatan 17a)	(316,138)	(418,689)	Current portion (Note 17a)
Bagian jangka panjang	<u>2,764,102</u>	<u>2,894,400</u>	Non-current portion
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Dibebankan pada laba rugi:			Charged to profit or loss:
IPK	340,733	331,251	PEB
IJPL	119,746	116,449	OLTEB
Jumlah	<u>460,479</u>	<u>447,700</u>	Total
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain:			Charged to other comprehensive income:
IPK	64,188	496,372	PEB
Jumlah	<u>64,188</u>	<u>496,372</u>	Total

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/78 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang (lanjutan)

b. Long-term post-employment benefits liabilities (continued)

Rincian estimasi liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan lainnya untuk masing-masing program yang diselenggarakan Grup pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

The details of estimated post-employment benefits liabilities and other long-term benefits for each of the programs operated by the Group as at 31 December 2021 and 2020 were as follows:

	31 Desember/December 2021						
	IPK/PEB		IJPL/OLTEB		Dampak batas atas aset/ Impact on assets ceilings	Jumlah/ Total	
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets			
Pada 1 Januari 2021	5,411,194	(3,088,898)	186,524	-	6,709	2,515,529	As at 1 January 2021
Biaya jasa kini	221,516	-	120,358	-	-	341,874	Current service cost
Biaya bunga bersih	342,246	-	6,612	-	(3,838)	345,020	Net interest cost
Biaya jasa lalu	(26,511)	-	1,153	-	-	(25,358)	Past service costs
Pendapatan bunga	169	(192,849)	3	-	-	(192,677)	Interest Income
Kerugian aktuarial bersih yang diakui	-	-	(8,380)	-	-	(8,380)	Net actuarial loss
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	537,420	(192,849)	119,746	-	(3,838)	460,479	Balance recognised in profit or loss
Pengukuran kembali: Imbal hasil aset program non-bunga – bersih	133	27,964	-	-	-	28,097	Remeasurements: Return on plan assets excluding interest income – net
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(10)	-	-	-	-	(10)	Actuarial loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(34,364)	-	-	-	-	(34,364)	Actuarial loss from change in financial assumptions
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	70,465	-	-	-	-	70,465	Actuarial loss from experience adjustment
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	36,224	27,964	-	-	-	64,188	Balance recognised in other comprehensive income
Pembayaran dari program:							Payments from plans:
Pembayaran iuran Imbalan yang dibayar	7,339	(51,195)	(160)	-	-	(44,016)	Contribution payments
	(957,192)	373,437	(99,300)	-	-	(683,055)	Benefit payments
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2021	5,034,985	(2,931,541)	206,810	-	2,871	2,313,125	Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2021
Dampak batas atas aset	-	2,871	-	-	(2,871)	-	Impact on assets ceiling
Aset program yang tidak memenuhi kriteria perspektif akuntansi	-	767,115	-	-	-	767,115	Unqualified plan asset from an accounting perspective

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/79 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang (lanjutan)

b. Long-term post-employment benefits liabilities (continued)

	31 Desember/December 2020						
	IPK/PEB		IJPL/OLTEB		Dampak batas atas aset/ Impact on assets ceilings	Jumlah/ Total	
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets			
Pada 1 Januari 2020	5,440,017	(3,126,317)	190,675	-	10,030	2,514,405	As at 1 January 2020
Biaya jasa kini	183,250	-	86,879	-	-	270,129	Current service cost
Biaya bunga bersih	384,444	-	8,769	-	(3,321)	389,892	Net interest cost
Biaya jasa lalu	8,661	-	2,388	-	-	11,049	Past service costs
Pendapatan bunga	-	(239,593)	-	-	-	(239,593)	Interest Income
Kerugian aktuarial bersih yang diakui	-	-	18,413	-	-	18,413	Net actuarial loss
Kurtailmen	(2,190)	-	-	-	-	(2,190)	Curtailment
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	574,165	(239,593)	116,449	-	(3,321)	447,700	Balance recognised in profit or loss
Pengukuran kembali: Imbal hasil aset program non-bunga – bersih	(966)	62,392	-	-	-	61,426	Remeasurements: Return on plan assets excluding interest income – net
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	46,046	-	-	-	-	46,046	Actuarial loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	215,364	-	-	-	-	215,364	Actuarial loss from change in financial assumptions
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	174,661	-	-	-	-	174,661	Actuarial loss from experience adjustment
Dampak batas atas aset	(6,663)	-	-	-	-	(6,663)	Impact on asset ceiling
Penurunan nilai aset program	-	5,539	-	-	-	5,539	Impairment on plan assets
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	428,442	67,931	-	-	-	496,373	Balance recognised in other comprehensive income
Pembayaran dari program:							Payments from plans:
Pembayaran iuran	10,623	(162,926)	-	-	-	(152,303)	Contribution payments
Imbalan yang dibayar	(1,042,053)	372,007	(120,600)	-	-	(790,646)	Benefit payments
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2020	5,411,194	(3,088,898)	186,524	-	6,709	2,515,529	Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2020
Dampak batas atas aset	-	6,709	-	-	(6,709)	-	Impact on assets ceiling
Aset program yang tidak memenuhi kriteria perspektif akuntansi	-	797,560	-	-	-	797,560	Unqualified plan asset from an accounting perspective

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/80 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. **IMBALAN KERJA** (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tunai aset program manfaat pasti pascakerja yang terbentuk pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang secara akuntansi tidak dapat disajikan secara bersih terhadap liabilitas adalah masing-masing sebesar Rp767.115 dan Rp797.560 disajikan sebagai "aset imbalan pascakerja" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai aset program pada Dana Pensiun sebesar Rp2.161.555 (2020: Rp2.284.629) memenuhi kriteria aset program secara akuntansi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset program ditempatkan dalam bentuk investasi deposito berjangka dan surat berharga yang tidak memiliki harga pasar yang dikutip dan nilai wajarnya mendekati nilai tercatatnya.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tingkat diskonto per tahun	3.65% - 7.60%	3.65% - 7.40%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji	3.00% - 9.30%	2.56% - 9.00%	Salary growth rate
Tingkat mortalitas	TM IV 2019	TM IV 2019	Mortality rate
Usia pensiun normal (dalam tahun)	56	56	Normal retirement age (in years)

Melalui program pensiun manfaat pasti, Grup terekspos beberapa risiko seperti kenaikan gaji, volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi, sebagai berikut:

Volatilitas aset

Asumsi yang berhubungan dengan tingkat pengembalian aset yang diharapkan ditentukan berdasarkan data historis dan ekspektasi manajemen terhadap pengembangan investasi dimasa yang akan datang. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Perubahan imbal hasil obligasi

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

17. **EMPLOYEE BENEFITS** (continued)

As at 31 December 2021 and 2020, the total investment values of plan assets in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) which cannot be accounted for net of the liabilities amounting to Rp767,115 and Rp797,560, respectively are presented as "post-employment benefits assets" in the consolidated statements of financial position. Plan assets in Dana Pensiun amounting to Rp2,161,555 (2020: Rp2,284,629) meet the criteria of plan assets in accordance with accounting perspectives.

As at 31 December 2021 and 2020, the plan assets were mostly placed in the form of investments in time deposits and bonds, which did not have quoted market prices and their fair values approximate their carrying value.

The principal assumptions used in determining the Group's employee benefit liabilities are as follows:

Though its defined benefits pension plans, the Group is exposed to a number of risks such as salary growth, assets volatility and changes in bonds yields, as follows:

Assets volatility

Assumptions regarding the expected return on plan assets are based on the historical data and management's expectation of the future investment development. If the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

Changes in bond yields

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit program.

A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/81 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. **IMBALAN KERJA** (lanjutan)

Perubahan imbal hasil obligasi (lanjutan)

Grup memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Grup adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.

Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama tertimbang pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Dampak atas Kewajiban Imbalan Pasti/
Impact on Defined Benefit Obligations**

	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumptions</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions</u>	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 9.16%	Kenaikan sebesar/ Increase by 8.81%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 9.23%	Penurunan sebesar/ Decrease by 9.62%	Salary growth rate

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode proyeksi unit kredit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

17. **EMPLOYEE BENEFITS** (continued)

Changes in bond yields (continued)

The Group ensures that the investment positions are managed within an *asset-liability matching* ("ALM") framework that is developed to achieve long-term returns that are in line with the obligation in defined benefit pension plans. Within this ALM framework, the Group's objective is to match assets and the pension obligations by investing in a well-diversified portfolio that generates sufficient risk-adjusted returns.

Investment across the plans is well diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted actuarial principal assumptions as of 31 December 2021 is as follows:

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined medical benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/82 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Risiko gaji (lanjutan)

Rata-rata durasi untuk masing-masing kewajiban imbalan pasti adalah 1,29 - 20,09 tahun.

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than a year</i>	1 sampai 5 tahun/ <i>Between 1-5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>Over 5 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
IPK	563,704	1,666,532	11,819,377	14,049,613	PEB
IJPL	78,450	421,735	1,793,065	2,293,250	OLTEB
Jumlah	<u>642,154</u>	<u>2,088,267</u>	<u>13,612,442</u>	<u>16,342,863</u>	Total

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Salary risk (continued)

The weighted average duration of each defined benefit obligation is 1.29 - 20.09 years.

Management believes that the estimated liabilities of employee benefits from all of the Group's pension programs, based on the estimated calculation provided by the actuaries, exceeds the minimum liability stated by the Job Creation Law.

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefits is as follow:

18. MODAL SAHAM

18. SHARE CAPITAL

31 Desember/December 2021 dan/and 2020

	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership (%)</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Pemerintah Indonesia	<u>25,000,000</u>	<u>100</u>	<u>25,000,000</u>	The Government of Indonesia

19. LABA BERSIH PER SAHAM

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

19. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owner of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5,321,127	2,337,259	Profit for the year attributable to owner of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>	Weighted average number of ordinary shares outstanding (shares)
Laba bersih per saham – dasar dan dilusi (nilai penuh)	<u>212,845</u>	<u>93,490</u>	Earnings per shares – basic and diluted (full amount)

Grup tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba bersih per saham dasar sama dengan laba bersih per saham dilusi.

The Group did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share is the same as the diluted earnings per share.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/83 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. **PENCADANGAN SALDO LABA DAN PEMBAGIAN LABA**

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan wajib dari keuntungan paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Kinerja Tahun Buku 2020 tanggal 30 Juni 2021 dan RUPS Kinerja Tahun Buku 2019 tanggal 3 Agustus 2020, Perusahaan mencadangkan saldo laba sebesar masing-masing Rp1.749.229 dan Rp2.668.254 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 1 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 4 Agustus 2020, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp973.500.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 2 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 26 Agustus 2021, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp588.030.

20. **APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTIONS OF INCOME**

Under Indonesian Limited Company Law, the company is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Based on the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the Financial Year 2020 dated 30 June 2021 and GMS for the Financial Year 2019 dated 3 August 2020, the Company had appropriated retained earnings of Rp1,749,229 and Rp2,668,254, respectively, for the year ended 31 December 2021 and 2020.

As resolved during the Annual GMS concerning the legalisation of the Consolidated Financial Statements for the year 2019 based on Notarial Deed No. 1 by notary Lumassia S.H. dated on 4 August 2020, the shareholders approved cash dividend of Rp973,500.

As resolved during the Annual GMS concerning the legalisation of the Consolidated Financial Statements for the year 2020 based on Notarial Deed No. 2 by notary Lumassia S.H. dated on 26 August 2021, the shareholders approved cash dividend of Rp588,030.

21. **PENJUALAN PRODUK**

Pendapatan penjualan produk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

21. **SALES OF PRODUCTS**

The revenues from sales of products for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak berelasi (Catatan 29)			Related parties (Note 29)
Penjualan pupuk:			Fertiliser sales:
- Subsidi	1,134,831	1,125,296	Subsidy -
- Non-subsidi	486,568	666,824	Non-subsidy -
Penjualan non-pupuk	<u>377,045</u>	<u>427,810</u>	Non-fertiliser sales
	<u>1,998,444</u>	<u>2,219,930</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Penjualan pupuk:			Fertiliser sales:
- Subsidi	12,558,459	11,223,323	Subsidy -
- Non-subsidi	24,392,214	17,974,276	Non-subsidy -
Penjualan non-pupuk	10,119,987	5,715,454	Non-fertiliser sales
Penjualan produk lainnya	<u>244,747</u>	<u>223,718</u>	Sales of other products
	<u>47,315,407</u>	<u>35,136,771</u>	
Jumlah	<u><u>49,313,851</u></u>	<u><u>37,356,701</u></u>	Total

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat penjualan produk kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

Pendapatan dari penjualan produk diakui pada suatu titik waktu.

For the years ended 31 December 2021 and 2020, there were no customers which sales of product transaction exceeded 10% of total revenue.

The revenues from sales of products are recognised at a point in time.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/84 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH INDONESIA 22. REIMBURSEMENT OF SUBSIDY FROM THE GOVERNMENT OF INDONESIA

Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The reimbursement of subsidy from the Government for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Subsidi pupuk:			Subsidy of fertiliser:
NPK	11,000,486	9,673,700	NPK
Urea	10,193,563	12,643,616	Urea
ZA	1,583,586	1,368,545	ZA
SP-36	1,416,033	2,035,402	SP-36
Organik	509,883	878,324	Organic
NPK kakao	<u>53,651</u>	<u>31,507</u>	NPK cocoa
	24,757,202	26,631,094	
Penyesuaian piutang subsidi dari Pemerintah, yang belum ditagih – bersih setelah penyesuaian tahun sebelumnya	<u>501,490</u>	<u>(918,946)</u>	Adjustment of unbilled subsidy receivables from the Government – net of prior year adjustment
Jumlah	<u>25,258,692</u>	<u>25,712,148</u>	Total

Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah untuk tahun 2021 dan 2020 dibukukan berdasarkan harga pupuk subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 8 Maret 2022 untuk PKT dan 24 Maret 2022 untuk PIM, PKG, PKC, dan PSP untuk tahun 2021 dan 17 Mei 2021 untuk tahun 2020. Per tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, volume penyaluran subsidi masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK-RI. Secara historis, aktual kuantitas penyaluran pupuk yang disetujui dan estimasi dari kuantitas penyaluran tidak berbeda signifikan.

Reimbursement of subsidy from Government for the year 2021 was recorded based on 2021 subsidised fertiliser price audited by BPK-RI as stated on Minutes of Audit Result dated 8 March 2022 for PKT and 24 March 2022 for PIM, PKG, PKC and PSP for 2021 and 17 May 2021 for 2020. As the issuance date of these consolidated financial statements, the subsidy distributed volume are still being audited by BPK-RI. Historically, the actual approved distributed quantity and estimates of distributed quantity are not significantly different.

23. PENDAPATAN JASA 23. RENDERING OF SERVICES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak berelasi (Catatan 29)	2,700,542	6,597,704	Related parties (Note 29)
Pihak ketiga	<u>1,330,051</u>	<u>2,211,020</u>	Third parties
Jumlah	<u>4,030,593</u>	<u>8,808,724</u>	Total

Pendapatan jasa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The rendering of services for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pendapatan konstruksi	2,966,228	6,954,611	Construction revenues
Jasa operasi dan pemeliharaan	292,267	997,885	Operation and maintenance services
Pendapatan keuangan dari perjanjian konsesi jasa	225,091	130,868	Finance income from service concession arrangement
Pendapatan konstruksi dari perjanjian konsesi jasa	154,266	352,780	Construction revenue from service concession arrangement
Jasa lainnya	<u>392,741</u>	<u>372,580</u>	Other services
Jumlah	<u>4,030,593</u>	<u>8,808,724</u>	Total

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/85 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN JASA (lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat pendapatan jasa kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

Manajemen memperkirakan bahwa harga transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.592.908 (2020: Rp4.040.359) akan diakui sebagai pendapatan selama rentang waktu antara 1-3 tahun ke depan.

Pendapatan Grup yang diakui pada tahun ini, yang berasal dari saldo kontrak liabilitas tahun lalu sebesar Rp118.052 (2020: Rp166.015).

23. RENDERING OF SERVICES (continued)

For the years ended 31 December 2021 and 2020, there was no customer which rendering of services transaction exceeded 10% of total revenue.

Management expects that the transaction price allocated to the unsatisfied contracts as of 31 December 2021 amounting to Rp2,592,908 (2020: Rp4,040,359) will be recognised as revenue within the next 1-3 years.

Revenue of the Group recognised in the current year related to carried-forward contract liabilities amounting to Rp118,052 (2020: Rp166,015).

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

24. COST OF REVENUES

The cost of revenues for the years ended 31 December 2021 and 2020 were as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Bahan baku yang digunakan	42,883,940	38,343,301	Raw material used
Penyusutan (Catatan 10)	4,112,455	3,765,120	Depreciation (Note 10)
Biaya tenaga kerja langsung	3,267,898	2,530,188	Direct labour
Perbaikan dan pemeliharaan	980,305	757,788	Repairs and maintenance
Biaya <i>overhead</i> lainnya	<u>3,416,216</u>	<u>3,404,341</u>	Other overhead costs
Jumlah biaya produksi	54,660,814	48,800,738	Total production costs
Persediaan barang jadi dan barang dalam proses:			Finished goods and work in progress inventories:
Awal tahun	7,845,646	10,246,176	Beginning of the year
Akhir tahun	<u>(8,149,802)</u>	<u>(7,845,646)</u>	End of the year
	<u>54,356,658</u>	<u>51,201,268</u>	
Beban non-manufaktur:			Non-manufacturing cost:
Jasa konstruksi	6,086,695	7,181,246	Construction services
Perdagangan	1,794,178	983,395	Trading
Listrik, <i>steam</i> , dan utilitas	510,584	641,185	Electricity, steam and utilities
Properti dan jasa kawasan industri	131,729	227,280	Properties and services industrial estate
Lainnya	<u>589,945</u>	<u>521,472</u>	Others
Jumlah beban non-manufaktur	<u>9,113,131</u>	<u>9,554,578</u>	Total cost of non-manufacture
Jumlah	<u><u>63,469,789</u></u>	<u><u>60,755,846</u></u>	Total

Pemasok yang memiliki transaksi pembelian lebih dari 10% dari jumlah beban pokok pendapatan usaha konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah PT Pertamina (Persero) dan entitas anak dengan nilai masing-masing sebesar Rp16.882.530 (26,60%) (2020: Rp13.201.477 (21,73%)).

Lihat Catatan 29 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Suppliers with purchase transactions that represent more than 10% of the total consolidated cost of revenues for the years ended 31 December 2021 are PT Pertamina (Persero) and subsidiaries amounting to Rp16,882,530 (26.60%) (2020: Rp13,201,477 (21.73%)).

Refer to Note 29 for details of related parties balances and transactions.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/86 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN PENJUALAN

25. SELLING EXPENSES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Gaji, upah, dan kesejahteraan	559,551	560,477	<i>Salaries, wages, and welfare</i>
Biaya jasa	160,294	117,086	<i>Service charges</i>
Beban sewa	140,982	121,699	<i>Rent expenses</i>
			<i>Promotion and</i>
Beban promosi dan pemasaran	117,512	107,148	<i>marketing expenses</i>
Beban penyusutan (Catatan 10)	110,086	32,787	<i>Depreciation expenses (Note 10)</i>
Beban perlengkapan			<i>Supply and office</i>
dan operasional kantor	35,107	41,481	<i>operating expenses</i>
Beban perjalanan dinas	23,664	26,399	<i>Travel expenses</i>
Beban pemeliharaan	18,673	17,940	<i>Maintenance expenses</i>
Beban penelitian	16,062	16,496	<i>Research expenses</i>
Beban unit pelayanan dan utilitas	11,690	15,854	<i>Service unit and utility expenses</i>
Beban asuransi	10,990	14,288	<i>Insurance expenses</i>
Beban lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	75,894	115,114	<i>Other expenses</i> <i>(each below Rp10,000)</i>
	<u>1,280,505</u>	<u>1,186,769</u>	
Jumlah			<i>Total</i>

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Gaji, upah, dan kesejahteraan	2,047,088	1,965,767	<i>Salaries, wages, and welfare</i>
Beban jasa	521,498	564,524	<i>Service charges</i>
Beban pajak	312,576	413,326	<i>Tax expenses</i>
Beban unit pelayanan dan utilitas	215,461	191,105	<i>Service unit and utility expenses</i>
Beban penyusutan (Catatan 10)	127,317	107,817	<i>Depreciation expenses (Note 10)</i>
Beban bina wilayah	141,113	142,409	<i>Regional development expenses</i>
Beban pemeliharaan	129,485	100,512	<i>Maintenance expenses</i>
Beban sewa	109,145	32,429	<i>Rent expenses</i>
			<i>Promotion and</i>
Beban promosi dan pemasaran	109,896	127,065	<i>marketing expenses</i>
Beban perlengkapan			<i>Supply and office</i>
dan operasional kantor	101,061	97,327	<i>operating expenses</i>
Beban pelatihan	52,906	58,625	<i>Training expenses</i>
Biaya perjalanan dinas	47,604	32,588	<i>Travel expenses</i>
Beban penelitian	43,462	25,973	<i>Research expenses</i>
			<i>Reversal of allowance for</i>
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang – bersih	(55,399)	(5,674)	<i>impairment losses of</i> <i>receivables – net</i>
Beban lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	119,911	170,297	<i>Other expenses</i> <i>(each below Rp10,000)</i>
	<u>4,023,124</u>	<u>4,024,090</u>	
Jumlah			<i>Total</i>

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/87 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. PENDAPATAN/(BEBAN) LAINNYA – BERSIH

27. OTHER INCOME/(EXPENSES) – NET

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pendapatan lainnya – bersih	98,610	78,558	<i>Other income – net</i>
Denda dan klaim	70,625	31,872	<i>Penalty and claim</i>
Kerugian selisih kurs – bersih	<u>(19,055)</u>	<u>(215,772)</u>	<i>Foreign exchange loss – net</i>
Jumlah	<u><u>150,180</u></u>	<u><u>(105,342)</u></u>	<i>Total</i>

28. BIAYA KEUANGAN

28. FINANCE COSTS

Biaya keuangan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan beban bunga dan beban keuangan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

The Group's finance costs for the years ended 31 December 2021 and 2020 representing interest expense and other financial expenses are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pinjaman bank jangka pendek	769,174	1,767,177	<i>Short-term bank loans</i>
Utang obligasi	648,074	621,520	<i>Bonds payable</i>
Pinjaman jangka panjang	523,759	453,672	<i>Long-term loans</i>
Biaya bank dan pinjaman	63,823	80,284	<i>Bank and loan cost</i>
Kerugian selisih kurs atas pinjaman	29,802	34,058	<i>Exchange differences loss on borrowing</i>
Pinjaman non-bank	<u>12,862</u>	<u>18,638</u>	<i>Non-bank loan</i>
Jumlah	<u><u>2,047,494</u></u>	<u><u>2,975,349</u></u>	<i>Total</i>

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Nature of relationships with related parties

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

In the normal course of business, the Group entered into trade and other transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those for transactions between unrelated parties.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/88 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) **29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)**

Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

Nature of relationships with related parties (continued)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of the nature of relationships and types of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/Relationship with the related parties	Transaksi/ Transaction
Pemerintah Indonesia/ <i>The Government of Indonesia</i>	Pemegang saham utama/ <i>Ultimate parent</i>	Dividen dan penggantian biaya subsidi/ <i>Dividend and reimbursement of subsidy</i>
Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI	Entitas di bawah kendali Pemerintah/ <i>Entities controlled by the Government</i>	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, fasilitas <i>Non Cash loan, fasilitas Bill Purchasing Line, fasilitas Kredit Modal Kerja, fasilitas Supply Chain Financing, fasilitas Treasury Line/ Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, placement of restricted cash, Non Cash Loan facility, Bill Purchasing Line facility, Working Capital Loans facility, Supply Chain Financing Facility, Treasury Line facility</i>
PT Adhi Karya (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bhandra Graha Reksa (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Fokus Jasa Mitra, PT Graha Sarana Gresik, PT Iglas (Persero), PT Industri Gula Glenmore, PT Krakatau Engineering, PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i> , PT Perta Arun Gas, PT Pertagas Niaga, PT Pertamina (Persero) dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i> , PT Pertani (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Petro Graha Medika, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i> , PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, Yayasan Petrokimia Gresik, Perum Bulog, Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, Dana Pensiun Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BNI, DPLK BRI, Tabungan Hari Tua ("YHT") PIM, BRI Life, PT Pembangunan Perumahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Entitas di bawah kendali Pemerintah/ <i>Entities controlled by the Government</i>	Penjualan pupuk subsidi, penjualan pupuk non-subsidi, pendapatan jasa EPC, pendapatan jasa non-EPC, penjualan jasa, penjualan produk non-pupuk, pembelian bahan baku, sewa, jasa pemeliharaan mekanik, pemakaian listrik, jasa pengangkutan gas dan pengelola aset program manfaat pasti/ <i>Subsidy fertiliser sales, non-subsidy fertiliser sales, revenue from EPC, revenue from non-EPC, rendering of services, non-fertiliser sales, purchase of raw material, rental, mechanic maintenance, electricities, gas transportation services and defined benefit plan asset manager</i>
PT Aneka Jasa Grhadika, MNK, PT Petrocentral, PT Gresik Cipta Sejahtera (Persero), PT Petrocentral, PT Petrokopindo Cipta Selaras	Entitas asosiasi/ <i>Associates</i>	Penjualan pupuk non-subsidi, penjualan non-pupuk, sewa dan pembelian non-bahan baku/ <i>Non-subsidy fertiliser sales, non-fertiliser sales, rental and purchase of non-raw materials</i>
PT Kaltim Jordan Abadi, PT Petro Jordan Abadi ("PJA")	Ventura bersama/ <i>Joint ventures</i>	Penjualan non-pupuk, pembelian bahan baku/ <i>Non-fertiliser sales, purchase of raw materials</i>

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/89 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) 29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

Nature of relationships with related parties (continued)

Pihak-pihak yang berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ <i>Relationship with the related parties</i>	Transaksi/ <i>Transaction</i>
RDMP Balikpapan JO	Ventura Bersama/ <i>Joint Venture</i>	Pendapatan, piutang usaha, piutang lainnya, pendapatan yang masih harus diterima, pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan/ <i>Revenues, trade receivables, other receivables, construction contract work in progress – due from customers</i>
Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Personil manajemen kunci (terdiri dari anggota direksi dan komisaris dan seluruh pihak yang melapor secara langsung kepada direksi)/ <i>Key management personnel (consisting of members of the board of directors and commissioners and those who directly report to the board of directors)</i>	Kompensasi dan remunerasi/ <i>Compensation and remuneration</i>
Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:		<i>Significant transactions with related parties are as follows:</i>
<u>Piutang usaha:</u>		<u>Trade receivables:</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PJA	225,431	41,938
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	155,529	497,480
PT Gresik Cipta Sejahtera	103,761	83,005
MNK	55,545	57,669
RDMP Balikpapan JO	64,076	43,546
PT Industri Gula Glenmore	54,166	59,933
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	53,991	71,306
Lainnya (masing-masing di bawah Rp30.000)	<u>203,238</u>	<u>218,782</u>
	<u>915,737</u>	<u>1,073,659</u>
Cadangan penurunan nilai	<u>(63,747)</u>	<u>(35,796)</u>
Jumlah	<u>851,990</u>	<u>1,037,863</u>
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0.66%</u>	<u>0.85%</u>

PJA
PT Pertamina (Persero)
and subsidiaries
PT Gresik Cipta Sejahtera
MNK
RDMP Balikpapan JO
PT Industri Gula Glenmore
PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero)
Others (each below Rp30,000)

Allowance for impairment

Total

As a percentage
of total assets

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/90 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)			29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)
<u>Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan:</u>			<u>Construction contract work in progress – due from customers:</u>
	2021	2020	
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	830,912	2,031,075	PT Pertamina (Persero) and subsidiaries
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	336,615	578,042	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RDMP Balikpapan JO	49,935	87,713	RDMP Balikpapan JO
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	33,743	65,532	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	<u>52,283</u>	-	Others (each below Rp10,000)
Jumlah	<u>1,303,488</u>	<u>2,762,362</u>	Total
Persentase terhadap jumlah aset	<u>1.01%</u>	<u>2.26%</u>	As a percentage of total assets
<u>Utang usaha:</u>			<u>Trade payables:</u>
	2021	2020	
PT Semen Indonesia (Persero) dan entitas anak	49,693	-	PT Semen Indonesia (Persero) and subsidiaries
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	30,790	263,674	PT Pertamina (Persero) and subsidiaries
PT Krakatau Engineering	-	35,503	PT Krakatau Engineering
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	23,238	31,248	PT Pembangunan Perumahan (Persero)
PT Perta Arun Gas	8,662	24,417	PT Perta Arun Gas
Lainnya (masing-masing di bawah Rp20.000)	<u>167,263</u>	<u>196,115</u>	Others (each below Rp20,000)
Jumlah	<u>279,646</u>	<u>550,957</u>	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0.49%</u>	<u>1.00%</u>	As a percentage of total liabilities
<u>Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi:</u>			<u>Amounts due to customers from construction contract work:</u>
	2021	2020	
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	-	22,852	PT Pertamina (Persero) and subsidiaries
PT Perta Arun Gas	-	14,352	PT Perta Arun Gas
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	<u>-</u>	<u>125</u>	Others (each below Rp10,000)
Jumlah	<u>-</u>	<u>37,329</u>	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0.00%</u>	<u>0.07%</u>	As a percentage of total liabilities

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/91 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)			29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)
<u>Pendapatan:</u>			<u>Revenues:</u>
	2021	2020	
Penjualan produk (Catatan 21)	1,998,444	2,219,930	<i>Sales of products (Note 21)</i>
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah (Catatan 22)	25,258,692	25,712,148	<i>Reimbursement of subsidy from Government (Note 22)</i>
Pendapatan jasa (Catatan 23)	<u>2,700,542</u>	<u>6,597,704</u>	<i>Services revenue (Note 23)</i>
Jumlah	<u>29,957,678</u>	<u>34,529,782</u>	<i>Total</i>
	2021	2020	
Pemerintah Indonesia (Catatan 22)	25,258,692	25,712,148	<i>Government of Indonesia (Note 22)</i>
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	1,459,774	5,179,517	<i>PT Pertamina (Persero) and subsidiaries</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	549,115	1,345,010	<i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
PT Gresik Cipta Sejahtera	514,759	283,351	<i>PT Gresik Cipta Sejahtera</i>
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	428,765	181,519	<i>PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)</i>
PT Pertani (Persero)	402,118	416,257	<i>PT Pertani (Persero)</i>
MNK	307,061	301,331	<i>MNK</i>
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	216,949	171,533	<i>PT Trans Pacific Petrochemical Indotama</i>
PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan entitas anak	213,031	120,402	<i>PT Perkebunan Nusantara (Persero) and subsidiaries</i>
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	96,599	89,265	<i>PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)</i>
PT Petrocentral	78,319	138,527	<i>PT Petrocentral</i>
PT Kaltim Jordan Abadi	52,694	101,030	<i>PT Kaltim Jordan Abadi</i>
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100.000)	<u>379,802</u>	<u>489,892</u>	<i>Others (each below Rp100,000)</i>
Jumlah	<u>29,957,678</u>	<u>34,529,782</u>	<i>Total</i>
Persentase terhadap jumlah pendapatan	<u>38.11%</u>	<u>48.04%</u>	<i>As a percentage of total revenue</i>

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/92 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) **29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)**

Pembelian:

Purchases:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	16,882,530	13,201,477	PT Pertamina (Persero) and subsidiaries
PJA	2,166,267	1,593,777	PJA
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	585,242	24,545	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Bukit Asam Tbk	570,848	327,269	PT Bukit Asam Tbk
PT Fokus Jasa Mitra	374,770	307,724	PT Fokus Jasa Mitra
PT Petrokopindo Cipta Selaras	355,482	344,802	PT Petrokopindo Cipta Selaras
PT Bhanda Ghara Rekza (Persero)	250,397	216,745	PT Bhanda Ghara Rekza (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	192,711	79,222	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Aneka Jasa Grhadika	183,021	194,362	PT Aneka Jasa Grhadika
PT Pertamina Gas	173,130	159,525	PT Pertamina Gas
PT Graha Sarana Gresik	173,115	169,778	PT Graha Sarana Gresik
PT Gresik Cipta Sejahtera	155,523	190,976	PT Gresik Cipta Sejahtera
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100.000)	<u>276,301</u>	<u>60,575</u>	Others (each below Rp100,000)
Jumlah	<u><u>22,339,337</u></u>	<u><u>16,870,777</u></u>	Total
Persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan	<u><u>35.20%</u></u>	<u><u>27.77%</u></u>	As a percentage of total cost of revenues

Kompensasi manajemen kunci:

Key management compensation:

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of the Company for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Direksi			Board of Directors
Gaji dan tunjangan rumah	23,965	23,101	Salary and home allowance
Tunjangan hari raya	1,463	-	Holiday allowance
Tantiem yang masih harus dibayar*	<u>74,155</u>	<u>79,551</u>	Accrued tantiem*
	99,583	102,652	
Imbalan pascakerja	<u>8,325</u>	<u>5,938</u>	Post-employment benefit
	<u>107,908</u>	<u>108,590</u>	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Gaji dan tunjangan rumah	13,245	10,837	Salary and home allowance
Tunjangan hari raya	789	-	Holiday allowance
Tantiem yang masih harus dibayar*	<u>36,945</u>	<u>28,868</u>	Accrued tantiem*
	50,979	39,705	
Imbalan pascakerja	<u>4,269</u>	<u>2,599</u>	Post-employment benefit
	<u>55,248</u>	<u>42,304</u>	
Jumlah	<u><u>163,156</u></u>	<u><u>150,894</u></u>	Total

*) Tantiem menggunakan nilai akrual tahun berjalan

Tantiem using current year accrued amount *)

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/93 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

	31 Desember/December 2021			
	Jumlah/ <i>Total</i>	Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>At amortised cost</i>	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>At fair value through other comprehensive income</i>	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	17,453,305	17,453,305	-	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	3,324,666	3,324,666	-	Trade receivables
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	5,880,216	5,880,216	-	Subsidy receivables from the Government of Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih	981,471	981,471	-	Unbilled subsidy receivables
Piutang lainnya	979,595	979,595	-	Other receivables
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan	1,543,717	1,543,717	-	Construction contract work in progress – due from customers
Aset lancar lainnya	1,169,457	1,169,457	-	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	1,983,245	1,940,421	42,824	Other non-current assets
Jumlah	33,315,672	33,272,848	42,824	Total
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	6,101,227	6,101,227	-	Trade payables
Utang lainnya	1,642,704	1,642,704	-	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	6,985,668	6,985,668	-	Accrued liabilities
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	95,627	95,627	-	Subsidy payable to the Government of Indonesia
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	2,210	2,210	-	Amounts due to customer for construction contract work
Pinjaman bank jangka pendek	7,308,865	7,308,865	-	Short-term bank loans
Bagian lancar pinjaman jangka panjang	4,208,700	4,208,700	-	Current maturities of non-current borrowings
Pinjaman jangka panjang	19,945,845	19,945,845	-	Non-current borrowings
Liabilitas tidak lancar lainnya	66,909	66,909	-	Other non-current liabilities
Jumlah	46,357,755	46,357,755	-	Total

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/94 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) 30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	31 Desember/December 2020			
	Jumlah/ Total	Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ At amortised cost	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/At fair value through other comprehensive income	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	12,405,518	12,405,518	-	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	3,613,966	3,613,966	-	Trade receivables
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	5,719,393	5,719,393	-	Subsidy receivables from the Government of Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih	479,981	479,981	-	Unbilled subsidy receivables
Piutang lainnya	795,648	795,648	-	Other receivables
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan	3,111,002	3,111,002	-	Construction contract work in progress – due from customers
Aset lancar lainnya	812,500	812,500	-	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	1,867,955	1,829,910	38,045	Other non-current assets
Jumlah	<u>28,805,963</u>	<u>28,767,918</u>	<u>38,045</u>	Total
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	3,621,211	3,621,211	-	Trade payables
Utang lainnya	1,335,066	1,335,066	-	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	6,467,251	6,467,251	-	Accrued liabilities
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	126,633	126,633	-	Subsidy payable to the Government of Indonesia
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	55,820	55,820	-	Amounts due to customer for construction contract work
Pinjaman bank jangka pendek	8,313,717	8,313,717	-	Short-term bank loans
Bagian lancar pinjaman jangka panjang	3,145,122	3,145,122	-	Current maturities of non-current borrowings
Pinjaman jangka panjang	25,399,325	25,399,325	-	Non-current borrowings
Liabilitas tidak lancar lainnya	27,833	27,833	-	Other non-current liabilities
Jumlah	<u>48,491,978</u>	<u>48,491,978</u>	<u>-</u>	Total

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/95 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos berbagai risiko keuangan diantaranya: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko keuangan dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari ketidakpastian atau perubahan tak terduga dalam kondisi pasar dan kinerja keuangan konsolidasian Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko keuangan yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

Faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

(i) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Risiko suku bunga dari kas di bank dan deposito tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Grup memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga nilai wajar. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Manajemen telah memulai diskusi dengan pemberi pinjaman untuk membahas lebih lanjut mengenai transisi penggantian LIBOR dan JIBOR serta untuk menganalisa risiko pada perubahan tingkat bunga. Pada 31 Desember 2021, acuan tingkat bunga alternatif belum ditentukan.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks as follows: market risk (including foreign currency exchange rates risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential losses arising from uncertainties or unexpected changes in market conditions and the Group's consolidated financial performance.

The Group uses various methods to measure financial risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange and other price risks and aging analysis for credit risk.

Financial risk factor

a. Market risk

(i) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from short-term borrowings and long-term borrowings. The interest rate risk from cash in bank and deposits is not significant and all other financial instruments are non-interest bearing. The Group has borrowings with fixed and floating interest rates. Borrowings with floating interest rates are exposed to cashflow interest rate risk. Borrowings with fixed rates exposes the Group to fair value interest risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

Management has started discussions with the lenders to find out more about the transition to LIBOR and JIBOR replacement as well as to analyse the risk of changes in interest rates. As at 31 December 2021, the alternative benchmark has not yet been determined.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/96 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut berisi rincian semua liabilitas keuangan yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2021 yang mengacu pada LIBOR dan JIBOR dan belum bertransisi ke acuan suku bunga alternatif:

Pinjaman bank

Berbagai skenario disimulasikan dengan mempertimbangkan pembiayaan kembali, pembaruan posisi yang ada, pembiayaan alternatif dan lindung nilai jika diperlukan. Berdasarkan skenario ini, Grup menghitung dampaknya terhadap laba rugi pada perubahan suku bunga yang ditentukan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika tingkat suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan panjang 100 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba rugi untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp313.287 (31 Desember 2020: Rp366.645).

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2021 jika Rp melemah/menguat sebesar 10% terhadap USD dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak tahun berjalan akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp422.861 (31 Desember 2020: lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp357.623), terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan/kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Financial risk factor (continued)

a. Market risk (continued)

(i) Interest rate risk (continued)

The following table contains details of all of the financial liabilities of the Group as at 31 December 2021 which have reference to LIBOR and JIBOR and have not yet transitioned to an alternative interest rate benchmark:

16,201,584

Bank loans

Various scenarios are simulated taking into consideration refinancing, renewal of existing positions, alternative financing and hedging if necessary. Based on these scenarios, the Group calculates the impact on profit or loss at a defined interest rate shift.

As at 31 December 2021, if interest rates on short-term and long-term borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit or loss for the year would have been Rp313,287 (31 December 2020: Rp366,645), lower/higher.

(ii) Foreign exchange risk

The Group is facing foreign exchange risk arising from various currency exposures. Foreign exchange risk primarily arises from recognised monetary assets and liabilities that are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. These exposures are managed partially by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency.

As at 31 December 2021, if the Rp had weakened/strengthened by 10% against the USD with all other variables held constant, the pre-tax profit for the year would have been Rp422,861 lower or higher (31 December 2020: Rp357,623 lower or higher), respectively, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

2021

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/97 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing
(lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Grup didenominasikan dalam mata uang USD, dan EUR. Deviasi pergerakan kurs untuk mata uang tersebut adalah masing-masing sebesar 1,36%, dan 4,57%.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika nilai tukar Rp terhadap mata uang asing meningkat sebesar deviasi yang telah disebutkan diatas dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak tahun berjalan akan menjadi lebih rendah sebesar Rp57.509 terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, piutang usaha, pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan, utang usaha, liabilitas yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek, dan pinjaman bank jangka panjang dalam mata uang asing.

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp33.308.575 (31 Desember 2020: Rp28.797.618). Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, piutang usaha, piutang subsidi, aset lancar dan tidak lancar lainnya, piutang lainnya dan pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan.

Semua kas di bank dan aset keuangan tidak lancar lainnya yang merupakan saldo bank yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan tersebut minimal.

Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dan piutang subsidi dari Pemerintah yang belum tertagih dianggap dapat diabaikan, sebab pihak yang bersangkutan merupakan Pemerintah Indonesia.

Terkait piutang retensi dan pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan, Grup mempunyai jaminan dalam bentuk garansi pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh bank atau institusi keuangan.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Financial risk factor (continued)

a. Market risk (continued)

(ii) Foreign exchange risk (continued)

As at 31 December 2021, monetary assets and liabilities held by the Group are denominated in USD and EUR. The deviation for such currencies is 1.36% and 4.57%, respectively.

As at 31 December 2021, if the exchange rates of the Rp against foreign currencies appreciated by the deviation aforementioned with all other variables held constant, profit before tax for the year would have been Rp57,509 lower, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables, construction contract work in progress – due from customers, trade payables, accrued liabilities, short-term bank loans and long-term bank loans denominated in foreign currencies.

b. Credit risk

As at 31 December 2021, the total maximum exposure from credit risk was Rp33,308,575 (31 December 2020: Rp28,797,618). Credit risk arises from cash in banks, trade receivables, subsidy receivables, other current and non-current assets, other receivables and construction contract work in progress – due from customers.

All the cash in banks and other non-current financial assets in the form of restricted deposits are placed in banks with good credit rating. Therefore, the Group believes the credit risk of such financial assets is minimal.

The credit risk on subsidy receivables and unbilled subsidy receivables from the Government are considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.

Related to retention receivables and construction contract work in progress – due from customers, the Group receives performance guarantees issued by banks or financial institutions.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/98 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Selain itu, Grup juga memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan kepada pelanggan dengan sejarah kredit yang baik. Grup memiliki penilaian atas pelanggan dalam hal kemampuan membayar piutang saat jatuh tempo. Penilaian setiap pelanggan didasarkan pada kemampuan keuangan pelanggan serta pengalaman sebelumnya.

Atas dasar itu, penyisihan kerugian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ditetapkan sebagai berikut untuk piutang usaha dan piutang lainnya:

	31 Desember/December 2021					Jumlah/ Total	
	Lancar/ Current	Sudah jatuh tempo 1-90 hari/ Overdue 1-90 days	Sudah jatuh tempo 91-120 hari/ Overdue 91-120 days	Sudah jatuh tempo 121-365 hari/ Overdue 121-365 days	Sudah jatuh tempo >365 hari/ Overdue >365 days		
Tingkat kerugian yang diharapkan	0.21%	1.47%	18.99%	6.11%	65.34%		Expected loss rate
Piutang usaha	2,533,230	500,675	51,676	186,495	750,970	4,023,046	Trade receivables
Piutang lainnya	621,397	-	-	-	-	621,397	Other receivables
Piutang lainnya – tidak lancar	-	-	-	-	535,848	535,848	Other receivables – non-current
Penyisihan kerugian	(6,658)	(7,359)	(9,812)	(11,388)	(840,813)	(876,030)	Provision

	31 Desember/December 2020					Jumlah/ Total	
	Lancar/ Current	Sudah jatuh tempo 1-90 hari/ Overdue 1-90 days	Sudah jatuh tempo 91-120 hari/ Overdue 91-120 days	Sudah jatuh tempo 121-365 hari/ Overdue 121-365 days	Sudah jatuh tempo >365 hari/ Overdue >365 days		
Tingkat kerugian yang diharapkan	0.33%	1.42%	6.28%	6.39%	86.48%		Expected loss rate
Piutang usaha	2,519,202	766,744	230,904	263,497	948,791	4,729,138	Trade receivables
Piutang lainnya	486,910	-	-	-	-	486,910	Other receivables
Piutang lainnya – tidak lancar	-	-	-	-	489,115	489,115	Other receivables – non-current
Penyisihan kerugian	(9,846)	(10,883)	(14,510)	(16,842)	(1,243,468)	(1,295,549)	Provision

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama dan hari lewat jatuh tempo. Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran pelanggan selama 36 bulan sebelum 1 Januari 2021 atau 31 Desember 2021 serta kerugian kredit historis yang dialami, bila ada. Tingkat kerugian historis kemudian disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi forward-looking mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Financial risk factor (continued)

b. Credit risk (continued)

In addition, the Group also ensures that sales are only made to customers with a good credit history. The Group has an assessment of customers in terms of ability to pay receivables when due. Each customer's valuation is based on the customer's financial ability and previous experience.

On that basis, the loss allowances as at 31 December 2021 and 2020 were determined as follows for trade receivables and other receivables:

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due. The expected loss rates are based on the profile of payments from customers over a period of 36 months before 1 January 2021 or 31 December 2021 and historic credit losses, if any. The historical loss rates are then adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/99 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Grup telah mencadangkan nilai piutang usaha dan piutang lainnya yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai.

Seluruh saldo piutang usaha dan piutang lainnya di atas yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai sebagian besar berasal dari pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi yang sudah ada lebih dari 12 bulan yang tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk penjualan pupuk, nonpupuk, dan jasa lainnya yang telah dilakukan.

Kebijakan umum Grup untuk penjualan pupuk, nonpupuk, dan jasa lainnya untuk pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah sebagai berikut:

- (i) memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik;
- (ii) menerima pelanggan baru dan penjualan pupuk, nonpupuk, dan jasa lainnya yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kewenangan Grup; dan
- (iii) meminta pembayaran dimuka untuk penjualan pupuk dan nonpupuk untuk pelanggan lama dan baru.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengelola risiko likuiditas dan memastikan ketersediaan kas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana. Selain itu, Grup juga memiliki fasilitas stand-by loan yang dapat ditarik sesuai dengan permintaan untuk mendanai kegiatan operasi pada saat diperlukan.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Financial risk factor (continued)

b. Credit risk (continued)

As at 31 December 2021 and 2020, the Group had provided the provision for the balance of trade receivables and other receivables which were past due and impaired.

The entire balance from trade receivables and other receivables is mostly derived from third party and related party customers which have existed for more than 12 months and are spread over a large number of customers. The Group also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered.

The Group's general policies for sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered to new and existing customers are as follows:

- (i) selecting customers with strong financial conditions and good reputations;
- (ii) acceptance of new customers and sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered being approved by the authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy; and
- (iii) requesting advance payments for sales of fertiliser and non-fertiliser for recurring and new customers.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the Group's cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. To manage its liquidity risk and ensuring cash availability, the Group monitors its level of cash and cash equivalents, and maintains these at a level deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan maturity profiles and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds. In addition, the Group has a stand-by loan facility which can be withdrawn upon request to fund its operations when needed.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/100 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

c. Liquidity risk (continued)

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

2021					
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	1-5 tahun/ <i>years</i>	Di atas 5 tahun/ <i>Over 5 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	6,101,227	-	-	6,101,227	Trade payables
Utang lainnya	1,642,704	-	-	1,642,704	Other payables
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	95,627	-	-	95,627	Subsidy payable to the Government of Indonesia
Liabilitas yang masih harus dibayar	6,985,668	-	-	6,985,668	Accrued liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	8,182,296	-	-	8,182,296	Short-term bank loans
Pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang	4,252,196	15,410,837	660,950	20,323,983	Long-term bank loans and other loans
Utang obligasi	2,261,279	7,817,914	814,400	10,893,593	Bonds payables
Liabilitas sewa	233,323	29,266	-	262,589	Lease liabilities
Jumlah	29,754,320	23,258,017	1,475,350	54,487,687	Total
2020					
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	1-5 tahun/ <i>years</i>	Di atas 5 tahun/ <i>Over 5 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	3,621,211	-	-	3,621,211	Trade payables
Utang lainnya	1,335,066	-	-	1,335,066	Other payables
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	126,633	-	-	126,633	Subsidy payable to the Government of Indonesia
Liabilitas yang masih harus dibayar	6,467,251	-	-	6,467,251	Accrued liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	9,307,231	-	-	9,307,231	Short-term bank loans
Pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang	5,459,803	20,636,112	-	26,095,915	Long-term bank loans and other loans
Utang obligasi	501,631	7,064,312	458,733	8,024,676	Bonds payables
Liabilitas sewa	103,599	89,266	2,198	195,063	Lease liabilities
Jumlah	26,922,425	27,789,690	460,931	55,173,046	Total

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/101 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

d. Estimasi nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajarnya:

	2021		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Utang obligasi	9,037,933	9,437,775	<i>Bonds payable</i>
Pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap	1,850,000	2,129,760	<i>Long-term bank loans with fixed interest rate</i>
	2020		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Utang obligasi	6,289,446	6,447,758	<i>Bonds payable</i>
Pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap	927,353	1,208,910	<i>Long-term bank loans with fixed interest rate</i>

Nilai wajar dari obligasi diestimasi menggunakan harga pasar yang dikutip pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan diklasifikasikan sebagai tingkat 1 dalam hierarki nilai wajar.

Nilai wajar dari pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap diestimasi menggunakan *input* tingkat 2 dalam hierarki nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

d. Fair value estimation

The table below describes the carrying amounts and fair value of financial liabilities that are not presented by the Group at fair value:

The fair value of bonds payable is estimated using the quoted market price as at 31 December 2021 and 2020 and is within level 1 of the fair value hierarchy.

The fair value of long-term bank loan with fixed interest rate is estimated using the inputs within level 2 of the fair value hierarchy as at 31 December 2021 and 2020.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/102 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

e. Manajemen risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

e. Capital risk management

In managing the capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowings and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach regarding capital management during the year.

**32. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS**

a. Aktivitas investasi nonkas yang signifikan

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan aktivitas nonkas adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aktivitas investasi		
Perolehan aset tetap melalui utang lainnya dan beban akrual	315,370	196,434
Perolehan aset tetap melalui uang muka	152,090	42,997
Perolehan aset tetap melalui reklasifikasi persediaan	63,439	-
Perolehan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	40,494	10,628
Penambahan investasi pada ventura bersama melalui konversi pinjaman	10,400	42,382
Perolehan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	154,252	204,168
Perolehan aset hak-guna melalui sewa dibayar di muka	-	16,550
Aktivitas pendanaan		
Konversi dari utang usaha menjadi pinjaman bank	326,750	-

**32. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH
FLOWS**

a. Significant non-cash investing activities

Supplementary information to the consolidated statements of cash flow relating to non-cash activities is as follows:

<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Investing activities
	<i>Acquisition of fixed assets through other payables and accrued expenses</i>
	<i>Acquisition of fixed assets through advances</i>
	<i>Acquisition of fixed assets through reclassification of inventories</i>
	<i>Acquisition of fixed assets through capitalisation of borrowing cost</i>
	<i>Addition of investment in joint venture through loan conversion</i>
	<i>Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities</i>
	<i>Acquisition of right-of-use assets through rent prepayments</i>
	Financing activities
	<i>Conversion from trade payables to bank loans</i>

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/103 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**32. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS (lanjutan)**

b. Rekonsiliasi utang bersih

Transaksi di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

**32. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH
FLOWS (continued)**

b. Net debt reconciliation

Table below presents a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2021 and 2020, as follows:

	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	Pinjaman/ Borrowings	Jumlah/ Total	
Saldo pada 1 Januari 2020	<u>1,092</u>	<u>48,201,113</u>	<u>48,202,205</u>	<i>Balance as at 1 January 2020</i>
Arus kas masuk	-	45,605,211	45,605,211	<i>Cash in flows</i>
Arus kas keluar	(186,662)	(57,181,466)	(57,368,128)	<i>Cash out flows</i>
Akuisisi – liabilitas sewa	204,168	-	204,168	<i>Acquisition – lease liabilities</i>
Penyesuaian saldo awal berdasarkan PSAK 73	162,294	-	162,294	<i>Adjustment to the beginning balance based on SFAS 73</i>
Transaksi nonkas lainnya	<u>(7,175)</u>	<u>59,589</u>	<u>52,414</u>	<i>Other non-cash transactions</i>
Saldo pada 31 Desember 2020	<u>173,717</u>	<u>36,684,447</u>	<u>36,858,164</u>	<i>Balance as at 31 December 2020</i>
Arus kas masuk	-	20,114,688	20,114,688	<i>Cash in flows</i>
Arus kas keluar	(213,532)	(25,754,251)	(25,967,783)	<i>Cash out flows</i>
Akuisisi – liabilitas sewa	154,252	-	154,252	<i>Acquisition – lease liabilities</i>
Konversi dari utang usaha	-	326,750	326,750	<i>Conversion from trade payables</i>
Transaksi nonkas lainnya	<u>29,985</u>	<u>(52,646)</u>	<u>(22,661)</u>	<i>Other non-cash transactions</i>
Saldo pada 31 Desember 2021	<u>144,422</u>	<u>31,318,988</u>	<u>31,463,410</u>	<i>Balance as at 31 December 2021</i>

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/104 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The Group's monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

		2021		2020		
		Mata uang/ Currency (000)	Setara Rp/ Rp equivalent	Mata uang/ Currency (000)	Setara Rp/ Rp equivalent	
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	USD	245,184	3,498,531	58,395	823,661	Cash and cash equivalents
	Lainnya/Others		10,731		6,272	
Piutang usaha	USD	51,513	735,036	68,167	961,498	Trade receivables
	Lainnya/Others		-		5	
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi – dari pelanggan	USD	<u>71,357</u>	<u>1,018,186</u>	<u>80,395</u>	<u>1,133,976</u>	Construction contract work in progress – from customers
Jumlah aset			<u>5,262,484</u>		<u>2,925,412</u>	Total assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	USD	115,843	1,652,965	68,557	967,003	Trade payables
	EUR	1,754	28,281	1,039	17,999	
	Lainnya/Others		16,013		6,409	
Liabilitas yang masih harus dibayar	USD	235,870	3,365,629	208,374	2,939,118	Accrued liabilities
	EUR	3,122	50,348	5,036	87,274	
	Lainnya/Others		7		4,470	
Pinjaman bank jangka pendek	USD	169,000	2,411,461	15,932	224,723	Short-term bank loan
Pinjaman bank jangka panjang	USD	<u>139,247</u>	<u>1,986,917</u>	<u>152,106</u>	<u>2,145,460</u>	Long-term bank loan
Jumlah liabilitas			<u>9,511,621</u>		<u>6,392,456</u>	Total liabilities
Liabilitas moneter – bersih			<u>(4,249,137)</u>		<u>(3,467,044)</u>	Net monetary liabilities

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Monetary assets and liabilities mentioned above are translated using the Bank Indonesia closing rate as at 31 December 2021 and 2020.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain Rp pada tanggal 31 Desember 2021 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, liabilitas moneter bersih akan naik sekitar Rp18.288.

If assets and liabilities in currencies other than Rp as at 31 December 2021 are translated using the exchange rate as at the issuance date of the consolidated financial statements, the total net monetary liabilities will increase by approximately Rp18,288.

34. INFORMASI SEGMENT USAHA

Untuk kepentingan pelaporan manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut:

a. Pupuk dan amoniak

Segmen pupuk amoniak melakukan kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa di bidang perpupukan.

b. Jasa konstruksi

Segmen jasa konstruksi melakukan kegiatan usaha dalam *engineering, procurement, dan construction* ("EPC").

34. SEGMENT INFORMATION

For management reporting purposes, the Group is organised into business units based on their products and services and has three reportable operating segments as follows:

a. Fertiliser and ammonia

The ammonia fertiliser segment involves in production, trading and services in fertiliser.

b. Construction services

The construction services segment involves in *engineering, procurement and construction* ("EPC").

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/105 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Untuk kepentingan pelaporan manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut: (lanjutan)

c. Lainnya

Segmen lainnya melakukan kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi, pergudangan, dan kegiatan terkait lainnya.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba segmen dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

34. SEGMENT INFORMATION (continued)

For management reporting purposes, the Group is organised into business units based on their products and services and has three reportable operating segments as follows: (continued)

c. Other

The other segment involves in transportation business activities, expedition, storage and other related activities.

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of decision-making about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on segment income and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements.

31 Desember/December 2021						
<u>Sebelum eliminasi/Before elimination</u>						
	<u>Pupuk dan amoniak/ Ammonia and fertiliser</u>	<u>Jasa konstruksi/ Construction services</u>	<u>Lainnya/ Other</u>	<u>Eliminasi/ Elimination</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
PENDAPATAN						REVENUES
Pendapatan eksternal	75,815,808	3,296,040	1,970,750	(2,479,462)	78,603,136	External revenues
Pendapatan antar segmen	<u>1,278,643</u>	<u>14,699</u>	<u>5,363,168</u>	<u>(6,656,510)</u>	<u>-</u>	Inter-segment
Pendapatan bersih	<u>77,094,451</u>	<u>3,310,739</u>	<u>7,333,918</u>	<u>(9,135,972)</u>	<u>78,603,136</u>	Net revenues
LABA USAHA						OPERATING INCOME
Beban pokok pendapatan	(58,241,456)	(6,659,990)	(2,687,499)	4,119,156	(63,469,789)	Cost of revenues
Beban penjualan	(2,046,532)	(3,165)	(10,860)	780,052	(1,280,505)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi (Beban)/pendapatan lainnya – bersih	(2,486,927)	(455,803)	(1,155,169)	74,775	(4,023,124)	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan	97,079	54,050	35,064	(36,013)	150,180	Other (expenses)/ income – net
Beban keuangan	117,650	3,376	719,202	(613,885)	226,343	Finance income
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(1,733,295)	(174,040)	(698,190)	558,031	(2,047,494)	Finance costs
	<u>83,447</u>	<u>225,078</u>	<u>-</u>	<u>(12,507)</u>	<u>296,018</u>	Share in net income of associates and joint ventures
Laba sebelum pajak	12,884,417	(3,699,755)	3,536,466	(4,266,363)	8,454,765	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	<u>(3,222,486)</u>	<u>(12,373)</u>	<u>(85,231)</u>	<u>-</u>	<u>(3,320,090)</u>	Income tax expense
Laba tahun berjalan	<u>9,661,931</u>	<u>(3,712,128)</u>	<u>3,451,235</u>	<u>(4,266,363)</u>	<u>5,134,675</u>	Profit for the year
LAPORAN POSISI KEUANGAN						STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	115,537,608	7,785,388	45,302,140	(40,161,964)	128,463,172	Segment assets
Liabilitas segmen	45,413,830	13,415,576	11,549,016	(13,855,226)	56,523,196	Segment liabilities
Pengeluaran modal	3,206,631	13,609	327,571	(280,281)	3,267,530	Capital expenditures

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/106 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

34. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember/December 2020					
	Sebelum eliminasi/Before elimination					
	Pupuk dan amoniak/ Ammonia and fertiliser	Jasa konstruksi/ Construction services	Lainnya/ Other	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN						REVENUES
Pendapatan eksternal	63,927,098	8,052,663	1,273,188	(1,375,376)	71,877,573	External revenues
Pendapatan antar segmen	716,917	78,721	2,750,947	(3,546,585)	-	Inter-segment
Pendapatan bersih	64,644,015	8,131,384	4,024,135	(4,921,961)	71,877,573	Net revenues
LABA USAHA						OPERATING INCOME
Beban pokok pendapatan	(52,876,197)	(8,980,610)	(2,102,432)	3,203,393	(60,755,846)	Cost of revenues
Beban penjualan	(2,002,020)	(742)	(30,030)	846,023	(1,186,769)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(2,658,847)	(635,671)	(880,197)	150,625	(4,024,090)	General and administrative expenses
(Beban)/pendapatan lainnya – bersih	(47,681)	(71,046)	4,842	8,543	(105,342)	Other (expenses)/income – net
Pendapatan keuangan	128,974	24,095	772,628	(641,415)	284,282	Finance income
Beban keuangan	(2,638,043)	(233,334)	(662,078)	558,106	(2,975,349)	Finance costs
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	91,375	230,657	-	(85,143)	236,889	Share in net income of associates and joint ventures
Laba sebelum pajak	4,641,576	(1,535,267)	1,126,868	(881,829)	3,351,348	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(956,987)	(21,646)	(47,134)	-	(1,025,767)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	3,684,589	(1,556,913)	1,079,734	(881,829)	2,325,581	Profit for the year
LAPORAN POSISI KEUANGAN						STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	109,243,891	9,940,425	39,316,793	(36,005,553)	122,495,556	Segment assets
Liabilitas segmen	44,600,925	11,878,541	8,355,341	(9,702,068)	55,132,739	Segment liabilities
Pengeluaran modal	3,347,880	14,267	110,598	(171,479)	3,301,266	Capital expenditures

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Pengadaan gas bumi

Grup menandatangani perjanjian pengadaan gas bumi untuk produksi pupuk dengan pihak berelasi dan pihak ketiga dengan kapasitas volume gas sebesar 39 MMSCFD hingga 3.275 MMSCFD. Perjanjian pengadaan gas bumi tersebut berlaku efektif dalam kurun waktu hingga 31 Oktober 2030.

Pada tanggal 30 Juli 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 (“KEP134”) tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang menetapkan mengenai pengguna dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa pengguna dengan rekanannya, termasuk didalamnya Grup.

a. Supply of natural gas

The Group signed supply of natural gas agreements for fertiliser production with related parties and third parties with gas volume capacity of 39 MMSCFD to 3,275 MMSCFD. These natural gas supply agreements are valid up to 31 October 2030.

On 30 July 2021, the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia issued a decree No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 (“KEP134”) regarding Users and Prices of Certain Natural Gas in the Industrial Sector which stipulates certain users and prices of natural gas for several users and their partners, including the Group.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/107 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN
(lanjutan)

a. Pengadaan gas bumi (lanjutan)

Harga dan volume gas bumi tertentu yang telah ditetapkan untuk Grup melalui KEP134 adalah sebagai berikut:

Pengguna/ User	Sumber/ Source	Harga gas bumi/Natural gas price (USD/MMBTU)	Harga penyesuaian/ Price adjustments (USD/MMBTU)	Tarif penyaluran/ Distribution tariffs (USD/MMBTU) ¹⁾	Harga gas bumi tertentu di plant gate/Certain natural gas price in plant gate	Volume gas bumi/ Natural gas volume			
						2021	2022	2023	2024
PSP	WK Pertamina EP (Asset II), WK Corridor dan/ and WK Pandan	5.558 - 6.00 dan/and 5.25+0.3* (Ammonia-320)/35+0.5*(Urea-320)/30.66	5.10 - 6.00	0.48 - 0.90	6.00 - 6.038	8.00 - 100.00	9.00 - 100.00	9.00 - 100.00	9.00 - 95.00
PKC	WK Pertamina EP (Asset II), WK Offshore North West Java dan/and PT Pertamina EP - WK PEP (Asset II)	5.57 - 6.00	4.00 - 6.00	0.09 - 2.00	5.95 - 6.00	25.00 - 39.00	23.00 - 39.00	23.00 - 39.00	23.00 - 39.00
PKT	Prorata/Prorate Wks di/in Bontang, East Kalimantan dan/ and WK Sebuku	5.88 dan/and 5.75+0.2* (NH3-350)/32+0.3*(UreaG-329)/26; floor price 6.67	5.88 - 5.90	0.12	6.00 - 6.02	85.00 - 250.26	335.06	335.06	335.06
PKG	WK Kangean (TSB dan/and Pagerungan), WK West Madura Offshore, WK West Madura Strait (BD, MAC, MDA-MBH) dan/and PT Pertamina EP Cepu-JTB (melalui kontrak dengan /through contracts with PT Pertamina (Persero) atau/ or afiliasi/affiliates	6.20 - 7.66	5.50 - 6.80	0.55 - 0.90	6.05 - 7.00	6.00 - 63.00	3.75 - 42.75	15.00 - 85.00	15.00 - 85.00
PIM	PT Medco E&P Malaka - WK A dan/and BP Berau Ltd	7.03 dan/and 10.5%*REP	5.00 - 6.56	0.04 - 0.05 dan/and biaya midstream/ midstream expense 0.35 - 1.55	5.39 - 6.59	36.00 - 45.00	45.00	45.00	45.00

¹⁾ Termasuk PPN dan terdiri dari biaya transportasi, kecuali dinyatakan lain/Include VAT and consist of transportation expense, unless otherwise stated.

b. Perjanjian kontrak konstruksi

Grup memiliki beberapa kontrak konstruksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga berupa EPC yang terdiri dari pembangunan pipa transmisi, pembangkit listrik, dan kilang minyak dengan rentang waktu penyelesaian proyek dari 1 tahun hingga 3 tahun dengan kisaran harga kontrak antara Rp55.000 sampai dengan Rp13.038.613.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

a. Supply of natural gas (continued)

The prices and volumes of certain natural gas that have been set for the Group through KEP134 are as follows:

b. Construction contract agreements

The Group has several construction contracts with related parties and third parties, namely EPC consisting of construction of transmission pipelines, power plants and refineries with contract period between 1 up to 3 years and contract price ranging between Rp55,000 to Rp13,038,613.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/108 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN
(lanjutan)**

c. Sewa

Transaksi sewa sebagai penyewa

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa tanah, bangunan dan prasarana, pabrik dan peralatan, kendaraan dan alat berat dan kapal. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari 1 sampai dengan 15 tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan seperti yang dijelaskan pada Catatan 3. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 menyajikan saldo-saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aset hak-guna:		
Tanah	433,231	55,683
Bangunan dan prasarana	252,201	191,305
Kendaraan dan alat berat	<u>254,450</u>	<u>244,313</u>
	<u>939,882</u>	<u>491,301</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Liabilitas sewa:		
Lancar	74,740	94,181
Tidak lancar	<u>69,682</u>	<u>79,536</u>
	<u>144,422</u>	<u>173,717</u>

Penambahan aset hak-guna selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp196.959 (2020: Rp220.718).

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

c. Lease

Lease transactions as a lessee

The Group entered into some lease agreements which are mainly related to rent of land, building and infrastructure, plants and equipment, vehicles and heavy equipment and ships. Rental agreements are typically made for fixed periods of 1 to 15 years but may have extension options as described in Note 3. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants, but leased assets may not be used as collateral for borrowing purposes.

The consolidated statement of financial position as at 31 December 2021 and 2020 shows the following amounts related to leases:

	<i>Right-of-use assets:</i>
	<i>Land</i>
	<i>Buildings and infrastructure</i>
	<i>Vehicles and heavy equipments</i>
	<i>Lease Liabilities:</i>
	<i>Current</i>
	<i>Non-current</i>

Additions to the right-of-use assets during the year ended 31 December 2021 amounted to Rp196,959 (2020: Rp220,718).

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/109 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN
(lanjutan)**

c. Sewa (lanjutan)

Transaksi sewa sebagai penyewa (lanjutan)

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Penyusutan aset hak-guna:			<i>Depreciation of right-of-use assets:</i>
Tanah	30,974	14,721	<i>Land</i>
Bangunan dan prasarana	125,669	80,089	<i>Buildings and infrastructure</i>
Kendaraan dan alat berat	<u>103,084</u>	<u>65,371</u>	<i>Vehicles and heavy equipments</i>
	<u>259,727</u>	<u>160,181</u>	
Beban bunga	12,181	12,439	<i>Interest expense</i>
Beban berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah	14,573	9,363	<i>Expense related to low-value assets</i>
Beban berkaitan dengan sewa jangka pendek	<u>94,572</u>	<u>23,066</u>	<i>Expense related to short-term leases</i>
	<u>121,326</u>	<u>44,868</u>	

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp213.532 (2020: Rp186.662).

The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2021 was Rp213,532 (2020: Rp186,662).

Jumlah komitmen sewa untuk sewa jangka pendek yang dicatat sebagai beban dengan dasar garis lurus pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp222.645.

Total lease commitments from short-term leases accounted and recognised as expenses on a straight-line basis as at 31 December 2021 was Rp222,645.

36. KONTINJENSI

a. Sengketa Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur ("Dapen PKT")

PKT mengubah Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") menjadi Program Pensiun luran Pasti ("PPIP") sesuai dengan persetujuan surat dari OJK No. KEP-575/NB.2/2015 tanggal 31 Desember 2015. Sebagai kompensasi atas perubahan program tersebut, PKT telah membayar sebesar Rp517.350 di tahun 2016 yang merupakan liabilitas PPMP per tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal 28 Agustus 2017, OJK mengeluarkan hasil temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Dapen PKT tahun 2015 yang mengindikasikan adanya lebih saji dalam penilaian aset Dapen PKT yang menyebabkan kekurangan pembayaran atas dana PPMP yang dibayarkan oleh PKT pada tahun 2016 (yaitu deficit pendanaan). Dapen PKT juga menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2015 yang menunjukkan adanya defisit pendanaan dari temuan OJK.

36. CONTINGENCIES

a. Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur ("Dapen PKT") disputes

PKT converted the Defined Benefits Pension Plan ("PPMP") to a Defined Contribution Pension Plan ("PPIP") based on Financial Services Authority ("OJK")'s approval letter No. KEP-575/NB.2/2015 on 31 December 2015. As compensation for the conversion of the program, PKT has paid Rp517,350 to Dapen PKT in 2016 which was PPMP's liability as at 31 December 2015.

On 28 August 2017, OJK issued the audit findings of Dapen PKT's 2015 financial statements which indicated that there was an overstatement of Dapen PKT's asset valuation which resulted in an underpayment of the PPMP's liability paid by PKT in 2016 (i.e. funding deficit). Dapen PKT also restated its 2015 financial statements to reflect OJK's findings related to the funding deficit.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/110 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. KONTINJENSI (lanjutan)

a. Sengketa Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur ("Dapen PKT") (lanjutan)

Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Republik Indonesia ("Jamdatun") menerbitkan surat tanggal 2 November 2018 yang menyebutkan bahwa PKT bertanggung jawab atas defisit pendanaan Dapen PKT.

Untuk menanggapi keputusan Jamdatun, berdasarkan keputusan pemegang saham PKT tanggal 13 Maret 2019 dan surat yang diterbitkan oleh Komisaris PKT pada tanggal 22 Februari 2019 mengenai defisit pendanaan Dapen PKT, Pemegang Saham dan Komisaris menyetujui agar PKT mencatat provisi sebesar Rp469.332 (terdiri dari pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp394.618 dan Rp74.713). PKT telah membukukan cadangan sebesar Rp469.332 sebagai beban akrual pada tanggal 31 Desember 2018 dan membayar sebagian dana kepada Dapen PKT sebesar Rp196.986 pada tanggal 31 Mei 2019.

Di tahun 2020, berdasarkan rekomendasi OJK, Dapen PKT melakukan penilaian ulang atas aset-aset Dapen PKT menggunakan aktuaris independen, PT Quattro Asia Consulting yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Dapen PKT dengan laporan yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2020. Berdasarkan laporan aktuaris independen tersebut, defisit pendanaan Dapen PKT yang harus diprovisikan oleh PKT adalah sebesar Rp484.176 dan PKT telah menambahkan provisi atas defisit tersebut sebesar Rp14.844 pada tahun 2020.

Sisa defisit sebesar Rp287.190 telah diselesaikan PKT melalui pembayaran sebesar Rp212.019 pada tanggal 5 Januari 2021 dan melakukan saling hapus dengan piutang Dapen PKT atas pensiun karyawan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PKT sebesar Rp75.171.

b. Penggunaan tanah pelabuhan Gresik milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PKG melakukan perjanjian penggunaan tanah milik Perusahaan yang merupakan bagian dari Hak atas Pengelolaan Lahan ("HPL") milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III"), dimana perjanjian tersebut berakhir tanggal 31 Januari 2004. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, perjanjian tersebut belum diperpanjang dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara PKG dengan Pelindo III terkait (i) tumpang tindih wilayah HGB Perusahaan dengan HPL Pelindo III; (ii) area yang diklaim oleh Pelindo III meliputi wilayah perairan.

36. CONTINGENCIES (continued)

a. Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur ("Dapen PKT") disputes (continued)

Furthermore, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Republik Indonesia ("Jamdatun") issued a letter dated 2 November 2018 which stated that PKT was responsible for Dapen PKT's funding deficit.

In response to Jamdatun's decision, based on the decision letter of PKT's shareholders dated 13 March 2019 and a letter issued by PKT's Board of Commissioners on 22 February 2019 regarding Dapen PKT's funding deficit, the Shareholders and the Board of Commissioners agreed for PKT to record a provision of Rp469,332 (consisting of principal and interest amounting to Rp394,618 and Rp74,713, respectively). PKT has recorded provision amounting to Rp469,332 as accrued expenses as at 31 December 2018 and paid partially to Dapen PKT amounting to Rp196,986 on 31 May 2019.

In 2020, based on OJK's recommendation, Dapen PKT reassessed Dapen PKT's assets using an independent actuary, PT Quattro Asia Consulting which was appointed by the Board Supervisory of Dapen PKT with a report published on 10 January 2020. Based on the actuary's independent report, the funding deficit fund of Dapen PKT that had to be provisioned by PKT amounted to Rp484,176 and PKT has recorded the additional provision amounting to Rp14,844 in 2020.

The remaining deficit amounted to Rp287,190 and has been settled by PKT through payments amounting to Rp212,019 on 5 January 2021 and offsetting Dapen PKT's receivables on employee pensions paid in advance by PKT amounting to Rp75,171.

b. Usage of Gresik port owned by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PKG entered into land use agreement for the land owned by PKG which is part of Right of Management (Hak atas Pengelolaan Lahan or "HPL") owned by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III"), where the agreement had ended on 31 January 2004. Up to 31 December 2021, this agreement had not been extended due to different view between PKG and Pelindo III regarding: (i) overlapping of Hak Guna Bangunan ("HGB") owned by PKG and HPL owned by Pelindo III and (ii) area claimed by Pelindo III includes water territory.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/111 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. KONTINJENSI (lanjutan)

**b. Penggunaan tanah pelabuhan Gresik milik
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
(lanjutan)**

PKG telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Pelindo III, termasuk klaim penagihan yang dilakukan oleh Pelindo III atas penggunaan lahan dari tahun 2004-2018 sebesar Rp31.000 yang telah ditolak oleh PKG, dan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") Cabang Jawa Timur, disepakati untuk melakukan pengukuran bersama dengan melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional ("BPN") untuk memastikan luas tanah atau batas-batas area HPL yang dimiliki oleh Pelindo III, yang telah dilakukan pada pertengahan tahun 2021. Setelah pengukuran bersama selesai, PKG dan Pelindo III akan membuat perjanjian terkait area penggunaan lahan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, PKG sedang menunggu hasil perhitungan bersama dari BPN. Manajemen percaya bahwa hasil akhir dari perselisihan ini tidak akan memberikan dampak material yang merugikan untuk laporan keuangan PKG, oleh karena itu, manajemen tidak membukukan provisi atas perselisihan pada tanggal 31 Desember 2021.

37. WABAH COVID-19

Pandemi COVID-19 tidak berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Grup secara keseluruhan pada tahun 2021. Grup dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa hambatan berarti yang diakibatkan oleh pandemi tersebut. Grup tentunya perlu melakukan beberapa penyesuaian pada beberapa prosedur operasionalnya untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan memastikan operasi yang optimal dan aman bagi karyawan dan pelanggannya.

Pandemi juga tidak berdampak secara substansial terhadap kegiatan pemasaran Grup. Peningkatan signifikan pada volume penjualan dan harga terjadi pada produk komoditas Grup, yaitu pupuk.

Meskipun kondisi keuangan membaik pada tahun 2021, pandemi COVID-19 telah membawa ketidakpastian yang signifikan. Oleh karena itu, dampak jangka menengah dan panjang dari pandemi pada operasi dan kinerja keuangan Grup sulit diprediksi saat ini.

36. CONTINGENCIES (continued)

**b. Usage of Gresik port owned by
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
(continued)**

PKG had conducted several discussions with Pelindo III, including claim charged by Pelindo III on land usage from 2004 to 2018 amounting to Rp31,000 which was rejected by PKG, and based on recommendation from BPKP East Java Branch, both parties agreed to conduct joint measurements by involving Badan Pertanahan Nasional ("BPN"), which was held in the mid 2021. After the joint measurement is completed, PKG and Pelindo III shall prepare agreement for land usage. As of the issuance date of these consolidated financial statements, PKG is still waiting for the land measurement result by BPN. Management believes that the final result of this disagreement will not result in significant adverse impact to PKG financial statements, therefore, management did not record any provision regarding this disagreement as at 31 December 2021.

37. COVID-19 OUTBREAK

The COVID-19 pandemic did not adversely affect the overall Group's financial performance in 2021. The Group was able to run its operations without significant hurdles caused by the pandemic. The Group needs to make some adjustments to its several operational procedures to adhere to the applicable health protocol and ensure optimum and safe operations for its employees and customers.

The pandemic also did not substantially impact the Group's marketing activities. The significant increases in sales volume and price were observed in the Group's commodities products, which is fertilizer.

Despite the improved financial condition in 2021, the COVID-19 pandemic has brought about significant uncertainties. The medium and long-term impacts of the pandemic on the Group's operations and financial performance are therefore difficult to predict at this moment.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/112 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Pada 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR") menyetujui Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) - yang biasa dikenal dengan "Undang-Undang Omnibus", yang kemudian ditandatangani Presiden pada 2 November 2020. Undang-Undang Omnibus mengamandemen lebih dari 75 undang-undang dan mengharuskan pemerintah pusat untuk menerbitkan lebih dari 30 peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang harus dikeluarkan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan Undang-Undang Omnibus. Undang-Undang Omnibus berfokus pada peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia (diantaranya, menyederhanakan proses perizinan, menyederhanakan proses pengadaan tanah, memformalkan zona ekonomi, memberikan lebih banyak insentif untuk zona perdagangan bebas dan mengubah undang-undang ketenagakerjaan).

Grup telah mengikuti pembaruan yang ada pada Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan sesuai PMK No. 18/PMK.03/2021 sesuai dengan kondisi transaksi Grup dan mulai diberlakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam menentukan perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan, Grup memperhatikan undang-undang yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama/Peraturan Grup.

39. REKLASIFIKASI

Akun tertentu pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Manajemen menilai kembali penyajian piutang Grup dari RDMP Balikpapan JO dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan memutuskan untuk mereklasifikasi piutang usaha dan piutang lain-lain dari pihak ketiga ke pihak berelasi dengan pertimbangan RDMP Balikpapan JO adalah pihak berelasi.

Manajemen juga menilai kembali penyajian terkait kelebihan pembayaran subsidi yang diterima dari Pemerintah dalam laporan arus kas konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang saling hapus dengan pembayaran kepada pemasok, dimana seharusnya disajikan sebagai penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia.

38. JOB CREATION LAW

On 5 October 2020, the Indonesian House of Representatives ("DPR") approved the job creation law - commonly known as the "Omnibus Law", which was later signed by the President on 2 November 2020. The Omnibus Law amended more than 75 current laws and will require the central government to issue more than 30 government regulations and other implementing regulations which must be issued within three months of its enactment. The Omnibus Law focuses on increasing the ease of doing business in Indonesia (e.g., simplifying licensing processes, simplifying land acquisition processes, formalising economic zones, providing more incentives for free trade zones and amending the labour law).

The Group has followed the existing updates on Law No. 11 Year 2020 of Job Creation concerning Tax Cluster in accordance with PMK No. 18/PMK.03/2021 for the conditions of the Group's transactions and shall be enforced in accordance with the provisions of the Law. In determining the calculation of the employee benefit obligations, the Group considers the prevailing regulations and the Collective Labor Agreement/Group Regulations.

39. RECLASSIFICATION

Certain account in the consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2020 have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2021.

Management reassessed the presentation of Group's receivables from RDMP Balikpapan JO in the Group's consolidated statement of financial position as of 31 December 2020 and decided to reclassify trade receivables and other receivables from third party into related party given RDMP Balikpapan JO is a related party.

Management also reassessed the presentation of overpayment of subsidy received from the Government in the Group's consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2020 which had been offset within payment to suppliers line item, which should be presented as receipts of fertilisers subsidy from the Government of Indonesia.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/113 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. REKLASIFIKASI (lanjutan)

Rincian akun signifikan yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

39. RECLASSIFICATION (continued)

The details of significant accounts being reclassified are as follows:

	<u>Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Setelah direklasifikasi/ As reclassified</u>	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset lancar				Current assets
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak berelasi	994,317	43,546	1,037,863	Related parties -
- Pihak ketiga	2,619,649	(43,546)	2,576,103	Third parties -
Piutang lainnya				Other receivables
- Pihak berelasi	53,878	375,346	429,224	Related parties -
- Pihak ketiga	433,032	(375,346)	57,686	Third parties -
Laporan arus kas konsolidasian				Consolidated statement of cash flows
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia	30,842,439	126,640	30,969,079	Receipts of fertilisers subsidy from the Government of Indonesia
Pembayaran kas kepada pemasok	(52,793,819)	(126,640)	(52,920,459)	Payment to suppliers

40. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pada 2022, Grup melakukan pembayaran atas pinjaman bank dari Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BTPN dengan nilai sebesar Rp2.998.870.

40. SUBSEQUENT EVENTS

In 2022, the Group repaid bank loan from Bank Mandiri, BCA, BNI and BTPN amounting to Rp2,998,870.




Memperkuat Konsolidasi, Melewati Tantangan, Menyambut Peluang

*Strengthening Consolidation, Overcoming Challenges,
Embracing Opportunities*



Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan Jaya,
Jakarta 11480-Indonesia

E-mail : info@pupuk-indonesia.com
Hotline : +62 800 100 800 1
SMS : +62 822 100 100 81
Telepon : +62 21 53654900
Faksimili : +62 21 5480607/5482455

 PT Pupuk Indonesia
 @pupuk_indonesia
 pt.pupukindonesia

